PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGASEM



LAPORAN KEUANGAN

KABUPATEN KARANGASEM 2025

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN KEUANGAN

KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2025



BUPATI KARANGASEM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami telah dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025. Laporan Keuangan ini terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, maka laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilengkapi setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang kami susun ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah

Kabupaten Karangasem. Demi terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu Menuju Karangasem Yang Agung, serta dapat memenuhi kebutuhan informasi keuangan secara komprehensif, yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, meningkatkan efektifitas pengendalian kepada para pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*), dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya/untuk pengambilan keputusan yang relevan. Serta menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Amlapura, 25 Mei 2026

BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

BUPATI KARANGASEM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internyang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Amlapura, 25 Mei 2026
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB			iii
DAFTAR ISI			iv
DAFTAR TABEL			vi
DAFTAR GAMBAR			xii
DAFTAR LAMPIRAN			xiii
LAPORAN KEUANGAN			
	1	Laporan Realisasi Anggaran	
	2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
	3	Neraca	
	4	Laporan Operasional	
	5	Laporan Arus Kas	
	6	Laporan Perubahan Ekuitas	
	7	Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I	**Pendahuluan**		**1**
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.3	Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	2
BAB II	**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**		**4**
	2.1	Ekonomi Makro	4
	2.2	Kebijakan Keuangan	9
	2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	15
BAB III	**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**		**23**
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	23
	3.2	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	27
BAB IV	**Kebijakan Akuntansi**		**29**
	4.1	Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	29
	4.2	Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30
	4.3	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah	31

BAB V	**Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**		**42**
	5.1	Penjelasan atas Pos–Pos LRA	42
	5.2	Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL	86
	5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	88
	5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	133
	5.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	153
	5.6	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	162
	5.7	Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja	165
	5.8	Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan	165
BAB VI	**Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah**		**166**
	6.1	Letak Geografis	166
	6.2	Dasar Hukum Pembentukan	166
	6.3	Pemerintahan	166
BAB VII	**Penutup**		**168**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem 5
Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karangasem 5
Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karangasem 5
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem 5
Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kabupaten Karangasem 6
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia 6
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem 7
Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem 8
Tabel 2.9 PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 8
Tabel 2.10 Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 16
Tabel 2.11 Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 18
Tabel 2.12 Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 19
Tabel 2.13 Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 21
Tabel 2.14 Persentase Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa 22
Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025 23
Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan SILPA Tahun 2021–2025. 23
Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021–2025 24
Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun 2021–2025 25
Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021–2025 25
Tabel 3.6 Rasio PAD terhadap Belanja Daerah dan Belanja Operasi Tahun 2021–2025 27
Tabel 4.1 Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang 35
Tabel 4.2 Persentase Penyisihan Investasi Non Permanen Berdasarkan Jangka Waktu Jatuh Tempo Pengembalian 35
Tabel 4.3 Masa Manfaat Aset Tetap Berdasarkan Golongan Aset 41
Tabel 5.1 Rincian Pendapatan Daerah 42
Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah 43
Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah 43
Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah 45
Tabel 5.5 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 47
Tabel 5.6 Rincian Penerimaan Pendapatan Dividen 48
Tabel 5.7 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 49
Tabel 5.8 Rincian Nilai Investasi Taman Ujung 52
Tabel 5.9 Rincian Pendapatan Transfer 53
Tabel 5.10 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 54
Tabel 5.11 Rincian Dana Perimbangan 54
Tabel 5.12 Rincian Dana Desa 55

Tabel 5.13 Rincian Insentif Fiskal 55
Tabel 5.14 Rincian Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya Reguler) Tahun 2025 56
Tabel 5.15 Rincian Realisasi Penyerapan sisa dana Insentif Fiskal (IF Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat) Tahun 2024 56
Tabel 5.16 Rincian Dana Bagi Hasil 56
Tabel 5.17 Rincian Dana Alokasi Umum 57
Tabel 5.18 Rincian Dana Alokasi Khusus 57
Tabel 5.19 Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik 57
Tabel 5.20 Rincian Dana Alokasi Khusus – Non Fisik 58
Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah 59
Tabel 5.22 Rincian Pendapatan Bagi Hasil 59
Tabel 5.23 Rincian Bantuan Keuangan 60
Tabel 5.24 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 61
Tabel 5.25 Rincian Pendapatan Hibah 61
Tabel 5.26 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 62
Tabel 5.27 Rincian Belanja Daerah 63
Tabel 5.28 Rincian Belanja Operasi 63
Tabel 5.29 Rincian Belanja Pegawai 64
Tabel 5.30 Rincian Belanja Barang dan Jasa 66
Tabel 5.31 Rincian Belanja Hibah 67
Tabel 5.32 Rincian Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 68
Tabel 5.33 Rincian Hibah Dana BOS 69
Tabel 5.34 Rincian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 69
Tabel 5.35 Rincian Hibah Dana BOSP 69
Tabel 5.36 Rincian Belanja Bantuan Sosial 70
Tabel 5.37 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga 70
Tabel 5.38 Rincian Belanja Modal 71
Tabel 5.39 Rincian Belanja Modal Tanah 71
Tabel 5.40 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71
Tabel 5.41 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74
Tabel 5.42 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 75
Tabel 5.43 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 76
Tabel 5.44 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya 77
Tabel 5.45 Rincian Belanja Tak Terduga 77
Tabel 5.46 Rincian Belanja Transfer 78
Tabel 5.47 Rincian Belanja Bagi Hasil 78
Tabel 5.48 Rincian Belanja Bantuan Keuangan 79

Tabel 5.49 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. 79
Tabel 5.50 Rincian Pembiayaan Daerah 80
Tabel 5.51 Rincian Penerimaan Pembiayaan 81
Tabel 5.52 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 81
Tabel 5.53 Rincian Pencairan Dana Cadangan 81
Tabel 5.54 Rincian Pengeluaran Pembiayaan 82
Tabel 5.55 Rincian Penyertaan Modal Daerah 82
Tabel 5.56 Rincian Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) 83
Tabel 5.57 Rincian Rincian SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat 83
Tabel 5.58 Rincian Rincian keberadaan SiLPA 84
Tabel 5.59 Rincian Saldo Angaran Lebih Awal 86
Tabel 5.60 Rincian SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 86
Tabel 5.61 Rincian Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 87
Tabel 5.62 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 87
Tabel 5.63 Rincian Saldo Anggaran Lebih 87
Tabel 5.64 Rincian Aset 88
Tabel 5.65 Rincian Aset Tetap 88
Tabel 5.66 Rincian Kas dan Setara Kas 89
Tabel 5.67 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 89
Tabel 5.68 Rincian Kas BLUD 90
Tabel 5.69 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP 90
Tabel 5.70 Rincian Piutang 91
Tabel 5.71 Rincian Piutang Pajak Daerah 92
Tabel 5.72 Rincian Tempat Validasi Piutang PBB-P2 Tuntas 94
Tabel 5.73 Rincian Tempat Validasi Piutang PBB-P2 Belum Tuntas 94
Tabel 5.74 Rincian Piutang Retribusi Daerah 95
Tabel 5.75 Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 96
Tabel 5.76 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah 97
Tabel 5.77 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak 97
Tabel 5.78 Rincian Penyisihan Piutang 97
Tabel 5.79 Rincian Beban Dibayar Dimuka 98
Tabel 5.80 Rincian Persediaan 98
Tabel 5.81 Rincian Persediaan Usang/Kadaluarsa/Tidak Berlaku 99
Tabel 5.82 Rincian Investasi Jangka Panjang 99
Tabel 5.83 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen 100
Tabel 5.84 Rincian Mutasi Penerimaan Dana Bergulir 101
Tabel 5.85 Rincian Investasi Permanen 101
Tabel 5.86 Rincian Nilai Penyertaan Modal 102
Tabel 5.87 Rincian Nilai Investasi pada Perumda Tirta Tohlangkir 104

Tabel 5.88 Rincian Nilai Investasi pada PT Karangasem Sejahtera (Perseroda) 104
Tabel 5.89 Rincian Aset Tetap 105
Tabel 5.90 Rincian Tanah 106
Tabel 5.91 Rincian Mutasi Tanah 106
Tabel 5.92 Rincian Tanah yang Diperoleh dari Penyerahan Fasilitas Umum atau Fasilitas Sosial 107
Tabel 5.93 Rincian Peralatan dan Mesin 108
Tabel 5.94 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin 108
Tabel 5.95 Rincian Gedung dan Bangunan 110
Tabel 5.96 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan 110
Tabel 5.97 Rincian Reklasifikasi Antar Aset Tetap 111
Tabel 5.98 Rincian Penghapusan BMD 112
Tabel 5.99 Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi 112
`Tabel 5.100 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi 112
Tabel 5.101 Rincian Reklasifikasi Penambahan Antar Aset Tetap 113
Tabel 5.102 Rincian Ruas Jalan yang Belum Diproses Pemindahtanganan 114
Tabel 5.103 Rincian Aset tetap Lainnya 115
Tabel 5.104 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 115
Tabel 5.105 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 116
Tabel 5.106 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 116
Tabel 5.107 Rincian Akumulasi Penyusutan 117
Tabel 5.108 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan 118
Tabel 5.109 Rincian Aset Lainnya 119
Tabel 5.110 Rincian Tagihan Jangka Panjang 119
Tabel 5.111 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga 120
Tabel 5.112 Rincian Bentuk Aset Tetap Yang Dikerjasamakan Pemanfaatannya 120
Tabel 5.113 Rincian Aset Tidak Berwujud 120
Tabel 5.114 Rincian Perangkat Daerah Yang Memiliki Aset Tidak Berwujud 120
Tabel 5.115 Rincian Aset Lain-Lain 121
Tabel 5.116 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain 121
Tabel 5.117 Rincian Aset Lain-Lain 121
Tabel 5.118 Rincian Aset Rusak Berat/Usang 122
Tabel 5.119 Rincian Mutasi Aset Rusak Berat/Usang 122
Tabel 5.120 Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah 123
Tabel 5.121 Rincian Rincian dari Ternak Guliran dan Tanaman 124
Tabel 5.122 Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihibahkan/Disertakan 125
Tabel 5.123 Rincian Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut 126
Tabel 5.124 Rincian Dokumen Pengadaan yang Belum Ditemukan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 126
Tabel 5.125 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 126

Tabel 5.126 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Perangkat Daerah 127
Tabel 5.127 Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga..... 127
Tabel 5.128 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 127
Tabel 5.129 Rincian Properti Investasi 128
Tabel 5.130 Rincian Properti Investasi Tanah 128
Tabel 5.131 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan..... 128
Tabel 5.132 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 129
Tabel 5.133 Rincian Kewajiban 129
Tabel 5.134 Rincian Kewajiban Jangka Pendek..... 129
Tabel 5.135 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 130
Tabel 5.136 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka..... 130
Tabel 5.137 Rincian Utang Belanja..... 131
Tabel 5.138 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya 131
Tabel 5.139 Rincian Ekuitas..... 132
Tabel 5.140 Rincian Pendapatan Daerah-LO..... 133
Tabel 5.141 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO..... 133
Tabel 5.142 Rincian Pajak Daerah-LO 134
Tabel 5.143 Rincian Selisih Pajak Daerah LO dan LRA 134
Tabel 5.144 Rincian Retribusi Daerah-LO..... 134
Tabel 5.145 Rincian Selisih Retribusi Daerah LO dan LRA 135
Tabel 5.146 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 135
Tabel 5.147 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA..... 136
Tabel 5.148 Rincian Pengakuan Investasi 136
Tabel 5.149 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO 136
Tabel 5.150 Rincian Selisih Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan LRA..... 138
Tabel 5.151 Rincian Pendapatan Transfer-LO..... 138
Tabel 5.152 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 138
Tabel 5.153 Rincian Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA..... 139
Tabel 5.154 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 140
Tabel 5.155 Rincian Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA..... 140
Tabel 5.156 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 140
Tabel 5.157 Rincian Pendapatan Hibah - LO..... 141
Tabel 5.158 Rincian Selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA 142
Tabel 5.159 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO..... 142
Tabel 5.160 Rincian Beban Daerah..... 143
Tabel 5.161 Rincian Beban Operasi..... 143
Tabel 5.162 Rincian Beban Pegawai 143
Tabel 5.163 Rincian Selisih Beban Pegawai LO dan LRA 144

Tabel 5.164 Rincian Beban Barang dan Jasa 145
Tabel 5.165 Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa LO dan LRA 146
Tabel 5.166 Rincian Beban Hibah 146
Tabel 5.167 Rincian Selisih Beban Hibah LO dan LRA 147
Tabel 5.168 Rincian Beban Bantuan Sosial 147
Tabel 5.169 Rincian Beban Penyisihan Piutang 148
Tabel 5.170 Rincian Selisih Beban Penyisihan Piutang LO dan Neraca 148
Tabel 5.171 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 148
Tabel 5.172 Rincian Beban Transfer 149
Tabel 5.173 Rincian Beban Bagi Hasil 149
Tabel 5.174 Rincian Selisih Beban Bagi Hasil LO dan LRA 150
Tabel 5.175 Rincian Beban Bantuan Keuangan 150
Tabel 5.176 Rincian Selisih Beban Bantuan Keuangan LO dan LRA 150
Tabel 5.177 Rincian Surplus Non Operasional 151
Tabel 5.178 Rincian Defisit Non Operasional Tahun 151
Tabel 5.179 Rincian Pos Luar Biasa 151
Tabel 5.180 Rincian Surplus/(Defisit) - LO 151
Tabel 5.181 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 153
Tabel 5.182 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 153
Tabel 5.183 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 155
Tabel 5.184 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 156
Tabel 5.185 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas 156
Tabel 5.186 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas 156
Tabel 5.187 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 157
Tabel 5.188 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 158
Tabel 5.189 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 158
Tabel 5.190 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 158
Tabel 5.191 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 158
Tabel 5.192 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 159
Tabel 5.193 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas 159
Tabel 5.194 Rincian Saldo Awal Kas 160
Tabel 5.195 Rincian Koreksi SiLPA Tahun Lalu 160
Tabel 5.196 Rincian Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) 160
Tabel 5.197 Rincian Saldo Akhir Kas 160
Tabel 5.198 Rincian Ekuitas Awal 162
Tabel 5.199 Rincian Surplus/(Defisit) - LO 162
Tabel 5.200 Rincian Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar 162
Tabel 5.201 Rincian Saldo Ekuitas Akhir 164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Komposisi Pendapatan Daerah Berdasarkan Klasifikasinya 42
Gambar 5.2 Komposisi Belanja Operasi Berdasarkan Klasifikasinya..... 64
Gambar 5.3 Komposisi Neraca Berdasarkan Klasifikasinya 88
Gambar 5.4 Komposisi Pendapatan Daerah-LO Berdasarkan Klasifikasinya..... 133
Gambar 5.5 Komposisi Beban Daerah..... 143
Gambar 5.6 Komposisi Dampak Kumuluatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Berdasarkan Klasifikasinya 163

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Rekapitulasi Belanja Mandatory Spending Fungsi Pendidikan
Lampiran 2	:	Rekapitulasi Belanja Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Lampiran 3	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Lampiran 4	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Lampiran 5	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 6	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Lampiran 7	:	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
Lampiran 8	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Lampiran 9		Rekapitulasi Bantuan Sosial Berupa Barang
Lampiran 10		Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga
Lampiran 11	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Lampiran 12	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran 13	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Lampiran 14	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Lampiran 15	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Lampiran 16	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Lampiran 17	:	Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah
Lampiran 18	:	Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah
Lampiran 19	:	Rincian Alokasi Dana Desa
Lampiran 20	:	Rincian Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
Lampiran 21	:	Rincian Dana Desa
Lampiran 22	:	Laporan Kekayaan Milik Desa
Lampiran 23	:	Laporan Realisasi APBDesa
Lampiran 24	:	Kas BLUD
Lampiran 25	:	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Lampiran 26	:	Kas Dana BOSP
Lampiran 27	:	Kas BOK Puskesmas
Lampiran 28	:	Daftar Mutasi Piutang
Lampiran 29	:	Daftar Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Lampiran 30	:	Daftar Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Dan Piutang Lainnya
Lampiran 31	:	Penyisihan Piutang
Lampiran 32	:	Beban dibayar di muka
Lampiran 33	:	Daftar Persediaan
Lampiran 34	:	Aset Lainnya Dana Bergulir PSBDT yang akan dihapuskan pada Diskoperindag
Lampiran 35	:	Daftar Aset Tetap Tanah
Lampiran 36	:	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran 37	:	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran 38	:	Penanganan Atas Ruas Jalan Lingkungan Hasil Penelusuran pada 19 Lokasi dari 74 Lokasi
Lampiran 39	:	Daftar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Lampiran 40	:	Daftar Aset Tetap Lainnya
Lampiran 41	:	Daftar Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan
Lampiran 42	:	Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 43	:	Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Lampiran 44	:	Daftar Kemitraan Pihak Ketiga

Lampiran 45 : Daftar Aset Tidak Berwujud
Lampiran 46 : Daftar Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat
Lampiran 47 : Daftar Piutang Pajak yang akan dihapuskan Milik Pemerintah
Lampiran 48 : Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan
Lampiran 49 : Daftar Deposito Uang Jaminan Reklamasi Yang Masih Dalam Penguasaan
Lampiran 50 : Daftar Pendapatan diterima Dimuka
Lampiran 51 : Daftar Mutasi Utang Belanja
Lampiran 52 : Rincian Utang Belanja
Lampiran 53 : Daftar Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya
Lampiran 54 : Beban Pegawai
Lampiran 55 : Beban Barang dan Jasa
Lampiran 56 : Beban Hibah
Lampiran 57 : Rincian Mutasi PFK APBD, BLUD, FKTP, BOK dan BOSP

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	**5.1.1**	**1.810.318.014.123,00**	**1.815.849.878.102,63**	**100,31**	**1.840.886.441.359,72**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	494.262.674.756,00	487.605.462.281,40	98,65	432.504.250.383,84
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	342.359.241.433,00	351.322.521.550,00	102,62	273.800.083.472,10
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	129.943.268.695,00	105.937.526.418,00	81,53	128.058.589.565,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	13.843.338.532,00	17.660.748.688,46	127,58	17.077.888.186,17
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	8.116.826.096,00	12.684.665.624,94	156,28	13.567.689.160,23
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.303.598.713.991,00	1.283.346.700.326,23	98,45	1.406.411.525.953,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**5.1.1.2.1**	**1.157.546.734.000,00**	**1.144.358.634.493,00**	**98,86**	**1.162.203.551.295,00**
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	-	-	-	1.069.138.776.295,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.2	83.992.155.000,00	83.992.155.000,00	100,00	80.146.587.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.3	21.457.852.000,00	21.457.852.000,00	100,00	12.918.188.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.4	21.759.626.000,00	22.145.223.500,00	101,77	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.5	788.341.122.000,00	778.235.871.351,00	98,72	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.6	241.995.979.000,00	238.527.532.642,00	98,57	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**5.1.1.2.2**	**146.051.979.991,00**	**138.988.065.833,23**	**95,16**	**244.207.974.658,00**
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	109.307.659.716,00	103.690.739.894,00	94,86	189.805.671.394,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	36.744.320.275,00	35.297.325.939,23	96,06	54.402.303.264,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	12.456.625.376,00	44.897.715.495,00	360,43	1.970.665.022,88
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	1.811.381,00	-	4.122.090,88
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	12.456.625.376,00	44.895.904.114,00	360,42	1.966.542.932,00
BELANJA DAERAH	**5.1.2**	**1.952.404.482.852,00**	**1.792.465.399.275,09**	**91,81**	**1.881.895.709.920,04**
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.581.693.285.139,00	1.432.566.228.412,11	90,57	1.358.638.489.124,28
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	954.066.995.385,00	867.684.627.061,42	90,95	778.402.111.503,13
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	522.220.452.454,00	461.598.712.878,69	88,39	502.971.996.015,52
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	102.210.837.300,00	100.252.888.472,00	98,08	65.384.381.605,63
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	3.195.000.000,00	3.030.000.000,00	94,84	11.880.000.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	129.896.466.600,00	120.520.176.393,98	92,78	264.862.753.970,76
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	300.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	63.133.444.158,00	58.439.288.240,00	92,56	83.390.069.715,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	24.922.360.570,00	22.650.253.698,83	90,88	62.569.671.412,76
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	39.145.081.780,00	38.314.593.413,15	97,88	117.717.493.843,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.274.409.133,00	1.096.394.042,00	48,21	409.169.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	121.170.959,00	19.647.000,00	16,21	776.350.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	2.500.000.000,00	1.073.840.000,00	42,95	-
Belanja Tidak Terduga		2.500.000.000,00	1.073.840.000,00	42,95	-
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	238.314.731.113,00	238.305.154.469,00	100,00	258.394.466.825,00
Belanja Bagi Hasil	**5.1.2.4.1**	**48.220.252.738,00**	**48.210.676.094,00**	**99,98**	**39.170.192.200,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		46.879.267.166,00	46.879.267.166,00	100,00	38.284.766.176,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		1.340.985.572,00	1.331.408.928,00	99,29	885.426.024,00
Belanja Bantuan Keuangan	**5.1.2.4.2**	**190.094.478.375,00**	**190.094.478.375,00**	**100,00**	**219.224.274.625,00**
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		190.094.478.375,00	190.094.478.375,00	100,00	219.224.274.625,00
SURPLUS/(DEFISIT)		**(142.086.468.729,00)**	**23.384.478.827,54**	**(16,46)**	**(41.009.268.560,32)**

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	**5.1.3**	**142.086.468.729,00**	**142.086.468.729,71**	**100,00**	**187.095.737.290,03**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	146.086.468.729,00	146.086.468.729,71	100,00	188.595.737.290,03
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	146.086.468.729,00	146.086.468.729,71	100,00	177.704.937.290,03
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	-	-	-	10.890.800.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO		**142.086.468.729,00**	**142.086.468.729,71**	**100,00**	**187.095.737.290,03**
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA) SEBELUM KOREKSI	**5.1.4**	**-**	**165.470.947.557,25**	**-**	**146.086.468.729,71**
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)		-	165.470.947.557,25	-	146.086.468.729,71

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Amlapura, 25 Mei 2026
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN PERUBAHAN SAL

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	146.086.468.729,71	177.705.128.986,01
PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	146.086.468.729,71	177.704.937.290,03
Subtotal		-	191.695,98
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	165.470.947.557,25	146.086.468.729,71
Subtotal		165.470.947.557,25	146.086.660.425,69
KOREKSI KESALAHAN +/(-) PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	-	(191.695,98)
LAIN-LAIN		-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.5	165.470.947.557,25	146.086.468.729,71

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Amlapura, 25 Mei 2026
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

Pemerintah Kabupaten Karangasem

NERACA

Per 31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	**5.3.1**	**1.751.430.306.903,40**	**1.759.350.596.661,11**
ASET LANCAR	**5.3.1.1**	**274.823.348.321,38**	**265.464.735.524,89**
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	165.470.947.557,25	146.087.592.499,23
Kas di Kas Daerah		156.199.655.553,00	136.294.499.385,07
Kas di Bendahara Penerimaan		75.593.445,00	146.509.464,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas di BLUD		8.396.264.840,11	7.825.721.638,32
Kas Dana BOS		-	-
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		218.883.627,00	237.228.895,00
Kas Lainnya		-	1.123.769,52
Setara Kas		-	-
Kas Dana Desa		-	-
Kas Dana BOSP		117.896.004,14	234.897.083,32
Kas Dana BOK Puskesmas		462.654.088,00	1.347.612.264,00
Kas Otonomi Khusus		-	-
Kas Dana Abadi Daerah		-	-
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3.1	110.539.649.726,60	100.774.911.820,60
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.2	12.518.487.904,00	11.198.849.127,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.3	4.513.525.979,13	4.331.049.123,13
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.3.4	4.132.190.342,00	32.078.368.624,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(65.958.699.955,15)	(61.430.163.630,47)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	172.278.609,00	188.464.667,47
Persediaan	5.3.1.1.6	43.434.968.158,55	32.235.663.293,93
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**	**155.856.136.081,93**	**149.372.851.618,31**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	155.856.136.081,93	149.372.851.618,31
ASET TETAP	**5.3.1.3**	**1.270.320.329.351,18**	**1.292.841.953.242,90**
Tanah	5.3.1.3.1	171.171.218.650,25	168.267.539.890,25
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	716.292.885.992,38	665.465.118.312,38
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.004.075.427.670,56	981.076.869.476,03
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.690.911.902.962,32	1.637.758.035.809,17
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	41.744.567.919,35	40.667.915.977,35
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	31.275.366.744,72	28.436.539.044,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.385.151.040.588,40)	(2.228.830.065.266,28)
ASET LAINNYA	**5.3.1.4**	**50.141.282.538,91**	**51.671.056.275,01**
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2	27.355.979.937,00	27.355.979.937,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	1.727.745.050,00	1.708.098.050,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	154.574.682.110,66	156.235.737.155,76
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.5	(768.866.302,00)	(455.633.371,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.6	(132.748.258.256,75)	(133.533.082.496,75)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.7	-	359.957.000,00
PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.5**	**289.210.610,00**	-
Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1	155.500.000,00	-
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5.2	416.140.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.3	(282.429.390,00)	-
JUMLAH ASET		**1.751.430.306.903,40**	**1.759.350.596.661,11**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
KEWAJIBAN	**5.3.2**	**43.181.218.383,23**	**43.407.607.558,80**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**	**43.181.218.383,23**	**43.407.607.558,80**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	1.123.682,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	356.525.383,33	1.416.478.850,00
Utang Belanja	5.3.2.1.3	42.450.242.069,90	41.990.004.939,28
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	374.450.930,00	87,52
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.2.2**	-	-
Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
Utang kepada Masyarakat		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
EKUITAS	**5.3.3**	**1.708.249.088.520,17**	**1.715.942.989.102,31**
EKUITAS	**5.3.3**	**1.708.249.088.520,17**	**1.715.942.989.102,31**
Ekuitas	5.3.3	1.708.249.088.520,17	1.715.942.989.102,31
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.751.430.306.903,40**	**1.759.350.596.661,11**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Amlapura, 25 Mei 2025
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN OPERASIONAL

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	1.745.930.039.509,75	1.744.834.872.572,07	1.095.166.937,68	0,06
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**5.4.1.1**	**502.466.377.194,67**	**447.240.476.037,87**	**55.225.901.156,80**	**12,35**
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	360.780.759.789,33	280.544.725.171,00	80.236.034.618,33	28,60
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	108.343.667.821,69	130.008.500.417,01	(21.664.832.595,32)	(16,66)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	22.073.035.455,71	23.320.989.565,75	(1.247.954.110,04)	(5,35)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	11.268.914.127,94	13.366.260.884,11	(2.097.346.756,17)	(15,69)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**5.4.1.2**	**1.171.048.410.044,23**	**1.282.066.808.241,00**	**(111.018.398.196,77)**	**(8,66)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	**5.4.1.2.1**	**1.060.006.522.493,00**	**1.080.117.448.295,00**	**(20.110.925.802,00)**	**(1,86)**
Dana Perimbangan-LO		-	1.067.199.260.295,00	(1.067.199.260.295,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		21.785.266.500,00	-	21.785.266.500,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		778.235.871.351,00	-	778.235.871.351,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO		238.527.532.642,00	-	238.527.532.642,00	-
Dana Desa-LO		-	-	-	-
Insentif Fiskal-LO		21.457.852.000,00	12.918.188.000,00	8.539.664.000,00	66,11
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**5.4.1.2.2**	**111.041.887.551,23**	**201.949.359.946,00**	**(90.907.472.394,77)**	**(45,01)**
Pendapatan Bagi Hasil-LO		75.744.561.612,00	180.079.446.542,00	(104.334.884.930,00)	(57,94)
Bantuan Keuangan-LO		35.297.325.939,23	21.869.913.404,00	13.427.412.535,23	61,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**5.4.1.3**	**72.415.252.270,85**	**15.527.588.293,20**	**56.887.663.977,65**	**366,37**
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	27.519.348.156,85	13.561.045.361,20	13.958.302.795,65	102,93
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	44.895.904.114,00	1.966.542.932,00	42.929.361.182,00	2.182,99
BEBAN DAERAH	5.4.2	1.753.396.945.858,48	1.688.750.102.062,84	64.646.843.795,64	3,83
BEBAN OPERASI	**5.4.2.1**	**1.600.445.174.518,48**	**1.512.978.586.446,84**	**87.466.588.071,64**	**5,78**
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	862.722.127.761,16	774.153.704.332,41	88.568.423.428,75	11,44
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	482.767.636.888,40	511.026.272.772,16	(28.258.635.883,76)	(5,53)
Beban Hibah	5.4.3.1.3	91.814.645.192,00	66.658.432.403,63	25.156.212.788,37	37,74
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	3.030.000.000,00	11.880.000.000,00	(8.850.000.000,00)	(74,49)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	5.483.567.890,80	10.060.472.227,81	(4.576.904.337,01)	(45,49)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	154.627.196.786,12	139.199.704.710,83	15.427.492.075,29	11,08
BEBAN TRANSFER	**5.4.2.2**	**152.951.771.340,00**	**175.771.515.616,00**	**(22.819.744.276,00)**	**(12,98)**
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	46.849.447.965,00	36.693.827.991,00	10.155.619.974,00	27,68
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	106.102.323.375,00	139.077.687.625,00	(32.975.364.250,00)	(23,71)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(7.466.906.348,73)**	**56.084.770.509,23**	**(63.551.676.857,96)**	**(113,31)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3	24.868.000,00	330.458.754,00	(305.590.754,00)	(92,47)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		24.868.000,00	330.458.754,00	(305.590.754,00)	(92,47)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		-	-	-	-
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.4	502.474.652,42	374.315.561,00	128.159.091,42	34,24
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		502.474.652,42	374.315.561,00	128.159.091,42	34,24
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(477.606.652,42)**	**(43.856.807,00)**	**(433.749.845,42)**	**989,01**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**(7.944.513.001,15)**	**56.040.913.702,23**	**(63.985.426.703,38)**	**(114,18)**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
POS LUAR BIASA	**5.4.5**	**(1.073.840.000,00)**	**-**		
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO		-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa-LO		-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA		**1.073.840.000,00**	-	**1.073.840.000,00**	-
Beban Luar Biasa		1.073.840.000,00	-	1.073.840.000,00	-
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.6	(9.018.353.001,15)	56.040.913.702,23	(65.059.266.703,38)	(116,09)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Amlapura, 25 Mei 2026
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN ARUS KAS

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1.1**	**1.815.825.010.102,63**	**1.840.555.982.605,72**
Pajak Daerah		351.322.521.550,00	273.800.083.472,10
Retribusi Daerah		105.937.526.418,00	128.058.589.565,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		17.660.748.688,46	17.077.888.186,17
Lain-lain PAD yang Sah		12.659.797.624,94	13.237.230.406,23
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.144.358.634.493,00	1.162.203.551.295,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		138.988.065.833,23	244.207.974.658,00
Pendapatan Hibah		1.811.381,00	4.122.090,88
Dana Darurat		-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		44.895.904.114,00	1.966.542.932,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1.2**	**1.671.945.222.881,11**	**1.617.032.955.949,28**
Belanja Pegawai		867.684.627.061,42	778.402.111.503,13
Belanja Barang dan Jasa		461.598.712.878,69	502.971.996.015,52
Belanja Bunga		-	-
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		100.252.888.472,00	65.384.381.605,63
Belanja Bantuan Sosial		3.030.000.000,00	11.880.000.000,00
Belanja Imbalan		-	-
Belanja Tidak Terduga		1.073.840.000,00	-
Belanja Bagi Hasil		48.210.676.094,00	39.170.192.200,00
Belanja Bantuan Keuangan		190.094.478.375,00	219.224.274.625,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**143.879.787.221,52**	**223.523.026.656,44**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.5.2**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**5.5.2.1**	**24.868.000,00**	**11.221.258.754,00**
Pencairan Dana Cadangan		-	10.890.800.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		24.868.000,00	330.458.754,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**5.5.2.2**	**124.520.176.393,98**	**266.362.753.970,76**
Belanja Modal Tanah		-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		58.439.288.240,00	83.390.069.715,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		22.650.253.698,83	62.569.671.412,76
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		38.314.593.413,15	117.717.493.843,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.096.394.042,00	409.169.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya		19.647.000,00	776.350.000,00
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Daerah		4.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		**(124.495.308.393,98)**	**(255.141.495.216,76)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.5.3**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	**5.5.3.1**	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	**5.5.3.2**	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		-	-

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.5.4**		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.4.1**	**112.917.982.966,93**	**135.950.220.704,21**
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		112.917.982.966,93	135.950.220.704,21
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		-	-
Kiriman Uang Masuk		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.4.2**	**112.917.982.966,93**	**135.950.220.704,21**
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		112.917.982.966,93	135.950.220.704,21
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		-	-
Kiriman Uang Keluar		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		-	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	**5.5.5**	**19.384.478.827,54**	**(31.618.468.560,32)**
SALDO AWAL KAS	**5.5.6**	**146.086.468.729,71**	**177.705.128.986,01**
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	**5.5.7**	-	**(191.695,98)**
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)	**5.5.8**	-	**1.123.769,52**
SALDO AKHIR KAS		165.470.947.557,25	146.087.592.499,23

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Amlapura, 25 Mei 2026
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	**5.6.1**	**1.715.942.989.102,31**	**1.662.889.063.869,91**
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	**5.6.2**	**(9.018.353.001,15)**	**56.040.913.702,23**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	**5.6.3**	**1.324.452.419,01**	**(2.986.988.469,83)**
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar		1.636.214.749,56	1.941.089.795,99
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang		(1.899.724.261,63)	(5.180.210.253,32)
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap		1.690.815.560,00	(136.583.968,00)
Koreksi Ekuitas-Dana Cadangan		-	-
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya		(567.077.125,05)	(8.594.346,00)
Koreksi Ekuitas-Properti Investasi		-	-
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek		464.223.496,13	397.310.301,50
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang		-	-
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.708.249.088.520,17	1.715.942.989.102,31

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Amlapura, 25 Mei 2026
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA



Pemerintah Kabupaten Karangasem

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2022, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang mefopmiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran (TA) 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomo 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu untuk:

1. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
2. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; dan
3. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2025 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
12. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); dan
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19)

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja
5.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem, yaitu (minimal):

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 sebesar 6,40%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 sebesar 1,8%;
3. *Gini Ratio* Tahun 2025 sebesar 0,276;
4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 sebesar 71,89;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025 sebesar 5,25;
6. Tingkat Inflasi Tahun 2025 sebesar 2,51%; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2025 sebesar Rp21,804 Triliun.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Penanggulangan kemiskinan sudah sering dilakukan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan di mana kemiskinan menurut asal penyebabnya terdiri dari 2 macam yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah setempat. Sedangkan Kemiskinan Struktural terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang maupun sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka semakin parah kemiskinannya. Pembahasan masalah kemiskinan pastinya akan lebih menarik jika dikaitkan dengan karakteristik penduduk maupun rumah tangga miskin. Karakteristik yang dimaksud adalah pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Dengan mengetahui bagaimana karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, diharapkan dapat dihasilkan suatu kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (persen poin) 2025 thd 2024
1	Kabupaten Karangasem (%)	6,56	6,52	6,40	(0,12)
2	Kabupaten Karangasem (Ribu Orang)	27,83	27,76	27,32	(1,59)
3	Provinsi Bali (%)	4,25	4,00	3,72	(0,28)
4	Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	(0,56)
5	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	9	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem.

Dalam kurun waktu Tiga Tahun Persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem terakhir relatif menurun, dimana pada Tahun 2023 sebesar 6,56, Tahun 2024 sebesar 6,52%, dan Tahun 2025 sebesar 6,40%. Kendati berada di bawah angka nasional, persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem masih di atas angka provinsi, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun(poin) 2025 thd 2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Karangasem	0.62	0.56	0,52	(0,04)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0.55	0.50	0,56	0,06
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1.53	1.46	1,37	(0,09)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	8	6	5	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun(poin) 2025 thd 2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Karangasem	0.09	0.10	0,08	(0,02)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali	0.10	0.09	0,12	0,03
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0.38	0.35	0,32	(0,03)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	3	4	4	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem TPT Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebesar 1,8%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (persen poin) 2025 thd 2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Karangasem (%)	2.61	1.63	1,8	0,17
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (%)	2.69	1.79	1,49	(0,30)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	5.32	4.91	4,85	(0,06)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	4	4	9	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem.

TPT di Kabupaten Karangasem, yakni sebesar 2,61% pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan menjadi 1.63% pada tahun 2024, namun kembali mengalami kenaikan sebesar 1,8 persen poin pada tahun 2025 hal ini dikarenakan *standard of error* Kabupaten Karangasem sebesar 25% sehingga menyebabkan adanya kenaikan tingkat

pengangguran di Kabupaten Karangasem. TPT Kabupaten Karangasem pada tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Bali yakni sebesar 1,49%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem Realisasi, *Gini Ratio* Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebesar 0,276 poin, mengalami penurunan sebesar 0,007 poin dibandingkan tahun 2024, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (poin) 2025 thd 2024
1	Tingkat Kabupaten Karangasem	0.337	0.283	0.276	(7,00)
2	Tingkat Provinsi Bali	0.362	0.361	0.353	(8,00)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem.

Gini Ratio yang disajikan adalah tahun 2023, 2024, dan 2025 dimana tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Karangasem selama 3 tahun tersebut mengalami fluktuasi setiap tahunnya apabila dibandingkan dengan angka Provinsi Bali.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pengukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karenanya, pengukuran keberhasilan pembangunan harus mencakup baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: a. Rendah (< 60); b. Sedang (60≤IPM<70); c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebesar 71,89 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun(poin) 2025 thd 2024
1	Kabupaten Karangasem	70.09	70.91	71,89	0,98
2	Provinsi Bali	78.01	78.63	79,37	0,74
3	Indonesia/Nasional	74.39	75.02	75,90	0,88
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	9	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem.

Realisasi pencapaian IPM Tahun 2025 adalah sebesar 71,89 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 70,91 poin mengalami kenaikan sebesar 0,98 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS), serta Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,52 tahun pada Tahun 2025, meningkat 0,35 tahun dibandingkan Tahun 2024. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 6,98 tahun dengan harapan lama sekolah 12,92 tahun. Sementara, Pengeluaran Riil per kapita per Tahun yang disesuaikan sebesar Rp 11.676.000 atau naik sebesar Rp 500.000 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Karangasem pada saat ini berada pada urutan 9 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali. Pada tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 IPM yang dicapai Kabupaten Karangasem masih di angka terendah se- Provinsi Bali.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Kabupaten Karangasem			Provinsi Bali	Nasional
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	11.179,22	11.663,31	12.275,39	177.992,95	13.580.524,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,10	4,33	5,25	5,82	5,11

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebesar 5,25% mengalami peningkatan sebelumnya dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 4,33%. Selama kurun waktu Tahun 2023 - Tahun 2025 perekonomian Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan. Dalam laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem lebih baik di Tahun 2025 dibandingkan dari laju pertumbuhan Ekonomi 2 (dua) tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi di sebagian besar lapangan usaha. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur Ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

2.1.6 Laju Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Karangasem dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan

peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (***Galloping Inflation***),** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (***High Inflation***)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. dan (iv) **Hiper inflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem didekati dengan tingkat inflasi Singaraja yang memiliki karakteristik cenderung sama. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebesar 2,51% dengan kategori ringan dengan berdasarkan inflasi kota Singaraja sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem

No	Inflasi	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (persen poin) 2025 thd 2024
1	Tingkat Inflasi Kota Singaraja (%)	4.31	1.93	2,51	0,58
2	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	2.77	2.34	2,91	0,57
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2.61	1.57	2,92	1,35

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tingkat Inflasi di Kota Singaraja yang juga mencerminkan kenaikan harga di Kabupaten Karangasem pada Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,51%, sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 1,93%, dan di Tahun 2023 sebesar 4,31%. Secara umum, tingkat inflasi Kabupaten Karangasem masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Bali yang sudah mencapai sebesar 2,91% pada Tahun 2025.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Karangasem

Struktur perekonomian Kabupaten Karangasem dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

dalam miliar rupiah

No	Lapangan Usaha	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.136,05	5.408.96
2	Pertambangan dan Penggalian	732,50	768.39
3	Industri Pengolahan	812,24	885,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19,58	21,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,07	26,78
6	Konstruksi	1.388,94	1.463,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.083,92	1.214,91
8	Transportasi dan Pergudangan	3.239,84	3.539,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.963,79	2.237,37
10	Informasi dan Komunikasi	688,43	732,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.194,49	1.228,54
12	Real Estate	796,75	846,90
13	Jasa Perusahaan	166,65	185,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.470,85	1.637,06
15	Jasa Pendidikan	505,37	539,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	472,30	507,15
17	Jasa lainnya	512,56	561,06
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20.210,33	21.804,41
19	PDRB Provinsi	298.441,51	324.148,94

2024 : Angka Sementara
2025 : Angka Sangat Sementara
Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

2.2 Kebijakan Keuangan

Mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil merupakan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem. Keuangan daerah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan Semua proses pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk disusun. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mengarahkan segala potensi yang ada untuk mencapai sasaran, tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD sehingga visi dan misi sebagaimana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Di samping itu dalam pelaksanaannya, kebijakan keuangan daerah harus memperhatikan situasi, kondisi daerah Kabupaten Karangasem, kebutuhan masyarakat, dan selaras serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem mencakup arah dan kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Arah kebijakan daerah Kabupaten

Karangasem dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan Pembangunan tentu harus diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Tercapainya realisasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi di tingkat nasional, regional, dan lokal serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi juga berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karangasem.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi sehingga setiap pemungutan PAD mempunyai dasar hukum yang jelas. Upaya optimalisasi penerimaan PAD diupayakan melalui :

a. Penataan regulasi melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
b. Peningkatan pengawasan melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait untuk mencegah kebocoran;
c. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
d. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerja sama dengan PT Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
e. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak melalui program Gerbang Pajak dan melakukan penjajakan kepada wajib pajak yang menunggak pajak;
f. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak;
g. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; dan
h. Peningkatan iklim investasi dengan penyederhanaan proses perizinan serta kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu:

a. ***Dana Perimbangan*** terdiri dari :
   1) Dana Transfer Umum yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan mengalami peningkatan dari alokasi DAU tahun 2024 dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik.

2) Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang pendanaannya dapat diusulkan melalui dana DAK. Selanjutnya dilakukan koordinasi yang intensif baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali terhadap usulan permohonan pendanaan kegiatan yang bersumber dari DAK.

b. ***Dana Insentif Fiskal (DIF)*** yang dulunya dikenal dengan ***Dana Insentif Daerah (DID***) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dengan diraihnya predikat WTP terhadap laporan keuangan berturut-turut sebanyak 9 kali diharapkan alokasi DIF dari tahun ke tahun dapat terus meningkat.

c. ***Dana Desa*** merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya. Upaya peningkatan dilakukan dengan memperjuangkan usulan-usulan program dan kegiatan yang pendanaannya dimohonkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Rumah Sakit Pratama Kubu.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB;
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah serta dengan melakukan pelayanan keliling ke daerah-daerah yang berpotensi;
3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Juru Sita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah;
5. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;

6. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak melalui program Gerbang Pajak dan melakukan penjajakan kepada wajib pajak yang menunggak pajak;
7. Memperkuat struktur permodalan BUMD, melalui perluasan sumber permodalan dan pembiayaan diantaranya pemupukan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
8. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain –lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
9. Menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja Daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan dan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta mitigasi dan kebencanaan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari kelompok belanja:

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

   a. Belanja Pegawai

      Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi

pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah. Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan (TPP) ASN, gaji dan tunjangan KDH-WKDH dan DPRD, insentif pajak dan retribusi daerah. Penganggaran gaji dan tunjangan ASN mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan acress gaji sesuai ketentuan maksimal sebesar 2,5 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja barang dan jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah tahun anggaran diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/ masyarakat untuk menangani masalah sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagihasilkan dengan proporsi

13% dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi:

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian;
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2025;
4. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah, di samping juga belanja modal diarahkan untuk pengadaan aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat;
5. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,5% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
6. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut; dan
7. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, maka dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2026.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana dari selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan atas nilai SiLPA yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2024. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal tahun 2025 diarahkan untuk PT BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 APBD dan Perubahannya

Pelaksanaan anggaran Kabupaten Karangasem Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024, serta Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami perubahan APBD dalam bentuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD sebanyak 1 (Satu) Kali, yaitu : 1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan tanggal 9 September 2025. Dimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilakukan dalam rangka perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 yang dijabarkan ke Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2025. Kemudian, dimana dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa : Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah daerah. Namun dalam rangka mewujudkan penganggaran yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, sejak ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disertai dengan penetapan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan pada 24 Maret 2025. Perubahan pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan efisiensi belanja melalui penyesuaian dan/atau pergeseran belanja;
2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan pada 9 September 2025. Perubahan kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan pada 10 November 2025, Perubahan ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa: berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/6413/PADFE/BPKAD, Tanggal 25 September 2025, Perihal Pagu Definitif Perubahan Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem mendapatkan tambahan pendapatan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Bali;
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan pada 8 Desember 2025, Perubahan keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa : berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Karangasem mendapatkan tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus Non fisik.

   Target kinerja APBD Tahun 2025 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

   a. Anggaran Pendapatan

Tabel 2.10 Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Daerah	1.717.980.604.576,00	1.810.318.014.123,00	92.337.409.547,00	5,37
Pendapatan Asli Daerah	456.289.832.412,00	494.262.674.756,00	37.972.842.344,00	8,32

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pajak Daerah	324.810.293.132,00	342.359.241.433,00	17.548.948.301,00	5,40
Retribusi Daerah	8.255.832.200,00	129.943.268.695,00	121.687.436.495,00	1473,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.424.995.605,00	13.843.338.532,00	3.418.342.927,00	32,79
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.798.711.475,00	8.116.826.096,00	(104.681.885.379,00)	(92,80)
Pendapatan Transfer	**1.259.717.455.744,00**	**1.303.598.713.991,00**	**43.881.258.247,00**	**3,48**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.170.113.362.000,00	1.157.546.734.000,00	(12.566.628.000,00)	(1,07)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.604.093.744,00	146.051.979.991,00	56.447.886.247,00	63,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**1.973.316.420,00**	**12.456.625.376,00**	**10.483.308.956,00**	**531,25**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.973.316.420,00	12.456.625.376,00	10.483.308.956,00	531,25

Dari data tersebut di atas diketahui terdapat kenaikan anggaran pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp92.337.409.547,00 atau 5,37%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi sumber-sumber PAD terutama pada Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar 5,40%, hasil pengelolaan kekayaan daerah meningkat sebesar 32,79% dan sementara Retribusi Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 1.473,96% diakibatkan pendapatan pelayanan Kesehatan dari BLUD pindah ke Retribusi Daerah. Berdasarkan realisasi ini perlu dilakukan penyesuaian proyeksi APBD agar bisa selaras dengan target Belanja Daerah. Hal tersebut didasarkan pada:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a) Rencana target PAD perubahan tahun anggaran 2025 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun berjalan; dan
   b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD termasuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

2) Pendapatan Transfer

   Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum berbentuk BLUD, dan pendapatan

pengembalian sisa belanja hibah pilkada. Proyeksi anggaran atas Pendapatan Daerah dilaksanakan berdasarkan kajian kemampuan realisasi dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

b. Anggaran Belanja

Tabel 2.11 Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja	**1.803.429.121.925,00**	**1.952.404.482.852,00**	**148.975.360.927,00**	**8,26**
Belanja Operasi	**1.490.412.292.958,00**	**1.581.693.285.139,00**	**91.280.992.181,00**	**6,12**
Belanja Pegawai	953.252.694.320,00	954.066.995.385,00	814.301.065,00	0,09
Belanja Barang dan Jasa	468.232.097.638,00	522.220.452.454,00	53.988.354.816,00	11,53
Belanja Hibah	62.177.501.000,00	102.210.837.300,00	40.033.336.300,00	64,39
Belanja Bantuan Sosial	6.750.000.000,00	3.195.000.000,00	(3.555.000.000,00)	(52,67)
Belanja Modal	**74.431.281.049,00**	**129.896.466.600,00**	**55.465.185.551,00**	**74,52**
Belanja Modal Tanah	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.726.092.060,00	63.133.444.158,00	31.407.352.098,00	99,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.839.939.000,00	24.922.360.570,00	9.082.421.570,00	57,34
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.623.419.989,00	39.145.081.780,00	12.521.661.791,00	47,03
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	241.830.000,00	2.274.409.133,00	2.032.579.133,00	840,50
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	121.170.959,00	121.170.959,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Transfer	**236.085.547.918,00**	**238.314.731.113,00**	**2.229.183.195,00**	**0,94**
Belanja Bagi Hasil	43.298.596.293,00	48.220.252.738,00	4.921.656.445,00	11,37
Belanja Bantuan Keuangan	192.786.951.625,00	190.094.478.375,00	(2.692.473.250,00)	(1,40)

Secara total perubahan anggaran belanja daerah mengalami kenaikan dari anggaran induk sebesar Rp148.975.360.927,00 atau 8,26%. Perubahan anggaran belanja daerah terjadi peningkatan pada belanja operasi sebesar Rp91.280.992.181,00, belanja modal sebesar Rp55.465.185.551,00, belanja transfer sebesar Rp2.229.183.195,00, sedangkan belanja tidak terduga masih sama dengan anggaran belanja induk.

Kebijakan penganggaran belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian;
2) Pemenuhan dan Pemanfaatan Anggaran untuk Pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan Fokus pada penuntasan WAJAR 12 Tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
3) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih. Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dialokasikan anggaran yang cukup

untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2025;

4) Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan di masing-masing wilayah, di samping juga belanja modal diarahkan untuk pengadaan aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat;
5) Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
6) Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut; dan
7) Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2026, maka dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2026.

c. Anggaran Pembiayaan

Tabel 2.12 Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Uraian	APBD	Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	**89.448.517.349,00**	**146.086.468.729,00**	**56.637.951.380,00**	**63,32**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.448.517.349,00	146.086.468.729,00	56.637.951.380,00	63,32
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	**85.448.517.349,00**	**142.086.468.729,00**	**56.637.951.380,00**	**66,28**

Anggaran pembiayaan mengalami kenaikan dari anggaran induk. SILPA mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran induk. SILPA ini bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan penghematan belanja TA 2025.

Penggunaan dan pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SILPA terdiri dari SILPA bebas dan SILPA terikat. Pemanfaatan SILPA bebas bersifat umum/*block grant* yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SILPA terikat digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Alokasi SILPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp142.086.468.729,00 meningkat sebesar Rp56.637.951.380,00 dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2025 yang diperkirakan sebesar Rp85.448.517.349,00.

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2025 yaitu diarahkan untuk Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk

diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah penyertaan modal daerah tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari PT BPD Bali sebesar Rp3.000.000.000,00. Dan PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp1.000.000.000,00.

Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp146.086.468.729,00 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00, menjadi pembiayaan neto sebesar Rp142.086.468.729,00, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp(142.086.468.729,00).

2.3.2 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory *spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Kas bosp

2.3.2.1 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendidikan minimal 20% dari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan data anggaran dan realisasi, total alokasi mandatory spending fungsi pendidikan di Kabupaten Karangasem dianggarkan sebesar Rp684.204.956.221,00 dengan realisasi sebesar Rp662.059.956.071,78 atau mencapai 96,76% dari anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, total Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.952.404.482.852,00 dengan realisasi sebesar Rp1.792.465.399.275,09. Apabila dibandingkan terhadap total Belanja Daerah, maka persentase alokasi mandatory spending fungsi pendidikan adalah sebesar 35,04% dari total belanja yang dianggarkan dan sebesar 36,94% dari total realisasi belanja daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memenuhi ketentuan mandatory spending fungsi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu minimal 20% dari APBD. Persentase tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan telah berada di atas batas minimal yang dipersyaratkan, baik dari sisi penganggaran maupun realisasi. Adapun capaian mandatory spending pada fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Karangasem dapat dilihat secara rinci pada ***Lampiran 1***.

2.3.2.2 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Tujuan dari mandatory *spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,

mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem. Total alokasi mandatory spending untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dianggarkan sebesar Rp450.037.964.684,00 dengan realisasi sebesar Rp415.482.236.805,35 atau mencapai 92,32% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun total Belanja Daerah di luar Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp1.714.089.751.739,00 dengan realisasi sebesar Rp1.554.160.244.806,09 atau sebesar 90,67%. Berdasarkan perbandingan tersebut, persentase alokasi mandatory spending belanja infrastruktur pelayanan publik adalah sebesar 26,26% dari total belanja daerah di luar transfer yang dianggarkan dan sebesar 26,73% dari realisasi belanja daerah di luar transfer. Persentase tersebut masih berada di bawah ketentuan minimal 40% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belum terpenuhinya batas minimal mandatory spending infrastruktur pelayanan publik tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja yang bersifat wajib dan mengikat, khususnya belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan, sehingga ruang fiskal *(fiscal space)* untuk pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik menjadi terbatas. Meskipun demikian, realisasi belanja infrastruktur telah mencapai 92,32%, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Karangasem dapat dilihat secara rinci pada ***Lampiran* 2.**

2.3.2.3 *Mandatory Spending* Fungsi Aparatur

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud dialokasikan paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi aparatur adalah untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi aparatur di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.13 Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai ASN	**873.739.120.170,00**	**792.761.708.032,42**	**90,73**
Gaji dan Tunjangan	560.882.190.079,72	507.877.716.833,00	90,55
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	312.856.930.090,28	284.883.991.199,42	91,06
Belanja Pegawai DPRD	**34.797.087.534,00**	**32.662.929.684,00**	**93,87**
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.406.487.534,00	32.413.729.684,00	94,21
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	390.600.000,00	249.200.000,00	63,80
Belanja Gaji KDH/WKDH	**3.549.705.969,00**	**1.723.482.683,00**	**48,55**
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.808.311.969,00	1.013.482.683,00	36,09
Belanja Dana Operasional Pimpinan KDH/WKDH	741.394.000,00	710.000.000,00	95,77
Belanja Pegawai BLUD	**41.981.081.712,00**	**40.536.506.662,00**	**96,56**
Total Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	954.066.995.385,00	867.684.627.061,42	90,95
Belanja Pegawai terkait untuk Guru	153.863.339.200,00	153.818.010.600,00	99,97
Total Belanja Pegawai di Luar TPG dan Tamsil Guru	800.203.656.185,00	713.866.616.461,42	89,21
Total Belanja Daerah	**1.952.404.482.852,00**	**1.792.465.399.275,09**	**91,81**
Rasio Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	**40,99%**	**39,83%**	

2.3.2.4 *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari mandatory *spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi ADD di wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Persentase Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja ADD	**106.102.323.375,00**	**106.102.323.375,00**	**100,00**
Dana Perimbangan	**1.052.096.727.000,00**	**1.038.908.627.493,00**	**98,75**
DAK Fisik	1.124.124.000,00	979.576.871,00	87,14
DAK Non Fisik	240.871.855.000,00	237.547.955.771,00	98,62
Total Dana Perimbangan dikurangi DAK	**810.100.748.000,00**	**800.381.094.851,00**	**98,80**
Persentase	**13,10%**	**13,26%**	

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membelanjakan seluruh kebutuhan belanjanya melalui PAD. Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik provinsi maupun pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

3.1.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Uraian	APBD	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
Pendapatan	1.810.318.014.123,00	1.815.849.878.102,63	5.531.863.979,63	100,31
Belanja	1.952.404.482.852,00	1.792.465.399.275,09	(159.939.083.576,91)	91,81
Surplus/(Defisit)	**(142.086.468.729,00)**	**23.384.478.827,54**	**165.470.947.556,54**	**(16,46)**
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	146.086.468.729,00	146.086.468.729,71	0,71	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Neto	**142.086.468.729,00**	**142.086.468.729,71**	**0,71**	**100,00**
SILPA	**0,00**	**165.470.947.557,25**	**165.470.947.557,25**	**0,00**

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada Bab V, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan belanja operasi dan efisiensi pelaksanaan belanja modal sehubungan dengan penyesuaian kebutuhan riil di lapangan. Efisiensi tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan anggaran yang efektif serta efisien.

3.1.2 Tren Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan SILPA Tahun 2021–2025

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Pendapatan	1.815.849,88	1.840.886,44	1.641.545,93	1.577.410,44	1.555.811,56
Belanja	1.792.465,40	1.881.895,71	1.583.642,34	1.548.907,88	1.547.531,45
Surplus/(Defisit)	**23.384,48**	**(41.009,27)**	**57.903,59**	**28.502,56**	**8.280,11**
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	146.086,47	188.595,74	161.301,54	118.187,57	113.908,34
Pengeluaran Pembiayaan	4.000,00	1.500,00	41.500,00	2.500,00	4.000,00
Pembiayaan Neto	**142.086,47**	**187.095,74**	**119.801,54**	**115.687,57**	**109.908,34**
SILPA	**165.470,95**	**146.086,47**	**177.705,13**	**144.190,13**	**118.188,45**

3.1.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data di atas, Realisasi Pendapatan Daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pendapatan meningkat dari Rp1.555.811,56 juta pada Tahun 2021 menjadi Rp1.815.849,88 juta pada Tahun 2025. Meskipun pada Tahun 2025 sedikit menurun dibanding Tahun 2024, secara umum kapasitas fiskal daerah tetap terjaga. Peningkatan pendapatan tersebut juga ditopang oleh PAD Kabupaten Karangasem. Perbandingan realisasi PAD dari Tahun 2021 sampai 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021–2025

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
1	Pajak Daerah	351.322,52	273.800,08	232.153,51	167.957,91	85.667,48
2	Retribusi Daerah	105.937,53	128.058,59	10.472,01	10.215,72	9.207,86
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.660,75	17.077,89	10.334,90	9.321,19	10.759,41
4	Lain-lain PAD yang sah	12.684,67	13.567,69	128.280,10	113.837,41	147.057,00
Jumlah		**487.605,46**	**432.504,25**	**381.240,52**	**301.333,23**	**252.691,75**

Penjelasan:

1. Realisasi Pajak Daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2021 realisasi sebesar Rp85.667,48 juta dan meningkat menjadi Rp351.322,52 juta pada Tahun 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penerapan regulasi perpajakan daerah yang lebih efektif dan terintegrasi. Kontribusi Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dalam struktur PAD Kabupaten Karangasem;
2. Realisasi Retribusi Daerah mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Pada Tahun 2021 sebesar Rp9.207,86 juta, meningkat secara signifikan pada Tahun 2024 menjadi Rp128.058,59 juta dikarenakan perubahan subjek dan objek pajak retribusi, penyesuaian tarif serta kebijakan pengelolaan layanan publik yang menjadi pendapatan retribusi. Namun di tahun 2025 kembali mengalami penurunan menjadi Rp105.937,52 juta. Penurunan di tahun 2025 disebabkan oleh terjadinya reklasifikasi ke Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diantaranya Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas menjadi Pendapatan Dana Kapitasi;
3. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada Tahun 2025 realisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercatat sebesar Rp17.660,75 juta, meningkat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.077,89 juta. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kinerja yang relatif baik dari badan usaha yang menjadi tempat penyertaan modal pemerintah daerah, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem;
4. Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp12.684,66 juta, mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp13.567,69 juta. Pendapatan berasal dari hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan atau bentuk lain, pendapatan denda pajak daerah, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan pengembalian, serta pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Realisasi pada pos ini mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh sifat pendapatannya yang tidak rutin dan sangat tergantung pada kondisi transaksi serta kebijakan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Untuk Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sangat bergantung pada kebijakan fiskal nasional maupun daerah serta kinerja instansi vertikal terkait. Tingkat pencapaiannya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang berdampak pada penerimaan negara, khususnya bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan besaran realisasi dana perimbangan tersebut. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sangat tergantung pada hibah dari Pemerintah Pusat serta dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Karena sifatnya yang insidental dan berbasis persetujuan pihak pemberi hibah, maka realisasinya dapat berbeda secara signifikan antar tahun anggaran.

3.1.2.2 Belanja

Gambaran Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten selama Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta kondisi ekonomi yang berkembang. Secara umum, realisasi belanja daerah mengalami tren peningkatan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024, namun pada Tahun 2025 terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan belanja yang diselaraskan dengan ketersediaan pendapatan daerah serta optimalisasi efisiensi anggaran. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2021 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun 2021–2025

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
1	Belanja Operasi	1.432.566,23	1.358.638,49	1.230.741,04	1.199.158,17	1.210.433,00
2	Belanja Modal	120.520,18	264.862,75	119.036,45	139.308,07	143.668,86
3	Belanja Tidak Terduga	1.073,84	0,00	0,05	0,00	2.119,88
4	Belanja Transfer	238.305,15	258.394,47	233.864,80	210.441,64	191.309,71
Jumlah		**1.792.465,40**	**1.881.895,71**	**1.583.643,34**	**1.548.907,88**	**1.547.531,45**

Penjelasan:

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa Realisasi Belanja Daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan komposisi terbesar pada Belanja Operasi. Belanja Operasi cenderung meningkat hingga Tahun 2025 dan menjadi komponen dominan dalam struktur belanja daerah, sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Realisasi Belanja Modal bersifat fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada Tahun 2024 akibat pengadaan dan penggantian aset yang telah usang. Pada Tahun 2025 realisasi menurun menyesuaikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Belanja Tidak Terduga direalisasikan sesuai kebutuhan keadaan darurat. Pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi, sedangkan Tahun 2025 terealisasi dalam jumlah terbatas. Belanja Transfer menunjukkan kecenderungan meningkat, seiring dengan kenaikan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil kepada desa/kelurahan. Secara umum, belanja daerah dikelola dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan prinsip efisiensi anggaran.

3.1.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021–2025

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
1	Penerimaan	146.086,47	188.595,74	161.301,54	118.187,58	113.908,34
2	Pengeluaran	4.000,00	1.500,00	41.500,00	2.500,00	4.000,00

Berdasarkan realisasi pembiayaan daerah TA 2021 sampai dengan TA 2025, penerimaan pembiayaan menunjukkan tren peningkatan dari TA 2021 hingga TA 2024, kemudian mengalami penurunan pada TA 2025. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan pembiayaan dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan selama periode tersebut cenderung berfluktuasi, dengan kenaikan signifikan pada TA 2023 dan kembali menurun pada TA 2024 serta relatif stabil pada TA 2025. Pengeluaran pembiayaan digunakan terutama untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri serta penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal dilakukan secara selektif sesuai kemampuan kas daerah dengan tujuan

mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, pengelolaan pembiayaan daerah mencerminkan upaya menjaga keseimbangan fiskal, memenuhi kewajiban jangka panjang, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

3.1.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

3.1.3.1 PAD terhadap Belanja Daerah

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja daerah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Daerah}} = \frac{487.605.462.281,40}{1.792.465.399.275,09} \text{ X } 100\% = 27,20\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja daerah sebesar 27,20% sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi.

3.1.3.2 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{487.605.462.281,40}{1.432.566.228.412,11} \text{ X } 100\% = 34,04\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 34,04%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD.

3.1.3.3 PAD dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Pendapatan Bagi Hasil}}{\text{Belanja}} = \frac{591.296.202.175,40}{1.792.465.399.275,09} \text{ X } 100\% = 32,99\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak hanya mampu menutupi belanja sebesar 32,99%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan belanja pemerintah.

3.1.3.4 PAD dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Pendapatan Bagi Hasil}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{591.296.202.175,40}{1.432.566.228.412,11} \text{ X } 100\% = 41,28\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak hanya mampu menutupi belanja operasi sebesar 41,28%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan operasional pemerintahan. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat

kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar. Perkembangan ukuran kemandirian terutama berdasarkan realisasi PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rasio PAD terhadap Belanja Daerah dan Belanja Operasi Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	
					Realisasi	Target
PAD / Belanja	16,33	19,45	24,07	22,98	27,20	25,32
PAD / Belanja Operasi	20,88	25,13	30,98	31,83	34,04	31,25

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa, rasio kemandirian keuangan daerah yang diukur dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah dan Belanja Operasi menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada Tahun Anggaran 2024, rasio PAD terhadap Belanja Daerah tercatat sebesar 22,98%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 meningkat menjadi 27,20%. dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah secara kapasitas fiskal relatif lebih tinggi dibandingkan Tahun Anggaran 2024,. Capaian tersebut didukung oleh optimalisasi penerimaan PAD serta adanya kebijakan efisiensi dan penghematan belanja daerah, khususnya pada belanja yang bersifat non-prioritas, sehingga kapasitas pendanaan yang bersumber dari PAD terhadap belanja daerah dan belanja operasi dapat ditingkatkan. Secara umum, meskipun tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, Pemerintah Kabupaten Karangasem terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta pengendalian belanja daerah secara lebih efektif dan efisien.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan daerah. Tahun 2025 masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan pajak baik pajak reklame, PBJT-Makanan dan/atau minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, pajak MBLB dan PBB-P2 yang baru pada Tahun 2014 diserahkan ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya saldo piutang pajak daerah.

Kinerja keuangan, bidang belanja daerah Tahun 2025 tidak mengalami kendala yang berarti. Secara umum belanja daerah dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja daerah. Kinerja Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan target yang dianggarkan dalam Tahun 2025. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan. Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Bab V.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB;
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialiasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah;

3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah;
5. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
6. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
7. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2025.

4.1.2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pengguna anggaran dan pengguna barang terdiri dari: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah dengan 7 Unit Bagian), 16 Dinas, 6 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 unit RSUD, 1 Inspektorat, dan 8 Kecamatan.

4.1.3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. BLUD menyajikan Laporan Keuangan BLUD serta sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan yang memuat BLUD didalamnya.

4.1.4. Perusahaan Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Karangasem dan dikelola secara profesional yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem. PDAM Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Modal PDAM Kabupaten Karangasem seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah dalam memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Karangasem dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera. Modal Dasar yang disetor Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2025 telah menggunakan basis akrual.

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan;
2. Kesinambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/ berkesinambungan;
3. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah;
4. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Eksistensi Aset, Pendapatan dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas;
5. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
6. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan **"bulan"**. Jika transaksi terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya; dan
7. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa APBD. Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak

lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah;
2. Asas Bruto, Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran; dan
3. Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Pendapatan – LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
5. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.4.2 Pendapatan – LRA

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
   a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
   b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
   c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
   d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan

e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum;
6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima; dan
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.4.3 Beban – LO

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
3. Beban diukur sesuai dengan:
   a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
   b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
4. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
5. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan
6. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

4.4.4 Belanja - LRA

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban serta dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja;
3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
4. Belanja diakui pada saat:
   a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
   b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-Lain PAD yang Sah;
6. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
7. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.5 Transfer

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
2. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
3. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
   b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
4. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
5. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
6. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
7. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.6 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;

2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah;
3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi);
5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah;
7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan;
8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan; dan
9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.4.7 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyTabelarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; dan
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.7.1 Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
2. Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain;
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang;
5. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
6. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan sebagainya;
7. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan;

8. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk dapat menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang;
9. Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dilakukan dengan menggunakan taksiran persentase atas besaran piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

10. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
11. Persediaan terdiri atas: barang pakai habis, barang tak pakai habis, barang bekas dipakai; dan
12. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir untuk persediaan selain obat dan harga real untuk persediaan obat-obatan.

4.4.7.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
   a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan
   b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir dan investasi jangka panjang yang sifatnya non permanen diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), khusus untuk investasi jangka panjang dalam rangka mempertahankan suatu peninggalan sejarah atau/objek wisata sesuai peraturan, hasil investasi diakui sebagai pengurang investasi;
5. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterimakan kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*);

Tabel 4.2 Persentase Penyisihan Investasi Non Permanen Berdasarkan Jangka Waktu Jatuh Tempo Pengembalian

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100%

6. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

4.4.7.3 Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya;
3. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya;
4. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
5. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polder, bangunan air pengaman sungai dan tanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
6. Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya;
8. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis;
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan;
10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan;
11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;
13. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi;
14. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan;
15. Jalan, Jaringan dan Irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan;

16. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan;
17. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola (jika ada);
18. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan;
19. Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
20. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan; dan
21. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai Tahun 2015, seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010, tanpa memperhitungkan sisa umur ekonomis.

4.4.7.4 Properti Investasi

1. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
   b. Dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

   Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk keinginan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

   Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
2. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah dan ditatausahakan BMD tidak secara terpisah, dan tidak memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu:

a. Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa menempati perbandingan 3:4 (75%) luasan area dari area bagian properti digunakan sendiri (25%); atau
b. Intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal yang tidak memenuhi properti yang digunakan sendiri dengan perbandingan 3:4 (75%) dari intensitas properti digunakan sendiri (25%).

3. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
   a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas dimasa yang akan datang dari aset properti investasi; atau
   b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

4.4.7.5 Perjanjian Konsesi Jasa

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
   a. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
   b. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
2. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang :
   a. disediakan oleh mitra, yang:
      1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
      2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
   b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
      1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
      2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

4.4.7.6 Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran; atau
2. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

4.4.7.7 Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan;
2. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan pihak III, Aset Tidak berwujud, Aset Lain - lain, Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF);
3. Piutang Penjualan angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Ataupun kemitraan dengan pihak lain (Bank) sehubungan kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan juga dalam bentuk perjanjian;
7. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;.
8. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud, termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya, serta kas yang dibatasi penggunaannya yang merupakan hak pemerintah atau kas yang tidak merupakan hak pemerintah lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
9. Pos Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia;
10. Aset lainnya diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Piutang Penjualan angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset;
13. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun (aset lainnya tersebut selesai dibangun) atau aset tersebut disetujui penempatannya sesuai dengan perjanjiannya;
14. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan, Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaat;

15. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan karena kondisi/digolongkan sebagai rusak berat/tidak dapat digunakan maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca;
16. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) diakui dan disajikan sebesar nilai penyaluran transfer oleh pusat secara non tunai berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat.

4.4.7.8 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan;
4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Lain yang Ditangguhkan dan Biaya yang Masih Harus Dibayar;
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat;
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
10. Utang PFK, Pendapatan Lain yang Ditangguhkan, Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan;
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang; dan
12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang Rupiah.

4.4.7.9 Ekuitas

1. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban; dan
2. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

4.4.7.10 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Nilai perolehan Aset Tetap yang masih Rp0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan;

2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam Tahun 2025, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010; Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut:

Tabel 4.3 Masa Manfaat Aset Tetap Berdasarkan Golongan Aset

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
1	Peralatan dan Mesin	5 – 10
2	Gedung dan Bangunan	25
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12
4	Aset tetap lainnya	0

3. Pada Tahun 2015 diterapkan penghitungan penyusutan tanpa nilai residu. Langkah ini dimulai dari penghitungan penyusutan 2014, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2014. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Namun untuk tahun selanjutnya penyusutan aset tetap tanpa memperhitungkan umur ekonomis, disusutkan dengan membagi nilai aset tetap dengan umur ekonomis sesuai masa manfaatnya. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar daripada tambahan investasi Pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem;
4. Selanjutnya dalam penghitungan penyusutan tanpa penggunaan nilai residu aset tetap. Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka penyusutan Tahun 2025 dihitung sebagai berikut:

   $$\text{Penyusutan 2025} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

   Penyusutan per bulan = penyusutan per periode : 12
   Nilai penyusutan pada tahun berkenaan = penyusutan per bulan x bulan kepemilikan aset tetap.
5. Penyusutan aset yang diperoleh dalam Tahun 2025 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat; dan
6. Terhadap aset tetap yang tidak dpigunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

BAB V
PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

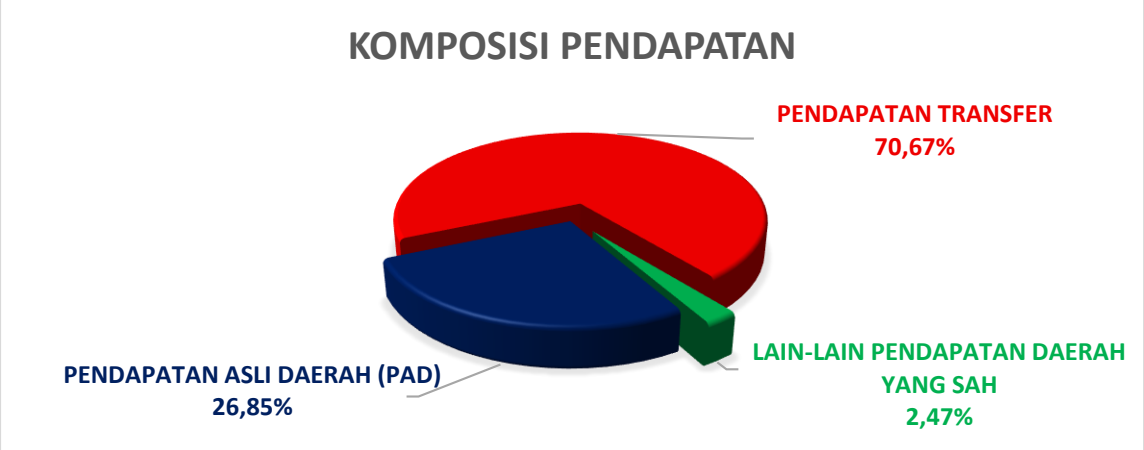
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Pendapatan Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	494.262.674.756,00	487.605.462.281,40	98,65	432.504.250.383,84
PENDAPATAN TRANSFER	1.303.598.713.991,00	1.283.346.700.326,23	98,45	1.406.411.525.953,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.456.625.376,00	44.897.715.495,00	360,43	1.970.665.022,88
Jumlah	**1.810.318.014.123,00**	**1.815.849.878.102,63**	**100,31**	**1.840.886.441.359,72**

Penjelasan:
Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Gambar 5.1 Komposisi Pendapatan Daerah Berdasarkan Klasifikasinya



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	342.359.241.433,00	351.322.521.550,00	102,62	273.800.083.472,10
Retribusi Daerah	129.943.268.695,00	105.937.526.418,00	81,53	128.058.589.565,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.843.338.532,00	17.660.748.688,46	127,58	17.077.888.186,17
Lain-lain PAD yang Sah	8.116.826.096,00	12.684.665.624,94	156,28	13.567.689.160,23
Jumlah	**494.262.674.756,00**	**487.605.462.281,40**	**98,65**	**432.504.250.383,84**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Reklame	**550.000.000,00**	**325.077.500,00**	**59,11**	**444.995.800,00**
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	550.000.000,00	325.077.500,00	59,11	444.995.800,00
Pajak Air Tanah	**1.242.320.538,00**	**1.332.780.956,00**	**107,28**	**1.242.320.538,00**
Pajak Air Tanah	1.242.320.538,00	1.332.780.956,00	107,28	1.242.320.538,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	**104.000.000.000,00**	**86.758.057.532,00**	**83,42**	**103.998.911.390,00**
Pajak Pasir dan Kerikil	104.000.000.000,00	86.758.057.532,00	83,42	103.998.911.390,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	**6.800.000.000,00**	**7.120.198.132,00**	**104,71**	**6.750.823.600,00**
PBBP2	6.800.000.000,00	7.120.198.132,00	104,71	6.750.823.600,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	**38.021.110.000,00**	**43.104.258.046,00**	**113,37**	**30.453.068.938,00**
BPHTB-Pemindahan Hak	38.021.110.000,00	43.104.258.046,00	113,37	30.453.068.938,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	**133.196.930.884,00**	**150.356.575.684,00**	**112,88**	**130.909.963.206,10**
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	33.366.930.884,00	35.847.387.360,00	107,43	31.269.344.270,00
PBJT-Tenaga Listrik	25.380.000.000,00	26.820.268.883,00	105,67	25.277.707.988,00
PBJT-Jasa Perhotelan	66.100.000.000,00	76.026.204.923,00	115,02	66.329.241.932,10
PBJT-Jasa Parkir	250.000.000,00	228.800.664,00	91,52	201.977.500,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	8.100.000.000,00	11.433.913.854,00	141,16	7.831.691.516,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**30.367.801.585,00**	**32.399.347.200,00**	**106,69**	**0,00**
Opsen PKB	30.367.801.585,00	32.399.347.200,00	106,69	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**28.181.078.426,00**	**29.926.226.500,00**	**106,19**	**0,00**
Opsen BBNKB	28.181.078.426,00	29.926.226.500,00	106,19	0,00
Jumlah	**342.359.241.433,00**	**351.322.521.550,00**	**102,62**	**273.800.083.472,10**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Pajak Reklame lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan kondisi perekonomian dan strategi promosi pelaku usaha yang mulai beralih ke media digital juga berdampak pada menurunnya minat pemasangan reklame luar ruang, sehingga penerimaan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron pada TA 2025 lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2024;
   b. Realisasi Pajak Air Tanah lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 karena adanya adanya penertiban dan pendataan ulang wajib pajak sehingga meningkatkan potensi terhadap pajak dipungut;
   c. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan realisasi Tahun 2024 karena adanya pembatasan aktivitas penambangan, faktor cuaca, serta menurunnya permintaan bahan galian.;
   d. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan dan dibandingkan realisasi Tahun 2024 Hal ini dipengaruhi oleh efektivitas intensifikasi pemungutan pajak serta penerimaan dari pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya, sehingga realisasi lebih tinggi dibandingkan TA 2024;
   e. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
      - Meningkatnya transaksi jual beli dan peralihan hak atas tanah dan bangunan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah;
      - Optimalisasi pemungutan dan pengawasan pajak daerah, termasuk peningkatan validasi data, penguatan koordinasi dengan PPAT/Notaris, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak; dan
      - Kesadaran masyarakat yang semakin baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran BPHTB, khususnya pada saat proses peralihan hak.
   f. Realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 karena adanya penertiban dan pendataan ulang Wajib Pajak (WP) yang menyebabkan bertambahnya Wajib Pajak PBJT diantaranya Wajib Pajak Jasa Perhotelan, Jasa Makanan dan/atau Minuman, serta Jasa Kesenian dan Hiburan.
   g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) lebih tinggi dari anggarannya disebabkan penerimaan pajak PKB oleh Provinsi Bali meningkat. Kebijakan opsen pajak tersebut baru diberlakukan pada Tahun 2025 sehingga tidak ada realisasi pada tahun 2024.
2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi oleh peraturan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	**127.392.458.095,00**	**101.428.428.996,00**	**79,62**	**124.591.066.659,34**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	122.159.731.095,00	96.008.524.996,00	78,59	119.410.608.659,34
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	806.400.000,00	857.385.000,00	106,32	665.687.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	3.962.346.000,00	4.283.355.000,00	108,10	4.230.501.000,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	463.981.000,00	279.164.000,00	60,17	284.270.000,00
Retribusi Jasa Usaha	**950.810.600,00**	**1.346.465.000,00**	**141,61**	**975.264.000,00**
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	106.004.000,00	152.835.750,00	144,18	120.279.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	501.120.000,00	620.968.000,00	123,92	505.286.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	30.000.000,00	31.380.000,00	104,60	42.660.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.000.000,00	11.350.000,00	567,50	2.480.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	47.700.000,00	48.349.000,00	101,36	40.869.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	263.986.600,00	481.582.250,00	182,43	263.690.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**1.600.000.000,00**	**3.162.632.422,00**	**197,66**	**2.492.258.906,00**
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	800.000.000,00	1.340.797.622,00	167,60	933.282.906,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	800.000.000,00	1.821.834.800,00	227,73	1.558.976.000,00
Jumlah	**129.943.268.695,00**	**105.937.526.418,00**	**81,53**	**128.058.589.565,34**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Retribusi Jasa Umum
      1) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan adanya reklasifikasi pendapatan ke Lain-lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Penyusunan APBD 2025;

2) Realisasi Retribusi Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan diadakannya monitoring kepada petugas parkir secara berkala dan evaluasi kinerja para petugas parkir secara periodik terutama bagi petugas parkir yang targetnya tidak terpenuhi;
3) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan dan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan mulai berlakunya E-Retribusi serta adanya pengawasan dan pembinaan rutin kepada petugas pemungutan retribusi pasar; dan
4) Retribusi Pelayanan Kebersihan lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan dan lebih rendah dari realisasi Tahun 2024 disebabkan pada masing-masing desa sudah memiliki TPST serta mengelola sampah sendiri.

b. Retribusi Jasa Usaha
1) Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan adanya peningkatan jumlah objek retribusi khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (bertambahnya jumlah data Satuan Pendidikan yang menyediakan kantin sekolah);
2) Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 disebabkan karena dilakukannya monitoring petugas parkir secara berkala dan evaluasi kinerja para petugas parkir terutama bagi petugas parkir yang targetnya tidak terpenuhi;
3) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan namun lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan banyaknya masyarakat yang memotong hewan ternak (Sapi) di Rumah Potong Hewan (RPH);
4) Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan dalam penggunaan Stadion I Gusti Ketut Jelantik oleh masyarakat umum dalam penyelenggaraan event di bidang olahraga sehingga menyebabkan pelampauan penerimaan dari target yang ditetapkan;
5) Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan meningkatkannya antusiasme masyarakat dalam mengkonsumsi ikan yang cukup tinggi; dan
6) Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan

meningkatnya pemanfaatan aset khususnya pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu
   1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan realisasi Tahun 2024 dikarenakan tingginya permohonan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung terutama pada sektor pariwisata sehingga target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Tahun 2025 dapat dipenuhi bahkan terlampaui; dan
   2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan realisasi Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
      - Meningkatnya aktivitas investasi di sektor pariwisata, terutama pada sektor perhotelan, diving, resort dan usaha wisata bahari berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja asing;
      - Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan melakukan perpanjangan izin secara resmi;
      - Upaya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem mengedukasi pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi melalui gathering wajib retribusi PTK secara berkala; dan
      - Optimalisasi pengawasan dan pendataan pengguna Tenaga Kerja Asing dengan pemangku kepentingan seperti Tim Pora Kabupaten Karangasem dan Kantor Imigrasi TPI II Singaraja.

2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi oleh peraturan sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**13.843.338.532,00**	**17.660.748.688,46**	**127,58**	**17.077.888.186,17**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.435.448.072,00	13.435.448.071,71	100,00	11.601.832.407,75

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	407.890.460,00	4.225.300.616,75	1035,89	5.476.055.778,42
Jumlah	**13.843.338.532,00**	**17.660.748.688,46**	**127,58**	**17.077.888.186,17**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan namun lebih tinggi dibandingkan realisasi Tahun 2024 dikarenakan PT Bank Pembangunan Daerah Bali membagikan dividen sebesar Rp13.400.123.459,71 dan PT Jamkrida Bali Mandara membagikan dividen sebesar Rp35.324.612,00. Realisasi ini dipengaruhi oleh perolehan laba perusahaan dan nilai penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara; dan
   b. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan namun lebih rendah dibandingkan realisasi Tahun 2024 dikarenakan PT Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem membagikan dividen sebesar Rp4.225.300.616,75. Realisasi ini dipengaruhi oleh perolehan laba perusahaan yang didapat pada PT Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem.
2. Rincian penerimaan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rincian Penerimaan Pendapatan Dividen

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali	13.400.123.460,00	13.400.123.459,71	100,00	11.601.832.407,75
PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali	35.324.612,00	35.324.612,00	100,00	5.476.055.778,42
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Tohlangkir	407.890.460,00	4.225.300.616,75	1.035,89	5.476.055.778,42
Jumlah	**13.843.338.532,00**	**17.660.748.688,46**	**127,58**	**17.077.888.186,17**

3. Dasar pengakuan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD:
   a. PT Bank Pembangunan Daerah Bali diakui berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 1 tanggal 4 Februari 2025 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali serta Berita Acara Nomor: 0149/BA/DIR/OKA/2025 Tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2024.
   b. PT Jamkrida Bali Mandara diakui berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 6 tanggal 10 Maret 2025; dan

c. Perumda Tirta Tohlangkir diakui berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Karangasem Nomor 900/3612/Ekbang/Setda tanggal 30 Desember 2025.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**24.868.000,00**	**0,00**	**330.458.754,00**
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	24.868.000,00	0,00	330.458.754,00
Hasil Kerja Sama Daerah	**1.826.213.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.671.682.326,00**
Hasil Kerja Sama Daerah	1.826.213.800,00	0,00	0,00	1.671.682.326,00
Jasa Giro	**1.897.779.162,00**	**1.918.664.465,93**	**101,10**	**2.572.037.169,73**
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.603.928.600,00	1.715.436.619,93	106,95	2.261.243.680,24
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	237.291.005,00	51.838.687,09	21,85	56.304.638,51
Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	68.030.202,95
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.429.847,00	5.983.660,15	418,48	5.217.656,21
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	52.541.228,00	136.877.840,76	260,52	161.090.127,82
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	2.588.482,00	8.527.658,00	329,45	20.150.864,00
Pendapatan Bunga	**437.500.000,00**	**4.375.000.000,20**	**1.000,00**	**3.572.916.666,83**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	437.500.000,00	4.375.000.000,20	1.000,00	3.572.916.666,83
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	**1.861.507.029,00**	**1.520.289.521,00**	**81,67**	**1.045.628.727,47**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.861.507.029,00	1.520.289.521,00	81,67	1.045.628.727,47
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0,00**	**488.093.836,75**	**0,00**	**331.625.617,65**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	488.093.836,75	0,00	331.625.617,65
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**579.928.717,00**	**2.673.349.057,00**	**460,98**	**2.780.422.487,72**
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	311.962.097,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	280.258.745,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	15.623.972,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.920.400,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	614.439,00	5.041.476,00	820,50	12.430.520,12

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	189.046.218,00	986.094.163,00	521,62	1.210.831.933,60
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	156.043.472,00	562.572.296,00	360,52	947.394.820,00
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	106.982.288,00	602.831.922,00	563,49	0,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	126.501.900,00	515.534.500,00	407,53	0,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	740.400,00	1.274.700,00	172,16	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.358,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	16.358,00
Pendapatan dari Pengembalian	**1.090.655.283,00**	**1.190.418.410,90**	**109,15**	**7.437.768,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	974.530.688,00	971.542.400,00	99,69	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	47.609.696,00	47.609.696,00	100,00	7.437.768,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	30.000,00	4.530.000,00	15.100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	3.391.650,00	3.391.650,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	43.293.249,00	54.086.000,00	124,93	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	49.530.464,90	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	18.300.000,00	56.228.200,00	307,26	0,00
Pendapatan BLUD	**413.242.105,00**	**493.982.333,16**	**119,54**	**837.678.103,83**
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	138.956.400,00	156.905.000,00	112,92	154.315.526,50
Pendapatan BLUD dari Hibah	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	37.801.000,00	48.051.898,35	127,12	176.723.000,00
Pendapatan BLUD dari APBD	0,00	0,00	0,00	162.393.638,99
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	236.484.705,00	289.024.434,81	122,22	344.245.938,34

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.785.181,00**
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	417.785.181,00
Jumlah	**8.116.826.096,00**	**12.684.665.624,94**	**156,28**	**13.567.689.160,23**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan memiliki realisasi pada Tahun 2025 namun lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan bedanya jenis barang yang dijual, pada TA 2024 jenis barang rusak berat yang dijual adalah kendaraan dinas sedangkan pada TA 2025 adalah barang-barang hasil bongkaran gedung dan bangunan;
2. Hasil Kerja Sama Daerah tidak memiliki realisasi pada Tahun 2025 dan lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

   Taman Soekasada Ujung Karangasem berdiri di Desa Dinas Tumbu Desa Adat Ujung Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem. Saldo Investasi atau Penyertaan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Proyek Pembangunan Taman Soekasada Ujung Karangasem sebesar Rp11.432.236.519,00 yang diukur dari Tahun 2001 hingga 2009 dengan sisa umur investasi 21 tahun. Pada tahun 2001 diadakan Revitalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem yang mengikatkan diri berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Puri Agung Karangasem melalui Akta Notaris Nomor 86 tanggal 30 Maret 2002. Jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 11 Januari 2031. Semua bangunan yang dibangun/diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem setelah berakhirnya perjanjian menjadi milik Puri Agung Karangasem. Sesuai dengan Keputusan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem Nomor: 275 Tahun 2005 – Nomor: 075 Tahun 2005, tanggal 4 Juli 2005 telah ditetapkan Dewan Pembina dan Badan Pengelola Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem. Pembagian keuntungan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pembagian Hasil Pengelolaan Bersama yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Pemda Karangasem mendapat 60% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama; dan
   b. Puri Agung Karangasem mendapat 40% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama.

   Hingga Tahun 2023 penyisihan investasi diperhitungkan dari penyetoran bagian hasil untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dari Taman Soekasada Ujung. Bagi hasil yang diterima Pemda diperhitungkan mengurangi nilai investasi dikarenakan sifat perjanjian Investasi dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung antara pihak Pemda Karangasem dengan Puri Karangasem merupakan investasi non permanen dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengkapitalisasian atas belanja untuk Badan Pengelola dihentikan, dan diakumulasi menjadi nilai investasi dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2009, sejak Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya perjanjian disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan dengan memperhitungkan penyisihan penurunan investasi. Penyetoran bagi hasil keuntungan dari Taman Soekasada Ujung sejak pertama kali disetor adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Nilai Investasi Taman Ujung

Uraian	Hasil Investasi	Nilai Sisa Investasi
Nilai investasi dalam proyek pembangunan diukur dari tahun 2009		**11.432.236.519,00**
Hasil investasi yang diterima sejak Tahun 2009 atas PKS Nomor 21 tanggal 11 Januari 2001 antara Puri Karangasem dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah:		
Hasil investasi tahun setor 2009	53.843.892,00	
Hasil investasi tahun setor 2010	82.249.500,00	
Hasil investasi tahun setor 2011	96.420.000,00	
Hasil investasi tahun setor 2012	121.570.386,00	
Hasil investasi tahun setor 2013	178.557.548,00	
Hasil investasi tahun setor 2014	356.201.584,00	
Hasil investasi tahun setor 2015	523.835.612,00	
Hasil investasi tahun setor 2016	795.210.711,00	
Hasil investasi tahun setor 2017	771.863.297,00	
Hasil investasi tahun setor 2018	910.489.536,00	
Hasil investasi tahun setor 2019	1.509.810.570,91	
Hasil investasi tahun setor 2020	1.741.646.366,38	
Hasil investasi tahun setor 2021	0,00	
Hasil investasi tahun setor 2022	0,00	
Hasil investasi tahun setor 2023	1.599.443.525,40	
Hasil investasi tahun setor 2024	1.671.682.326,00	
Hasil investasi tahun setor 2025	0,00	
Jumlah hasil investasi sampai dengan tanggal neraca		(10.412.824.854,69)
Nilai Sisa Investasi yang Dapat Direalisasikan		**1.019.411.664,31**

Investasi Dalam Proyek Pembangunan dan Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan mengalami penurunan pada tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024, penyajian Investasi Non Permanen dalam proyek pembangunan Taman Soekasada Ujung dikoreksi berdasarkan Berita Acara Penelusuran Dokumen Nomor: 900.1.6.3/2281/BPKAD/Setda dan Nomor: 900.1.6.3/4991/Disbudpar/Setda Tanggal 11 Desember 2024. Hasil penelusuran ditemukan bahwa realisasi belanja untuk kegiatan Taman Soekasada Ujung yang tercantum dalam laporan keuangan mulai Tahun 2001 sampai dengan 2009 adalah belanja operasional dan belanja modal serta tidak ada dokumen dan produk hukum yang menyebutkan kegiatan tersebut adalah penyertaan modal. Dari penurunan nilai Investasi Non Permanen dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung tahun 2023 berarti Pemerintah Kabupaten Karangasem mencantumkan nilai Rp0,00 pada neraca pemerintah daerah, namun hak terhadap bagi keuntungan maupun kerugian tetap diperoleh merujuk pada belum berakhirnya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Pihak Puri Karangasem yang sama sama diwakili oleh Badan Pengelola yang dibentuk bersama. Namun di tahun 2025 hak atas pembagian keuntungan dari pengelolaan investasi tersebut tidak dibagikan ke Pemerintah Kabupaten Karangasem.

3. Penerimaan Jasa Giro lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan namun lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan Realisasi Penerimaan Jasa Giro tergantung pada ketersediaan dan perputaran jumlah uang di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang mengakibatkan penerimaan Jasa Giro tidak dapat diprediksi dengan tepat;
4. Penerimaan Pendapatan Bunga lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan serta lebih tinggi dibandingkan realisasi Tahun 2024 disebabkan karena jumlah deposito lebih besar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem serta adanya perhitungan manajemen kas menyesuaikan dengan kebutuhan dana;
5. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain pada Tahun 2025 tidak ada realisasi dikarenakan tanah bukti sudah merupakan kewenangan Provinsi;

6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan memiliki realisasi pada Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan adanya keterlambatan waktu penyelesaian kontrak kerja konstruksi;
7. Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan namun lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan adanya penagihan denda pajak atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang lebih intensif ke lapangan;
8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah tidak memiliki anggaran dan realisasi pada Tahun 2025 dan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan tidak adanya realisasi Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah tidak memungut Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sejak Tahun 2024;
9. Realisasi Pendapatan dari pengembalian lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan adanya penagihan yang insentif atas pengembalian belanja tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025;
10. Realisasi Pendapatan BLUD lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan namun lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan meningkatnya pengunjung di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sehingga pendapatan dari jasa parkir juga mengalami peningkatan. Selain itu meningkatnya kepercayaan pihak ketiga kepada RSUD Karangasem di mana Pendapatan komisi merupakan pendapatan yang diperoleh hasil kerja sama dengan PT. Prodia Widyausada Denpasar. Sedangkan Pengguna jasa lab merupakan pemeriksaan lab pasien yang dikonfirmasi dari pihak ketiga seperti RS. Balimed Karangasem, Hasna Medika, RS. Kasna Medika, Dinkes Kab.Karangasem, TCM, Klinik Pratama Nawadara, serta adanya pendapatan di luar perencanaan, salah satunya hasil lelang inventaris kantor yang terjadi di TA 2025; dan
11. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak tidak dianggarkan dan tidak terealisasi pada Tahun 2025. Adapun, realisasi Tahun 2024 sebesar Rp417.785.181,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang pengawasan menara telekomunikasi, yang pemungutannya telah dihentikan sejak Tahun 2024.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.9 Rincian Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.157.546.734.000,00	1.144.358.634.493,00	98,86	1.162.203.551.295,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	146.051.979.991,00	138.988.065.833,23	95,16	244.207.974.658,00
Jumlah	**1.303.598.713.991,00**	**1.283.346.700.326,23**	**98,45**	**1.406.411.525.953,00**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.10 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.069.138.776.295,00
Dana Desa	83.992.155.000,00	83.992.155.000,00	100,00	80.146.587.000,00
Insentif Fiskal	21.457.852.000,00	21.457.852.000,00	100,00	12.918.188.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	21.759.626.000,00	22.145.223.500,00	101,77	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	788.341.122.000,00	778.235.871.351,00	98,72	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	241.995.979.000,00	238.527.532.642,00	98,57	0,00
Jumlah	**1.157.546.734.000,00**	**1.144.358.634.493,00**	**98,86**	**1.162.203.551.295,00**

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rincian Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	17.398.566.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	775.837.883.115,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	55.595.869.328,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	220.306.457.852,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.069.138.776.295,00**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di Tahun 2025 serta dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya secara umum disebabkan pada Tahun 2025 terjadi perubahan nomenklatur kodefikasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga tidak terdapat realisasi pada Tahun 2025.

5.1.1.2.1.2 Dana Desa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Dana Desa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas Dana Desa

yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rincian Dana Desa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Desa	**83.992.155.000,00**	**83.992.155.000,00**	**100,00**	**80.146.587.000,00**
Dana Desa	83.992.155.000,00	83.992.155.000,00	100,00	80.146.587.000,00
Jumlah	**83.992.155.000,00**	**83.992.155.000,00**	**100,00**	**80.146.587.000,00**

Penjelasan:

Realisasi Dana Desa yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp83.992.155.000,00 sesuai dengan anggaran yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Dana Desa yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp83.992.155.000,00sesuai dengan anggaran yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

5.1.1.2.1.3 Insentif Fiskal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Insentif Fiskal Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas Insentif Fiskal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Insentif Fiskal

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Insentif Fiskal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.918.188.000,00**
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	12.918.188.000,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	**21.457.852.000,00**	**21.457.852.000,00**	**100,00**	**0,00**
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	21.457.852.000,00	21.457.852.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**21.457.852.000,00**	**21.457.852.000,00**	**100,00**	**12.918.188.000,00**

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Insentif Fiskal di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Insentif Fiskal tidak memiliki anggaran dan realisasi Tahun 2025 serta lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 dikarenakan perubahan nomenklatur kodefikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
   b. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp21.457.852.000,00 sesuai dengan anggaran yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Yang disesuaikan pada Keputusan

Menteri Keuangan Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025.

Laporan Realisasi Penggunaan Insentif Fiskal TA 2025 diperuntukkan untuk kegiatan beberapa bidang antara lain:

a. Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya Reguler) Tahun 2025

Tabel 5.14 Rincian Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya Reguler) Tahun 2025

Uraian	Realisasi (Rp)	Output
Pelayanan Kesehatan		
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	21.457.852.000,00	568.794 Orang
Jumlah	**21.457.852.000,00**	**568.794 Orang**

b. Realisasi Penyerapan sisa dana Insentif Fiskal (IF Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat) Tahun 2024

Tabel 5.15 Rincian Realisasi Penyerapan sisa dana Insentif Fiskal (IF Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat) Tahun 2024

Uraian	Realisasi (Rp)	Output
Dukungan Infrastruktur Pelayanan Publik		
Pembangunan Jalan	77.776.480,00	1 KM
Jumlah	**77.776.480,00**	**1 KM**

5.1.1.2.1.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Dana Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak	**20.582.106.000,00**	**20.960.489.500,00**	**101,84**	**0,00**
DBH PBB	802.887.000,00	773.905.300,00	96,39	0,00
DBH PPh Pasal 21	18.524.838.000,00	18.672.554.200,00	100,80	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.092.220.000,00	1.339.691.000,00	122,66	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	162.161.000,00	174.339.000,00	107,51	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	**1.177.520.000,00**	**1.184.734.000,00**	**100,61**	**0,00**
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2631000	5724000	217,56	0,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	317.000,00	4.438.000,00	1400,00	0,00
DBH SDA Perikanan	1.174.572.000,00	1.174.572.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**21.759.626.000,00**	**22.145.223.500,00**	**101,77**	**0,00**

Penjelasan:

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp22.145.223,500,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.17 Rincian Dana Alokasi Umum

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	**659.760.618.000,00**	**658.421.195.560,00**	**99,80**	**0,00**
DAU	659.760.618.000,00	658.421.195.560,00	99,80	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	**128.580.504.000,00**	**119.814.675.791,00**	**93,18**	**0,00**
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	62.167.162.000,00	53.401.333.791,00	85,90	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	49.717.454.000,00	49.717.454.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.095.888.000,00	16.095.888.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**788.341.122.000,00**	**778.235.871.351,00**	**98,72**	**0,00**

Penjelasan:

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp778.235.871.351,00 tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebabkan DAU untuk alokasi PPPK disalurkan sesuai dengan jumlah PPPK yang diangkat sampai Tahun 2025.

5.1.1.2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Dana Alokasi Khusus

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik	1.124.124.000,00	979.576.871,00	87,14	0,00
DAK Non Fisik	240.871.855.000,00	237.547.955.771,00	98,62	0,00
Jumlah	**241.995.979.000,00**	**238.527.532.642,00**	**98,57**	**0,00**

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	249.978.000,00	249.278.250,00	99,72	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	339.442.000,00	302.324.682,00	89,07	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	534.704.000,00	427.973.939,00	80,04	0,00
Jumlah	**1.124.124.000,00**	**979.576.871,00**	**87,14**	**0,00**

Penjelasan:

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp979.576.871,00 tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan dikarenakan rendahnya penawaran pada proses tender oleh penyedia;.

a. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20 Rincian Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	73.099.160.000,00	72.880.820.700,00	99,70	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.167.750.000,00	2.167.750.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	146.216.167.000,00	146.606.089.800,00	100,27	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	847.750.000,00	731.250.000,00	86,26	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.335.800.000,00	3.885.948.400,00	89,62	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	247.260.834,00	61,71	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	302.100.000,00	302.100.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.259.290.000,00	4.219.285.074,00	99,06	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.532.260.000,00	1.532.035.440,00	99,99	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.556.850.000,00	1.168.959.794,00	45,72	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	457.834.000,00	457.834.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.591.234.000,00	3.243.621.729,00	70,65	0,00
Jumlah	**240.871.855.000,00**	**237.547.955.771,00**	**98,62**	**0,00**

Penjelasan:

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp237.547.955.771,00 tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebabkan adanya anggaran pendapatan yang tidak ditransfer sebesar sisa anggaran tahun sebelumnya;

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	109.307.659.716,00	103.690.739.894,00	94,86	189.805.671.394,00
Bantuan Keuangan	36.744.320.275,00	35.297.325.939,23	96,06	54.402.303.264,00
Jumlah	**146.051.979.991,00**	**138.988.065.833,23**	**95,16**	**244.207.974.658,00**

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	**109.307.659.716,00**	**103.690.739.894,00**	**94,86**	**189.805.671.394,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.965.204.963,00	12.876.879.002,00	99,32	59.047.970.401,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.496.218.543,00	11.288.823.297,00	98,20	53.764.937.241,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.895.307.227,00	50.476.260.692,00	91,95	48.539.238.509,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	253.721.938,00	296.345.992,00	116,80	252.480.377,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.697.207.045,00	28.752.430.911,00	96,82	28.201.044.866,00
Jumlah	**109.307.659.716,00**	**103.690.739.894,00**	**94,86**	**189.805.671.394,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dari Tahun 2024 disebabkan pendapatan Tahun 2025 belum ditransfer dan masih tercatat sebagai piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 serta adanya peraturan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dicatat sebagai pendapatan pajak daerah yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2025.
b. Pendapatan bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan disebabkan pendapatan Tahun 2025 belum ditransfer dan masih tercatat sebagai piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025. Realisasi lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 disebabkan penerimaan pajak provinsi yang fluktuatif pada Tahun 2025; dan
c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan lebih tinggi realisasinya dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan realisasi Tahun 2024 disebabkan penerimaan

pendapatan pajak Provinsi lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan serta dari tahun 2024.

d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan disebabkan pendapatan Tahun 2025 belum ditransfer dan masih tercatat sebagai piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025. Realisasi lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 disebabkan penerimaan pajak provinsi yang fluktuatif pada Tahun 2025.

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	**26.744.320.275,00**	**25.297.325.939,23**	**94,59**	**54.402.303.264,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	26.744.320.275,00	25.297.325.939,23	94,59	54.402.303.264,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**36.744.320.275,00**	**35.297.325.939,23**	**96,06**	**54.402.303.264,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/33/PADFE/BPKAD tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp25.399.610.374,00 serta Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/6413/PADFE/BPKAD tanggal 25 September 2025 sebesar Rp1.344.709.901,00. Realisasi lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan realisasi Tahun 2024 disebabkan realisasi *sharing* PBI Daerah dan Bantuan Keuangan untuk pengelolaan sampah lebih rendah dari Lampiran surat Gubernur Bali, serta pada tahun 2024 terdapat realisasi pendapatan BKK atas piutang transfer BKK Tahun 2023.

b. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sudah sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Denpasar Nomor 900.1/6343/BPKAD tanggal 29 Agustus 2025, serta pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menerima alokasi anggaran BKK dari Kabupaten/ Kota lainnya.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	0,00	1.811.381,00	0,00	4.122.090,88
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.456.625.376,00	44.895.904.114,00	360,42	1.966.542.932,00
Jumlah	**12.456.625.376,00**	**44.897.715.495,00**	**360,43**	**1.970.665.022,88**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Pendapatan Hibah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	**0,00**	**1.811.381,00**	**0,00**	**4.122.090,88**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.811.381,00	0,00	4.122.090,88
Jumlah	**0,00**	**1.811.381,00**	**0,00**	**4.122.090,88**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis memiliki realisasi namun tidak memiliki anggaran pada Tahun 2025 serta lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Lebih Bayar atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp56.300,00 atas nama sebagai berikut:
   - I Kadek Mudita
   - Ni Luh Kartini
   - I Nyoman Mardana Wibawa,ST
   - I Kadek Angga Hari Sanjaya
   - Putu Deni Suryawan Giri,S.Sos
   - I Gusti Agung Dwi Putra,ST
   - I Made Tarsi Ardipa
   - I Made Dono Wijaya,SE
2) Lebih Bayar atas Pembayaran Pajak sebesar Rp1.270.081,00 dikarenakan adanya malfungsi pada sistem perhitungan pajak. Wajib Pajak Lebih Bayar atas Pembayaran Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:
   - Puri Matahari
   - Sekarini
   - PT. Timor Bunutan
   - Bulih Bungallow
   - Qnara Indian
   - Citra Lestari

3) Lebih Bayar atas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp5.000,00 yang tidak diketahui atas nama penerima layanan tersebut;
4) Salah transfer dari pihak ketiga sebesar Rp480.000,00 yang selanjutnya diakui sebagai Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan	**10.483.308.956,00**	**12.209.790.315,00**	**116,47**	**93.398.232,00**
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	10.483.308.956,00	12.209.790.315,00	116,47	93.398.232,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	**1.973.316.420,00**	**32.686.113.799,00**	**1.656,41**	**1.873.144.700,00**
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.973.316.420,00	32.686.113.799,00	1.656,41	1.873.144.700,00
Jumlah	**12.456.625.376,00**	**44.895.904.114,00**	**360,42**	**1.966.542.932,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Penerimaan Pendapatan atas pengembalian Hibah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan Tahun 2025 serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan pengembalian atas hibah Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2025 sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 124/HK/2025, dan pengembalian atas hibah Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2025 yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Karangasem Karangasem sebesar Rp1.695.138.733,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 123/HK/2025. Pendapatan atas pengembalian Hibah tersebut tidak dianggarkan dalam APBD karena realisasinya setelah proses mekanisme penyusunan Perubahan APBD serta pada Tahun 2024 dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem yang pertanggungjawaban kegiatan hibahnya dilaksanakan pada Tahun 2025;
   b. Pengembalian sebesar Rp3.000.000,00 atas Dana BKK TA.2024 Kegiatan STT Yowana Jaya Santhi Perbekel Manggis.
   c. Pengembalian sebesar Rp291.816.861,00 atas Dana Hibah Politeknik Negeri Bali (PNB) TA.2024

d. Pengembalian sebesar Rp 6.000.000,00 atas Dana BKK Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Desa Pidpid
e. Setor atas Dana Sisa Anggaran Koni Kab.Karangasem sebesar Rp2.416.849,00.
f. Pengembalian sebesar Rp10.170.069.246,00 atas sisa Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Pemeilihan Bupati Karangasem Tahun 2024
g. Pengembalian sebesar Rp10.006.000,00 atas Sisa Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024
h. Pengembalian sebesar Rp31.342.626,00 Sisa Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024
i. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2025 lebih tinngi dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan realisasi Tahun 2024 disebabkan karena adanya reklasifikasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Penyusunan APBD 2025.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Belanja Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	1.581.693.285.139,00	1.432.566.228.412,11	90,57	1.358.638.489.124,28
BELANJA MODAL	129.896.466.600,00	120.520.176.393,98	92,78	264.862.753.970,76
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	1.073.840.000,00	42,95	0,00
BELANJA TRANSFER	238.314.731.113,00	238.305.154.469,00	100,00	258.394.466.825,00
Jumlah	**1.952.404.482.852,00**	**1.792.465.399.275,09**	**91,81**	**1.881.895.709.920,04**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	954.066.995.385,00	867.684.627.061,42	90,95	778.402.111.503,13
Belanja Barang dan Jasa	522.220.452.454,00	461.598.712.878,69	88,39	502.971.996.015,52
Belanja Hibah	102.210.837.300,00	100.252.888.472,00	98,08	65.384.381.605,63
Belanja Bantuan Sosial	3.195.000.000,00	3.030.000.000,00	94,84	11.880.000.000,00
Jumlah	**1.581.693.285.139,00**	**1.432.566.228.412,11**	**90,57**	**1.358.638.489.124,28**

Penjelasan:

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Gambar 5.2 Komposisi Belanja Operasi Berdasarkan Klasifikasinya



Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 3.***

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	560.882.190.079,72	507.877.716.833,00	90,55	445.239.135.407,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	312.856.930.090,28	284.883.991.199,42	91,06	113.960.473.110,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	144.201.638.189,13
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.406.487.534,00	32.413.729.684,00	94,21	31.618.263.224,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.808.311.969,00	1.013.482.683,00	36,09	1.031.964.235,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.131.994.000,00	959.200.000,00	84,74	848.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	41.981.081.712,00	40.536.506.662,00	96,56	41.502.037.338,00
Jumlah	**954.066.995.385,00**	**867.684.627.061,42**	**90,95**	**778.402.111.503,13**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan tahun 2025 disebabkan adanya ASN yang pensiun sebanyak 224 orang, meninggal sebanyak 17 orang dan pindah tugas ke Pemerintah Daerah lain dan Provinsi sebanyak 17 orang serta realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024 karena adanya pengangkatan PPPK yang efektif berlaku di bulan Juli dan Oktober akan tetapi sudah dianggarkan dari bulan Juni, serta pengangkatan CPNS sejumlah 105 orang dari 172 formasi.;

b. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan tahun 2025 disebabkan adanya ASN yang pensiun serta realisasi tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024 karena adanya pengangkatan PPPK yang efektif berlaku di tengah tahun anggaran sehingga Belanja Gaji Pokok ASN tidak sepenuhnya terserap;

c. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN lebih rendah dari anggaran tahun 2025 serta dibandingkan realisasi tahun 2024 disebabkan adanya perubahan nomenklatur kodefikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN beralih menjadi Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

d. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD lebih rendah dari anggaran tahun 2025 dipengaruhi karena tidak terbentuknya pansus dan karena tidak ada anggota DPRD yang Pergantian Antar Waktu (PAW);

e. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan dikarenakan Tunjangan Kepala Daerah sudah dibebankan kepada pasangannya selaku ASN. Serta sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap bulannya dibayarkan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

f. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan namun lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024 disebabkan belanja operasional pimpinan DPRD serta KDH/WKDH bersifat fluktuatif sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Belanja operasional KDH/WKDH berupa pemberian biaya tunjangan operasional Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan surat, proposal, telaah staf dan atau perintah tertulis dari Bupati/Wakil Bupati yang pemberiaanya sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2025; dan

g. Realisasi Belanja Pegawai BLUD lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan tahun 2025 serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan realisasi belanja dipengaruhi pendapatan BLUD.

2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 4.***

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	93.450.593.740,00	71.381.343.488,20	76,38	80.579.017.343,50
Belanja Jasa	208.898.743.100,00	182.438.071.161,73	87,33	198.125.346.576,75
Belanja Pemeliharaan	32.403.913.954,00	29.728.155.680,98	91,74	35.754.261.443,51
Belanja Perjalanan Dinas	29.287.652.861,00	21.822.347.792,00	74,51	31.340.268.198,65
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.457.839.170,00	14.797.695.000,00	95,73	15.708.582.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	61.263.105.305,20
Belanja Barang dan Jasa BOSP	58.069.023.483,00	57.754.240.046,18	99,46	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.206.478.000,00	3.760.860.214,00	89,41	4.083.435.926,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.446.208.146,00	79.915.999.495,60	99,35	76.117.979.221,91
Jumlah	**522.220.452.454,00**	**461.598.712.878,69**	**88,40**	**502.971.996.015,52**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Barang TA 2025 lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan dan lebih rendah dari realisasi TA 2024 dikarenakan Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 20305 lebih tinggi daripada e-katalog, dan adanya Surat Edaran Bupati Karangasem Nomor 00.1.3.5/1451/Perben/BPKAD/SETDA Tentang Penegasan Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas Bermotor Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Serta belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan pada SKPD Sekretariat DPRD tidak terserap dengan optimal dikarenakan masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses jumlahnya lebih sedikit dari perencanaan untuk setiap lokus reses;
   b. Realisasi Belanja Jasa TA 2025 lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan dan juga lebih rendah dari realisasi TA 2024 disebabkan Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, dan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud terealisasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah yang dilakukan pembayarannya sesuai tagihan yang telah ditetapkan;
   c. Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024 disebabkan adanya penerapan efisiensi efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan berupa penawaran negosiasi harga kepada penyedia pada belanja pemeliharaan tanah lapangan olahraga, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dan belanja pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
   d. Realisasi Perjalanan Dinas TA 2025 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan realisasi TA 2024 disebabkan efisiensi kegiatan serta

perjalanan dinas yang dilakukan selektif sesuai tujuan dan hasil Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

e. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dan juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2024 disebabkan realisasi pemberian hadiah dan penghargaan hanya dapat diberikan jika telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS tidak memiliki anggaran dan realisasi pada TA 2025 dikarenakan mengalami perubahan nomenklatur kodefikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

g. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 serta lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan adanya pengurangan jumlah pagu anggaran pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Pagu anggaran Tahun 2024 sejalan dengan berkurangnya transfer dana BOSP sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

h. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas TA 2025 lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dikarenakan kurang adanya penyedia yang tersedia untuk lokasi wilayah yang terpencar dan juga terpencil serta data sasaran yang dipakai untuk riset kesehatan dasar masih menggunakan data tahun 2013; dan

i. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan tahun 2025 disebabkan adanya utang belanja barang kepada pihak ketiga serta adanya efisiensi anggaran dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024 karena peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 5***

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.227.232.250,00	7.594.542.021,00	92,31	47.242.835.750,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	86.529.010.050,00	85.248.275.656,00	98,52	11.563.476.225,64
Belanja Hibah Dana BOS	939.880.000,00	935.845.481,00	99,57	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.685.000,00	1.464.685.000,00	100,00	1.421.608.749,99
Belanja Hibah Dana BOSP	5.050.030.000,00	5.009.540.314,00	99,20	5.156.460.880,00
Jumlah	**102.210.837.300,00**	**100.252.888.472,00**	**98,08**	**65.384.381.605,63**

Penjelasan

1. Hibah Kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:
   a. Kepolisian Daerah Bali yang didasarkan pada Keputusan Bupati Karangasem 155/HK/2025 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kepolisian Daerah Bali Berupa Bangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Kepolisian Daerah Bali Tahun 2025 sebesar Rp4.875.583.000,00;
   b. Kepolisian Resort Karangasem Keputusan Bupati Karangasem Nomor 446/HK/2025 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kepolisian Resor Karangasem sebesar Rp1.480.446.000,00.;
   c. I Ketut Manik atas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non berusaha Nomor 01/PKKPR-NON BERUSAHA/DPMPTSP/2026 sebesar Rp358.000,00;
   d. I Wayan Parwata atas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha Nomor 02/PKKPR-NON BERUSAHA/DPMPTSP/2026 sebesar Rp360.000,00;
   e. Politeknik Negeri Bali yang didasarkan pada Keputusan Bupati Karangasem 21/HK/2025 tentang Pemberian Hibah yang difasilitasi Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebesar Rp950.000.000,00 dan ada pengembalian sebesar Rp64.288.229,00
   f. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Karangasem yang didasarkan pada Keputusan Bupati Karangasem Nomor 141/HK/2025 tentang Pemberian Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Karangasem Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp250.000.000,00; dan
   g. Kejaksaan Negeri yang didasarkan pada Keputusan Bupati Karangasem Nomor 606/HK/2024 tentang Pemberian Hibah berupa Bangunan Pos Komando Kepada Kejaksaan Negeri Karangasem di Pelabuhan Padangbai Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebesar Rp102.083.250,00.
2. Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.32 Rincian Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Nilai
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	46.854.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.367.134.626,00

Uraian	Nilai
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.647.141.030,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	380.000.000,00
Jumlah	**85.248.275.656,00**

3. Hibah Dana BOS di Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.33 Rincian Hibah Dana BOS

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	453.680.000,00	451.309.400,00	99,48	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	486.200.000,00	484.536.081,00	99,66	0,00
Jumlah	**939.880.000,00**	**935.845.481,00**	**99,57**	**0,00**

Penjelasan

a. Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian Hibah kepada:
   1) Satuan Pendidikan Dasar berdasarkan data *cut off* Dapodik Sekolah yang tervalidasi dan langsung di transfer ke masing-masing Sekolah oleh Pemerintah Pusat; dan
   2) Satuan Pendidikan Menengah Pertama berdasarkan data *cut off* Dapodik Sekolah yang tervalidasi dan langsung di transfer ke masing-masing Sekolah oleh Pemerintah Pusat.

4. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 39/HK/2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memperoleh Suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Nilai
Partai Persatuan Indonesia	50.250.000,00
Partai Golongan Karya	254.800.000,00
Partai Nasional Demokrat	206.975.000,00
Partai Demokrat	169.380.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	250.820.000,00
Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	497.875.000,00
Partai Hati Nurani Rakyat	34.585.000,00
Jumlah	**1.464.685.000,00**

5. Hibah Dana BOSP di Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.35 Rincian Hibah Dana BOSP

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.655.410.000,00	3.615.144.874,00	98,90	3.658.585.880,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.394.620.000,00	1.394.395.440,00	99,98	1.497.875.000,00
Jumlah	**5.050.030.000,00**	**5.009.540.314,00**	**99,20**	**5.156.460.880,00**

Penjelasan
Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian Hibah kepada Satuan Pendidikan PAUD dan Satuan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data *cut off* Dapodik sekolah yang tervalidasi dan langsung di transfer ke masing-masing sekolah oleh Pemerintah Pusat.

6. Rincian belanja hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 6*** dan ***Lampiran 7.***

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.195.000.000,00	3.030.000.000,00	94,84	11.880.000.000,00
Jumlah	**3.195.000.000,00**	**3.030.000.000,00**	**94,84**	**11.880.000.000,00**

Penjelasan:

1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga terdiri dari:

Tabel 5.37 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.415.000.000,00	2.370.000.000,00	98,14	11.880.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	780.000.000,00	660.000.000,00	84,62	0,00
Jumlah	**3.195.000.000,00**	**3.030.000.000,00**	**94,84**	**11.880.000.000,00**

2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem berupa uang bantuan bedah rumah sebanyak 158 rumah yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan nilai bantuan tiap rumahnya sebesar Rp15.000.000,00; dan
   b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem berupa bantuan barang sebanyak 22 rumah tidak layak huni yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan nilai bantuan tiap rumahnya sebesar Rp.30.000.000,00 dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
   c. Penurunan jumlah penerima manfaat dari target yang ditetapkan diawal dikarenakan adanya penerima manfaat yang menolak bantuan serta tidak lagi terpenuhinya syarat untuk menjadi penerima manfaat.
3. Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10.***

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38 Rincian Belanja Modal

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.133.444.158,00	58.439.288.240,00	92,56	83.390.069.715,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.922.360.570,00	22.650.253.698,83	90,88	62.569.671.412,76
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.145.081.780,00	38.314.593.413,15	97,88	117.717.493.843,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.274.409.133,00	1.096.394.042,00	48,21	409.169.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	121.170.959,00	19.647.000,00	16,21	776.350.000,00
Jumlah	**129.896.466.600,00**	**120.520.176.393,98**	**92,78**	**264.862.753.970,76**

Penjelasan:
Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 11.***

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.39 Rincian Belanja Modal Tanah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2025 dikarenakan masih dalam proses administrasi tahap pembelian sehingga belum dapat melakukan pembayaran atau pembelian tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	215.307.728,00	208.014.000,00	96,61	4.806.882.412,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan	7.066.720.000,00	6.625.695.503,00	93,76	16.514.125.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.438.000,00	10.851.000,00	66,01	50.160.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	8.100.000.000,00	8.095.252.200,00	99,94	5.304.650.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.542.655.581,00	6.664.495.819,00	88,36	9.810.455.726,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.510.224.666,00	10.987.868.626,00	95,46	3.512.542.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	218.244.962,00	161.512.658,00	74,01	11.487.509.880,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	2.525.757.800,00	1.812.577.826,00	71,76	3.276.430.000,00
Belanja Modal Komputer	2.678.964.187,00	2.204.136.219,00	82,28	5.586.484.350,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	117.450.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	293.646.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	387.561.903,00	375.448.460,00	96,87	12.325.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	348.552.996,00	190.864.500,00	54,76	519.900.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	15.471.296.761,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	16.342.869.620,00	16.321.389.020,00	99,87	53.060.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.180.146.715,00	4.781.182.409,00	77,36	6.573.152.586,00
Jumlah	**63.133.444.158,00**	**58.439.288.240,00**	**92,56**	**83.390.069.715,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Alat Besar lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat pengadaan belanja Modal *Excavator*, dan Belanja Modal *Loader* serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
   b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena tidak adanya pengadaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dan Belanja Modal Angkutan Barang pada tahun 2025 serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
   c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena tidak adanya pengadaan Belanja Modal Perkakas Bengkel *Service*, Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding, dan Belanja Modal Alat Ukur Lainnya pada tahun 2025 serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
   d. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 namun lebih tinggi realisasinya dari tahun 2024 disebabkan karena besarnya pengadaan Belanja Modal Alat Pengolahan pada tahun 2025 serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
   e. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena tidak adanya pengadaan Belanja Modal Alat Penyimpan

Perlengkapan Kantor pada tahun 2025 serta adanya efisiensi belanja modal alat rumah tangga berupa Belanja Modal Mebel dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) di tahun 2025;

f. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan adanya pengadaan Belanja Modal Alat Studio Lainnya pada tahun 2025 serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
g. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan tidak adanya pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah, Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic, dan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya pada Tahun 2025 serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
h. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan tidak adanya pengadaan Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi, dan Belanja Modal System/Power Supply serta adanya efisiensi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya tahun 2025 yang sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
i. Realisasi Belanja Modal Komputer lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan adanya efisiensi Belanja Modal personal Komputer, Belanja Modal Peralatan Personal Komputer dan tidak adanya pengadaan Belanja Modal Peralatan Jaringan pada tahun 2025 serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja tidak memiliki anggaran dan realisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah;
k. Realisasi Belanja Modal Alat Peraga tidak memiliki anggaran dan realisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah;
l. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan adanya pengadaan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya pada Tahun 2025 serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
m. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan tidak adanya pengadaan Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Tahun 2025 serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
n. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS tidak memiliki anggaran dan realisasi karena mengalami perubahan nomenklatur kodefikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
o. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan adanya pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan

Reguler pada tahun 2025 serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah; dan

p. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan sesuai dengan kebutuhan pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas.

2. Rincian saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 12.***

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	16.873.860.570,00	15.244.815.130,77	90,35	52.123.868.963,24
Belanja Modal Monumen	196.000.000,00	192.508.862,44	98,22	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.072.500.000,00	6.444.901.698,85	91,13	9.508.733.101,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	780.000.000,00	768.028.006,77	98,47	937.069.348,00
Jumlah	**24.922.360.570,00**	**22.650.253.698,83**	**90,88**	**62.569.671.412,76**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 karena secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah pada Tahun 2025. Untuk tahun 2024 terdapat alokasi BKK dari Provinsi Bali untuk pengadaan Bangunan Gedung;
   b. Realisasi Belanja Modal Monumen lebih rendah dari anggaran tahun 2025 yang ditetapkan karena secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Tidak ada realisasi Belanja Modal Monumen tahun 2024;
   c. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 karena secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah pada Tahun 2025 dan ketersediaan anggaran; dan
   d. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan

secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sesuai dengan kebutuhan pengadaan Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dan ketersediaan anggaran.

2. Rincian saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 13.***

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	32.282.048.480,00	31.767.134.102,00	98,40	104.302.974.518,00
Belanja Modal Bangunan Air	1.468.600.800,00	1.459.806.190,00	99,40	5.916.643.100,00
Belanja Modal Instalasi	3.440.000.000,00	3.361.174.154,15	97,71	186.833.680,00
Belanja Modal Jaringan	1.954.432.500,00	1.726.478.967,00	88,34	7.311.042.545,00
Jumlah	**39.145.081.780,00**	**38.314.593.413,15**	**97,88**	**117.717.493.843,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah pada Tahun 2025 dan ketersediaan anggaran;
   b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan karena secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah pada Tahun 2025 dan ketersediaan anggaran;
   c. Realisasi Belanja Modal Instalasi lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 karena secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah pada Tahun 2025 dan ketersediaan anggaran; dan
   d. Realisasi Belanja Modal Jaringan Air lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 karena secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah pada Tahun 2025 dan ketersediaan anggaran;

2. Rincian saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 14***.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.162.597.701,00	0,00	0,00	31.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000.000,00	95.516.610,00	95,52	0,00
Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00
Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	154.169.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.011.811.432,00	1.000.877.432,00	98,92	0,00
Jumlah	**2.274.409.133,00**	**1.096.394.042,00**	**48,21**	**409.169.000,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan memiliki realisasi lebih rendah dari anggaran serta dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 karena Calon Penyedia tidak hadir saat dipanggil untuk proses klarifikasi, sehingga untuk melanjutkan ketahap berikutnya tidak cukup waktu (proses pengadaan menggunakan sistem mini kompetisi dan anggarannya di perubahan);
   b. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 karena secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender/pengadaan di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Tidak ada realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2024;
   c. Realisasi Belanja Modal Hewan tidak memiliki anggaran dan realisasi Tahun 2025 karena menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah;
   d. Realisasi Belanja Modal Biota Perairan tidak memiliki anggaran dan realisasi Tahun 2025 karena menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah;
   e. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS tidak memiliki anggaran dan realisasi karena mengalami perubahan nomenklatur kodefikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

f. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 karena secara umum disebabkan nilai penawaran untuk tender/pengadaan di bawah pagu anggaran sehingga ada efisiensi anggaran serta sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Tahun 2024 dianggarkan pada rekening Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

2. Rincian saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 15***.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	121.170.959,00	19.647.000,00	16,21	776.350.000,00
Jumlah	**121.170.959,00**	**19.647.000,00**	**16,22**	**776.350.000,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   Realisasi belanja modal Aset Lainnya tahun 2025 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan menghindari risiko yang muncul akibat dari adanya tenggat waktu, kualitas, dan administrasi atas penggunaan software.
2. Rincian saldo Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 16***.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.45 Rincian Belanja Tak Terduga

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	1.073.840.000,00	42,95	0,00
Jumlah	**2.500.000.000,00**	**1.073.840.000,00**	**42,95**	**0,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab rendahnya capaian realisasi bandingkan anggaran pada Belanja Tak Terduga di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Tidak Terduga lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan disebabkan karena Belanja Tidak Terduga bertujuan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mendesak dan tidak terduga, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dalam APBD sehingga Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 direalisasikan berdasarkan kejadian/peristiwa yang masuk kategori tanggap darurat atau luar biasa seperti belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk korban bencana / musibah di Kabupaten Karangasem serta adanya permohonan pengembalian kelebihan penerimaan tahun sebelumnya dari pihak lain, namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dikarenakan tahun 2024 tidak ada realisasi Belanja Tidak Terduga; dan
   b. Pengeluaran Belanja Tidak Terduga didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Belanja Transfer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil	48.220.252.738,00	48.210.676.094,00	99,98	39.170.192.200,00
Belanja Bantuan Keuangan	190.094.478.375,00	190.094.478.375,00	100,00	219.224.274.625,00
Jumlah	**238.314.731.113,00**	**238.305.154.469,00**	**100,00**	**258.394.466.825,00**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Belanja Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	46.879.267.166,00	46.879.267.166,00	100,00	38.284.766.176,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.340.985.572,00	1.331.408.928,00	99,29	885.426.024,00
Jumlah	**48.220.252.738,00**	**48.210.676.094,00**	**99,98**	**39.170.192.200,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2025 sudah sesuai dengan anggaran dan realisasi tahun 2025 namun lebih tinggi dari Tahun 2024 disebabkan karena penerimaan Pajak Daerah lebih tinggi pada tahun 2025; dan
   b. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa lebih rendah dibandingkan anggaran yang ditetapkan tahun 2025 dikarenakan proses perhitungan penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Oktober masih mengacu pada pagu APBD induk, sehingga terdapat kekurangan penyaluran setelah disesuaikan dengan pagu APBD perubahan. Selisih realisasi atas anggaran yang ditetapkan menjadi kewajiban pemerintah daerah kepada di perubahan APBD 2026, namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 disebabkan pendapatan retribusi daerah meningkat pada tahun 2025.
2. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa disalurkan kepada 75 desa. yang didasarkan pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Serta Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
3. Rincian desa penerima Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi dapat dilihat pada ***Lampiran 17*** dan ***Lampiran 18.***

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	190.094.478.375,00	190.094.478.375,00	100,00	219.224.274.625,00
Jumlah	**190.094.478.375,00**	**190.094.478.375,00**	**100,00**	**219.224.274.625,00**

Penjelasan:

1. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri atas:

Tabel 5.49 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	101.242.323.375,00	101.242.323.375,00	100,00	100.101.522.625,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	88.852.155.000,00	88.852.155.000,00	100,00	119.122.752.000,00
Jumlah	**190.094.478.375,00**	**190.094.478.375,00**	**100,00**	**219.224.274.625,00**

2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sudah tercapai sesuai anggaran yang ditetapkan tahun 2025 dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; dan
   b. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sudah tercapai sesuai anggaran yang ditetapkan tahun 2025 namun lebih rendah realisasinya dibandingkan pada Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
3. Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan didasarkan pada:
   a. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025; dan
   b. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 86/HK/2025 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Subak dan Subak Abian di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025.
4. Rincian desa penerima Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus serta Ringkasan Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dapat dilihat pada ***Lampiran 19, Lampiran 20, Lampiran 21, Lampiran 22,*** dan ***Lampiran 23.***

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.50 Rincian Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	146.086.468.729,00	146.086.468.729,71	100,00	188.595.737.290,03
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
Jumlah	**142.086.468.729,00**	**142.086.468.729,71**	**100,00**	**187.095.737.290,03**

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	146.086.468.729,00	146.086.468.729,71	100,00	177.704.937.290,03
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.890.800.000,00
Jumlah	**146.086.468.729,00**	**146.086.468.729,71**	**100,00**	**188.595.737.290,03**

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.52 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	101.737.176.629,03	101.737.176.629,74	100,00	47.412.818.425,01
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	7.395.492.000,00	7.395.492.000,00	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	63.869.609,88	63.869.609,88	100,00	25.945.682,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	450.990,00
Penghematan Belanja	36.889.930.490,09	36.889.930.490,09	100,00	130.265.722.193,02
Jumlah	**146.086.468.729,00**	**146.086.468.729,71**	**100,00**	**177.704.937.290,03**

Penjelasan:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pencairan Dana Cadangan TA 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Pencairan Dana Cadangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.890.800.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.890.800.000,00**

Penjelasan:
Pencairan Dana Cadangan tidak dianggarkan dan tidak memiliki realisasi Tahun 2025. Terdapat realisasi Dana Cadangan tahun 2024 atas seluruh saldo Dana Cadangan disebabkan adanya penarikan sisa dana cadangan yang diperuntukkan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
Jumlah	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**100,00**	**1.500.000.000,00**

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Penyertaan Modal Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				
PT BPD Bali	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
PT Jamkrida Bali Mandara	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	500.000.000,00
Jumlah	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**100,00**	**1.500.000.000,00**

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2025 telah melakukan penyertaan modal pada:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sebanyak 3.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.000.000,00 sehingga porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 menjadi 1,62% dari sebelumnya 1,81%. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp46.550.000.000,00 Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali; dan
2. PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebanyak 1.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.000.000,00 sehingga menambah porsi kepemilikan menjadi 1,76% dari sebelumnya 1,55%. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp4.075.000.000,00 Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroran Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.56 Rincian Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Daerah				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	494.262.674.756,00	487.605.462.281,40	98,65	432.504.250.383,84
PENDAPATAN TRANSFER	1.303.598.713.991,00	1.283.346.700.326,23	98,45	1.406.411.525.953,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.456.625.376,00	44.897.715.495,00	360,43	1.970.665.022,88
Belanja Daerah				
BELANJA OPERASI	1.581.693.285.139,00	1.432.566.228.412,11	90,57	1.358.638.489.124,28
BELANJA MODAL	129.896.466.600,00	120.520.176.393,98	92,78	264.862.753.970,76
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	1.073.840.000,00	42,95	0,00
Belanja Transfer				
Belanja Bagi Hasil	48.220.252.738,00	48.210.676.094,00	99,98	39.170.192.200,00
Belanja Bantuan Keuangan	190.094.478.375,00	190.094.478.375,00	100,00	219.224.274.625,00
Pembiayaan Daerah				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	146.086.468.729,00	146.086.468.729,71	100,00	188.595.737.290,03
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**165.470.947.557,25**	**0,00**	**146.086.468.729,71**

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2025 memiliki SiLPA sebesar Rp165.470.947.557,25 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Rincian SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat

Uraian	Nilai
➢ **Dana SiLPA Terikat**	**22.726.474.145,15**
✓ **Kas di BLUD**	**8.396.264.840,11**
✓ **Kas Dana BOSP**	**117.896.004,14**
✓ **Kas Dana Kapitasi pada FKTP (RS Pratama)**	**218.883.627,00**
✓ **Kas BOK Puskesmas**	**462.654.088,00**
✓ **Dana Alokasi Umum (DAU)Tahun 2024 yang terdiri dari :**	
• DAU Penggajian Formasi PPPK	0,00
• DAU Pendanaan Kelurahan	0,00
• DAU Bidang Pendidikan	407.305.326,00
• DAU Bidang Kesehatan	285.933.589,00
• DAU Bidang Pekerjaan Umum	62.826.044,00
✓ **Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 yang terdiri dari :**	
• DAU Penggajian Formasi PPPK	0,00
• DAU Pendanaan Kelurahan	3.877.743,00
• DAU Bidang Pendidikan	5.060.799.774,00
• DAU Bidang Kesehatan	1.636.622.998,00
• DAU Bidang Pekerjaan Umum	
✓ **DAK Fisik Tahun 2024 yang terdiri dari:**	
• Perpustakaan	2.418.000,00
✓ **Sisa DAK Fisik sd Tahun 2023 yang terdiri dari:**	

Uraian	Nilai
• Bidang Pendidikan	250.000.000,00
• Bidang Kesehatan	886.242,00
✓ **DAK Non-Fisik 2025 yang terdiri dari:**	
• DAK NF Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas	506.890.521,00
• DAK NF Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	465.807.135,00
• DAK NF Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan	117.757.175,00
• DAK NF Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	203.350.654,00
• DAK NF Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	133.291.602,00
• DAK NF Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.175.000,00
✓ **Utang Jangka Pendek Lainnya**	
• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	374.450.930,00
✓ **Utang Belanja Pegawai Tahun 2025**	**4.012.382.852,90**
• • Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	36.106.605,00
• • Dinas Kesehatan	385.600.176,00
• • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	42.833.750,00
• • Dinas Perhubungan	25.813.600,00
• • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	100.261.725,00
• • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	3.139.798.037,90
• • Dinas Ketenagakerjaan	18.592.000,00
• • Bagian Umum	236.959.288,00
• • Kecamatan Bebandem	3.118.286,00
• • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	505.000,00
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.882.019,00
• Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	9.912.366,00
➢ **Dana SiLPA Non-Terikat**	**-22.726.474.145,15**
✓ Pelampauan PAD	
✓ Efiensi Belanja Hibah	1.957.948.828,00
✓ Efisiensi Belanja Bantuan Sosial	165.000.000,00
✓ Efisiensi Belanja Tak Terduga	1.426.160.000,00
✓ Lain-Lain	-26.275.582.973,15
Jumlah	**0,00**

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Rincian keberadaan SiLPA

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	156.199.655.553,00	136.294.499.385,07
Kas di Bendahara Penerimaan	75.593.445,00	146.509.464,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	8.396.264.840,11	7.825.721.638,32
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	218.883.627,00	237.228.895,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	117.896.004,14	234.897.083,32
Kas Dana BOK Puskesmas	462.654.088,00	1.347.612.264,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah	**165.470.947.557,25**	**146.086.468.729,71**

3. Jumlah SILPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada Poin 5.5.9 dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada Poin 5.2.3 dan Poin 5.2.5

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Karangasem (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Angaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.59 Rincian Saldo Angaran Lebih Awal

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	136.294.499.385,07	160.859.600.916,45
Kas di Bendahara Penerimaan	146.509.464,00	186.213.706,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.825.721.638,32	13.607.809.769,06
Kas Dana BOS	237.228.895,00	143.665.757,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	234.897.083,32	244.602.583,50
Kas Dana BOK Puskesmas	1.347.612.264,00	2.663.236.254,00
Jumlah	**146.086.468.729,71**	**177.705.128.986,01**

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.60 Rincian SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(146.086.468.729,71)	(177.704.937.290,03)

Saldo tersebut adalah SILPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2025 dan 2024. Untuk saldo SILPA TA 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SILPA dalam LRA TA 2024 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SILPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2024 sebagaimana diungkapkan dalam catatan ***poin*** 5.2.4 di bawah**.**

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.61 Rincian Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	165.470.947.557,25	146.086.468.729,71

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2025. Saldo tersebut sama dengan jumlah SILPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.4***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.2.5***.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.62 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Kesalahan Pengakuan kas BOS SD Negeri Tahun 2023	0,00	(191.695,98)

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.63 Rincian Saldo Anggaran Lebih

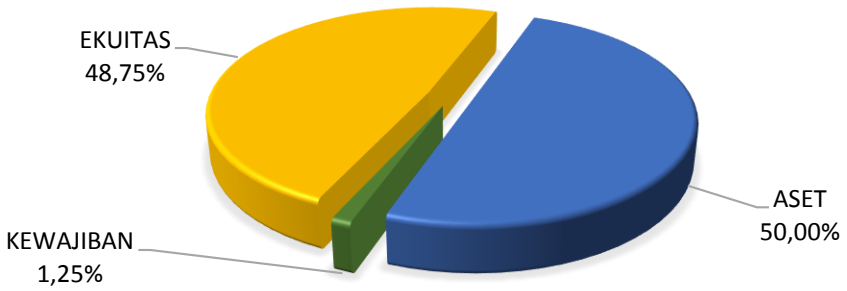
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	156.199.655.553,00	136.294.499.385,07
Kas di Bendahara Penerimaan	75.593.445,00	146.509.464,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	8.396.264.840,11	7.825.721.638,32
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	218.883.627,00	237.228.895,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	117.896.004,14	234.897.083,32
Kas Dana BOK Puskesmas	462.654.088,00	1.347.612.264,00
Jumlah	**165.470.947.557,25**	**146.086.468.729,71**

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.4***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.2.3*** di atas.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk per tanggal 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.3 Komposisi Neraca Berdasarkan Klasifikasinya



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Tabel 5.64 Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	274.823.348.321,38	265.464.735.524,89	9.358.612.796,49	3,53
Investasi Jangka Panjang	155.856.136.081,93	149.372.851.618,31	6.483.284.463,62	4,34
Aset Tetap	1.270.320.329.351,18	1.292.841.953.242,90	(22.521.623.891,72)	(1,74)
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	50.141.282.538,91	51.671.056.275,01	(1.529.773.736,10)	(2,96)
Properti Investasi	289.210.610,00	0,00	289.210.610,00	0,00
Jumlah	**1.751.430.306.903,40**	**1.759.350.596.661,11**	**(7.920.289.757,71)**	**(0,45)**

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	165.470.947.557,25	146.087.592.499,23	19.383.355.058,02	13,27
Piutang Pajak Daerah	110.539.649.726,60	100.774.911.820,60	9.764.737.906,00	9,69
Piutang Retribusi Daerah	12.518.487.904,00	11.198.849.127,00	1.319.638.777,00	11,78
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.513.525.979,13	4.331.049.123,13	182.476.856,00	4,21
Piutang Transfer Antar Daerah	4.132.190.342,00	32.078.368.624,00	(27.946.178.282,00)	(87,12)
Penyisihan Piutang	(65.958.699.955,15)	(61.430.163.630,47)	(4.528.536.324,68)	7,37
Beban Dibayar Dimuka	172.278.609,00	188.464.667,47	(16.186.058,47)	(8,59)
Persediaan	43.434.968.158,55	32.235.663.293,93	11.199.304.864,62	34,74
Jumlah	**274.823.348.321,38**	**265.464.735.524,89**	**9.358.612.796,49**	**3,53**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai

kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Kas dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	156.199.655.553,00	136.294.499.385,07	19.905.156.167,93	14,60
Kas di Bendahara Penerimaan	75.593.445,00	146.509.464,00	(70.916.019,00)	(48,40)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	8.396.264.840,11	7.825.721.638,32	570.543.201,79	7,29
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	218.883.627,00	237.228.895,00	(18.345.268,00)	(7,73)
Kas Lainnya	0,00	1.123.769,52	(1.123.769,52)	(100,00)
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	117.896.004,14	234.897.083,32	(117.001.079,18)	(49,81)
Kas Dana BOK Puskesmas	462.654.088,00	1.347.612.264,00	(884.958.176,00)	(65,67)
Jumlah	**165.470.947.557,25**	**146.087.592.499,23**	**19.383.355.058,02**	**13,27**

Penjelasan:

1. Kas di Kas Daerah

   Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada Bank BPD Bali Cabang Amlapura dengan nomor rekening yaitu 022.01.00.00000-0. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak BPD Bali Cabang Amlapura yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SILPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.4***.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

   Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp75.593.445,00. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2025. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

   a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BPKAD Per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.463.445,00 merupakan penerimaan pajak daerah tahun 2025 yang baru masuk RKUD Kabupaten Karangasem pada tanggal 2 Januari 2026 karena PT Finnet Indonesia baru mengirimkan dana transaksi tersebut pada H+1 hari kerja (pada tanggal 2 Januari 2026). Hai ini sesuai dengan pemberitahuan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Surat Nomor B-15951/KRS/DJA/2025 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Batas Waktu Pelimpahan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa "terkait pelimpahan pajak PBB via Finnet, Finnet-BCA, dan via Gopay, hanya dapat dilimpahkan pada H+1 dan belum bisa dilakukan pelimpahan pada H+0 dikarenakan dana atas transaksi tersebut dikirim H+1 hari kerja (tanggal 2 Januari 2026) yang dikirim dari PT Finnet Indonesia".

   b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Pratama Per 31 Desember 2025 sebesar Rp130.000,00 merupakan pendapatan lainnya yang sejenis dari UPTD Rumah Sakit Pratama yang diterima pada tanggal 31 Desember 2025 namun baru disetor ke RKUD Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 Januari 2026 karena Bendaraha Penerimaan lepas jaga pada tanggal 2 Januari 2026. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.67 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Kas di Bendahara Penerimaan UPTD RS Pratama (Dinas Kesehatan)	130.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan BPKAD	75.463.445,00

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Jumlah	**75.593.445,00**

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025.

4. Kas di BLUD

Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp8.396.264.840,11. Pada tahun 2025 sebanyak 12 (dua belas) Puskesmas dan 1 (satu) RSUD sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan BLUD. RSUD menggunakan 2 (dua) rekening dalam proses transaksi penerimaan. Untuk Puskesmas masih menggunakan 1 (satu) rekening dalam penerimaan pendapatan BLUD. Rincian saldo Kas BLUD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.68 Rincian Kas BLUD

Uraian	Bank	No.Rekening	Saldo Bank	Saldo Tunai	Item Rekonsiliasi	Jumlah
RSUD Karangasem	BPD	022.01.00.00473-1	1.809.791.682,18	4.141.900,00	0,00	2.431.310.778,79
	Mandiri	145-00-7555777-3	617.377.196,61	0,00	0,00	
Puskesmas Karangasem I	BPD	022.01.05.00224-9	574.875.688,35	285.000,00	0,00	575.160.688,35
Puskesmas Karangasem II	BPD	022.01.05.00228-7	385.052.231,47	0,00	0,00	385.052.231,47
Puskesmas Manggis I	BPD	038.01.05.00006-0	466.566.950,50	0,00	0,00	466.566.950,50
Puskesmas Manggis II	BPD	038.01.05.00007-3	115.355.885,62	0,00	0,00	115.355.885,62
Puskesmas Abang I	BPD	022.01.05.00223-7	757.862.725,38	0,00	(174.076,00)	757.688.649,38
Puskesmas Abang II	BPD	022.01.05.00229-9	378.741.457,36	240.000,00	0,00	378.981.457,36
Puskesmas Kubu I	BPD	022.01.05.00553-8	694.214.338,37	180.000,00	0,00	694.394.338,37
Puskesmas Kubu II	BPD	022.01.05.00592-5	527.891.483,55	400.000,00	0,00	528.291.483,55
Puskesmas Bebandem	BPD	022.01.05.00227-5	669.470.039,11	0,00	0,00	669.470.039,11
Puskesmas Selat	BPD	022.01.05.00226-3	492.549.919,20	0,00	0,00	492.549.919,20
Puskesmas Rendang	BPD	051.01.05.00004-4	378.100.062,36	0,00	0,00	378.100.062,36
Puskesmas Sidemen	BPD	022.01.05.00225-0	509.155.856,05	0,00	14.186.500,00	523.342.356,05
Jumlah			**8.377.005.516,11**	**5.246.900,00**	**14.012.424,00**	**8.396.264.840,11**

Masing-masing saldo Kas Tunai dan Item Rekonsiliasi Tahun 2025 telah disetor ke rekening Bank dan ditransfer ke Pihak Ketiga yaitu:

b. RSUD Karangasem sebesar Rp4.141.900,00 disetor pada tanggal 2 Januari 2026
c. Puskesmas Karangasem I sebesar Rp285.000,00 disetor pada tanggal 2 Januari 2026;
d. Puskesmas Abang II sebesar Rp240.000,00 disetor pada tanggal 2 Januari 2026;
e. Puskesmas Kubu I sebesar Rp180.000,00 disetor pada tanggal 2 Januari 2026;
f. Puskesmas Kubu II sebesar Rp400.000,00 disetor pada tanggal 2 Januari 2026 ;
g. Puskesmas Abang I sebesar Rp174.076,00 ditransfer ke Pihak Ketiga (Rekanan) pada tanggal 20 Januari 2026; dan
h. Puskesmas Sidemen sebesar Rp14.186.500,00 disetor pada tanggal 13 Februari 2026.

Rincian saldo Kas di BLUD dapat dilihat pada ***Lampiran 24***.

5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 sebesar Rp218.883.627,00. Yang masih menerapkan kapitasi FKTP adalah UPTD RS Pratama Kubu. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
UPTD RS Pratama Kubu	218.883.627,00	237.228.895,00	(18.345.268,00)	(7,73)

Penjelasan:
Sebab-sebab utama penurunan pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP disebabkan karena adanya defisit antara pendapatan dibandingkan dengan belanja dimana Pendapatan FKTP sebesar Rp1.893.682.453,00 lebih rendah jika dibandingkan dengan Belanja Operasional FKTP yang sebesar Rp1.912.027.721,00 pada RS Pratama. Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada ***Lampiran 25***.

6. Kas Lainnya

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 karena seluruh saldo Kas Lainnya telah digunakan untuk membayar Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp87,52 dan Utang Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp1.123.682,00.

7. Setara Kas

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki saldo Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025.

8. Kas Dana BOSP

Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp117.896.004,14 yang tersebar pada 400 sekolah negeri di seluruh Kabupaten Karangasem baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama, namun terjadi perbedaan sisa kas di Kas Dana BOSP dengan rekening koran senilai Rp498,94 pada 3 sekolah yakni :

a. Selisih saldo Kas BOSP pada SD Negeri 3 Bunutan sebesar Rp1,00 terjadi akibat kelebihan transfer dana oleh Bendahara kepada penyedia atas belanja ATK;
b. Selisih saldo Kas BOSP pada SD Negeri 3 Sibetan sebesar Rp500,00 terjadi akibat kelebihan transfer uang tunai ke Rekening BOS oleh Bendahara;
c. Selisih saldo Kas BOSP pada SD Negeri 3 Sangkan Gunung sebesar Rp0,06 merupakan kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara. Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada ***Lampiran 26***.

9. Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp462.654.088,00 sebagaimana disajikan pada Neraca Per tanggal 31 Desember 2025 (Audited) merupakan saldo Kas BOK Puskesmas per 30 Desember 2025 sesuai dengan Surat dari Bank BNI Nomor INS1/6/ tanggal 2 Januari 2026 yang diantaranya menyatakan bahwa "Posisi saldo Giro BOK Puskesmas pada 31 Desember 2025 adalah *Ending Balance* (posisi saldo giro) per 31 Desember 2025 dikurangi dengan transaksi kredit sistem yang masuk ke rekening Giro BOK Puskesmas pada tanggal 31 Desember 2025". Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada ***Lampiran 27***.

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Tidak terdapat Investasi Jangka Pendek pada Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.3 Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang sebagai berikut:

Tabel 5.70 Rincian Piutang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Daerah	110.539.649.726,60	100.774.911.820,60	9.764.737.906,00	9,69
Piutang Retribusi Daerah	12.518.487.904,00	11.198.849.127,00	1.319.638.777,00	11,78
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.513.525.979,13	4.331.049.123,13	182.476.856,00	4,21

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Transfer Antar Daerah	4.132.190.342,00	32.078.368.624,00	(27.946.178.282,00)	(87,12)
Jumlah	**131.703.853.951,73**	**148.383.178.694,73**	**(16.679.324.743,00)**	**(11,24)**

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2025 menyajikan piutang dalam lembar muka laporan keuangan dan juga dalam penjelasan catatan atas laporan keuangan mengikuti struktur penyajian dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Rincian mutasi piutang dapat dilihat pada ***Lampiran 28, Lampiran 29*** dan ***Lampiran 30***; dan
3. Rincian klasifikasi umur atas piutang dapat dilihat pada ***Lampiran 31.***

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.71 Rincian Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Reklame	123.207.161,00	116.326.661,00	6.880.500,00	5,91
Piutang Pajak Air Tanah	162.423.880,00	150.659.352,00	11.764.528,00	7,81
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.039.005.966,00	37.302.564.598,00	4.736.441.368,00	12,70
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	62.071.535.385,00	59.701.896.152,00	2.369.639.233,00	3,97
Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.100.888.878,00	1.541.298.421,00	1.559.590.457,00	101,19
Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	2.352.430.238,94	1.732.672.285,94	619.757.953,00	35,77
Piutang PBJT-Jasa Parkir	34.004.100,00	0,00	34.004.100,00	0,00
Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	656.154.117,66	229.494.350,66	426.659.767,00	185,91
Jumlah	**110.539.649.726,60**	**100.774.911.820,60**	**9.764.737.906,00**	**9,69**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Reklame mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.880.500,00. Peningkatan tersebut dikarenakan koreksi penambahan saldo awal sejumlah Rp800,00 karena adanya perbedaan perhitungan pada sistem dan pembukuan, ketetapan tahun 2025 sebesar Rp331.957.200,00 dan baru dilakukan pembayaran tahun 2025 sebesar Rp325.077.500,00 dari SKPD yang telah diterbitkan pada tahun 2025 wajib pajak belum melaksanakan pembayaran, sedangkan piutang yang masih tersisa merupakan SKPD dari tahun-tahun sebelumnya yang sampai saat ini belum dilaksanakan pembayaran. Sisanya merupakan piutang dengan kategori macet yang merupakan piutang dari tahun 2008 sd 2019;
2. Piutang Pajak Air Tanah mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp11.764.528,00 dengan perhitungan penetapan tahun 2025 sebesar Rp1.344.545.480,00 dan total pembayaran tahun 2025 adalah sebesar Rp1.332.780.956,00 termasuk pembayaran sebelum ketetapan sebelum tahun 2025. Sebelumnya karena hanya piutang dalam kategori lancar yang mengalami penurunan dari tahun 2024 namun penagihan pajak air tanah tahun 2025 terus dilaksanakan walaupun masih ada beberapa wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran sepanjang tahun 2025 sesuai dengan SKPD yang telah ditetapkan;

3. Piutang Pajak MBLB pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.736.441.368,00 dengan perhitungan ketetapan tahun 2025 sebesar Rp89.843.273.900,00 namun pembayaran yang diterima sebesar Rp85.106.832.532,00 termasuk pembayaran ketetapan sebelum tahun 2025. Hal ini disebabkan karena adanya penerbitan SKPDKB tahun 2025 sebagai hasil dari pemeriksaan di tahun 2024 serta masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan pelunasan piutang pajak sesuai dengan SPTPD yang telah dilaporkan karena masih berharap adanya penghapusan sanksi denda serta ada beberapa yang menyatakan kendala operasional seperti kerusakan alat perusahaan sehingga menggunakan pajak daerah. Terdapat beberapa wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak di Tahun 2025;
4. Piutang Pajak PBB-P2 mengalami peningkatan piutang pajak daerah sebesar Rp2.369.639.233,00 dari tahun 2024, peninkatan piutang disebabkan ketetapan tahun 2025 sejumlah Rp9.490.230.751,00 sedangkan pembayaran tahun 2025 sebesar Rp7.120.591.518,00 temasuk pembayaran ketetapan sebelum tahun 2025. Pembayaran oleh masyarakat terkadang baru di lakukan ketika akan melaksanakan proses pengalihan hak;
5. Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman terjadi peningkatan sebesar Rp1.559.590.457,00 dari tahun 2024, peningkatan putang disebabkan ketetapan tahun 2025 sebesar Rp37.406.977.817,00 namun pembayrannya hanya sebesar Rp35.847.387.360,00 termasuk ketetapan sebelum tahun 2025, hal ini dikarenakan adanya penerbitan SKPDKB tahun 2025 sebagai hasil dari pemeriksaan di tahun 2024 belum dapat dilunasi pembayarannya oleh wajib pajak bahkan beberapa wajib pajak melaksanakan pembayaran melalui skema perjanjian angsuran;
6. Piutang PBJT-Jasa Perhotelan terjadi peningkatan sebesar Rp619.757.953,00 dari tahun 2024. Kenaikan terjadi karena selisish ketetapan tahun 2025 sebesar Rp76.645.797.876,00 sedangkan total pembayran di tahun 2025 sebesar Rp76.026.204.923,00 . Hal ini karena penerbitan SKPDKB tahun 2025 sebagai hasil dari pemeriksaan di tahun 2024 belum dapat dilunasi pembayarannya oleh wajib pajak bahkan beberapa wajib pajak melaksanakan pembayaran melalui skema perjanjian angsuran selain hal tersebut diatas juga terjadi koreksi tambah sebesar Rp165.000,00; dan
7. Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan terjadi peningkatan sebesar Rp426.659767,00 dari tahun 2024. Peningkatan terjadi karena ketetapan tahun 2025 sebesar Rp11.860.573.621,00 namun pembayran yang dilakukan tahun 2025 sebesar Rp11.433.913.854,00. Peningkatan ketetapan pajak ini karena meningkatnya jumlah Wajib pajak PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai hasil dari pendataan pajak daerah disamping adanya penerbitan dari SKPDKB tahun 2025 khususnya wajib pajak Jasa Hiburan Diving dan Snorkling sebagai hasil dari pemeriksaan di tahun 2024 belum dapat dilunasi pembayarannya oleh wajib pajak bahkan beberapa wajib pajak melaksanakan pembayaran melalui skema perjanjian angsuran.

Penjelasan hal-hal penting lainnya:

1. Jumlah Piutang Pajak diatas merupakan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak namun belum terbayar.

2. Saldo piutang PBB-P2 sebagian berasal dari pelimpahan piutang PBB dari KPP Pratama Gianyar pada Tahun 2014. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka penurunan nilai piutang PBB antara lain:
   a. Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2022 maka pada bulan November 2022 telah dilaksanakan pemungutan PBB-P2 dengan sistem jemput bola/mendekatkan pelayanan ke masyarakat yang jauh dari perkotaan dengan nama Kegiatan "Pade Eling"dan BumDes ataupun LPD nya belum bekerja sama dengan PT BPD Bali Cabang Karangasem;
   b. Melaksanakan kegiatan validasi piutang PBB-P2 melalui konfirmasi fisik kepada WP dilakukan secara bertahap pada Tahun 2025 sehingga dapat menunjukkan nilai piutang yang valid. Namun hasil pengolahan *database* SIM PBB Kabupaten Karangasem dapat memberikan informasi jumlah NOP dan SPPT serta nilai piutang pajak yang dapat diindikasikan belum valid dan memerlukan konfirmasi kepada WP dikarenakan WP tersebut belum melakukan pembayaran sejak piutang PBB-P2 diserahkan kepada Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal Neraca. Adapun penyajian validitas berdasarkan hasil pengolahan *database* SIM PBB-P2 sampai dengan tanggal Neraca diuraikan sebagai berikut:
      a. Terdapat empat kecamatan yang sudah tuntas dilaksanakan validasi piutang PBB-P2 sampai dengan Bulan Desember tahun 2025 yaitu Kecamatan Bebandem, Kecamatan Rendang, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.72 Rincian Tempat Validasi Piutang PBB-P2 Tuntas

Kecamatan	NOP	SPPT (Lembar)	Piutang PBB-P2	Data Valid	Data Tidak Valid	Jumlah Piutang Valid	Jumlah Piutang Tidak Valid
Bebandem	91 NOP	2.184	58.797.257,00	44 NOP	47 NOP	35.053.129,00	23.744.128,00
Rendang	118 NOP	2.832	33.661.935,00	56 NOP	62 NOP	17.177.681,00	16.484.254,00
Kubu	249 NOP	5.976	111.223.737,00	105 NOP	114 NOP	40.007.903,00	71.215.834,00
Abang	425 NOP	10.200	191.372.056,00	122 NOP	303 NOP	60.852.228,00	130.519.828,00

Penjelasan:

Atas jumlah piutang yang tidak valid disebabkan tidak ditemukannya Objek dan Wajib Pajaknya. Belum dilakukan perlakuan penghapusan atas piutang yang tidak valid pada tahun 2025.

   b. Terdapat 3 kecamatan yang masih proses validasi pada tahun 2025 yaitu Kecamatan Selat, Kecamatan Sidemen dan Kecamatan Karangasem. Pada tanggal neraca proses yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Tempat Validasi Piutang PBB-P2 Belum Tuntas

Kecamatan	NOP	SPPT	Piutang Pajak	Progress Validasi	%
Selat	751 NOP	18.024 Lembar SPPT	254.572.112,00	584 NOP	77,76
Sidemen	1.094 NOP	26.256 Lembar SPPT	286.054.093,00	520 NOP	47,53
Karangasem	1.463 NOP	35.112 Lembar SPPT	1.628.073.637,00	638 NOP	43,61

Penjelasan:

Kegiatan validasi piutang dilanjutkan prosesnya pada tahun 2026. BPKAD Kabupaten Karangasem akan berusaha melakukan validasi dan memproses lebih lanjut hasil validasi dari NOP yang belum melakukan pembayaran piutang PBB-P2 sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang secara bertahap, sehingga saldo piutang PBB-P2 lebih valid dan dapat diyakini oleh para *stakeholder*.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Piutang Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Retribusi Jasa Umum	**12.448.866.098,00**	**11.140.893.875,00**	**1.307.972.223,00**	**11,74**
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.431.690.570,00	11.123.718.347,00	1.307.972.223,00	11,76
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	17.175.528,00	17.175.528,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	**1.632.000,00**	**0,00**	**1.632.000,00**	**0,00**
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	0,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	**67.989.806,00**	**57.955.252,00**	**10.034.554,00**	**17,31**
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	67.989.806,00	57.955.252,00	10.034.554,00	17,31
Jumlah	**12.518.487.904,00**	**11.198.849.127,00**	**1.319.638.777,00**	**11,78**

Penjelasan:

Sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Koreksi saldo awal untuk piutang retribusi secara total berkurang sejumlah Rp50.460.293,36 yang merupakan selisih dari koreksi pengurangan sejumlah Rp53.126.960,00 dan koreksi penambahan sejumlah Rp2.666.666,64.
2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Karangasem tahun 2025 sejumlah Rp12.431.690.570,00 mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 sebesar Rp1.307.972.223,00 karena meningkatnya kunjungan pasien serta meningkatnya klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar. Namun terdapat koreksi saldo awal tahun 2024 sebesar Rp53.126.960,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Karangsem terkoreksi kurang sebesar Rp22.454.600,00 karena direklasifikasi ke Piutang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Dan Piutang Lainnya dengan rincian: Piutang pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebesar Rp945.000,00, Piutang pada Hasna Medika sebesar Rp19.259.600,00 dan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem sebesar Rp2.250.000,00.
   b. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Kabupaten Karangasem juga terkoreksi kurang sebesar Rp37.660,00 yang terdiri dari pengurangan biaya administrasi dari Obat Fee For Service sebesar Rp20.300,00 sesuai dengan surat Direktur RSUD Karangasem tanggal 31 Mei 2025 dan oleh Jasa Raharja sebesar Rp17.360,00.
   c. Terdapat koreksi kurang pada UPTD RSUD Kabupaten Karangasem sebesar Rp29.748.900,00 dengan rincian biaya administrasi BPJS sebesar Rp91.900,00, Kelebihan pembayaran dari BPJS atas klaim-klaim sebesar Rp8.500.900,00 dan adanya klaim pending bulan Desember yang dinyatakan tidak layak setelah melalui verifikasi senilai Rp21.156.100,00 sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Karagnasem tanggal 31 Mei 2025.
   d. Koreksi kurang sebesar Rp5.800,00 merupakan beban administrasi pembayaran dari BPJS pada dua puskesmas masing masing Rp2.900,00 yakni Puskesmas Kubu I dan Puskesmas Karangasem I.
   e. Terdapat klaim pending bulan Desember yang dinyatakan tidak layak setelah melalui verifikasi senilai Rp880.000,00 pada Puskesmas Kubu II

3. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan piutang yang timbul sebelum tahun 2025. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mengalami perubahan karena tidak ada kegiatan pemungutan retribusi serta tidak ada pelunasan di tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah tidak memungut Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sejak Tahun 2024 karena berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
4. Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan piutang yang timbul karena adanya perjanjian sewa menyewa tanah jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko dengan jangka waktu 3 Mei 2025 – 3 Mei 2026 yang belum dilakukan pembayaran. Dalam perhitungannya terdapat koreksi tambah saldo awal sebesar Rp2.666.666,64 berupa Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sesuai dengan perhitungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindusterian dan Perdagangan.
5. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena dari SKRD yang telah diterbitkan pada tahun 2025 belum melaksanakan pembayaran dan baru dilakukan pembayaran di Bulan Januari Tahun 2026.

5.3.1.1.3.3 Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Denda Pajak Daerah	4.495.137.482,13	4.328.538.226,13	166.599.256,00	3.85
Piutang Denda Retribusi Daerah	2.510.897,00	2.510.897,00	0,00	0,00
Piutang BLUD UPTD RSUD Karangasem	15.877.600,00	0,00	15.877.600,00	0,00
Jumlah	**4.513.525.979,13**	**4.331.049.123,13**	**182.476.856,00**	**4,21**

Penjelasan:

Sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

1. Kenaikan Piutang Denda Pajak Daerah karena bertambahnya ketetapan SKPDKB untuk PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan di tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan di tahun 2024 serta adanya peningkatan piutang lancar untuk Pajak MBLB
2. Terdapat koreksi tambah saldo awal pada Denda Pajak Daerah sebesar Rp6.710.823,00 yang terdiri dari Denda Pajak Air tanah (PAT) sebesar Rp22.773,00 dan Denda Pajak Mineral bukan Logam sebesar Rp6.688.050.
3. Piutang Denda Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan karena tidak ada pelunasan di tahun 2025 dan pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2025 sudah tidak memungut Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Kenaikan Piutang Pendapatan BLUD UPTD RSUD Karangasem karena adanya kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit dan Klinik terkait pemeriksaan

laboratorium di Tahun 2025, juga terjadi penambahan dari reklasifikasi dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp22.454.600,00 seperti penjelasan diatas.

5.3.1.1.3.4 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	4.132.190.342,00	32.078.368.624,00	(27.946.178.282,00)	(87,12)
Piutang Bantuan Keuangan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**4.132.190.342,00**	**32.078.368.624,00**	**(27.946.178.282,00)**	**(87,12)**

Penjelasan:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 didasarkan atas Surat Gubernur Bali Nomor: B.31.900/1147/PADFE/BPKAD tanggal 18 Februari 2026 tentang Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kota/Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Bagi Hasil Pajak serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	88.325.961,00	12.500.394.931,00	(12.412.068.970,00)	(99,29)
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	207.395.246,00	10.908.856.830,00	(10.701.461.584,00)	(98,10)
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.811.695.156,00	8.626.539.075,00	(4.814.843.919,00)	(55,81)
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.773.979,00	42.577.788,00	(17.803.809,00)	(41,81)
Jumlah	**4.132.190.342,00**	**32.078.368.624,00**	**(27.946.178.282,00)**	**(87,12)**

2. Tidak terdapat Piutang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Tahun 2025.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pendapatan	**(65.958.699.955,15)**	**(61.430.163.630,47)**	**(4.528.536.324,68)**	**7,37**
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(64.775.475.201,13)	(60.011.887.084,50)	(4.763.588.116,63)	7,94
Penyisihan Piutang Retribusi	(689.719.429,39)	(664.613.928,15)	(25.105.501,24)	3,78
Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(452.183.421,21)	(432.878.931,58)	(19.304.489,63)	4,46
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(41.321.903,42)	(320.783.686,24)	279.461.782,82	(87,12)
Penyisihan Piutang Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**(65.958.699.955,15)**	**(61.430.163.630,47)**	**(4.528.536.324,68)**	**7,37**

Penjelasan:

1. Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan berdasarkan perhitungan kualitas piutang, yang diklasifikasikan menjadi empat, yaitu macet, diragukan, kurang lancar, dan lancar;
2. Kenaikan Penyisihan Piutang Retribusi dan LLPAD yang Sah sejalan dengan peningkatan piutang dan pergeseran umur piutang;

3. Penurunan Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah dipengaruhi nilai piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 menurun dibandingkan Tahun 2024.

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Dimuka yang merupakan Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.79 Rincian Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	71.976.825,67	71.927.584,13	49.241,54	0,07
Beban Dibayar Dimuka-Sewa	100.301.783,33	116.537.083,34	(16.235.300,01)	(13,93)
Jumlah	**172.278.609,00**	**188.464.667,47**	**(16.186.058,47)**	**(8,59)**

Penjelasan:

1. Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut:
   a. Asuransi dibayar dimuka untuk Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 karena ada peningkatan nilai pada polis dan premium note;
   b. Sewa dibayar dimuka tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024 karena masa berlaku pada beberapa perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang kembali.
2. Beban Dibayar Dimuka disebabkan karena belanja sewa tanah dan bangunan serta pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh beberapa perangkat daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya dengan jangka waktu dari 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang melewati TA 2025. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.
3. Rincian Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada ***Lampiran 32***.

5.3.1.1.6 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan	400.885.196,01	699.643.382,50	(298.758.186,49)	(42,70)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.199.523.901,37	3.476.483.809,12	723.040.092,25	20,80
Obat-obatan	18.797.655.426,17	21.916.317.823,31	(3.118.662.397,14)	(14,23)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	19.088.220.422,00	5.018.826.764,00	14.069.393.658,00	280,33
Natura dan Pakan	948.683.213,00	1.124.391.515,00	(175.708.302,00)	(15,63)
Jumlah	**43.434.968.158,55**	**32.235.663.293,93**	**11.199.304.864,62**	**34,74**

Penjelasan:

1. Persediaan dimaksud di atas merupakan bahan habis pakai/material yang terdiri dari bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit ternak/bibit ikan, bahan lainnya, alat tulis kantor, kertas dan *cover*,

bahan cetak, benda pos, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, obat, persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya, natura, pakan. Rincian persediaan dapat dilihat pada ***Lampiran 33.***

2. Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada UPTD RSUD Kabupaten Karangasem, UPTD Puskesmas, UPTD RS Pratama Kubu serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik;
3. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karangasem juga menerima hibah berupa alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Bali pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang baru di BAST kan di Tahun 2025 sebesar Rp262.580.404,00, juga menerima hibah/sumbangan persediaan barang yang diterima oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp11.609.484.204,76; dan
4. Selain itu juga terdapat persediaan yang kondisinya usang/kadaluarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan Neraca per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Persediaan Usang/Kadaluarsa/Tidak Berlaku

Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Dinas Kesehatan	Obat dan BMHP	234.929.141,42
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Karcis	64.851.956,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Karcis	149,506,044.00
Dinas Lingkungan Hidup	Karcis	6,072,864.00
Dinas Perhubungan	Karcis	17,836,605.00
Jumlah		**299.781.097,42**

Penjelasan:
Pada Tahun 2025 diterbitkan Berita Acara Pemusnahan Barang Persediaan (Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai) Tahun 2025 dengan Nomor: 400.7.18.3/7863/BIDANG YANKES & SDK/DINKES/2025 tanggal 23 Desember 2025 oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp103.604.154,40.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Non-Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	155.856.136.081,93	149.372.851.618,31	6.483.284.463,62	4,34
Jumlah	**155.856.136.081,93**	**149.372.851.618,31**	**6.483.284.463,62**	**4,34**

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Bergulir	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	(2.300.000,00)	(2.300.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

Sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Investasi Non-Permanen sebagai berikut:

1. Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2025 merupakan Dana Bergulir yang terakhir kali diluncurkan pada tahun 2009. Sejak Tahun 2010, Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir tidak lagi memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat dengan pertimbangan kondisi para pengguna Dana Bergulir terdahulu tidak mampu lagi mengangsur karena kesulitan likuiditas sehingga Dana Bergulir yang diberikan menjadi macet. Hal tersebut menjadi piutang atas investasi Dana bergulir yang tidak bisa tertagih (macet).
2. Dana bergulir dan penyisihan dana bergulir di tahun 2025 tidak ada perubahan dari tahun 2024. Penurunan dana bergulir terjadi dari tahun 2017 hingga 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem melaksanakan penyerahan penyelesaian piutang atas Investasi Dana Bergulir kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja pada tanggal 6 Maret 2017 dengan Surat Nomor 181.3/656/Disperindag perihal penyerahan penyelesaian penghapusan piutang macet. Sejak diterima oleh KPKNL maka proses penagihan atas piutang dana bergulir dilaksanakan oleh pihak KPKNL dan sampai tanggal 31 Desember 2023 proses tersebut sudah berakhir. Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem menyampaikan surat No 530/961/Diskoperindag/Ind tanggal 4 April 2023 Perihal Usulan Penghapusan Piutang Sementara kepada Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah Bali sebesar Rp205.546.950,35. Atas hal tersebut Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan Surat Nomor: S-1361/KNL.1402/2024 tanggal 24 November 2024 serta sudah ditindaklanjuti kembali dengan Surat Kepala BPKAD Nomor 900.1.7.3/2276/Bid.Akpel/BPKAD tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Bali. Atas proses yang sudah dilaksanakan maka saldo Dana bergulir pada Disperindag sebesar Rp205.546.950,35 direklasifikasi ke Aset Lainnya.

   Dalam pengelolaan Dana Bergulir terjadi permasalahan hukum. Sesuai surat Nomor B-420P.1.14/Dek.3/4/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Permintaan Keterangan, Kejaksaan Negeri Amlapura telah melakukan pemeriksaan atas penyaluran Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan putusan yang dituangkan dalam Surat Putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2011/PN.Ap tanggal 11 Januari 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012. Salah satu hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem dirugikan sebesar Rp120.350.000,00. Mutasi penerimaan dana bergulir sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Mutasi Penerimaan Dana Bergulir

Tahun	Mutasi Saldo Dana Bergulir			Pembayaran		
					Menurut Pemda	
	Saldo Laporan KPKNL	Saldo Neraca Pemda	Selisih	Menurut KPKNL	Penerimaan Pembiayaan Pengembalian Dana Bergulir	Surat Keterangan Lunas
2017	341.700.106,08	290.219.129,08	51.480.977,00	51.480.977,00	51.480.977,00	0,00
2018	290.219.129,08	267.549.150,00	22.669.979,08	52.734.828,08	22.669.979,08	30.064.849,00
2019	267.549.150,00	251.826.425,00	15.722.725,00	25.972.725,00	15.722.725,00	10.250.000,00
2020	251.826.425,00	248.612.789,00	3.213.636,00	3.213.636,00	3.213.636,00	0,00
2021	248.612.789,00	248.612.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	208.297.940,00	208.297.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	207.846.950,00	0,00	0,00	450.990,00	0,00
2024	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Penyisihan atas Dana Bergulir dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan melalui Perbup Karangasem Nomor 19 Tahun 2023, dimana investasi nonpermanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan dimana jatuh tempo pada periode diatas 4 (empat) tahun disisihkan sebesar 100% dari nilai investasi.

3. Rincian Aset Lainnya Dana Bergulir PSBDT yang akan dihapuskan pada Diskopperindag dapat dilihat pada ***Lampiran 34***.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Tabel 5.85 Rincian Investasi Permanen

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PT BPD Bali	46.550.000.000,00	43.550.000.000,00	3.000.000.000,00	6,89
PT Jamkrida Bali Mandara	4.075.000.000,00	3.075.000.000,00	1.000.000.000,00	32,52
Perumda Tirta Toh Langkir	95.233.212.349,93	92.747.851.618,31	2.485.360.731,62	2,68
Perseroda Karangasem Sejahtera	9.997.923.732,00	10.000.000.000,00	(2.076.268,00)	(0,02)
Jumlah	**155.856.136.081,93**	**149.372.851.618,31**	**6.483.284.463,62**	**4,34**

Penjelasan:

Sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. PT BPD Bali mengalami peningkatan karena adanya penambahan penyertaan modal tahun 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan analisis meningkatkan PAD.
2. PT Jamkrida Bali Mandara mengalami peningkatan karena adanya penambahan penyertaan modal tahun 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan analisis meningkatkan PAD.
3. Perumda Tirta Toh Langkir mengalami peningkatan karena adanya penambahan atas laba tahun 2025 sehingga meningkatkan ekuitas Perumda.
4. Perseroda Karangasem Sejahtera mengalami penurunan sebesar Rp2.076.268,00 yang merupakan selisih laba tahun-tahun sebelumnya dan kerugian tahun 2025.

Penjelasan hal-hal penting lainnya:

1. PT Bank BPD Bali

   Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT Bank BPD Bali per 31 Desember 2025 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT Bank BPD Bali sebesar 1,62% dari keseluruhan modal PT Bank BPD Bali. Penyertaan pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp46.550.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada PT Bank BPD Bali yang sudah disahamkan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank BPD Bali sebesar Rp3.000.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh dividen sebesar Rp13.400.123.459,71 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 10 Februari 2025 untuk Tahun Buku 2024 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 01 tanggal 4 Februari 2025. Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali yaitu metode biaya (*cost method*).

2. PT Jamkrida Bali Mandara

   Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT Jamkrida Bali Mandara sampai dengan 31 Desember 2025:

Tabel 5.86 Rincian Nilai Penyertaan Modal

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Peraturan Daerah
1	Penyertaan Modal Tahun 2011	75.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
2	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2017	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2017
3	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2018	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2018
4	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2019	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2019
5	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2021	250.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2021
6.	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2022	250.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara
7.	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2023	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara
8.	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2024	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
9.	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2025	1.000.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
Jumlah		**4.075.000.000,00**	

PT Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat di hadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Ijin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh dividen sebesar Rp35.324.612,00 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2025 untuk Tahun Buku 2024 sesuai Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 6 tanggal 10 Maret 2025.

Pada Tahun 2025 terjadi penambahan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebanyak 1.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.000.000,00 sehingga menambah porsi kepemilikan menjadi 1,76% dari sebelumnya 1,55%. Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara yaitu metode biaya (*cost method*). Metode biaya (*cost method)* diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%.

3. Perumda Tirta Tohlangkir

Perumda Tirta Tohlangkir didirikan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang PDAM. Karena didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dan jumlah kepemilikan sebesar 100% maka penyertaan modal pada Perumda Tirta Tohlangkir diakui dengan metode ekuitas (*equity method*),.

Pada Tahun 2025 terjadi penambahan Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Tahun 2024 sebesar Rp92.747.851.618,31 menjadi Rp95.233.212.349,93 pada Tahun 2025. Peningkatan ekuitas tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Cadangan Umum sebesar Rp1.536.472.951,54. Ekuitas juga dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan Akumulasi kerugian s.d tahun lalu sebesar Rp4.030.457.553,98 serta laba yang diperoleh Perumda Tirta Tohlangkir untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp8.637.587.384,00 menurun sebesar Rp3.081.569.773,78 dari tahun sebelumnya sebesar Rp11.719.157.157,90. Adanya laba tersebut mempengaruhi ekuitas Pemerintah di Perumda Tirta Toh Langkir, dimana juga terjadi koreksi atas keuntungan tahun lalu sebesar Rp7.493.856.541,15 dan adanya pembagian keuntungan tahun lalu sebesar Rp4.225.300.616,75 yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 didasarkan pada Surat Persetujuan Bupati Karangasem Nomor 900/3612/Ekbang/Setda tanggal 30 Desember 2025 serta Perda Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 1976 yaitu 30% untuk Dana Pembangunan Daerah dan 25% untuk Anggaran dan Belanja Daerah dari Laba bersih Perumda Tirta Toh Langkir. Perhitungan pembagian keuntungan tersebut diperoleh dari nilai laba Tahun 2024.

Berikut perhitungan pengakuan nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perumda Tirta Tohlangkir sampai dengan 31 Desember 2025:

Tabel 5.87 Rincian Nilai Investasi pada Perumda Tirta Tohlangkir

Uraian	Nilai
Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem	70.600.547.648,68
Penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya	5.680.195.396,00
Modal hibah	1.245.250.466,00
Cadangan umum	7.514.474.206,54
Cadangan dana sosial dan pendidikan	1.561.492.094,79
Akumulasi kerugian s.d. tahun lalu	(6.334.846,08)
Laba/rugi tahun berjalan	8.637.587.384,00
Nilai Investasi pada Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem	**95.233.212.349,93**

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem **tidak sama dengan** nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Tirta Tohlangkir dalam laporan keuangan Tahun Buku 2025.

Laporan Keuangan Perumda Air Tirta Toh Langkir untuk tahun 2025 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan dengan Nomor Laporan 00072/2.0925/AU.8/04/1881-2/1/IV/2026 pada tanggal 27 April 2026. Opini atas Laporan Keuangan Tersebut yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian.**

4. Perseroda Karangasem Sejahtera

Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera tanggal 8 November 2022 dimana modal dasar seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemda. Pada tahun 2023 Pemda Karangasem melakukan penyetoran modal dasar awal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera tanggal 10 November 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 ditransfer ke rekening PT Karangasem Sejahtera tanggal 14 November 2023. Pada tahun 2024 belum ada keuntungan yang disetor kepada Pemda karena metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT Karangasem Sejahtera saat itu menggunakan metode biaya (*cost method*).

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2025 PT Karangasem Sejahtera (Perseroda) bahwa kepemilikan saham Pemda sebesar 99,90% dari total saham Rp10.010.000.000,00 terdiri atas Rp10.000.000.000,00 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Rp10.000.000,00 dari Koperasi Werdhi Guna, dari kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Karangasem tersebut diakui dengan metode ekuitas (*equity method*).

Nilai Investasi pada PT Karangasem sejahtera di tahun 2025 sebesar Rp9.997.923.732,00 menurun sebesar Rp2.076.268,00 dari Rp10.000.000.000,00, hal ini disebabkan akumulasi kerugian yang diperhitungkan dari tahun 2024 dimana tedapat laba sebesar Rp27.201.774,00 namun di tahun 2025 terdapat rugi sebesar Rp29.278.042,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Rincian Nilai Investasi pada PT Karangasem Sejahtera (Perseroda)

Uraian	Nilai
Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem	10.000.000.000,00
Laba Ditahan	27.201.774,00
Laba Tahun Berjalan	(29.278.042,00)
Ekuitas Saldo Awal	0,00
Nilai Investasi pada PT Karangasem Sejahtera (Perseroda)	**9.997.923.732,00**

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem **tidak sama dengan** nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perseroda Karangasem Sejahtera dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 ang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Dwi Haryadi dan Rekan dengan Nomor Laporan

00084/2.1446/AU.8/05/1900-2/1/IV/2026 pada tanggal 27 April 2026. Opini atas Laporan Keuangan Tersebut yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian.**

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.89 Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	171.171.218.650,25	168.267.539.890,25	2.903.678.760,00	1,73
Peralatan dan Mesin	716.292.885.992,38	665.465.118.312,38	50.827.767.680,00	7,64
Gedung dan Bangunan	1.004.075.427.670,56	981.076.869.476,03	22.998.558.194,53	2,34
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.690.911.902.962,32	1.637.758.035.809,17	53.153.867.153,15	3,25
Aset Tetap Lainnya	41.744.567.919,35	40.667.915.977,35	1.076.651.942,00	2,65
Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.275.366.744,72	28.436.539.044,00	2.838.827.700,72	9,98
Akumulasi Penyusutan	(2.385.151.040.588,40)	(2.228.830.065.266,28)	(156.320.975.322,12)	7,01
Jumlah	**1.270.320.329.351,18**	**1.292.841.953.242,90**	**(22.521.623.891,72)**	**(1,74)**

Penjelasan:

1. Penyusunan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karangasem dimulai dari tahun 2001 dengan bukti buku inventarisasi per 31 Desember 2001. Penyusunan awal dilakukan dengan mempergunakan metode fisik dengan menggunakan harga taksiran untuk harga perolehan aset tetap yang tidak memiliki dokumen pengadaan. Setelah tahun 2001 dasar penilaian aset tetap yang tercantum pada neraca berdasarkan harga perolehan aset tersebut yakni semua sumber daya keuangan yang dikorbankan untuk memperoleh aset tersebut yang meliputi harga beli barang ditambah komponen biaya lainnya hingga barang/aset tersebut dapat dipergunakan.
2. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang kodefikasi BMD. Dengan diterapkannya Permendagri tersebut maka kode barang yang tertera pada daftar BMD telah memenuhi kriteria 7-digit kode BMD dan telah sesuai dengan ketentuan.
3. Penyusunan laporan BMD pada tahun 2025 menggunakan Aplikasi SIMDA BMD yang dibantu rekapitulasinya dengan menggunakan perhitungan Aplikasi dari *Microsoft Excel* yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang penatausahaan BMD untuk pengolahan data dan informasi mutasi BMD. Laporan tahun 2025 menggunakan aplikasi simda BMD untuk harga perolehan dan juga akumulasi penyusutannya. Dotajun 2025 juga telah diterapkan aplikasi e-BMD sebagai penyanding karena hasil dari aplikasi tersebut belum dapat menyajikan akumulasi penyusutan aset tetap yang sesuai dengan perhitungan pada kebijakan akuntansi Kabupaten Karangasem, ketidak sesuaian tersebut akan dikomunikasikan dengan pihak yang membangun aplikasi tersebut. Peralihan dari aplikasi simda BMD ke E-BMD dilakukan untuk menyesuaiakan dengan peraturan tentang BMD pada Permendagri 47 tahun 2021 yang mana simda BMD telah dihentikan pengembangnnya oleh BPKP sebelum permendagri tersebut ditrbitkan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:
    a. Melakukan proses migrasi data dari data aplikasi Simda BMD ke Aplikasi E-BMD pada seluruh Kartu Inventaris Barang (KIB) dari KIB A-F untuk data *audited* tahun 2023 dan telah dilakukan rekonsiliasi harga perolehan BMD termasuk penyusutan BMD sesuai dengan data aset tetap, aset Lainnya serta akumulasi penyusutan masing-masing;

b. Walaupun telah melakukan migrasi data hingga data *audited* tahun 2023 serta sosialisasi pengoperasian E-BMD dan telah melakukan input pengadaan tahun 2024 – tahun 2025. Hasil aplikasi E-BMD telah dikomparasi dengan kertas kerja mutasi BMD dengan hasil nilai perolehan sesuai dengan kertas kerja BMD, namun aplikasi e-BMD belum dapat digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan tahun 2025 *audited* karena perhitungan saldo awal akumulasi penyusutan tahun 2025 belum sesuai dan terjadi kekeliruan perhitungan akumulasi penyusutannya ; dan

c. Langkah-langkah yang telah di ambil yakni dengan berkonsultasi sekaligus memperbaiki data BMD dengan pihak Kementerian Dalam Negeri melalui pengembang aplikasi yakni Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, namun hingga penyusunan LKPD *audited* saldo awal akumulasi penyusutan tahun 2025 belum sesuai.

4. Di tahun 2025 tedapat penambahan 12 (dua belas) Unit Pengguna Barang (UPB) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem yakni 12 Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri yang terdiri atas 8 (delapan) sekolah sebelum tahun 2025 dan 4 sekolah di tahun 2025, namun baru di *input* BMD pengadaan tahun 2025 saja sedangkan pengadaan tahun sebelumnya masih tercatat pada UPB Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Sedangkan BMD yang berasal dari 8 (delapan) unit TK Swasta menjadi TK Negeri telah di Inventarisasi pada tahun 2022 namun belum dapat dicatat dalam KIB karena harga perolehan dari aset-aset tersebut belum diperoleh; dan

5. Berdasarkan data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dapat diinformasikan bahwa terdapat 13 pengembang yang belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang properti di Kabupaten Karangasem.

5.3.1.3.1 Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.90 Rincian Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	171.171.218.650,25	168.267.539.890,25	2.903.678.760,00	1,73

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Tanah selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Mutasi Tanah

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**168.267.539.890,25**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	0,00	
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	893.128.760,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
Penilaian / Hasil Inventarisasi	2.260.770.000,00	
Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	3.444.850.820,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**6.598.749.580,00**
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi ke Properti Investasi	(155.500.000,00)	
- Penghapusan tahun 2025	(94.720.000,00)	

Uraian	Nilai	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
Lebih/Double Catat	0,00	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(3.444.850.820,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(3.695.070.820,00)**
Saldo Akhir		**171.171.218.650,25**

2. Tanah sebesar Rp171.171.218.650,25 merupakan hasil mutasi penambahan dan pengurangan BMD yakni:
   a. Pemerintah Kabupaten Karangasem di tahun 2025 sesuai dengan data KIB A memiliki 1.299 bidang tanah dengan klasifikasi aset tetap sebanyak 1.295 senilai Rp171.171.218.650,25, tiga bidang tanah merupakan Aset Lainnya berupa pemanfaatan senilai Rp23.667.523.000,00 dan satu bidang tanah tercatat sebagai properti investasi senilai Rp155.500.000,00. Dari 1.295 bidang tanah tersebut terdiri dari 615 bidang tanah adalah tanah Jalan dan sisanya sebanyak 680 bidang adalah tanah non jalan. Hingga tahun 2025 sebanyak 908 bidang tanah sudah bersertifikat dan sisanya sebanyak 391 belum bersertifikat;
   b. Di tahun 2024 terdapat 1.263 bidang tanah bertambah 38 bidang dengan rincian 6 (enam) bidang tanah merupakan hibah/penyerahan dari pengembang, 1 (satu) dari hasil inventarisasi dan 31 merupakan pemecahan tanah dari 4 bidang tanah yang masih tercatat gabungan. Dan 2 (dua) bidang tanah dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Karangasem;
   c. Penambahan BMD berupa tanah yang tercatat sebagai aset tetap sebanyak 7 bidang tanah senilai Rp3.153.898.760,00. Penambahan tersebut terdiri dari 1 bidang tanah berupa tanah bangunan kantor pemerintah seluas ± 4.210 m^2 senilai Rp2.260.770.000,00 merupakan hasil Inventarisasi yang mana hingga akhir 2025 belum tercatat, 6 bidang tanah merupakan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang properti di Kabupaten Karangasem yang secara aturan harus diserahkan kepada pemerintah. Adapun rincian tanah yang diperoleh dari penyerahan fasum/fasos yang baru tercatat tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.92 Rincian Tanah yang Diperoleh dari Penyerahan Fasilitas Umum atau Fasilitas Sosial

Uraian	Tanggal Perolehan	Nomor BAST	Luas (m2)	Harga Perolehan
Jalan Khusus Komplek	9 September 2025	027/GLA/IX/2025 dan 600.2.8.3/3507/PKP /DPUPERKIM	2.280,23	12.400.720,00
Jalan Khusus Komplek	12 September 2025	012/DAP/IX/2025 dan 600.2.8.3/3537/PKP /DPUPERKIM	523,40	83.744.000,00
Jalan Khusus Komplek	17 September 2025	017/KAR/IX/2025 dan 600.2.8.3/3699/PKP /DPUPERKIM	2.090,64	418.128.000,00
Jalan Khusus Komplek	11 September 2025	011/DAP/IX/2025 dan 600.2.8.3/3509/PKP /DPUPERKIM	836,08	167.216.000,00
Jalan Khusus Komplek	27 Agustus 2025	021/LKV/VIII/2025 dan 600.2.8.3/3366/PKP /DPUPERKIM	1.582,64	56.975.040,00
Jalan Khusus Komplek	23 Juli 2025	640/005/BTN Griyaloka Satasrengga dan 600.2.8.3/3366/PKP /DPUPERKIM	4.210	154.665.000,00
Jumlah				**893.128.760,00**

   d. Pengurangan BMD berupa tanah yang merupakan akun aset tetap sebanyak dua bidang tanah senilai Rp94.720.000,00 merupakan pemindahtanganan ke Kejaksaan Negeri Karangasem yang tercatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III senilai

Rp35.840.000,00 dan pada Bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III senilai Rp58.880.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 35/KPTS/HK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;

e. Tiga bidang tanah yang dimanfaatkan dalam bentuk Pinjam Pakai terdiri atas tanah Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium senilai Rp23.396.323.000,00 pada BPU2K yang tercatat pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp28.000.000,00 pada KPUD Kab. Karangasem yang tercatat pada Bagian Umum Setda dan Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan senilai Rp243.200.000,00 pada Kementerian Agama Kantor Karangasem yang tercatat pada Bagian Umum Setda; dan

f. Progres pelaksanaan sertifikasi Aset tanah Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2025 sebanyak satu bidang tanah yakni tanah Puskesmas Manggis II.

g. Adanya reklasifikasi aset tetap ke Properti Investasi sebesar Rp155.500.000,00 terhadap 2 bidang tanah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

3. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 35***.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.93 Rincian Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	716.292.885.992,38	665.465.118.312,38	50.827.767.680,00	7,64

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.94 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**665.465.118.312,38**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	58.439.288.240,00	
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	7.426.000,00	
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	796.746.856,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	441.000,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00	
Kurang catat	0,00	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	163.019.643,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**59.406.921.739,00**
Mutasi Kurang:		
- Salah Pos Belanja Modal	(15.704.980,00)	
- Pengakuan Ekstrakomptable	(1.344.030.248,00)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(2.334.500,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(7.054.064.688,00)	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
Koreksi Kurang	0,00	
Lebih Catat	0,00	
- Penghapusan Tahun 2025	0,00	
- Belanja modal tahun berjalan diserahkan ke Pihak Swasta	0,00	

Uraian	Nilai
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(163.019.643,00)
Jumlah Mutasi Kurang	**(8.579.154.059,00)**
Saldo Akhir	**716.292.885.992,38**

2. Peralatan dan Mesin sebesar Rp716.292.885.992,38 merupakan hasil mutasi penambahan dan pengurangan BMD yakni:
   a. Perolehan BMD dari pengadaan BMD berupa aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp58.439.288.240,00 yang dikonsolidasikan dari seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Karangasem;
   b. Kapitalisasi Non-Belanja Modal sebesar Rp7.426.000,00 adalah pengakuan BMD sebagai aset tetap peralatan dan mesin dari rekening belanja barang dan jasa, pertimbangan yang menjadi dasar adalah masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan diadakan tidak untuk dialihkan kepada pihak diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Kapitalisasi Non-Belanja Modal tersebut terjadi pada Unit Pengguna Barang (UPB) UPTD Puskesmas Bebandem berupa Alat Pemadam Kebakaran sebanyak 4 Unit seharga Rp6.760.000,00 dan UPTD Puskesmas Rendang berupa PH Meter Portable seharga Rp666.000,00;
   c. Perolehan hibah tahun berjalan sebesar Rp796.746.856,00 tersebar pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem berupa 5 buah lampu penerangan pada TPST Linggasana sebesar Rp88.866.250,00 dengan tahun perolehan 2016 dan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem berupa Mesin TCM Ganexpert seharga Rp574.260.606,00 dengan tahun perolehan 2021. Pada Tahun 2025 terdapat bantuan dari Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 5 Muncan sebesar Rp22.400.000,00, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1 Culik sebesar Rp23.100.000,00, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2 Sidemen sebesar Rp27.200.000,00 dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Sidemen sebesar Rp60.920.000,00;
   d. Reklasifikasi Tambah antar aset tetap sejumlah Rp441.000,00 dari Aset tetap lainnya berupa tiga buah Alat Peraga Praktik Sekolah yang langsung di reklasifikasi ke Ekstrakomptable karena di bawah kapitalisasi;
   e. Mutasi antar perangkat daerah yang terjadi penambahan sebesar Rp163.019.643,00 pada dua OPD yakni UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp130.241.666,00 yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk barang yang diadakan tahun 2025 dan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp32.777.977,00 berupa peralatan kantor dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa BMD pengadaan sebelum tahun 2025.
   f. Pengurangan atas salah pos Belanja sebesar Rp15.704.980,00 yang mana jumlah tersebut adalah BMD yang berklasifikasi persediaan maupun dikoreksi karena merupakan bahan pakai habis. Pengurangan tersebut terjadi pada Dinas Kesehatan berupa alat kesehatan sebesar Rp6.241.000,00, pada UPTD Rumah Sakit Umum Pratama sebesar Rp463.980,00 dan pada SMP 3 Abang berupa pembelian kabel untuk CCTV senilai Rp9.000.000,00;
   g. Terdapat pengurangan BMD dari aset tetap sebesar Rp1.344.030.248,00 karena BMD tersebut berklasifikasi sebagai barang Ekstrakomptabel yang mana barang tersebut dianggarkan di belanja modal namun nilai perolehannya di bawah batas

kapitalisasi aset tetap yang tertuang dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

h. Terdapat BMD dengan belanja modal Peralatan dan mesin namun setelah digolongkan merupakan klasifikasi aset tetap yang lainnya sebesar Rp2.334.500,00 yakni ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada UPTD Puskesmas Selat;

i. Terdapat pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lain-lain sebesar Rp7.054.064.688,00 karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan, BMD ini akan diusulkan penghapusan dan akan dipindahtangankan maupun dimusnahkan; dan

j. Mutasi antar perangkat daerah terjadi pengurangan sebesar Rp163.019.643,00 pada dua OPD yakni UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp130.241.666,00 yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp32.777.977,00.

3. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 36***.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.95 Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Gedung dan Bangunan	1.004.075.427.670,56	981.076.869.476,03	22.998.558.194,53	2,34

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.96 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**981.076.869.476,03**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	22.650.253.698,83	
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	0,00	
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	5.096.089.043,09	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	253.228.293,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan/Perolehan Lainnya	0,00	
Kurang Catat	0,00	
Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	3.072.809.873,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**31.072.380.907,92**
Mutasi Kurang:		
- Salah Pos Belanja Modal	(268.599.950,00)	
- Pengakuan ekstrakomptabel	0,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(1.914.234.929,44)	
- Pelunasan utang tahun 2025	0,00	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(1.083.158.074,95)	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	
Lebih Catat	0,00	
- Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	(416.140.000,00)	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(3.072.809.873,00)	
- Penghapusan Tahun 2025	(1.318.879.886,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(8.073.822.713,39)**
Saldo Akhir		**1.004.075.427.670,56**

2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.004.075.427.670,56 merupakan hasil mutasi penambahan dan pengurangan BMD yakni:

a. Perolehan dari Pengadaan BMD sebesar Rp22.650.253.698,83, angka ini merupakan konsolidasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem. Penambahan ini adalah dari rekening belanja modal yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp15.244.815.130,77 Belanja Modal Monumen sebesar Rp192.508.862,44 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Prasasti sebesar Rp6.444.901.698,85 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp768.028.006,77;
b. Terdapat perolehan hibah sebesar Rp5.096.089.043,09 yang diserahterimakan tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan Naskah Perjanjian Hibah nomor 393/BA/DC/2025 dan nomor 000.2.5/1316/PBMD/BPKAD /SETDA berupa Bangunan Gudang seharga Rp137.320.070,00, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp344.331.176,00 dan taman senilai Rp675.312.159,00 serta Revitalisasi aset pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp3.939.125.638,09 pada tahun 2025;
c. Reklasifikasi antar Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp253.228.293,00 merupakan perpindahan karena perubahan fungsi barang yakni dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Bangunan Gedung Pendidikan SMP Abang pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem yang tahun 2024 belum diselesaikan;
d. Mutasi tambah antar perangkat daerah sekaligus mutasi kurang antar perangkat daerah sebesar Rp3.072.809.873,00. Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah sebesar Rp379.578.000,00, Pada Lingkup Kecamatan dari Dianas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem sebesar Rp1.890.301.873,00 dan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karangasem sebesar Rp802.930.000,00;
e. Terdapat pengurangan BMD dari aset tetap sebesar Rp268.599.950,00 yang disebabkan oleh kesalahan pos Belanja Modal. Pengurangan tersebut terjadi pada UPTD Puskesmas Bebandem sebesar Rp208.596.800,00 dan UPTD Puskesmas Rendang sebesar Rp60.003.150,00 dimana jumlah tersebut di bawah batas kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan BMD yang minimal sejumlah 15% dari harga perolehan gedung sebelumnya yang seharusnya dianggarkan di belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
f. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp1.914.234.929,44 terjadi karena belanja pada APBD tidak sesuai dengan klasifikasi BMD dengan rincian:

Tabel 5.97 Rincian Reklasifikasi Antar Aset Tetap

Perangkat Daerah	Jenis BMD Sebelumnya	Jenis BMD Setelahnya	Jumlah
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan	Kontruksi Dalam Pengerjaan	207.362.002,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan	Kontruksi Dalam Pengerjaan	521.040.950,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gedung dan Bangunan	Kontruksi Dalam Pengerjaan	97.958.281,44
Dinas Ketenagakerjaan	Gedung dan Bangunan	Kontruksi Dalam Pengerjaan	75.156.155,00
Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan	Jalan Jaringan dan Irigasi	728.860.000,00
Bagian Umum Sekda	Gedung dan Bangunan	Kontruksi Dalam Pengerjaan	94.550.581,00

Perangkat Daerah	Jenis BMD Sebelumnya	Jenis BMD Setelahnya	Jumlah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung dan Bangunan	Kontruksi Dalam Pengerjaan	99.606.960,00
Kecamatan Selat	Gedung dan Bangunan	Kontruksi Dalam Pengerjaan	89.700.000,00
Jumlah			**1.914.234.929,44**

g. Pengurangan sebesar Rp1.083.158.074,95 yang terdiri dari Rp959.885.825,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya karena terhitung tahun 2025 bangunan tersebut tidak dapat dipergunakan kembali (rusak berat), dan Rp123.272.249,95 merupakan kurang volume aset pada tahun 2025;

h. Pengurangan sebesar Rp416.140.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset properti investasi karena terhitung tahun 2025 bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai properti investasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan

i. Mutasi kurang Gedung dan Bangunan juga diakibatkan penghapusan BMD sebesar Rp1.318.879.886,00. Perangkat daerah yang melakukan penghapusan sebagai berikut:

Tabel 5.98 Rincian Penghapusan BMD

Perangkat Daerah/UPB	Nomor SK Penghapusan	Jumlah	Keterangan
SD 3 Bungaya	32/KPTS/HK/2025	15.157.000,00	Penjualan
SD 4 Peringsari	32/KPTS/HK/2025	60.000.000,00	Penjualan
SD 2 Manggis	32/KPTS/HK/2025	20.832.000,00	Penjualan
SD 2 Nyuhtebel	32/KPTS/HK/2025	21.451.000,00	Penjualan
Dinas Kesehatan	35/KPTS/HK/2025	334.315.000,00	Hibah Ke Kejaksaan Negeri Amlapura
Puskesmas Sidemen	32/KPTS/HK/2025	583.370.861,00	Penjualan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32/KPTS/HK/2025	134.710.725,00	Penjualan
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	32/KPTS/HK/2025	78.483.300,00	Penjualan
Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	35/KPTS/HK/2025	70.560.000,00	Hibah Ke Kejaksaan Negeri Amlapura
Jumlah		**1.318.879.886,00**	

3. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 37***.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Jalan, Jaringan, dan Irigasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.99 Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.690.911.902.962,32	1.637.758.035.809,17	53.153.867.153,15	3,25

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

`Tabel 5.100 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**1.637.758.035.809,17**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	38.314.593.413,15

Uraian	Nilai	
- Utang Belanja Modal	0,00	
- Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	0,00	
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	14.512.908.745,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.512.730.500,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	18.905.256,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**54.359.137.914,15**
Mutasi Kurang:		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(697.498.114,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(488.867.391,00)	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(18.905.256,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(1.205.270.761,00)**
Saldo Akhir		**1.690.911.902.962,32**

2. Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.690.911.902.962,32 merupakan hasil mutasi penambahan dan pengurangan BMD dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal sebesar Rp38.314.593.413,15,00 merupakan pengadaan dari APBD yang merupakan konsolidasi dari seluruh perangkat daerah, rincian belanja modal Jalan Jaringan dan Irigasi sesuai dengan LRA adalah Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp31.767.134.102,00, Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp1.459.806.190,00, Belanja Modal Instalasi sebesar Rp3.361.174.154,15, dan Belanja Modal Jaringan Rp1.726.478.967,00. Pencatatan pada Aplikasi Simda BMD dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.
   b. Penerimaan Hibah sebelum Tahun Berjalan sebesar Rp14.512.908.745,00 merupakan penambahan dari perolehan hibah berupa fasilitas Pengolahan Sampah di TPST Linggasana yang telah dibangun tahun 2016 namun baru di serahterimakan pada tahun 2025 dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara nomor 393/BA/DC/2025 dan 000.2.5/1316/PBMD/BPKAD/SETDA. Tanggal 12 Agustus 2025.
   c. Reklasifikasi penambahan antar Aset Tetap sebesar Rp1.512.730.500,00 terdapat penambahan dari aset tetap klasifikasi yang lain, reklas ini karena menyesuaikan fungsi BMD sesuai dengan penggunaannya. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang melakukan reklasifikasi ini yakni:

Tabel 5.101 Rincian Reklasifikasi Penambahan Antar Aset Tetap

Perangkat Daerah	Jenis BMD Sekarang	Jenis BMD Sebelumnya	Jumlah
Puskesmas Selat	Jalan Jaringan dan Irigasi	Peralatan dan Mesin	2.334.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Jaringan dan Irigasi	Kontruksi Dalam Pengerjaan	781.536.000,00
Dinas Perhubungan	Jalan Jaringan dan Irigasi	Gedung dan Bangunan	728.860.000,00
Jumlah			**1.512.730.500,00**

   d. Mutasi antar Perangkat Daerah terjadi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp18.905.256,00 yakni berupa Sumur Resapan senilai Rp1.576.000,00, Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang senilai Rp10.329.256,00 dan Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain senilai Rp7.000.000,00.
   e. Reklasifikasi pengurang antar Aset Tetap sebesar Rp697.498.114,00 Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kontruksi Dalam Pengerjaan dikarenakan merupakan pengurangan Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena BMD baru berupa *Detail Engineering Design*.

f. Reklasifikasi pengurang ke Aset Lainnya sebesar Rp488.867.391,00 Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kontruksi Dalam Pengerjaan dikarenakan kurangnya volume atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut

g. Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2024 masih memuat berbagai permasalahan, di antaranya:

1) Dua aset ruas jalan dengan tahun perolehan 2004 dan 2005 tercatat dengan nilai sebesar Rp0,00, yaitu Jalan Setapak Desa Duda dan Jalan Setapak Desa Sangkan Gunung dalam KIB D DPUPRKIM. Pengurus Barang, Jabatan Fungsional Bidang Bina Marga (BM), dan Kepala DPUPRKIM menjelaskan kedua ruas jalan tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum ditemukan dokumen pengadaan/perolehannya untuk lebih lanjut ditindaklanjuti dengan pencatatan nilai atau penghapusan aset.

2) Aset Tetap berupa jalan yang tidak dikuasai Pemerintah Kabupaten Karangasem belum diproses pemindahtanganan yaitu empat ruas jalan kabupaten yang *upgrade* menjadi jalan provinsi, terkait hal tersebut telah dilakukan rapat koordinasi dengan BPKAD Prov. Bali dan Dinas PUPR Prov. Langkah di tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan lokasi bersama Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan BPKAD Prov. Bali untuk mengetahui lokasi jalan, kondisi jalan beserta kepemilikan tanah jalan tersebut agar tidak menimbulkan dampak selanjutnya dan disepakati untuk melakukan hibah ke Provinsi Bali namun hingga saat ini belum ditindak lanjuti. Adapun ruas jalan yang mengalami *upgrad*e adalah sebagai berikut.

Tabel 5.102 Rincian Ruas Jalan yang Belum Diproses Pemindahtanganan

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang (Km)
1.	Simp. Bajo - Lempuyang – Telaga Mas	5,33
2.	Batusesa – Besakih	5,55
3.	Jalan Lingkar Bebandem	0,41
4.	Jalan Lingkar Pelabuhan Padangbai	0,42

3) Terdapat dua ruas jalan provinsi yang *downgrade* menjadi jalan kabupaten, yaitu Jalan Simpang Tista – Lempuyang dan Jalan Wates Tengah – Pesangkan (sebagian panjang jalan) belum dimohonkan hibah ruas jalan dan tanah di bawah jalannya.

4) Terdapat 74 item aset berupa penanganan atas ruas jalan lingkungan dan desa dengan nilai buku Rp3.696.453.361,06 meliputi pengaspalan, pembetonan atau rabat beton, pemasangan paving, dan perbaikan jalan serta lingkungan permukiman dengan tahun perolehan 2004 s.d. 2020, yang berada di wilayah desa pada Kabupaten Karangasem. Dalam tahun 2024 telah dilakukan penelusuran terhadap 74 item aset dan dari penelusuran yang dilakukan ditemukan lokasi aset sebanyak 19 item sesuai dengan ***Lampiran 38.***

5) Terdapat perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap Aset Tetap belum ditambahkan atau dikapitalisasi pada nilai tercatat aset bersangkutan (Aset Induk). Sebanyak 50 item aset berupa pekerjaan perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan aset yang belum diketahui aset induknya dengan tahun perolehan 2002 s.d. 2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.490.733.627,00, nilai penyusutan sebesar Rp3.208.327.758,00 dan nilai buku sebesar Rp282.405.869,00 pada KIB D DPUPRKIM. Permasalahan

tersebut berdampak terhadap perhitungan masa umur manfaat maupun penyusutan aset. Pengurus Barang dan Kepala DPUPRKIM menjelaskan pekerjaan tersebut tidak dapat menunjuk secara spesifik lokasi pekerjaan sehingga belum diketahui aset induknya. Inventarisasi atas Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi belum pernah dilaksanakan termasuk atas aset pekerjaan perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan tersebut yang belum ditambahkan ke aset induk.

6) Permasalahan lainnya yaitu perencanaan yang tidak terdapat kelanjutan pembangunan fisik tercatat sebagai Aset Tetap. Terdapat 16 item aset berupa pekerjaan perencanaan embung, perencanaan jaringan air bersih/air minum, dan perencanaan konstruksi pengaman pantai dengan tahun perolehan 2007 s.d. 2011 dengan nilai buku sebesar Rp0,00 pada KIB D DPUPRKIM. Pengurus Barang, Pejabat Fungsional Bidang SDA, dan Kepala DPUPRKIM menjelaskan aset perencanaan tersebut tidak mempunyai aset induk karena tidak terdapat kelanjutan pembangunan fisik. Ditahun 2025 telah diusulkan penghapusan dengan alasan sebab lain namun hingga akhir 2025 belum ditindaklanjuti.

3. Rincian mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 39***.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.103 Rincian Aset tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	37.342.569.783,35	36.451.305.827,35	891.263.956,00	2,45
Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.638.874.836,00	3.453.486.850,00	185.387.986,00	5,37
Hewan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00
Biota Perairan	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00
Tanaman	539.123.300,00	539.123.300,00	0,00	0,00
Jumlah	**41.744.567.919,35**	**40.667.915.977,35**	**1.076.651.942,00**	**2,65**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.104 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**40.667.915.977,35**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	1.096.394.042,00	
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	0,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
Kurang Catat	0,00	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**1.096.394.042,00**
Mutasi Kurang:		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(441.000,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(19.301.100,00)	
- Belanja Modal Tahun Berjalan yang diserahkan ke sekolah swasta	0,00	
- Penghapusan tahun 2025	0,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
Lebih Catat	0,00	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		**(19.742.100,00)**
Saldo Akhir		**41.744.567.919,35**

2. Jumlah Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca sejumlah Rp41.744.567.919,35 dengan penjelasan mutasi tambah kurang sebagai berikut:
   a. Pengadaan dari APBD berupa Belanja Modal sebesar Rp1.096.394.042,00.
   b. Reklasifikasi Kurang ke Peralatan dan mesin dari Aset tetap Lainnya karena salah pos belanja sebesar Rp441.000,00 berupa tiga buah Alat Peraga Praktek Sekolah pada SD 3 Pertima.
   c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp19.301.100,00 karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan.
3. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 40***.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.275.366.744,72	28.436.539.044,00	2.838.827.700,72	9,98

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.106 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**28.436.539.044,00**
Mutasi Tambah:		
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	2.059.513.841,28	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.882.873.043,44	
- Utang Belanja	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**3.942.386.884,72**
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(1.034.764.293,00)	
- Pelunasan Utang Tahun 2025	(68.794.891,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(1.103.559.184,00)**
Saldo Akhir		**31.275.366.744,72**

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp31.275.366.744,72 merupakan hasil mutasi penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Penambahan dari belanja non-belanja modal sebesar Rp2.059.513.841,28 yang berupa perencanaan/DED pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejumlah Rp2.030.548.560,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sejumlah Rp28.965.281,00 yang diperoleh dari belanja barang dan jasa;
   b. Terdapat reklasifikasi tambah antar aset tetap ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.882.873.043,44 dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.185.374.929,44 dan dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp697.498.114,00 berupa perencanaan/DED yang belum terselesaikan .
   c. Reklasifikasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sejumlah Rp1.034.764.293,00 yang terjadi di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem sebesar Rp253.228.293,00 merupakan reklasifikasi ke Gedung Bangunan Pendidikan Permanen pada SMP 6 Abang dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa

Jalan Jaringan dan Irigasi dalam pengerjaan yang telah di kapitalisasi ke aset induknya sejumlah Rp781.536.000,00.

d. Terdapat pengurangan sebesar Rp68.794.891,00 merupakan pelunasan Utang Jangka Pendek atas perolehan Gedung dan Bangunan Mall Pelayanan Publik, Wantilan dan Bangunan Krematorium yang juga ketiga bangunan tersebut masih tercatat pada kontruksi dalam pengerjaan.

3. Dari jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tercantum dalam daftar BMD pada KIB F tidak seluruhnya akan dikerjakan fisiknya dikarenakan KDP tersebut telah diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya dimana dengan pergantian kepemimpinan daerah sudah tentu memiliki visi dan misi yang berbeda sehingga perlu dilakukan inventarisasi dan kajian terhadap perencanaan yang dicatatkan Perangkat Daerah, dengan tujuan untuk dapat menghapuskan KDP yang tidak mungkin untuk dilanjutkan pembangunannya, sehingga aset yang dicatatkan dalam LKPD menjadi lebih riil.
4. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 41*** **dan** ***Lampiran 42***.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.107 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(544.782.463.362,25)	(496.134.396.259,29)	(48.648.067.102,96)	9,81
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(485.653.127.931,43)	(452.382.581.758,03)	(33.270.546.173,40)	7,35
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.354.715.449.294,72)	(1.280.313.087.248,96)	(74.402.362.045,76)	5,81
Jumlah	**(2.385.151.040.588,40)**	**(2.228.830.065.266,28)**	**(156.320.975.322,12)**	**7,01**

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem menggunakan metode penyusutan untuk aset tetap adalah metode garis lurus dengan perhitungan bulanan yang mana perhitungan beban penyusutan meliputi harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis yang telah diestimasi sejak barang diadakan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Beban penyusutan dari tahun ke tahun terakumulasi menjadi akumulasi penyusutan aset tetap yang mengurangi harga perolehan sehingga nilai buku dapat diperoleh terhadap aset tetap.
2. Saat terjadi kapitalisasi aset tetap atau penambahan harga perolehan setelah tanggal perolehan maka beban penyusutan dihitung kembali berdasarkan sisa nilai buku ditambah dengan besarnya nilai kapitalisasi dibagi dengan masa manfaat yang tersisa yang ditambahkan dengan penambahan masa manfaat sesuai dengan persentase nilai kapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Jika terjadi reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya karena tidak dapat dipergunakan atau dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah maka beban penyusutan dihentikan atau tidak diperhitungkan mulai saat dilakukan penghentian penggunaan.

4. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.108 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**(2.228.830.065.266,28)**
Mutasi Tambah:		
- Beban Penyusutan	(154.316.664.808,12)	
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	(10.601.366.853,00)	
- Reklasifikasi antar aset tetap	(553.933.600,00)	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
Kurang Catat	(18.410.300,00)	
Akmulasi atas Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(1.756.597.205,00)	
Jumlah Mutasi Tambah		**(167.246.972.766,12)**
Mutasi Kurang:		
- Pengakuan Ekstrakomtabel	14.828.839,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	553.933.600,00	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	7.454.555.934,00	
- Reklasifikasi ke Properti Investasi	284.026.120,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
Lebih Catat	1.852.760,00	
- Penghapusan Tahun 2025	860.202.986,00	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	1.756.597.205,00	
Jumlah Mutasi Kurang		**10.925.997.444,00**
Saldo Akhir		**(2.385.151.040.588,40)**

5. Penjelasan mutasi Akumulasi Penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Beban penyusutan tahun berjalan adalah sebesar Rp154.316.664.808,12 yang diperhitungkan dengan menggunakan Aplikasi Simda BMD;
   b. Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat hibah yang diterima tahun 2025 namun tahun perolehan BMD tersebut sebelum tahun 2025 sehingga terdapat penambahan saldo awal akumulasi penyusutan hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp10.601.366.853,00 jumlah tersebut terjadi atas hibah BMD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp13.724.616,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp10.233.514.863,00 dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp354.127.374,00;
   c. Mutasi tambah kurang berupa Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp553.933.600,00 merupakan akibat dari reklasifikasi BMD dari klasifikasi Gedung dan Bangunan ke Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem yang disebabkan oleh kapitalisasi/penggabungan BMD berupa Jembatan Penyebrangan (Pelabuhan Rakyat di Desa Padang Bai) dimana pada daftar barang (KIB) tahun 2024 masih terpisah antara Jembatan Penyebrangan (Dermaga) yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Bali dengan bangunan yang ada di atasnya yang merupakan perolehan APBD Kabupaten Karangasem;
   d. Koreksi penambahan pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp18.410.300,00 karena Kapitalisasi/penggabungan BMD dimana perbedaan masa manfaat antara Jalan Jaringan dan Irigasi dengan Gedung dan Bangunan menyebabkan selisih sehingga disesuaikan agar selaras dengan hasil perhitungan Aplikasi Simda BMD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem;
   e. Mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp1.756.597.205,00 yang merupakan penambahan dan pengurangan dengan nilai yang sama pada perangkat daerah terkait namun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh;
   f. Terdapat pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp14.828.839,00 karena BMD tersebut berklasifikasi sebagai barang Ekstrakomptabel yang mana barang tersebut dianggarkan di belanja modal namun nilai perolehannya di bawah

batas kapitalisasi aset tetap yang tertuang dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem;

g. Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp7.454.555.934,00 yang diakibatkan penghentian penggunaan BMD seluruh klasifikasi BMD;
h. Pengurangan karena Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp284.026.120,00 yang diakibatkan penghentian penggunaan BMD seluruh klasifikasi BMD;
i. Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.852.760,00 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah berupa Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas Kapitalisasi/penggabungan BMD untuk gedung yang baru dialihkan status penggunaan BMD dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pemeliharaannya yang dilakukan tahun 2024 sekaligus penyesuaian dengan aplikasi Simda BMD;
j. Pengurangan karena Penghapusan BMD sebesar Rp860.202.986,00 merupakan akumulasi penyusutan terhadap BMD yang dipindahtangankan dan selanjutnya dilakukan penghapusan BMD.

6. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 43***.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.109 Rincian Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	27.355.979.937,00	27.355.979.937,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.727.745.050,00	1.708.098.050,00	19.647.000,00	1,15
Aset Lain-lain	154.574.682.110,66	156.235.737.155,76	(1.661.055.045,10)	(1,06)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(768.866.302,00)	(455.633.371,00)	(313.232.931,00)	68,75
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(132.748.258.256,75)	(133.533.082.496,75)	784.824.240,00	(0,59)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	359.957.000,00	(359.957.000,00)	(100,00)
Jumlah	**50.141.282.538,91**	**51.671.056.275,01**	**(1.529.773.736,10)**	**(2,96)**

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tagihan Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Tagihan Jangka Panjang serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.110 Rincian Tagihan Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	100.787.600,00	100.787.600,00	0,00	0,00
Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(100.787.600,00)	(100.787.600,00)	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Kabupaten Karangasem LHP Nomor 08.C/BPK.DPS/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 yaitu Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem sebesar Rp266.211.400,00 tidak didukung bukti yang memadai. Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut per 31 Desember 2025 belum ditindaklanjuti sebesar Rp100.787.600,00

dan telah dilakukan penyisihan sebesar nilai yang sama. Upaya penagihan atas TGR tersebut masih diupayakan sampai saat ini oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem.

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.111 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kerja Sama Pemanfaatan	27.355.979.937,00	27.355.979.937,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(2.665.790.521,00)	(2.665.790.521,00)	0,00	0,00
Jumlah	**24.690.189.416,00**	**24.690.189.416,00**	0,00	**0,00**

Penjelasan:

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024. Bentuk aset tetap yang dikerjasamakan pemanfaatannya berupa pinjam pakai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Bentuk Aset Tetap Yang Dikerjasamakan Pemanfaatannya

Uraian	31 Desember 2025
Tanah	23.667.523.000,00
Peralatan dan Mesin	3.252.197.937,00
Gedung dan Bangunan	436.259.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.456.707.521,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(209.083.000,00)
Jumlah	**24.690.189.416,00**

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 44***.

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.113 Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	1.727.745.050,00	1.708.098.050,00	19.647.000,00	1,15
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(768.866.302,00)	(455.633.371,00)	(313.232.931,00)	68,75
Jumlah	**958.878.748,00**	**1.252.464.679,00**	**(293.585.931,00)**	**(23,44)**

Penjelasan:

1. Realisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 lebih tinggi dari Tahun 2024 disebabkan karena ada penambahan Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perhubungan sebesar Rp19.647.000,00
2. Rincian perangkat daerah yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.114 Rincian Perangkat Daerah Yang Memiliki Aset Tidak Berwujud

Perangkat Daerah	Nilai Perolehan
Dinas pendidikan, Kependudukan dan Olahraga	132.928.050,00
Dinas Kesehatan	168.470.000,00
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	294.150.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.800.000,00
Dinas Perhubungan	141.747.000,00

Perangkat Daerah	Nilai Perolehan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	67.700.000,00
Kecamatan Karangasem - Kelurahan Karangasem	35.000.000,00
Kecamatan Karangasem - Kelurahan Subagan	43.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	732.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	93.450.000,00
Jumlah	**1.727.745.050,00**

Mutasi Penambahan Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terdapat Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp19.647.000,00 yang merupakan perolehan dari APBD/Belanja Modal pada Dinas Perhubungan;dan
b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp313.232.931,00 di tahun 2025 berdasarkan perhitungan melalui aplikasi Simda BMD.

3. Rincian Aset Tidak Berwujud pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 45***.

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-Lain per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.115 Rincian Aset Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lain-lain	154.574.682.110,66	156.235.737.155,76	(1.661.055.045,10)	(1,06)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(130.082.467.735,75)	(130.867.291.975,75)	784.824.240,00	(0,60)
Jumlah	**24.492.214.374,91**	**25.368.445.180,01**	**-876.230.805,10**	**-3,45**

Rincian mutasi Aset Lain-lain selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.116 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**25.368.445.180,01**
Mutasi Tambah:		
- Reklas dari Aset Tetap	1.190.835.319,95	
- Mutasi Antar PD	508.333,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**1.191.343.652,95**
Mutasi Kurang:		
- Reklas ke Aset Tetap	0,00	
- Penghapusan	(2.067.066.125,05)	
- Mutasi Antar PD	(508.333,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(2.067.574.458,05)**
Saldo Akhir		**24.492.214.374,91**

Penjelasan:

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 memiliki nilai buku sebesar Rp24.492.214.374,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rincian Aset Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lain-Lain	**154.574.682.110,66**	**156.235.737.155,76**	**(1.661.055.045,10)**	**(1,06)**
Aset Rusak Berat/Usang	146.461.531.464,71	147.234.737.150,76	(773.205.686,05)	(0,53)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	8.113.150.645,95	9.001.000.005,00	(887.849.359,05)	(9,86)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	**(130.082.467.735,75)**	**(130.867.291.975,75)**	**784.824.240,00**	**(0,60)**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Rusak Berat/Usang	(127.249.007.790,06)	(128.033.832.030,06)	784.824.240,00	(0,61)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	(2.833.459.945,69)	(2.833.459.945,69)	(0,00)	0,00
Jumlah	**24.492.214.374,91**	**25.368.445.180,01**	**(876.230.805,10)**	**(3,45)**

5.3.1.4.4.1 Aset Rusak Berat/Usang

Pada Aset Rusak Berat/Usang dimana rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Rusak Berat/Usang serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.118 Rincian Aset Rusak Berat/Usang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	146.461.531.464,71	147.234.737.150,76	(773.205.686,05)	(0,53)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang	(127.249.007.790,06)	(128.033.832.030,06)	784.824.240,00	(0,61)
Jumlah	**19.212.523.674,65**	**19.200.905.120,70**	**11.618.553,95**	**0,06**

Penjelasan :

Jumlah sebesar Rp19.212.523.674,65 merupakan saldo nilai buku Aset Rusak Berat/Usang yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pemerintahan per 31 Desember 2025. Di tahun 2025 terdapat mutasi tambah dan kurang dari keseluruhan Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp11.618.553,95 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.119 Rincian Mutasi Aset Rusak Berat/Usang

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	7.054.064.688,00	6.757.758.453,00	296.306.235,00
Gedung dan Bangunan	959.885.825,00	696.797.481,00	263.088.344,00
Aset Tetap Lainnya	19.301.100,00	0,00	19.301.100,00
Penambahan pindah antar perangkat daerah			
Peralatan dan Mesin	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00
Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	1.991.667,00	508.333,00
Pengurangan Berupa Penghapusan Aset Lainnya			
Peralatan dan Mesin	(5.987.824.586,00)	(5.987.624.169,00)	(200.417,00)
Gedung dan Bangunan	(1.572.684.713,05)	(1.182.631.505,00)	(390.053.208,05)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.245.948.000,00)	(1.069.124.500,00)	(176.823.500,00)
Pengurangan pindah antar perangkat daerah			
Peralatan dan Mesin	(3.410.000,00)	(3.410.000,00)	0,00
Gedung dan Bangunan	(2.500.000,00)	(1.991.667,00)	(508.333,00)
Total Penambahan Nilai Buku Aset Rusak Berat/Usang	**(773.205.686,05)**	**(784.824.240,00)**	**11.618.553,95**

Penjelasan:

1. Rincian Aset Rusak Berat/Usang per perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 46***. Atas Aset Rusak Berat/Usang telah dilakukan pengajuan usulan penghapusan, di tahun 2025 sudah dibentuk Tim Teknis Penghapusan BMD dan di tahun 2025 telah ditindaklanjuti berupa pemindahtanganan peralatan dan mesin juga Jalan Jaringan dan Irigasi yang diteruskan dengan menerbitkan surat Keputusan sekretaris daerah untuk penghapusan dari daftar BMD;
2. Untuk proses pemindahtanganan pada tahun 2025 sudah dilaksanakan pengajuan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja atas BMD Rusak Berat jenis Peralatan dan Mesin juga Gedung dan Bangunan dengan nilai lelang yang sudah masuk ke Kas Daerah sebesar Rp24.868.000,00 yang dicatat dalam Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA dan Surplus Non Operasional atas Penjualan Aset Non Lancar-LO;
3. Untuk mutasi tambah kurang dapat disampaikan sebagai berikut:
    a. Penambahan Aset Lainnya yang berkategori Aset Usang ataupun rusak berat adalah dari reklasifikasi dari aset tetap pada klasifikasi Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya dengan total Penambahan nilai buku Rp578.695.679,00;
    b. Pengurangan Aset Lainnya yang berkategori Aset Usang ataupun rusak berat adalah dari penghapusan aset tersebut yang dilakukan dengan

pemindahtanganan sebesar Rp7.560.509.299,05 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp7.170.255.674,00 sehingga nilai buku penghapusan adalah sebesar Rp390.253.625,05. Selain penghapusan karena pemindahtanganan juga dilakukan penghapusan sebab lain karena BMD berupa Jalan Jaringan dan Irigasi tersebut telah ditelusuri namun tidak diketemukan sebanyak 17 Jalan Khusus Komplek seharga Rp1.245.948.000,00 dengan akumulasi penyusutan Rp1.069.124.500,00 dan nilai buku Rp176.823.500,00. Sehingga pengurangan bersih sebesar Rp 567.077.125,05;

c. Dari perhitungan diatas terjadi penambahan nilai buku Aset Lainnya yang Aset Usang ataupun rusak berat sejumlah Rp11.618.553,95; dan

d. Pengalihan status penggunaan BMD atau Pindah antar Perangkat Daerah yang berklasifikasi Aset Lainnya yang Aset Usang ataupun rusak berat tidak diperhitungkan karena tidak menambah maupun tidak mengurangi total aset secara keseluruhan.

5.3.1.4.4.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Pada Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah dimana rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.120 Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak yang akan Dihapuskan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir pada Disperindag	0,00	0,00	0,00	0,00
Ternak Guliran dan Tanaman	2.015.034.366,00	2.015.034.366,00	0,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihibahkan/Disertakan	5.666.935.279,95	6.554.784.639,00	(887.849.359,05)	(13,55)
Aset Tetap yang akan Dihapuskan Selain Rusak Berat	223.336.000,00	223.336.000,00	0,00	0,00
Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut	207.845.000,00	207.845.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan	(2.806.354.145,69)	(2.806.354.145,69)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut	(27.105.800,00)	(27.105.800,00)	0,00	0,00
Jumlah	**5.279.690.700,26**	**6.167.540.059,31**	**(887.849.359,05)**	**(14,40)**

Penjelasan:

1. Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan

   Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo piutang bersih pajak yang dapat direalisasikan dan direncanakan akan dihapuskan per 31 Desember 2022 sesuai dengan surat usulan penghapusan piutang pajak nomor 973/803.a/Dispenda tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp940.631.736,44 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal Neraca (31 Desember 2025) belum dilakukan pelunasan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Rincian piutang pajak yang akan dihapuskan dapat dilihat pada ***Lampiran 47***.

2. Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung

   Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo tagihan piutang bersih atas tunggakan pembayaran sewa Taman Wisata Putung oleh PT Panca Bahagia Rahayu sebesar Rp13.040.000,00 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal Neraca

(31 Desember 2025) belum dilakukan pelunasan oleh yang bersangkutan. Tagihan atas pembayaran sewa Taman Wisata Putung sampai akhir Tahun 2020 belum dilaksanakan usulan penghapusan.

Taman Wisata Putung dikelola oleh pihak ketiga (PT Panca Bahagia Rahayu) sesuai surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/21/Umum Tanggal 16 Mei 1998 untuk jangka waktu 25 tahun (30 April 1986 s.d. 1 Mei 2011) dengan nilai sewa per tahun Rp3.260.000,00. Namun dalam pelaksanaannya pihak ketiga (PT Panca Bahagia Rahayu) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga terdapat tunggakan sewa selama 4 tahun (2001 s.d. 2004), dan telah dilakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Panca Bahagia Rahayu. Sampai dengan tanggal neraca (31 Desember 2025), belum ada penyelesaian tunggakan sewa tersebut di atas.

3. Dana Bergulir pada Diskopperindag

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo dana bergulir Disperindag pada aset lainnya per 31 Desember 2025. Saldo dana bergulir atas piutang yang dinyatakan PSBDT oleh PUPN dan diusulkan penghapusan sebesar Rp205.546.950,35. Pada Tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem melaksanakan penyerahan penyelesaian piutang atas Investasi Dana Bergulir kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja pada tanggal 6 Maret 2017 dengan Surat Nomor 181.3/656/Disperindag perihal penyerahan penyelesaian penghapusan piutang macet. Sejak diterima oleh KPKNL maka proses penagihan atas piutang dana bergulir dilaksanakan oleh pihak KPKNL dan sampai tanggal 31 Desember 2023 proses tersebut sudah berakhir. Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Karangasem menyampaikan Surat Nomor 530/961/Diskoperindag/Ind tanggal 4 April 2023 Perihal Usulan Penghapusan Piutang Sementara kepada Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah Bali sebesar Rp205.546.950,35. Atas hal tersebut Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan Surat Nomor S-1361/KNL.1402/2024 tanggal 24 November 2024 serta sudah ditindaklanjuti kembali dengan Surat Kepala BPKAD Nomor 900.1.7.3/2276/Bid.Akpel/BPKAD tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Bali.

4. Ternak Guliran dan Tanaman

Jumlah sebesar Rp2.015.034.366,00 merupakan saldo ternak guliran sebesar Rp1.992.165.366,00 dan tanaman perkebunan lain-lain pada Dinas Pertanian sebesar Rp22.869.000,00. Atas ternak yang digulirkan dari Tahun 2003, pada tahun 2025 tidak terjadi penagihan dan perguliran kembali kepada petani. Rincian dari Ternak Guliran dan Tanaman sesuai rincian di bawah:

Tabel 5.121 Rincian Rincian dari Ternak Guliran dan Tanaman

Jenis Ternak	Tahun Pemberian	Saldo 31 Desember 2025	
		Jumlah	Nilai
Ternak Guliran			
Sapi	2003	36	62.947.500,00
Sapi	2004	16	38.325.000,00
Sapi dan Kambing	2005	30	18.050.000,00
Sapi dan Kambing	2006	34	58.650.000,00
Sapi, Kambing dan Babi	2007	658	915.089.110,00
Sapi, Kambing, Babi, Itik dan Ayam	2008	4.425	899.103.756,00
Tanaman			22.869.000,00
	Jumlah	**5.199**	**2.015.034.366,00**

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihibahkan/Disertakan

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihibahkan/Disertakan sebesar Rp2.860.581.134,26 yang merupakan saldo nilai buku aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak Pihak Ketiga per 31 Desember 2025. Nilai tersebut diatas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihibahkan/Disertakan

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
Peralatan dan Mesin	1.441.764.255,00	1.409.434.249,00	32.330.006,00	Sekolah swasta
	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Rusak berat sekolah swasta
	119.903.000,00	119.903.000,00	0,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
Gedung dan Bangunan	1.932.130.384,00	660.943.183,36	1.271.187.200,64	Sekolah swasta
	415.543.000,00	23.212.800,00	392.330.200,00	Rusak berat sekolah swasta
	357.326.000,00	91.638.080,00	265.687.920,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
	5.872.469,15	0,00	5.872.469,15	Kurang Volume atas Belanja Modal pada TK Negeri 1 Manggis
	6.290.831,31	0,00	6.290.831,31	Kurang Volume atas Belanja Modal pada SMP 3 Amlapura
	5.678.315,00	0,00	5.678.315,00	Kurang Volume atas Belanja Modal pada Satap Tianyar Barat/SD 3 Tianyar Barat
	5.777.759,00	0,00	5.777.759,00	Kurang Volume atas Belanja Modal pada SD 3 Tenganan
Aset Tetap Lainnya	117.550.000,00	117.550.000,00	0,00	Sekolah swasta
Dinas Perikanan				
Gedung dan Bangunan	212.500.000,00	42.500.000,00	170.000.000,00	Belum ada BAST
DPUPRKIM				
Gedung dan Bangunan	28.979.055,61	0,00	28.979.055,61	Kurang Volume atas Belanja Modal
Jalan, Jaringan dan Irigasi	408.079.000,00	341.172.833,33	66.906.166,67	Akan diserahkan ke Desa
	488.867.391,00	0,00	488.867.391,00	Kurang Volume atas Belanja Modal
Sat Pol PP				
Gedung dan Bangunan	6.870.280,32	0,00	6.870.280,32	Kurang Volume atas Belanja Modal
Dinas Kesehatan				
Gedung dan Bangunan	41.591.419,99	0,00	41.591.419,99	Kurang Volume atas Belanja Modal pada RS Pratama Kubu
	9.468.665,57	0,00	9.468.665,57	Kurang Volume atas Belanja Modal pada RSUD
	12.743.454,00	0,00	12.743.454,00	Kurang Volume atas Belanja Modal pada UPTD Puskesmas Sidemen
Jumlah	**5.666.935.279,95**	**2.806.354.145,69**	**2.860.581.134,26**	

Penjelasan:

a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah mengadakan penelusuran ke sekolah-sekolah swasta yang menerima aset dan menginstruksikan kepada penerima untuk memohon hibah yang hingga akhir Tahun 2025 sudah ditindaklanjuti oleh sebagian besar penerima hibah tersebut namun belum dihapuskan hingga akhir 2025.

b. Untuk aset jalan yang akan diserahkan ke desa yang tercatat pada DPUPRKIM hingga Tahun 2025 adalah sebesar Rp408.079.000,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp341.172.833,33 dan nilai buku sebesar Rp66.906.166,67.

c. Untuk Aset Lainnya yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihibahkan/Disertakan karena kurang volume pekerjaan pada tahun 2025 dikurangkan pada saat terjadi pelunasan atas nilai kekurangan volume masing – masing pekerjaan.

d. Rincian kurang volume pekerjaan dapat dilihat pada ***Lampiran 48.***

3. Aset Tetap akan Dihapuskan Selain Rusak Berat

Jumlah sebesar Rp223.336.000,00 merupakan saldo Aset Tetap yang akan dihapuskan dalam kondisi selain rusak berat per 31 Desember 2025. Atas aset tetap akan dihapuskan selain rusak berat tercatat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp223.336.000,00 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pasar Bebandem dan Pasar Seni Manggis yang berupa perencanaan (DED) yang dialihkan status penggunaannya/pindahan dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Karangasem belum mengambil kebijakan untuk menghapus DED tersebut walau perencanaan tersebut kemungkinan tidak dapat dilanjutkan mengingat pembangunan telah dilaksanakan dengan perencanaan yang berbeda.

4. Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut

Jumlah sebesar Rp180.739.200,00 merupakan saldo Gedung dan Bangunan yang belum dikapitalisasi per 31 Desember 2025. Rincian Aset Tetap tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.123 Rincian Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Gedung dan Bangunan	207.845.000,00	(27.105.800,00)	180.739.200,00	Aset yang belum dikapitalisasi

Atas aset yang belum dikapitalisasi serta ditelusuri lebih lanjut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga masih menelusuri dokumen pengadaannya namun belum ditemukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124 Rincian Dokumen Pengadaan yang Belum Ditemukan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	23.905.000,00	3.824.800,00	20.080.200,00
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	78.325.000,00	9.399.000,00	68.926.000,00
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	30.250.000,00	3.630.000,00	26.620.000,00
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	46.250.000,00	5.550.000,00	40.700.000,00
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	24.800.000,00	2.976.000,00	21.824.000,00
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen/Perencanaan	4.315.000,00	1.726.000,00	2.589.000,00
Jumlah	**207.845.000,00**	**27.105.800,00**	**180.739.200,00**

5.3.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.125 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(768.866.302,00)	(455.633.371,00)	(313.232.931,00)	68,75

Penjelasan:

1. Realisasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud lebih tinggi dari Tahun 2024 dikarenakan penambahan atas penyusutan tahun berjalan.
2. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Perangkat Daerah

Perangkat Daerah	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Dinas Pendidikan, Kependudukan dan Olahraga	(56.772.985,00)
Dinas Kesehatan	(114.664.250,00)
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	(122.562.500,00)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(18.800.000,00)
Dinas Perhubungan	(122.754.900,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	(53.256.667,00)
Kecamatan Karangasem - Kelurahan Karangasem	(18.833.333,00)
Kecamatan Karangasem - Kelurahan Subagan	(28.100.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(205.416.667,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	(27.705.000,00)
Jumlah	**(768.866.302,00)**

5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.127 Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**(2.665.790.521,00)**	**(2.665.790.521,00)**	**0,00**	**0,00**
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(2.665.790.521,00)	(2.665.790.521,00)	0,00	**0,00**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	**(130.082.467.735,75)**	**(130.867.291.975,75)**	**784.824.240,00**	**(0,60)**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Rusak Berat/Usang	(127.249.007.790,06)	(128.033.832.030,06)	784.824.240,00	(0,61)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	(2.833.459.945,69)	(2.833.459.945,69)	0,00	0,00
Jumlah	**(132.748.258.256,75)**	**(133.533.082.496,75)**	**784.824.240,00**	**(0,59)**

Penjelasan:

1. Realisasi Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sama dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak ada penambahan atas penyusutan tahun berjalan.
2. Realisasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain lebih rendah dari Tahun 2024 dikarenakan penyusutan atas penghapusan aset lain-lain lebih besar daripada penambahan atas penyusutan tahun berjalan.

5.3.1.4.7 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana TDF per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana TDF serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.128 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	359.957.000,00	(359.957.000,00)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**359.957.000,00**	**(359.957.000,00)**	**(100,00)**

Pemerintah Kabupaten Karangasem mencatat Dana Transfer TDF untuk saldo pokok *Treasury Deposit Facility* Transfer Daerah (TKF-TKD) Tahun 2025 sebesar Rp0,00

berdasarkan saldo yang tercantum dalam aplikasi SIKD *Next Generation* pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan Surat S-35/PK/PK.2/2025 tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facilty ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025.

5.3.1.5 Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Properti Investasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.129 Rincian Properti Investasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Properti Investasi Tanah	155.500.000,00	0,00	155.500.000,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	416.140.000,00	0,00	416.140.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(282.429.390,00)	0,00	(282.429.390,00)	0,00
Jumlah	**289.210.610,00**	**0,00**	**289.210.610,00**	**0,00**

5.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Properti Investasi Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.130 Rincian Properti Investasi Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Properti Investasi Tanah	155.500.000,00	0,00	155.500.000,00	0,00
Jumlah	**155.500.000,00**	**0,00**	**155.500.000,00**	**0,00**

Penjelasan:

Saldo Properti Investasi Tanah sebesar Rp155.500.000,00 pada TA 2025 dikarenakan adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang sudah seharusnya dikategorikan menjadi Properti Investasi Tanah.

5.3.1.5.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Properti Investasi Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.131 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	416.140.000,00	0,00	416.140.000,00	0,00
Jumlah	**416.140.000,00**	**0,00**	**416.140.000,00**	**0,00**

Penjelasan:

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp416.140.000,00 pada TA 2025 dikarenakan adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa bangunan gedung dan kantor, bangunan gedung tempat ibadah, dan Rumah Negara Golongan II pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang sudah seharusnya di kategorikan menjadi Properti Investasi Gedung dan Bangunan.

5.3.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Akumulasi Penyusutan Properti Investasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.132 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(282.429.390,00)	0,00	(282.429.390,00)	0,00
Jumlah	**(282.429.390,00)**	**0,00**	**(282.429.390,00)**	**0,00**

Penjelasan:

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp282.429.390,00 pada TA 2025 dikarenakan adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sehingga nilai akumulasi yang melekat pada aset tersebut juga turut berpindah sehingga menjadi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Tabel 5.133 Rincian Kewajiban

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	43.181.218.383,23	43.407.607.558,80	(226.389.175,57)	(0,52)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**43.181.218.383,23**	**43.407.607.558,80**	**(226.389.175,57)**	**(0,52)**

Penjelasan:

Tidak termasuk saldo Utang Belanja adalah uang Jaminan Reklamasi yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan ditempatkan bentuk Bilyet deposito dengan saldo per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.053.554.150,00. Uang jaminan reklamasi tersebut diberikan oleh para Penambang Galian C yang beroperasional di Kabupaten Karangasem, dan dapat dicairkan ketika para penambang tersebut telah memenuhi kewajibannya dalam mereklamasi daerah tambangnya. Rincian dana jaminan reklamasi tersebut dapat dilihat pada ***Lampiran 49.***

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Tabel 5.134 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	1.123.682,00	(1.123.682,00)	(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	356.525.383,33	1.416.478.850,00	(1.059.953.466,67)	(74,83)
Utang Belanja	42.450.242.069,90	41.990.004.939,28	460.237.130,62	1,10
Utang Jangka Pendek Lainnya	374.450.930,00	87,52	374.450.842,48	427.846.026,60
Jumlah	**43.181.218.383,23**	**43.407.607.558,80**	**(226.389.175,57)**	**(0,52)**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per tanggal Neraca yaitu rincian

nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Bendahara (Selain BUD) serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.135 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Iuran Wajib Pegawai 1% BPJS	0,00	1.123.682,00	(1.123.682,00)	(100,00)

Penjelasan:

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dikarenakan tidak adanya pengklasifikasian utang kepada Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada tahun 2025 serta telah dilakukannya pelunasan atas Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2025 atas Iuran Wajib Pegawai 1% BPJS pada UPTD Puskesmas Abang 1 telah disetorkan ke BPJS oleh Bendahara BLUD UPTD Puskesmas Abang 1 di Kabupaten Karangasem tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp1.123.682,00.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.136 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka–Belanja Sewa	**259.247.333,33**	**1.295.289.666,67**	**(1.036.042.333,34)**	**(79,99)**
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	97.999.333,33	134.708.666,67	(36.709.333,34)	(27,25)
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	161.248.000,00	221.716.000,00	(60.468.000,00)	(27,27)
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	938.865.000,00	(938.865.000,00)	(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka–Pajak Daerah	**97.278.050,00**	**121.189.183,33**	**(23.911.133,33)**	**(19,73)**
Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	97.278.050,00	121.189.183,33	(23.911.133,33)	(19,73)
Jumlah	**356.525.383,33**	**1.416.478.850,00**	**(1.059.953.466,67)**	**(74,83)**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab kenaikan dan penurunan Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Penurunan Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa disebabkan Pendapatan Sewa Aset Tidak Berwujud di reklasifikasi ke Pendapatan LO; dan
   b. Penurunan Pajak Reklame Diterima Dimuka dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan objek pajak yang jangka waktu berlakunya melewati Tahun 2025 lebih rendah.
2. Atas saldo Pendapatan Diterima Dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.
3. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka tersebut dapat dilihat pada ***Lampiran 50***.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja sebagai berikut:

Tabel 5.137 Rincian Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	12.588.826.704,90	18.012.626.863,28	(5.423.800.158,38)	(30,11)
Utang Belanja Barang dan Jasa	28.635.686.598,00	21.266.542.167,00	7.369.144.431,00	34,65
Utang Belanja Hibah	0,00	55.084.122,00	(55.084.122,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	68.794.891,00	(68.794.891,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	1.225.728.767,00	2.586.956.896,00	(1.361.228.129,00)	(52,62)
Jumlah	**42.450.242.069,90**	**41.990.004.939,28**	**460.237.130,62**	**1,10**

Penjelasan:

1. Utang Belanja Tahun 2025 didalamnya termasuk utang belanja yang belum dibayarkan atas Belanja Pegawai yaitu belanja tambahan penghasilan pegawai, iuran jaminan kesehatan PNS dan PPPK, jasa pelayanan, insentif pemungutan retribusi, dan insentif pemungutan pajak sebesar Rp12.588.826.704,90, Utang Barang dan Jasa sebesar Rp28.635.686.598,00, dan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.225.728.767,00.
2. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami penurunan karena tidak tercapainya realisasi pajak daerah MBLB dan Reklame sehingga berpengaruh pada Belanja Insentif Pegawai dan Belanja Insentif KDH dan WKDH.
3. Utang Belanja Pegawai BLUD mengalami kenaikan karena ada banyaknya klaim yang ditunda dari BPJS yang belum dibayar oleh BPJS sehingga berpengaruh pada kenaikan utang jasa pelayanan.
4. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami kenaikan dari tahun 2025 karena adanya peningkatan harga kebutuhan operasional seperti obat, medis bahan habis pakai dan bahan kimia yang tidak dibarengi dengan penyesuaian dari tarif klaim BPJS.
5. Utang Belanja Hibah mengalami penurunan karena pengerjaan fisik posko kejaksaan sudah dapat diselesaikan oleh penyedia dan sudah dihibahkan ke kejaksaan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor :600.1.15/491/CK/DPUPRKIM tanggal 17 Februari 2025.
6. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan dari tahun 2024 karena Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa paket konsolidasi pekerjaan pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) dan pembangunan wantilan budaya yang bersumber dari dana BKK sudah terbayarkan di Tahun 2025.
7. Utang Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan karena menyesuaikan dengan capaian pendapatan pajak dan retribusi setiap tahunnya.
8. Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 51 dan 52***.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.138 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Jangka Pendek Lainnya	**374.450.930,00**	**87,52**	**374.450.842,48**	**427.846.026,60**

Penjelasan:

1. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya di Tahun 2025 sebesar Rp374.450.930,00 merupakan utang kepada Pemerintah Provinsi Bali yang terdiri dari opsen Pajak MBLB yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp330.245.000,00 dan denda opsen pajak MBLB sebesar Rp44.205.930,00. Sedangkan Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya di Tahun 2024 sudah dilakukan transfer dan penyetoran ke rekening dana BOSP dari Bendahara BOSP pada SD Negeri 2 Tribuana sebesar Rp87,12 dan SMP Negeri 3 Kubu sebesar Rp0,40.
2. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 53***.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Investasi jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024.

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.139 Rincian Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	1.708.249.088.520,17	1.715.942.989.102,31	(7.693.900.582,14)	(0,45)

Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
2. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.4***.

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

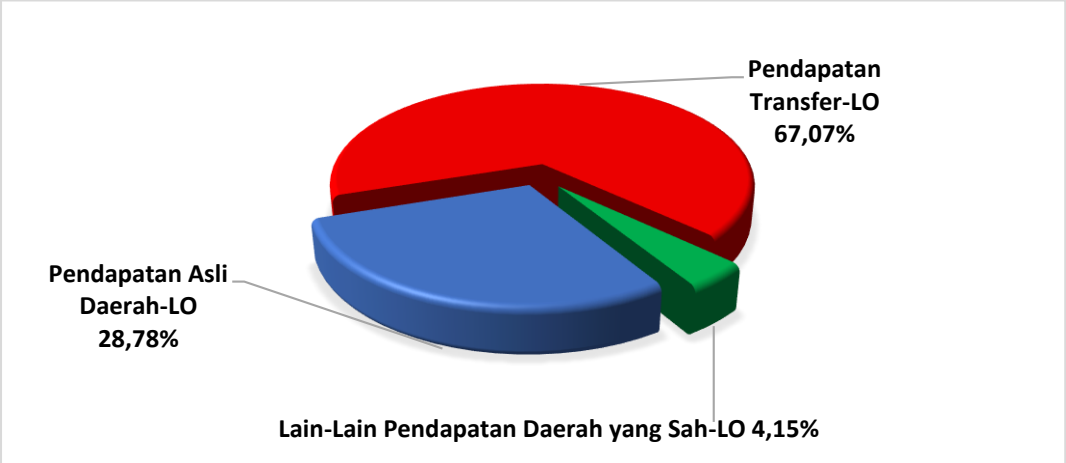
Tabel 5.140 Rincian Pendapatan Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	502.466.377.194,67	447.240.476.037,87
PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.171.048.410.044,23	1.282.066.808.241,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	72.415.252.270,85	15.527.588.293,20
Jumlah	**1.745.930.039.509,75**	**1.744.834.872.572,07**

Penjelasan:

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah-LO Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Gambar 5.4 Komposisi Pendapatan Daerah-LO Berdasarkan Klasifikasinya



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.141 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Daerah-LO	360.780.759.789,33	280.544.725.171,00
Retribusi Daerah-LO	108.343.667.821,69	130.008.500.417,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	22.073.035.455,71	23.320.989.565,75
Lain-lain PAD yang Sah-LO	11.268.914.127,94	13.366.260.884,11
Jumlah	**502.466.377.194,67**	**447.240.476.037,87**

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-

LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.142 Rincian Pajak Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Reklame-LO	**355.868.333,33**	**471.612.750,00**
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	355.868.333,33	471.612.750,00
Pajak Air Tanah-LO	**1.344.545.484,00**	**1.223.595.510,00**
Pajak Air Tanah-LO	1.344.545.484,00	1.223.595.510,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	**91.164.253.900,00**	**107.090.821.750,00**
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	91.164.253.900,00	107.090.821.750,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	**9.489.837.365,00**	**9.383.646.585,00**
PBBP2-LO	9.489.837.365,00	9.383.646.585,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	**43.104.258.046,00**	**30.453.068.938,00**
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	43.104.258.046,00	30.453.068.938,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	**152.996.422.961,00**	**131.921.979.638,00**
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	37.406.977.817,00	31.432.819.886,00
PBJT-Tenaga Listrik-LO	26.820.268.883,00	25.277.707.988,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	76.645.797.876,00	67.133.281.309,00
PBJT-Jasa Parkir-LO	262.804.764,00	201.977.500,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	11.860.573.621,00	7.876.192.955,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	**32.399.347.200,00**	**0,00**
Opsen PKB-LO	32.399.347.200,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	**29.926.226.500,00**	**0,00**
Opsen BBNKB-LO	29.926.226.500,00	0,00
Jumlah	**360.780.759.789,33**	**280.544.725.171,00**

Penjelasan:

Pengakuan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp9.458.238.239,33 (Rp360.780.759.789,33–Rp351.322.521.550,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.143 Rincian Selisih Pajak Daerah LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**9.458.238.239,33**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:		
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dari kenaikan saldo Piutang Pajak Daerah atas ketetapan pajak Tahun 2025 yang belum dibayar WP	15.853.899.988,00	
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2025	121.189.183,33	
Pengurangan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:		
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Pajak Daerah atas ketetapan pajak sebelum Tahun 2025 yang telah dibayar WP	(6.089.327.882,00)	
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang diterima pembayarannya di TA 2025	(97.278.050,00)	
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya pengakuan utang opsen MBLB kepada Pemerintah Provinsi Bali di TA 2025	(330.245.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**9.458.238.239,33**

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.144 Rincian Retribusi Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Jasa Umum-LO	**102.789.528.179,00**	**126.874.687.344,34**
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	97.369.624.179,00	121.694.229.344,34
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	857.385.000,00	665.687.000,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.283.355.000,00	4.230.501.000,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	279.164.000,00	284.270.000,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	**1.442.607.666,69**	**921.129.166,67**
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	153.651.750,00	123.079.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	620.968.000,00	505.286.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	31.380.000,00	42.660.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	11.350.000,00	2.480.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	48.349.000,00	40.869.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	576.908.916,69	206.755.166,67
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	**4.111.531.976,00**	**2.212.683.906,00**
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.350.832.176,00	933.282.906,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	2.760.699.800,00	1.279.401.000,00
Jumlah	**108.343.667.821,69**	**130.008.500.417,01**

Penjelasan:

Pengakuan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Retribusi Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.406.141.403,69 (Rp108.343.667.821,69–Rp105.937.526.418,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.145 Rincian Selisih Retribusi Daerah LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**2.406.141.403,69**
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:	
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya kenaikan saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2025 atas pelayanan yang telah diberikan	11.935.261.620,00
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya kenaikan saldo Piutang pemanfaatan aset yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2025.	1.632.000,00
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya kenaikan saldo Piutang Retribusi persetujuan bangunan gedung yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2025.	10.034.554,00
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2025	130.228.333,33
Pengakuan Pendapatan Daerah -LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2025	938.865.000,00
Pengurangan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:	
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya pebayaran atas piutang retribusi sebelum Tahun 2025.	(10.574.162.437,00)
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2025.	(2.666.666,64)
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang diterima pembayarannya di TA 2025	(33.051.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**2.406.141.403,69**

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.146 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	22.073.035.455,71	23.320.989.565,75

Penjelasan:

Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.412.286.767,25 (Rp22.073.035.455,71-Rp17.660.748.688,46). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi

penambahan dan pengurangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.147 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**4.412.286.767,25**
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:	
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dari pengakuan laba usaha PDAM Tahun Buku 2025	8.637.587.384,00
Pengurangan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:	
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya pembagian tunai atas laba usaha PDAM Tahun Buku 2024 di Tahun 2025	(4.225.300.616,75)
Jumlah Penjelasan Selisih	**4.412.286.767,25**

Penjelasan:
Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 terdiri dari pendapatan operasional diperoleh dari pembagian tunai atas dividen dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode biaya serta pengakuan keuntungan dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode ekuitas tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.148 Rincian Pengakuan Investasi

Uraian	Metode Pencatatan	Pembagian Untung/Rugi BUMD	Tahun 2025
PT BPD Bali	Biaya	Tunai	13.400.123.459,71
PT Jamkrida Bali Mandara	Biaya	Tunai	35.324.612,00
Perumda Tirta Tohlangkir	Ekuitas	Pengakuan Laba	4.225.300.616,75
Jumlah			**17.660.748.688,46**

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.149 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	**0,00**	**60.468.000,00**
Hasil Sewa BMD-LO	0,00	60.468.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	**0,00**	**1.671.682.326,00**
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	1.671.682.326,00
Jasa Giro-LO	**1.918.664.465,93**	**2.572.037.169,73**
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.715.436.619,93	2.261.243.680,24
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	51.838.687,09	56.304.638,51
Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	0,00	68.030.202,95
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	136.877.840,76	161.090.127,82
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	5.983.660,15	5.217.656,21
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	8.527.658,00	20.150.864,00
Pendapatan Bunga-LO	**4.375.000.000,20**	**3.572.916.666,83**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	4.375.000.000,20	3.572.916.666,83
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	**123.712.521,00**	**1.045.628.727,47**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	123.712.521,00	1.045.628.727,47
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	**488.093.836,75**	**331.625.617,65**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	488.093.836,75	331.625.617,65
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	**2.789.031.560,00**	**3.237.605.176,60**
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	489.161.879,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	0,00	310.304.094,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	0,00	17.104.229,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	1.920.400,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	5.110.580,00	11.966.051,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	965.948.064,00	1.459.753.703,60

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	562.572.296,00	947.394.820,00
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	738.591.420,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	515.534.500,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1.274.700,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	**1.087.006.410,90**	**7.437.768,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	971.542.400,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	47.609.696,00	7.437.768,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	4.530.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	3.391.650,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	3.500.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	204.464,90	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO	56.228.200,00	0,00
Pendapatan dari BLUD-LO	**487.405.333,16**	**861.798.103,83**
Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	2.546.731.890,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	156.905.000,00	(2.368.296.363,50)
Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	1.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	41.474.898,35	176.723.000,00
Pendapatan BLUD dari APBD-LO	0,00	162.393.638,99
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	289.024.434,81	344.245.938,34
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	**0,00**	**5.061.328,00**
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	0,00	5.061.328,00
Jumlah	**11.268.914.127,94**	**13.366.260.884,11**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2025 tidak ada realisasi karena adanya reklasifikasi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Hasil Kerja Sama Daerah-LO di Tahun 2025 tidak ada realisasi disebabkan karena tidak adanya penyetoran dari Taman Soekasada Ujung ;
   c. Jasa Giro-LO pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 hal ini disebabkan Realisasi Penerimaan Jasa Giro tergantung pada ketersediaan dan perputaran jumlah uang di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang mengakibatkan penerimaan Jasa Giro tidak dapat diprediksi dengan tepat ;
   d. Kenaikan Pendapatan Bunga-LO pada tahun 2025 karena adanya peningkatan jumlah Deposito Pemerintah Kabupaten Karangasem serta adanya perhitungan manajemen kas menyesuaikan dengan kebutuhan dana ;
   e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO mengalami penurunan Tahun 2025 karena hasil temuan Tahun 2024 lebih besar dari Tahun 2025;
   f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO mengalami kenaikan Tahun 2025 dikarenakan penyelesaian waktu pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak;
   g. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO pada tahun 2025 mengalami penurunan karena adanya regulasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2025 tentang pemberian pembebasan sanksi administrasi berupa denda terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku dari tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
   h. Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan disebabkan karena ada Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran

atas hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali TA.2024, dan Pendapatan dari Pengembalian kelebihan dari Belanja tahun sebelumnya.

i. Pendapatan dari BLUD-LO Tahun 2025 mengalami penurunan disebabkan karena direklasifikasi ke Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan

j. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO Tahun 2025 tidak ada realisasi namun Tahun 2024 ada realisasi yang merupakan pembayaran piutang pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ;

2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.415.751.497,00 (Rp11.268.914.127,94 - Rp12.684.665.624,94). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.150 Rincian Selisih Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(1.415.751.497,00)**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:		
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dari kenaikan saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah atas ketetapan pajak Tahun 2025 yang belum dibayar WP	331.821.332,00	
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dari kenaikan saldo Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2025 yang belum dibayar WP	15.877.600,00	
Pengurangan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:		
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dalam LO diakui sebagai surplus/defisit penjualan aset non lancar Tahun 2025	(24.868.000,00)	
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2025 yang telah dibayar WP di Tahun 2025	(171.932.899,00)	
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Pendapatan BLUD yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2025 yang telah dibayar WP di Tahun 2025	(22.454.600,00	
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dan Pendapatan dari pengembalian atas kurang volume Tahun 2024 yang sudah dibayar di Tahun 2025	(1.499.989.000,00)	
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya pengakuan utang atas denda opsen Pajak Pasir dan Kerikil Tahun 2025	(44.205.930,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(1.415.751.497,00)**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.151 Rincian Pendapatan Transfer-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.060.006.522.493,00	1.080.117.448.295,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	111.041.887.551,23	201.949.359.946,00
Jumlah	**1.171.048.410.044,23**	**1.282.066.808.241,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.152 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Perimbangan-LO	**0,00**	**1.067.199.260.295,00**
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	15.459.050.000,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	775.837.883.115,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	55.595.869.328,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	220.306.457.852,00
Insentif Fiskal-LO	**21.457.852.000,00**	**12.918.188.000,00**
Insentif Fiskal-LO	0,00	12.918.188.000,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	21.457.852.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	**21.785.266.500,00**	**0,00**
DBH Pajak-LO	20.603.534.500,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	1.181.732.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	**778.235.871.351,00**	**0,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	658.421.195.560,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	119.814.675.791,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	**238.527.532.642,00**	**0,00**
DAK Fisik-LO	979.576.871,00	0,00
DAK Non Fisik-LO	237.547.955.771,00	0,00
Jumlah	**1.060.006.522.493,00**	**1.080.117.448.295,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Dana Perimbangan -LO di Tahun 2025 serta dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya secara umum disebabkan pada Tahun 2025 diantaranya karena :
   a. Terjadi perubahan nomenklatur kodefikasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga menyebabkan perbedaan realisasi Pendapatan Transfer Pusat – LO antara Tahun 2025 dan Tahun 2024.
   b. Penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO secara umum disebabkan penurunan realisasi DAK Fisik – LO tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2025 sebesar 84.352.112.000,00 (Rp1.060.006.522.493,00– Rp1.144.358.634.493,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.153 Rincian Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(84.352.112.000,00)**
Penjelasan Selisih:		
Pengurangan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:		
Pengurangan Pendapatan Daerah -LO atas Saldo Pokok DBH pada Rekening TDF-TKD	(359.957.000,00)	
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO atas tidak diakuinya penerimaan Dana Desa Tahun Berjalan sebagai Pendapatan Operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual	(83.992.155.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(84.352.112.000,00)**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.154 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bagi Hasil-LO	**75.744.561.612,00**	**180.079.446.542,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	75.744.561.612,00	180.079.446.542,00
Bantuan Keuangan	**35.297.325.939,23**	**21.869.913.404,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	25.297.325.939,23	21.869.913.404,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah	**111.041.887.551,23**	**201.949.359.946,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 disebabkan pendapatan Tahun 2025 belum ditransfer dan masih tercatat sebagai piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 serta adanya peraturan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dicatat sebagai pendapatan pajak daerah yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2025.
   b. Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2025 lebih tinggi dari realisasi Tahun 2024 disebabkan karena adanya penambahan program kegiatan pada bidang lingkungan hidup dalam rangka pengelolaan persampahan.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar 27.946.178.282,00 (Rp111.041.887.551,23 – Rp138.988.065.833,23). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.155 Rincian Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(27.946.178.282,00)**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:		
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dari kenaikan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2025	4.132.190.342,00	
Pengurangan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO		
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak disebabkan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Bali atas pengakuan piutang sebelum Tahun 2025	(32.078.368.624,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(27.946.178.282,00)**

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.156 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah-LO	27.519.348.156,85	13.561.045.361,20
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	44.895.904.114,00	1.966.542.932,00
Jumlah	**72.415.252.270,85**	**15.527.588.293,20**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo

Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.157 Rincian Pendapatan Hibah - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	**14.752.343.407,09**	**76.168.261,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	14.752.343.407,09	76.168.261,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	**11.872.064.608,76**	**8.823.946.255,32**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	11.872.064.608,76	8.823.946.255,32
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	**893.128.760,00**	**4.656.808.754,00**
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	893.128.760,00	4.656.808.754,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	**1.811.381,00**	**4.122.090,88**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.811.381,00	4.122.090,88
Jumlah	**27.519.348.156,85**	**13.561.045.361,20**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 tercatat sebesar Rp14.752.343.407,09 yang terdiri dari hibah dari Kementerian PU (Tanah dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa penataan bangunan kawasan pusaka) sebesar Rp5.003.071.000,00, hibah berupa Peralatan dan mesin yang tahun perolehannya sebelum tahun 2025 sebesar Rp220.133.232,00, hibah berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp4.736.852.163,00 dan berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp788.371.374,00 yang tahun perolehannya sebelum tahun 2025 yang dinilai dengan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Karangasem. Selain itu juga terdapat hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam program Revitalisasi yang di terima oleh 6 Sekolah Dasar Negeri dan 4 Sekolah Menengah Pertama sejumlah Rp4.072.745.638,09 berupa peralatan dan mesin Rp133.620.000,00 dan berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.939.125.368,09, namun terdapat barang *extracomptable* berupa peralatan dan mesin senilai Rp68.830.000,00.
   b. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 terdapat pengakuan pendapatan hibah alkon BPPKB sebesar Rp262.580.404,00 dan ada pengakuan pendapatan hibah sumbangan barang Dinkes tahun 2025 sebesar Rp11.609.484.204,76.
   c. Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perseorangan Dalam Negeri-LO Tahun 2025 yaitu menerima hibah tanah dari pengembang sebesar Rp893.128.760,00.
   d. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2025 menerima Lebih Bayar atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp56.300,00, menerima Lebih Bayar atas Pembayaran Pajak sebesar Rp1.270.081,00 atas nama Wajib Pajak (WP), menerima Lebih Bayar atas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp5.000,00 yang tidak diketahui atas nama penerima layanan tersebut dan menerima sumbangan dari Staf Sekretaris Dewan karena kesalahan transfer yang harusnya ditransfer ke pihak ketiga namun di transfer ke RKUD sebesar Rp480.000,00.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp27.517.536.775,85 (Rp27.519.348.156,85 – Rp1.811.381,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.158 Rincian Selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**27.517.536.775,85**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:		
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang Milik Daerah selama Tahun 2025	6.638.485.529,00	
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 2025	16.875.135.608,76	
Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa revitalisasi selama Tahun 2025	4.072.745.638,09	
Pengurangan Pendapatan Daerah LRA terhadap LO:		
Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa revitalisasi di bawah kapitalisasi (Ekstracomptabel) selama Tahun 2025	(68.830.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**27.517.536.775,85**

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.159 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain-lain Pendapatan-LO	**12.209.790.315,00**	**93.398.232,00**
Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	12.209.790.315,00	93.398.232,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	**32.686.113.799,00**	**1.873.144.700,00**
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	32.686.113.799,00	1.873.144.700,00
Jumlah	**44.895.904.114,00**	**1.966.542.932,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dari Tahun 2025 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LO Tahun 2025 lebih tinggi dari Tahun 2025 disebabkan karena Pendapatan atas Pengembalian Hibah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2025 merupakan Pengembalian Dana BKK Kegiatan STT Yowana Jaya Santhi Perbekel Manggis sebesar Rp3.000.000,00, Pengembalian Dana Hibah Politeknik Negeri Bali (PNB) sebesar Rp291.816.861,00, Pengembalian Dana BKK Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Desa Pidpid sebesar Rp6.000.000,00, pengembalian atas hibah yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak ketiga yaitu Dana Hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp2.416.849,00, Pengembalian Sisa Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem sebesar Rp11.875.213.979,00 dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem sebesar Rp31.342.626,00.
   b. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO Tahun 2025 lebih tinggi dari Tahun 2024 disebabkan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang fluktuatif serta adanya reklasifikasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp30.792.431.346,00.

2. Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2025 ini *sama dengan* saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2025.

5.4.2 Beban Daerah

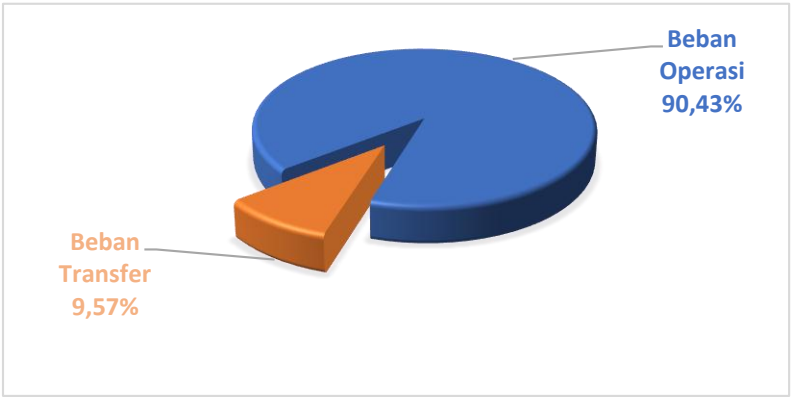
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Daerah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.160 Rincian Beban Daerah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Operasi	1.600.445.174.518,48	1.512.978.586.446,84
Beban Transfer	152.951.771.340,00	175.771.515.616,00
Jumlah	**1.753.396.945.858,48**	**1.688.750.102.062,84**

Penjelasan:
Komposisi realisasi Beban Daerah Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Gambar 5.5 Komposisi Beban Daerah



5.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.161 Rincian Beban Operasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai	862.722.127.761,16	774.153.704.332,41
Beban Barang dan Jasa	482.767.636.888,40	511.026.272.772,16
Beban Hibah	91.814.645.192,00	66.658.432.403,63
Beban Bantuan Sosial	3.030.000.000,00	11.880.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	5.483.567.890,80	10.060.472.227,81
Beban Penyusutan dan Amortisasi	154.627.196.786,12	139.199.704.710,83
Jumlah	**1.600.445.174.518,48**	**1.512.978.586.446,84**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.162 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	507.805.446.760,00	444.630.384.718,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Tambahan Penghasilan ASN	278.605.335.163,16	113.960.473.110,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	138.112.699.053,29
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	32.413.729.684,00	31.618.263.224,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.089.360.489,00	1.072.808.423,37
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	959.200.000,00	848.600.000,00
Beban Pegawai BLUD	41.849.055.665,00	43.910.475.803,75
Jumlah	**862.722.127.761,16**	**774.153.704.332,41**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya pengangkatan PPPK;
   b. Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya pengangkatan PPPK;
   c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 tidak ada realisasi disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur kodefikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN beralih menjadi Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya peningkatan pada Beban Uang Representasi DPRD, Beban Tunjangan Jabatan DPRD, Beban Tunjangan Reses DPRD dan Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota;
   e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 dipengaruhi oleh nilai beban penambahan utang insentif bagi KDH/WKDH Tahun 2024 dan pelunasan utang insentif bagi KDH/WKDH Tahun 2024;
   f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena Belanja Dana Operasional KDH/WKDH lebih besar; dan
   g. Beban Pegawai BLUD Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya penurunan Pendapatan BLUD.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp4.962.499.300,26 (Rp862.722.127.761,16–Rp867.684.627.061,42). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.163 Rincian Selisih Beban Pegawai LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(4.962.499.300,26)**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban Pegawai:		
Penambahan Beban Pegawai atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada perangkat daerah Non-BLUD	2.719.431.500,90	
Penambahan Beban Pegawai atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada BLUD Karangasem	9.869.395.204,00	
Pengurangan Beban Pegawai:		
Pengurangan Beban Pegawai atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2025 pada perangkat daerah Non-BLUD	(8.994.479.804,16)	

Uraian	Nilai
Pengurangan Beban Pegawai atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2025 pada BLUD Karangasem	(8.556.846.201,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(4.962.499.300,26)**

3. Rincian lebih lanjut Beban Pegawai menurut jenis beban dan perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 54.***

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.164 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang	81.997.592.576,46	89.189.215.344,01
Beban Jasa	180.371.617.030,95	196.800.438.935,83
Beban Pemeliharaan	29.728.155.680,98	31.675.815.013,62
Beban Perjalanan Dinas	21.822.347.792,00	31.340.268.198,65
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.797.695.000,00	15.708.582.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	62.047.736.252,53
Beban Barang dan Jasa BOSP	58.774.877.957,98	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.760.860.214,00	4.083.435.926,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	91.514.490.636,03	80.180.781.101,52
Jumlah	**482.767.636.888,40**	**511.026.272.772,16**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Barang lebih rendah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 lebih tinggi daripada e-katalog
   b. Beban Jasa lebih rendah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 karena efisiensi pelaksanaan kegiatan;
   c. Beban Pemeliharaan lebih rendah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan;
   d. Beban Perjalanan Dinas lebih rendah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya efisiensi kegiatan serta perjalanan dinas yang dilakukan selektif sesuai tujuan dan hasil Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025;
   e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat lebih rendah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 karena realisasi pemberian hadiah dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   f. Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 tidak ada realisasi dikarenakan mengalami perubahan nomenklatur kodefikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
   g. Beban Barang dan Jasa BOSP lebih tinggi Tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur kodefikasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
   h. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2024 karena kurang adanya penyedia yang tersedia untuk lokasi

wilayah yang terpencar dan juga terpencil serta data sasaran yang dipakai untuk riset kesehatan dasar masih menggunakan data tahun 2013; dan

i. Beban Barang dan Jasa BLUD lebih tinggi Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 karena adanya peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp21.168.924.009,71 (Rp482.767.636.888,40 – Rp461.598.712.878,69). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.165 Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**21.168.924.009,71**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban Barang dan Jasa:		
Penambahan Beban Barang dan Jasa karena penggunaan persediaan TA 2024 dalam pelaksanaan kegiatan operasional	27.235.985.283,70	
Penambahan Beban Barang dan Jasa karena penggunaan barang yang diperoleh secara hibah dari pihak ketiga	11.872.064.608,76	
Penambahan Beban Barang dan Jasa atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Tak Habis Pakai yang berasal dari Salah Pos Belanja	284.304.930,00	
Penambahan Beban Barang dan Jasa atas Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi yang pindah ke ekstrakomptabel	1.275.200.248,00	
Penambahan Beban Barang dan Jasa atas pengakuan Beban yang berasal dari Beban Dibayar Dimuka yang belum diakui sebagai Beban saat pengeluaran kas	132.077.167,50	
Pengakuan Beban Barang dan Jasa karena adanya penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa	28.635.686.598,00	
Pengurangan Beban Barang dan Jasa:		
Pengurangan Beban Barang dan Jasa karena adanya pembayaran Utang Belanja yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2025	(21.263.619.529,00)	
Pengurangan Beban Barang dan Jasa karena adanya pengakuan Beban Dibayar Dimuka, sehingga pengakuan beban dialokasikan secara bertahap	(115.891.109,00)	
Pengurangan Beban Barang dan Jasa karena adanya kapitalisasi sebagai Aset Tetap atas Belanja Barang dan Jasa BLUD	(7.426.000,00)	
Pengurangan Beban Barang dan Jasa atas pengakuan Beban Barang dan Jasa karena Kapitalisasi ke Aset Tetap	(2.059.513.841,28)	
Pengurangan Beban Barang dan Jasa atas pengakuan persediaan yang berasal dari belanja barang TA 2025	(24.346.747.736,55)	
Pengurangan Beban Barang dan Jasa atas pengakuan Beban Barang dari persediaan obat kadaluwarsa yang direklasifikasi menjadi defisit non operasional lainnya	(234.929.141,42)	
Pengurangan Beban Barang dan Jasa atas pengakuan Beban Barang dari persediaan karcis kadaluwarsa yang direklasifikasi menjadi defisit non operasional lainnya	(238.267.469,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**21.168.924.009,71**

3. Rincian lebih lanjut Beban Barang dan Jasa menurut jenis beban dan perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 55.***

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.166 Rincian Beban Hibah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.709.439.771,00	46.771.909.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	82.695.134.626,00	12.359.671.955,64
Beban Hibah Dana BOS	935.845.481,00	948.781.818,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.685.000,00	1.421.608.749,99
Beban Hibah Dana BOSP	5.009.540.314,00	5.156.460.880,00
Jumlah	**91.814.645.192,00**	**66.658.432.403,63**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 merupakan pemberian Hibah kepada:
      1) Hibah Kepada Kepolisian Daerah Bali Berupa Bangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Kepolisian Daerah Bali Tahun 2025;
      2) Hibah kepada Kepolisian Resort Karangasem berupa pembangunan gedung gudang barang bukti Polres Karangasem Tahun 2025;
      3) Hibah kepada Politeknik Negeri Bali yang difasilitasi Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karangasem Tahun 2025.
   b. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 berupa Rehabilitasi Pura Kiduling Kreteg, Rehabilitasi Bangunan Pura dan Senderan pura Hyangaluh Besakih ;
   c. Beban Hibah Dana BOS Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 hal ini disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan sekolah;
   d. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 39/HK/2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memperoleh Suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025; dan
   e. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian Hibah kepada Satuan Pendidikan PAUD dan Satuan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data *cut off* Dapodik Sekolah yang tervalidasi dan langsung di transfer ke masing-masing Sekolah oleh Pemerintah Pusat;
3. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp8.438.243.280,00,00 (Rp91.814.645.192,00–Rp100.252.888.472,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.167 Rincian Selisih Beban Hibah LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**(8.438.243.280,00)**
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban Hibah	
Penambahan Beban Hibah yang berasal dari penyerahan persediaan barang kepada Pemerintah Pusat dari Belanja TA 2024 yang diakui sebagai Beban Hibah TA 2025	526.010.872,00
Pengurangan Beban Hibah:	
Pengurangan Beban Hibah dikarenakan terdapat Belanja Hibah Barang yang belum diserahkan sampai dengan tanggal Neraca dan diakui sebagai Persediaan Barang	(8.909.170.030,00)
Pengurangan Beban Hibah dikarenakan karena adanya pembayaran Utang Belanja Hibah yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2025	(55.084.122,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(8.438.243.280,00)**

   b. Rincian lebih lanjut Beban Hibah menurut jenis beban dan perangkat daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 56***.

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.168 Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.030.000.000, 00	11.880.000.000,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah	**3.030.000.000,00**	**11.880.000.000,00**

Penjelasan:

a. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dari Tahun 2024 pada Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga mengalami penurunan karena Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem berupa bantuan bedah rumah sebanyak 158 rumah yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan nilai bantuan tiap rumahnya sebesar Rp15.000.000,00 dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman hal; dan

b. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2025.

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.169 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Piutang		
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.438.258.484,93	9.938.812.257,36
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	26.004.916,24	75.895.254,65
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	19.304.489,63	45.764.715,80
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Jumlah	**5.483.567.890,80**	**10.060.472.227,81**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp955.031.566,12 [Rp5.483.567.890,80 - (Rp65.958.699.955,15) - Rp61.430.163.630,47)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.170 Rincian Selisih Beban Penyisihan Piutang LO dan Neraca

Uraian	Nilai	
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca		**(955.031.566,12)**
Penjelasan Selisih:		
Pengurangan Penyisihan Piutang:		
Koreksi Ekuitas penurunan Penyisihan Piutang Pajak MBLB dan PBJT Jasa Perhotelan TA 2025	(674.670.368,30)	
Koreksi Ekuitas penurunan Penyisihan Piutang Retribusi TA 2025	(899.415,00)	
Koreksi Ekuitas penurunan Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah (DBH Prov) TA 2025	(279.461.782,82)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(955.031.566,12)**

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.171 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	54.958.819.796,96	45.526.551.048,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.297.170.359,40	33.249.942.950,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.057.973.698,76	60.210.895.952,49
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	313.232.931,00	212.314.760,00
Jumlah	**154.627.196.786,12**	**139.199.704.710,83**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal Tahun 2025 dan adanya reklasifikasi antar aset tetap;
   b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal Tahun 2025, reklasifikasi antar aset tetap dan reklasifikasi dari aset lainnya;
   c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 hal ini disebabkan adanya penambahan aset tetap dari belanja modal Tahun 2025, reklasifikasi antar aset tetap dan reklasifikasi antar aset tetap; dan
   d. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset tidak berwujud dari belanja modal Tahun 2025.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.1.3.7 dan 5.3.1.5.5.***
3. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing perangkat daerah telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.3.1.3.7***, dan juga dapat dilihat pada ***Lampiran 43.***

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.172 Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bagi Hasil	46.849.447.965,00	36.693.827.991,00
Beban Bantuan Keuangan	106.102.323.375,00	139.077.687.625,00
Jumlah	**152.951.771.340,00**	**175.771.515.616,00**

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.173 Rincian Beban Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	45.457.419.857,00	35.594.010.851,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.392.028.108,00	1.099.817.140,00
Jumlah	**46.849.447.965,00**	**36.693.827.991,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dari Tahun 2025 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Peningkatan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena penerimaan Pajak Daerah lebih tinggi; dan

b. Peningkatan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena penerimaan Retribusi Daerah lebih tinggi.

2. Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Bagi Hasil dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.361.228.129,00 (Rp46.849.447.965,00 – Rp48.210.676.094,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.174 Rincian Selisih Beban Bagi Hasil LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(1.361.228.129,00)**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban Bagi Hasil:		
Penambahan Beban atas pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2025	1.225.728.767,00	
Pengurangan Beban Bagi Hasil:		
Pengurangan Beban atas pembayaran Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 di Tahun 2025	(2.586.956.896,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(1.361.228.129,00)**

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.175 Rincian Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	106.102.323.375,00	139.077.687.625,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2025 dan Tahun 2024 berdasarkan persentase Dana Alokasi Umum yang diterima.
2. Pengakuan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp83.992.155.000,00 (Rp106.102.323.375,00 – Rp190.094.478.375,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.176 Rincian Selisih Beban Bantuan Keuangan LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(83.992.155.000,00)**
Penjelasan Selisih:		
Pengurangan Beban Bantuan Keuangan:		
Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual	(83.992.155.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(83.992.155.000,00)**

3. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.3 Surplus Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.177 Rincian Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	24.868.000,00	330.458.754,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00
Jumlah	**24.868.000,00**	**330.458.754,00**

Penjelasan:

Tahun 2025 Surplus Non Operasional - LO merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap) sebesar Rp24.868.000,00.

5.4.4 Defisit Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.178 Rincian Defisit Non Operasional Tahun

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO	502.474.652,42	374.315.561,00
Jumlah	**502.474.652,42**	**374.315.561,00**

Penjelasan:

Adanya peningkatan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan adanya koreksi persediaan berupa obat kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan dan barang cetakan berupa karcis yang sudah kedaluwarsa (Karcis Perda Lama) pada Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Pendapatan Luar Biasa – LO dan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.179 Rincian Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	1.073.840.000,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2025 ini memiliki nilai yang sama dengan saldo Beban Tidak Terduga Tahun 2025 dalam LO SIPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.073.840.000,00 berupa belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk korban bencana/musibah di Kabupaten Karangasem TA 2025.

5.4.6 Surplus/(Defisit)–LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.180 Rincian Surplus/(Defisit) - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
Pendapatan Daerah – LO	**1.745.930.039.509,75**	**1.744.834.872.572,07**
Pendapatan Asli Daerah – LO	502.466.377.194,67	447.240.476.037,87
Pendapatan Transfer – LO	1.171.048.410.044,23	1.282.066.808.241,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	72.415.252.270,85	15.527.588.293,20
Beban Daerah	**1.753.396.945.858,48**	**1.688.750.102.062,84**
Beban Operasi	1.600.445.174.518,48	1.512.978.586.446,84
Beban Transfer	152.951.771.340,00	175.771.515.616,00
Kegiatan Non Operasional		
Surplus Non Operasional – LO		
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	24.868.000,00	330.458.754,00
Defisit Non Operasional – LO		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	502.474.652,42	374.315.561,00
Pos Luar Biasa		
Beban Luar Biasa	1.073.840.000,00	0,00
Jumlah	**(9.018.353.001,15)**	**56.040.913.702,23**

Penjelasan:

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.2.***

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.181 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.815.825.010.102,63	1.840.555.982.605,72
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.671.945.222.881,11	1.617.032.955.949,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**143.879.787.221,52**	**223.523.026.656,44**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.182 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pajak Daerah		
Pajak Reklame	325.077.500,00	444.995.800,00
Pajak Air Tanah	1.332.780.956,00	1.242.320.538,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	86.758.057.532,00	103.998.911.390,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.120.198.132,00	6.750.823.600,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.104.258.046,00	30.453.068.938,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	150.356.575.684,00	130.909.963.206,10
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	32.399.347.200,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	29.926.226.500,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	96.008.524.996,00	119.410.608.659,34
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	857.385.000,00	665.687.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	4.283.355.000,00	4.230.501.000,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	279.164.000,00	284.270.000,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	152.835.750,00	120.279.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	620.968.000,00	505.286.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	31.380.000,00	42.660.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	11.350.000,00	2.480.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	48.349.000,00	40.869.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	481.582.250,00	263.690.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.340.797.622,00	933.282.906,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.821.834.800,00	1.558.976.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.660.748.688,46	17.077.888.186,17
Lain-Lain PAD yang Sah		
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	1.671.682.326,00
Jasa Giro	1.918.664.465,93	2.572.037.169,73
Pendapatan Bunga	4.375.000.000,20	3.572.916.666,83
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.520.289.521,00	1.045.628.727,47
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	488.093.836,75	331.625.617,65
Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.673.349.057,00	2.780.422.487,72
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	16.358,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.190.418.410,90	7.437.768,00
Pendapatan BLUD	493.982.333,16	837.678.103,83
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	417.785.181,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Dana Perimbangan	0,00	1.069.138.776.295,00
Dana Desa	83.992.155.000,00	80.146.587.000,00
Insentif Fiskal	21.457.852.000,00	12.918.188.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	22.145.223.500,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	778.235.871.351,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	238.527.532.642,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		
Pendapatan Bagi Hasil	103.690.739.894,00	189.805.671.394,00
Bantuan Keuangan	35.297.325.939,23	54.402.303.264,00
Pendapatan Hibah		
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.811.381,00	4.122.090,88
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	12.209.790.315,00	93.398.232,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	32.686.113.799,00	1.873.144.700,00
Jumlah	**1.815.825.010.102,63**	**1.840.555.982.605,72**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.183 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Pegawai		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	507.877.716.833,00	445.239.135.407,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	284.883.991.199,42	113.960.473.110,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	144.201.638.189,13
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.413.729.684,00	31.618.263.224,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.013.482.683,00	1.031.964.235,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	959.200.000,00	848.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	40.536.506.662,00	41.502.037.338,00
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Barang	71.381.343.488,20	80.579.017.343,50
Belanja Jasa	182.438.071.161,73	198.125.346.576,75
Belanja Pemeliharaan	29.728.155.680,98	35.754.261.443,51
Belanja Perjalanan Dinas	21.822.347.792,00	31.340.268.198,65
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.797.695.000,00	15.708.582.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	61.263.105.305,20
Belanja Barang dan Jasa BOSP	57.754.240.046,18	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.760.860.214,00	4.083.435.926,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.915.999.495,60	76.117.979.221,91
Belanja Bunga		
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.594.542.021,00	47.242.835.750,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	85.248.275.656,00	11.563.476.225,64
Belanja Hibah Dana BOS	935.845.481,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.685.000,00	1.421.608.749,99
Belanja Hibah Dana BOSP	5.009.540.314,00	5.156.460.880,00
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.370.000.000,00	11.880.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	660.000.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	1.073.840.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	46.879.267.166,00	38.284.766.176,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.331.408.928,00	885.426.024,00
Belanja Bantuan Keuangan		
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	190.094.478.375,00	219.224.274.625,00
Jumlah	**1.671.945.222.881,11**	**1.617.032.955.949,28**

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan

dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.184 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	24.868.000,00	11.221.258.754,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	124.520.176.393,98	266.362.753.970,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(124.495.308.393,98)**	**(255.141.495.216,76)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi.

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.185 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pencairan Dana Cadangan		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	10.890.800.000,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	24.868.000,00	330.458.754,00
Jumlah	**24.868.000,00**	**11.221.258.754,00**

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.186 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Modal Tanah		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal Alat Besar	208.014.000,00	4.806.882.412,00
Belanja Modal Alat Angkutan	6.625.695.503,00	16.514.125.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.851.000,00	50.160.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	8.095.252.200,00	5.304.650.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.664.495.819,00	9.810.455.726,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.987.868.626,00	3.512.542.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	161.512.658,00	11.487.509.880,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.812.577.826,00	3.276.430.000,00
Belanja Modal Komputer	2.204.136.219,00	5.586.484.350,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	117.450.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	0,00	293.646.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	375.448.460,00	12.325.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	190.864.500,00	519.900.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	15.471.296.761,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	16.321.389.020,00	53.060.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.781.182.409,00	6.573.152.586,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Belanja Modal Bangunan Gedung	15.244.815.130,77	52.123.868.963,24
Belanja Modal Monumen	192.508.862,44	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.444.901.698,85	9.508.733.101,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	768.028.006,77	937.069.348,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.767.134.102,00	104.302.974.518,00
Belanja Modal Bangunan Air	1.459.806.190,00	5.916.643.100,00
Belanja Modal Instalasi	3.361.174.154,15	186.833.680,00
Belanja Modal Jaringan	1.726.478.967,00	7.311.042.545,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	31.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	95.516.610,00	0,00
Belanja Modal Hewan	0,00	62.000.000,00
Belanja Modal Biota Perairan	0,00	162.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	154.169.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.000.877.432,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	19.647.000,00	776.350.000,00
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah	**124.520.176.393,98**	**266.362.753.970,76**

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.187 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.188 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.189 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.190 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	112.917.982.966,93	135.950.220.704,21
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	112.917.982.966,93	135.950.220.704,21
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.191 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Iuran Wajib Pegawai	16.333.420.901,00	17.151.629.839,00
Pajak Penghasilan	22.807.685.035,60	40.182.014.799,16
Pajak Pertambahan Nilai	27.002.145.226,33	39.275.820.345,05
Tabungan Asuransi Pensiunan	13.602.135.711,00	11.989.854.697,00
BPJS Kesehatan	29.531.611.784,00	24.071.987.228,00
PFK Lainnya	0,00	14.586.705,00
Iuran JKK	997.903.266,00	910.231.908,00
Iuran JKM	2.643.081.043,00	2.354.095.183,00
BPJS Kesehatan Non ASN	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah	**112.917.982.966,93**	**135.950.220.704,21**

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, FKTP RS Pratama dan BOK Puskesmas. dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada ***Lampiran 57.***

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.192 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Iuran Wajib Pegawai	16.333.420.901,00	17.151.629.839,00
Pajak Penghasilan	22.807.685.035,60	40.182.014.799,16
Pajak Pertambahan Nilai	27.002.145.226,33	39.275.820.345,05
Tabungan Asuransi Pensiunan	13.602.135.711,00	11.989.854.697,00
BPJS Kesehatan	29.531.611.784,00	24.071.987.228,00
PFK Lainnya	0,00	14.586.705,00
Iuran JKK	997.903.266,00	910.231.908,00
Iuran JKM	2.643.081.043,00	2.354.095.183,00
BPJS Kesehatan Non ASN	0,00	0,00
Jumlah	**112.917.982.966,93**	**135.950.220.704,21**

Untuk Tahun 2025, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD, BLUD Puskesams, FKTP RS Pratama dan BOK Puskesmas. dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada ***Lampiran 57.***

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/ (Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.193 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	143.879.787.221,52	223.523.026.656,44
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(124.495.308.393,98)	(255.141.495.216,76)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	**19.384.478.827,54**	**(31.618.468.560,32)**

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.194 Rincian Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	136.294.499.385,07	160.859.600.916,45
Kas di Bendahara Penerimaan	146.509.464,00	186.213.706,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.825.721.638,32	13.607.809.769,06
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	237.228.895,00	143.665.757,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	234.897.083,32	244.602.583,50
Kas Dana BOK Puskesmas	1.347.612.264,00	2.663.236.254,00
Jumlah	**146.086.468.729,71**	**177.705.128.986,01**

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.195 Rincian Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana BOS di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	0,00	(191.695,98)
Jumlah	**0,00**	**(191.695,98)**

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada ***Poin 5.2.4*** di atas.

5.5.8 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.196 Rincian Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya	0,00	1.123.769,52
Jumlah	**0,00**	**1.123.769,52**

Jumlah saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) di atas juga sama dengan saldo Kas Lainnya yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada Poin ***5.3.1.1.1***.

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.197 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	156.199.655.553,00	136.294.499.385,07
Kas di Bendahara Penerimaan	75.593.445,00	146.509.464,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di BLUD	8.396.264.840,11	7.825.721.638,32
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	218.883.627,00	237.228.895,00
Kas Lainnya	0,00	1.123.769,52
Setara Kas	0	0
Kas Dana BOSP	117.896.004,14	234.897.083,32

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Dana BOK Puskesmas	462.654.088,00	1.347.612.264,00
Jumlah	**165.470.947.557,25**	**146.087.592.499,23**

Penjelasan:

1. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak terdapat Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2024 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024; dan
2. Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.4*** di atas.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.198 Rincian Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	1.715.942.989.102,31	1.662.889.063.869,91

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.199 Rincian Surplus/(Defisit) - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) – LO	(9.018.353.001,15)	56.040.913.702,23

Penjelasan:

Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Karangasem masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada ***poin 5.4.5***.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

5.6.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki dampak kumulatif perubahan kebijakan.

5.6.3.2 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.200 Rincian Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

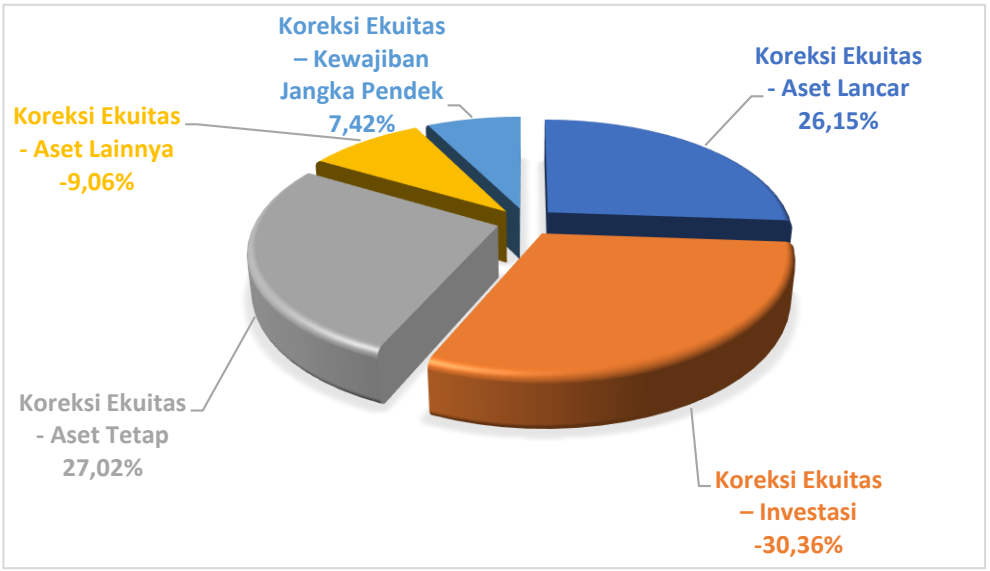
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar :	1.636.214.749,56	1.941.089.795,99
- Koreksi Ekuitas – Kas	-	(191.695,98)
- Koreksi Ekuitas – Piutang	(21.129.070,36)	1.482.809.276,00
- Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	955.031.566,12	452.120.895,45
- Koreksi Ekuitas – Beban Dibayar Dimuka	0,03	0,01
- Koreksi Ekuitas – Persediaan	702.312.253,77	6.351.320,51
Koreksi Ekuitas – Investasi	(1.899.724.261,63)	(5.180.210.253,32)
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	1.690.815.560,00	(136.583.968,00)
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	(567.077.125,05)	(8.594.346,00)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek	464.223.496,13	397.310.301,50
Jumlah Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	**1.324.452.419,01**	**(2.986.988.469,83)**

Penjelasan:

1. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:
   a. Koreksi Ekuitas - Aset Lancar yang disebabkan adanya koreksi saldo awal di kas bendahara, koreksi saldo awal piutang pajak, saldo awal piutang Lain-Lain PAD, koreksi penyisihan piutang Lain-Lain PAD dan koreksi beban dibayar dimuka;
   b. Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang yang disebabkan oleh koreksi nilai ekuitas investasi;
   c. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap yang disebabkan reklasifikasi dan koreksi peralatan dan mesin, serta reklasifikasi dan koreksi gedung dan bangunan;
   d. Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya yang disebabkan koreksi aset lainnya; dan
   e. Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek yang disebabkan koreksi utang belanja.
2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2025 digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Gambar 5.6 Komposisi Dampak Kumuluatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Berdasarkan Klasifikasinya



5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.201 Rincian Saldo Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	1.708.249.088.520,17	1.715.942.989.102,31

Penjelasan:

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***poin 5.3.3.***

5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti: Sewa Dibayar Dimuka, Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan/Laba yang Masih Harus Diterima, dan pos kewajiban seperti: Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban serta tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

5.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian Setelah Tahun Pelaporan

Adapun beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2025 adalah:

1. Potensi ketertagihan piutang daerah yang material kepada pihak ketiga dengan masih banyak yang menunda melaksanakan kewajibannya dengan beberapa alasan, diantaranya Kondisi Keuangan Perusahaan menurun, adanya keterlambatan pembayaran; Masih banyak yang mengabaikan surat teguran yang diberikan; Piutang macet atau yang lebih 5 Tahun banyak yang sudah tutup usahanya bahkan sudah ditinggalkan oleh pemiliknya; dan Belum adanya peraturan untuk mengambil langkah-langkah penghapusan piutang daerah yang sekiranya dapat diusulkan untuk penghapusan setelah dilaksanakan penelusuran piutang khususnya piutang macet atau yang lebih 5 Tahun yaitu piutang pajak daerah untuk 7 jenis pajak daerah, meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, PBB P2, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan dengan piutang kondisi per-31 Desember 2025 sekitar 110.73 Milyar; dan
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek pada Tahun 2026 masih bisa dilaksanakan walaupun terjadi kebijakan anggaran. Untuk kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah menganggarkan di APBD Induk 2026 dan tidak terganggu dengan adanya perubahan kebijakan anggaran pada Tahun 2026.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Letak Geografis

Karangasem adalah salah satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Bali, yang terletak diantara 08°00'00"- 08°41'37,8"LS dan 115°35'9,8"- 115°54'8,9"BT di ujung Timur Pulau Bali. Berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng di sebelah Barat, Laut Bali di sebelah Utara, Selat Lombok di sebelah Timur, serta Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km^2 atau 14,90% dari luas Provinsi Bali yang mempunyai luas 5.632,86 km^2.

6.2 Dasar Hukum Pembentukan

Sebagai sebuah kabupaten, Karangasem dibentuk berdasarkan UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Seiring berjalannya waktu menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem Di Provinsi Bali, yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2024. Namun sesuai Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024, pengertian Kabupaten Karangasem tetap mengacu pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 yaitu Kabupaten Karangasem adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958. Pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem terletak di Kota Amlapura sekaligus sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Karangasem merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

6.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan, 75 Desa Dinas, 554 Banjar Dinas, 52 Lingkungan, 190 Desa Adat/Pakraman dan 741 Banjar Adat (berdasarkan data Karangasem Membangun Tahun 2022). Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 31, Amlapura.

Pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025, penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh I Gusti Putu Parwata, S.E. sebagai Bupati Karangasem dan Pandu Prapanca Lagosa, S.H., M.H. sebagai Wakil Bupati Karangasem. Pasangan kepala daerah tersebut merupakan hasil pemilihan kepala daerah yang menjabat untuk masa jabatan periode 2025–2030 dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam penerapannya mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah karena terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di mana terdapat penggantian nama perangkat daerah serta pemisahan urusan dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2025, Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 untuk menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah adalah:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ;
15. Dinas Ketenagakerjaan;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Perencanaan Daerah;
22. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Kecamatan Karangasem;
28. Kecamatan Kubu;
29. Kecamatan Abang;
30. Kecamatan Bebandem;
31. Kecamatan Selat;
32. Kecamatan Manggis;
33. Kecamatan Rendang; dan
34. Kecamatan Sidemen.

BAB VII
PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan semua laporan keuangan perangkat daerah. Implementasi tersebut dimulai sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam paket undang-undang di bidang keuangan.

Amlapura, 25 Mei 2026
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA



Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2025

REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
1	**1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	**Rp.633.564.943.624,00**	**Rp.613.330.233.743,78**	**96,81**
	1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp.730.460.000,00	Rp.716.278.100,00	98,06
	1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp.242.960.000,00	Rp.233.866.400,00	96,26
	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.5.761.960.000,00	Rp.5.707.626.466,00	99,06
	1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp.494.260.000,00	Rp.484.780.800,00	98,08
	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.961.837.668,00	Rp.895.133.398,00	93,06
	1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.2.232.978.600,00	Rp.2.209.706.970,00	98,96
	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.633.082.340,00	Rp.382.277.979,00	60,38
	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.142.000.000,00	Rp.104.962.250,00	73,92
	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp.2.520.632.452,00	Rp.1.975.326.206,00	78,37
	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp.46.289.966.032,00	Rp.45.970.097.699,09	99,31
	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp.141.587.475,00	Rp.76.369.000,00	53,94
	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.86.077.700,00	Rp.31.197.400,00	36,24
	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.94.670.000,00	Rp.53.473.200,00	56,48
	1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.33.271.500,00	Rp.22.098.850,00	66,42
	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.181.500.000,00	Rp.110.404.646,00	60,83
	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp.540.870.000,00	Rp.426.859.050,00	78,92
	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.161.250.000,00	Rp.127.848.150,00	79,29
	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp.38.675.000,00	Rp.25.583.500,00	66,15
	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp.2.710.338.536,00	Rp.2.649.327.978,00	97,75
	1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp.836.091.300,00	Rp.788.304.621,00	94,28
	1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	Rp.29.642.500,00	Rp.22.550.100,00	76,07
	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.1.267.816.500,00	Rp.1.055.584.211,68	83,26
	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp.994.516.000,00	Rp.949.151.820,00	95,44
	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp.924.280.000,00	Rp.789.599.171,52	85,43
	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.286.702.500,00	Rp.276.832.100,00	96,56
	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.915.240.700,00	Rp.822.750.059,00	89,89
	1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.2.233.720.000,00	Rp.2.204.091.886,40	98,67
	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp.47.725.000,00	Rp.29.949.700,00	62,75
	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.667.197.800,00	Rp.503.419.900,00	75,45
	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp.1.371.569.944,00	Rp.995.280.187,00	72,57
	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp.25.000.000,00	Rp.21.293.750,00	85,17
	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp.29.226.768.503,00	Rp.29.195.474.080,09	99,89
	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp.90.327.400,00	Rp.65.108.099,00	72,08
	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.27.596.200,00	Rp.16.061.530,00	58,20
	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.26.756.200,00	Rp.16.443.032,00	61,46
	1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.50.582.400,00	Rp.32.994.482,00	65,23
	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.20.155.000,00	Rp.8.403.650,00	41,70
	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp.16.721.000,00	Rp.12.648.400,00	75,64
	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp.998.431.000,00	Rp.773.726.406,00	77,49
	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.25.757.400,00	Rp.14.646.743,00	56,86
	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp.169.503.000,00	Rp.164.145.056,00	96,84
	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	Rp.121.127.900,00	Rp.109.138.100,00	90,10
	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp.5.066.266.204,00	Rp.4.663.238.654,00	92,04
	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp.48.604.000,00	Rp.27.470.000,00	56,52
	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp.44.390.000,00	Rp.26.254.150,00	59,14
	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp.4.274.620.000,00	Rp.4.234.285.074,00	99,06
	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp.48.499.400,00	Rp.25.645.000,00	52,88
	1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.43.750.000,00	Rp.27.535.000,00	62,94
	1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.43.672.700,00	Rp.26.795.000,00	61,35
	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.42.204.000,00	Rp.27.600.000,00	65,40
	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.27.319.000,00	Rp.12.661.250,00	46,35

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.438.555.000,00	Rp.297.175.816,00	67,76
	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp.964.000.000,00	Rp.794.927.466,00	82,46
	1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp.179.188.000,00	Rp.167.552.600,00	93,51
	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp.319.747.500,00	Rp.109.155.540,00	34,14
	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp.1.622.260.000,00	Rp.1.622.035.440,00	99,99
	1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.140.770.384,00	Rp.117.975.496,00	83,81
	1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.11.038.000,00	Rp.7.100.000,00	64,32
	1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.11.431.500,00	Rp.7.455.000,00	65,21
	1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp.129.769.456,00	Rp.87.061.064,00	67,09
	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00
	1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp.40.879.500,00	Rp.32.661.822,00	79,90
	1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp.366.484.292,00	Rp.109.856.084,00	29,98
	1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Rp.1.591.561.501,00	Rp.50.477.250,00	3,17
	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.158.002.984,00	Rp.99.878.946,00	63,21
	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.91.979.284,00	Rp.25.421.390,00	27,64
	1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp.33.927.750,00	Rp.12.873.910,00	37,95
	1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp.18.119.092,00	Rp.12.589.524,00	69,48
	1.01.06.2.01.0006 - Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.697.915.435,00	Rp.314.045.538,00	45,00
	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp.250.000.000,00	Rp.250.000.000,00	100,00
	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.494.382.180.771,00	Rp.483.082.419.795,00	97,71
	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp.260.916.412,00	Rp.156.822.378,00	60,10
	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp.34.540.000,00	Rp.25.887.700,00	74,95
	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.975.970.000,00	Rp.316.416.392,00	32,42
	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.125.275.000,00	Rp.103.404.994,00	82,54
	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp.992.481.693,00	Rp.986.833.148,00	99,43
	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00
	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rp.79.594.600,00	Rp.70.643.162,00	88,75
	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Rp.2.693.479.293,00	Rp.1.962.679.993,00	72,87
	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.4.803.699.824,00	Rp.4.434.517.767,00	92,31
	2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp.512.511.499,00	Rp.355.365.074,00	69,34
	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Rp.7.570.000.000,00	Rp.7.570.000.000,00	100,00
	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Rp.57.734.000,00	Rp.4.701.200,00	8,14
2	**1.02.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kesehatan**	**Rp.358.037.373,00**	**Rp.270.493.903,00**	**75,55**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.26.756.000,00	Rp.14.009.290,00	52,36
	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.24.019.000,00	Rp.17.044.700,00	70,96
	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp.267.807.373,00	Rp.221.450.433,00	82,69
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.39.455.000,00	Rp.17.989.480,00	45,59
3	**1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Puskesmas Karangasem I**	**Rp.36.186.000,00**	**Rp.28.656.260,00**	**79,19**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.14.580.000,00	Rp.12.579.100,00	86,28
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.21.606.000,00	Rp.16.077.160,00	74,41
4	**1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Puskesmas Karangasem II**	**Rp.14.130.000,00**	**Rp.11.922.260,00**	**84,38**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.5.750.000,00	Rp.5.700.000,00	99,13
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.8.380.000,00	Rp.6.222.260,00	74,25
5	**1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Puskesmas Manggis I**	**Rp.14.680.000,00**	**Rp.14.503.840,00**	**98,80**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.4.000.000,00	Rp.4.000.000,00	100,00
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.10.680.000,00	Rp.10.503.840,00	98,35
6	**1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Puskesmas Manggis II**	**Rp.5.479.800,00**	**Rp.5.129.800,00**	**93,61**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.600.000,00	Rp.600.000,00	100,00
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.4.879.800,00	Rp.4.529.800,00	92,83
7	**1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Puskesmas Abang I**	**Rp.12.279.000,00**	**Rp.11.429.522,00**	**93,08**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.1.300.000,00	Rp.1.300.000,00	100,00

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.10.979.000,00	Rp.10.129.522,00	92,26
8	**1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Puskesmas Abang II**	**Rp.17.828.800,00**	**Rp.16.028.800,00**	**89,90**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.3.450.000,00	Rp.3.450.000,00	100,00
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.14.378.800,00	Rp.12.578.800,00	87,48
9	**1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Puskesmas Kubu I**	**Rp.30.979.000,00**	**Rp.25.381.300,00**	**81,93**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.600.000,00	Rp.600.000,00	100,00
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.30.379.000,00	Rp.24.781.300,00	81,57
10	**1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Puskesmas Kubu II**	**Rp.10.579.000,00**	**Rp.8.859.600,00**	**83,75**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.2.400.000,00	Rp.1.400.000,00	58,33
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.8.179.000,00	Rp.7.459.600,00	91,20
11	**1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Puskesmas Rendang**	**Rp.11.932.000,00**	**Rp.11.932.000,00**	**100,00**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.4.800.000,00	Rp.4.800.000,00	100,00
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.7.132.000,00	Rp.7.132.000,00	100,00
12	**1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Puskesmas Sidemen**	**Rp.7.860.000,00**	**Rp.2.876.800,00**	**36,60**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.3.500.000,00	Rp.400.000,00	11,43
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.4.360.000,00	Rp.2.476.800,00	56,81
13	**1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Puskesmas Selat**	**Rp.5.379.600,00**	**Rp.5.316.600,00**	**98,83**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.1.200.000,00	Rp.1.200.000,00	100,00
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.4.179.600,00	Rp.4.116.600,00	98,49
14	**1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Puskesmas Bebandem**	**Rp.21.668.000,00**	**Rp.19.009.200,00**	**87,73**
	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.14.944.000,00	Rp.13.125.200,00	87,83
	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.6.724.000,00	Rp.5.884.000,00	87,51
15	**1.03.1.04.2.10.14.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**Rp.47.052.300,00**	**Rp.36.040.975,00**	**76,60**
	1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Rp.541.800,00	Rp.541.800,00	100,00
	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Rp.19.659.500,00	Rp.19.004.475,00	96,67
	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Rp.26.851.000,00	Rp.16.494.700,00	61,43
16	**1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**Rp.248.847.912,00**	**Rp.215.420.494,00**	**86,57**
	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp.201.933.912,00	Rp.174.966.714,00	86,65
	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp.46.914.000,00	Rp.40.453.780,00	86,23
17	**1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Rp.447.693.104,00**	**Rp.352.263.691,00**	**78,68**
	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Rp.447.693.104,00	Rp.352.263.691,00	78,68
18	**1.06.2.08.2.14.00.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Rp.481.811.032,00**	**Rp.425.410.534,00**	**88,29**
	1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp.25.249.184,00	Rp.22.820.528,00	90,38
	2.08.06.2.01.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.72.247.388,00	Rp.65.702.046,00	90,94
	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp.139.964.460,00	Rp.94.487.960,00	67,51
	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp.15.000.000,00	Rp.15.000.000,00	100,00
	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp.34.350.000,00	Rp.32.400.000,00	94,32
	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Rp.195.000.000,00	Rp.195.000.000,00	100,00
19	**2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan**	**Rp.459.575.910,00**	**Rp.417.974.262,00**	**90,95**
	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp.380.377.910,00	Rp.360.449.982,00	94,76
	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp.11.975.000,00	Rp.5.760.000,00	48,10
	2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Rp.55.250.000,00	Rp.44.804.280,00	81,09
	2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp.11.973.000,00	Rp.6.960.000,00	58,13
20	**5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**Rp.119.486.084,00**	**Rp.86.325.928,00**	**72,25**
	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp.119.486.084,00	Rp.86.325.928,00	72,25
21	**2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Rp.156.128.560,00**	**Rp.125.207.525,00**	**80,20**
	2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Rp.156.128.560,00	Rp.125.207.525,00	80,20
22	**2.18.3.29.0.00.05.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Rp.121.262.250,00**	**Rp.7.977.100,00**	**6,58**
	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp.121.262.250,00	Rp.7.977.100,00	6,58
23	**8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Rp.2.297.427.800,00**	**Rp.1.815.606.033,00**	**79,03**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rp.155.494.400,00	Rp.132.121.900,00	84,97
	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	Rp.2.072.482.200,00	Rp.1.635.819.148,00	78,93
	8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp.27.951.200,00	Rp.24.764.985,00	88,60
	8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	Rp.41.500.000,00	Rp.22.900.000,00	55,18
24	**2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**	**Rp.40.362.500,00**	**Rp.25.081.364,00**	**62,14**
	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp.4.262.000,00	Rp.2.638.262,00	61,90
	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp.36.100.500,00	Rp.22.443.102,00	62,17
25	**2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**	**Rp.212.895.000,00**	**Rp.165.850.932,00**	**77,90**
	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.36.530.000,00	Rp.30.566.160,00	83,67
	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp.31.193.000,00	Rp.27.167.050,00	87,09
	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp.8.211.000,00	Rp.3.659.789,00	44,57
	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.4.085.000,00	Rp.3.502.302,00	85,74
	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.132.876.000,00	Rp.100.955.631,00	75,98
26	**2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	**Rp.96.334.600,00**	**Rp.84.432.340,00**	**87,64**
	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp.96.334.600,00	Rp.84.432.340,00	87,64
27	**2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**Rp.44.710.856.244,00**	**Rp.43.958.252.272,00**	**98,32**
	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp.87.744.202,00	Rp.78.112.329,00	89,02
	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp.1.505.224.680,00	Rp.1.442.239.351,00	95,82
	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Rp.377.645.076,00	Rp.323.701.554,00	85,72
	2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Rp.41.106.905.936,00	Rp.40.797.872.394,00	99,25
	2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Rp.39.744.356,00	Rp.30.768.454,00	77,42
	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp.414.050.340,00	Rp.397.732.250,00	96,06
	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Rp.695.000.000,00	Rp.486.636.025,00	70,02
	2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Rp.85.648.272,00	Rp.77.922.573,00	90,98
	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rp.37.853.396,00	Rp.33.790.914,00	89,27
	3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Rp.150.350.530,00	Rp.89.843.674,00	59,76
	3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Rp.210.689.456,00	Rp.199.632.754,00	94,75
28	**2.23.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**Rp.99.547.280,00**	**Rp.81.703.620,00**	**82,08**
	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp.99.547.280,00	Rp.81.703.620,00	82,08
29	**3.27.2.09.3.25.10.0000 - Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan**	**Rp.203.711.948,00**	**Rp.170.940.373,00**	**83,91**
	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp.46.955.512,00	Rp.38.251.554,00	81,46
	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp.83.459.612,00	Rp.72.210.153,00	86,52
	3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Rp.73.296.824,00	Rp.60.478.666,00	82,51
30	**5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**Rp.350.001.500,00**	**Rp.329.695.000,00**	**94,20**
	5.05.02.2.01.0006 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.100.000.000,00	Rp.93.577.000,00	93,58
	5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rp.100.000.000,00	Rp.94.631.000,00	94,63
	5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Rp.133.541.500,00	Rp.126.190.000,00	94,49
	5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp.16.460.000,00	Rp.15.297.000,00	92,93
TOTAL		**Rp.684.204.956.221,00**	**Rp.662.059.956.071,78**	**96,76**
TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)		**Rp.1.952.404.482.852,00**	**Rp 1.792.465.399.275,09**	
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (MINIMAL 20%)		**35,04%**	**36,94 %**	

REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
1	**1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	**Rp.38.076.075.755,00**	**Rp.32.701.944.966,00**	**85,89**
	1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp.730.460.000,00	Rp.716.278.100,00	98,06
	1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp.242.960.000,00	Rp.233.866.400,00	96,26
	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.5.761.960.000,00	Rp.5.707.626.466,00	99,06
	1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp.494.260.000,00	Rp.484.780.800,00	98,08
	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.961.837.668,00	Rp.895.133.398,00	93,06
	1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.2.232.978.600,00	Rp.2.209.706.970,00	98,96
	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp.2.520.632.452,00	Rp.1.975.326.206,00	78,37
	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.86.077.700,00	Rp.31.197.400,00	36,24
	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.94.670.000,00	Rp.53.473.200,00	56,48
	1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.33.271.500,00	Rp.22.098.850,00	66,42
	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp.540.870.000,00	Rp.426.859.050,00	78,92
	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp.2.710.338.536,00	Rp.2.649.327.978,00	97,75
	1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp.836.091.300,00	Rp.788.304.621,00	94,28
	1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	Rp.29.642.500,00	Rp.22.550.100,00	76,07
	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.1.267.816.500,00	Rp.1.055.584.211,68	83,26
	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp.994.516.000,00	Rp.949.151.820,00	95,44
	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp.924.280.000,00	Rp.789.599.171,52	85,43
	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.286.702.500,00	Rp.276.832.100,00	96,56
	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.915.240.700,00	Rp.822.750.059,00	89,89
	1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.2.233.720.000,00	Rp.2.204.091.886,40	98,67
	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp.25.000.000,00	Rp.21.293.750,00	85,17
	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.27.596.200,00	Rp.16.061.530,00	58,20
	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.26.756.200,00	Rp.16.443.032,00	61,46
	1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.50.582.400,00	Rp.32.994.482,00	65,23
	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp.998.431.000,00	Rp.773.726.406,00	77,49
	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp.169.503.000,00	Rp.164.145.056,00	96,84
	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	Rp.121.127.900,00	Rp.109.138.100,00	90,10
	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp.44.390.000,00	Rp.26.254.150,00	59,14
	1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.43.750.000,00	Rp.27.535.000,00	62,94
	1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.43.672.700,00	Rp.26.795.000,00	61,35
	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.42.204.000,00	Rp.27.600.000,00	65,40
	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp.964.000.000,00	Rp.794.927.466,00	82,46
	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp.319.747.500,00	Rp.109.155.540,00	34,14
	1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp.140.770.384,00	Rp.117.975.496,00	83,81
	1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp.11.038.000,00	Rp.7.100.000,00	64,32
	1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp.11.431.500,00	Rp.7.455.000,00	65,21
	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp.250.000.000,00	Rp.250.000.000,00	100,00
	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.353.005.236,00	Rp.275.576.938,00	78,07

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.204.030.000,00	Rp.152.790.417,00	74,89
	1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.339.006.472,00	Rp.227.797.337,00	67,20
	1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.351.899.500,00	Rp.304.246.523,00	86,46
	1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.167.398.900,00	Rp.96.395.425,00	57,58
	1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.48.309.800,00	Rp.38.685.510,00	80,08
	1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.1.618.709.782,00	Rp.1.358.795.356,00	83,94
	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.70.152.000,00	Rp.61.281.060,00	87,35
	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.1.144.200.000,00	Rp.508.228.650,00	44,42
	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.136.136.736,00	Rp.54.530.112,00	40,06
	1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.399.736.736,00	Rp.396.767.573,00	99,26
	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.320.250.000,00	Rp.240.104.440,00	74,97
	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.435.196.368,00	Rp.418.907.228,40	96,26
	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.975.970.000,00	Rp.316.416.392,00	32,42
	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp.125.275.000,00	Rp.103.404.994,00	82,54
	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp.992.481.693,00	Rp.986.833.148,00	99,43
	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Rp.2.693.479.293,00	Rp.1.962.679.993,00	72,87
	2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp.512.511.499,00	Rp.355.365.074,00	69,34
2	**1.02.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kesehatan**	**Rp.3.927.603.726,00**	**Rp.2.932.848.232,00**	**74,67**
	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.912.122.900,00	Rp.820.747.648,00	89,98
	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.123.626.000,00	Rp.116.001.158,00	93,83
	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp.20.536.000,00	Rp.1.540.000,00	7,50
	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp.428.808.136,00	Rp.113.598.400,00	26,49
	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp.59.443.600,00	Rp.32.286.050,00	54,31
	1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp.33.665.900,00	Rp.20.506.650,00	60,91
	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.82.205.104,00	Rp.61.646.376,00	74,99
	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.78.473.433,00	Rp.77.348.700,00	98,57
	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.34.789.430,00	Rp.32.159.454,00	92,44
	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.391.486.900,00	Rp.307.339.618,00	78,51
	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.64.136.776,00	Rp.50.006.500,00	77,97
	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.2.354.400,00	Rp.1.020.000,00	43,32
	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.546.706.329,00	Rp.343.905.322,00	62,90
	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.700.783.714,00	Rp.521.516.973,00	74,42
	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.152.000.000,00	Rp.148.934.000,00	97,98
	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.296.465.104,00	Rp.284.291.383,00	95,89
3	**1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Rumah Sakit Umum Daerah**	**Rp.93.449.936.182,00**	**Rp.96.039.023.112,37**	**102,77**
	1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rp.3.724.311.242,00	Rp.3.567.174.939,00	95,78
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.89.725.624.940,00	Rp.92.471.848.173,37	103,06
4	**1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Puskesmas Karangasem I**	**Rp.4.510.533.231,00**	**Rp.3.557.662.001,00**	**78,87**
	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.107.000.000,00	Rp.106.223.780,00	99,27

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.220.506.984,00	Rp.193.118.242,00	87,58
	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp.200.000,00	Rp.0,00	0,00
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.4.182.826.247,00	Rp.3.258.319.979,00	77,90
5	**1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Puskesmas Karangasem II**	**Rp.3.525.936.287,00**	**Rp.2.904.429.723,00**	**82,37**
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.257.712.280,00	Rp.217.499.443,00	84,40
	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp.150.000,00	Rp.0,00	0,00
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.268.074.007,00	Rp.2.686.930.280,00	82,22
6	**1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Puskesmas Manggis I**	**Rp.3.913.762.981,00**	**Rp.3.469.911.318,00**	**88,66**
	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.1.129.000.000,00	Rp.1.061.989.273,00	94,06
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.204.228.456,00	Rp.174.005.474,00	85,20
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.2.580.534.525,00	Rp.2.233.916.571,00	86,57
7	**1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Puskesmas Manggis II**	**Rp.2.515.726.821,00**	**Rp.2.123.746.904,00**	**84,42**
	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.687.000.000,00	Rp.578.287.100,00	84,18
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.615.137.280,00	Rp.550.204.952,00	89,44
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.1.213.589.541,00	Rp.995.254.852,00	82,01
8	**1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Puskesmas Abang I**	**Rp.3.963.786.364,00**	**Rp.3.148.973.672,00**	**79,44**
	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.70.000.000,00	Rp.69.185.200,00	98,84
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.196.335.472,00	Rp.172.940.300,00	88,08
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.697.450.892,00	Rp.2.906.848.172,00	78,62
9	**1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD Puskesmas Abang II**	**Rp.3.557.174.212,00**	**Rp.2.886.294.138,00**	**81,14**
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.140.210.736,00	Rp.130.938.848,00	93,39
	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp.96.000,00	Rp.0,00	0,00
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.416.867.476,00	Rp.2.755.355.290,00	80,64
10	**1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD Puskesmas Kubu I**	**Rp.4.037.658.840,00**	**Rp.3.256.173.008,00**	**80,65**
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.238.680.296,00	Rp.183.867.832,00	77,04
	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp.100.000,00	Rp.0,00	0,00
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.798.878.544,00	Rp.3.072.305.176,00	80,87
11	**1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Puskesmas Kubu II**	**Rp.3.653.792.277,00**	**Rp.3.025.415.894,00**	**82,80**
	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.107.000.000,00	Rp.106.361.700,00	99,40
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.141.798.736,00	Rp.132.446.248,00	93,40
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.404.993.541,00	Rp.2.786.607.946,00	81,84
12	**1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD Puskesmas Rendang**	**Rp.3.889.125.977,00**	**Rp.3.598.207.537,00**	**92,52**
	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.61.000.000,00	Rp.60.003.150,00	98,37
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.268.831.120,00	Rp.243.778.072,00	90,68
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.559.294.857,00	Rp.3.294.426.315,00	92,56
13	**1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD Puskesmas Sidemen**	**Rp.4.399.481.460,00**	**Rp.3.958.372.741,00**	**89,97**
	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.1.154.000.000,00	Rp.1.002.101.847,00	86,84
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.221.651.112,00	Rp.178.856.419,00	80,69
	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp.146.500,00	Rp.0,00	0,00
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.023.683.848,00	Rp.2.777.414.475,00	91,86
14	**1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Puskesmas Selat**	**Rp.4.677.204.529,00**	**Rp.4.405.457.748,35**	**94,19**
	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.800.000.000,00	Rp.790.899.420,35	98,86
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.359.676.080,00	Rp.310.488.493,00	86,32
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.517.528.449,00	Rp.3.304.069.835,00	93,93
15	**1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPTD Puskesmas Bebandem**	**Rp.4.329.173.546,00**	**Rp.3.732.913.205,00**	**86,23**
	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.110.000.000,00	Rp.108.980.000,00	99,07
	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp.221.083.840,00	Rp.165.513.696,00	74,86
	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.998.089.706,00	Rp.3.458.419.509,00	86,50
16	**1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPTD Rumah Sakit Pratama**	**Rp.5.163.691.590,00**	**Rp.3.933.806.169,00**	**76,18**
	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp.5.163.691.590,00	Rp.3.933.806.169,00	76,18
17	**1.03.1.04.2.10.14.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**Rp.102.501.906.577,00**	**Rp.97.674.599.635,00**	**95,29**
	1.03.02.2.01.0088 - Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Rp.213.942.700,00	Rp.211.535.450,00	98,87

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp.373.549.452,00	Rp.305.434.568,00	81,77
	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp.463.000.000,00	Rp.460.886.550,00	99,54
	1.03.02.2.01.0118 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.203.333.600,00	Rp.202.320.060,00	99,50
	1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Rp.50.000.000,00	Rp.50.000.000,00	100,00
	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.1.013.143.200,00	Rp.1.003.760.590,00	99,07
	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.2.030.215.748,00	Rp.1.846.451.304,00	90,95
	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp.100.000.000,00	Rp.92.403.837,00	92,40
	1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Rp.541.800,00	Rp.541.800,00	100,00
	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp.1.633.015.410,00	Rp.806.898.742,00	49,41
	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp.261.378.292,00	Rp.194.808.352,00	74,53
	1.03.05.2.01.0041 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp.95.000.000,00	Rp.90.138.021,00	94,88
	1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Rp.10.000.000,00	Rp.4.129.100,00	41,29
	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp.8.895.969.792,00	Rp.8.407.882.968,00	94,51
	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp.207.476.862,00	Rp.182.970.508,00	88,19
	1.03.09.2.01.0008 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp.30.503.156.615,00	Rp.29.857.143.980,00	97,88
	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp.2.175.925.180,00	Rp.2.154.935.600,00	99,04
	1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan	Rp.4.464.420.739,00	Rp.4.352.438.488,00	97,49
	1.03.10.2.01.0033 - Rekonstruksi Jalan	Rp.23.003.875.777,00	Rp.22.492.147.113,00	97,78
	1.03.10.2.01.0034 - Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp.1.712.669.556,00	Rp.1.650.983.679,00	96,40
	1.03.10.2.01.0040 - Pembangunan Jembatan	Rp.1.594.213.470,00	Rp.1.562.089.124,00	97,98
	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp.528.440.326,00	Rp.511.170.864,00	96,73
	1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp.14.159.377.142,00	Rp.13.407.136.262,00	94,69
	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp.45.296.200,00	Rp.40.972.470,00	90,45
	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Rp.38.276.000,00	Rp.28.102.837,00	73,42
	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rp.7.972.000,00	Rp.6.646.600,00	83,37
	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp.7.500.000,00	Rp.5.294.525,00	70,59
	1.03.11.2.03.0006 - Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Rp.10.000.000,00	Rp.7.713.440,00	77,13
	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp.98.170.965,00	Rp.80.576.901,00	82,08
	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Rp.19.659.500,00	Rp.19.004.475,00	96,67
	1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Rp.769.222.600,00	Rp.718.069.020,00	93,35
	1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.31.252.800,00	Rp.24.170.448,00	77,34
	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp.135.348.441,00	Rp.94.466.895,00	69,80
	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Rp.30.596.000,00	Rp.21.507.950,00	70,30
	1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp.111.905.400,00	Rp.59.712.160,00	53,36
	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp.100.625.022,00	Rp.79.590.682,00	79,10

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp.3.538.015.368,00	Rp.3.281.950.572,00	92,76
	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp.1.822.046.368,00	Rp.1.798.580.594,00	98,71
	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.998.100,00	Rp.1.705.775,00	85,37
	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.2.747.000,00	Rp.1.241.400,00	45,19
	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.2.747.000,00	Rp.1.944.850,00	70,80
	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.4.997.700,00	Rp.3.747.700,00	74,99
	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.5.372.500,00	Rp.4.215.900,00	78,47
	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.21.032.450,00	Rp.11.647.540,00	55,38
	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.424.057.480,00	Rp.334.622.463,00	78,91
	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.93.011.500,00	Rp.65.290.000,00	70,20
	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.2.786.000,00	Rp.2.784.000,00	99,93
	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.6.500.000,00	Rp.6.327.000,00	97,34
	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.126.440.500,00	Rp.121.850.250,00	96,37
	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.395.320.000,00	Rp.296.672.539,00	75,05
	1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.89.158.135,00	Rp.79.973.956,00	89,70
	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.438.636.031,00	Rp.281.862.608,00	64,26
	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Rp.5.000.000,00	Rp.4.125.000,00	82,50
	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.48.725.000,00	Rp.34.588.350,00	70,99
	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.277.812.656,00	Rp.251.657.828,00	90,59
	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Rp.22.571.200,00	Rp.14.363.389,00	63,64
	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rp.47.610.000,00	Rp.24.917.858,00	52,34
	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Rp.26.851.000,00	Rp.16.494.700,00	61,43
18	**1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja**	**Rp.822.798.623,00**	**Rp.552.606.999,00**	**67,16**
	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.336.600,00	Rp.311.119,00	92,43
	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.337.900,00	Rp.310.100,00	91,77
	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.332.900,00	Rp.306.850,00	92,17
	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.600.200,00	Rp.516.500,00	86,05
	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.600.200,00	Rp.547.650,00	91,24
	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.643.600,00	Rp.560.237,00	87,05
	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.939.600,00	Rp.865.781,00	92,14
	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.625.000,00	Rp.577.719,00	92,44
	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.11.017.200,00	Rp.7.011.707,00	63,64
	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.146.647.400,00	Rp.130.883.169,00	89,25
	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.4.133.600,00	Rp.3.162.484,00	76,51
	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.8.000.000,00	Rp.7.990.500,00	99,88
	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.85.920.000,00	Rp.78.586.113,00	91,46
	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.237.600.000,00	Rp.0,00	0,00

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.271.000.000,00	Rp.267.113.620,00	98,57
	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.19.064.423,00	Rp.18.885.000,00	99,06
	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.20.000.000,00	Rp.19.999.000,00	100,00
	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.15.000.000,00	Rp.14.979.450,00	99,86
19	**1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**Rp.4.167.831.020,00**	**Rp.3.698.420.780,00**	**88,74**
	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.192.044.824,00	Rp.888.537.735,00	74,54
	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp.48.855.200,00	Rp.40.872.990,00	83,66
	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp.295.792.000,00	Rp.248.902.156,00	84,15
	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp.31.826.500,00	Rp.22.108.350,00	69,47
	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp.1.900.000.000,00	Rp.1.883.330.000,00	99,12
	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp.201.933.912,00	Rp.174.966.714,00	86,65
	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp.46.914.000,00	Rp.40.453.780,00	86,23
	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.465.000,00	Rp.416.250,00	89,52
	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.475.000,00	Rp.471.750,00	99,32
	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.473.700,00	Rp.471.195,00	99,47
	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.475.000,00	Rp.416.250,00	87,63
	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.400.400,00	Rp.399.600,00	99,80
	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.51.444.080,00	Rp.38.671.740,00	75,17
	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.100.463.000,00	Rp.93.358.197,00	92,93
	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.7.986.630,00	Rp.6.794.932,00	85,08
	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.3.300.000,00	Rp.3.120.000,00	94,55
	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.44.150.000,00	Rp.27.385.285,00	62,03
	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.20.813.184,00	Rp.20.590.098,00	98,93
	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.145.516.038,00	Rp.138.410.556,00	95,12
	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.16.000.000,00	Rp.13.965.750,00	87,29
	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.58.502.552,00	Rp.54.777.452,00	93,63
20	**1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Rp.1.826.238.375,00**	**Rp.1.417.287.045,00**	**77,61**
	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp.961.955.293,00	Rp.664.947.845,00	69,12
	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp.102.007.395,00	Rp.75.434.508,00	73,95
	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.2.838.300,00	Rp.1.781.000,00	62,75
	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.48.129.868,00	Rp.35.734.192,00	74,25
	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.59.915.700,00	Rp.54.375.000,00	90,75
	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.76.624.876,00	Rp.67.747.528,00	88,41
	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.11.849.500,00	Rp.8.051.997,00	67,95
	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.72.961.500,00	Rp.59.505.010,00	81,56
	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.63.517.568,00	Rp.53.446.611,00	84,14

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.88.937.144,00	Rp.78.648.909,00	88,43
	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.196.501.231,00	Rp.181.320.812,00	92,27
	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.51.000.000,00	Rp.51.000.000,00	100,00
	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.80.000.000,00	Rp.78.987.973,00	98,73
	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp.10.000.000,00	Rp.6.305.660,00	63,06
21	**1.06.2.08.2.14.00.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Rp.3.511.213.376,00**	**Rp.3.088.413.603,12**	**87,96**
	1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp.25.249.184,00	Rp.22.820.528,00	90,38
	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp.18.231.192,00	Rp.13.130.274,00	72,02
	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp.154.764.876,00	Rp.149.283.571,44	96,46
	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp.65.314.050,00	Rp.38.230.388,00	58,53
	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Rp.464.186.000,00	Rp.317.932.500,00	68,49
	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp.132.000.000,00	Rp.128.000.000,00	96,97
	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp.43.870.650,00	Rp.9.441.276,00	21,52
	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Rp.67.200.000,00	Rp.67.200.000,00	100,00
	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Rp.140.915.000,00	Rp.83.993.700,00	59,61
	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp.1.137.000.000,00	Rp.1.137.000.000,00	100,00
	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.42.034.877,00	Rp.41.092.972,00	97,76
	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.21.531.784,00	Rp.21.320.516,00	99,02
	1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.40.002.768,00	Rp.39.985.056,00	99,96
	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.249.678.534,00	Rp.191.598.267,00	76,74
	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.32.979.500,00	Rp.11.380.958,00	34,51
	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.3.282.400,00	Rp.2.880.000,00	87,74
	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.39.830.088,00	Rp.39.127.234,00	98,24
	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.94.668.000,00	Rp.92.938.426,00	98,17
	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.55.483.052,00	Rp.54.717.607,00	98,62
	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.409.336.497,00	Rp.354.443.034,00	86,59
	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.60.842.668,00	Rp.60.390.000,00	99,26
	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.212.812.256,00	Rp.211.507.295,68	99,39
22	**2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketenagakerjaan**	**Rp.1.240.951.248,00**	**Rp.1.056.425.305,40**	**85,13**
	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.588.100,00	Rp.1.275.055,00	80,29
	2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.1.240.000,00	Rp.551.105,00	44,44
	2.07.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.1.476.200,00	Rp.1.299.365,00	88,02
	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.47.436.800,00	Rp.38.786.347,00	81,76
	2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.230.792.048,00	Rp.170.449.581,00	73,85

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.49.066.100,00	Rp.46.495.000,00	94,76
	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.17.724.000,00	Rp.13.737.221,00	77,51
	2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.2.424.000,00	Rp.2.112.000,00	87,13
	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.54.300.000,00	Rp.50.407.002,00	92,83
	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.75.000.000,00	Rp.68.284.484,00	91,05
	2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.223.000.000,00	Rp.129.354.140,00	58,01
	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.45.904.000,00	Rp.45.410.440,00	98,92
	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.491.000.000,00	Rp.488.263.565,40	99,44
23	**5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**Rp.3.650.682.074,00**	**Rp.3.107.814.262,52**	**85,13**
	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp.15.331.600,00	Rp.11.746.017,00	76,61
	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp.86.450.192,00	Rp.73.962.480,00	85,56
	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp.25.620.900,00	Rp.12.658.045,00	49,41
	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp.167.063.900,00	Rp.103.098.631,00	61,71
	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	Rp.94.416.784,00	Rp.72.699.991,00	77,00
	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp.949.197.892,00	Rp.809.620.025,00	85,30
	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.22.254.692,00	Rp.19.748.927,00	88,74
	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.10.219.700,00	Rp.7.745.872,00	75,79
	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.18.573.592,00	Rp.16.479.380,00	88,72
	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.122.284.287,00	Rp.114.965.441,00	94,01
	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.284.575.840,00	Rp.232.474.525,00	81,69
	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.22.444.000,00	Rp.10.222.565,00	45,55
	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.30.000.000,00	Rp.23.239.800,00	77,47
	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.17.875.600,00	Rp.17.300.000,00	96,78
	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.31.121.400,00	Rp.5.827.500,00	18,73
	5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.500.000.000,00	Rp.498.465.431,52	99,69
	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.153.887.000,00	Rp.114.000.000,00	74,08
	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.225.660.000,00	Rp.174.556.676,00	77,35
	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.52.309.360,00	Rp.50.952.766,00	97,41
	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.341.434.549,00	Rp.288.776.562,00	84,58
	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.226.632.440,00	Rp.213.312.192,00	94,12
	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.253.328.346,00	Rp.235.961.436,00	93,14
24	**5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Rp.869.082.661,00**	**Rp.684.187.388,00**	**78,73**
	5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp.158.816.256,00	Rp.152.544.114,00	96,05
	5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.12.987.456,00	Rp.10.122.489,00	77,94
	5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.1.506.800,00	Rp.1.497.701,00	99,40
	5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.199.813.029,00	Rp.134.223.972,00	67,17
	5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.59.188.600,00	Rp.48.407.700,00	81,79
	5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.25.010.400,00	Rp.16.314.021,00	65,23
	5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.7.500.000,00	Rp.6.672.000,00	88,96
	5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.76.130.000,00	Rp.54.627.659,00	71,76

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.21.378.912,00	Rp.16.032.528,00	74,99
	5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.180.068.368,00	Rp.135.329.912,00	75,15
	5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.84.959.200,00	Rp.70.045.500,00	82,45
	5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.41.723.640,00	Rp.38.369.792,00	91,96
25	**4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD**	**Rp.7.591.313.616,00**	**Rp.6.502.739.180,08**	**85,66**
	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp.15.271.850,00	Rp.5.850.900,00	38,31
	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.24.894.603,00	Rp.4.106.414,00	16,50
	4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.6.091.600,00	Rp.3.333.009,00	54,71
	4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.5.409.300,00	Rp.3.582.819,00	66,23
	4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.6.692.175,00	Rp.4.708.405,00	70,36
	4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.7.525.400,00	Rp.5.101.648,00	67,79
	4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.3.244.600,00	Rp.1.752.226,00	54,00
	4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.21.780.444,00	Rp.18.727.298,00	85,98
	4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.69.255.016,00	Rp.50.522.989,00	72,95
	4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.122.932.935,00	Rp.24.592.840,00	20,01
	4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.156.948.966,00	Rp.136.153.093,00	86,75
	4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.769.880.357,00	Rp.647.608.170,30	84,12
	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.8.782.400,00	Rp.6.744.490,00	76,80
	4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.171.256.368,00	Rp.162.669.792,00	94,99
	4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.1.613.501.816,00	Rp.1.243.307.924,00	77,06
	4.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1.571.329.596,00	Rp.1.420.173.336,00	90,38
	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.378.000.000,00	Rp.358.268.999,00	94,78
	4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.436.773.988,00	Rp.406.100.316,00	92,98
	4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.741.366.890,00	Rp.651.595.560,00	87,89
	4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.200.000.000,00	Rp.193.315.475,00	96,66
	4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.935.375.312,00	Rp.929.980.790,78	99,42
	4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.325.000.000,00	Rp.224.542.686,00	69,09
26	**2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Rp.1.137.553.106,00**	**Rp.918.332.380,00**	**80,73**
	2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rp.4.437.900,00	Rp.3.223.343,00	72,63
	2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.6.043.400,00	Rp.4.359.902,00	72,14
	2.12.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.6.392.200,00	Rp.4.241.276,00	66,35
	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.178.835.104,00	Rp.174.377.318,00	97,51
	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.10.204.900,00	Rp.6.242.101,00	61,17
	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.1.350.000,00	Rp.1.056.000,00	78,22
	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.99.000.000,00	Rp.81.960.735,00	82,79
	2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.14.677.800,00	Rp.10.592.603,00	72,17
	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.271.146.360,00	Rp.193.449.865,00	71,35
	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.484.465.442,00	Rp.378.930.338,00	78,22

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.8.000.000,00	Rp.7.998.000,00	99,98
	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.53.000.000,00	Rp.51.900.899,00	97,93
27	**2.18.3.29.0.00.05.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Rp.2.084.058.878,00**	**Rp.1.830.046.460,00**	**87,81**
	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp.243.957.788,00	Rp.206.625.926,00	84,70
	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp.14.533.000,00	Rp.13.346.096,00	91,83
	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.39.018.368,00	Rp.29.478.232,00	75,55
	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.176.470.530,00	Rp.158.032.761,00	89,55
	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.6.075.800,00	Rp.5.049.228,00	83,10
	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.6.300.000,00	Rp.6.300.000,00	100,00
	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.751.052.700,00	Rp.729.781.248,00	97,17
	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.302.032.300,00	Rp.172.591.859,00	57,14
	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.91.816.336,00	Rp.85.920.776,00	93,58
	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.208.503.852,00	Rp.187.798.832,00	90,07
	2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Rp.5.000.000,00	Rp.4.992.000,00	99,84
	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.66.375.600,00	Rp.59.509.000,00	89,65
	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.172.922.604,00	Rp.170.620.502,00	98,67
28	**2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Rp.5.170.147.455,00**	**Rp.4.658.655.855,00**	**90,11**
	2.21.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.20.689.444,00	Rp.15.816.824,00	76,45
	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.5.451.588,00	Rp.4.659.245,00	85,47
	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.1.975.000,00	Rp.1.672.454,00	84,68
	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.699.300,00	69,93
	2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.699.300,00	69,93
	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.34.050.968,00	Rp.33.460.476,00	98,27
	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.92.589.550,00	Rp.81.114.991,00	87,61
	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.6.000.000,00	Rp.4.307.515,00	71,79
	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.3.906.000,00	Rp.2.883.500,00	73,82
	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.262.000.000,00	Rp.163.018.831,00	62,22
	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.177.662.552,00	Rp.169.782.242,00	95,56
	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.20.949.091,00	Rp.20.899.250,00	99,76
	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.71.192.008,00	Rp.59.354.584,00	83,37
	2.16.03.2.02.0020 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp.2.276.922.184,00	Rp.1.916.556.969,00	84,17
	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Rp.100.000.000,00	Rp.99.511.500,00	99,51
	2.16.03.2.02.0027 - Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp.25.000.000,00	Rp.21.178.985,00	84,72
	2.16.03.2.02.0021 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Rp.25.000.000,00	Rp.23.586.412,00	94,35

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	2.16.03.2.02.0030 - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Rp.2.002.000.450,00	Rp.2.001.975.677,00	100,00
	2.20.02.2.01.0010 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp.20.250.000,00	Rp.18.288.700,00	90,31
	2.20.02.2.01.0009 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp.22.508.620,00	Rp.19.189.100,00	85,25
29	**7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Karangasem**	**Rp.384.076.774,00**	**Rp.359.463.012,00**	**93,59**
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.567.000,00	Rp.392.774,00	69,27
	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.459.600,00	Rp.375.497,00	81,70
	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.476.500,00	Rp.327.089,00	68,64
	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.567.800,00	Rp.396.503,00	69,83
	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.588.800,00	Rp.409.137,00	69,49
	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.10.118.456,00	Rp.7.549.997,00	74,62
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.127.573.200,00	Rp.120.371.289,00	94,35
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.10.967.200,00	Rp.7.823.576,00	71,34
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.4.526.000,00	Rp.3.832.500,00	84,68
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.18.000.000,00	Rp.15.900.000,00	88,33
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.47.400.000,00	Rp.43.018.098,00	90,76
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.5.231.400,00	Rp.3.570.570,00	68,25
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.117.892.272,00	Rp.115.986.982,00	98,38
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.29.708.546,00	Rp.29.544.000,00	99,45
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.10.000.000,00	Rp.9.965.000,00	99,65
30	**7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Subagan**	**Rp.437.803.060,00**	**Rp.389.989.368,00**	**89,08**
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp.300.000.000,00	Rp.281.357.280,00	93,79
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.54.236.200,00	Rp.39.442.950,00	72,72
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.1.980.000,00	Rp.670.000,00	33,84
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.3.100.000,00	Rp.3.100.000,00	100,00
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.16.650.000,00	Rp.12.994.988,00	78,05
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.14.914.228,00	Rp.14.394.904,00	96,52
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.26.922.632,00	Rp.24.464.246,00	90,87
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.20.000.000,00	Rp.13.565.000,00	67,83
31	**7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Karangasem**	**Rp.532.651.536,00**	**Rp.507.437.831,00**	**95,27**
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp.393.700.000,00	Rp.374.865.397,00	95,22
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.62.025.400,00	Rp.59.656.334,00	96,18
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.4.366.800,00	Rp.3.840.850,00	87,96
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.3.139.000,00	Rp.3.139.000,00	100,00
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.16.260.000,00	Rp.15.526.784,00	95,49
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.15.593.884,00	Rp.15.013.938,00	96,28
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.28.566.452,00	Rp.26.900.528,00	94,17
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.9.000.000,00	Rp.8.495.000,00	94,39
32	**7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Padangkerta**	**Rp.345.249.168,00**	**Rp.328.020.294,00**	**95,01**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp.224.426.900,00	Rp.221.007.388,00	98,48
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.33.511.000,00	Rp.30.364.772,00	90,61
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.2.482.400,00	Rp.1.860.623,00	74,95
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.3.282.400,00	Rp.3.264.000,00	99,44
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.16.800.000,00	Rp.12.335.594,00	73,43
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.5.078.100,00	Rp.4.290.493,00	84,49
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.33.634.184,00	Rp.28.914.896,00	85,97
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.10.000.000,00	Rp.9.950.000,00	99,50
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.16.034.184,00	Rp.16.032.528,00	99,99
33	**7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Abang**	**Rp.393.502.600,00**	**Rp.353.351.172,00**	**89,80**
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.484.300,00	Rp.285.402,00	58,93
	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.382.900,00	Rp.226.781,00	59,23
	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.390.800,00	Rp.231.784,00	59,31
	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.886.100,00	Rp.546.000,00	61,62
	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.943.600,00	Rp.576.393,00	61,08
	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.578.300,00	Rp.349.000,00	60,35
	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.578.300,00	Rp.346.000,00	59,83
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.151.793.050,00	Rp.132.092.181,00	87,02
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.6.761.200,00	Rp.4.636.609,00	68,58
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.250.000,00	Rp.250.000,00	100,00
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.3.782.200,00	Rp.0,00	0,00
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.31.500.000,00	Rp.28.649.492,00	90,95
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.17.430.084,00	Rp.15.490.383,00	88,87
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.141.807.582,00	Rp.133.929.069,00	94,44
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.13.500.000,00	Rp.13.429.550,00	99,48
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.22.434.184,00	Rp.22.312.528,00	99,46
34	**7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Kubu**	**Rp.566.307.741,00**	**Rp.550.405.571,00**	**97,19**
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.300.000,00	Rp.227.839,00	75,95
	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.300.000,00	Rp.227.839,00	75,95
	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.300.000,00	Rp.227.839,00	75,95
	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.500.000,00	Rp.403.796,00	80,76
	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.500.000,00	Rp.403.796,00	80,76
	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.300.000,00	Rp.227.839,00	75,95
	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.120.000,00	Rp.101.965,00	84,97
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.130.381.695,00	Rp.121.216.471,00	92,97
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.3.914.000,00	Rp.2.665.354,00	68,10
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.14.000.000,00	Rp.12.112.500,00	86,52
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.31.000.000,00	Rp.30.247.261,00	97,57

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.26.557.368,00	Rp.26.512.078,00	99,83
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.148.134.678,00	Rp.146.918.144,00	99,18
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.10.000.000,00	Rp.9.970.000,00	99,70
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.200.000.000,00	Rp.198.942.850,00	99,47
35	**7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bebandem**	**Rp.439.888.978,00**	**Rp.401.779.504,00**	**91,34**
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.250.000,00	Rp.1.149.000,00	91,92
	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.922.950,00	92,30
	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.903.288,00	90,33
	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.932.850,00	93,28
	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.914.950,00	91,50
	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.750.000,00	Rp.702.250,00	93,63
	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.7.480.000,00	Rp.5.949.553,00	79,54
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.143.364.600,00	Rp.127.212.624,00	88,73
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.10.000.000,00	Rp.8.654.150,00	86,54
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.36.540.000,00	Rp.36.300.000,00	99,34
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.31.000.000,00	Rp.18.328.130,00	59,12
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.785.484,00	Rp.25.754.155,00	86,47
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.161.718.894,00	Rp.160.151.104,00	99,03
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.14.000.000,00	Rp.13.904.500,00	99,32
36	**7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Selat**	**Rp.874.671.266,00**	**Rp.807.734.062,00**	**92,35**
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.501.000,00	Rp.350.700,00	70,00
	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.283.500,00	Rp.198.450,00	70,00
	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.381.000,00	Rp.266.433,00	69,93
	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.567.000,00	Rp.396.900,00	70,00
	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.588.000,00	Rp.411.188,00	69,93
	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.570.000,00	Rp.398.601,00	69,93
	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.1.449.500,00	Rp.1.133.987,00	78,23
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.189.712.159,00	Rp.161.661.132,00	85,21
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.12.376.500,00	Rp.9.475.553,00	76,56
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.300.000,00	Rp.300.000,00	100,00
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.24.000.000,00	Rp.9.218.577,00	38,41
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.35.746.868,00	Rp.29.990.491,00	83,90
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.198.034.184,00	Rp.186.315.436,00	94,08
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.14.000.000,00	Rp.13.930.000,00	99,50
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.396.161.555,00	Rp.393.686.614,00	99,38
37	**7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Rendang**	**Rp.817.762.245,00**	**Rp.774.075.087,00**	**94,66**
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.500.000,00	Rp.350.000,00	70,00

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.500.000,00	Rp.275.000,00	55,00
	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.500.000,00	Rp.275.000,00	55,00
	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.1.500.000,00	Rp.1.050.000,00	70,00
	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.1.867.000,00	Rp.1.026.850,00	55,00
	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.731.500,00	Rp.512.050,00	70,00
	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.331.000,00	Rp.231.700,00	70,00
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.120.496.100,00	Rp.109.304.557,00	90,71
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.7.772.500,00	Rp.5.981.600,00	76,96
	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.50.800.000,00	Rp.39.139.821,00	77,05
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.10.000.000,00	Rp.7.339.630,00	73,40
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.29.825.668,00	Rp.25.430.860,00	85,27
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.177.938.477,00	Rp.170.772.809,00	95,97
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.15.000.000,00	Rp.14.200.000,00	94,67
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.400.000.000,00	Rp.398.185.210,00	99,55
38	**7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sidemen**	**Rp.484.338.250,00**	**Rp.437.382.892,00**	**90,31**
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.441.000,00	Rp.375.342,00	85,11
	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.504.000,00	Rp.378.000,00	75,00
	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.469.000,00	Rp.351.919,00	75,04
	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.1.109.800,00	Rp.806.750,00	72,69
	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.1.187.300,00	Rp.865.154,00	72,87
	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.700.000,00	Rp.525.000,00	75,00
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.116.852.266,00	Rp.105.460.321,00	90,25
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.8.987.700,00	Rp.7.103.146,00	79,03
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.56.324.566,00	Rp.50.909.400,00	90,39
	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.40.142.100,00	Rp.34.887.300,00	86,91
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.27.900.000,00	Rp.20.379.984,00	73,05
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.64.413.780,00	Rp.56.694.590,00	88,02
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.136.806.738,00	Rp.134.956.586,00	98,65
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.23.500.000,00	Rp.18.760.250,00	79,83
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.5.000.000,00	Rp.4.929.150,00	98,58
39	**7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Manggis**	**Rp.505.082.521,00**	**Rp.439.753.088,00**	**87,07**
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.000.000,00	Rp.631.390,00	63,14
	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.631.390,00	63,14
	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.850.000,00	Rp.539.890,00	63,52
	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.1.000.000,00	Rp.631.390,00	63,14
	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.850.000,00	Rp.539.890,00	63,52
	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.1.250.000,00	Rp.784.437,00	62,75
	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.1.250.000,00	Rp.784.437,00	62,75

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.185.000.000,00	Rp.163.362.812,00	88,30
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.8.000.000,00	Rp.4.395.028,00	54,94
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.1.350.000,00	Rp.1.080.000,00	80,00
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.17.500.000,00	Rp.13.650.000,00	78,00
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.75.000.000,00	Rp.57.827.304,00	77,10
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.16.434.184,00	Rp.14.918.528,00	90,78
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.156.598.337,00	Rp.150.986.092,00	96,42
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.13.000.000,00	Rp.10.550.500,00	81,16
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.25.000.000,00	Rp.18.440.000,00	73,76
40	**4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Organisasi**	**Rp.514.342.412,00**	**Rp.464.470.291,00**	**90,30**
	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp.399.839.456,00	Rp.377.304.000,00	94,36
	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp.74.464.456,00	Rp.58.945.871,00	79,16
	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp.40.038.500,00	Rp.28.220.420,00	70,48
41	**4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Perekonomian dan Pembangunan**	**Rp.220.486.444,00**	**Rp.189.694.531,00**	**86,03**
	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp.48.155.032,00	Rp.39.606.694,00	82,25
	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp.172.331.412,00	Rp.150.087.837,00	87,09
42	**4.01.0.00.0.00.01.0009 - Bagian Umum**	**Rp.12.586.755.573,00**	**Rp.9.436.135.310,00**	**74,97**
	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.19.642.456,00	Rp.15.505.107,00	78,94
	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.3.240.600,00	Rp.731.673,00	22,58
	4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.10.170.000,00	Rp.6.583.404,00	64,73
	4.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.358.531.410,00	Rp.288.300.284,00	80,41
	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.586.263.943,00	Rp.1.353.174.691,00	85,31
	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.1.065.309.950,00	Rp.901.468.379,00	84,62
	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.82.999.200,00	Rp.63.138.619,00	76,07
	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.263.953.900,00	Rp.228.431.998,00	86,54
	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.1.531.166.856,00	Rp.1.230.898.363,00	80,39
	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.1.077.000.000,00	Rp.859.723.470,00	79,83
	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.384.349.460,00	Rp.547.562.502,00	39,55
	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.1.655.484.948,00	Rp.1.094.287.917,00	66,10
	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1.340.069.672,00	Rp.1.003.355.653,00	74,87
	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Rp.10.353.190,00	Rp.9.725.000,00	93,93
	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.327.449.658,00	Rp.219.072.054,00	66,90
	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1.870.770.330,00	Rp.1.614.176.196,00	86,28
43	**4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**Rp.424.490.212,00**	**Rp.305.973.011,00**	**72,08**
	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.275.631.868,00	Rp.199.889.746,00	72,52
	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp.52.278.844,00	Rp.28.703.939,00	54,91
	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.96.579.500,00	Rp.77.379.326,00	80,12
44	**8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Rp.947.548.172,00**	**Rp.712.610.533,00**	**75,21**
	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.2.461.200,00	Rp.2.357.572,00	95,79
	8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.1.197.600,00	Rp.1.147.827,00	95,84

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.1.659.500,00	Rp.1.601.719,00	96,52
	8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.1.932.500,00	Rp.1.826.500,00	94,51
	8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.2.400.000,00	Rp.2.249.328,00	93,72
	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.937.000,00	Rp.909.696,00	97,09
	8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.1.000.000,00	Rp.948.325,00	94,83
	8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.1.425.000,00	Rp.1.362.625,00	95,62
	8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.13.715.800,00	Rp.11.256.661,00	82,07
	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.230.542.400,00	Rp.145.286.240,00	63,02
	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.47.970.200,00	Rp.42.423.237,00	88,44
	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.8.000.000,00	Rp.7.944.000,00	99,30
	8.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.8.000.000,00	Rp.8.000.000,00	100,00
	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.28.993.500,00	Rp.24.430.000,00	84,26
	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.38.000.000,00	Rp.24.248.177,00	63,81
	8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.48.000.000,00	Rp.42.245.000,00	88,01
	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.125.945.104,00	Rp.104.102.640,00	82,66
	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.370.368.368,00	Rp.275.290.986,00	74,33
	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.15.000.000,00	Rp.14.980.000,00	99,87
45	**2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**	**Rp.24.948.410.245,00**	**Rp.22.961.777.205,43**	**92,04**
	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp.111.506.100,00	Rp.103.903.915,00	93,18
	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp.984.000,00	Rp.871.000,00	88,52
	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp.132.393.000,00	Rp.124.973.300,00	94,40
	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Rp.28.261.345,00	Rp.19.510.870,00	69,04
	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.1.279.494.618,00	Rp.1.115.502.323,28	87,18
	2.11.05.2.01.0002 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp.17.367.456,00	Rp.8.928.964,00	51,41
	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp.207.256.100,00	Rp.202.610.900,00	97,76
	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp.11.875.037.000,00	Rp.11.625.264.857,15	97,90
	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Rp.594.818.576,00	Rp.391.763.135,00	65,86
	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	Rp.2.204.421.876,00	Rp.1.730.354.831,00	78,49
	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Rp.5.792.057.600,00	Rp.5.543.854.776,00	95,71
	2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Rp.56.901.684,00	Rp.51.589.818,00	90,66
	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Rp.1.883.968.984,00	Rp.1.429.290.780,00	75,87
	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.24.657.912,00	Rp.17.450.478,00	70,77
	2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.599.000,00	Rp.415.250,00	69,32
	2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.599.000,00	Rp.415.119,00	69,30
	2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.489.800,00	Rp.426.000,00	86,97
	2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.899.000,00	Rp.748.356,00	83,24
	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.15.283.184,00	Rp.10.758.396,00	70,39
	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.159.325.540,00	Rp.138.395.856,00	86,86
	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.13.335.600,00	Rp.11.845.472,00	88,83
	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.1.177.200,00	Rp.1.020.000,00	86,65

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.235.500.000,00	Rp.135.537.068,00	57,55
	2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.68.077.618,00	Rp.63.066.177,00	92,64
	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.174.729.684,00	Rp.170.542.508,00	97,60
	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.20.000.000,00	Rp.20.000.000,00	100,00
	2.11.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.49.268.368,00	Rp.42.737.056,00	86,74
46	**2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**	**Rp.558.906.441,00**	**Rp.466.182.856,00**	**83,41**
	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Rp.2.496.000,00	Rp.1.728.871,00	69,27
	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp.3.768.500,00	Rp.3.258.014,00	86,45
	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.3.036.600,00	Rp.2.334.455,00	76,88
	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp.28.340.200,00	Rp.20.928.133,00	73,85
	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.839.000,00	Rp.565.967,00	67,46
	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.866.500,00	Rp.703.832,00	81,23
	2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.862.100,00	Rp.730.657,00	84,75
	2.13.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.1.211.100,00	Rp.930.377,00	76,82
	2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.1.117.300,00	Rp.942.547,00	84,36
	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.52.049.000,00	Rp.41.306.062,00	79,36
	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.49.761.800,00	Rp.41.858.179,00	84,12
	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.14.903.800,00	Rp.7.992.955,00	53,63
	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.4.500.000,00	Rp.4.392.000,00	97,60
	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.81.805.400,00	Rp.66.690.943,00	81,52
	2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.22.553.484,00	Rp.21.848.645,00	96,87
	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.269.295.657,00	Rp.230.089.219,00	85,44
	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.21.500.000,00	Rp.19.882.000,00	92,47
47	**2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan**	**Rp.12.146.254.523,00**	**Rp.10.175.067.557,50**	**83,77**
	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp.1.296.997.388,00	Rp.1.134.537.813,00	87,47
	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp.2.164.048.584,00	Rp.1.732.972.483,00	80,08
	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp.500.000.000,00	Rp.494.672.750,00	98,93
	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.620.516.668,00	Rp.500.928.250,00	80,73
	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.85.765.000,00	Rp.82.766.999,00	96,50
	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.130.363.000,00	Rp.112.588.000,00	86,36
	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp.951.432.220,00	Rp.776.181.285,50	81,58
	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.9.020.000,00	Rp.7.213.800,00	79,98
	2.15.02.2.08.0006 - Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Rp.6.817.600,00	Rp.3.925.100,00	57,57
	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.71.447.912,00	Rp.65.306.528,00	91,40
	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.26.533.144,00	Rp.20.408.600,00	76,92

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.14.020.456,00	Rp.10.304.664,00	73,50
	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.250.000,00	Rp.208.125,00	83,25
	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.300.000,00	Rp.233.100,00	77,70
	2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.300.000,00	Rp.233.100,00	77,70
	2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.800.000,00	Rp.664.002,00	83,00
	2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.800.000,00	Rp.629.370,00	78,67
	2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.150.000,00	Rp.124.209,00	82,81
	2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.74.800,00	Rp.61.605,00	82,36
	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.41.057.824,00	Rp.30.917.070,00	75,30
	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.85.874.100,00	Rp.79.152.109,00	92,17
	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.9.526.400,00	Rp.6.689.898,00	70,22
	2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.6.000.000,00	Rp.5.532.000,00	92,20
	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.81.435.011,00	Rp.78.842.000,00	96,82
	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.5.728.098.504,00	Rp.4.737.985.487,00	82,71
	2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.59.326.836,00	Rp.58.169.112,00	98,05
	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.185.531.853,00	Rp.164.311.042,00	88,56
	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.35.500.000,00	Rp.35.500.000,00	100,00
	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.34.267.223,00	Rp.34.009.056,00	99,25
48	**2.17.3.31.3.30.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	**Rp.5.348.905.127,00**	**Rp.4.505.342.056,00**	**84,23**
	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.1.500.000,00	Rp.1.390.800,00	92,72
	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.1.397.373.808,00	Rp.1.376.984.164,00	98,54
	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.1.902.996.694,00	Rp.1.476.526.624,00	77,59
	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.4.992.000,00	Rp.4.342.400,00	86,99
	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp.11.922.456,00	Rp.9.427.264,00	79,07
	3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp.937.200,00	Rp.835.000,00	89,10
	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.205.235.918,00	Rp.178.078.654,00	86,77
	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp.9.489.025,00	Rp.8.649.822,00	91,16
	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp.25.129.200,00	Rp.12.743.801,00	50,71
	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp.60.625.400,00	Rp.50.383.095,00	83,11
	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp.3.372.200,00	Rp.2.568.801,00	76,18
	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp.13.789.456,00	Rp.10.586.465,00	76,77
	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp.3.900.000,00	Rp.2.859.701,00	73,33
	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.3.879.900,00	Rp.1.948.050,00	50,21
	2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.1.549.500,00	Rp.1.067.176,00	68,87

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.5.518.200,00	Rp.3.744.000,00	67,85
	2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.1.651.200,00	Rp.1.217.075,00	73,71
	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.28.424.812,00	Rp.20.707.546,00	72,85
	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.3.000.000,00	Rp.1.941.950,00	64,73
	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.3.175.500,00	Rp.2.043.900,00	64,36
	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.15.745.700,00	Rp.8.199.570,00	52,07
	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.387.932.100,00	Rp.248.806.823,00	64,14
	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.9.272.000,00	Rp.3.046.600,00	32,86
	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.8.400.000,00	Rp.5.890.500,00	70,13
	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.58.937.200,00	Rp.48.550.003,00	82,38
	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.500.056.000,00	Rp.417.651.581,00	83,52
	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.351.260.370,00	Rp.291.991.703,00	83,13
	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.118.000.000,00	Rp.112.295.000,00	95,17
	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.210.839.288,00	Rp.200.863.988,00	95,27
49	**2.22.3.26.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**Rp.46.002.798.283,00**	**Rp.44.769.908.211,00**	**97,32**
	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp.87.744.202,00	Rp.78.112.329,00	89,02
	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp.1.505.224.680,00	Rp.1.442.239.351,00	95,82
	2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Rp.41.106.905.936,00	Rp.40.797.872.394,00	99,25
	2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Rp.85.648.272,00	Rp.77.922.573,00	90,98
	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rp.37.853.396,00	Rp.33.790.914,00	89,27
	3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp.31.220.500,00	Rp.27.804.050,00	89,06
	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.1.214.559.136,00	Rp.775.900.763,00	63,88
	3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.32.486.492,00	Rp.27.761.744,00	85,46
	3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.22.282.316,00	Rp.18.554.964,00	83,27
	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp.17.309.466,00	Rp.12.719.834,00	73,48
	2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.355.500,00	Rp.336.886,00	94,76
	2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.600.000,00	Rp.487.734,00	81,29
	2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.1.292.500,00	Rp.1.217.500,00	94,20
	2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.395.500,00	Rp.374.404,00	94,67
	2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.911.000,00	Rp.861.362,00	94,55
	2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.190.290.000,00	Rp.110.737.946,00	58,19
	2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.39.091.000,00	Rp.21.275.709,00	54,43
	2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.5.500.000,00	Rp.3.660.000,00	66,55
	2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.383.000.000,00	Rp.251.138.822,00	65,57
	2.22.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.42.419.568,00	Rp.38.042.110,00	89,68
	2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.338.497.478,00	Rp.281.903.960,00	83,28
	2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.274.133.341,00	Rp.217.971.782,00	79,51

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.63.000.000,00	Rp.41.051.400,00	65,16
	2.22.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.472.078.000,00	Rp.459.174.458,00	97,27
	2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.50.000.000,00	Rp.48.995.222,00	97,99
50	**2.23.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**Rp.1.300.097.240,00**	**Rp.1.183.182.245,40**	**91,01**
	2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.2.963.000,00	Rp.2.647.600,00	89,36
	2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.2.963.000,00	Rp.2.647.600,00	89,36
	2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.2.963.000,00	Rp.2.767.539,00	93,40
	2.23.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.2.963.000,00	Rp.2.647.600,00	89,36
	2.23.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.2.963.000,00	Rp.2.767.539,00	93,40
	2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.43.864.568,00	Rp.33.457.488,00	76,27
	2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.2.963.000,00	Rp.2.767.539,00	93,40
	2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.154.929.103,00	Rp.125.298.210,00	80,87
	2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.10.208.000,00	Rp.8.458.052,00	82,86
	2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.20.000.000,00	Rp.15.225.000,00	76,13
	2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.336.080.000,00	Rp.324.499.994,00	96,55
	2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.106.000.000,00	Rp.87.956.768,00	82,98
	2.23.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.44.934.268,00	Rp.44.896.556,00	99,92
	2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.242.868.326,00	Rp.208.778.236,00	85,96
	2.23.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Rp.5.000.000,00	Rp.4.725.000,00	94,50
	2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.84.834.184,00	Rp.84.625.528,00	99,75
	2.23.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.7.000.000,00	Rp.6.914.900,00	98,78
	2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.226.600.791,00	Rp.222.101.096,40	98,01
51	**3.27.2.09.3.25.10.0000 - Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan**	**Rp.12.664.788.780,00**	**Rp.10.551.453.276,00**	**83,31**
	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Rp.22.963.444,00	Rp.19.560.447,00	85,18
	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp.83.459.612,00	Rp.72.210.153,00	86,52
	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp.3.814.575.599,00	Rp.2.940.346.470,00	77,08
	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp.61.398.824,00	Rp.51.080.686,00	83,19
	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Rp.69.861.124,00	Rp.58.360.956,00	83,54
	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Rp.522.975.000,00	Rp.509.603.000,00	97,44
	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp.4.006.529.850,00	Rp.3.713.929.000,00	92,70
	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Rp.129.450.000,00	Rp.126.519.600,00	97,74
	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp.534.225.000,00	Rp.527.261.100,00	98,70
	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp.791.055.000,00	Rp.308.451.470,00	38,99
	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp.224.755.114,00	Rp.169.145.462,00	75,26
	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp.31.761.912,00	Rp.26.312.973,00	82,84
	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp.68.491.868,00	Rp.57.100.237,00	83,37
	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.32.494.368,00	Rp.25.047.051,00	77,08
	3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.3.000.000,00	Rp.2.813.850,00	93,80

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.3.000.000,00	Rp.2.813.850,00	93,80
	3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.1.924.000,00	Rp.1.744.395,00	90,67
	3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.1.924.000,00	Rp.1.730.790,00	89,96
	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.4.921.200,00	Rp.4.594.432,00	93,36
	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.62.146.236,00	Rp.47.361.546,00	76,21
	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.265.902.028,00	Rp.249.541.524,00	93,85
	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.614.103.709,00	Rp.504.394.307,00	82,14
	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.23.483.200,00	Rp.20.659.556,00	87,98
	3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.25.478.912,00	Rp.19.908.528,00	78,14
	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.5.012.000,00	Rp.4.996.200,00	99,68
	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.58.857.000,00	Rp.49.487.999,00	84,08
	3.27.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.12.981.000,00	Rp.12.971.473,00	99,93
	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.421.500.000,00	Rp.297.905.872,00	70,68
	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.415.670.920,00	Rp.397.412.760,00	95,61
	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.132.478.912,00	Rp.118.522.328,00	89,47
	3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.86.645.800,00	Rp.86.130.750,00	99,41
	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.131.763.148,00	Rp.123.534.511,00	93,75
52	**5.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Daerah**	**Rp.2.392.733.336,00**	**Rp.2.036.644.067,00**	**85,12**
	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.948.691.497,00	Rp.864.809.859,00	91,16
	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.35.339.456,00	Rp.30.471.261,00	86,22
	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.14.239.456,00	Rp.10.776.264,00	75,68
	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.2.300.000,00	Rp.2.011.500,00	87,46
	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.2.300.000,00	Rp.1.920.000,00	83,48
	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.2.300.000,00	Rp.1.940.000,00	84,35
	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.61.150.000,00	Rp.59.980.000,00	98,09
	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.15.389.456,00	Rp.11.756.264,00	76,39
	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.12.989.456,00	Rp.8.976.264,00	69,10
	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.36.335.000,00	Rp.22.906.502,00	63,04
	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.4.725.000,00	Rp.4.344.000,00	91,94
	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp.14.814.456,00	Rp.11.256.264,00	75,98
	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp.1.725.000,00	Rp.1.248.000,00	72,35
	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp.20.787.500,00	Rp.9.600.000,00	46,18

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.17.814.456,00	Rp.13.536.264,00	75,98
	5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp.1.725.000,00	Rp.1.440.000,00	83,48
	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp.1.725.000,00	Rp.960.000,00	55,65
	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp.1.725.000,00	Rp.1.440.000,00	83,48
	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.20.976.956,00	Rp.15.696.264,00	74,83
	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.4.887.500,00	Rp.3.600.000,00	73,66
	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.4.887.500,00	Rp.2.784.000,00	56,96
	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.22.116.956,00	Rp.13.800.264,00	62,40
	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.7.887.500,00	Rp.5.880.000,00	74,55
	5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp.4.887.500,00	Rp.3.600.000,00	73,66
	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp.17.976.956,00	Rp.12.792.264,00	71,16
	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp.5.750.000,00	Rp.3.888.000,00	67,62
	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.499.800,00	Rp.355.422,00	71,11
	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.1.722.200,00	Rp.1.577.375,00	91,59
	5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.1.722.200,00	Rp.1.567.660,00	91,03
	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.500.000,00	Rp.421.800,00	84,36
	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.600.000,00	Rp.570.000,00	95,00
	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.171.505.100,00	Rp.133.460.667,00	77,82
	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.33.208.000,00	Rp.13.958.298,00	42,03
	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.11.000.000,00	Rp.9.060.000,00	82,36
	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.105.110.400,00	Rp.97.460.000,00	92,72
	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.140.008.000,00	Rp.115.283.249,00	82,34
	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.80.715.451,00	Rp.52.353.206,00	64,86
	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.56.986.368,00	Rp.52.135.458,00	91,49
	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.26.178.912,00	Rp.19.632.528,00	74,99
	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.269.154.100,00	Rp.236.135.752,00	87,73
	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.51.075.100,00	Rp.31.087.200,00	60,87
	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.157.301.104,00	Rp.150.172.218,00	95,47
53	**6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat**	**Rp.1.326.554.970,00**	**Rp.971.125.669,00**	**73,21**
	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.16.986.174,00	Rp.12.889.684,00	75,88
	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.9.000.000,00	Rp.8.802.405,00	97,80
	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.189.546.200,00	Rp.121.964.819,00	64,35
	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.15.006.800,00	Rp.10.219.064,00	68,10
	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.12.000.000,00	Rp.12.000.000,00	100,00
	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.104.883.500,00	Rp.94.582.902,00	90,18

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
a	b	c	d	e = d / c * 100%
	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.152.029.000,00	Rp.111.042.800,00	73,04
	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.127.900.000,00	Rp.73.322.002,00	57,33
	6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.26.406.548,00	Rp.26.404.616,00	99,99
	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.30.556.548,00	Rp.26.532.528,00	86,83
	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.410.240.200,00	Rp.265.597.830,00	64,74
	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.62.000.000,00	Rp.56.621.590,00	91,33
	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.170.000.000,00	Rp.151.145.429,00	88,91
54	**5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**Rp.709.118.000,00**	**Rp.538.568.843,18**	**75,95**
	5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rp.100.000.000,00	Rp.94.631.000,00	94,63
	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp.68.090.800,00	Rp.49.039.425,00	72,02
	5.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.500.000,00	Rp.328.001,00	65,60
	5.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.1.400.000,00	Rp.1.119.307,00	79,95
	5.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.1.400.000,00	Rp.1.329.999,00	95,00
	5.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.500.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.600.000,00	Rp.0,00	0,00
	5.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.100.430.000,00	Rp.78.837.240,00	78,50
	5.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.15.149.700,00	Rp.10.642.130,00	70,25
	5.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.5.000.000,00	Rp.1.750.000,00	35,00
	5.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp.59.261.200,00	Rp.49.070.700,00	82,80
	5.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.54.206.400,00	Rp.39.800.000,00	73,42
	5.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.32.800.000,00	Rp.16.495.616,00	50,29
	5.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.23.318.100,00	Rp.19.141.134,00	82,09
	5.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.95.311.800,00	Rp.44.285.650,00	46,46
	5.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.21.000.000,00	Rp.3.258.500,00	15,52
	5.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.130.150.000,00	Rp.128.840.141,18	98,99
TOTAL		**Rp.450.037.964.684,00**	**Rp.415.482.236.805,35**	**92,32**
TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR BELANJA TRANSFER(Rp.)		**1.714.089.751.739,00**	**1.554.160.244.806,09**	
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)		**26%**	**27%**	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

Dalam Rupiah

No	OPD	Anggaran				Realisasi			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	494.382.180.771,00	94.893.097.003,00	13.809.910.000,00	-	483.082.419.795,00	87.933.605.823,10	13.765.385.795,00	-
2	Dinas Kesehatan	181.466.274.638,00	207.071.382.624,00	45.000.000,00	-	160.650.656.556,00	192.384.918.673,90	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.013.796.399,00	25.800.781.397,00	37.278.232.250,00	3.195.000.000,00	14.863.227.010,00	23.260.807.517,00	36.139.971.280,00	3.030.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	11.731.823.137,00	3.481.897.730,00	-	-	9.664.781.013,00	2.550.962.299,00	-	-
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.426.144.865,00	2.304.526.684,00	-	-	3.585.186.651,00	1.845.651.175,00	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.112.652.839,00	2.547.015.091,00	-	-	3.729.991.606,00	2.004.193.764,00	-	-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.005.346.661,00	8.163.856.017,00	335.000.000,00	-	5.289.600.795,00	6.775.483.912,68	335.000.000,00	-
8	Dinas Ketenagakerjaan	5.399.459.199,00	1.448.083.843,00	-	-	4.851.969.156,00	1.160.468.827,00	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	5.108.307.268,00	14.099.930.095,00	-	-	3.694.872.229,00	12.219.244.110,43	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.691.423.098,00	10.835.368.051,00	-	-	4.947.057.928,00	10.036.028.229,00	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.196.322.723,00	3.980.036.474,00	-	-	3.701.299.951,00	3.193.505.322,00	-	-
12	Dinas Perhubungan	8.503.399.132,00	10.150.070.669,00	25.000.000,00	-	6.543.782.740,00	8.365.261.179,50	25.000.000,00	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.083.047.002,00	6.122.506.143,00	-	-	3.803.568.954,00	5.316.978.036,00	-	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8.049.416.155,00	6.738.699.940,00	-	-	6.098.300.000,00	5.574.479.358,00	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.358.646.451,00	2.525.388.534,00	-	-	3.714.194.411,00	1.380.514.300,00	-	-
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.351.240.173,00	8.579.657.128,00	40.650.000.000,00	-	5.063.792.867,00	6.990.489.957,00	40.415.000.000,00	-
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.507.051.024,00	1.135.290.793,00	-	-	2.657.730.256,00	984.371.619,00	-	-
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	22.145.759.458,00	11.449.481.885,00	6.731.823.050,00	-	18.713.535.725,00	9.019.677.636,00	6.309.120.383,00	-
19	Sekretariat Daerah	25.458.578.882,00	35.261.757.382,00	980.000.000,00	-	18.729.557.725,00	28.052.768.202,00	915.711.771,00	-
20	Sekretariat DPRD	40.052.684.683,00	32.563.692.483,00	-	-	37.236.869.641,00	25.601.594.998,08	-	-
21	Badan Perencanaan Daerah	4.371.606.801,00	2.682.993.072,00	-	-	3.583.136.964,00	2.220.559.860,00	-	-
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.444.613.922,00	8.112.154.461,00	-	-	21.994.939.438,42	6.813.073.997,00	-	-
23	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.209.176.960,00	3.161.989.938,00	-	-	4.305.757.861,00	2.475.491.259,00	-	-
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.531.989.695,00	792.110.979,00	-	-	1.153.132.000,00	609.650.184,00	-	-
25	Inspektorat	8.067.789.230,00	3.677.218.158,00	-	-	6.984.704.071,00	2.420.197.459,00	-	-
26	Kecamatan Karangasem	6.812.882.392,00	5.021.087.488,00	701.187.000,00	-	6.067.744.135,00	4.652.247.087,00	693.014.243,00	-
27	Kecamatan Abang	3.651.615.915,00	609.761.312,00	-	-	3.107.306.058,00	523.386.472,00	-	-
28	Kecamatan Kubu	2.318.976.244,00	469.350.477,00	-	-	2.077.204.188,00	433.809.406,00	-	-
29	Kecamatan Bebandem	3.121.124.204,00	585.154.288,00	-	-	2.773.559.818,00	511.717.852,00	-	-
30	Kecamatan Selat	2.800.661.634,00	632.195.631,00	-	-	2.410.534.192,00	557.369.952,00	-	-
31	Kecamatan Rendang	3.644.080.392,00	505.726.537,00	-	-	3.343.799.419,00	440.760.494,00	-	-
32	Kecamatan Sidemen	2.958.408.788,00	535.631.176,00	-	-	2.337.462.394,00	463.020.139,00	-	-
33	Kecamatan Manggis	3.562.620.357,00	615.927.081,00	-	-	3.116.828.652,00	545.411.073,00	-	-
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.527.894.293,00	5.666.631.890,00	1.654.685.000,00	-	3.806.122.862,00	4.281.012.706,00	1.654.685.000,00	-
Jumlah		**954.066.995.385,00**	**522.220.452.454,00**	**102.210.837.300,00**	**3.195.000.000,00**	**867.684.627.061,42**	**461.598.712.878,69**	**100.252.888.472,00**	**3.030.000.000,00**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d/c*100%
I	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**560.882.190.079,72**	**507.877.716.833,00**	**90,55**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	303.205.580.781,00	292.513.308.886,00	96,47
2	Dinas Kesehatan	112.825.731.675,00	97.313.544.286,00	86,25
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.882.622.019,00	10.549.100.419,00	81,89
4	Satuan Polisi Pamong Praja	7.711.998.816,00	6.601.137.635,00	85,60
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.747.397.425,00	2.368.945.805,00	86,23
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.561.609.139,00	2.466.732.488,00	69,26
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.964.702.081,00	3.492.144.076,00	70,34
8	Dinas Ketenagakerjaan	3.433.821.588,00	2.976.523.731,00	86,68
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.275.385.262,00	2.373.863.102,00	72,48
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.167.530.698,00	3.448.301.296,00	66,73
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.737.315.123,00	2.352.620.105,00	85,95
12	Dinas Perhubungan	5.595.119.446,00	4.400.455.016,00	78,65
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.063.409.798,96	2.394.628.510,00	78,17
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.974.925.667,00	3.893.728.110,00	78,27
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.727.351.251,00	2.286.553.784,00	83,84
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.187.654.282,00	3.353.258.478,00	80,07
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.311.186.224,00	1.751.821.422,00	75,80
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	14.351.351.380,00	12.559.013.150,00	87,51
19	Sekretariat Daerah	12.803.531.100,00	10.167.812.990,00	79,41
20	Sekretariat DPRD	3.353.739.713,00	2.999.331.921,00	89,43
21	Badan Perencanaan Daerah	2.618.493.201,00	2.155.425.041,00	82,32
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.798.241.116,76	9.235.042.312,00	78,27
23	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.231.794.960,00	2.726.002.967,00	84,35
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	862.234.895,00	620.804.651,00	72,00
25	Inspektorat	4.444.376.830,00	3.694.805.234,00	83,13
26	Kecamatan Karangasem	4.577.883.006,00	4.035.195.598,00	88,15
27	Kecamatan Abang	2.505.807.395,00	2.117.732.657,00	84,51
28	Kecamatan Kubu	1.483.976.244,00	1.313.393.091,00	88,50
29	Kecamatan Bebandem	2.020.061.729,00	1.826.079.610,00	90,40
30	Kecamatan Selat	1.787.237.234,00	1.562.633.949,00	87,43
31	Kecamatan Rendang	2.475.714.542,00	2.260.911.354,00	91,32
32	Kecamatan Sidemen	1.988.118.788,00	1.568.480.444,00	78,89
33	Kecamatan Manggis	2.299.392.377,00	2.034.016.777,00	88,46
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.906.894.293,00	2.464.367.938,00	84,78
II	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**312.856.930.090,28**	**284.883.991.199,42**	**91,06**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	191.176.599.990,00	190.569.110.909,00	99,68
2	Dinas Kesehatan	26.659.461.251,00	22.800.605.608,00	85,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.131.174.380,00	4.314.126.591,00	70,36
4	Satuan Polisi Pamong Praja	4.019.824.321,00	3.063.643.378,00	76,21
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.678.747.440,00	1.216.240.846,00	72,45
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.551.043.700,00	1.263.259.118,00	81,45
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.040.644.580,00	1.797.456.719,00	88,08
8	Dinas Ketenagakerjaan	1.965.637.611,00	1.875.445.425,00	95,41
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.832.922.006,00	1.321.009.127,00	72,07
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.523.892.400,00	1.498.756.632,00	59,38
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.459.007.600,00	1.348.679.846,00	92,44
12	Dinas Perhubungan	2.908.279.686,00	2.143.327.724,00	73,70
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.019.637.203,04	1.408.940.444,00	69,76
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.074.490.488,00	2.204.571.890,00	71,71

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d/c*100%
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.631.295.200,00	1.427.640.627,00	87,52
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.163.585.891,00	1.710.534.389,00	79,06
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.195.864.800,00	905.908.834,00	75,75
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	7.794.408.078,00	6.154.522.575,00	78,96
19	Sekretariat Daerah	9.105.341.813,00	6.838.262.052,00	75,10
20	Sekretariat DPRD	1.901.857.436,00	1.574.608.036,00	82,79
21	Badan Perencanaan Daerah	1.753.113.600,00	1.427.711.923,00	81,44
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.646.372.805,24	12.759.897.126,42	61,80
23	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.977.382.000,00	1.579.754.894,00	79,89
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	669.754.800,00	532.327.349,00	79,48
25	Inspektorat	3.623.412.400,00	3.289.898.837,00	90,80
26	Kecamatan Karangasem	2.234.999.386,00	2.032.548.537,00	90,94
27	Kecamatan Abang	1.145.808.520,00	989.573.401,00	86,36
28	Kecamatan Kubu	835.000.000,00	763.811.097,00	91,47
29	Kecamatan Bebandem	1.101.062.475,00	947.480.208,00	86,05
30	Kecamatan Selat	1.013.424.400,00	847.900.243,00	83,67
31	Kecamatan Rendang	1.168.365.850,00	1.082.888.065,00	92,68
32	Kecamatan Sidemen	970.290.000,00	768.981.950,00	79,25
33	Kecamatan Manggis	1.263.227.980,00	1.082.811.875,00	85,72
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.621.000.000,00	1.341.754.924,00	82,77
III	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**34.406.487.534,00**	**32.413.729.684,00**	**94,21**
1	Sekretariat DPRD	34.406.487.534,00	32.413.729.684,00	94,21
IV	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**2.808.311.969,00**	**1.013.482.683,00**	**36,09**
1	Sekretariat Daerah	2.808.311.969,00	1.013.482.683,00	36,09
V	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**1.131.994.000,00**	**959.200.000,00**	**84,74**
1	Sekretariat DPRD	390.600.000,00	249.200.000,00	63,80
2	Sekretariat Daerah	741.394.000,00	710.000.000,00	95,77
VI	**Belanja Pegawai BLUD**	**41.981.081.712,00**	**40.536.506.662,00**	**96,56**
1	Dinas Kesehatan	41.981.081.712,00	40.536.506.662,00	96,56
	Jumlah Seluruh Belanja Pegawai	**954.066.995.385,00**	**867.684.627.061,42**	**90,95**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
I	**Belanja Barang**	**93.450.593.740,00**	**71.381.343.488,20**	**76,38**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.558.866.984,00	5.866.267.079,00	68,54
2	Dinas Kesehatan	14.868.695.341,00	10.960.221.781,20	73,71
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.569.005.521,00	2.608.287.715,00	73,08
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.792.612.307,00	1.463.189.580,00	81,62
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	924.820.300,00	721.629.972,00	78,03
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	961.915.771,00	774.137.118,00	80,48
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.078.187.017,00	1.501.108.610,00	72,23
8	Dinas Ketenagakerjaan	735.699.100,00	571.516.549,00	77,68
9	Dinas Lingkungan Hidup	5.176.480.807,00	4.038.553.336,00	78,02
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.987.730.167,00	1.576.868.579,00	79,33
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.146.980.052,00	773.904.651,00	67,47
12	Dinas Perhubungan	2.371.278.281,00	1.985.487.734,00	83,73
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	565.934.502,00	390.310.040,00	68,97
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.383.244.056,00	1.022.352.325,00	73,91
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	910.273.114,00	500.078.333,00	54,94
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.763.197.526,00	1.376.461.873,00	78,07
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	439.725.161,00	371.217.068,00	84,42
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	6.510.431.157,00	5.742.298.073,00	88,20
19	Sekretariat Daerah	17.860.478.549,00	14.496.237.350,00	81,16
20	Sekretariat DPRD	7.309.089.258,00	5.029.893.687,00	68,82
21	Badan Perencanaan Daerah	736.241.454,00	540.026.245,00	73,35
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.575.895.607,00	1.965.922.458,00	76,32
23	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	737.873.891,00	470.766.373,00	63,80
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	250.464.076,00	177.348.237,00	70,81
25	Inspektorat	1.408.242.632,00	852.594.834,00	60,54
26	Kecamatan Karangasem	1.644.695.225,00	1.426.918.683,00	86,76
27	Kecamatan Abang	357.723.050,00	313.565.126,00	87,66
28	Kecamatan Kubu	313.065.373,00	296.702.555,00	94,77
29	Kecamatan Bebandem	318.160.926,00	282.821.238,00	88,89
30	Kecamatan Selat	418.928.169,00	370.572.911,00	88,46
31	Kecamatan Rendang	318.017.793,00	281.613.714,00	88,55
32	Kecamatan Sidemen	284.202.704,00	254.385.923,00	89,51
33	Kecamatan Manggis	320.799.969,00	284.813.445,00	88,78
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.851.637.900,00	2.093.270.293,00	73,41
II	**Belanja Jasa**	**208.898.743.100,00**	**182.438.071.161,73**	**87,33**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.787.071.536,00	12.461.215.364,00	78,93
2	Dinas Kesehatan	104.405.456.962,00	95.602.876.925,00	91,57
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13.131.959.583,00	11.934.806.673,00	90,88
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.222.551.000,00	825.143.769,00	67,49
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.171.911.920,00	964.763.013,00	82,32
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.284.347.404,00	934.248.977,00	72,74
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.934.797.392,00	1.353.325.230,00	69,95
8	Dinas Ketenagakerjaan	465.428.148,00	350.141.396,00	75,23
9	Dinas Lingkungan Hidup	8.574.679.418,00	8.001.468.534,43	93,32
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.698.349.884,00	1.319.351.351,00	77,68
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.454.012.008,00	2.104.019.267,00	85,74
12	Dinas Perhubungan	7.282.849.548,00	5.990.031.243,00	82,25
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.128.980.770,00	4.546.825.348,00	88,65
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.512.287.826,00	2.733.948.755,00	77,84
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.439.989.820,00	720.989.263,00	50,07
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.367.002.482,00	1.864.951.156,00	78,79
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	437.762.216,00	356.906.612,00	81,53
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	3.227.819.528,00	2.540.554.556,00	78,71
19	Sekretariat Daerah	11.018.919.246,00	8.466.846.069,00	76,84
20	Sekretariat DPRD	6.804.995.142,00	5.828.194.222,30	85,65

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
21	Badan Perencanaan Daerah	1.501.202.908,00	1.343.692.658,00	89,51
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.836.305.570,00	4.267.594.025,00	88,24
23	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.724.111.623,00	1.495.951.459,00	86,77
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	433.557.912,00	381.698.238,00	88,04
25	Inspektorat	1.429.936.776,00	1.070.323.457,00	74,85
26	Kecamatan Karangasem	3.206.584.012,00	3.088.439.104,00	96,32
27	Kecamatan Abang	215.248.520,00	173.930.236,00	80,80
28	Kecamatan Kubu	117.285.104,00	101.919.501,00	86,90
29	Kecamatan Bebandem	201.604.112,00	163.879.654,00	81,29
30	Kecamatan Selat	166.759.462,00	140.585.569,00	84,30
31	Kecamatan Rendang	125.208.744,00	100.501.780,00	80,27
32	Kecamatan Sidemen	181.853.472,00	146.438.716,00	80,53
33	Kecamatan Manggis	207.627.112,00	184.140.228,00	88,69
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.200.285.940,00	878.368.813,00	73,18
III	**Belanja Pemeliharaan**	**32.403.913.954,00**	**29.728.155.680,98**	**91,74**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	11.047.018.000,00	10.724.797.763,92	97,08
2	Dinas Kesehatan	1.660.731.798,00	1.363.326.428,10	82,09
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.848.316.293,00	8.470.113.571,00	95,73
4	Satuan Polisi Pamong Praja	134.064.423,00	133.638.950,00	99,68
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	165.000.500,00	123.151.750,00	74,64
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.051.916,00	148.154.900,00	98,74
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	265.152.372,00	260.410.961,68	98,21
8	Dinas Ketenagakerjaan	74.608.910,00	74.022.440,00	99,21
9	Dinas Lingkungan Hidup	248.395.572,00	112.852.000,00	45,43
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	111.288.000,00	106.648.899,00	95,83
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	87.248.914,00	75.613.300,00	86,66
12	Dinas Perhubungan	455.942.840,00	351.775.362,50	77,15
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	330.641.451,00	308.997.248,00	93,45
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.467.166.958,00	1.453.158.777,00	99,05
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	107.375.600,00	98.761.000,00	91,98
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.819.524.900,00	1.333.341.269,00	73,28
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	196.880.000,00	195.407.902,00	99,25
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	168.500.000,00	159.170.050,00	94,46
19	Sekretariat Daerah	2.182.976.460,00	1.690.209.781,00	77,43
20	Sekretariat DPRD	1.252.942.360,00	1.140.718.947,78	91,04
21	Badan Perencanaan Daerah	106.564.112,00	79.239.050,00	74,36
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	355.227.692,00	323.547.105,00	91,08
23	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	296.959.200,00	271.225.000,00	91,33
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	50.865.000,00	14.713.500,00	28,93
25	Inspektorat	238.500.000,00	187.018.425,00	78,41
26	Kecamatan Karangasem	124.528.251,00	98.590.500,00	79,17
30	Kecamatan Abang	29.478.182,00	28.579.550,00	96,95
31	Kecamatan Kubu	29.000.000,00	28.804.250,00	99,33
32	Kecamatan Bebandem	58.389.250,00	58.142.200,00	99,58
33	Kecamatan Selat	39.500.000,00	39.204.000,00	99,25
34	Kecamatan Rendang	62.500.000,00	58.645.000,00	93,83
35	Kecamatan Sidemen	64.575.000,00	59.459.400,00	92,08
36	Kecamatan Manggis	73.500.000,00	62.537.400,00	85,08
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.500.000,00	94.179.000,00	93,71
IV	**Belana Perjalanan Dinas**	**29.287.652.861,00**	**21.822.347.792,00**	**74,51**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	432.142.000,00	280.535.570,00	64,92
2	Dinas Kesehatan	1.482.812.377,00	780.633.830,00	52,65
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	251.500.000,00	247.599.558,00	98,45
4	Satuan Polisi Pamong Praja	332.670.000,00	128.990.000,00	38,77
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	27.793.964,00	26.906.440,00	96,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.700.000,00	147.652.769,00	97,98
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	426.846.586,00	335.519.111,00	78,60
8	Dinas Ketenagakerjaan	172.347.685,00	164.788.442,00	95,61
9	Dinas Lingkungan Hidup	100.374.298,00	66.370.240,00	66,12

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.000.000,00	33.159.400,00	87,26
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	291.795.500,00	239.968.104,00	82,24
12	Dinas Perhubungan	40.000.000,00	37.966.840,00	94,92
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.949.420,00	70.845.400,00	92,07
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	376.001.100,00	365.019.501,00	97,08
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.750.000,00	60.685.704,00	89,57
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	180.216.900,00	170.835.659,00	94,79
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60.923.416,00	60.840.037,00	99,86
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1.188.955.000,00	278.729.957,00	23,44
19	Sekretariat Daerah	3.519.383.127,00	2.779.475.002,00	78,98
20	Sekretariat DPRD	17.196.665.723,00	13.602.788.141,00	79,10
21	Badan Perencanaan Daerah	338.984.598,00	257.601.907,00	75,99
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	344.725.592,00	256.010.409,00	74,26
23	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	403.045.224,00	237.548.427,00	58,94
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	36.223.991,00	23.390.209,00	64,57
25	Inspektorat	600.538.750,00	310.260.743,00	51,66
26	Kecamatan Karangasem	34.780.000,00	32.298.800,00	92,87
27	Kecamatan Abang	7.311.560,00	7.311.560,00	100,00
28	Kecamatan Kubu	10.000.000,00	6.383.100,00	63,83
29	Kecamatan Bebandem	7.000.000,00	6.874.760,00	98,21
30	Kecamatan Selat	7.008.000,00	7.007.472,00	99,99
31	Kecamatan Sidemen	5.000.000,00	2.736.100,00	54,72
32	Kecamatan Manggis	5.000.000,00	4.920.000,00	98,40
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.074.208.050,00	790.694.600,00	73,61
V	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**15.457.839.170,00**	**14.797.695.000,00**	**95,73**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	998.975.000,00	846.550.000,00	84,74
2	Dinas Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	15.000.000,00	9.200.000,00	61,33
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.458.872.650,00	3.325.120.000,00	96,13
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.000.000,00	-	0,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.449.715.320,00	2.244.900.000,00	91,64
8	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	353.776.200,00	298.925.000,00	84,50
9	Sekretariat Daerah	680.000.000,00	620.000.000,00	91,18
10	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.000.000,00	12.500.000,00	59,52
11	Kecamatan Karangasem	10.500.000,00	6.000.000,00	57,14
12	Kecamatan Manggis	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	440.000.000,00	424.500.000,00	96,48
VI	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**58.069.023.483,00**	**57.754.240.046,18**	**99,46**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	58.069.023.483,00	57.754.240.046,18	99,46
VII	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**4.206.478.000,00**	**3.760.860.214,00**	89,41
1	Dinas Kesehatan	4.206.478.000,00	3.760.860.214,00	89,41
VIII	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**80.446.208.146,00**	**79.915.999.495,60**	**99,34**
1	Dinas Kesehatan	80.446.208.146,00	79.915.999.495,60	99,34
Jumlah Seluruh Belanja Barang dan Jasa		**522.220.452.454,00**	**461.598.712.878,69**	**88,39**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
I	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**8.227.232.250,00**	**7.594.542.021,00**	**92,31**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.027.232.250,00	6.458.830.250,00	91,91
3	Sekretariat Daerah	950.000.000,00	885.711.771,00	93,23
II	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**86.529.010.050,00**	**85.248.275.656,00**	**98,52**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.570.000.000,00	7.570.000.000,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	45.000.000,00	-	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.251.000.000,00	29.681.141.030,00	98,12
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	335.000.000,00	335.000.000,00	100,00
5	Dinas Perhubungan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40.650.000.000,00	40.415.000.000,00	99,42
7	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	6.731.823.050,00	6.309.120.383,00	93,72
8	Sekretariat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
9	Kecamatan Karangasem	701.187.000,00	693.014.243,00	98,83
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00
III	**Belanja Hibah Dana BOS**	**939.880.000,00**	**935.845.481,00**	**99,57**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	939.880.000,00	935.845.481,00	99,57
IV	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**1.464.685.000,00**	**1.464.685.000,00**	**100,00**
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.464.685.000,00	1.464.685.000,00	100,00
V	**Belanja Hibah Dana BOSP**	**5.050.030.000,00**	**5.009.540.314,00**	**99,20**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.050.030.000,00	5.009.540.314,00	99,20
	Jumlah Seluruh Belanja Hibah	**102.210.837.300,00**	**100.252.888.472,00**	**98,08**

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	16/04/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan - Hibah Koni	5.500.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17/04/2025	Pembayaran Belanja Hibah Bupati Karangasem Kepada Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Karangasem sesuai SK Bupati Nomor 43/HK/2025. Sumber Dana : Pajak Daerah	25.000.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22/04/2025	Pembayaran Belanja Hibah Bupati Karangasem Kepada Persatuan Purnawirawan TNI-AD Cabang Karangasem sesuai SK Bupati Nomor 43/HK/2025. Sumber Pendanaan : Pajak Darah	25.000.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Bupati Karangasem Kepada Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Cabang Karangasem sesuai SK Bupati Nomor 43/HK/2025. Sumber Pendanaan : Pajak Darah	25.000.000,00
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.000.000,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.000.000,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	171.000.000,00
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.000.000,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.000.000,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.000.000,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	171.000.000,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.000.000,00
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	171.000.000,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	267.000.000,00
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	203.000.000,00
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	203.000.000,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	715.000.000,00
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	235.000.000,00
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	491.000.000,00
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	267.000.000,00
31	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
32	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.000.000,00
34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.163.000.000,00
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	171.000.000,00
36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.000.000,00
37	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	171.000.000,00
38	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Desa Adat Pucang Kecamatan Kubu	171.000.000,00
39	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	491.000.000,00
40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kepada Desa Adat Buyan	107.000.000,00
41	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	363.000.000,00
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	299.000.000,00
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	107.000.000,00
44	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	171.000.000,00
45	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	203.000.000,00
46	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Selat Kec. Selat	555.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
47	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kepada Desa Adat Padangkerta Kecamatan Karangasem	427.000.000,00
48	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Menanga Kecamatan Rendang	139.000.000,00
49	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Tista Kec. Abang	267.000.000,00
50	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Rendang Kec. Rendang	427.000.000,00
51	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Peladung Kec. Karangasem	331.000.000,00
52	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Tohjiwa Kec. Sidemen	235.000.000,00
53	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Ababi Kec. Abang	491.000.000,00
54	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Bonyoh Kecamatan Kubu	203.000.000,00
55	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Tiyingtali Kecamatan Abang	235.000.000,00
56	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Geriana Kangin Kecamatan Selat	299.000.000,00
57	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Ujung Hyang Kecamatan KarangAsem	203.000.000,00
58	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Temega, Kel. Padangkerta (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
59	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Karangasem Teben, Kel. Karangasem (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Pasegehan, Kel. Subagan (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
61	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Susuan Jasri, Kel. Subagan (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
62	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Sayehan, Kel. Subagan (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Telabah Let, Kel. Karangasem (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
64	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Susuan Karangasem, Kel. Karangasem (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
65	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Bungbung, Kel. Karangasem (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
66	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Abian Sanghyang, Kel. Subagan (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
67	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Telabah Anyar, Kel. Karangasem (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
68	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Bedugul, Kel. Padangkerta (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
69	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Peladung, Kel. Padangkerta (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
70	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Buug Teben, Kel. Padangkerta (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
71	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Penaban, Kel. karangasem (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
72	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Bucu, Kel. Padangkerta (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
73	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Sudi Galiran, Kel. Subagan (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
74	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Gerenjeng, Kel. Padangkerta (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
75	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Juuk Manis, Kel. Karangasem (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
76	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Baingin, Kel. Padangkerta (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
77	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Karangasem Dulu, Kel. karangasem (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
78	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Subagan, Kel. Subagan (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
79	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Susuan Timbrah, Kel. Subagan (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
80	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Sase, Kel. Subagan (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
81	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Cau Jasri, Kel. Subagan (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
82	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Manikaji, Kec. Kubu (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
83	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Kubakal, Kec. Rendang (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
84	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Geriana Kauh, Kec. Selat (Hibah Kabupaten)	139.000.000,00
85	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Pekarangan, Kec. Manggis (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
86	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Karangsari, Kec. Selat (Hibah Kabupaten)	171.000.000,00
87	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Teges, Kec. Rendang (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
88	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Paleg Kelod, Kec. Kubu (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
89	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Batugunung, Kec. Karangasem (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
90	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Sogra, Kec. Selat (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
91	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Cegi, Kec Kubu (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
92	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Pesedahan, Kec. Manggis (Hibah Kabupaten)	139.000.000,00
93	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Padangaji, Kec. Selat (Hibah Kabupaten)	139.000.000,00
94	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Ngis, Kec. Abang (Hibah Kabupaten)	139.000.000,00
95	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Umacetra, Kec. Selat (Hibah Kabupaten)	171.000.000,00
96	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Santi, Kec Selat (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
97	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Pengalusan, Kec. Kubu (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
98	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tampuagan, Kec. karangasem(Hibah Kabupaten)	139.000.000,00
99	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Batusesa, Kec. Rendang (Hibah Kabupaten)	139.000.000,00
100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Darmaji, Kec. Kubu (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
101	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Pedahan Kaje, Kec. Kubu (Hibah Kabupaten)	171.000.000,00
102	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Bantas, Kec. Kubu (Hibah Kabupaten)	139.000.000,00
103	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Tumingal Kecamatan Abang	107.000.000,00
104	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Tanah Aji Kecamatan Abang	107.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
105	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Panek Kecamatan Kubu	107.000.000,00
106	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Yehpoh Kecamatan Manggis	171.000.000,00
107	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Linggawana Kecamatan Abang	107.000.000,00
108	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Bukit Galah Kecamatan Selat	107.000.000,00
109	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Gamongan Kecamatan Abang	107.000.000,00
110	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kepada Desa Adat Ban Kecamatan Kubu	107.000.000,00
111	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Gumung Kec. Manggis	107.000.000,00
112	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Bunga Kec. Kubu	107.000.000,00
113	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Baturinggit Kec Kubu	139.000.000,00
114	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Peselatan Kec. Abang	139.000.000,00
115	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Pateh Kec Selat	107.000.000,00
116	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) desa Adat Dlungdungan Kec. Kubu	107.000.000,00
117	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Kedampal Kec. Abang	107.000.000,00
118	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Nusu Kecamatan Kubu	139.000.000,00
119	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Purwayu Kec. Abang	139.000.000,00
120	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Desa Adat Tigaron Kec Kubu	139.000.000,00
121	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Subak Telabah Aungan, Kel. Karangasem (Hibah Kabupaten)	12.000.000,00
122	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tanahampo, Kec. Manggis (Hibah Kabupaten)	139.000.000,00
123	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Badeg Tengah, Kec. Selat (Hibah Kabupaten)	139.000.000,00
124	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Badeg Kelodan, Kec. Selat (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
125	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Desa Adat Susuan Kecamatan Karangasem	107.000.000,00
126	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Kabupaten) Kepada Adat Yeha Kecamatan Selat	203.000.000,00
127	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/05/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Taman Darma, Kec. Selat (Hibah Kabupaten)	107.000.000,00
128	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Jasri, Kec. Karangasem (Hibah Kabupaten)	331.000.000,00
129	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Karangasem, Kec. Karangasem (Hibah Kabupaten)	1.195.000.000,00
130	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Manggis, Kec. Manggis (Hibah Kabupaten)	523.000.000,00
131	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Dukuh, Kec. Kubu (Hibah Kabupaten)	267.000.000,00
132	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tianyar, Kec. Kubu (Hibah Kabupaten)	1.067.000.000,00
133	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Nongan, Kec. Rendang (Hibah Kabupaten)	491.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
134	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Ulakan, Kec.Manggis (Hibah Kabupaten)	299.000.000,00
135	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Sukahet, Kec. Sidemen (Hibah Kabupaten)	523.000.000,00
136	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Perasi, Kec. Karangasem (Hibah Kabupaten)	363.000.000,00
137	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Cutcut, Kec. Kubu (Hibah Kabupaten)	203.000.000,00
138	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Kertasari, Kec. Karangasem (Hibah Kabupaten)	235.000.000,00
139	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Karangsari, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
140	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Pemuteran, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
141	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Pejeng, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
142	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tulamben, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
143	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tangkup Desa, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
144	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Segah, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
145	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Ancut, Kecamatan Selat (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
146	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Angantelu, Kecamatan Manggis (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	395.000.000,00
147	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Dukuh, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
148	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Daya, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
149	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Belong Plugon, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
150	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	235.000.000,00
151	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Pempatan, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
152	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20/06/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Muntig, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	171.000.000,00
153	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Putung, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
154	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Asak, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
155	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Dukuh Penaban, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
156	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tangkup Anyar, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	171.000.000,00
157	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	427.000.000,00
158	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tabola, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	523.000.000,00
159	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Subagan, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	779.000.000,00
160	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Temega, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	203.000.000,00
161	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Sengkidu, Kecamatan Manggis (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	171.000.000,00
162	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Jumenang, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
163	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Bebandem, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	363.000.000,00
164	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Asti, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
165	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	03/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Kaliaga, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
166	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Iseh, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
167	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Umanyar, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
168	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Macang, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
169	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tabu, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
170	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Budakeling, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	203.000.000,00
171	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Geliang, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
172	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Nangka, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
173	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Poh, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
174	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Komala, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	171.000.000,00
175	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Jungsri, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
176	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Kastala, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
177	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tanah Aron, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
178	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tohpati, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
179	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tumbu, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	171.000.000,00
180	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	09/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Liligundi, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
181	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Sanggem, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
182	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Telung Buana, Kecamatan Selat (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
183	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Padang Tunggal, Kecamatan Selat (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
184	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Paleg Kaja, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
185	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Presana, Kecamatan Selat (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
186	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Saren, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	235.000.000,00
187	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	203.000.000,00
188	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Sibetan, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	715.000.000,00
189	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Duda, Kecamatan Selat (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	939.000.000,00
190	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Bupati Karangasem Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karangasem sesuai SK Bupati Nomor 43/HK/2025 Sumber Dana : Pajak Daerah	115.000.000,00
191	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24/07/2025	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Belong Batu Kau, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
192	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Klungah, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
193	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Padangbai, Kecamatan Manggis (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	171.000.000,00
194	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Bungaya, Kecamatan Bebandem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	555.000.000,00
195	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25/07/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Culik, Kecamatan Abang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	427.000.000,00
196	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	07/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	459.000.000,00
197	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	07/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Apit Yeh, Kecamatan Manggis(Hibah Kabupaten) Tahun 2025	203.000.000,00
198	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	07/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tegeh, Kecamatan Selat (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
199	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	07/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Ipah, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
200	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	07/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Bukit, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	171.000.000,00
201	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	07/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Buk cabe, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
202	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	07/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Mijil, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
203	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	07/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Lebih, Kecamatan Selat (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
204	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tenganan Dauh Tukad, Kecamatan Manggis (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
205	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Basangalas, Kecamatan Abang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
206	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Kayuaya, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	75.000.000,00
207	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	235.000.000,00
208	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Bukit Catu, Kecamatan Manggis (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
209	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Temukus, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
210	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Kebung, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
211	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29/08/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Gegelang, Kecamatan Manggis (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	363.000.000,00
212	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	02/09/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Munti Gunung, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	75.000.000,00
213	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	02/09/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Bukit, Kecamatan Kubu (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
214	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	02/09/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Kebon Bukit, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
215	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23/09/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Sebun, Kecamatan Selat (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
216	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23/09/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Pule, Kecamatan Rendang (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	107.000.000,00
217	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23/09/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Sekargunung, Kecamatan Karangasem (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
218	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29/09/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Telun Wayah, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	235.000.000,00
219	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	01/10/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Desa Adat Sangkungan, Kecamatan Sidemen (Hibah Kabupaten) Tahun 2025	139.000.000,00
220	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem	75.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
221	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	22/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan, Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.070.000.000,00
			JUMLAH	**46.854.000.000,00**
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20/03/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Belanja Hibah Uang kepada Palang Merah Indonesia)	285.000.000,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24/03/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Belanja Hibah Uang kepada PWRI) Tahun Anggaran 2025	50.000.000,00
3	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19/06/2025	Pemb. belanja Hibah Uang kepada (DPKPeradah Indonesia) Kabupaten Karangasem Pada Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial di Bagian Pemerintahan dan Kesra Tahun Anggaran 2025	30.000.000,00
4	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	08/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Kelompok Tani Ancak Lestari	30.000.000,00
5	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	08/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Telabah Aungan	25.599.375,00
6	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	08/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Gerenjeng	62.437.500,00
7	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	08/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Subak Abian Taman sari	30.000.000,00
8	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	08/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Kelompok Tani Batu Mekar	30.000.000,00
9	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	08/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Telabah Anyar	45.787.500,00
10	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	13/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Kelompok Tani Sri Wijaya	108.225.000,00
11	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	13/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Selat	119.047.500,00
12	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	14/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Subak Auman	18.750.000,00
13	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	14/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Abian Pandan Sari	83.250.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	14/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Subak Peladung	30.000.000,00
15	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani di Subak Desa Timbrah	18.750.000,00
16	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Kelompok Tani Arumanis	30.000.000,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier di Subak Boan	18.750.000,00
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Kelompok Tani Jerum Tangkas Mahotama	169.252.594,00
19	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Subagan	123.184.744,00
20	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Abian Tunjung Kuning	31.635.000,00
21	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Candra Buana	99.900.000,00
22	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Subak Diwang	18.750.000,00
23	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Poan I	49.950.000,00
24	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	16/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani di Subak Babakan	18.750.000,00
25	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	16/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani di Subak Susuan Jasri	18.750.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
26	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	16/10/2025	Pembayaran Tahap I (25%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier di Subak Gantalan II	18.750.000,00
27	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	31/10/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Abian Tunjung Kuning	56.943.000,00
28	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	31/10/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Selat	214.285.500,00
29	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	07/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Subak Abian Taman sari	54.000.000,00
30	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	13/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Candra Buana	179.820.000,00
31	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	13/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Telabah Aungan	46.078.875,00
32	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	14/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Abian Pandan Sari	149.850.000,00
33	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	14/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Subak Diwang	33.750.000,00
34	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	14/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Kelompok Tani Sri Wijaya	194.805.000,00
35	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	17/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Telabah Anyar	82.417.500,00
36	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	17/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Kelompok Tani Batu Mekar	54.000.000,00
37	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	20/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Gerenjeng	112.387.500,00
38	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	20/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Kelompok Tani Ancak Lestari	54.000.000,00
39	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	20/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Subak Susuan Jasri	33.750.000,00
40	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	20/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Gantalan II	33.750.000,00
41	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	20/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Kelompok Tani Arumanis	54.000.000,00
42	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	20/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Auman	33.750.000,00
43	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	21/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Babakan	33.750.000,00
44	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	25/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Desa Timbrah	33.750.000,00
45	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	25/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung/Dam Parit di Subak Peladung	54.000.000,00
46	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	25/11/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Selat	142.857.000,00
47	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	26/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Kelompok Tani Jerum Tangkas Mahotama	304.654.669,00
48	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	26/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Subagan	221.732.539,00
49	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	27/11/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Babakan	22.500.000,00
50	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	27/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Poan I	89.910.000,00
51	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	27/11/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung /Dam Parit di Subak Peladung	36.000.000,00
52	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	27/11/2025	Pembayaran Tahap II (45%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Boan	33.750.000,00
53	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	27/11/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung di Subak Abian Taman sari	36.000.000,00
54	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	02/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Candra Buana	119.880.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
55	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	04/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Abian Pandan Sari	99.900.000,00
56	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	04/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Susuan Jasri	22.500.000,00
57	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	04/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Telabah Anyar	54.945.000,00
58	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	04/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Kelompok Tani Arumanis	36.000.000,00
59	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	04/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Subak Abian Tunjung Kuning	37.962.000,00
60	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	04/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Gantalan II	22.500.000,00
61	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	04/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Desa Timbrah	22.500.000,00
62	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	04/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Telabah Aungan	30.719.250,00
63	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	05/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Kelompok Tani Sri Wijaya	129.870.000,00
64	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	09/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Kelompok Tani Ancak Lestari	36.000.000,00
65	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	09/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Embung Pertanian di Kelompok Tani Batu Mekar	36.000.000,00
66	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	09/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Diwang	22.500.000,00
67	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	11/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Poan I	59.940.000,00
68	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	11/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Auman	22.500.000,00
69	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	11/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Boan	22.500.000,00
70	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Subagan	147.821.692,00
71	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/12/2025	Pembayaran Tahap III (30%) atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Produksi di Kelompok Tani Jerum Tangkas Mahotama	203.103.112,00
72	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/12/2025	Pembayaran Tahap III atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Gerenjeng	41.625.000,00
			JUMLAH	**5.129.776.850,00**
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
1	Kelurahan Karangasem	16/09/2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rabat Beton pada sub. kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahun Anggaran 2025	9.301.800,00
2	Kelurahan Padangkerta	29/09/2025	Pemby. Blj. hibah brg kpd bdn. dan lbg nirlaba, sukarela dan sosial yg telah memiliki surat ket. terdaftar, jasa Perenc. dan Rabat Beton Jl. Lk, Pdkt Kaler dan Jasa Pernc. Rabat Beton Jl. Lk. Kertasari, pd Sub. Keg. Pemb. sarpras di Kel. Pdkt TA 2025	7.370.400,00
3	Kelurahan Karangasem	29/09/2025	Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, sosial yang telah memiliki Surat keterangan terdaftar (Rabat Beton) di kelurahan Karangasem Tahun Anggaran 2025	54.310.410,00
4	Kelurahan Padangkerta	01/10/2025	Pemby. Uang Muka Sebesar 50%atas Pekerjaan Rabat Beton Jl. Lingkungan Pdkt Kaler dan Jl. Lingkungan Kertasari, pd Sub. Keg. Pembangunan sarpras di Kel. Pdkt, Kec. Karangasem TA 2025.	99.594.500,00
5	Kelurahan Subagan	07/10/2025	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-Rabat Beton, Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun Anggaran 2025	9.190.800,00
6	Kelurahan Subagan	21/10/2025	Pembayaran Uang Muka Sebesar 50% atas pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Rabat Beton), Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun Anggaran 2025	89.888.522,00
7	Kelurahan Karangasem	12/11/2025	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial (jasa Konsultasi Perencanaan Rabat Beton) pada sub.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluranan di Kelurahan Karangasem Tahun Anggaran 2025	3.724.050,00
8	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	13/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan nomor Invoice GM-INV/2025/11/7JLSJKB dan kode bayar 0195400362097	27.071.000,00
9	Kelurahan Karangasem	17/11/2025	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial (jasa Konsultasi Pengawasan Rabat Beton) pada sub.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluranan di Kelurahan Karangasem Tahun Anggaran 2025	7.603.500,00
10	Kelurahan Karangasem	20/11/2025	Pembayaran 100% belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang sudah memiliki surat keterangan terdaftar (Rabat Beton) pada sub.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahun Anggaran 2025	126.724.290,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
11	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	21/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan nomor Invoice GM-INV/2025/10/PWY9ZAM dan kode bayar 0195400397436	773.160,00
12	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	21/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan nomor Invoice GM-INV/2025/10/8P5J9WK dan kode bayar 0195400394155	3.200.000,00
13	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	25/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan nomor Invoice GM-INV/2025/10/5UPN9H6 dan kode bayar 0195400397359	15.349.094,00
14	Kelurahan Padangkerta	27/11/2025	Pemby. sekaligus (100%) atas Pekerjaan Rabat Beton Jl. Lingkungan Pdkt Kaler dan Jl. Lingkungan Kertasari, pd Sub. Keg. Pembangunan sarpras di Kel. Pdkt, Kec. Karangasem TA 2025.	99.594.500,00
15	Kelurahan Karangasem	27/11/2025	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial (jasa Konsultasi Pengawasan Rabat Beton) pada sub.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluranan di Kelurahan Karangasem Tahun Anggaran 2025	2.985.900,00
16	Kelurahan Karangasem	27/11/2025	Pembayaran Sekaligus 100% belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang sudah memiliki surat keterangan terdaftar (Rabat Beton) pada sub.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahun Anggaran 2025	79.422.700,00
17	Kelurahan Padangkerta	08/12/2025	Pemby. Blj. hibah brng. kpd badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yg telah memiliki Suket. terdaftar, jasa Pengaw. dan Rabat Beton Jl. Lk, Pdkt Kaler dan Jasa Pengaw. Rabat Beton Jl. Lk. Kertasari, pd Sub. Keg. Pemb. sarpras di Kel. Pdkt TA 2025	5.838.600,00
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Bibit Sapi Bali Betina) dengan nomor Invoice GM-INV/2025/12/57PZPZA-AD01 dan kode bayar 0195400494688	385.999.980,00
19	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Jukung Fiber) dengan nomor Invoice GM-INV/2025/12/XZ46VZZ dan kode bayar 0195400495175	44.455.500,00
20	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	16/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Jaring Ikan) dengan nomor Invoice GM-INV/2025/12/HHFCD68 dan kode bayar 0195400502790	39.604.800,00
21	Kelurahan Subagan	17/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-Rabat Beton), Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun Anggaran 2025	7.575.750,00
22	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	18/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Mesin Tempel) dengan nomor Invoice GM-INV/2025/12/U68T9LF dan kode bayar 0195400501240	1.027.889.999,00
23	Kelurahan Subagan	19/12/2025	Pembayaran Angsuran Sekaligus (100%) atas Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Fisik Rabat Beton), Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun Anggaran 2025	89.888.521,00
			JUMLAH	**2.237.357.776,00**
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Pengempon Pura Dadia Sri Karang Buncing	40.000.000,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Klompok Suka Duka Buntu Sari	20.000.000,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Sekaa Gong Swara Gayatri	30.000.000,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Banjar Pegubugan Ujung Biok	100.000.000,00
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Sekaha Gender Mekar Sedana	50.000.000,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Sanggar Seni Waringinsari	50.000.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13/11/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Uang Kpd.Bdn.dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ats.Pek. Pemb.Pura Merajan Agung Kwit. Ida Bang Manik Angkeran Siddhimantra Besakih pada Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP Kab.Karangasem TA.2025	3.000.000.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13/11/2025	Belanja Hibah Bupati Karangasem Kepada Pengempon Pura Penataran Agung untuk Pembangunan Pura Penataran Agung , Pura Luhur Lawangan dan Pura Batu Jineng Pada Sub Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBDP Kab. Karangasem TA. 2025	7.000.000.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14/11/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Uang Kpd. Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemsyrktan atas Pek. Pemb.Candi Bentar,Paduraksa dan Penyengker Pura Dadia Ibu Gede Br.Dinas Tigaron Kauh,Ds. Sukadana Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008, Sumber Dana APBDP TA. 2025	150.000.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj. Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Pemb.Tembok Penyengker dan Candi Bentar Merajan I Gusti Ler Pernawa Br,Ds. Saren Kaler Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Uang Kpd.Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Kemasyarakatan ats Pek.Pem Pura Dadia Tangkas Kori Agung BD Batudawa Kelod,Ds Tulamben, Kec Kubu, Kab Karangasem Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Sumber Dana APBDP TA.2025	30.000.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek.Pemb.Bale Pertemuan Pura Dadia Dalem Tarukan Taman Alit Tegal Suci Br.Ds.Darma Winanguna Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	60.000.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb 100% Blj. Hibah Ung.Kpd.Bdn. dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Penataan Pura panti Pasek Gelgel dan Gaduh, Br. Dinas Dukuh Pada Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBDP Kab.Karangasem TA. 2025	75.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj. Hibah Ung.kpd Badan dan Lbg Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmasytrktan atas Pek.Pemb.Penataan Halaman Dan Pemb.Bale Pesandekan Pr.Karang Jineng Dwi Purusa Br.Ds.Kaler,Ds. Seraya,pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008Pd. Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kepada Badan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Penataan Pura Gunung Sari Pasek Gelgel Aan, Br.Dinas Dukuh Pada Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBDP Kab.Karangasem TA. 2025	75.000.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Bdn.dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasykt ats Pek.Perehaban Tembok Penyengker,Perehaban Gelung Kori, dan Pemb.1 Pasang Candi Bentar Pr.Dadia Cemara Pada Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	250.000.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Uang Kpd Bdn dan Lmbg Nirlaba, Sukarela Brsift Sosial Ksyarktan atas Pek. Renovasi Atap dan Pemb. Bale Los Memukur Masal Balai Msyrkt Widya Sabha, Lingk. Gede,Kel.Subagan,Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	750.000.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Kemasyarakatan atas Pek. Perehaban Tembok Penyengker di Purian/Utama Mandala Pura Puraji Ds. Adat Duda Kec.Selat Kab.Karangasem Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Sumber Dana APBDP TA. 2025	150.000.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb 100% Blj.Hibah Ung Kpd.Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ats Pek Pemb.Pura Dadia Pasek Gelgel Pegatepan Br.Dinas Batudawa Kelod Pada Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP Kab.Karangasem TA. 2025	100.000.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb100%Blj.Hibah Ung Kpd.Bdn.dan Lmbg.Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek.Pemb/Penataan Natar/Halaman Pr.Penataran Alit menggunakan Batu Sikat Pd.Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008Sumber.Dana APBDP TA.2025	30.000.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Bdn.dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasykt ats Pek.Pemb.Bale Pawedaan Pengempon Pr.Dadia Sri Karang Buncing Br.Dinas Saren Kaler, Ds.Nongan Kec.Rendang Pd.Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd. Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Ung Kpd Bdn & Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan ats Pek.Pem.Ble Pesamuan Peng.Pr.Kompiang Pasek Tohjiwa Pd sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sbr Dana APBDP TA 2025	50.000.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek. Pembangunan/Rehab Pura Dadia Pasek Gelgel Bongli Br. Dinas Batu Dawe Kelod,Sub.Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb. 100% Blj. Hibah Uang Kpd. Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek. Prhbn Bale Pesamuan Pura Dadia Pugleg Tangkas Kori Agung Br. Ds.Alas Tunggal,Ds.Duda Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008, Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Bdn.dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasykt ats Pek.Perehaban Gelung Agung Pura Dadya Sri Nararya Kresna Kepakisan Bd.Baler Pasar Rendang, Pd.Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb 100% Blj.Hibah Uang Kpd.Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ats Pek.Pemb.Pura Sendetan Pasek Kayu Selem Bantas Br.Dinas Bantas Ds. Baturinggit Kec.Kubu Pada Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Uang Kpd. Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Kemsyaraktan atas Pek.Pemb/Rehab Br.Adat Pempatan Br.Dinas Batudawa Kelod,Ds.Tulamben,Kec.Kubu,Kab.Karangasem Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008, Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung. Kpd.Bdn.dan Lembaga Nirlaba.Sukarela Bersifat Sosial Kmayskatan Ats Pek.Pemb./Perehaban Pr.Sendetan Buncing Pasek Kayu Selem Br. Ds.Batudawa Kelod,Ds.Tulamben,Kec.Kubu, Pd.Sub.Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd.Sbr Dana APBDP TA.2025	35.000.000,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Bdn.dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ats Pek.Pemb.Pelinggih Pura Pasek Gelgel Pegatepan,Br.Dinas Kayuaya Pd.Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA.2025	75.000.000,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Kemasyarakatan atas Pek.Pemb.Candi Batu Padas Pura Dadia Pasek Gelgel Br. Dinas Tegenan Ds. Menanga Kec.Rendang Kab.Karangasem Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008, Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/11/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn.dan Lmbg.Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasyrkt atas Pek. Pembangunan Rehab Pura Dadia Arya Tan kaur Pada Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Sumber Dana APBDP TA.2025	30.000.000,00
32	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Sanggar Seni Kembang Rampe	200.000.000,00
33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Pengempon Pura Penataran Kebayan	40.000.000,00
34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Pengempon Pura Dadia Pasek Gelgel Aan	70.000.000,00
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Pesemetonan Karang Lingsir Direng	36.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Sekeha Gong Adi Swari Nandhi	50.000.000,00
37	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Pengempon Pura Dadia Alit Mangku Pipil	30.000.000,00
38	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Sanggar Seni Lontar Emas	50.000.000,00
39	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Dadia Tangkas Kori Agung Telutug	50.000.000,00
40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Sekaa Gong Istri Gita Cita Swara	30.000.000,00
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek.Pemb.Rehab Pr Dadia Tangkas Kori Agung Bd.Kubu Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	100.000.000,00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung Kpd.Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ats.Pek.Pemb.Palinggih Pura Plelinggih Ds.Adat Ngis, Kec.Manggis Pada SubKeg.1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBDP TA.2025	110.000.000,00
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25/11/2025	Pemb.100%Blj. Hibah Uang Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan ats Pek.Perehaban Palinggih Padmasana, Penyengker dan Balai Pesangkepan Pura Pauman Merta Sari Ds.Selumbung pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	35.000.000,00
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn.dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ats.Pek.Penataan Pemuunan Setra di Br. Adat Dukuh,Br.Dinas Dukuh,Kec Kubu Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung Kpd.Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ats.Pek.Perehaban Pelinggih Sapta Petala dan Apit Lawang Pura Penataran Br.Dinas Tengah Ds.Manggis Pada SubKeg.1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemsyrktan ats Pek.Rehab Bale Pesangkepan dan Pemb.Tembok Penyengker Pura Gedong, Ds. Adat Padangaji, Ds.Peringsari Pd.Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Pelinggih Pr.Dadia Anyar Kajanan Br. Dinas Kajanan Desa Ngis Pd.Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan atas Pek.Pemb.Bale Piasan Pengempon Pr.Piasan Pasek Padang Subadra Semseman Br.Adat Semseman Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek.Pemb.Bale Paebatan Paiguman Warga Pasujan, Ds Bugbug Kec.KarangasemPd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	61.000.000,00
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb. 100% Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pekerjaan Rehab Pelinggih Pura Dalem Lingsir Br. Tohjiwa pada Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd. Sumber Dana APBDP TA. 2025	75.000.000,00
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan atas Pekerjaan Pemb. Pelinggih Gedong Dalem dan Padmasana Pr.Dalem Satak, Bd.Jumenang Desa Bukit Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pr.Dadia Tangkas Kori Agung Lngk.Ds.Subagan Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	45.000.000,00
53	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Sekaa Gong Istri Wina Iswari	20.000.000,00
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek. Perehaban Tbk Penyengker Pr.Dadia Puseh Sukahet Br. Dinas Padang Tunggal Kangin,Ds.Duda Pd.Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pengempon Pesimpenan Perehaban Bale Kulkul Dinas Pegubungan Ds.Duda Kec Selat pada Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pelinggih Pura Dadya Penataran Sekar Sari, Br Ds.Bukit Kauh Ds.Tenganan Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perbaikan Tembok Penyengker, Sanggar Agung dan Taksu Pr Pesendetan Pasek Gelgel Untalan Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	20.000.000,00
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats.Pek.Perehaban Pelinggih Pura Merjan Alit Arya Pelangan,Br.Ds.Pangitebel Ds.Antiga Kelod Pd.Sub Keg.1.03.09.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Pr Dadia Pande Br.Ds.Brahmana,Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Bale Piyasan Pura Dadia Alit Arya Wang Bang Sidemen,Br.Ds Pangitebel Ds Antiga Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Rehab bale Puwaregan dan Penataan Areal Parkir Pura Dadia Pasek Padang Subadra Br.Ds Kajanan Ds.Ngis Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Badan dan Lembaga N?rlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Pelinggih Pr.Dadia Pasek Kermaning Br.Dinas Karangasem Pd.Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Pemb.Pelinggih Pengaruman Pura Pemaksan Gedong Sari Br.Pande,Ds Manggis pada Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosil Kemsy ats Pek Pemb.Pelinggih Penyimpenan Pura Pejenengan Dalem Empuaji,Bd Kelod Ds.Antiga Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pelinggih Pura Penataran Pasek Ketewel Br. Ds.Kelodan Ds Ngis Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj. Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek. Perehaban Pelinggih Pura Pasek Bendesa Gelgel Br.Ds.Kelodan Ds.Ngis pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Belj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pekerjaan Pemb.Padmasana dan Gedong Pura Dadia Alit Dalem Tarukan,Bd.Pangitebal,Ds.Antiga Kelod pd Sub Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdndan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pekerjaan Pemb.Bale Pesamuan Pura Arya Kubon Tubuh Kuta Waringin Br. Ds.pakel,Ds.Gegelang Pd Sub Keg1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Bale Pewaregan Pura Dadia Pasek Jumpungan,Br.Ds.Mendira, Ds Sengkidu pada Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pekerjaan Rehab Pura Pesimpenan, Pr.Dadia Pasek Gelgel,Br.Bucu, Ds. Nongan,Pada Sub.Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Pelinggih Pr.Paibon Tangkas Kori Agung Manggis Br.Ds. Kelodan Desa Manggis Pd.Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd. Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Pemb. Bale Gong Pura Dadia Pasek Gelgel Br.Ds. Rendang Tengah, Desa Rendang,Pada Sub Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan atas Pek.Pemb.Balai Pesandekan Pr.Dadia Pulesari Menanga Kawan Br.Ds. Menanga Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan atas Pek. Pemb./Rehab Perbaikan Gedong Pesimpenan Pr.Dadia Pegatepan Kelodan Br.Adat Mumbul,Br.Ds.Mumbul Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Candi dan Sanggah Apit Lawang Pura Pemaksan Gaduh Br.Ds Tihingan Tengah Ds Bebandem Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	70.000.000,00
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyraktan atas Pek.Perehaban Bale Kulkul Pengempon Pr.Pejenengan Pulasari Jangu Kangin Br.Ds.Jangu-Desa Duda Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008Pd. Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pelinggih Pr Penataran Tangkas Kori Agung Dauh Bingin Br. Ds Kajanan Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Bale Piasan Pura Dadia tangkas Kori Agung Br.Dinas Kauhan Ds.Pesedahan pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pekerjaan Perehaban Pelinggih Pura Penataran Pasek Gelgel Br.Ds.Kelodan Ds.Ngis pada Sub Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb Pelinggih Pura Pande Taman Sari Batu Gampil Br.Dinas Belong Ds Ulakan Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	100.000.000,00
81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kepada Bdn.dan Lembaga Nirlaba,Kmsyrktan Bersifat Sosial Pek.Pemb.Tembok Penyengker Pengempon Pr.Dadia Pratisentana Sira Arya Kubontubuh Kuthawringin Br.Ds. Yeha,Ds.Sebudi,Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00
82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Bale Pesandekan Pura Dadia Diadi Br.Ds.Tauman Nyuhtebal Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Bale Pesandekan dan Senderan Merajan Dalem Sukawati,Ds.Antiga Pd.Sub.Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Candi Bentar Pura Penataran Pande Br.Dinas Alas Tunggal Ds.Duda Kec.Selat,Kab.Karangasem Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Sumber Dana APBDP TA.2025	30.000.000,00
85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Bale Kulkul Pura Dadia Para Gotra Sentana Dalem Tarukan Br. Dinas Duda Ds.Duda Pd.Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd. Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Tmbk Penyengker Pr.Pasek Bukit Belun, Ds.Pakraman Duda,Br.Dinas Jangu, Ds. Duda Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Bale Pesandekan Pura Batur Ceta Br.Dinas Dalem Ds. Duda Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBDP Kab. Karangasem TA. 2025	50.000.000,00
88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kmsyraktan atas Pek.Perehaban Palinggih Sapta Petala dan Penglurahan Pr.Dadia Pulasari Jangu Kauh Br.Ds.Jangu Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Uang Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy Ats.Pek. Pemb.Candi Bentar Pura Dadia Batur Daging Ds.Adat Kebon Bukit, Desa Bukit Pd.Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00
90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pembayaran 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyn atas Pekerjaan Rehab Pura Dadia Dukuh Sari, Ds.Bugbug, Pd.Sub Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	65.500.000,00
91	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27/11/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Sekeha Gong Pura Masceti	150.000.000,00
92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27/11/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy atas Peke Pemb.Bale Kulkul Pura Dadia Pasek Kayu Selem Br.Dinas Teges Ds.Pempatan pada Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 PadaSumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan atas Pek.Pemb.Pr.Manik Galih Br. Dinas Wates Kangin, Desa Duda Timur Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	250.000.000,00
94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb.100% Blj. Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Wantilan Banjar Adat Kerta Satya, Br.Ds.Padang Tunggal Kangin, Desa Duda,Pd.Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBDP TA. 2025	300.000.000,00
95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan ats.Pek.Perehaban /Renovasi Candi Gelung Kori Merajan Agung Padang Tunggal Arya Wang Bang Sidemen Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	180.000.000,00
96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Penyengker dan Pemb Bale Pesandekan Pr Karang Lingsir Warih Maras Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb/Rehabilitasi Pelinggih Gedong Pura Dadya Pasek Gelgel Akah Tebola Br.Ds.Tebola Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	75.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pekerjaan Pemb.Wantilan Pr. Penataran Puri Agung Ulah Br. Dinas Sindu Bali Desa Sindu Wati Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00
99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Bale Kulkul dan Perehaban Bale Pesandekan Pura Paibon Pasek Gelgel Pegatepan Br. Dinas Kertabuana Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	100.000.000,00
100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Penataan Perehaban/Penataan Areal Parkir Pura Merajan Pasek Gelgel Br.Dinas Dukuh, Desa Dukuh Kec.Kubu Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	100.000.000,00
101	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Dasar Pelinggih Menjangan Sulang dan Pelinggih Taksu Pura Merajan Arya Wang Bang Sidemen Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
102	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb.100% Blj. Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan atas Pek. Perehaban Balai Penyimpenan Pr. Dadia Tangkas Kori Agung Br. Dinas Tihingan Tengah Ds.Bebandem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
103	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Candi dan Tembok Penyengker Pura Dadia Pulasari Banjar Dinas Teganan Desa Menanga Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
104	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Puargan Pura Dadia Kawan Batu Lepang Desa Selumbung Kec.Manggis Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	35.000.000,00
105	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pelinggih/Piasan Idayang Kompyang Paibon Pasek Bendesa Batu Dinding,Bd Saren Kelod Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
106	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb/Rehab Candi Gelung Pr Dadia Arya Kubon Tubuh Kutha Waringin Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	01/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Bale Pesandekan Pura Dadia Dukuh Sari Bias Miik Br.Samuh Desa Bugbug Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	60.400.000,00
108	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Pewaregan Pura Piasan Pasek Bedelod Semseman Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
109	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sosial Kmsyrktan ats Pek.Sukarela Rehab/Pemb. Pelinggih Apit Lawang Pr.Dadia Arya Kanuruhan Tangkas Kori Agung Br.Ds.Pangleg Ds.Jungutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
110	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb. Senderan dan Wantilan Pura Dadia Tangkas kori Agung Br.Ds. Juwuklegi,Ds. Duda Timur Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	200.000.000,00
111	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pelinggih Pura Dadia Pasek Gelgel Wayahan Br.Dinas Bengklok, Desa Tinyar Barat Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	200.000.000,00
112	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb/Rehab Pura Merajan Tanjung Sari,Ds Gegelang Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
113	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Atap Pelinggih Pura dadia Pasek Togog Tinyar Bd.Eka Adnyana Kec. Kubu Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
114	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb. Renovasi Bale Gong Pura Dadia Pasek Tutuan Br.Dinas Untalan Desa Jungutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
115	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan atas Pek.Pemb.Wantilan Jaba Sisi Pura Dadia Sri Aji Agra Dalem Samperangan JL.Gunung Agung Ds.Muncan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	150.000.000,00
116	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pelinggih Meru Tumpang Tiga Pura Dadia Ki Mantri Tutuan Br.Ds.Putung,Ds.Duda Timur Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
117	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek. Perehaban Pelinggih Pr.Dadia Paibon Pasek Sakti,Br. Abian Tihing, Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
118	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pura Dadia Pasek Sibang Banjar Dinas Triwangsa Desa Macang Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	30.000.000,00
119	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan atas Pek.Perehaban Pura Dadia Tangkas Kori Agung Br. Dinas Bangbang Biaung, Desa Duda Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
120	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Candi Bentar dan Bale Pesamuan Pura Dadia Pasek Gelgel Br. Dinas Tengah,Desa Nongan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
121	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Bale Gong Pura Dadia Brangsinga Desa Gunung Kec.Sidemen Kab. Karanagasem Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	100.000.000,00
122	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb. 00% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Penataan Areal Pura dan Perlengkapan Palinggih Pr Karang Lingsir Pendukuhan Kaliasem Br.Dinas Karanganyar Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
123	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pelinggih dan Tembok Penyengker Pura Pauman Santhi Raharja Br.Ds Tengah Ds Selumbung Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
124	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb. Blnj. 100% Dana Hibah Uang Kepada Kelompok Cubang Yeh Pol Br. Dinas Biaslantang Kelod, Desa Purwakerti Kecamatan Abang, Kab. Karangasem pada Sub Keg. 1.03.02.2.01.0089. di Dinas PUPRKIM Kab. Karangasem, APBDP TA. 2025	100.000.000,00
125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan atas Pek.Pemb. Fasilitas umum Br. Adat Alas Tunggal Desa Pakraman Duda, Kec. Selat Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	75.000.000,00
126	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Piasan Pura Kawitan Celuk Pangitebel Br.Ds.Pangitebel Ds. Antiga Kelod Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
127	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Rehab Pewaregan Pura Dadia Pasek Gelgel Akah Br.Bloncing Kelod, Ds Telagetawang Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
128	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Gong Sendetan Taman Alit Wang Bang Pinatih Desa Tianyar Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
129	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Pelinggih Pura Ibu Alit Brangsinga Semsemen Br.Adat Semseman Ds Sangkan Gunung Kec.Sidemen Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb/Rehab Pengempon Pura Dadia Taman Sari Banjar Adat Batannyuh Kaler Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
131	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	02/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Penyengker dan Pemb.Bale Pesandekan Pura Karang Lingsir Warih Serawi Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
132	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	04/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Pewedaan Pura Dadia Merta Sari Subagan,Kec.Karangasem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	35.000.000,00
133	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb./Rehab Bataran Pelinggih Pr.Dadia Wayan Bakta,Br. Dinas Tihingan Tengah Ds.Bebandem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
134	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Penyengker Pura Dadia Pasek Gelgel Pegatepan Br Dukuh Br.Dinas Bantas Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
135	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pelinggih Pura Dukuh Lampuan Link.Jasri Kelod, Desa Adat Jasri Kel.subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
136	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb./Perehabatan Pura Taman Sari Ulun Suwi Br. DS.Abiancanang Desa Ulakan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	150.000.000,00
137	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb/Perbaikan Bale Pewedaaan Pr.Dadia Alit I Gusti Ngurah Batu Lepang Br.Pebukit,Kel.Karangasem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
138	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Blj. Hibah Uang Bupati Karangasem kpd Pengempon Pemb. Pelinggih Pura Merajan Agung Lingk. Padangkerta Tengah, Kel. Padangkerta, Kec.Karangasem,Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	180.000.000,00
139	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Ksyrktn Ats.Pek.Pemb.Peluasan Areal Madya Mandala,Tmbk Penyengker,Cndi.Bentar,Apit Lawang&Bale Pesandekan Br.Ds.Taman Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008Pd Smbr Dana APBDP TA. 2025	200.000.000,00
140	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pura Penataran Pande Kawan Linggasana Br.Dinas Linggasana Desa Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	150.000.000,00
141	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Los Pura dan Pewaregan Dapur Pura Ayu Lebah Sari Br.Ds. Lebah Desa Datah Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	150.000.000,00
142	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pelinggih Pura Karang Sari Br.Dinas Ijogading Desa Seraya Kec. Karangasem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	68.000.000,00
143	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Puargan Pura Penataran Anyar Lingk.Padangkerta Tengah Kel.Padangkerta Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Balai Petiasan Pura Sendetan Tangkas Kori Agung Desa Adat Tianyar, Desa Tianyar Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	45.000.000,00
145	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb. 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek. Perehaban/Perbaikan Penyengker Merajan Tebola Arya Wang Bang Sidemen,Br Dinas Tebola Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 APBDP TA.2025	75.000.000,00
146	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Pebat Pura Pejengan Agung Bala Dadya Pekandelan Desa Sibetan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
147	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Bale Kulkul dan Tembok Penyengker Pr.Paibon Pande Alit Br.Ds.Pande Desa Manggis Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	75.000.000,00
148	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pura Rambut Sedana Br.dinas Bantas,Desa Baturinggit Kec.Kubu Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
149	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Belanja Hibah Uang Bupati Karangasem kepada Pengempon Perehaban Bale Gong Pura Ibu Poh DS.Kesimpar Kec.Abang Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pelinggih Pengempon Pura Dadia Purwasari Br.Batannyuh Kelod Desa Adat Karangasem Kel. Karangasem	100.000.000,00
151	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb./Rehab Wantilan Banjar Adat Pengawan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
152	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb./Rehab Balai Pesandekan Pengempon Pr.Dadia Pasek Gelgel Br.Ds. Tihingan Kauh, Desa Bebandem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
153	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Balai Asagan Pura Catus Pata Desa Adat Jati Tuhu Desa Ban Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
154	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Piasan Pura Piasan Brangsinga Br.Adat Semseman Desa Sangkan Gunung Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
155	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Candi Bentar Subak Abian Batu Lompeh Desa Tianyar Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
156	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pekerjaan Perbaikan/Perehaban Bale Pawedaan Pura Dadia Merajan Ageng Duda Br Dinas Duda,Ds Duda Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	70.000.000,00
157	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Belanja Hibah Uang Bupati Karangasem kepada Perehaban Bale Gong Pura Sendetan Arya Brangsinga Br.Ds. Bias Lantang Kaler Desa Purwa Kerthi Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
158	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb. 100% Blj.Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb.Balai Paebatan Pura Dadya Pasek Gelgel Pegatepan Ds Adat Pedahan Kelod Ds Tianyar Tengah Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	70.000.000,00
159	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Tembok Penyengker Pengempon Pura Penataran Pucak Sari Br.Dinas Anyar Desa Selumbung Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Penyengker Pura Dadia Pasek Gelgel Tianyar Desa Adat Tianyar Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Pesandekan Pengempon Pura Dadya Tangkas Mendira Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
162	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Penyengker Pura Subak Abian Samuh Ds.Adat Paleg Kaja Ds. Tianyar Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
163	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pura Dadia Kelod Kangin Br.Kelod Desa Antiga Kec.Manggis Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
164	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb/Pembuatan Bale Banten,Lapan Pelinggih dan Prasarana Lainnya Pr.Dadia Sira Arya Brangsinga Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
165	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pura Dadya Pasek Gaduh,Br Dinas Aas Ds.Bunutan Kec Abang Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Penyengker Pura Sendetan Dewa Hyang Kelab.Desa Adat Tianyar Desa Tianyar Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
167	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pelinggih Anglurah Pura Dadia I Wayan Bhuarta Br.Ds.Tihingan Tengah Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
168	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Senderan Dadya Dukuh Segening Desa Adat Cegi Desa Ban Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
169	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Rehab/Pemb.Pelinggih Lepitan Pr.Dadia Pasek Gelgel Dauh Petung Br.Ds.ihingan Kauh Ds.Bebandem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Kongco Tempat Ibadah Pengempon Kongco Br.Dinas Bukian Desa Nongan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
171	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung Kpd.Bdn.dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb./Perehaban Pelinggih Padma,Pr.Penataran Lan Paibon Pasek Gelgel /Pasek Dangka Kaja Kangin Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
172	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Penyengker Pura Sendetan Pasek Gelgel Tianyar Desa Adat Tianyar Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
173	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pura Kembar Widi Wida Br.Dinas Bantas Desa Baturinggit Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
174	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perbaikan Pelinggih Gedong Sanggaragung Pr.Dadia Bukit Puncak Sari Br.Ds.Untalan Ds.Jungutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
175	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Tembok Penyengker Pura dadia Kidul Br.Dinas Yehbunga Desa Jungutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	150.000.000,00
176	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Penyengker Pura Dadia Pasek Gelgel Batu Dingding Br.Ds.Bantas Desa Baturinggit Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
177	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	05/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Candi dan Penyengker Pura Dadia Pasek Perteka Rendang Br.Dinas Dangin Pasar Desa Rendang Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
178	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	05/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Semeton Kilitan Sangke	50.000.000,00
179	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	05/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada STT Sidhi Adnyana	20.000.000,00
180	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	05/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Pura Pasek Tatar Dadia Kelod	80.000.000,00
181	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	08/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pelinggih Sangar Agung Pr.Dadia Pasek Gelgel Akah Br.Kayu Putih Desa Bebandem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
182	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	08/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Balai Gong Pura Dadya Pasek Gelgel Aan Kayuaya Br.Dinas Kayuaya Desa Sukadana Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
183	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Candi dan Tembok Penyengker Pr.Pemaksan Dewa Gede Pande Pengawan,Br Dinas Pengawan Ds Sibetan Pada Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	75.000.000,00
184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Balai Gong&Penyengker Pr.Paibon Dadia Arya Wang Bang Sidemen Br.Ds.Bukit Kelod Ds.Bukit Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	150.000.000,00
185	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Bdn&Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Penataan Pr.&Pemb. Km.Mandi Pr.Pesendetan Dalem Segening Bantas Br.Dns.Bantas Ds.Baturinggit Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Tribun Bale Banten dan Bale Pewedaan Paibon Pasek Pegatepan Desa Adat Jasri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
187	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pura Dadya Arya Kuta Waringin,Br.Dinas Abang Kaler Ds Abang Kec Abang Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	40.000.000,00
188	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Rehab Bale Piasan Pr.Dadia Pasek Gelgel Batur Bd.Dukuh Desa Bebandem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	45.000.000,00
189	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pelinggih Pr.Sendetan Tiaras Br.Dns.Kangin Ds.Seraya Timur Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	45.000.000,00
190	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Ung.Kpd. Bdn&Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Kulkul Pr.Penataran I.R.Gd.Gerombong Prati Sentana Sira arya Kubon Tubuh BD.Tengah Ds.Selumbung Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	35.000.000,00
191	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Candi dan Tmbk Pura Penatran Arya Wang Bang Pinatih Br.Dinas Padang Tunggal Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	160.000.000,00
192	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pembn 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pekerjaan Perehaban Pelinggih Pura Merajan Jero Abang,Dusun Abang Jeroan Ds Abang pada Sub Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00
193	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Belanja Hibah Uang Bupati Karangasem Kepada Pembangunan Bale Kulkul,Pura Paibon Dadia Pasek Gelgel Ngis BD.Ngis Kaler Ds.Tri Buana Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
194	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pengadaan Tribun bale Banten Pura Dadia Jumutan Br.Adat Gede Desa Adat Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	60.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
195	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek. Rehab Bale Pesandekan Pr Dadia Pasek Eka Cita Budi Karana,Lingk.Jasri Kaler Kel.Subagan Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
196	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pr.Segara Suansari Br.Dns.Tukad Hitem Ds.Seraya Timur Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	45.000.000,00
197	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Penyengker,Candi&Pelinggih Apit Lawang Kelompok Gubug Dukuh Br.Ds.Bangle Ds.Bunutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	65.000.000,00
198	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb Bale Gong Pura Paibon Arya Dalem Pering Br.Dinas Kaler Ds Antiga pada Sub Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 PadaSumber Dana APBDP Kab. Karangasem TA. 2025	100.000.000,00
199	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Ulang Penyengker Pura Dadia Manik Cemara Desa adat Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	70.000.000,00
200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lembaga Nirlaba Skarla Brsifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Candi Bntr,B.Kulkul,B.Pesandekan,Tmbk.Peyngkr,Gdong Pengempon Pr.Dadia.Gunung Sari BD.Pendem Ds.Muncan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Smbr Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
201	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd.Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Pr.Pemaksan Bingin Kembar Pasek Gelgel Kemoning Br.Dns Kemoning Ds.Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
202	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Tembok Penyengker Br.Kereteg Sibetan Desa Sibetan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00
203	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Rehab Pura Dadia Dukuh Ayung Desa Bugbug Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	47.700.000,00
204	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Balai Kelompok Suka Duka Batu Megok Br.Dinas Tinjalas Desa Seraya Timur Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	45.000.000,00
205	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pura Maksan Penataran Br.Dinas Dangin Sema Desa Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
206	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Balai Gong Pura Sendetan Karim br.Dns.Tukad Hitem Ds.Seraya Timur Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
207	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban/Pemb.Pewaregan Pr.Dadia Pasek Preteka Kubakal BD.Tihingan Tengah,Ds.Bebandem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
208	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perbaikan/Renovasi Pelinggih Pr.di Dadia Pasek Trah Ababi Br.Dns.Saren Kauh Ds.Budakeling Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	45.000.000,00
209	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb./Rehab Pr.Pesendetan Tranes Pasek Siwa Gaduh BD.AAS Ds.Bunutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
210	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Gedong Prajapati Panitia Renovasi&Penataan Setra Br.Adat Telengan Kalanganyar Ds.Gegelang Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
211	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pelinggih&Penyengker Pr.Dadia Telabah Pengawan Br.Dinas Pengawan Ds.Sibetan	75.000.000,00
212	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Pertemuan Pr.Dadia Celagi Desa Adat Penginyahan Ds.Tianyar Tengah Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	70.000.000,00
213	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Candi dan Meru Tumpang Tiga Pengempon Dadia Kembar Sari Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
214	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Bale Pesandekan Pr.Dalam Ds.Adt Bebandem Br.Dns.DS.Tengah Desa Bebandem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
215	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pura Pesendetan Pasek Gelgel, Ds Bunutan Pada Sub Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP Kab.Karangasem TA. 2025	50.000.000,00
216	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pr.Maksan Candi Raras Br.Dns.Br.Gula Ds.Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	60.000.000,00
217	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pr.Pesimpenan Bukit Catu Br.Dinas Bau Kawan DS.Nawa Kerti Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
218	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Candi Kurung Pr.Dadia Pasek Gelgel Manik Jepun Br.adat Kauhan Ds.Pesedahan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
219	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Reh.Balai Penyimpanan&Pem.Tribun Balai Banten Pr.Dadia IGST.Nym.Subagan Br.Adt Tengah Kaler Link.Genteng Ds.Adt.Sbg.Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	40.000.000,00
220	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Penyengker Pura Pesendetan Manik Buncing Karang Kubu Br.Dinas Bantas Desa Baturinggit Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
221	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Bdn&Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Candi,Penyengker&Pelinggih Pr.Dadia Dukuh Segening Padang Kawat Br.Dns.Mumbul Ds.Jungutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
222	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pr.Paibon Pasek toh Jiwa Br.Dinas Pesaban Kawan Ds.Pesaban Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
223	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pr.Arya Tangkas Kori Agung Lingk.Belong Kel.Karangasem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
224	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Gong Desa Adat Karangasem Kec.Karangasem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	150.000.000,00
225	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Balai Pauman Nyoman Pr.Pauman Nyoman Br.Dinas Perasi Kelod Ds.Pertima	70.000.000,00
226	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Pesandekan Dadia Madya Sari Br.Adat Werdiguna Desa Jasri Kel.Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
227	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Gelung Kori Pr.Dadia Pasek Tulamben Br.Dinas Perasi Kelod Ds.Pertima Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
228	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb. 100% Blj. Hibah Uang Kepada Kelompok Sumur Bor Agung Banjar Dinas Lebah, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem pada Sub Keg. 1.03.02.2.01.0119 di Dinas PUPRKIM Kab. Karangasem Sumber Dana APBDP TA. 2025 Sesuai SK Bupati.	50.000.000,00
229	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pekerjaan Pembangunan Bale Kulkul Pura Dadia Pretisentana Arya Jelantik Ds Ngis Br Dinas Ngis Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	75.000.000,00
230	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Penyengker Pr.Sendetan Si Rasman Sari Br.Dns.Bangle Ds.Bunutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	29.000.000,00
231	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb./Rehab Pr.Dadya Br.Genteng Ds.Pidpid Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
232	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Pasucian Pr.Bale Agung Br.Dns.Desa,Desa Bungaya Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	100.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
233	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek.Pembangunan Bale Pesandekan Pengempon Pura Dadia Merajan Ayu Br Dinas Perasi Tengah Ds Pertima Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
234	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Kulkul Pr.Dadia Alit Pule Br.Dns.Kelodan Ds.Selumbung Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
235	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pelinggih Pr.Dadia Pasek Manik Bingin Br.Sampiang Desa Adat Jasri Kelod Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
236	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Pura Paibon Pasek Gelgel Br.Dns.Pesangkan Anyar Ds.Duda Timur Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
237	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Tmbk Penyengker Pr.Penataran Puncak Sari Biyu Bali Abah Br.Dns.Pakel Ds.Gegelang Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
238	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lmbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek.Pemb.Candi Bentar dan Penyengker Pr Dadia Pasek Gelgel Ds Adat Asak Br.Dinas Asak Kangin,Ds Pertima Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	45.000.000,00
239	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemas ats Pek.Pemb Bale Gong Pr Dadia Para Gotra Santana Dalem Tarukan Batur Sari,Br Dinas Merita,Ds Laba Sari Kec Abang Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	100.000.000,00
240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pengrehaban Pelinggih Apit Lawang&Pelinggih Rong Kalih Pr.Dadia Pasek Pejeng Bd.Kelodan Ds.Manggis Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
241	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Pawedan&Gedong Rong Tiga Pr.Dadia Taman Tigaron Lingk.Gd.Subagan Ds.subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pelinggih Pr.Dadia Taman Sari Br.Dns.Merita Ds.Laba Sari Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
243	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Gong Pura Dadia Pulasari BD.Sangkan Gunung Ds.Sangkan Gunung Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
244	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Pelinggih Pr.Dadia Alit Pasek Dangka Ds.Selumbung Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	35.000.000,00
245	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Bale Kulkul Pr.Dadya Pasek Bendesa Gelgel Br.Dns.Kedampal Ds.Datah Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
246	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb./Rehab Pura Pemaksaan Siig Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
247	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lmbg Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pelinggih Pura Penataran Pande Mas Desa Selumbung Kec Manggis Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	35.000.000,00
248	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pengadaan Tribun Bale Banten,Pemasangan Batu Skt&Penggantian Duk Pelinggih Pr.Dadia Alit Cemara Lingk.Tengah Kel.Sbg Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	60.000.000,00
249	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb. 100% Blj Hibah Ung Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek. Pemb Bale Gong Pura Manik Kembar Bakalan Br Dinas,Ds Bturinggit Kec Kubu, Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lmbg Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pelinggih Pura Dadia Penataran Kayu Selem Desa Adat Asak, Desa Pertima Kec.Karangasem Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	45.000.000,00
251	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb./Rehab Pr.Dadia Batur Taman Sari Br.Dns.Pande Desa Manggis Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	75.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
252	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Pwaregan Pr.Penataran Temaga Br.Adat Temaga Ds.Kertha Buana Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	100.000.000,00
253	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn.dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Pemb.Bale Pesandekan,Penyengker,Candi Apit Surang Merajan Dewa Bagus Ayu Ds.Adat Jasri Kel.Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	25.000.000,00
254	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lmbg Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb dan Penataan Bale banjar Adat Kebon Br.Adat Kebon desa Kertha Mandala Kec.Abang Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	300.000.000,00
255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100%Blj Hibah Ung Kpd &Lmbg Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb Candi Surya,Plggih Apit Lwng,Plggih Bhatara Baruna &Pyear Pr Dadia Pasek Bendesa Bt Dinding BD.Saren Kld Ds Nongan Pd Sub 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
256	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Pawedaan Dadia Dangin PGSDT.Dalem Tarukan Pulasari Br.Dns.Pesaban Kangin Ds.Pesaban Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	80.000.000,00
257	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek.Perehaban Pos di Kelompok Pos Mekar Sari Umah Neng Br Dinas Sambilaklak Desa Kubu Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
258	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Pr.Dadia Pasek Tanah Lengis Br.Dns.Nangka Ds.Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	40.000.000,00
259	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Tmbk.Penyengker Pr.Kertasari Br.Dns.Perasi Kangin Ds.Pertima Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	30.000.000,00
260	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Pelinggih Pr.Dadia Rambut Sedana Br.Dns.Caniga Desa Dukuh Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	25.000.000,00
261	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Puaregan Pr.Dadia Batur Sari Br.Dinas Pandesari Ds.Bebandem Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	40.000.000,00
262	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Pengaruman Pr.Dadia Pasek Padang Subadra BD.Tanah Aron Ds.Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
263	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Pelinggih Pr.Pemaksan Dadia Pasek Tulamben Br.Dns.Tegalbengkak Ds.Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
264	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Penyengker dan Candi Bentar Pr.Dadia Lebah Sari Lingk.Br.Adat Genteng Ds.Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
265	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Kulkul Pr.Dadia Buana Sari Bungaya BD.Subagan Ds.Bungaya Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
266	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Los Pengempon Pr.Dadia Mengwi Lingk.Br.adat Tengah Kaler Ds.Adat Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	30.000.000,00
267	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Rehab Balai Pawedan&Rehab Balai Paebatan Pr.Dadia I Gst.Puger Jl.Jeruk Ds.Adat Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	40.000.000,00
268	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perbaikan Pr.Dadia Arya Kanuruhan Asah Teben Br.Asah Teben Ds.Datah Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
269	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek.Perehaban Pelinggih Pura Dadia Gharbawana Br Dinas Griya,Desa Culik,Kec Abang Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
270	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Pesimpenan dan Penggantian Duk Pelinggih Link.Genteng Kel.Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	70.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
271	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Pr.Pemaksan Alit Tegal Bengkak Br.Dns.Tegal Bengkak Ds.Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	40.000.000,00
272	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Rehab Pelinggih Pr.Pasek Sumerta BD.Buayang Ds.Culik Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	51.000.000,00
273	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Pr.Dadia Merajan Arya Nyuh Aya Br.Dns Tegal Bengkak Ds. Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	30.000.000,00
274	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100%Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Wantilan Jaba Sisi Pr.Dadia Batan Careme Lingk.Br.Adat Genteng Ds.Adat Subagan Kel.Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	55.000.000,00
275	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pelinggih&Penyengker Pr.Dadia Dukuh Lebah Desa Bugbug Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	65.400.000,00
276	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Komunitas Seni Ghana Svara	130.000.000,00
277	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pekerjaan Pemb candi dan Penyengker Pura Dadia Tangkas Abiansoan Br Dinas Abiansoan Ds.Bungaya Kangin Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
278	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Kulkul Pura Dadia Pasek Gelgel Br.Dns.Tegal Langlangan Ds.Datah Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
279	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Pr.Pesendetan Sekar Bela Br.Dns.Tuminggal Ds.Tiyingtali Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	40.000.000,00
280	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Rehab Candi Bentar dan Penyengker Pr.Paibon Pasek Toh Jiwa Baleran Br.Dns.Komala Ds.Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
281	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Uang Kpd. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktan Ats.Pek.Perehaban Pelinggih Pesendetan Karmin Pasek Siwa Gaduh Br.Dns.AAS.Ds.Bunutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
282	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban/Penataan Pr.Diareal Pr.Pesendetan Kayu Selem Getas Br.Dns.Bantas Ds.Baturinggit Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	25.000.000,00
283	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Penyengker Pengempon Pr.Dadia Pasek Padang Subadra Br.Adat Semseman Ds.Sangkan Gunung Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	30.000.000,00
284	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lmbg Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb Dasar Pondasi Pr Pemaksan Manik Kembar Br Dinas Bukit Paon Ds Bhuana Giri Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	30.000.000,00
285	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lembaga Nirlab,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pembangunan Bale Piyasa Pura Dadia Suci Pasek Gelgel Br Dinas Bias Lantang Ds Purwa Kerthi Kec Abang Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
286	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Pelinggih Pr.Purusa Pesendetan Kumpi Landep Br.Dns.Bangle Ds.Bunutan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	60.000.000,00
287	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek.Pembangunan Pelinggih Pura Dadia Buda Wage Br Dinas Bantas,Ds Baturinggit Kec Kubu Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
288	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb 100% Blj Hibah Ung Kpd Bdn dan Lmbg Nirlaba,Sukarela,Sukarela Bersifat Sosial Kemsy ats Pek Perehaban Pr Paibon Panti Sari Butus BD.Butus Ds.Bhuana Giri Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	50.000.000,00
289	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100%Blj.Hbh.Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Brsft.Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Bntn Bale Pawedaan Bsrta Tribun,Wastra Pelinggih&Penggantian duk Pelinggih Pr.Dadia Ujung Lebah Ling.Br.Adt.Gd.Ds.Adt.Sbg.Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
290	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lmbg Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Perehaban Pura Maksan Kanginan Komala Br Dians Komala Ds Bhuana Giri Kec Bebandem Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	30.000.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
291	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Pr.Tunjung Susila Kerti Br.Dinas Babakan Ds.Purwa Kerthi Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA. 2025	50.000.000,00
292	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Gambang Pr.Dadia Padangkerta Lingk.Br.Adt.Tengah Kaler Ds.Adat Subagan Kel.Subagan Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	25.000.000,00
293	Dinas Perhubungan	18/12/2025	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,sukarela bersifat sosial Kemasyarakatan (Hibah Uang kepada DPC Organda Kab.Karangasem) pada subkeg.2.15.02.2.09.0002 TA.2025	25.000.000,00
294	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lmbg Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb Pelinggih Pura Pasek Gelgel Munting BD.Munting Ds Tulamben Kec Kubu Pd Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	75.000.000,00
295	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Perehaban Pr.Dadia Pande Cemara Tebel Ds.Bhuana Giri Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
296	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb./Rehabilitasi di Pr.Dadia Tangkas Kori Agung Br.Dns.Kedampal Ds.Datah Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	50.000.000,00
297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19/12/2025	Pemb.100% Blj.Hibah Ung.Kpd.Bdn&Lbg Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kmsyrktn Ats.Pek.Pemb.Bale Kulkul Pr.Maksan Batur Ds.Adt.Ngis BD.Ngis Kaler Ds.Tri Buana Pd Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008.Sbr.APBDP TA.2025	75.000.000,00
298	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19/12/2025	Pemba 100% Belanja Uang Hibah Kpd Bdn dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pek Pemb Pelinggih Pura Dadia Manik Luwih Br Dinas Bantas Ds Baturinggit,Kec Kubu Pd Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Sumber Dana APBDP TA.2025	25.000.000,00
299	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19/12/2025	Pemb.100% Blj Hibah Ung Kpd dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy ats Pekerjaan Pemb dan Penataan Pura Dadia Pasek kayu Selem Kedampal Abang Berupa Pembangunan Penyengker Pd Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pd Sumber Dana APBDP TA.2025	100.000.000,00
300	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	31/12/2025	Jurnal koreksi belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ke Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00
JUMLAH				**28.094.000.000,00**
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13/06/2025	Pembayaran Sekaligus Sebesar 100% Atas Pelks. Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Pura dan Senderan di Pura Hyangaluh Besakih Pada Sub. Kegiatan. 1.03.09.2.01.0008 Pada Dinas PUPRKIM Kab. Karangasem Sumber Dana APBD TA.2025	87.704.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15/07/2025	Pembayaran Sekaligus Sebesar 100% ats. Pelaksanaan Pekerjaan Konsultansi Peencanaan Rehabilitasi Pura Kiduling Kreteg Pada Sub. Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 Pada Dinas PUPRKIM Kab. Karangasem Sumber Dana APBD TA.2025	99.398.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	08/09/2025	Pembayaran Uang Muka sebesar 30% atas Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pura dan Senderan di Pura Hyangaluh Besakih pada Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pada Dinas PUPRKIM Kab. Karangasem Sumber Dana APBD TA. 2025	249.795.900,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28/10/2025	Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Pakerjaan paket Rehabilitasi Pura Kidulingkreteg Pada Sub. Kegiatan 1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBD TA. 2025	521.687.100,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26/11/2025	Pembayaran Angsuran 1 Sebesar 50% (Lima Puluh) Persen Atas Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pura dan Senderan di Pura Hyangaluh Besakih Pada Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBD Kab. Karangasem TA. 2025	124.897.950,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19/12/2025	Pembayaran Angsuran II Sekaligus 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pura dan Senderan di Pura Hyangaluh Besakih Pada Sub Keg 1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBD TA. 2025	457.959.150,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31/12/2025	Pemb.Termin 1 Sebesar 84%(Delapan Puluh Empat)Persen Pek.Paket Rehabilitasi Pura Kidulingkreteg Untuk Sub.Keg.1.03.09.2.01.0008 Pd.Sumber Dana APBD Kab. Karangasem TA. 2025	852.088.930,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31/12/2025	Pembayaran Sekaligs sebesar 100% atas Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Pura dan Senderan di Pura Hyangaluh Besakih Pada Sub Keg. 1.03.09.2.01.0008 Pada Sumber Dana APBD TA. 2025	59.743.000,00

No	OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
a	b	c	d	e
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31/12/2025	Pembayaran Sekaligus Sebesar 100% atas Pelaksanaan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pura Kidulingkreteg Pada Sub Keg.1.03.09.2.01.0008 Pada Smber Dana APBD TA. 2025	99.867.000,00
JUMLAH				**2.553.141.030,00**
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	03/11/2025	Pemberian Dana Hibah Uang Kepada Kelompok Pengelolaan Penglukatan Sapta Gangga Pura Tirta Empul Desa Pertima Timbrah untuk Subkeg. 1.04.05.2.01.0003 di DPUPRKIM Kab. Karangasem, sesuai SK Bupati, Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah TA 2025	250.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	03/11/2025	Pemberian Dana Hibah Uang Kepada Kelompok Sadar Wisata Sthiti Rana Mangguh Ayu untuk Subkeg. 1.04.05.2.01.0003 di DPUPRKIM Kab. Karangasem, sesuai SK Bupati, Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah TA 2025	30.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	03/11/2025	Pemberian Dana Hibah Uang Kepada Kelompok Pasraman Sabda Palon untuk Subkeg. 1.04.05.2.01.0003 di DPUPRKIM Kab. Karangasem, sesuai SK Bupati, Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah TA 2025	100.000.000,00
JUMLAH				**380.000.000,00**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d/c*100%
I	**Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu**	**-**	**-**	**-**
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	0,00
II	**Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga**	**3.195.000.000,00**	**3.030.000.000,00**	**94,84**
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.195.000.000,00	3.030.000.000,00	94,84
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**3.195.000.000,00**	**3.030.000.000,00**	**94,84**

Rekapitulasi Bantuan Sosial Berupa Barang per 31 Desember 2025

No.	SP2D					Surat Keputusan Bupati			
	Uraian	Reff.	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nama Penerima
1	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (3 Unit) Desa Tulamben		51.'07/04.0/000402/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	90.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Wayan Dana
2	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (3 Unit) Desa Tulamben		51.'07/04.0/000402/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	90.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Kadek Alit Wahana Putra
3	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (3 Unit) Desa Tulamben		51.'07/04.0/000402/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	90.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Made Diana
4	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (1 Unit) Desa Seraya Barat		51.'07/04.0/000376/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/3/2025	30.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Wayan Mardiana
5	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (4 Unit) Kel. Subagan		51.'07/04.0/000406/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	120.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Nengah Budiarta
6	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (4 Unit) Kel. Subagan		51.'07/04.0/000406/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	120.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Wayan Nuradi
7	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (4 Unit) Kel. Subagan		51.'07/04.0/000406/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	120.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Gede Wiryajana
8	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (4 Unit) Kel. Subagan		51.'07/04.0/000406/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	120.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Ketut Alit
9	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (2 Unit) Desa Tegalinggah		51.'07/04.0/000378/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/3/2025	60.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	Ni Nyoman Rasmin
10	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (2 Unit) Desa Tegalinggah		51.'07/04.0/000378/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/3/2025	60.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	Ni Nengah Sari

No.	Penerima Bantuan							OPD *Leading Sector*	Pertanggungjawaban	
	Nomor Proposal /Tanggal	Kecamatan	Tanggal Diserahkan Bantuan	Cara Pemberian Bantuan						
				Tunai/ Transfer	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Nilai Bantuan (Rp)		Tanggal	Nilai LPJ (Rp)
1	409/III/2025 27 Maret 2025	Kubu	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15898-1	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Tulamben	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	90.000.000
2	409/III/2025 27 Maret 2025	Kubu	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15898-1	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Tulamben	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	90.000.000
3	409/III/2025 27 Maret 2025	Kubu	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15898-1	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Tulamben	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	90.000.000
4	105/SB/III/2025 26 Maret 2025	Karangasem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.55495-2	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Seraya Barat	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	30.000.000
5	400.10.4.1/76/Kel.Subagan/2025 26 Maret 2025	Karangasem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15896-6	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Kel. Subagan	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	120.000.000
6	400.10.4.1/76/Kel.Subagan/2025 26 Maret 2025	Karangasem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15896-6	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Kel. Subagan	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	120.000.000
7	400.10.4.1/76/Kel.Subagan/2025 26 Maret 2025	Karangasem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15896-6	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Kel. Subagan	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	120.000.000
8	400.10.4.1/76/Kel.Subagan/2025 26 Maret 2025	Karangasem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15896-6	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Kel. Subagan	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	120.000.000
9	400/487VII/2025 8 Juli 2025	Karangasem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15835-6	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Tegalinggah	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	60.000.000
10	400/487VII/2025 8 Juli 2025	Karangasem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15835-6	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Tegalinggah	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	60.000.000

No.	SP2D					Surat Keputusan Bupati			
	Uraian	Reff.	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nama Penerima
11	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (2 Unit) Desa Bukit		51.'07/04.0/000377/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/3/2025	60.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Wayan Dek Warga Yasa
12	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (2 Unit) Desa Bukit		51.'07/04.0/000377/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/3/2025	60.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	Gusti Putu Ariasa
13	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (1 Unit) Kel Karangasem		51.'07/04.0/000405/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	30.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Wayan Sudiantara
14	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (4 Unit) Desa Besakih		51.'07/04.0/000404/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	120.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Wayan Merta
15	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (4 Unit) Desa Besakih		51.'07/04.0/000404/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	120.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Kadek Fendi
16	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (4 Unit) Desa Besakih		51.'07/04.0/000404/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	120.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Wayan Darta
17	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (4 Unit) Desa Besakih		51.'07/04.0/000404/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	120.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Putu Agus Saputra
18	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (2 Unit) Desa Pempatan		51.'07/04.0/000401/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR4/11/2025	11/10/2025	60.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Ketut Mulih
19	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (2 Unit) Desa Pempatan		51.'07/04.0/000401/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR4/11/2025	11/10/2025	60.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Komang Budiartana
20	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (1 Unit) Desa Sangkan Gunung		51.'07/04.0/000579/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PP32/11/2025	11/3/2025	30.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Komang Agus Saputra
21	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (1 Unit) Desa Bunutan		51.'07/04.0/000400/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	30.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Wayan Armida
22	Pembayaran sebesar 100% Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga (1 Unit) Desa Jungutan		51.'07/04.0/000403/LS/1.03.1.04.2.1 0.14.0000/PPR3/11/2025	11/10/2025	30.000.000	409/HK/2025	23-Sep-25	**30.000.000**	I Made Kawi
	Jumlah							**660.000.000**	

No.	Penerima Bantuan							OPD *Leading Sector*	Pertanggungjawaban	
	Nomor Proposal /Tanggal	Kecamatan	Tanggal Diserahkan Bantuan	Cara Pemberian Bantuan					Tanggal	Nilai LPJ (Rp)
				Tunai/ Transfer	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Nilai Bantuan (Rp)			
11	400/508/VI/2022 28 Juni 2022	Karangasem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.55478-2	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Bukit	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	60.000.000
12	400/508/VI/2022 28 Juni 2022	Karangasem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.55478-2	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Bukit	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	60.000.000
13	045./18/Kr.Asem/2025 31 Januari 2025	Karangasem	12/30/2025	Transfer	053.02.02.03728-4	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Kel.Karangasem	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	30.000.000
14	01/DB/V/2025 5 Mei 2025	Rendang	12/30/2025	Transfer	051.02.02.89266-4	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Besakih	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	120.000.000
15	01/DB/V/2025 5 Mei 2025	Rendang	12/30/2025	Transfer	051.02.02.89266-4	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Besakih	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	120.000.000
16	01/DB/V/2025 5 Mei 2025	Rendang	12/30/2025	Transfer	051.02.02.89266-4	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Besakih	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	120.000.000
17	01/DB/V/2025 5 Mei 2025	Rendang	12/30/2025	Transfer	051.02.02.89266-4	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Besakih	**30.000.000**	DPUPRKIM	12/15/2025	120.000.000
18	01/DP/V/2025 5 Mei 2025	Rendang	12/30/2025	Transfer	051.02.02.01294-0	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Pempatan	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	60.000.000
19	01/DP/V/2025 5 Mei 2025	Rendang	12/30/2025	Transfer	051.02.02.01294-0	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Pempatan	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	60.000.000
20	01/DSG/V/2025 5 Mei 2025	Sidemen	12/30/2025	Transfer	025.02.02.12779-6	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sangkan Gunung	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	30.000.000
21	140/105/Kesra 17 Juni 2025	Abang	12/30/2025	Transfer	022.02.02.55517-6	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Bunutan	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	30.000.000
22	243/II/Jung/2023 27 Pebruari 2023	Bebandem	12/30/2025	Transfer	022.02.02.15858-8	Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Desa Jungutan	**30.000.000**	DPUPRKIM	11/15/2025	30.000.000
							660.000.000			

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA KELUARGA KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SUMBER DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
7	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
8	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
9	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
10	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
11	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
12	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
13	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
14	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
1	10	11	12	13	14	15	16	17
1	I Komang Widiantara	Br. Dinas Ambengan	Nongan	Rendang	051.02.33.03389-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
2	Ni Kadek Seni	Br. Dinas Pemuteran	Pempatan	Rendang	051.02.22.03392-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
3	Nyoman Cole	Br. Dinas Pemuteran	Pempatan	Rendang	051.02.22.01307-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
4	Ni Ketut Sukarmi	Br. Dinas Langsat	Rendang	Rendang	051.02.22.03388-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
5	Dewa Ayu Ketut Balik	Br. Dinas Pesaban Kawan	Pesaban	Rendang	051.02.22.03390-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
6	I Nengah Rena	Br. Dinas Kunyit	Besakih	Rendang	051.02.22.03391-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
7	I Wayan Mupu	Br. Dinas Mijil	Sangkan Gunung	Sidemen	025.02.22.08480-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
8	I Wayan Budiada	Br. Dinas Ipah	Sangkan Gunung	Sidemen	025.02.22.084823	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
9	I Wayan Dugdug	Br. Dinas Dukuh	Sangkan Gunung	Sidemen	025.02.22.08478-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
10	Ni Ketut Racik	Br. Dinas Tabu	Tangkup	Sidemen	025.02.22.08477-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
11	I Gusti Ngurah Ambawa	Br. Dinas Tebola	Sidemen	Sidemen	025.02.22.08475-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
12	I Gusti Agung Jaya	Br. Dinas Tebola	Sidemen	Sidemen	025.02.22.08479-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
13	I Gusti Bagus Putra	Br. Dinas Tebola	Sidemen	Sidemen	025.02.22.08481-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
14	I Gusti Ngurah Wedayana	Br. Dinas Tebola	Sidemen	Sidemen	025.02.22.08474-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
15	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
16	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
17	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
18	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
19	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
20	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
21	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
22	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
23	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
24	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
25	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
26	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
27	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
28	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
29	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
30	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
31	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
15	I Gusti Lanang Mantra	Br. Dinas Tebola	Sidemen	Sidemen	025.02.22.08476-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
16	I Nyoman Ngantia	Br. Dinas Umasari Kauh	Pering Sari	Selat	025.02.22.08464-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
17	I Gusti Ngurah Pujawan	Br. Dinas Padangaji Tengah	Pering Sari	Selat	025.02.22.08465-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
18	Ni Wayan Jebel	Br. Dinas Umasari Kangin	Pering Sari	Selat	025.02.22.08463-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
19	I Gusti Bagus Yustiawan	Br. Dinas Padangaji Tengah	Pering Sari	Selat	025.02.22.08471-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
20	I Nyoman Dadi	Br. Dinas Umasari Kangin	Pering Sari	Selat	025.02.22.08466-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
21	Ni Ketut Sari	Br. Dinas Muncan	Muncan	Selat	025.02.22.08468-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
22	I Kadek Ardana	Br. Dinas Perangsari Kelod	Duda Utara	Selat	025.02.22.08467-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
23	I Wayan Merta	Br. Dinas Wates Kangin	Duda Timur	Selat	025.02.22.08472-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
24	I Gede Wandra Eldy	Br. Juwuk Legi	Duda Timur	Selat	025.02.22.08470-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
25	I Gusti Lanang Alit	Br. Dinas Padang Tunggal Kangin	Duda	Selat	025.02.22.08473-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
26	Ni Nyoman Rai	jln sultan angung Ling. Pendem	Karangasem	Karangasem	022.02.22.00542-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
27	Ni Nyoman Merta Sari	Lingk. Penaban	Karangasem	Karangasem	022.02.22.00545-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
28	Muhali	Karangtebu Belong	Karangasem	Karangasem	022.02.22.00608-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
29	Ni Komang Rema	Lingk. Juuk Manis	Karangasem	Karangasem	022.02.22.00500-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
30	I Gusti Bagus Sebut Wijaya	Lingkungan Kodok Darsana	Karangasem	Karangasem	022.02.22.00078-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
31	I Nyoman Subrata	Lingkungan Kodok Darsana	Karangasem	Karangasem	022.02.22.00548-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
32	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
33	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
34	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
35	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
36	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
37	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
38	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
39	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
40	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
41	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
42	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
43	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
44	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
45	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
46	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
47	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
48	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
32	Ni Made Sari	Lingkungan Celuknegara	Karangasem	Karangasem	022.02.22.00506-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
33	I Putu Suantara	Lingkungan Kodok Darsana	Karangasem	Karangasem	022.02.22.00511-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
34	Ni Komang Sari	Lingkungan Pangi	Karangasem	Karangasem	022.02.22.00494-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
35	I Gusti Made Jelantik	Ling. Padangkerta Tengah	Padangkerta	Karangasem	053.02.22.00262-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
36	I Gusti Made Rai Eyet	Ling. Padangkerta Kaler	Padangkerta	Karangasem	053.02.22.00261-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
37	I Gusti Ketut Kelodan	Lingkungan Genteng	Subagan	Karangasem	022.02.22.00083-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
38	I Gusti Putu Tinon	Lingkungan Tengah	Subagan	Karangasem	022.02.22.00585-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
39	I Komang Rimawa	Lingkungan Br Galiran	Subagan	Karangasem	022.02.22.00080-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
40	I Wayan Witana	Lingkungan Galiran Kelod	Subagan	Karangasem	022.02.22.00505-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
41	I Wayan Dana	Lingkungan Galiran	Subagan	Karangasem	022.02.22.00071-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
42	I Gusti Ngurah Kaler	Lingkungan Gede	Subagan	Karangasem	022.02.22.00077-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
43	I Gusti Made Sudarsana	Lingkungan Banjar Gede	Subagan	Karangasem	022.02.22.00529-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
44	I Ketut Merta	Lingkungan Tengah	Subagan	Karangasem	022.02.22.00086-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
45	Ni Made Geria	Jalan Salak Subagan	Subagan	Karangasem	022.02.22.00064-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
46	I Gede Julung	Lingkungan Tengah	Subagan	Karangasem	022.02.22.00055-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
47	I Gusti Nyoman Sayang	Lingkungan Gede	Subagan	Karangasem	022.02.22.00066-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
48	I Gusti Ketut Merta Wiri	Lingkungan Genteng	Subagan	Karangasem	022.02.22.00497-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
49	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
50	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
51	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
52	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
53	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
54	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
55	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
56	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
57	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
58	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
59	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
60	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
61	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
62	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
63	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
64	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
65	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
49	Ni Ketut Tambun	Lingkungan Genteng	Subagan	Karangasem	022.02.22.00075-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
50	I Gusti Ngurah Panca Negara	Lingkungan Br. Genteng	Subagan	Karangasem	022.02.22.00495-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
51	I Gusti Putu Alit Beleleng	Lingkungan Gede	Subagan	Karangasem	022.02.22.00082-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
52	I Wayan Sugianto	Br Dinas Benasari	Seraya	Karangasem	053.02.22.00244-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
53	I Wayan Adi Putra	Br Dinas Yeh Kali	Seraya	Karangasem	053.02.22.00242-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
54	I Wayan Sumada	Br Dinas Yeh Kali	Seraya	Karangasem	053.02.22.00241-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
55	I Komang Pariyasa	Br Dinas Yeh Kali	Seraya	Karangasem	053.02.22.00246-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
56	I Wayan Putu Suwidiantara	Br Dinas Taman	Seraya	Karangasem	053.02.22.00247-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
57	I Made Sadra	Br Dinas Taman	Seraya	Karangasem	053.02.22.00248-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
58	I Komang Lebih	Br Dinas Peninggaran	Seraya	Karangasem	053.02.22.00249-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
59	I Kadek Darma	Br. Dinas Benasari	Seraya	Karangasem	053.02.22.00245-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
60	I Wayan Putrawan	Br. Dinas Yeh Kali	Seraya	Karangasem	053.02.22.00271-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
61	I Nengah Suladra	Br. Dinas Yeh Kali	Seraya	Karangasem	053.02.22.00243-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
62	I Kadek Ari	Br Dinas Bungkulan	Seraya Barat	Karangasem	053.02.22.00251-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
63	I Wayan Kasih	Br Dinas Dauh Pangkung	Seraya Barat	Karangasem	053.02.22.00270-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
64	Ni Wayan Semita	Br Dinas Merajan	Seraya Barat	Karangasem	053.02.22.00269-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
65	I Nengah Suteja	Br. Dinas Pesiatin Kaler	Seraya Barat	Karangasem	053.02.22.00250-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
66	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
67	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
68	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
69	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
70	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
71	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
72	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
73	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
74	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
75	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
76	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
77	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
78	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
79	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
80	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
81	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
66	I Komang Dama	Br Dinas Ujung Tengah	Tumbu	Karangasem	053.02.22.00266-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
67	I Nyoman Mandana	Br Dinas Ujung Tengah	Tumbu	Karangasem	053.02.22.00255-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
68	I Komang Pura	Br Dinas Ujung Tengah	Tumbu	Karangasem	053.02.22.00256-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
69	I Kadek Deni Ariawan	Br Dinas Tumbu Kaler	Tumbu	Karangasem	053.02.22.00252-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
70	I Ketut Warsika	Br. Dinas Tumbu Kaler	Tumbu	Karangasem	053.02.22.00257-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
71	Ni Nyoman Kideh	Br. Dinas Ujung Tengah	Tumbu	Karangasem	053.02.22.00265-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
72	I Made Gatra	Br. Dinas Ujung Tengah	Tumbu	Karangasem	053.02.22.00253-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
73	Ni Ketut Suartini	Br. Dinas Ujung Tengah	Tumbu	Karangasem	053.02.22.00254-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
74	I Gusti Made Kasna	Br Dinas Perasi Tengah	Pertima	Karangasem	053.02.22.00264-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
75	I Gede Agust Mahardika Yudha Negara	Br. Dinas Asak Kawan	Pertima	Karangasem	053.02.22.00263-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
76	I Wayan Arya Wiguna	Br. Dinas Asak Kangin	Pertima	Karangasem	053.02.22.00268-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
77	I Nengah Putra	Br. Dinas Tukad Buah	Seraya Timur	Karangasem	053.02.22.00258-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
78	I Wayan Beteng	Br. Dinas Gili Selang	Seraya Timur	Karangasem	053.02.22.00267-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
79	I Wayan Landep	Br. Dinas Gili Selang	Seraya Timur	Karangasem	053.02.22.00259-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
80	I Wayan Jelantik	Br. Dinas Gili Selang	Seraya Timur	Karangasem	053.02.22.00260-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
81	I Nengah Sudiarsa	Br. Dinas Jumenang	Bukit	Karangasem	022.02.22.00513-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
82	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
83	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
84	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
85	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
86	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
87	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
88	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
89	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
90	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
91	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
92	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
93	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
94	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
95	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
96	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
97	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
82	Gusti Gede Oka	Br. Dinas Kebon Bukit	Bukit	Karangasem	022.02.22.00514-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
83	Sainunah	Br. Dinas Kampung Anyar	Bukit	Karangasem	022.02.22.00524-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
84	I Wayan Suparta	Br. Dinas Batugunung	Bukit	Karangasem	022.02.22.00517-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
85	I Made Runa	Br. Dinas Bukit Kaler	Bukit	Karangasem	022.02.22.00526-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
86	Alinah	Br. Dinas Tibulaka Sasak	Bukit	Karangasem	022.02.22.00510-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
87	Ani Hidayatus Soleha	Br. Dinas Bukit Tabuan	Bukit	Karangasem	022.02.22.00515-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
88	Sarudin	Br. Dinas Tiingjangkrik	Bukit	Karangasem	022.02.22.00516-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
89	Suparman	Br. Dinas Karangsasak	Bukit	Karangasem	022.02.22.00547-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
90	I Ketut Kasning	Br. Dinas Bukit Kelod	Bukit	Karangasem	022.02.22.00559-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
91	I Kadek Arimbawa	Br. Dinas Tibulaka Bali	Bukit	Karangasem	022.02.22.00549-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
92	I Ketut Budiarta	Br. Dinas Sekargunung Kaler	Bukit	Karangasem	022.02.22.00551-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
93	I Nyoman Sukerti	Br. Dinas Sekargunung Kelod	Bukit	Karangasem	022.02.22.00553-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
94	I Ketut Mangku Diana	Br Dinas Tihingan Kauh	Bebandem	Bebandem	022.02.22.00029-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
95	I Nengah Putu	Br Dinas Tihingan Kauh	Bebandem	Bebandem	022.02.22.00034-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
96	Ni Nengah Lipet	Br Dinas Tihingan Kauh	Bebandem	Bebandem	022.02.22.00043-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
97	I Wayan Sudarma	Br Dinas Pandesari	Bebandem	Bebandem	022.02.22.00035-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
98	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
99	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
100	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
101	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
102	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
103	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
104	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
105	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
106	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
107	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
108	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
109	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
110	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
111	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
112	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
113	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
114	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
98	I Nengah Madeg	Br. Dinas Abiansoan	Bungaya Kangin	Bebandem	022.02.22.00026-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
99	I Komang Sudiana	Br. Dinas Abiansoan	Bungaya Kangin	Bebandem	022.02.22.00017-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
100	I Made Sulendra	Br. Dinas Bedugul	Bhuana Giri	Bebandem	022.02.22.00037-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
101	I Made Gosa	Br. Dinas Kemoning	Bhuana Giri	Bebandem	022.02.22.00041-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
102	I Gede Murdana	Br. Dinas Telutug	Sibetan	Bebandem	022.02.22.00040-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
103	I Putu Leo Ade Chandra	Br. Dinas Telutug	Sibetan	Bebandem	022.02.22.00019-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
104	Ni Nengah Gangsar	BR. Dinas Penginyahan	Tianyar Tengah	Kubu	022.02.22.00047-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
105	I Ketut Sepet	BR. Dinas Penginyahan	Tianyar Tengah	Kubu	022.02.22.00541-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
106	I Gede Kari	BR. Dinas Penginyahan	Tianyar Tengah	Kubu	022.02.22.00011-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
107	Ni Wayan Rahayu	BR. Dinas Penginyahan	Tianyar Tengah	Kubu	022.02.22.00008-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
108	Ni Nyoman Dana	BR. Dinas Penginyahan	Tianyar Tengah	Kubu	022.02.22.00002-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
109	Ni Luh Tajep	BR. Dinas Penginyahan	Tianyar Tengah	Kubu	022.02.22.00010-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
110	I Ketut Mula	BR. Dinas Tunas Sari	Tianyar	Kubu	022.02.22.00530-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
111	Ni Made Payu	BR. Dinas Tunas Sari	Tianyar	Kubu	022.02.22.00048-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
112	I Gede Yasa	BR. Dinas Tunas Sari	Tianyar	Kubu	022.02.22.00045-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
113	I Nengah Ngetis	BR. Dinas Tunas Sari	Tianyar	Kubu	022.02.22.00016-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
114	I Ketut Suplag Arsana	Br Dinas Kayuaya	Sukadana	Kubu	022.02.22.00538-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
115	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
116	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
117	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
118	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
119	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
120	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
121	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
122	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
123	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
124	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
125	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
126	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
127	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
128	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
129	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
130	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
131	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
115	I Nyoman Sueca Jawi	Br Dinas Kayuaya	Sukadana	Kubu	022.02.22.00539-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
116	I Nyoman Urip	Br Dinas Pucang	Ban	Kubu	022.02.22.00535-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
117	I Nyoman Mudana	Br Dinas Daya	Ban	Kubu	022.02.22.00053-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
118	I Nengah Nukari	BR. Dinas Batas	Baturinggit	Kubu	022.02.22.00054-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
119	I Ketut Ngetis	BR. Dinas Batas	Baturinggit	Kubu	022.02.22.00532-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
120	Ni Nyoman Sari Gubar	BR. Dinas Batas	Baturinggit	Kubu	022.02.22.00540-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
121	I Nengah Paum Budiyasa	BR. Dinas Batas	Baturinggit	Kubu	022.02.22.00590-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
122	I Ketut Sudirman	Br Dinas Sambilaklak	Kubu	Kubu	022.02.22.00536-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
123	I Komang Asa	BR. Dinas Bebayu	Labasari	Abang	022.02.22.00561-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
124	Ni Ketut Buda	BR. Dinas Mekar Sari	Labasari	Abang	022.02.22.00564-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
125	Ni Nyoman Werti	BR. Dinas Mekar Sari	Labasari	Abang	022.02.22.00583-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
126	I Komang Sujana	BR. Dinas Lebah	Purwa Kerthi	Abang	022.02.22.00591-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
127	I Gede Putu Sutama	BR. Dinas Karanganyar	Datah	Abang	022.02.22.00576-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
128	Ni Nyoman Srinteg	BR. Dinas Balegede	Datah	Abang	022.02.22.00612-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
129	I Putu Desta Sukartana	BR. Dinas Juwuk	Datah	Abang	022.02.22.00626-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
130	I Nengah Udiana	BR. Dinas Juwuk	Datah	Abang	022.02.22.00620-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
131	I Nengah Yoko	BR. Dinas Juwuk	Datah	Abang	022.02.22.00627-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
132	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
133	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
134	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
135	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
136	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
137	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
138	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
139	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
140	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000436/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	17/11/2025	2.115.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
141	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
142	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
143	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
144	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
145	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
146	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
147	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
148	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
132	I Ketut Putra	Br.Dinas Umanyar	Ababi	Abang	022.02.22.00605-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
133	Ni Wayan Murti	Br.Dinas Umanyar	Ababi	Abang	022.02.22.00566-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
134	Ni Luh Parcani	Br. Dinas Kebon	Kertha Mandala	Abang	022.02.22.00592-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
135	I Wayan Suardi	Br. Dinas Tauman	Nyuhtebel	Manggis	038.02.22.00007-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
136	I Nengah Windra	Br. Dinas Karanganyar	Nyuhtebel	Manggis	038.02.22.00003-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
137	I Nengah Muliasih	Br. Dinas Kanginan	Pesedahan	Manggis	038.02.22.00006-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
138	I Nyoman Winadi	Br. Dinas Kanginan	Pesedahan	Manggis	038.02.22.00005-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
139	I Wayan Muarsa	Br. Dinas Kanginan	Pesedahan	Manggis	038.02.22.00001-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
140	Ni Ketut Manis	Br. Dinas Kaler	Antiga	Manggis	038.02.22.00004-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
141	I Komang Sujana	BR. Dinas Kedampal	Datah	Abang	022.02.22.00638-9	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
142	I Wayan Slamet	BR. Dinas Karanganyar	Datah	Abang	022.02.22.00629-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
143	I Gede Merta	BR. Dinas Tengah	Datah	Abang	022.02.22.00637-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
144	I Made Arnata	BR. Dinas Tengah	Datah	Abang	022.02.22.00597-0	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
145	I Komang Astrawan	BR. Dinas Tengah	Datah	Abang	022.02.22.00588-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
146	I Nengah Darni	BR. Dinas Asah Teben	Datah	Abang	022.02.22.00630-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
147	I Nengah Suastika	BR. Dinas Tengah	Datah	Abang	022.02.22.00640-6	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
148	I Gede Kasta	Br. Dinas Asah Teben	Datah	Abang	022.02.22.00595-7	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00

NO	SP2D					SURAT KEPUTUSAN BUPATI		
	URAIAN	Reff.	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)
149	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
150	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000444/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	21/11/2025	150.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
151	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000457/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	25/11/2025	120.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
152	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000457/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	25/11/2025	120.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
153	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000457/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	25/11/2025	120.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
154	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000457/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	25/11/2025	120.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
155	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000457/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	25/11/2025	120.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
156	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000457/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	25/11/2025	120.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
157	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000457/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	25/11/2025	120.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
158	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		51.'07/04.0/000457/LS/1.03.1.04.2.10.14.0000/PPR3/11/2025	25/11/2025	120.000.000,00	410/HK/2025	9/23/2025	15.000.000,00
	Jumlah							**2.370.000.000,00**

NO	PENERIMA BANTUAN							
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	REKENING	BIAYA BAHAN (Rp)	ONGKOS TUKANG (Rp)	JUMLAH DITERIMA
149	I Wayan Udiana	Br. Dinas Asah Teben	Datah	Abang	022.02.22.00636-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
150	I Wayan Suta	Br. Dinas Asah Teben	Datah	Abang	022.02.22.00635-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
151	I Nyoman Adiarta	BR. Dinas Juwuk	Datah	Abang	022.02.22.00668-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
152	I Nyoman Kerana	BR. Dinas Kedampal	Datah	Abang	022.02.22.00663-8	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
153	I Nengah Sukerata	BR. Dinas Kedampal	Datah	Abang	022.02.22.00661-4	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
154	I Wayan Narmi	BR. Dinas Kedampal	Datah	Abang	022.02.02.00670-5	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
155	I Wayan Ariana	BR. Dinas Kedampal	Datah	Abang	022.02.22.00657-3	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
156	I Gede Udiana	BR. Dinas Asah Teben	Datah	Abang	022.02.22.00642-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
157	I Gede Pastika	BR. Dinas Tengah	Datah	Abang	022.02.22.00647-1	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
158	I Kadek Sudarya	BR. Dinas Wates	Datah	Abang	022.02.22.00643-2	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
	Jumlah					**1.975.000.000,00**	**395.000.000,00**	**2.370.000.000,00**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	Anggaran						
		Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i = c+d+e+f+g+h
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	21.948.392.447,00	12.017.279.400,00	50.100.000,00	2.174.409.133,00	-	**36.190.180.980,00**
2	Dinas Kesehatan	-	9.390.369.610,00	7.281.311.242,00	2.900.000.000,00	-	-	**19.571.680.852,00**
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00	313.827.100,00	1.433.305.950,00	34.450.649.280,00	-	-	**36.497.782.330,00**
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	1.674.631.800,00	1.005.000.000,00	-	-	-	**2.679.631.800,00**
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	1.900.000.000,00	-	-	-	-	**1.900.000.000,00**
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	107.732.000,00	-	-	-	-	**107.732.000,00**
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	39.830.088,00	100.000.000,00	-	-	-	**139.830.088,00**
8	Dinas Ketenagakerjaan	-	54.300.000,00	476.000.000,00	-	-	-	**530.300.000,00**
9	Dinas Lingkungan Hidup	-	11.221.331.062,00	-	540.000.000,00	-	-	**11.761.331.062,00**
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	**-**
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	27.088.100,00	-	-	-	-	**27.088.100,00**
12	Dinas Perhubungan	-	734.644.823,00	496.000.000,00	992.625.000,00	-	21.170.959,00	**2.244.440.782,00**
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	7.825.100.000,00	-	-	-	-	**7.825.100.000,00**
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	242.409.200,00	-	-	-	-	**242.409.200,00**
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	749.692.700,00	-	-	-	-	**749.692.700,00**
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	5.000.000,00	-	-	-	-	**5.000.000,00**
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	280.000.000,00	186.600.791,00	-	-	-	**466.600.791,00**
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	-	76.850.000,00	-	-	-	-	**76.850.000,00**
19	Sekretariat Daerah	-	2.391.997.450,00	96.000.000,00	-	-	100.000.000,00	**2.587.997.450,00**
20	Sekretariat DPRD	-	2.792.750.912,00	125.000.000,00	-	100.000.000,00	-	**3.017.750.912,00**
21	Badan Perencanaan Daerah	-	245.118.400,00	-	-	-	-	**245.118.400,00**
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	326.884.000,00	550.000.000,00	-	-	-	**876.884.000,00**
23	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	**-**
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	109.967.600,00	129.470.000,00	-	-	-	**239.437.600,00**
25	Inspektorat	-	250.024.500,00	80.000.000,00	50.000.000,00	-	-	**380.024.500,00**
26	Kecamatan Karangasem	-	178.100.000,00	-	161.707.500,00	-	-	**339.807.500,00**
27	Kecamatan Abang	-	3.782.200,00	-	-	-	-	**3.782.200,00**
28	Kecamatan Kubu	-	14.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	**214.000.000,00**
29	Kecamatan Bebandem	-	36.540.000,00	-	-	-	-	**36.540.000,00**
30	Kecamatan Selat	-	-	346.393.187,00	-	-	-	**346.393.187,00**
31	Kecamatan Rendang	-	50.800.000,00	400.000.000,00	-	-	-	**450.800.000,00**
32	Kecamatan Sidemen	-	96.466.666,00	-	-	-	-	**96.466.666,00**
33	Kecamatan Manggis	-	17.500.000,00	-	-	-	-	**17.500.000,00**
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	28.313.500,00	-	-	-	-	**28.313.500,00**
								-
Jumlah		**300.000.000,00**	**63.133.444.158,00**	**24.922.360.570,00**	**39.145.081.780,00**	**2.274.409.133,00**	**121.170.959,00**	**129.896.466.600,00**

No	OPD	Realisasi						
		Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	Total
a	b	j	k	l	m	n	o	p = j + k + l + m + n
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	20.725.936.276,00	11.072.791.406,08	-	1.000.877.432,00	-	**32.799.605.114,08**
2	Dinas Kesehatan	-	7.634.119.118,00	6.435.243.687,12	2.850.480.000,00	-	-	**16.919.842.805,12**
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	298.706.550,00	1.284.291.440,00	33.924.438.406,00	-	-	**35.507.436.396,00**
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	1.577.970.198,00	742.621.384,69	-	-	-	**2.320.591.582,69**
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	1.883.330.000,00	-	-	-	-	**1.883.330.000,00**
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	88.014.999,00	-	-	-	-	**88.014.999,00**
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	39.127.234,00	97.958.281,44	-	-	-	**137.085.515,44**
8	Dinas Ketenagakerjaan	-	50.407.002,00	473.772.565,40	-	-	-	**524.179.567,40**
9	Dinas Lingkungan Hidup	-	11.004.358.983,00	-	510.694.154,15	-	-	**11.515.053.137,15**
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	**-**
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	22.950.000,00	-	-	-	-	**22.950.000,00**
12	Dinas Perhubungan	-	660.795.459,00	492.839.000,00	835.235.903,00	-	19.647.000,00	**2.008.517.362,00**
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	7.748.465.000,00	-	-	-	-	**7.748.465.000,00**
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	218.342.853,00	-	-	-	-	**218.342.853,00**
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	728.421.248,00	-	-	-	-	**728.421.248,00**
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	4.999.999,00	-	-	-	-	**4.999.999,00**
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	268.899.992,00	184.508.296,40	-	-	-	**453.408.288,40**
18	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	-	67.455.672,00	-	-	-	-	**67.455.672,00**
19	Sekretariat Daerah	-	2.027.113.906,00	94.550.581,00	-	-	-	**2.121.664.487,00**
20	Sekretariat DPRD	-	2.328.080.928,00	124.003.722,00	-	95.516.610,00	-	**2.547.601.260,00**
21	Badan Perencanaan Daerah	-	212.743.249,00	-	-	-	-	**212.743.249,00**
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	188.126.201,00	498.465.431,52	-	-	-	**686.591.632,52**
23	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	**-**
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	85.720.700,00	128.160.141,18	-	-	-	**213.880.841,18**
25	Inspektorat	-	201.545.702,00	79.778.144,00	49.888.950,00	-	-	**331.212.796,00**
26	Kecamatan Karangasem	-	162.907.950,00	-	143.856.000,00	-	-	**306.763.950,00**
27	Kecamatan Abang	-	-	-	-	-	-	**-**
28	Kecamatan Kubu	-	12.112.500,00	198.942.850,00	-	-	-	**211.055.350,00**
29	Kecamatan Bebandem	-	36.300.000,00	-	-	-	-	**36.300.000,00**
30	Kecamatan Selat	-	-	344.141.558,00	-	-	-	**344.141.558,00**
31	Kecamatan Rendang	-	39.139.821,00	398.185.210,00	-	-	-	**437.325.031,00**
32	Kecamatan Sidemen	-	85.796.700,00	-	-	-	-	**85.796.700,00**
33	Kecamatan Manggis	-	13.650.000,00	-	-	-	-	**13.650.000,00**
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	23.750.000,00	-	-	-	-	**23.750.000,00**
								-
Jumlah		**-**	**58.439.288.240,00**	**22.650.253.698,83**	**38.314.593.413,15**	**1.096.394.042,00**	**19.647.000,00**	**120.520.176.393,98**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
I	**Belanja Modal Alat Besar**	**215.307.728,00**	**208.014.000,00**	**96,61**
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.000.000,00	94.960.500,00	94,96
2	Dinas Lingkungan Hidup	108.979.728,00	107.226.000,00	98,39
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.328.000,00	5.827.500,00	92,09
II	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**7.066.720.000,00**	**6.625.695.503,00**	**93,76**
1	Dinas Kesehatan	1.462.500.000,00	1.305.000.001,00	89,23
2	Satuan Polisi Pamong Praja	746.000.000,00	686.606.999,00	92,04
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.900.000.000,00	1.883.330.000,00	99,12
4	Dinas Lingkungan Hidup	2.958.220.000,00	2.750.758.503,00	92,99
III	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**16.438.000,00**	**10.851.000,00**	**66,01**
1	Satuan Polisi Pamong Praja	16.438.000,00	10.851.000,00	66,01
IV	**Belanja Modal Alat Pertanian**	**8.100.000.000,00**	**8.095.252.200,00**	**99,94**
1	Dinas Lingkungan Hidup	8.100.000.000,00	8.095.252.200,00	99,94
V	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**7.542.655.581,00**	**6.664.495.819,00**	**88,36**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.783.298.530,00	2.535.957.606,00	91,11
2	Dinas Kesehatan	20.473.433,00	19.358.400,00	94,55
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	85.844.200,00	81.918.000,00	95,43
4	Satuan Polisi Pamong Praja	693.296.700,00	666.892.699,00	96,19
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.555.700,00	19.369.500,00	99,05
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.000.000,00	38.599.984,00	98,97
7	Dinas Ketenagakerjaan	36.800.000,00	33.800.002,00	91,85
8	Dinas Lingkungan Hidup	46.631.334,00	43.697.280,00	93,71
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.088.100,00	7.050.000,00	99,46
10	Dinas Perhubungan	139.843.622,00	89.577.000,00	64,06
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	217.909.200,00	194.550.003,00	89,28
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.830.600,00	6.350.000,00	64,59
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.000.000,00	4.999.999,00	100,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	210.000.000,00	206.399.993,00	98,29
15	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	12.763.000,00	12.737.673,00	99,80
16	Sekretariat Daerah	911.676.900,00	697.012.878,00	76,45
17	Sekretariat DPRD	1.496.949.796,00	1.312.564.128,00	87,68
18	Badan Perencanaan Daerah	105.110.400,00	97.460.000,00	92,72
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	185.762.600,00	145.036.001,00	78,08
20	Badan Riset dan Inovasi Daerah	64.362.800,00	52.970.700,00	82,30
21	Inspektorat	171.342.900,00	148.842.902,00	86,87
22	Kecamatan Karangasem	142.100.000,00	131.107.950,00	92,26
23	Kecamatan Rendang	50.800.000,00	39.139.821,00	77,05
24	Kecamatan Sidemen	68.902.266,00	63.303.300,00	91,87
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.313.500,00	15.800.000,00	86,28
VI	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**11.510.224.666,00**	**10.987.868.626,00**	**95,46**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	747.345.001,00	703.643.098,00	94,15
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.000.000,00	13.375.500,00	83,60
3	Satuan Polisi Pamong Praja	18.681.600,00	16.983.000,00	90,91
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	830.088,00	527.250,00	63,52
5	Dinas Perhubungan	116.169.167,00	106.920.000,00	92,04
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.825.100.000,00	7.748.465.000,00	99,02
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	722.862.100,00	705.448.998,00	97,59
8	Sekretariat Daerah	1.090.530.000,00	990.139.980,00	90,79

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
9	Sekretariat DPRD	898.938.610,00	664.201.800,00	73,89
10	Badan Perencanaan Daerah	31.334.900,00	21.645.000,00	69,08
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24.793.400,00	-	0,00
12	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.564.800,00	7.750.000,00	90,49
13	Inspektorat	9.075.000,00	8.769.000,00	96,63
VII	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**218.244.962,00**	**161.512.658,00**	**74,01**
1	Dinas Kesehatan	218.244.962,00	161.512.658,00	94,42
VIII	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**2.525.757.800,00**	**1.812.577.826,00**	**71,76**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.335.000.000,00	702.352.826,00	52,61
2	Dinas Kesehatan	1.190.757.800,00	1.110.225.000,00	93,24
IX	**Belanja Modal Komputer**	**2.678.964.187,00**	**2.204.136.219,00**	**82,28**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	391.326.300,00	271.729.226,00	69,44
2	Dinas Kesehatan	318.246.700,00	256.840.650,00	80,70
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	111.982.900,00	108.452.550,00	96,85
4	Satuan Polisi Pamong Praja	200.215.500,00	196.636.500,00	98,21
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88.176.300,00	68.645.499,00	77,85
6	Dinas Ketenagakerjaan	17.500.000,00	16.607.000,00	94,90
7	Dinas Lingkungan Hidup	7.500.000,00	7.425.000,00	99,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	20.000.000,00	15.900.000,00	79,50
9	Dinas Perhubungan	96.300.131,00	94.079.999,00	97,69
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	24.500.000,00	23.792.850,00	97,11
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.000.000,00	16.622.250,00	97,78
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70.000.000,00	62.499.999,00	89,29
13	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	58.857.000,00	49.487.999,00	84,08
14	Sekretariat Daerah	389.790.550,00	339.961.048,00	87,22
15	Sekretariat DPRD	396.862.506,00	351.315.000,00	88,52
16	Badan Perencanaan Daerah	108.673.100,00	93.638.249,00	86,17
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	110.000.000,00	37.262.700,00	33,88
18	Badan Riset dan Inovasi Daerah	37.040.000,00	25.000.000,00	67,49
19	Inspektorat	69.606.600,00	43.933.800,00	63,12
20	Kecamatan Karangasem	36.000.000,00	31.800.000,00	88,33
21	Kecamatan Abang	3.782.200,00	-	0,00
22	Kecamatan Kubu	14.000.000,00	12.112.500,00	86,52
23	Kecamatan Bebandem	36.540.000,00	36.300.000,00	99,34
24	Kecamatan Sidemen	27.564.400,00	22.493.400,00	81,60
25	Kecamatan Manggis	17.500.000,00	13.650.000,00	78,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00	7.950.000,00	79,50
XII	**Belanja Modal Rambu-rambu**	**387.561.903,00**	**375.448.460,00**	**96,87**
1	Dinas Perhubungan	382.331.903,00	370.218.460,00	96,83
2	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	5.230.000,00	5.230.000,00	100,00
XIII	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**348.552.996,00**	**190.864.500,00**	**54,76**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	348.552.996,00	190.864.500,00	54,76
XV	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**	**16.342.869.620,00**	**16.321.389.020,00**	**99,87**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	16.342.869.620,00	16.321.389.020,00	84,16
XVI	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**6.180.146.715,00**	**4.781.182.409,00**	**77,36**
	Dinas Kesehatan	6.180.146.715,00	4.781.182.409,00	**96,67**
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**63.133.444.158,00**	**58.439.288.240,00**	**92,56**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
I	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**16.873.860.570,00**	**15.244.815.130,77**	**90,35**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.994.779.400,00	6.248.887.850,08	89,34
2	Dinas Kesehatan	4.527.311.242,00	4.121.373.692,50	91,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.433.305.950,00	1.284.291.440,00	89,60
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.005.000.000,00	742.621.384,69	73,89
5	Dinas Ketenagakerjaan	400.000.000,00	398.616.410,40	99,65
6	Dinas Perhubungan	496.000.000,00	492.839.000,00	99,36
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	186.600.791,00	184.508.296,40	98,88
8	Sekretariat DPRD	125.000.000,00	124.003.722,00	99,20
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	550.000.000,00	498.465.431,52	90,63
11	Badan Riset dan Inovasi Daerah	129.470.000,00	128.160.141,18	98,99
12	Inspektorat	80.000.000,00	79.778.144,00	99,72
13	Kecamatan Kubu	200.000.000,00	198.942.850,00	99,47
14	Kecamatan Selat	346.393.187,00	344.141.558,00	99,35
15	Kecamatan Rendang	400.000.000,00	398.185.210,00	99,55
II	**Belanja Modal Monumen**	**196.000.000,00**	**192.508.862,44**	**98,22**
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000.000,00	97.958.281,44	97,96
2	Sekretariat Daerah	96.000.000,00	94.550.581,00	98,49
II	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**7.072.500.000,00**	**6.444.901.698,85**	**91,13**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.022.500.000,00	4.823.903.556,00	96,05
2	Dinas Kesehatan	1.974.000.000,00	1.545.841.987,85	78,31
3	Dinas Ketenagakerjaan	76.000.000,00	75.156.155,00	98,89
IV	**Belanja Gedung dan Bangunan BLUD**	**780.000.000,00**	**768.028.006,77**	**98,47**
1	Dinas Kesehatan	780.000.000,00	768.028.006,77	**99,65**
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**24.922.360.570,00**	**22.650.253.698,83**	**90,88**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
I	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**32.282.048.480,00**	**31.767.134.102,00**	**98,40**
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.282.048.480,00	31.767.134.102,00	98,40
II	**Belanja Modal Bangunan Air**	**1.468.600.800,00**	**1.459.806.190,00**	**99,40**
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.468.600.800,00	1.459.806.190,00	99,40
III	**Belanja Modal Instalasi**	**3.440.000.000,00**	**3.361.174.154,15**	**97,71**
1	Dinas Lingkungan Hidup	540.000.000,00	510.694.154,15	94,57
2	Dinas Kesehatan	2.900.000.000,00	2.850.480.000,00	98,29
IV	**Belanja Modal Jaringan**	**1.954.432.500,00**	**1.726.478.967,00**	**88,34**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	50.100.000,00	-	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	700.000.000,00	697.498.114,00	99,64
3	Dinas Perhubungan	992.625.000,00	835.235.903,00	84,14
4	Inspektorat	50.000.000,00	49.888.950,00	99,78
5	Kecamatan Karangasem	161.707.500,00	143.856.000,00	88,96
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**39.145.081.780,00**	**38.314.593.413,15**	**97,88**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
I	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**1.162.597.701,00**	**-**	**0,00**
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.162.597.701,00	-	0,00
II	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**100.000.000,00**	**95.516.610,00**	**95,52**
1	Sekretariat DPRD	100.000.000,00	95.516.610,00	95,52
III	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP**	**1.011.811.432,00**	**1.000.877.432,00**	**98,92**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.011.811.432,00	1.000.877.432,00	98,92
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**2.274.409.133,00**	**1.096.394.042,00**	**48,21**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	OPD	TA.2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	d	e = d / c * 100%
I	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**	**121.170.959,00**	**19.647.000,00**	**16,21**
1	Dinas Perhubungan	21.170.959,00	19.647.000,00	99,64
2	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	-	0,00
	Jumlah Seluruh Belanja Modal Aset Lainnya	**121.170.959,00**	**19.647.000,00**	**16,21**

Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	Kecamatan / Desa	Pagu		Kurang Salur 2024	Jumlah	PENYALURAN 2025					
		Induk	Perubahan			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
a	d	c	d	e	f + d + e	g	h	i	j	k	l
Kecamatan Rendang											
1	Nongan	518.547.179,00	546.563.402,00	29.136.233,00	575.699.635,00	35.883.464,79	41.483.774,32	37.957.653,50	32.927.745,87	43.039.415,86	51.336.170,72
2	Rendang	567.464.471,00	598.123.611,00	31.884.807,00	630.008.418,00	39.268.541,39	45.397.157,68	41.538.399,28	36.033.993,91	47.099.551,09	56.178.982,63
3	Menanga	602.345.581,00	634.889.289,00	33.844.714,00	668.734.003,00	41.682.314,21	48.187.646,48	44.091.696,53	38.248.944,39	49.994.683,22	59.632.212,52
4	Besakih	673.492.242,00	709.879.883,00	37.842.317,00	747.722.200,00	46.605.663,15	53.879.379,36	49.299.632,11	42.766.757,37	55.899.856,09	66.675.731,96
5	Pempatan	1.007.084.763,00	1.061.495.842,00	56.586.280,00	1.118.082.122,00	69.690.265,60	80.566.781,04	73.718.604,65	63.949.882,45	83.588.035,33	99.701.391,54
6	Pesaban	431.845.431,00	455.177.305,00	24.264.617,00	479.441.922,00	29.883.703,83	34.547.634,48	31.611.085,55	27.422.184,87	35.843.170,77	42.752.697,67
Kecamatan Sidemen											
7	Tangkup	446.932.796,00	471.079.816,00	25.112.349,00	496.192.165,00	30.927.749,48	35.754.623,68	32.715.480,67	28.380.232,55	37.095.422,07	44.246.346,80
8	Talibeng	458.574.197,00	483.350.181,00	25.766.459,00	509.116.640,00	31.733.334,43	36.685.935,76	33.567.631,22	29.119.461,51	38.061.658,35	45.398.845,50
9	Sidemen	474.727.615,00	500.376.341,00	26.674.090,00	527.050.431,00	32.851.150,96	37.978.209,20	34.750.061,42	30.145.203,55	39.402.392,05	46.998.033,89
10	Sangkan Gunung	558.485.587,00	588.659.614,00	31.380.300,00	620.039.914,00	38.647.202,62	44.678.846,96	40.881.144,97	35.463.834,77	46.354.303,72	55.290.073,11
11	Telaga Tawang	439.826.304,00	463.589.371,00	24.713.048,00	488.302.419,00	30.435.980,24	35.186.104,32	32.195.285,45	27.928.970,30	36.505.583,23	43.542.804,10
12	Sinduwati	470.412.783,00	495.828.386,00	26.431.647,00	522.260.033,00	32.552.564,58	37.633.022,64	34.434.215,72	29.871.211,72	39.044.260,99	46.570.865,52
13	Tri Eka Buana	438.814.948,00	462.523.374,00	24.656.222,00	487.179.596,00	30.365.994,40	35.105.195,84	32.121.254,19	27.864.749,20	36.421.640,68	43.442.679,85
14	Kerta Buana	444.305.570,00	468.310.644,00	24.964.730,00	493.275.374,00	30.745.945,44	35.544.445,60	32.523.167,72	28.213.403,70	36.877.362,31	43.986.251,43
15	Lokasari	432.271.559,00	455.626.457,00	24.288.561,00	479.915.018,00	29.913.191,88	34.581.724,72	31.642.278,12	27.449.244,00	35.878.539,40	42.794.884,34
16	Wismakerta	448.228.908,00	472.445.954,00	25.185.175,00	497.631.129,00	31.017.440,43	35.858.312,64	32.810.356,07	28.462.535,66	37.202.999,36	44.374.661,89
Kecamatan Manggis											
17	Gegelang	623.014.623,00	656.675.044,00	35.006.070,00	691.681.114,00	43.112.611,91	49.841.169,84	45.604.670,40	39.561.428,56	51.710.213,71	61.678.447,68
18	Antiga	569.564.734,00	600.337.349,00	32.002.817,00	632.340.166,00	39.413.879,59	45.565.178,72	41.692.138,53	36.167.360,61	47.273.872,92	56.386.908,67
19	Ulakan	513.989.618,00	541.759.604,00	28.880.151,00	570.639.755,00	35.568.081,57	41.119.169,44	37.624.040,04	32.638.340,74	42.661.138,29	50.884.972,18
20	Manggis	559.303.578,00	589.521.800,00	31.426.261,00	620.948.061,00	38.703.807,60	44.744.286,24	40.941.021,91	35.515.777,20	46.422.196,97	55.371.054,22
21	Nyuh Tebel	418.558.587,00	441.172.596,00	23.518.053,00	464.690.649,00	28.964.254,22	33.484.686,96	30.638.488,57	26.578.470,27	34.740.362,72	41.437.300,11
22	Tenganan	535.999.207,00	564.958.333,00	30.116.831,00	595.075.164,00	37.091.145,12	42.879.936,56	39.235.141,95	34.035.949,64	44.487.934,18	53.063.921,49
23	Ngis	436.136.062,00	459.699.752,00	24.505.700,00	484.205.452,00	30.180.615,49	34.890.884,96	31.925.159,74	27.694.639,94	36.199.293,15	43.177.470,14
24	Selumbung	484.425.826,00	510.598.530,00	27.219.015,00	537.817.545,00	33.522.267,16	38.754.066,08	35.459.970,46	30.761.039,95	40.207.343,56	47.958.156,77
25	Padangbai	443.587.243,00	467.553.508,00	24.924.369,00	492.477.877,00	30.696.237,22	35.486.979,44	32.470.586,19	28.167.789,93	36.817.741,17	43.915.137,06
26	Antiga Kelod	495.552.023,00	522.325.856,00	27.844.176,00	550.170.032,00	34.292.199,99	39.644.161,84	36.274.408,08	31.467.553,46	41.130.817,91	49.059.650,28
27	Pasedahan	391.704.482,00	412.867.643,00	22.009.206,00	434.876.849,00	27.105.950,16	31.336.358,56	28.672.768,08	24.873.234,61	32.511.472,01	38.778.743,74
28	Sengkidu	412.203.022,00	434.473.651,00	23.160.946,00	457.634.597,00	28.524.449,12	32.976.241,76	30.173.261,21	26.174.891,90	34.212.850,83	40.808.099,18
Kecamatan Karangasem											
29	Bugbug	632.978.495,00	667.177.248,00	35.565.922,00	702.743.170,00	43.802.111,85	50.638.279,60	46.334.025,83	40.194.134,43	52.537.215,09	62.664.871,01
30	Tumbu	476.729.253,00	502.486.124,00	26.786.559,00	529.272.683,00	32.989.664,31	38.138.340,24	34.896.581,32	30.272.307,57	39.568.528,00	47.196.196,05
31	Seraya	666.481.016,00	702.489.852,00	37.448.369,00	739.938.221,00	46.120.486,31	53.318.481,28	48.786.410,37	42.321.544,52	55.317.924,33	65.981.620,58
32	Seraya Barat	546.079.894,00	575.583.663,00	30.683.246,00	606.266.909,00	37.788.728,66	43.686.391,52	39.973.048,24	34.676.073,27	45.324.631,20	54.061.909,51
33	Seraya Timur	597.217.737,00	629.484.396,00	33.556.590,00	663.040.986,00	41.327.467,40	47.777.418,96	43.716.338,35	37.923.326,30	49.569.072,17	59.124.555,96
34	Pertima	550.306.751,00	580.038.889,00	30.920.746,00	610.959.635,00	38.081.227,17	44.024.540,08	40.282.454,17	34.944.478,69	45.675.460,33	54.480.368,35
35	Tegalinggah	455.959.989,00	480.594.732,00	25.619.571,00	506.214.303,00	31.552.431,24	36.476.799,12	33.376.271,19	28.953.459,30	37.844.679,09	45.140.038,91
36	Bukit	500.742.823,00	527.797.106,00	28.135.838,00	555.932.944,00	34.651.403,35	40.059.425,84	36.654.374,64	31.797.169,26	41.561.654,31	49.573.539,48
Kecamatan Abang											
37	Ababi	640.111.536,00	674.695.674,00	35.966.715,00	710.662.389,00	44.295.718,29	51.208.922,88	46.856.164,44	40.647.082,54	53.129.257,49	63.371.042,06
38	Tiying Tali	476.525.530,00	502.271.393,00	26.775.112,00	529.046.505,00	32.975.566,68	38.122.042,40	34.881.668,80	30.259.371,16	39.551.618,99	47.176.027,47
39	Bunutan	852.073.451,00	898.109.531,00	47.876.474,00	945.986.005,00	58.963.482,81	68.165.876,08	62.371.776,61	54.106.664,14	70.722.096,43	84.355.271,65
40	Tista	585.752.322,00	617.399.525,00	32.912.369,00	650.311.894,00	40.534.060,68	46.860.185,76	42.877.069,97	37.195.272,45	48.617.442,73	57.989.479,88

No	Kecamatan / Desa	PENYALURAN 2025										
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Salur Induk	Total Penyaluran		Sisa	
a	d	m	n	o	p	q	r	s = g + h + ... + q + r	t = e + s	u = t / f * 100%	v = t - f	w = v / f * 100%
Kecamatan Rendang												
1	Nongan	47.447.066,88	58.210.642,52	42.273.479,52	52.142.032,46	70.018.242,59	33.843.712,97	546.563.402,00	575.699.635,00	100,00%	-	0,00%
2	Rendang	51.922.999,10	63.701.959,63	46.261.359,94	57.060.865,45	76.623.431,95	37.036.368,95	598.123.611,00	630.008.418,00	100,00%	-	0,00%
3	Menanga	55.114.620,66	67.617.614,57	49.104.969,83	60.568.303,32	81.333.349,41	39.312.933,85	634.889.289,00	668.734.003,00	100,00%	-	0,00%
4	Besakih	61.624.540,14	75.604.337,90	54.905.053,29	67.722.390,06	90.940.120,56	43.956.421,01	709.879.883,00	747.722.200,00	100,00%	-	0,00%
5	Pempatan	92.148.255,81	113.052.492,62	82.100.489,26	101.266.477,87	135.984.358,40	65.728.807,43	1.061.495.842,00	1.118.082.122,00	100,00%	-	0,00%
6	Pesaban	39.513.856,94	48.477.749,04	35.205.299,96	43.423.818,22	58.311.102,62	28.185.001,06	455.177.305,00	479.441.922,00	100,00%	-	0,00%
Kecamatan Sidemen												
7	Tangkup	40.894.350,83	50.171.414,04	36.435.265,99	44.940.914,39	60.348.316,20	29.169.699,29	471.079.816,00	496.192.165,00	100,00%	-	0,00%
8	Talibeng	41.959.539,03	51.478.244,86	37.384.306,98	46.111.504,60	61.920.227,08	29.929.491,68	483.350.181,00	509.116.640,00	100,00%	-	0,00%
9	Sidemen	43.437.576,77	53.291.581,96	38.701.180,76	47.735.796,65	64.101.386,48	30.983.767,30	500.376.341,00	527.050.431,00	100,00%	-	0,00%
10	Sangkan Gunung	51.101.431,21	62.694.015,46	45.529.375,11	56.158.002,14	75.411.034,45	36.450.349,48	588.659.614,00	620.039.914,00	100,00%	-	0,00%
11	Telaga Tawang	40.244.106,82	49.373.659,31	35.855.924,02	44.226.327,53	59.388.741,69	28.705.883,99	463.589.371,00	488.302.419,00	100,00%	-	0,00%
12	Sinduwati	43.042.769,64	52.807.211,10	38.349.423,07	47.301.922,71	63.518.764,60	30.702.153,71	495.828.386,00	522.260.033,00	100,00%	-	0,00%
13	Tri Eka Buana	40.151.567,74	49.260.127,34	35.773.475,33	44.124.631,64	59.252.181,32	28.639.876,46	462.523.374,00	487.179.596,00	100,00%	-	0,00%
14	Kerta Buana	40.653.959,66	49.876.489,07	36.221.086,86	44.676.735,97	59.993.566,65	28.998.229,59	468.310.644,00	493.275.374,00	100,00%	-	0,00%
15	Lokasari	39.552.847,65	48.525.584,96	35.240.039,16	43.466.667,22	58.368.642,58	28.212.812,96	455.626.457,00	479.915.018,00	100,00%	-	0,00%
16	Wismakerta	41.012.945,08	50.316.911,92	36.540.928,83	45.071.243,66	60.523.326,64	29.254.291,82	472.445.954,00	497.631.129,00	100,00%	-	0,00%
Kecamatan Manggis												
17	Gegelang	57.005.838,00	69.937.862,88	50.789.970,46	62.646.659,72	84.124.242,82	40.661.928,01	656.675.044,00	691.681.114,00	100,00%	-	0,00%
18	Antiga	52.115.173,16	63.937.729,23	46.432.579,51	57.272.055,58	76.907.026,82	37.173.445,67	600.337.349,00	632.340.166,00	100,00%	-	0,00%
19	Ulakan	47.030.050,05	57.699.023,59	41.901.933,84	51.683.751,15	69.402.845,76	33.546.257,34	541.759.604,00	570.639.755,00	100,00%	-	0,00%
20	Manggis	51.176.277,39	62.785.840,82	45.596.060,12	56.240.254,51	75.521.486,19	36.503.736,84	589.521.800,00	620.948.061,00	100,00%	-	0,00%
21	Nyuh Tebel	38.298.110,71	46.986.205,44	34.122.117,66	42.087.771,95	56.517.010,91	27.317.816,48	441.172.596,00	464.690.649,00	100,00%	-	0,00%
22	Tenganan	49.043.927,44	60.169.757,92	43.696.219,78	53.896.904,97	72.374.749,79	34.982.744,17	564.958.333,00	595.075.164,00	100,00%	-	0,00%
23	Ngis	39.906.449,67	48.959.403,16	35.555.084,73	43.855.258,70	58.890.457,15	28.465.035,17	459.699.752,00	484.205.452,00	100,00%	-	0,00%
24	Selumbung	44.324.963,08	54.380.275,75	39.491.807,23	48.710.991,31	65.410.913,92	31.616.734,73	510.598.530,00	537.817.545,00	100,00%	-	0,00%
25	Padangbai	40.588.232,73	49.795.851,71	36.162.526,75	44.604.505,36	59.896.573,42	28.951.347,03	467.553.508,00	492.477.877,00	100,00%	-	0,00%
26	Antiga Kelod	45.343.010,10	55.629.271,22	40.398.847,28	49.829.775,72	66.913.258,48	32.342.901,64	522.325.856,00	550.170.032,00	100,00%	-	0,00%
27	Pasedahan	35.840.960,16	43.971.639,42	31.932.892,64	39.387.485,45	52.890.990,90	25.565.147,28	412.867.643,00	434.876.849,00	100,00%	-	0,00%
28	Sengkidu	37.716.576,51	46.272.747,65	33.603.993,45	41.448.694,02	55.658.833,77	26.903.011,59	434.473.651,00	457.634.597,00	100,00%	-	0,00%
Kecamatan Karangasem												
29	Bugbug	57.917.532,29	71.056.379,03	51.602.254,39	63.648.567,75	85.469.642,50	41.312.234,23	667.177.248,00	702.743.170,00	100,00%	-	0,00%
30	Tumbu	43.620.726,65	53.516.280,19	38.864.360,14	47.937.069,50	64.371.663,01	31.114.407,02	502.486.124,00	529.272.683,00	100,00%	-	0,00%
31	Seraya	60.983.012,96	74.817.277,46	54.333.477,68	67.017.382,67	89.993.410,40	43.498.823,43	702.489.852,00	739.938.221,00	100,00%	-	0,00%
32	Seraya Barat	49.966.310,30	61.301.387,38	44.518.026,80	54.910.559,20	73.735.922,46	35.640.674,46	575.583.663,00	606.266.909,00	100,00%	-	0,00%
33	Seraya Timur	54.645.422,94	67.041.977,28	48.686.933,02	60.052.677,68	80.640.948,08	38.978.257,86	629.484.396,00	663.040.986,00	100,00%	-	0,00%
34	Pertima	50.353.067,72	61.775.882,42	44.862.612,52	55.335.586,81	74.306.664,55	35.916.546,19	580.038.889,00	610.959.635,00	100,00%	-	0,00%
35	Tegalinggah	41.720.338,99	51.184.781,25	37.171.189,12	45.848.635,36	61.567.236,73	29.758.871,72	480.594.732,00	506.214.303,00	100,00%	-	0,00%
36	Bukit	45.817.968,30	56.211.975,77	40.822.016,45	50.351.731,81	67.614.160,27	32.681.686,51	527.797.106,00	555.932.944,00	100,00%	-	0,00%
Kecamatan Abang												
37	Ababi	58.570.205,54	71.857.114,07	52.183.760,71	64.365.824,00	86.432.799,84	41.777.782,14	674.695.674,00	710.662.389,00	100,00%	-	0,00%
38	Tiying Tali	43.602.086,00	53.493.410,82	38.847.752,04	47.916.584,21	64.344.153,74	31.101.110,68	502.271.393,00	529.046.505,00	100,00%	-	0,00%
39	Bunutan	77.964.720,77	95.651.360,31	69.463.514,68	85.679.458,50	115.053.533,57	55.611.775,46	898.109.531,00	945.986.005,00	100,00%	-	0,00%
40	Tista	53.596.337,46	65.754.902,16	47.752.238,93	58.899.783,55	79.092.800,00	38.229.951,43	617.399.525,00	650.311.894,00	100,00%	-	0,00%

No	Kecamatan / Desa	Pagu		Kurang Salur 2024	Jumlah	PENYALURAN 2025					
		Induk	Perubahan			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
41	Abang	474.974.490,00	500.636.555,00	26.687.962,00	527.324.517,00	32.868.234,71	37.997.959,20	34.768.132,67	30.160.880,12	39.422.882,67	47.022.474,51
42	Pidpid	492.898.136,00	519.528.584,00	27.695.059,00	547.223.643,00	34.108.551,01	39.431.850,88	36.080.143,56	31.299.031,64	40.910.545,29	48.796.915,46
43	Datah	901.485.202,00	950.190.915,00	50.652.831,00	1.000.843.746,00	62.382.775,98	72.118.816,16	65.988.716,79	57.244.310,33	74.823.271,77	89.247.035,00
44	Culik	464.965.596,00	490.086.897,00	26.125.580,00	516.212.477,00	32.175.619,24	37.197.247,68	34.035.481,63	29.525.315,35	38.592.144,47	46.031.594,00
45	Purwakerti	514.560.849,00	542.361.697,00	28.912.248,00	571.273.945,00	35.607.610,75	41.164.867,92	37.665.854,15	32.674.613,91	42.708.550,47	50.941.524,05
46	Kerta Mandala	506.307.676,00	533.662.619,00	28.448.517,00	562.111.136,00	35.036.491,18	40.504.614,08	37.061.721,88	32.150.537,43	42.023.537,11	50.124.459,92
47	Labasari	459.331.800,00	484.148.717,00	25.809.027,00	509.957.744,00	31.785.760,56	36.746.544,00	33.623.087,76	29.167.569,30	38.124.539,40	45.473.848,20
48	Nawa Kerti	483.565.229,00	509.691.436,00	27.170.660,00	536.862.096,00	33.462.713,85	38.685.218,32	35.396.974,76	30.706.392,04	40.135.914,01	47.872.957,67
49	Kesimpar	430.886.837,00	454.166.921,00	24.210.756,00	478.377.677,00	29.817.369,12	34.470.946,96	31.540.916,47	27.361.314,15	35.763.607,47	42.657.796,86
50	Tribuana	505.160.948,00	532.453.936,00	28.384.084,00	560.838.020,00	34.957.137,60	40.412.875,84	36.977.781,39	32.077.720,20	41.928.358,68	50.010.933,85
Kecamatan Bebandem											
51	Bungaya	528.734.101,00	557.300.705,00	29.708.617,00	587.009.322,00	36.588.399,79	42.298.728,08	38.703.336,19	33.574.615,41	43.884.930,38	52.344.676,00
52	Budakeling	465.327.072,00	490.467.903,00	26.145.891,00	516.613.794,00	32.200.633,38	37.226.165,76	34.061.941,67	29.548.269,07	38.622.146,98	46.067.380,13
53	Bebandem	695.900.428,00	733.498.746,00	39.101.393,00	772.600.139,00	48.156.309,62	55.672.034,24	50.939.911,33	44.189.677,18	57.759.735,52	68.894.142,37
54	Sibetan	613.769.513,00	646.930.437,00	34.486.604,00	681.417.041,00	42.472.850,30	49.101.561,04	44.927.928,35	38.974.364,08	50.942.869,58	60.763.181,79
55	Jungutan	665.679.896,00	701.645.449,00	37.403.355,00	739.048.804,00	46.065.048,80	53.254.391,68	48.727.768,39	42.270.673,40	55.251.431,37	65.902.309,70
56	Bungaya Kangin	513.770.971,00	541.529.143,00	28.867.866,00	570.397.009,00	35.552.951,19	41.101.677,68	37.608.035,08	32.624.456,66	42.642.990,59	50.863.326,13
57	Buana Giri	685.572.809,00	722.613.143,00	38.521.102,00	761.134.245,00	47.441.638,38	54.845.824,72	50.183.929,62	43.533.873,37	56.902.543,15	67.871.708,09
58	Macang	402.454.135,00	424.198.048,00	22.613.173,00	446.811.221,00	27.849.826,14	32.196.330,80	29.459.642,68	25.555.837,57	33.403.693,21	39.842.959,37
Kecamatan Selat											
59	Muncan	586.355.396,00	618.035.181,00	32.946.254,00	650.981.435,00	40.575.793,40	46.908.431,68	42.921.214,99	37.233.567,65	48.667.497,87	58.049.184,20
60	Selat	436.598.427,00	460.187.097,00	24.531.680,00	484.718.777,00	30.212.611,15	34.927.874,16	31.959.004,86	27.724.000,11	36.237.669,44	43.223.244,27
61	Duda	511.986.607,00	539.648.373,00	28.767.606,00	568.415.979,00	35.429.473,20	40.958.928,56	37.477.419,63	32.511.149,54	42.494.888,38	50.686.674,09
62	Sebudi	722.577.898,00	761.617.553,00	40.600.352,00	802.217.905,00	50.002.390,54	57.806.231,84	52.892.702,13	45.883.696,52	59.973.965,53	71.535.211,90
63	Duda Utara	528.832.906,00	557.404.848,00	29.714.169,00	587.119.017,00	36.595.237,10	42.306.632,48	38.710.568,72	33.580.889,53	43.893.131,20	52.354.457,69
64	Duda Timur	561.824.753,00	592.179.189,00	31.567.922,00	623.747.111,00	38.878.272,91	44.945.980,24	41.125.571,92	35.675.871,82	46.631.454,50	55.620.650,55
65	Pering Sari	536.953.416,00	565.964.097,00	30.170.446,00	596.134.543,00	37.157.176,39	42.956.273,28	39.304.990,05	34.096.541,92	44.567.133,53	53.158.388,18
66	Amerta Bhuana	464.402.863,00	489.493.761,00	26.093.961,00	515.587.722,00	32.136.678,12	37.152.229,04	33.994.289,57	29.489.581,80	38.545.437,63	45.975.883,44
Kecamatan Kubu											
67	Ban	1.207.252.828,00	1.272.478.647,00	67.833.364,00	1.340.312.011,00	83.541.895,70	96.580.226,24	88.370.906,99	76.660.554,53	100.201.984,69	119.518.029,97
68	Dukuh	638.015.027,00	672.485.895,00	35.848.916,00	708.334.811,00	44.150.639,87	51.041.202,16	46.702.699,98	40.513.954,21	52.955.247,24	63.163.487,67
69	Kubu	540.726.936,00	569.941.493,00	30.382.473,00	600.323.966,00	37.418.303,97	43.258.154,88	39.581.211,72	34.336.160,44	44.880.335,69	53.531.966,66
70	Tianyar	798.357.532,00	841.491.433,00	44.858.273,00	886.349.706,00	55.246.341,21	63.868.602,56	58.439.771,34	50.695.703,28	66.263.675,16	79.037.395,67
71	Tianyar Barat	795.149.956,00	838.110.557,00	44.678.045,00	882.788.602,00	55.024.376,96	63.611.996,48	58.204.976,78	50.492.022,21	65.997.446,35	78.719.845,64
72	Tianyar Tengah	686.162.361,00	723.234.547,00	38.554.228,00	761.788.775,00	47.482.435,38	54.892.988,88	50.227.084,83	43.571.309,92	56.951.475,96	67.930.073,74
73	Tulamben	817.415.486,00	861.579.056,00	45.929.105,00	907.508.161,00	56.565.151,63	65.393.238,88	59.834.813,58	51.905.883,36	67.845.485,34	80.924.133,11
74	Baturinggit	609.064.630,00	641.971.355,00	34.222.245,00	676.193.600,00	42.147.272,40	48.725.170,40	44.583.530,92	38.675.604,01	50.552.364,29	60.297.398,37
75	Sukadana	699.957.661,00	737.775.184,00	39.329.361,00	777.104.545,00	48.437.070,14	55.996.612,88	51.236.900,79	44.447.311,47	58.096.485,86	69.295.808,44
Jumlah		**42.225.338.107,00**	**44.506.701.386,00**	**2.372.565.780,00**	**46.879.267.166,00**	**2.921.993.397,00**	**3.378.027.048,56**	**3.090.894.749,43**	**2.681.308.969,79**	**3.504.703.062,88**	**4.180.308.472,59**

No	Kecamatan / Desa	PENYALURAN 2025										
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Salur Induk	Total Penyaluran		Sisa	
41	Abang	43.460.165,84	53.319.295,45	38.721.306,73	47.760.621,01	64.134.722,09	30.999.879,99	500.636.555,00	527.324.517,00	100,00%	-	0,00%
42	Pidpid	45.100.179,44	55.331.353,36	40.182.494,67	49.562.916,57	66.554.910,17	32.169.691,96	519.528.584,00	547.223.643,00	100,00%	-	0,00%
43	Datah	82.485.895,98	101.198.183,99	73.491.704,83	90.648.011,47	121.725.489,61	58.836.703,08	950.190.915,00	1.000.843.746,00	100,00%	-	0,00%
44	Culik	42.544.352,03	52.195.725,27	37.905.352,48	46.754.185,88	62.783.243,59	30.346.635,38	490.086.897,00	516.212.477,00	100,00%	-	0,00%
45	Purwakerti	47.082.317,68	57.763.148,37	41.948.502,26	51.741.190,70	69.479.977,24	33.583.539,50	542.361.697,00	571.273.945,00	100,00%	-	0,00%
46	Kerta Mandala	46.327.152,35	56.836.670,46	41.275.679,51	50.911.300,50	68.365.570,05	33.044.884,52	533.662.619,00	562.111.136,00	100,00%	-	0,00%
47	Labasari	42.028.859,70	51.563.291,23	37.446.068,99	46.187.684,77	62.022.525,32	29.978.937,77	484.148.717,00	509.957.744,00	100,00%	-	0,00%
48	Nawa Kerti	44.246.218,45	54.283.667,56	39.421.648,85	48.624.454,74	65.294.709,12	31.560.566,63	509.691.436,00	536.862.096,00	100,00%	-	0,00%
49	Kesimpar	39.426.145,59	48.370.139,98	35.127.152,58	43.327.427,80	58.181.666,88	28.122.437,14	454.166.921,00	478.377.677,00	100,00%	-	0,00%
50	Tribuana	46.222.226,74	56.707.942,01	41.182.194,90	50.795.992,40	68.210.730,64	32.970.041,75	532.453.936,00	560.838.020,00	100,00%	-	0,00%
Kecamatan Bebandem												
51	Bungaya	48.379.170,24	59.354.197,63	43.103.947,13	53.166.368,89	71.393.758,53	34.508.576,74	557.300.705,00	587.009.322,00	100,00%	-	0,00%
52	Budakeling	42.577.427,09	52.236.303,54	37.934.821,06	46.790.533,77	62.832.052,92	30.370.227,63	490.467.903,00	516.613.794,00	100,00%	-	0,00%
53	Bebandem	63.674.889,16	78.119.817,60	56.731.834,02	69.975.624,57	93.965.847,46	45.418.922,92	733.498.746,00	772.600.139,00	100,00%	-	0,00%
54	Sibetan	56.159.910,44	68.900.032,93	50.036.282,11	61.717.026,28	82.875.897,19	40.058.532,90	646.930.437,00	681.417.041,00	100,00%	-	0,00%
55	Jungutan	60.909.710,48	74.727.345,99	54.268.168,04	66.936.826,81	89.885.237,12	43.446.537,21	701.645.449,00	739.048.804,00	100,00%	-	0,00%
56	Bungaya Kangin	47.010.043,85	57.674.478,89	41.884.109,10	51.661.765,22	69.373.321,62	33.531.986,99	541.529.143,00	570.397.009,00	100,00%	-	0,00%
57	Buana Giri	62.729.912,02	76.960.468,25	55.889.896,37	68.937.140,36	92.571.332,39	44.744.876,28	722.613.143,00	761.134.245,00	100,00%	-	0,00%
58	Macang	36.824.553,35	45.178.365,12	32.809.235,73	40.468.403,68	54.342.463,64	26.266.736,72	424.198.048,00	446.811.221,00	100,00%	-	0,00%
Kecamatan Selat												
59	Muncan	53.651.518,73	65.822.601,54	47.801.403,28	58.960.425,00	79.174.230,82	38.269.311,84	618.035.181,00	650.981.435,00	100,00%	-	0,00%
60	Selat	39.948.756,07	49.011.306,95	35.592.778,07	43.901.751,31	58.952.888,58	28.495.212,02	460.187.097,00	484.718.777,00	100,00%	-	0,00%
61	Duda	46.846.774,54	57.474.171,23	41.738.642,54	51.482.340,16	69.132.383,17	33.415.527,96	539.648.373,00	568.415.979,00	100,00%	-	0,00%
62	Sebudi	66.115.877,67	81.114.555,08	58.906.659,24	72.658.152,79	97.568.044,23	47.160.065,54	761.617.553,00	802.217.905,00	100,00%	-	0,00%
63	Duda Utara	48.388.210,90	59.365.289,20	43.112.002,00	53.176.304,11	71.407.099,70	34.515.025,37	557.404.848,00	587.119.017,00	100,00%	-	0,00%
64	Duda Timur	51.406.964,90	63.068.860,81	45.801.593,66	56.493.768,85	75.861.914,01	36.668.284,83	592.179.189,00	623.747.111,00	100,00%	-	0,00%
65	Pering Sari	49.131.237,56	60.276.874,73	43.774.009,68	53.992.854,64	72.503.595,03	35.045.022,01	565.964.097,00	596.134.543,00	100,00%	-	0,00%
66	Amerta Bhuana	42.492.861,96	52.132.554,45	37.859.476,85	46.697.600,83	62.707.259,46	30.309.907,85	489.493.761,00	515.587.722,00	100,00%	-	0,00%
Kecamatan Kubu												
67	Ban	110.463.633,76	135.522.794,54	98.418.774,15	121.394.192,65	163.012.595,30	78.793.058,47	1.272.478.647,00	1.340.312.011,00	100,00%	-	0,00%
68	Dukuh	58.378.374,97	71.621.765,89	52.012.847,18	64.155.011,55	86.149.713,71	41.640.950,58	672.485.895,00	708.334.811,00	100,00%	-	0,00%
69	Kubu	49.476.514,64	60.700.479,43	44.081.638,04	54.372.297,38	73.013.124,09	35.291.306,06	569.941.493,00	600.323.966,00	100,00%	-	0,00%
70	Tianyar	73.049.714,18	89.621.362,88	65.084.436,18	80.278.103,98	107.800.396,27	52.105.930,30	841.491.433,00	886.349.706,00	100,00%	-	0,00%
71	Tianyar Barat	72.756.220,97	89.261.289,45	64.822.945,22	79.955.569,12	107.367.284,50	51.896.583,32	838.110.557,00	882.788.602,00	100,00%	-	0,00%
72	Tianyar Tengah	62.783.856,03	77.026.649,69	55.937.958,37	68.996.422,17	92.650.937,83	44.783.354,19	723.234.547,00	761.788.775,00	100,00%	-	0,00%
73	Tulamben	74.793.516,97	91.760.754,99	66.638.096,21	82.194.458,94	110.373.748,43	53.349.774,55	861.579.056,00	907.508.161,00	100,00%	-	0,00%
74	Baturinggit	55.729.413,65	68.371.876,05	49.652.726,32	61.243.930,91	82.240.605,74	39.751.461,95	641.971.355,00	676.193.600,00	100,00%	-	0,00%
75	Sukadana	64.046.125,98	78.575.271,13	57.062.591,49	70.383.595,85	94.513.686,04	45.683.723,93	737.775.184,00	777.104.545,00	100,00%	-	0,00%
								0,00				
Jumlah		**3.863.618.436,79**	**4.740.097.258,89**	**3.442.332.805,72**	**4.245.929.859,05**	**5.701.591.080,78**	**2.755.896.244,52**	**44.506.701.386,00**	**46.879.267.166,00**	**100,00%**	**-**	**0,00%**

Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

No	Kecamatan / Desa	Pagu				PENYALURAN					
		Induk	Perubahan	Kurang Salur 2024	Jumlah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
a	b	c	d	e	f = d+e	g	h	i	j	k	l
Kecamatan Rendang											
1	Nongan	13.180.120,00	13.835.114,00	2.632.824,00	16.467.938,00	999.053,10	1.034.639,42	1.057.045,62	1.233.659,23	1.217.843,09	1.779.316,20
2	Rendang	14.423.470,00	15.140.253,00	2.881.192,00	18.021.445,00	1.093.299,03	1.132.242,40	1.156.762,29	1.350.036,79	1.332.728,63	1.947.168,45
3	Menanga	15.310.057,00	16.070.900,00	3.058.295,00	19.129.195,00	1.160.502,32	1.201.839,47	1.227.866,57	1.433.021,34	1.414.649,27	2.066.857,70
4	Besakih	17.118.420,00	17.969.130,00	3.419.528,00	21.388.658,00	1.297.576,24	1.343.795,97	1.372.897,28	1.602.284,11	1.581.742,01	2.310.986,70
5	Pempatan	25.597.473,00	26.869.556,00	5.113.281,00	31.982.837,00	1.940.288,45	2.009.401,63	2.052.917,33	2.395.923,47	2.365.206,51	3.455.658,86
6	Pesaban	10.976.387,00	11.521.865,00	2.192.612,00	13.714.477,00	832.010,13	861.646,38	880.306,24	1.027.389,82	1.014.218,16	1.481.812,25
Kecamatan Sidemen											
7	Tangkup	11.359.868,00	11.924.404,00	2.269.216,00	14.193.620,00	861.077,99	891.749,64	911.061,41	1.063.283,64	1.049.651,80	1.533.582,18
8	Talibeng	11.655.762,00	12.235.003,00	2.328.323,00	14.563.326,00	883.506,76	914.977,32	934.792,11	1.090.979,32	1.076.992,41	1.573.527,87
9	Sidemen	12.066.340,00	12.665.985,00	2.410.339,00	15.076.324,00	914.628,57	947.207,69	967.720,47	1.129.409,42	1.114.929,82	1.628.955,90
10	Sangkan Gunung	14.195.250,00	14.900.692,00	2.835.604,00	17.736.296,00	1.075.999,95	1.114.327,13	1.138.459,05	1.328.675,40	1.311.641,10	1.916.358,75
11	Telaga Tawang	11.179.240,00	11.734.799,00	2.233.134,00	13.967.933,00	847.386,39	877.570,34	896.575,05	1.046.376,86	1.032.961,78	1.509.197,40
12	Sinduwati	11.956.667,00	12.550.862,00	2.388.431,00	14.939.293,00	906.315,36	938.598,36	958.924,69	1.119.144,03	1.104.796,03	1.614.150,05
13	Tri Eka Buana	11.153.534,00	11.707.815,00	2.227.999,00	13.935.814,00	845.437,88	875.552,42	894.513,43	1.043.970,78	1.030.586,54	1.505.727,09
14	Kerta Buana	11.293.091,00	11.854.308,00	2.255.876,00	14.110.184,00	856.016,30	886.507,64	905.705,90	1.057.033,32	1.043.481,61	1.524.567,29
15	Lokasari	10.987.218,00	11.533.234,00	2.194.776,00	13.728.010,00	832.831,12	862.496,61	881.174,88	1.028.403,60	1.015.218,94	1.483.274,43
16	Wismakerta	11.392.812,00	11.958.985,00	2.275.796,00	14.234.781,00	863.575,15	894.335,74	913.703,52	1.066.367,20	1.052.695,83	1.538.029,62
Kecamatan Manggis											
17	Gegelang	15.835.410,00	16.622.361,00	3.163.238,00	19.785.599,00	1.200.324,08	1.243.079,69	1.269.999,88	1.482.194,38	1.463.191,88	2.137.780,35
18	Antiga	14.476.853,00	15.196.289,00	2.891.856,00	18.088.145,00	1.097.345,46	1.136.432,96	1.161.043,61	1.355.033,44	1.337.661,22	1.954.375,16
19	Ulakan	13.064.278,00	13.713.516,00	2.609.684,00	16.323.200,00	990.272,27	1.025.545,82	1.047.755,10	1.222.816,42	1.207.139,29	1.763.677,53
20	Manggis	14.216.041,00	14.922.516,00	2.839.757,00	17.762.273,00	1.077.575,91	1.115.959,22	1.140.126,49	1.330.621,44	1.313.562,19	1.919.165,54
21	Nyuh Tebel	10.638.670,00	11.167.365,00	2.125.151,00	13.292.516,00	806.411,19	835.135,60	853.221,33	995.779,51	983.013,11	1.436.220,45
22	Tenganan	13.623.705,00	14.300.743,00	2.721.433,00	17.022.176,00	1.032.676,84	1.069.460,84	1.092.621,14	1.275.178,79	1.258.830,34	1.839.200,18
23	Ngis	11.085.443,00	11.636.341,00	2.214.397,00	13.850.738,00	840.276,58	870.207,28	889.052,53	1.037.597,46	1.024.294,93	1.496.534,81
24	Selumbung	12.312.844,00	12.924.738,00	2.459.579,00	15.384.317,00	933.313,58	966.558,25	987.490,09	1.152.482,20	1.137.706,79	1.662.233,94

No	Kecamatan / Desa	PENYALURAN										
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Salur Induk	Total Penyaluran		Sisa	
a	b	m	n	o	p	q	r	s	t	u = t / f * 100%	v = t-f	w = v/c
Kecamatan Rendang												
1	Nongan	1.472.219,40	1.456.668,06	1.585.631,00	736.426,00	1.145.006,88	0,00	13.717.508,00	16.350.332,00	99,29%	117.606,00	0,89%
2	Rendang	1.611.101,60	1.594.083,22	1.735.212,00	805.897,00	1.253.021,59	0,00	15.011.553,00	17.892.745,00	99,29%	128.700,00	0,89%
3	Menanga	1.710.133,37	1.692.068,89	1.841.873,00	855.434,00	1.330.043,07	0,00	15.934.289,00	18.992.584,00	99,29%	136.611,00	0,89%
4	Besakih	1.912.127,51	1.891.929,33	2.059.428,00	956.475,00	1.487.140,85	0,00	17.816.383,00	21.235.911,00	99,29%	152.747,00	0,89%
5	Pempatan	2.859.237,73	2.829.035,04	3.079.498,00	1.430.234,00	2.223.749,98	0,00	26.641.151,00	31.754.432,00	99,29%	228.405,00	0,89%
6	Pesaban	1.226.062,43	1.213.111,29	1.320.512,00	613.295,00	953.559,30	0,00	11.423.923,00	13.616.535,00	99,29%	97.942,00	0,89%
Kecamatan Sidemen												
7	Tangkup	1.268.897,26	1.255.493,64	1.366.646,00	634.721,00	986.875,44	0,00	11.823.040,00	14.092.256,00	99,29%	101.364,00	0,89%
8	Talibeng	1.301.948,62	1.288.195,88	1.402.244,00	651.254,00	1.012.580,71	0,00	12.130.999,00	14.459.322,00	99,29%	104.004,00	0,89%
9	Sidemen	1.347.810,18	1.333.572,99	1.451.638,00	674.195,00	1.048.249,96	0,00	12.558.318,00	14.968.657,00	99,29%	107.667,00	0,89%
10	Sangkan Gunung	1.585.609,43	1.568.860,32	1.707.756,00	793.146,00	1.233.195,87	0,00	14.774.029,00	17.609.633,00	99,29%	126.663,00	0,89%
11	Telaga Tawang	1.248.721,11	1.235.530,62	1.344.916,00	624.629,00	971.182,45	0,00	11.635.047,00	13.868.181,00	99,29%	99.752,00	0,89%
12	Sinduwati	1.335.559,70	1.321.451,92	1.438.444,00	668.067,00	1.038.721,86	0,00	12.444.173,00	14.832.604,00	99,29%	106.689,00	0,89%
13	Tri Eka Buana	1.245.849,75	1.232.689,59	1.341.823,00	623.193,00	968.949,52	0,00	11.608.293,00	13.836.292,00	99,29%	99.522,00	0,89%
14	Kerta Buana	1.261.438,26	1.248.113,44	1.358.613,00	630.990,00	981.073,24	0,00	11.753.540,00	14.009.416,00	99,29%	100.768,00	0,89%
15	Lokasari	1.227.272,25	1.214.308,33	1.321.815,00	613.900,00	954.500,84	0,00	11.435.196,00	13.629.972,00	99,29%	98.038,00	0,89%
16	Wismakerta	1.272.577,10	1.259.134,62	1.370.610,00	636.562,00	989.736,22	0,00	11.857.327,00	14.133.123,00	99,29%	101.658,00	0,89%
Kecamatan Manggis												
17	Gegelang	1.768.815,30	1.750.130,95	1.905.075,00	884.788,00	1.375.682,49	0,00	16.481.062,00	19.644.300,00	99,29%	141.299,00	0,89%
18	Antiga	1.617.064,48	1.599.983,11	1.741.634,00	808.880,00	1.257.659,56	0,00	15.067.113,00	17.958.969,00	99,29%	129.176,00	0,89%
19	Ulakan	1.459.279,85	1.443.865,19	1.571.695,00	729.954,00	1.134.943,53	0,00	13.596.944,00	16.206.628,00	99,29%	116.572,00	0,89%
20	Manggis	1.587.931,78	1.571.158,14	1.710.258,00	794.307,00	1.235.001,29	0,00	14.795.667,00	17.635.424,00	99,29%	126.849,00	0,89%
21	Nyuh Tebel	1.188.339,44	1.175.786,78	1.279.883,00	594.425,00	924.220,59	0,00	11.072.436,00	13.197.587,00	99,29%	94.929,00	0,89%
22	Tenganan	1.521.767,85	1.505.693,11	1.638.997,00	761.211,00	1.183.541,91	0,00	14.179.179,00	16.900.612,00	99,29%	121.564,00	0,89%
23	Ngis	1.238.243,98	1.225.164,17	1.333.632,00	619.388,00	963.034,26	0,00	11.537.426,00	13.751.823,00	99,29%	98.915,00	0,89%
24	Selumbung	1.375.344,67	1.360.816,64	1.481.294,00	687.968,00	1.069.662,84	0,00	12.814.871,00	15.274.450,00	99,29%	109.867,00	0,89%

No	Kecamatan / Desa	Pagu				PENYALURAN					
		Induk	Perubahan	Kurang Salur 2024	Jumlah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
a	b	c	d	e	f = d+e	g	h	i	j	k	l
25	Padangbai	11.274.833,00	11.835.143,00	2.252.229,00	14.087.372,00	854.632,34	885.074,39	904.241,61	1.055.324,37	1.041.794,57	1.522.102,46
26	Antiga Kelod	12.595.643,00	13.221.591,00	2.516.071,00	15.737.662,00	954.749,74	988.757,98	1.010.170,57	1.178.952,18	1.163.837,41	1.700.411,81
27	Pasedahan	9.956.108,00	10.450.923,00	1.988.845,00	12.439.768,00	754.672,99	781.554,48	798.479,91	931.891,75	919.944,38	1.344.074,58
28	Sengkidu	10.477.128,00	10.997.795,00	2.092.882,00	13.090.677,00	794.166,30	822.454,55	840.265,67	980.659,18	968.086,63	1.414.412,28
Kecamatan Karangasem											
29	Bugbug	16.088.666,00	16.888.202,00	3.213.827,00	20.102.029,00	1.219.520,88	1.262.960,28	1.290.311,01	1.505.899,14	1.486.592,74	2.171.969,91
30	Tumbu	12.117.217,00	12.719.389,00	2.420.502,00	15.139.891,00	918.485,05	951.201,53	971.800,80	1.134.171,51	1.119.630,85	1.635.824,30
31	Seraya	16.940.213,00	17.782.067,00	3.383.930,00	21.165.997,00	1.284.068,15	1.329.806,72	1.358.605,08	1.585.603,94	1.565.275,68	2.286.928,76
32	Seraya Barat	13.879.930,00	14.569.701,00	2.772.616,00	17.342.317,00	1.052.098,69	1.089.574,51	1.113.170,39	1.299.161,45	1.282.505,53	1.873.790,55
33	Seraya Timur	15.179.720,00	15.934.086,00	3.032.259,00	18.966.345,00	1.150.622,78	1.191.608,02	1.217.413,54	1.420.821,79	1.402.606,13	2.049.262,20
34	Pertima	13.987.365,00	14.682.476,00	2.794.077,00	17.476.553,00	1.060.242,27	1.098.008,15	1.121.786,67	1.309.217,36	1.292.432,53	1.888.294,28
35	Tegalinggah	11.589.316,00	12.165.254,00	2.315.050,00	14.480.304,00	878.470,15	909.761,31	929.463,14	1.084.759,98	1.070.852,80	1.564.557,66
36	Bukit	12.727.579,00	13.360.084,00	2.542.426,00	15.902.510,00	964.750,49	999.114,95	1.020.751,84	1.191.301,39	1.176.028,30	1.718.223,17
Kecamatan Abang											
37	Ababi	16.269.969,00	17.078.515,00	3.250.044,00	20.328.559,00	1.233.263,65	1.277.192,57	1.304.851,51	1.522.869,10	1.503.345,14	2.196.445,82
38	Tiying Tali	12.112.039,00	12.713.954,00	2.419.467,00	15.133.421,00	918.092,56	950.795,06	971.385,53	1.133.686,85	1.119.152,40	1.635.125,27
39	Bunutan	21.657.489,00	22.733.772,00	4.326.240,00	27.060.012,00	1.641.637,67	1.700.112,89	1.736.930,62	2.027.140,97	2.001.151,98	2.923.761,02
40	Tista	14.888.299,00	15.628.183,00	2.974.045,00	18.602.228,00	1.128.533,06	1.168.731,47	1.194.041,58	1.393.544,79	1.375.678,83	2.009.920,37
41	Abang	12.072.615,00	12.672.571,00	2.411.592,00	15.084.163,00	915.104,22	947.700,28	968.223,72	1.129.996,76	1.115.509,63	1.629.803,03
42	Pidpid	12.528.188,00	13.150.784,00	2.502.596,00	15.653.380,00	949.636,65	983.462,76	1.004.760,68	1.172.638,40	1.157.604,57	1.691.305,38
43	Datah	22.913.407,00	24.052.104,00	4.577.119,00	28.629.223,00	1.736.836,25	1.798.702,45	1.837.655,24	2.144.694,90	2.117.198,81	3.093.309,95
44	Culik	11.818.215,00	12.405.529,00	2.360.774,00	14.766.303,00	895.820,70	927.729,88	947.820,84	1.106.184,92	1.092.003,07	1.595.459,03
45	Purwakerti	13.078.797,00	13.728.756,00	2.612.584,00	16.341.340,00	991.372,81	1.026.685,56	1.048.919,52	1.224.175,40	1.208.480,84	1.765.637,60
46	Kerta Mandala	12.869.023,00	13.508.557,00	2.570.680,00	16.079.237,00	975.471,94	1.010.218,31	1.032.095,64	1.204.540,55	1.189.097,73	1.737.318,11
47	Labasari	11.675.020,00	12.255.216,00	2.332.169,00	14.587.385,00	884.966,52	916.489,07	936.336,60	1.092.781,87	1.078.771,85	1.576.127,70
48	Nawa Kerti	12.290.969,00	12.901.777,00	2.455.210,00	15.356.987,00	931.655,45	964.841,07	985.735,71	1.150.434,70	1.135.685,54	1.659.280,82
49	Kesimpar	10.952.022,00	11.496.289,00	2.187.745,00	13.684.034,00	830.163,27	859.733,73	878.352,16	1.025.109,26	1.011.966,83	1.478.522,97
50	Tribuana	12.839.876,00	13.477.962,00	2.564.858,00	16.042.820,00	973.262,60	1.007.930,27	1.029.758,06	1.201.812,39	1.186.404,54	1.733.383,26

No	Kecamatan / Desa	PENYALURAN										
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Salur Induk	Total Penyaluran		Sisa	
a	b	m	n	o	p	q	r	s	t	u = t / f * 100%	v = t-f	w = v/c
25	Padangbai	1.259.398,85	1.246.095,57	1.356.416,00	629.970,00	979.487,84	0,00	11.734.538,00	13.986.767,00	99,29%	100.605,00	0,89%
26	Antiga Kelod	1.406.933,32	1.392.071,61	1.515.316,00	703.769,00	1.094.230,38	0,00	13.109.200,00	15.625.271,00	99,29%	112.391,00	0,89%
27	Pasedahan	1.112.097,26	1.100.349,96	1.197.767,00	556.290,00	864.962,69	0,00	10.362.085,00	12.350.930,00	99,29%	88.838,00	0,89%
28	Sengkidu	1.170.295,20	1.157.933,14	1.260.448,00	585.399,00	910.188,05	0,00	10.904.308,00	12.997.190,00	99,29%	93.487,00	0,89%
Kecamatan Karangasem												
29	Bugbug	1.797.103,99	1.778.120,83	1.935.543,00	898.938,00	1.397.683,22	0,00	16.744.643,00	19.958.470,00	99,29%	143.559,00	0,89%
30	Tumbu	1.353.493,14	1.339.195,92	1.457.759,00	677.038,00	1.052.667,90	0,00	12.611.268,00	15.031.770,00	99,29%	108.121,00	0,89%
31	Seraya	1.892.221,79	1.872.233,88	2.037.988,00	946.518,00	1.471.660,00	0,00	17.630.910,00	21.014.840,00	99,29%	151.157,00	0,89%
32	Seraya Barat	1.550.388,18	1.534.011,12	1.669.822,00	775.527,00	1.205.801,58	0,00	14.445.851,00	17.218.467,00	99,29%	123.850,00	0,89%
33	Seraya Timur	1.695.574,72	1.677.664,03	1.826.193,00	848.152,00	1.318.719,79	0,00	15.798.638,00	18.830.897,00	99,29%	135.448,00	0,89%
34	Pertima	1.562.388,67	1.545.884,85	1.682.747,00	781.530,00	1.215.135,22	0,00	14.557.667,00	17.351.744,00	99,29%	124.809,00	0,89%
35	Tegalinggah	1.294.526,60	1.280.852,26	1.394.250,00	647.542,00	1.006.807,10	0,00	12.061.843,00	14.376.893,00	99,29%	103.411,00	0,89%
36	Bukit	1.421.670,57	1.406.653,19	1.531.188,00	711.141,00	1.105.693,10	0,00	13.246.516,00	15.788.942,00	99,29%	113.568,00	0,89%
Kecamatan Abang												
37	Ababi	1.817.355,54	1.798.158,45	1.957.355,00	909.068,00	1.413.433,22	0,00	16.933.338,00	20.183.382,00	99,29%	145.177,00	0,89%
38	Tiying Tali	1.352.914,76	1.338.623,65	1.457.136,00	676.748,00	1.052.218,92	0,00	12.605.879,00	15.025.346,00	99,29%	108.075,00	0,89%
39	Bunutan	2.419.141,52	2.393.587,65	2.605.499,00	1.210.091,00	1.881.468,68	0,00	22.540.523,00	26.866.763,00	99,29%	193.249,00	0,89%
40	Tista	1.663.023,00	1.645.456,16	1.791.133,00	831.869,00	1.293.403,74	0,00	15.495.335,00	18.469.380,00	99,29%	132.848,00	0,89%
41	Abang	1.348.511,10	1.334.266,51	1.452.393,00	674.545,00	1.048.793,75	0,00	12.564.847,00	14.976.439,00	99,29%	107.724,00	0,89%
42	Pidpid	1.399.398,60	1.384.616,48	1.507.201,00	700.000,00	1.088.370,48	0,00	13.038.995,00	15.541.591,00	99,29%	111.789,00	0,89%
43	Datah	2.559.427,56	2.532.391,82	2.756.592,00	1.280.264,00	1.990.576,02	0,00	23.847.649,00	28.424.768,00	99,29%	204.455,00	0,89%
44	Culik	1.320.094,62	1.306.150,20	1.421.788,00	660.331,00	1.026.692,74	0,00	12.300.075,00	14.660.849,00	99,29%	105.454,00	0,89%
45	Purwakerti	1.460.901,62	1.445.469,83	1.573.442,00	730.765,00	1.136.204,82	0,00	13.612.055,00	16.224.639,00	99,29%	116.701,00	0,89%
46	Kerta Mandala	1.437.469,87	1.422.285,59	1.548.205,00	719.044,00	1.117.980,26	0,00	13.393.727,00	15.964.407,00	99,29%	114.830,00	0,89%
47	Labasari	1.304.099,73	1.290.324,27	1.404.561,00	652.330,00	1.014.251,39	0,00	12.151.040,00	14.483.209,00	99,29%	104.176,00	0,89%
48	Nawa Kerti	1.372.901,24	1.358.399,01	1.478.662,00	686.746,00	1.067.763,46	0,00	12.792.105,00	15.247.315,00	99,29%	109.672,00	0,89%
49	Kesimpar	1.223.340,86	1.210.418,47	1.317.580,00	611.933,00	951.443,45	0,00	11.398.564,00	13.586.309,00	99,29%	97.725,00	0,89%
50	Tribuana	1.434.214,15	1.419.064,26	1.544.698,00	717.415,00	1.115.449,47	0,00	13.363.392,00	15.928.250,00	99,29%	114.570,00	0,89%

No	Kecamatan / Desa	Pagu				PENYALURAN					
		Induk	Perubahan	Kurang Salur 2024	Jumlah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
a	b	c	d	e	f = d+e	g	h	i	j	k	l
Kecamatan Bebandem											
51	Bungaya	13.439.045,00	14.106.906,00	2.684.546,00	16.791.452,00	1.018.679,61	1.054.965,03	1.077.811,41	1.257.894,61	1.241.767,76	1.814.271,08
52	Budakeling	11.827.403,00	12.415.173,00	2.362.609,00	14.777.782,00	896.517,15	928.451,14	948.557,72	1.107.044,92	1.092.852,04	1.596.699,41
53	Bebandem	17.687.978,00	18.566.993,00	3.533.301,00	22.100.294,00	1.340.748,73	1.388.506,27	1.418.575,84	1.655.594,74	1.634.369,17	2.387.877,03
54	Sibetan	15.600.423,00	16.375.696,00	3.116.297,00	19.491.993,00	1.182.512,06	1.224.633,21	1.251.153,92	1.460.199,59	1.441.479,09	2.106.057,11
55	Jungutan	16.919.850,00	17.760.693,00	3.379.862,00	21.140.555,00	1.282.524,63	1.328.208,23	1.356.971,97	1.583.697,96	1.563.394,14	2.284.179,75
56	Bungaya Kangin	13.058.721,00	13.707.682,00	2.608.574,00	16.316.256,00	989.851,05	1.025.109,60	1.047.309,42	1.222.296,29	1.206.625,82	1.762.927,34
57	Buana Giri	17.425.476,00	18.291.446,00	3.480.865,00	21.772.311,00	1.320.851,08	1.367.899,87	1.397.523,18	1.631.024,55	1.610.113,98	2.352.439,26
58	Macang	10.229.337,00	10.737.690,00	2.043.384,00	12.781.074,00	775.383,74	803.002,95	820.392,83	957.465,94	945.190,74	1.380.960,50
Kecamatan Selat											
59	Muncan	14.903.628,00	15.644.273,00	2.977.107,00	18.621.380,00	1.129.695,00	1.169.934,80	1.195.270,97	1.394.979,58	1.377.095,23	2.011.989,78
60	Selat	11.097.196,00	11.648.677,00	2.216.745,00	13.865.422,00	841.167,46	871.129,89	889.995,12	1.038.697,55	1.025.380,91	1.498.121,46
61	Duda	13.013.367,00	13.660.074,00	2.599.514,00	16.259.588,00	986.413,22	1.021.549,31	1.043.672,03	1.218.051,15	1.202.435,11	1.756.804,55
62	Sebudi	18.366.050,00	19.278.762,00	3.668.751,00	22.947.513,00	1.392.146,59	1.441.734,93	1.472.957,21	1.719.062,28	1.697.023,02	2.479.416,75
63	Duda Utara	13.441.556,00	14.109.542,00	2.685.048,00	16.794.590,00	1.018.869,94	1.055.162,15	1.078.012,79	1.258.129,64	1.241.999,77	1.814.610,06
64	Duda Timur	14.280.123,00	14.989.782,00	2.852.558,00	17.842.340,00	1.082.433,32	1.120.989,66	1.145.265,86	1.336.619,51	1.319.483,37	1.927.816,61
65	Pering Sari	13.647.958,00	14.326.202,00	2.726.278,00	17.052.480,00	1.034.515,22	1.071.364,70	1.094.566,23	1.277.448,87	1.261.071,32	1.842.474,33
66	Amerta Bhuana	11.803.912,00	12.390.515,00	2.357.917,00	14.748.432,00	894.736,53	926.607,09	946.673,74	1.104.846,16	1.090.681,47	1.593.528,12
Kecamatan Kubu											
67	Ban	30.685.225,00	32.210.146,00	6.129.596,00	38.339.742,00	2.325.940,05	2.408.790,09	2.460.955,05	2.872.137,06	2.835.314,74	4.142.505,20
68	Dukuh	16.216.681,00	17.022.579,00	3.239.399,00	20.261.978,00	1.229.224,42	1.273.009,46	1.300.577,82	1.517.881,34	1.498.421,32	2.189.251,94
69	Kubu	13.743.871,00	14.426.881,00	2.745.438,00	17.172.319,00	1.041.785,42	1.078.893,87	1.102.258,45	1.286.426,33	1.269.933,68	1.855.422,59
70	Tianyar	20.292.170,00	21.300.603,00	4.053.508,00	25.354.111,00	1.538.146,49	1.592.935,35	1.627.432,03	1.899.347,11	1.874.996,51	2.739.442,95
71	Tianyar Barat	20.210.642,00	21.215.023,00	4.037.222,00	25.252.245,00	1.531.966,66	1.586.535,40	1.620.893,49	1.891.716,09	1.867.463,32	2.728.436,67
72	Tianyar Tengah	17.440.461,00	18.307.176,00	3.483.858,00	21.791.034,00	1.321.986,94	1.369.076,19	1.398.724,97	1.632.427,15	1.611.498,60	2.354.462,24
73	Tulamben	20.776.574,00	21.809.079,00	4.150.271,00	25.959.350,00	1.574.864,31	1.630.961,06	1.666.281,23	1.944.687,33	1.919.755,44	2.804.837,49
74	Baturinggit	15.480.838,00	16.250.167,00	3.092.409,00	19.342.576,00	1.173.447,52	1.215.245,78	1.241.563,21	1.449.006,44	1.430.429,43	2.089.913,13
75	Sukadana	17.791.102,00	18.675.242,00	3.553.901,00	22.229.143,00	1.348.565,53	1.396.601,51	1.426.846,38	1.665.247,15	1.643.897,82	2.401.798,77
Jumlah		**1.073.258.186,00**	**1.126.594.456,00**	**214.391.116,00**	**1.340.985.572,00**	**81.352.970,50**	**84.250.767,60**	**86.075.306,52**	**100.456.966,21**	**99.169.056,39**	**144.889.855,11**

No	Kecamatan / Desa	PENYALURAN										
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Salur Induk	Total Penyaluran		Sisa	
a	b	m	n	o	p	q	r	s	t	u = t / f * 100%	v = t-f	w = v/c
Kecamatan Bebandem												
51	Bungaya	1.501.141,33	1.485.284,47	1.616.781,00	750.893,00	1.167.500,70	0,00	13.986.990,00	16.671.536,00	99,29%	119.916,00	0,89%
52	Budakeling	1.321.120,92	1.307.165,65	1.422.893,00	660.844,00	1.027.491,05	0,00	12.309.637,00	14.672.246,00	99,29%	105.536,00	0,89%
53	Bebandem	1.975.747,14	1.954.876,94	2.127.948,00	988.298,00	1.536.622,14	0,00	18.409.164,00	21.942.465,00	99,29%	157.829,00	0,89%
54	Sibetan	1.742.567,25	1.724.160,17	1.876.805,00	871.658,00	1.355.268,60	0,00	16.236.494,00	19.352.791,00	99,29%	139.202,00	0,89%
55	Jungutan	1.889.947,25	1.869.983,36	2.035.539,00	945.380,00	1.469.891,71	0,00	17.609.718,00	20.989.580,00	99,29%	150.975,00	0,89%
56	Bungaya Kangin	1.458.659,14	1.443.251,03	1.571.026,00	729.643,00	1.134.460,31	0,00	13.591.159,00	16.199.733,00	99,29%	116.523,00	0,89%
57	Buana Giri	1.946.425,67	1.925.865,19	2.096.368,00	973.631,00	1.513.817,22	0,00	18.135.959,00	21.616.824,00	99,29%	155.487,00	0,89%
58	Macang	1.142.616,94	1.130.547,25	1.230.638,00	571.554,00	888.661,11	0,00	10.646.414,00	12.689.798,00	99,29%	91.276,00	0,89%
Kecamatan Selat												
59	Muncan	1.664.735,25	1.647.150,32	1.792.977,00	832.725,00	1.294.735,07	0,00	15.511.288,00	18.488.395,00	99,29%	132.985,00	0,89%
60	Selat	1.239.556,79	1.226.463,11	1.335.046,00	620.045,00	964.053,71	0,00	11.549.657,00	13.766.402,00	99,29%	99.020,00	0,89%
61	Duda	1.453.593,09	1.438.238,50	1.565.570,00	727.109,00	1.130.520,04	0,00	13.543.956,00	16.143.470,00	99,29%	116.118,00	0,89%
62	Sebudi	2.051.487,79	2.029.817,52	2.209.523,00	1.026.185,00	1.595.528,91	0,00	19.114.883,00	22.783.634,00	99,29%	163.879,00	0,89%
63	Duda Utara	1.501.421,81	1.485.561,99	1.617.083,00	751.034,00	1.167.718,85	0,00	13.989.604,00	16.674.652,00	99,29%	119.938,00	0,89%
64	Duda Timur	1.595.089,74	1.578.240,49	1.717.967,00	797.888,00	1.240.567,44	0,00	14.862.361,00	17.714.919,00	99,29%	127.421,00	0,89%
65	Pering Sari	1.524.476,91	1.508.373,56	1.641.914,00	762.566,00	1.185.650,86	0,00	14.204.422,00	16.930.700,00	99,29%	121.780,00	0,89%
66	Amerta Bhuana	1.318.496,97	1.304.569,43	1.420.067,00	659.532,00	1.025.450,49	0,00	12.285.189,00	14.643.106,00	99,29%	105.326,00	0,89%
Kecamatan Kubu												
67	Ban	3.427.539,62	3.391.333,86	3.691.579,00	1.714.507,00	2.665.741,33	0,00	31.936.343,00	38.065.939,00	99,29%	273.803,00	0,89%
68	Dukuh	1.811.403,27	1.792.269,06	1.950.944,00	906.091,00	1.408.804,37	0,00	16.877.878,00	20.117.277,00	99,29%	144.701,00	0,89%
69	Kubu	1.535.190,39	1.518.973,87	1.653.453,00	767.925,00	1.193.982,40	0,00	14.304.245,00	17.049.683,00	99,29%	122.636,00	0,89%
70	Tianyar	2.266.635,39	2.242.692,47	2.441.245,00	1.133.805,00	1.762.858,70	0,00	21.119.537,00	25.173.045,00	99,29%	181.066,00	0,89%
71	Tianyar Barat	2.257.528,71	2.233.681,99	2.431.437,00	1.129.250,00	1.755.775,67	0,00	21.034.685,00	25.071.907,00	99,29%	180.338,00	0,89%
72	Tianyar Tengah	1.948.099,49	1.927.521,33	2.098.171,00	974.469,00	1.515.119,09	0,00	18.151.556,00	21.635.414,00	99,29%	155.620,00	0,89%
73	Tulamben	2.320.743,32	2.296.228,85	2.499.521,00	1.160.871,00	1.804.939,97	0,00	21.623.691,00	25.773.962,00	99,29%	185.388,00	0,89%
74	Baturinggit	1.729.209,60	1.710.943,62	1.862.419,00	864.976,00	1.344.878,27	0,00	16.112.032,00	19.204.441,00	99,29%	138.135,00	0,89%
75	Sukadana	1.987.266,09	1.966.274,21	2.140.354,00	994.060,00	1.545.580,54	0,00	18.516.492,00	22.070.393,00	99,29%	158.750,00	0,89%
Jumlah		**119.882.939,38**	**118.616.592,25**	**129.118.077,00**	**59.967.241,00**	**93.238.040,04**	**0,00**	**1.117.017.812,00**	**1.331.408.928,00**	**124,05%**	**9.576.644,00**	**0,89%**

Rincian Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

Dalam rupiah

NO	KEC.	DESA	PERHITUNGAN PAGU					
			ALOKASI PENGHASILAN TETAP	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH ADD PER DESA	Asumsi pemotongan BPJS 1% setahun	NILAI ADD YANG DISALURKAN KE DESA SETAHUN
			a	*b*	*c*	*d = a + b + c*	*e*	*f = d - e*
1	RENDANG	NONGAN	640.388.400,00	539.945.854,20	288.903.043,80	1.469.237.297,00	7.911.024,00	1.461.326.273,00
2	RENDANG	RENDANG	640.388.400,00	539.945.854,20	367.092.732,80	1.547.426.987,00	7.911.024,00	1.539.515.963,00
3	RENDANG	MENANGA	467.646.000,00	539.945.854,20	422.846.907,80	1.430.438.762,00	5.753.472,00	1.424.685.290,00
4	RENDANG	BESAKIH	554.017.200,00	539.945.854,20	536.568.154,80	1.630.531.208,00	6.832.248,00	1.623.698.960,00
5	RENDANG	PEMPATAN	554.017.200,00	539.945.854,20	1.069.784.425,80	2.163.747.480,00	6.832.248,00	2.156.915.232,00
6	RENDANG	PESABAN	352.484.400,00	539.945.854,20	150.318.452,80	1.042.748.707,00	4.315.104,00	1.038.433.603,00
7	SIDEMEN	TANGKUP	352.484.400,00	539.945.854,20	174.434.187,80	1.066.864.442,00	4.315.104,00	1.062.549.338,00
8	SIDEMEN	TALIBENG	467.646.000,00	539.945.854,20	193.041.870,80	1.200.633.725,00	5.753.472,00	1.194.880.253,00
9	SIDEMEN	SIDEMEN	381.274.800,00	539.945.854,20	218.861.591,80	1.140.082.245,00	4.674.696,00	1.135.407.549,00
10	SIDEMEN	SANGKAN GUNUNG	496.436.400,00	539.945.854,20	352.740.831,80	1.389.123.086,00	6.113.064,00	1.383.010.022,00
11	SIDEMEN	TELAGA TAWANG	381.274.800,00	539.945.854,20	163.075.127,80	1.084.295.782,00	4.674.696,00	1.079.621.086,00
12	SIDEMEN	SINDUWATI	381.274.800,00	539.945.854,20	211.964.738,80	1.133.185.392,00	4.674.696,00	1.128.510.696,00
13	SIDEMEN	TRI EKA BUANA	323.694.000,00	539.945.854,20	161.458.570,80	1.025.098.424,00	3.955.512,00	1.021.142.912,00
14	SIDEMEN	KERTA BUANA	352.484.400,00	539.945.854,20	170.234.812,80	1.062.665.067,00	4.315.104,00	1.058.349.963,00
15	SIDEMEN	LOKASARI	410.065.200,00	539.945.854,20	150.999.578,80	1.101.010.633,00	5.034.288,00	1.095.976.345,00
16	SIDEMEN	WISMA KERTA	294.903.600,00	539.945.854,20	176.505.900,80	1.011.355.355,00	3.595.920,00	1.007.759.435,00
17	MANGGIS	GEGELANG	381.274.800,00	539.945.854,20	455.884.427,80	1.377.105.082,00	4.674.696,00	1.372.430.386,00
18	MANGGIS	ANTIGA	410.065.200,00	539.945.854,20	370.449.807,80	1.320.460.861,00	5.034.288,00	1.315.426.573,00
19	MANGGIS	ULAKAN	410.065.200,00	539.945.854,20	281.618.210,80	1.231.629.265,00	5.034.288,00	1.226.594.977,00
20	MANGGIS	MANGGIS	582.807.600,00	539.945.854,20	354.048.313,80	1.476.801.768,00	7.191.840,00	1.469.609.928,00
21	MANGGIS	NYUHTEBEL	323.694.000,00	539.945.854,20	129.080.682,80	992.720.536,00	3.955.512,00	988.765.024,00
22	MANGGIS	TENGANAN	381.274.800,00	539.945.854,20	316.798.469,80	1.238.019.123,00	4.674.696,00	1.233.344.427,00
23	MANGGIS	NGIS	323.694.000,00	539.945.854,20	157.176.623,80	1.020.816.478,00	3.955.512,00	1.016.860.966,00
24	MANGGIS	SELUMBUNG	410.065.200,00	539.945.854,20	234.363.269,80	1.184.374.323,00	5.034.288,00	1.179.340.035,00
25	MANGGIS	PADANGBAI	352.484.400,00	539.945.854,20	169.086.635,80	1.061.516.890,00	4.315.104,00	1.057.201.786,00
26	MANGGIS	ANTIGA KELOD	352.484.400,00	539.945.854,20	252.147.448,80	1.144.577.702,00	4.315.104,00	1.140.262.598,00
27	MANGGIS	PESEDAHAN	294.903.600,00	539.945.854,20	86.156.921,80	921.006.414,00	3.595.920,00	917.410.494,00
28	MANGGIS	SENGKIDU	323.694.000,00	539.945.854,20	118.921.909,80	982.561.764,00	3.955.512,00	978.606.252,00

Dalam rupiah

NO	KEC.	DESA	PENYALURAN							
			ADD perBulan	Asumsi pemotongan BPJS 1%	Nilai Amprah perBulan oleh Desa	REALISASI JAN FEB MAR (PAGU INDUK)	REALISASI APR (PAGU INDUK)	REALISASI MEI	REALISASI JUNI	REALISASI JULI
			Januari s.d November							
1	RENDANG	NONGAN	122.436.400,00	659.252,00	121.777.148,00	373.597.644,00	124.532.548,00	124.532.548,00	124.532.548,00	124.532.548,00
2	RENDANG	RENDANG	128.952.200,00	659.252,00	128.292.948,00	393.924.744,00	131.308.248,00	131.308.248,00	131.308.248,00	131.308.248,00
3	RENDANG	MENANGA	119.203.200,00	479.456,00	118.723.744,00	365.773.332,00	121.924.444,00	121.924.444,00	121.924.444,00	121.924.444,00
4	RENDANG	BESAKIH	135.877.600,00	569.354,00	135.308.246,00	416.660.838,00	138.886.946,00	138.886.946,00	138.886.946,00	138.886.946,00
5	RENDANG	PEMPATAN	180.312.200,00	569.354,00	179.742.846,00	555.282.738,00	185.094.246,00	185.094.246,00	185.094.246,00	185.094.246,00
6	RENDANG	PESABAN	86.895.700,00	359.592,00	86.536.108,00	266.492.424,00	88.830.808,00	88.830.808,00	88.830.808,00	88.830.808,00
7	SIDEMEN	TANGKUP	88.905.300,00	359.592,00	88.545.708,00	272.761.824,00	90.920.608,00	90.920.608,00	90.920.608,00	90.920.608,00
8	SIDEMEN	TALIBENG	100.052.800,00	479.456,00	99.573.344,00	306.030.132,00	102.010.044,00	102.010.044,00	102.010.044,00	102.010.044,00
9	SIDEMEN	SIDEMEN	95.006.800,00	389.558,00	94.617.242,00	291.419.526,00	97.139.842,00	97.139.842,00	97.139.842,00	97.139.842,00
10	SIDEMEN	SANGKAN GUNUNG	115.760.200,00	509.422,00	115.250.778,00	354.655.134,00	118.218.378,00	118.218.378,00	118.218.378,00	118.218.378,00
11	SIDEMEN	TELAGA TAWANG	90.357.900,00	389.558,00	89.968.342,00	276.916.326,00	92.305.442,00	92.305.442,00	92.305.442,00	92.305.442,00
12	SIDEMEN	SINDUWATI	94.432.100,00	389.558,00	94.042.542,00	289.626.426,00	96.542.142,00	96.542.142,00	96.542.142,00	96.542.142,00
13	SIDEMEN	TRI EKA BUANA	85.424.800,00	329.626,00	85.095.174,00	262.280.622,00	87.426.874,00	87.426.874,00	87.426.874,00	87.426.874,00
14	SIDEMEN	KERTA BUANA	88.555.400,00	359.592,00	88.195.808,00	271.670.124,00	90.556.708,00	90.556.708,00	90.556.708,00	90.556.708,00
15	SIDEMEN	LOKASARI	91.750.800,00	419.524,00	91.331.276,00	280.884.828,00	93.628.276,00	93.628.276,00	93.628.276,00	93.628.276,00
16	SIDEMEN	WISMA KERTA	84.279.600,00	299.660,00	83.979.940,00	259.084.920,00	86.361.640,00	86.361.640,00	86.361.640,00	86.361.640,00
17	MANGGIS	GEGELANG	114.758.700,00	389.558,00	114.369.142,00	353.038.926,00	117.679.642,00	117.679.642,00	117.679.642,00	117.679.642,00
18	MANGGIS	ANTIGA	110.038.400,00	419.524,00	109.618.876,00	337.936.128,00	112.645.376,00	112.645.376,00	112.645.376,00	112.645.376,00
19	MANGGIS	ULAKAN	102.635.700,00	419.524,00	102.216.176,00	314.842.128,00	104.947.376,00	104.947.376,00	104.947.376,00	104.947.376,00
20	MANGGIS	MANGGIS	123.066.800,00	599.320,00	122.467.480,00	376.318.140,00	125.439.380,00	125.439.380,00	125.439.380,00	125.439.380,00
21	MANGGIS	NYUHTEBEL	82.726.700,00	329.626,00	82.397.074,00	253.863.522,00	84.621.174,00	84.621.174,00	84.621.174,00	84.621.174,00
22	MANGGIS	TENGANAN	103.168.200,00	389.558,00	102.778.642,00	316.880.226,00	105.626.742,00	105.626.742,00	105.626.742,00	105.626.742,00
23	MANGGIS	NGIS	85.068.000,00	329.626,00	84.738.374,00	261.167.622,00	87.055.874,00	87.055.874,00	87.055.874,00	87.055.874,00
24	MANGGIS	SELUMBUNG	98.697.800,00	419.524,00	98.278.276,00	302.557.128,00	100.852.376,00	100.852.376,00	100.852.376,00	100.852.376,00
25	MANGGIS	PADANGBAI	88.459.700,00	359.592,00	88.100.108,00	271.371.624,00	90.457.208,00	90.457.208,00	90.457.208,00	90.457.208,00
26	MANGGIS	ANTIGA KELOD	95.381.400,00	359.592,00	95.021.808,00	292.965.024,00	97.655.008,00	97.655.008,00	97.655.008,00	97.655.008,00
27	MANGGIS	PESEDAHAN	76.750.500,00	299.660,00	76.450.840,00	235.596.720,00	78.532.240,00	78.532.240,00	78.532.240,00	78.532.240,00
28	MANGGIS	SENGKIDU	81.880.100,00	329.626,00	81.550.474,00	251.222.322,00	83.740.774,00	83.740.774,00	83.740.774,00	83.740.774,00

Dalam rupiah

NO	KEC.	DESA	PENYALURAN							
			REALISASI AGUSTUS	REALISASI SEPT	REALISASI OKT	REALISASI NOV	REALISASI DES	TOTAL REALISASI JAN SD DES 2025	TOTALBPJS 1% JAN SD DES 2025	JUMLAH SALUR + BPJS 1%
1	RENDANG	NONGAN	121.777.148,00	121.777.148,00	121.777.148,00	121.777.148,00	102.489.845,00	**1.461.326.273,00**	7.911.024,00	1.469.237.297,00
2	RENDANG	RENDANG	128.292.948,00	128.292.948,00	128.292.948,00	128.292.948,00	107.186.435,00	**1.539.515.963,00**	7.911.024,00	1.547.426.987,00
3	RENDANG	MENANGA	118.723.744,00	118.723.744,00	118.723.744,00	118.723.744,00	96.319.206,00	**1.424.685.290,00**	5.753.472,00	1.430.438.762,00
4	RENDANG	BESAKIH	135.308.246,00	135.308.246,00	135.308.246,00	135.308.246,00	110.257.354,00	**1.623.698.960,00**	6.832.248,00	1.630.531.208,00
5	RENDANG	PEMPATAN	179.742.846,00	179.742.846,00	179.742.846,00	179.742.846,00	142.284.126,00	**2.156.915.232,00**	6.832.248,00	2.163.747.480,00
6	RENDANG	PESABAN	86.536.108,00	86.536.108,00	86.536.108,00	86.536.108,00	70.473.515,00	**1.038.433.603,00**	4.315.104,00	1.042.748.707,00
7	SIDEMEN	TANGKUP	88.545.708,00	88.545.708,00	88.545.708,00	88.545.708,00	71.922.250,00	**1.062.549.338,00**	4.315.104,00	1.066.864.442,00
8	SIDEMEN	TALIBENG	99.573.344,00	99.573.344,00	99.573.344,00	99.573.344,00	82.516.569,00	**1.194.880.253,00**	5.753.472,00	1.200.633.725,00
9	SIDEMEN	SIDEMEN	94.617.242,00	94.617.242,00	94.617.242,00	94.617.242,00	76.959.687,00	**1.135.407.549,00**	4.674.696,00	1.140.082.245,00
10	SIDEMEN	SANGKAN GUNUNG	115.250.778,00	115.250.778,00	115.250.778,00	115.250.778,00	94.478.264,00	**1.383.010.022,00**	6.113.064,00	1.389.123.086,00
11	SIDEMEN	TELAGA TAWANG	89.968.342,00	89.968.342,00	89.968.342,00	89.968.342,00	73.609.624,00	**1.079.621.086,00**	4.674.696,00	1.084.295.782,00
12	SIDEMEN	SINDUWATI	94.042.542,00	94.042.542,00	94.042.542,00	94.042.542,00	76.545.534,00	**1.128.510.696,00**	4.674.696,00	1.133.185.392,00
13	SIDEMEN	TRI EKA BUANA	85.095.174,00	85.095.174,00	85.095.174,00	85.095.174,00	68.774.098,00	**1.021.142.912,00**	3.955.512,00	1.025.098.424,00
14	SIDEMEN	KERTA BUANA	88.195.808,00	88.195.808,00	88.195.808,00	88.195.808,00	71.669.775,00	**1.058.349.963,00**	4.315.104,00	1.062.665.067,00
15	SIDEMEN	LOKASARI	91.331.276,00	91.331.276,00	91.331.276,00	91.331.276,00	75.253.309,00	**1.095.976.345,00**	5.034.288,00	1.101.010.633,00
16	SIDEMEN	WISMA KERTA	83.979.940,00	83.979.940,00	83.979.940,00	83.979.940,00	67.308.195,00	**1.007.759.435,00**	3.595.920,00	1.011.355.355,00
17	MANGGIS	GEGELANG	114.369.142,00	114.369.142,00	114.369.142,00	114.369.142,00	91.196.324,00	**1.372.430.386,00**	4.674.696,00	1.377.105.082,00
18	MANGGIS	ANTIGA	109.618.876,00	109.618.876,00	109.618.876,00	109.618.876,00	88.433.437,00	**1.315.426.573,00**	5.034.288,00	1.320.460.861,00
19	MANGGIS	ULAKAN	102.216.176,00	102.216.176,00	102.216.176,00	102.216.176,00	83.098.641,00	**1.226.594.977,00**	5.034.288,00	1.231.629.265,00
20	MANGGIS	MANGGIS	122.467.480,00	122.467.480,00	122.467.480,00	122.467.480,00	101.664.348,00	**1.469.609.928,00**	7.191.840,00	1.476.801.768,00
21	MANGGIS	NYUHTEBEL	82.397.074,00	82.397.074,00	82.397.074,00	82.397.074,00	66.828.510,00	**988.765.024,00**	3.955.512,00	992.720.536,00
22	MANGGIS	TENGANAN	102.778.642,00	102.778.642,00	102.778.642,00	102.778.642,00	82.842.665,00	**1.233.344.427,00**	4.674.696,00	1.238.019.123,00
23	MANGGIS	NGIS	84.738.374,00	84.738.374,00	84.738.374,00	84.738.374,00	68.516.352,00	**1.016.860.966,00**	3.955.512,00	1.020.816.478,00
24	MANGGIS	SELUMBUNG	98.278.276,00	98.278.276,00	98.278.276,00	98.278.276,00	80.260.299,00	**1.179.340.035,00**	5.034.288,00	1.184.374.323,00
25	MANGGIS	PADANGBAI	88.100.108,00	88.100.108,00	88.100.108,00	88.100.108,00	71.600.898,00	**1.057.201.786,00**	4.315.104,00	1.061.516.890,00
26	MANGGIS	ANTIGA KELOD	95.021.808,00	95.021.808,00	95.021.808,00	95.021.808,00	76.590.310,00	**1.140.262.598,00**	4.315.104,00	1.144.577.702,00
27	MANGGIS	PESEDAHAN	76.450.840,00	76.450.840,00	76.450.840,00	76.450.840,00	61.881.454,00	**917.410.494,00**	3.595.920,00	921.006.414,00
28	MANGGIS	SENGKIDU	81.550.474,00	81.550.474,00	81.550.474,00	81.550.474,00	66.218.938,00	**978.606.252,00**	3.955.512,00	982.561.764,00

Dalam rupiah

NO	KEC.	DESA	PERHITUNGAN PAGU					
			ALOKASI PENGHASILAN TETAP	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH ADD PER DESA	Asumsi pemotongan BPJS 1% setahun	NILAI ADD YANG DISALURKAN KE DESA SETAHUN
			a	*b*	*c*	*d = a + b + c*	*e*	*f = d - e*
29	KARANGASEM	BUGBUG	438.855.600,00	539.945.854,20	471.810.740,80	1.450.612.194,00	5.393.880,00	1.445.218.314,00
30	KARANGASEM	TUMBU	381.274.800,00	539.945.854,20	222.061.020,80	1.143.281.675,00	4.674.696,00	1.138.606.979,00
31	KARANGASEM	SERAYA	669.178.800,00	539.945.854,20	525.361.368,80	1.734.486.022,00	8.270.616,00	1.726.215.406,00
32	KARANGASEM	SERAYA BARAT	496.436.400,00	539.945.854,20	332.911.498,80	1.369.293.753,00	6.113.064,00	1.363.180.689,00
33	KARANGASEM	SERAYA TIMUR	496.436.400,00	539.945.854,20	414.650.531,80	1.451.032.785,00	6.113.064,00	1.444.919.721,00
34	KARANGASEM	PERTIMA	611.598.000,00	539.945.854,20	339.667.731,80	1.491.211.586,00	7.551.432,00	1.483.660.154,00
35	KARANGASEM	TEGALLINGGAH	381.274.800,00	539.945.854,20	188.863.306,80	1.110.083.960,00	4.674.696,00	1.105.409.264,00
36	KARANGASEM	BUKIT	611.598.000,00	539.945.854,20	260.444.453,80	1.411.988.308,00	7.551.432,00	1.404.436.876,00
37	ABANG	ABABI	582.807.600,00	539.945.854,20	483.212.234,80	1.605.965.688,00	7.191.840,00	1.598.773.848,00
38	ABANG	TIYINGTALI	467.646.000,00	539.945.854,20	221.735.387,80	1.229.327.241,00	5.753.472,00	1.223.573.769,00
39	ABANG	BUNUTAN	525.226.800,00	539.945.854,20	822.013.421,80	1.887.186.075,00	6.472.656,00	1.880.713.419,00
40	ABANG	TISTA	410.065.200,00	539.945.854,20	396.324.144,80	1.346.335.198,00	5.034.288,00	1.341.300.910,00
41	ABANG	ABANG	410.065.200,00	539.945.854,20	219.256.198,80	1.169.267.252,00	5.034.288,00	1.164.232.964,00
42	ABANG	PIDPID	410.065.200,00	539.945.854,20	247.905.459,80	1.197.916.514,00	5.034.288,00	1.192.882.226,00
43	ABANG	DATAH	640.388.400,00	539.945.854,20	900.993.458,80	2.081.327.712,00	7.911.024,00	2.073.416.688,00
44	ABANG	CULIK	381.274.800,00	539.945.854,20	203.257.921,80	1.124.478.576,00	4.674.696,00	1.119.803.880,00
45	ABANG	PURWA KERTHI	381.274.800,00	539.945.854,20	282.531.269,80	1.203.751.924,00	4.674.696,00	1.199.077.228,00
46	ABANG	KERTHA MANDALA	352.484.400,00	539.945.854,20	269.339.347,80	1.161.769.602,00	4.315.104,00	1.157.454.498,00
47	ABANG	LABASARI	410.065.200,00	539.945.854,20	194.252.829,80	1.144.263.883,00	5.034.288,00	1.139.229.595,00
48	ABANG	NAWA KERTI	352.484.400,00	539.945.854,20	232.987.685,80	1.125.417.940,00	4.315.104,00	1.121.102.836,00
49	ABANG	KESIMPAR	381.274.800,00	539.945.854,20	148.786.231,80	1.070.006.885,00	4.674.696,00	1.065.332.189,00
50	ABANG	TRI BUANA	381.274.800,00	539.945.854,20	267.506.412,80	1.188.727.066,00	4.674.696,00	1.184.052.370,00
51	BEBANDEM	BUNGAYA	438.855.600,00	539.945.854,20	305.185.879,80	1.283.987.333,00	5.393.880,00	1.278.593.453,00
52	BEBANDEM	BUDAKELING	467.646.000,00	539.945.854,20	203.835.707,80	1.211.427.562,00	5.753.472,00	1.205.674.090,00
53	BEBANDEM	BEBANDEM	582.807.600,00	539.945.854,20	572.385.532,80	1.695.138.987,00	7.191.840,00	1.687.947.147,00
54	BEBANDEM	SIBETAN	525.226.800,00	539.945.854,20	441.106.989,80	1.506.279.643,00	6.472.656,00	1.499.806.987,00
55	BEBANDEM	JUNGUTAN	582.807.600,00	539.945.854,20	524.080.852,80	1.646.834.307,00	7.191.840,00	1.639.642.467,00
56	BEBANDEM	BUNGAYA KANGIN	352.484.400,00	539.945.854,20	281.268.723,80	1.173.698.977,00	4.315.104,00	1.169.383.873,00
57	BEBANDEM	BUANA GIRI	669.178.800,00	539.945.854,20	555.877.804,80	1.765.002.459,00	8.270.616,00	1.756.731.843,00

Dalam rupiah

NO	KEC.	DESA	PENYALURAN							
			ADD perBulan	Asumsi pemotongan BPJS 1%	Nilai Amprah perBulan oleh Desa	REALISASI JAN FEB MAR (PAGU INDUK)	REALISASI APR (PAGU INDUK)	REALISASI MEI	REALISASI JUNI	REALISASI JULI
			Januari s.d November							
29	KARANGASEM	BUGBUG	120.884.300,00	449.490,00	120.434.810,00	371.394.930,00	123.798.310,00	123.798.310,00	123.798.310,00	123.798.310,00
30	KARANGASEM	TUMBU	95.273.400,00	389.558,00	94.883.842,00	292.251.126,00	97.417.042,00	97.417.042,00	97.417.042,00	97.417.042,00
31	KARANGASEM	SERAYA	144.540.500,00	689.218,00	143.851.282,00	442.178.046,00	147.392.682,00	147.392.682,00	147.392.682,00	147.392.682,00
32	KARANGASEM	SERAYA BARAT	114.107.800,00	509.422,00	113.598.378,00	349.500.234,00	116.500.078,00	116.500.078,00	116.500.078,00	116.500.078,00
33	KARANGASEM	SERAYA TIMUR	120.919.300,00	509.422,00	120.409.878,00	370.750.134,00	123.583.378,00	123.583.378,00	123.583.378,00	123.583.378,00
34	KARANGASEM	PERTIMA	124.267.600,00	629.286,00	123.638.314,00	379.687.242,00	126.562.414,00	126.562.414,00	126.562.414,00	126.562.414,00
35	KARANGASEM	TEGALLINGGAH	92.506.900,00	389.558,00	92.117.342,00	283.620.726,00	94.540.242,00	94.540.242,00	94.540.242,00	94.540.242,00
36	KARANGASEM	BUKIT	117.665.600,00	629.286,00	117.036.314,00	359.091.342,00	119.697.114,00	119.697.114,00	119.697.114,00	119.697.114,00
37	ABANG	ABABI	133.830.400,00	599.320,00	133.231.080,00	409.897.440,00	136.632.480,00	136.632.480,00	136.632.480,00	136.632.480,00
38	ABANG	TIYINGTALI	102.443.900,00	479.456,00	101.964.444,00	313.489.632,00	104.496.544,00	104.496.544,00	104.496.544,00	104.496.544,00
39	ABANG	BUNUTAN	157.265.500,00	539.388,00	156.726.112,00	483.761.136,00	161.253.712,00	161.253.712,00	161.253.712,00	161.253.712,00
40	ABANG	TISTA	112.194.500,00	419.524,00	111.774.976,00	344.662.728,00	114.887.576,00	114.887.576,00	114.887.576,00	114.887.576,00
41	ABANG	ABANG	97.438.900,00	419.524,00	97.019.376,00	298.629.828,00	99.543.276,00	99.543.276,00	99.543.276,00	99.543.276,00
42	ABANG	PIDPID	99.826.300,00	419.524,00	99.406.776,00	306.077.628,00	102.025.876,00	102.025.876,00	102.025.876,00	102.025.876,00
43	ABANG	DATAH	173.443.900,00	659.252,00	172.784.648,00	532.724.544,00	177.574.848,00	177.574.848,00	177.574.848,00	177.574.848,00
44	ABANG	CULIK	93.706.500,00	389.558,00	93.316.942,00	287.362.926,00	95.787.642,00	95.787.642,00	95.787.642,00	95.787.642,00
45	ABANG	PURWA KERTHI	100.312.600,00	389.558,00	99.923.042,00	307.971.726,00	102.657.242,00	102.657.242,00	102.657.242,00	102.657.242,00
46	ABANG	KERTHA MANDALA	96.814.100,00	359.592,00	96.454.508,00	297.434.724,00	99.144.908,00	99.144.908,00	99.144.908,00	99.144.908,00
47	ABANG	LABASARI	95.355.300,00	419.524,00	94.935.776,00	292.129.428,00	97.376.476,00	97.376.476,00	97.376.476,00	97.376.476,00
48	ABANG	NAWA KERTI	93.784.800,00	359.592,00	93.425.208,00	287.984.124,00	95.994.708,00	95.994.708,00	95.994.708,00	95.994.708,00
49	ABANG	KESIMPAR	89.167.200,00	389.558,00	88.777.642,00	273.201.726,00	91.067.242,00	91.067.242,00	91.067.242,00	91.067.242,00
50	ABANG	TRI BUANA	99.060.500,00	389.558,00	98.670.942,00	304.065.726,00	101.355.242,00	101.355.242,00	101.355.242,00	101.355.242,00
51	BEBANDEM	BUNGAYA	106.998.900,00	449.490,00	106.549.410,00	328.076.730,00	109.358.910,00	109.358.910,00	109.358.910,00	109.358.910,00
52	BEBANDEM	BUDAKELING	100.952.200,00	479.456,00	100.472.744,00	308.836.332,00	102.945.444,00	102.945.444,00	102.945.444,00	102.945.444,00
53	BEBANDEM	BEBANDEM	141.261.500,00	599.320,00	140.662.180,00	433.079.940,00	144.359.980,00	144.359.980,00	144.359.980,00	144.359.980,00
54	BEBANDEM	SIBETAN	125.523.300,00	539.388,00	124.983.912,00	384.735.636,00	128.245.212,00	128.245.212,00	128.245.212,00	128.245.212,00
55	BEBANDEM	JUNGUTAN	137.236.100,00	599.320,00	136.636.780,00	420.522.240,00	140.174.080,00	140.174.080,00	140.174.080,00	140.174.080,00
56	BEBANDEM	BUNGAYA KANGIN	97.808.200,00	359.592,00	97.448.608,00	300.535.824,00	100.178.608,00	100.178.608,00	100.178.608,00	100.178.608,00
57	BEBANDEM	BUANA GIRI	147.083.500,00	689.218,00	146.394.282,00	450.111.546,00	150.037.182,00	150.037.182,00	150.037.182,00	150.037.182,00

Dalam rupiah

NO	KEC.	DESA	PENYALURAN							
			REALISASI AGUSTUS	REALISASI SEPT	REALISASI OKT	REALISASI NOV	REALISASI DES	TOTAL REALISASI JAN SD DES 2025	TOTALBPJS 1% JAN SD DES 2025	JUMLAH SALUR + BPJS 1%
29	KARANGASEM	BUGBUG	120.434.810,00	120.434.810,00	120.434.810,00	120.434.810,00	96.890.904,00	**1.445.218.314,00**	5.393.880,00	1.450.612.194,00
30	KARANGASEM	TUMBU	94.883.842,00	94.883.842,00	94.883.842,00	94.883.842,00	77.152.317,00	**1.138.606.979,00**	4.674.696,00	1.143.281.675,00
31	KARANGASEM	SERAYA	143.851.282,00	143.851.282,00	143.851.282,00	143.851.282,00	119.061.504,00	**1.726.215.406,00**	8.270.616,00	1.734.486.022,00
32	KARANGASEM	SERAYA BARAT	113.598.378,00	113.598.378,00	113.598.378,00	113.598.378,00	93.286.631,00	**1.363.180.689,00**	6.113.064,00	1.369.293.753,00
33	KARANGASEM	SERAYA TIMUR	120.409.878,00	120.409.878,00	120.409.878,00	120.409.878,00	98.196.563,00	**1.444.919.721,00**	6.113.064,00	1.451.032.785,00
34	KARANGASEM	PERTIMA	123.638.314,00	123.638.314,00	123.638.314,00	123.638.314,00	103.170.000,00	**1.483.660.154,00**	7.551.432,00	1.491.211.586,00
35	KARANGASEM	TEGALLINGGAH	92.117.342,00	92.117.342,00	92.117.342,00	92.117.342,00	75.158.202,00	**1.105.409.264,00**	4.674.696,00	1.110.083.960,00
36	KARANGASEM	BUKIT	117.036.314,00	117.036.314,00	117.036.314,00	117.036.314,00	98.411.822,00	**1.404.436.876,00**	7.551.432,00	1.411.988.308,00
37	ABANG	ABABI	133.231.080,00	133.231.080,00	133.231.080,00	133.231.080,00	109.422.168,00	**1.598.773.848,00**	7.191.840,00	1.605.965.688,00
38	ABANG	TIYINGTALI	101.964.444,00	101.964.444,00	101.964.444,00	101.964.444,00	84.240.185,00	**1.223.573.769,00**	5.753.472,00	1.229.327.241,00
39	ABANG	BUNUTAN	156.726.112,00	156.726.112,00	156.726.112,00	156.726.112,00	125.032.987,00	**1.880.713.419,00**	6.472.656,00	1.887.186.075,00
40	ABANG	TISTA	111.774.976,00	111.774.976,00	111.774.976,00	111.774.976,00	89.987.974,00	**1.341.300.910,00**	5.034.288,00	1.346.335.198,00
41	ABANG	ABANG	97.019.376,00	97.019.376,00	97.019.376,00	97.019.376,00	79.352.528,00	**1.164.232.964,00**	5.034.288,00	1.169.267.252,00
42	ABANG	PIDPID	99.406.776,00	99.406.776,00	99.406.776,00	99.406.776,00	81.073.990,00	**1.192.882.226,00**	5.034.288,00	1.197.916.514,00
43	ABANG	DATAH	172.784.648,00	172.784.648,00	172.784.648,00	172.784.648,00	139.254.160,00	**2.073.416.688,00**	7.911.024,00	2.081.327.712,00
44	ABANG	CULIK	93.316.942,00	93.316.942,00	93.316.942,00	93.316.942,00	76.022.618,00	**1.119.803.880,00**	4.674.696,00	1.124.478.576,00
45	ABANG	PURWA KERTHI	99.923.042,00	99.923.042,00	99.923.042,00	99.923.042,00	80.784.366,00	**1.199.077.228,00**	4.674.696,00	1.203.751.924,00
46	ABANG	KERTHA MANDALA	96.454.508,00	96.454.508,00	96.454.508,00	96.454.508,00	77.622.110,00	**1.157.454.498,00**	4.315.104,00	1.161.769.602,00
47	ABANG	LABASARI	94.935.776,00	94.935.776,00	94.935.776,00	94.935.776,00	77.851.159,00	**1.139.229.595,00**	5.034.288,00	1.144.263.883,00
48	ABANG	NAWA KERTI	93.425.208,00	93.425.208,00	93.425.208,00	93.425.208,00	75.439.048,00	**1.121.102.836,00**	4.315.104,00	1.125.417.940,00
49	ABANG	KESIMPAR	88.777.642,00	88.777.642,00	88.777.642,00	88.777.642,00	72.750.927,00	**1.065.332.189,00**	4.674.696,00	1.070.006.885,00
50	ABANG	TRI BUANA	98.670.942,00	98.670.942,00	98.670.942,00	98.670.942,00	79.881.908,00	**1.184.052.370,00**	4.674.696,00	1.188.727.066,00
51	BEBANDEM	BUNGAYA	106.549.410,00	106.549.410,00	106.549.410,00	106.549.410,00	86.883.443,00	**1.278.593.453,00**	5.393.880,00	1.283.987.333,00
52	BEBANDEM	BUDAKELING	100.472.744,00	100.472.744,00	100.472.744,00	100.472.744,00	83.165.006,00	**1.205.674.090,00**	5.753.472,00	1.211.427.562,00
53	BEBANDEM	BEBANDEM	140.662.180,00	140.662.180,00	140.662.180,00	140.662.180,00	114.778.567,00	**1.687.947.147,00**	7.191.840,00	1.695.138.987,00
54	BEBANDEM	SIBETAN	124.983.912,00	124.983.912,00	124.983.912,00	124.983.912,00	102.154.855,00	**1.499.806.987,00**	6.472.656,00	1.506.279.643,00
55	BEBANDEM	JUNGUTAN	136.636.780,00	136.636.780,00	136.636.780,00	136.636.780,00	111.876.787,00	**1.639.642.467,00**	7.191.840,00	1.646.834.307,00
56	BEBANDEM	BUNGAYA KANGIN	97.448.608,00	97.448.608,00	97.448.608,00	97.448.608,00	78.339.185,00	**1.169.383.873,00**	4.315.104,00	1.173.698.977,00
57	BEBANDEM	BUANA GIRI	146.394.282,00	146.394.282,00	146.394.282,00	146.394.282,00	120.894.441,00	**1.756.731.843,00**	8.270.616,00	1.765.002.459,00

Dalam rupiah

NO	KEC.	DESA	PERHITUNGAN PAGU					
			ALOKASI PENGHASILAN TETAP	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH ADD PER DESA	Asumsi pemotongan BPJS 1% setahun	NILAI ADD YANG DISALURKAN KE DESA SETAHUN
			a	*b*	*c*	*d = a + b + c*	*e*	*f = d - e*
58	BEBANDEM	MACANG	294.903.600,00	539.945.854,20	103.339.230,80	938.188.685,00	3.595.920,00	934.592.765,00
59	SELAT	MUNCAN	611.598.000,00	539.945.854,20	397.288.100,80	1.548.831.954,00	7.551.432,00	1.541.280.522,00
60	SELAT	SELAT	410.065.200,00	539.945.854,20	157.915.669,80	1.107.926.723,00	5.034.288,00	1.102.892.435,00
61	SELAT	DUDA	467.646.000,00	539.945.854,20	278.416.585,80	1.286.008.439,00	5.753.472,00	1.280.254.967,00
62	SELAT	SEBUDI	525.226.800,00	539.945.854,20	615.026.958,80	1.680.199.612,00	6.472.656,00	1.673.726.956,00
63	SELAT	DUDA UTARA	410.065.200,00	539.945.854,20	305.343.809,80	1.255.354.864,00	5.034.288,00	1.250.320.576,00
64	SELAT	DUDA TIMUR	496.436.400,00	539.945.854,20	358.078.174,80	1.394.460.429,00	6.113.064,00	1.388.347.365,00
65	SELAT	PERING SARI	525.226.800,00	539.945.854,20	318.323.682,80	1.383.496.337,00	6.472.656,00	1.377.023.681,00
66	SELAT	AMERTA BHUANA	352.484.400,00	539.945.854,20	202.358.446,80	1.094.788.701,00	4.315.104,00	1.090.473.597,00
67	KUBU	BAN	669.178.800,00	539.945.854,20	1.389.734.252,80	2.598.858.906,00	8.270.616,00	2.590.588.290,00
68	KUBU	DUKUH	410.065.200,00	539.945.854,20	479.861.163,80	1.429.872.217,00	5.034.288,00	1.424.837.929,00
69	KUBU	KUBU	410.065.200,00	539.945.854,20	324.355.298,80	1.274.366.352,00	5.034.288,00	1.269.332.064,00
70	KUBU	TIANYAR	352.484.400,00	539.945.854,20	736.153.577,80	1.628.583.831,00	4.315.104,00	1.624.268.727,00
71	KUBU	TIANYAR BARAT	640.388.400,00	539.945.854,20	731.026.568,80	1.911.360.822,00	7.911.024,00	1.903.449.798,00
72	KUBU	TIANYAR TENGAH	582.807.600,00	539.945.854,20	556.820.147,80	1.679.573.601,00	7.191.840,00	1.672.381.761,00
73	KUBU	TULAMBEN	410.065.200,00	539.945.854,20	766.615.924,80	1.716.626.979,00	5.034.288,00	1.711.592.691,00
74	KUBU	BATURINGGIT	323.694.000,00	539.945.854,20	433.586.673,80	1.297.226.527,00	3.955.512,00	1.293.271.015,00
75	KUBU	SUKADANA	467.646.000,00	539.945.854,20	578.870.637,80	1.586.462.491,00	5.753.472,00	1.580.709.019,00
JUMLAH			**33.749.091.600,00**	**40.495.939.065,00**	**26.997.292.710,00**	**101.242.323.375,00**	**414.969.168,00**	**100.827.354.207,00**

Dalam rupiah

NO	KEC.	DESA	PENYALURAN							
			ADD perBulan	Asumsi pemotongan BPJS 1%	Nilai Amprah perBulan oleh Desa	REALISASI JAN FEB MAR (PAGU INDUK)	REALISASI APR (PAGU INDUK)	REALISASI MEI	REALISASI JUNI	REALISASI JULI
			Januari s.d November							
58	BEBANDEM	MACANG	78.182.300,00	299.660,00	77.882.640,00	240.063.720,00	80.021.240,00	80.021.240,00	80.021.240,00	80.021.240,00
59	SELAT	MUNCAN	129.069.300,00	629.286,00	128.440.014,00	394.667.142,00	131.555.714,00	131.555.714,00	131.555.714,00	131.555.714,00
60	SELAT	SELAT	92.327.200,00	419.524,00	91.907.676,00	282.682.728,00	94.227.576,00	94.227.576,00	94.227.576,00	94.227.576,00
61	SELAT	DUDA	107.167.300,00	479.456,00	106.687.844,00	328.225.332,00	109.408.444,00	109.408.444,00	109.408.444,00	109.408.444,00
62	SELAT	SEBUDI	140.016.600,00	539.388,00	139.477.212,00	429.950.136,00	143.316.712,00	143.316.712,00	143.316.712,00	143.316.712,00
63	SELAT	DUDA UTARA	104.612.900,00	419.524,00	104.193.376,00	321.010.128,00	107.003.376,00	107.003.376,00	107.003.376,00	107.003.376,00
64	SELAT	DUDA TIMUR	116.205.000,00	509.422,00	115.695.578,00	356.042.934,00	118.680.978,00	118.680.978,00	118.680.978,00	118.680.978,00
65	SELAT	PERING SARI	115.291.300,00	539.388,00	114.751.912,00	352.815.336,00	117.605.112,00	117.605.112,00	117.605.112,00	117.605.112,00
66	SELAT	AMERTA BHUANA	91.232.300,00	359.592,00	90.872.708,00	280.021.224,00	93.340.408,00	93.340.408,00	93.340.408,00	93.340.408,00
67	KUBU	BAN	216.571.500,00	689.218,00	215.882.282,00	666.891.846,00	222.297.282,00	222.297.282,00	222.297.282,00	222.297.282,00
68	KUBU	DUKUH	119.156.000,00	419.524,00	118.736.476,00	366.380.028,00	122.126.676,00	122.126.676,00	122.126.676,00	122.126.676,00
69	KUBU	KUBU	106.197.100,00	419.524,00	105.777.576,00	325.952.628,00	108.650.876,00	108.650.876,00	108.650.876,00	108.650.876,00
70	KUBU	TIANYAR	135.715.300,00	359.592,00	135.355.708,00	418.793.724,00	139.597.908,00	139.597.908,00	139.597.908,00	139.597.908,00
71	KUBU	TIANYAR BARAT	159.280.000,00	659.252,00	158.620.748,00	488.537.844,00	162.845.948,00	162.845.948,00	162.845.948,00	162.845.948,00
72	KUBU	TIANYAR TENGAH	139.964.400,00	599.320,00	139.365.080,00	429.033.540,00	143.011.180,00	143.011.180,00	143.011.180,00	143.011.180,00
73	KUBU	TULAMBEN	143.052.200,00	419.524,00	142.632.676,00	440.928.528,00	146.976.176,00	146.976.176,00	146.976.176,00	146.976.176,00
74	KUBU	BATURINGGIT	108.102.200,00	329.626,00	107.772.574,00	333.026.622,00	111.008.874,00	111.008.874,00	111.008.874,00	111.008.874,00
75	KUBU	SUKADANA	132.205.200,00	479.456,00	131.725.744,00	406.335.132,00	135.445.044,00	135.445.044,00	135.445.044,00	135.445.044,00
JUMLAH			**8.436.856.600,00**	**34.580.764,00**	**8.402.275.836,00**	**25.879.945.008,00**	**8.626.648.336,00**	**8.626.648.336,00**	**8.626.648.336,00**	**8.626.648.336,00**

Dalam rupiah

NO	KEC.	DESA	PENYALURAN							
			REALISASI AGUSTUS	REALISASI SEPT	REALISASI OKT	REALISASI NOV	REALISASI DES	TOTAL REALISASI JAN SD DES 2025	TOTALBPJS 1% JAN SD DES 2025	JUMLAH SALUR + BPJS 1%
58	BEBANDEM	MACANG	77.882.640,00	77.882.640,00	77.882.640,00	77.882.640,00	62.913.525,00	**934.592.765,00**	3.595.920,00	938.188.685,00
59	SELAT	MUNCAN	128.440.014,00	128.440.014,00	128.440.014,00	128.440.014,00	106.630.468,00	**1.541.280.522,00**	7.551.432,00	1.548.831.954,00
60	SELAT	SELAT	91.907.676,00	91.907.676,00	91.907.676,00	91.907.676,00	75.668.699,00	**1.102.892.435,00**	5.034.288,00	1.107.926.723,00
61	SELAT	DUDA	106.687.844,00	106.687.844,00	106.687.844,00	106.687.844,00	87.644.483,00	**1.280.254.967,00**	5.753.472,00	1.286.008.439,00
62	SELAT	SEBUDI	139.477.212,00	139.477.212,00	139.477.212,00	139.477.212,00	112.601.124,00	**1.673.726.956,00**	6.472.656,00	1.680.199.612,00
63	SELAT	DUDA UTARA	104.193.376,00	104.193.376,00	104.193.376,00	104.193.376,00	84.523.440,00	**1.250.320.576,00**	5.034.288,00	1.255.354.864,00
64	SELAT	DUDA TIMUR	115.695.578,00	115.695.578,00	115.695.578,00	115.695.578,00	94.798.207,00	**1.388.347.365,00**	6.113.064,00	1.394.460.429,00
65	SELAT	PERING SARI	114.751.912,00	114.751.912,00	114.751.912,00	114.751.912,00	94.780.249,00	**1.377.023.681,00**	6.472.656,00	1.383.496.337,00
66	SELAT	AMERTA BHUANA	90.872.708,00	90.872.708,00	90.872.708,00	90.872.708,00	73.599.909,00	**1.090.473.597,00**	4.315.104,00	1.094.788.701,00
67	KUBU	BAN	215.882.282,00	215.882.282,00	215.882.282,00	215.882.282,00	170.978.188,00	**2.590.588.290,00**	8.270.616,00	2.598.858.906,00
68	KUBU	DUKUH	118.736.476,00	118.736.476,00	118.736.476,00	118.736.476,00	95.005.293,00	**1.424.837.929,00**	5.034.288,00	1.429.872.217,00
69	KUBU	KUBU	105.777.576,00	105.777.576,00	105.777.576,00	105.777.576,00	85.665.628,00	**1.269.332.064,00**	5.034.288,00	1.274.366.352,00
70	KUBU	TIANYAR	135.355.708,00	135.355.708,00	135.355.708,00	135.355.708,00	105.660.539,00	**1.624.268.727,00**	4.315.104,00	1.628.583.831,00
71	KUBU	TIANYAR BARAT	158.620.748,00	158.620.748,00	158.620.748,00	158.620.748,00	129.045.170,00	**1.903.449.798,00**	7.911.024,00	1.911.360.822,00
72	KUBU	TIANYAR TENGAH	139.365.080,00	139.365.080,00	139.365.080,00	139.365.080,00	113.843.181,00	**1.672.381.761,00**	7.191.840,00	1.679.573.601,00
73	KUBU	TULAMBEN	142.632.676,00	142.632.676,00	142.632.676,00	142.632.676,00	112.228.755,00	**1.711.592.691,00**	5.034.288,00	1.716.626.979,00
74	KUBU	BATURINGGIT	107.772.574,00	107.772.574,00	107.772.574,00	107.772.574,00	85.118.601,00	**1.293.271.015,00**	3.955.512,00	1.297.226.527,00
75	KUBU	SUKADANA	131.725.744,00	131.725.744,00	131.725.744,00	131.725.744,00	105.690.735,00	**1.580.709.019,00**	5.753.472,00	1.586.462.491,00
JUMLAH			**8.402.275.836,00**	**8.402.275.836,00**	**8.402.275.836,00**	**8.402.275.836,00**	**6.831.712.511,00**	**100.827.354.207,00**	**414.969.168,00**	**101.242.323.375,00**

Rincian Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Karangasem TA 2025

Dalam Rupiah

No	Kecamatan / Desa	Total Pagu	Transfer dari RKUD ke Rekening Desa		
			Tahap I	Sisa	
a	b	c	d	e	f = e / c * 100%
	Kecamatan Rendang				
1	Desa Pempatan	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-
2	Desa Besakih	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
3	Desa Menanga	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
4	Desa Rendang	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-
5	Desa Nongan	168.000.000,00	168.000.000,00	-	-
6	Desa Pesaban	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
	Kecamatan Selat				
7	Desa Muncan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
8	Desa Peringsari	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
9	Desa Sebudi	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-
10	Desa Amerta Bhuana	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
11	Desa Selat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
12	Desa Duda	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
13	Desa Duda Utara	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
14	Desa Duda Timur	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
	Kecamatan Sidemen				
15	Desa Sinduwati	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
16	Desa Sidemen	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
17	Desa Telaga Tawang	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
18	Desa Tri Eka Buana	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
19	Desa Talibeng	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
20	Desa Lokasari	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
21	Desa Kerta Buana	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
22	Desa WismaKerta	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
23	Desa Tangkup	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
24	Desa Sangkan Gunung	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-
	Kecamatan Bebandem				
25	Desa Sibetan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
26	Desa Jungutan	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-
27	Desa Macang	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
28	Desa Bebandem	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-
29	Desa Bhuana Giri	228.000.000,00	228.000.000,00	-	-
30	Desa Budakeling	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
31	Desa Bungaya	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
32	Desa Bungaya Kangin	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
	Kecamatan Manggis				
33	Desa Gegelang	132.000.000,00	132.000.000,00	-	-
34	Desa Antiga	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-
35	Desa Antiga Kelod	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
36	Desa Padangbai	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
37	Desa Ulakan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-
38	Desa Manggis	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-
39	Desa Selumbung	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
40	Desa Ngis	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
41	Desa Nyuhtebel	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
42	Desa Tenganan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-
43	Desa Sengkidu	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
44	Desa Pesedahan	-	-	-	-
	Kecamatan Karangasem				
45	Desa Bugbug	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
46	Desa Pertima	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-
47	Desa Tegallinggah	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
48	Desa Bukit	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-
49	Desa Tumbu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
50	Desa Seraya Barat	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-
51	Desa Seraya	168.000.000,00	168.000.000,00	-	-
52	Desa Seraya Timur	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-

No	Kecamatan / Desa	Total Pagu	Transfer dari RKUD ke Rekening Desa		
			Tahap I	Sisa	
a	b	c	d	e	f = e / c * 100%
	Kecamatan Abang				
53	Desa Ababi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
54	Desa Tiyingtali	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-
55	Desa Abang	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
56	Desa Pidpid	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
57	Desa NawaKerti	-	-	-	-
58	Desa Kesimpar	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
59	Desa Tista	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
60	Desa Tribuana	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-
61	Desa Kertha Mandala	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
62	Desa Culik	-	-	-	-
63	Desa Labasari	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
64	Desa Datah	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
65	Desa Purwakerti	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
66	Desa Bunutan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
	Kecamatan Kubu				
67	Desa Tulamben	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
68	Desa Dukuh	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
69	Desa Kubu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
70	Desa Baturinggit	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
71	Desa Sukadana	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-
72	Desa Ban	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-
73	Desa Tianyar	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-
74	Desa Tianyar Tengah	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-
75	Desa Tianyar Barat	288.000.000,00	288.000.000,00	-	-
Jumlah		**4.860.000.000,00**	**4.860.000.000,00**	**-**	**-**

Rincian Dana Desa Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2025

Dalam Rupiah

NO	DESA		STATUS DESA	PAGU	PAGU BLT	KETAHANAN PANGAN	STUNTING	PROKLIM	POTENSI_DESA	TI
1	Ababi Abang 5107052001	Ababi	MANDIRI	1.303.701.000,00	90.000.000 (25KPM)	269.511.400,00	319.482.900,00	13.696.800,00	-	4.231.700,00
2	Abang Abang 5107052005	Abang	MANDIRI	936.809.000,00	54.000.000 (15 KPM)	187.360.000,00	401.118.500,00	-	-	5.000.000,00
3	Amerta Bhuana Selat 5107072008	Amerta Bhuana	MAJU	892.202.000,00	82.800.000 (23 KPM)	655.781.250,00	92.915.000,00	-	-	5.000.000,00
4	Antiga Manggis 5107032002	Antiga	MAJU	1.080.397.000,00	162.000.000 (45 KPM)	216.680.000,00	115.666.600,00	10.000.000,00	3.545.000,00	5.352.020,00
5	Antiga Kelod Manggis 5107032010	Antiga Kelod	MAJU	1.003.039.000,00	144.000.000 (40 KPM)	201.800.000,00	71.080.000,00	2.500.000,00	-	-
6	Ban Kubu 5107082001	Ban	MAJU	2.005.119.000,00	129.600.000 (36 KPM)	386.863.000,00	610.585.000,00	299.766.000,00	-	27.960.000,00
7	Baturinggit Kubu 5107082008	Baturinggit	MANDIRI	1.033.690.000,00	100.800.000 (28 KPM)	324.468.050,00	21.865.000,00	-	-	6.000.000,00
8	Bebandem Bebandem 5107062003	Bebandem	MANDIRI	1.522.128.000,00	86.400.000 (24 KPM)	350.510.070,00	347.997.800,00	-	-	-
9	Besakih Rendang 5107012004	Besakih	MANDIRI	1.111.414.000,00	118.800.000 (33 KPM)	230.200.000,00	410.760.000,00	31.950.000,00	-	1.000.000,00
10	Bhuana Giri Bebandem 5107062007	Bhuana Giri	MAJU	1.297.975.000,00	180.000.000 (50 KPM)	262.335.000,00	398.250.120,00	15.000.000,00	12.329.610,00	-
11	Budakeling Bebandem 5107062002	Budakeling	MANDIRI	972.931.000,00	108.000.000 (30 KPM)	194.586.200,00	332.335.000,00	-	-	-
12	Bugbug Karangasem 5107042001	Bugbug	MANDIRI	1.256.766.000,00	100.800.000 (28 KPM)	252.000.000,00	40.475.000,00	-	-	-
13	Bukit Karangasem 5107042011	Bukit	MANDIRI	1.357.015.000,00	158.400.000 (44 KPM)	271.403.000,00	265.981.000,00	-	-	-
14	Bungaya Bebandem 5107062001	Bungaya	MANDIRI	1.257.223.000,00	126.000.000 (35 KPM)	252.410.000,00	154.300.000,00	72.677.450,00	-	19.040.000,00
15	Bungaya Kangin Bebandem 5107062006	Bungaya Kangin	MANDIRI	1.037.065.000,00	154.800.000 (43 KPM)	207.413.000,00	266.238.000,00	-	-	-
16	Bunutan Abang 5107052003	Bunutan	MANDIRI	1.931.220.000,00	190.800.000 (53 KPM)	388.512.700,00	300.415.600,00	-	-	-
17	Culik Abang 5107052008	Culik	MANDIRI	888.167.000,00	115.200.000 (32 KPM)	179.665.900,00	207.078.250,00	31.233.500,00	6.500.000,00	10.506.390,00
18	Datah Abang 5107052007	Datah	MANDIRI	1.871.223.000,00	90.000.000 (25 KPM)	321.401.200,00	301.972.000,00	10.500.000,00	-	20.000.000,00
19	Duda Selat 5107072003	Duda	MANDIRI	1.213.354.000,00	172.800.000 (48 KPM)	380.630.000,00	48.736.000,00	-	-	-
20	Duda Timur Selat 5107072006	Duda Timur	MANDIRI	1.100.548.000,00	162.000.000 (45 KPM)	288.791.000,00	161.427.000,00	-	126.418.000,00	5.350.000,00

Dalam Rupiah

NO	DESA		PADAT_KARYA	JML_EARMARK	EARMARK (1)	EARMARK (2)	NON EARMARK (1)	NON EARMARK (2)	JML_NON EARMARK	TOTAL REALISASI	SISA
1	Ababi Abang 5107052001	Ababi	491.179.780,00	1.188.102.580,00	712.861.548,00	475.241.032,00	69.359.052,00	46.239.368,00	115.598.420,00	1.303.701.000,00	-
2	Abang Abang 5107052005	Abang	181.470.500,00	828.949.000,00	497.369.400,00	331.579.600,00	64.716.000,00	43.144.000,00	107.860.000,00	936.809.000,00	-
3	Amerta Bhuana Selat 5107072008	Amerta Bhuana	-	836.496.250,00	501.897.750,00	334.598.500,00	22.282.300,00	33.423.450,00	55.705.750,00	892.202.000,00	-
4	Antiga Manggis 5107032002	Antiga	-	513.243.620,00	307.946.172,00	205.297.448,00	226.861.352,00	340.292.028,00	567.153.380,00	1.080.397.000,00	-
5	Antiga Kelod Manggis 5107032010	Antiga Kelod	-	419.380.000,00	251.628.000,00	167.752.000,00	233.463.600,00	350.195.400,00	583.659.000,00	1.003.039.000,00	-
6	Ban Kubu 5107082001	Ban	-	1.454.774.000,00	872.864.400,00	581.909.600,00	220.138.000,00	330.207.000,00	550.345.000,00	2.005.119.000,00	-
7	Baturinggit Kubu 5107082008	Baturinggit	547.764.680,00	1.000.897.730,00	600.538.638,00	400.359.092,00	19.675.362,00	13.116.908,00	32.792.270,00	1.033.690.000,00	-
8	Bebandem Bebandem 5107062003	Bebandem	-	784.907.870,00	470.944.722,00	313.963.148,00	442.332.078,00	294.888.052,00	737.220.130,00	1.522.128.000,00	-
9	Besakih Rendang 5107012004	Besakih	-	792.710.000,00	475.626.000,00	317.084.000,00	191.222.400,00	127.481.600,00	318.704.000,00	1.111.414.000,00	-
10	Bhuana Giri Bebandem 5107062007	Bhuana Giri	16.324.100,00	884.238.830,00	530.543.298,00	353.695.532,00	165.494.468,00	248.241.702,00	413.736.170,00	1.297.975.000,00	-
11	Budakeling Bebandem 5107062002	Budakeling	119.746.870,00	754.668.070,00	452.800.842,00	301.867.228,00	130.957.758,00	87.305.172,00	218.262.930,00	972.931.000,00	-
12	Bugbug Karangasem 5107042001	Bugbug	-	393.275.000,00	235.965.000,00	157.310.000,00	518.094.600,00	345.396.400,00	863.491.000,00	1.256.766.000,00	-
13	Bukit Karangasem 5107042011	Bukit	316.285.800,00	1.012.069.800,00	607.241.880,00	404.827.920,00	206.967.120,00	137.978.080,00	344.945.200,00	1.357.015.000,00	-
14	Bungaya Bebandem 5107062001	Bungaya	558.138.000,00	1.182.565.450,00	709.539.270,00	473.026.180,00	44.794.530,00	29.863.020,00	74.657.550,00	1.257.223.000,00	-
15	Bungaya Kangin Bebandem 5107062006	Bungaya Kangin	165.303.000,00	793.754.000,00	476.252.400,00	317.501.600,00	145.986.600,00	97.324.400,00	243.311.000,00	1.037.065.000,00	-
16	Bunutan Abang 5107052003	Bunutan	678.000.900,00	1.557.729.200,00	934.637.520,00	623.091.680,00	224.094.480,00	149.396.320,00	373.490.800,00	1.931.220.000,00	-
17	Culik Abang 5107052008	Culik	310.409.200,00	860.593.240,00	516.355.944,00	344.237.296,00	16.544.256,00	11.029.504,00	27.573.760,00	888.167.000,00	-
18	Datah Abang 5107052007	Datah	704.165.700,00	1.448.038.900,00	868.823.340,00	579.215.560,00	253.910.460,00	169.273.640,00	423.184.100,00	1.871.223.000,00	-
19	Duda Selat 5107072003	Duda	-	602.166.000,00	361.299.600,00	240.866.400,00	366.712.800,00	244.475.200,00	611.188.000,00	1.213.354.000,00	-
20	Duda Timur Selat 5107072006	Duda Timur	201.840.000,00	945.826.000,00	567.495.600,00	378.330.400,00	92.833.200,00	61.888.800,00	154.722.000,00	1.100.548.000,00	-

Dalam Rupiah

NO	DESA		STATUS DESA	PAGU	PAGU BLT	KETAHANAN PANGAN	STUNTING	PROKLIM	POTENSI_DESA	TI
21	Duda Utara Selat 5107072005	Duda Utara	MANDIRI	1.172.221.000,00	129.600.000 (36 KPM)	508.189.000,00	74.331.180,00	-	-	-
22	Dukuh Kubu 5107082002	Dukuh	MAJU	1.125.823.000,00	151.200.000 (42 KPM)	204.000.000,00	156.015.000,00	-	-	-
23	Gegelang Manggis 5107032001	Gegelang	MAJU	1.209.439.000,00	180.000.000 (50 KPM)	241.887.800,00	134.444.100,00	-	-	-
24	Jungutan Bebandem 5107062005	Jungutan	MANDIRI	1.252.096.000,00	187.200.000 (52 KPM)	273.562.560,00	345.195.140,00	-	-	-
25	Kertha Buana Sidemen 5107022008	Kertha Buana	MAJU	877.884.000,00	122.400.000 (34 KPM)	355.862.000,00	163.954.960,00	109.140.040,00	-	-
26	Kertha Mandala Abang 5107052010	Kertha Mandala	MANDIRI	1.259.020.000,00	108.000.000 (30 KPM)	262.400.000,00	283.957.000,00	-	-	-
27	Kesimpar Abang 5107052013	Kesimpar	MAJU	866.865.000,00	86.400.000 (24 KPM)	174.000.000,00	222.212.500,00	-	-	2.500.000,00
28	Kubu Kubu 5107082003	Kubu	MANDIRI	909.188.000,00	108.000.000 (30 KPM)	202.960.000,00	127.338.360,00	-	-	-
29	Laba Sari Abang 5107052011	Laba Sari	MANDIRI	893.168.000,00	129.600.000 (36 KPM)	290.681.000,00	30.810.500,00	5.970.000,00	-	45.570.000,00
30	Lokasari Sidemen 5107022009	Lokasari	MAJU	827.487.000,00	108.000.000 (30 KPM)	449.813.500,00	132.469.000,00	-	9.152.660,00	4.000.000,00
31	Macang Bebandem 5107062008	Macang	MAJU	740.052.000,00	90.000.000 (25 KPM)	148.541.500,00	129.935.400,00	305.549.000,00	20.693.900,00	10.846.400,00
32	Manggis Manggis 5107032004	Manggis	MAJU	1.031.341.000,00	90.000.000 (25 KPM)	208.000.000,00	257.045.000,00	-	-	-
33	Menanga Rendang 5107012003	Menanga	MANDIRI	1.246.681.000,00	28.800.000 (8 KPM)	250.000.000,00	433.442.000,00	-	-	-
34	Muncan Selat 5107072001	Muncan	MANDIRI	1.096.105.000,00	140.400.000 (39 KPM)	225.000.000,00	45.774.100,00	-	-	10.840.000,00
35	Nawa Kerti Abang 5107052012	Nawa Kerti	MAJU	1.075.925.000,00	54.000.000 (15 KPM)	266.747.350,00	288.055.400,00	-	-	-
36	Ngis Manggis 5107032007	Ngis	MAJU	781.677.000,00	111.600.000 (31 KPM)	159.711.800,00	120.585.000,00	-	-	-
37	Nongan Rendang 5107012001	Nongan	MANDIRI	1.035.187.000,00	126.000.000 (35 KPM)	210.000.000,00	241.017.000,00	-	-	-
38	Nyuh Tebel Manggis 5107032005	Nyuh Tebel	MANDIRI	756.300.000,00	72.000.000 (20 KPM)	162.178.000,00	132.864.000,00	5.200.000,00	64.467.910,00	16.500.000,00
39	Padangbai Manggis 5107032009	Padangbai	MANDIRI	846.008.000,00	118.800.000 (33 KPM)	172.910.000,00	190.048.890,00	-	-	-
40	Pempatan Rendang 5107012005	Pempatan	MANDIRI	1.588.539.000,00	223.200.000 (62 KPM)	329.745.000,00	481.845.500,00	45.935.000,00	7.528.000,00	4.500.000,00

Dalam Rupiah

NO	DESA		PADAT_KARYA	JML_EARMARK	EARMARK (1)	EARMARK (2)	NON EARMARK (1)	NON EARMARK (2)	JML_NON EARMARK	TOTAL REALISASI	SISA
21	Duda Utara Selat 5107072005	Duda Utara	359.197.500,00	1.071.317.680,00	642.790.608,00	428.527.072,00	60.541.992,00	40.361.328,00	100.903.320,00	1.172.221.000,00	-
22	Dukuh Kubu 5107082002	Dukuh	549.975.650,00	1.061.190.650,00	636.714.390,00	424.476.260,00	25.852.940,00	38.779.410,00	64.632.350,00	1.125.823.000,00	-
23	Gegelang Manggis 5107032001	Gegelang	-	556.331.900,00	333.799.140,00	222.532.760,00	261.242.840,00	391.864.260,00	653.107.100,00	1.209.439.000,00	-
24	Jungutan Bebandem 5107062005	Jungutan	-	805.957.700,00	483.574.620,00	322.383.080,00	267.682.980,00	178.455.320,00	446.138.300,00	1.252.096.000,00	-
25	Kertha Buana Sidemen 5107022008	Kertha Buana	-	751.357.000,00	450.814.200,00	300.542.800,00	50.610.800,00	75.916.200,00	126.527.000,00	877.884.000,00	-
26	Kertha Mandala Abang 5107052010	Kertha Mandala	131.590.000,00	785.947.000,00	471.568.200,00	314.378.800,00	283.843.800,00	189.229.200,00	473.073.000,00	1.259.020.000,00	-
27	Kesimpar Abang 5107052013	Kesimpar	110.000.000,00	595.112.500,00	357.067.500,00	238.045.000,00	108.701.000,00	163.051.500,00	271.752.500,00	866.865.000,00	-
28	Kubu Kubu 5107082003	Kubu	-	438.298.360,00	262.979.016,00	175.319.344,00	282.533.784,00	188.355.856,00	470.889.640,00	909.188.000,00	-
29	Laba Sari Abang 5107052011	Laba Sari	314.432.000,00	817.063.500,00	490.238.100,00	326.825.400,00	45.662.700,00	30.441.800,00	76.104.500,00	893.168.000,00	-
30	Lokasari Sidemen 5107022009	Lokasari	-	703.435.160,00	422.061.096,00	281.374.064,00	49.620.736,00	74.431.104,00	124.051.840,00	827.487.000,00	-
31	Macang Bebandem 5107062008	Macang	-	705.566.200,00	423.339.720,00	282.226.480,00	13.794.320,00	20.691.480,00	34.485.800,00	740.052.000,00	-
32	Manggis Manggis 5107032004	Manggis	370.400.000,00	925.445.000,00	555.267.000,00	370.178.000,00	42.358.400,00	63.537.600,00	105.896.000,00	1.031.341.000,00	-
33	Menanga Rendang 5107012003	Menanga	40.868.870,00	753.110.870,00	451.866.522,00	301.244.348,00	296.142.078,00	197.428.052,00	493.570.130,00	1.246.681.000,00	-
34	Muncan Selat 5107072001	Muncan	208.321.000,00	630.335.100,00	378.201.060,00	252.134.040,00	279.461.940,00	186.307.960,00	465.769.900,00	1.096.105.000,00	-
35	Nawa Kerti Abang 5107052012	Nawa Kerti	-	608.802.750,00	365.281.650,00	243.521.100,00	186.848.900,00	280.273.350,00	467.122.250,00	1.075.925.000,00	-
36	Ngis Manggis 5107032007	Ngis	-	391.896.800,00	235.138.080,00	156.758.720,00	155.912.080,00	233.868.120,00	389.780.200,00	781.677.000,00	-
37	Nongan Rendang 5107012001	Nongan	180.894.500,00	757.911.500,00	454.746.900,00	303.164.600,00	166.365.300,00	110.910.200,00	277.275.500,00	1.035.187.000,00	-
38	Nyuh Tebel Manggis 5107032005	Nyuh Tebel	137.555.000,00	590.764.910,00	354.458.946,00	236.305.964,00	99.321.054,00	66.214.036,00	165.535.090,00	756.300.000,00	-
39	Padangbai Manggis 5107032009	Padangbai	228.605.000,00	710.363.890,00	426.218.334,00	284.145.556,00	81.386.466,00	54.257.644,00	135.644.110,00	846.008.000,00	-
40	Pempatan Rendang 5107012005	Pempatan	109.745.000,00	1.202.498.500,00	721.499.100,00	480.999.400,00	231.624.300,00	154.416.200,00	386.040.500,00	1.588.539.000,00	-

Dalam Rupiah

NO	DESA		STATUS DESA	PAGU	PAGU BLT	KETAHANAN PANGAN	STUNTING	PROKLIM	POTENSI_DESA	TI
41	Peringsari Selat 5107072007	Peringsari	MAJU	1.075.114.000,00	126.000.000 (35 KPM)	388.365.000,00	314.249.000,00	-	-	-
42	Pertima Karangasem 5107042009	Pertima	MANDIRI	1.285.426.000,00	187.200.000 (52 KPM)	261.109.650,00	236.901.510,00	4.915.000,00	-	12.417.500,00
43	Pesaban Rendang 5107012006	Pesaban	MANDIRI	772.071.000,00	104.400.000 (29 KPM)	321.967.700,00	181.051.400,00	5.390.000,00	-	-
44	Pesedahan Manggis 5107032011	Pesedahan	MANDIRI	730.359.000,00	108.000.000 (30 KPM)	314.569.000,00	108.500.000,00	35.670.000,00	25.410.000,00	-
45	Pidpid Abang 5107052006	Pidpid	MANDIRI	1.190.831.000,00	176.400.000 (49 KPM)	238.377.000,00	284.756.010,00	-	-	10.000.000,00
46	Purwa Kerthi Abang 5107052009	Purwa Kerthi	MANDIRI	1.135.645.000,00	54.000.000 (15 KPM)	310.391.430,00	420.376.650,00	25.000.000,00	-	-
47	Rendang Rendang 5107012002	Rendang	MANDIRI	1.050.454.000,00	72.000.000 (20 KPM)	278.921.870,00	240.352.000,00	-	-	19.037.000,00
48	Sangkan Gunung Sidemen 5107022004	Sangkan Gunung	MANDIRI	1.573.975.000,00	226.800.000 (63 KPM)	569.157.100,00	435.773.480,00	-	-	-
49	Sebudi Selat 5107072004	Sebudi	MAJU	1.086.880.000,00	108.000.000 (30 KPM)	190.298.000,00	90.371.000,00	-	-	-
50	Selat Selat 5107072002	Selat	MANDIRI	837.125.000,00	122.400.000 (34 KPM)	167.908.000,00	188.797.000,00	-	-	-
51	Selumbung Manggis 5107032008	Selumbung	MAJU	908.957.000,00	133.200.000 (37 KPM)	182.726.300,00	180.957.770,00	-	-	-
52	Sengkidu Manggis 5107032012	Sengkidu	MANDIRI	734.160.000,00	100.800.000 (28 KPM)	148.354.250,00	69.000.000,00	-	-	-
53	Seraya Karangasem 5107042006	Seraya	MANDIRI	1.324.377.000,00	136.800.000 (38 KPM)	269.805.600,00	313.435.000,00	4.958.940,00	-	-
54	Seraya Barat Karangasem 5107042007	Seraya Barat	MANDIRI	1.188.379.000,00	118.800.000 (33 KPM)	249.600.000,00	303.364.500,00	21.850.000,00	-	21.329.000,00
55	Seraya Timur Karangasem 5107042008	Seraya Timur	MAJU	1.445.830.000,00	162.000.000 (45 KPM)	290.000.000,00	341.883.770,00	-	-	24.040.000,00
56	Sibetan Bebandem 5107062004	Sibetan	MANDIRI	1.265.931.000,00	36.000.000 (10 KPM)	602.366.640,00	164.728.200,00	-	-	-
57	Sidemen Sidemen 5107022003	Sidemen	MANDIRI	900.347.000,00	61.200.000 (17 KPM)	181.260.540,00	236.129.000,00	287.416.840,00	1.930.000,00	4.300.000,00
58	Sinduwati Sidemen 5107022006	Sinduwati	MANDIRI	901.652.000,00	108.000.000 (30 KPM)	230.925.000,00	304.371.500,00	-	17.841.000,00	6.612.000,00
59	Sukadana Kubu 5107082009	Sukadana	MANDIRI	1.141.219.000,00	100.800.000 (28 KPM)	228.310.030,00	127.156.400,00	-	-	-

Dalam Rupiah

NO	DESA		PADAT_KARYA	JML_EARMARK	EARMARK (1)	EARMARK (2)	NON EARMARK (1)	NON EARMARK (2)	JML_NON EARMARK	TOTAL REALISASI	SISA
41	Peringsari Selat 5107072007	Peringsari	-	828.614.000,00	497.168.400,00	331.445.600,00	98.600.000,00	147.900.000,00	246.500.000,00	1.075.114.000,00	-
42	Pertima Karangasem 5107042009	Pertima	-	702.543.660,00	421.526.196,00	281.017.464,00	349.729.404,00	233.152.936,00	582.882.340,00	1.285.426.000,00	-
43	Pesaban Rendang 5107012006	Pesaban	-	612.809.100,00	367.685.460,00	245.123.640,00	95.557.140,00	63.704.760,00	159.261.900,00	772.071.000,00	-
44	Pesedahan Manggis 5107032011	Pesedahan	-	592.149.000,00	355.289.400,00	236.859.600,00	82.926.000,00	55.284.000,00	138.210.000,00	730.359.000,00	-
45	Pidpid Abang 5107052006	Pidpid	425.322.980,00	1.134.855.990,00	680.913.594,00	453.942.396,00	33.585.006,00	22.390.004,00	55.975.010,00	1.190.831.000,00	-
46	Purwa Kerthi Abang 5107052009	Purwa Kerthi	93.600.000,00	903.368.080,00	542.020.848,00	361.347.232,00	139.366.152,00	92.910.768,00	232.276.920,00	1.135.645.000,00	-
47	Rendang Rendang 5107012002	Rendang	365.935.980,00	976.246.850,00	585.748.110,00	390.498.740,00	44.524.290,00	29.682.860,00	74.207.150,00	1.050.454.000,00	-
48	Sangkan Gunung Sidemen 5107022004	Sangkan Gunung	190.601.900,00	1.422.332.480,00	853.399.488,00	568.932.992,00	90.985.512,00	60.657.008,00	151.642.520,00	1.573.975.000,00	-
49	Sebudi Selat 5107072004	Sebudi	-	388.669.000,00	233.201.400,00	155.467.600,00	279.284.400,00	418.926.600,00	698.211.000,00	1.086.880.000,00	-
50	Selat Selat 5107072002	Selat	-	479.105.000,00	287.463.000,00	191.642.000,00	214.812.000,00	143.208.000,00	358.020.000,00	837.125.000,00	-
51	Selumbung Manggis 5107032008	Selumbung	363.205.950,00	860.090.020,00	516.054.012,00	344.036.008,00	19.546.792,00	29.320.188,00	48.866.980,00	908.957.000,00	-
52	Sengkidu Manggis 5107032012	Sengkidu	-	318.154.250,00	190.892.550,00	127.261.700,00	249.603.450,00	166.402.300,00	416.005.750,00	734.160.000,00	-
53	Seraya Karangasem 5107042006	Seraya	168.230.890,00	893.230.430,00	535.938.258,00	357.292.172,00	258.687.942,00	172.458.628,00	431.146.570,00	1.324.377.000,00	-
54	Seraya Barat Karangasem 5107042007	Seraya Barat	267.714.880,00	982.658.380,00	589.595.028,00	393.063.352,00	123.432.372,00	82.288.248,00	205.720.620,00	1.188.379.000,00	-
55	Seraya Timur Karangasem 5107042008	Seraya Timur	513.046.600,00	1.330.970.370,00	798.582.222,00	532.388.148,00	45.943.852,00	68.915.778,00	114.859.630,00	1.445.830.000,00	-
56	Sibetan Bebandem 5107062004	Sibetan	-	803.094.840,00	481.856.904,00	321.237.936,00	277.701.696,00	185.134.464,00	462.836.160,00	1.265.931.000,00	-
57	Sidemen Sidemen 5107022003	Sidemen	-	772.236.380,00	463.341.828,00	308.894.552,00	76.866.372,00	51.244.248,00	128.110.620,00	900.347.000,00	-
58	Sinduwati Sidemen 5107022006	Sinduwati	160.000.000,00	827.749.500,00	496.649.700,00	331.099.800,00	44.341.500,00	29.561.000,00	73.902.500,00	901.652.000,00	-
59	Sukadana Kubu 5107082009	Sukadana	-	456.266.430,00	273.759.858,00	182.506.572,00	410.971.542,00	273.981.028,00	684.952.570,00	1.141.219.000,00	-

Dalam Rupiah

NO	DESA		STATUS DESA	PAGU	PAGU BLT	KETAHANAN PANGAN	STUNTING	PROKLIM	POTENSI_DESA	TI
60	Talibeng Sidemen 5107022002	Talibeng	MANDIRI	930.530.000,00	72.000.000 (20 KPM)	186.106.000,00	231.480.460,00	19.500.000,00	138.283.360,00	14.471.910,00
61	Tangkup Sidemen 5107022001	Tangkup	MANDIRI	1.168.535.000,00	118.800.000 (33 KPM)	674.011.150,00	359.519.850,00	-	5.125.000,00	-
62	Tegalinggah Karangasem 5107042010	Tegalinggah	MANDIRI	959.126.000,00	97.200.000 (27 KPM)	16.056.570,00	211.548.020,00	-	-	63.161.000,00
63	Telagatawang Sidemen 5107022005	Telagatawang	MANDIRI	956.981.000,00	21.600.000 (6 KPM)	244.082.000,00	34.260.000,00	-	-	-
64	Tenganan Manggis 5107032006	Tenganan	MAJU	914.366.000,00	136.800.000 (38 KPM)	165.000.000,00	287.015.000,00	-	-	-
65	Tianyar Kubu 5107082004	Tianyar	MANDIRI	1.453.899.000,00	180.000.000 (50 KPM)	318.159.480,00	253.130.000,00	-	-	-
66	Tianyar Barat Kubu 5107082005	Tianyar Barat	MANDIRI	1.672.515.000,00	241.200.000 (67 KPM)	334.503.000,00	344.105.000,00	-	-	-
67	Tianyar Tengah Kubu 5107082006	Tianyar Tengah	MAJU	1.414.338.000,00	136.800.000 (38 KPM)	282.882.000,00	358.382.000,00	136.800.000,00	-	-
68	Tista Abang 5107052004	Tista	MANDIRI	1.062.667.000,00	158.400.000 (44 KPM)	216.133.400,00	52.010.000,00	-	-	24.390.000,00
69	Tiyingtali Abang 5107052002	Tiyingtali	MANDIRI	1.003.841.000,00	90.000.000 (25 KPM)	244.815.430,00	35.337.500,00	-	24.850.430,00	21.621.500,00
70	Tri Buana Abang 5107052014	Tri Buana	MANDIRI	1.113.661.000,00	57.600.000 (16 KPM)	225.000.000,00	179.412.520,00	-	-	21.818.000,00
71	Tri Eka Buana Sidemen 5107022007	Tri Eka Buana	MAJU	807.792.000,00	118.800.000 (33 KPM)	165.000.000,00	197.268.000,00	5.400.000,00	-	10.000.000,00
72	Tulamben Kubu 5107082007	Tulamben	MANDIRI	1.440.171.000,00	108.000.000 (30 KPM)	452.002.270,00	183.580.000,00	-	-	-
73	Tumbu Karangasem 5107042005	Tumbu	MANDIRI	978.302.000,00	100.800.000 (28 KPM)	381.511.900,00	249.166.000,00	-	-	-
74	Ulakan Manggis 5107032003	Ulakan	MANDIRI	996.115.000,00	108.000.000 (30 KPM)	199.223.000,00	338.892.000,00	-	-	-
75	Wisma Kerta Sidemen 5107022010	Wisma Kerta	MAJU	907.592.000,00	86.400.000 (24 KPM)	260.419.730,00	109.200.000,00	-	9.600.000,00	-
Jumlah				**83.992.155.000,00**	**8.967.600.000 (2.491 KPM)**	**20.707.830.320,00**	**16.826.479.340,00**	**1.506.018.570,00**	**473.674.870,00**	**457.394.420,00**

Dalam Rupiah

NO	DESA		PADAT_KARYA	JML_EARMARK	EARMARK (1)	EARMARK (2)	NON EARMARK (1)	NON EARMARK (2)	JML_NON EARMARK	TOTAL REALISASI	SISA
60	Talibeng Sidemen 5107022002	Talibeng	121.825.500,00	783.667.230,00	470.200.338,00	313.466.892,00	88.117.662,00	58.745.108,00	146.862.770,00	930.530.000,00	-
61	Tangkup Sidemen 5107022001	Tangkup	-	1.157.456.000,00	694.473.600,00	462.982.400,00	6.647.400,00	4.431.600,00	11.079.000,00	1.168.535.000,00	-
62	Tegalinggah Karangasem 5107042010	Tegalinggah	150.000.000,00	537.965.590,00	322.779.354,00	215.186.236,00	252.696.246,00	168.464.164,00	421.160.410,00	959.126.000,00	-
63	Telagatawang Sidemen 5107022005	Telagatawang	-	299.942.000,00	179.965.200,00	119.976.800,00	394.223.400,00	262.815.600,00	657.039.000,00	956.981.000,00	-
64	Tenganan Manggis 5107032006	Tenganan	196.099.400,00	784.914.400,00	470.948.640,00	313.965.760,00	51.780.640,00	77.670.960,00	129.451.600,00	914.366.000,00	-
65	Tianyar Kubu 5107082004	Tianyar	-	751.289.480,00	450.773.688,00	300.515.792,00	421.565.712,00	281.043.808,00	702.609.520,00	1.453.899.000,00	-
66	Tianyar Barat Kubu 5107082005	Tianyar Barat	-	919.808.000,00	551.884.800,00	367.923.200,00	451.624.200,00	301.082.800,00	752.707.000,00	1.672.515.000,00	-
67	Tianyar Tengah Kubu 5107082006	Tianyar Tengah	-	914.864.000,00	548.918.400,00	365.945.600,00	199.789.600,00	299.684.400,00	499.474.000,00	1.414.338.000,00	-
68	Tista Abang 5107052004	Tista	-	450.933.400,00	270.560.040,00	180.373.360,00	367.040.160,00	244.693.440,00	611.733.600,00	1.062.667.000,00	-
69	Tiyingtali Abang 5107052002	Tiyingtali	-	416.624.860,00	249.974.916,00	166.649.944,00	352.329.684,00	234.886.456,00	587.216.140,00	1.003.841.000,00	-
70	Tri Buana Abang 5107052014	Tri Buana	410.309.500,00	894.140.020,00	536.484.012,00	357.656.008,00	131.712.588,00	87.808.392,00	219.520.980,00	1.113.661.000,00	-
71	Tri Eka Buana Sidemen 5107022007	Tri Eka Buana	200.000.000,00	696.468.000,00	417.880.800,00	278.587.200,00	44.529.600,00	66.794.400,00	111.324.000,00	807.792.000,00	-
72	Tulamben Kubu 5107082007	Tulamben	-	743.582.270,00	446.149.362,00	297.432.908,00	417.953.238,00	278.635.492,00	696.588.730,00	1.440.171.000,00	-
73	Tumbu Karangasem 5107042005	Tumbu	132.476.880,00	863.954.780,00	518.372.868,00	345.581.912,00	68.608.332,00	45.738.888,00	114.347.220,00	978.302.000,00	-
74	Ulakan Manggis 5107032003	Ulakan	272.680.000,00	918.795.000,00	551.277.000,00	367.518.000,00	46.392.000,00	30.928.000,00	77.320.000,00	996.115.000,00	-
75	Wisma Kerta Sidemen 5107022010	Wisma Kerta	60.780.000,00	526.399.730,00	315.839.838,00	210.559.892,00	152.476.908,00	228.715.362,00	381.192.270,00	907.592.000,00	-
Jumlah			**11.124.043.510,00**	**60.063.041.030,00**	**36.037.824.618,00**	**24.025.216.412,00**	**13.029.901.618,00**	**10.899.212.352,00**	**23.929.113.970,00**	**83.992.155.000,00**	**-**

PMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	Total Kabupaten Karangasem	KECAMATAN							
		MANGGIS	SELAT	RENDANG	ABANG	KARANGASEM	BEBANDEM	KUBU	SIDEMEN
I. ASET DESA									
A. ASET LANCAR									
1. Kas Desa	**46.677.228.378,23**	**6.617.395.013,31**	**4.615.696.202,97**	**2.705.996.167,45**	**7.988.195.976,22**	**4.325.016.759,72**	**6.483.075.382,77**	**6.471.702.685,53**	**7.470.150.190,26**
a. Uang Kas di Bendahara Desa	198.085.352,99	8.333.059,00	17.300.000,00	-	-	97.587,86	7.544.792,35	19.045.548,62	145.764.365,16
b. Rekening Kas Desa	46.479.143.025,24	6.609.061.954,31	4.598.396.202,97	2.705.996.167,45	7.988.195.976,22	4.324.919.171,86	6.475.530.590,42	6.452.657.136,91	7.324.385.825,10
2. Piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Piutang Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. piutang Panjer Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. piutang Pembangunan Pasar Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46.677.228.378,23	***6.617.395.013,31***	***4.615.696.202,97***	***2.705.996.167,45***	***7.988.195.976,22***	***4.325.016.759,72***	***6.483.075.382,77***	***6.471.702.685,53***	***7.470.150.190,26***
B. ASET TIDAK LANCAR									
1. Investasi Permanen	**18.314.632.135,70**	**2.890.400.949,70**	**1.502.743.336,00**	**1.386.290.800,00**	**3.343.250.236,00**	**2.222.213.259,00**	**2.026.859.200,00**	**2.897.427.355,00**	**2.045.447.000,00**
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	18.314.632.135,70	2.890.400.949,70	1.502.743.336,00	1.386.290.800,00	3.343.250.236,00	2.222.213.259,00	2.026.859.200,00	2.897.427.355,00	2.045.447.000,00
2. Aset Tetap	**80.975.790.967,86**	**13.757.644.858,00**	**10.745.453.736,00**	**5.932.220.090,00**	**11.310.018.379,62**	**5.362.395.865,00**	**7.847.948.832,00**	**18.595.798.051,16**	**7.424.311.156,08**
- Tanah	624.511.520,00	-	51.227.020,00	-	501.284.500,00	72.000.000,00	-	-	-
- Peralatan dan Mesin	9.831.096.235,96	1.425.014.116,00	916.037.709,00	691.960.040,00	1.005.047.625,00	873.513.055,00	1.167.298.416,00	2.685.054.347,96	1.067.170.927,00
- Gedung dan Bangunan	18.329.897.746,70	3.036.569.649,00	2.769.433.723,00	1.878.202.250,00	2.777.068.360,62	1.375.767.750,00	1.482.608.408,00	2.958.307.035,00	2.051.940.571,08
- Jalan Jaringan dan Instalasi	51.308.556.765,20	8.719.876.093,00	6.918.255.284,00	3.357.022.800,00	6.992.837.894,00	2.986.119.060,00	5.140.016.808,00	12.901.536.668,20	4.292.892.158,00
- Aset Tetap Lainnya	881.728.700,00	576.185.000,00	90.500.000,00	5.035.000,00	33.780.000,00	54.996.000,00	58.025.200,00	50.900.000,00	12.307.500,00
- Kontruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Dana Cadangan	**550.000.000,00**	300.000.000,00	-	-	-	-	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	-
- Dana Cadangan	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
4. Aset Tidak lancar Lainya	**103.800.000,00**	2.000.000,00	**1.800.000,00**	-	-	-	**100.000.000,00**	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	***99.944.223.103,56***	***16.950.045.807,70***	***12.249.997.072,00***	***7.318.510.890,00***	***14.653.268.615,62***	***7.584.609.124,00***	***10.124.808.032,00***	***21.593.225.406,16***	***9.469.758.156,08***
JUMLAH ASET (A + B)	**146.621.451.481,79**	**23.567.440.821,01**	**16.865.693.274,97**	**10.024.507.057,45**	**22.641.464.591,84**	**11.909.625.883,72**	**16.607.883.414,77**	**28.064.928.091,69**	**16.939.908.346,34**
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	130.645.440,00	-	76.000,00	(23.888.711,00)	-	-	139.000.947,00	15.457.204,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	130.645.440,00	-	76.000,00	(23.888.711,00)	-	-	139.000.947,00	15.457.204,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN	***130.645.440,00***	**-**	***76.000,00***	***(23.888.711,00)***	**-**	**-**	***139.000.947,00***	***15.457.204,00***	**-**
EKUITAS									
Ekuitas	**92.907.882.323,30**	**15.253.605.070,60**	**12.249.997.072,00**	**7.318.510.890,00**	**15.584.867.445,73**	**7.329.609.124,00**	**10.124.808.032,00**	**15.576.726.532,89**	**9.469.758.156,08**
Ekuitas SAL	**53.582.923.718,49**	**8.313.835.750,41**	**4.615.620.202,97**	**2.729.884.878,45**	**7.056.597.146,11**	**4.580.016.759,72**	**6.344.074.435,77**	**12.472.744.354,80**	**7.470.150.190,26**
JUMLAH EKUITAS	**146.490.806.041,79**	**23.567.440.821,01**	**16.865.617.274,97**	**10.048.395.768,45**	**22.641.464.591,84**	**11.909.625.883,72**	**16.468.882.467,77**	**28.049.470.887,69**	**16.939.908.346,34**
								-	-
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	***146.490.806.041,79***	***23.567.440.821,01***	***16.865.617.274,97***	***10.048.395.768,45***	***22.641.464.591,84***	***11.909.625.883,72***	***16.468.882.467,77***	***28.049.470.887,69***	***16.939.908.346,34***
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**146.621.451.481,79**	**23.567.440.821,01**	**16.865.693.274,97**	**10.024.507.057,45**	**22.641.464.591,84**	**11.909.625.883,72**	**16.607.883.414,77**	**28.064.928.091,69**	**16.939.908.346,34**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN REALISASI APB DESA SE- KABUPATEN KARANGASEM
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

KODE REK	URAIAN	TOTAL KABUPATEN KARANGASEM	KECAMATAN							
			MANGGIS	SELAT	RENDANG	ABANG	KARANGASEM	BEBANDEM	KUBU	SIDEMEN
		ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
		LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**PENDAPATAN**									
4.1	PENDAPATAN ASLI DESA	3.228.699.527	703.754.096	224.816.763	109.292.192	536.648.862	449.963.317	568.789.746	459.349.047	176.085.504
		3.203.141.586	756.300.967	203.934.847	112.792.192	574.950.245	418.804.416	554.208.143	397.860.353	184.290.423
		25.557.941	(52.546.871,25)	20.881.916	(3.500.000,00)	(38.301.383,00)	31.158.901	14.581.603	61.488.694	(8.204.919,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	251.685.153.815	34.078.213.063	26.037.449.816	24.683.669.293	46.199.965.451	27.829.556.083	27.530.362.247	37.325.800.408	28.000.137.454
		250.875.563.632	34.049.404.890	25.562.936.526	24.629.051.472	46.147.022.490	27.777.668.777	27.478.221.281	37.284.954.676	27.946.303.520
		809.590.183	28.808.173	474.513.290	54.617.821	52.942.961	51.887.306	52.140.966	40.845.732	53.833.934
4.3	PENDAPATAN LAIN-LAIN	2.484.016.890	375.955.898	111.592.437	1.191.431.788	191.847.787	119.462.214	180.796.444	173.962.817	138.967.505
		2.850.184.852	428.278.597	156.703.574	1.192.323.273	285.841.249	150.840.767	166.604.833	248.148.477	221.444.081
		(366.167.961,72)	(52.322.698,83)	(45.111.137,24)	(891.484,71)	(93.993.461,62)	(31.378.553,74)	14.191.611	(74.185.660,77)	(82.476.575,82)
	JUMLAH PENDAPATAN	**257.397.870.232**	35.157.923.057	26.373.859.016	25.984.393.273	46.928.462.100	28.398.981.614	28.279.948.437	37.959.112.272	28.315.190.463
		256.928.890.070	35.233.984.454	25.923.574.947	25.934.166.937	47.007.813.984	28.347.313.960	28.199.034.257	37.930.963.506	28.352.038.024
		468.980.162	(76.061.397,10)	450.284.069	50.226.336	(79.351.883,57)	51.667.653	80.914.180	28.148.765	(36.847.560,78)
5	**BELANJA**									
5.1	BELANJA PEGAWAI	78.713.576.089	11.355.597.224	8.380.607.948	6.607.649.980	14.776.396.385	8.787.965.597	9.101.113.257	10.685.186.428	9.019.059.270
		77.738.245.271	11.180.803.023	8.286.195.619	6.524.386.019	14.672.996.032	8.647.021.421	8.957.937.883	10.548.648.137	8.920.257.136
		975.330.818	174.794.201	94.412.329	83.263.961	103.400.353	140.944.176	143.175.374	136.538.291	98.802.134
5.2	BELANJA BARANG DAN JASA	112.456.489.116	15.714.334.049	11.006.153.074	13.365.193.400	19.055.452.955	14.111.310.043	12.080.007.549	15.094.048.188	12.029.989.859
		82.345.784.984	11.465.872.519	8.046.287.676	11.254.181.825	14.026.824.971	10.807.736.587	7.954.230.477	10.904.326.758	7.886.324.171
		30.110.704.131	4.248.461.530	2.959.865.397	2.111.011.576	5.028.627.983	3.303.573.455	4.125.777.071	4.189.721.430	4.143.665.688
5.3	BELANJA MODAL	78.917.535.882	9.704.734.292	8.656.338.839	6.696.633.561	13.658.677.351	6.204.593.723	9.399.090.817	13.976.370.349	10.621.096.950
		66.118.357.766	8.134.998.407	6.971.999.356	6.179.882.145	11.774.995.495	5.428.803.865	8.065.838.856	11.962.569.016	7.599.270.626
		12.799.178.116	1.569.735.885	1.684.339.483	516.751.416	1.883.681.857	775.789.858	1.333.251.961	2.013.801.333	3.021.826.324
5.4	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.316.522.738	1.603.644.029	1.368.598.591	718.395.793	2.342.396.711	1.127.935.482	1.601.213.150	1.452.495.810	1.101.843.173
		8.990.230.125	1.469.599.000	1.045.800.000	673.200.000	1.457.600.000	1.087.642.125	956.289.000	1.256.100.000	1.044.000.000
		2.326.292.613	134.045.029	322.798.591	45.195.793	884.796.711	40.293.357	644.924.150	196.395.810	57.843.173
	JUMLAH BELANJA	**281.404.123.825**	38.378.309.594	29.411.698.452	27.387.872.735	49.832.923.402	30.231.804.844	32.181.424.773	41.208.100.774	32.771.989.251
		235.192.618.146	32.251.272.949	24.350.282.652	24.631.649.989	41.932.416.497	25.971.203.998	25.934.296.216	34.671.643.910	25.449.851.934
		46.211.505.679	6.127.036.645	5.061.415.800	2.756.222.746	7.900.506.904	4.260.600.846	6.247.128.557	6.536.456.863	7.322.137.318
	SURPLUS / DEFISIT	**(24.006.253.593,12)**	(3.220.386.537,17)	(3.037.839.435,99)	(1.403.479.461,31)	(2.904.461.301,53)	(1.832.823.230,37)	(3.901.476.336,15)	(3.248.988.502,20)	(4.456.798.788,40)
		21.736.271.923	2.982.711.505	1.573.292.296	1.302.516.948	5.075.397.486	2.376.109.962	2.264.738.041	3.259.319.596	2.902.186.090
		(45.742.525.516,57)	(6.203.098.041,78)	(4.611.131.731,49)	(2.705.996.409,35)	(7.979.858.787,68)	(4.208.933.192,59)	(6.166.214.376,79)	(6.508.308.098,19)	(7.358.984.878,70)
6	**PEMBIAYAAN**									
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.089.001.399	5.882.205.637	4.763.063.724	2.789.770.261	6.445.241.538	3.913.452.272	6.433.939.472	6.247.918.033	6.613.410.462
		40.606.412.868	6.071.696.648	4.763.063.724	2.789.770.261	5.593.979.032	3.397.296.162	6.433.939.472	4.943.257.106	6.613.410.462
		2.482.588.531	(189.491.011,49)	0	0	851.262.505	516.156.110	0	1.304.660.927	0

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN REALISASI APB DESA SE- KABUPATEN KARANGASEM
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

KODE REK	URAIAN	TOTAL KABUPATEN KARANGASEM	KECAMATAN							
			MANGGIS	SELAT	RENDANG	ABANG	KARANGASEM	BEBANDEM	KUBU	SIDEMEN
		ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
		LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.659.314.233	2.661.819.100	1.722.943.336	1.386.290.800	3.540.750.236	1.967.213.259	2.324.959.200	2.997.429.155	2.057.909.147
		18.719.850.286	2.744.819.100	1.722.943.336	1.386.290.800	3.530.750.236	1.967.213.259	2.324.959.200	2.997.427.355	2.045.447.000
		(60.536.053,03)	(83.000.000,00)	0	0	10.000.000	0	0	1.800	12.462.147
	PEMBIAYAAN NETTO	**24.429.687.166**	3.220.386.537	3.040.120.388	1.403.479.461	2.904.491.302	1.946.239.013	4.108.980.272	3.250.488.878	4.555.501.315
		21.886.562.582	3.326.877.548	3.040.120.388	1.403.479.461	2.063.228.796	1.430.082.903	4.108.980.272	1.945.829.751	4.567.963.462
		2.543.124.584	(106.491.011,49)	0	0	841.262.505	516.156.110	0	1.304.659.127	(12.462.146,97)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**423.433.573**	(0,57)	2.280.952	(0,00)	30.000	113.415.783	207.503.936	1.500.376	98.702.527
		43.622.834.505	6.309.589.053	4.613.412.683	2.705.996.409	7.138.626.282	3.806.192.866	6.373.718.313	5.205.149.347	7.470.149.552
		(43.199.400.932,83)	(6.309.589.053,27)	(4.611.131.731,49)	(2.705.996.409,35)	(7.138.596.282,28)	(3.692.777.082,80)	(6.166.214.376,79)	(5.203.648.971,18)	(7.371.447.025,67)

Kas BLUD Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	Puskesmas	Saldo BLUD Tahun 2024	Koreksi Saldo Awal	Saldo BLUD Tahun 2024 setelah Koreksi	Pendapatan BLUD TA 2025	Belanja BLUD TA 2025	Penyesuaian Belanja BLUD Tahun 2025	Saldo Akhir	Saldo BLUD Tahun 2025 (SILPA)			
									Saldo Tunai	Saldo Rekening	Item Rekonsiliasi	Jumlah
a	b	c	d	e	f	g	h	l = e + f - g + h	j	k	l	m = j + k + l
1	UPTD RSUD KABUPATEN KARANGASEM	2.425.624.940,24		2.425.624.940,24	92.477.534.011,92	92.489.104.173,37	17.256.000,00	2.431.310.778,79	4.141.900,00	2.427.168.878,79	-	2.431.310.778,79
2	UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I	710.298.747,62		710.298.747,62	3.123.181.919,73	3.258.319.979,00	-	575.160.688,35	285.000,00	574.875.688,35	-	575.160.688,35
3	UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II	279.806.641,84		279.806.641,84	2.792.175.869,63	2.686.930.280,00	-	385.052.231,47	-	385.052.231,47	-	385.052.231,47
4	UPTD PUSKESMAS MANGGIS I	284.736.525,19		284.736.525,19	2.415.746.996,31	2.233.916.571,00	-	466.566.950,50	-	466.566.950,50	-	466.566.950,50
5	UPTD PUSKESMAS MANGGIS II	133.589.540,78		133.589.540,78	977.021.196,84	995.254.852,00	-	115.355.885,62	-	115.355.885,62	-	115.355.885,62
6	UPTD PUSKESMAS ABANG I	696.550.891,66		696.550.891,66	2.967.985.929,72	2.906.848.172,00	-	757.688.649,38	-	757.862.725,38	(174.076,00)	757.688.649,38
7	UPTD PUSKESMAS ABANG II	290.826.076,65		290.826.076,65	2.843.510.670,71	2.755.355.290,00	-	378.981.457,36	240.000,00	378.741.457,36	-	378.981.457,36
8	UPTD PUSKESMAS KUBU I	895.911.543,80		895.911.543,80	2.870.787.970,57	3.072.305.176,00	-	694.394.338,37	180.000,00	694.214.338,37	-	694.394.338,37
9	UPTD PUSKESMAS KUBU II	428.448.540,67		428.448.540,67	2.886.450.888,88	2.786.607.946,00	-	528.291.483,55	400.000,00	527.891.483,55	-	528.291.483,55
10	UPTD PUSKESMAS BEBANDEM	737.689.705,70		737.689.705,70	3.390.199.842,41	3.458.419.509,00	-	669.470.039,11	-	669.470.039,11	-	669.470.039,11
11	UPTD PUSKESMAS SELAT	315.418.449,20		315.418.449,20	3.481.201.305,00	3.304.069.835,00	-	492.549.919,20	-	492.549.919,20	-	492.549.919,20
12	UPTD PUSKESMAS RENDANG	276.294.857,16		276.294.857,16	3.396.231.520,20	3.294.426.315,00	-	378.100.062,36	-	378.100.062,36	-	378.100.062,36
13	UPTD PUSKESMAS SIDEMEN	350.525.177,81		350.525.177,81	2.950.231.653,24	2.777.414.475,00	-	523.342.356,05		509.155.856,05	14.186.500,00	523.342.356,05
Jumlah		**7.825.721.638,32**	**-**	**7.825.721.638,32**	**126.572.259.775,16**	**126.018.972.573,37**		**8.396.264.840,11**	**5.246.900,00**	**8.377.005.516,11**	**14.012.424,00**	**8.396.264.840,11**

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	Puskesmas	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Pendapatan JKN TA 2025	Belanja JKN TA 2025	Saldo Akhir	Saldo JKN Tahun 2025 (SILPA)		
								Saldo Tunai	Saldo Rekening	Jumlah
a	b	c	d	e = c + d	f	g	h = e + f - g	i	j	k = l + j
1	UPTD RS Pratama Kubu	237.228.895,00	-	237.228.895,00	1.893.682.453,00	1.912.027.721,00	218.883.627,00		218.883.627,00	218.883.627,00
Jumlah		**237.228.895,00**	**-**	**237.228.895,00**	**1.893.682.453,00**	**1.912.027.721,00**	**218.883.627,00**	**-**	**218.883.627,00**	**218.883.627,00**

Kas Dana BOSP Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
SEKOLAH DASAR NEGERI													
1	SD Negeri 1 Ababi	89,57		89,57	114.480.000,00	22.500.000,00	136.980.000,00	63.720.000,00	11.298.000,00	50.760.000,00	11.202.000,00	136.980.000,00	89,57
2	SD Negeri 1 Abang	-		-	160.060.000,00	-	160.060.000,00	124.360.000,00	-	35.700.000,00	-	160.060.000,00	-
3	SD Negeri 1 Bunutan	0,26		0,26	95.400.000,00	-	95.400.000,00	73.797.500,00	-	21.600.000,00	-	95.397.500,00	2.500,26
4	SD Negeri 1 Culik	50.644,83		50.644,83	152.590.000,00	22.500.000,00	175.090.000,00	122.695.500,00	12.584.000,00	29.944.500,00	9.916.000,00	175.140.000,00	644,83
5	SD Negeri 1 Datah	272.363,64		272.363,64	73.140.000,00	-	73.140.000,00	56.690.000,00	-	16.450.000,00	-	73.140.000,00	272.363,64
6	SD Negeri 1 Kertha Mandala	0,15		0,15	118.720.000,00	-	118.720.000,00	85.520.000,00	-	33.200.000,00	-	118.720.000,00	0,15
7	SD Negeri 1 Kesimpar	0,19		0,19	92.220.000,00	-	92.220.000,00	63.570.000,00	-	28.650.000,00	-	92.220.000,00	0,19
8	SD Negeri 1 Labasari	0,83		0,83	177.020.000,00	22.500.000,00	199.520.000,00	122.069.990,00	11.534.791,00	54.950.000,00	10.965.209,00	199.519.990,00	10,83
9	SD Negeri 1 Nawa Kerti	0,09		0,09	270.300.000,00	-	270.300.000,00	184.000.000,00	-	86.300.000,00	-	270.300.000,00	0,09
10	SD Negeri 1 Pidpid	0,10		0,10	145.220.000,00	-	145.220.000,00	102.737.600,00	-	42.482.400,00	-	145.220.000,00	0,10
11	SD Negeri 1 Purwa Kerthi	303.144,34		303.144,34	198.976.856,00	-	198.976.856,00	158.521.385,00	-	35.812.500,00	-	194.333.885,00	4.946.115,34
12	SD Negeri 1 Tista	0,97		0,97	155.820.000,00	-	155.820.000,00	107.820.000,00	-	48.000.000,00	-	155.820.000,00	0,97
13	SD Negeri 1 Tiyingtali	546.685,75		546.685,75	135.672.372,00	-	135.672.372,00	101.319.000,00	-	34.900.000,00	-	136.219.000,00	57,75
14	SD Negeri 1 Tribuana	111,96		111,96	58.300.000,00	22.500.000,00	80.800.000,00	39.240.611,00	9.738.791,00	19.059.500,00	12.761.209,00	80.800.111,00	0,96
15	SD Negeri 2 Ababi	0,57		0,57	111.300.000,00	-	111.300.000,00	80.850.000,00	-	30.450.000,00	-	111.300.000,00	0,57
16	SD Negeri 2 Abang	0,16		0,16	142.040.000,00	-	142.040.000,00	111.040.000,00	-	31.000.000,00	-	142.040.000,00	0,16
17	SD Negeri 2 Bunutan	-		-	191.860.000,00	-	191.860.000,00	160.360.000,00	-	31.500.000,00	-	191.860.000,00	-
18	SD Negeri 2 Culik	97.300,02		97.300,02	182.222.700,00	-	182.222.700,00	142.985.000,00	-	39.335.000,00	-	182.320.000,00	0,02
19	SD Negeri 2 Datah	0,26		0,26	124.020.000,00	-	124.020.000,00	70.720.000,00	-	53.300.000,00	-	124.020.000,00	0,26
20	SD Negeri 2 Kertha Mandala	0,32		0,32	129.320.000,00	-	129.320.000,00	100.900.000,00	-	28.420.000,00	-	129.320.000,00	0,32
21	SD Negeri 2 Kesimpar	-		-	81.620.000,00	-	81.620.000,00	57.570.000,00	-	24.050.000,00	-	81.620.000,00	-
22	SD Negeri 2 Labasari	0,67		0,67	82.680.000,00	-	82.680.000,00	51.129.000,00	-	31.551.000,00	-	82.680.000,00	0,67
23	SD Negeri 2 Nawa Kerti	0,16		0,16	102.820.000,00	22.500.000,00	125.320.000,00	74.749.000,00	12.380.000,00	28.071.000,00	10.120.000,00	125.320.000,00	0,16
24	SD Negeri 2 Pidpid	0,96		0,96	117.660.000,00	-	117.660.000,00	76.844.000,00	-	40.816.000,00	-	117.660.000,00	0,96
25	SD Negeri 2 Purwa Kerthi	0,19		0,19	168.540.000,00	-	168.540.000,00	117.055.000,00	-	51.485.000,00	-	168.540.000,00	0,19
26	SD Negeri 2 Tista	0,91		0,91	95.400.000,00	-	95.400.000,00	60.695.800,00	-	34.704.200,00	-	95.400.000,00	0,91
27	SD Negeri 2 Tiyingtali	4.603.489,90		4.603.489,90	161.120.000,00	22.500.000,00	183.620.000,00	138.773.400,00	11.310.600,00	26.950.000,00	8.826.000,00	185.860.000,00	2.363.489,90
28	SD Negeri 2 Tribuana	0,88		0,88	159.000.000,00	-	159.000.000,00	122.595.000,00	-	36.405.000,00	-	159.000.000,00	0,88
29	SD Negeri 3 Ababi	0,39		0,39	114.480.000,00	-	114.480.000,00	65.882.000,00	-	48.598.000,00	-	114.480.000,00	0,39
30	SD Negeri 3 Abang	86.498,25		86.498,25	79.500.000,00	-	79.500.000,00	54.100.000,00	-	25.400.000,00	-	79.500.000,00	86.498,25
31	SD Negeri 3 Bunutan	8.988.099,76		8.988.099,76	258.131.900,00	87.000.000,00	345.131.900,00	216.913.999,00	32.221.570,00	50.206.000,00	43.450.000,00	342.791.569,00	11.328.430,76
32	SD Negeri 3 Culik	0,71		0,71	108.120.000,00	22.500.000,00	130.620.000,00	70.134.000,00	12.218.000,00	37.986.000,00	10.282.000,00	130.620.000,00	0,71
33	SD Negeri 3 Datah	-		-	115.540.000,00	-	115.540.000,00	76.540.000,00	-	39.000.000,00	-	115.540.000,00	-
34	SD Negeri 3 Kertha Mandala	0,01		0,01	133.560.000,00	-	133.560.000,00	98.365.200,00	-	35.194.800,00	-	133.560.000,00	0,01
35	SD Negeri 3 Labasari	184,44		184,44	84.799.816,00	22.500.000,00	107.299.816,00	52.800.000,00	12.430.000,00	32.000.000,00	10.070.000,00	107.300.000,00	0,44
36	SD Negeri 3 Pidpid	511,10		511,10	65.720.000,00	-	65.720.000,00	41.792.000,00	-	23.928.000,00	-	65.720.000,00	511,10
37	SD Negeri 3 Purwa Kerthi	2.195.046,76		2.195.046,76	237.440.000,00	22.500.000,00	259.940.000,00	176.135.046,00	11.829.136,00	63.500.000,00	10.670.864,00	262.135.046,00	0,76
38	SD Negeri 3 Tista	412,39		412,39	86.920.000,00	-	86.920.000,00	65.190.000,00	-	21.730.000,00	-	86.920.000,00	412,39
39	SD Negeri 3 Tiyingtali	18.305,92		18.305,92	109.161.695,00	-	109.161.695,00	71.797.000,00	-	37.383.000,00	-	109.180.000,00	0,92
40	SD Negeri 3 Tribuana	777.752,26		777.752,26	133.842.248,00	-	133.842.248,00	109.320.000,00	-	25.300.000,00	-	134.620.000,00	0,26
41	SD Negeri 4 Ababi	214,86		214,86	108.120.000,00	-	108.120.000,00	83.120.000,00	-	25.000.000,00	-	108.120.000,00	214,86
42	SD Negeri 4 Bunutan	0,49		0,49	193.980.000,00	-	193.980.000,00	122.718.500,00	-	71.261.500,00	-	193.980.000,00	0,49
43	SD Negeri 4 Datah	0,82		0,82	55.120.000,00	-	55.120.000,00	40.120.000,00	-	15.000.000,00	-	55.120.000,00	0,82

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
44	SD Negeri 4 Purwa Kerthi	0,84		0,84	82.680.000,00	-	82.680.000,00	62.145.000,00	-	20.535.000,00	-	82.680.000,00	0,84
45	SD Negeri 4 Tista	0,57		0,57	77.380.000,00	22.500.000,00	99.880.000,00	47.942.000,00	10.863.791,00	29.438.000,00	11.636.209,00	99.880.000,00	0,57
46	SD Negeri 4 Tribuana	0,56		0,56	93.280.000,00	-	93.280.000,00	64.280.000,00	-	29.000.000,00	-	93.280.000,00	0,56
47	SD Negeri 5 Ababi	303.002,62		303.002,62	81.316.998,00	22.500.000,00	103.816.998,00	52.008.000,00	11.356.000,00	29.612.000,00	11.144.000,00	104.120.000,00	0,62
48	SD Negeri 5 Bunutan	245.029,21		245.029,21	212.815.000,00	-	212.815.000,00	163.423.860,00	-	48.550.000,00	-	211.973.860,00	1.086.169,21
49	SD Negeri 5 Datah	-		-	101.760.000,00	-	101.760.000,00	80.160.000,00	-	21.600.000,00	-	101.760.000,00	-
50	SD Negeri 6 Ababi	0,18		0,18	155.820.000,00	-	155.820.000,00	105.370.000,00	-	50.450.000,00	-	155.820.000,00	0,18
51	SD Negeri 6 Bunutan	0,33		0,33	65.720.000,00	-	65.720.000,00	50.220.000,00	-	15.500.000,00	-	65.720.000,00	0,33
52	SD Negeri 6 Datah	0,06		0,06	146.280.000,00	-	146.280.000,00	86.385.300,00	-	59.894.700,00	-	146.280.000,00	0,06
53	SD Negeri 7 Ababi	0,77		0,77	92.220.000,00	22.500.000,00	114.720.000,00	62.700.000,00	11.900.000,00	29.520.000,00	10.600.000,00	114.720.000,00	0,77
54	SD Negeri 7 Bunutan	0,86		0,86	219.420.000,00	-	219.420.000,00	165.980.000,00	-	53.440.000,00	-	219.420.000,00	0,86
55	SD Negeri 7 Datah	362.361,85		362.361,85	51.940.000,00	-	51.940.000,00	41.071.000,00	-	10.869.000,00	-	51.940.000,00	362.361,85
56	SD Negeri 8 Ababi	0,67		0,67	56.180.000,00	-	56.180.000,00	28.562.000,00	-	27.618.000,00	-	56.180.000,00	0,67
57	SD Negeri 8 Bunutan	475.873,14		475.873,14	54.060.000,00	-	54.060.000,00	41.269.473,00	-	13.266.400,00	-	54.535.873,00	0,14
58	SD Negeri 8 Datah	581,51		581,51	75.260.000,00	-	75.260.000,00	36.234.581,00	-	39.026.000,00	-	75.260.581,00	0,51
59	SD Negeri 9 Datah	-		-	110.240.000,00	-	110.240.000,00	75.710.000,00	-	34.530.000,00	-	110.240.000,00	-
60	SD Negeri 1 Bebandem	226,33		226,33	157.940.000		157.940.000,00	106.880.392,00	-	50.950.000,00	-	157.830.392,00	109.834,33
61	SD Negeri 1 Bhuana Giri	0,52		0,52	146.280.000		146.280.000,00	88.880.000,00	-	57.400.000,00	-	146.280.000,00	0,52
62	SD Negeri 1 Budakeling	-		-	78.440.000		78.440.000,00	51.712.000,00	-	26.728.000,00	-	78.440.000,00	-
63	SD Negeri 1 Bungaya	-		-	124.020.000		124.020.000,00	80.335.000,00	-	43.685.000,00	-	124.020.000,00	-
64	SD Negeri 1 Bungaya Kangin	580,55		580,55	87.980.000		87.980.000,00	61.530.000,00	-	26.450.000,00	-	87.980.000,00	580,55
65	SD Negeri 1 Jungutan	906.500,07		906.500,07	140.073.500		140.073.500,00	116.714.900,00	-	23.500.000,00	-	140.214.900,00	765.100,07
66	SD Negeri 1 Macang	148.089,15		148.089,15	111.152.000	22.500.000	133.652.000,00	80.550.000,00	14.246.000,00	30.750.000,00	8.254.000,00	133.800.000,00	89,15
67	SD Negeri 1 Sibetan	60.000,12		60.000,12	215.120.000		215.120.000,00	183.940.000,00	-	31.240.000,00	-	215.180.000,00	0,12
68	SD Negeri 2 Bebandem	25.000,83		25.000,83	120.815.000		120.815.000,00	101.090.125,00	-	19.735.000,00	-	120.825.125,00	14.875,83
69	SD Negeri 2 Bhuana Giri	0,93		0,93	127.200.000		127.200.000,00	76.320.000,00	-	50.880.000,00	-	127.200.000,00	0,93
70	SD Negeri 2 Budakeling	712.448,74		712.448,74	138.147.801	22.500.000	160.647.801,00	114.110.000,00	13.330.624,00	24.700.000,00	9.169.376,00	161.310.000,00	50.249,74
71	SD Negeri 2 Bungaya	159.327,24		159.327,24	113.261.200		113.261.200,00	89.320.000,00	-	24.100.000,00	-	113.420.000,00	527,24
72	SD Negeri 2 Bungaya Kangin	-		-	100.700.000		100.700.000,00	72.000.000,00	-	28.700.000,00	-	100.700.000,00	-
73	SD Negeri 2 Jungutan	15.316.979,75		15.316.979,75	124.627.800		124.627.800,00	108.003.200,00	-	29.000.000,00	-	137.003.200,00	2.941.579,75
74	SD Negeri 2 Sibetan	180.200,77		180.200,77	130.199.800		130.199.800,00	106.959.795,00	-	23.250.000,00	-	130.209.795,00	170.205,77
75	SD Negeri 3 Bebandem	1.405.400,92		1.405.400,92	105.654.600	22.500.000	128.154.600,00	76.990.000,00	10.502.100,00	29.089.000,00	11.994.000,00	128.575.100,00	984.900,92
76	SD Negeri 3 Bhuana Giri	2.635.929,62		2.635.929,62	144.704.070		144.704.070,00	109.702.810,00	-	35.447.000,00	-	145.149.810,00	2.190.189,62
77	SD Negeri 3 Budakeling	0,61		0,61	156.880.000	22.500.000	179.380.000,00	109.255.200,00	12.379.066,00	47.624.800,00	10.120.934,00	179.380.000,00	0,61
78	SD Negeri 3 Bungaya	0,68		0,68	124.020.000		124.020.000,00	87.835.000,00	-	36.185.000,00	-	124.020.000,00	0,68
79	SD Negeri 3 Bungaya Kangin	383,58		383,58	115.540.000		115.540.000,00	89.211.987,00	-	26.328.000,00	-	115.539.987,00	396,58
80	SD Negeri 3 Jungutan	0,06		0,06	98.580.000	22.500.000	121.080.000,00	83.730.000,00	11.541.000,00	14.850.000,00	10.959.000,00	121.080.000,00	0,06
81	SD Negeri 3 Sibetan	775.528,65		775.528,65	186.910.000		186.910.000,00	154.735.528,00	-	32.950.000,00	-	187.685.528,00	0,65
82	SD Negeri 4 Bebandem	0,72		0,72	126.140.000	22.500.000	148.640.000,00	88.640.000,00	9.686.124,00	37.500.000,00	12.813.876,00	148.640.000,00	0,72

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
83	SD Negeri 4 Bhuana Giri	70,47		70,47	83.740.000	22.500.000	106.240.000,00	60.199.000,00	12.443.124,00	23.541.000,00	10.056.876,00	106.240.000,00	70,47
84	SD Negeri 4 Jungutan	0,31		0,31	96.460.000		96.460.000,00	74.459.949,00	-	22.000.000,00	-	96.459.949,00	51,31
85	SD Negeri 4 Sibetan	222.738,17		222.738,17	71.857.262	22.500.000	94.357.262,00	56.020.587,00	12.294.000,00	15.474.500,00	10.206.000,00	93.995.087,00	584.913,17
86	SD Negeri 5 Bebandem	2.245.000,41		2.245.000,41	135.555.000		135.555.000,00	107.950.000,00	-	29.850.000,00	-	137.800.000,00	0,41
87	SD Negeri 5 Bhuana Giri	134.810,11		134.810,11	58.197.500	22.500.000	80.697.500,00	44.534.105,00	11.583.000,00	13.797.800,00	10.917.000,00	80.831.905,00	405,11
88	SD Negeri 5 Jungutan	19.880,49		19.880,49	110.220.124		110.220.124,00	72.840.000,00	-	37.400.000,00	-	110.240.000,00	4,49
89	SD Negeri 5 Sibetan	341,78		341,78	85.860.000	22.500.000	108.360.000,00	52.864.000,00	14.736.000,00	32.996.000,00	7.764.000,00	108.360.000,00	341,78
90	SD Negeri 6 Bebandem	687.310,17		687.310,17	100.012.690		100.012.690,00	60.500.000,00	-	40.200.000,00	-	100.700.000,00	0,17
91	SD Negeri 6 Bhuana Giri	0,64		0,64	14.840.000		14.840.000,00	14.839.430,00	-	-	-	14.839.430,00	570,64
92	SD Negeri 6 Jungutan	999,57		999,57	89.039.000		89.039.000,00	56.459.000,00	-	32.580.000,00	-	89.039.000,00	999,57
93	SD Negeri 6 Sibetan	500,09		500,09	58.300.000		58.300.000,00	35.700.500,00	-	22.600.000,00	-	58.300.500,00	0,09
94	SD Negeri 7 Bebandem	499,75		499,75	109.180.000		109.180.000,00	80.180.499,00	-	29.000.000,00	-	109.180.499,00	0,75
95	SD Negeri 7 Bhuana Giri	-		-	157.940.000		157.940.000,00	95.814.000,00	-	62.126.000,00	-	157.940.000,00	-
96	SD Negeri 7 Sibetan	1.821,21		1.821,21	72.080.000		72.080.000,00	59.590.000,00	-	12.490.000,00	-	72.080.000,00	1.821,21
97	SD Negeri 8 Bebandem	201.683,84		201.683,84	82.677.300	22.500.000	105.177.300,00	47.878.983,00	11.779.340,00	35.000.000,00	10.720.660,00	105.378.983,00	0,84
98	SD Negeri 9 Bebandem	0,73		0,73	135.680.000		135.680.000,00	105.380.000,00	-	30.300.000,00	-	135.680.000,00	0,73
99	SD Negeri 1 Ban	-		-	250.160.000,00		250.160.000,00	192.660.000,00	-	57.500.000,00	-	250.160.000,00	-
100	SD Negeri 1 Baturinggit	0,13		0,13	119.780.000,00	22.500.000,00	142.280.000,00	95.192.500,00	11.500.000,00	24.587.500,00	11.000.000,00	142.280.000,00	0,13
101	SD Negeri 1 Dukuh	0,40		0,40	180.200.000,00	22.500.000,00	202.700.000,00	158.700.000,00	11.500.000,00	21.500.000,00	11.000.000,00	202.700.000,00	0,40
102	SD Negeri 1 Kubu	0,16		0,16	195.040.000,00		195.040.000,00	147.040.000,00		48.000.000,00		195.040.000,00	0,16
103	SD Negeri 1 Sukadana	0,40		0,40	153.700.000,00		153.700.000,00	86.100.000,00		67.600.000,00		153.700.000,00	0,40
104	SD Negeri 1 Tianyar	0,73		0,73	119.780.000,00		119.780.000,00	83.880.000,00		35.900.000,00		119.780.000,00	0,73
105	SD Negeri 1 Tianyar Barat	-		-	89.039.999,00		89.039.999,00	77.439.999,00		11.600.000,00		89.039.999,00	-
106	SD Negeri 1 Tianyar Tengah	0,13		0,13	150.520.000,00		150.520.000,00	72.178.260,00		75.800.000,00		147.978.260,00	2.541.740,13
107	SD Negeri 1 Tulamben	0,13		0,13	420.820.000,00		420.820.000,00	336.720.000,00		84.100.000,00		420.820.000,00	0,13
108	SD Negeri 10 Tianyar	315.374,63		315.374,63	96.144.625,00		96.144.625,00	73.752.450,00		22.645.000,00		96.397.450,00	62.549,63
109	SD Negeri 2 Ban	61,98		61,98	249.100.000,00		249.100.000,00	176.790.000,00		72.310.000,00		249.100.000,00	61,98
110	SD Negeri 2 Baturinggit	0,11		0,11	178.080.000,00		178.080.000,00	143.580.000,00		34.500.000,00		178.080.000,00	0,11
111	SD Negeri 2 Dukuh	73.227,97		73.227,97	148.400.000,00		148.400.000,00	107.600.000,00		40.800.000,00		148.400.000,00	73.227,97
112	SD Negeri 2 Kubu	0,78		0,78	81.620.000,00		81.620.000,00	53.444.500,00		28.150.000,00		81.594.500,00	25.500,78
113	SD Negeri 2 Sukadana	0,06		0,06	181.260.000,00		181.260.000,00	150.260.000,00		31.000.000,00		181.260.000,00	0,06
114	SD Negeri 2 Tianyar	1.625.499,99		1.625.499,99	123.454.500,00		123.454.500,00	104.552.262,00		18.000.000,00		122.552.262,00	2.527.737,99
115	SD Negeri 2 Tianyar Barat	0,47		0,47	116.600.000,00		116.600.000,00	83.500.000,00		33.100.000,00		116.600.000,00	0,47
116	SD Negeri 2 Tianyar Tengah	49.999,97		49.999,97	394.270.000,00		394.270.000,00	299.119.999,97		95.200.000,00		394.319.999,97	-
117	SD Negeri 2 Tulamben	755.500,58		755.500,58	231.384.500,00		231.384.500,00	180.636.750,00		51.500.000,00		232.136.750,00	3.250,58

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
118	SD Negeri 3 Ban	99.012,80		99.012,80	327.486.800,00		327.486.800,00	222.340.000,00		105.200.000,00		327.540.000,00	45.812,80
119	SD Negeri 3 Baturinggit	99,99		99,99	44.520.000,00		44.520.000,00	44.227.000,00		-		44.227.000,00	293.099,99
120	SD Negeri 3 Dukuh	18,39		18,39	44.520.000,00	22.500.000,00	67.020.000,00	23.970.000,00	11.576.400,00	20.550.000,00	10.923.600,00	67.020.000,00	18,39
121	SD Negeri 3 Kubu	163.000,06		163.000,06	60.257.000,00		60.257.000,00	48.920.000,00		11.500.000,00		60.420.000,00	0,06
122	SD Negeri 3 Sukadana	39.999,83		39.999,83	186.520.000,00		186.520.000,00	137.059.999,83		49.500.000,00		186.559.999,83	-
123	SD Negeri 3 Tianyar	0,53		0,53	100.700.000,00		100.700.000,00	78.150.000,00		22.550.000,00		100.700.000,00	0,53
124	SD Negeri 3 Tianyar Barat	35.639,86		35.639,86	286.175.000,00		286.175.000,00	251.800.000,00		34.400.000,00		286.200.000,00	10.639,86
125	SD Negeri 3 Tianyar Tengah	25.000,47		25.000,47	72.055.000,00		72.055.000,00	56.730.000,00		15.350.000,00		72.080.000,00	0,47
126	SD Negeri 3 Tulamben	-		-	157.940.000,00	22.500.000,00	180.440.000,00	87.640.000,00	11.527.400,00	70.300.000,00	10.972.600,00	180.440.000,00	-
127	SD Negeri 4 Ban	376,72		376,72	77.380.000,00		77.380.000,00	59.380.000,00		18.000.000,00		77.380.000,00	376,72
128	SD Negeri 4 Baturinggit	8.655,48		8.655,48	48.760.000,00		48.760.000,00	45.268.655,00		3.500.000,00		48.768.655,00	0,48
129	SD Negeri 4 Dukuh	99,71		99,71	73.140.000,00		73.140.000,00	55.290.000,00		17.850.000,00		73.140.000,00	99,71
130	SD Negeri 4 Kubu	319,12		319,12	65.720.000,00		65.720.000,00	53.220.000,00		12.500.000,00		65.720.000,00	319,12
131	SD Negeri 4 Sukadana	0,72		0,72	131.440.000,00		131.440.000,00	86.440.000,00		45.000.000,00		131.440.000,00	0,72
132	SD Negeri 4 Tianyar	509.000,15		509.000,15	246.471.000,00		246.471.000,00	187.980.000,00		59.000.000,00		246.980.000,00	0,15
133	SD Negeri 4 Tianyar Barat	0,76		0,76	99.640.000,00	22.500.000,00	122.140.000,00	67.590.000,00	9.950.000,00	32.050.000,00	12.550.000,00	122.140.000,00	0,76
134	SD Negeri 4 Tianyar Tengah	106,17		106,17	68.899.894,00		68.899.894,00	44.899.991,00		24.000.000,00		68.899.991,00	9,17
135	SD Negeri 4 Tulamben	4.688,19		4.688,19	134.615.400,00		134.615.400,00	88.216.000,00		46.300.000,00		134.516.000,00	104.088,19
136	SD Negeri 5 Ban	27.000,32		27.000,32	115.513.000,00		115.513.000,00	95.940.000,00		19.600.000,00		115.540.000,00	0,32
137	SD Negeri 5 Tianyar	96.425,03		96.425,03	243.704.000,00		243.704.000,00	161.850.000,00		81.950.000,00		243.800.000,00	425,03
138	SD Negeri 5 Tianyar Barat	0,45		0,45	119.780.000,00	22.500.000,00	142.280.000,00	61.004.000,00	13.496.600,00	58.776.000,00	9.000.000,00	142.276.600,00	3.400,45
139	SD Negeri 5 Tulamben	0,16		0,16	150.520.000,00		150.520.000,00	133.670.000,00		16.850.000,00		150.520.000,00	0,16
140	SD Negeri 6 Ban	268.014,00		268.014,00	90.892.000,00		90.892.000,00	66.557.500,00		24.600.000,00		91.157.500,00	2.514,00
141	SD Negeri 6 Tianyar	575.899,99		575.899,99	158.442.600,00		158.442.600,00	107.996.000,00		51.000.000,00		158.996.000,00	22.499,99
142	SD Negeri 6 Tianyar Barat	76,90		76,90	451.560.000,00		451.560.000,00	315.080.000,00		136.480.000,00		451.560.000,00	76,90
143	SD Negeri 7 Ban	0,13		0,13	150.520.000,00		150.520.000,00	115.970.000,00		34.550.000,00		150.520.000,00	0,13
144	SD Negeri 7 Tianyar	0,02		0,02	46.640.000,00		46.640.000,00	30.640.000,00		16.000.000,00		46.640.000,00	0,02
145	SD Negeri 7 Tianyar Barat	0,70		0,70	131.440.000,00		131.440.000,00	74.440.000,00		57.000.000,00		131.440.000,00	0,70
146	SD Negeri 8 Ban	0,31		0,31	114.480.000,00		114.480.000,00	89.880.000,00		24.600.000,00		114.480.000,00	0,31
147	SD Negeri 8 Tianyar	224.999,29		224.999,29	149.235.000,00		149.235.000,00	124.459.999,29		25.000.000,00		149.459.999,29	-
148	SD Negeri 8 Tianyar Barat	-		-	128.260.000,00		128.260.000,00	103.422.000,00		24.800.000,00		128.222.000,00	38.000,00
149	SD Negeri 9 Tianyar	899,65		899,65	43.460.000,00		43.460.000,00	26.960.000,00		16.500.000,00		43.460.000,00	899,65
150	SD Negeri 1 Bugbug	108.000,00		108.000,00	280.792.000,00	-	280.792.000,00	189.005.670,00	-	91.500.000,00	-	280.505.670,00	394.330,00
151	SD Negeri 1 Bukit	9.438,00		9.438,00	102.810.562,00	-	102.810.562,00	82.222.000,00	-	20.564.000,00	-	102.786.000,00	34.000,00
152	SD Negeri 1 Karangasem	20.702,62		20.702,62	451.539.400,00	22.500.000,00	474.039.400,00	328.553.500,00	13.618.000,00	123.000.000,00	8.882.000,00	474.053.500,00	6.602,62
153	SD Negeri 1 Padangkerta	-		-	168.540.000,00	-	168.540.000,00	119.584.500,00	-	42.732.300,00	-	162.316.800,00	6.223.200,00
154	SD Negeri 1 Pertima	512.369,00		512.369,00	87.467.631,00	-	87.467.631,00	70.243.030,00	-	17.500.000,00	-	87.743.030,00	236.970,00

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
155	SD Negeri 1 Seraya	-		-	98.580.000,00	-	98.580.000,00	83.780.000,00	-	14.800.000,00	-	98.580.000,00	-
156	SD Negeri 1 Seraya Barat	41.000,70		41.000,70	179.099.000,00	-	179.099.000,00	150.564.800,00	-	22.063.500,00	-	172.628.300,00	6.511.700,70
157	SD Negeri 1 Seraya Timur	75.000,09		75.000,09	163.165.000,00	-	163.165.000,00	129.940.000,00	-	33.300.000,00	-	163.240.000,00	0,09
158	SD Negeri 1 Subagan	10.500.000,30		10.500.000,30	246.020.000,00	-	246.020.000,00	175.003.776,00	-	79.912.000,00	-	254.915.776,00	1.604.224,30
159	SD Negeri 1 Tegallinggah	-		-	87.980.000,00	-	87.980.000,00	57.920.300,00	-	30.000.000,00	-	87.920.300,00	59.700,00
160	SD Negeri 1 Tumbu	218.695,00		218.695,00	119.561.305,00	-	119.561.305,00	80.479.550,00	-	39.300.000,00	-	119.779.550,00	450,00
161	SD Negeri 1 0 Karangasem	1.167.880,43		1.167.880,43	34.872.120,00	-	34.872.120,00	28.090.000,00	-	7.950.000,00	-	36.040.000,00	0,43
162	SD Negeri 1 1 Karangasem	679.346,97		679.346,97	83.060.654,00	-	83.060.654,00	59.089.408,00	-	24.650.000,00	-	83.739.408,00	592,97
163	SD Negeri 1 2 Karangasem	476.800,00		476.800,00	108.703.200,00	-	108.703.200,00	89.230.000,00	-	19.950.000,00	-	109.180.000,00	-
164	SD Negeri 2 Bugbug	222.466,11		222.466,11	190.578.173,00	-	190.578.173,00	127.349.336,00	-	63.450.000,00	-	190.799.336,00	1.303,11
165	SD Negeri 2 Bukit	46.474.800,19		46.474.800,19	40.810.000,00	-	40.810.000,00	59.319.900,00	-	21.350.000,00	-	80.669.900,00	6.614.900,19
166	SD Negeri 2 Karangasem	151.577,00		151.577,00	57.088.423,00	-	57.088.423,00	41.931.487,00	-	14.450.000,00	-	56.381.487,00	858.513,00
167	SD Negeri 2 Padangkerta	1.676.216,53		1.676.216,53	112.803.784,00	-	112.803.784,00	82.895.056,00	-	30.414.333,00	-	113.309.389,00	1.170.611,53
168	SD Negeri 2 Pertima	122.680,08		122.680,08	32.737.320,00	-	32.737.320,00	19.715.990,00	-	13.144.000,00	-	32.859.990,00	10,08
169	SD Negeri 2 Seraya	-		-	120.840.000,00	-	120.840.000,00	79.271.620,00	-	36.030.000,00	-	115.301.620,00	5.538.380,00
170	SD Negeri 2 Seraya Barat	1.309,81		1.309,81	153.700.000,00	-	153.700.000,00	116.647.309,00	-	37.054.000,00	-	153.701.309,00	0,81
171	SD Negeri 2 Seraya Timur	0,92		0,92	319.060.000,00	-	319.060.000,00	284.000.000,00	-	34.000.000,00	-	318.000.000,00	1.060.000,92
172	SD Negeri 2 Subagan	1.137.500,99		1.137.500,99	74.122.500,00	-	74.122.500,00	59.847.500,00	-	15.000.000,00	-	74.847.500,00	412.500,99
173	SD Negeri 2 Tegallinggah	9.500,00		9.500,00	62.530.500,00	22.500.000,00	85.030.500,00	46.634.575,00	12.620.000,00	15.800.000,00	9.880.000,00	84.934.575,00	105.425,00
174	SD Negeri 2 Tumbu	2.465.352,80		2.465.352,80	146.994.648,00	-	146.994.648,00	100.176.000,00	-	49.284.000,00	-	149.460.000,00	0,80
175	SD Negeri 3 Bugbug	846,17		846,17	214.119.946,00	-	214.119.946,00	163.291.144,00	-	50.378.000,00	-	213.669.144,00	451.648,17
176	SD Negeri 3 Bukit	270.000,00		270.000,00	52.730.000,00	-	52.730.000,00	29.550.000,00	-	23.450.000,00	-	53.000.000,00	-
177	SD Negeri 3 Karangasem	1.025,00		1.025,00	77.379.333,00	-	77.379.333,00	57.379.575,00	-	20.000.000,00	-	77.379.575,00	783,00
178	SD Negeri 3 Padangkerta	167,91		167,91	63.600.000,00	22.500.000,00	86.100.000,00	41.800.000,00	18.324.000,00	21.800.000,00	4.176.000,00	86.100.000,00	167,91
179	SD Negeri 3 Pertima	200.733,03		200.733,03	153.499.270,00	22.500.000,00	175.999.270,00	98.905.620,00	12.734.000,00	54.675.000,00	9.766.000,00	176.080.620,00	119.383,03
180	SD Negeri 3 Seraya	1.221.737,62		1.221.737,62	142.938.263,00	-	142.938.263,00	115.227.206,00	-	28.000.000,00	-	143.227.206,00	932.794,62
181	SD Negeri 3 Seraya Barat	0,24		0,24	135.680.000,00	-	135.680.000,00	107.920.000,00	-	27.760.000,00	-	135.680.000,00	0,24
182	SD Negeri 3 Seraya Timur	54.118,03		54.118,03	204.525.882,00	-	204.525.882,00	157.612.000,00	-	46.900.000,00	-	204.512.000,00	68.000,03
183	SD Negeri 3 Subagan	-		-	116.600.000,00	22.500.000,00	139.100.000,00	81.200.000,00	11.818.000,00	35.400.000,00	10.682.000,00	139.100.000,00	-
184	SD Negeri 3 Tegallinggah	126.278,00		126.278,00	60.293.722,00	-	60.293.722,00	41.343.046,00	-	18.950.000,00	-	60.293.046,00	126.954,00
185	SD Negeri 3 Tumbu	0,70		0,70	59.360.000,00	22.500.000,00	81.860.000,00	40.110.000,00	12.397.000,00	19.250.000,00	10.103.000,00	81.860.000,00	0,70
186	SD Negeri 4 Bugbug	1.339.400,33		1.339.400,33	182.040.600,00	-	182.040.600,00	127.710.000,00	-	55.000.000,00	-	182.710.000,00	670.000,33
187	SD Negeri 4 Bukit	0,25		0,25	46.640.000,00	-	46.640.000,00	38.640.000,00	-	8.000.000,00	-	46.640.000,00	0,25
188	SD Negeri 4 Karangasem	7.504,00		7.504,00	85.852.496,00	22.500.000,00	108.352.496,00	73.560.000,00	13.468.000,00	12.300.000,00	9.032.000,00	108.360.000,00	-
189	SD Negeri 4 Padangkerta	-		-	434.600.000,00	-	434.600.000,00	284.600.000,00	-	150.000.000,00	-	434.600.000,00	-
190	SD Negeri 4 Pertima	0,73		0,73	164.300.000,00	22.500.000,00	186.800.000,00	129.100.000,00	15.090.000,00	35.200.000,00	7.410.000,00	186.800.000,00	0,73

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
191	SD Negeri 4 Seraya	901.175,00		901.175,00	123.118.825,00	-	123.118.825,00	74.717.125,00	-	48.850.000,00	-	123.567.125,00	452.875,00
192	SD Negeri 4 Seraya Barat	319.200,87		319.200,87	67.520.800,00	-	67.520.800,00	46.840.000,00	-	21.000.000,00	-	67.840.000,00	0,87
193	SD Negeri 4 Seraya Timur	0,94		0,94	172.780.000,00	-	172.780.000,00	143.780.000,00	-	29.000.000,00	-	172.780.000,00	0,94
194	SD Negeri 4 Subagan	447.500,04		447.500,04	355.712.500,00	-	355.712.500,00	297.760.000,00	-	58.400.000,00	-	356.160.000,00	0,04
195	SD Negeri 5 Bugbug	184.432,80		184.432,80	85.675.568,00	22.500.000,00	108.175.568,00	67.760.000,00	14.950.000,00	18.100.000,00	7.550.000,00	108.360.000,00	0,80
196	SD Negeri 5 Karangasem	0,19		0,19	270.300.000,00	-	270.300.000,00	211.100.000,00	-	59.200.000,00	-	270.300.000,00	0,19
197	SD Negeri 5 Padangkerta	-		-	82.680.000,00	-	82.680.000,00	59.604.100,00	-	23.075.900,00	-	82.680.000,00	-
198	SD Negeri 5 Seraya	-		-	86.920.000,00	-	86.920.000,00	63.980.000,00	-	22.940.000,00	-	86.920.000,00	-
199	SD Negeri 5 Seraya Barat	907.500,34		907.500,34	118.872.500,00	-	118.872.500,00	87.298.916,00	-	32.480.000,00	-	119.778.916,00	1.084,34
200	SD Negeri 5 Subagan	4.069.000,00		4.069.000,00	147.511.000,00	-	147.511.000,00	113.721.358,00	-	30.600.000,00	-	144.321.358,00	7.258.642,00
201	SD Negeri 6 Bugbug	0,70		0,70	178.080.000,00	-	178.080.000,00	142.532.000,00	-	35.548.000,00	-	178.080.000,00	0,70
202	SD Negeri 6 Karangasem	9.853,31		9.853,31	272.410.244,00	22.500.000,00	294.910.244,00	208.385.000,00	15.110.000,00	64.035.000,00	7.390.000,00	294.920.000,00	97,31
203	SD Negeri 6 Seraya	200.000,09		200.000,09	101.560.000,00	-	101.560.000,00	76.705.602,00	-	24.700.000,00	-	101.405.602,00	354.398,09
204	SD Negeri 6 Subagan	1.162.613,00		1.162.613,00	139.817.387,00	-	139.817.387,00	111.580.000,00	-	29.400.000,00	-	140.980.000,00	-
205	SD Negeri 7 Bugbug	-		-	104.940.000,00	-	104.940.000,00	91.696.500,00	-	13.243.500,00	-	104.940.000,00	-
206	SD Negeri 7 Karangasem	400.325,94		400.325,94	85.459.675,00	-	85.459.675,00	69.010.000,00	-	16.850.000,00	-	85.860.000,00	0,94
207	SD Negeri 7 Seraya	1.629.600,02		1.629.600,02	192.350.400,00	-	192.350.400,00	174.722.000,00	-	18.450.000,00	-	193.172.000,00	808.000,02
208	SD Negeri 7 Subagan	81.430,70		81.430,70	124.020.000,00	-	124.020.000,00	97.830.000,00	-	26.190.000,00	-	124.020.000,00	81.430,70
209	SD Negeri 8 Karangasem	6.757.050,89		6.757.050,89	126.375.280,00	-	126.375.280,00	78.641.830,00	-	54.490.500,00	-	133.132.330,00	0,89
210	SD Negeri 8 Seraya	-		-	77.380.000,00	-	77.380.000,00	62.380.000,00	-	15.000.000,00	-	77.380.000,00	-
211	SD Negeri 8 Subagan	31.597,48		31.597,48	32.828.403,00	-	32.828.403,00	29.000.000,00	-	3.860.000,00	-	32.860.000,00	0,48
212	SD Negeri 9 Karangasem	0,06		0,06	109.180.000,00	-	109.180.000,00	69.494.000,00	-	39.686.000,00	-	109.180.000,00	0,06
213	SD Negeri 9 Seraya	7.084,00		7.084,00	67.832.916,00	-	67.832.916,00	51.137.382,00	-	16.700.000,00	-	67.837.382,00	2.618,00
214	SD Negeri 9 Subagan	-		-	69.960.000,00	-	69.960.000,00	53.860.000,00	-	16.100.000,00	-	69.960.000,00	-
215	SD NEGERI 1 ANTIGA	36.461,98		36.461,98	129.317.500,00	-	129.317.500,00	78.763.400,00	-	50.556.600,00	-	129.320.000,00	33.961,98
216	SD NEGERI 1 ANTIGA KELOD	398.533,72		398.533,72	127.861.500,00	22.500.000,00	150.361.500,00	96.960.000,00	12.228.791,00	31.300.000,00	10.271.209,00	150.760.000,00	33,72
217	SD NEGERI 1 GEGELANG	18.344,62		18.344,62	99.636.800,00	22.500.000,00	122.136.800,00	77.033.000,00	12.193.400,00	22.600.000,00	10.306.600,00	122.133.000,00	22.144,62
218	SD NEGERI 1 MANGGIS	240.250,80		240.250,80	154.760.000,00	-	154.760.000,00	136.170.000,00	-	18.590.000,00	-	154.760.000,00	240.250,80
219	SD NEGERI 1 NGIS	0,67		0,67	59.360.000,00	-	59.360.000,00	44.860.000,00	-	14.500.000,00	-	59.360.000,00	0,67
220	SD NEGERI 1 NYUHTEBEL	890,56		890,56	129.320.000,00	-	129.320.000,00	92.766.700,00	-	36.553.300,00	-	129.320.000,00	890,56
221	SD NEGERI 1 PADANGBAI	1.127.115,29		1.127.115,29	176.952.951,00	-	176.952.951,00	144.492.480,00	-	31.950.000,00	-	176.442.480,00	1.637.586,29
222	SD NEGERI 1 PESEDAHAN	0,14		0,14	111.300.000,00	-	111.300.000,00	86.400.000,00	-	24.900.000,00	-	111.300.000,00	0,14
223	SD NEGERI 1 SELUMBUNG	759,23		759,23	95.400.000,00	22.500.000,00	117.900.000,00	75.382.814,00	12.909.500,00	19.650.000,00	9.590.500,00	117.532.814,00	367.945,23
224	SD NEGERI 1 SENGKIDU	0,55		0,55	127.200.000,00	-	127.200.000,00	82.300.000,00	-	44.900.000,00	-	127.200.000,00	0,55
225	SD NEGERI 1 TENGANAN	69,84		69,84	71.020.000,00	-	71.020.000,00	52.516.700,00	-	18.503.300,00	-	71.020.000,00	69,84

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
226	SD NEGERI 1 ULAKAN	175.190,44		175.190,44	170.660.000,00	-	170.660.000,00	155.960.000,00	-	14.700.000,00	-	170.660.000,00	175.190,44
227	SD NEGERI 2 ANTIGA	416.850,38		416.850,38	209.463.150,00	-	209.463.150,00	160.215.500,00	-	49.600.000,00	-	209.815.500,00	64.500,38
228	SD NEGERI 2 ANTIGA KELOD	-		-	198.220.000,00	22.500.000,00	220.720.000,00	131.120.000,00	11.250.124,00	67.100.000,00	11.249.876,00	220.720.000,00	-
229	SD NEGERI 2 GEGELANG	600,06		600,06	97.520.000,00	-	97.520.000,00	82.730.000,00	-	14.790.000,00	-	97.520.000,00	600,06
230	SD NEGERI 2 MANGGIS	478.060,46		478.060,46	67.840.000,00	22.500.000,00	90.340.000,00	40.220.000,00	12.251.291,00	27.600.000,00	10.248.709,00	90.320.000,00	498.060,46
231	SD NEGERI 2 NGIS	0,11		0,11	90.100.000,00	-	90.100.000,00	64.100.000,00	-	26.000.000,00	-	90.100.000,00	0,11
232	SD NEGERI 2 NYUH TEBEL	11.768,26		11.768,26	78.428.300,00	-	78.428.300,00	67.940.000,00	-	10.500.000,00	-	78.440.000,00	68,26
233	SD NEGERI 2 PADANGBAI	661.450,89		661.450,89	164.698.550,00	-	164.698.550,00	146.304.000,00	-	19.000.000,00	-	165.304.000,00	56.000,89
234	SD NEGERI 2 SELUMBUNG	72.608,47		72.608,47	51.867.392,00	-	51.867.392,00	30.017.615,00	-	21.444.000,00	-	51.461.615,00	478.385,47
235	SD NEGERI 2 SENGKIDU	2.018.218,53		2.018.218,53	130.481.871,00	-	130.481.871,00	100.230.100,00	-	31.800.000,00	-	132.030.100,00	469.989,53
236	SD NEGERI 2 TENGANAN	0,20		0,20	69.960.000,00	-	69.960.000,00	52.364.000,00	-	17.596.000,00	-	69.960.000,00	0,20
237	SD NEGERI 2 ULAKAN	1.500.000,96		1.500.000,96	72.700.000,00	-	72.700.000,00	36.500.000,00	-	37.700.000,00	-	74.200.000,00	0,96
238	SD NEGERI 3 ANTIGA	2.612,65		2.612,65	129.320.000,00	-	129.320.000,00	104.220.000,00	-	25.100.000,00	-	129.320.000,00	2.612,65
239	SD NEGERI 3 ANTIGA KELOD	-		-	151.580.000,00	-	151.580.000,00	128.183.800,00	-	23.396.200,00	-	151.580.000,00	-
240	SD NEGERI 3 GEGELANG	65,26		65,26	113.420.000,00	-	113.420.000,00	93.930.000,00	-	19.490.000,00	-	113.420.000,00	65,26
241	SD NEGERI 3 MANGGIS	15.100,72		15.100,72	113.404.900,00	-	113.404.900,00	69.195.400,00	-	44.224.600,00	-	113.420.000,00	0,72
242	SD NEGERI 3 NGIS	0,53		0,53	31.800.000,00	-	31.800.000,00	19.781.300,00	-	12.018.700,00	-	31.800.000,00	0,53
243	SD NEGERI 3 SELUMBUNG	178.201,85		178.201,85	84.621.800,00	22.500.000,00	107.121.800,00	73.350.000,00	12.909.500,00	11.450.000,00	9.590.500,00	107.300.000,00	1,85
244	SD NEGERI 3 TENGANAN	8,03		8,03	103.880.000,00	-	103.880.000,00	73.067.300,00	-	30.000.000,00	-	103.067.300,00	812.708,03
245	SD NEGERI 3 ULAKAN	0,67		0,67	118.720.000,00	-	118.720.000,00	98.220.000,00	-	20.500.000,00	-	118.720.000,00	0,67
246	SD NEGERI 4 ANTIGA	0,17		0,17	119.780.000,00	50.750.000,00	170.530.000,00	88.976.700,00	26.300.000,00	30.803.300,00	24.450.000,00	170.530.000,00	0,17
247	SD NEGERI 4 ANTIGA KELOD	169,46		169,46	155.820.000,00	-	155.820.000,00	101.320.000,00	-	54.500.000,00	-	155.820.000,00	169,46
248	SD NEGERI 4 GEGELANG	70,48		70,48	149.460.000,00	-	149.460.000,00	118.960.000,00	-	30.500.000,00	-	149.460.000,00	70,48
249	SD NEGERI 4 MANGGIS	0,85		0,85	97.520.000,00	-	97.520.000,00	53.866.700,00	-	43.653.300,00	-	97.520.000,00	0,85
250	SD NEGERI 4 TENGANAN	121.926,46		121.926,46	60.345.375,00	-	60.345.375,00	44.120.000,00	-	16.300.000,00	-	60.420.000,00	47.301,46
251	SD NEGERI 4 ULAKAN	8,31		8,31	83.740.000,00	22.500.000,00	106.240.000,00	54.750.000,00	11.250.000,00	28.990.000,00	11.250.000,00	106.240.000,00	8,31
252	SD NEGERI 5 ANTIGA	89,65		89,65	77.380.000,00	-	77.380.000,00	45.580.000,00	-	31.800.000,00	-	77.380.000,00	89,65
253	SD NEGERI 5 GEGELANG	8,09		8,09	75.260.000,00	22.500.000,00	97.760.000,00	45.660.000,00	11.250.000,00	29.600.000,00	11.250.000,00	97.760.000,00	8,09
254	SD NEGERI 5 MANGGIS	126.900,97		126.900,97	57.113.100,00	-	57.113.100,00	35.061.345,00	-	21.888.000,00	-	56.949.345,00	290.655,97
255	SD NEGERI 5 TENGANAN	0,66		0,66	44.520.000,00	-	44.520.000,00	26.020.000,00	-	18.500.000,00	-	44.520.000,00	0,66

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
256	SD NEGERI 5 ULAKAN	180.651,79		180.651,79	83.740.000,00	-	83.740.000,00	72.540.000,00	-	11.200.000,00	-	83.740.000,00	180.651,79
257	SD NEGERI 6 ANTIGA	0,24		0,24	121.900.000,00	-	121.900.000,00	99.850.000,00	-	22.050.000,00	-	121.900.000,00	0,24
258	SD NEGERI 6 GEGELANG	0,77		0,77	111.300.000,00	-	111.300.000,00	85.100.000,00	-	26.200.000,00	-	111.300.000,00	0,77
259	SD NEGERI 7 GEGELANG	270,19		270,19	61.480.000,00	-	61.480.000,00	55.480.000,00	-	6.000.000,00	-	61.480.000,00	270,19
260	SD NEGERI 1 BESAKIH	0,10		0,10	86.920.000,00	22.500.000,00	109.420.000,00	56.919.840,00	11.486.124,00	30.000.000,00	11.013.876,00	109.419.840,00	160,10
261	SD NEGERI 2 BESAKIH	0,73		0,73	245.920.000,00		245.920.000,00	228.420.000,00	-	17.500.000,00	-	245.920.000,00	0,73
262	SD NEGERI 3 BESAKIH	25.100,08		25.100,08	85.834.900,00		85.834.900,00	49.923.287,00	-	35.750.000,00	-	85.673.287,00	186.713,08
263	SD NEGERI 4 BESAKIH	0,17		0,17	59.360.000,00		59.360.000,00	46.360.000,00	-	13.000.000,00	-	59.360.000,00	0,17
264	SD NEGERI 5 BESAKIH	0,91		0,91	109.180.000,00		109.180.000,00	95.227.000,00	-	13.950.000,00	-	109.177.000,00	3.000,91
265	SD NEGERI 6 BESAKIH	185.000,77		185.000,77	142.915.000,00	22.500.000,00	165.415.000,00	125.918.400,00	11.347.340,00	17.100.000,00	11.152.660,00	165.518.400,00	81.600,77
266	SD NEGERI 1 MENANGA	145.000,74		145.000,74	203.375.000,00		203.375.000,00	148.320.000,00	-	55.200.000,00	-	203.520.000,00	0,74
267	SD NEGERI 2 MENANGA	23.500,12		23.500,12	119.756.500,00	22.500.000,00	142.256.500,00	103.340.160,00	11.548.404,00	16.000.000,00	10.951.596,00	141.840.160,00	439.840,12
268	SD NEGERI 3 MENANGA	0,92		0,92	168.540.000,00		168.540.000,00	123.890.000,00	-	44.650.000,00	-	168.540.000,00	0,92
269	SD NEGERI 4 MENANGA	0,68		0,68	55.120.000,00		55.120.000,00	49.620.000,00	-	5.500.000,00	-	55.120.000,00	0,68
270	SD NEGERI 5 MENANGA	0,15		0,15	109.180.000,00	22.500.000,00	131.680.000,00	101.738.205,00	11.349.468,00	7.000.000,00	11.150.532,00	131.238.205,00	441.795,15
271	SD NEGERI 6 MENANGA	0,32		0,32	43.460.000,00	22.500.000,00	65.960.000,00	38.860.000,00	11.273.138,00	4.600.000,00	11.226.862,00	65.960.000,00	0,32
272	SD NEGERI 1 NONGAN	16.000,52		16.000,52	57.224.000,00		57.224.000,00	49.290.000,00	-	7.950.000,00	-	57.240.000,00	0,52
273	SD NEGERI 2 NONGAN	413.048,85		413.048,85	96.046.952,00		96.046.952,00	78.060.000,00	-	18.400.000,00	-	96.460.000,00	0,85
274	SD NEGERI 3 NONGAN	0,23		0,23	79.500.000,00		79.500.000,00	63.300.000,00	-	16.200.000,00	-	79.500.000,00	0,23
275	SD NEGERI 4 NONGAN	0,15		0,15	98.580.000,00	22.500.000,00	121.080.000,00	66.880.000,00	11.383.771,00	31.700.000,00	11.116.229,00	121.080.000,00	0,15
276	SD NEGERI 5 NONGAN	18.500,83		18.500,83	77.361.500,00	22.500.000,00	99.861.500,00	60.030.000,00	11.273.138,00	17.350.000,00	11.226.862,00	99.880.000,00	0,83
277	SD NEGERI 6 NONGAN	0,88		0,88	48.760.000,00		48.760.000,00	38.660.000,00	-	10.100.000,00	-	48.760.000,00	0,88
278	SD NEGERI 1 PEMPATAN	0,29		0,29	62.540.000,00		62.540.000,00	49.640.000,00	-	12.900.000,00	-	62.540.000,00	0,29
279	SD NEGERI 2 PEMPATAN	0,53		0,53	119.780.000,00		119.780.000,00	86.580.000,00	-	33.200.000,00	-	119.780.000,00	0,53
280	SD NEGERI 3 PEMPATAN	0,49		0,49	155.820.000,00		155.820.000,00	116.570.000,00	-	39.250.000,00	-	155.820.000,00	0,49
281	SD NEGERI 4 PEMPATAN	-		-	259.700.000,00		259.700.000,00	200.210.000,00	-	59.490.000,00	-	259.700.000,00	-
282	SD NEGERI 5 PEMPATAN	0,38		0,38	138.860.000,00		138.860.000,00	125.860.000,00	-	13.000.000,00	-	138.860.000,00	0,38

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
283	SD NEGERI 6 PEMPATAN	0,66		0,66	106.000.000,00		106.000.000,00	78.550.000,00	-	27.450.000,00	-	106.000.000,00	0,66
284	SD NEGERI 7 PEMPATAN	0,19		0,19	58.300.000,00	22.500.000,00	80.800.000,00	51.800.000,00	11.345.569,00	6.500.000,00	11.154.431,00	80.800.000,00	0,19
285	SD NEGERI 8 PEMPATAN	0,78		0,78	126.140.000,00		126.140.000,00	95.790.000,00	-	30.350.000,00	-	126.140.000,00	0,78
286	SD NEGERI 1 PESABAN	93.000,55		93.000,55	115.447.000,00		115.447.000,00	88.968.631,00	-	26.570.000,00	-	115.538.631,00	1.369,55
287	SD NEGERI 2 PESABAN	0,36		0,36	78.440.000,00		78.440.000,00	66.440.000,00	-	12.000.000,00	-	78.440.000,00	0,36
288	SD NEGERI 1 RENDANG	198.934,69		198.934,69	170.461.066,00		170.461.066,00	109.831.538,00	-	60.750.000,00	-	170.581.538,00	78.462,69
289	SD NEGERI 2 RENDANG	0,87		0,87	221.540.000,00	22.500.000,00	244.040.000,00	191.040.000,00	11.347.340,00	30.500.000,00	11.152.660,00	244.040.000,00	0,87
290	SD NEGERI 3 RENDANG	553.275,76		553.275,76	87.426.725,00		87.426.725,00	62.930.000,00	-	25.050.000,00	-	87.980.000,00	0,76
291	SD NEGERI 4 RENDANG	0,78		0,78	79.500.000,00		79.500.000,00	56.020.000,00	-	23.480.000,00	-	79.500.000,00	0,78
292	SD NEGERI 5 RENDANG	0,60		0,60	42.400.000,00	-	42.400.000,00	32.400.000,00	-	10.000.000,00	-	42.400.000,00	0,60
293	SD Negeri 1 Amerta Bhuana	0,22		0,22	110.240.000,00		110.240.000,00	78.240.000,00	-	32.000.000,00	-	110.240.000,00	0,22
294	SD Negeri 1 Duda	2.419.705,22		2.419.705,22	135.680.000,00		135.680.000,00	115.107.030,00	-	22.950.000,00	-	138.057.030,00	42.675,22
295	SD Negeri 1 Duda Timur	8.737,36		8.737,36	128.251.263,00		128.251.263,00	97.210.000,00	-	31.050.000,00	-	128.260.000,00	0,36
296	SD Negeri 1 Duda Utara	0,01		0,01	153.700.000,00		153.700.000,00	105.100.000,00	-	48.600.000,00	-	153.700.000,00	0,01
297	SD Negeri 1 Muncan	374,35		374,35	143.100.000,00		143.100.000,00	102.850.000,00	-	40.250.000,00	-	143.100.000,00	374,35
298	SD Negeri 1 Peringsari	0,90		0,90	121.900.000,00		121.900.000,00	72.637.000,00	-	49.200.000,00	-	121.837.000,00	63.000,90
299	SD Negeri 1 Sebudi	11,59		11,59	108.120.000,00		108.120.000,00	83.120.000,00	-	25.000.000,00	-	108.120.000,00	11,59
300	SD Negeri 1 Selat	0,29		0,29	142.040.000,00		142.040.000,00	99.140.000,00	-	42.900.000,00	-	142.040.000,00	0,29
301	SD Negeri 2 Amerta Bhuana	0,95		0,95	125.080.000,00		125.080.000,00	101.130.000,00	-	23.950.000,00	-	125.080.000,00	0,95
302	SD Negeri 2 Duda	0,89		0,89	139.920.000,00		139.920.000,00	103.920.000,00	-	36.000.000,00	-	139.920.000,00	0,89
303	SD Negeri 2 Duda Timur	0,42		0,42	143.100.000,00	22.500.000,00	165.600.000,00	104.550.000,00	13.500.000,00	38.550.000,00	9.000.000,00	165.600.000,00	0,42
304	SD Negeri 2 Duda Utara	0,10		0,10	225.780.000,00		225.780.000,00	122.780.000,00	-	103.000.000,00	-	225.780.000,00	0,10
305	SD Negeri 2 Muncan	0,24		0,24	85.860.000,00		85.860.000,00	60.360.000,00	-	25.500.000,00	-	85.860.000,00	0,24
306	SD Negeri 2 Peringsari	0,33		0,33	161.120.000,00		161.120.000,00	118.420.000,00	-	42.700.000,00	-	161.120.000,00	0,33
307	SD Negeri 2 Sebudi	-		-	169.600.000,00		169.600.000,00	117.600.000,00	-	52.000.000,00	-	169.600.000,00	-
308	SD Negeri 2 Selat	0,63		0,63	66.780.000,00		66.780.000,00	45.630.000,00	-	21.150.000,00	-	66.780.000,00	0,63
309	SD Negeri 3 Amerta Bhuana	0,57		0,57	73.140.000,00	22.500.000,00	95.640.000,00	57.040.000,00	11.700.000,00	16.100.000,00	10.800.000,00	95.640.000,00	0,57
310	SD Negeri 3 Duda	0,08		0,08	102.820.000,00		102.820.000,00	71.070.000,00	-	31.750.000,00	-	102.820.000,00	0,08
311	SD Negeri 3 Duda Timur	0,06		0,06	126.140.000,00	22.500.000,00	148.640.000,00	99.340.000,00	12.700.000,00	26.800.000,00	9.800.000,00	148.640.000,00	0,06
312	SD Negeri 3 Duda Utara	0,35		0,35	145.220.000,00		145.220.000,00	99.870.000,00	-	45.350.000,00	-	145.220.000,00	0,35
313	SD Negeri 3 Muncan	0,31		0,31	99.640.000,00		99.640.000,00	67.790.000,00	-	31.850.000,00	-	99.640.000,00	0,31
314	SD Negeri 3 Peringsari	49.412,63		49.412,63	133.555.000,00		133.555.000,00	96.654.412,00	-	36.950.000,00	-	133.604.412,00	0,63

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
315	SD Negeri 3 Sebudi	0,22		0,22	113.420.000,00		113.420.000,00	75.820.000,00	-	37.600.000,00	-	113.420.000,00	0,22
316	SD Negeri 4 Duda Timur	620,13		620,13	127.200.000,00		127.200.000,00	61.800.000,00	-	65.400.000,00	-	127.200.000,00	620,13
317	SD Negeri 4 Duda Utara	0,70		0,70	72.080.000,00		72.080.000,00	46.380.000,00	-	25.700.000,00	-	72.080.000,00	0,70
318	SD Negeri 4 Muncan	0,11		0,11	129.320.000,00		129.320.000,00	73.720.000,00	-	55.600.000,00	-	129.320.000,00	0,11
319	SD Negeri 4 Peringsari	-		-	127.200.000,00		127.200.000,00	98.850.000,00	-	28.350.000,00	-	127.200.000,00	-
320	SD Negeri 4 Sebudi	0,79		0,79	115.540.000,00		115.540.000,00	92.540.000,00	-	23.000.000,00	-	115.540.000,00	0,79
321	SD Negeri 5 Duda Timur	0,28		0,28	74.200.000,00	22.500.000,00	96.700.000,00	57.550.000,00	13.500.000,00	16.650.000,00	9.000.000,00	96.700.000,00	0,28
322	SD Negeri 5 Muncan	0,33		0,33	98.580.000,00		98.580.000,00	77.680.000,00	-	20.900.000,00	-	98.580.000,00	0,33
323	SD Negeri 5 Peringsari	222,07		222,07	54.060.000,00		54.060.000,00	26.185.000,00	-	27.875.000,00	-	54.060.000,00	222,07
324	SD Negeri 6 Duda Timur	0,21		0,21	74.200.000,00		74.200.000,00	57.900.000,00	-	16.300.000,00	-	74.200.000,00	0,21
325	SD Negeri 6 Muncan	0,45		0,45	37.100.000,00		37.100.000,00	31.100.000,00	-	6.000.000,00	-	37.100.000,00	0,45
326	SD Negeri 7 Duda Timur	82,59		82,59	56.180.000,00	22.500.000,00	78.680.000,00	41.080.000,00	12.450.000,00	15.100.000,00	10.050.000,00	78.680.000,00	82,59
327	SD Negeri 1 Kerta Buana	1.282.250,11		1.282.250,11	93.057.750,00	-	93.057.750,00	48.028.633,00	-	45.550.000,00	-	93.578.633,00	761.367,11
328	SD Negeri 1 Lokasari	-		-	170.660.000,00	-	170.660.000,00	150.660.000,00	-	20.000.000,00	-	170.660.000,00	-
329	SD Negeri 1 Sangkan Gunung	-		-	107.060.000,00	-	107.060.000,00	73.330.000,00	-	33.730.000,00	-	107.060.000,00	-
330	SD Negeri 1 Sidemen	3.432.850,00		3.432.850,00	85.607.150,00	-	85.607.150,00	47.153.032,00	-	41.800.000,00	-	88.953.032,00	86.968,00
331	SD Negeri 1 Sinduwati	-		-	120.840.000,00	-	120.840.000,00	84.390.000,00	-	36.450.000,00	-	120.840.000,00	-
332	SD Negeri 1 Talibeng	141.000,23		141.000,23	65.579.000,00	-	65.579.000,00	55.520.000,00	-	10.200.000,00	-	65.720.000,00	0,23
333	SD Negeri 1 Tangkup	0,96		0,96	149.460.000,00	-	149.460.000,00	113.577.400,00	-	35.882.600,00	-	149.460.000,00	0,96
334	SD Negeri 1 Telagatawang	0,03		0,03	191.860.000,00	-	191.860.000,00	162.260.000,00	-	29.600.000,00	-	191.860.000,00	0,03
335	SD Negeri 1 Tri Eka Buana	780.245,15		780.245,15	115.819.816,00	-	115.819.816,00	87.427.148,00	-	27.600.000,00	-	115.027.148,00	1.572.913,15
336	SD Negeri 1 Wisma Kerta	0,63		0,63	60.420.000,00	-	60.420.000,00	39.377.100,00	-	19.950.000,00	-	59.327.100,00	1.092.900,63
337	SD Negeri 2 Kerta Buana	455.304,45		455.304,45	116.260.290,00	-	116.260.290,00	95.593.894,00	-	20.795.000,00	-	116.388.894,00	326.700,45
338	SD Negeri 2 Lokasari	614,49		614,49	51.940.000,00	-	51.940.000,00	31.243.625,00	-	20.429.000,00	-	51.672.625,00	267.989,49
339	SD Negeri 2 Sangkan Gunung	144.750,00		144.750,00	123.875.250,00	-	123.875.250,00	104.538.031,00	-	19.470.000,00	-	124.008.031,00	11.969,00
340	SD Negeri 2 Sidemen	309.000,50		309.000,50	74.951.000,00	-	74.951.000,00	56.457.900,00	-	18.050.000,00	-	74.507.900,00	752.100,50
341	SD Negeri 2 Sinduwati	0,36		0,36	62.540.000,00	-	62.540.000,00	54.090.000,00	-	8.450.000,00	-	62.540.000,00	0,36
342	SD Negeri 2 Talibeng	115.031,18		115.031,18	73.024.969,00	22.500.000,00	95.524.969,00	47.189.954,00	11.384.000,00	25.950.000,00	11.116.000,00	95.639.954,00	46,18
343	SD Negeri 2 Tangkup	-		-	126.140.000,00	-	126.140.000,00	93.190.000,00		32.950.000,00	-	126.140.000,00	-
344	SD Negeri 2 Telagatawang	396.204,12		396.204,12	179.803.796,00	-	179.803.796,00	148.296.307,00		31.900.000,00	-	180.196.307,00	3.693,12
345	SD Negeri 2 Tri Eka Buana	261.768,49		261.768,49	74.998.232,00	22.500.000,00	97.498.232,00	55.960.000,00	13.500.000,00	19.300.000,00	9.000.000,00	97.760.000,00	0,49
346	SD Negeri 2 Wisma Kerta	0,26		0,26	51.940.000,00	-	51.940.000,00	39.340.000,00	-	12.600.000,00	-	51.940.000,00	0,26
347	SD Negeri 3 Sangkan Gunung	1.671.458,06		1.671.458,06	77.828.542,00	-	77.828.542,00	53.750.000,00	-	25.750.000,00	-	79.500.000,00	0,06
348	SD Negeri 3 Sidemen	317.552,00		317.552,00	90.842.448,00	-	90.842.448,00	66.178.500,00	-	24.950.000,00	-	91.128.500,00	31.500,00

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
349	SD Negeri 3 Sinduwati	23,13		23,13	90.100.000,00	-	90.100.000,00	68.300.000,00	-	21.800.000,00	-	90.100.000,00	23,13
350	SD Negeri 3 Talibeng	-		-	66.780.000,00	22.500.000,00	89.280.000,00	50.289.000,00	12.793.000,00	16.200.000,00	9.707.000,00	88.989.000,00	291.000,00
351	SD Negeri 3 Wismakerta	168.000,00		168.000,00	42.232.000,00	-	42.232.000,00	31.080.254,00		11.160.000,00		42.240.254,00	159.746,00
352	SD Negeri 4 Sangkan Gunung	2.210.000,00		2.210.000,00	131.350.000,00	-	131.350.000,00	112.240.000,00		21.320.000,00		133.560.000,00	-
353	SD Negeri 4 Sidemen	-		-	126.140.000,00	-	126.140.000,00	100.352.000,00		25.788.000,00		126.140.000,00	-
354	SD Negeri 5 Sangkan Gunung	-		-	115.540.000,00	-	115.540.000,00	83.540.000,00		32.000.000,00		115.540.000,00	-
355	SD Negeri 6 Sangkan Gunung	0,98		0,98	67.840.000,00		67.840.000,00	42.289.949,00		25.550.000,00		67.839.949,00	51,98
JUMLAH SEKOLAH DASAR		**160.089.665,58**	**-**	**160.089.665,58**	**43.869.214.118,00**	**1.577.750.000,00**	**45.446.964.118,00**	**32.563.262.396,09**	**842.288.355,00**	**11.391.475.033,00**	**721.762.515,00**	**45.518.788.299,09**	**88.265.484,49**
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI													
1	SMPN 1 Abang	-		-	975.000.000	35.000.000	1.010.000.000,00	864.400.000	18.470.000	110.600.000	16.530.000	1.010.000.000,00	-
2	SMPN 2 Abang	4.771.942,10		4.771.942,10	1.158.728.058	-	1.158.728.058,00	893.953.896	-	260.681.200	-	1.154.635.096,00	8.864.904,10
3	SMPN 3 Abang	-		-	599.300.000	35.000.000	634.300.000,00	429.758.000	18.905.000	169.542.000	16.095.000	634.300.000,00	-
4	SMPN 4 Abang	393.770,09		393.770,09	303.806.230	35.000.000	338.806.230,00	268.704.000	16.492.000	35.496.000	18.508.000	339.200.000,09	-
5	SMPN 5 Abang	3.640.179,93		3.640.179,93	444.859.821	-	444.859.821,00	403.320.000	-	45.180.000	-	448.500.000,00	0,93
6	SMPN 6 Abang	-		-	577.200.000	-	577.200.000,00	403.451.666	-	173.748.334	-	577.200.000,00	-
7	SMPN Satu Atap Datah	0,12		0,12	79.300.000	-	79.300.000,00	58.500.000	-	20.800.000	-	79.300.000,00	0,12
8	SMPN Satu Atap Bunutan	0,29		0,29	107.900.000	-	107.900.000,00	100.900.000	-	7.000.000	-	107.900.000,00	0,29
9	SMPN 1 Bebandem	85.514,48		85.514,48	933.314.486	35.000.000	968.314.486,00	757.301.051	19.040.100	176.000.000	15.959.900	968.301.051,00	98.949,48
10	SMPN 2 Bebandem	2.612.000,05		2.612.000,05	863.188.000	-	863.188.000,00	716.200.000	-	149.600.000	-	865.800.000,00	0,05
11	SMPN 3 Bebandem	0,71		0,71	440.700.000	-	440.700.000,00	346.400.000	-	94.300.000	-	440.700.000,00	0,71
12	SMPN 4 Bebandem	368.432,65		368.432,65	496.231.568	35.000.000	531.231.568,00	404.093.447	23.118.100	92.500.000	11.878.300	531.589.847,00	10.153,65
13	SMPN Satu Atap Jungutan	6.977,55		6.977,55	81.900.000	-	81.900.000,00	61.431.977	-	20.475.000	-	81.906.977,00	0,55
14	SMPN 1 Kubu	7.110,27		7.110,27	1.293.492.890	-	1.293.492.890,00	1.116.845.575	-	175.985.000	-	1.292.830.575,00	669.425,27
15	SMPN 2 Kubu	0,55		0,55	1.007.500.000	-	1.007.500.000,00	961.062.500	-	46.280.000	-	1.007.342.500,00	157.500,55
16	SMPN 3 Kubu	390.960,49		390.960,49	626.370.440	35.000.000	661.370.440,00	494.658.940	22.820.000	131.793.300	12.180.000	661.452.240,00	309.160,49
17	SMPN 4 Kubu	7.945.075,71		7.945.075,71	506.855.034	35.000.000	541.855.034,00	394.863.500	18.328.500	119.300.000	14.790.000	547.282.000,00	2.518.109,71
18	SMPN 5 Kubu	15,98		15,98	388.699.985	-	388.699.985,00	312.909.595	-	75.790.400	-	388.699.995,00	5,98
19	SMPN Satu Atap Baturinggit	11.742.240,15		11.742.240,15	106.557.760	-	106.557.760,00	87.521.000	-	30.500.000	-	118.021.000,00	279.000,15
20	SMPN Satu Atap Ban	0,49		0,49	139.100.000	-	139.100.000,00	120.987.500	-	18.100.000	-	139.087.500,00	12.500,49
21	SMPN Satu Atap 7 Ban	196.200,00		196.200,00	85.800.000	-	85.800.000,00	64.800.000	-	21.000.000	-	85.800.000,00	196.200,00
22	SMPN Satu Atap Tianyar	2.118.000,26		2.118.000,26	125.282.000	-	125.282.000,00	96.879.750	-	18.413.000	-	115.292.750,00	12.107.250,26
23	SMPN Satu Atap Tianyar Tengah	0,16		0,16	184.600.000	-	184.600.000,00	145.869.000	-	36.750.000	-	182.619.000,00	1.981.000,16
24	SMPN Satu Atap Tianyar Barat	26.162,05		26.162,05	170.274.000	-	170.274.000,00	170.296.500	-	-	-	170.296.500,00	3.662,05
25	SMPN 1 Amlapura	14.054.722,87		14.054.722,87	1.266.445.278	100.000.000	1.366.445.278,00	1.102.024.903	94.970.000	178.472.800	5.030.000	1.380.497.703,00	2.297,87
26	SMPN 2 Amlapura	65.975,00		65.975,00	1.712.034.025	35.000.000	1.747.034.025,00	1.501.068.652	16.904.000	210.992.800	18.096.000	1.747.061.452,00	38.548,00
27	SMPN 3 Amlapura	507.367,27		507.367,27	966.692.633	-	966.692.633,00	847.198.490	-	120.000.000	-	967.198.490,00	1.510,27
28	SMPN 4 Amlapura	0,72		0,72	848.900.000	-	848.900.000,00	790.149.061	-	58.600.000	-	848.749.061,00	150.939,72
29	SMPN 5 Amlapura	0,36		0,36	765.700.000	-	765.700.000,00	686.497.750	-	79.190.000	-	765.687.750,00	12.250,36
30	SMPN 6 Amlapura	410.609,07		410.609,07	484.489.391	35.000.000	519.489.391,00	447.426.541	17.554.000	37.000.000	17.446.000	519.426.541,00	473.459,07
31	SMPN 1 Manggis	1.040.617,04		1.040.617,04	919.359.383	-	919.359.383,00	803.900.000	-	116.500.000	-	920.400.000,00	0,04

NO.	SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOSP 2024 SETELAH KOREKSI	PENDAPATAN BOSP REGULER 2025	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2025	TOTAL PENDAPATAN BOSP	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP REGULER	BELANJA BRANG DAN JASA BOSP KINERJA	BELANJA MODAL BOSP REGULER	BELANJA MODAL BOSP KINERJA	TOTAL BELANJA	SALDO KAS DI BENDAHARA BOSP 2025
32	SMPN 2 Manggis	1.441,88		1.441,88	852.798.720	-	852.798.720,00	692.599.962	-	160.200.000	-	852.799.962,00	199,88
33	SMPN 3 Manggis	15.830.178,40		15.830.178,40	1.025.469.822	-	1.025.469.822,00	886.037.405	-	155.250.000	-	1.041.287.405,00	12.595,40
34	SMPN Satu Atap Gegelang	0,02		0,02	53.300.000	35.000.000	88.300.000,00	40.800.000	21.108.000	12.500.000	13.892.000	88.300.000,00	0,02
35	SMPN 1 Rendang	4.092.628,26		4.092.628,26	993.007.372	35.000.000	1.028.007.372,00	955.587.000	23.160.000	41.513.000	11.840.000	1.032.100.000,00	0,26
36	SMPN 2 Rendang	20.578,60		20.578,60	991.879.422		991.879.422,00	643.781.050	-	348.099.600	-	991.880.650,00	19.350,60
37	SMPN 3 Rendang	1.919.452,46		1.919.452,46	501.180.548		501.180.548,00	344.184.424	-	158.530.000	-	502.714.424,00	385.576,46
38	SMPN Satu Atap Besakih	-		-	45.500.000	35.000.000	80.500.000,00	37.000.000	14.737.430	8.500.000	20.262.570	80.500.000,00	-
39	SMPN 1 Selat	0,12		0,12	660.400.000	-	660.400.000,00	510.400.000	-	150.000.000	-	660.400.000,00	0,12
40	SMPN 2 Selat	5.054,18		5.054,18	1.072.494.946	35.000.000	1.107.494.946,00	877.228.554	22.086.600	195.271.400	12.913.400	1.107.499.954,00	46,18
41	SMPN 3 Selat	3.770,20		3.770,20	1.111.499.724	-	1.111.499.724,00	934.086.348	-	177.415.200	-	1.111.501.548,00	1.946,20
42	SMPN 1 Sidemen	0,55		0,55	822.900.000	-	822.900.000,00	524.050.000	-	298.850.000	-	822.900.000,00	0,55
43	SMPN 2 Sidemen	45.052,00		45.052,00	631.754.948	35.000.000	666.754.948,00	491.850.000	17.600.000	139.950.000	17.400.000	666.800.000,00	-
44	SMPN 3 Sidemen	1.314.000,96		1.314.000,96	328.886.000	-	328.886.000,00	267.110.378	-	62.600.000	-	329.710.378,00	489.622,96
45	SMPN Satu Atap Sangkan Gunung	1.191.383,70		1.191.383,70	325.108.617	-	325.108.617,00	242.714.650	-	82.751.000	-	325.465.650,00	834.350,70
JUMLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		**74.807.417,74**	**-**	**74.807.417,74**	**28.075.761.101,00**	**590.000.000,00**	**28.665.761.101,00**	**23.300.803.065,09**	**365.293.730,00**	**4.822.020.034,00**	**222.821.170,00**	**28.710.937.999,09**	**29.630.519,65**
Jumlah Keseluruhan		**234.897.083,32**	**-**	**234.897.083,32**	**71.944.975.219,00**	**2.167.750.000,00**	**74.112.725.219,00**	**55.864.065.461,18**	**1.207.582.085,00**	**16.213.495.067,00**	**944.583.685,00**	**74.229.726.298,18**	**117.896.004,14**

Kas BOK Puskesmas Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	PENDAPATAN BOK	BELANJA BOK	Saldo Akhir	Saldo Kas BOK Puskesmas Tahun 2025		
								Saldo Tunai	Saldo Rekening	Jumlah
a	b	c	d	e = c+d	f	g	h = e+f-g	i	j	k = i+j
1	UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I	113.340.127,00		113.340.127,00	271.104.873,00	343.534.182,00	40.910.818,00		40.910.818,00	40.910.818,00
2	UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II	90.805.238,00		90.805.238,00	267.205.761,00	328.126.674,00	29.884.325,00		29.884.325,00	29.884.325,00
3	UPTD PUSKESMAS MANGGIS I	73.705.947,00		73.705.947,00	271.768.553,00	321.825.334,00	23.649.166,00		23.649.166,00	23.649.166,00
4	UPTD PUSKESMAS MANGGIS II	85.558.562,00		85.558.562,00	234.061.937,00	295.544.290,00	24.076.209,00		24.076.209,00	24.076.209,00
5	UPTD PUSKESMAS ABANG I	75.132.398,00		75.132.398,00	318.718.601,00	372.972.486,00	20.878.513,00		20.878.513,00	20.878.513,00
6	UPTD PUSKESMAS ABANG II	149.231.502,00		149.231.502,00	243.421.497,00	360.487.799,00	32.165.200,00		32.165.200,00	32.165.200,00
7	UPTD PUSKESMAS KUBU I	116.173.094,00		116.173.094,00	319.407.905,00	355.312.908,00	80.268.091,00		80.268.091,00	80.268.091,00
8	UPTD PUSKESMAS KUBU II	198.847.685,00		198.847.685,00	247.515.314,00	409.394.600,00	36.968.399,00		36.968.399,00	36.968.399,00
9	UPTD PUSKESMAS BEBANDEM	225.189.621,00		225.189.621,00	132.863.879,00	293.284.000,00	64.769.500,00		64.769.500,00	64.769.500,00
10	UPTD PUSKESMAS SELAT	52.864.178,00		52.864.178,00	341.899.822,00	379.462.209,00	15.301.791,00		15.301.791,00	15.301.791,00
11	UPTD PUSKESMAS RENDANG	42.788.381,00		42.788.381,00	317.754.619,00	357.152.500,00	3.390.500,00		3.390.500,00	3.390.500,00
12	UPTD PUSKESMAS SIDEMEN	123.975.531,00		123.975.531,00	277.898.968,00	311.482.923,00	90.391.576,00		90.391.576,00	90.391.576,00
JUMLAH		**1.347.612.264,00**	**-**	**1.347.612.264,00**	**3.243.621.729,00**	**4.128.579.905,00**	**462.654.088,00**	**-**	**462.654.088,00**	**462.654.088,00**

Daftar Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	Piutang Pajak	OPD	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2025				Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	Nilai Bersih Dapat Direalisasi Per 31 Desember 2025
						Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2025	Mutasi Kurang					
							Pembayaran atas Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2025	Pembayaran atas Piutang per 2024	Total Pembayaran Tahun 2025			
a	b	c	d	e	f = d + e	g	h	i	j = f + g - h - i	k	l	m
A.	**Piutang Pajak**											
1	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	116.326.661,00	800,00	116.327.461,00	331.957.200,00	321.026.700,00	4.050.800,00	325.077.500,00	123.207.161,00	82.720.418,00	40.486.743,00
2	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	150.659.352,00	-	150.659.352,00	1.344.545.484,00	1.317.122.348,00	15.658.608,00	1.332.780.956,00	162.423.880,00	78.263.500,16	84.160.379,84
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	37.302.564.598,00	-	37.302.564.598,00	89.843.273.900,00	82.600.263.617,00	2.506.568.915,00	85.106.832.532,00	42.039.005.966,00	21.460.969.173,33	20.578.036.792,67
4	PBBP2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	59.701.896.152,00	-	59.701.896.152,00	9.490.230.751,00	4.572.750.657,00	2.547.840.861,00	7.120.591.518,00	62.071.535.385,00	42.014.841.596,44	20.056.693.788,56
5	BPHTB-Pemindahan Hak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	43.104.258.046,00	43.104.258.046,00	-	43.104.258.046,00	-	-	-
6	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.541.298.421,00	-	1.541.298.421,00	37.406.977.817,00	35.628.037.501,00	219.349.859,00	35.847.387.360,00	3.100.888.878,00	541.419.494,06	2.559.469.383,94
7	PBJT-Tenaga Listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	26.820.268.883,00	26.820.268.883,00	-	26.820.268.883,00	-	-	-
8	PBJT-Jasa Perhotelan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.732.672.285,94	165.000,00	1.732.837.285,94	76.645.797.876,00	75.262.871.985,00	763.332.938,00	76.026.204.923,00	2.352.430.238,94	424.137.303,50	1.928.292.935,44
9	PBJT-Jasa Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	262.804.764,00	228.800.664,00	-	228.800.664,00	34.004.100,00	340.041,00	33.664.059,00
10	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	229.494.350,66	-	229.494.350,66	11.860.573.621,00	11.401.387.953,00	32.525.901,00	11.433.913.854,00	656.154.117,66	172.783.674,64	483.370.443,02
	Jumlah Piutang Pajak		**100.774.911.820,60**	**165.800,00**	**100.775.077.620,60**	**297.110.688.342,00**	**281.256.788.354,00**	**6.089.327.882,00**	**287.346.116.236,00**	**110.539.649.726,60**	**64.775.475.201,13**	**45.764.174.525,47**
B.	**Piutang Retribusi**											
	Retribusi Jasa Umum											
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan											
1a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A	-	-	-	682.089.000,00	682.089.000,00	-	682.089.000,00	-	-	-
1b	Retribusi Pelayanan Kesehatan	UPTD Rumah Sakit Pratama	-	-	-	298.367.100,00	298.367.100,00	-	298.367.100,00	-		-
1c	Retribusi Pelayanan Kesehatan	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	10.871.464.447,00	(52.241.160,00)	10.819.223.287,00	93.269.020.079,00	81.581.539.459,00	10.322.794.337,00	91.904.333.796,00	12.183.909.570,00	611.994.173,85	11.571.915.396,15
1d	Retribusi Pelayanan Kesehatan	UPTD Puskesmas se-Kab. Karangasem	252.253.900,00	(885.800,00)	251.368.100,00	33.912.579.346,00	33.664.798.346,00	251.368.100,00	33.916.166.446,00	247.781.000,00	2.477.810,00	245.303.190,00
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	238.104.000,00	238.104.000,00	-	238.104.000,00	-	-	-
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	-	-	-	857.385.000,00	857.385.000,00	-	857.385.000,00	-	-	-
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	4.283.355.000,00	4.283.355.000,00	-	4.283.355.000,00	-	-	-
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	41.060.000,00	41.060.000,00	-	41.060.000,00	-	-	-
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.175.528,00	-	17.175.528,00	-	-	-	-	17.175.528,00	17.175.528,00	-
	Jumlah Retribusi Jasa Umum		**11.140.893.875,00**	**(53.126.960,00)**	**11.087.766.915,00**	**133.581.959.525,00**	**121.646.697.905,00**	**10.574.162.437,00**	**132.220.860.342,00**	**12.448.866.098,00**	**631.647.511,85**	**11.817.218.586,15**
	Retribusi Jasa Usaha											
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Sekretariat Daerah	-	-	-	10.940.000,00	10.940.000,00	-	10.940.000,00	-	-	-
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	25.031.000,00	25.031.000,00	-	25.031.000,00	-	-	-
		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	-	-	-	2.450.000,00	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-	-	-
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	47.500.000,00	47.500.000,00	-	47.500.000,00	-	-	-
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	-
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	87.256.250,00	87.256.250,00	-	87.256.250,00	-	-	-
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	2.666.666,64	2.666.666,64	110.121.333,36	108.489.333,36	2.666.666,64	111.156.000,00	1.632.000,00	16.320,00	1.615.680,00
		UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	182.649.000,00	182.649.000,00	-	182.649.000,00	-	-	-

No	Piutang Pajak	OPD	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2025				Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	Nilai Bersih Dapat Direalisasi Per 31 Desember 2025
						Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2025	Mutasi Kurang					
							Pembayaran atas Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2025	Pembayaran atas Piutang per 2024	Total Pembayaran Tahun 2025			
a	b	c	d	e	f = d + e	g	h	i	j = f + g - h - i	k	l	m
		Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	-
2	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan	Dinas Perhubungan	-	-	-	620.968.000,00	620.968.000,00	-	620.968.000,00	-	-	-
3	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	-
		Sekretariat Daerah	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	-
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	119.235.750,00	119.235.750,00	-	119.235.750,00	-	-	-
		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	-	-
		UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	18.900.000,00	18.900.000,00	-	18.900.000,00	-	-	-
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
4	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	-	-	-	31.380.000,00	31.380.000,00	-	31.380.000,00	-	-	-
5	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	11.350.000,00	11.350.000,00	-	11.350.000,00	-	-	-
6	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	-	-	-	48.349.000,00	48.349.000,00	-	48.349.000,00	-	-	-
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha		**-**	**2.666.666,64**	**2.666.666,64**	**1.345.430.333,36**	**1.343.798.333,36**	**2.666.666,64**	**1.346.465.000,00**	**1.632.000,00**	**16.320,00**	**1.615.680,00**
	Retribusi Perizinan Tertentu											
1	Retribusi Persetujuan bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	57.955.252,00	-	57.955.252,00	1.350.832.176,00	1.340.797.622,00	-	1.340.797.622,00	67.989.806,00	58.055.597,54	9.934.208,46
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu		**57.955.252,00**	**-**	**57.955.252,00**	**1.350.832.176,00**	**1.340.797.622,00**	**-**	**1.340.797.622,00**	**67.989.806,00**	**58.055.597,54**	**9.934.208,46**
	Jumlah Retribusi		**11.198.849.127,00**	**(50.460.293,36)**	**11.148.388.833,64**	**136.278.222.034,36**	**124.331.293.860,36**	**10.576.829.103,64**	**134.908.122.964,00**	**12.518.487.904,00**	**689.719.429,39**	**11.828.768.474,61**
C.	**Piutang lain-Lain PAD yang Sah**											
1	Denda Pajak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.328.538.226,13	6.710.823,00	4.335.249.049,13	2.316.199.835,00	1.984.378.503,00	171.932.899,00	2.156.311.402,00	4.495.137.482,13	449.513.748,21	4.045.623.733,92
2	Pendapatan BLUD	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	-	22.454.600,00	22.454.600,00	15.877.600,00	-	22.454.600,00	22.454.600,00	15.877.600,00	158.776,00	15.718.824,00
3	Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.510.897,00	-	2.510.897,00	-	-	-	-	2.510.897,00	2.510.897,00	-
	Jumlah Piutang lain-Lain PAD yang Sah		**4.331.049.123,13**	**29.165.423,00**	**4.360.214.546,13**	**2.332.077.435,00**	**1.984.378.503,00**	**194.387.499,00**	**2.178.766.002,00**	**4.513.525.979,13**	**452.183.421,21**	**4.061.342.557,92**
D.	**Transfer Antar Daerah**											
	Bagi Hasil Pajak Provinsi											
1	PKB		12.500.394.931,00	-	12.500.394.931,00	464.810.032,00	376.484.071,00	12.500.394.931,00	12.876.879.002,00	88.325.961,00	883.259,61	87.442.701,39
2	BBNKB		10.908.856.830,00	-	10.908.856.830,00	587.361.713,00	379.966.467,00	10.908.856.830,00	11.288.823.297,00	207.395.246,00	2.073.952,46	205.321.293,54
3	PBBKB		8.626.539.075,00	-	8.626.539.075,00	45.661.416.773,00	41.849.721.617,00	8.626.539.075,00	50.476.260.692,00	3.811.695.156,00	38.116.951,56	3.773.578.204,44
4	PPAP		42.577.788,00	-	42.577.788,00	278.542.183,00	253.768.204,00	42.577.788,00	296.345.992,00	24.773.979,00	247.739,79	24.526.239,21
5	Pajak Rokok		-	-	-	28.752.430.911,00	28.752.430.911,00	-	28.752.430.911,00	-	-	-
	Jumlah Bagi Hasil pajak Provinsi		**32.078.368.624,00**	**-**	**32.078.368.624,00**	**75.744.561.612,00**	**71.612.371.270,00**	**32.078.368.624,00**	**103.690.739.894,00**	**4.132.190.342,00**	**41.321.903,42**	**4.090.868.438,58**
	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi											
1	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)		-	-	-	25.297.325.939,23	25.297.325.939,23	-	25.297.325.939,23	-	-	-

No	Piutang Pajak	OPD	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2025				Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	Nilai Bersih Dapat Direalisasi Per 31 Desember 2025
						Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2025	Mutasi Kurang					
							Pembayaran atas Laporan Pajak/Ketetapan/ Tagihan Tahun 2025	Pembayaran atas Piutang per 2024	Total Pembayaran Tahun 2025			
a	b	c	d	e	f = d + e	g	h	i	j = f + g - h - i	k	l	m
	Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Provinsi		-	-	-	25.297.325.939,23	25.297.325.939,23	-	25.297.325.939,23	-	-	-
	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		32.078.368.624,00	-	32.078.368.624,00	101.041.887.551,23	96.909.697.209,23	32.078.368.624,00	128.988.065.833,23	4.132.190.342,00	41.321.903,42	4.090.868.438,58
Jumlah Keseluruhan			148.383.178.694,73	(21.129.070,36)	148.362.049.624,37	536.762.875.362,59	504.482.157.926,59	48.938.913.108,64	553.421.071.035,23	131.703.853.951,73	65.958.699.955,15	65.745.153.996,58

Daftar Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2025

No	Piutang	Piutang Bruto Per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Piutang Bruto Per 31 Desember 2024 setelah penyesuaian	Mutasi Tahun 2025				Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	Nilai Bersih Dapat Direalisasi
					Ketetapan/Tagihan Tahun 2025	Kurang					
						Pembayaran atas Tagihan Tahun 2025	Pembayaran atas Piutang per 2024	Jumlah Pembayaran Tahun 2025			
a	b	d	e	f = d + e	g	h	i	j = f + g - h - i	k	l	m
A.	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Kab. Karangasem**										
1	Inhealth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rujukan JKN & Jamkesmas	7.130.000,00	-	7.130.000,00	-	-	-	-	7.130.000,00	7.130.000,00	-
3	PMI(Sarana/Kantong Darah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Obat Fee For Service	292.119.462,00	(20.300,00)	292.099.162,00	321.684.925,00	-	292.099.162,00	292.099.162,00	321.684.925,00	3.216.849,25	318.468.075,75
5	Pasien Umum	487.806.025,00	-	487.806.025,00	-	-	-	-	487.806.025,00	487.806.025,00	-
6	Jasa Raharja	105.386.220,00	(17.360,00)	105.368.860,00	126.851.600,00	-	105.368.860,00	105.368.860,00	126.851.600,00	1.268.516,00	125.583.084,00
7	Rujukan Ambulance	10.520.000,00	-	10.520.000,00	-	-	10.520.000,00	10.520.000,00	-	-	-
8	Dinkes Provinsi	945.000,00	(945.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	RS. Balimed Karangasem	15.331.000,00	-	15.331.000,00	705.000,00	-	15.331.000,00	15.331.000,00	705.000,00	7.050,00	697.950,00
10	Hasna Medika	19.259.600,00	(19.259.600,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BPJS Tenaga Kerja	19.939.840,00	-	19.939.840,00	378.335,00	-	18.446.915,00	18.446.915,00	1.871.260,00	187.126,00	1.684.134,00
12	PT.Prodia Wida Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BPJS Kesehatan	9.910.777.300,00	(29.748.900,00)	9.881.028.400,00	11.237.860.760,00	-	9.881.028.400,00	9.881.028.400,00	11.237.860.760,00	112.378.607,60	11.125.482.152,40
14	Pasien LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinkes Kab.Karangasem	2.250.000,00	(2.250.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Kab. Karangasem	**10.871.464.447,00**	**(52.241.160,00)**	**10.819.223.287,00**	**11.687.480.620,00**	**-**	**10.322.794.337,00**	**10.322.794.337,00**	**12.183.909.570,00**	**611.994.173,85**	**11.571.915.396,15**
B.	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas se - Kabupaten Karangasem**										
B.1	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan RJTP	2.001.300,00	-	2.001.300,00	1.794.200,00	-	2.001.300,00	2.001.300,00	1.794.200,00	17.942,00	1.776.258,00
2	Pelayanan Promotif	3.248.400,00	(2.900,00)	3.245.500,00	1.764.200,00	-	3.245.500,00	3.245.500,00	1.764.200,00	17.642,00	1.746.558,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Karangasem I	**5.249.700,00**	**(2.900,00)**	**5.246.800,00**	**3.558.400,00**	**-**	**5.246.800,00**	**5.246.800,00**	**3.558.400,00**	**35.584,00**	**3.522.816,00**
B.2	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan Promotif	-	-	-	157.100,00		-	-	157.100,00	1.571,00	155.529,00
2	Pelayanan RITP	27.988.400,00	-	27.988.400,00	7.197.100,00	-	27.988.400,00	27.988.400,00	7.197.100,00	71.971,00	7.125.129,00
3	Pelayanan RJTP	16.633.400,00	-	16.633.400,00	5.232.100,00	-	16.633.400,00	16.633.400,00	5.232.100,00	52.321,00	5.179.779,00
4	Pelayanan Preventif	558.400,00	-	558.400,00	-		558.400,00	558.400,00	-	-	-
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Karangasem II	**45.180.200,00**	**-**	**45.180.200,00**	**12.586.300,00**	**-**	**45.180.200,00**	**45.180.200,00**	**12.586.300,00**	**125.863,00**	**12.460.437,00**
B.3	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan RITP	-	-	-	3.594.200,00	-	-	-	3.594.200,00	35.942,00	3.558.258,00
2	Pelayanan RJTP	7.828.100,00	-	7.828.100,00	6.376.800,00	-	7.828.100,00	7.828.100,00	6.376.800,00	63.768,00	6.313.032,00
3	Pelayanan Promotif	-	-	-	691.300,00	-	-	-	691.300,00	6.913,00	684.387,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Manggis I	**7.828.100,00**	**-**	7.828.100,00	**10.662.300,00**	**-**	**7.828.100,00**	**7.828.100,00**	**10.662.300,00**	**106.623,00**	**10.555.677,00**
B.4	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	JKN Klaim Non Kapitasi	2.418.400,00	-	2.418.400,00	-	-	2.418.400,00	2.418.400,00	-	-	-

No	Piutang	Piutang Bruto Per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Piutang Bruto Per 31 Desember 2024 setelah penyesuaian	Mutasi Tahun 2025				Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	Nilai Bersih Dapat Direalisasi
					Ketetapan/Tagihan Tahun 2025	Kurang					
						Pembayaran atas Tagihan Tahun 2025	Pembayaran atas Piutang per 2024	Jumlah Pembayaran Tahun 2025			
2	Pelayanan RJTP	-	-	-	694.200,00	-	-	-	694.200,00	6.942,00	687.258,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Manggis II	**2.418.400,00**	**-**	2.418.400,00	**694.200,00**	**-**	**2.418.400,00**	**2.418.400,00**	**694.200,00**	**6.942,00**	**687.258,00**
B.5	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan Promotif	1.238.400,00	-	1.238.400,00	1.071.300,00	-	1.238.400,00	1.238.400,00	1.071.300,00	10.713,00	1.060.587,00
2	Pelayanan RITP	7.388.400,00	-	7.388.400,00	8.991.300,00	-	7.388.400,00	7.388.400,00	8.991.300,00	89.913,00	8.901.387,00
3	Pelayanan RJTP	18.255.500,00	-	18.255.500,00	18.336.300,00	-	18.255.500,00	18.255.500,00	18.336.300,00	183.363,00	18.152.937,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Abang I	**26.882.300,00**	**-**	**26.882.300,00**	**28.398.900,00**	**-**	**26.882.300,00**	**26.882.300,00**	**28.398.900,00**	**283.989,00**	**28.114.911,00**
B.6	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan RJTP	14.047.600,00	-	14.047.600,00	7.731.300,00	-	14.047.600,00	14.047.600,00	7.731.300,00	77.313,00	7.653.987,00
2	Pelayanan Promotif	-	-	-	77.100,00	-	-	-	77.100,00	771,00	76.329,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Abang II	**14.047.600,00**	**-**	**14.047.600,00**	**7.808.400,00**	**-**	**14.047.600,00**	**14.047.600,00**	**7.808.400,00**	**78.084,00**	**7.730.316,00**
B.7	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan RITP	11.988.400,00	(2.900,00)	11.985.500,00	12.191.300,00	-	11.985.500,00	11.985.500,00	12.191.300,00	121.913,00	12.069.387,00
2	Pelayanan RJTP	10.556.000,00	-	10.556.000,00	3.531.800,00	-	10.556.000,00	10.556.000,00	3.531.800,00	35.318,00	3.496.482,00
3	Pelayanan Promotif	307.100,00	-	307.100,00	357.100,00	-	307.100,00	307.100,00	357.100,00	3.571,00	353.529,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Kubu I	**22.851.500,00**	**(2.900,00)**	**22.848.600,00**	**16.080.200,00**	**-**	**22.848.600,00**	**22.848.600,00**	**16.080.200,00**	**160.802,00**	**15.919.398,00**
B.8	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan RJTP	13.155.500,00	(880.000,00)	12.275.500,00	10.559.200,00	-	12.275.500,00	12.275.500,00	10.559.200,00	105.592,00	10.453.608,00
2	Pelayanan Promotif	-	-	-	1.274.200,00	-	-	-	1.274.200,00	12.742,00	1.261.458,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Kubu II	**13.155.500,00**	**(880.000,00)**	**12.275.500,00**	**11.833.400,00**	**-**	**12.275.500,00**	**12.275.500,00**	**11.833.400,00**	**118.334,00**	**11.715.066,00**
B.9	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan RJTP	15.932.100,00	-	15.932.100,00	9.028.100,00	-	15.932.100,00	15.932.100,00	9.028.100,00	90.281,00	8.937.819,00
2	Pelayanan Promotif	974.200,00	-	974.200,00	865.500,00	-	974.200,00	974.200,00	865.500,00	8.655,00	856.845,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Bebandem	**16.906.300,00**	**-**	**16.906.300,00**	**9.893.600,00**	**-**	**16.906.300,00**	**16.906.300,00**	**9.893.600,00**	**98.936,00**	**9.794.664,00**
B.10	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan Promotif	1.501.300,00	-	1.501.300,00	10.388.400,00	-	1.501.300,00	1.501.300,00	10.388.400,00	103.884,00	10.284.516,00
2	Pelayanan RITP	1.394.200,00	-	1.394.200,00	31.779.700,00	-	1.394.200,00	1.394.200,00	31.779.700,00	317.797,00	31.461.903,00
3	Pelayanan RJTP	16.493.100,00	-	16.493.100,00	57.464.400,00	-	16.493.100,00	16.493.100,00	57.464.400,00	574.644,00	56.889.756,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Selat	**19.388.600,00**	**-**	**19.388.600,00**	**99.632.500,00**	**-**	**19.388.600,00**	**19.388.600,00**	**99.632.500,00**	**996.325,00**	**98.636.175,00**
B.11	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan RITP	50.585.500,00	-	50.585.500,00	18.794.200,00	-	50.585.500,00	50.585.500,00	18.794.200,00	187.942,00	18.606.258,00

No	Piutang	Piutang Bruto Per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Piutang Bruto Per 31 Desember 2024 setelah penyesuaian	Mutasi Tahun 2025				Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	Nilai Bersih Dapat Direalisasi
					Ketetapan/Tagihan Tahun 2025	Kurang					
						Pembayaran atas Tagihan Tahun 2025	Pembayaran atas Piutang per 2024	Jumlah Pembayaran Tahun 2025			
2	Pelayanan RJTP	15.792.600,00	-	15.792.600,00	11.384.200,00	-	15.792.600,00	15.792.600,00	11.384.200,00	113.842,00	11.270.358,00
3	Pelayanan Promprev	114.200,00	-	114.200,00	3.727.100,00	-	114.200,00	114.200,00	3.727.100,00	37.271,00	3.689.829,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Rendang	**66.492.300,00**	**-**	**66.492.300,00**	**33.905.500,00**	**-**	**66.492.300,00**	**66.492.300,00**	**33.905.500,00**	**339.055,00**	**33.566.445,00**
B.12	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD**										
1	Pelayanan Promotif	1.274.200,00	-	1.274.200,00	647.100,00	-	1.274.200,00	1.274.200,00	647.100,00	6.471,00	640.629,00
2	Pelayanan RITP	-	-	-	2.797.100,00	-	-	-	2.797.100,00	27.971,00	2.769.129,00
3	Pelayanan RJTP	10.579.200,00	-	10.579.200,00	9.283.100,00	-	10.579.200,00	10.579.200,00	9.283.100,00	92.831,00	9.190.269,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Sidemen	**11.853.400,00**	**-**	**11.853.400,00**	**12.727.300,00**	**-**	**11.853.400,00**	**11.853.400,00**	**12.727.300,00**	**127.273,00**	**12.600.027,00**
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas se - Kabupaten Karangasem	**252.253.900,00**	**(885.800,00)**	**251.368.100,00**	**247.781.000,00**	**-**	**251.368.100,00**	**251.368.100,00**	**247.781.000,00**	**2.477.810,00**	**245.303.190,00**
	Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	**11.123.718.347,00**	**(53.126.960,00)**	**11.070.591.387,00**	**11.935.261.620,00**	**-**	**10.574.162.437,00**	**10.574.162.437,00**	**12.431.690.570,00**	**614.471.983,85**	**11.817.218.586,15**

Daftar Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Dan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2025

No	Piutang	Piutang Bruto Per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Piutang Bruto Per 31 Desember 2024 Setelah Penyesuaian	Mutasi Tahun 2025				Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025	Nilai Bersih Dapat Direalisasi
					Ketetapan/Tagihan Tahun 2025	Kurang					
						Pembayaran atas Tagihan Tahun 2025	Pembayaran atas Piutang per 2024	Jumlah Pembayaran Tahun 2025			
a	b	c	d	e	f = d + e	g	h	i	j = f + g - h - i	k	i = j - k
A.	**Denda Pajak**										
1	Denda Pajak Reklame	672.149,86	-	672.149,86	-	-	-	-	672.149,86	67.214,99	604.934,87
2	Denda Pajak Air Tanah (AT)	6.700.979,24	22.773,00	6.723.752,24	5.110.580,00	4.767.272,00	274.204,00	5.041.476,00	6.792.856,24	679.285,62	6.113.570,62
3	Denda Pajak Mineral Bukan Logam	3.744.879.769,53	6.688.050,00	3.751.567.819,53	1.010.153.994,00	905.069.863,00	81.024.300,00	986.094.163,00	3.775.627.650,53	377.562.765,05	3.398.064.885,48
4	Denda PBB-P2	-	-	-	562.572.296,00	562.572.296,00	-	562.572.296,00	-	-	-
5	Denda BPHTB	-	-	-				-	-	-	-
6	Denda PBJT-Makanan dan/Minuman	221.331.212,14	-	221.331.212,14	187.937.344,00	159.331.663,00	23.131.726,00	182.463.389,00	226.805.167,14	22.680.516,71	204.124.650,43
7	Denda PBJT-Tenaga Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Denda PBJT-Jasa Perhotelan	340.549.345,86	-	340.549.345,86	428.615.596,00	285.297.024,00	67.502.669,00	352.799.693,00	416.365.248,86	41.636.524,89	374.728.723,97
9	PBJT-Jasa Parkir	1.610.092,00	-	1.610.092,00	4.487.147,00	1.671.052,00	-	1.671.052,00	4.426.187,00	442.618,70	3.983.568,30
10	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	12.794.677,50	-	12.794.677,50	117.322.878,00	65.669.333,00	-	65.669.333,00	64.448.222,50	6.444.822,25	58.003.400,25
	Jumlah Piutang Denda Pajak	**4.328.538.226,13**	**6.710.823,00**	**4.335.249.049,13**	**2.316.199.835,00**	**1.984.378.503,00**	**171.932.899,00**	**2.156.311.402,00**	**4.495.137.482,13**	**449.513.748,21**	**4.045.623.733,92**
B.	**Piutang BLUD RSUD Kab. Karangasem**										
1	Dinkes Provinsi	-	945.000,00	945.000,00	-	-	945.000,00	945.000,00	-	-	-
2	PT.Prodia Wida Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RS Kasna Medika	-	-	-	8.512.300,00	-	-	-	8.512.300,00	85.123,00	8.427.177,00
4	Klinik Pratama Nawadara	-	-	-	107.300,00	-	-	-	107.300,00	1.073,00	106.227,00
5	Viral Load (Lab)	-	-	-	720.000,00	-	-	-	720.000,00	7.200,00	712.800,00
6	TCM	-	-	-	2.640.000,00	-	-	-	2.640.000,00	26.400,00	2.613.600,00
7	Hasna Medika	-	19.259.600,00	19.259.600,00	3.898.000,00	-	19.259.600,00	19.259.600,00	3.898.000,00	38.980,00	3.859.020,00
8	Dinkes Kab.Karangasem	-	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-
	Jumlah Piutang BLUD RSUD Kab. Karangasem	**-**	**22.454.600,00**	**22.454.600,00**	**15.877.600,00**	**-**	**22.454.600,00**	**22.454.600,00**	**15.877.600,00**	**158.776,00**	**15.718.824,00**
C.	**Piutang Lainnya atas Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**										
1	PT. Solusi Tunas Pratama	1.889.307,00	-	1.889.307,00	-	-	-	-	1.889.307,00	1.889.307,00	-
2	PT. Centratama Menara Indonesia	621.590,00	-	621.590,00	-	-		-	621.590,00	621.590,00	-
	Jumlah Piutang Denda Retribusi	**2.510.897,00**	**-**	**2.510.897,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.510.897,00**	**2.510.897,00**	**-**
	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**4.331.049.123,13**	**29.165.423,00**	**4.360.214.546,13**	**2.332.077.435,00**	**1.984.378.503,00**	**194.387.499,00**	**2.178.766.002,00**	**4.513.525.979,13**	**452.183.421,21**	**4.061.342.557,92**

Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Jenis Piutang	No	Uraian	Nilai Piutang Berdasarkan Umur Piutang								
Pajak											
Self Assesment			**0 - <1 Tahun**	**0,01**	**1 - 2 Tahun**	**0,10**	**> 2 - 5 Tahun**	**0,50**	**> 5 Tahun**	**1,00**	**Total**
	1	Pajak MBLB	7.243.010.283,00	72.430.102,83	10.512.514.500,00	1.051.251.450,00	7.892.387.125,00	3.946.193.562,50	16.391.094.058,00	16.391.094.058,00	21.460.969.173,33
	2	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.778.940.316,00	17.789.403,16	882.066.829,00	88.206.682,90	8.916.650,00	4.458.325,00	430.965.083,00	430.965.083,00	541.419.494,06
	3	PBJT-Tenaga Listrik	-	-		-		-		-	-
	4	PBJT-Jasa Perhotelan	1.382.925.891,00	13.829.258,91	508.265.631,00	50.826.563,10	203.514.470,90	101.757.235,45	257.724.246,04	257.724.246,04	424.137.303,50
	5	PBJT-Jasa Parkir	34.004.100,00	340.041,00	-	-	-	-	-	-	340.041,00
	6	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	459.185.668,00	4.591.856,68	11.975.538,00	1.197.553,80	35.997.295,00	17.998.647,50	148.995.616,66	148.995.616,66	172.783.674,64
	Jumlah		**10.898.066.258,00**	**108.980.662,58**	**11.914.822.498,00**	**1.191.482.249,80**	**8.140.815.540,90**	**4.070.407.770,45**	**17.228.779.003,70**	**17.228.779.003,70**	**22.599.649.686,53**
	Penyisihan Piutang		**108.980.662,58**		**1.191.482.249,80**		**4.070.407.770,45**		**17.228.779.003,70**		
Official Assesment			**0 - <1 Tahun**		**1 - 3 Tahun**		**> 3 - 5 Tahun**		**> 5 Tahun**		**Total**
	1	Pajak Reklame	40.895.700,00	408.957,00	-	-	-	-	82.311.461,00	82.311.461,00	82.720.418,00
	2	Pajak Air Tanah	27.423.136,00	274.231,36	44.718.288,00	4.471.828,80	33.530.032,00	16.765.016,00	56.752.424,00	56.752.424,00	78.263.500,16
	3	Pajak PBB-P2	4.917.876.594,00	49.178.765,94	12.613.247.230,00	1.261.324.723,00	7.672.146.907,00	3.836.073.453,50	36.868.264.654,00	36.868.264.654,00	42.014.841.596,44
	4	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan									
	Jumlah		**4.986.195.430,00**	**49.861.954,30**	**12.657.965.518,00**	**1.265.796.551,80**	**7.705.676.939,00**	**3.852.838.469,50**	**37.007.328.539,00**	**37.007.328.539,00**	**42.175.825.514,60**
	Penyisihan Piutang		**49.861.954,30**		**1.265.796.551,80**		**3.852.838.469,50**		**37.007.328.539,00**		
Total Penyisihan Piutang Pajak									**64.775.475.201,13**		
Retribusi											
			0 - 1 Bulan		**> 1 - 3 Bulan**		**> 3 - 12 Bulan**		**> 12 Bulan**		**Total**
	1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	17.175.528,00	17.175.528,00	17.175.528,00
	2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.632.000,00	16.320,00		-		-			
	3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.034.554,00	100.345,54	-	-	-	-	57.955.252,00	57.955.252,00	58.055.597,54
	4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Kab. Karangasem	11.687.102.285,00	116.871.022,85	1.871.260,00	187.126,00	-	-	494.936.025,00	494.936.025,00	611.994.173,85
	5	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas se- Kab. Karangasem	247.781.000,00	2.477.810,00		-	-	-	-	-	2.477.810,00
	Jumlah		11.946.549.839,00	119.465.498,39	1.871.260,00	187.126,00	-	-	570.066.805,00	570.066.805,00	689.703.109,39
	% Penyisihan Piutang		1%	-	10%	-	50%	-	100%	-	-
	Penyisihan Piutang		119.465.498,39	-	187.126,00	-	-	-	570.066.805,00	-	-
Total Penyisihan Piutang Retribusi									**689.719.429,39**		
Piutang lain-Lain PAD yang Sah											
			s.d. Jatuh Tempo		**1 Bulan Sejak Tagihan I**		**1 Bulan Sejak Tagihan II**		**1 Bulan Sejak Tagihan III**		**Total**
	1	Denda Pajak	-	-	4.495.137.482,13	449.513.748,21	-	-	-	-	449.513.748,21

Jenis Piutang	No	Uraian	Nilai Piutang Berdasarkan Umur Piutang								
	2	Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		-					2.510.897,00	2.510.897,00	2.510.897,00
	3	Pendapatan BLUD RSUD	15.877.600,00	158.776,00							158.776,00
	Jumlah		15.877.600,00	158.776,00	4.495.137.482,13	449.513.748,21	-	-	2.510.897,00	2.510.897,00	452.183.421,21
	% Penyisihan Piutang		1%	-	10%	-	50%	-	100%		
	Penyisihan Piutang		158.776,00		449.513.748,21		-		2.510.897,00		
Total Piutang lain-Lain PAD yang Sah									**452.183.421,21**		
Piutang Transfer Antar Daerah											
			0 - 1 Bulan		**> 1 - 3 Bulan**		**> 3 - 12 Bulan**		**> 12 Bulan**		**Total**
	1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	4.132.190.342,00	41.321.903,42	-	-	-	-	-	-	41.321.903,42
	Jumlah		4.132.190.342,00	41.321.903,42	-	-	-	-	-	-	41.321.903,42
	% Penyisihan Piutang		1%	-	10%	-	50%	-	100%	-	-
	Penyisihan Piutang		41.321.903,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PenyisihanPiutang Transfer Antar Daerah								-	**41.321.903,42**	-	-
Jumlah Keseluruhan									**65.958.699.955,15**		

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	OPD	Uraian	Tgl Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Perjanjian	Nilai Pembebanan Per Bulan	Yang Telah Dibebankan s.d. 31 Des 2024		Beban Tahun 2025 atas Belanja (SP2D) Sebelum Tahun 2025		Beban Tahun 2025 atas Belanja (SP2D) Tahun 2025		Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025		
			Mulai	Berakhir				Bulan	Beban	Bulan	Beban	Bulan	Beban	Atas Belanja (SP2D) sebelum Tahun 2025	Atas Belanja (SP2D) Tahun 2025	Total
a	b	c	d	e	f	g	h = g / f	i	j = h * i	k	l = h * k	m	n = h * m	o = g - j - l - n	p = g - n	q = o + p
Asuransi Dibayar Dimuka																
1	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi Asuransi Kendaraan Dinas)	3/31/2024	3/30/2025	12	173.275.844,00	14.439.653,67	9	129.956.883,00	3	43.318.961,00	-	-	-	-	-
2	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi Asuransi Rumah Jabatan, Rumah Dinas dan Kantor Setda)/Property All Ris dan Asuransi Gempa Bumi	17/07/2024	7/16/2025	12	49.043.354,00	4.086.946,17	5	20.434.730,83	7	28.608.623,17	-	-	-	-	-
3	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi Asuransi Kendaraan Dinas)	3/31/2025	3/31/2026	12	173.472.810,00	14.456.067,50	-	-	-	-	9	130.104.607,50	-	43.368.202,50	43.368.202,50
4	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi Asuransi Gedung Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan)	7/17/2025	7/17/2026	12	49.043.354,00	4.086.946,17	-	-	-	-	5	20.434.730,83	-	28.608.623,17	28.608.623,17
Jumlah Bagian Umum						**444.835.362,00**			**150.391.613,83**		**71.927.584,17**		**150.539.338,33**	**-**	**71.976.825,67**	**71.976.825,67**
Jumlah Asuransi Dibayar Dimuka						**444.835.362,00**			**150.391.613,83**		**71.927.584,17**		**150.539.338,33**	**-**	**71.976.825,67**	**71.976.825,67**
Sewa Dibayar Dimuka																
Belanja Sewa Tanah Tempat Bangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah																
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Datah - Pos Datah	4/1/2020	3/31/2025	60	18.700.000,00	311.666,67	57	17.765.000,00	3	935.000,00	-	-	-	-	-
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah Tempat Bangunan Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Br. Dinas Bencingan Desa Rendang - Pos Rendang	12/5/2023	12/4/2025	24	11.500.000,00	479.166,67	13	6.229.166,67	11	5.270.833,33	-	-	-	-	-
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Bhuana Giri - Pos Butus	1/30/2023	1/29/2026	36	15.000.000,00	416.666,67	23	9.583.333,33	12	5.000.000,00	-	-	416.666,67	-	416.666,67
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Ababi - Pos Umanyar	1/30/2023	1/29/2026	36	15.000.000,00	416.666,67	23	9.583.333,33	12	5.000.000,00	-	-	416.666,67	-	416.666,67
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Duda - Pos Selat	11/3/2023	11/4/2025	24	19.000.000,00	791.666,67	14	11.083.333,33	10	7.916.666,67	-	-	-	-	-
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah dan Bangunan tempat pos pengawasan pajak MBLB di Br. Dinas Kayu Putih Desa Bebandem - Pos Kayu Putih	11/30/2023	11/29/2025	24	13.750.000,00	572.916,67	13	7.447.916,67	11	6.302.083,33	-	-	-	-	-
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Perpanjangan Sewa Hosting Website Kantor	12/4/2024	12/3/2025	12	7.500.000,00	625.000,00	1	625.000,00	11	6.875.000,00	-	-	-	-	-
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah tempat pos pengawasan pajak MBLB di Desa Datah - Pos Datah	4/1/2025	3/31/2030	60	20.757.000,00	345.950,00	-	-	-	-	9	3.113.550,00	-	17.643.450,00	17.643.450,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah Tempat Bangunan Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Br. Dinas Bencingan Desa Rendang - Pos Rendang	12/5/2025	12/4/2026	12	6.000.000,00	500.000,00	-	-	-	-	1	500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah dan Bangunan tempat pos pengawasan pajak MBLB di Br. Dinas Kayu Putih Desa Bebandem - Pos Kayu Putih	11/30/2025	11/29/2027	24	14.500.000,00	604.166,67	-	-	-	-	1	604.166,67	-	13.895.833,33	13.895.833,33

No	OPD	Uraian	Tgl Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Perjanjian	Nilai Pembebanan Per Bulan	Yang Telah Dibebankan s.d. 31 Des 2024		Beban Tahun 2025 atas Belanja (SP2D) Sebelum Tahun 2025		Beban Tahun 2025 atas Belanja (SP2D) Tahun 2025		Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025		
			Mulai	Berakhir				Bulan	Beban	Bulan	Beban	Bulan	Beban	Atas Belanja (SP2D) sebelum Tahun 2025	Atas Belanja (SP2D) Tahun 2025	Total
a	b	c	d	e	f	g	h = g / f	i	j = h * i	k	l = h * k	m	n = h * m	o = g - j - l - n	p = g - n	q = o + p
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Perpanjangan Sewa Hosting Website Kantor	12/15/2025	12/14/2026	12	7.500.000,00	625.000,00	-	-	-	-	1	625.000,00	-	6.875.000,00	6.875.000,00
	Jumlah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					**149.207.000,00**			**62.317.083,33**		**37.299.583,33**		**4.842.716,67**	**833.333,33**	**43.914.283,33**	**44.747.616,67**
Belanja Dibayar Dimuka Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan																
1	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan	Sewa Menyewa atas Tanah di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem	10/3/2020	10/2/2030	120	41.500.000,00	345.833,33	51	17.637.500,00	12	4.150.000,00	-	-	19.712.500,00	-	19.712.500,00
2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan	Sewa Menyewa atas Tanah di Pasar Karanganyar Kecamatan Bebandem Desa Sibetan Kabupaten Karangasem	11/22/2022	11/21/2027	60	93.500.000,00	1.558.333,33	25	38.958.333,33	12	18.700.000,00	-	-	35.841.666,67	-	35.841.666,67
	Jumlah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan					**135.000.000,00**			**56.595.833,33**		**22.850.000,00**		**-**	**55.554.166,67**	**-**	**55.554.166,67**
Jumlah Sewa Dibayar Dimuka						**284.207.000,00**			**118.912.916,67**		**60.149.583,33**		**4.842.716,67**	**56.387.500,00**	**43.914.283,33**	**100.301.783,33**
Jumlah Beban Dibayar Dimuka						**729.042.362,00**			**269.304.530,50**		**132.077.167,50**		**155.382.055,00**	**56.387.500,00**	**115.891.109,00**	**172.278.609,00**

Daftar Persediaan Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2025

Dalam rupiah

No	OPD	Barang Pakai Habis										
		Bahan bangunan dan konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Bahan Lainnya	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						1.148.900,00	205.269,00	5.216.500,00	2.500.000,00	4.135.000,00	1.374.105,00
2	Bidang Pengelolaan Pendidikan SD	24.406.700,00	1.030.000,00			59.041.635,00	161.804.731,20	8.527.200,00	29.429.500,00	8.570.000,00	40.111.800,00	20.420.697,00
3	Bidang Pengelolaan Pendidikan SMP					1.651.000,00	32.257.462,00	3.054.200,00		715.500,00	8.755.000,00	5.503.800,00
4	Dinas Kesehatan						1.568.940,00	10.370.000,00	131.812.250,00	1.000.000,00		4.725.270,00
5	UPTD Puskesmas Karangasem I		13.620.070,00			6.785.400,00	773.850,00	9.136.500,00			15.684.300,00	25.510.020,00
6	UPTD Puskesmas Karangasem II		9.348.048,00			6.477.600,00	2.369.200,00			750.000,00		
7	UPTD Puskesmas Kubu I		21.003.064,00				240.806,00	2.703.960,00		200.000,00	1.106.475,00	1.019.100,00
8	UPTD Puskesmas Kubu II		6.868.125,00				4.606.814,00				1.934.000,00	
9	UPTD Puskesmas Manggis I					328.900,00	181.100,00	2.174.200,00			1.202.800,00	
10	UPTD Puskesmas Manggis II						1.605.800,00	4.512.000,00			4.655.100,00	444.000,00
11	UPTD Puskesmas Abang I					952.935,00		783.660,00		1.000.000,00	2.571.225,00	
12	UPTD Puskesmas Abang II						731.700,00	3.356.314,00		50.000,00	2.637.474,00	797.800,00
13	UPTD Puskesmas Rendang		53.963.877,00			12.026.300,00	8.685.570,00	10.128.100,00		300.000,00	8.742.490,00	
14	UPTD Puskesmas Selat						21.580.000,00			500.000,00	9.306.000,00	
15	UPTD Puskesmas Sidemen		27.347.029,60			3.995.000,00	6.322.693,00	5.248.235,00		560.000,00	15.904.000,00	
16	UPTD Puskesmas Bebandem					5.335.845,41	6.144.067,56	9.748.769,00		1.000.000,00	8.147.994,73	
17	UPTD Laboratorium Kesehatan		46.759.130,00			250.560,00	232.581,63	430.680,00	615.453,00	340.000,00	506.160,00	
18	UPTD RS Pratama Kubu					3.247.860,00	2.560.548,00	1.457.430,00	827.950,00	70.000,00	4.634.250,00	1.698.300,00
19	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karangasem						78.453.118,00	19.873.440,00			15.475.494,00	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	65.202.900,00					151.000,00	4.935.000,00	260.000,00		1.298.700,00	
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						100.011,00	127.000,00		2.370.000,00		
22	Satuan Polisi Pamong Praja						184.300,00	350.000,00		50.000,00		380.700,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						43.800,00	640.000,00		700.000,00		
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan							159.395,60		60.000,00		
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana							1.587.494,00				
26	Dinas Lingkungan Hidup						159.550,00	409.000,00	3.051.946,00	100.000,00	1.799.000,00	264.100,00
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							6.718.662,50	111.051.292,00		1.633.233.805,39	6.541.000,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									100.000,00		

Dalam rupiah

No	OPD	Barang Pakai Habis								Total
		Alat Listrik	Perlengkapan Dinas	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Natura	Pakan	
a	b	n	o	p	q	r	s	t	u	v = (a + b + ... t + u)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.183.336,00								**17.763.110,00**
2	Bidang Pengelolaan Pendidikan SD	19.977.000,00		34.349.600,00	19.516.889,00					**427.185.752,20**
3	Bidang Pengelolaan Pendidikan SMP	6.281.130,00		6.200.000,00	2.866.700,00					**67.284.792,00**
4	Dinas Kesehatan	3.504.825,00			5.403.948.525,43	690.384.000,00				**6.247.313.810,43**
5	UPTD Puskesmas Karangasem I	8.192.500,00			486.016.906,47					**565.719.546,47**
6	UPTD Puskesmas Karangasem II				267.575.615,68					**286.520.463,68**
7	UPTD Puskesmas Kubu I				311.674.623,98					**337.948.028,98**
8	UPTD Puskesmas Kubu II	1.168.450,00			159.336.787,29					**173.914.176,29**
9	UPTD Puskesmas Manggis I	647.000,00			435.493.762,43					**440.027.762,43**
10	UPTD Puskesmas Manggis II	2.668.700,00			117.001.432,23					**130.887.032,23**
11	UPTD Puskesmas Abang I	1.650.225,00			572.799.062,01					**579.757.107,01**
12	UPTD Puskesmas Abang II	547.750,00			338.781.640,01					**346.902.678,01**
13	UPTD Puskesmas Rendang	4.050.000,00			390.049.908,65					**487.946.245,65**
14	UPTD Puskesmas Selat	9.277.200,00			428.440.335,34					**469.103.535,34**
15	UPTD Puskesmas Sidemen	2.540.200,00			195.040.528,16					**256.957.685,76**
16	UPTD Puskesmas Bebandem	6.384.955,04			189.095.743,81					**225.857.375,55**
17	UPTD Laboratorium Kesehatan				2.574.201,66					**51.708.766,29**
18	UPTD RS Pratama Kubu	1.404.150,00			531.906.789,30					**547.807.277,30**
19	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karangasem	3.875.160,00		83.809.013,90	8.839.986.194,72			113.838.713,00		**9.155.311.133,62**
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			-			8.909.170.030,00			**8.981.017.630,00**
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									**2.597.011,00**
22	Satuan Polisi Pamong Praja									**965.000,00**
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									**1.383.800,00**
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan									**219.395,60**
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana			1.806.968,00	105.549.780,00					**108.944.242,00**
26	Dinas Lingkungan Hidup									**5.783.596,00**
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									**1.757.544.759,89**
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						193.007.392,00			**193.107.392,00**

No	OPD	Barang Pakai Habis										
		Bahan bangunan dan konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Bahan Lainnya	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
29	Dinas Perhubungan							135.880,00	173.027.497,00	520.000,00	1.275.480,00	
30	Dinas Komunikasi dan Informatika						79.290,00	380.003,00				
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					209.790,00	824.850,00	1.135.950,00		400.000,00	3.343.320,00	
32	Dinas Ketenagakerjaan						22.200,00	262.000,00		230.000,00		
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan										277.500,00	
34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						909.972,00	837.000,00	-		917.000,00	1.802.261,00
35	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan				30.711.527,00		350.000,00			300.000,00	1.324.875,00	
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan						22.200,00	183.000,00	25.442.918,00			
37	Bagian Hukum							196.890,00				
38	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan							364.005,00		100.000,00		
39	Bagian Organisasi						11.712.000,00	330.000,00			2.185.000,00	
40	Bagian Perekonomian dan Pembangunan						293.020,00	491.230,00		170.000,00		
41	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan							380.994,00		250.000,00		
42	Bagian Umum						542.790,00	477.927,00	1.520.710,00	800.000,00		
43	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						41.242,00	132.002,00				
44	Sekretariat DPRD						563.880,00					
45	Kecamatan Abang						158.707,00	359.640,00				
46	Kecamatan Kubu							266.472,00				
47	Kecamatan Selat							127.344,00				
48	Kecamatan Rendang						69.700,00	144.300,00				
49	Inspektorat Daerah							201.000,00		200.000,00		
50	Badan Perencanaan Daerah					321.900,00	144.300,00	1.969.140,00	139.996,00	350.000,00	1.888.110,00	
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						9.502.976,00	765.800,00		290.000,00		
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								21.395.000,00			
53	Badan Riset dan Inovasi Daerah							711.694,30				
54	Kecamatan Karangasem							178.200,00				198.290,00
	JUMLAH	**89.609.600,00**	**179.939.343,60**	**-**	**30.711.527,00**	**100.624.725,41**	**357.143.669,39**	**116.666.980,40**	**503.791.012,00**	**24.545.500,00**	**1.793.052.353,12**	**70.679.443,00**

No	OPD	Barang Pakai Habis								Total
		Alat Listrik	Perlengkapan Dinas	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Natura	Pakan	
a	b	n	o	p	q	r	s	t	u	v = (a + b + … t + u)
29	Dinas Perhubungan	1.127.083.459,52								**1.302.042.316,52**
30	Dinas Komunikasi dan Informatika									**459.293,00**
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									**5.913.910,00**
32	Dinas Ketenagakerjaan									**514.200,00**
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									**277.500,00**
34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	79.731,00								**4.545.964,00**
35	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan					18.000.000,00		818.715.000,00	16.129.500,00	**885.530.902,00**
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan									**25.648.118,00**
37	Bagian Hukum									**196.890,00**
38	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan									**464.005,00**
39	Bagian Organisasi									**14.227.000,00**
40	Bagian Perekonomian dan Pembangunan									**954.250,00**
41	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan									**630.994,00**
42	Bagian Umum	4.221.000,00								**7.562.427,00**
43	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa									**173.244,00**
44	Sekretariat DPRD									**563.880,00**
45	Kecamatan Abang									**518.347,00**
46	Kecamatan Kubu									**266.472,00**
47	Kecamatan Selat									**127.344,00**
48	Kecamatan Rendang									**214.000,00**
49	Inspektorat Daerah									**401.000,00**
50	Badan Perencanaan Daerah	742.590,00								**5.556.036,00**
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									**10.558.776,00**
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					9.277.659.000,00				**9.299.054.000,00**
53	Badan Riset dan Inovasi Daerah									**711.694,30**
54	Kecamatan Karangasem									**376.490,00**
	JUMLAH	**1.207.479.361,56**	**-**	**126.165.581,90**	**18.797.655.426,17**	**9.986.043.000,00**	**9.102.177.422,00**	**932.553.713,00**	**16.129.500,00**	**43.434.968.158,55**

Aset lainnya Dana Bergulir PSBDT yang Akan Dihapuskan pada Diskoperindag

No	Identitas Penanggung Hutang	Saldo Awal	Pembayaran 2017-2022	PSBDT 2017-29 Maret 2023	PSBDT		Keterangan
		1 Januari 2017			Nomor	Tanggal	
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Dewa Gede Putra	2.900.000,00		2.900.000,00	PSBDT-81/PUPNC.20.02/2019	25-03-2019	penanggung hutang tidak diketemukan alamatnya karena alamatnya tidak jelas dan tidak terdaftar di database di lingkungan galiran
2	Yus Atmaja	2.400.000,00	381.818,00	2.018.182,00	PSBDT-44/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang dalam keadaan tidak mampu
3	I Gusti Gede Rai	5.000.000,00		5.000.000,00	PSBDT-82/PUPNC.20.02/2019	25-03-2019	penanggung hutang tidak diketemukan alamatnya karena alamatnya tidak jelas dan tidak terdaftar di database di lingkungan Gede
4	Made Sunardi	6.800.000,00	3.636.361,00	3.163.639,00	PSBDT-26/PUPNC.20.02/2023	28-03-2023	penanggung hutang dalam keadaan tidak mampu
5	Wayan Muruk	10.000.000,00		10.000.000,00	PSBDT-45/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang dalam keadaan tidak mampu
6	Wayan Kembar	4.500.000,00		4.500.000,00	PSBDT-83/PUPNC.20.02/2019	25-03-2019	penanggung hutang tidak diketemukan alamatnya karena alamatnya tidak jelas dan tidak terdaftar di database desa Seraya Barat
7	Nyoman Yasa	5.000.000,00		5.000.000,00	PSBDT-153/PUPNC.20.02/2019	16-12-2019	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
8	Kadek Sukanata/komang sulantika	8.000.000,00		8.000.000,00	PSBDT-46/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang telah pindah alamat dan tidak diketahui lagi keberadaanya
9	Ketut Suasti	6.650.000,00		6.650.000,00	PSBDT-84/PUPNC.20.02/2019	25-03-2019	penanggung hutang tidak diketemukan alamatnya karena alamatnya tidak jelas dan tidak terdaftar di database di Kelurahan Padangkerta
10	Wayan Sidemen	2.750.000,00		2.750.000,00	PSBDT-132/PUPNC.20.02/2018	17-04-2018	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
11	Gusti Nyoman Ardana	750.000,00		750.000,00	PSBDT-85/PUPNC.20.02/2019	25-03-2019	penanggung hutang tidak diketemukan alamatnya karena alamatnya tidak jelas dan tidak terdaftar di database di Kelurahan Padangkerta
12	Wayan Rasna	7.000.000,00		7.000.000,00	PSBDT-86/PUPNC.20.02/2019	25-03-2019	penanggung hutang tidak diketemukan alamatnya karena alamatnya tidak jelas dan tidak terdaftar di database di Lingkungan Jasri Kaler
13	Gusti Ngurah Gede	10.200.000,00		10.200.000,00	PSBDT-47/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
14	Gede Mangku	20.000.000,00		20.000.000,00	PSBDT-51/PUPNC.20.02/2019	25-02-2019	debitur telah meninggal dunia dan ahli waris merupakan warga yang tidak mampu
15	Nengah Turun	3.750.000,00		3.750.000,00	PSBDT-63/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	Tidak ditemukan karena sudah pindah domisili dan alamat baru tidak ditemukan
16	Wayan Subrata	8.000.000,00		8.000.000,00	PSBDT-48/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
17	Made Tinggen	4.250.000,00		4.250.000,00	PSBDT-49/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin

No	Identitas Penanggung Hutang	Saldo Awal	Pembayaran 2017-2022	PSBDT 2017-29 Maret 2023	PSBDT		Keterangan
		1 Januari 2017			Nomor	Tanggal	
a	b	c	d	e	f	g	h
18	Raka Sri	1.000.000,00		1.000.000,00	PSBDT-73/PUPNC.20.02/2021	05-10-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
19	Made Gianyar/Ni wayan Ganjar (PSBDT)	2.400.000,00		2.400.000,00	PSBDT-64/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	debitur telah meninggal dunia dan ahli waris merupakan warga yang tidak mampu
20	Wayan Sadru	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	PSBDT-50/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
21	I Ketut Kentel	1.500.000,00		1.500.000,00	PSBDT-65/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
22	Ketut Suarjana	2.000.000,00		2.000.000,00	PSBDT-66/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
23	Made Suardana	4.500.000,00		4.500.000,00	PSBDT-51/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
24	Wayan Sumerta	4.935.500,00		4.935.500,00	PSBDT-52/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
25	Nyoman Rumia	5.000.000,00		5.000.000,00	PSBDT-53/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
26	Ketut Norsi	3.645.833,37		3.645.833,37	PSBDT-67/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	Debitur telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris
27	Wayan Suarna	3.300.000,00	2.727.273,00	572.727,00	PSBDT-68/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
28	Nyoman Kari	5.500.000,00		5.500.000,00	PSBDT-76/PUPNC.20.02/2021	18-10-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
29	Desak Nyoman Sekarini/Desak Ayu Sekarini (PSBDT)	15.000.000,00	1.818.181,00	13.181.819,00	PSBDT-01/PUPNC.20.02/2022	20-01-2022	Warga yang tidak mampu dan kena dampak Covid-19
30	Made Dadiantara	1.500.000,00		1.500.000,00	PSBDT-69/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
31	Nyoman Sudita	6.300.000,00		6.300.000,00	PSBDT-133/PUPNC.20.02/2018	17-04-2018	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
32	Gusti Ngurah Madra	4.000.000,00		4.000.000,00	PSBDT-70/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
33	Ketut Mustikasari	1.500.000,00		1.500.000,00	PSBDT-146/PUPNC.20.02/2019	22-10-2019	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
34	Desak Putu Astiti, SE	3.000.000,00		3.000.000,00	PSBDT-54/PUPNC.20.02/2021	09-03-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
35	Ketut Suarjana	12.000.000,00		12.000.000,00	PSBDT-71/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
36	Made Mahardika	6.800.000,00		6.800.000,00	PSBDT-134/PUPNC.20.02/2018	17-04-2018	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
37	Ari Arka	3.171.249,98		3.171.249,98	PSBDT-72/PUPNC.20.02/2021	08-06-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin

No	Identitas Penanggung Hutang	Saldo Awal 1 Januari 2017	Pembayaran 2017-2022	PSBDT 2017-29 Maret 2023	PSBDT		Keterangan
					Nomor	Tanggal	
a	b	c	d	e	f	g	h
38	Ngh Sutama	2.500.000,00	50.000,00	2.450.000,00	PSBDT-147/PUPNC.20.02/2019	22-10-2019	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
39	Nengah Suasti	5.150.000,00	100.000,00	5.050.000,00	PSBDT-74/PUPNC.20.02/2021	05-10-2021	penanggung hutang sudah pindah domisili keklungkung dan alamat baru tidak ditemukan
40	Dw Ayu Karang	6.583.000,00	150.000,00	6.433.000,00	PSBDT-148/PUPNC.20.02/2019	22-10-2019	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
41	I Gusti Made Ngurah	250.000,00		250.000,00	PSBDT-15/PUPNC.20.02/2021	05-10-2021	penanggung hutang merupakan warga yang tidak mampu/miskin
42	Ketut Suardana	4.025.000,00	100.000,00	3.925.000,00	PSBDT-87/PUPNC.20.02/2019	25-03-2019	penanggung hutang tidak diketemukan alamatnya karena alamatnya tidak jelas dan tidak terdaftar di database di desa Ulakan
Jumlah		**216.510.583,35**	**10.963.633,00**	**205.546.950,35**			

DAFTAR ASET TETAP TANAH PER 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Saldo per 31 Desember 2025
			Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya / Kurang Catat	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Penghapusan 2025	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	43.790.749.747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	43.790.749.747,00
2	Dinas Kesehatan	2.169.341.720,00	-	-	11.675.000,00	11.675.000,00	-	35.840.000,00	-	35.840.000,00	2.145.176.720,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	7.292.093.400,00	-	-	32.110.020,00	32.110.020,00	-	-	-	-	7.324.203.420,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	86.173.348.407,75	893.128.760,00	-	-	893.128.760,00	-	-	102.400.000,00	102.400.000,00	86.964.077.167,75
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	234.000,00	234.000,00	-	-	-	-	234.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	162.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	162.900.000,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	3.076.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.076.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	407.359.443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	407.359.443,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	61.685.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61.685.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.930.700.000,00	-	2.260.770.000,00	-	2.260.770.000,00	-	-	-	-	5.191.470.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	3.651.971.492,50	-	-	2.788.020.000,00	2.788.020.000,00	-	-	-	-	6.439.991.492,50
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	263.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	263.680.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6.071.813.080,00	-	-	-	-	155.500.000,00	-	-	155.500.000,00	5.916.313.080,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.464.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.464.800.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	513.344.450,00	-	-	244.329.300,00	244.329.300,00	-	-	-	-	757.673.750,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	10.035.109.330,00	-	-	-	-	-	58.880.000,00	2.720.519.000,00	2.779.399.000,00	7.255.710.330,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	151.040.000,00	-	-	100.660.000,00	100.660.000,00	-	-	-	-	251.700.000,00

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Saldo per 31 Desember 2025
			Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya / Kurang Catat	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Penghapusan 2025	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
22	Badan Perencanaan Daerah	167.936.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	167.936.000,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	102.400.000,00	102.400.000,00	-	-	-	-	102.400.000,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	833.371.820,00	-	-	-	-	-	-	621.931.820,00	621.931.820,00	211.440.000,00
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	122.624.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	122.624.000,00
27	Kecamatan Karangasem	452.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	452.500.000,00
28	Kecamatan Abang	-	-	-	7.341.500,00	7.341.500,00	-	-	-	-	7.341.500,00
29	Kecamatan Kubu	-	-	-	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-	-	-	9.100.000,00
30	Kecamatan Bebandem	18.110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.110.000,00
31	Kecamatan Selat	-	-	-	139.400.000,00	139.400.000,00	-	-	-	-	139.400.000,00
32	Kecamatan Rendang	369.810.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	369.810.000,00
33	Kecamatan Sidemen	1.176.000,00	-	-	9.581.000,00	9.581.000,00	-	-	-	-	10.757.000,00
34	Kecamatan Manggis	96.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000.000,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**168.267.539.890,25**	**893.128.760,00**	**2.260.770.000,00**	**3.444.850.820,00**	**6.598.749.580,00**	**155.500.000,00**	**94.720.000,00**	**3.444.850.820,00**	**3.695.070.820,00**	**171.171.218.650,25**

DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah					
			Belanja Modal	Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	197.110.088.796,30	20.725.936.276,00	-	133.620.000,00	441.000,00	-	20.859.997.276,00
2	Dinas Kesehatan	90.843.587.345,01	4.892.056.175,00	7.426.000,00	-	-	-	4.899.482.175,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	149.453.370.363,17	2.742.062.943,00	-	574.260.606,00	-	130.241.666,00	3.446.565.215,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.836.357.008,00	298.706.550,00	-	-	-	-	298.706.550,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	4.706.664.180,00	1.577.970.198,00	-	-	-	-	1.577.970.198,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.052.405.395,00	1.883.330.000,00	-	-	-	-	1.883.330.000,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	6.680.263.113,40	88.014.999,00	-	-	-	-	88.014.999,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.990.134.832,00	39.127.234,00	-	-	-	-	39.127.234,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	4.552.266.368,00	50.407.002,00	-	-	-	-	50.407.002,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	29.212.001.873,00	11.004.358.983,00	-	88.866.250,00	-	-	11.093.225.233,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.456.492.199,00	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.591.887.026,00	22.950.000,00	-	-	-	-	22.950.000,00
13	Dinas Perhubungan	15.795.166.810,50	660.795.459,00	-	-	-	-	660.795.459,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.518.176.012,00	7.748.465.000,00	-	-	-	-	7.748.465.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.925.129.925,00	218.342.853,00	-	-	-	-	218.342.853,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.171.814.198,00	728.421.248,00	-	-	-	-	728.421.248,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.692.775.503,00	4.999.999,00	-	-	-	-	4.999.999,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.610.338.665,00	268.899.992,00	-	-	-	-	268.899.992,00

No	OPD	Mutasi Kurang						Saldo per 31 Desember 2025
		Salah Pos Belanja Modal	Pengakuan Extracomptabel	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000,00	1.285.063.662,00	-	1.960.752.753,00	-	3.254.816.415,00	214.715.269.657,30
2	Dinas Kesehatan	6.704.980,00	8.262.080,00	2.334.500,00	-	130.241.666,00	147.543.226,00	95.595.526.294,01
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	164.612.832,00	-	164.612.832,00	152.735.322.746,17
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	46.620.000,00	32.777.977,00	79.397.977,00	15.055.665.581,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	4.125.000,00	-	4.125.000,00	6.280.509.378,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	350.304.000,00	-	350.304.000,00	12.585.431.395,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	6.768.278.112,40
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	8.029.262.066,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	79.863.576,00	-	79.863.576,00	4.522.809.794,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	1.024.323.106,00	-	1.024.323.106,00	39.280.904.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	6.456.492.199,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	92.499.036,00	-	92.499.036,00	2.522.337.990,00
13	Dinas Perhubungan	-	13.228.500,00	-	1.439.426.735,00	-	1.452.655.235,00	15.003.307.034,50
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	768.562.600,00	-	768.562.600,00	14.498.078.412,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	6.143.472.778,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	5.900.235.446,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	4.697.775.502,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	4.879.238.657,00

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah					
			Belanja Modal	Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	16.279.869.648,00	67.455.672,00	-	-	-	-	67.455.672,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	30.262.182.104,00	2.027.113.906,00	-	-	-	-	2.027.113.906,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	14.393.758.550,00	2.328.080.928,00	-	-	-	-	2.328.080.928,00
22	Badan Perencanaan Daerah	3.077.092.358,00	212.743.249,00	-	-	-	-	212.743.249,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	777.172.000,00	85.720.700,00	-	-	-	32.777.977,00	118.498.677,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.508.131.466,00	188.126.201,00	-	-	-	-	188.126.201,00
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.349.941.750,00	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	3.101.824.775,00	201.545.702,00	-	-	-	-	201.545.702,00
27	Kecamatan Karangasem	3.034.733.448,00	162.907.950,00	-	-	-	-	162.907.950,00
28	Kecamatan Abang	1.253.164.021,00	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Kubu	1.250.190.300,00	12.112.500,00	-	-	-	-	12.112.500,00
30	Kecamatan Bebandem	1.359.114.424,00	36.300.000,00	-	-	-	-	36.300.000,00
31	Kecamatan Selat	1.648.569.720,00	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Rendang	1.257.902.800,00	39.139.821,00	-	-	-	-	39.139.821,00
33	Kecamatan Sidemen	1.386.634.241,00	85.796.700,00	-	-	-	-	85.796.700,00
34	Kecamatan Manggis	1.394.192.835,00	13.650.000,00	-	-	-	-	13.650.000,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.931.724.260,00	23.750.000,00	-	-	-	-	23.750.000,00
JUMLAH		**665.465.118.312,38**	**58.439.288.240,00**	**7.426.000,00**	**796.746.856,00**	**441.000,00**	**163.019.643,00**	**59.406.921.739,00**

No	OPD	Mutasi Kurang						Saldo per 31 Desember 2025
		Salah Pos Belanja Modal	Pengakuan Extracomptabel	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-	-	-	329.517.000,00	-	329.517.000,00	16.017.808.320,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	288.756.400,00	-	288.756.400,00	32.000.539.610,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	-	2.240.860,00	-	-	-	2.240.860,00	16.719.598.618,00
22	Badan Perencanaan Daerah	-	-	-	74.356.800,00	-	74.356.800,00	3.215.478.807,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	895.670.677,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	11.696.257.667,00
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	2.349.941.750,00
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	3.303.370.477,00
27	Kecamatan Karangasem	-	16.741.325,00	-	208.225.600,00	-	224.966.925,00	2.972.674.473,00
28	Kecamatan Abang	-	-	-	6.545.000,00	-	6.545.000,00	1.246.619.021,00
29	Kecamatan Kubu	-	-	-	74.198.000,00	-	74.198.000,00	1.188.104.800,00
30	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	1.395.414.424,00
31	Kecamatan Selat	-	-	-	-	-	-	1.648.569.720,00
32	Kecamatan Rendang	-	18.493.821,00	-	-	-	18.493.821,00	1.278.548.800,00
33	Kecamatan Sidemen	-	-	-	55.594.250,00	-	55.594.250,00	1.416.836.691,00
34	Kecamatan Manggis	-	-	-	33.584.000,00	-	33.584.000,00	1.374.258.835,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	52.198.000,00	-	52.198.000,00	1.903.276.260,00
JUMLAH		**15.704.980,00**	**1.344.030.248,00**	**2.334.500,00**	**7.054.064.688,00**	**163.019.643,00**	**8.579.154.059,00**	**716.292.885.992,38**

DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah				
			Belanja Modal	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	455.443.665.086,70	11.072.791.406,08	3.939.125.638,09	253.228.293,00	-	15.265.145.337,17
2	Dinas Kesehatan	119.642.460.207,78	5.159.117.541,35	-	-	-	5.159.117.541,35
3	Rumah Sakit Umum Daerah	113.848.118.219,23	1.276.126.145,77		-	-	1.276.126.145,77
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.514.873.276,00	1.284.291.440,00	-	-	-	1.284.291.440,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	802.798.002,00	742.621.384,69	-	-	-	742.621.384,69
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	201.462.000,00	-	-	-	-	-
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	1.677.976.069,00	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.141.038.100,00	97.958.281,44	-	-	-	97.958.281,44
9	Dinas Ketenagakerjaan	1.253.544.000,00	473.772.565,40	-	-	-	473.772.565,40
10	Dinas Lingkungan Hidup	4.686.919.202,05	-	1.156.963.405,00	-	-	1.156.963.405,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.165.869.000,00	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.868.546.172,00	-	-	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	11.393.545.295,47	492.839.000,00	-	-	-	492.839.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	472.739.529,89	-	-	-	-	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	86.992.302.227,38	-	-	-	-	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.613.706.500,00	-	-	-	-	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37.566.823.251,00	-	-	-	-	-

No	OPD	Mutasi Kurang							Saldo per 31 Desember 2025
		Salah Pos Belanja Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	Penghapusan Tahun 2025	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	207.362.002,00	983.505.199,46	-	117.440.000,00	1.890.301.873,00	3.198.609.074,46	467.510.201.349,41
2	Dinas Kesehatan	268.599.950,00	-	54.334.873,99	-	917.685.861,00	-	1.240.620.684,99	123.560.957.064,14
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	9.468.665,57	-	-	-	9.468.665,57	115.114.775.699,43
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	521.040.950,00	28.979.055,61	-	-	802.930.000,00	1.352.950.005,61	14.446.214.710,39
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	6.870.280,32	-	-	-	6.870.280,32	1.538.549.106,37
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	201.462.000,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1.677.976.069,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	97.958.281,44	-	-	-	-	97.958.281,44	7.141.038.100,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	75.156.155,00	-	-	-	-	75.156.155,00	1.652.160.410,40
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	5.843.882.607,05
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	1.165.869.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	1.868.546.172,00
13	Dinas Perhubungan	-	728.860.000,00	-	-	-	-	728.860.000,00	11.157.524.295,47
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	472.739.529,89
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	416.140.000,00	-	-	416.140.000,00	86.576.162.227,38
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	15.613.706.500,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	37.566.823.251,00

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah				
			Belanja Modal	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.492.772.405,13	184.508.296,40	-	-	-	184.508.296,40
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	21.123.154.517,31	-	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	23.641.507.993,81	94.550.581,00	-	-	379.578.000,00	474.128.581,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	28.931.935.130,00	124.003.722,00	-	-	-	124.003.722,00
22	Badan Perencanaan Daerah	1.195.277.542,39	-	-	-	-	-
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	179.717.743,56	128.160.141,18	-	-	802.930.000,00	931.090.141,18
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.989.146.136,19	498.465.431,52	-	-	-	498.465.431,52
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.024.253.128,00	-	-	-	-	-
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	721.389.407,00	79.778.144,00	-	-	-	79.778.144,00
27	Kecamatan Karangasem	4.286.909.065,70	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Abang	2.676.493.706,00	-	-	-	97.273.865,00	97.273.865,00
29	Kecamatan Kubu	3.733.001.969,32	198.942.850,00	-	-	625.116.104,00	824.058.954,00
30	Kecamatan Bebandem	1.591.667.000,00	-	-	-	128.337.910,00	128.337.910,00
31	Kecamatan Selat	1.772.794.130,00	344.141.558,00	-	-	245.011.230,00	589.152.788,00
32	Kecamatan Rendang	926.605.300,00	398.185.210,00	-	-	222.363.871,00	620.549.081,00
33	Kecamatan Sidemen	3.031.100.418,12	-	-	-	250.336.373,00	250.336.373,00
34	Kecamatan Manggis	1.102.957.745,00	-	-	-	321.862.520,00	321.862.520,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	369.800.000,00	-	-	-	-	-
JUMLAH		**981.076.869.476,03**	**22.650.253.698,83**	**5.096.089.043,09**	**253.228.293,00**	**3.072.809.873,00**	**31.072.380.907,92**

No	OPD	Mutasi Kurang							Saldo per 31 Desember 2025
		Salah Pos Belanja Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	Penghapusan Tahun 2025	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	134.710.725,00	-	134.710.725,00	6.542.569.976,53
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	78.483.300,00	-	78.483.300,00	21.044.671.217,31
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	94.550.581,00	-	-	70.560.000,00	-	165.110.581,00	23.950.525.993,81
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	29.055.938.852,00
22	Badan Perencanaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1.195.277.542,39
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1.110.807.884,74
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	99.606.960,00	-	-	-	379.578.000,00	479.184.960,00	4.008.426.607,71
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	1.024.253.128,00
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	801.167.551,00
27	Kecamatan Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	4.286.909.065,70
28	Kecamatan Abang	-	-	-	-	-	-	-	2.773.767.571,00
29	Kecamatan Kubu	-	-	-	-	-	-	-	4.557.060.923,32
30	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	-	1.720.004.910,00
31	Kecamatan Selat	-	89.700.000,00	-	-	-	-	89.700.000,00	2.272.246.918,00
32	Kecamatan Rendang	-	-	-	-	-	-	-	1.547.154.381,00
33	Kecamatan Sidemen	-	-	-	-	-	-	-	3.281.436.791,12
34	Kecamatan Manggis	-	-	-	-	-	-	-	1.424.820.265,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	369.800.000,00
JUMLAH		**268.599.950,00**	**1.914.234.929,44**	**1.083.158.074,95**	**416.140.000,00**	**1.318.879.886,00**	**3.072.809.873,00**	**8.073.822.713,39**	**1.004.075.427.670,56**

Penanganan Atas Ruas Jalan Lingkungan
Hasil Penelusuran pada 19 lokasi dari 74 lokasi

No	OPD	Tahun	Jenis Barang/Nama Barang	Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Harga	Penyusutan	Nilai Buku	Kondisi	Keterangan
1	Dinas PUPRKIM	2004	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000002	Kec. Karangasem	48.241.000,00	48.241.000,00	0,00	Kurang Baik	Jalan AspalLingkungan Jasri Kelod
2	Dinas PUPRKIM	2004	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000008	Kec. Karangasem	48.264.000,00	48.264.000,00	0,00	Kurang Baik	Jalan AspalDesa Tumbu
3	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000016	Kec. Karangasem	153.751.000,00	128.125.834,00	25.625.166,00	Kurang Baik	Pengadaaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Banjar Adat Jangga Mekar Kec. Karangasem
4	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000017	Kec. Karangasem	117.993.000,00	98.327.500,00	19.665.500,00	Kurang Baik	Pengadaaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Lingkungan Susuan Kel. Karangasem Kec. Karangasem
5	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000018	Kec. Karangasem	128.269.000,00	106.890.834,00	21.378.166,00	Kurang Baik	Pengadaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Kel. Karangasem Kec. Karangasem
6	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000019	Kec. Karangasem	174.520.000,00	145.433.334,00	29.086.666,00	Kurang Baik	Pengadaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Desa Bukit Kec. Karangasem
7	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000038	Kec. Karangasem	95.130.000,00	79.275.000,00	15.855.000,00	Kurang Baik	Pengadaaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Lingk. Gelumpang Kel. Karangasem Kec. Karangasem
8	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000043	Kec. Karangasem	47.486.000,00	39.571.666,00	7.914.334,00	Kurang Baik	Pengadaaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman Jl. Pertigaan Padangkerta menuju Pesimpangan Pura Agung Kel. Padangkerta Kec. Karangasem
9	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000054	Kec. Karangasem	195.510.000,00	162.925.000,00	32.585.000,00	Kurang Baik	Pengadaaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Linkungan Telaga Mas Kel. Subagan Kec. Karangasem
10	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000055	Kec. Karangasem	195.492.000,00	162.910.000,00	32.582.000,00	Kurang Baik	Pengadaaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Banjar Dinas Bugbug Samuh Desa Bugbug Kec. Karangasem
11	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000056	Kec. Karangasem	195.586.000,00	162.988.334,00	32.597.666,00	Kurang Baik	Pengadaaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Lingkungan Kertasari, Kel. Padangkerta Kec. Karangasem

No	OPD	Tahun	Jenis Barang/Nama Barang	Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Harga	Penyusutan	Nilai Buku	Kondisi	Keterangan
12	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000062	Kec. Karangasem	97.535.000,00	81.279.166,00	16.255.834,00	Kurang Baik	Pengadaaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Desa Seraya Barat Kec. Karangasem
13	Dinas PUPRKIM	2014	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000064	Kec. Karangasem	97.640.000,00	81.366.666,00	16.273.334,00	Kurang Baik	Pengadaaan Konstruksi Perbaikan Lingkungan Permukiman di Banjar Dinas Pejongan Ds. Seraya Tengah Kec. Karangasem
14	Dinas PUPRKIM	2016	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000070	Kec. Karangasem	671.046.000,00	447.364.000,00	223.682.000,00	Kurang Baik	Pengadaan konstruksi perbaikan lingkungan permukiman (penanganan kawasan kumuh) di Kelurahan Padangkerta (termasuk perencanaan + pengawasan)
15	Dinas PUPRKIM	2016	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000071	Kec. Karangasem	658.350.000,00	438.900.000,00	219.450.000,00	Kurang Baik	Pengadaan konstruksi perbaikan lingkungan permukiman (penanganan kawasan kumuh) di Kelurahan Karangasem (termasuk perencanaan + pengawasan)
16	Dinas PUPRKIM	2016	Jalan Khusus Kompleks	1.3.4.01.001.009.002	000072	Kec. Karangasem	773.620.000,00	515.746.668,00	257.873.332,00	Kurang Baik	Pengadaan konstruksi perbaikan lingkungan permukiman (penanganan kawasan kumuh) di Kelurahan Subagan (termasuk perencanaan + pengawasan)
17	Dinas PUPRKIM	2017	Jalan Desa Lain-lain	1.3.4.01.001.005.002	000001	Jalan Melingkar Belakang Pemda, Jln Lingku	851.842.000,00	496.907.835,00	354.934.165,00	Baik	Pembetonan dan Pemasangan Vaving
18	Dinas PUPRKIM	2018	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001	000002	Jln Ayodya dan Yoga Centre	574.160.000,00	259.169.442,00	314.990.558,00	Baik	Pemasangan Vaping dan Pembetonan Jalan Desa
19	Dinas PUPRKIM	2020	Jalan Desa Lain-lain	1.3.4.01.001.005.002	000002	Kecamatan Karangasem	198.652.730,00	51.042.715,00	147.610.015,00	Baik	Pembetonan Jalan Lingkungan
Jumlah							**5.323.087.730,00**	**3.554.728.994,00**	**1.768.358.736,00**		

DAFTAR ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang				Saldo per 31 Desember 2025
			Belanja Modal	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.904.985.458,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.904.985.458,78
2	Dinas Kesehatan	1.094.022.985,00	-	-	2.334.500,00	-	2.334.500,00	-	-	-	-	1.096.357.485,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.609.817.262,36	2.850.480.000,00	-	-	-	2.850.480.000,00	-	-	-	-	4.460.297.262,36
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.546.036.770.590,77	33.924.438.406,00	-	781.536.000,00	-	34.705.974.406,00	697.498.114,00	488.867.391,00	18.905.256,00	1.205.270.761,00	1.579.537.474.235,77
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14.782.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.782.600,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	57.111.393,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.111.393,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	637.679.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.679.940,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	116.096.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.096.080,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.949.120.898,00	510.694.154,15	14.512.908.745,00	-	-	15.023.602.899,15	-	-	-	-	18.972.723.797,15
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	128.868.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.868.600,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26.589.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.589.690,00
13	Dinas Perhubungan	36.475.867.346,26	835.235.903,00	-	728.860.000,00	-	1.564.095.903,00	-	-	-	-	38.039.963.249,26
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	179.499.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.499.600,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.065.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.065.000,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.033.815.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.033.815.916,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	274.199.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.199.980,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1.794.140.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.794.140.265,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	8.836.480.047,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.836.480.047,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	781.973.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781.973.550,00

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang				Saldo per 31 Desember 2025
			Belanja Modal	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
22	Badan Perencanaan Daerah	19.029.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.029.250,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	18.905.256,00	18.905.256,00	-	-	-	-	18.905.256,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.543.815.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.543.815.574,00
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57.356.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.356.950,00
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	28.846.600,00	49.888.950,00	-	-	-	49.888.950,00	-	-	-	-	78.735.550,00
27	Kecamatan Karangasem	769.268.135,00	143.856.000,00	-	-	-	143.856.000,00	-	-	-	-	913.124.135,00
28	Kecamatan Abang	16.153.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.153.450,00
29	Kecamatan Kubu	361.178.648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.178.648,00
30	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Selat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Rendang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Sidemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Manggis	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**1.637.758.035.809,17**	**38.314.593.413,15**	**14.512.908.745,00**	**1.512.730.500,00**	**18.905.256,00**	**54.359.137.914,15**	**697.498.114,00**	**488.867.391,00**	**18.905.256,00**	**1.205.270.761,00**	**1.690.911.902.962,32**

Lampiran 32

DAFTAR ASET TETAP ASET TETAP LAINNYA 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang			Saldo per 31 Desember 2025
			Belanja Modal	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Total Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	35.287.675.368,35	1.000.877.432,00	1.000.877.432,00	441.000,00	19.301.100,00	19.742.100,00	36.268.810.700,35
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.547.500,00	-	-	-	-	-	2.547.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.180.904.000,00	-	-	-	-	-	2.180.904.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	18.296.000,00	-	-	-	-	-	18.296.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	217.295.000,00	-	-	-	-	-	217.295.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	42.540.000,00	-	-	-	-	-	42.540.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang			Saldo per 31 Desember 2025
			Belanja Modal	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Total Mutasi Kurang	
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	604.225.000,00	-	-	-	-	-	604.225.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	597.524.598,00	-	-	-	-	-	597.524.598,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	236.790.000,00	-	-	-	-	-	236.790.000,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	664.855.671,00	-	-	-	-	-	664.855.671,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	727.197.840,00	95.516.610,00	95.516.610,00	-	-	-	822.714.450,00
22	Badan Perencanaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.150.000,00	-	-	-	-	-	7.150.000,00
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	1.965.000,00	-	-	-	-	-	1.965.000,00
27	Kecamatan Karangasem	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Abang	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
29	Kecamatan Kubu	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
30	Kecamatan Bebandem	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
31	Kecamatan Selat	12.950.000,00	-	-	-	-	-	12.950.000,00
32	Kecamatan Rendang	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
33	Kecamatan Sidemen	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
34	Kecamatan Manggis	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**40.667.915.977,35**	**1.096.394.042,00**	**1.096.394.042,00**	**441.000,00**	**19.301.100,00**	**19.742.100,00**	**41.744.567.919,35**

DAFTAR ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			Saldo per 31 Desember 2025
			Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Pelunasan Utang di Tahun 2025	Total Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.228.151.540,00	-	207.362.002,00	207.362.002,00	253.228.293,00	-	253.228.293,00	1.182.285.249,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	215.883.184,00	-	-	-	-	-	-	215.883.184,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.649.139.070,00	2.030.548.560,00	1.218.539.064,00	3.249.087.624,00	781.536.000,00	68.794.891,00	850.330.891,00	29.047.895.803,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.750.000,00	-	97.958.281,44	97.958.281,44	-	-	-	147.708.281,44
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	75.156.155,00	75.156.155,00	-	-	-	75.156.155,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	63.171.750,00	28.965.281,28	-	28.965.281,28	-	-	-	92.137.031,28
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	98.554.500,00	-	-	-	-	-	-	98.554.500,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	33.805.000,00	-	-	-	-	-	-	33.805.000,00

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			Saldo per 31 Desember 2025
			Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Pelunasan Utang di Tahun 2025	Total Mutasi Kurang	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	98.084.000,00	-	94.550.581,00	94.550.581,00	-	-	-	192.634.581,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	99.606.960,00	99.606.960,00	-	-	-	99.606.960,00
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Abang	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Selat	-	-	89.700.000,00	89.700.000,00	-	-	-	89.700.000,00
32	Kecamatan Rendang	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Sidemen	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Manggis	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**28.436.539.044,00**	**2.059.513.841,28**	**1.882.873.043,44**	**3.942.386.884,72**	**1.034.764.293,00**	**68.794.891,00**	**1.103.559.184,00**	**31.275.366.744,72**

Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem													
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bertingkat	Beton	1	jalan Ngurah Rai Amlapura	1/1/1900		12/31/2009	Tanah Hak Pakai	Pembelian	56.063.000,00	Perencanaan Gedung Kantor Camat
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1		Beton	1	JL Ngurah Rai Amlapura	1/1/1900		12/31/2009	Tanah Hak Pakai	Pembelian	32.278.000,00	Perencanaan Gedung Serba Guna
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Karangasem													
1	Televisi	1	Tidak	Tidak	-		12/31/2018		12/31/2018		Pembelian	9.743.000,00	videotron
Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem													
1	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	1	Tidak	Beton		Jl.Ngurah Rai No.31 Amlapura	12/18/2025	027/22/BAST/2025	12/18/2025		Pembelian	94.550.581,00	Penataan Lapangan Tanah Aron-Perencanaan
Kecamatan Selat													
1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	Tidak	Tidak			12/10/2025	027.2/468/Sekret/Kec. Selat	12/10/2025		Pembelian	89.700.000,00	Perencanaan Penataan Lapangan Umum Selat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		Beton		-	1/1/1900		1/2/2009		Pembelian	759.251.000,00	Perencanaan Gedung Civic Center (Serah Terima dari Bagian Perlengkapa)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Tidak	Beton		Lk. Padangkerta	8/12/2024	602.1/2123/CK/DPURKIM	8/12/2024		Pembelian	5.860.244.907,00	Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2023 dan 2024
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Tidak	Beton		Jalan Ngurah Rai Amlapura	11/14/2023	602.1/286/CK-DPUPRKIM	11/14/2023		Pembelian	99.733.500,00	Reviu DED Gedung XIII Civic Center untuk Perpustakaan Daerah
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Tidak	Beton		Lk. Padangkerta	8/12/2024	602.1/2123/CK/DPURKIM	8/12/2024		Pembelian	4.398.912.043,00	Pembangunan Wantilan Budaya Kabupaten Karangasem (tahun 2023 dan 2024)
5	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	1	Tidak	Beton		Kec. Abang	8/5/2024	602.1/2037/CK/DPURKIM	12/31/2024		Pembelian	6.205.751.035,00	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Krematorium Kec. Abang (BKK) Lanjutan
6	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1				Perempatan Subagan Jl. Ahmad Yani Amlapura	1/1/1900		1/4/2014		Pembelian	5.967.480,00	Pengadaan Konstruksi Taman di Perempatan Subagan
7	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/44/BM-DPU/2015	1/2/2015		Pembelian	49.813.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Bunutan - Cekik
8	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/48/BM-DPU/2015	1/2/2015		Pembelian	39.950.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Ruas Jalan Bugbug - Pantai Bugbug - Ruas Jalan Lingkar Timbrah
9	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/22/2017	602.1/1727/BM-DPU/2017	1/2/2017		Pembelian	49.467.000,00	Ruas Jalan Kusambi - Batu Pilpil (Kurang Bayar PHR Provinsi Bali)
10	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Manggis	4/5/2018	602.1/405/BM-DPUPR/2018	4/5/2018		Pembelian	49.846.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Pert. Nyuh Tebel - Tenganan Dauh Tukad
11	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	4/5/2018	602.1/398/BM-DPUPR/2018	4/5/2018		Pembelian	29.969.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Peselatan - Pantai 1
12	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	4/5/2018	602.1/399/BM-DPUPR/2018	4/5/2018		Pembelian	49.896.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Peselatan - Pantai 2
13	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Bebandem	4/5/2018	602.1/411/BM-DPUPR/2018	4/5/2018		Pembelian	49.918.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Kecicang - Bungaya
14	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Rendang	4/5/2018	602.1/403/BM-DPUPR/2018	4/5/2018		Pembelian	44.895.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Pempatan - Keladian
15	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Rendang	4/5/2018	602.1/416/BM-DPUPR/2018	4/5/2018		Pembelian	44.704.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Rendang - SMAN 1 Rendang
16	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Rendang dan Kec. Karangasem	4/5/2018	602.1/417/BM-DPUPR/2018	4/5/2018		Pembelian	49.850.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Rendang - Ulakan, Ruas Jalan Rendang - Pr. Puseh dan Ruas Jalan Jl. Nenas - Jl. Gunung Agung
17	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Manggis	9/5/2019	602.1/932/BM-DPUPR/2019	10/8/2019		Pembelian	24.898.000,00	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Lingkar Pesaban dan Ruas Jalan Pr. Dalem - Gegelang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
18	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Selat	7/31/2019	602.1/543/BM-DPUPR/2019	9/13/2019		Pembelian	69.465.000,00	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Duda - Padang Tunggal
19	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	8/27/2019	602.1/858/BM-DPUPR/2019	9/26/2019		Pembelian	49.775.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Belong - Tiying Jangkrik
20	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Manggis	7/31/2019	602.1/544/BM-DPUPR/2019	9/13/2019		Pembelian	59.862.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Tanah Ampo - Yeh Poh
21	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Manggis	9/6/2019	602.1/950/BM-DPUPR/2019	10/4/2019		Pembelian	49.779.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Sengkidu - Tenganan Dauh Tukad
22	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Sidemen	9/26/2019	602.1/1181/BM-DPUPR/2019	11/8/2009		Pembelian	59.889.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Taliheng - Kebung
23	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Kubu	11/11/2019	602.1/1654/BM-DPUPR/2019	12/10/2019		Pembelian	59.147.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Peiukung - Paleg
24	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Bebandem	11/11/2019	602.1/1656/BM-DPUPR/2019	12/10/2019		Pembelian	39.446.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Budakeling - Tanah Aron
25	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Rendang	11/5/2020	602.1/331/BM-DPUPR/2020	11/5/2020		Pembelian	49.500.000,00	Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Candu - Tukad Jinah - (APBD)
26	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		2 Lokasi	11/19/2020	602.1/548/BM-DPUPR/2020	11/19/2020		Pembelian	26.922.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Cucut - Munggal - (APBD)
27	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Selat	11/5/2020	602.1/337/BM-DPUPR/2020	11/5/2020		Pembelian	48.867.000,00	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Duda - Perangsari - (APBD)
28	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Sidemen	11/5/2020	602.1/338/BM-DPUPR/2020	11/5/2020		Pembelian	49.087.000,00	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Lebu - Talibeng - (APBD)
29	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Manggis	11/5/2020	602.1/340/BM-DPUPR/2020	11/5/2020		Pembelian	58.951.000,00	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ulakan - Abian Canang - (APBD)
30	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Rendang	11/19/2020	602.1/549/BM-DPUPR/2020	11/19/2020		Pembelian	59.779.000,00	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ban - Ban - (APBD)
31	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	11/5/2020	602.1/315/BM-DPUPR/2020	11/5/2020		Pembelian	79.816.000,00	Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Amlapura - Bias - (APBD)
32	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	11/3/2020	602.1/281/BM-DPUPR/2020	11/3/2020		Pembelian	69.842.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Batannyuh - Sadimara - (APBD)
33	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	11/13/2020	602.1/465/BM-DPUPR/2020	11/13/2020		Pembelian	49.670.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Tiying Jangkrik - Kebon - (APBD)
34	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Kubu	11/13/2020	602.1/467/BM-DPUPR/2020	11/13/2020		Pembelian	49.714.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Batu Giling - Batu Giling - (APBD)
35	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	11/3/2020	602.1/288/BM-DPUPR/2020	11/3/2020		Pembelian	99.834.000,00	Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Ujung - Nusut - (APBD)
36	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Bebandem	11/19/2020	602.1/550/BM-DPUPR/2020	11/19/2020		Pembelian	49.791.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Tihingan Kangin - Pakel - (APBD)
37	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Abang	11/5/2020	602.1/342/BM-DPUPR/2020	11/5/2020		Pembelian	49.944.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Tihingan Kangin - Liligundi - (APBD)
38	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Rendang	11/11/2020	602.1/433/BM-DPUPR/2020	11/11/2020		Pembelian	49.786.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Palak - Penghulu - (APBD)
39	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	11/11/2020	602.1/436/BM-DPUPR/2020	11/11/2020		Pembelian	49.742.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Tukad Buah - Tukad Tiis - (APBD)
40	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Rendang	11/11/2020	602.1/437/BM-DPUPR/2020	11/11/2020		Pembelian	49.879.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Rendang - Nongan - (APBD)
41	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Manggis	11/13/2020	602.1/468/BM-DPUPR/2020	11/13/2020		Pembelian	49.566.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Buitan-Selumbung - (APBD)
42	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Sidemen	11/16/2020	602.1/521/BM-DPUPR/2020	11/16/2020		Pembelian	49.874.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas Jalan Gegelang - Bukit Abah - (APBD)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
43	Jalan Kabupaten Lokal	2	Tidak	Tidak		Kec. Kubu	11/11/2020	602.1/435/BM-DPUPR/2020	11/11/2020		Pembelian	49.834.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruas JalanTianyar - Br. Ayu - (APBD)
44	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Bebandem	9/8/2021	619	9/8/2021		Pembelian	59.537.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Yeh Kori - Pasar Agung
45	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	8/12/2021	397	8/12/2021		Pembelian	98.053.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bungkulan - Serava Tengah
46	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	8/12/2021	395	8/12/2021		Pembelian	99.165.880,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tenten Badung - Kalanganyar
47	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Kubu	8/12/2021	399	8/12/2021		Pembelian	99.215.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Bonyoh - Pucang
48	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		kec. Manggis	8/12/2021	401	8/12/2021		Pembelian	99.215.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Abian Canang - Pateh
49	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Manggis	9/8/2021	623	9/8/2021		Pembelian	59.774.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Selumbung - Pr. Puseh
50	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Rendang	10/1/2021	831	10/1/2021		Pembelian	50.682.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Br. Bucu - Sibakan
51	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Rendang	10/1/2021	821	10/1/2021		Pembelian	55.670.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kiduling Kreteg - Junggul
52	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Sidemen	10/1/2021	826	10/1/2021		Pembelian	41.563.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Telaga Tawang - Tri Eka Buana, Ruas Jalan Laplapan - Bukit Buluh
53	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Sidemen	10/1/2021	833	10/1/2021		Pembelian	38.565.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Telun Wayah - Semawa
54	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Bebandem	10/1/2021	827	10/1/2021		Pembelian	42.717.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Dukuh - Sekargunung
55	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Bebandem	8/12/2021	398	8/12/2021		Pembelian	99.314.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Bebandem - Linggasana
56	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/31/2022	602.1/2988/BM/DPUPR/2022	10/31/2022		Pembelian	64.509.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan Ruas Jalan Budakeling - Tanah Arop
57	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/31/2022	602.1/2985/BM/DPUPR/2022	10/31/2022		Pembelian	64.553.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan Ruas Jalan Bunutan - Cekik
58	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/16/2022	602.1/3556/BM/DPUPR/2022	11/16/2022		Pembelian	49.662.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan Ruas Jalan Gulinten - Gitgit, Ruas Jalan Culik - Dalem Puri, Ruas Jalan Culik - Pr. Puseh
59	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/16/2022	602.1/3557/BM/DPUPR/2022	10/16/2022		Pembelian	39.774.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan Ruas Jalan Pert. Dausa - Dausa
60	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/31/2022	602.1/2993/BM/DPUPR/2022	10/31/2022		Pembelian	59.616.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan Ruas Jalan Taman Sari - Songan Ruas Jalan Paleg - Bangli
61	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/17/2022	602.1/3595/BM/DPUPR/2022	11/17/2022		Pembelian	49.019.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan Ruas Jalan Yeh Malet - Pesinggahan Ruas Jalan Br. Panggung - Yeh Malet

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
62	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/31/2022	602.1/2987/BM/DPUPR/2022	10/31/2022		Pembelian	54.603.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bale Bunder - Monet
63	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/31/2022	602.1/2992/BM/DPUPR/2022	10/31/2022		Pembelian	58.384.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bedugul - Cemara Tebel Ruas Jalan Padangbai - Labuan Amuk
64	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/17/2022	602.1/3597/BM/DPUPR/2022	10/17/2022		Pembelian	44.784.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kubakal-Bangli Ruas Langsat - Bedugul Ruas Jalan Singarata - Menanga
65	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/16/2022	602.1/3558/BM/DPUPR/2022	11/16/2022		Pembelian	34.701.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pert. Belong-Belong Ruas Jalan Tengading - Padangbai
66	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/31/2022	602.1/2990/BM/DPUPR/2022	10/31/2022		Pembelian	53.787.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pule - Kecing, Ruas Jalan Lebih - Telun Buana, Ruas Jalan Telun Buana - Badeg Dukuh
67	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2023	602.1/1344/PPK/BM/DPUPRKIM	11/27/2023		Pembelian	49.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Ruas Jalan Br. Kelodan - Br. Bingin
68	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2023	602.1/1345/PPK/BM/DPUPRKIM	11/27/2023		Pembelian	74.492.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Ruas Jalan Bunga - Bonyoh
69	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2023	602.1/1347/PPK/BM/DPUPRKIM	11/27/2023		Pembelian	94.610.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Ruas Jalan Griana Kangin-Perangsari
70	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2023	602.1/1316/PPK/BM/DPUPRKIM	11/27/2023		Pembelian	49.512.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Ruas Jalan Kombang - Nampo
71	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2023	602.1/1348/PPK/BM/DPUPRKIM	11/27/2023		Pembelian	49.551.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Ruas Jalan Lubuk Kutuh - Punggul
72	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2023	602.1/1317/PPK/BM/DPUPRKIM	11/27/2023		Pembelian	49.545.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Ruas Jalan Pert. Batusesa-Palak dan Ruas Jalan Palak-Pert. Kiduling Kreteg
73	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2023	602.1/1349/PPK/BM/DPUPRKIM	11/27/2023		Pembelian	99.501.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Ruas Jalan Pert. Kubakal-Kubakal
74	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/28/2023	602.1/1389/PPK/BM/DPUPRKIM	11/28/2023		Pembelian	99.309.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Ruas Jalan Sanghyangambu - Gumung
75	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2023	602.1/1352/PPK/BM/DPUPRKIM	11/27/2023		Pembelian	49.833.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Ruas Jalan Umaanyar - Butus dan Ruas Jalan Pert. Samuh - Samuh
76	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/14/2024	602.1/4522/BM/DPURKIM	11/14/2024		Pembelian	58.608.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Hyang Taluh - Guminten
77	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3537/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	58.755.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Lokasari-Umasiing
78	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/14/2024	602.1/4521/BM/DPURKIM	11/14/2024		Pembelian	54.390.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Muntig - Pule
79	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3534/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	58.752.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Pert. Padanggaji - Padanggaji
80	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/15/2024	602.1/4564/BM/DPURKIM	11/15/2024		Pembelian	54.548.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Rendang - Menanga
81	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3539/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	98.815.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Temakung - Bonyoh
82	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/14/2024	602.1/4511/BM/DPURKIM	11/14/2024		Pembelian	19.764.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Belong - Lingkar Ulakan Barat

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
83	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/14/2024	602.1/4511/BM/DPURKIM	11/14/2024		Pembelian	34.692.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Ulakan Timur - Bukit Nganta
84	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3538/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	62.598.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Bubung Lada - Tegal Lantang
85	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3538/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	13.842.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Penginyahan - Munti Desa
86	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3538/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	22.516.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Pert. Bhuana Kusuma - Candi Gehe
87	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/15/2024	602.1/4568/BM/DPURKIM	11/15/2024		Pembelian	28.487.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Dulup Sampih - Abang
88	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/15/2024	602.1/4568/BM/DPURKIM	11/15/2024		Pembelian	30.251.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Tianyar Barat - Maspait
89	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3535/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	11.120.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Nusu - Pr. Segara
90	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3535/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	47.163.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Pr. Beten Waru - Pr. Dalem
91	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3536/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	21.195.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Pr. Dalem Perasi - Pantai Lebah Perasi
92	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3536/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	37.573.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Klakah - Ababi
93	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/15/2024	602.1/4567/BM/DPURKIM	11/15/2024		Pembelian	23.504.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Setra Culik - Pr. Dalem
94	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/15/2024	602.1/4567/BM/DPURKIM	11/15/2024		Pembelian	35.212.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Babakan - Song Ngis
95	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/15/2024	602.1/4565/BM/DPURKIM	11/15/2024		Pembelian	25.692.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Taman Sari - Nusut
96	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/15/2024	602.1/4565/BM/DPURKIM	11/15/2024		Pembelian	28.856.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Lusuh Kangin - Muntig
97	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/28/2024	602.1/3865/BM/DPURKIM	10/28/2024		Pembelian	31.744.000,00	Perencanaan Teknis Trotoar dan Median Ruas Jalan Ciung Wanara
98	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3533/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	32.976.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Lingkar SMK Nasional
99	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/14/2024	602.1/3533/BM/DPURKIM	10/14/2024		Pembelian	25.307.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Tegalinggah - Tumbu
100	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2025	000.3.2/6007/BM/DPUPRKIM	11/27/2025		Pembelian	49.450.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Perangsari Kelod - Kalanganyar
101	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			12/3/2025	000.3.2/6185/BM/DPUPRKIM	12/3/2025		Pembelian	49.506.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Gegelang - Telengan
102	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/26/2025	000.3.2/5899/BM/DPUPRKIM	11/26/2025		Pembelian	49.506.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Sinduwati - Gitgit
103	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/26/2025	000.3.2/5898/BM/DPUPRKIM	11/26/2025		Pembelian	49.617.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Tista - Kutabali
104	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2025	000.3.2/6004/BM/DPUPRKIM	11/27/2025		Pembelian	49.677.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Aas - Bluu dan Ruas Jalan Sekargunung - Pr. Puseh Lingga Manik
105	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2025	000.3.2/6005/BM/DPUPRKIM	11/27/2025		Pembelian	74.433.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Tohpati - Liligundi
106	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/26/2025	000.3.2/5900/BM/DPUPRKIM	11/26/2025		Pembelian	74.469.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Mumbul - Pengadangan
107	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/27/2025	000.3.2/6006/BM/DPUPRKIM	11/27/2025		Pembelian	79.246.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Pidpid - Manosul
108	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/26/2025	000.3.2/5901/BM/DPUPRKIM	11/26/2025		Pembelian	79.476.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Pert. Kecag Baluno - Kecag Baluno
109	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/24/2025	000.3.2/4992/BM/DPUPRKIM	10/24/2025		Pembelian	89.372.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Sengkidu - Ngis
110	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/17/2025	000.3.2/4862/BM/DPUPRKIM	10/17/2025		Pembelian	98.346.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Br. Lebuh-Gulinten dan Ruas Jalan Antiga-Pesangkan
111	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/17/2025	000.3.2/4861/BM/DPUPRKIM	10/17/2025		Pembelian	98.568.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Lingkar Ulakan Barat
112	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/10/2025	000.3.2/5546/BM/DPUPRKIM	11/10/2025		Pembelian	99.026.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Ban - Darmaji

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
113	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/24/2025	000.3.2/4995/BM/DPUPRKIM	10/24/2025		Pembelian	99.084.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Jasri - BTN Nirmalasari dan Ruas Jalan Pert. Keladian - Keladian
114	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/24/2025	000.3.2/4994/BM/DPUPRKIM	10/24/2025		Pembelian	99.106.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Pemuunan - Juntal Kaja dan Ruas Jalan Bangbang Biaung - Griana Kauh
115	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/17/2025	000.3.2/4860/BM/DPUPRKIM	10/17/2025		Pembelian	99.123.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Manik Mas - Parkir Atas Besakih, Ruas Jalan Pempatan - Pr. Pajenengan, Ruas Jalan Margi Agung - Kiduling Kreteg dan Ruas Jalan Palak - Pert. Kiduling Kreteg
116	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/24/2025	000.3.2/4993/BM/DPUPRKIM	10/24/2025		Pembelian	99.231.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Parkir Kedundung - Buyan
117	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/17/2025	000.3.2/4859/BM/DPUPRKIM	10/17/2025		Pembelian	99.356.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Jalan Pilihan-Bukit Mangun
118	Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			5/5/2025	000.3.2/1048/BM/DPUPRKIM	6/2/2025		Pembelian	59.585.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (Rj. Pert. Paleg - Pr. Laga)
119	Jalan Desa	1	Tidak	Tidak		Kelurahan Karangasem	1/1/1900		6/30/2020		Pembelian	2.295.153,00	perencanaan PLP di Lingkungan Ampel
120	Jalan Desa	1	Tidak	Tidak		Kelurahan Subagan	1/1/1900		6/30/2020		Pembelian	27.331.215,00	Perencanaan PLP di Lingkungan Galiran Kaler dan Karangasokong
121	Jalan Desa	1	Tidak	Tidak		Kelurahan Padang Kerta	1/1/1900		6/30/2020		Pembelian	19.814.816,00	Lingkungan Kerta Sari
122	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/22/2017	602.1/1745/BM-DPU/2017	1/2/2017		Pembelian	49.900.000,00	Penggantian Boegh Duiker Tk. Sampe Hulu Ruas Jalan Bebandem - Pande Besi (Kurang Bayar PHR Provinsi Bali)
123	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/22/2017	602.1/1743/BM-DPU/2017	1/2/2017		Pembelian	49.566.000,00	Pembangunan Jembatan Tk. Perit Hulu Ruas Jalan Pert. Kecag Balung - Kecag Balung (Kurang Bayar PHR Provinsi Bali)
124	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/22/2017	602.1/1746/BM-DPU/2017	1/2/2017		Pembelian	49.896.000,00	Pembangunan Jembatan Tk. Kelungah Ruas Jalan Pert. Tebola - Klungah (Kurang Bayar PHR Provinsi Bali)
125	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	3/14/2018	602.1/102/BM-DPUPR/2018	3/14/2018		Pembelian	49.566.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan/Box Culvert Tk. Adeng Ruas Jalan Bungaya - Telaga Mas (Fisik Gagal Tender)
126	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Sidemen	9/17/2019	602.1/1066/BM-DPUPR/2019	10/17/2019		Pembelian	49.445.000,00	Konsultansi Perencanaan Penggantian Boegh Duiker Tk. Mencung Ruas Jalan Tangkup - Klungah
127	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Redang	9/17/2019	602.1/1067/BM-DPUPR/2019	10/17/2019		Pembelian	49.797.000,00	Konsultansi Perencanaan Penggantian Boegh Duiker Tk. Bangka Ruas Jalan Batusesa - Menanga
128	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Abang	7/31/2019	602.1/545/BM-DPUPR/2019	8/23/2019		Pembelian	49.313.000,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan/Box Culvert Tk. Canging Ruas Jalan Pasar Karang Anyar - Ambal Ambal
129	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Bebandem	8/23/2019	602.1/816/BM-DPUPR/2019	10/9/2019		Pembelian	98.844.000,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Tk. Galih Ruas Jalan Untalan - Galih
130	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	10/8/2019	602.1/1295/BM-DPUPR/2019	11/1/2019		Pembelian	49.868.000,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan/Box Culvert Tk. Tibu Dalem Ruas Jalan Pert. Kecag Balung - Kecag Balung
131	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Manggis	10/7/2019	602.1/1276/BM-DPUPR/2019	11/1/2019		Pembelian	49.874.000,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Tk. Belong Ruas Jalan Manggis - Yeh Poh

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
132	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Abang	9/24/2019	602.1/1162/BM-DPUPR/2019	10/22/2019		Pembelian	49.857.000,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan/Box Culvert Tk. Nangnang Ruas Jalan Tindih Datah - Muntig
133	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kec. Kubu	10/7/2019	602.1/1277/BM-DPUPR/2019	11/1/2019		Pembelian	49.566.000,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Tk. Luah 2 Ruas Jalan Tianyar Barat - Tegal Sari
134	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kabupaten Karangasem	11/28/2023	602.1/1383/PPK/BM/DPUPRKIM	11/28/2023		Pembelian	49.587.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jembatan Tukad Dalem Ruas Jalan Batusesa - Kesimpar
135	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/27/2023	602.1/1340/PPK/BM/DPUPRKIM	11/27/2023		Pembelian	49.688.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jembatan Tukad Eling Ruas Jalan Lubuk-Kutuh Punggul
136	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			11/28/2023	602.1/1384/PPK/BM/DPUPRKIM	11/28/2023		Pembelian	99.311.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jembatan Tukad Ketes Ruas Jalan Buyutan-Gulinten
137	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			10/24/2025	000.3.2/4991/BM/DPUPRKIM	10/24/2025		Pembelian	99.012.000,00	Perencanaan Teknis Jembatan Tukad Taksu Ruas Jalan Kemoning-Bhuana Kerta
138	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Tidak	Tidak			6/12/2025	000.3.2/1888/BM/DPUPRKIM	6/12/2025		Pembelian	99.134.000,00	Perencanaan Teknis Jembatan Tukad Nyuling Ruas Jalan Belong-Tiying Jangkrik
139	Bendung	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	4/20/2018	602.1/193/SDA/DPUPR/2018	4/20/2018		Pembelian	46.442.000,00	Perencanaan Bendung Di Alur Tukad Barak
140	Bendung	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	4/20/2018	602.1/197/SDA/DPUPR/2018	4/20/2018		Pembelian	49.951.000,00	Perencanaan Bendung pada Aliran Tukad Pati Pedih
141	Bendung	1	Tidak	Tidak		Kec. Sidemen	10/9/2019	702.1/705/PAKET-SDA/DPUPR/2019	12/7/2019		Pembelian	56.848.000,00	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi Bendung Sangkungan
142	Bendung	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	11/12/2019	602.1/912/PAKET-SDA/DPUPR/2019	12/26/2019		Pembelian	56.914.000,00	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bendung Satua
143	Bendung	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	11/12/2019	602.1/920/PAKET-SDA/DPUPR/2019	12/26/2019		Pembelian	57.103.000,00	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bendung Bukit dan Abian Sanghyang DI. Subagan VI
144	Bendung	1	Tidak	Tidak		Karangasem	10/25/2021	734	10/25/2021		Pembelian	58.900.000,00	Perenc. Bangunan Pelengkap Bendung Pesaban dan Bendung Dlod Sema (Jembatan Penyebrangan) Sub Keg. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab./ Kota
145	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/22/2017	602.1/275/SDA/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	45.760.000,00	Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi di Kecamatan Karangasem
146	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Tidak	Tidak		Kec. Abang	10/9/2019	602.1/706/PAKET-SDA/DPUPR/2019	12/7/2019		Pembelian	74.756.000,00	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi Tempek Nungnungan Bandem dan Tempek Kelaci Dulu Abang
147	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Tidak	Tidak			10/31/2024	602.1/4040/SDA/DPURKIM	10/31/2024		Pembelian	99.345.000,00	Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Karangasem
148	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Tidak	Tidak			11/24/2025	000.3.2/5807/SDA/DPUPRKIM	11/24/2025		Pembelian	48.762.000,00	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Babakan
149	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Tidak	Tidak			10/30/2025	000.3.2/5189/SDA/DPUPRKIM	10/30/2025		Pembelian	93.430.000,00	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Susuan Karangasem
150	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lain-lain (dst)	1	Tidak	Tidak			10/30/2025	000.3.2/5191/SDA/DPUPRKIM	12/31/2025		Pembelian	94.900.560,00	Pekerjaan Konsultansi Review DED Tukad Janga

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
151	Bangunan Pelimpah Banjir	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	5/22/2017	602.1/251/SDA/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	49.900.000,00	DED Tukad Batu Keseni
152	Bangunan Pelimpah Banjir	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	5/22/2017	602.1/252/SDA/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	49.920.000,00	DED Muara Tukad Nampo
153	Bangunan Pemecah Gelombang	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	4/20/2018	602.1/198/SDA/DPUPR/2018	4/20/2018		Pembelian	46.403.000,00	Perencanaan Penataan Tukad Embah Api Bungbung
154	Bangunan Pemecah Gelombang	2	Tidak	Tidak		Kec. Manggis	11/6/2020	602.1/310/SDA-DPUPR/2020	11/6/2020		Pembelian	69.696.000,00	Perencanaan Tanggul Pantai Pada Kuburan Tanah Ampo di Kecamatan Manggis
155	Waduk Penyimpanan Air Baku	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/234/TRBP-AM/DPU/2016	1/2/2016		Pembelian	49.886.000,00	Perencanaan Cubang Komunal di Kecamatan Karangasem, Abang dan Kubu
156	Waduk Penyimpanan Air Baku	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/662/SDA/DPU/2016	1/2/2016		Pembelian	75.864.000,00	Perencanaan Teknis Embung Bejug, Desa Tulamben Kecamatan Kubu
157	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900		1/2/2010		Pembelian	21.597.000,00	Perencanaan Teknis Prasarana Air Limbah *)
158	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/16/TRBP/DPU/2012	1/2/2012		Pembelian	37.515.000,00	Belanja jasa Perencanaan teknis Air Limbah Anaerobik dan Perpipaan
159	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	1	Tidak	Tidak		Kec. Karangasem	9/3/2018	602.1/33/PPL-AL-DPUPR/2018	9/3/2018		Pembelian	39.800.000,00	Penyusunan DED Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat - Pembangunan Tanki Septick setempat di Kec. Karangasem
160	Bangunan (Box) Culvert	1	Tidak	Tidak			10/28/2024	602.1/3866/BM/DPURKIM	10/28/2024		Pembelian	99.678.000,00	Perencanaan Teknis Jembatan/Box Culvert Tukad Membah Ruas Jalan Telengan - Panti
161	Bangunan (Box) Culvert	1	Tidak	Tidak			11/1/2024	602.1/4069/BM/DPURKIM	11/1/2024		Pembelian	99.671.000,00	Perencanaan Teknis Jembatan/Box Culvert Tukad Ogang Ruas Jalan Gitgit - Ogang
162	Bangunan (Box) Culvert	1	Tidak	Tidak			11/26/2025	000.3.2/5897/BM/DPUPRKIM	11/26/2025		Pembelian	49.506.000,00	Perencanaan Teknis Jembatan/ Box Culvert Tukad Kecicang Ruas Jalan Kecicang-Bungaya
163	Bangunan (Box) Culvert	1	Tidak	Tidak			11/27/2025	000.3.2/6003/BM/DPUPRKIM	11/27/2025		Pembelian	49.627.000,00	Perencanaan Teknis Jembatan/ Box Culvert Tukad Pati Hulu Ruas Jalan Budakeling - Kayuputih
164	Air Sumber/Mata Air Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kec. Bebandem	10/25/2021	602.1/731/PAKET-SDA/DPUPR/2021	10/25/2021		Pembelian	99.838.000,00	Perencanaan Mata Air Sukaluwih, Mata Air Kayehan Pakel, Mata Air Anakan Kelod, Mata Air Dedari Yeh Kori dan Mata Air Liligundi Bebandem
165	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	1	Tidak	Tidak		Kec. Rendang	5/21/2019	602.1/35/PPL-DPUPR/2019	7/18/2019		Pembelian	35.904.000,00	Perencanaan SPAM di Kec. Rendang
166	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	6/28/2019	602.1/62/PPL-DPUPR/2019	8/26/2019		Pembelian	49.813.500,00	Perencanaan Perluasan Jaringan Induk SPAM di Kabupaten Karangasem
167	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	1	Tidak	Tidak			11/8/2024	602.1/4326/CK/DPURKIM	11/8/2024		Pembelian	97.624.000,00	Pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM di Desa Pempatan Rendang
168	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/27/TRBP/DPU/2012	1/2/2012		Pembelian	17.766.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Paleg Kaja, Datah, Pempatan, Timbrah, Tengangan dan Kota Amlapura
169	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/350/TRBP/DPU/2012	1/2/2012		Pembelian	9.561.000,00	Pengawasan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Paleg Kaja, Datah, Pempatan, Timbrah, Tengangan dan Kota Amlapura
170	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/34/TRBP/DPU/2012	1/2/2012		Pembelian	49.373.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Ban, Sebudi dan Muntigunung
171	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/430/PP-TRBP/DPU/2012	1/2/2012		Pembelian	44.880.000,00	Perencanaan Konstrusk Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Telun Buana dan Desa Sega

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
172	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/431/PP-TRBP/DPU/2012	1/2/2012		Pembelian	44.890.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Desa Ban dan Desa Sibetan
173	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/451/TRBP/DPU/2014	1/2/2014		Pembelian	49.879.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Sukadana Kecamatan Kubu
174	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1//TRBP/DPU/2014	1/2/2014		Pembelian	49.868.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Kubu Kecamatan Kubu
175	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/232/TRBP-AM/DPU/2016	1/2/2016		Pembelian	49.884.000,00	Perencanaan Konst. Jaringan Air Bersih di Banjar Nusu, Desa Sukadana, Kec. Kubu
176	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/28/2017	602.1/199/PPL/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	39.792.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Duda Timur di Kecamatan Selat
177	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/28/2017	602.1/201/PPL/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	11.980.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Tri Eka Bhuana di Kecamatan Sidemen
178	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/27/2017	602.1/195/PPL/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	19.890.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Wangsean dan Talibeng di Kecamatan Sidemen
179	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/28/2017	602.1/203/PPL/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	49.940.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Telaga Mas, Pura Gumang, Jumenang dan Bukit Asah Kecamatan Karangasem
180	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/27/2017	602.1/198/PPL/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	49.895.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Kecamatan Manggis
181	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	11/28/2017	602.1/200/PPL/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	49.800.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Kecamatan Sidemen
182	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/01/PPL/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	49.839.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Kecamatan Bebandem
183	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/09/PPL/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	25.900.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Dusun Batu Dawa, Desa Tulamben
184	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	1/1/1900	602.1/07/PPL/DPUPR/2017	1/2/2017		Pembelian	31.900.000,00	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Datah, Nawa Kerti, Bhuana Giri dan Pempatan
185	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Kab. Karangasem	2/22/2018	602.1/07/PPL-AM-DPUPR/2018	2/22/2018		Pembelian	33.718.000,00	Jasa Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih (DAK)
186	Jaringan air minum lainnya	1	Tidak	Tidak			10/31/2025	000.3.2/5253/CK/DPUPRKIM	11/27/2025		Pembelian	89.602.530,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan jaringan SPAM di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu
187	Jaringan air minum lainnya	1	Tidak	Tidak			11/25/2025	000.3.2/5843/CK/DPUPRKIM	12/24/2025		Pembelian	89.602.530,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan jaringan SPAM di Desa Ban, Kecamatan Kubu
188	Jaringan air minum lainnya	1	Tidak	Tidak			11/25/2025	000.3.2/5858/CK/DPUPRKIM	12/24/2025		Pembelian	89.574.780,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan jaringan SPAM di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu
189	Jaringan air minum lainnya	1	Tidak	Tidak			11/25/2025	000.3.2/5863/CK/DPUPRKIM	12/24/2025		Pembelian	89.436.030,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan jaringan SPAM di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu
190	Jaringan air minum lainnya	1	Tidak	Tidak			11/25/2025	000.3.2/5873/CK/DPUPRKIM	12/24/2025		Pembelian	89.436.030,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan jaringan SPAM di Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu
191	Jaringan air minum lainnya	1	Tidak	Tidak			11/25/2025	000.3.2/5853/CK/DPUPRKIM	12/24/2025		Pembelian	79.964.222,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan jaringan SPAM di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu
192	Jaringan air minum lainnya	1	Tidak	Tidak			11/25/2025	000.3.2/5848/CK/DPUPRKIM	12/24/2025		Pembelian	79.957.562,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan jaringan SPAM di Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu
193	Jaringan air minum lainnya	1	Tidak	Tidak			11/25/2025	000.3.2/5868/CK/DPUPRKIM	12/24/2025		Pembelian	89.924.430,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan jaringan SPAM di Desa Kubu, Kecamatan Kubu
194	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		7/9/2018		7/9/2018		Pembelian	103.075.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
195	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		5/24/2018		5/24/2018		Pembelian	312.285.600,00	Belanja Jasa Konsultansi

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
196	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		4/27/2018		4/27/2018		Pembelian	48.850.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
197	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		4/27/2018		4/27/2018		Pembelian	49.550.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
198	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		4/27/2018		4/27/2018		Pembelian	49.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
199	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		4/27/2018		4/27/2018		Pembelian	49.300.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
200	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		4/27/2018		4/27/2018		Pembelian	48.975.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
201	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		4/27/2018		4/27/2018		Pembelian	49.644.000,00	Belanja Jasa Konsultansi
202	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		3/14/2018		3/14/2018		Pembelian	49.388.000,00	Update Database Jaringan Jalan
203	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	Tidak	Tidak	0		5/14/2018		5/14/2018		Pembelian	327.976.000,00	Penyusunan Database Aset Irigasi
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah													
1	Bangunan Rumah Sakit Umum	1	Bertingkat	Beton	600	Jln.Ngurah Rai Amlapura	1/1/1900		1/2/2012	Tanah Milik Pemda	Pembelian	136.235.446,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap KLS III
2	Bangunan Rumah Sakit Umum	1	Tidak			jln ngurah rai	1/1/1900		12/31/2018	Tanah Milik Pemda	Pembelian	19.976.000,00	rehab gedung Radiologi
3	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	1	Tidak	Beton		Jln Ngurah Rai Amlapura	12/3/2022	22	12/3/2022	Tanah Milik Pemda	Pembelian	11.962.692,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Perluasan Gedung Jenasah
4	Selasar	1	Tidak	Beton		Jln Ngurah Rai Amlapura	12/6/2022	222	12/6/2022	Tanah Milik Pemda	Pembelian	23.977.998,00	Jasa Konsultasi perencanaan pembangunan selasar
5	Pagar Permanen	1	Tidak	Beton		Jln Ngurah Rai Amlapura	11/12/2022		11/12/2022	Tanah Milik Pemda	Pembelian	11.800.048,00	Jasa Konsultasi perencanaan Rehabilitasi Pagar Pembatas Bagian Selatan
6	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1	Tidak	Tidak			11/24/2022		11/24/2022		Pembelian	11.931.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan jaringan IPAL
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga													
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton			1/1/1900		11/9/2020		Pembelian	7.378.360,00	Pembangunan Kamar Mandi SMPN 4 Bebandem
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton			1/1/1900		11/9/2020		Pembelian	23.848.550,00	Bangunan Gedung Tempat Kerja , Perencanaan SD
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton			1/1/1900		11/9/2020		Pembelian	39.694.600,00	Rehabilitasi sedang / berat Ruang Kelas SD Perencanaan Kec.Bebandem
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton			1/1/1900		11/9/2020		Pembelian	23.848.000,00	Rehabilitasi sedang / berat Ruang Kelas SD Perencanaan Kec.Selat ,
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton			1/1/1900		11/9/2020		Pembelian	23.611.500,00	Rehabilitasi sedang / berat Ruang Kelas SD Perencanaan Kec.Abang dan Bebandem
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton			1/1/1900		11/9/2020		Pembelian	30.937.500,00	Renovasi Rehabilitasi sedang / berat Ruang Kelas SD Perencanaan Kec Rendang
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton			1/1/1900		11/9/2020		Pembelian	81.367.000,00	Renovasi Rehabilitasi sedang / berat Ruang Kelas SD Perencanaan Kec Karangasem Manggis Kubu Sidemen
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/29/2023		Pembelian	29.625.900,00	Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Pembangunan Lapangan Tenis Indoor
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/31/2025		Pembelian	49.221.200,00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN ULTINITAS SEKOLAH
10	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/30/2022		Pembelian	19.655.325,00	Perencanaan DAK LAB SMP 2023
11	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/29/2023		Pembelian	12.843.800,00	Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Komputer SMPN 2 Bebandem
12	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/29/2023		Pembelian	12.816.000,00	Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Komputer SMPN 4 Amlapura

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
13	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/29/2023		Pembelian	12.816.000,00	Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Komputer SMPN 2 Manggis
14	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/31/2025		Pembelian	22.042.600,00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SMPN 1 SELAT
15	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		11/9/2020		Pembelian	23.397.000,00	Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah ,Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Sekolah SD , Perencanaan Kec Abang Bebandem Karangasem
16	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		11/9/2020		Pembelian	23.672.000,00	Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah ,Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Sekolah SD , Perencanaan Kec Kubu Rendang Manggis
17	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Tidak	Beton	1	smp 2 rendang	1/1/1900		1/2/2017	Tanah Hak Pakai	Pembelian	14.376.000,00	Perencanaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Bangunan Kamar Mandi (SMP N 3 Selat, SMP N 3 Bebandem, SMP N 1 Rendang, SMP N 4 Kubu, SMP N 2 Manggis)
18	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/30/2022		Pembelian	99.529.926,00	perencanaan RKB kec.rendang. Kec.Selat. Kec. Sidemen dan kec. Manggis
19	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/30/2022		Pembelian	99.529.926,00	Perencanaan RKB Kec. Kubu. Kec. Abang . Kec Karangasem dan Kec. bebanedem
20	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/30/2022		Pembelian	29.743.000,00	Perencanaan RKB 2023
21	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/30/2022		Pembelian	40.186.662,00	Perencanaan DAK PAUD 2023
22	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/29/2023		Pembelian	60.732.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Bebandem
23	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/31/2024		Pembelian	21.759.330,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU DED 2025
24	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/31/2025		Pembelian	48.294.400,00	PERENCANAAN RUANG KELAS BARU
25	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/30/2022		Pembelian	99.108.126,00	Perencanaan Stadion 2023
26	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/30/2022		Pembelian	24.495.702,00	Perencanaan Perpustakaan 2023
27	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/30/2022		Pembelian	84.275.640,00	Perencanaan DAK Toilet 2023
28	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/29/2023		Pembelian	35.675.400,00	Perencanaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Penataan Taman Jalan Lingkar Stadion
29	Pagar Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/31/2025		Pembelian	78.481.400,00	Perencanaan Pagar DED 2026 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TA. 2025
30	Pagar Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/31/2025		Pembelian	9.322.402,00	PERENCANAAN PAGAR untuk satap gegelang
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1				Jl. Ngurah Rai no 70 Amlapura	1/1/1900		1/2/2014	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.750.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan
2	Tugu Kemerdekaan	1				Lingkungan Karang Tohpati, Amlapura	12/22/2025	020/20/Dayapersos/DINSOSPPPA PPKB/2025	12/22/2025		Pembelian	97.958.281,44	Perencanaan Tugu Pahlawan Ciung Wanara

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi Bangunan				Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak	Keterangan
		Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M2)		Tanggal	Nomor					
Dinas Ketenagakerjaan													
1	Pagar Permanen	1	Tidak	Beton			11/10/2025	000.4/1203/Set/Disnaker	11/10/2025		Pembelian	75.156.155,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan													
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1		Beton		Subagan	1/1/1900		5/14/2020		Pembelian	98.554.500,00	DED Pasar Subagan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah													
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Tidak	Beton			12/31/2025		12/31/2025		Pembelian	99.606.960,00	
Dinas Lingkungan Hidup													
1	Taman Permanen	1	Tidak	Beton			1/1/1900		12/16/2025		Pembelian	28.965.281,28	
2	Tugu Peringatan Lainnya	1	Tidak	Beton	360	Jl. Veteran jalur 11	4/1/2019	027/1090/Bidang/DLH/2019	7/2/2019		Pembelian	54.725.000,00	taman kota dijalur 11
3	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	1	Tidak	Tidak		karangasem	12/31/2015	2015	12/31/2015		Pembelian	4.000.000,00	perencanaan pembuatan biogas
4	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	1	Tidak	Tidak		Karangasem	5/22/2019	027/608/Bid. III.2/DLH/2019	7/8/2019		Pembelian	4.446.750,00	Perencanaan pembuatan SUmur resapan dan Lubang biopori
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata													
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		Beton	1	jalan...	1/1/1900		12/31/2018	Tanah Hak Pakai	Pembelian	5.400.000,00	hasil kerja (DED)
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Bertingkat	Beton	200	jl. diponegoro	1/1/1900		1/2/2013		Pembelian	28.405.000,00	gedung

DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah					
			Beban Penyusutan	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Koreksi	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah
						Kurang Catat		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	367.765.921.338,49	38.859.175.967,20		-	-	-	38.859.175.967,20
2	Dinas Kesehatan	117.998.130.870,24	10.509.308.799,77	-	-	-	-	10.509.308.799,77
3	Rumah Sakit Umum Daerah	173.016.535.921,78	14.363.242.833,39	354.127.374,00	-	-	-	14.717.370.207,39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.226.255.639.729,18	60.625.512.083,76	-	-	-	-	60.625.512.083,76
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.710.340.768,00	395.197.721,00	-	-	-	-	395.197.721,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.210.968.753,00	740.385.547,00	-	-	-	-	740.385.547,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	6.574.993.221,40	267.306.271,00	-	-	-	-	267.306.271,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.649.363.310,00	585.714.505,00	-	-	-	-	585.714.505,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	4.819.433.190,00	217.521.458,00	-	-	-	-	217.521.458,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	19.919.139.740,00	3.574.428.236,00	10.233.514.863,00	-	-	-	13.807.943.099,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.024.292.568,00	445.271.543,00	-	-	-	-	445.271.543,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.300.180.324,00	125.902.937,00	-	-	-	-	125.902.937,00
13	Dinas Perhubungan	36.162.328.214,00	6.970.796.826,00	-	553.933.600,00	14.398.165,00	-	7.539.128.591,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.496.940.411,00	853.091.144,00	-	-	-	-	853.091.144,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	42.003.703.338,19	3.681.386.496,00	-	-	-	-	3.681.386.496,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.207.716.151,00	810.454.743,00	-	-	-	-	810.454.743,00

No	OPD	Mutasi Kurang								Saldo per 31 Desember 2025
		Pengakuan Extracomptabel	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Koreksi Lebih Catat	Penghapusan Tahun 2025	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		-	2.570.214.366,00	-	-	117.440.000,00	973.029.340,00	3.660.683.706,00	402.964.413.599,69
2	Dinas Kesehatan		-	-	-	-	542.772.827,00	-	542.772.827,00	127.964.666.843,01
3	Rumah Sakit Umum Daerah		-	155.601.364,00	-	-	-	-	155.601.364,00	187.578.304.765,17
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		-	46.620.000,00	-	-	-	532.183.008,00	578.803.008,00	1.286.302.348.804,94
5	Satuan Polisi Pamong Praja		-	4.125.000,00	-	-	-	-	4.125.000,00	4.101.413.489,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	349.997.334,00	-	-	-	-	349.997.334,00	6.601.356.966,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	6.842.299.492,40
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	12.235.077.815,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	79.863.576,00	-	-	-	-	79.863.576,00	4.957.091.072,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	986.313.106,00	-	-	-	-	986.313.106,00	32.740.769.733,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	6.469.564.111,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	92.499.036,00	-	-	-	-	92.499.036,00	3.333.584.225,00
13	Dinas Perhubungan	-	553.933.600,00	1.439.426.735,00	-	-	-	-	1.993.360.335,00	41.708.096.470,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	617.585.800,00	-	-	-	-	617.585.800,00	4.732.445.755,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	282.429.390,00	-	-	-	282.429.390,00	45.402.660.444,19
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	13.018.170.894,00

No	OPD	Saldo per 31 Desember 2024 Audited	Mutasi Tambah					
			Beban Penyusutan	Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Koreksi	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Tambah
						Kurang Catat		
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.418.091.655,00	1.691.032.912,00	-	-	3.826.302,00	-	1.694.859.214,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.344.302.835,00	742.317.848,00	-	-	-	-	742.317.848,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	28.005.543.889,00	1.376.342.213,00	-	-	-	-	1.376.342.213,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	45.721.839.963,00	2.513.417.717,00	-	-	-	251.384.857,00	2.764.802.574,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	27.464.040.157,00	1.864.184.104,00	-	-	-	-	1.864.184.104,00
22	Badan Perencanaan Daerah	3.002.295.054,00	218.407.272,00	-	-	-	-	218.407.272,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	503.822.428,00	79.449.402,00	-	-	-	532.183.008,00	611.632.410,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.871.601.673,00	826.696.272,00	-	-	-	-	826.696.272,00
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.397.935.858,00	137.797.531,00	-	-	-	-	137.797.531,00
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	2.442.937.036,00	250.297.085,00	-	-	185.833,00	-	250.482.918,00
27	Kecamatan Karangasem	4.231.744.132,00	431.476.702,00	-	-	-	-	431.476.702,00
28	Kecamatan Abang	1.779.723.480,00	181.390.809,00	-	-	-	70.037.180,00	251.427.989,00
29	Kecamatan Kubu	2.119.482.306,00	258.272.910,00	-	-	-	291.440.714,00	549.713.624,00
30	Kecamatan Bebandem	2.123.666.091,00	130.673.095,00	-	-	-	92.403.292,00	223.076.387,00
31	Kecamatan Selat	2.381.228.317,00	126.373.344,00	-	-	-	123.097.487,00	249.470.831,00
32	Kecamatan Rendang	1.429.670.876,00	83.486.675,00	-	-	-	106.640.186,00	190.126.861,00
33	Kecamatan Sidemen	2.132.369.647,00	166.971.356,00	-	-	-	126.852.388,00	293.823.744,00
34	Kecamatan Manggis	1.524.330.008,00	113.967.769,00	-	-	-	162.558.093,00	276.525.862,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.819.812.013,00	96.711.728,00	-	-	-	-	96.711.728,00
JUMLAH		**2.228.830.065.266,28**	**154.313.963.855,12**	**10.587.642.237,00**	**553.933.600,00**	**18.410.300,00**	**1.756.597.205,00**	**167.230.547.197,12**

No	OPD	Mutasi Kurang								Saldo per 31 Desember 2025
		Pengakuan Extracomptabel	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Koreksi Lebih Catat	Penghapusan Tahun 2025	Mutasi Antar OPD	Total Mutasi Kurang	
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	19.112.950.869,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	70.044.462,00	-	70.044.462,00	4.016.576.221,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-	-	329.517.000,00	-	-	59.385.697,00	-	388.902.697,00	28.992.983.405,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	285.175.967,00	-	-	70.560.000,00	-	355.735.967,00	48.130.906.570,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-	29.328.224.261,00
22	Badan Perencanaan Daerah	-	-	74.356.800,00	-	-	-	-	74.356.800,00	3.146.345.526,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	1.852.760,00	-	-	1.852.760,00	1.113.602.078,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	251.384.857,00	251.384.857,00	37.446.913.088,00
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	2.535.733.389,00
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-	2.693.419.954,00
27	Kecamatan Karangasem	-	-	206.540.600,00	-	-	-	-	206.540.600,00	4.456.680.234,00
28	Kecamatan Abang	-	-	6.545.000,00	-	-	-	-	6.545.000,00	2.024.606.469,00
29	Kecamatan Kubu	-	-	68.798.000,00	-	-	-	-	68.798.000,00	2.600.397.930,00
30	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	-	-	2.346.742.478,00
31	Kecamatan Selat	-	-	-	-	-	-	-	-	2.630.699.148,00
32	Kecamatan Rendang	-	-	-	-	-	-	-	-	1.619.797.737,00
33	Kecamatan Sidemen	-	-	55.594.250,00	-	-	-	-	55.594.250,00	2.370.599.141,00
34	Kecamatan Manggis	-	-	33.584.000,00	-	-	-	-	33.584.000,00	1.767.271.870,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	52.198.000,00	-	-	-	-	52.198.000,00	1.864.325.741,00
JUMLAH		**-**	**553.933.600,00**	**7.454.555.934,00**	**282.429.390,00**	**1.852.760,00**	**860.202.986,00**	**1.756.597.205,00**	**10.909.571.875,00**	**2.385.151.040.588,40**

KEMITRAAN PIHAK KETIGA PER 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Jenis Aset	Uraian	Nama Pengguna/Peminjam	Sumber Perolehan	umur ekonomis	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Waktu Pinjam Pakai (Tahun)	Batas Akhir Perjanjian	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa tanah ke KPU	I Nyoman Orta Susila / Kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab Karangasem	Pengadaan APBD	0	012/696/Perwat	01 April 2005	-	-	28.000.000,00	-	28.000.000,00
2	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa tanah ke Kementerian Agama	Drs. Ida Bagus Mastika, M. Fil. H / Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem	Pengadaan APBD	0	028/370/BPKAD/PBMD/Setda/2022 1614/Kk.18.05.1/KS.01.00/	22 Maret 2022	5	22 Maret 2027	243.200.000,00	-	243.200.000,00
3	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa tanah di balai benih udang ke Kementerian Kelauatan Perikanan	Wendy Tri Prabowo / Kepala Balai PIU2K Karangasem	Pengadaan APBD	0	523/2100/SET/DISTANPP/2025 B.1135/BPIU2K.K/KS.320/VI	21 Juli 2025	5	20 Juli 2030	23.396.323.000,00	-	23.396.323.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Antiga Kecamatan Manggis	I Wayan Madra Arsana, SE / Perbekel Antiga, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1146/Set/DPMD/Setda 032/740/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Gegelang Kecamatan Manggis	I Made Darmayasa / Perbekel Gegelang, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1140/Set/DPMD/Setda 032/911/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis	I Ketut Mertha / Perbekel Antiga Kelod, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1147/Set/DPMD/Setda 032/529/VII/AK/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	30.883.000,00	30.883.000,00	-
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Manggis Kecamatan Manggis	I Wayan Partika Suyasa, SH / Perbekel Manggis, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1137/Set/DPMD/Setda 032/134/VII/Umum/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Pesedahan Kecamatan Manggis	Ir. I Kadek Suyasa / Perbekel Pesedahan, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1136/Set/DPMD/Setda 032/303/Umum	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	30.883.000,00	30.883.000,00	-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tenganan Kecamatan Manggis	I Ketut Sudiastika / Perbekel Tenganan, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1143/Set/DPMD/Setda 032/100/DT/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis	Drs. I Ketut Suadnya, MM / Perbekel Nyuhtebel, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1139/Set/DPMD/Setda 032/593/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Selumbung Kecamatan Manggis	I Wayan Sudiarka / Perbekel Selumbung, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1138/Set/DPMD/Setda 032/440/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-

No	OPD	Jenis Aset	Uraian	Nama Pengguna/Peminjam	Sumber Perolehan	umur ekonomis	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Waktu Pinjam Pakai (Tahun)	Batas Akhir Perjanjian	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Padangbai Kecamatan Manggis	Ni Wayan Suparwati Surya Dewi / Perbekel Padangbai, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1142/Set/DPMD/Setda 032/309/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Ulakan Kecamatan Manggis	I Ketut Sumendra / Perbekel Ulakan, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1144/Set/DPMD/Setda 032/327/VII/DU/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Sengkidu Kecamatan Manggis	I Wayan Darpi, SH / Perbekel Sengkidu, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1141/Set/DPMD/Setda 032/278/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	30.883.000,00	30.883.000,00	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Ngis Kecamatan Manggis	I Ketut Catur Mertayasa / Perbekel Ngis, Kecamatan Manggis	Pengadaan APBD	10	032/1145/Set/DPMD/Setda 032/304/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Culik Kecamatan Abang	I Wayan Putu Sedana / Perbekel Culik, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1155/Set/DPMD/Setda 032/501/Umum	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Abang Kecamatan Abang	I Nyoman Sutirtayana, S.Pd / Perbekel Abang, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1162/Set/DPMD/Setda 032/280/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.417.500,00	15.417.500,00	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tribuana Kecamatan Abang	I Nyoman Kerti / Perbekel Tribuana, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1149/Set/DPMD/Setda 032/126/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	30.883.000,00	30.883.000,00	-
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Datah Kecamatan Abang	I Gede Subrata / Perbekel Datah, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1150/Set/DPMD/Setda 032/1253/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tista Kecamatan Abang	I Ketut Selamet Ariyasa / Perbekel Tista, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1151/Set/DPMD/Setda 032/221/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Purwa Kerthi Kecamatan Abang	I Nengah Suanda / Perbekel Purwa Kerthi, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1152/Set/DPMD/Setda 032/204/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Kertha Mandala Kecamatan Abang	I Made Oka Dharma Pranata, SH / Perbekel Kertha Mandala, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1153/Set/DPMD/Setda 032/919/KM/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-

No	OPD	Jenis Aset	Uraian	Nama Pengguna/Peminjam	Sumber Perolehan	umur ekonomis	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Waktu Pinjam Pakai (Tahun)	Batas Akhir Perjanjian	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Ababi Kecamatan Abang	I Wayan Siki, SH / Perbekel Ababi, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1154/Set/DPMD/Setda 032/455/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tiyingtali Kecamatan Abang	I Ketut Sunarda, S.Pd / Perbekel Tiyingtali, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1156/Set/DPMD/Setda 032/856/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Bunutan Kecamatan Abang	I Made Suparwata, SE / Perbekel Bunutan, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1157/Set/DPMD/Setda 032/155/Umum	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Labasari Kecamatan Abang	I Gede Nyoman Geria, S.Pd / Perbekel Labasari, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1158/Set/DPMD/Setda 032/547/LS/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Nawa Kerti Kecamatan Abang	I Komang Rici Sidarta Putra / Perbekel Nawa Kerti, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1159/Set/DPMD/Setda 032/626/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Pidpid Kecamatan Abang	I Wayan Gemuk / Perbekel Pidpid, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1160/Set/DPMD/Setda 032/254/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Kesimpar Kecamatan Abang	I Gede Intaran / Perbekel Kesimpar, Kecamatan Abang	Pengadaan APBD	10	032/1161/Set/DPMD/Setda 032/463/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Dukuh Kecamatan Kubu	I Gede Suarsana, SE / Perbekel Dukuh, Kecamatan Kubu	Pengadaan APBD	10	032/1188/Set/DPMD/Setda 032/451/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Baturinggit Kecamatan Kubu	I Gede Putu Telantik, SE / Perbekel Baturinggit, Kecamatan Kubu	Pengadaan APBD	10	032/1194/Set/DPMD/Setda 032/630/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tianyar Kecamatan Kubu	Drs. I Ketut Wija / Perbekel Tianyar , Kecamatan Kubu	Pengadaan APBD	10	032/1189/Set/DPMD/Setda 032/90/DT/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Ban Kecamatan Kubu	I Gede Tamu Sugiantara / Perbekel Ban, Kecamatan Kubu	Pengadaan APBD	10	032/1190/Set/DPMD/Setda 032/1361/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-

No	OPD	Jenis Aset	Uraian	Nama Pengguna/Peminjam	Sumber Perolehan	umur ekonomis	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Waktu Pinjam Pakai (Tahun)	Batas Akhir Perjanjian	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu	I Ketut Karya / Perbekel Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	Pengadaan APBD	10	032/1191/Set/DPMD/Setda 032/95/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu	I Ketut Ada / Perbekel Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu	Pengadaan APBD	10	032/1192/Set/DPMD/Setda 032/851/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tulamben Kecamatan Kubu	I Nyoman Pica / Perbekel Tulamben, Kecamatan Kubu	Pengadaan APBD	10	032/1193/Set/DPMD/Setda 032/1069/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Sukadana Kecamatan Kubu	I Gede Suardana / Perbekel Sukadana, Kecamatan Kubu	Pengadaan APBD	10	032/1195/Set/DPMD/Setda 032/765/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Kubu Kecamatan Kubu	I Gede Putu Ngurah Astawa / Perbekel Kubu, Kecamatan Kubu	Pengadaan APBD	10	032/1187/Set/DPMD/Setda 032/890/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem	I Made Pertu, SH / Perbekel Seraya Timur, Kecamatan Karangasem	Pengadaan APBD	10	032/1211/Set/DPMD/Setda 032/952.3/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Bukit Kecamatan Karangasem	Gusti Ngurah Widnyana / Perbekel Bukit, Kecamatan Karangasem	Pengadaan APBD	10	032/1207/Set/DPMD/Setda 032/551/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.510.000,00	15.510.000,00	-
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tegallinggah Kecamatan Karangasem	I Gede Sudiarsa / Perbekel Tegallinggah , Kecamatan Karangasem	Pengadaan APBD	10	032/1206/Set/DPMD/Setda 032/601/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.510.000,00	15.510.000,00	-
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	I Wayan Patra Suarsa / Perbekel Seraya Barat, Kecamatan Karangasem	Pengadaan APBD	10	032/1205/Set/DPMD/Setda 032/267/Umum	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.510.000,00	15.510.000,00	-
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Pertima Kecamatan Karangasem	Ni Gusti Ayu Biksuni, SH / Perbekel Pertima, Kecamatan Karangasem	Pengadaan APBD	10	032/1204/Set/DPMD/Setda 032/139/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.510.000,00	15.510.000,00	-
44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Seraya Kecamatan Karangasem	I Wayan Dandri / Perbekel Seraya , Kecamatan Karangasem	Pengadaan APBD	10	032/1210/Set/DPMD/Setda 032/203/Sry/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.510.000,00	15.510.000,00	-

No	OPD	Jenis Aset	Uraian	Nama Pengguna/Peminjam	Sumber Perolehan	umur ekonomis	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Waktu Pinjam Pakai (Tahun)	Batas Akhir Perjanjian	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tumbu Kecamatan Karangasem	Kadek Oki Lerianto / Perbekel Tumbu , Kecamatan Karangasem	Pengadaan APBD	10	032/1209/Set/DPMD/Setda 032/766/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.510.000,00	15.510.000,00	-
46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	I Gede Diatmaja, S.Sn / Perbekel Bugbug, Kecamatan Karangasem	Pengadaan APBD	10	032/1208/Set/DPMD/Setda 032/140/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.510.000,00	15.510.000,00	-
47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Nongan Kecamatan Rendang	I Wayan Daging, S.TP / Perbekel Nongan, Kecamatan Rendang	Pengadaan APBD	10	032/1173/Set/DPMD/Setda 032/381/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Besakih Kecamatan Rendang	I Wayan Benya / Perbekel Besakih, Kecamatan Rendang	Pengadaan APBD	10	032/1172/Set/DPMD/Setda 032/883/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Pesaban Kecamatan Rendang	I Gede Widiasa / Perbekel Pesaban, Kecamatan Rendang	Pengadaan APBD	10	032/1171/Set/DPMD/Setda 032/326/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Menanga Kecamatan Rendang	I Made Hendra Sagita, SE / Perbekel Menanga, Kecamatan Rendang	Pengadaan APBD	10	032/1174/Set/DPMD/Setda 032/618/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Rendang Kecamatan Rendang	I Nengah Kariasa, SE / Perbekel Rendang, Kecamatan Rendang	Pengadaan APBD	10	032/1175/Set/DPMD/Setda 032/1015/Rd/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Pempatan Kecamatan Rendang	I Nengah Suta / Perbekel Pempatan, Kecamatan Rendang	Pengadaan APBD	10	032/1176/Set/DPMD/Setda 032/1217/PMP/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Telagatawang Kecamatan Sidemen	I Komang Muja Arsana, S.Pd / Perbekel Telagatawang, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1179/Set/DPMD/Setda 032/340/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Sidemen Kecamatan Sidemen	I Komang Putra / Perbekel Sidemen, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1177/Set/DPMD/Setda 032/605/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	I Made Sumendra / Perbekel Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1178/Set/DPMD/Setda 032/701/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-

No	OPD	Jenis Aset	Uraian	Nama Pengguna/Peminjam	Sumber Perolehan	umur ekonomis	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Waktu Pinjam Pakai (Tahun)	Batas Akhir Perjanjian	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen	I Ketut Alit Eka Yustadi, SH / Perbekel Kertha Buana, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1183/Set/DPMD/Setda 032/325/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Wisma Kerta Kecamatan Sidemen	I Wayan Suyasa / Perbekel Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1181/Set/DPMD/Setda 032/351/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	30.883.000,00	30.883.000,00	-
58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Talibeng Kecamatan Sidemen	I Ketut Mudiasa / Perbekel Talibeng, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1180/Set/DPMD/Setda 032/344/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Lokasari Kecamatan Sidemen	I Nengah Sukerta / Perbekel Lokasari, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1185/Set/DPMD/Setda 032/428/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tangkup Kecamatan Sidemen	I Gede Sukarnadita / Perbekel Tangkup, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1186/Set/DPMD/Setda 032/419/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.417.500,00	15.417.500,00	-
61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Tri Eka Buana Kecamatan Sidemen	I Gede Artayasa, S.Pd / Perbekel Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1182/Set/DPMD/Setda 032/263/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen	I Nengah Rumana, SH / Perbekel Sinduwati, Kecamatan Sidemen	Pengadaan APBD	10	032/1184/Set/DPMD/Setda 032/504/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Selat Kecamatan Selat	I Gusti Ngurah Oka / Perbekel Selat, Kecamatan Selat	Pengadaan APBD	10	032/1202/Set/DPMD/Setda 032/465/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Amerta Bhuana Kecamatan Selat	I Wayan Seriasa / Perbekel Amerta Bhuana, Kecamatan Selat	Pengadaan APBD	10	032/1196/Set/DPMD/Setda 032/542/AB/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	30.883.000,00	30.883.000,00	-
65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Pering Sari Kecamatan Selat	I Wayan Bawa / Perbekel Pering Sari, Kecamatan Selat	Pengadaan APBD	10	032/1197/Set/DPMD/Setda 032/870/Um	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Muncan Kecamatan Selat	I Wayan Tunas, S.M / Perbekel Muncan, Kecamatan Selat	Pengadaan APBD	10	032/1198/Set/DPMD/Setda 032/984/MC/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-

No	OPD	Jenis Aset	Uraian	Nama Pengguna/Peminjam	Sumber Perolehan	umur ekonomis	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Waktu Pinjam Pakai (Tahun)	Batas Akhir Perjanjian	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Sebudi Kecamatan Selat	I Nyoman Tinggal / Perbekel Sebudi, Kecamatan Selat	Pengadaan APBD	10	032/1199/Set/DPMD/Setda 032/822/Sebudi/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Duda Timur Kecamatan Selat	I Gede Pawana, S.Ag.M.Fil.H / Perbekel Duda Timur, Kecamatan Selat	Pengadaan APBD	10	032/1200/Set/DPMD/Setda 032/840/DT/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Duda Utara Kecamatan Selat	I Wayan Suarman, SE / Perbekel Duda Utara, Kecamatan Selat	Pengadaan APBD	10	032/1201/Set/DPMD/Setda 032/219/DU/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Duda Kecamatan Selat	I Wayan Dulur / Perbekel Duda , Kecamatan Selat	Pengadaan APBD	10	032/1203/Set/DPMD/Setda 032/723/Dd/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.417.500,00	15.417.500,00	-
71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	I Gede Partadana, S.H / Perbekel Bebandem, Kecamatan Bebandem	Pengadaan APBD	10	032/1163/Set/DPMD/Setda 032/398/BBD/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Bungaya Kecamatan Bebandem	I Made Putra Darmayasa / Perbekel Bungaya, Kecamatan Bebandem	Pengadaan APBD	10	032/1164/Set/DPMD/Setda 032/573/BNY/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Sibetan Kecamatan Bebandem	I Made Beru Suryawan / Perbekel Sibetan, Kecamatan Bebandem	Pengadaan APBD	10	032/1165/Set/DPMD/Setda 032/876/SBT/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Macang Kecamatan Bebandem	Ni Putu Dewi Suryanti, SH / Perbekel Macang, Kecamatan Bebandem	Pengadaan APBD	10	032/1166/Set/DPMD/Setda 032/186/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	30.883.000,00	30.883.000,00	-
75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Budakeling Kecamatan Bebandem	Ida Nyoman Adi Permana, S.Pd / Perbekel Budakeling, Kecamatan Bebandem	Pengadaan APBD	10	032/1167/Set/DPMD/Setda 032/396/Bdk/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Jungutan Kecamatan Bebandem	I Wayan Wastika / Perbekel Jungutan, Kecamatan Bebandem	Pengadaan APBD	10	032/1168/Set/DPMD/Setda 032/962/Jung/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem	Irfan Ardiansyah, Lc / Perbekel Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem	Pengadaan APBD	10	032/1169/Set/DPMD/Setda 032/139/BK/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-

No	OPD	Jenis Aset	Uraian	Nama Pengguna/Peminjam	Sumber Perolehan	umur ekonomis	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Waktu Pinjam Pakai (Tahun)	Batas Akhir Perjanjian	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Desa Bhuana Giri Kecamatan Bebandem	Ir. I Nengah Diarsa / Perbekel Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem	Pengadaan APBD	10	032/1170/Set/DPMD/Setda 032/691/BG/VII/2023	31 Juli 2023	5	31 Juli 2028	15.441.500,00	15.441.500,00	-
79	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kantor BNNK	Tri Kuncoro, S.E., M.H / Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Karangasem	Pengadaan APBD	10	028/524/Pol.PP/2024 SPK/09/VIII/KA/LG.03.02/2024/BNNK	14 Agustus 2024	5	14 Agustus 2029	211.000.000,00	126.600.000,00	84.400.000,00
80	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kantor BNNK	Tri Kuncoro, S.E., M.H / Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Karangasem	Pengadaan APBD	5	028/524/Pol.PP/2024 SPK/09/VIII/KA/LG.03.02/2024/BNNK	14 Agustus 2024	5	14 Agustus 2029	58.620.000,00	46.896.000,00	11.724.000,00
81	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kantor Bawaslu	I Putu Gede Suastrawan, S.T / Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Karangasem	Pengadaan APBD	5	028/1731/BPKAD/Setda	1 Nopember 2019	-	-	11.600.000,00	11.600.000,00	-
82	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem	Joko Budi Darmawan, SH., MH / Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem	Pengadaan APBD	10	028/2439/Perlk./Setda	4 September 2019	5	4 September 2024	249.700.000,00	199.760.000,00	49.940.000,00
83	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem	Dr. Endang Tirtana, SH.,MH / Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem	Pengadaan APBD	10	028/908/UM./Setda	13 April 2023	5	9 Januari 2028	455.260.000,00	182.104.000,00	273.156.000,00
84	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem	Dr. Endang Tirtana, SH.,MH / Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem	Pengadaan APBD	5	028/907/UM./Setda	13 April 2023	5	9 Januari 2028	318.783.437,00	255.026.754,00	63.756.683,00
85	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kantor Pengadilan Negeri Karangasem	Ronny Widodo, SH.,MH / Ketua Pengadilan Negeri Amlapura	Pengadaan APBD	5	028/1336/Umum/Setda	5 Juni 2023	5	5 Juni 2028	152.350.000,00	121.880.000,00	30.470.000,00
86	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kantor Pengadilan Negeri Karangasem	I Wayan Suarta, SH.MH / Ketua Pengadilan Negeri Amlapura	Pengadaan APBD	10	028/389/Um/Setda/2021	2 Maret 2021	-	-	287.000.000,00	148.283.333,00	138.716.667,00
87	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kodim 1623/ Karangasem	Letnan Kolonel Inf. Sutikno, S,M / Komandan Kodim 1623/Karangasem	Pengadaan APBD	10	028/1042/Umum/Setda	4 Mei 2023	5	9 Januari 2028	232.650.000,00	93.060.000,00	139.590.000,00
88	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa peralatan dan mesin ke Kodim 1623/ Karangasem	Benny Rahadian, S.E / Komandan Kodim 1623/Wira Satya Karangasem	Pengadaan APBD	5	028/2481/Perlk./Setda	9 Agustus 2018	-	-	8.624.000,00	4.886.934,00	3.737.066,00

No	OPD	Jenis Aset	Uraian	Nama Pengguna/Peminjam	Sumber Perolehan	umur ekonomis	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Waktu Pinjam Pakai (Tahun)	Batas Akhir Perjanjian	Nilai Perolehan	Nilai Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
89	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa Gedung dan Bangunan ke Kantor BNNK	Tri Kuncoro, S.E., M.H / Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Karangasem	Pengadaan APBD	25	028/524/Pol.PP/2024 SPK/09/VIII/KA/LG.03.02/2024/BNNK	14 Agustus 2024	5	14 Agustus 2029	166.059.000,00	44.155.000,00	121.904.000,00
90	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa Gedung dan Bangunan ke KPU	I Nyoman Orta Susila / Kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab Karangasem	Pengadaan APBD	25	012/696/Perwat	01 April 2005	-	-	70.200.000,00	44.928.000,00	25.272.000,00
91	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Aset Lainnya	Pemanfaatan bentuk pinjam pakai berupa Gedung dan Bangunan ke Kantor Bawaslu	I Putu Gede Suastrawan, S.T / Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Karangasem	Pengadaan APBD	25	028/1731/BPKAD/Setda	1 Nopember 2019	-	-	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00
JUMLAH											**27.355.979.937,00**	**2.665.790.521,00**	**24.690.189.416,00**

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD PER 31 DESEMBER 2025

No	OPD	ASET TIDAK BERWUJUD					
		Jenis Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Penyusutan	Total Penyusutan	Nilai Buku
a	b	c	d	e	f	g	h = e - g
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Software	2023	83.177.850,00	16.635.570,00	36.043.735,00	47.134.115,00
		Software	2023	49.750.200,00	9.950.040,00	20.729.250,00	29.020.950,00
2	Dinas Kesehatan	Software	2021	10.000.000,00	2.291.667,00	10.000.000,00	-
		Software	2021	58.003.000,00	13.292.354,00	58.003.000,00	-
		Software	2023	88.467.000,00	17.693.400,00	36.861.250,00	51.605.750,00
	UPTD Puskesmas Rendang	Software	2021	4.500.000,00	937.500,00	4.500.000,00	-
		Software	2021	1.500.000,00	312.500,00	1.500.000,00	-
	UPTD Lab Kesehatan	Software	2022	6.000.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00	2.200.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Software	2023	294.150.000,00	58.830.000,00	122.562.500,00	171.587.500,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Software	2019	18.800.000,00	-	18.800.000,00	-
5	Dinas Perhubungan	Software	2020	122.100.000,00	6.105.000,00	122.100.000,00	-
		Software	2025	19.647.000,00	654.900,00	654.900,00	18.992.100,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Software	2022	25.000.000,00	5.000.000,00	16.250.000,00	8.750.000,00
		Software	2021	42.700.000,00	8.540.000,00	37.006.667,00	5.693.333,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Software	2023	23.600.000,00	4.720.000,00	11.406.667,00	12.193.333,00
		Software	2024	69.850.000,00	13.970.000,00	16.298.333,00	53.551.667,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Software	2019	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
		Software	2024	180.000.000,00	36.000.000,00	42.000.000,00	138.000.000,00
		Software	2024	80.000.000,00	16.000.000,00	18.666.667,00	61.333.333,00
		Software	2024	150.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	115.000.000,00
		Software	2024	277.500.000,00	55.500.000,00	64.750.000,00	212.750.000,00
9	Kecamatan Karangasem						
	Kelurahan Karangasem	Software	2022	20.000.000,00	4.000.000,00	12.333.333,00	7.666.667,00
		Software	2023	15.000.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
	Kelurahan Subagan	Software	2021	24.000.000,00	4.800.000,00	22.400.000,00	1.600.000,00
		Software	2024	19.000.000,00	3.800.000,00	5.700.000,00	13.300.000,00
Jumlah				**1.727.745.050,00**	**313.232.931,00**	**768.866.302,00**	**958.878.748,00**

DAFTAR ASET TETAP DALAM KONDISI RUSAK BERAT 31 DESEMBER 2025

No	OPD	Jenis Aset Lain Lain											
		Peralatan dan Mesin						Gedung dan Bangunan					
		Saldo awal 2024	Mutasi Tambah		Mutasi kurang		Saldo Akhir 2025	Saldo awal 2024	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2025
			reklas dari aset tetap	mutasi antar OPD	Penghapusan 2025	mutasi antar OPD			reklas dari aset tetap	mutasi antar OPD	Penghapusan 2025	mutasi antar OPD	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	30.780.688.455,98	1.960.752.753,00	-	-	-	32.741.441.208,98	11.272.396.332,07	959.885.825,00	-	446.174.713,05	-	11.786.107.444,02
2	Dinas Kesehatan	11.830.536.845,22	-	-	-	-	11.830.536.845,22	934.365.402,08	-	-	-	-	934.365.402,08
3	Rumah Sakit Umum Daerah	33.249.662.171,80	164.612.832,00	-	5.987.824.586,00	-	27.426.450.417,80	75.542.500,00	-	-	-	-	75.542.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.520.859.586,00	46.620.000,00	-	-	3.410.000,00	1.564.069.586,00	59.000.000,00	-	-	-	-	59.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	80.336.410,00	4.125.000,00	-	-	-	84.461.410,00	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	501.814.059,36	350.304.000,00	-	-	-	852.118.059,36	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	445.594.127,00	-	-	-	-	445.594.127,00	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.332.325.954,80	-	-	-	-	1.332.325.954,80	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Ketenagakerjaan	404.829.333,00	79.863.576,00	-	-	-	484.692.909,00	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.048.855.818,77	1.024.323.106,00	-	-	-	4.073.178.924,77	1.305.329.127,00	-	-	-	-	1.305.329.127,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	747.728.800,00	-	-	-	-	747.728.800,00	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	243.594.133,00	92.499.036,00	-	-	-	336.093.169,00	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	4.572.653.584,97	1.439.426.735,00	-	-	-	6.012.080.319,97	531.157.914,00	-	-	-	-	531.157.914,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	697.441.493,00	768.562.600,00	-	-	-	1.466.004.093,00	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	351.966.587,00	-	-	-	-	351.966.587,00	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	973.779.331,00	-	-	-	-	973.779.331,00	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	529.302.860,00	-	-	-	-	529.302.860,00	1.130.690.000,00	-	-	1.000.690.000,00	-	130.000.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	341.053.050,00	-	-	-	-	341.053.050,00	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1.630.448.755,00	329.517.000,00	-	-	-	1.959.965.755,00	739.173.400,00	-	-	-	-	739.173.400,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	4.313.049.337,00	288.756.400,00	-	-	-	4.601.805.737,00	363.974.500,00	-	-	-	2.500.000,00	361.474.500,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	1.002.452.050,00	-	-	-	-	1.002.452.050,00	-	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan Daerah	1.295.471.865,00	74.356.800,00	-	-	-	1.369.828.665,00	-	-	-	-	-	-

No	OPD	Jenis Aset Lain Lain												Nilai Buku
		Jalan, Jaringan dan Irigasi			Aset Tetap Lainnya			Akumulasi Penyusutan						
		Saldo awal 2024	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Saldo awal 2024	Mutasi Tambah	Saldo Akhir 2025	Saldo awal 2024	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2025	
			Penghapusan			reklas dari aset tetap			reklas dari aset tetap	mutasi antar OPD	Penghapusan 2025	mutasi antar OPD		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.364.000,00	-	1.364.000,00	9.534.685.194,71	19.301.100,00	9.553.986.294,71	40.190.699.362,04	2.570.214.366,00	-	410.985.139,00	-	42.349.928.589,04	11.732.970.358,67
2	Dinas Kesehatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	12.200.426.620,22	-	-	-	-	12.200.426.620,22	565.475.627,08
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	5.499.000,00	-	5.499.000,00	33.242.234.295,00	155.601.364,00	-	5.987.624.169,00	-	27.410.211.490,00	97.280.427,80
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.332.257.200,00	1.245.948.000,00	13.086.309.200,00	-	-	-	12.638.024.121,67	46.620.000,00	-	1.069.124.500,00	3.410.000,00	11.612.109.621,67	3.097.269.164,33
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	211.041.000,00	-	211.041.000,00	78.047.661,00	4.125.000,00	-	-	-	82.172.661,00	213.329.749,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	501.814.059,36	349.997.334,00	-	-	-	851.811.393,36	306.666,00
7	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	432.423.279,00	-	-	-	-	432.423.279,00	13.170.848,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	1.329.618.455,80	-	-	-	-	1.329.618.455,80	2.707.499,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	404.268.917,00	79.863.576,00	-	-	-	484.132.493,00	560.416,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.965.000,00	-	9.965.000,00	-	-	-	3.394.916.139,00	986.313.106,00	-	-	-	4.381.229.245,00	1.007.243.806,77
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	747.596.085,00	-	-	-	-	747.596.085,00	132.715,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	243.485.800,00	92.499.036,00	-	-	-	335.984.836,00	108.333,00
13	Dinas Perhubungan	463.000.000,00	-	463.000.000,00	-	-	-	4.532.316.525,97	1.439.426.735,00	-	-	-	5.971.743.260,97	1.034.494.973,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	697.441.493,00	617.585.800,00	-	-	-	1.315.027.293,00	150.976.800,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	345.508.337,00	-	-	-	-	345.508.337,00	6.458.250,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.925.000,00	-	3.925.000,00	166.466.000,00	-	166.466.000,00	963.622.925,00	-	-	-	-	963.622.925,00	180.547.406,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	488.049.000,00	-	488.049.000,00	77.014.000,00	-	77.014.000,00	1.665.326.982,00	-	-	682.162.100,00	-	983.164.882,00	241.200.978,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	9.416.350,00	-	9.416.350,00	339.923.883,00	-	-	-	-	339.923.883,00	10.545.517,00
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1.400.705.850,00	-	1.400.705.850,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	3.106.254.600,00	329.517.000,00	-	-	-	3.435.771.600,00	668.073.405,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	37.705.000,00	-	37.705.000,00	4.616.870.523,00	285.175.967,00	-	-	1.991.667,00	4.900.054.823,00	100.930.414,00
21	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	998.003.237,00	-	-	-	-	998.003.237,00	4.448.813,00
22	Badan Perencanaan Daerah	-	-	-	51.850.000,00	-	51.850.000,00	1.295.260.399,00	74.356.800,00	-	-	-	1.369.617.199,00	52.061.466,00

No	OPD	Jenis Aset Lain Lain											
		Peralatan dan Mesin						Gedung dan Bangunan					
		Saldo awal 2024	Mutasi Tambah		Mutasi kurang		Saldo Akhir 2025	Saldo awal 2024	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2025
			reklas dari aset tetap	mutasi antar OPD	Penghapusan 2025	mutasi antar OPD			reklas dari aset tetap	mutasi antar OPD	Penghapusan 2025	mutasi antar OPD	
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	3.410.000,00	-	-	3.410.000,00	-	-	-	-	-	-
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	880.904.516,00	-	-	-	-	880.904.516,00	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00	-	-
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	312.367.400,00	-	-	-	-	312.367.400,00	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	432.730.650,00	-	-	-	-	432.730.650,00	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Karangasem	237.154.855,00	208.225.600,00	-	-	-	445.380.455,00	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Abang	146.285.000,00	6.545.000,00	-	-	-	152.830.000,00	111.820.000,00	-	-	111.820.000,00	-	-
29	Kecamatan Kubu	178.595.800,00	74.198.000,00	-	-	-	252.793.800,00	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Bebandem	140.178.250,00	-	-	-	-	140.178.250,00	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
31	Kecamatan Selat	75.480.000,00	-	-	-	-	75.480.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
32	Kecamatan Rendang	147.713.000,00	-	-	-	-	147.713.000,00	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Sidemen	56.007.861,00	55.594.250,00	-	-	-	111.602.111,00	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Manggis	112.059.916,00	33.584.000,00	-	-	-	145.643.916,00	-	-	-	-	-	-
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.279.923.525,00	52.198.000,00	-	-	-	1.332.121.525,00	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**103.893.845.380,90**	**7.054.064.688,00**	**3.410.000,00**	**5.987.824.586,00**	**3.410.000,00**	**104.960.085.482,90**	**16.539.949.175,15**	**959.885.825,00**	**2.500.000,00**	**1.572.684.713,05**	**2.500.000,00**	**15.927.150.287,10**

No	OPD	Jenis Aset Lain Lain												Nilai Buku
		Jalan, Jaringan dan Irigasi			Aset Tetap Lainnya			Akumulasi Penyusutan						
		Saldo awal 2024	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Saldo awal 2024	Mutasi Tambah	Saldo Akhir 2025	Saldo awal 2024	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2025	
			Penghapusan			reklas dari aset tetap			reklas dari aset tetap	mutasi antar OPD	Penghapusan 2025	mutasi antar OPD		
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	3.410.000,00	-	-	3.410.000,00	-
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	883.388.682,00	-	-	9.473.333,00	-	873.915.349,00	6.989.167,00
25	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	309.913.483,00	-	-	-	-	309.913.483,00	2.453.917,00
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-	-	-	-	-	424.855.733,00	-	-	-	-	424.855.733,00	7.874.917,00
27	Kecamatan Karangasem	-	-	-	-	-	-	236.296.855,00	206.540.600,00	-	-	-	442.837.455,00	2.543.000,00
28	Kecamatan Abang	-	-	-	-	-	-	224.478.349,00	6.545.000,00	-	80.010.933,00	-	151.012.416,00	1.817.584,00
29	Kecamatan Kubu	-	-	-	-	-	-	177.555.800,00	68.798.000,00	-	-	-	246.353.800,00	6.440.000,00
30	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	142.183.458,00	-	-	-	-	142.183.458,00	494.792,00
31	Kecamatan Selat	-	-	-	-	-	-	75.480.000,00	-	1.991.667,00	-	-	77.471.667,00	508.333,00
32	Kecamatan Rendang	-	-	-	-	-	-	147.604.668,00	-	-	-	-	147.604.668,00	108.332,00
33	Kecamatan Sidemen	-	-	-	-	-	-	56.007.861,00	55.594.250,00	-	-	-	111.602.111,00	-
34	Kecamatan Manggis	-	-	-	-	-	-	112.059.916,00	33.584.000,00	-	-	-	145.643.916,00	-
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.279.923.525,00	52.198.000,00	-	-	-	1.332.121.525,00	3.000.000,00
	Jumlah	**16.700.266.050,00**	**1.245.948.000,00**	**15.454.318.050,00**	**10.100.676.544,71**	**19.301.100,00**	**10.119.977.644,71**	**128.033.832.030,06**	**7.454.555.934,00**	**5.401.667,00**	**8.239.380.174,00**	**5.401.667,00**	**127.249.007.790,06**	**19.212.523.674,65**

Daftar Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Alamat	Saldo 31 Des 2024	Ketetapan	Pelunasan	Saldo 31 Des 2025
a	b	c	d	e	f	g	h = e + f - g
A.	**Piutang Pajak Hotel**						
	Bintang 5						
1	Hotel Amankila	10001154.04.02	Manggis	306.149.536,00	-	-	306.149.536,00
	Bintang 3						
1	Hotel Alila	10003323.04.02	Buitan	157.174.268,77	-	-	157.174.268,77
2	Hotel Tulamben Bali	10005022.05.08	Tulamben	61.603.203,45	-	-	61.603.203,45
	Melati 3						
1	Candidasa BB	10000003.01.04	Candidasa	110.659.759,00	-	-	110.659.759,00
2	Balina BB	10000017.04.02	Buitan	135.615.259,58	-	-	135.615.259,58
3	Hotel Bali Samudra	10000785.04.07	Nyuhtebel	34.832.605,00	-	-	34.832.605,00
	Melati 1						
1	Home Stay Pandawa	10000026.01.04	Candidasa	4.215.740,00	-	-	4.215.740,00
2	Serikandi Beach	10000336.01.04	Candidasa	275.325,00	-	-	275.325,00
3	Villa Amlapura	10006447.01.01	Amlapura	500,00	-	-	500,00
Jumlah Piutang Pajak Hotel				**810.526.196,80**	**-**	**-**	**810.526.196,80**
B.	**Piutang Pajak Restoran**						
	Restoran						
1	Rest. Hawai	20000107.01.04	Candidasa	748.800,00	-	-	748.800,00
2	Bar Bir Garden	20000696.01.04	Candidasa	799.200,00	-	-	799.200,00
3	Ciao Restaurant	20001138.01.04	Candidasa	5.747.406,00	-	-	5.747.406,00
4	Rest. Srikandi	20001288.01.04	Candidasa	597.787,50	-	-	597.787,50
5	Rest. Prima Bambu	20001307.03.02	Ababi	12.708.018,00	-	-	12.708.018,00
6	Rest. Taman Tirta	20001327.08.01	Menanga	47.966.720,64	-	-	47.966.720,64
7	Rest. Sumber Rasa	20001331.01.01	Amlapura	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00
8	Rest Bukit Jambul/ Green Hills	20002958.08.06	Pesaban	31.907.207,50	-	-	31.907.207,50
	Warung/Rumah Makan						
1	W R. Nym. Sudana	20000074.01.02	Subagan	302.400,00	-	-	302.400,00
2	W R. Samsudin	20000096.01.01	Amlapura	450.000,00	-	-	450.000,00
3	W R. Saparua II	20000335.01.02	Subagan	466.800,00	-	-	466.800,00
4	W R. Ni Wayan Putu	20000672.03.02	Tirta Gangga	117.000,00	-	-	117.000,00
5	W R. Jawa Timur	20001139.01.02	Subagan	828.000,00	-	-	828.000,00
6	W R. Yulia	20001140.01.01	Amlapura	549.000,00	-	-	549.000,00
	Cafe						
1	Tirtagangga Cafe	20001125.03.02	Tirta Gangga	750.000,00	-	-	750.000,00
Jumlah Piutang Restoran				**105.688.339,64**	**-**	**-**	**105.688.339,64**
C.	**Piutang Pajak Air Tanah**						
1	Hotel Amankila	8000.7698.03.08	Manggis	4.328.000,00	-	-	4.328.000,00
2	Candi Beach Cottage	8000.7702.04.07	Nyuh Tebel	5.689.200,00	-	-	5.689.200,00
3	Hotel Candidasa Beach II	8000.7737.01.04	Candidasa	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00
Jumlah Piutang Pajak Air Tanah				**24.417.200,00**	**-**	**-**	**24.417.200,00**
Total Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan				**940.631.736,44**	**-**	**-**	**940.631.736,44**

Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Tahun 2025

No	OPD	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Nilai Kekurangan Volume	Keterangan
A	**Kekurangan Volume Aset Lainnya (Aset Tetap yang Tidak**				
I	**Tahun 2024**				
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penataan Halaman SDN 1 Amerta Buana	179.227.500,00	2.385.000,00	STS Kasda tanggal 23 mei 2025
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 1 Datah	347.919.500,00	2.378.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 2 Baturinggit	287.874.800,00	2.854.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 2 Kerta Buana	282.956.800,00	2.930.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 2 Sangkan Gunung	342.990.000,00	9.516.000,00	STS Kasda tanggal 21 mei 2025
6	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 2 Sebudi	291.018.000,00	5.536.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 3 Bunutan	282.790.000,00	10.355.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 4 Nongan	328.200.000,00	2.389.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 4 Tianyar	288.844.700,00	3.127.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 5 Jungutan	328.118.000,00	12.750.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 6 Bunutan	292.847.400,00	2.456.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 6 Datah	285.282.300,00	561.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehab Ruang Kelas SDN 6 Duda Timur	361.000.000,00	2.631.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Selat	413.997.600,00	8.245.000,00	STS Kasda tanggal 20 mei 2025
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Bungaya-Bebandem	1.383.162.000,00	54.193.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jungutan-Tihingan	1.888.686.000,00	81.449.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Karanganyar-Yeh Kori	7.320.620.000,00	307.387.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Dukuh Gunung Sari-Bhuana Kusuma	2.971.715.000,00	51.455.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pert. Manggis-Pesangkan	6.987.474.000,00	269.860.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025

No	OPD	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Nilai Kekurangan Volume	Keterangan
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Puragai-Pule	1.898.659.000,00	223.850.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Teki-Panglege	3.136.000.000,00	45.312.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pert. Pidpid-Klakah	1.397.959.000,00	4.573.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Penginyahan-Celagi (Lanjutan)	2.344.917.000,00	352.716.000,00	STS Kasda tanggal 26 mei 2025
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	6.738.426.801,00	41.081.000,00	STS Kasda tanggal 21 mei 2025
	Jumlah		**40.380.685.401,00**	**1.499.989.000,00**	
II	**Tahun 2025**				
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Manggis	732.242.000,00	5.410.708,39	
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Toilet TK Negeri 1 Manggis		461.760,76	
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMPN 3 Amlapura	628.193.990,00	6.290.831,31	
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMPN Tianyar Barat	459.360.700,00	5.678.315,00	
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 3 Tenganan	391.451.800,00	5.777.759,00	
6	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Radiologi untuk Ruang CT-Scan	427.973.000,00	6.972.247,35	
7	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi (Belanja Modal Pembangunan Gedung Instalasi Listrik Lainnya (Cubicle Listrik dan Genset)	288.721.000,00	2.496.418,22	
8	UPTD Puskesmas Sidemen	Pemeliharaan Gedung Pustu Lokasari	548.920.000,00	12.743.454,00	
9	UPTD Rumah Sakit Pratama	Belanja Modal Pagar (Pembangunan Pagar)	981.306.000,00	41.591.419,99	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Wantilan Kantor Camat Abang (Lanjutan)	647.027.000,00	28.979.055,61	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Bungaya – Bebandem	1.582.849.000,00	62.809.148,00	
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tangkup - Klungah	1.571.609.000,00	105.825.355,00	
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Padang Tunggal – Pr. Taman Sari	1.564.729.000,00	115.104.165,00	

No	OPD	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Nilai Kekurangan Volume	Keterangan
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Purasana – Teki	2.642.405.000,00	35.439.093,00	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Batuampin – Kombang	1.569.195.000,00	25.331.018,00	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Dlundungan – Asti	1.555.728.000,00	17.275.450,00	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Alas Ngandang – Gunggung	2.302.913.000,00	127.083.162,00	
18	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	657.004.198,69	6.870.280,32	
Jumlah			**18.551.627.688,69**	**612.139.640,95**	
B	**Kekurangan Volume Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**				
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kesehatan RSUD Karangasem	496.402.647,00	5.535.000,00	STS Kas BLUD RSUD tanggal 20 Mei 2025
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Paket Konsolidasi Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem (BKK) dan Pekerjaan Pembangunan Wantilan Budaya Kabupaten Karangasem (BKK)	6.270.924.000,00	21.966.000,00	STS Kasda tanggal 28 Mei 2025
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Krematorium Kec. Abang (BKK)	4.149.895.000,00	12.854.000,00	STS Kasda tanggal 28 Mei 2025
Jumlah			**10.917.221.647,00**	**40.355.000,00**	

Daftar Deposito Uang Jaminan Reklamasi Yang Masih Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Karangasem

No	Nama	Alamat	Tanggal Bilyet	Nomor Bilyet	Nilai Bilyet yang Masih Dikuasai	Nilai Bilyet yang Sudah Dicairkan
1	I Ketut Dastra	Dharmawinangun,Tianyar, Kubu	5/6/1999	01.03426-6	2.500.000,00	-
2	I Nyoman Wira	Bukit, Sukadana, Kubu	5/6/1999	01.03426-6	2.500.000,00	-
3	I Wayan Putu Gde Artawa.SE	Dharmawinangun, Tianyar,Kubu	5/6/1999	01.03426-6	1.250.000,00	-
4	I Nyoman Mangku	Bukit, Sukadana, Kubu	6/24/1999	01.03671-3	2.500.000,00	-
5	I Wayan Karsi	Lebih, Sebudi, Selat	9/3/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
6	I Nengah Astawa		9/3/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
7	I Wayan Sumerta	Pura, Sebudi, Selat	9/3/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
8	Wy.Tusan Darsana	Lebah, Sukadana, Kubu	9/3/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
9	Drs.I Ketut Giri	Dukuh, Kubu	9/3/1999	01.03944-0	2.500.000,00	-
10	I N.Tedun Pandetra		10/11/2000	01.04377-8	2.500.000,00	-
11	I Komang Sumerati	Cucut, Ban, Kubu	6/6/2001	01.04502-7	2.500.000,00	-
12	I Nengah Subali	Eka Adnyana, Tianyar, Kubu	6/6/2001	01.04502-7	2.500.000,00	-
13	I Gede Somantapa	Lebah, Sukadana, Kubu	3/21/2002	0104730-9	-	2.500.000,00
14	I Made Mustika Sari	Umanyar, ababi, Abang	6/10/2002	0104784-1	2.500.000,00	-
15	I Wayan Surem	Telungbhuana, Sebudi, Selat	1/24/2002	0104677-9	2.500.000,00	-
16	I Gusti Lanang Putu	Badeg Kelodan, Sebudi, Selat	5/7/2002	01.04769-3	2.500.000,00	-
17	I Komang Degdeg	Pura, Sebudi, Selat	6/24/2002	01.04805-3	2.500.000,00	-
18	Putu Sutrepti	Bukit, Sukadana, Kubu	7/16/2002	01.04817-1	5.000.000,00	-
19	I Made Swadiaya	Nangka, Bhuana Giri, Bebandem	8/7/2003	01.05097-7	-	2.500.000,00
20	I Gede Beleleng	Eka Adnyana, Tianyar, Kubu	6/10/2004	01.05277-9	2.500.000,00	-
21	Ir.I Made Palayuta	Kesimpar, Besakih, Rendang	8/5/2004	01.05310-3	10.000.000,00	-
22	I Nyoman Sidia	Badeg tengah, Sebudi, Selat	9/24/2004	01.05337-0	5.000.000,00	-
23	I Nengah Tunas	Dinas Bukit, Sukadana, Kubu	11/11/2004	01.05359-1	2.500.000,00	-
24	Gusti Sudiarta	Badeg Tengah, Sebudi, Selat	12/20/2004	01.05374-7	7.500.000,00	-
25	I Wayan Karsi	Lebih, Sebudi, Selat	1/3/2005	01.05375-9	5.000.000,00	-
26	I Made Suparta Yasa	Badeg Tunggal, Sebudi, Selat	4/13/2005	03.0105410-7	7.500.000,00	-
27	Putu Budi Harijane	Yeha, Sebudi, Selat	5/10/2005	01.05420-1	7.500.000,00	-
28	I Nyoman Gede	Badeg Kelodan, Sebudi, Selat	5/16/2005	01.05422-3	10.000.000,00	-
29	I Ketut Buleleng	Ban, Ban, Kubu	5/23/2005	01.05404-0	1.250.000,00	-
30	I Nengah Sumardi SE	Liligundi, Bebandem	5/30/2005	01.05425-9	10.000.000,00	-
31	I Made Mustika Sari	Butus, Bhuana Giri, Bebandem	5/31/2005	01.05426-1	7.500.000,00	-
32	A.A.Ketut Sutrisna	Telung Bhuana, Sebudi, Selat	7/11/2005	01.05436-7	10.000.000,00	-
33		Pura, Sebudi, Selat	7/19/2005	01.05442-9	5.000.000,00	-
34	I Komang Degdeg	Pura, Sebudi, Selat	7/19/2005	01.05443-1	5.000.000,00	-
35	I Wayan Kusuma Jaya	Lebih, Sebudi, Selat	7/22/2005	01.05446-6	7.500.000,00	-
36	I Nyoman Sidia	Badeg tengah, Sebudi, Selat	10/19/2005	01.05486-7	2.500.000,00	-
37	I Wayan Prasa	Telung Bhuana, Sebudi, Selat	12/2/2005	03.0100009-3	8.000.000,00	-
38	I Komang Geria	Untalan, Jungutan, Bebandem	3/22/2006	030100059-8	8.000.000,00	-
39	I Nengah Sumardi,SE	Kreteg, Bebandem, Bebandem	5/25/2006	030100089-7	4.000.000,00	-
40	I Nyoman Ririg	Panek, Ban, Kubu	9/13/2006	030100152-8	2.500.000,00	-
41	I Nengah Subrata(Campuhan)	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	2/15/2007	030100213-2	-	5.000.000,00
42	I Made Trisnawati	Yeha, Sebudi, Selat	8/16/2007	030100291-2	10.000.000,00	-
43	I Nyoman Warta	Lebih, Sebudi, Selat	10/2/2007	03.0100316-2	10.000.000,00	-
44	I Ketut Dayuh	Batu Dawe, Tulamben, Kubu	10/29/2007	030100322-7	-	10.000.000,00
45	I GB Wahyu Diatmika		1/15/2009	030100517-2	49.914.950,00	-

46	Ir. I Ketut Wiadnya	Kubu	9/9/2009	030100606-0	49.914.950,00	-
47	I Gusti AR Pirawana	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	12/3/2009	030100666-9	3.750.000,00	-
48	I Gede Sandi	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	12/3/2009	03.0100665-7	1.250.000,00	-
49	I Komang Dudun	Bukit, Sukadana, Kubu	12/3/2009	03.0100664-5	2.500.000,00	-
50	I Nengah Sari	Nusu, Sukadana, Kubu	12/3/2009	03.0100663-3	2.500.000,00	-
51	I Gede Ardana	Muntig, Tulamben, Kubu	12/3/2009	03.0100662-0	2.500.000,00	-
52	I Nyoman Jangkrik	Bukit Paon, Bhuana Giri, Bebandem	12/1/2010	03.0100875-8	-	49.914.950,00
53	I Komang Degdeg	Pura, Sebudi, Selat	2/8/2011	03.0100932-4	49.914.950,00	-
54	I Gusti Made Tusan	Bhuana Giri, Bebandem	5/30/2011	03.0100993-4	-	49.914.950,00
55	CV Suas Karya	Batudawe, Kubu	11/8/2011	03.01.01096-9	-	49.914.950,00
56	PT Teguh Karya Raharjo	Nusu, Sukadana, Kubu	2/29/2012	03.01.01178-0	49.914.950,00	-
57	I Nengah Subrata (Campuhan)	Dharmawinangun, Tianyar, Kubu	5/2/2012	03.01.01204-6	-	44.914.950,00
58	I Ketut Wirata	Sebudi, Selat	6/10/2012	03.01.01205-8	49.914.950,00	-
59	I Nengah Darma	Tukad yeh sah, Rendang	7/5/2012	03.01.01242-4	-	49.914.950,00
60	I Komang Wirawan	Kubu	10/2/2012	03.01.01281-4 / 03.01.01717-5	-	49.914.950,00
61	I Ketut Ardika (Zero)	Dharmawinangun, Kubu	10/16/2012	03.01.01291-7	-	49.914.950,00
62	PT. Surya Mas Jaya Raya	Kubu	4/24/2013	03.01.01397-3	49.914.950,00	-
63	I Gede Ariana (Catur Karya)	Kubu	6/24/2013	03.01.01422-6	-	49.914.950,00
64	Nyoman Mangku (Sari Bumi)	Sukadana, Kubu	7/4/2013	03.01.01428-8	-	49.914.950,00
65	I Gede Rida	Kubu	9/30/2013	03.01.01453-7	49.914.950,00	-
66	I Kdk Armawa (Alam Bumi D)	Sukadana, Kubu	11/6/2013	03.01.01461-6	49.914.950,00	-
	A.A Lanang Ag Ananda				-	-
67	Anurata I	Kubu	3/3/2014	03.01.01443-4	49.914.950,00	-
	(I Nyoman Munia Dana)				-	-
68	I Nengah Subrata (Tukad Batang Sari)	Kubu	3/5/2014	03.01.01445-8	-	49.914.950,00
69	I Nyoman Suastika Dwiyana RBC	Kubu	3/5/2014	03.01.01446-1	-	49.914.950,00
70	I Gede Agung Suparwata,SH	Kubu	3/5/2014	03.01.01447-2	-	49.914.950,00
71	I Made Sudarsana (anom jaya)	Kubu	5/26/2014	03.01.01467-8	-	49.914.950,00
72	I Kadek Budiarta (mahendra Stone)	Kubu	5/26/2014	03.01.01468-1 / 03.01.01714-9	49.914.950,00	-
73	I Gusti Made Tusan (DBK)	Bebandem	7/2/2014	03.01.01712- 5	49.914.950,00	-
74	I Nengah Subrata (Soma Ribek)	BD Darmawinangun, tianyar,kubu	7/8/2014	03.01.01477-0	-	49.914.950,00
75	I Gst Ag Bgs Oka Wisnawa (wayan suarta)	BD Pejeng, Rendang	7/8/2014	03.01.01476-9 / 03.01.01713-7	49.914.950,00	-
76	I Nyoman Arya (Pasir Rejeki)	BD. Mekar sari, Desa Sukadana, Kubu	7/14/2014	03.01.01478-3	-	49.914.950,00
77	I Gede Mangku Surata (alam bumi mandiri)	Kubu	7/23/2014	03.01.01479-5	-	49.914.950,00
78	I Nengah Birit (Arsa Bhuana Manunggal (ABM)	Bebandem	9/2/2014	03.01.01488-6	-	49.914.950,00
79	I Nyoman Mangku Lebih	Kubu	9/5/2014	03.01.01490-3/03.01.01716-3	49.914.950,00	-
80	I Made Gara (Roy CS)	Kubu	10/22/2014	03.01.01502-4	-	49.914.950,00
81	I Nyoman Munia Dana (Hanurata II)	Kubu	11/4/2014	03.01.01505-1	49.914.950,00	-
82	I Nyoman Tarka (Harta Rasih)	Kubu	11/6/2014	03.01.01506-2/03.01.01715-0	-	49.914.950,00
83	I Gede Somantapa(giri mandara)	Kubu	11/12/2014	03.01.01508-6	-	47.414.950,00
84	I Ketut Dayuh (Abu Pasir Indah)	Tulamben	2/11/2015	03.01.01528-2	-	39.914.950,00

85	I Made Ardana / edwin pieterzs	Baturinggit, Desa Baturinggit	2/26/2015	03.01.01530-9	-	49.914.950,00
86	I Gede Ariana (Panca Pandawa)	Darmawinangun, Tianyar, Kubu	5/29/2015	03.01.01553-0	-	49.914.950,00
87	I Made Suweca (pandawa jaya)	Darmawinangun, Tianyar, Kubu	7/8/2015	03.01.01566-1	-	49.914.950,00
88	PT . Octa (A.A Ayu Mahayuni)	Nusu, Sukadana, Kubu	12/30/2015	03.01.01607-8	99.829.900,00	-
89	Guna Karya (I Made sudarsana)	Nusu, Sukadana, Kubu	1/26/2016	03.01.01024-8	49.914.950,00	-
90	PT. Bumi Pasir Mandiri	Dukuh, Tulamben, Kubu	2/25/2016	03.01.01634-0	-	249.574.750,00
		Jumlah			**1.053.554.150,00**	**1.450.033.550,00**

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
I	**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - BELANJA SEWA**																
A.	**Sewa Tanah**																
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah																
1	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Perpanjangan Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kab.Karangasem untuk Gedung Sekretariat Kelembagaan Badan Kerjasama antar desa (BKAD) Kecamatan Bebandem	2021	24/3/2021	3/23/2026	60	2.950.000,00	49.166,67	45	2.212.500,00	12	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	147.500,00	147.500,00
2	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kab.Karangasem untuk Penempatan ATM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Jl Kesatrian Amlapura)	2022	3/14/2022	3/13/2025	36	15.000.000,00	416.666,67	34	14.166.666,67	2	0,00	833.333,33	833.333,33	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kab.Karangasem untuk Penempatan ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem (Di Areal Kantor Bupati Karangasem)	2024	9/30/2024	9/29/2029	60	46.250.000,00	770.833,33	3	2.312.500,00	12	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	34.687.500,00	34.687.500,00
	JUMLAH - Bagian Umum Setda Kab Karangasem						**64.200.000,00**			**18.691.666,67**		**0,00**	**10.673.333,33**	**10.673.333,33**	**0,00**	**34.835.000,00**	**34.835.000,00**
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah																
1	Dinas Perhubungan	Perpanjangan Sewa Menyewa Tanah di terminal Karang Sokong untuk permainan anak-anak	2022	10/29/2022	10/29/2025	36	6.048.000,00	168.000,00	26	4.368.000,00	10	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Perhubungan	Sewa menyewa lahan bagian di lapangan parkir Tirta Gangga (tanah milik pemerintah Kabupaten Karangasem)	2022	6/27/2022	6/27/2027	60	7.400.000,00	123.333,33	30	3.700.000,00	12	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
	JUMLAH - Dinas Perhubungan						**13.448.000,00**			**8.068.000,00**		**0,00**	**3.160.000,00**	**3.160.000,00**	**0,00**	**2.220.000,00**	**2.220.000,00**
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah																
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa menyewa tanah untuk ATM BRI di Karangsokong	2024	7/16/2024	7/15/2027	36	30.000.000,00	833.333,33	5	4.166.666,67	12	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.833.333,33	15.833.333,33
	JUMLAH - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan						**30.000.000,00**			**4.166.666,67**		**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**15.833.333,33**	**15.833.333,33**
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya																
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Toilet Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem Di Pasar Barat Amlapura,Ni Luh Resika, 511.2/582/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	3/31/2024	3/30/2025	12	4.800.000,00	400.000,00	9	3.600.000,00	3	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, NI WAYAN SUATI, 028/866/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000,00	4	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko,ANAK AGUNG AYU WIRYAWATI,028/867/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000,00	4	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, KADEK TRI JAYANTHA ANANDA, 028/868/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, NI WAYAN SUATI, 028/869/BID.PERDANGANGAN.DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000,00	4	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I KETUT DARMA PUTRA, 028/870/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000,00	4	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I KETUT DARMA PUTRA,028/871/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000,00	4	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, GO SING IN, 028/872/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, DHARMA SUTEJA, 028/873/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000,00	4	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, NI KETUT MAWARTI, 028/874/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000,00	4	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I KADEK TRI JAYANTHA ANANDA, 028/875/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, HAJI AMIN, 028/876/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, GUSTI NGURAH BAGUS SEMARE BAWA, 028/877/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000,00	4	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, ATANG FERYANTO, 028/878/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	2.340.000,00	195.000,00	8	1.560.000,00	4	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, TAN TJIK SIE, 028/879/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000,00	4	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, IR. I MADE SUARTAMA, 028/880/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.852.000,00	321.000,00	8	2.568.000,00	4	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, NUR HARTINI,A.Md, 028/881/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000,00	4	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I KETUT DANA, 028/882/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, ABBAS ALI, 028/883/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	1.440.000,00	120.000,00	8	960.000,00	4	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, TERRYSIA FERYANTO, 028/884/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000,00	4	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, SITI BADARIAH, 028/885/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, I MADE ARNAWA, 028/886/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko, RICHI MAHENDRA, 028/887/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko,SITI BADARIAH, 028/888/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.528.000,00	294.000,00	8	2.352.000,00	4	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko,Richi Mahendra, 028/889/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	1.800.000,00	150.000,00	8	1.200.000,00	4	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko,Richi Mahendra, 028/890/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	1.800.000,00	150.000,00	8	1.200.000,00	4	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Kesatrian Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko,Richi Mahendra, 028/891/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	1.800.000,00	150.000,00	8	1.200.000,00	4	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko,Ni Ketut Simpreg, 028/892/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	2.448.000,00	204.000,00	8	1.632.000,00	4	0,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko,Taufik, 028/894/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko,I Made Sudiksa, 028/895/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	3.240.000,00	270.000,00	8	2.160.000,00	4	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Tanah Jalan Gajah Mada Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Bangunan Ruko,Dharma Suteja, 028/896/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/3/2024	5/2/2025	12	7.497.000,00	624.750,00	8	4.998.000,00	4	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Toilet Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem Di Pasar Timur Amlapura,I Komang Darmika, 511.2/1072/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/31/2024	5/30/2025	12	2.400.000,00	200.000,00	7	1.400.000,00	5	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Toilet Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem Di Pasar Rakyat Rubaya ,Ni Lu Citra, 511.2/836/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	5/2/2024	5/1/2025	12	2.400.000,00	200.000,00	8	1.600.000,00	4	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Toilet Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem Di Pasar Rakyat Subagan ,Ni Wayan Supartini, 511.2/2334/BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG	2024	9/20/2024	9/19/2025	12	2.400.000,00	200.000,00	3	600.000,00	9	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Menyewa Toilet Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem Di Pasar Rakyat Menanga ,Ni Putu Sri Astini, 511.2/2362/BID.PERDAGANGAN/ DISKOPPERINDAG	2024	10/2/2024	10/1/2025	12	2.400.000,00	200.000,00	3	600.000,00	9	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /826/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Ni Wayan Suati	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	2.448.000,00	204.000,00	-	0,00	8	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00
37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /827 / BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Anak Agung Ayu Wiryawati	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	1.440.000,00	120.000,00	-	0,00	8	960.000,00	0,00	960.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
38	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /828/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Kadek Tri Jayantha Ananda	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN KESATRIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /829/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Ni Wayan Suati	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	1.440.000,00	120.000,00	-	0,00	8	960.000,00	0,00	960.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN KESATRIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /830/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; I Ketut Darma Putra	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	1.440.000,00	120.000,00	-	0,00	8	960.000,00	0,00	960.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN KESATRIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /831/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; I Ketut Darma Putra	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	1.440.000,00	120.000,00	-	0,00	8	960.000,00	0,00	960.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /832/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Go Sing In	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /833/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Dharma Suteja	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	2.448.000,00	204.000,00	-	0,00	8	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00
44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /834/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Ni Ketut Marwati	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	2.448.000,00	204.000,00	-	0,00	8	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00
45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /835/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Kadek Tri Jayantha Ananda	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
46	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /836/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Haji Amin	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
47	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /837/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Gusti Ngurah Bagus Semara Bawa	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	2.448.000,00	204.000,00	-	0,00	8	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00
48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /838/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Atang Feryanto	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	2.340.000,00	195.000,00	-	0,00	8	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
49	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /839/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Tan Tjik Sie	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	2.448.000,00	204.000,00	-	0,00	8	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00
50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /840/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Ir. I Made Suartama	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.852.000,00	321.000,00	-	0,00	8	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00
51	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /841/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Nur Hartini, A.Md	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	2.448.000,00	204.000,00	-	0,00	8	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00
52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /842/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG ; I Ketut Dana	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN KESATRIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /843/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Abbas Ali	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	1.440.000,00	120.000,00	-	0,00	8	960.000,00	0,00	960.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
54	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /845/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Siti Badariah	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
55	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /846/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; I Made Arnawa	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /847/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Richi Mahendra	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
57	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /848/ BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG; Siti Badariah	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.528.000,00	294.000,00	-	0,00	8	2.352.000,00	0,00	2.352.000,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN KESATRIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /849/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Richi Mahendra	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	1.800.000,00	150.000,00	-	0,00	8	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
59	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN KESATRIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /850/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Richi Mahendra	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	1.800.000,00	150.000,00	-	0,00	8	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN KESATRIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /851/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Richi Mahendra	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	1.800.000,00	150.000,00	-	0,00	8	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
61	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /852/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Ni Ketut Simpreg	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	2.448.000,00	204.000,00	-	0,00	8	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
62	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN KESATRIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /853/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; I Gusti Ngurah Parta	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	1.800.000,00	150.000,00	-	0,00	8	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
63	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /854/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Taufik	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /855/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; I Made Sudiksa	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	3.240.000,00	270.000,00	-	0,00	8	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
65	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TANAH JALAN GAJAH MADA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM UNTUK BANGUNAN RUKO; NOMOR : 028 /856/ BID.PERDAGANGAN / DISKOPPERINDAG; Dharma Suteja	2025	5/3/2025	5/2/2026	12	7.497.000,00	624.750,00	-	0,00	8	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00
66	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TOILET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DI PASAR AMLAPURA BARAT; NOMOR : 511.2 / 631 / BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG; Ni Luh Resika	2025	3/31/2025	3/30/2026	12	2.400.000,00	200.000,00	-	0,00	9	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TOILET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DI PASAR AMLAPURA TIMUR; I Komang Darmika	2025	5/31/2025	5/30/2026	12	2.400.000,00	200.000,00	-	0,00	7	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
68	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TOILET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DI PASAR RAKYAT MENANGA; NOMOR : 511.2 / 856 / BID.PERDAGANGAN/DISKOPPERINDAG; Ni Putu Sri Astini	2025	10/2/2025	10/1/2026	12	2.400.000,00	200.000,00	-	0,00	3	600.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TOILET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DI PASAR RAKYAT RUBAYA; NOMOR : 511.2 / 763 / BID.PERDAGANGAN/DISKOPPE RINDAG; Ni Luh Citra	2025	5/2/2025	5/1/2026	12	2.400.000,00	200.000,00	-	0,00	8	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SEWA MENYEWA TOILET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DI PASAR RAKYAT SUBAGAN; NOMOR : 511.2 / 1831 / BID.PERDAGANGAN/DISKOPPE RINDAG	2025	9/20/2025	9/19/2026	12	2.400.000,00	200.000,00	-	0,00	3	600.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	JUMLAH - Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya						**189.354.000,00**			**62.334.000,00**		**60.102.000,00**	**33.867.000,00**	**93.969.000,00**	**33.051.000,00**	**0,00**	**33.051.000,00**
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak di Pisahkan																
1	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Sewa Tempat Untuk ATM (PT.Bank BPD Bali)	2022	11/01/2022	10/01/2027	60	60.300.000,00	1.005.000,00	36	36.180.000,00	12	0,00	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	12.060.000,00	12.060.000,00
	JUMLAH - BLUD - UPTD Rumah Sakit Umum Daerah						**60.300.000,00**			**36.180.000,00**		**0,00**	**12.060.000,00**	**12.060.000,00**	**0,00**	**12.060.000,00**	**12.060.000,00**
	JUMLAH - SEWA TANAH						**357.302.000,00**	**0,00**		**129.440.333,33**		**60.102.000,00**	**69.760.333,33**	**129.862.333,33**	**33.051.000,00**	**64.948.333,33**	**97.999.333,33**
B.	**Sewa Gedung Dan Bangunan**																
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah																
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sewa Tanah dan Bangunan Perumda Tirta Toh Langkir	2023	9/12/2023	9/12/2028	60	302.340.000,00	5.039.000,00	16	80.624.000,00	12	0,00	60.468.000,00	60.468.000,00	0,00	161.248.000,00	161.248.000,00
	JUMLAH -Sewa dan Bangunan						**302.340.000,00**			**80.624.000,00**		**0,00**	**60.468.000,00**	**60.468.000,00**	**0,00**	**161.248.000,00**	**161.248.000,00**
II	**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - PAJAK DAERAH**																
A.	**Pajak Reklame**																
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Bintang Mas Jaya	2024	1/16/2024	1/15/2025	12	4.687.500,00	390.625,00	11	4.296.875,00	1	0,00	390.625,00	390.625,00	0,00	0,00	0,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Bintang Mas Jaya	2024	1/16/2024	1/15/2025	12	2.062.500,00	171.875,00	11	1.890.625,00	1	0,00	171.875,00	171.875,00	0,00	0,00	0,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. KaryaTeknik Indonesia	2024	1/21/2024	1/20/2025	12	516.000,00	43.000,00	11	473.000,00	1	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. KaryaTeknik Indonesia	2024	1/21/2024	1/20/2025	12	516.000,00	43.000,00	11	473.000,00	1	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. KaryaTeknik Indonesia	2024	1/21/2024	1/20/2025	12	510.000,00	42.500,00	11	467.500,00	1	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. KaryaTeknik Indonesia	2024	1/21/2024	1/20/2025	12	516.000,00	43.000,00	11	473.000,00	1	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.YAKULT	2024	1/25/2024	1/24/2025	12	4.872.000,00	406.000,00	11	4.466.000,00	1	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.YAKULT	2024	1/25/2024	1/24/2025	12	1.392.000,00	116.000,00	11	1.276.000,00	1	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CATUR ARTHA, ST (JFC CULIK)	2024	1/27/2024	1/26/2025	12	696.000,00	58.000,00	11	638.000,00	1	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penginapan Mertaning Yasa	2024	1/29/2024	1/28/2025	12	255.800,00	21.316,67	11	234.483,33	1	0,00	21.316,67	21.316,67	0,00	0,00	0,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Telkom Indonesia (Persero) Tbk	2024	2/5/2024	2/4/2025	12	756.600,00	63.050,00	11	693.550,00	1	0,00	63.050,00	63.050,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.073.400,00	89.450,00	11	983.950,00	1	0,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.001.400,00	83.450,00	11	917.950,00	1	0,00	83.450,00	83.450,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.073.400,00	89.450,00	11	983.950,00	1	0,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.001.400,00	83.450,00	11	917.950,00	1	0,00	83.450,00	83.450,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.073.400,00	89.450,00	11	983.950,00	1	0,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.001.400,00	83.450,00	11	917.950,00	1	0,00	83.450,00	83.450,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.797.600,00	149.800,00	11	1.647.800,00	1	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	2.454.300,00	204.525,00	11	2.249.775,00	1	0,00	204.525,00	204.525,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.034.400,00	86.200,00	11	948.200,00	1	0,00	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	962.400,00	80.200,00	11	882.200,00	1	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.034.400,00	86.200,00	11	948.200,00	1	0,00	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	962.400,00	80.200,00	11	882.200,00	1	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Mas / Putu Agus Wijayantara	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.073.400,00	89.450,00	11	983.950,00	1	0,00	89.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Mas / Putu Agus Wijayantara	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.001.400,00	83.450,00	11	917.950,00	1	0,00	83.450,00	83.450,00	0,00	0,00	0,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Dondowijaya Pratama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	1.034.400,00	86.200,00	11	948.200,00	1	0,00	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Dondowijaya Pratama	2024	2/11/2024	2/10/2025	12	962.400,00	80.200,00	11	882.200,00	1	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2024	2/19/2024	2/18/2025	12	1.056.000,00	88.000,00	10	880.000,00	2	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2024	2/19/2024	2/18/2025	12	1.455.000,00	121.250,00	10	1.212.500,00	2	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2024	2/19/2024	2/18/2025	12	411.000,00	34.250,00	10	342.500,00	2	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2024	2/19/2024	2/18/2025	12	876.000,00	73.000,00	10	730.000,00	2	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2024	2/19/2024	2/18/2025	12	915.000,00	76.250,00	10	762.500,00	2	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	D'JUMAH MART	2024	2/21/2024	2/20/2025	12	876.000,00	73.000,00	10	730.000,00	2	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hino Cahaya Surya Bali Indah	2024	2/23/2024	2/22/2025	12	409.000,00	34.083,33	10	340.833,33	2	0,00	68.166,67	68.166,67	0,00	0,00	0,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hino Cahaya Surya Bali Indah	2024	2/23/2024	2/22/2025	12	310.200,00	25.850,00	10	258.500,00	2	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hino Cahaya Surya Bali Indah	2024	2/23/2024	2/22/2025	12	375.000,00	31.250,00	10	312.500,00	2	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.GEMILANG LAKU USADHA	2024	3/9/2024	3/8/2025	12	876.000,00	73.000,00	10	730.000,00	2	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2024	3/17/2024	3/16/2025	12	778.200,00	64.850,00	9	583.650,00	3	0,00	194.550,00	194.550,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2024	3/17/2024	3/16/2025	12	852.300,00	71.025,00	9	639.225,00	3	0,00	213.075,00	213.075,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2024	3/17/2024	3/16/2025	12	1.136.400,00	94.700,00	9	852.300,00	3	0,00	284.100,00	284.100,00	0,00	0,00	0,00
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2024	3/17/2024	3/16/2025	12	789.000,00	65.750,00	9	591.750,00	3	0,00	197.250,00	197.250,00	0,00	0,00	0,00
42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2024	3/17/2024	3/16/2025	12	1.275.000,00	106.250,00	9	956.250,00	3	0,00	318.750,00	318.750,00	0,00	0,00	0,00
43	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2024	3/18/2024	3/17/2025	12	1.635.000,00	136.250,00	9	1.226.250,00	3	0,00	408.750,00	408.750,00	0,00	0,00	0,00
44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2024	3/20/2024	3/19/2025	12	749.400,00	62.450,00	9	562.050,00	3	0,00	187.350,00	187.350,00	0,00	0,00	0,00
45	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2024	3/20/2024	3/19/2025	12	610.800,00	50.900,00	9	458.100,00	3	0,00	152.700,00	152.700,00	0,00	0,00	0,00
46	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2024	3/20/2024	3/19/2025	12	600.000,00	50.000,00	9	450.000,00	3	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2024	3/20/2024	3/19/2025	12	749.400,00	62.450,00	9	562.050,00	3	0,00	187.350,00	187.350,00	0,00	0,00	0,00
48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2024	3/20/2024	3/19/2025	12	555.000,00	46.250,00	9	416.250,00	3	0,00	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MIXUE	2024	3/27/2024	3/26/2025	12	690.000,00	57.500,00	9	517.500,00	3	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sakti Label Abyudaya	2024	4/1/2024	3/31/2025	12	5.643.800,00	470.316,67	9	4.232.850,00	3	0,00	1.410.950,00	1.410.950,00	0,00	0,00	0,00
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sakti Label Abyudaya	2024	4/1/2024	3/31/2025	12	5.643.800,00	470.316,67	9	4.232.850,00	3	0,00	1.410.950,00	1.410.950,00	0,00	0,00	0,00
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2024	4/2/2024	4/1/2025	12	375.000,00	31.250,00	9	281.250,00	3	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00
53	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2024	4/2/2024	4/1/2025	12	390.000,00	32.500,00	9	292.500,00	3	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
54	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Garry's Frozen Food	2024	4/3/2024	4/2/2025	12	600.000,00	50.000,00	9	450.000,00	3	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.AGUSTA	2024	4/3/2024	4/2/2025	12	465.000,00	38.750,00	9	348.750,00	3	0,00	116.250,00	116.250,00	0,00	0,00	0,00
56	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	J & T Express	2024	4/3/2024	4/2/2025	12	375.000,00	31.250,00	9	281.250,00	3	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00
57	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	JFC / Padangkerta	2024	4/8/2024	4/7/2025	12	735.000,00	61.250,00	9	551.250,00	3	0,00	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	0,00
58	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Sejahtera Indobali Trada	2024	4/16/2024	4/15/2025	12	897.000,00	74.750,00	8	598.000,00	4	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
59	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	D'JALIKAN BELAYAG & NASI AYAM	2024	4/18/2024	4/17/2025	12	555.000,00	46.250,00	8	370.000,00	4	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PRIME GENERATION	2024	4/19/2024	4/18/2025	12	510.000,00	42.500,00	8	340.000,00	4	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PRIME GENERATION	2024	4/19/2024	4/18/2025	12	870.000,00	72.500,00	8	580.000,00	4	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	JFC Bebandem	2024	4/25/2024	4/24/2025	12	696.000,00	58.000,00	8	464.000,00	4	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Yagya Dasa Klinik	2024	4/28/2024	4/27/2025	12	876.000,00	73.000,00	8	584.000,00	4	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	2.355.000,00	196.250,00	8	1.570.000,00	4	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00
65	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	273.100,00	22.758,33	8	182.066,67	4	0,00	91.033,33	91.033,33	0,00	0,00	0,00
66	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	241.000,00	20.083,33	8	160.666,67	4	0,00	80.333,33	80.333,33	0,00	0,00	0,00
67	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	426.000,00	35.500,00	8	284.000,00	4	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	529.500,00	44.125,00	8	353.000,00	4	0,00	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
69	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	930.000,00	77.500,00	8	620.000,00	4	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
70	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	795.000,00	66.250,00	8	530.000,00	4	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.920.000,00	160.000,00	8	1.280.000,00	4	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.065.000,00	88.750,00	8	710.000,00	4	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	802.600,00	66.883,33	8	535.066,67	4	0,00	267.533,33	267.533,33	0,00	0,00	0,00
74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.950.000,00	162.500,00	8	1.300.000,00	4	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	2.640.000,00	220.000,00	8	1.760.000,00	4	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
76	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.316.400,00	109.700,00	8	877.600,00	4	0,00	438.800,00	438.800,00	0,00	0,00	0,00
77	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.162.500,00	96.875,00	8	775.000,00	4	0,00	387.500,00	387.500,00	0,00	0,00	0,00
78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.842.000,00	153.500,00	8	1.228.000,00	4	0,00	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00
79	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.608.000,00	134.000,00	8	1.072.000,00	4	0,00	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00
80	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.020.000,00	85.000,00	8	680.000,00	4	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.020.000,00	85.000,00	8	680.000,00	4	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
82	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.020.000,00	85.000,00	8	680.000,00	4	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	876.000,00	73.000,00	8	584.000,00	4	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	2.022.000,00	168.500,00	8	1.348.000,00	4	0,00	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00
85	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT BLUE OCEAN HEART	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.059.000,00	88.250,00	8	706.000,00	4	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00
86	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	588.000,00	49.000,00	8	392.000,00	4	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
87	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.020.000,00	85.000,00	8	680.000,00	4	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
88	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	561.000,00	46.750,00	8	374.000,00	4	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
89	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2024	5/1/2024	4/30/2025	12	1.560.000,00	130.000,00	8	1.040.000,00	4	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
90	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dewa Gede Oka	2024	5/8/2024	5/7/2025	12	397.500,00	33.125,00	8	265.000,00	4	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
91	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	DFC	2024	5/9/2024	5/8/2025	12	444.000,00	37.000,00	8	296.000,00	4	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
92	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	DFC	2024	5/9/2024	5/8/2025	12	350.400,00	29.200,00	8	233.600,00	4	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
93	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I WAYAN SUDIASTIKA	2024	5/15/2024	5/14/2025	12	840.000,00	70.000,00	8	560.000,00	4	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
94	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/16/2024	5/15/2025	12	537.000,00	44.750,00	7	313.250,00	5	0,00	223.750,00	223.750,00	0,00	0,00	0,00
95	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/16/2024	5/15/2025	12	1.381.600,00	115.133,33	7	805.933,33	5	0,00	575.666,67	575.666,67	0,00	0,00	0,00
96	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/16/2024	5/15/2025	12	303.400,00	25.283,33	7	176.983,33	5	0,00	126.416,67	126.416,67	0,00	0,00	0,00
97	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/16/2024	5/15/2025	12	261.900,00	21.825,00	7	152.775,00	5	0,00	109.125,00	109.125,00	0,00	0,00	0,00
98	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/16/2024	5/15/2025	12	537.000,00	44.750,00	7	313.250,00	5	0,00	223.750,00	223.750,00	0,00	0,00	0,00
99	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/16/2024	5/15/2025	12	1.381.600,00	115.133,33	7	805.933,33	5	0,00	575.666,67	575.666,67	0,00	0,00	0,00
100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/16/2024	5/15/2025	12	303.400,00	25.283,33	7	176.983,33	5	0,00	126.416,67	126.416,67	0,00	0,00	0,00
101	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/16/2024	5/15/2025	12	261.900,00	21.825,00	7	152.775,00	5	0,00	109.125,00	109.125,00	0,00	0,00	0,00
102	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/27/2024	5/26/2025	12	428.700,00	35.725,00	7	250.075,00	5	0,00	178.625,00	178.625,00	0,00	0,00	0,00
103	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	5/27/2024	5/26/2025	12	852.600,00	71.050,00	7	497.350,00	5	0,00	355.250,00	355.250,00	0,00	0,00	0,00
104	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MIXUE SUDIRMAN	2024	5/25/2024	5/24/2025	12	690.000,00	57.500,00	7	402.500,00	5	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
105	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	6/3/2024	6/2/2025	12	597.800,00	49.816,67	7	348.716,67	5	0,00	249.083,33	249.083,33	0,00	0,00	0,00
106	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	6/3/2024	6/2/2025	12	339.200,00	28.266,67	7	197.866,67	5	0,00	141.333,33	141.333,33	0,00	0,00	0,00
107	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	6/3/2024	6/2/2025	12	2.507.200,00	208.933,33	7	1.462.533,33	5	0,00	1.044.666,67	1.044.666,67	0,00	0,00	0,00
108	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	J & T Cargo (GD Arsa Wiratmaja)	2024	6/4/2024	6/3/2025	12	375.000,00	31.250,00	7	218.750,00	5	0,00	156.250,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00
109	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Astra International Tbk. Honda	2024	6/5/2024	6/4/2025	12	4.920.000,00	410.000,00	7	2.870.000,00	5	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RAJA OPTIK	2024	6/5/2024	6/4/2025	12	285.000,00	23.750,00	7	166.250,00	5	0,00	118.750,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00
111	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MASAKAN PADANG / DEDI DETRA	2024	6/5/2024	6/4/2025	12	375.000,00	31.250,00	7	218.750,00	5	0,00	156.250,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
112	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Gusti Nyoman Gariada	2024	6/5/2024	6/4/2025	12	735.000,00	61.250,00	7	428.750,00	5	0,00	306.250,00	306.250,00	0,00	0,00	0,00
113	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	NI KETUT ANNY MARWAN NINGSIH	2024	6/5/2024	6/4/2025	12	555.000,00	46.250,00	7	323.750,00	5	0,00	231.250,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00
114	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Nyoman Handi Yuliawan	2024	6/5/2024	6/4/2025	12	375.000,00	31.250,00	7	218.750,00	5	0,00	156.250,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00
115	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Gusti Bagus Ari Wibawa,SE	2024	6/5/2024	6/4/2025	12	516.000,00	43.000,00	7	301.000,00	5	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
116	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Wing's Surya	2024	6/6/2024	6/5/2025	12	1.776.000,00	148.000,00	7	1.036.000,00	5	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
117	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Wing's Surya	2024	6/6/2024	6/5/2025	12	1.770.000,00	147.500,00	7	1.032.500,00	5	0,00	737.500,00	737.500,00	0,00	0,00	0,00
118	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	6/6/2024	6/5/2025	12	3.596.900,00	299.741,67	7	2.098.191,67	5	0,00	1.498.708,33	1.498.708,33	0,00	0,00	0,00
119	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	6/6/2024	6/5/2025	12	390.100,00	32.508,33	7	227.558,33	5	0,00	162.541,67	162.541,67	0,00	0,00	0,00
120	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ZUMA (Wempi Tranggono)	2024	6/10/2024	6/9/2025	12	510.000,00	42.500,00	7	297.500,00	5	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00
121	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ACK Fried Chicken	2024	6/13/2024	6/12/2025	12	803.400,00	66.950,00	7	468.650,00	5	0,00	334.750,00	334.750,00	0,00	0,00	0,00
122	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Klinik Penta Medika	2024	6/14/2024	6/13/2025	12	2.316.000,00	193.000,00	7	1.351.000,00	5	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00
123	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. World Innovative Telecommunication	2024	6/15/2024	6/14/2025	12	1.145.400,00	95.450,00	7	668.150,00	5	0,00	477.250,00	477.250,00	0,00	0,00	0,00
124	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KENT WIRIA/MBM	2024	6/20/2024	6/19/2025	12	1.545.000,00	128.750,00	6	772.500,00	6	0,00	772.500,00	772.500,00	0,00	0,00	0,00
125	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketut Widasniti/AIRA	2024	6/20/2024	6/19/2025	12	555.000,00	46.250,00	6	277.500,00	6	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
126	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	NOVATEK KARANGASEM	2024	6/20/2024	6/19/2025	12	735.000,00	61.250,00	6	367.500,00	6	0,00	367.500,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00
127	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Klinik Utama Jantung Hasna Medika Karangasem	2024	6/21/2024	6/20/2025	12	1.275.000,00	106.250,00	6	637.500,00	6	0,00	637.500,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00
128	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Ketut Ageng (MN Mart)	2024	6/24/2024	6/23/2025	12	480.000,00	40.000,00	6	240.000,00	6	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
129	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2024	6/28/2024	6/27/2025	12	510.000,00	42.500,00	6	255.000,00	6	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2024	6/28/2024	6/27/2025	12	555.000,00	46.250,00	6	277.500,00	6	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
131	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPR Mitra Bali Artha Mandiri	2024	6/29/2024	6/28/2025	12	555.000,00	46.250,00	6	277.500,00	6	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
132	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Bayu/Bandung Collection	2024	7/4/2024	7/3/2025	12	915.000,00	76.250,00	6	457.500,00	6	0,00	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
133	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Klinik Utama Jantung Hasna Medika Karangasem	2024	7/5/2024	7/4/2025	12	738.000,00	61.500,00	6	369.000,00	6	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Beruang Mas Putra	2024	7/5/2024	7/4/2025	12	1.059.000,00	88.250,00	6	529.500,00	6	0,00	529.500,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00
135	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2024	7/10/2024	7/9/2025	12	510.000,00	42.500,00	6	255.000,00	6	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
136	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2024	7/10/2024	7/9/2025	12	555.000,00	46.250,00	6	277.500,00	6	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
137	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2024	7/10/2024	7/9/2025	12	330.000,00	27.500,00	6	165.000,00	6	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
138	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2024	7/10/2024	7/9/2025	12	960.000,00	80.000,00	6	480.000,00	6	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
139	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2024	7/10/2024	7/9/2025	12	1.590.000,00	132.500,00	6	795.000,00	6	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00
140	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	APOTEK IRA FARMA	2024	7/11/2024	7/10/2025	12	483.000,00	40.250,00	6	241.500,00	6	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
141	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	APOTEK IRA FARMA	2024	7/11/2024	7/10/2025	12	300.000,00	25.000,00	6	150.000,00	6	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
142	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	APOTEK PAYE FARMA	2024	7/11/2024	7/10/2025	12	735.000,00	61.250,00	6	367.500,00	6	0,00	367.500,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00
143	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. SEKAR TUNJUNG BIRU/ BALI MED KRASEMA	2024	7/19/2024	7/18/2025	12	3.795.000,00	316.250,00	5	1.581.250,00	7	0,00	2.213.750,00	2.213.750,00	0,00	0,00	0,00
144	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	UD WIPRA	2024	7/21/2024	7/20/2025	12	627.000,00	52.250,00	5	261.250,00	7	0,00	365.750,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00
145	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ACK CULIK	2024	7/23/2024	7/22/2025	12	717.600,00	59.800,00	5	299.000,00	7	0,00	418.600,00	418.600,00	0,00	0,00	0,00
146	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Aashaya Jasri	2024	7/26/2024	7/25/2025	12	1.368.000,00	114.000,00	5	570.000,00	7	0,00	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00
147	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	LANGGENG TEMAJA	2024	8/7/2024	8/6/2025	12	4.515.000,00	376.250,00	5	1.881.250,00	7	0,00	2.633.750,00	2.633.750,00	0,00	0,00	0,00
148	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA	2024	8/8/2024	8/7/2025	12	1.501.800,00	125.150,00	5	625.750,00	7	0,00	876.050,00	876.050,00	0,00	0,00	0,00
149	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA	2024	8/8/2024	8/7/2025	12	850.200,00	70.850,00	5	354.250,00	7	0,00	495.950,00	495.950,00	0,00	0,00	0,00
150	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA	2024	8/8/2024	8/7/2025	12	2.787.000,00	232.250,00	5	1.161.250,00	7	0,00	1.625.750,00	1.625.750,00	0,00	0,00	0,00
151	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Centrum Promosi Indonesia	2024	8/8/2024	8/7/2025	12	4.515.000,00	376.250,00	5	1.881.250,00	7	0,00	2.633.750,00	2.633.750,00	0,00	0,00	0,00
152	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	2024	8/9/2024	8/8/2025	12	912.000,00	76.000,00	5	380.000,00	7	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00
153	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	2024	8/9/2024	8/8/2025	12	1.920.000,00	160.000,00	5	800.000,00	7	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
154	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	2024	8/9/2024	8/8/2025	12	4.356.000,00	363.000,00	5	1.815.000,00	7	0,00	2.541.000,00	2.541.000,00	0,00	0,00	0,00
155	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bank BPD Bali Cab.Karangasem	2024	8/9/2024	8/8/2025	12	2.895.000,00	241.250,00	5	1.206.250,00	7	0,00	1.688.750,00	1.688.750,00	0,00	0,00	0,00
156	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ryryd/Accu Yuasa	2024	8/9/2024	8/8/2025	12	1.038.000,00	86.500,00	5	432.500,00	7	0,00	605.500,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00
157	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ryryd/Accu Yuasa	2024	8/9/2024	8/8/2025	12	960.000,00	80.000,00	5	400.000,00	7	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
158	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ryryd/Accu Yuasa	2024	8/9/2024	8/8/2025	12	1.557.000,00	129.750,00	5	648.750,00	7	0,00	908.250,00	908.250,00	0,00	0,00	0,00
159	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ryryd/Accu Yuasa	2024	8/9/2024	8/8/2025	12	960.000,00	80.000,00	5	400.000,00	7	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Locita Narrakarya	2024	8/10/2024	8/9/2025	12	1.239.000,00	103.250,00	5	516.250,00	7	0,00	722.750,00	722.750,00	0,00	0,00	0,00
161	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Media Putra Bangsa	2024	8/14/2024	8/13/2025	12	2.385.000,00	198.750,00	5	993.750,00	7	0,00	1.391.250,00	1.391.250,00	0,00	0,00	0,00
162	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Media Putra Bangsa	2024	8/14/2024	8/13/2025	12	690.000,00	57.500,00	5	287.500,00	7	0,00	402.500,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00
163	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Kadek Suparmadi	2024	8/14/2024	8/13/2025	12	555.000,00	46.250,00	5	231.250,00	7	0,00	323.750,00	323.750,00	0,00	0,00	0,00
164	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Media Putra Bangsa	2024	8/14/2024	8/13/2025	12	696.000,00	58.000,00	5	290.000,00	7	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00
165	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Komang Santika Skm	2024	8/14/2024	8/13/2025	12	519.000,00	43.250,00	5	216.250,00	7	0,00	302.750,00	302.750,00	0,00	0,00	0,00
166	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Putu Sudarma	2024	8/15/2024	8/14/2025	12	353.400,00	29.450,00	5	147.250,00	7	0,00	206.150,00	206.150,00	0,00	0,00	0,00
167	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ni Putu Diah Padmi Arini S.Pd.SD	2024	8/15/2024	8/14/2025	12	292.200,00	24.350,00	5	121.750,00	7	0,00	170.450,00	170.450,00	0,00	0,00	0,00
168	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ni Putu Diah Padmi Arini S.Pd.SD	2024	8/15/2024	8/14/2025	12	630.600,00	52.550,00	5	262.750,00	7	0,00	367.850,00	367.850,00	0,00	0,00	0,00
169	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ACK Bebandem	2024	8/21/2024	8/20/2025	12	717.600,00	59.800,00	4	239.200,00	8	0,00	478.400,00	478.400,00	0,00	0,00	0,00
170	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.ADIRA	2024	8/24/2024	8/23/2025	12	915.000,00	76.250,00	4	305.000,00	8	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
171	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Gede Wangsa	2024	8/24/2024	8/23/2025	12	177.600,00	14.800,00	4	59.200,00	8	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00
172	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Gede Wangsa	2024	8/24/2024	8/23/2025	12	264.000,00	22.000,00	4	88.000,00	8	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
173	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MONARCH	2024	8/28/2024	2/27/2025	6	637.500,00	106.250,00	4	425.000,00	2	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00
174	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MONARCH	2024	8/28/2024	2/27/2025	6	618.000,00	103.000,00	4	412.000,00	2	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
175	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MONARCH	2024	8/28/2024	2/27/2025	6	348.000,00	58.000,00	4	232.000,00	2	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
176	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MONARCH	2024	8/28/2024	2/27/2025	6	348.000,00	58.000,00	4	232.000,00	2	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
177	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Toko Wajar	2024	8/30/2024	8/29/2025	12	1.410.000,00	117.500,00	4	470.000,00	8	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
178	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lotus Sea View	2024	9/5/2024	9/4/2025	12	606.000,00	50.500,00	4	202.000,00	8	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
179	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indo Dialektika Madani	2024	9/5/2024	9/4/2025	12	2.064.000,00	172.000,00	4	688.000,00	8	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indo Dialektika Madani	2024	9/5/2024	9/4/2025	12	1.548.000,00	129.000,00	4	516.000,00	8	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00
181	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indo Dialektika Madani	2024	9/5/2024	9/4/2025	12	1.548.000,00	129.000,00	4	516.000,00	8	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00
182	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OPTIK INTERNASIONAL	2024	9/5/2024	9/4/2025	12	915.000,00	76.250,00	4	305.000,00	8	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
183	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OPTIK INTERNASIONAL	2024	9/5/2024	9/4/2025	12	915.000,00	76.250,00	4	305.000,00	8	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
184	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Gadai Mas	2024	9/6/2024	9/5/2025	12	366.000,00	30.500,00	4	122.000,00	8	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
185	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Gadai Mas	2024	9/6/2024	9/5/2025	12	870.000,00	72.500,00	4	290.000,00	8	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
186	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	GM Conblock	2024	9/6/2024	9/5/2025	12	1.059.000,00	88.250,00	4	353.000,00	8	0,00	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00
187	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	The Royal Bali Club	2024	9/7/2024	9/6/2025	12	566.400,00	47.200,00	4	188.800,00	8	0,00	377.600,00	377.600,00	0,00	0,00	0,00
188	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	The Royal Bali Club	2024	9/7/2024	9/6/2025	12	588.000,00	49.000,00	4	196.000,00	8	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
189	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ANEMONE	2024	9/7/2024	9/6/2025	12	336.000,00	28.000,00	4	112.000,00	8	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ANEMONE	2024	9/7/2024	9/6/2025	12	375.000,00	31.250,00	4	125.000,00	8	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
191	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ANEMONE	2024	9/7/2024	9/6/2025	12	561.000,00	46.750,00	4	187.000,00	8	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00
192	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ANEMONE	2024	9/7/2024	9/6/2025	12	600.000,00	50.000,00	4	200.000,00	8	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
193	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	9/8/2024	9/7/2025	12	1.381.600,00	115.133,33	4	460.533,33	8	0,00	921.066,67	921.066,67	0,00	0,00	0,00
194	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	9/8/2024	9/7/2025	12	537.000,00	44.750,00	4	179.000,00	8	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
195	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	9/8/2024	9/7/2025	12	303.400,00	25.283,33	4	101.133,33	8	0,00	202.266,67	202.266,67	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
196	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	9/8/2024	9/7/2025	12	261.900,00	21.825,00	4	87.300,00	8	0,00	174.600,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00
197	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MR D.I.Y	2024	9/11/2024	9/10/2025	12	284.700,00	23.725,00	4	94.900,00	8	0,00	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00
198	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MR D.I.Y	2024	9/11/2024	9/10/2025	12	2.226.300,00	185.525,00	4	742.100,00	8	0,00	1.484.200,00	1.484.200,00	0,00	0,00	0,00
199	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MR D.I.Y	2024	9/11/2024	9/10/2025	12	408.500,00	34.041,67	4	136.166,67	8	0,00	272.333,33	272.333,33	0,00	0,00	0,00
200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MONARCH	2024	9/12/2024	3/11/2025	6	468.800,00	78.133,33	4	312.533,33	2	0,00	156.266,67	156.266,67	0,00	0,00	0,00
201	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Mahagiri	2024	9/12/2024	9/11/2025	12	555.600,00	46.300,00	4	185.200,00	8	0,00	370.400,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00
202	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.G & G Promotion	2024	9/12/2024	9/11/2025	12	2.355.000,00	196.250,00	4	785.000,00	8	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
203	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ANEMONE UNTUNG SURAPATI	2024	9/13/2024	9/12/2025	12	750.000,00	62.500,00	4	250.000,00	8	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
204	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ANEMONE UNTUNG SURAPATI	2024	9/13/2024	9/12/2025	12	336.000,00	28.000,00	4	112.000,00	8	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
205	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Liberty Dive Resort	2024	9/17/2024	9/16/2025	12	246.000,00	20.500,00	3	61.500,00	9	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
206	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Liberty Dive Resort	2024	9/17/2024	9/16/2025	12	304.500,00	25.375,00	3	76.125,00	9	0,00	228.375,00	228.375,00	0,00	0,00	0,00
207	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tauch Terminal	2024	9/18/2024	2/17/2025	5	882.000,00	176.400,00	3	529.200,00	2	0,00	352.800,00	352.800,00	0,00	0,00	0,00
208	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	APOTEK SINDU RAJA FARMA	2024	9/21/2024	9/20/2025	12	870.000,00	72.500,00	3	217.500,00	9	0,00	652.500,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00
209	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	APOTEK SINDU RAJA FARMA	2024	9/21/2024	9/20/2025	12	915.000,00	76.250,00	3	228.750,00	9	0,00	686.250,00	686.250,00	0,00	0,00	0,00
210	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.G & G Promotion	2024	9/25/2024	9/24/2025	12	2.385.000,00	198.750,00	3	596.250,00	9	0,00	1.788.750,00	1.788.750,00	0,00	0,00	0,00
211	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2024	9/26/2024	9/25/2025	12	378.800,00	31.566,67	3	94.700,00	9	0,00	284.100,00	284.100,00	0,00	0,00	0,00
212	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2024	9/26/2024	9/25/2025	12	735.600,00	61.300,00	3	183.900,00	9	0,00	551.700,00	551.700,00	0,00	0,00	0,00
213	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2024	9/26/2024	9/25/2025	12	328.800,00	27.400,00	3	82.200,00	9	0,00	246.600,00	246.600,00	0,00	0,00	0,00
214	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2024	9/26/2024	9/25/2025	12	328.800,00	27.400,00	3	82.200,00	9	0,00	246.600,00	246.600,00	0,00	0,00	0,00
215	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2024	9/26/2024	9/25/2025	12	328.800,00	27.400,00	3	82.200,00	9	0,00	246.600,00	246.600,00	0,00	0,00	0,00
216	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2024	9/26/2024	9/25/2025	12	700.400,00	58.366,67	3	175.100,00	9	0,00	525.300,00	525.300,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
217	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
218	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	375.000,00	31.250,00	3	93.750,00	9	0,00	281.250,00	281.250,00	0,00	0,00	0,00
219	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
220	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
221	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	375.000,00	31.250,00	3	93.750,00	9	0,00	281.250,00	281.250,00	0,00	0,00	0,00
222	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
223	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
224	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	375.000,00	31.250,00	3	93.750,00	9	0,00	281.250,00	281.250,00	0,00	0,00	0,00
225	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
227	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
228	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
229	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
230	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	336.000,00	28.000,00	3	84.000,00	9	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
231	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
232	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
233	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
234	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
235	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
236	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
237	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
238	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
239	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
240	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
241	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
242	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	465.000,00	38.750,00	3	116.250,00	9	0,00	348.750,00	348.750,00	0,00	0,00	0,00
243	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
244	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2024	9/30/2024	9/29/2025	12	426.000,00	35.500,00	3	106.500,00	9	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00
245	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Bintang Mas Jaya	2024	10/3/2024	10/2/2025	12	2.062.500,00	171.875,00	3	515.625,00	9	0,00	1.546.875,00	1.546.875,00	0,00	0,00	0,00
246	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Gede Agia Suaputra	2024	10/5/2024	10/4/2025	12	876.000,00	73.000,00	3	219.000,00	9	0,00	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00
247	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	NI PUTU DYAH GIANA PARAMITHA	2024	10/10/2024	10/9/2025	12	303.000,00	25.250,00	3	75.750,00	9	0,00	227.250,00	227.250,00	0,00	0,00	0,00
248	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Adrian Sugiarjo	2024	10/11/2024	10/10/2025	12	516.000,00	43.000,00	3	129.000,00	9	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00
249	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Gree Electric Appliances Indonesia	2024	10/15/2024	10/14/2025	12	876.000,00	73.000,00	3	219.000,00	9	0,00	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00
250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Bayu Swastika	2024	10/17/2024	10/16/2025	12	3.075.000,00	256.250,00	2	512.500,00	10	0,00	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00	0,00	0,00
251	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	JNE / MD WISNU WEDA DWIJUANT	2024	10/19/2024	10/18/2025	12	1.005.000,00	83.750,00	2	167.500,00	10	0,00	837.500,00	837.500,00	0,00	0,00	0,00
252	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Labihir	2024	10/27/2024	10/26/2025	12	375.000,00	31.250,00	2	62.500,00	10	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00
253	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Gadai Mas	2024	10/29/2024	10/28/2025	12	428.100,00	35.675,00	2	71.350,00	10	0,00	356.750,00	356.750,00	0,00	0,00	0,00
254	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Gadai Mas	2024	10/29/2024	10/28/2025	12	876.000,00	73.000,00	2	146.000,00	10	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
255	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Pariwara Utama Rizal	2024	10/31/2024	10/30/2025	12	969.000,00	80.750,00	2	161.500,00	10	0,00	807.500,00	807.500,00	0,00	0,00	0,00
256	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Pariwara Utama Rizal	2024	10/31/2024	10/30/2025	12	915.000,00	76.250,00	2	152.500,00	10	0,00	762.500,00	762.500,00	0,00	0,00	0,00
257	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Wayan Merta Sukadana	2024	11/2/2024	11/1/2025	12	709.500,00	59.125,00	2	118.250,00	10	0,00	591.250,00	591.250,00	0,00	0,00	0,00
258	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Wayan Merta Sukadana	2024	11/2/2024	11/1/2025	12	804.000,00	67.000,00	2	134.000,00	10	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
259	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	11/12/2024	11/11/2025	12	173.600,00	14.466,67	2	28.933,33	10	0,00	144.666,67	144.666,67	0,00	0,00	0,00
260	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	11/12/2024	11/11/2025	12	534.800,00	44.566,67	2	89.133,33	10	0,00	445.666,67	445.666,67	0,00	0,00	0,00
261	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	11/12/2024	11/11/2025	12	166.600,00	13.883,33	2	27.766,67	10	0,00	138.833,33	138.833,33	0,00	0,00	0,00
262	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	11/12/2024	11/11/2025	12	1.325.900,00	110.491,67	2	220.983,33	10	0,00	1.104.916,67	1.104.916,67	0,00	0,00	0,00
263	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BOSHI	2024	11/21/2024	11/20/2025	12	349.800,00	29.150,00	1	29.150,00	11	0,00	320.650,00	320.650,00	0,00	0,00	0,00
264	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BOSHI	2024	11/21/2024	11/20/2025	12	750.000,00	62.500,00	1	62.500,00	11	0,00	687.500,00	687.500,00	0,00	0,00	0,00
265	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BOSHI	2024	11/21/2024	11/20/2025	12	570.000,00	47.500,00	1	47.500,00	11	0,00	522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00
266	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.YAKULT	2024	11/28/2024	11/27/2025	12	330.000,00	27.500,00	1	27.500,00	11	0,00	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00
267	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	12/4/2024	12/3/2025	12	537.000,00	44.750,00	1	44.750,00	11	0,00	492.250,00	492.250,00	0,00	0,00	0,00
268	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	12/4/2024	12/3/2025	12	166.600,00	13.883,33	1	13.883,33	11	0,00	152.716,67	152.716,67	0,00	0,00	0,00
269	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	12/4/2024	12/3/2025	12	1.325.900,00	110.491,67	1	110.491,67	11	0,00	1.215.408,33	1.215.408,33	0,00	0,00	0,00
270	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2024	12/4/2024	12/3/2025	12	173.600,00	14.466,67	1	14.466,67	11	0,00	159.133,33	159.133,33	0,00	0,00	0,00
271	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Komang Budiana	2024	12/5/2024	12/4/2025	12	552.000,00	46.000,00	1	46.000,00	11	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
272	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rama Candidasa Resort & Spa	2024	12/7/2024	12/6/2025	12	1.581.600,00	131.800,00	1	131.800,00	11	0,00	1.449.800,00	1.449.800,00	0,00	0,00	0,00
273	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sakti Label Abyudaya	2024	12/12/2024	1/11/2025	1	2.664.100,00	2.664.100,00	1	2.664.100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sakti Label Abyudaya	2024	12/12/2024	1/11/2025	1	1.453.200,00	1.453.200,00	1	1.453.200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indo Dialektika Madani	2024	12/13/2024	12/12/2025	12	696.000,00	58.000,00	1	58.000,00	11	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00
276	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Pasir Madawa / PT. Indomarco Prismatama	2024	12/21/2024	12/20/2025	12	1.034.400,00	86.200,00	-	0,00	12	0,00	1.034.400,00	1.034.400,00	0,00	0,00	0,00
277	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Pasir Madawa / PT. Indomarco Prismatama	2024	12/21/2024	12/20/2025	12	962.400,00	80.200,00	-	0,00	12	0,00	962.400,00	962.400,00	0,00	0,00	0,00
278	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Bintang Mas Jaya	2025	1/16/2025	1/15/2026	12	2.062.500,00	171.875,00	-	0,00	11	1.890.625,00	0,00	1.890.625,00	171.875,00	0,00	171.875,00
279	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Bintang Mas Jaya	2025	1/16/2025	1/15/2026	12	4.687.500,00	390.625,00	-	0,00	11	4.296.875,00	0,00	4.296.875,00	390.625,00	0,00	390.625,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
280	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. KaryaTeknik Indonesia	2025	1/21/2025	1/20/2026	12	516.000,00	43.000,00	-	0,00	11	473.000,00	0,00	473.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
281	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. KaryaTeknik Indonesia	2025	1/21/2025	1/20/2026	12	516.000,00	43.000,00	-	0,00	11	473.000,00	0,00	473.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
282	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. KaryaTeknik Indonesia	2025	1/21/2025	1/20/2026	12	510.000,00	42.500,00	-	0,00	11	467.500,00	0,00	467.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00
283	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. KaryaTeknik Indonesia	2025	1/21/2025	1/20/2026	12	516.000,00	43.000,00	-	0,00	11	473.000,00	0,00	473.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
284	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketemu Lagi (Hana Wijaya)	2025	1/24/2025	1/23/2026	12	375.000,00	31.250,00	-	0,00	11	343.750,00	0,00	343.750,00	31.250,00	0,00	31.250,00
285	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketemu Lagi (Hana Wijaya)	2025	1/24/2025	1/23/2026	12	735.000,00	61.250,00	-	0,00	11	673.750,00	0,00	673.750,00	61.250,00	0,00	61.250,00
286	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.YAKULT	2025	1/25/2025	1/24/2026	12	1.392.000,00	116.000,00	-	0,00	11	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00
287	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.YAKULT	2025	1/25/2025	1/24/2026	12	2.784.000,00	232.000,00	-	0,00	11	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00
288	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penginapan Mertaning Yasa	2025	1/29/2025	1/28/2026	12	255.800,00	21.316,67	-	0,00	11	234.483,33	0,00	234.483,33	21.316,67	0,00	21.316,67
289	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.AGUSTA	2025	2/3/2025	2/2/2026	12	465.000,00	38.750,00	-	0,00	11	426.250,00	0,00	426.250,00	38.750,00	0,00	38.750,00
290	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/10/2025	2/10/2026	12	1.073.400,00	89.450,00	-	0,00	11	983.950,00	0,00	983.950,00	89.450,00	0,00	89.450,00
291	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.073.400,00	89.450,00	-	0,00	11	983.950,00	0,00	983.950,00	89.450,00	0,00	89.450,00
292	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.001.400,00	83.450,00	-	0,00	11	917.950,00	0,00	917.950,00	83.450,00	0,00	83.450,00
293	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.797.600,00	149.800,00	-	0,00	11	1.647.800,00	0,00	1.647.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00
294	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	2.454.300,00	204.525,00	-	0,00	11	2.249.775,00	0,00	2.249.775,00	204.525,00	0,00	204.525,00
295	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.034.400,00	86.200,00	-	0,00	11	948.200,00	0,00	948.200,00	86.200,00	0,00	86.200,00
296	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	962.400,00	80.200,00	-	0,00	11	882.200,00	0,00	882.200,00	80.200,00	0,00	80.200,00
297	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.073.400,00	89.450,00	-	0,00	11	983.950,00	0,00	983.950,00	89.450,00	0,00	89.450,00
298	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.001.400,00	83.450,00	-	0,00	11	917.950,00	0,00	917.950,00	83.450,00	0,00	83.450,00
299	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indomarco Prismatama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.001.400,00	83.450,00	-	0,00	11	917.950,00	0,00	917.950,00	83.450,00	0,00	83.450,00
300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Dondowijaya Pratama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.034.400,00	86.200,00	-	0,00	11	948.200,00	0,00	948.200,00	86.200,00	0,00	86.200,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
301	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Dondowijaya Pratama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	962.400,00	80.200,00	-	0,00	11	882.200,00	0,00	882.200,00	80.200,00	0,00	80.200,00
302	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Dondowijaya Pratama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.034.400,00	86.200,00	-	0,00	11	948.200,00	0,00	948.200,00	86.200,00	0,00	86.200,00
303	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Dondowijaya Pratama	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	962.400,00	80.200,00	-	0,00	11	882.200,00	0,00	882.200,00	80.200,00	0,00	80.200,00
304	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Duta Waraniaga	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.001.400,00	83.450,00	-	0,00	11	917.950,00	0,00	917.950,00	83.450,00	0,00	83.450,00
305	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Duta Waraniaga	2025	2/11/2025	2/10/2026	12	1.034.400,00	86.200,00	-	0,00	11	948.200,00	0,00	948.200,00	86.200,00	0,00	86.200,00
306	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2025	2/19/2025	2/18/2026	12	1.056.000,00	88.000,00	-	0,00	10	880.000,00	0,00	880.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
307	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2025	2/19/2025	2/18/2026	12	1.455.000,00	121.250,00	-	0,00	10	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00	242.500,00	0,00	242.500,00
308	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2025	2/19/2025	2/18/2026	12	411.000,00	34.250,00	-	0,00	10	342.500,00	0,00	342.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00
309	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2025	2/19/2025	2/18/2026	12	876.000,00	73.000,00	-	0,00	10	730.000,00	0,00	730.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
310	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	2025	2/19/2025	2/18/2026	12	915.000,00	76.250,00	-	0,00	10	762.500,00	0,00	762.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00
311	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	D'JUMAH MART	2025	2/21/2025	2/20/2026	12	876.000,00	73.000,00	-	0,00	10	730.000,00	0,00	730.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
312	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hino Cahaya Surya Bali Indah	2025	2/23/2025	2/22/2026	12	409.000,00	34.083,33	-	0,00	10	340.833,33	0,00	340.833,33	68.166,67	0,00	68.166,67
313	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hino Cahaya Surya Bali Indah	2025	2/23/2025	2/22/2026	12	310.200,00	25.850,00	-	0,00	10	258.500,00	0,00	258.500,00	51.700,00	0,00	51.700,00
314	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hino Cahaya Surya Bali Indah	2025	2/23/2025	2/22/2026	12	375.000,00	31.250,00	-	0,00	10	312.500,00	0,00	312.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
315	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.GEMILANG LAKU USADHA	2025	3/9/2025	3/8/2026	12	876.000,00	73.000,00	-	0,00	10	730.000,00	0,00	730.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
316	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2025	3/17/2025	3/16/2026	12	778.200,00	64.850,00	-	0,00	9	583.650,00	0,00	583.650,00	194.550,00	0,00	194.550,00
317	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2025	3/17/2025	3/16/2026	12	852.300,00	71.025,00	-	0,00	9	639.225,00	0,00	639.225,00	213.075,00	0,00	213.075,00
318	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2025	3/17/2025	3/16/2026	12	1.136.400,00	94.700,00	-	0,00	9	852.300,00	0,00	852.300,00	284.100,00	0,00	284.100,00
319	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2025	3/17/2025	3/15/2026	12	789.000,00	65.750,00	-	0,00	9	591.750,00	0,00	591.750,00	197.250,00	0,00	197.250,00
320	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2025	3/17/2025	3/16/2026	12	1.275.000,00	106.250,00	-	0,00	9	956.250,00	0,00	956.250,00	318.750,00	0,00	318.750,00
321	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT INDOSAT TBK	2025	3/18/2025	3/17/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	9	319.500,00	0,00	319.500,00	106.500,00	0,00	106.500,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
322	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT INDOSAT TBK	2025	3/18/2025	3/17/2026	12	246.000,00	20.500,00	-	0,00	9	184.500,00	0,00	184.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00
323	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT INDOSAT TBK	2025	3/18/2025	3/17/2026	12	246.000,00	20.500,00	-	0,00	9	184.500,00	0,00	184.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00
324	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT INDOSAT TBK	2025	3/18/2025	3/17/2026	12	465.000,00	38.750,00	-	0,00	9	348.750,00	0,00	348.750,00	116.250,00	0,00	116.250,00
325	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT INDOSAT TBK	2025	3/18/2025	3/17/2026	12	246.000,00	20.500,00	-	0,00	9	184.500,00	0,00	184.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00
326	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT INDOSAT TBK	2025	3/18/2025	3/17/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	9	319.500,00	0,00	319.500,00	106.500,00	0,00	106.500,00
327	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT INDOSAT TBK	2025	3/18/2025	3/17/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	9	319.500,00	0,00	319.500,00	106.500,00	0,00	106.500,00
328	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT INDOSAT TBK	2025	3/18/2025	3/17/2026	12	246.000,00	20.500,00	-	0,00	9	184.500,00	0,00	184.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00
329	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Platinum Jaya Makmur	2025	3/18/2025	3/17/2026	12	1.635.000,00	136.250,00	-	0,00	9	1.226.250,00	0,00	1.226.250,00	408.750,00	0,00	408.750,00
330	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2025	3/20/2025	3/19/2026	12	749.400,00	62.450,00	-	0,00	9	562.050,00	0,00	562.050,00	187.350,00	0,00	187.350,00
331	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2025	3/20/2025	3/19/2026	12	749.400,00	62.450,00	-	0,00	9	562.050,00	0,00	562.050,00	187.350,00	0,00	187.350,00
332	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2025	3/20/2025	3/19/2026	12	610.800,00	50.900,00	-	0,00	9	458.100,00	0,00	458.100,00	152.700,00	0,00	152.700,00
333	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2025	3/20/2025	3/19/2026	12	561.000,00	46.750,00	-	0,00	9	420.750,00	0,00	420.750,00	140.250,00	0,00	140.250,00
334	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.BNI (Persero) Tbk,Kantor Cabang Singaraja	2025	3/20/2025	3/19/2026	12	600.000,00	50.000,00	-	0,00	9	450.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
335	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sakti Label Abyudaya	2025	4/1/2025	3/31/2026	12	5.643.800,00	470.316,67	-	0,00	9	4.232.850,00	0,00	4.232.850,00	1.410.950,00	0,00	1.410.950,00
336	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sakti Label Abyudaya	2025	4/1/2025	3/31/2026	12	5.643.800,00	470.316,67	-	0,00	9	4.232.850,00	0,00	4.232.850,00	1.410.950,00	0,00	1.410.950,00
337	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2025	4/2/2025	4/1/2026	12	375.000,00	31.250,00	-	0,00	9	281.250,00	0,00	281.250,00	93.750,00	0,00	93.750,00
338	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2025	4/2/2025	4/1/2026	12	390.000,00	32.500,00	-	0,00	9	292.500,00	0,00	292.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00
339	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	JFC / Padangkerta	2025	4/8/2025	4/7/2026	12	735.000,00	61.250,00	-	0,00	9	551.250,00	0,00	551.250,00	183.750,00	0,00	183.750,00
340	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	NI MADE DARMIASIH	2025	4/9/2025	4/8/2026	12	735.000,00	61.250,00	-	0,00	9	551.250,00	0,00	551.250,00	183.750,00	0,00	183.750,00
341	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	NI MADE DARMIASIH	2025	4/9/2025	4/8/2026	12	555.000,00	46.250,00	-	0,00	9	416.250,00	0,00	416.250,00	138.750,00	0,00	138.750,00
342	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PRIME GENERATION	2025	4/19/2025	4/18/2026	12	510.000,00	42.500,00	-	0,00	8	340.000,00	0,00	340.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
343	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PRIME GENERATION	2025	4/19/2025	4/18/2026	12	870.000,00	72.500,00	-	0,00	8	580.000,00	0,00	580.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
344	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Yagya Dasa Klinik	2025	4/28/2025	4/27/2026	12	876.000,00	73.000,00	-	0,00	8	584.000,00	0,00	584.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00
345	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2025	5/1/2025	4/30/2026	12	2.355.000,00	196.250,00	-	0,00	8	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	785.000,00	0,00	785.000,00
346	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2025	5/1/2025	4/30/2026	12	529.500,00	44.125,00	-	0,00	8	353.000,00	0,00	353.000,00	176.500,00	0,00	176.500,00
347	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2025	5/1/2025	4/30/2026	12	273.100,00	22.758,33	-	0,00	8	182.066,67	0,00	182.066,67	91.033,33	0,00	91.033,33
348	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2025	5/1/2025	4/30/2026	12	241.000,00	20.083,33	-	0,00	8	160.666,67	0,00	160.666,67	80.333,33	0,00	80.333,33
349	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2025	5/1/2025	4/30/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	8	284.000,00	0,00	284.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00
350	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2025	5/1/2025	4/30/2026	12	588.000,00	49.000,00	-	0,00	8	392.000,00	0,00	392.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00
351	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2025	5/1/2025	4/30/2026	12	561.000,00	46.750,00	-	0,00	8	374.000,00	0,00	374.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00
352	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.CARLCARE SERVICE ILA	2025	5/1/2025	4/30/2026	12	1.560.000,00	130.000,00	-	0,00	8	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
353	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/16/2025	5/15/2026	12	303.400,00	25.283,33	-	0,00	7	176.983,33	0,00	176.983,33	126.416,67	0,00	126.416,67
354	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/16/2025	5/15/2026	12	261.900,00	21.825,00	-	0,00	7	152.775,00	0,00	152.775,00	109.125,00	0,00	109.125,00
355	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/16/2025	5/15/2026	12	537.000,00	44.750,00	-	0,00	7	313.250,00	0,00	313.250,00	223.750,00	0,00	223.750,00
356	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/16/2025	5/15/2026	12	1.381.600,00	115.133,33	-	0,00	7	805.933,33	0,00	805.933,33	575.666,67	0,00	575.666,67
357	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/16/2025	5/15/2026	12	303.400,00	25.283,33	-	0,00	7	176.983,33	0,00	176.983,33	126.416,67	0,00	126.416,67
358	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/16/2025	5/15/2026	12	1.381.600,00	115.133,33	-	0,00	7	805.933,33	0,00	805.933,33	575.666,67	0,00	575.666,67
359	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/16/2025	5/15/2026	12	537.000,00	44.750,00	-	0,00	7	313.250,00	0,00	313.250,00	223.750,00	0,00	223.750,00
360	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/16/2025	5/15/2026	12	261.900,00	21.825,00	-	0,00	7	152.775,00	0,00	152.775,00	109.125,00	0,00	109.125,00
361	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MIXUE SUDIRMAN	2025	5/25/2025	5/24/2026	12	690.000,00	57.500,00	-	0,00	7	402.500,00	0,00	402.500,00	287.500,00	0,00	287.500,00
362	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/27/2025	5/26/2026	12	852.600,00	71.050,00	-	0,00	7	497.350,00	0,00	497.350,00	355.250,00	0,00	355.250,00
363	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	5/27/2025	5/26/2026	12	428.700,00	35.725,00	-	0,00	7	250.075,00	0,00	250.075,00	178.625,00	0,00	178.625,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
364	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	6/3/2025	6/2/2026	12	339.200,00	28.266,67	-	0,00	7	197.866,67	0,00	197.866,67	141.333,33	0,00	141.333,33
365	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	6/3/2025	6/2/2026	12	2.507.200,00	208.933,33	-	0,00	7	1.462.533,33	0,00	1.462.533,33	1.044.666,67	0,00	1.044.666,67
366	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	6/3/2025	6/2/2026	12	597.800,00	49.816,67	-	0,00	7	348.716,67	0,00	348.716,67	249.083,33	0,00	249.083,33
367	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RAJA OPTIK	2025	6/5/2025	6/4/2026	12	285.000,00	23.750,00	-	0,00	7	166.250,00	0,00	166.250,00	118.750,00	0,00	118.750,00
368	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Gusti Bagus Ari Wibawa,SE	2025	6/5/2025	6/4/2026	12	516.000,00	43.000,00	-	0,00	7	301.000,00	0,00	301.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
369	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Wing's Surya	2025	6/6/2025	6/5/2026	12	1.776.000,00	148.000,00	-	0,00	7	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00
370	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Wing's Surya	2025	6/6/2025	6/5/2026	12	1.770.000,00	147.500,00	-	0,00	7	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	737.500,00	0,00	737.500,00
371	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	6/6/2025	6/5/2026	12	3.596.900,00	299.741,67	-	0,00	7	2.098.191,67	0,00	2.098.191,67	1.498.708,33	0,00	1.498.708,33
372	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	6/6/2025	6/5/2026	12	390.100,00	32.508,33	-	0,00	7	227.558,33	0,00	227.558,33	162.541,67	0,00	162.541,67
373	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. World Innovative Telecommunication	2025	6/15/2025	6/14/2026	12	1.145.400,00	95.450,00	-	0,00	7	668.150,00	0,00	668.150,00	477.250,00	0,00	477.250,00
374	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2025	6/28/2025	6/27/2026	12	555.000,00	46.250,00	-	0,00	6	277.500,00	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	277.500,00
375	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2025	6/28/2025	6/27/2026	12	510.000,00	42.500,00	-	0,00	6	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
376	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPR Mitra Bali Artha Mandiri	2025	6/29/2025	6/28/2026	12	555.000,00	46.250,00	-	0,00	6	277.500,00	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	277.500,00
377	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I GEDE OKA SUMANTRA	2025	6/30/2025	6/29/2026	12	5.568.000,00	464.000,00	-	0,00	6	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00
378	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Beruang Mas Putra	2025	7/5/2025	7/4/2026	12	696.000,00	58.000,00	-	0,00	6	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00
379	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Beruang Mas Putra	2025	7/5/2025	7/4/2026	12	915.000,00	76.250,00	-	0,00	6	457.500,00	0,00	457.500,00	457.500,00	0,00	457.500,00
380	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	GEDE RENDY PUJANA	2025	7/7/2025	7/6/2026	12	228.000,00	19.000,00	-	0,00	6	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00
381	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2025	7/10/2025	7/9/2026	12	690.000,00	57.500,00	-	0,00	6	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00
382	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2025	7/10/2025	7/9/2026	12	1.590.000,00	132.500,00	-	0,00	6	795.000,00	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00
383	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2025	7/10/2025	7/9/2026	12	330.000,00	27.500,00	-	0,00	6	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
384	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Wirawan	2025	7/10/2025	7/9/2026	12	555.000,00	46.250,00	-	0,00	6	277.500,00	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	277.500,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
385	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Beruang Mas Putra	2025	7/11/2025	7/10/2026	12	1.923.000,00	160.250,00	-	0,00	6	961.500,00	0,00	961.500,00	961.500,00	0,00	961.500,00
386	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	APOTEK PAYE FARMA	2025	7/11/2025	7/10/2026	12	735.000,00	61.250,00	-	0,00	6	367.500,00	0,00	367.500,00	367.500,00	0,00	367.500,00
387	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	2025	7/14/2025	7/13/2026	12	1.192.800,00	99.400,00	-	0,00	6	596.400,00	0,00	596.400,00	596.400,00	0,00	596.400,00
388	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	2025	7/14/2025	7/13/2026	12	631.200,00	52.600,00	-	0,00	6	315.600,00	0,00	315.600,00	315.600,00	0,00	315.600,00
389	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	2025	7/14/2025	7/13/2026	12	1.231.800,00	102.650,00	-	0,00	6	615.900,00	0,00	615.900,00	615.900,00	0,00	615.900,00
390	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	2025	7/14/2025	7/13/2026	12	670.200,00	55.850,00	-	0,00	6	335.100,00	0,00	335.100,00	335.100,00	0,00	335.100,00
391	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	2025	7/14/2025	7/13/2026	12	1.231.800,00	102.650,00	-	0,00	6	615.900,00	0,00	615.900,00	615.900,00	0,00	615.900,00
392	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	2025	7/14/2025	7/13/2026	12	670.200,00	55.850,00	-	0,00	6	335.100,00	0,00	335.100,00	335.100,00	0,00	335.100,00
393	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tauch Terminal	2025	7/18/2025	1/17/2026	6	882.000,00	147.000,00	-	0,00	5	735.000,00	0,00	735.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
394	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. SEKAR TUNJUNG BIRU/ BALI MED KRASEMA	2025	7/19/2025	7/18/2026	12	3.795.000,00	316.250,00	-	0,00	5	1.581.250,00	0,00	1.581.250,00	2.213.750,00	0,00	2.213.750,00
395	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	UD WIPRA	2025	7/21/2025	7/20/2026	12	627.000,00	52.250,00	-	0,00	5	261.250,00	0,00	261.250,00	365.750,00	0,00	365.750,00
396	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ACK CULIK	2025	7/23/2025	7/22/2026	12	717.600,00	59.800,00	-	0,00	5	299.000,00	0,00	299.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00
397	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	JOFFI RAMEN KARANGASEM	2025	7/25/2025	7/24/2026	12	555.000,00	46.250,00	-	0,00	5	231.250,00	0,00	231.250,00	323.750,00	0,00	323.750,00
398	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gogo Fried Chicken Amlapura	2025	7/25/2025	7/24/2026	12	713.400,00	59.450,00	-	0,00	5	297.250,00	0,00	297.250,00	416.150,00	0,00	416.150,00
399	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ACK SELAT	2025	7/25/2025	7/24/2026	12	516.000,00	43.000,00	-	0,00	5	215.000,00	0,00	215.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00
400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	APOTEK KAYANA	2025	7/25/2025	7/24/2026	12	717.600,00	59.800,00	-	0,00	5	299.000,00	0,00	299.000,00	418.600,00	0,00	418.600,00
401	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	dr.Putu Putri Adiyani Dewi	2025	7/25/2025	7/24/2026	12	1.056.000,00	88.000,00	-	0,00	5	440.000,00	0,00	440.000,00	616.000,00	0,00	616.000,00
402	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Aashaya Jasri	2025	7/26/2025	7/25/2026	12	1.368.000,00	114.000,00	-	0,00	5	570.000,00	0,00	570.000,00	798.000,00	0,00	798.000,00
403	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	LANGGENG TEMAJA	2025	8/7/2025	8/6/2026	12	4.515.000,00	376.250,00	-	0,00	5	1.881.250,00	0,00	1.881.250,00	2.633.750,00	0,00	2.633.750,00
404	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA	2025	8/8/2025	8/7/2026	12	1.501.800,00	125.150,00	-	0,00	5	625.750,00	0,00	625.750,00	876.050,00	0,00	876.050,00
405	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA	2025	8/8/2025	8/7/2026	12	850.200,00	70.850,00	-	0,00	5	354.250,00	0,00	354.250,00	495.950,00	0,00	495.950,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
406	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KFC /PT. FAST FOOD INDONESIA	2025	8/8/2025	8/7/2026	12	2.787.000,00	232.250,00	-	0,00	5	1.161.250,00	0,00	1.161.250,00	1.625.750,00	0,00	1.625.750,00
407	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Centrum Promosi Indonesia	2025	8/8/2025	8/7/2026	12	4.515.000,00	376.250,00	-	0,00	5	1.881.250,00	0,00	1.881.250,00	2.633.750,00	0,00	2.633.750,00
408	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ryryd/Accu Yuasa	2025	8/9/2025	8/8/2026	12	1.038.000,00	86.500,00	-	0,00	5	432.500,00	0,00	432.500,00	605.500,00	0,00	605.500,00
409	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ryryd/Accu Yuasa	2025	8/9/2025	8/8/2026	12	1.557.000,00	129.750,00	-	0,00	5	648.750,00	0,00	648.750,00	908.250,00	0,00	908.250,00
410	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ryryd/Accu Yuasa	2025	8/9/2025	8/8/2026	12	960.000,00	80.000,00	-	0,00	5	400.000,00	0,00	400.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00
411	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ryryd/Accu Yuasa	2025	8/9/2025	8/8/2026	12	960.000,00	80.000,00	-	0,00	5	400.000,00	0,00	400.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00
412	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Locita Narrakarya	2025	8/10/2025	8/9/2026	12	1.239.000,00	103.250,00	-	0,00	5	516.250,00	0,00	516.250,00	722.750,00	0,00	722.750,00
413	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Media Putra Bangsa	2025	8/14/2025	8/13/2026	12	690.000,00	57.500,00	-	0,00	5	287.500,00	0,00	287.500,00	402.500,00	0,00	402.500,00
414	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Media Putra Bangsa Advertising	2025	8/14/2025	8/13/2026	12	2.385.000,00	198.750,00	-	0,00	5	993.750,00	0,00	993.750,00	1.391.250,00	0,00	1.391.250,00
415	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Media Putra Bangsa Advertising	2025	8/14/2025	8/13/2026	12	690.000,00	57.500,00	-	0,00	5	287.500,00	0,00	287.500,00	402.500,00	0,00	402.500,00
416	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. Media Putra Bangsa Advertising	2025	8/14/2025	8/13/2026	12	696.000,00	58.000,00	-	0,00	5	290.000,00	0,00	290.000,00	406.000,00	0,00	406.000,00
417	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Komang Santika Skm	2025	8/14/2025	8/13/2026	12	519.000,00	43.250,00	-	0,00	5	216.250,00	0,00	216.250,00	302.750,00	0,00	302.750,00
418	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ACK Bebandem	2025	8/21/2025	8/20/2026	12	717.600,00	59.800,00	-	0,00	4	239.200,00	0,00	239.200,00	478.400,00	0,00	478.400,00
419	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. World Innovative Telecommunication	2025	8/21/2025	8/20/2026	12	696.000,00	58.000,00	-	0,00	4	232.000,00	0,00	232.000,00	464.000,00	0,00	464.000,00
420	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. World Innovative Telecommunication	2025	8/21/2025	8/20/2026	12	2.355.000,00	196.250,00	-	0,00	4	785.000,00	0,00	785.000,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
421	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I Gede Wangsa	2025	8/24/2025	8/23/2026	12	177.600,00	14.800,00	-	0,00	4	59.200,00	0,00	59.200,00	118.400,00	0,00	118.400,00
422	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.ADIRA	2025	8/24/2025	8/23/2026	12	915.000,00	76.250,00	-	0,00	4	305.000,00	0,00	305.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
423	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MONARCH	2025	8/28/2025	2/27/2026	6	618.000,00	103.000,00	-	0,00	4	412.000,00	0,00	412.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00
424	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Toko Wajar	2025	8/30/2025	8/29/2026	12	1.410.000,00	117.500,00	-	0,00	4	470.000,00	0,00	470.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00
425	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	I GEDE OKA SUMANTRA	2025	9/2/2025	9/1/2026	12	5.280.000,00	440.000,00	-	0,00	4	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
426	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	9/2/2025	9/1/2026	12	171.200,00	14.266,67	-	0,00	4	57.066,67	0,00	57.066,67	114.133,33	0,00	114.133,33

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
427	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	9/2/2025	9/1/2026	12	169.500,00	14.125,00	-	0,00	4	56.500,00	0,00	56.500,00	113.000,00	0,00	113.000,00
428	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	9/2/2025	9/1/2026	12	162.800,00	13.566,67	-	0,00	4	54.266,67	0,00	54.266,67	108.533,33	0,00	108.533,33
429	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	9/2/2025	9/1/2026	12	158.600,00	13.216,67	-	0,00	4	52.866,67	0,00	52.866,67	105.733,33	0,00	105.733,33
430	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lotus Sea View	2025	9/5/2025	9/4/2026	12	606.000,00	50.500,00	-	0,00	4	202.000,00	0,00	202.000,00	404.000,00	0,00	404.000,00
431	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OPTIK INTERNASIONAL	2025	9/5/2025	9/4/2026	12	915.000,00	76.250,00	-	0,00	4	305.000,00	0,00	305.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
432	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OPTIK INTERNASIONAL	2025	9/5/2025	9/4/2026	12	915.000,00	76.250,00	-	0,00	4	305.000,00	0,00	305.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
433	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	The Royal Bali Club	2025	9/7/2025	9/6/2026	12	566.400,00	47.200,00	-	0,00	4	188.800,00	0,00	188.800,00	377.600,00	0,00	377.600,00
434	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	The Royal Bali Club	2025	9/7/2025	9/6/2026	12	588.000,00	49.000,00	-	0,00	4	196.000,00	0,00	196.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00
435	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ANEMONE	2025	9/7/2025	9/6/2026	12	375.000,00	31.250,00	-	0,00	4	125.000,00	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
436	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	9/8/2025	9/7/2026	12	537.000,00	44.750,00	-	0,00	4	179.000,00	0,00	179.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00
437	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	9/8/2025	9/7/2026	12	303.400,00	25.283,33	-	0,00	4	101.133,33	0,00	101.133,33	202.266,67	0,00	202.266,67
438	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	9/8/2025	9/7/2026	12	261.900,00	21.825,00	-	0,00	4	87.300,00	0,00	87.300,00	174.600,00	0,00	174.600,00
439	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	9/8/2025	9/7/2026	12	1.381.600,00	115.133,33	-	0,00	4	460.533,33	0,00	460.533,33	921.066,67	0,00	921.066,67
440	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MR D.I.Y	2025	9/11/2025	9/10/2026	12	2.226.300,00	185.525,00	-	0,00	4	742.100,00	0,00	742.100,00	1.484.200,00	0,00	1.484.200,00
441	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MR D.I.Y	2025	9/11/2025	9/10/2026	12	408.500,00	34.041,67	-	0,00	4	136.166,67	0,00	136.166,67	272.333,33	0,00	272.333,33
442	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	MR D.I.Y	2025	9/11/2025	9/10/2026	12	284.700,00	23.725,00	-	0,00	4	94.900,00	0,00	94.900,00	189.800,00	0,00	189.800,00
443	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.G & G Promotion	2025	9/12/2025	9/11/2026	12	2.355.000,00	196.250,00	-	0,00	4	785.000,00	0,00	785.000,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
444	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Mahagiri	2025	9/12/2025	9/11/2026	12	555.600,00	46.300,00	-	0,00	4	185.200,00	0,00	185.200,00	370.400,00	0,00	370.400,00
445	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ANEMONE UNTUNG SURAPATI	2025	9/13/2025	9/12/2026	12	672.000,00	56.000,00	-	0,00	4	224.000,00	0,00	224.000,00	448.000,00	0,00	448.000,00
446	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	ANEMONE UNTUNG SURAPATI	2025	9/13/2025	9/12/2026	12	750.000,00	62.500,00	-	0,00	4	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
447	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Liberty Dive Resort	2025	9/17/2025	9/16/2026	12	246.000,00	20.500,00	-	0,00	3	61.500,00	0,00	61.500,00	184.500,00	0,00	184.500,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
448	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Liberty Dive Resort	2025	9/17/2025	9/16/2026	12	304.500,00	25.375,00	-	0,00	3	76.125,00	0,00	76.125,00	228.375,00	0,00	228.375,00
449	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	9/20/2025	9/19/2026	12	386.400,00	32.200,00	-	0,00	3	96.600,00	0,00	96.600,00	289.800,00	0,00	289.800,00
450	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	APOTEK SINDU RAJA FARMA	2025	9/21/2025	9/20/2026	12	870.000,00	72.500,00	-	0,00	3	217.500,00	0,00	217.500,00	652.500,00	0,00	652.500,00
451	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	APOTEK SINDU RAJA FARMA	2025	9/21/2025	9/20/2026	12	915.000,00	76.250,00	-	0,00	3	228.750,00	0,00	228.750,00	686.250,00	0,00	686.250,00
452	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.G & G Promotion	2025	9/25/2025	9/24/2026	12	2.385.000,00	198.750,00	-	0,00	3	596.250,00	0,00	596.250,00	1.788.750,00	0,00	1.788.750,00
453	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2025	9/26/2025	9/25/2026	12	378.800,00	31.566,67	-	0,00	3	94.700,00	0,00	94.700,00	284.100,00	0,00	284.100,00
454	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2025	9/26/2025	9/25/2026	12	328.800,00	27.400,00	-	0,00	3	82.200,00	0,00	82.200,00	246.600,00	0,00	246.600,00
455	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2025	9/26/2025	9/25/2026	12	367.800,00	30.650,00	-	0,00	3	91.950,00	0,00	91.950,00	275.850,00	0,00	275.850,00
456	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2025	9/26/2025	9/25/2026	12	367.800,00	30.650,00	-	0,00	3	91.950,00	0,00	91.950,00	275.850,00	0,00	275.850,00
457	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2025	9/26/2025	9/25/2026	12	328.800,00	27.400,00	-	0,00	3	82.200,00	0,00	82.200,00	246.600,00	0,00	246.600,00
458	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2025	9/26/2025	9/25/2026	12	328.800,00	27.400,00	-	0,00	3	82.200,00	0,00	82.200,00	246.600,00	0,00	246.600,00
459	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT. BCA Tbk	2025	9/26/2025	9/25/2026	12	700.400,00	58.366,67	-	0,00	3	175.100,00	0,00	175.100,00	525.300,00	0,00	525.300,00
460	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	2025	9/29/2025	9/28/2026	12	1.231.800,00	102.650,00	-	0,00	3	307.950,00	0,00	307.950,00	923.850,00	0,00	923.850,00
461	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	375.000,00	31.250,00	-	0,00	3	93.750,00	0,00	93.750,00	281.250,00	0,00	281.250,00
462	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
463	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
464	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
465	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
466	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
467	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
468	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
469	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
470	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
471	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
472	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
473	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	336.000,00	28.000,00	-	0,00	3	84.000,00	0,00	84.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
474	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	375.000,00	31.250,00	-	0,00	3	93.750,00	0,00	93.750,00	281.250,00	0,00	281.250,00
475	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	375.000,00	31.250,00	-	0,00	3	93.750,00	0,00	93.750,00	281.250,00	0,00	281.250,00
476	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	375.000,00	31.250,00	-	0,00	3	93.750,00	0,00	93.750,00	281.250,00	0,00	281.250,00
477	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
478	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
479	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
480	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
481	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
482	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
483	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
484	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
485	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
486	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
487	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
488	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.Indocement Tunggal Perkasa	2025	9/30/2025	9/29/2026	12	426.000,00	35.500,00	-	0,00	3	106.500,00	0,00	106.500,00	319.500,00	0,00	319.500,00
489	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV.Bintang Mas Jaya	2025	10/3/2025	10/2/2026	12	2.062.500,00	171.875,00	-	0,00	3	515.625,00	0,00	515.625,00	1.546.875,00	0,00	1.546.875,00

Dalam Rupiah

No	SKPD	Uraian	Masa Pembayaran	Masa Perjanjian		Masa Berlaku (Bulan)	Nilai Total	Nilai/Bulan	Jumlah Bulan sd Tahun 2024	Telah Menjadi Pendapatan LO sd Tahun Sebelumnya	Bulan Tahun 2025	Pendapatan LO - Tahun 2025			Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025		
												Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah	Atas Penerimaan Tahun 2025	Atas Penerimaan Sebelum Tahun 2025	Jumlah
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j = h*i	k	l	m	n = l+m	o	p	q = o+p
490	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Komang Bayu Swastika	2025	10/17/2025	10/16/2026	12	3.075.000,00	256.250,00	-	0,00	2	512.500,00	0,00	512.500,00	2.562.500,00	0,00	2.562.500,00
491	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Labihir	2025	10/27/2025	10/26/2026	12	375.000,00	31.250,00	-	0,00	2	62.500,00	0,00	62.500,00	312.500,00	0,00	312.500,00
492	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Beruang Mas Putra	2025	11/13/2025	11/12/2026	12	735.000,00	61.250,00	-	0,00	2	122.500,00	0,00	122.500,00	612.500,00	0,00	612.500,00
493	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OKSANA TERESHCHENKO	2025	11/17/2025	11/16/2026	12	510.000,00	42.500,00	-	0,00	1	42.500,00	0,00	42.500,00	467.500,00	0,00	467.500,00
494	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OKSANA TERESHCHENKO	2025	11/17/2025	11/16/2026	12	930.000,00	77.500,00	-	0,00	1	77.500,00	0,00	77.500,00	852.500,00	0,00	852.500,00
495	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OKSANA TERESHCHENKO	2025	11/17/2025	11/16/2026	12	131.900,00	10.991,67	-	0,00	1	10.991,67	0,00	10.991,67	120.908,33	0,00	120.908,33
496	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OKSANA TERESHCHENKO	2025	11/17/2025	11/16/2026	12	573.600,00	47.800,00	-	0,00	1	47.800,00	0,00	47.800,00	525.800,00	0,00	525.800,00
497	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OKSANA TERESHCHENKO	2025	11/17/2025	11/16/2026	12	160.500,00	13.375,00	-	0,00	1	13.375,00	0,00	13.375,00	147.125,00	0,00	147.125,00
498	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT.YAKULT	2025	11/28/2025	11/27/2026	12	330.000,00	27.500,00	-	0,00	1	27.500,00	0,00	27.500,00	302.500,00	0,00	302.500,00
499	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PABORITO COFFEE	2025	12/1/2025	1/31/2026	2	392.500,00	196.250,00	-	0,00	1	196.250,00	0,00	196.250,00	196.250,00	0,00	196.250,00
500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	12/4/2025	12/3/2026	12	173.600,00	14.466,67	-	0,00	1	14.466,67	0,00	14.466,67	159.133,33	0,00	159.133,33
501	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	12/4/2025	12/3/2026	12	1.325.900,00	110.491,67	-	0,00	1	110.491,67	0,00	110.491,67	1.215.408,33	0,00	1.215.408,33
502	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	12/4/2025	12/3/2026	12	537.000,00	44.750,00	-	0,00	1	44.750,00	0,00	44.750,00	492.250,00	0,00	492.250,00
503	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PT SENSATIA BOTANICALS	2025	12/4/2025	12/3/2026	12	166.600,00	13.883,33	-	0,00	1	13.883,33	0,00	13.883,33	152.716,67	0,00	152.716,67
504	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rama Candidasa Resort & Spa	2025	12/7/2025	12/6/2026	12	1.581.600,00	131.800,00	-	0,00	1	131.800,00	0,00	131.800,00	1.449.800,00	0,00	1.449.800,00
505	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Puri Bagus	2025	12/10/2025	3/9/2026	3	140.300,00	46.766,67	-	0,00	1	46.766,67	0,00	46.766,67	93.533,33	0,00	93.533,33
506	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Puri Bagus	2025	12/10/2025	3/9/2026	3	77.300,00	25.766,67	-	0,00	1	25.766,67	0,00	25.766,67	51.533,33	0,00	51.533,33
507	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. Pasir Madawa / PT. Indomarco Prismatama	2025	12/21/2025	12/20/2026	12	1.034.400,00	86.200,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1.034.400,00	0,00	1.034.400,00
	JUMLAH - Pajak Reklame						**482.119.100,00**			**147.902.116,67**		**115.749.750,00**	**121.189.183,33**	**236.938.933,33**	**97.278.050,00**	**0,00**	**97.278.050,00**
	JUMLAH - PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - PAJAK DAERAH						**482.119.100,00**			**147.902.116,67**		**115.749.750,00**	**121.189.183,33**	**236.938.933,33**	**97.278.050,00**	**0,00**	**97.278.050,00**
JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA							**1.141.761.100,00**			**357.966.450,00**		**175.851.750,00**	**251.417.516,67**	**427.269.266,67**	**130.329.050,00**	**226.196.333,33**	**356.525.383,33**

Daftar Mutasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025

No.	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Saldo Per 31 Desember 2024 Setelah Koreksi	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun 2024	Pembayaran Utang Belanja Hibah Tahun 2024	Pembayaran Utang Belanja Transfer Tahun 2024	Pembayaran Utang Belanja Tahun 2024 di Tahun 2025	Utang atas Belanja Tahun 2025	Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025
a	b	c	d	e = c+d	f	g	h	i	j	k = f+g+h+i+j	l	m = e-k+l
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	7.000.634.592,00	(3.000.000,00)	6.997.634.592,00	6.997.634.592,00					6.997.634.592,00	36.106.605,00	36.106.605,00
2	Dinas Kesehatan	350.766.507,50	(4.734.668,00)	346.031.839,50	313.676.672,50	32.355.167,00				346.031.839,50	385.600.176,00	385.600.176,00
3	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karangasem	27.427.694.192,75	(13.345.651,75)	27.414.348.541,00	6.595.183.136,00	20.819.165.405,00				27.414.348.541,00	36.126.511.206,00	36.126.511.206,00
4	UPTD Puskesmas (BLUD)	2.365.886.566,00	(51.360.304,00)	2.314.526.262,00	1.961.663.065,00	352.863.197,00				2.314.526.262,00	2.311.348.011,00	2.311.348.011,00
5	Dinas PUPR	137.763.388,00		137.763.388,00	13.884.375,00		68.794.891,00	55.084.122,00		137.763.388,00	42.833.750,00	42.833.750,00
6	Dinas Perhubungan	35.782.025,00		35.782.025,00	30.562.625,00	5.219.400,00				35.782.025,00	25.813.600,00	25.813.600,00
7	Dinas Koperasi, UKM,Perindustrian dan Perdagangan	112.337.110,00	(2.950,00)	112.334.160,00	58.317.800,00	54.016.360,00				112.334.160,00	100.261.725,00	100.261.725,00
8	BPKAD (SKPD)	1.685.879.517,66	(270.312.500,00)	1.415.567.017,66	1.415.567.017,66					1.415.567.017,66	1.914.069.270,90	1.914.069.270,90
9	BPKAD (SKPKD)	2.586.956.896,00		2.586.956.896,00					2.586.956.896,00	2.586.956.896,00	1.225.728.767,00	1.225.728.767,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	12.750.000,00		12.750.000,00	12.750.000,00					12.750.000,00	18.592.000,00	18.592.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	10.380.000,00		10.380.000,00	10.380.000,00					10.380.000,00		-
12	Bagian Umum	263.114.144,37	(121.467.422,37)	141.646.722,00	141.646.722,00					141.646.722,00	236.959.288,00	236.959.288,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.000,00		60.000,00	60.000,00					60.000,00	505.000,00	505.000,00
14	Kecamatan Bebandem										3.118.286,00	3.118.286,00
15	Jumlah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										12.882.019,00	12.882.019,00
16	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan										9.912.366,00	9.912.366,00
Jumlah		**41.990.004.939,28**	**(464.223.496,12)**	**41.525.781.443,16**	**17.551.326.005,16**	**21.263.619.529,00**	**68.794.891,00**	**55.084.122,00**	**2.586.956.896,00**	**41.525.781.443,16**	**42.450.242.069,90**	**42.450.242.069,90**

Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Karangasem Per 31 Desember 2025

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER									TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA HIBAH	BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	JJI		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l = (c + d + ... + j + k)
1	**Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga**										
	Iuran BPJS 4% Tunjangan Profesi Guru PNS Triwulan IV gelombang 4 & 6 Tahun Anggaran 2025	5.691.213,00									5.691.213,00
	Iuran BPJS 4% Tunjangan Profesi Guru PPPK Triwulan IV gelombang 4 & 6 Tahun Anggaran 2025	1.165.392,00									1.165.392,00
	Iuran BPJS 4% Tambahan Penghasilan Guru PNS Triwulan III dan IV Gelombang I Tahun Anggaran 2025	3.150.000,00									3.150.000,00
	Iuran BPJS 4% Tambahan Penghasilan Guru PPPK Triwulan III dan IV Gelombang I Tahun Anggaran 2025	26.100.000,00									26.100.000,00
	Sub Jumlah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	**36.106.605,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**36.106.605,00**
2	**Dinas Kesehatan**										
-	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**										
	UPTD Puskesmas Abang I	3.764.370,00									3.764.370,00
	UPTD Puskesmas Abang II	3.530.552,00									3.530.552,00
	UPTD Puskesmas Bebandem	4.114.435,00									4.114.435,00
	UPTD Puskesmas Karangasem I	3.988.846,00									3.988.846,00
	UPTD Puskesmas Karangasem II	3.614.000,00									3.614.000,00
	UPTD Puskesmas Kubu I	3.046.670,00									3.046.670,00
	UPTD Puskesmas Kubu II	3.251.960,00									3.251.960,00
	UPTD Puskesmas Manggis I	3.358.716,00									3.358.716,00
	UPTD Puskesmas Manggis II	1.284.785,00									1.284.785,00
	UPTD Puskesmas Rendang	14.247.347,00									14.247.347,00
	UPTD Puskesmas Selat	5.067.403,00									5.067.403,00
	UPTD Puskesmas Sidemen	3.851.232,00									3.851.232,00
	RS Pratama Kubu	2.732.481,00									2.732.481,00
	RSUD Karangasem	81.474.549,00									81.474.549,00
-	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**										-
	UPTD Puskesmas Abang I	2.235.606,00									2.235.606,00
	UPTD Puskesmas Abang II	1.585.308,00									1.585.308,00
	UPTD Puskesmas Bebandem	2.291.204,00									2.291.204,00
	UPTD Puskesmas Karangasem I	1.666.449,00									1.666.449,00
	UPTD Puskesmas Karangasem II	2.169.636,00									2.169.636,00
	UPTD Puskesmas Kubu I	2.431.784,00									2.431.784,00
	UPTD Puskesmas Kubu II	2.622.171,00									2.622.171,00
	UPTD Puskesmas Manggis I	1.154.010,00									1.154.010,00
	UPTD Puskesmas Manggis II	641.141,00									641.141,00

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER									TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA HIBAH	BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	JJI		
	UPTD Puskesmas Rendang	7.087.369,00									7.087.369,00
	UPTD Puskesmas Selat	3.053.703,00									3.053.703,00
	UPTD Puskesmas Sidemen	2.099.169,00									2.099.169,00
	RS Pratama Kubu	832.506,00									832.506,00
	RSUD Karangasem	86.456.793,00									86.456.793,00
											-
-	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3				543.200,00						543.200,00
											-
-	**UPTD Laboratorium Kesehatan**										-
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	17.925.930,00									17.925.930,00
-	**UPTD RS Pratama Kubu**										-
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										-
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	12.749.849,00									12.749.849,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	92.996.817,00									92.996.817,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN (JASPEL JKN)				6.235.534,00						6.235.534,00
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan				1.494.651,00						1.494.651,00
	Sub Jumlah Dinas Kesehatan	**377.326.791,00**	**-**	**-**	**8.273.385,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**385.600.176,00**
3	**UPTD Puskesmas**										
-	**UPTD Puskesmas Abang I**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		155.079.726,00								155.079.726,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					4.457.110,00					4.457.110,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				40.865,00						40.865,00
-	**UPTD Puskesmas Abang II**										
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		135.914.793,00								135.914.793,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					6.374.365,00					6.374.365,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				79.202,00						79.202,00
-	**UPTD Puskesmas Bebandem**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		168.214.612,00								168.214.612,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN					4.239.470,00					4.239.470,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				50.990,00						50.990,00
-	**UPTD Puskesmas Karangasem I**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER									TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA HIBAH	BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	JJI		
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		148.928.211,00								148.928.211,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					4.918.527,00					4.918.527,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				183.641,00						183.641,00
-	**UPTD Puskesmas Karangasem II**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		152.499.728,00								152.499.728,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					7.467.253,00					7.467.253,00
-	**UPTD Puskesmas Kubu I**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		146.313.270,00								146.313.270,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					7.077.838,00					7.077.838,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				350.290,00						350.290,00
-	**UPTD Puskesmas Kubu II**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		160.426.849,00								160.426.849,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					5.873.562,00					5.873.562,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				263.002,00						263.002,00
-	**UPTD Puskesmas Manggis I**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		127.347.038,00								127.347.038,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					7.720.608,00					7.720.608,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				9.093,00						9.093,00
-	**UPTD Puskesmas Manggis II**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		49.466.144,00								49.466.144,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					1.989.357,00					1.989.357,00
-	**UPTD Puskesmas Rendang**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		533.367.882,00								533.367.882,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					32.289.676,00					32.289.676,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				73.219,00						73.219,00
-	**UPTD Puskesmas Selat**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		232.440.253,00								232.440.253,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					17.053.514,00					17.053.514,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				126.753,00						126.753,00
-	**UPTD Puskesmas Sidemen**										-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										-
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		165.481.751,00								165.481.751,00

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER									TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA HIBAH	BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	JJI		
	Belanja Obat-Obatan-Obat					27.299.992,00					27.299.992,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					3.000.000,00					3.000.000,00
	Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi NON ASN/Remunerasi					4.864.488,00					4.864.488,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				64.939,00						64.939,00
	Sub Jumlah UPTD Puskesmas	**-**	**2.175.480.257,00**	**-**	**1.241.994,00**	**134.625.760,00**		**-**	**-**	**-**	**2.311.348.011,00**
4	**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**										
-	Jasa Pelayanan		7.693.914.947,00								7.693.914.947,00
-	Darah Siap Transfusi (PMI)					577.456.000,00					577.456.000,00
-	BBM Rujukan Ambulance					3.845.600,00					3.845.600,00
-	Sampah Medis					125.831.487,00					125.831.487,00
-	Bahan Habis Pakai (BHP)					17.700.619.099,00					17.700.619.099,00
-	Obat-obatan					7.183.414.066,00					7.183.414.066,00
-	Bahan Kimia/Lab					2.338.282.317,00					2.338.282.317,00
-	RS Balimed Karangasem					114.804.090,00					114.804.090,00
-	Belanja Air					64.247.600,00					64.247.600,00
-	Sewa Alat-alat Kedokteran Lainnya					264.350.000,00					264.350.000,00
-	RS Kasih Ibu Saba					24.415.000,00					24.415.000,00
-	PT Prodia					26.931.000,00					26.931.000,00
-	Pembacaan TLD					8.400.000,00					8.400.000,00
	Sub Jumlah UPTD RSUD KAB KARANGASEM	**-**	**7.693.914.947,00**	**-**	**-**	**28.432.596.259,00**		**-**	**-**	**-**	**36.126.511.206,00**
5	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				-						
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Sewa Alat Berat (TA 2025)	1.050.000,00									1.050.000,00
-	Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakkan (TA 2025)	33.750,00									33.750,00
-	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (TA 2025)	40.000.000,00									40.000.000,00
-	Insentif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus (Triwulan IV TA 2025)	1.750.000,00									1.750.000,00
	Sub Jumlah DPUPR Perkim	**42.833.750,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.833.750,00**
6	**Dinas Perhubungan**										
-	Insentf bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.080.000,00									10.080.000,00
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan	7.516.800,00									7.516.800,00
-	Insentf bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				4.918.400,00						4.918.400,00

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER									TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA HIBAH	BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	JJI		
-	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan				3.298.400,00						3.298.400,00
	Sub Jumlah Dinas Perhubungan	**17.596.800,00**	**-**	**-**	**8.216.800,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**25.813.600,00**
7	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**										
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Pasar TW IV 2025	49.529.325,00									49.529.325,00
-	Pembayaran Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar Untuk Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				33.011.200,00						33.011.200,00
-	Pembayaran Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Jasa Kontribusi Pengelolaan Pasar Kepada Desa Adat /Koperasi/Pemilik Lahan Pasar untuk Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				17.721.200,00						17.721.200,00
	Sub Jumlah Diskopperindag	49.529.325,00		-	50.732.400,00			-		-	**100.261.725,00**
8	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)**										
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	13.432.590,81									13.432.590,81
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	88.230.000,00									88.230.000,00
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	411.103.251,87									411.103.251,87
-	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT	1.401.303.428,22									1.401.303.428,22
	Sub Jumlah BPKAD	**1.914.069.270,90**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1.914.069.270,90**
9	**BPKAD (SKPKD)**										
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah									950.718.471,00	950.718.471,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah									275.010.296,00	275.010.296,00
	Sub Jumlah BPKAD SKPKD	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.225.728.767,00**	**1.225.728.767,00**
10	**Dinas Ketenagakerjaan**										
	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.064.000,00									18.064.000,00

NO	SKPD	UTANG BELANJA DAN TRANSFER									TOTAL
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA			BELANJA HIBAH	BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	JJI		
	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah	528.000,00									528.000,00
	Sub Jumlah Dinas Ketenagakerjaan	**18.592.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**18.592.000,00**
11	**BAGIAN UMUM**										
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.434.760,00									19.434.760,00
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.096.415,91									2.096.415,91
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.770.000,00									13.770.000,00
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	64.160.623,13									64.160.623,13
-	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT	137.497.488,96									137.497.488,96
	Sub Jumlah Bagian Umum	**236.959.288,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**236.959.288,00**
12	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**										
-	Insentif Retribusi jasa usaha atas Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar,grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya	30.000,00									30.000,00
	Insentif Retribusi Jasa Usaha atas Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	475.000,00									475.000,00
	Sub Jumlah DPM&PTSP	**505.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**505.000,00**
13	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										-
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.882.019,00									12.882.019,00
	Jumlah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**12.882.019,00**									12.882.019,00
14	**Kecamatan Bebandem**										-
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.118.286,00									3.118.286,00
	Jumlah Kecamatan Bebandem	**3.118.286,00**									3.118.286,00
15	**Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan**										-
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.912.366,00									9.912.366,00
	Jumlah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	**9.912.366,00**									9.912.366,00
	Saldo Utang per 31 Desember 2025	**2.719.431.500,90**	**9.869.395.204,00**	**-**	**68.464.579,00**	**28.567.222.019,00**	**-**	**-**	**-**	**1.225.728.767,00**	**42.450.242.069,90**

Daftar Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025

No.	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Saldo Per 31 Desember 2024 Setelah Koreksi	Pembayaran utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024	Utang atas Belanja Tahun 2025	Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025
a	b	c	d	e =c+d	f	g	h = e-f+g
1	Utang Jangka Pendek Lainnya bendahara Dana BOS						
	SD Negeri 2 Tribuana	87,12		87,12	87,12		
	SMPN 3 Kubu	0,40		0,40	0,40		
	Jumlah	87,52	-	87,52	87,52	-	-
2	utang Jangka Pendek Lainnya kelebihan pembayaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)						
	BPKAD	-	-	-	-	330.245.000,00	330.245.000,00
	Jumlah	-	-	-	-	330.245.000,00	330.245.000,00
3	utang Jangka Pendek Lainnya kelebihan pembayaran opsen denda pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)						
	BPKAD					44.205.930,00	44.205.930,00
	Jumlah	-	-	-	-	44.205.930,00	44.205.930,00
Jumlah		**87,52**	**-**	**87,52**	**87,52**	**374.450.930,00**	**374.450.930,00**

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025

No	OPD	Beban Pegawai							Jumlah Beban Pegawai
		Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Beban Pegawai BLUD	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j = c+d+e+f+g+h+i
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	292.326.775.699,00	183.794.116.109,00	-	-	-	-	-	476.120.891.808,00
2	Dinas Kesehatan	97.382.459.969,00	22.795.340.043,50	-	-	-	-	19.830.293.912,00	140.008.093.924,50
3	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-	-	22.018.761.753,00	22.018.761.753,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.549.100.419,00	4.343.075.966,00	-	-	-	-	-	14.892.176.385,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.601.137.635,00	3.063.643.378,00	-	-	-	-	-	9.664.781.013,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.368.945.805,00	1.216.240.846,00	-	-	-	-	-	3.585.186.651,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.466.732.488,00	1.263.259.118,00	-	-	-	-	-	3.729.991.606,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.492.144.076,00	1.797.456.719,00	-	-	-	-	-	5.289.600.795,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	2.976.523.731,00	1.881.287.425,00	-	-	-	-	-	4.857.811.156,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.373.863.102,00	1.310.629.127,00	-	-	-	-	-	3.684.492.229,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.448.301.296,00	1.498.756.632,00	-	-	-	-	-	4.947.057.928,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.365.502.124,00	1.348.679.846,00	-	-	-	-	-	3.714.181.970,00
13	Dinas Perhubungan	4.400.455.016,00	2.130.361.899,00	-	-	-	-	-	6.530.816.915,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.394.628.510,00	1.408.940.444,00	-	-	-	-	-	3.803.568.954,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.893.728.110,00	2.195.783.415,00	-	-	-	-	-	6.089.511.525,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.286.553.784,00	1.428.085.627,00	-	-	-	-	-	3.714.639.411,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.353.258.478,00	1.710.534.389,00	-	-	-	-	-	5.063.792.867,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.751.821.422,00	905.908.834,00	-	-	-	-	-	2.657.730.256,00
19	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	12.568.925.516,00	6.154.522.575,00	-	-	-	-	-	18.723.448.091,00
20	Sekretariat Daerah	10.187.247.750,00	6.838.262.052,00	-	-	1.089.360.489,00	710.000.000,00	-	18.824.870.291,00
21	Sekretariat DPRD	2.999.331.921,00	1.574.608.036,00	-	32.413.729.684,00	-	249.200.000,00	-	37.236.869.641,00

No	OPD	Beban Pegawai							Jumlah Beban Pegawai
		Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Beban Pegawai BLUD	
22	Badan Perencanaan Daerah	2.155.425.041,00	1.427.711.923,00	-	-	-	-	-	3.583.136.964,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.235.042.312,00	13.258.399.379,66	-	-	-	-	-	22.493.441.691,66
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.726.002.967,00	1.579.754.894,00	-	-	-	-	-	4.305.757.861,00
25	Badan Riset dan Inovasi daerah	620.804.651,00	532.327.349,00	-	-	-	-	-	1.153.132.000,00
26	Inspektorat Daerah	3.694.805.234,00	3.289.898.837,00	-	-	-	-	-	6.984.704.071,00
27	Kecamatan Karangasem :	4.035.195.598,00	2.032.548.537,00	-	-	-	-	-	6.067.744.135,00
28	Kecamatan Abang	2.117.732.657,00	989.573.401,00	-	-	-	-	-	3.107.306.058,00
29	Kecamatan Kubu	1.313.393.091,00	763.811.097,00	-	-	-	-	-	2.077.204.188,00
30	Kecamatan Bebandem	1.829.197.896,00	947.480.208,00	-	-	-	-	-	2.776.678.104,00
31	Kecamatan Selat	1.562.633.949,00	847.900.243,00	-	-	-	-	-	2.410.534.192,00
32	Kecamatan Rendang	2.260.911.354,00	1.082.888.065,00	-	-	-	-	-	3.343.799.419,00
33	Kecamatan Sidemen	1.568.480.444,00	768.981.950,00	-	-	-	-	-	2.337.462.394,00
34	Kecamatan Manggis	2.034.016.777,00	1.082.811.875,00	-	-	-	-	-	3.116.828.652,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.464.367.938,00	1.341.754.924,00	-	-	-	-	-	3.806.122.862,00
JUMLAH		**507.805.446.760,00**	**278.605.335.163,16**	**-**	**32.413.729.684,00**	**1.089.360.489,00**	**959.200.000,00**	**41.849.055.665,00**	**862.722.127.761,16**

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025

No	OPD	Beban Barang dan Jasa								
		Beban Barang	Beban Jasa	Beban Pemeliharaan	Beban Perjalanan Dinas	Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Beban Barang dan Jasa BOS	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Beban Barang dan Jasa BLUD	JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k = c+d+e+f+g+h+i+j
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.904.813.549,00	12.461.215.364,00	10.724.797.763,92	280.535.570,00	846.550.000,00	58.774.877.957,98	-	-	88.992.790.204,90
2	Dinas Kesehatan	21.760.667.630,88	95.580.037.137,00	1.363.326.428,10	780.633.830,00	1.000.000,00	-	3.760.860.214,00	11.891.339.430,60	135.137.864.670,58
3	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-	-	-	79.623.151.205,43	79.623.151.205,43
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.861.991.915,00	9.904.258.113,00	8.470.113.571,00	247.599.558,00	-	-	-	-	21.483.963.157,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.463.662.080,00	825.143.769,00	133.638.950,00	128.990.000,00	-	-	-	-	2.551.434.799,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	721.620.576,40	964.763.013,00	123.151.750,00	26.906.440,00	9.200.000,00	-	-	-	1.845.641.779,40
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	773.453.318,00	934.248.977,00	148.154.900,00	147.652.769,00	-	-	-	-	2.003.509.964,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.812.476.572,00	1.353.325.230,00	260.410.961,68	335.519.111,00	3.325.120.000,00	-	-	-	7.086.851.874,68
9	Dinas Ketenagakerjaan	571.505.349,00	350.141.396,00	74.022.440,00	164.788.442,00	-	-	-	-	1.160.457.627,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	4.037.783.196,00	7.972.503.253,15	112.852.000,00	66.370.240,00	-	-	-	-	12.189.508.689,15
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.351.988.106,48	1.319.351.351,00	106.648.899,00	33.159.400,00	7.000.000.000,00	-	-	-	9.811.147.756,48
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	774.064.651,00	2.104.019.267,00	75.613.300,00	239.968.104,00	-	-	-	-	3.193.665.322,00
13	Dinas Perhubungan	1.191.829.726,00	5.993.028.643,00	351.775.362,50	37.966.840,00	-	-	-	-	7.574.600.571,50
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	392.050.747,00	4.546.825.348,00	308.997.248,00	70.845.400,00	-	-	-	-	5.318.718.743,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.012.940.985,00	2.753.514.795,00	1.453.158.777,00	365.019.501,00	-	-	-	-	5.584.634.058,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	499.465.723,00	720.989.263,00	98.761.000,00	60.685.704,00	-	-	-	-	1.379.901.690,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.383.378.178,00	1.864.951.156,00	1.333.341.269,00	170.835.659,00	2.244.900.000,00	-	-	-	6.997.406.262,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	371.155.568,00	356.906.612,00	195.407.902,00	60.840.037,00	-	-	-	-	984.310.119,00
19	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	5.862.594.888,00	2.540.554.556,00	159.170.050,00	278.729.957,00	298.925.000,00	-	-	-	9.139.974.451,00
20	Sekretariat Daerah	14.482.231.240,00	8.466.796.827,50	1.690.209.781,00	2.779.475.002,00	620.000.000,00	-	-	-	28.038.712.850,50
21	Sekretariat DPRD	5.033.078.167,00	5.828.194.222,30	1.140.718.947,78	13.602.788.141,00	-	-	-	-	25.604.779.478,08
22	Badan Perencanaan Daerah	542.096.209,00	1.343.692.658,00	79.239.050,00	257.601.907,00	-	-	-	-	2.222.629.824,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.060.329.958,00	4.260.979.325,00	323.547.105,00	256.010.409,00	-	-	-	-	6.900.866.797,00
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	463.849.597,00	1.495.951.459,00	271.225.000,00	237.548.427,00	-	-	-	-	2.468.574.483,00
25	Badan Riset dan Inovasi daerah	177.098.342,70	381.698.238,00	14.713.500,00	23.390.209,00	12.500.000,00	-	-	-	609.400.289,70
26	Inspektorat Daerah	852.317.834,00	1.070.323.457,00	187.018.425,00	310.260.743,00	-	-	-	-	2.419.920.459,00
27	Kecamatan Karangasem	1.444.021.518,00	3.088.439.104,00	98.590.500,00	32.298.800,00	6.000.000,00	-	-	-	4.669.349.922,00
28	Kecamatan Abang	314.250.879,00	173.930.236,00	28.579.550,00	7.311.560,00	-	-	-	-	524.072.225,00
29	Kecamatan Kubu	296.728.083,00	101.919.501,00	28.804.250,00	6.383.100,00	-	-	-	-	433.834.934,00
30	Kecamatan Bebandem	283.093.238,00	163.879.654,00	58.142.200,00	6.874.760,00	-	-	-	-	511.989.852,00
31	Kecamatan Selat	370.561.567,00	140.585.569,00	39.204.000,00	7.007.472,00	-	-	-	-	557.358.608,00
32	Kecamatan Rendang	300.316.535,00	100.501.780,00	58.645.000,00	-	-	-	-	-	459.463.315,00
33	Kecamatan Sidemen	254.385.923,00	146.438.716,00	59.459.400,00	2.736.100,00	-	-	-	-	463.020.139,00
34	Kecamatan Manggis	284.813.445,00	184.140.228,00	62.537.400,00	4.920.000,00	9.000.000,00	-	-	-	545.411.073,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.090.977.282,00	878.368.813,00	94.179.000,00	790.694.600,00	424.500.000,00	-	-	-	4.278.719.695,00
	JUMLAH	**81.997.592.576,46**	**180.371.617.030,95**	**29.728.155.680,98**	**21.822.347.792,00**	**14.797.695.000,00**	**58.774.877.957,98**	**3.760.860.214,00**	**91.514.490.636,03**	**482.767.636.888,40**

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025

No	OPD	Beban Hibah						
		Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Beban Hibah Dana BOS	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Beban Hibah Dana BOSP	Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Jumlah
a	b	c	d	e	f	g	h	i = c+d+e+f+g+h
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	250.000.000,00	7.570.000.000,00	935.845.481,00	-	5.009.540.314,00	-	13.765.385.795,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
3	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	573.728.000,00	27.128.000.000,00	-	-	-	-	27.701.728.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	335.000.000,00	-	-	-	-	335.000.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	-	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	40.415.000.000,00	-	-	-	-	40.415.000.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	-	6.309.120.383,00	-	-	-	-	6.309.120.383,00
20	Sekretariat Daerah	885.711.771,00	30.000.000,00	-	-	-	-	915.711.771,00
21	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Riset dan Inovasi daerah	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Karangasem	-	693.014.243,00	-	-	-	-	693.014.243,00
28	Kecamatan Abang	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Kubu	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Bebandem	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Selat	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Rendang	-	-	-	-	-	-	-

No	OPD	Beban Hibah						
		Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Beban Hibah Dana BOS	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Beban Hibah Dana BOSP	Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Jumlah
33	Kecamatan Sidemen	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Manggis	-	-	-	-	-	-	-
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	190.000.000,00	-	1.464.685.000,00	-	-	1.654.685.000,00
	JUMLAH	**1.709.439.771,00**	**82.695.134.626,00**	**935.845.481,00**	**1.464.685.000,00**	**5.009.540.314,00**	**-**	**91.814.645.192,00**

Rincian Mutasi PFK APBD, BLUD, FKTP, BOK dan BOSP Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2025

		APBD		BLUD RSUD		BLUD PUSKESMAS		FKTP	
NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	9.952.758.315,00	9.952.758.315,00	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	59.857.104,00	59.857.104,00	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	28.483.249,00	28.483.249,00	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	27.372.722,00	27.372.722,00	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	18.046.723,00	18.046.723,00	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	69.056.272,00	69.056.272,00	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	77.780.454,00	77.780.454,00	-	-	-	-	-	-
8	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	29.443.271.431,00	29.443.271.431,00	-	-	-	-	-	-
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	952.483.821,00	952.483.821,00	-	-	-	-	-	-
10	Iuran Jaminan Kematian	2.496.244.317,00	2.496.244.317,00	-	-	-	-	-	-
11	Iuran Wajib Pegawai	488.446,00	488.446,00	-	-	-	-	-	-
12	Iuran Wajib Pegawai 1%	6.062.434.260,00	6.062.434.260,00	124.058.880,00	124.058.880,00	183.084.069,00	183.084.069,00	10.596.931,00	10.596.931,00
13	Taspen	11.238.194.217,00	11.238.194.217,00	-	-	-	-	-	-
14	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jaminan Hari Tua	2.363.941.494,00	2.363.941.494,00	-	-	-	-	-	-
16	Pajak Pertambahan Nilai	17.577.743.120,33	17.577.743.120,33	5.197.733.683,00	5.197.733.683,00	454.973.438,00	454.973.438,00	10.676.259,00	10.676.259,00
17	PPh 21	17.329.801.768,00	17.329.801.768,00	1.173.062.799,00	1.173.062.799,00	117.167.866,00	117.167.866,00	7.790.016,00	7.790.016,00
18	Pajak Penghasilan Ps 22	928.906.350,50	928.906.350,50	615.509.894,00	615.509.894,00	37.752.990,00	37.752.990,00	426.702,00	426.702,00
19	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pajak Penghasilan Ps 23	404.478.610,00	404.478.610,00	109.820.172,00	109.820.172,00	34.529.309,00	34.529.309,00	1.517.609,00	1.517.609,00
21	Pajak Penghasilan Ps 25	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.939.064.550,10	1.939.064.550,10	14.711.419,00	14.711.419,00	4.456.679,00	4.456.679,00	538.317,00	538.317,00
	JUMLAH	**100.970.407.223,93**	**100.970.407.223,93**	**7.234.896.847,00**	**7.234.896.847,00**	**831.964.351,00**	**831.964.351,00**	**31.545.834,00**	**31.545.834,00**

		BOK		BOSP		JUMLAH	
NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	-	-	-	-	9.952.758.315,00	9.952.758.315,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	-	-	-	59.857.104,00	59.857.104,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	-	-	-	28.483.249,00	28.483.249,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	-	-	-	27.372.722,00	27.372.722,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	-	-	-	18.046.723,00	18.046.723,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	-	-	-	-	69.056.272,00	69.056.272,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	-	-	-	77.780.454,00	77.780.454,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	-	-	-	-	29.443.271.431,00	29.443.271.431,00
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	-	-	-	-	952.483.821,00	952.483.821,00
10	Iuran Jaminan Kematian	-	-	-	-	2.496.244.317,00	2.496.244.317,00
11	Iuran Wajib Pegawai	-	-	-	-	488.446,00	488.446,00
12	Iuran Wajib Pegawai 1%	-	-	-	-	6.380.174.140,00	6.380.174.140,00
13	Taspen	-	-	-	-	11.238.194.217,00	11.238.194.217,00
14	Lainnya	-	-	-	-	-	-
15	Jaminan Hari Tua	-	-	-	-	2.363.941.494,00	2.363.941.494,00
16	Pajak Pertambahan Nilai	12.860.890,00	12.860.890,00	3.748.157.836,00	3.748.157.836,00	27.002.145.226,33	27.002.145.226,33
17	PPh 21	13.094.085,00	13.094.085,00	20.686.100,00	20.686.100,00	18.661.602.634,00	18.661.602.634,00
18	Pajak Penghasilan Ps 22	-	-	-	-	1.582.595.936,50	1.582.595.936,50
19	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	-	-	-	-	-
20	Pajak Penghasilan Ps 23	4.829.866,00	4.829.866,00	47.749.770,00	47.749.770,00	602.925.336,00	602.925.336,00
21	Pajak Penghasilan Ps 25	-	-	-	-	-	-
22	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.790.164,00	1.790.164,00	-	-	1.960.561.129,10	1.960.561.129,10
	JUMLAH	**32.575.005,00**	**32.575.005,00**	**3.816.593.706,00**	**3.816.593.706,00**	**112.917.982.966,93**	**112.917.982.966,93**

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN KEUANGAN

(PT. BPD BALI)

PER 31 DESEMBER 2025

BANK BPD BALI

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025



	Halaman/ *Pages*	
Daftar Isi		***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		***Director's Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	1- 2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4 - 5	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	6	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 106	*Notes to the Financial Statements*

***

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:/*We, the undersigned:*

Nama/ *Name*	: I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Alamat Kantor/ *Office address*	: Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar, Bali.
Jabatan/ *Position*	: Direktur Utama/*President Director.*

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

State that :

1. *We are responsible for preparation and presentation of the Entity financial statements for the year ended December 31, 2025;*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in the financial statements is complete and correct;*
   b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement letter is made truthfully.*

Denpasar, 09 Januari 2026/*January 09*, 2026

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Directors*

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Utama/*President Director*	Pelaksana Tugas Direktur Operasional/*Interim Director of Operations*

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No/*Ref.* : 00001/2.1127/AU.1/07/0060-5/1/I/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Bali (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini audit kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Pada tanggal 31 Desember 2025, pinjaman yang diberikan mencerminkan 58% dari jumlah aset. Bank melaporkan pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp117.899.889.023 (Catatan 9) dengan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai Sebesar Rp1.155.828.488.569 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") berdasarkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 109").

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on these matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Description of the Key Audit Matter:

Allowance for impairment credit loss attributable to loans

As of December 31, 2025, the loans represent 58% of the total assets. The Bank reported a recovery of allowance for impairment losses on loans amounting to Rp117,899,889,023 (Note 9) with an accumulated allowance for impairment losses of Rp1,155,828,488,569 for the year ended December 31, 2025.

These allowance for impairment losses for loans measured at amortized cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under SFAS 109, "Financial Instruments" ("SFAS 109").

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan. Bank menghitung KKE dengan menggunakan beberapa parameter seperti *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto. Bank juga menggunakan asumsi dalam menentukan eksposure seperti arus kas masa depan yang diharapkan dan faktor makro ekonomi masa akan datang, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat, mengingat ketidakpastian ekonomi yang timbul di masa yang akan datang.

As disclosed in Note 3 to the financial statements, this assessment involves significant management judgment and estimation. The Bank calculates ECL using several parameters such as the probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate. The Bank also uses assumptions in determining exposures such as expected future cash flows and future macroeconomic factors, several weighted probability scenarios and ECL overlay adjustments made, given the economic uncertainties that arise in the future.

Pengungkapan Bank mengenai cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dijelaskan pada Catatan 2d dan 9 atas laporan keuangan.

The Bank's disclosures regarding allowance for impairment losses on loans are explained in Notes 2d and 9 to the financial statements.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

How our audit addressed this Key Audit Matter

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan, sebagai berikut:

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating allowance for impairment credit loss attributable to loans, include the following:

- Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Bank yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen pinjaman.

- *We have carried out procedures by understanding and evaluating the design and implementation of Bank relevant internal controls for the identification of financial assets with significantly increased credit risk or objective evidence of impairment, through testing of internal rating determination controls and conducting sampling examinations of loan documents.*

- Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

- *We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

- Kami mengevaluasi keakuratan, kelengkapan data dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 109. Kami juga mengevaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia.

- *We evaluate the accuracy, completeness of data and significant modeling assumptions used in the ECL model, including the determination of the probability of default, loss given default and exposure at default, which are applied to the requirements of SFAS 109. We also evaluate the reasonableness of Indonesia's macroeconomic forecasts.*

- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilainya dinilai secara individual berdasarkan sampel.

- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis.*

- Kami juga menilai apakah pengungkapan laporan keuangan secara memadai dan Bank eksposur mencerminkan tepat terhadap risiko kredit.

- *We also assessed whether the financial statement disclosures adequately and appropriately reflect the Bank's exposures to credit risk.*

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Description of the Key Audit Matter:

Penilaian atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain

Valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss

Bank telah mengakui beban atas imbalan kerja sebesar Rp78.092.444.731 dan kerugian komprehensif lainnya sebesar Rp71.764.669.581 pada tanggal 31 Desember 2025. Beban atas imbalan kerja dan asumsi yang mendasar penilaian kerugian aktuarial merupakan hal penting, dan juga subjektif, pertimbangan karena saldo tidak stabil dan mempengaruhi komponen ekuitas lainnya Bank. Manajemen telah memperoleh saran dari aktuaria untuk menghitung aktuaria ini. Penilaian aktuaria ini sensitif terhadap asumsi utama seperti tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kematian. Mengingat pertimbangan diperlukan oleh Bank dalam menetapkan asumsi ini, volatilitas dapat diakibatkan oleh perubahan asumsi dan signifikansi saldo terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi terperinci mengenai hal ini disajikan dalam Catatan 20 pada laporan keuangan.

Bank's has recognized the post employment benefit expense of Rp78,092,444,731 and other comprehensive loss amounting to Rp71,764,669,581 as of December 31, 2025. The employee benefit expense and assumptions that underpin the valuation of the actuarial loss are important, and also subjective, judgments as the balance is volatile and affects Bank's other equity component. Management has obtained advice from actuarial specialists in order to calculate this actuarial amount. These actuarial valuations are sensitive to key assumptions such as discount rates, inflation rates and mortality rates. Given the judgment required by Bank's in setting these assumptions, the volatility can result from changes in assumptions and the significance of the balances to the financial statements as a whole. Detailed information pertaining to this is presented in Note 20 to the financial statements.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan Penilaian atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain, sebagai berikut:

Kami mengevaluasi penilaian Bank atas asumsi yang digunakan dalam penilaian kerugian aktuaria yang dilaporkan di penghasilan komprehensif lainnya termasuk informasi yang terkandung dalam laporan penilaian aktuaria untuk setiap program.

Kami mereviu ruang lingkup penilaian yang dilakukan dan kami mengevaluasi keahlian dan independensi aktuaris Bank. Ini termasuk penilaian dan penyelidikan untuk asumsi utama yang diterapkan, *benchmarking*, tingkat diskonto, inflasi, dan tingkat kematian, terhadap data eksternal jika tersedia dan membentuk ekspektasi independen kami sendiri berdasarkan pengetahuan kami tentang praktik pasar lokal.

Kami juga menilai kecukupan dan kelengkapan pengungkapan imbalan kerja terkait dalam laporan keuangan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsitensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

How our audit addressed this Key Audit Matter

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss, include the following:

We evaluated Bank's assessment of the assumptions used in the valuation of actuarial loss reported in other comprehensive loss including the information contained within the actuarial valuation reports for each plan.

We reviewed the scope of valuations performed and we evaluated the expertise and independence of Bank's actuary. This included assessment and inquiry for the key assumptions applied, benchmarking, discount rates, inflation, and mortality rates, against external data where available and forming our own independent expectations based on our knowledge of local market practices.

We also assessed the adequacy and completeness of the related post employment benefit disclosures in the financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

  Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

  Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern.

Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

00001

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO Registered Public Accountants

Welly Adrianto, CPA

No. Ijin Akuntan Publik / *Public Accountant License Number:* AP. 0060

Jakarta, 9 Januari 2026/*January 9, 2026*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
ASET				***ASSETS***
Kas	4	868.945.822.140	580.735.597.835	*Cash*
Giro Pada Bank Indonesia	5	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro Pada Bank Lain	6			*Current Accounts with Other Banks*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		50.635.186.507	45.119.172.455	*Third Parties* -
Jumlah Giro Pada Bank Lain		50.635.186.507	45.119.172.455	*Total Current Accounts with Other Banks*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(33.541.150)	(32.035.380)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		50.601.645.357	45.087.137.075	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7			*Placements with Bank Indonesia and Other Banks*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	*Third Parties* -
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lainnya		2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	*Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(871.698.227)	(1.778.693.256)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	
Efek - Efek	8			*Securities*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		11.273.318.815.282	9.760.077.271.692	*Third Parties* -
Jumlah Efek - Efek		11.273.318.815.282	9.760.077.271.692	*Total Securities*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(17.000.000)	-	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		11.273.301.815.282	9.760.077.271.692	
Pinjaman yang Diberikan	9			*Loans*
- Pihak Berelasi		28.230.814.253	32.221.984.154	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		24.972.675.035.729	22.797.947.429.290	*Third Parties* -
Total Pinjaman yang Diberikan		25.000.905.849.982	22.830.169.413.444	*Total Loans*
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
		23.845.077.361.413	21.525.087.396.052	
Aset Tetap	10	419.196.470.729	388.131.366.573	*Fixed Assets*
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(275.476.562.033)	(258.497.766.049)	*Less: Accumulated Depreciation*
		143.719.908.696	129.633.600.524	
Aset Takberwujud	11	58.954.311.542	51.760.428.880	*Intangible Assets*
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(49.035.896.338)	(44.300.181.485)	*Less: Accumulated Amortization*
		9.918.415.204	7.460.247.395	
Aset Hak Guna	12	91.975.523.569	82.819.125.696	*Right-of-Use Assets*
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(43.258.122.900)	(38.048.572.569)	*Less: Accumulated Depreciation*
		48.717.400.669	44.770.553.127	
Aset Lain - lain	13	277.012.295.332	229.637.221.111	*Other Assets*
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	18d	197.591.142.029	152.158.565.329	*Deferred Tax Assets - Net*
TOTAL ASET		**41.380.988.852.181**	**38.312.681.637.703**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Segera	14	82.350.275.735	74.679.631.081	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan dari Nasabah	15a			*Deposits from Customers*
- Pihak Berelasi		1.807.365.717.356	590.707.387.143	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		32.045.845.274.782	31.577.083.821.666	*Third Parties* -
		33.853.210.992.138	32.167.791.208.809	
Simpanan dari Bank Lain	16a			*Deposits from Other Banks*
- Pihak Berelasi		--	--	*Related Parties* -
- Pihak Ketiga		1.075.658.295.068	661.691.987.042	*Third Parties* -
		1.075.658.295.068	661.691.987.042	
Pinjaman yang Diterima	17	23.991.677.262	24.433.647.846	*Borrowings*
Utang Pajak	18a	69.394.655.562	69.106.199.029	*Taxes Payable*
Beban yang Masih Harus Dibayar	19	24.454.215.202	22.595.470.132	*Accrued Expense*
Liabilitas Imbalan Kerja	20	296.976.448.112	265.776.646.490	*Post-Employment Benefit Obligation*
Liabilitas Sewa	21	17.404.471.686	15.056.560.942	*Lease Liabilities*
Liabilitas Lain - lain	22	417.705.426.456	351.353.237.757	*Other Liabilities*
TOTAL LIABILITAS		**35.861.146.457.221**	**33.652.484.589.128**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham				*Share Capital*
nilai nominal Rp1.000.000				*Rp1,000,000 (full amount)*
(nilai penuh) per saham				*par value per share*
Modal Dasar :				*Authorized Capital :*
7.000.000 saham				*7,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:	23			*Issued and fully paid capital:*
- 2025 : 2.880.177 saham		2.880.177.000.000	-	*2025 : 2,880,177 shares* -
- 2024 : 2.407.177 saham		--	2.407.177.000.000	*2024 : 2,407,177 shares* -
Tambahan Modal Disetor	24	1.881.882	1.881.882	*Additional Paid-In Capital*
Pengukuran Kembali atas				*Remeasurement of Post-Employment*
Imbalan Pasca Kerja		(126.881.342.334)	(70.904.900.061)	*Benefit Obligation*
Saldo laba				*Retained Earnings*
- Telah Ditentukan Penggunaannya		1.665.073.760.835	1.445.457.325.528	*Appropriated* -
- Belum Ditentukan Penggunaannya		1.101.471.094.577	878.465.741.226	*Unappropriated* -
TOTAL EKUITAS		**5.519.842.394.960**	**4.660.197.048.575**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**41.380.988.852.181**	**38.312.681.637.703**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
PENDAPATAN BUNGA				***INTEREST INCOME***
Pendapatan Bunga	26	3.504.934.937.519	3.347.855.439.821	*Interest Income*
Beban Bunga	27	(1.064.599.686.227)	(970.120.006.452)	*Interest Expense*
Jumlah Pendapatan Bunga Bersih		**2.440.335.251.292**	**2.377.735.433.369**	***Net Interest Income***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan Operasional	28	222.943.984.674	215.885.835.798	*Operating Income*
Provisi dan Komisi	28	12.086.235.268	9.767.737.892	*Provision and Commission*
Lainnya	28	56.473.176.790	1.085.572.298	*Others*
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		**291.503.396.732**	**226.739.145.988**	***Total Other Operating Income***
PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				***RECOVERY (PROVISION) FOR IMPAIRMENT LOSSES***
Aset Keuangan	29	116.264.804.003	(148.944.965.537)	*Financial Assets*
Transaksi Rekening Administratif	22	93.730.043	3.029.469.404	*Transactions of Administrative Accounts*
Jumlah Pemulihan (Pembentukan) Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		**116.358.534.046**	**(145.915.496.133)**	***Total Recovery (Provision) for Impairment Losses***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan Tunjangan Karyawan	30	(908.986.417.227)	(857.370.759.001)	*Salaries and Employee Benefits*
Umum dan Administrasi	31	(429.182.535.035)	(372.758.501.000)	*General and Administrative*
Beban Modifikasi		(39.918.101.120)	(44.540.916.125)	*Modification Expenses*
Jumlah Beban Operasional Lainnya		**(1.378.087.053.382)**	**(1.274.670.176.126)**	***Total Other Operating Expenses***
LABA OPERASIONAL		**1.470.110.128.688**	**1.183.888.907.098**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)***
Pendapatan Non Operasional	32	35.677.871.708	55.191.460.239	*Non-Operating Income*
Beban Non Operasional	32	(45.991.319.231)	(41.081.119.538)	*Non-Operating Expenses*
Jumlah Pendapatan Non Operasional		**(10.313.447.523)**	**14.110.340.701**	***Total Non Operating Income***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**1.459.796.681.165**	**1.197.999.247.799**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN (BEBAN)				***INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT***
Kini	18b	(387.969.935.980)	(343.799.588.163)	*Current Tax*
Tangguhan	18d	29.644.349.392	24.266.081.590	*Deferred Tax*
Jumlah Beban Pajak		**(358.325.586.588)**	**(319.533.506.573)**	***Total Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN		**1.101.471.094.577**	**878.465.741.226**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laporan Laba Rugi				***Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss***
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	20	(71.764.669.581)	(14.981.663.737)	*Remeasurement of Post - Employement Benefit Obligation*
- Pajak Penghasilan Terkait	18d	15.788.227.308	3.295.966.022	*Related Income Tax -*
Jumlah Rugi Komprehensif Lain		**(55.976.442.273)**	**(11.685.697.715)**	***Total Other Comprehensive Loss***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**1.045.494.652.304**	**866.780.043.511**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM	44	404.740	411.318	*EARNINGS PER SHARE*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid-up Capital*	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital*	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit Obligation-After Tax*	Saldo Laba / *Retained Earnings*			Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*
					Telah Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*			
					Cadangan Umum/ *General Reserve*	Cadangan Tujuan/ *Specific Reserve*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	
Saldo 1 Januari 2025 / *Balance as of January 1, 2025*		**2.407.177.000.000**	**1.881.882**	**(70.904.900.061)**	**1.445.457.325.528**	**--**	**878.465.741.226**	**4.660.197.048.575**
Laba tahun berjalan/ *Profit for the year*		--	--	--	--	--	1.101.471.094.577	1.101.471.094.577
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit obligation*	20	--	--	(55.976.442.273)	--	--	--	(55.976.442.273)
Setoran modal/ *Issuance of share capital*	24	473.000.000.000	--	--	--	--	--	473.000.000.000
Pembagian laba/ *Distribution of net income :*								
Cadangan umum/ *General reserve*	25	--	--	--	219.616.435.307	--	(219.616.435.307)	--
Dividen / *Dividends*	25	--	--	--	--	--	(658.849.305.920)	(658.849.305.920)
Saldo 31 Desember 2025 / *Balance as of December 31, 2025*		**2.880.177.000.000**	**1.881.882**	**(126.881.342.334)**	**1.665.073.760.835**	**--**	**1.101.471.094.577**	**5.519.842.394.960**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

					Saldo Laba / *Retained Earnings*			
					Telah Ditentukan penggunaaannya/ *Appropriated*			
	Catatan/ *Notes*	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid-up Capital***	**Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital***	**Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurement of post employment benefit Obligation-After Tax***	**Cadangan Umum/ *General Reserve***	**Cadangan Tujuan/ *Specific Reserve***	**Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated***	**Jumlah Ekuitas/ *Total Equity***
Saldo 1 Januari 2024 / *Balance as of January 1, 2024*		**2.050.257.000.000**	**2.340.338**	**(59.219.202.346)**	**1.260.900.248.199**	**-**	**738.228.309.317**	**3.990.168.695.508**
Laba tahun berjalan/ *Profit for the year*		--	--	--	--	--	878.465.741.226	878.465.741.226
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ *Remeasurament of post employment benefit obligation*	20	--	--	(11.685.697.715)	--	--	--	(11.685.697.715)
Setoran modal/ *Issuance of share capital*	24	356.920.000.000	(458.456)	--	--	--	--	356.919.541.544
Pembagian laba/ *Distribution of net income :*								
Cadangan umum/ *General reserve*	25	--	--	--	184.557.077.329	--	(184.557.077.329)	-
Dividen / *Dividends*	25	--	--	--	--	--	(553.671.231.988)	(553.671.231.988)
Saldo 31 Desember 2024/ *Balance as of December 31, 2024*		**2.407.177.000.000**	**1.881.882**	**(70.904.900.061)**	**1.445.457.325.528**	**--**	**878.465.741.226**	**4.660.197.048.575**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal: 31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari Pendapatan Bunga, Provisi, dan Komisi		3.468.219.766.908	3.325.426.375.190	*Receipts from Interest Income, Fee and Commissions*
Pembayaran Bunga		(1.062.740.941.157)	(967.549.242.090)	*Payments of Interest Expense*
Pembayaran Beban Tenaga Kerja		(906.796.368.064)	(735.821.419.561)	*Payments of Employee Expense*
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi		(373.756.182.021)	(321.580.852.461)	*Payments of General and Administrative Expense*
Penerimaan dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional Lainnya		265.822.041.836	224.163.788.098	*Receipts from Other Operating Income and Other Non-Operating Income*
Pembayaran Beban Non Operasional		(45.991.319.231)	(41.081.119.538)	*Non Operating Expense Paid*
Arus Kas Sebelum Perubahan Pada Aset dan Liabilitas Operasi		**1.344.756.998.271**	**1.483.557.529.638**	***Cash Flows Before Changes to Operating Assets and Liabilities***
(Kenaikan) / Penurunan dalam Aset Operasi				*(Increase) / Decrease In Operating Assets*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7	(192.360.193.748)	28.800.004.297	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		-	3.965.877.652.040	*Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement*
Pinjaman yang Diberikan	9	(2.244.531.751.737)	(1.797.174.407.778)	*Loans*
Aset Keuangan Lainnya				
Aset Lain-lain	13	1.426.331.658	6.501.624.333	*Other Assets*
Kenaikan / (Penurunan) Liabilitas Operasi				*(Increase) / Decrease In Operating Liabilities*
Liabilitas Segera	14	7.670.644.654	(28.715.358.221)	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan Nasabah	15	1.685.419.783.329	4.219.373.905.941	*Deposits from Customers*
Simpanan dari Bank Lain	16	413.966.308.026	(888.890.225.126)	*Deposits from Other Banks*
Liabilitas Lain-lain	22	72.802.945.548	(20.547.913.112)	*Other Liabilities*
Utang Pajak	18	(9.019.131.786)	(51.713.374.301)	*Taxes Payable*
Pembayaran Pajak Penghasilan	18	(378.662.347.661)	(340.266.587.176)	*Payment of Income Tax*
Penerimaan Pengembalian Pajak	18	-	57.677.097.293	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		701.469.586.554	6.634.479.947.828	*Net Cash Provided by Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian Efek-efek	8	(1.513.241.543.590)	(5.404.041.068.047)	*Acquisition from Marketable Securities*
Pembelian Aset Tetap	10	(44.600.642.117)	(35.677.351.024)	*Acquisitions of Fixed Assets*
Penjualan Aset Tetap	10	165.985.612	-	*Proceeds from Sale of Fixed Assests*
Pembelian Aset Takberwujud	11	(7.193.882.662)	(3.991.054.298)	*Acquisitions of Intangible Assests*
Pembayaran Aset Hak Guna		(468.245.883)	(9.987.014.734)	*Payment of Right-of-Use Assets*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1.565.338.328.640)	(5.453.696.488.103)	*Net Cash Used in Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penambahan Setoran Modal	23,24	473.000.000.000	356.919.541.544	*Proceeds from Issuance of Share Capital*
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	17	(441.970.584)	(42.296.794.237)	*Payments of Borrowings*
Pembayaran Liabiltas Sewa	45	(21.311.933.334)	(9.624.383.458)	*Payments of Lease Liabilities*
Pembayaran Dividen	25	(658.849.305.920)	(553.671.231.988)	*Dividend Paid*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(207.603.209.838)	(248.672.868.139)	*Net Cash Used in Financing Activities*
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		**(1.071.471.951.924)**	**932.110.591.586**	***Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		**6.465.667.511.109**	**5.533.556.919.523**	***Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year***
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		**5.394.195.559.185**	**6.465.667.511.109**	***Cash and Cash Equivalents at End of the Year***
Komponen Kas dan Setara Kas:				***Components of Cash and Cash Equivalents:***
Kas	4	868.945.822.140	580.735.597.835	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	*Current Account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	6	50.635.186.507	45.119.172.455	*Current Account with Other Banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Jangka Waktu Jatuh Tempo Tiga Bulan atau Kurang Sejak Tanggal Perolehan	7	1.850.024.737.924	3.144.937.358.091	*Placement with Bank Indonesia and Other Banks - Maturing within Three Months Since Aquisition Date*
Jumlah Kas dan Setara Kas		**5.394.195.559.185**	**6.465.667.511.109**	***Total Cash and Cash Equivalents***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank") didirikan berdasarkan akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2490), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Surat No. 6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Setelah itu diterbitkan ijin usaha Bank BPD Bali melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No.Kep.110/025/65 pada tanggal 2 November 1965.

Bank kembali mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali") yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 No. 6 Seri D No. 3).

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No. 7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-12858 HT.01.01.TH. 2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No. 6004.

Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/26/KEP.DGS/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, telah disetujui pengalihan izin usaha Bank dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tanggal 11 November 2004, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Umum Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/32/KEP.DGS/2004 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Bank Umum Devisa.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan akta No. 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, S.H., mengenai penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., Notaris di Denpasar, dan masih dalam proses pencatatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tanggal 27 Maret 2025, Bank memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Tanda Terdaftar Sebagai Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk No.1/PM.02/STTD/PPE-EBUS/2025 mengenai izin usaha sebagai Pedagang Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS).

Dengan izin tersebut, Bank berwenang melakukan transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) di Pasar Sekunder, baik untuk kepentingan Bank sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah.

Pemegang saham pengendali dari Bank adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (The "Bank") was established based on deed No.131 dated June 5, 1962 by Ida Bagus Ketut Rurus, as Secretary of the Government of Bali and Notary.

In relation to the amendment of Law No. 13 year 1962 regarding the Basic regulation of the Regional Development Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 No. 59, Supplement to State Gazette No. 2490), the Provincial Government of Bali set a change of legal status of the Bank of Limited Liability Company into Region through Letter No. 6/DPRDGR dated February 9, 1965 and approved by the Ministry of Internal Affairs in its decision No. Des.9/21/28-128 dated July 14, 1965. After that, a business license was issued for Bank BPD Bali through the Decree of the Minister of Central Bank Affairs/Governor of Bank Negara Indonesia No. Kep.110/025/65 on November 2, 1965.

The Bank has changed its legal form from Regional Companies into a Limited Liability Company (PT). Changes in legal entities established in the Provincial Government of Bali Regulation No.2 year 2002 regarding Changes Legal Entity BPD Bali from "PD" to Limited Liability Company (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali") which was promulgated on March 5, 2002 (Bali Provincial Gazette 2002 No. 6 Series D No. 3).

Changes to the Bank's legal form into a Limited Liability Company as stated in notarial deed No. 7 dated May 12, 2004, made before Notary Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., which has been approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia by Decree No. C-12858 HT.01.01.TH. 2004 dated May 21, 2004 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 22, 2004, Supplement No. 6004.

Through Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No. 6/26/KEP.DGS/2004 dated July 19, 2004 regarding Corporate Entity Change from "Perusahaan Daerah" Bank Pembangunan Daerah to "Perseroan Terbatas" Bank Pembangunan Daerah Bali, has approved the transfer of the business license of Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali to Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

On November 11, 2004, the Bank has obtained a license to operate as a Foreign Exchange Bank in accordance with the Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No. 6/32/KEP.DGS/2004 on the appointment of the Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali as a Foreign Exchange Bank.

The Bank's Articles of Association have amended several times, among other, by deed No. 25 dated August 8, 2008, Notary I Made Widiada, S.H., regarding the adjustment and amendment Bank's Articles by Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies.

The latest amendment to the Articles of Association is in accordance with Deed Number 46 dated December 22, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Bali, which was made by I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., Notary in Denpasar, and is still in the process of being recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights.

On March 27, 2025, the Bank obtained approval from the Financial Services Authority (OJK) through a Registration Certificate as a Securities Broker-Dealer for Debt Securities and Sukuk No. 1/PM.02/STTD/PPE-EBUS/2025, regarding a business license as a Securities Dealer conducting business as a Securities Broker-Debt Securities and Sukuk (PPE-EBUS).

With this license, the Bank is authorized to conduct Debt Securities and Sukuk (EBUS) transactions in the Secondary Market, both for the Bank's own benefit and for the benefit of its customers.

The controlling shareholder of the Bank is Provincial Government of Bali and Badung Regency Goverments.

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa (Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan memperoleh surat penunjukan Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Valuta Asing dan /atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri) yang kegiatan usaha utamanya adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu berupa surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan surat berharga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana, meminjam dana dari/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan/atau antar pihak ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
k. Membeli agunan, baik sebagian maupun seluruhnya melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
m. Melakukan kegiatan dalam perdagangan Valuta Asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya atau mendirikan perusahaan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
o. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. Menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
r. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
s. Pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
t. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Purpose and Objectives

Based on Article 3 of the Bank's Articles of Association, the purpose and objective of the Bank is to do business in the banking sector. In order to achieve the aforementioned aims and objectives, the Company may carry out the business activities of Regional Government Foreign Exchange Commercial Banks (This group includes the activities of banks whose capital is wholly or substantially owned by the Regional Government as stated in the applicable laws and regulations and obtain a letter of appointment of Bank Indonesia to be able to conducting banking business activities in foreign currencies and/or conducting banking transactions with foreign parties) whose main business activities are as follows:

a. *To collect third-party funds in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings and/or other similar forms;*
b. *To grant loans;*
c. *Issuing a letter of acknowledgment of debt;*
d. *Buying, selling or guaranteeing at risk or interest and at the behest of its customers, namely in the form of bills of exchange including those accepted by the bank whose validity period is no longer than the custom in trading of said letters, debt acknowledgments and other trade papers whose validity period is not longer than is customary in trading such documents, state treasury papers and government guarantee letters, Bank Indonesia Certificates (SBI), Bonds, trade papers with a maturity in accordance with applicable laws and regulations and other securities in accordance with laws and regulations applicable;*
e. *Transferring money both for its own interests and for the benefit of customers;*
f. *To put placement, obtain borrowings from/or provide financing to other banks, either by letter, telecommunication facilities, sight letter of credit (L/C), cheque or other facilities;*
g. *Receive payments from bills on securities and perform calculations with/or between third parties;*
h. *Provide a place for storage of goods and securities;*
i. *Carry out custodial activities for the benefit of other parties based on a contract;*
i. *Placing funds from customers to other customers in the form of securities listed on the stock exchange*
k. *Purchasing collateral, either in part or in whole through an auction or in other ways in the event that the debtor does not fulfill his obligations to the bank, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations;*
l. *Performing factoring activities, credit card business and trustee activities;*
m. *Carrying out activities in Foreign Exchange trading and/or as a Foreign Exchange Bank by complying with the provisions of the applicable laws and regulations;*
n. *To conduct invesment activities through share participation in banks or other financial institution in accordance with the prevailing regulation;*
o. *Act as the founder and administrator of the Pension Fund in accordance with the applicable laws and regulations;*
p. *Carry out other activities commonly carried out by commercial banks as long as they do not conflict with the applicable laws and regulations;*
q. *Organizing payment system service activities;*
r. *Carrying out receivables transfer activities;*
s. *Utilization of information technology in accordance with applicable laws and regulations;*
t. *Carry out other activities with the approval of the Otoritas jasa Keuangan.*

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya

Bank berkantor pusat di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar. Bank mengklasifikasikan jaringan kantor menjadi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu. Selain itu Bank memiliki Terminal Perbankan Elektronik (TPE) berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ATM Setor Tarik Tunai (CRM) dan Sistem Pembayaran Elektronik (EDC) serta kegiatan/aktivitas lainnya. Jumlah jaringan kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan kegiatan/aktivitas lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024	
Kantor Pusat	1	1	*Main Office*
Kantor Cabang Utama	1	1	*Main Branch Office*
Kantor Cabang	13	13	*Branch Office*
Kantor Cabang Pembantu	88	88	*Sub Branch Office*
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	224	215	*Automated Teller Machines*
ATM Setor Tarik Tunai (CRM)	26	26	*Cash Recycling Machines*
Sistem Pembayaran Elektronik (EDC)	103	103	*Electronic Data Captures*
Kegiatan/Aktivitas Lainnya	56	57	*Other Events/ Activities*
	512	**504**	

Sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, jaringan kantor Bank terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, dan Kantor di Luar Negeri. Untuk memperluas layanan kepada nasabah, Bank dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE).

Sesuai pengumuman OJK tanggal 27 April 2022 melalui aplikasi APOLO-Jaringan Kantor, untuk *Payment Point* dan Kas Keliling tidak dilaporkan sebagai jaringan kantor Bank namun dicatatkan sebagai kegiatan/aktivitas lainnya karena merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Bank dan berada di bawah supervisi Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu.

1. *GENERAL (CONTINUED)*

c. *Office Network, Electronic Banking Terminal (TPE), and other events/activities.*

The Bank's head office is located at Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar. The Bank classifies the office network into Head Office, Main Branch Office, Branch Offices, and Sub-Branch Offices. In addition, the Bank has an Electronic Banking Terminal (TPE) in the form of Automated Teller Machines (ATM), ATM Cash Withdrawals (CRM) and Electronic Payment System (EDC) as well as other events/activities. The number of office networks, Electronic Banking Terminals (TPE) and other events/activities as of December 31, 2025 and 2024 (unaudited) are as follows:

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number POJK No. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks, the Bank's office network consists of the Head Office, Regional Offices, Branch Offices, Sub-Branch Offices, Functional Offices, and Overseas Offices. To expand services to customers, the Bank can provide Electronic Banking Terminal (TPE).

In accordance with the OJK announcement dated April 27, 2022 through the APOLO-Office Network application, Payment Points and Mobile Cash are not reported as the Bank's office network but are listed as other events/activities because they are part of an organizational unit within the Bank and are under the supervision of a Branch Office or Office, Sub Branch.

d. Organisasi dan Struktur Manajemen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham No. 47 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Februari 2023 dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., Akta Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., tanggal 12 Mei 2023 dan Akta No. 38 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H. tanggal 22 November 2023 serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0762A/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Struktur Keanggotaan Komite, serta Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 46 yang berita acaranya dibuat oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., tanggal 22 Desember 2025, Pada 31 Desember 2025 dan 2024 susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota Komite adalah sebagai berikut :

d. *Organizational and Management Structure*

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders No. 47 concerning Minutes of Shareholders' Meeting dated February 22, 2023 drawn up by Notary I Made Widiada, S.H., Deed of General Meeting of Shareholders No. 25 concerning Statement of Meeting Resolutions made by Notary I Made Widiada, S.H., dated May 12, 2023 and Deed No. 38 concerning Statement of Meeting Decisions made by Notary I Made Widiada, S.H. dated November 22, 2023 and Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number: 0762A/KEP/DIR/SDM/2025 dated December 22, 2025 concerning Committee Membership Structure, and the deed of extraordinary general meeting of shareholder No. 46, the minutes of which were also prepared by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn dated December 22, 2025 as of December 31, 2025 and 2024 the composition of the Board of Commissioners, Directors and Committee Members is as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*President Commissioner*
Komisaris Independen	I Nyoman Suparsa Widana	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.	*Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	I Gede Darmawa, S.E.	*Non Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	I Made Sutama, S.H., M.H.	*Non Independent Commissioner*
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	*President Director*
Direktur Teknologi Informasi (TI) dan Merangkap Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional	Ida Bagus Gede Setia Yasa	*Director of Information Technology (IT) and Concurrently as Director Operational Appointee*
Direktur Bisnis	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	*Director of Business*
Direktur Kredit	Made Lestara Widiatmika	*Director of Loan*
Direktur Kepatuhan	Drs. I Wayan Sutela Negara	*Director of Compliance*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*Chairman*
Anggota	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	*Member*
Anggota	I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.	*Member*
Anggota	I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.	*Member*
Anggota	-	*Member*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	*Chairman*
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	*Member*
Anggota	I Made Sutama, S.H., M.H.	*Member*
Anggota	I Nengah Dana Wirawan, S.E.	*Member*
Anggota	I Made Artawa, SE	*Member*

1. UMUM (LANJUTAN) / *1. GENERAL (CONTINUED)*

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

Komite Remunerasi dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	*Chairman*
Anggota	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*Member*
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	*Member*
Anggota	I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.	*Member*
Anggota	I Made Sutama, S.H., M.H.	*Member*
Anggota	A.A. Istri Eka Parwita Dewi, S.E., M.M.	*Member*
Anggota	I Made Artawa, SE	*Member*

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Ir. Gede Arimbawa	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	I Nyoman Suparsa Widana	*Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	*Non Independent Commissioner*
Komisaris Non Independen	I Gede Darmawa	*Non Independent Commissioner*
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	*President Director*
Direktur Operasional & TI	Ida Bagus Gede Setia Yasa	*Director of Operational & IT*
Direktur Bisnis	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	*Director of Business*
Direktur Kredit	Made Lestara Widiatmika	*Director of Loan*
Direktur Kepatuhan	Drs. I Wayan Sutela Negara	*Director of Compliance*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*Chairman*
Anggota	Ir. Gede Arimbawa	*Member*
Anggota	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	*Member*
Anggota	I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.	*Member*
Anggota	Drs. Ec. I Wayan Sugiarta, MM	*Member*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Ir. Gede Arimbawa	*Chairman*
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	*Member*
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si	*Member*
Anggota	I Nengah Dana Wirawan, S.E.	*Member*
Anggota	I Made Artawa, SE	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	*Chairman*
Anggota	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	*Member*
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, SH., MH	*Member*
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si	*Member*
Anggota	Ir Gede Arimbawa	*Member*
Anggota	Ida Ayu Putri Yuniawati, S.E	*Member*
Anggota	I Made Artawa, SE	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Anti *Fraud* Bank adalah I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA. sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 22 Maret 2024.

As of December 31, 2025 and 2024, the Head of the Bank's Internal Audit and Anti-Fraud Work Unit was I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA. in accordance with Directors' Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 dated March 22, 2024.

Divisi Sekretaris Perusahaan tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0059/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 31 Januari 2025 adalah Sanjaya Caesar, S.H., M.H. sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

The Corporate Secretary Division as of December 31 2025 based on the Decision Letter Board of Directors No.0059/KEP/DIR/SDM/2025 dated January 31, 2025 is Sanjaya Caesar, S.H., M.H. as the Head of Corporate Secretary Division.

Jumlah pegawai Bank adalah sebagai berikut:

The number of employees of the Bank are as follows:

	Tetap/ ***Permanent***	**Tidak Tetap/** ***Non-Permanent***	**Jumlah/** ***Total***	
2025	1.220	79	1.299	*2025*
2024	1.264	34	1.298	*2024*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan.

Efektif tanggal 1 Januari 2025, Bank menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Standar-standar berikut ini akan diterapkan di Indonesia sebagai berikut:

- PSAK 117: Kontrak asuransi; dan
- PSAK 221: Dampak perubahan tingkat tukar mata uang asing.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies that are consistently applied in the preparation of the financial statements are as follows:

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("IFAS") which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Instituteof Accountants (DSAK-IAI).

The Financial statements of the Bank have also been prepared and presented in accordance with the Banking Accounting Guidebook (BPAK) in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 34/SEOJK.03/2021 concerning the Banking Accounting Guidebook for Conventional Commercial Banks.

b. Basis for Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with SFAS 201, "Presentation of Financial Statement". The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 months from the date of acquisition, as long as they are not pledged as a collateral for borrowings nor restricted.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and asumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Bank's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards.

Effective January 1, 2025, the Bank adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Bank's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

The following standards to be adopted in Indonesia are as follows:

- *SFAS 117 : Insurance contracts; and*
- *SFAS 221 : The effects of changes in foreign exchange rates.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117, yang menggantikan PSAK 104, memperkenalkan model pengukuran yang konsisten untuk kontrak asuransi, dengan fokus pada perkiraan saat ini dan Margin Layanan Kontrak (CSM), yang mewakili laba yang belum diakui selama periode pertanggungan. Hal ini berbeda dengan praktik akuntansi yang beragam dalam PSAK 104, yang sering kali menekankan penerimaan premi dan klaim yang telah terjadi. PSAK 117 juga mewajibkan identifikasi kontrak yang merugikan, di mana biaya yang diharapkan melebihi manfaat, yang mengharuskan pengakuan kerugian segera dalam laba atau rugi, suatu konsep yang tidak dibahas dalam PSAK 104.

PSAK 117 berlaku untuk kontrak asuransi secara keseluruhan dan tidak terbatas pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, standar ini meningkatkan keterbandingan melalui persyaratan penyajian dan pengungkapan yang komprehensif, serta memisahkan pendapatan asuransi dari komponen investasi. Secara keseluruhan, PSAK 117 bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan penanggung, mengatasi ketidakteraturan di bawah PSAK 104, dan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang kesehatan keuangan dan paparan risiko.

PSAK 221 : Dampak perubahan kurs valuta asing

Perubahan tersebut menjelaskan situasi di mana suatu mata uang dianggap tidak dapat ditukar dan memberikan panduan tentang cara menghitung kurs spot saat suatu mata uang tidak dapat ditukar.

Perubahan tersebut juga menetapkan persyaratan pengungkapan baru untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dampak dari mata uang yang tidak dapat ditukar terhadap kinerja keuangan, posisi, dan arus kas suatu entitas.

Selain itu, perubahan tersebut menetapkan bahwa entitas pendekatan yang harus menerapkan konsisten untuk menentukan kelayakan tukar dan nilai tukar spot yang digunakan ketika kelayakan tukar tidak ada. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dan kepraktisan informasi keuangan yang disediakan kepada pengguna, terutama dalam situasi di mana kondisi ekonomi dapat melemah dengan cepat akibat mata uang yang tidak dapat ditukar.

Setidaknya, suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai:

- sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak dapat ditukar dengan mata uang lain;
- kurs spot yang digunakan;
- metode perkiraan; dan
- risiko yang dihadapi entitas akibat mata uang yang tidak dapat ditukar dengan mata uang lain.

Standar baru dan yang direvisi yang dilaporkan di atas tidak mempengaruhi laporan keuangan saat ini dan periode sebelumnya dari Bank.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan belum diterapkan secara dini oleh Bank, di diskusikan di Catatan 49.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (Continued)

Impact of adoption these new accounting standards are follows:

SFAS 117 : Insurance contracts

SFAS 117, replacing SFAS 104, introduces a consistent measurement model for insurance contracts, focusing on current estimates and the Contractual Service Margin (CSM), which represents unearned profit recognized over the coverage period. This contrasts with SFAS 104's diverse accounting practices, which often underlined premium receipts and incurred claims. SFAS 117 also mandates the identification of onerous contracts, where expected costs exceed benefits, requiring immediate loss recognition in profit or loss, a notion not addressed in SFAS 104.

SFAS 117 applies to entirely insurance contracts and is not restricted to insurance companies. Therefore, the standard improves comparability through comprehensive presentation and disclosure requirements, distinctive insurance revenue from investment components. Overall, SFAS 117 aims to provide a clearer representation of an insurer's financial position, addressing irregularities under SFAS 104 and enhancing stakeholders' understanding of financial health and risk exposure.

SFAS 221 : The effects of changes in foreign exchange rates

The amendments explain the situations under which a currency is considered non-exchangeable and provide guidance on how to estimate the spot exchange rate when a currency is not exchangeable.

The amendments also present new disclosure requirements to help users of financial statements understand the impact of a currency not being exchangeable on an entity's financial performance, position and cash flows.

Additionally, the amendments stipulate that entities should apply a constant approach to determine exchangeability and the spot exchange rate to use when exchangeability is lacking. These changes aim to improve the uniformity and practicality of financial information provided to users, especially in situations where economic conditions can weaken rapidly due to non-exchangeable currencies.

At a minimum, an entity must disclose information about:

- *the nature and financial effects of the currency not being exchangeable into the other currency;*
- *the spot exchange rate(s) used;*
- *the estimation method; and*
- *the risks to which the entity is exposed because of the currency not being exchangeable into the other currency.*

The new and amended standard/s reported above did not affect the current and prior financial statements of the Bank.

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2025 and have not been early adopted by the Bank, are discussed in Note 49.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

i) Klasifikasi
Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*) ;
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Pada pengakuan awal, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika penentuan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi pengukuran atau pengakuan inkonsistensi (kadang-kadang disebut sebagai "*accounting mismatch* ").

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities

i) Classification
The Bank classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortized cost.*

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

A debt instruments measured at FVOCI, only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell);*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Bank menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam klasifikasi ini kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Bank untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

i) Classification (Continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Bank. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Bank assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. subportfolios or sub-business lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Bank reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Bank did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Bank can reclassify all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverege* ;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu subklasifikasi yang ditetapkan pada saat pengakuan awal dan subklasifikasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lainnya. Liabilitas keuangan lainnya berkaitan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan liabilitas.

ii) Pengakuan awal

Bank pada awalnya mengakui Pinjaman yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajarnya ditambahkan/dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Bank pada saat pengakuan awal, dapat menetapkan aset dan liabilitas keuangan tertentu, pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar hanya diterapkan jika kondisi berikut terpenuhi:

a. penerapan opsi nilai wajar mengurangi atau menghilangkan ketidaksesuaian akuntansi yang mungkin timbul; atau
b. aset dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan, yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen utama berdasarkan nilai wajar; atau
c. aset dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

i) Classification (Continued)

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the 'Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a 'contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extention terms;*
- *Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified asheld for trading;*
- *Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

ii) Initial recognition

The Bank initially recognises loans and deposits on the date of origination.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

a. *Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.*
b. *Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.*

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

a. *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
b. *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
c. *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.*

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

iii) Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iv) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, atau Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur Pinjaman yang diberikan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan
Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Bank bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Bank memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap fee (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Nilai tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan penurunan nilai. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto suatu aset (bila aset tersebut bukan merupakan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi suatu liabilitas.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain (sebagai bagian dari ekuitas), sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya, kecuali keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar untuk instrumen utang. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

iv) Derecognition

The Bank derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognised as a separate asset or liability.

In transactions in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

Derecognition of financial liabilities
The Derecognition of financial liabilities Bank derecognizes financial liabilities when, and only when, the Bank's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Bank exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Bank accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

v) Income and expense recognition

a. *Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest rate method.*
The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment. In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

b. *Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets fair value through other comprehensive income are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument. When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk mengelola aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar diakui dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dikeluarkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar.

vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

viii) Pengukuran biaya perolehan amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan di terima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan *volume* yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

vi) Reclassification of financial assets

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Bank or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

viii) Amortised cost measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

The impairment losses on financial assets is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau di terima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Portfolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam *portfolio*.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan dalam tingkat hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkat berikut:

- Level 1: Harga yang dikutip (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang identik.
- Level 2: Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (sebagai harga) atau tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Level 3: Input untuk aset atau liabilitas berdasarkan input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses* (ECL) diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/ hold to collect and sell* dan memiliki arus kas *Solely Payments of Principal and Interest* (SPPI). Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai *Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI)*.

Bank menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

- *Probability of Default (PD)*
  Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage 1*) atau sepanjang umur *(Stage* 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

2. *INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

d. *Financial Assets and Liabilities (Continued)*

ix) Fair value measurement (Continued)

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- *Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).*
- *Level 3: Input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.*

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

SFAS 109 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses (ECL) or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12- month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest (SPPI). Expected credit losses are not recognized for equity instruments designated at Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI).

The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD) metrics, discounted using the effective interest rate.

- *Probability of Default (PD)*
  The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

- *Loss Given Default (LGD)*
  Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

- *Exposure at Default (EAD)*
  Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang *committed* pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka ECL dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage 2*)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam ECL. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan faktor kuantitatif. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (*Stage* 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk *portofolio revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik), bukan sepanjang periode kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

2. *INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (Continued)

- *Loss Given Default (LGD)*
  The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

- *Exposure at Default (EAD)*
  The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

12-month expected credit losses (Stage 1)

ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a twelve month basis.

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in ECL. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using quantitative factors. Financial assets that are 30 or more days past due and not credit impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, including credit cards, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn) rather than the contractual term.

For assets measured at amortised cost, the statement of financial position amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the statement of financial position amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif. Dasar *input*, asumsi dan teknik estimasi diungkapkan dalam Catatan 3.

Ketika ada sejumlah kewajiban debitur yang dianggap tidak bisa diselesaikan, maka cadangan kerugian penurunan nilai kredit *Stage* 3 akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai *Stage* 3 ini adalah selisih antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung menggunakan tiga skenario (antara lain dari hasil penyelesaian terbaik, terburuk atau yang paling mungkin) dimana Bank akan memberikan bobot probabilitas individu untuk setiap skenario pemulihan yang diidentifikasi berdasarkan rencana *workout* untuk masing-masing debitur individu.

Proyeksi arus kas juga mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memperhitungkan dampak dari informasi ekonomi di masa mendatang (*forward looking*). Keadaan dari masing-masing debitur secara individu dipertimbangkan ketika memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukan unsur pertimbangan yang signifikan.

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen Pinjaman yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

Pemulihan aset keuangan yang dihapuskan
Ketika pinjaman tidak tertagih, pinjaman tersebut dihapuskan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terkait. Pinjaman tersebut dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah diselesaikan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Pemulihan aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dari tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

e. Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Penjabaran

Mata Uang Pelaporan

Bank menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah (Rp). Transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Reuters. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui didalam laporan laba rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai invetasi bersih yang memenuhi syarat.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "kerugian/(keuntungan) lain-lain-neto".

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasfikasikan sebagai tersedia untuk dijual dianalisa antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (Continued)

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the statement of financial position date using the effective interest rate as the discount rate.The basis of inputs, assumptions and estimation technique are disclosed in Note 3.

Where any amount is considered irrecoverable, a Stage 3 credit impairment provision is raised. This Stage 3 provision is the difference between the loan carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting minimum three scenarios (among others typically the best, worst or most likely recovery outcomes) where the Bank assigns individual probability weighting for each recovery scenario that has been identified based on the workout plan for each individual debtors.

The cash flows projection include realisable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgment.

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognised as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognised together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognised as other liabilities.

Recoveries of written-off financial assets
When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

e. Foreign Currency Transaction and Translations

Reporting Currency

The Bank maintains their accounting records in Indonesian Rupiah (Rp). Transactions during the year involving currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions were made.

Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated inforeign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Reuters. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges.

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash equivalents are presented in the profit or loss within"finance income or costs". All other net foreign exchange gains and losses are presented inthe profit or loss within "other (losses)/gains - net".

Changes in the fair value of monetary securities denominated in foreign currency classified as available-for-sale are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security.Translation differences related to changes inamortised cost are recognised in profit or loss,and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

e. Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Penjabaran (Lanjutan)

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-meneter yang dicatat pada nilai wajar diakui sebagai bagian keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar. Sebagai contoh, selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-meneter seperti ekuitas yang dimiliki dan dicatat pada nilai wajar melaui laporan laba-rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar dan selisih penjabarannya pada aset non-moneter seperti tersedia ekuitas yang diklasifkasikan sebagai *fair value through other comprehensive income* diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 menggunakan kurs tengah Reuters pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Dolar Amerika Serikat	16.675	16.095	*United States Dollar (USD)*

f. Giro Wajib Minimum

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

g. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *interbank call money* , tabungan, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD),dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Surat Utang Negara (SUN), obligasi bank, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diperdagangkan di bursa efek.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat sesuai dengan klasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, efek-efek untuk tujuan investasi diukur sesuai dengan klasifikasinya sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada efek-efek.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali *(Repo)* dan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali *(Reverse Repo)*

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)* disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Foreign Currency Transaction and Translations (Continued)

Translation differences on non-monetary financial assets and liabilities carried at fair value are reported as part of the fair value gain or loss. For example, translation differences on non-monetary financial assets and liabilities such as equities held at fair value through profit or loss are recognised in profit or loss as part of the fair value gain or loss and translation differences on non-monetary assets such as equities classified as fair value through other comprehensive income are recognised in other comprehensive income.

As of December 31, 2025 and 2024 using the Reuters' middle rates at 16:00 Western Indonesian Time, the foreign currency rates used for translations of foreign currencies to Rupiah are as follows:

f. The Minimum Statutory Reserve

The Bank is required to maintain statutory reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

g. Current accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Current account with Bank Indonesia and Other Bank are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

h. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility, interbank call money, saving, Negotiable Certificate of Deposit (NCD), and time deposit.

Placements with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

i. Securities

Securities owned consist of Government Debt Securities (SUN), bank bonds, Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) which are traded on the stock exchange.

Marketable securities are initially measured at fair value plus transaction costs and subsequently accounted for in accordance with their classification as held to maturity.

Subsequently accounted for, securities for investment purposes are measured according to their classification as measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreement (Repo) and Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement (Reverse Repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (repo) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

j. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali *(Repo)* dan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali *(Reverse Repo)* (Lanjutan)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)* disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

k. Instrumen Keuangan Derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga, dan transaksi *spot* untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga *swap* dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

l. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi
Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Setelah pengakuan awal, Pinjaman yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan-bersih.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreement (Repo) and Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement (Reverse Repo) (Continued)

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

k. Derivative Financial Instruments

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risk, such as currency risk and interest rate risk.

Derivatives financial instruments are recognized in the statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

l. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with its interest after a specified period of time, and receivables from trading of financial instruments that already at maturity which have not been settled within 15 (fifteen) days.

Loans are classified as amortized cost

Loans given which are initially measured at fair value plus its transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain the financial assets, and after the initial measurement at cost to be amortized using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Subsequent to initial recognition, loans are measured at amortised cost or fair value depending on the respective classification. For loan which classified as amortised cost is subsequently measured using the effective interest method. While for loans which classified as fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value are recorded in net trading income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

l. Pinjaman yang Diberikan (Lanjutan)

Bank mencatat restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi.

Dalam restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aset (termasuk kepentingan ekuitas debitur), Bank mencatat aset tersebut (termasuk kepentingan ekuitas) sebesar nilai wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat pinjaman yang diberikan diatas nilai wajar aset yang diterima setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual aset tersebut, diakui sebagai kerugian dalam laba rugi tahun berjalan.

Hanya dalam restrukturisasi kredit yang bermasalah melibatkan modifikasi persyaratan kredit, akun bank untuk efek restrukturisasi prospektif dan tidak mengubah nilai buku kredit pada saat restrukturisasi, kecuali jumlahnya melebihi nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam kebijakan baru.

Jika nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih rendah dari nilai tercatat pinjaman sebelum restrukturisasi, Bank mengurangi saldo pinjaman dengan jumlah yang sama dengan nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan. Jumlah pengurangan tersebut diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai.

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi pada akun pendapatan bunga dan beban modifikasi yang disajikan secara terpisah. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

m. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", antara lain:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   viii Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan. (Catatan 34).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

l. Loans (Continued)

The Bank accounts for troubled debt restructuring in accordance with the type of restructuring.

In troubled debt restructuring which involves a repossesion of assets (including an equity interest of the debtor), the Bank records those assets (including an equity interest) at their fair values at the time of restructuring. The excess of the carrying amount of the loans over the fair value of assets received less estimated costs to sell, is recognised as a loss in the current year profit or loss.

In troubled debt restructuring which only involves modification of the credit terms, the Bank accounts for the restructuring effect prospectively and does not change the carrying amount of the loans at the time of restructuring, unless the amount exceeds the present value of the total future cash receipts specified in the new terms.

If the present value of the total future cash receipts specified in the new terms is lower than the carrying amount of the loans prior to restructuring, the Bank reduces the loans balance to the amount equal to the present value of the total future cash receipts. The amount of the reduction is recognised as allowance for impairment losses.

When the contractual cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified and the renegotiation or modification does not result in the derecognition of that financial asset, the Bank recalculates the gross carrying amount of financial assets and recognizes the gain or loss arising from the modification in the profit or loss account in the interest income and modification expense accounts which are presented separately. The gross carrying amount of the financial asset shall be recalculated as the present value of the renegotiated or modified contractual cash flows that are discounted at the financial asset's original effective interest rate. Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

m. Transaction with Related Parties

In carrying out its business, the Bank conducts transactions with related parties as defined in SFAS 224 concerning "Related Party Disclosures", among others:

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
   viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements. (Note 34).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

n. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non publik yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang.

Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat dengan nilai wajar dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Investasi saham ini diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain dengan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan jika tidak diperdagangkan di bursa efek.

Penyertaan sementara pada perusahaan debitur timbul akibat konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham. Pada saat pengakuan awal, saham yang diterima diakui dengan nilai wajar. Selanjutnya, saham tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas apabila Bank memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees* dan nilai wajar apabila Bank BPD Bali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees.* Kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat penurunan permanen atas penyertaan sementara dengan menggunakan metode *individual assessment.*

Penyertaan sementara dihapusbuku dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Sebelumnya, Bank mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

o. Aset Tetap

1) Kepemilikan Langsung

Aset tetap disusutkan, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*). Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

	Metode / *Method*	Tarif / *Rate*	Tahun / *Years*	
Bangunan				*Buildings*
Permanen	Garis Lurus/	5%	20	*Permanent*
Bukan Permanen	*Straight Line*	10%	10	*Non Permanent*
Perlengkapan				*Fixtures*
Kelompok 1		50%	4	*Cluster 1*
Kelompok 2	Saldo Menurun Berganda /	25%	8	*Cluster 2*
Kelompok 3	*Double Declining*	12,5%	16	*Cluster 3*
Kelompok 4		10%	20	*Cluster 4*

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap, saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya perbaikan itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*). Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2) Aset dalam Penyelesaian

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Bank memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mengukur aset tetapnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Investment In Shares

Investments in shares represent investments in non publicly listed companies engaged in the financial services industry held for long term purposes.

Investment with an ownership interest below 20% and have no significant influence are carried at fair value reduced by an allowance for impairment losses.

These investment in shares are classified as Fair Value through OCI by irrevocable election if they are not trade in the stock exchange.

Temporary investments in debtor companies arise from conversion of loans to shares/ equity. At initial recognition, shares received were recognized at fair value. Subsequently, the shares are recognized using equity method if Bank has significant influence over the investees or at fair value if Bank does not have significant influence over the investees. Loss from permanent decline in investment values of temporary investment are recognized using the individual assessment method.

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 years in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" which was effective on January 1, 2020. Previously, the Bank follows Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks" and Circular Letter of Bank Indonesia (SEBI) No.15/28/DPNP dated July 31, 2013 regarding Asset Quality Ratings for Commercial Banks.

o. Fixed Assets

1) *Direct Ownership*

Fixed assets depreciation, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation and impairment loss (if any).

Fixed assets, except land and building, is calculated using the double declining balance method. The building is calculated using the straight line method. Fixed assets, except land, depreciation over their estimated useful lives as follows:

Land is recorded at cost and not depreciated.

Acquisition cost includes the cost of replacing a part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss incurred.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

2) *Construction in Progress*

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

The Bank has chosen the cost model for the valuation of its fixed assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

o. Aset Tetap (Lanjutan)

PSAK No. 236 tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah aset tetap tersebut nilai tercatatnya lebih tinggi dari jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut.

Maka nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

Klasifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) tergantung pada substansi transaksi, dan bukan pada bentuk hukumnya. Akibatnya, jika suatu kontrak memberikan sesuatu yang secara substansi merupakan pembelian aset tetap, maka hak tersebut memenuhi definisi aset tetap dan dicatat sesuai dengan PSAK 216 Aset Tetap.

Oleh karena itu, pengalihan pengendalian atas aset yang mendasarinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian aset tetap berdasarkan PSAK 216, atau transaksi sewa sesuai PSAK 116.

Bank menyimpulkan bahwa hak guna bangunan yang dimilikinya diklasifikasikan sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 216 karena Bank memperoleh kendali atas hak guna tanah setelah memperoleh hak guna bangunan (HGB) sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 115 Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

p. Aset TakBerwujud

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Perangkat lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Perangkat lunak komputer diamortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) selama 4 (empat) tahun.

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

q. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Nilai tercatat aset non-keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat suatu aset tidak dapat dipulihkan. Jika ada indikasi seperti itu dan nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah terpulihkan, aset atau unit penghasil kas diturunkan nilainya ke jumlah terpulihkan. Taksiran jumlah terpulihkan aset adalah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset dan nilai pakai.

Nilai wajar adalah nilai yang diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi yang wajar dikurangi biaya penjualan sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang diharapkan muncul dari penggunaan aset secara terus menerus dan dari penjualannya pada akhir masa pakainya. Untuk aset yang tidak menghasilkan arus kas masuk independen yang besar, jumlah terpulihkan ditentukan untuk unit penghasil kas terkait aset tersebut. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Dalam membuat taksiran nilai pakai, estimasi arus kas masa mendatang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu dari uang dan risiko spesifik untuk aset.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Fixed Assets (Continued)

SFAS No. 236 " Impairment of Assets" required the carrying amount of the fixed asset have to review at each statement of financial position date to assess whether the carrying amount is more than recoverable amount from the fixed assets. If the carrying amount is more than recoverable amount.

The carrying amount had to decrease into recoverable amount from its, determined using more than amount between the net sold pricing and used value.

Classifying land use rights (HGB) depends on the substance of the transaction, and not on its legal form. Consequently, if a contract provides something that in substance represents the purchase of fixed assets, then the rights meet the definition of fixed assets and are recorded in accordance with SFAS 216 Property, Plant and Equipment.

Accordingly, the transfer of control over underlying assets becomes the main consideration in determining whether the transaction is a purchase of fixed assets under SFAS 216, or a lease transaction under SFAS 116.

The Bank has concluded that the land use rights it holds are classified as fixed assets under SFAS 216 as it obtains control of the land use rights (HGB) as defined under SFAS 115 Revenue from contracts with customers.

p. Intangible Assets

Software acquired by Bank is stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses (if any).

Acquisition of the software in capitalized as at cost incurred to acquired and make the software ready for use. The software is amortized using the double declining balance method over 4 (four) years.

Cost of development and maintenance program software is recognized as at the transaction date.

q. Impairment of Non - Financial Assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The carrying values of non-financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. If such indication exists and where the carrying amount of an asset exceeds the estimated recoverable amount, the assets or cash-generating units are written down to their recoverable amount. The estimated recoverable amount of an asset is the higher of an asset's fair value and value-in-use.

The fair value is the amount obtainable from the sale of an asset in an arm's length transaction less costs of disposal while value-in-use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. For an asset that does not generate largely independent cash inflows, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Impairment losses are recognised in profit or loss.

In assessing value-in-use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

q. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan (Lanjutan)

Untuk aset non-keuangan tidak termasuk aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan, apakah ada indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin tidak lagi ada atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut terjadi, jumlah terpulihkan diperkirakan. Rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika ini kasusnya, jumlah tercatat aset meningkat menjadi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah peningkatan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, sehingga seolah-olah kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi kecuali aset dicatat pada nilai revaluasi, yang mana pembalikan diperlakukan sebagai peningkatan revaluasi. Setelah pembalikan itu, beban penyusutan atau amortisasi disesuaikan dalam tahun-tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisa, secara sistematis atas sisa manfaatnya.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun baik secara individu maupun di tingkat unit penghasil kas mana yang sesuai dan ketika keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

r. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari pendapatan bunga yang masih akan diterima, tagihan, pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan beban yang ditangguhkan.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan Pinjaman yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian Pinjaman yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain".

AYDA disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut.

Kelebihan saldo Pinjaman yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai Pinjaman yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan pada saat dijual.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

s. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas kepada masyarakat maupun kepada Bank lain timbul.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

q. Impairment of Non - Financial Assets (Continued)

For non-financial assets excluding intangible assets with indefinite useful life, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is carried at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation or amortisation expense is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Intangible assets with indefinite useful lives are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level as appropriate and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

r. Other Assets

Other assets include interests receivable, receivables, prepaid tax, prepaid expenses, foreclosed asset, abandoned properties, and deferred expense.

Prepaid expenses are amortized during the useful life of each cost using the straight line method.

Foreclosed assets is the Bank's assets acquired, either through auction or outside the auction based on voluntary submission by the owner or on the power scheme to sell outside the auction of the scheme owner in the event the debtor does not fulfill its obligations to the Bank. Foreclosed assets is given credit guarantees have been taken over as part of the solution given and presented in "Other Assets".

Foreclosed assets are stated at net realizable value. Net realizable value is the fair value of foreclosed asset reduced by the estimated costs to sell these foreclosed asset.

Excess balances of loans that have not been repaid by the borrower on the value of foreclosed asset, charged against loss reserves decline in the value of loans. The difference between the net realizable value with foreclosed asset proceeds is recognized as a gain or loss on current year at the time of sale.

Expenses related to foreclosed asset maintenance are charged to current year income statement as incurred.

In the event of permanent impairment, the carrying value is reduced to recognize the decline and losses charged to current year income statement.

s. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately are recorded at the time liabilities to public customers or other Banks arise.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortized cost.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

t. Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

u. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank lain terdiri dari liabilitas terhadap Bank lain, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan dari Bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang jumlahnya signifikan dan dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari Bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

v. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

w. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

t. Deposits from Customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits, and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through cheque, Automatic Teller Machine card (ATM) or transfers between accounts using bill and other orders of payment or transfer.

Savings account represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors under certain conditions.

Time deposits represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors at specific maturities, based on the agreement between the depositor and Bank.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

u. Deposits from Other Banks

Deposits from other Banks represent liabilities to other Banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other Banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other Banks are deducted is from the total deposits received.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

v. Borrowings

Borrowings are funds received from another party liability repayment in accordance with the requirements of the loan agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate method.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

w. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

w. Perpajakan (Lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

x. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (*Stage* 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan. Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan *Stage* 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi dipertimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

y. Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan serta berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan dan beban provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan atau beban provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

z. Transaksi Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

w. Taxation (Continued)

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation liabilities are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

x. Interest Income and Expense

Interest income for financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortised cost and interest expense on all financial liabilities held at amortised cost are recognised in profit or loss using the effective interest method.

Interest income for financial assets that are either held at fair value through other comprehensive income or amortised cost that have become credit impaired subsequent to initial recognition (Stage 3) is recognised using the credit adjusted effective interest rate. This rate is calculated in the same manner as the effective interest rate except that expected credit losses are included in the expected cash flows. Interest income is therefore recognised on the amortised cost of the financial asset including expected credit losses. Should the credit risk on a Stage 3 financial asset improve such that the financial asset is no longer considered credit impaired, interest income recognition reverts to a computation based on the rehabilitated the carrying value of the financial asset gross.

y. Fees and Commission

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income.

z. Lease Transactions

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Short term lease; and*
- *Low value asset*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Bank has the right to operate the asset;*
  2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

z. Transaksi Sewa (Lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga awal. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan - harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

aa. Imbalan Kerja

Bank menerapkan PSAK 219, "Imbalan Kerja"

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, insentif, dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020, mana yang lebih tinggi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

z. Lease Transactions (Continued)

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the leases, less any leases incentives received and discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application. The right-of-use asset is amortized over the straight line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each lease's payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease's period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

Lease modification

The Bank accounts for a leases modification as a separate leases if both:
- *the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

aa. Employee Benefits

Bank apply SFAS 219, "Employee Benefits".

Short-term Employee Benefit

Short term employee benefits are recognized when payable to the employee based on accrual basis.

Short term employee benefits such as wages, benefit, incentive, and other non monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short term employee benefits are measured using undiscounted amount.

Defined Benefit Plan and Other Long-term Employee Benefits

The post-employment benefits are accured and recognized as expense when service have been rendered by qualified Bank's employees. The benefits are determined based on the Bank regulations and the minimum requirements of Omnibus Law No. 11/2020 whichever is higher.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

aa. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee* ("IFRIC") Agenda *Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit.*

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai komprehensif lain, terdiri atas :
- Keuntungan dan kerugian aktuaris.
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Program Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Di luar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, yaitu meliputi uang penggantian hak, uang pisah, sumbangan kematian, penghargaan masa bakti proporsional, dan penghargaan dalam rangka pensiun.

Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa bakti, penghargaan masa bakti proporsional, cuti besar, dan uang duka dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit.*

Bonus dan Tantiem

Bank juga memberikan bonus kepada karyawan serta tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya cadangan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah bonus dan tantiem yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Uang Penghargaan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Bank memberikan uang penghargaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank pada setiap akhir masa jabatannya. Besarnya uang penghargaan diatur lebih lanjut dan ditentukan dalam RUPS. Uang penghargaan tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

ab. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

aa. Employee Benefit (Continued)

Defined Benefit Plan and Other Long-term Employee Benefits

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with SFAS 219: Employment Benefits which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19).

The post-employments benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using Projected Unit Credit Method.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income, consist of:
- *Actuarial gains and losses.*
- *Return on plan assets, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).*
- *The changes in the impact of the asset ceiling, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).*

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

For other long-term employee benefits over the current service cost, net interest on net defined benefit liabilities (assets), and the remeasurement of net defined benefit liability (asset) obligations are recognized immediately in the current statement of profit or loss and other comprehensive income.

All past service costs are recognised at the earlier of when the amendement or curtailment occurs, and when the related restructuring or termination costs are recognized, as a result, unvested past service cost can no longer be deffered and recognised over the future vesting period.

Other Long-term Post-Employment Benefit

Other than pension benefits, the Bank also provides other long-term post-employment benefits, such as compensation pay, separation pay, death allowance, proportional service award for pension, and award for pension.

Similar to pension benefits, service reward benefits, service reward benefits proportional, long service leave, and death allowance liabilities and expenses are calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit Method.

Bonus and Tantiem

Banks also provide bonus to the employees and tantiem to the Board of Commissioners and Directors. Estimated the amount of the reserve is determined based on the experiences of the previous year, taking into account the financial ability of the Bank, and then requested approval of the General Meeting of Shareholders. If there is a difference between the amount of bonus and tantiem that are reserved to the realization, then the excess is charged to the profit and loss for the year.

Service Awards Benefit for the Board of Directors and Commissioners

The Bank provides services awards benefit to the Bank's Board of Directors and Commissioners at each end of his tenure. The amount of the award money is further regulated and determined in the GMS. Services awards benefit was reserved proportionally during the term of office, which is recognized as an expense in the current year.

ab. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

ab. Modal Saham (Lanjutan)

Ketika entitas membeli modal saham ekuitas Bank (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank.

ac. Laba Bersih per Saham

Sesuai dengan PSAK 233, laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

ad. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ae. Liabilitas dan Aset Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

af. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Bank yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Bank, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Bank untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Bank meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar. Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan serta aset tetap.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

ag. Provisi

Provisi diakui ketika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Bank diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

ah. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Bank pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

ab. Share Capital (Continued)

Where any company purchases the Bank's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary sharesare subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Bank's equity holders.

ac. Earnings per Share

In accordance with SFAS 233, basic earnings per share is computed by dividing net income for the current year attributable to equity holders of the parent entity with the weighted average number of outstanding issued and fully paid-up ordinary shares during the year.

ad. Dividend

Dividends distribution to the shareholders is recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividend is approved by the shareholders.

ae. Contingent Liabilities and Assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

af. Operating Segments

An operating segment is a component of the Bank that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that related to transactions with any of the Banks other components, whose operating results are reviewed regulary by the Bank Board of Directors to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the Bank's Board Director include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes and fixed assets.

The Bank has identified and disclosed financial information by major business activities (business segment) based on geographical segments.

A geographical segment includes the provision of services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from other operating segments that are in other economic environments.

ag. Provision

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

ah. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Bank positions at the reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik. Masukan *(input)* untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Aset keuangan tanpa harga kuotasi dalam pasar aktif

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset memiliki harga kuotasi atau tidak dalam pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi apakah aset keuangan memiliki kuotasi pasar dalam pasar aktif adalah penentuan apakah harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dan apakah harga tersebut merepresentasikan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regards to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Significant accounting judgments and estimates that affect the reported amounts of financial statement, are as follows:

Going concern

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

Fair value of financial instruments

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the financial statements of financial position is not available in an active market, the fair value is determined using various valuation techniques including the use of statistical mathematical model. The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. Considerations include considerations such as liquidity and volatility feedback model, the level of early payment and the level of default assumption.

Financial assets not quoted in an active market

Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available and whether those prices represent actual and regularly occurring market transaction in arm's length basis.

Allowance for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well are the estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (CONTINUED)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Bank mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Pengakuan pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal dan perbedaan temporer sampai pada batas adanya kemungkinan bahwa keuntungan yang dikenai pajak akan tersedia dimana kerugian dapat dimanfaatkan.

Pertimbangan manajemen yang signifikan juga diperlukan untuk menentukan jumlah dari aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu yang mungkin terjadi dan tingkatan dari keuntungan yang dikenakan pajak di masa yang akan datang bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa yang akan datang.

Recognition of deferred taxes

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun

Biaya untuk program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja ditentukan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktuarial melibatkan pembuatan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian dari aset yang diharapkan, peningkatan gaji di masa depan, tingkat kematian, dan peningkatan jumlah pensiun di masa depan. Karena sifat jangka panjang rencana-rencana ini, estimasi memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Present value atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan 20 - pengukuran liabilitas imbalan pascakerja: asumsi-asumsi aktuarial.

Present value of post-employment benefit obligation

The cost of defined benefit retirement plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates, and future pension increases. Due to the long term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

Assumptions used in determining the cost or income for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash flows that will be used to pay employee benefits. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates on Government Bonds that have a maturity that resembles the period of employee employee benefits.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following Note 20 - measurement of obligation for postemployment benefits: actuarial assumptions.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat atas aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Impairment of Non-Financial Assets

The Bank evaluates the decline in asset value if there are events or changes in circumstances that indicate that the carrying value of an asset cannot be recovered. Important factors that can cause a review of impairment are as follows:

- *Performance that is not achieved significantly against historical expectations or projections of future operating results;*
- *Significant changes in the way the asset is used or the overall business strategy; and*
- *Industry or economic trends that are significantly negative.*

The Bank recognizes an impairment loss if the carrying amount of the asset exceeds the recoverable value. The recoverable amount is a higher value between fair value less costs to sell and the value of use of the asset (or cash-generating unit). The recoverable amount is estimated for individual assets or, if not possible, for the cash generating unit for which the asset is part of the unit.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (CONTINUED)

Estimasi Masa Sewa

Dalam mengestimasi masa sewa dari masing-masing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Estimation of Lease Term

When estimating the lease term of the respective lease arrangement, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Bank mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Bank, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah Indonesia (IDR), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Bank dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

Functional Currency

The functional currency of the Bank is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

The Bank considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Bank, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (IDR), as this reflected the fact that majority of the Bank's operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

Provisi dan Kontinjensi

Bank dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

Provisions and Contingencies

The Bank in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations,if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties in to account.

4. KAS / ***4. CASH***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Rupiah			***Rupiah***
Kas	741.127.868.715	463.250.063.085	*Cash*
Kas ATM	127.438.547.150	117.133.199.105	*Cash In ATM*
Sub Jumlah	**868.566.415.865**	**580.383.262.190**	***Sub Total***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Kas	379.406.275	352.335.645	*Cash*
Sub Jumlah	**379.406.275**	**352.335.645**	***Sub Total***
Jumlah	**868.945.822.140**	**580.735.597.835**	***Total***

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dimiliki oleh Bank.

The Cash As of December 31, 2025 and 2024 is owned by the Bank.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / ***5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Rupiah	2.623.731.050.114	2.694.046.490.228	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	858.762.500	828.892.500	*United States Dollar*
Jumlah	**2.624.589.812.614**	**2.694.875.382.728**	***Total***

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk Giro pada Bank Indonesia.

The Bank is required to maintain Minimum Satutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN)

Per 31 Desember 2025 dan 2024, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, yang telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021, serta PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Selanjutnya, pemenuhan GWM dimaksud juga telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023, PADG No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023, PADG No. 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No. 24/8/PADG/2022, serta terakhir dengan PADG No. 31 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas PADG No. 24/8/PADG/2022.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank's fulfillment of the Minimum Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum/GWM) has complied with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018, as amended by PBI No. 22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 dated July 28, 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 dated December 17, 2021, and PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 concerning the Fourth Amendment to PBI No. 20/3/PBI/2018 on Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units. Furthermore, the implementation of the aforesaid Minimum Reserve Requirement has also been carried out in accordance with the Board of Governors Regulation (Peraturan Anggota Dewan Gubernur/PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 concerning the Implementation Guidelines for the Fulfillment of Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, as subsequently amended by PADG No. 2 of 2023 dated March 24, 2023, PADG No. 12 of 2023 dated September 27, 2023, PADG No. 8 of 2025 dated March 27, 2025 concerning the Third Amendment to PADG No. 24/8/PADG/2022, and most recently by PADG No. 31 of 2025 dated December 23, 2025 concerning the Fourth Amendment to PADG No. 24/8/PADG/2022.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas PBI No. 20/4/PBI/2018. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 23 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang mencabut dan menggantikan PADG No. 21/22/PADG/2019 beserta seluruh perubahannya. Dengan demikian, pelaksanaan perhitungan dan pemenuhan kewajiban PLM Bank pada periode laporan akhir Desember 2025 telah mengacu pada ketentuan yang berlaku terkini sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut.

The Bank's Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) has been prepared in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated April 3, 2018 concerning the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, as amended several times, most recently by PBI No. 24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 concerning the Fourth Amendment to PBI No. 20/4/PBI/2018. Further implementing provisions regarding the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) are regulated in the Regulation of the Members of the Board of Governors (PADG) No. 23 of 2025 dated October 20, 2025 concerning the Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, which revokes and replaces PADG No. 21/22/PADG/2019 and all its amendments. Thus, the implementation of the calculation and fulfillment of the Bank's PLM obligations in the reporting period ending December 2025 has referred to the latest applicable provisions as referred to in the regulation.

Berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 27/250/DKMP/Srt/B, setelah dilakukan penyesuaian untuk periode 16–31 Desember 2025, total insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank PT BPD Bali tercatat sebesar 4,10%. Insentif tersebut berasal dari penyaluran kredit pada sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan. Pada periode ini, tidak terdapat kontribusi dari faktor penyesuaian maupun *interest rate channel* . Penurunan KLM dari 5,00% menjadi 4,10% merupakan hasil penyesuaian (*adjustment*) atas evaluasi realisasi penyaluran kredit terhadap komitmen yang telah ditetapkan.

Based on Bank Indonesia Letter Number 27/250/DKMP/Srt/B, after adjustments for the period of December 16–31, 2025, the total incentives for the Macroprudential Liquidity Policy (KLM) of Bank PT BPD Bali were recorded at 4.10%. These incentives come from credit distribution in the agriculture, industry and downstream sectors, services including the creative economy, construction, real estate and housing, as well as MSMEs, cooperatives, inclusion, and sustainable financing. During this period, there was no contribution from adjustment factors or interest rate channels. The decrease in KLM from 5.00% to 4.10% is the result of an adjustment based on the evaluation of credit distribution realization against established commitments.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Minimum Statutory Reserve (GWM) ratio required by Bank Indonesia on December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Giro Wajib Minimum:			*Minimum Required Account*
GWM Rupiah	4,90%	5,20%	*GWM Rupiah*
Harian	0,00%	0,00%	*Daily*
Rata-rata	4,90%	5,20%	*Average*
PLM	4,00%	5,00%	*PLM*
GWM Valas	4,00%	4,00%	*GWM Foreign Exchange*
Harian	2,00%	2,00%	*Daily*
Rata-rata	2,00%	2,00%	*Average*

Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.

Minimum Statutory Reserves, hereinafter abbreviated as GWM, is the minimum amount of funds that must be maintained by Conventional Commercial Banks or Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, the amount of which is determined by Bank Indonesia in the amount of a certain percentage of DPK BUK or DPK BUS and UUS.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.

Macroprudential Liquidity Buffer, hereinafter abbreviated as PLM is a minimum liquidity reserve in rupiahs that must be maintained by BUK in the form of securities that meet certain requirements, the amount of which is determined by Bank Indonesia at a certain percentage of BUK Deposits in rupiah.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN) / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)*

Rasio GWM Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Statutory Reserves Ratios As of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Giro Wajib Minimum:			*Minimum Required Account:*
GWM Rupiah	5,05%	5,29%	*GWM Rupiah*
Harian	0,00%	0,00%	*Daily*
Rata-rata	5,05%	5,29%	*Average*
PLM	31,73%	27,96%	*PLM*
GWM Valas	22,46%	21,22%	*GWM Foreign Exchange*
Harian	2,00%	2,00%	*Daily*
Rata-rata	20,46%	19,22%	*Average*

Bank telah memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Bank has met the Statutory Reserve Requirement required by Bank of Indonesia As of December 31, 2025 and 2024.

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan Mata Uang / *a. By Currency*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Rupiah	18.372.100.692	14.552.351.435	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	32.263.085.815	30.566.821.020	*United States Dollar*
Jumlah	50.635.186.507	45.119.172.455	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(33.541.150)	(32.035.380)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**50.601.645.357**	**45.087.137.075**	***Net***

b. Berdasarkan Hubungan / *b. By Relationship*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
Rupiah	18.372.100.692	14.552.351.435	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	32.263.085.815	30.566.821.020	*United States Dollar*
Jumlah	50.635.186.507	45.119.172.455	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(33.541.150)	(32.035.380)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**50.601.645.357**	**45.087.137.075**	***Net***

c. Berdasarkan Bank / *c. By Bank*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Rupiah			***Rupiah***
Bank Pemerintah Daerah			***Local Government Bank***
PT Bank DKI	8.563.507	8.973.507	*PT Bank DKI*
Bank Umum			***Commercial Bank***
PT Bank Central Asia Tbk	11.205.316.648	7.519.318.751	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	5.040.905.983	4.805.467.717	*PT Bank Mandiri* (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.002.863.771	2.100.828.988	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	114.450.783	117.762.471	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
Sub - Jumlah	18.372.100.692	14.552.351.434	*Sub - Total*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	20.301.056.789	18.764.278.977	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	11.962.029.026	11.802.542.044	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
Sub - Jumlah	32.263.085.815	30.566.821.021	*Sub - Total*
Jumlah	50.635.186.507	45.119.172.455	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(33.541.150)	(32.035.380)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**50.601.645.357**	**45.087.137.075**	***Net***

6. GIRO PADA BANK LAIN (LANJUTAN) / ***6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (CONTINUED)***

d. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun / ***d. Average Interest Rate per Annum***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Rupiah	0,00% - 2,00%	0,00% - 2,00%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,00%	0,00%	*United States Dollar*

e. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / ***e. Movements in the Allowance for Impairment Losses***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Jumlah/*Amount***	
Saldo awal tahun	32.035	--	--	32.035	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	1.506	--	--	1.506	*Movement during current period*
Saldo akhir periode	33.541	--	--	33.541	*Balance, end of period*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Jumlah/*Amount***	
Saldo awal tahun	19.246	--	--	19.246	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	12.789	--	--	12.789	*Movement during current period*
Saldo akhir periode	32.035	--	--	32.035	*Balance, end of period*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

f. Berdasarkan Kualitas Aset / ***f. By Asset Quality***

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada giro pada bank lain secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

The Bank assessed impairment in current accounts with other bank individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Seluruh giro pada bank lain Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

All current accounts with other banks As of December 31, 2025 and 2024 were classified as current.

Kualitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut :

The quality of current account with other banks are as follows :

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Lancar	50.635.186.507	45.119.172.455	*Current*
Jumlah	50.635.186.507	45.119.172.455	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(33.541.150)	(32.035.380)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**50.601.645.357**	**45.087.137.075**	***Net***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

As of December 31, 2025 and 2024, there are no current account with other banks which are used as collateral.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan / *By Type and Relationship*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Fasilitas Penyimpanan			***Saving Facility***
Bank Indonesia	-	600.000.000.000	*Bank Indonesia*
Diskonto yang Belum di Amortisasi	-	(87.474.487)	*Unamortized Discount*
Sub - Jumlah	-	599.912.525.513	*Sub - Total*
Interbank Call Money			***Interbank Call Money***
Bank Umum			***Commercial Bank***
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	350.000.000.000	300.000.000.000	*PT Bank CIMB Niaga, Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	300.000.000.000	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	300.000.000.000	-	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia	200.000.000.000	-	*PT Bank Maybank Indonesia*
Bank Pemerintah Daerah			***Local Goverment Bank***
PT BPD BJB	200.000.000.000	400.000.000.000	*PT BPD BJB*
PT BPD Kalimantan Tengah	130.000.000.000	50.000.000.000	*PT BPD Kalimantan Tengah*
PT BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	100.000.000.000	310.000.000.000	*PT BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat*
PT BPD Maluku Malut	100.000.000.000	75.000.000.000	*PT BPD Maluku Malut*
PT BPD Sulawesi Tenggara	80.000.000.000	100.000.000.000	*PT BPD Sulawesi Tenggara*
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo	50.000.000.000	-	*PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo*
PT BPD Lampung	40.000.000.000	100.000.000.000	*PT BPD Lampung*
PT BPD DKI	-	300.000.000.000	*PT BPD DKI*
PT BPD Sumsel Babel	-	150.000.000.000	*PT BPD Sumsel Babel*
PT BPD Papua	-	100.000.000.000	*PT BPD Papua*
PT BPD Kalimantan Selatan	-	100.000.000.000	*PT BPD Kalimantan Selatan*
PT BPD Kalimantan Timur & Kalimantan Utara	-		*PT BPD Kalimantan Timur & Kalimantan Utara*
PT BPD Jambi	-	60.000.000.000	*PT BPD Jambi*
PT BPD NTT	-	50.000.000.000	*PT BPD NTT*
PT BPD DIY	-	50.000.000.000	*PT BPD DIY*
Sub - Jumlah	1.850.000.000.000	2.145.000.000.000	*Sub - Total*
Tabungan			***Saving***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	24.737.924	24.832.578	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Sub - Jumlah	24.737.924	24.832.578	*Sub - Total*
Deposit On Call			***Deposit On Call***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	400.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Sub - Jumlah	-	400.000.000.000	
Deposito			***Deposit***
Negotiable Certificate of Deposit	192.360.193.748	-	*Negotiable Certificate of Deposit*
Sub - Jumlah	192.360.193.748	-	*Sub - Total*
Jumlah	**2.042.384.931.672**	**3.144.937.358.091**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(871.698.227)	(1.778.693.256)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**2.041.513.233.445**	**3.143.158.664.835**	***Net***

b. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun / *Average Interest Rate per Annum*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Rupiah	0,00% - 8,10%	0,00% - 6,57%	*Rupiah*

c. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Movements in the Allowance for Impairment Losses*

	31 Desember 2025 / December 31, 2025				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Jumlah/*Amount***	
Saldo awal tahun	1.778.694	--	--	1.778.694	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	(906.995)	--	--	(906.995)	*Movement during current period*
Saldo, akhir periode	871.698	--	--	871.698	*Balance, end of period*

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (LANJUTAN) / *7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (CONTINUED)*

c. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan) / *c. Movements in the Allowance for Impairment Losses (Continued)*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Jumlah/*Amount***	
Saldo awal tahun	2.062.878	--	--	2.062.878	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	(284.184)	--	--	(284.184)	*Movement during current period*
Saldo, akhir periode	1.778.694	--	--	1.778.694	*Balance, end of period*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

d. Berdasarkan Kualitas Aset / *d. By Asset Quality*

Kualitas Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The quality of Placement with Bank indonesia and other banks are as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Lancar	2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	*Current*
Jumlah	2.042.384.931.672	3.144.937.358.091	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(871.698.227)	(1.778.693.256)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**2.041.513.233.445**	**3.143.158.664.835**	***Net***

e. Berdasarkan Sisa Umur sampai dengan saat Jatuh Tempo / *e. By Remaining Period to Maturity Date*

Nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The carrying value for placement on the Bank Indonesia and other banks that are held to maturity by remaining period to maturity date are as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*		**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***		
	Jangka Waktu / *Period*	**Jumlah / *Total***	**Jangka Waktu / *Period***	**Jumlah / *Total***	
Deposito	< 1 tahun/*year*	192.360.193.748	< 1 tahun/*year*	-	*Deposits*
Interbank Call Money	< 1 bulan/*month*	1.850.000.000.000	< 1 bulan/*month*	2.145.000.000.000	*Interbank Call Money*
Fasilitas Penyimpanan	< 1 bulan/*month*	-	< 1 bulan/*month*	599.912.525.513	*Savings Facility*
Tabungan	> 1 bulan/*month*	24.737.924	> 1 bulan/*month*	24.832.578	*Savings*
Deposito On Call	< 1 bulan/*month*	-	< 1 bulan/*month*	400.000.000.000	*Deposit On Call*
		2.042.384.931.672		**3.144.937.358.091**	

f. Informasi Lain / *f. Other Information*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan. Manajemen yakin bahwa seluruh dana yang ditempatkan akan diterima kembali.

As of December 31, 2025 and 2024, there were no placements with Bank Indonesia and other banks pledged as cash collateral. Management believes that all funds are placed to be reaccepted.

8. EFEK - EFEK / *8. SECURITIES*

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan / *a. By Type and Relationship*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Biaya Perolehan diamortisasi			***Amortized Cost***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Surat Utang Negara (SUN) (setelah dikurangi/ditambah diskonto/premi yang diamortisasi pada Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp4.625.799.191 dan Rp15.017.757.895	3.694.209.799.191	3.277.824.242.105	*Government Bonds (net of unamortized discount or premium of the year 2025 and 2024 of Rp4,625,799,191 and Rp15,017,757,895*
Sub - Jumlah	3.694.209.799.191	3.277.824.242.105	*Sub - Total*
Obligasi Bank	258.000.000.000	366.000.000.000	*Bank Bonds*
Sub - Jumlah	258.000.000.000	366.000.000.000	*Sub - Total*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	7.321.109.016.091	6.116.253.029.587	*Securities Bank Indonesia Rupiah (SRBI)*
Sub - Jumlah	7.321.109.016.091	6.116.253.029.587	*Sub - Total*
Jumlah	**11.273.318.815.282**	**9.760.077.271.692**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.000.000)	-	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Bersih	**11.273.301.815.282**	**9.760.077.271.692**	***Net***

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

8. SECURITIES (CONTINUED)

b. Berdasarkan Penerbit

b. By Issuer

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Pemerintah			***Government***
SUN Seri FR 0090	800.334.000.000	800.334.000.000	*SUN Seri FR 0090*
SUN Seri FR 0104	534.764.000.000	185.000.000.000	*SUN Seri FR 0104*
SUN Seri FR 0086	500.000.000.000	500.000.000.000	*SUN Seri FR 0086*
SUN Seri FR 0109	320.504.000.000	-	*SUN Seri FR 0109*
SUN Seri FR 0101	300.000.000.000	300.000.000.000	*SUN Seri FR 0101*
SUN Seri FR 0103	300.000.000.000	-	*SUN Seri FR 0103*
SUN Seri FR 0108	291.172.000.000	-	*SUN Seri FR 0108*
SUN Seri FR 0095	230.000.000.000	230.000.000.000	*SUN Seri FR 0095*
SUN Seri FR 0084	212.810.000.000	212.810.000.000	*SUN Seri FR 0084*
SUN Seri FR 0087	150.000.000.000	-	*SUN Seri FR 0087*
SUN Seri FR 0045	30.000.000.000	30.000.000.000	*SUN Seri FR 0045*
SUN Seri FR 0042	20.000.000.000	20.000.000.000	*SUN Seri FR 0042*
SUN Seri FR 0081	-	800.000.000.000	*SUN Seri FR 0081*
SUN Seri VR 0033	-	214.698.000.000	*SUN Seri VR 0033*
Diskonto/Premium yang belum Diamortisasi	4.625.799.191	(15.017.757.895)	*Unamortized discount/premium*
Sub - Jumlah	3.694.209.799.191	3.277.824.242.105	*Sub - Total*
Bank			***Bank***
PT Bank Mandiri, Tbk	175.000.000.000	115.000.000.000	*PT Bank Mandiri, Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	40.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk*
PT Bank BTPN, Tbk	33.000.000.000	33.000.000.000	*PT Bank BTPN, Tbk*
PT Bank Mantap	10.000.000.000	-	*PT Bank Mantap*
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	-	75.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia, Tbk*
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	-	70.000.000.000	*PT Bank Tabungan Negara, Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	-	50.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	-	23.000.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia, Tbk*
Sub - Jumlah	258.000.000.000	366.000.000.000	*Sub - Total*
SRBI			***SRBI***
SRBI Seri IDSR030626364S	900.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR030626364S*
SRBI Seri IDSR200226364S	600.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR200226364S*
SRBI Seri IDSR140826364S	550.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR140826364S*
SRBI Seri IDSR040526367S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR040526367S*
SRBI Seri IDSR100426364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR100426364S*
SRBI Seri IDSR180926364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR180926364S*
SRBI Seri IDSR230326367S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR230326367S*
SRBI Seri IDSR061126364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR061126364S*
SRBI Seri IDSR021026364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR021026364S*
SRBI Seri IDSR161026364S	500.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR161026364S*
SRBI Seri IDSR020126364S	430.569.000.000	-	*SRBI Seri IDSR020126364S*
SRBI Seri IDSR170726364S	366.097.000.000	-	*SRBI Seri IDSR170726364S*
SRBI Seri IDSR030726364S	350.527.000.000	-	*SRBI Seri IDSR030726364S*
SRBI Seri IDSR310726364S	300.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR310726364S*
SRBI Seri IDSR181226364S	249.308.000.000	-	*SRBI Seri IDSR181226364S*
SRBI Seri IDSR020926364S	131.200.000.000	-	*SRBI Seri IDSR020926364S*
SRBI Seri IDSR060226364S	76.345.000.000	-	*SRBI Seri IDSR060226364S*
SRBI Seri IDSR190126367S	50.000.000.000	-	*SRBI Seri IDSR190126367S*
SRBI Seri IDSR010825364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR010825364S*
SRBI Seri IDSR020525364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR020525364S*
SRBI Seri IDSR040425364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR040425364S*
SRBI Seri IDSR040725364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR040725364S*
SRBI Seri IDSR051225364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR051225364S*
SRBI Seri IDSR071125364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR071125364S*
SRBI Seri IDSR080925367S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR080925367S*
SRBI Seri IDSR101025364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR101025364S*
SRBI Seri IDSR110625364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR110625364S*
SRBI Seri IDSR141125364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR141125364S*
SRBI Seri IDSR310125364S	-	500.000.000.000	*SRBI Seri IDSR310125364S*
SRBI Seri IDSR280225364S	-	400.000.000.000	*SRBI Seri IDSR280225364S*
SRBI Seri IDSR170125364S	-	200.000.000.000	*SRBI Seri IDSR170125364S*
SRBI Seri IDSR240125364S	-	100.000.000.000	*SRBI Seri IDSR240125364S*
SRBI Seri IDSR100125364S	-	73.578.000.000	*SRBI Seri IDSR100125364S*
SRBI Seri IDSR030125364S	-	60.526.000.000	*SRBI Seri IDSR030125364S*
Diskonto yang belum Diamortisasi	(182.936.983.909)	(217.850.970.413)	*Unamortized discount*
Sub - Jumlah	7.321.109.016.091	6.116.253.029.587	*Sub - Total*
Jumlah	**11.273.318.815.282**	**9.760.077.271.692**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.000.000)	-	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Bersih	**11.273.301.815.282**	**9.760.077.271.692**	***Net***

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

c. Berdasarkan Peringkat

Peringkat obligasi berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

8. SECURITIES (CONTINUED)

c. By Rating

Bond ratings classified by the rating institution assessment as of December 31, 2025 and 2024 were as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*			
	Pemeringkat / *Agencies*	**Peringkat / *Rating***	**Nilai Wajar / *Fair Value***	
Perbankan				***Banking***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Pefindo	AAA	175.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT BPD Jawa Timur, Tbk	Pefindo	AA-	40.000.000.000	*PT BPD Jawa Timur, Tbk*
PT Bank BTPN, Tbk	Pefindo	AAA	33.000.000.000	PT Bank *BTPN, Tbk*
PT Bank Mantap Indonesia, Tbk	Pefindo	AAA	10.000.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Pemerintah				***Government***
SUN Seri FR 0090	-	-	800.334.000.000	*SUN Seri FR 0090*
SUN Seri FR 0104	-	-	534.764.000.000	*SUN Seri FR 0104*
SUN Seri FR 0086	-	-	500.000.000.000	*SUN Seri FR 0086*
SUN Seri FR 0109	-	-	320.504.000.000	*SUN Seri FR 0109*
SUN Seri FR 0101			300.000.000.000	*SUN Seri FR 0101*
SUN Seri FR 0103	-	-	300.000.000.000	*SUN Seri FR 0103*
SUN Seri FR 0108	-	-	291.172.000.000	*SUN Seri FR 0108*
SUN Seri FR 0095			230.000.000.000	*SUN Seri FR 0095*
SUN Seri FR 0084	-	-	212.810.000.000	*SUN Seri FR 0084*
SUN Seri FR 0087			150.000.000.000	*SUN Seri FR 0087*
SUN Seri FR 0045			30.000.000.000	*SUN Seri FR 0045*
SUN Seri FR 0042	-	-	20.000.000.000	*SUN Seri FR 0042*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	4.625.799.191	*Unamortized discount*
Bank Indonesia				***Bank Indonesia***
SRBI Seri				*SRBI Seri*
IDSR030626364S	-	-	900.000.000.000	*IDSR030626364S*
IDSR200226364S	-	-	600.000.000.000	*IDSR200226364S*
IDSR140826364S	-	-	550.000.000.000	*IDSR140826364S*
IDSR040526367S	-	-	500.000.000.000	*IDSR040526367S*
IDSR100426364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR100426364S*
IDSR180926364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR180926364S*
IDSR230326367S	-	-	500.000.000.000	*IDSR230326367S*
IDSR061126364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR061126364S*
IDSR021026364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR021026364S*
IDSR161026364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR161026364S*
IDSR020126364S	-	-	430.569.000.000	*IDSR020126364S*
IDSR170726364S	-	-	366.097.000.000	*IDSR170726364S*
IDSR030726364S	-	-	350.527.000.000	*IDSR030726364S*
IDSR310726364S	-	-	300.000.000.000	*IDSR310726364S*
IDSR181226364S	-	-	249.308.000.000	*IDSR181226364S*
IDSR020926364S	-	-	131.200.000.000	*IDSR020926364S*
IDSR060226364S	-	-	76.345.000.000	*IDSR060226364S*
IDSR190126367S	-	-	50.000.000.000	*IDSR190126367S*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	(182.936.983.909)	*discount*
Jumlah			11.273.318.815.282	**Total**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			(17.000.000)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Bersih			**11.273.301.815.282**	***Net***

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN) / *8. SECURITIES (CONTINUED)*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Pemeringkat / *Agencies*	**Peringkat / *Rating***	**Nilai Wajar / *Fair Value***	
Perbankan				***Banking***
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Pefindo	AAA	115.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Fitch	AA+	75.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Fitch	AA+	70.000.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Pefindo	AAA	50.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank BTPN, Tbk	Pefindo	AAA	33.000.000.000	*PT Bank BTPN, Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Pefindo	AAA	23.000.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia, Tbk*
Pemerintah				***Government***
SUN Seri FR 0090	-	-	800.334.000.000	*SUN Seri FR 0090*
SUN Seri FR 0081	-	-	800.000.000.000	*SUN Seri FR 0081*
SUN Seri FR 0086	-	-	500.000.000.000	*SUN Seri FR 0086*
SUN Seri FR 0101			300.000.000.000	*SUN Seri FR 0101*
SUN Seri FR 0095	-	-	230.000.000.000	*SUN Seri FR 0095*
SUN Seri VR 0033	-	-	214.698.000.000	*SUN Seri VR 0033*
SUN Seri FR 0084	-	-	212.810.000.000	*SUN Seri FR 0084*
SUN Seri FR 0104			185.000.000.000	*SUN Seri FR 0104*
SUN Seri FR 0045	-	-	30.000.000.000	*SUN Seri FR 0045*
SUN Seri FR 0042	-	-	20.000.000.000	*SUN Seri FR 0042*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	(15.017.757.895)	*Unamortized discount*
Bank Indonesia				***Bank Indonesia***
SRBI Seri				*SRBI Seri*
IDSR010825364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR010825364S*
IDSR020525364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR020525364S*
IDSR040425364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR040425364S*
IDSR040725364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR040725364S*
IDSR051225364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR051225364S*
IDSR071125364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR071125364S*
IDSR080925367S	-	-	500.000.000.000	*IDSR080925367S*
IDSR101025364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR101025364S*
IDSR110625364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR110625364S*
IDSR141125364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR141125364S*
IDSR310125364S	-	-	500.000.000.000	*IDSR310125364S*
IDSR280225364S	-	-	400.000.000.000	*IDSR280225364S*
IDSR170125364S	-	-	200.000.000.000	*IDSR170125364S*
IDSR240125364S	-	-	100.000.000.000	*IDSR240125364S*
IDSR100125364S			73.578.000.000	*IDSR100125364S*
IDSR030125364S			60.526.000.000	*IDSR030125364S*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	-	(217.850.970.413)	*Unamortized discount*
Jumlah			9.760.077.271.692	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			-	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Bersih			**9.760.077.271.692**	***Net***

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN) / ***8. SECURITIES (CONTINUED)***

d. Berdasarkan Jangka Waktu / ***d. By Period***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Kurang dari 1 tahun	6.338.236.858.050	--	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 5 tahun	4.290.039.582.083	6.696.951.029.587	*1 to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	645.025.375.149	3.063.126.242.105	*More than 5 years*
Jumlah	**11.273.301.815.282**	**9.760.077.271.692**	***Total***

e. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo / ***e. By Maturity***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Kurang dari 1 tahun	8.133.580.110.978	7.365.110.829.414	*Less than 1 year*
1 sampai dengan 5 tahun	2.514.693.053.827	2.179.860.628.175	*1 to 5 year*
Lebih dari 5 tahun	625.028.650.477	215.105.814.103	*More than 5 year*
Jumlah	**11.273.301.815.282**	**9.760.077.271.692**	***Total***

f. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun / ***f. Average Interest Rate per Annum***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Efek - efek	4,62% - 10,25%	5,125% - 10,25%	*Marketable Securities*

g. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / ***g. Movements in the Allowance for Impairment Losses***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/*Amount*	
Saldo awal tahun	-	--	--	-	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	17.000	--	--	17.000	*Movement during current period*
Saldo, akhir periode	17.000	--	--	17.000	*Balance, end of period*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand Rupiah*				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/*Amount*	
Saldo awal tahun	28.500	--	--	28.500	*Balance, beginning of year*
Perubahan selama periode berjalan	(28.500)	--	--	(28.500)	*Movement during current period*
Saldo, akhir periode	-	--	--	-	*Balance, end of period*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

h. Berdasarkan Kualitas Aset / ***h. By Asset Quality***

Kualitas efek-efek adalah sebagai berikut :

The quality of Marketable Securities are as follows :

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Lancar	11.273.318.815.282	9.760.077.271.692	*Current*
Jumlah	11.273.318.815.282	9.760.077.271.692	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.000.000)	-	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**11.273.301.815.282**	**9.760.077.271.692**	***Net***

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN / *9. LOANS*

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan / *a. By Type and Relationship*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Konsumsi	18.537.601.171	25.594.538.599	*Consumer*
Investasi	4.842.373.091	3.072.625.561	*Investment*
Modal kerja	4.850.839.991	3.554.819.994	*Working Capital*
Sub - Jumlah	28.230.814.253	32.221.984.154	*Sub - Total*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Konsumsi	10.117.915.143.467	9.845.952.811.271	*Consumer*
Investasi	11.430.589.171.472	10.148.113.997.612	*Investment*
Modal kerja	2.960.844.477.821	2.396.466.231.441	*Working Capital*
Sindikasi	463.326.242.969	407.414.388.966	*Syndication*
Sub - Jumlah	24.972.675.035.729	22.797.947.429.290	*Sub - Total*
Total	**25.000.905.849.982**	**22.830.169.413.444**	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**23.845.077.361.413**	**21.525.087.396.052**	***Net***

Rincian Pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut: / *Loans based on quality are as follows :*

	31 Desember 2025 / December *31, 2025*			
	Portofolio Pinjaman yang diberikan/ *Loans Portfolio*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for Impairment Losses*	
	%	Jumlah Pinjaman yang diberikan / *Total Loans*	Jumlah / *Total*	
Kualitas				***Quality***
Lancar	98,12%	24.530.788.118.734	761.260.660.618	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	1,09%	270.558.874.292	197.145.396.782	*Special Mention*
Kurang Lancar	0,08%	20.817.234.340	19.615.395.011	*Substandard*
Diragukan	0,12%	29.249.498.995	28.314.933.581	*Doubtful*
Macet	0,60%	149.492.123.621	149.492.102.577	*Loss*
Jumlah	**100,00%**	**25.000.905.849.982**	**1.155.828.488.569**	***Total***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Portofolio Pinjaman yang diberikan/ *Loans Portfolio*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for Impairment Losses*	
	%	Jumlah Pinjaman yang diberikan / *Total Loans*	Jumlah / *Total*	
Kualitas				***Quality***
Lancar	98,10%	22.395.257.413.275	940.706.643.862	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	0,99%	224.851.683.887	159.330.794.433	*Special Mention*
Kurang Lancar	0,06%	14.637.833.507	9.622.096.322	*Substandard*
Diragukan	0,10%	21.976.355.246	21.976.355.246	*Doubtful*
Macet	0,76%	173.446.127.529	173.446.127.529	*Loss*
Jumlah	**100,00%**	**22.830.169.413.444**	**1.305.082.017.392**	***Total***

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN) / ***9. LOANS (CONTINUED)***

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi / ***b. By Economic Sector***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Rumah Tangga	10.136.051.687.411	9.871.547.349.870	*Household*
Perdagangan Besar dan Eceran	6.405.488.772.110	6.048.280.146.621	*Wholesale and Retail Trade*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.322.154.368.773	1.866.187.420.441	*Accommodation and culinary supplying*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.817.940.538.077	1.716.940.863.965	*Agriculture, forestry and Fishery*
Konstruksi	872.366.066.380	765.664.443.315	*Construction*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	706.598.266.229	55.378.760.635	*Financial and Insurance Activities*
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	555.751.771.056	550.346.330.047	*Human Health Activities And Social activity*
Industri Pengolahan	542.429.628.130	502.656.383.479	*Processing Industry*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	345.577.359.636	294.141.437.592	*Leasing and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Pengangkutan dan Pergudangan	147.461.542.922	143.605.037.883	*Transportation and Warehousing*
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	101.846.086.907	85.142.737.675	*Professional, Scientific and Technical Activities*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	96.893.359.152	109.221.071.358	*Water Management, Wastewater Management Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Pendidikan	83.144.083.604	67.617.717.247	*Education*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.046.508.075	15.732.497.986	*Arts, Entertainment and Recreation*
Real Estate	15.917.669.230	14.999.773.035	*Real Estate*
Informasi dan Komunikasi	13.011.445.119	13.156.692.643	*Information and Communication*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	8.277.219.673	9.214.338.501	*Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used to Fulfill Own Needs*
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	401.057.227	-	*Not Other Business Fields*
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	-	8.035.714.286	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air*
Pertambangan dan Penggalian	-	76.889.421	*Mining and Excavation*
Aktivitas Jasa Lainnya	814.548.420.271	692.223.807.444	*Other Service Activities*
Jumlah	**25.000.905.849.982**	**22.830.169.413.444**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**23.845.077.361.413**	**21.525.087.396.052**	***Total - net***

c. Berdasarkan Periode Sisa Jatuh Tempo / ***c. By Remaining Period to Maturity***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.932.854.593.050	1.491.057.519.439	*Less or equal to 1 year*
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	1.072.029.968.694	795.348.645.455	*More than 1 year to 2 years*
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	6.971.975.513.810	6.038.368.724.587	*More than 2 years to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	15.024.045.774.428	14.505.394.523.963	*More than 5 years*
Jumlah	25.000.905.849.982	22.830.169.413.444	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**23.845.077.361.413**	**21.525.087.396.052**	***Net***

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN) / ***9. LOANS (CONTINUED)***

d. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian Kredit / ***d. By Loan Period based on Credit Agreements***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Lebih dari 5 tahun	19.998.142.764.999	15.696.379.339.786	*More than 5 years*
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	3.223.077.510.397	5.737.465.031.701	*More than 2 years to 5 years*
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	446.250.276.735	900.440.979.155	*More than 1 year to 2 years*
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.333.435.297.851	495.884.062.802	*Less than or equal to 1 year*
Jumlah	**25.000.905.849.982**	**22.830.169.413.444**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155.828.488.569)	(1.305.082.017.392)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah bersih	**23.845.077.361.413**	**21.525.087.396.052**	***Net***

e. Berdasarkan Pihak Berelasi / ***e. By Related Parties***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Keluarga Direksi dan Karyawan kunci	27.355.693.858	26.419.046.747	*Director's family and Key Employees*
Komisaris	875.120.395	3.214.217.807	*Commissioners*
Lainnya	-	2.588.719.600	*Others*
Jumlah	**28.230.814.253**	**32.221.984.154**	***Total***

f. Berdasarkan *Stage* / ***f. By Stage***

	31 Desember 2025 / *December 31 2025* (Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand of Rupiah*)				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Jumlah/Total**	
Saldo awal	22.369.604.395	75.114.636	385.450.382	22.830.169.413	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(85.094.409)	86.289.250	(1.194.841)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(98.369.362)	(23.840.641)	122.210.003	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	19.168.384	(16.351.360)	(2.817.024)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	2.331.687.788	(31.457.574)	(129.493.777)	2.170.736.437	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	24.536.996.796	89.754.311	374.154.743	25.000.905.850	***Ending balance***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024* (Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand of Rupiah*)				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Jumlah/Total**	
Saldo awal	20.724.188.158	87.243.126	339.149.721	21.150.581.005	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(65.543.364)	69.396.084	(3.852.720)	--	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(213.042.911)	(24.945.697)	237.988.608	--	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	40.104.144	(28.595.767)	(11.508.377)	--	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	1.883.898.368	(27.983.110)	(176.326.850)	1.679.588.408	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	22.369.604.395	75.114.636	385.450.382	22.830.169.413	***Ending balance***

g. Tingkat Suku Bunga per Tahun / ***g. Annual Interest Rates***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pinjaman yang diberikan	2,00% - 15,00%	2,00% - 16,00%	*Loans*

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN) / ***9. LOANS (CONTINUED)***

h. Ikhtisar Kredit Bermasalah Berdasarkan Sektor Ekonomi / ***h. Non-Performing Loans by Economic Sector***

	31 Desember 2025 / *December 31 2025*		
	Kredit bermasalah/ *Non Performing Loan*	**Cadangan Kerugian/ *Allowance for Impairment Losses***	
Perdagangan Besar dan Eceran	94.830.513.597	94.383.507.472	*Wholesale and Retail Trade*
Rumah Tangga	59.376.497.568	59.142.248.506	*Household*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.774.906.384	15.707.646.117	*Agriculture, forestry and Fishery*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9.025.405.107	8.322.528.514	*Accommodation and culinary supplying*
Konstruksi	5.557.773.849	5.557.773.849	*Construction*
Industri Pengolahan	2.388.656.104	2.341.129.971	*Processing Industry*
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.053.966.162	2.053.966.162	*Human Health Activities and Social Activities*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1.728.175.764	1.572.984.544	*Leasing and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.064.530.609	1.064.530.609	*Financial and Insurance Activities*
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	953.443.783	953.443.783	*Professional, Scientific and Technical Activities*
Pendidikan	441.859.640	400.974.688	*Education*
Informasi dan Komunikasi	200.672.742	200.672.742	*Information and Communication*
Pengangkutan dan Pergudangan	122.799.591	66.591.966	*Transportation and Warehousing*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	98.500.000	98.500.000	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	32.352.287	32.352.287	*Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used to Fulfill Own Needs*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi			*Arts, Entertainment and Recreation*
Aktivitas Jasa Lainnya	5.908.803.769	5.523.579.959	*Other Service Activities*
Jumlah	**199.558.856.956**	**197.422.431.169**	***Total***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*		
	Kredit bermasalah/ *Non Performing Loan*	**Cadangan Kerugian/ *Allowance for Impairment Losses***	
Perdagangan Besar dan Eceran	111.605.129.728	111.006.072.842	*Wholesale and Retail Trade*
Rumah Tangga	42.717.013.859	39.813.809.031	*Household*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.016.465.069	18.559.785.813	*Agriculture, forestry and Fishery*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.469.393.901	10.909.251.701	*Accommodation and culinary supplying*
Konstruksi	8.241.780.167	8.241.780.167	*Construction*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	867.869.508	812.498.227	*Leasing and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.489.505.436	2.489.505.436	*Human Health Activities And Social activity*
Industri Pengolahan	3.035.956.300	2.634.242.542	*Processing Industry*
Real Estate			*Real Estate*
Informasi dan Komunikasi	390.082.990	390.082.990	*Information and Communication*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.569.787.975	2.569.787.975	*Financial and Insurance Activities*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	98.500.000	98.500.000	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	850.993	850.993	*Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used To Fulfill Own Needs*
Pertambangan dan Penggalian	76.889.421	76.889.421	*Mining and Excavation*
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	497.084.585	475.217.126	*Professional, Scientific and Technical Activities*
Aktivitas Jasa Lainnya	6.984.006.350	6.966.304.833	*Other Service Activities*
Jumlah	**210.060.316.282**	**205.044.579.097**	***Total***

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

h. Ikhtisar Kredit Bermasalah Berdasarkan Sektor Ekonomi (Lanjutan)

Rasio kredit bermasalah - kotor terhadap jumlah kredit adalah 0,80% dan 0,92% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Rasio kredit bermasalah - bersih terhadap jumlah kredit adalah 0,01% dan 0,02% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

i. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan Pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi sebesar Rp463.326.242.969 dan Rp407.414.388.966 masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Keikutsertaan Bank dalam kredit sindikasi sebagai anggota sebesar 0,69% - 5,57% pada 31 Desember 2025 dan sebesar 0,69% - 5,75% pada 31 Desember 2024 dari masing - masing fasilitas pinjaman.

j. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Perubahan dalam penyisihan kerugian Pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

9. LOANS (CONTINUED)

h. Non-Performing Loans by Economic Sector (Continued)

Non performing loan ratio - gross to total loan was 0.80% and 0.92% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Non performing loan ratio - net to total loan was 0.01% and 0.02% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

i. Syndicated Loans

Syndicated loans represent loans provided to debtors under syndication agreements with other banks. Total syndicated loans amounted to Rp463.326.242.969 and Rp407,414,388,966 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

The participation of the Bank as a member of syndications is between 0.69% - 5.75% as at December 31, 2025 and 0.69% - 5.75% as at December 31, 2024 of each syndicated loan facility.

j. Movements in the Allowance for Impairment Losses

The movement of Allowance for impairment losses is as follows:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025 (Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand of Rupiah*)				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Jumlah/Total**	
Saldo, awal tahun	886.334.783	38.343.339	380.403.895	1.305.082.017	*Balance, beginning of year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(19.068.182)	19.568.471	(500.289)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(27.164.457)	(12.275.796)	39.440.253	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	9.105.977	(7.021.815)	(2.084.162)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(127.374.605)	23.338.246	(13.863.530)	(117.899.889)	*Net change in exposure and remeasurement*
Penghapusan	-	-	(31.353.640)	(31.353.640)	*Written-off*
Saldo, akhir tahun	**721.833.516**	**61.952.445**	**372.042.527**	**1.155.828.488**	***Balance, end of year***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024* (Dalam Ribuan Rupiah/ *In Thousand of Rupiah*)				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Jumlah/Total**	
Saldo, awal tahun	846.818.858	53.581.614	332.126.824	1.232.527.296	*Balance, beginning of year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(21.198.002)	24.386.597	(3.188.595)	--	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(98.672.351)	(17.228.563)	115.900.914	--	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	27.616.163	(17.314.060)	(10.302.103)	--	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	131.770.115	(5.082.249)	12.462.698	139.150.564	*Net change in exposure and remeasurement*
Penghapusan	-	-	(66.595.843)	(66.595.843)	*Written-off*
Saldo, akhir tahun	**886.334.783**	**38.343.339**	**380.403.895**	**1.305.082.017**	***Balance, end of year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

k. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Pinjaman yang Diberikan

1) Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, fidusia, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh bank.
2) Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna lainnya, kredit multiguna perorangan dan kredit konsumtif perorangan lainnya.
3) Kredit Program Pemerintah terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit modal kerja lainnya dimana Pemerintah dapat menyediakan sebagian dan/atau keseluruhan dananya.
4) Kredit karyawan adalah Pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah, atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sesuai tujuan kreditnya.
5) 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
6) Saldo kredit yang dihapus buku selama periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp31.353.639.800 dan Rp66.595.842.488. Penghapusbukuan kredit ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.
7) Simpanan dari nasabah yang diblokir dan dijadikan jaminan atas Pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing - masing sebesar Rp345.314.089.715 dan Rp310.567.943.916 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Deposito berjangka	332.483.692.885	297.184.669.764	*Time Deposit*
Tabungan	12.830.396.830	13.383.274.152	*Savings*
Jumlah	**345.314.089.715**	**310.567.943.916**	***Total***

8) Tagihan/piutang yang ada saat ini dan/atau akan melekat dikemudian hari, termasuk hak agunan yang melekat padanya dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

l. Kredit yang Direstrukturisasi

Berikut ini adalah jenis dan jumlah Pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2025 dan 2024:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Perpanjangan Jangka waktu Kredit dan Skema Lain	634.548.117.082	829.510.069.105	*Extension of Loan Period and Other Schemes*
Perpanjangan Jangka waktu Kredit	104.356.986.465	135.571.462.723	*Extension of Loan Period*
Perpanjangan Waktu dengan Penyesuaian Suku Bunga	187.630.929	622.232.802	*Extension of Loan Period and Interest Rate Adjusment*
Jumlah	**739.092.734.476**	**965.703.764.630**	***Total***

Kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Lancar	511.701.152.434	685.917.877.420	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	137.228.587.623	146.584.482.438	*Special Mention*
Kurang Lancar	9.801.056.706	8.533.158.716	*Substandard*
Diragukan	7.478.615.467	8.947.689.713	*Doubtful*
Macet	72.883.322.246	115.720.556.343	*Loss*
Jumlah	**739.092.734.476**	**965.703.764.630**	***Total***

9. LOANS (CONTINUED)

k. Other Significant Information Related to Loans

1) Loans are generally secured by pledged collateral, fiduciary rights, time deposits or other collateral accepted by Bank.
2) Consumption loans consist of home ownership loans, motor vehicle loans, other multipurpose loans, individual multipurpose loans and other individual consumer loans.
3) Government Loan Program consists of investment loans, working capital loan and other working capital loans which the Government provide partial and/or all of their funds.
4) Loans to Employee are loans given to employees to buy vehicles, houses, or other purposes with an interest rate according to the purpose of the credit
5) December 31, 2025 and 2024, there were no violations or exceeding the Legal Lending Limit (LLL) for third parties and related parties and in accordance with regulations established by Bank Indonesia.
6) Credit balances written off during the period December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp31,353,639,800 and Rp66,595,842,488. Write-off credit is not a write-off, so that the billing attempt is still being done.
7) Deposits from customer which are blocked and pleged as loan collateral as of December 31, 2025 and 2024, amounting to Rp345,314,089,715 and Rp310,567,943,916 respectively, are follows:
8) Mortgage bills/debts that are present and/or will be attached later, including the right collateral attached to it are pledged as loan collateral from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

l. Restructured Loans

Below is the type and amount of restructured loans as of December 31, 2025 and 2024:

Restructured loans by quality are as follows:

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

Berikut ini adalah aset tetap kepemilikan langsung yang dimiliki oleh Bank: / *The following is the direct ownership of fixed assets by the Bank:*

	31 Desember 2025 / December 31, 2025				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga Perolehan/ *Acquisition Cost*					
Tanah/*Land*	16.224.955.805	-	-	-	16.224.955.805
Bangunan/*Buildings*	123.434.848.438	345.946.269	32.260.036	1.826.268.800	125.574.803.471
Inventaris kelompok I/ *Fixture Group I*	195.972.992.448	21.410.120.038	11.607.795.875	-	205.775.316.611
Inventaris kelompok II/ *Fixture Group II*	48.291.199.622	2.123.009.445	1.895.482.050	-	48.518.727.017
	383.923.996.313	23.879.075.752	13.535.537.961	1.826.268.800	396.093.802.904
Aset dalam Penyelesaian/ *Construction in Progress*	4.207.370.260	20.721.566.365	-	(1.826.268.800)	23.102.667.825
Jumlah/*Total*	388.131.366.573	44.600.642.117	13.535.537.961	-	419.196.470.729
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan/*Buildings*	59.923.454.277	4.995.579.014	32.260.031	-	64.886.773.260
Inventaris kelompok I/ *Fixture Group I*	160.502.698.110	22.218.506.387	11.604.797.424	-	171.116.407.073
Inventaris kelompok II/ *Fixture Group II*	38.071.613.662	3.295.310.341	1.893.542.303	-	39.473.381.700
	258.497.766.049	30.509.395.742	13.530.599.758	-	275.476.562.033
Nilai Buku Bersih/ *Net Book Value*	**129.633.600.524**				**143.719.908.696**

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga Perolehan/ *Acquisition Cost*					
Tanah/*Land*	16.224.955.805	-	--	--	16.224.955.805
Bangunan/*Buildings*	110.772.189.606	-	866.787.950	13.529.446.782	123.434.848.438
Inventaris kelompok I/ *Fixture Group I*	163.307.763.912	16.138.655.507	762.905.651	17.289.478.680	195.972.992.448
Inventaris kelompok II/ *Fixture Group II*	46.193.793.226	2.243.596.891	146.190.495	-	48.291.199.622
	336.498.702.549	18.382.252.398	1.775.884.096	30.818.925.462	383.923.996.313
Aset dalam Penyelesaian/ *Construction in Progress*	17.731.197.095	17.295.098.626	--	(30.818.925.462)	4.207.370.260
Jumlah/*Total*	354.229.899.644	35.677.351.024	1.775.884.096	--	388.131.366.573
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan/*Buildings*	55.612.666.014	4.833.044.458	522.256.195	--	59.923.454.277
Inventaris kelompok I/ *Fixture Group I*	140.216.307.648	21.032.568.126	746.177.664	--	160.502.698.110
Inventaris kelompok II/ *Fixture Group II*	34.958.066.028	3.234.261.417	120.713.783	--	38.071.613.662
	230.787.039.690	29.099.874.001	1.389.147.642	--	258.497.766.049
Nilai Buku Bersih/ *Net Book Value*	**123.442.859.954**				**129.633.600.524**

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp30.509.395.742 dan Rp29.099.874.001 masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024 (catatan 31).

Total depreciation expense charged to other operating expenses amounted to Rp30,509,395,742 and Rp29,099,874,001 in December 31, 2025 and 2024, respectively (note 31).

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 berkisar antara 8% sampai dengan 12%. Estimasi penyelesaian yaitu pada tahun 2026.

The percentage level of completion of assets in progress on December 31, 2025 ranges from 8% to 12%. Estimated completion is in 2026.

Bank telah mengasuransikan aset tetap untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp473.662.724.755 dan Rp349.721.418.610 pada PT Asuransi Bangun Askrida.

The Bank has insured fixed assets to cover possible losses against the risk of fire, theft and natural disasters with insurance coverage values as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp473,662,724,755 and Rp349,721,418,610 respectively at PT Asuransi Bangun Askrida .

10. ASET TETAP (LANJUTAN)

10. FIXED ASSETS (CONTINUED)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Management is of the opinion that the amount of insurance coverage is sufficient to cover possible losses occurring on the insured fixed assets on December 31, 2025 and 2024.

Penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut :

Details of sale and disposal of property and equipment are as follows :

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Harga Jual	165.985.612	-	*Selling Price*
Nilai Buku	4.938.203	386.736.454	*Book Value*
Laba (Rugi) Penjualan/Penghapusan (Catatan 32)	**161.047.409**	**(386.736.454)**	***Gain (Loss) on Sale/Disposal (Note 32)***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Bank memiliki 52 dan 52 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik sejumlah 1 unit dan 1 unit, Sertifikat Hak Pakai (SHP) sejumlah 2 unit dan 2 unit, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sejumlah 49 unit dan 49 unit yang mempunyai masa manfaat 30 (tiga puluh) tahun. Masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir antara tahun 2037 sampai dengan 2042. Seluruh sertifikat tanah adalah atas nama Bank. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank owns 52 and 52 plots of land with Certificates of Ownership Rights of 1 unit and 1 unit, Certificates of Right to Use (SHP) of 2 units and 2 units, and Certificates of Building Use Rights (HGB) of 49 units and 49 units which have a useful life of 30 (thirty) years. The validity period of the Building Use Rights Certificate (HGB) ends between 2037 and 2042. All land certificates are in the name of the Bank. Management is of the opinion that there is no problem with the extension of land rights because all land was obtained legally and supported by adequate proof of ownership.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There are no fixed assets pledged by the Bank As of December 31, 2025 and 2024.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai permanen atas aset tetap yang dimiliki Bank.

Management believes that there is no indication of permanent impairment losses on fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 harga perolehan dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp175.326.307.800 dan Rp156.773.671.263.

As of December 31, 2025 and 2024 the cost of fully depreciated fixed asset that are still in use amounted to Rp175,326,307,800 and Rp156,773,671,263.

11. ASET TAKBERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSETS

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

The details of intangible assets are as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai Perolehan					***Acquisition Cost***
Perangkat lunak komputer	51.760.428.880	7.193.882.662	--	58.954.311.542	*Computer Software*
Jumlah	**51.760.428.880**	**7.193.882.662**	**--**	**58.954.311.542**	***Total***
Akumulasi amortisasi					***Accumulated Amortization***
Perangkat lunak komputer	44.300.181.485	4.735.714.853	--	49.035.896.338	*Computer Software*
Jumlah	**44.300.181.485**	**4.735.714.853**	**--**	**49.035.896.338**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**7.460.247.395**			**9.918.415.204**	***Net Intangible Assets***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai Perolehan					***Acquisition Cost***
Perangkat lunak komputer	47.769.374.582	3.991.054.298	--	51.760.428.880	*Computer Software*
Jumlah	**47.769.374.582**	**3.991.054.298**	**--**	**51.760.428.880**	***Total***
Akumulasi amortisasi					***Accumulated Amortization***
Perangkat lunak komputer	39.561.514.110	4.738.667.375	--	44.300.181.485	*Computer Software*
Jumlah	**39.561.514.110**	**4.738.667.375**	**--**	**44.300.181.485**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**8.207.860.472**			**7.460.247.395**	***Net book value***

Jumlah amortisasi yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp4.735.714.853 dan Rp4.738.667.375 masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024 (catatan 31).

Total amortization expense charged to other operating expenses amounted to Rp4,735,714,853 and Rp4,738,667,375 in December 31, 2025 and 2024, respectively (note 31).

12. ASET HAK GUNA / *12. RIGHT-OF-USE ASSET*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
Gedung	48.551.426.065	9.681.534.000	6.478.773.549	51.754.186.516	*Building*
Tanah	3.422.826.599	1.815.000.000	--	5.237.826.599	*Land*
ATM	24.812.011.023	3.015.223.333	7.938.618.539	19.888.615.817	*ATM*
Kendaraan	3.779.463.653	8.294.230.628	--	12.073.694.281	*Vehicle*
Gedung Bukan Kantor	2.253.398.356	1.322.102.000	554.300.000	3.021.200.356	*Non-Office Building*
Total	**82.819.125.696**	**24.128.089.961**	**14.971.692.088**	**91.975.523.569**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Gedung	21.240.551.717	9.221.547.904	6.478.773.549	23.983.326.072	*Building*
Tanah	525.838.134	282.299.768	--	808.137.902	*Land*
ATM	13.366.039.804	6.457.154.164	7.938.618.539	11.884.575.429	*ATM*
Kendaraan	1.387.122.986	3.105.035.842	--	4.492.158.828	*Vehicle*
Gedung Bukan Kantor	1.529.019.928	1.115.204.741	554.300.000	2.089.924.669	*Non-Office Building*
Total	**38.048.572.569**	**20.181.242.419**	**14.971.692.088**	**43.258.122.900**	***Total***
Nilai buku bersih	**44.770.553.127**			**48.717.400.669**	***Net book value***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
Gedung	45.504.975.154	10.952.916.833	7.906.465.922	48.551.426.065	*Building*
Tanah	3.311.826.599	111.000.000	--	3.422.826.599	*Land*
ATM	19.951.635.192	8.746.308.217	3.885.932.386	24.812.011.023	*ATM*
Kendaraan	4.716.881.605	347.912.433	1.285.330.385	3.779.463.653	*Vehicle*
Gedung Bukan Kantor	2.039.000.551	933.587.805	719.190.000	2.253.398.356	*Non-Office Building*
Total	**75.524.319.101**	**21.091.725.288**	**13.796.918.693**	**82.819.125.696**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Gedung	20.643.471.120	8.503.546.519	7.906.465.922	21.240.551.717	*Building*
Tanah	338.021.690	187.816.444	--	525.838.134	*Land*
ATM	10.754.614.557	6.497.357.633	3.885.932.386	13.366.039.804	*ATM*
Kendaraan	1.418.980.372	1.253.472.999	1.285.330.385	1.387.122.986	*Vehicle*
Gedung Bukan Kantor	1.351.296.360	896.913.568	719.190.000	1.529.019.928	*Non-Office Building*
Total	**34.506.384.099**	**17.339.107.163**	**13.796.918.693**	**38.048.572.569**	***Total***
Nilai buku bersih	**41.017.935.002**			**44.770.553.127**	***Net book value***

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp20.181.242.419 dan Rp17.339.107.163 masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024 (catatan 31).

Total depreciation expense charged to other operating expenses amounted to Rp20,181,242,419 and Rp17,339,107,163 in December 31, 2025 and 2024, respectively (note 31).

13. ASET LAIN-LAIN / *13. OTHER ASSETS*

Seluruh aset lain-lain dalam mata uang Rupiah. / *All other assets are stated in Rupiah.*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Bunga yang Akan Diterima	187.192.248.337	138.390.842.458	*Accrued Interest receivable*
Tagihan *Switching* Antar Bank & GPN	51.772.611.072	50.147.958.932	*Interbank Switching Bills & GPN*
Rupa-rupa Dalam Penyelesaian	12.618.284.968	17.066.850.693	*Other Advances*
Beban yang Ditangguhkan	12.030.897.170	11.691.500.199	*Deferred Costs*
Biaya Dibayar Dimuka	8.029.568.985	4.745.379.742	*Prepaid Expense*
Setoran Jaminan	3.037.244.407	2.548.430.545	*Security Deposit*
Persediaan Barang Cetakan	1.454.210.293	1.423.900.863	*Printing Supplies*
Properti Terbengkalai	436.651.800	436.651.800	*Abandoned Property*
Tagihan Kiriman Uang *Western Union*	423.578.300	592.531.600	*Money bills transfer Western Union*
Tagihan lainnya	-	2.523.574.279	*Other Bills*
Lainnya	17.000.000	69.600.000	*Others*
Jumlah	**277.012.295.332**	**229.637.221.111**	***Total***

13. ASET LAIN-LAIN (LANJUTAN) / *13. OTHER ASSETS (CONTINUED)*

a. Bunga yang akan diterima terdiri dari: / ***a. Accrued interests receivables are as follows:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pinjaman yang diberikan	113.088.224.447	90.229.057.889	*Loans*
Efek-efek dan Penempatan Pada Bank Lain	74.104.023.890	48.161.784.569	*Securities and Placement with Other Banks*
Jumlah	**187.192.248.337**	**138.390.842.458**	***Total***

b. Biaya dibayar dimuka terdiri dari: / ***b. Prepaid expenses:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Asuransi	5.939.729.606	2.589.540.145	*Insurance*
Sewa	2.084.865.442	2.153.088.414	*Rental*
Lain-Lain	4.973.937	2.751.183	*Others*
Jumlah	**8.029.568.985**	**4.745.379.742**	***Total***

c. Uang muka pajak / ***c. Tax advance***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pajak Badan	-	-	*Corporate income tax*
PPN	-	-	*VAT*
	-	-	
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan cadangan kerugian	-	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**-**	**-**	***Total***

Cadangan kerugian ekspektasian atas uang muka pajak adalah sebagai berikut: / *Expected credit losses on transactions of tax advance are as follows:*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Saldo awal tahun	-	48.424.954.723	*Balance, beginning of year*
Pemulihan tahun berjalan	-	(48.424.954.723)	*Recovery during the year*
Jumlah	**-**	**-**	***Total***

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak, pada tanggal 7 Desember 2020, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2016 No. 00096/206/16/904/20 sebesar Rp59.074.459.024 dimana yang disetujui oleh Bank hanya sebesar Rp1.516.356.854 dan dicatat sebagai beban pajak kini - tahun sebelumnya di laporan laba rugi tahun 2020. Pada tanggal 4 Januari 2021, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB PPh Badan dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Badan yang tidak disetujui sebesar Rp57.558.102.170 ke Kantor Pajak pada tanggal 26 Februari 2021.

Based on the results of the tax audit by the Tax Office, on December 7, 2020, the Bank has received an Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB) on Corporate Income Tax for the 2016 fiscal year No. 00096/206/16/904/20 amounting to Rp59,074,459,024 of which the Bank approved only Rp1,516,356,854 and was recorded as current tax expense - the previous year in the 2020 income statement. On January 4, 2021, the Bank has made payments for all SKPKB of Corporate Income Tax and has submitted an objection letter for the SKPKB of Corporate Income Tax which was not approved in the amount of Rp57,558,102,170 to the Tax Office on February 26, 2021.

Pada tanggal 14 Desember 2020, Bank juga menerima SKPKB atas PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp242.949.390 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikut Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp158.133.156 untuk tahun fiskal 2016. Pada tanggal 4 Januari 2021, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB tersebut dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pajak pada tanggal 26 Februari 2021.

On December 14, 2020, the Bank also received SKPKB for Income Tax Article 4 (2) amounting to Rp242,949,390 and Value Added Tax (VAT) and Tax Collection Letter (STP) amounting to Rp158,133,156 for the 2016 fiscal year. On January 4, 2021 , the Bank has made payments for all of the said SKPKB and has submitted an objection letter to the SKPKB Tax Article 4 paragraph (2) and Value Added Tax (PPN) to the Tax Office on February 26, 2021.

Jumlah pembayaran atas SKPKB yang tidak disetujui diatas sebesar Rp57.959.184.716 dimana Bank telah mengajukan keberatan dan dicatat sebagai uang muka pajak pada tanggal 31 Desember 2021.

The total payment for the SKPKB that was not approved above amounted to Rp57,959,184,716 where the Bank has filed an objection, which was recorded as a tax advance as of December 31, 2021.

Pada tanggal 13 Januari 2022 Bank menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00001/KEB/PJ/WPJ.17/2022, KEP-00002/KEB/PJ/WPJ.17/2022, dan KEP-00003/KEB/PJ/WPJ.17/2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimana Direktorat Jenderal Pajak menetapkan menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

On January 13, 2022, the Bank received the Decree of the Director General of Taxes Number: KEP-00001/KEB/PJ/WPJ.17/2022, KEP-00002/KEB/PJ/WPJ.17/2022, and KEP-00003/KEB/PJ /WPJ.17/2022 concerning Taxpayer's Objection to the Underpaid Tax Assessment Letter where the Directorate General of Taxes determines to reject the Taxpayer's objection and maintains the amount of tax still to be paid by the Taxpayer.

Selanjutnya, Bank memutuskan untuk mengajukan permohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta sesuai Surat Nomor : R-1692/DIR/OKA/2022 dan R-1693/DIR/OKA/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas keputusan penolakan keberatan dimaksud.

Subsequently, the Bank decided to submit an appeal application addressed to the Head of the Tax Court domiciled in Jakarta in accordance with Letters Number: R-1692/DIR/OKA/2022 and R-1693/DIR/OKA/2022 dated April 1, 2022 regarding the Application for Appeal against the Decision of the Directorate General of Taxes on the decision to reject the objection.

13. ASET LAIN-LAIN (LANJUTAN) / 13. OTHER ASSETS (CONTINUED)

c. Uang muka pajak (Lanjutan) / ***c. Tax advance (Continued)***

Pada tanggal 8 Desember 2023, Bank menjalani persidangan ke-8 dengan agenda Pemberitahuan Sidang Pengucapan Putusan terkait permohonan Banding terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas keputusan penolakan keberatan dimaksud. Adapun hasil persidangan ke-8 adalah :

a. No. Putusan : PUT-003579.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
   Jenis Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
b. No. Putusan : PUT-003580.16/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
   Jenis Putusan : Mengabulkan Sebagian

Pada tanggal 2 April 2024, Bank mengakui pendapatan atas penyelesaian sengketa pajak tahun buku 2016 sebesar Rp48.385.816.690.

On December 8, 2023, the Bank underwent its 8th trial with the agenda of Notification of Decision Pronunciation Hearing regarding the appeal against the Directorate General of Taxes' decision regarding the decision to reject the objection in question. The results of the 8th trial are :

a. No. Decision : PUT-003579.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Type of Decision : Grant it all
b. No. Decision : PUT-003580.16/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Type of Decision : Partially Grant it

On April 2, 2024, the Bank recognized income from the resolution of tax disputes for the 2016 financial year amounting to Rp48,385,816,690.

d. Tagihan *Switching* Antar Bank & GPN / ***d. Interbank Switching Bills & GPN***

Tagihan ATM merupakan tagihan yang terkait dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

ATM receivables is customers' transactions conducted through ATM Bersama and ATM Prima network.

e. Tagihan Lainnya / ***e. Other Bills***

Tagihan lainnya merupakan tagihan kepada PT Arindo Pratama atas dana talangan pembayaran ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

The other bill is a bill to PT Arindo Pratama for the bailout funds paid to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
PT Arindo Pratama	12.617.871.397	12.617.871.397	*PT Arindo Pratama*
	12.617.871.397	12.617.871.397	
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan cadangan kerugian	(12.617.871.397)	(10.094.297.118)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**-**	**2.523.574.279**	***Total***

Cadangan kerugian ekspektasian atas tagihan lainnya adalah sebagai berikut:

Expected credit losses on transactions of other bills are as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Saldo awal tahun	10.094.297.118	-	*Balance, beginning of year*
Penyisihan tahun berjalan	2.523.574.279	10.094.297.118	*Provision during the year*
Jumlah	**12.617.871.397**	**10.094.297.118**	***Total***

14. LIABILITAS SEGERA / 14. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Titipan Kewajiban *Switching* Antar Bank & GPN	37.342.122.338	36.320.864.633	*Interbank Switching & GPN Obligation*
Beban yang Masih Harus Dibayar	29.700.117.410	29.346.716.695	*Accrued payable*
Titipan Gaji Tabungan	8.970.079.522	1.734.534.418	*Temporary salary savings account*
Titipan Pembayaran Kredit	1.728.846.337	2.564.310.481	*Deposit of credit payment*
Rekening Titipan	128.255.804	13.555.343	*Temporary account*
Bunga Deposito Jatuh Tempo	78.144.283	33.238.125	*Interest of time deposit fall due*
Lain-lain	4.402.710.041	4.666.411.386	*Others*
Jumlah	**82.350.275.735**	**74.679.631.081**	***Total***

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan.

Temporary account were payment transactions received from customer by the Bank as collecting agent before deposit to destination account.

Seluruh transaksi liabilitas segera dalam bentuk Rupiah.

All liability transactions are immediately in Rupiah.

15. SIMPANAN DARI NASABAH / 15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Hubungan / ***a. By Type, Currency, and Relationship***

	31 Desember 2025 / December 31, 2025			
	Pihak Berelasi / *Related Parties*	Pihak Ketiga / *Third Parties*	Jumlah / *Total*	
Rupiah				***Rupiah***
Giro	1.754.244.794.994	3.496.816.661.297	5.251.061.456.291	*Current Account*
Tabungan	29.351.347.741	18.106.980.850.335	18.136.332.198.076	*Savings*
Deposito Berjangka	23.614.138.775	10.438.507.962.798	10.462.122.101.573	*Time Deposit*
Sub - Jumlah	1.807.210.281.510	32.042.305.474.430	33.849.515.755.940	*Sub - Total*
Dollar Amerika Serikat				***United States Dollar***
Giro	-	77.408.018	77.408.018	*Current Account*
Tabungan	155.435.846	492.358.059	647.793.905	*Savings*
Deposito Berjangka	-	2.970.034.275	2.970.034.275	*Time Deposit*
Sub - Jumlah	155.435.846	3.539.800.352	3.695.236.198	*Sub - Total*
Jumlah	**1.807.365.717.356**	**32.045.845.274.782**	**33.853.210.992.138**	***Total***

15. SIMPANAN DARI NASABAH (LANJUTAN) / *15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (CONTINUED)*

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Hubungan (Lanjutan) / *a. By Type, Currency, and Relationship (Continued)*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Pihak Berelasi / *Related Parties*	**Pihak Ketiga / *Third Parties***	**Jumlah / *Total***	
Rupiah				***Rupiah***
Giro	540.226.399.665	4.422.522.692.658	4.962.749.092.323	*Current Account*
Tabungan	25.296.065.082	17.785.814.256.618	17.811.110.321.700	*Savings*
Deposito Berjangka	25.126.901.368	9.364.956.646.192	9.390.083.547.560	*Time Deposit*
Sub - Jumlah	590.649.366.115	31.573.293.595.468	32.163.942.961.583	*Sub - Total*
Dollar Amerika Serikat				***United States Dollar***
Giro	--	76.629.583	76.629.583	*Current Account*
Tabungan	58.021.028	1.270.375.615	1.328.396.643	*Savings*
Deposito Berjangka	--	2.443.221.000	2.443.221.000	*Time Deposit*
Sub - Jumlah	58.021.028	3.790.226.198	3.848.247.226	*Sub - Total*
Jumlah	**590.707.387.143**	**31.577.083.821.666**	**32.167.791.208.809**	***Total***

b. Deposito Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu / *b. Time Deposits Based on Contractual Period*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	2.239.194.095.588	2.076.722.845.921	*1 Month*
3 bulan	2.898.870.996.392	2.711.192.774.899	*3 Months*
6 bulan	1.799.321.539.197	1.682.379.230.831	*6 Months*
12 bulan	3.455.447.634.297	2.872.085.822.201	*12 Months*
24 bulan	69.287.836.099	47.702.873.708	*24 Months*
Sub - Jumlah	10.462.122.101.573	9.390.083.547.560	*Sub - Total*
Dollar Amerika Serikat			***United States Dollar***
1 bulan	126.730.000	1.665.832.500	*1 Month*
3 bulan	116.725.000	112.665.000	*3 Months*
6 bulan	266.800.000	257.520.000	*6 Months*
12 bulan	2.459.779.275	407.203.500	*12 Months*
Sub - Jumlah	2.970.034.275	2.443.221.000	*Sub - Total*
Jumlah	**10.465.092.135.848**	**9.392.526.768.560**	***Total***

c. Deposito Berjangka Berdasarkan Sisa Umur Sampai dengan Saat Jatuh Tempo / *c. Classification Time Deposits Based on Remaining Maturity*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Rupiah			***Rupiah***
Kurang atau sama dengan 1 bulan	5.663.557.216.636	3.632.783.007.524	*Less or equal to 1 month* / *1 month*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	1.825.696.811.193	2.742.694.647.670	*More than 1 month to* / *3 months*
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	1.410.702.773.370	1.440.106.331.270	*More than 3 months to* / *6 months*
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	1.526.795.119.348	1.541.258.687.389	*More than 6 months to* / *12 months*
Lebih dari 12 bulan	35.370.181.026	33.240.873.707	*More than 12 months*
Sub - Jumlah	10.462.122.101.573	9.390.083.547.560	*Sub - Total*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Kurang atau sama dengan 1 bulan	2.431.431.775	1.923.352.500	*Less or equal to 1 month* / *1 month*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	116.725.000	112.665.000	*More than 1 month to* / *3 months*
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	-	--	*More than 3 months to* / *6 months*
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	421.877.500	407.203.500	*More than 6 months to* / *12 months*
Sub - Jumlah	2.970.034.275	2.443.221.000	*Sub - Total*
Jumlah	**10.465.092.135.848**	**9.392.526.768.560**	***Total***

d. Kisaran Suku Bunga per Tahun / *d. Interest Range per Annum*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Rupiah			***Rupiah***
Giro	0,00% - 1,90%	0,00% - 1,90%	*Current Account*
Tabungan	0,00% - 3,50%	0,00% - 3,50%	*Savings*
Deposito berjangka	2,90% - 3,50%	2,90% - 4,00%	*Time Deposit*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Giro	0,00% - 0,15%	0,00% - 0,15%	*Current Account*
Tabungan	0,00% - 0,20%	0,00% - 0,20%	*Savings*
Deposito berjangka	0,20%	0,20%	*Time Deposit*

15. SIMPANAN DARI NASABAH (LANJUTAN) / *15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (CONTINUED)*

e. Simpanan Diblokir dan Dijadikan Jaminan atas Pinjaman yang Diberikan: / ***e. Blocked Savings Account and Pledged as Collateral for Loans:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Deposito berjangka	332.483.692.885	297.184.669.764	*Time deposit*
Tabungan	12.830.396.830	13.383.274.152	*Savings*
Jumlah	**345.314.089.715**	**310.567.943.916**	***Total***

16. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *16. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Seluruh simpanan dari bank lain dalam mata uang Rupiah. / *All deposit with other banks are stated in Rupiah.*

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan / ***a. By Type and Relationship***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pihak Ketiga			***Third parties***
Interbank Call Money	400.000.000.000	-	*Interbank Call Money*
Deposito berjangka	257.266.962.310	258.016.962.310	*Time deposits*
Tabungan	248.170.972.552	221.135.342.280	*Savings*
Giro	170.220.360.206	182.539.682.452	*Current account*
Jumlah	**1.075.658.295.068**	**661.691.987.042**	***Total***

b. Deposito Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu / ***b. Time Deposits Based on Contractual Period***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
1 bulan	55.800.000.000	88.255.000.000	*1 Month*
3 bulan	169.716.962.310	149.111.962.310	*3 Months*
6 bulan	8.650.000.000	7.550.000.000	*6 Months*
12 bulan	23.100.000.000	13.100.000.000	*12 Months*
Jumlah	**257.266.962.310**	**258.016.962.310**	***Total***

c. Deposito Berjangka Berdasarkan Sisa Umur Sampai dengan Saat Jatuh Tempo / ***c. Classification Time Deposits Based on Remaining Maturity***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Kurang atau sama dengan 1 bulan	164.916.962.310	113.555.000.000	*Less or equal to 1 month*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	78.700.000.000	128.811.962.310	*More than 1 to 3 months*
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	2.550.000.000	4.550.000.000	*More than 3 to 6 months*
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	11.100.000.000	11.100.000.000	*More than 6 to 12 months*
Jumlah	**257.266.962.310**	**258.016.962.310**	***Total***

d. Tingkat Suku Bunga per Tahun / ***d. Interest Rate per Annum***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Giro	0,00% - 1,90%	0,00% - 1,90%	*Current account*
Tabungan	0,00% - 3,50%	0,00% - 3,50%	*Savings*
Deposito berjangka	2,90% - 3,50%	2,90% - 4,00%	*Time deposits*
Interbank Call Money	4,30% - 4,75%	-	*Interbank Call Money*

e. Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. / ***e.*** *There are no deposits from other banks that are blocked or used as collateral for loans granted on December 31, 2025 and 2024.*

17. PINJAMAN YANG DITERIMA / 17. BORROWINGS

Tidak terdapat pinjaman yang diterima dari pihak berelasi.

There were no borrowings from related parties.

Seluruh pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah.

All borrowings are stated in Rupiah.

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	20.000.000.000	20.000.000.000	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
KPR Sejahtera tapak	3.217.591.798	3.583.537.129	*KPR Sejahtera tapak*
KLBI KUT MT Tahun 1998/1999	408.088.291	466.213.822	*KLBI KUT MT Tahun 1998/1999*
KPR Sejahtera tapak Porsi 75	205.527.844	223.427.566	*KPR Sejahtera tapak Porsi 75*
KLBI KUT MT Tahun 1999	160.469.329	160.469.329	*KLBI KUT MT Tahun 1999*
Jumlah	**23.991.677.262**	**24.433.647.846**	***Total***

Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Bank memperoleh fasilitas pinjaman lagi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas Pinjaman Kredit Homestay (ASN, Pegawai BUMN, BUMD, PPPK) yang telah disalurkan sebesar Rp10.000.000.000 jangka waktu 1 tahun dengan tingkat bunga 6,50% sesuai dengan PKS No. 071/PP/SMF-BPD.BALI/V/2023 tanggal 8 Mei 2023. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 8 Mei 2024.

The Bank obtained another loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for Homestay Loan (ASN, BUMN Employees, BUMD, PPPK) which had been disbursed in the amount of Rp10,000,000,000 for a period of 1 years with an interest rate of 6.50% according to MCC No. 071/PP/SMF-BPD.BALI/V/2023 dated May 8, 2023. This loan has been paid on May 8, 2024.

Bank memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas KPR yang telah disalurkan sebesar Rp32.000.000.000 jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 5,80% sesuai dengan PKS No. 247/PP/SMF-BPD.BALI/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 20 Desember 2024.

The Bank obtained loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for the KPR that had been disbursed in the amount of Rp32,000,000,000 for a period of 3 years with an interest rate of 5.80% in accordance with PKS No. 247/PP/SMF-BPD.BALI/XII/2021 dated December 17, 2021. This loan has been paid on December 20, 2024.

Bank memperoleh fasilitas pinjaman lagi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas Pinjaman Kredit Multiguna Perumahan (ASN, Pegawai BUMN, BUMD, PPPK) yang telah disalurkan sebesar Rp20.000.000.000 jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 6,75% sesuai dengan PKS No. 189/PP/SMF-BPD.BALI/VII/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

The Bank obtained another loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for Multipurpose Housing Loans (ASN, BUMN Employees, BUMD, PPPK) which had been disbursed in the amount of Rp20,000,000,000 for a period of 5 years with an interest rate of 6.75% according to MCC No. 189/PP/SMF-BPD.BALI/VII/2022 dated August 3, 2022.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain:

During the loan period, the Bank has an obligation to fulfill the following requirements:

a. Memberikan data laporan keuangan audited yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik paling lambat 120 hari sejak ditutupnya tahun buku;

a. Provide audited financial report data that has been checked by a Public Accountant no later than 120 days since the closing of the financial year;

b. Memberikan data laporan keuangan interim yang ditandatangani pejabat berwenang paling lambat 15 hari sesudah berakhirnya setiap triwulan;

b. Provide interim financial report data signed by the authorized official no later than 15 days after the end of each quarter;

c. Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha dan tidak terbatas pada isi laporan keuangan;

c. Provide information regarding financial condition and business activities and is not limited to the contents of financial statements;

d. Memberikan dokumen dokumen lainnya;

d. Provide other documents;

e. Memberikan laporan secara periodik;

e. Provide periodic reports;

f. Mematuhi semua tuntutan hukum;

Comply with all legal demands

g. Menyediakan akses data/informasi atas Jaminan;

Provide access to data/information on the Guarantee;

h. Memperkenankan SMF untuk melakukan verifikasi atas agunan, dan dokumen jaminan;

f. Allowing SMF to verify the collateral and guarantee documents;

i. Memberitahukan secara tertulis setiap perkara/tuntutan/gugatan material yang dihadapi Bank;

g. Notify of any material case/claim/lawsuit faced by the Bank;

j. Memberitahukan apabila terjadi Tindakan:
   1) Adanya suatu pemberitahuan perkara
   2) Perkara/tuntutan/gugatan dengan nilai 30% atau kolektif 50% dari ekuitas
   3) Jika kalah perkara dan mempengaruhi kelangsungan usaha

h. Notify if there is an Action:
   1) There is a notification of the case
   2) Cases or demands or lawsuits with a value of 30% or collectively 50% of the equity
   3) If lose the case and it affects business continuity

k. bertanggung jawab dalam menyimpan dokumen jaminan;

k. Responsible for storing guarantee documents;

l. mengasuransikan aset asetnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan;

l. Insure assets related to business activities and assets;

m. Memperoleh persetujuan SMF dalam tindakan:
   1) Menjual atau melepaskan harta kekayaan diluar kegiatan usaha sehari-hari
   2) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi
   3) Menjaminkan tagihan kredit KMG kepada pihak lain
   4) Mengubah anggaran dasar yang terkait dengan penurunan modal disetor, maksud dan tujuan Bank serta kegiatan usaha.

m. Notify if there is an Action:
   1) Selling or disposing of assets outside of daily business activities
   2) Carrying out consolidation, merger, takeover, liquidation
   3) *Guarantee KMG credit bills to other parties*
   4) *Changing the articles of association related to the decrease in paid-up capital, the Bank's intent and purpose and business activities.*

17. PINJAMAN YANG DITERIMA (LANJUTAN)

Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain: (lanjutan)

n Melakukan segala upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha;
o Melaporkan perubahan dokumen berikut ini:
1) Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Susunan Pengurus
2) Hasil Pemeringkatan Perusahaan
3) NPWP terbaru
4) Dokumen pembaharuan seluruh izin usaha
p Melaporkan realisasi setiap 1 tahun sekali untuk posisi berakhir 31 Desember.

Tidak terdapat ketentuan rasio keuangan yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman.

Terdapat aset Bank yang dijadikan agunan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berupa Fidusia atas Aset Keuangan KPR yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR termasuk hak agunan yang melekat padanya sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.

Pinjaman KPR Sejahtera Tapak

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bank BPD Bali yang selanjutnya disebut dengan KPR Sejahtera Bank BPD Bali adalah kredit pemilikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terdiri dari:

a. KPR Sejahtera Tapak adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.
b. KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan.

Sasarannya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap.

Dana KPR Sejahtera Bank BPD Bali merupakan gabungan antara dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan dana Bank dengan proporsi yaitu:

1) Dana FLPP sebesar 90% dari plafond kredit.
2) Dana Bank sebesar 10% dari plafond kredit.

Suku Bunga KPR Sejahtera Tapak BPD Bali 5% (lima persen) per tahun dengan metode perhitungan bunga annuitas bulanan.

Pinjaman KPR Sejahtera Tapak Porsi 75

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bank BPD Bali yang selanjutnya disebut dengan KPR Sejahtera Bank BPD Bali adalah kredit pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terdiri dari :

a. KPR Sejahtera Tapak Porsi 75 adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.
b. KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan.

Sasarannya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap.

Dana KPR Sejahtera Bank BPD Bali merupakan gabungan antara dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan dana Bank dengan proporsi yaitu :

1) Dana FLPP sebesar 75% dari plafond kredit.
2) Dana Bank sebesar 25% dari plafond kredit.

Suku Bunga KPR Sejahtera Bank BPD Bali 5% (lima persen) per tahun dengan metode perhitungan bunga *annuitas* bulanan.

17. BORROWINGS (CONTINUED)

Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

During the loan period, the Bank has an obligation to fulfill the following requirements: (continued)

n Make every effort to maintain business continuity;
o Report document changes no later than 7 days after the reporting period
1) Deed of Establishment, Deed of Amendment to the Articles of Association, Deed of management composition
2) Company Ranking Results
3) New NPWP
4) Renewal documents for all business permits
p Reporting realization once a year for positions ending December 31.

There are no financial ratio requirements required by lenders.

There are Bank assets which are used as collateral for PT Sarana Multigriya Financial (Persero) in the form of Fiduciary on KPR Financial Assets, i.e. bills / receivables which currently exists and/or will be obtained later from the issuance of KPR including collateral rights attached to it in accordance with agreed criteria.

KPR Sejahtera Tapak Loan

Bank BPD Bali's Prosperous Housing Loan, hereinafter referred to as KPR Sejahtera Bank BPD Bali, is a housing loan for Low-Income Communities (MBR) with the support of a housing finance liquidity facility consisting of:

a. KPR Sejahtera Tapak is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income people in the framework of ownership of the Prosperous House which is purchased from development actors.
b. KPR Sejahtera Susun is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income communities in the context of the ownership of the Flat Prosperous Housing Unit purchased from the developer.

The target is Low-Income Communities ("MBR") who earn permanent income or non-permanent income.

KPR Sejahtera Bank BPD Bali funds are a combination of FLPP funds (Housing Finance Liquidity Facility) and Bank funds in proportion, namely:

1) FLPP funds amounting to 90% of the credit ceiling.
2) Bank funds amounting to 10% of the credit ceiling.

Bank BPD Bali KPR Sejahtera Tapak Interest Rate 5% (five percent) per year with the monthly annuity interest calculation method.

KPR Sejahtera Tapak Loan Portions 75

Bank BPD Bali's Prosperous Housing Loan, hereinafter referred to as KPR Sejahtera Bank BPD Bali, is a housing loan with the support of housing finance liquidity facilities which consists of :

a. KPR Sejahtera Tapak Portion 75 is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income people in the framework of ownership of the Prosperous House which is purchased from developer.
b. KPR Sejahtera Susun is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income communities in the context of the ownership of the Flat Prosperous Housing Unit purchased from the developer.

The target is Low-Income Communities (MBR) who are permanent incomes or non-permanent income.

KPR Sejahtera Bank BPD Bali funds are a combination of FLPP funds (Housing Finance Liquidity Facility) and Bank funds in proportion, namely:

1) FLPP funds amounting to 75% of the credit ceiling.
2) Bank funds amounting to 25% of the credit ceiling.

Bank BPD Bali KPR Sejahtera Interest Rate 5% (five percent) per year with the monthly annuity interest calculation method.

17. PINJAMAN YANG DITERIMA (LANJUTAN)

KLBI KUT MT Tahun 1998/1999

Kredit modal kerja yang diberikan melalui Bank pemberi kredit kepada Koperasi Primer atau LSM sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan holtikultura.

Jangka waktu KUT ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun atau menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan komoditas sejak ditandatanganinya perjanjian penerusan KUT. Jangka waktu KLBI KUT ditetapkan maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan KLBI (SPK KLBI) kepada Bank.

Debitur merupakan Koperasi atau LSM, dengan Bunga Kredit Likuiditas 10,5%. Apabila Bank terlambat menyampaikan laporan pelunasan lebih cepat kepada BI maka kepada Bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar (mengacu pada SE Pengalihan Pengelolaan KLBI No. 5/56/INTERN tanggal 18 Nopember 2003 dan SE 6/37/INTERN Tanggal 9 Juli 2004. *Risk Sharing* :

- Pemerintah : 52,25%
- Bank Indonesia : 42,75%
- Jamkrindo : 5%

17. BORROWINGS (CONTINUED)

KLBI KUT MT Year 1998/1999

Working capital loans provided through lending banks to Primary Cooperatives or Non-governmental organizationas (NGO) executor of granting credit for the needs of farmers who are members of farmer groups to finance their farming business in the context of intensification of rice, secondary crops and horticulture.

The KUT period is set at a maximum of 1 (one) year or adjusted to the commodity financing term from the signing of the KUT forwarding agreement. The KL KUT period is set at a maximum of 2 (two) years from the date of the KLBI Approval Letter (SPK KLBI) to the Bank.

The debtor is a Cooperative or an NGO, with a Liquidity Loan Interest of 10.5%. If a bank is late in submitting a report on early repayment to BI, the Bank will be subject to a financial penalty (referring to SE Transfer of Management of KLBI No. 5/56/INTERN dated November 18, 2003 and SE 6/37/INTERN dated July 9, 2004. Risk Sharing:

- *Government : 52.25%*
- *Bank of Indonesia : 42.75%*
- *Jamkrindo : 5%*

18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Taxes Payable

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Pasal 25	13.453.620.528	9.350.028.412	*Article 25*
Pasal 29	34.935.029.610	29.731.033.407	*Article 29*
Pasal 21	7.118.267.173	17.014.599.990	*Article 21*
Pasal 4 (2)	12.944.741.015	12.483.340.165	*Article 4 (2)*
Pasal 23	807.658.583	480.741.069	*Article 23*
PPN	135.338.653	46.455.986	*VAT*
Jumlah	**69.394.655.562**	**69.106.199.029**	***Total***

b. Manfaat (Beban) Pajak

b. Tax Benefit (Expense)

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Pajak Kini			*Current Tax*
Tahun berjalan	(374.511.456.220)	(312.248.233.220)	*Current year*
Penyesuaian tahun sebelumnya	(13.458.479.760)	(31.551.354.943)	*Prior year adjustment*
Sub Jumlah	(387.969.935.980)	(343.799.588.163)	*Sub Total*
Pajak Tangguhan	29.644.349.392	24.266.081.590	*Deferred Tax*
Jumlah	**(358.325.586.588)**	**(319.533.506.573)**	***Total***

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

18. TAXATION (CONTINUED)

c. Rekonsiliasi Pajak

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

c. Tax Reconciliation

The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in statement of profit or loss the are as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Laba Sebelum Beban Pajak	1.459.796.681.165	1.197.999.247.799	*Income Before Tax Expense*
Beda Waktu:			***Temporary Difference:***
Koreksi Positif :			*Positive Correction:*
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan	143.590.604.342	--	*Allowance for Impairment Loss for loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya	2.523.574.279	10.094.297.118	*Allowance for Impairment Loss for other bills*
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem	235.164.078.692	187.552.435.752	*Provision for Bonus and Tantiem*
Penyisihan Cadangan Asuransi	18.782.398.282	-	*Provision for Insurance*
Penyisihan Cadangan dana pensiun	-	47.789.063.478	*Provision for Pension Fund*
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja	78.092.444.731	43.148.062.936	*Post-Employment Benefits Expense*
Pembentukan Penghargaan Direksi	12.440.898.330	5.584.393.867	*Director Service gratuity Expense*
Pembentukan Penghargaan Dewan Komisaris	710.997.471	1.076.884.148	*Board of Commissioners Services Gratuity Expense*
Sub - Jumlah	**491.304.996.127**	**295.245.137.299**	***Sub - Total***
Koreksi Negatif :			*Negative Correction:*
Pembayaran Bonus dan Tantiem	187.552.435.752	157.611.744.040	*Payment of Bonus and Tantiem*
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan	--	2.718.723.769	*Allowance for Impairment Loss for loans*
Pembayaran Cadangan dana pensiun	47.789.063.478	--	*Payment of Pension Fund*
Pembayaran Penghargaan Dewan Komisaris	2.559.141.517	--	*Payment of Board of Commissioners Services Gratuity*
Pembayaran Manfaat Imbalan Kerja	118.657.312.690	24.614.298.628	*Post-Employment Benefits Paid*
Sub - Jumlah	**356.557.953.436**	**184.944.766.437**	***Sub - Total***
Jumlah Beda Waktu	**134.747.042.691**	**110.300.370.862**	***Total Temporary difference:***
Beda Tetap :			***Permanent Difference:***
Koreksi Positif :			*Positive Correction:*
Biaya Promosi dan Pengembangan Bisnis	30.529.215.884	40.469.277.746	*Bussiness Development Expense*
Biaya Humas dan CSR	21.821.938.593	16.658.948.088	*Cost of Public Relation and CSR*
Pemantapan Pelaksanaan Ibadah	4.800.176.532	3.813.609.889	*Strengthening Implementation of Worship*
Biaya Pajak	38.049.355.006	31.975.660.033	*Tax Expense*
Tamu dan Souvenir	1.508.531.944	1.790.633.530	*Entertaiment and Souvenirs*
Biaya Sumbangan	1.447.473.600	1.422.996.520	*Donation*
Biaya HUT Bank	546.819.783	2.252.138.142	*Bank Anniversary Cost*
Biaya Telepon,Telegram	--	480.381.709	*Cost of Telephone, Telegram*
Biaya Lain-lain	9.262.411.593	12.329.025.394	*Other Expense*
Sub - Jumlah	**107.965.922.935**	**111.192.671.051**	***Sub - Total***
Koreksi Negatif :			*Negative Correction:*
Pendapatan Sewa Gedung	184.845.000	182.138.134	*Rental Income Buliding*
Sub - Jumlah	**184.845.000**	**182.138.134**	***Sub - Total***
Jumlah Beda Tetap	**107.781.077.935**	**111.010.532.917**	***Total Permanent Difference:***
Jumlah Koreksi Fiskal	**242.528.120.626**	**221.310.903.779**	***Total Fiscal Correction***
Laba Kena Pajak	**1.702.324.801.791**	**1.419.310.151.578**	***Estimated of Income Tax***
Pembulatan	1.702.324.801.000	1.419.310.151.000	*Rounded*
Beban Pajak Penghasilan:			*Income Tax Expense*
22% x 1.702.324.801.000	374.511.456.220	--	22% x 1.702.324.801.000
22% x 1.419.310.151.000	--	312.248.233.220	22% x 1.419.310.151.000
Jumlah Pajak Kini	**374.511.456.220**	**312.248.233.220**	***Total current taxes***
Dikurangi:			*Less:*
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Pasal 25	339.576.426.610	282.517.199.813	*Prepaid Taxes Article 25*
Kurang Pajak Penghasilan Badan	**34.935.029.610**	**29.731.033.407**	***Income Tax Payable***

Total laba kena pajak Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan 2025 dan 2024.

The Bank's taxable income for the year ended December 31, 2025 and 2024 is the basis for preparing annual tax return for 2025 and 2024.

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN) ***18. TAXATION (CONTINUED)***

d. Aset Pajak Tangguhan ***d. Deferred Tax Assets***

	31 Desember 2025 / December 31, 2025				
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Charged to Profit or Loss***	**Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain/ *Charged to Other Comprehensive Income***	**Penyesuaian / *Adjustment***	**Saldo Akhir / *Ending Balance***
Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan/ *Provision for Impairment Losses on Loans*	30.668.903.527	31.589.932.955	-	-	62.258.836.482
Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Lainnya/ *Provision for Impairment Losses on Other Bill*	2.220.745.366	555.186.341	-	-	2.775.931.707
Penyisihan Cadangan Asuransi/ *Provision for Insurance*	-	4.132.127.622	-	-	4.132.127.622
Penyisihan Cadangan Dana Pensiun/ *Provision for Pension Fund*	10.513.593.965	(10.513.593.965)	-	-	-
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem/ *Provision for Bonus and Tantiem*	41.104.493.246	10.474.561.447	-	-	51.579.054.693
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja/ *Post-Employee Benefit Expense*	35.069.140.807	(11.484.811.220)	15.788.227.308	-	39.372.556.895
Pembentukan Imbalan Jangka Panjang/ *Long Term Post Employee Benefit Expense*	23.401.721.422	2.560.540.269	-	-	25.962.261.691
Pembentukan Pengabdian Direksi/ *Director Service Gratuity Expense*	6.764.186.208	2.736.997.633	-	-	9.501.183.841
Pembentukan Pengabdian Dewan Komisaris/ *Commissioner Service Gratuity Expense*	2.415.780.789	(406.591.690)	-	-	2.009.189.099
Aset Pajak Tangguhan/ *Deffered Tax Asset*	**152.158.565.329**	**29.644.349.392**	**15.788.227.308**	-	**197.591.142.029**

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN) / ***18. TAXATION (CONTINUED)***

d. Aset Pajak Tangguhan / ***d. Deferred Tax Assets***

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Charged to Profit or Loss*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain/ *Charged to Other Comprehensive Income*	Penyesuaian / *Adjustment*	Saldo Akhir / *Ending Balance*
Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan/ *Provision for Impairment Losses on Loans*	31.267.022.756	(598.119.229)	-	-	30.668.903.527
Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Lainnya/ *Provision for Impairment Losses on Other Bill*	-	2.220.745.366	-	-	2.220.745.366
Penyisihan Cadangan Dana Pensiun/ *Provision for Pension Fund*	-	10.513.593.965	-	-	10.513.593.965
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem/ *Provision for Bonus and Tantiem*	34.517.541.069	6.586.952.177	-	-	41.104.493.246
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja/ *Post-Employee Benefit Expense*	31.175.697.437	597.477.348	3.295.966.022	-	35.069.140.807
Pembentukan Imbalan Jangka Panjang/ *Long term post Employee Benefit Expense*	19.921.770.622	3.479.950.800	-	-	23.401.721.422
Pembentukan Pengabdian Direksi/ *Director Service Gratuity Expense*	5.719.072.634	1.228.566.651	-	(183.453.077)	6.764.186.208
Pembentukan Pengabdian Dewan Komisaris/ *Commissioner Service Gratuity Expense*	1.995.413.199	236.914.513	-	183.453.077	2.415.780.789
Aset Pajak Tangguhan/ *Deffered Tax Asset*	**124.596.517.717**	**24.266.081.590**	**3.295.966.022**	--	**152.158.565.329**

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan dan dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa mendatang.

Management believes that deferred tax assets can be utilized and can be compensated againts future taxable income.

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 7 Maret 2025, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2022 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-163/P2DK/KPP.170409/2024 sebesar Rp11.665.978.749.

Bank menerima Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun pajak 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. STP Pajak Penghasilan Tahun 2022 Nomor : 00016/106/22/904/25 tanggal 16 Mei 2025 berupa sanksi administratif bunga pasal 8(2) KUP sebesar Rp2.492.241.468. Bank telah melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 17 Juni 2025.
b. STP Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember 2022 Nomor : 00019/101/22/904/25 tanggal 17 Juni 2025 berupa sanksi administratif denda Pasal 7 KUP sebesar Rp98.226. Bank telah melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 23 Juni 2025.
c. STP Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2022 Nomor : 00019/140/22/904/25 tanggal 6 Agustus 2025 berupa sanksi administratif bunga Pasal 9 (2a) KUP sebesar Rp117.517.916. Bank telah melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 12 Agustus 2025.

Pada tanggal 19 Desember 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2023 sebagaimana berikut :

a. SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Juli 2023 Nomor : 00054/240/23/904/25 sebesar Rp168.887.510.
b. SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2023 Nomor : 00055/240/23/904/25 sebesar Rp236.195.435.
c. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 Nomor : 00052/201/23/904/25 sebesar Rp1.252.690.859.
d. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2023 Nomor : 00129/203/23/904/25 sebesar Rp9.019.889.
e. SKPKB Pajak Penghasilan Nomor : 00030/206/23/904/25 sebesar Rp15.126.850.376 dibebankan pada beban pajak kini.
f. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2023 Nomor : 00115/207/23/904/25 sebesar Rp140.323.205.
g. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Februari 2023 Nomor : 00116/207/23/904/25 sebesar Rp160.587.520.
h. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Maret 2023 Nomor : 00117/207/23/904/25 sebesar Rp181.138.779.
i. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa April 2023 Nomor : 00118/207/23/904/25 sebesar Rp242.183.891.
j. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Mei 2023 Nomor : 00119/207/23/904/25 sebesar Rp174.447.968.
k. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juni 2023 Nomor : 00120/207/23/904/25 sebesar Rp158.135.295.
l. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli 2023 Nomor : 00121/207/23/904/25 sebesar Rp373.614.364.
m. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Agustus 2023 Nomor : 00122/207/23/904/25 sebesar Rp193.032.805.
n. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa September 2023 Nomor : 00123/207/23/904/25 sebesar Rp247.992.665.
o. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Oktober 2023 Nomor : 00124/207/23/904/25 sebesar Rp196.216.465.
p. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa November 2023 Nomor : 00125/207/23/904/25 sebesar Rp240.120.143.
q. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2023 Nomor : 00126/207/23/904/25 sebesar Rp205.560.315.
r. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 Nomor : 00166/107/23/904/25 sebesar Rp163.076.641.

Pada tanggal 30 Desember 2025, Bank melakukan pembayaran terhadap pokok SKPKB dan STP sebagaimana dimaksud diatas sebesar Rp13.684.920.735. Dibebankan pada beban pajak kini sebesar Rp10.563.443.000, sisanya dibebankan di beban pajak.

Pada tanggal 19 Desember 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2024 sebagaimana berikut :

a. SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa September 2024 Nomor: 00002/240/24/904/25 sebesar Rp145.360.526.
b. SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2024 Nomor: 00003/240/24/904/25 sebesar Rp116.057.622.
c. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 Nomor: 00002/201/24/904/25 sebesar Rp2.248.450.686.
d. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2024 Nomor: 00001/203/24/904/25 sebesar Rp873.751.118.

18. TAXATION (CONTINUED)

e. Tax Assesment

On March 7, 2025, the Bank made a payment for the 2022 tax underpayment based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-163/P2DK/KPP.170409/2024 amounting to Rp11,665,978,749.

The Bank received the Tax Bill Letter (SKPKB) for the 2022 tax year as follows:

a. 2022 Income Tax STP Number: 00016/106/22/904/25 dated May 16, 2025 in the form of administrative sanctions for interest under Article 8(2) of the KUP amounting to Rp2,492,241,468. The Bank has made payment for the bill on June 17, 2025.
b. Article 21 Income Tax STP for December 2022 Period Number: 00019/101/22/904/25 dated June 17, 2025 in the form of an administrative fine sanction under Article 7 KUP amounting to Rp98,226. The Bank has made payment for the bill on June 23, 2025.
c. Final Income Tax STP Article 4 (2) for the December 2022 Period Number: 00019/140/22/904/25 dated August 6, 2025 in the form of administrative sanctions in the form of interest under Article 9 (2a) KUP amounting to IDR 117,517,916. The Bank has made payment for the bill on August 12, 2025.

On December 19, 2025, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2023 tax year as follows:

a. Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) July 2023 Period Number: 00054/240/23/904/25 amounting to Rp168,887,510.
b. Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) December 2023 Period Number: 00055/240/23/904/25 amounting to Rp236,195,435.
c. Income Tax SKPKB Article 21 January 2023 to December 2023 Period Number: 00052/201/23/904/25 amounting to Rp1,252,690,859.
d. Income Tax SKPKB Article 23 December 2023 Period Number: 00129/203/23/904/25 amounting to Rp9,019,889.
e. Income Tax SKPKB Number: 00030/206/23/904/25 amounting to Rp15,126,850,376 charged to current tax expense.
f. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for January 2023 Number: 00115/207/23/904/25 amounting to Rp140,323,205.
g. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for February 2023 Number: 00116/207/23/904/25 amounting to Rp160,587,520.
h. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for March 2023 Number: 00117/207/23/904/25 amounting to Rp181,138,779.
i. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for April 2023 Number: 00118/207/23/904/25 amounting to Rp242,183,891.
j. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for May 2023 Number: 00119/207/23/904/25 amounting to Rp174,447,968.
k. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for June 2023 Number: 00120/207/23/904/25 amounting to Rp158,135,295.
l. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for July 2023 Number: 00121/207/23/904/25 amounting to Rp373,614,364.
m. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for August 2023 Number: 00122/207/23/904/25 amounting to Rp193,032,805.
n. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for September 2023 Number: 00123/207/23/904/25 amounting to Rp247,992,665.
o. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for October 2023 Number: 00124/207/23/904/25 amounting to Rp196,216,465.
p. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for November 2023 Number: 00125/207/23/904/25 amounting to Rp240,120,143.
q. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for December 2023 Number: 00126/207/23/904/25 amounting to Rp205,560,315.
r. STP Value Added Tax for Goods and Services for the Period January 2023 to December 2023 Number: 00166/107/23/904/25 amounting to Rp163,076,641.

On December 30, 2025, the Bank made a payment of the principal of the SKPKB and STP as referred to above amounting to Rp13,684,920,735. Charged to current tax expense of Rp10,563,443,000, the remainder is charged to tax expense.

On December 19, 2025, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2024 tax year as follows:

a. Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) September 2024 Period Number: 00002/240/24/904/25 amounting to Rp145,360,526.
b. Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) December 2024 Period Number: 00003/240/24/904/25 amounting to Rp116,057,622.
c. Income Tax SKPKB Article 21 January 2024 to December 2024 Period Number: 00002/201/24/904/25 amounting to Rp2,248,450,686.
d. Income Tax SKPKB Article 23 December 2024 Period Number: 00001/203/24/904/25 amounting to Rp873,751,118.

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 19 Desember 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2024 sebagaimana berikut (lanjutan) :

e. SKPKB Pajak Penghasilan Nomor: 00001/206/24/904/25 sebesar Rp3.530.786.832 dibebankan pada beban pajak kini.
f. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2024 Nomor : 00033/207/24/904/25 sebesar Rp2.186.690.537.
g. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2024 Nomor: 00222/107/24/904/25 sebesar Rp162.996.104.

Pada tanggal 30 Desember 2025, Bank melakukan pembayaran terhadap pokok SKPKB dan STP sebagaimana dimaksud diatas sebesar Rp7.620.628.673. Dibebankan pada beban pajak kini sebesar Rp2.895.036.760, sisanya dibebankan di beban pajak.

Pada tanggal 30 Juli 2024, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2019 sebagaimana berikut :

a. SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2019 Nomor : 00047/240/19/904/24 sebesar Rp3.244.667.670.
b. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember 2019 Nomor : 00067/201/19/904/24 sebesar Rp275.332.173.
c. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2019 Nomor : 00129/203/19/904/24 sebesar Rp10.232.394.
d. SKPKB Pajak Penghasilan Nomor : 00052/206/19/904/24 sebesar Rp21.115.701.671 dibebankan pada beban pajak kini.
e. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2019 Nomor : 00116/207/19/904/24 sebesar Rp809.341.896.
f. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Juli 2019 Nomor : 00046/277/19/904/24 sebesar Rp425.113.
g. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00047/277/19/904/24 sebesar Rp417.575.
h. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa September 2019 Nomor : 00048/277/19/904/24 sebesar Rp416.222.
i. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Oktober 2019 Nomor : 00049/277/19/904/24 sebesar Rp408.412.
j. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Nopember 2019 Nomor : 00050/277/19/904/24 sebesar Rp411.982.
k. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Desember 2019 Nomor : 00051/277/19/904/24 sebesar Rp410.111.
l. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Juli 2019 Nomor : 00009/177/19/904/24 sebesar Rp29.687.
m. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00010/177/19/904/24 sebesar Rp29.160.
n. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00010/177/19/904/24 sebesar Rp29.160.
o. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean MasaSeptember 2019 Nomor : 00011/177/19/904/24 sebesar Rp29.066.
p. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Oktober 2019 Nomor : 00012/177/19/904/24 sebesar Rp28.520.
q. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa November 2019 Nomor : 00013/177/19/904/24 sebesar Rp28.770.
r. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Desember 2019 Nomor : 00014/177/19/904/24 sebesar Rp28.639.
s. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2019 Nomor : 00082/107/19/904/24 sebesar Rp56.329.475.

Pada tanggal 7 Agustus 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap pokok SKPKB dan STP sebagaimana dimaksud diatas sebesar Rp17.774.886.922 dan tanggal 9 Agustus 2024 diajukan permohonan keringanan sanksi sebesar 100% yang masih menunggu keputusan dari Kantor Pajak.

18. TAXATION (CONTINUED)

e. Tax Assesment

On December 19, 2025, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2024 tax year as follows (continued):

e. Income Tax SKPKB Number: 00001/206/24/904/25 amounting to Rp3,530,786,832 charged to current tax expense.
f. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for December 2024 Number: 00033/207/24/904/25 amounting to Rp2,186,690,537.
g. STP Value Added Tax for Goods and Services for the Period December 2024 Number: 00222/107/24/904/25 amounting to Rp162,996,104.

On December 30, 2025, the Bank made a payment of the principal of the SKPKB and STP as referred to above amounting to Rp7,620,628,673. Charged to current tax expense of Rp2,895,036,760, the remainder is charged to tax expense.

On July 30, 2024, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2019 tax year as follows:

a. Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) December 2019 Period Number: 00047/240/19/904/24 amounting to Rp3,244,667,670.
b. Income Tax SKPKB Article 21 December 2019 Period Number: 00067/201/19/904/24 amounting to Rp275,332,173.
c. Income Tax SKPKB Article 23 December 2019 Period Number: 00129/203/19/904/24 amounting to Rp10,232,394.
d. Income Tax SKPKB Number: 00052/206/19/904/24 amounting to Rp21,115,701,671 charged to current tax expense.
e. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for December 2019 Number: 00116/207/19/904/24 amounting to Rp809,341,896.
f. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of July 2019 Number: 00046/277/19/904/24 amounting to Rp425,113.
g. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00047/277/19/904/24 amounting to Rp417,575.
h. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of September 2019 Number: 00048/277/19/904/24 amounting to Rp416,222.
i. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of October 2019 Number: 00049/277/19/904/24 amounting to Rp408,412.
j. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for November 2019 Number: 00050/277/19/904/24 amounting to Rp411,982.
k. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of December 2019 Number: 00051/277/19/904/24 amounting to Rp410,111.
l. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the July 2019 Period Number: 00009/177/19/904/24 amounting to Rp29,687.
m. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00010/177/19/904/24 amounting to Rp29,160.
n. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00010/177/19/904/24 amounting to Rp29,160.
o. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area Period of September 2019 Number: 00011/177/19/904/24 amounting to Rp29,066.
p. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of October 2019 Number: 00012/177/19/904/24 amounting to Rp28,520.
q. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for November 2019 Number: 00013/177/19/904/24 amounting to Rp28,770.
r. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of December 2019 Number: 00014/177/19/904/24 amounting to Rp28,639.
s. STP Value Added Tax for Goods and Services for the Period of December 2019 Number: 00082/107/19/904/24 amounting to Rp56,329,475.

On August 7, 2024, the Bank made payment of the SKPKB and STP principal as referred to above amounting to Rp17,774,886,922 and on August 9, 2024 a request for 100% sanction relief was submitted which is still awaiting a decision from the Tax Office.

18. PERPAJAKAN (LANJUTAN) / *18. TAXATION (CONTINUED)*

e. Surat Ketetapan Pajak (Lanjutan) / ***e. Tax Assesment (Continued)***

Pada tanggal 4 Desember 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2021 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-136/P2DK/KPP.170409/2024 sebesar Rp10.647.597.708. Dibebankan pada beban pajak kini sebesar Rp10.293.153.642, sisanya dibebankan di beban pajak.

On December 4, 2024, the Bank made a payment for the 2021 tax underpayment based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-136/P2DK/KPP.170409/2024 amounting to Rp10,647,597,708. Charged to current tax expense of Rp10,293,153,642, the remainder is charged to tax expenses.

Pada tanggal 6 Desember 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2020 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-185/WPJ.17/KP.0409/2024 sebesar Rp219.281.153. Dibebankan ke pajak kini sebesar Rp142.499.630, sisanya dibebankan di beban pajak.

On December 6, 2024, the Bank made a payment for the 2020 tax underpayment based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-185/WPJ.17/KP.0409/2024 amounting to Rp219,281,153. Charged to current tax expense of Rp142,499,630, the remainder is charged to tax expenses.

19. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *19. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Rupiah			*Rupiah*
Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar	18.864.038.801	17.081.274.947	*Accrued Deposit Interest*
Biaya bunga tabungan yang masih harus dibayar	5.433.383.797	5.513.924.628	*Accrued Saving Interest*
Biaya bunga lainnya yang masih harus dibayar	154.583.333	-	*Accrued Other Interest*
Sub - Jumlah	**24.452.005.931**	**22.595.199.575**	***Sub Total***
Mata uang asing			*Foreign Currency*
Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar	2.191.095	231.124	*Accrued Deposit Interest*
Biaya bunga tabungan yang masih harus dibayar	18.176	39.433	*Accrued Saving Interest*
Sub - Jumlah	**2.209.271**	**270.557**	***Sub- Total***
Jumlah	**24.454.215.202**	**22.595.470.132**	***Total***

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION*

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bakti dan penghargaan masa bakti proporsional, imbalan masa bebas tugas yang dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020.

The Bank provides long-term employee benefits and post-employee benefit to the eligible employees of the pension plan, long service leave, service reward benefit and service reward benefit proportional, severance compensation are calculated based on the Company Regulation, which comply with Omnibus Law No.11/2020.

Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja pada 31 Desember 2025 dihitung oleh aktuaria independen Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dari laporan aktuaria no 003/KKAGD/LAP/I/26 tanggal 5 Januari 2026.

Actuarial assessment of long-term employee benefits and post- employee benefit as of December 31, 2025 is calculated by an independent actuary Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan, using the projected unit credit method from the actuarial reports No. 003/KKAGD/LAP/I/26 dated January 5, 2026.

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

The Bank's pension plan managed by Bali Regional Development Bank Pension Fund. Employee contribution is 5% (five percent) of basic salary of those employees and the Bank bear the difference.

Program penghargaan masa bakti dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti berupa pembayaran yang jumlahnya sebesar masing-masing 3 (tiga) kali, 5 (lima) kali, 6 (enam) kali dan 7 (tujuh) kali dari penghasilan bulan terakhir kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun dengan syarat-syarat tertentu.

Service reward benefit managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No.0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service reward benefit amount for 3 (three) times, 5 (five) times, 6 (six) and 7 (seven) times that of last month's employee's salary with tenure of 15 years, 25 years, 30 years and 35 years and certain conditions.

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

Imbalan masa bebas tugas dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Severance compensation managed by the Bank and is an employee benefits program for employees who will retire.

Program cuti berimbalan jangka panjang dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan untuk penggantian hak cuti besar.

Long service leave benefit managed by the Bank and is an employee benefits program for employees for reimbursement of leave entitlements.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: / ***The liability for employee benefits consists of:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Program Imbalan Kerja	161.839.729.422	147.916.251.836	*Employee Benefits Program*
Program Dana Pensiun	17.126.438.282	11.488.933.649	*Pension Fund Program*
Imbalan Jangka Panjang Lainnya	118.010.280.408	106.371.461.005	*Other Long term benefit*
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	**296.976.448.112**	**265.776.646.490**	***Ending Balance of Defined benefit***

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan klasifikasi akun adalah sebagai berikut:

Expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income based on account classification are as follows :

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Biaya Karyawan (Catatan 30)	78.092.444.731	43.148.062.936	*Employee Costs (Note 30)*
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Kerugian Aktuaria	71.764.669.581	14.981.663.737	*Remeasurement of Liability for Employee Benefit - Actuarial Loss*
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	**149.857.114.312**	**58.129.726.673**	***Expense Recognized in the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***

Dana Pensiun

Pension Funds

Program Pensiun Manfaat Pasti

Defined Benefit Pension Programme

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Tingkat Diskonto	6,75%	7,00%	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	2,50%	2,50%	*Salary Increase Rate Basic Pension Per Year*
Tingkat Mortalita	1=TMI'2019	1=TMI'2019	*Mortality Rate*
Tingkat Pengunduran Diri per Tahun			*Resignation Rate*
< 30 tahun	6,00%	6,00%	*Age <30*
54 - 56 tahun	0,00%	0,00%	*Age 54 - 56*
Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian / *10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian / *10% from mortality rate*	*Disability Rate*
Rata-rata Masa Kerja	12,51	10,33	*Average Years of Service*

a. Aset program neto

a. Program Net Asset

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024.. compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Nilai Wajar Aset Program	561.774.462.438	472.419.692.559	*Fair Value of Asset Program*
Nilai Kini Kewajiban	(578.900.900.720)	(483.908.626.208)	*Present Value of Benefit Obligation*
Status Pendanaan	**(17.126.438.282)**	**(11.488.933.649)**	***Funded Status***

Rekonsiliasi yang menunjukkan pergerakan selama periode dalam kewajiban bersih (atau aset) yang diakui dalam laporan posisi keuangan:

Reconciliation showing the movements during the period in the net liability (or asset) recognized in the balance sheet:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Saldo Awal Tahun	11.488.933.649	-	*Beginning Balance*
Biaya Imbalan Pasti	37.273.034.811	11.623.967.498	*Defined Benefit Cost*
Pembayaran	(86.384.978.739)	(8.110.515.310)	*Payment*
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Kerugian (Keuntungan) Aktuaria	54.749.448.561	7.975.481.461	*Remeasurement of Liability for Employee Benefit - Actuarial (Gain) Loss*
Saldo Akhir Kewajiban Bersih	**17.126.438.282**	**11.488.933.649**	***Ending Balance for Net Liability***

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN) / ***20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)***

b. Rekonsiliasi nilai wajar aset program bank adalah sebagai berikut: / ***b. The reconciliation of the fair value of the bank's plan assets is as follows:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Saldo Awal Tahun	472.419.692.559	456.682.153.707	*Beginning Balance*
Bunga atas Imbalan Pasti	32.359.943.210	32.400.307.518	*Interest on defined benefit*
Iuran	89.536.684.391	11.227.735.178	*Contribution*
Pembayaran Manfaat	(27.554.268.166)	(27.890.503.844)	*Benefits paid*
Kerugian aktuaria	(4.987.589.556)	-	*Actuarial loss*
Saldo Akhir Nilai Wajar Aset Program	**561.774.462.438**	**472.419.692.559**	***Ending Balance for Fair Value of Asset Program***

c. Beban imbalan kerja adalah sebagai berikut: / ***c. Employee benefit expense are as follows :***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Biaya Jasa Kini	13.419.764.213	13.088.587.236	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu	23.456.453.279	-	*Past Service Cost*
Biaya Bunga	32.756.760.529	30.393.736.302	*Interest Cost*
Hasil yang Diharapkan Dari Aset Program	(32.359.943.210)	(32.400.307.518)	*Expected return on Plan assets*
Bunga atas Dampak Batas atas Dari Aset	-	541.951.478	*Interest on asset ceiling Impact of asset*
Beban Imbalan Kerja	**37.273.034.811**	**11.623.967.498**	***Employee Benefit Expense***

d. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut: / ***d. The change in the present value of defined benefit liability are as follows:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Saldo Awal Tahun	483.908.626.208	448.939.989.741	*Beginning Balance*
Biaya Jasa Kini	13.419.764.213	13.088.587.236	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu	23.456.453.279	-	*Past Service Cost*
Biaya Bunga	32.756.760.529	30.393.736.302	*Interest Cost*
Pembayaran Manfaat	(24.402.562.514)	(24.773.283.976)	*Benefits Paid*
Kerugian aktuaria	49.761.859.005	16.259.596.905	*Actuarial Loss*
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	**578.900.900.720**	**483.908.626.208**	***Ending Balance Present Value Benefit Liability***

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto / ***e. Sensitivity level analysis for discount rate risk***

Tabel berikut menunjukan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

The tables below shows the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation and current service cost in the assumed changes in the discount rate (unaudited):

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

Tingkat Diskonto/ *Discount Rate*	**Nilai Kini Kewajiban/ *Present Value of Obligation***	
	Jumlah/ *Amount*	**Perubahan / *Changes***
6,75%	578.900.900.720	0%
-1%	650.421.485.765	12,35%
+1%	520.358.003.418	-10,11%

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Tingkat Diskonto/ *Discount Rate*	**Nilai Kini Kewajiban/ *Present Value of Obligation***	
	Jumlah/ *Amount*	**Perubahan / *Changes***
7,00%	483.908.626.208	0%
-1%	544.246.254.914	12,47%
+1%	434.496.132.769	-10,21%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the statement of financial position.

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN) / *20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)*

Program Imbalan Kerja / ***Employee Benefits Program***

Program imbalan dihitung sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020. Termasuk dalam program ini adalah THT.

The rewards program is calculated in accordance with Omnibus Law No. 11/2020. Included in the program is THT.

Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan kerja pada laporan aktuaris tertanggal 5 Januari 2026 dan 7 Januari 2025 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

The following are assumptions used in the calculation of the employee benefit pension plan as of January 5, 2026 and January 7, 2025 respectively for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follow:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Tingkat Diskonto	6,25% - 6,50%	6,75% - 7,00%	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	2,50%	2,50%	*Annual pension Based salary increase rates per year*
Tingkat Mortalita	1=TMI'2019	1=TMI'2019	*Mortality Rate*
Usia Pensiun	56 tahun / *56 years*	56 tahun / *56 years*	*Retirement Age*
Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian / *10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian / *10% from mortality rate*	*Disability Rate*
Rata-rata masa kerja	14,38	14,43	*Average years of service*

a. Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: / ***a. The liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja	296.976.448.112	265.776.646.490	*Present Value of Benefit Obligation*
Nilai Wajar Aset Program	--	--	*Fair Value of Asset Program*
Liabilitas Yang Diakui Dalam Laporan Posisi Keuangan	**296.976.448.112**	**265.776.646.490**	***Liability Recognized in the Statement of Financial Position***

b. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk program imbalan kerja adalah sebagai berikut: / ***b. Expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income for employee benefits program are as follows:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Biaya Jasa Kini	8.788.655.793	7.901.681.438	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu	-	-	*Past Service Cost*
Biaya Bunga	9.623.092.542	9.015.884.729	*Interest Cost*
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	**18.411.748.335**	**16.917.566.167**	***Expenses Recognized in the Profit or Loss Statements***
Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja-Neto			*Remeasurement of the net Liability for employee benefits - Net*
Dampak karena perubahan asumsi finansial	7.856.982.683	(2.384.613.854)	*Effect to changes in financial assumptions*
Dampak karena penyesuaian pengalaman	9.158.238.337	9.390.796.130	*Effect to experience adjusments*
Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	**17.015.221.020**	**7.006.182.276**	***Recognized in other Comprehensive Income***

c. Perubahan penyisihan adalah sebagai berikut: / ***c. The allowance changes are as follows:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Saldo Awal Tahun	147.916.251.836	141.707.715.620	*Beginning Balance*
Penambahan Tahun Berjalan	18.411.748.335	16.917.566.167	*Addition during the year*
Nilai Yang Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lain	17.015.221.020	7.006.182.276	*Amount recognized in other Comprehensive Income*
Pembayaran Manfaat	(21.503.491.769)	(17.715.212.227)	*Benefit Paid*
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	**161.839.729.422**	**147.916.251.836**	***Ending Balance of Current cost Defined Benefits***

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN) / *20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)*

Program Imbalan Kerja (Lanjutan) / ***Employee Benefits Program (Continued)***

d. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto / ***d. Sensitivity level analysis for discount rate risk***

Tabel berikut menunjukan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

The tables below shows the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation and current service cost in the assumed changes in the discount rate (unaudited):

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

Tingkat Diskonto/ *Discount Rate*	Nilai Kini Kewajiban/ *Present Value of Obligation*	
	Jumlah/ *Amount*	Perubahan / *Changes*
6,50%	161.839.729.422	0%
-1%	175.202.915.819	8,26%
+1%	148.356.103.996	-8,33%

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Tingkat Diskonto/ *Discount Rate*	Nilai Kini Kewajiban/ *Present Value of Obligation*	
	Jumlah/ *Amount*	Perubahan / *Changes*
7,00%	147.916.251.836	0%
-1%	159.044.298.918	12,47%
+1%	138.169.664.326	-10,21%

Imbalan jangka panjang lainnya / ***Other long-term benefit***

a. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk imbalan jangka panjang adalah sebagai berikut: / ***a. Expenses recognized in the statements of income and other comprehensive income for long-term benefits are as follows:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Biaya Jasa Kini	8.168.602.035	7.128.617.584	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	7.175.566.240	5.757.999.729	*Interest Cost*
Keuntungan Aktuaria atas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	7.063.493.310	9.830.427.268	*Actuarial Gain of Other Long Term Employee Benefit*
Beban Yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	**22.407.661.585**	**22.717.044.581**	***Expenses Recognized in the Income Statements***
(Keuntungan) Kerugian Aktuaria	-	--	*Actuarial Gain/ Loss*
Beban Yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	**22.407.661.585**	**22.717.044.581**	***Expenses Recognized in the Income Statements and Other Comprehensive Income***

b. Perubahan liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: / ***b. Changes in the liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Saldo Awal Tahun	106.371.461.005	90.553.502.824	*Beginning Balance*
Penambahan Tahun Berjalan	15.344.168.275	12.886.617.313	*Additions during the year*
Keuntungan Aktuaria yang diakui Tahun Berjalan	7.063.493.310	9.830.427.268	*Net Actuarial Gain Recognized during the Year*
Pembayaran Manfaat	(10.768.842.182)	(6.899.086.400)	*Benefits Paid*
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	**118.010.280.408**	**106.371.461.005**	***Ending Balance of Present Value of Defined Benefit***

c. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto / ***c. Sensitivity level analysis for discount rate risk***

Tabel berikut menunjukan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

The tables below shows the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation and current service cost in the assumed changes in the discount rate (unaudited):

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

Tingkat Diskonto/ *Discount Rate*	Nilai Kini Kewajiban/ *Present Value of Obligation*	
	Jumlah/ *Amount*	Perubahan / *Changes*
6,25%	118.010.280.408	0%
-1%	125.568.850.586	6,41%
+1%	111.253.881.419	-5,73%

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN) / *20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)*

Imbalan jangka panjang lainnya (Lanjutan) / ***Other long-term benefit (Continued)***

c. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (lanjutan) / ***c. Sensitivity level analysis for discount rate risk (continued)***

Tabel berikut menunjukan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

The tables below shows the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation and current service cost in the assumed changes in the discount rate (unaudited):

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*		
Tingkat Diskonto/ *Discount Rate*	**Nilai Kini Kewajiban/ *Present Value of Obligation***	
	Jumlah/ *Amount*	**Perubahan / *Changes***
7,00%	106.371.461.005	0%
-1%	113.224.427.129	12,47%
+1%	100.233.392.375	-10,21%

Perkiraan jumlah manfaat imbalan kerja dari program imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo sesuai dengan rata-rata durasi tertimbang adalah sebagai berikut:

The estimated amount of employee benefit benefits from employee benefit plans and other long-term benefits that will mature according to the weighted average duration is as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Satu tahun	35.967.646.020	28.613.080.232	*One year*
Dua sampai dengan lima tahun	123.336.236.542	131.177.037.730	*Between two and five years*
Lima sampai dengan sepuluh tahun	154.670.376.097	147.709.156.224	*Between five and ten years*
Lebih dari sepuluh tahun	576.717.029.032	538.830.565.428	*More than ten years*
Jumlah	**890.691.287.691**	**846.329.839.614**	***Total***

21. LIABILITAS SEWA / *21. LEASE LIABILITIES*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Kendaraan	8.002.197.284	2.544.985.357	*Vehicles*
Mesin ATM	7.005.756.215	10.685.885.947	*ATM Machine*
Tanah	1.963.906.189	1.825.689.638	*Land*
Bangunan	432.611.998	-	*Buildings*
Jumlah	**17.404.471.686**	**15.056.560.942**	***Total***

22. LIABILITAS LAIN-LAIN / *22. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Jasa Produksi dan Tantiem	234.450.248.602	186.838.605.662	*Production Service Bonus and Tantiem*
Rupa-rupa Kewajiban	116.254.241.577	61.016.719.743	*Other Liabilities*
Penghargaan Direksi	43.187.199.273	30.746.300.943	*Service Gratuity for the Directors*
Penangguhan Remunerasi Pengurus dan karyawan	10.435.267.456	10.211.596.802	*Deferral of Management Remuneration and employee*
Penghargaan Dewan Komisaris	9.132.677.720	10.980.821.765	*Service gratuity for Board of Commissioners*
Provisi Bank Garansi Diterima Di Muka	843.281.853	398.284.556	*Advance Bank Guarantee Fees*
Estimasi Kerugian atas Transaksi Rekening Administratif	521.856.463	615.586.506	*Estimated Losses on Transactions of Administration Account*
Titipan Pembayaran Lainnya	316.460.779	405.880.412	*Other Payment Deposit*
Titipan Pajak Dan Retribusi Daerah	303.036.326	470.824.670	*Deposit of Local Taxes and Retribution*
Pendapatan Bunga Kredit Yang Ditangguhkan	237.599.077	145.291.127	*Deferred Interest Income for Loans*
Cadangan Iuran Pensiun	-	47.789.063.478	*Allowance Pension Contribution*
Lainnya	2.023.557.330	1.734.262.093	*Others*
Jumlah	**417.705.426.456**	**351.353.237.757**	***Total***

22. LIABILITAS LAIN-LAIN (LANJUTAN) / *22. OTHER LIABILITIES (CONTINUED)*

Rupa-rupa kewajiban terdiri dari imbal jasa penjamin dan lainnya terdiri dari dana titipan, setoran jaminan *safe deposit box* , dan setoran jaminan bank garansi lainnya.

Other liabilities consist of guarantor fees and others consist of safe deposit funds, safe deposit box guarantee deposits, and other bank guarantee deposits.

Cadangan kerugian ekspektasian atas transaksi rekening administratif adalah sebagai berikut:

Expected credit losses on transactions of administration account are as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Saldo awal tahun	615.586.506	3.645.055.910	*Balance, beginning of year*
Pemulihan Tahun Berjalan	(93.730.043)	(3.029.469.404)	*Reversal during the year*
Jumlah	**521.856.463**	**615.586.506**	***Balance, end of period***

23. MODAL SAHAM / *23. SHARE CAPITAL*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the shareholders composition are as follows:

31 Desember 2025 / December 31, 2025

Pemegang Saham/ *Shareholder*	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Jumlah dalam Rupiah/ *Amount in Rupiah*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*
Pemerintah Provinsi Bali / *Province of Bali*	839.912	839.912.000.000	29,16%
Pemerintah Kota Denpasar / *Denpasar City Government*	350.000	350.000.000.000	12,15%
Pemerintah Kabupaten / *Regencies Government*			
- Badung	1.250.617	1.250.617.000.000	43,42%
- Gianyar	200.000	200.000.000.000	6,93%
- Buleleng	80.000	80.000.000.000	2,78%
- Karangasem	46.550	46.550.000.000	1,62%
- Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,29%
- Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,09%
- Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,08%
- Bangli	13.577	13.577.000.000	0,47%
Jumlah / *Total*	**2.880.177**	**2.880.177.000.000**	**100,00%**

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Pemegang Saham/ *Shareholder*	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Jumlah dalam Rupiah/ *Amount in Rupiah*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*
Pemerintah Provinsi Bali / *Province of Bali*	719.912	719.912.000.000	29,91%
Pemerintah Kota Denpasar / *Denpasar City Government*	300.000	300.000.000.000	12,46%
Pemerintah Kabupaten / *Regencies Government*			
- Badung	1.050.617	1.050.617.000.000	43,65%
- Gianyar	100.000	100.000.000.000	4,15%
- Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,32%
- Karangasem	43.550	43.550.000.000	1,81%
- Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,54%
- Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,31%
- Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,29%
- Bangli	13.577	13.577.000.000	0,56%
Jumlah / *Total*	**2.407.177**	**2.407.177.000.000**	**100,00%**

Selama periode 31 Desember 2025, pemegang saham Bank telah memberikan kontribusi tambahan.

During the period December 31, 2025, the Bank's shareholders have made additional contributions.

Berdasarkan Akta No 05 Tanggal 11 Maret 2025 oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham atau bernominal Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 839.912 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp839.912.000.000 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0074552 tanggal 11 Maret 2025.

Based on Deed no. 05 dated March 11, 2025 by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn in Bali, the Bali Province Government approved an increase in paid-in capital of 120,000 (one hundred and twenty thousand) shares or a nominal value of Rp120,000,000,000 (one hundred and twenty billion rupiah) so that now there are 839,912 (eight hundred and thirty nine thousand nine hundred and twelve) shares or a total nominal value of Rp839,912,000,000 (eight hundred and thirty nine billion nine hundred and twelve million rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0074552 dated March 11, 2025.

23. MODAL SAHAM (LANJUTAN)

Berdasarkan Akta No 15 Tanggal 29 April 2025 oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham atau bernominal Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 1.250.617 (satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh belas) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.250.617.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah) dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0117549 tanggal 30 April 2025.

Berdasarkan Akta No 10 Tanggal 20 Juni 2025 oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau bernominal Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) serta penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham atau bernominal Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 46.550 (empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp46.550.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0163309 tanggal 20 Juni 2025.

Berdasarkan Akta No. 44 tanggal 17 Desember 2025 oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dan untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham kedalam Bank adalah sebanyak 2.880.177 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh) lembar saham, atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.880.177.000.000 (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan masih dalam proses pencatatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM

Tambahan setoran modal tersebut telah dilaporkan dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

23. SHARE CAPITAL (CONTINUED)

Based on Deed No. 15 dated April 29, 2025 by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn, in Bali, it was approved that the Badung Regency Government increase its paid-up capital by 200,000 (two hundred thousand) shares or with a nominal value of Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah) so that now it is 1,250,617 (one million two hundred and fifty thousands six hundred and seventeen) shares or with a total nominal value of Rp1,250,617,000,000,000 (one billion two hundred and fifty thousands six hundred and seventeen million rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0117549 dated April 30, 2025.

Based on Deed No. 10 dated June 20, 2025 by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., in Bali, it was approved that the Gianyar Regency Government increase its paid-up capital by 100,000 (one hundred thousand) shares or with a nominal value of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) so that now it is 200,000 (two hundred thousand) shares or with a total nominal value of Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah) and the Karangasem Regency Government increase its paid-up capital by 3,000 (three thousand) shares or with a nominal value of Rp3,000,000,000 (three billion rupiah) so that now it is 46,550 (forty six thousands five hundred and fifty) shares or with a total nominal value of Rp46,550,000,000,000 (forty six thousands five hundred and fifty billion rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0163309 dated June 20, 2025.

Based on Deed No. 44 dated December 17, 2025 by Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn., in Bali, it was approved that the Denpasar City Government would increase its paid-up capital by 50,000 (fifty thousand) shares or with a nominal value of Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah) so that now it is 350,000 (three hundred and fifty thousand) shares or with a total nominal value of Rp350,000,000,000 (three hundred and fifty billion rupiah)and that the total amount of capital paid by shareholders into the Bank is 2,880,177 (two million eight hundred eighty thousand one hundred seventy-seven) shares, or with a total nominal value of Rp2,880,177,000,000 (two trillion eight hundred eighty billion one hundred seventy-seven million rupiah) and and is still in the process of being recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights.

Those additional paid-in capital have been reported for registration to and recorded by Financial Services Authority.

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Selama 31 Desember 2025 dan 2024, para pemegang saham Bank melakukan penambahan setoran modal dan saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

During December 31, 2025 and 2024, the Bank's shareholders have additional capital contributions and the balance of additional paid-in capital as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember 2025 / December 31, 2025

Pemegang saham/ *Shareholders*	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Penambahan Modal Disetor/ *Additional Paid In Capital*	Reklasifikasi Ke Modal Disetor Penuh/ *Reclassification to Share Capital*	31 Desember 2025 / December 31, 2025
Pemerintah Provinsi Bali / *Province of Bali*	-	120.000.000.000	(120.000.000.000)	-
Pemerintah Kota Denpasar / *Denpasar City Government*	-	50.000.000.000	(50.000.000.000)	-
Pemerintah Kabupaten/ *Regencies Government*				
- Badung	-	200.000.000.000	(200.000.000.000)	-
- Buleleng	312.707	-	-	312.707
- Jembrana	642.847	-	-	642.847
- Karangasem	-	3.000.000.000	(3.000.000.000)	-
- Klungkung	200.202	-	-	200.202
- Gianyar	-	100.000.000.000	(100.000.000.000)	-
- Bangli	726.126	-	-	726.126
	1.881.882	**473.000.000.000**	**(473.000.000.000)**	**1.881.882**

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Selama 31 Desember 2025 dan 2024, para pemegang saham Bank melakukan penambahan setoran modal dan saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

During December 31, 2025 and 2024, the Bank's shareholders have additional capital contributions and the balance of additional paid-in capital as at December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Pemegang saham/ *Shareholders*	1 Januari 2024 / January 1, 2024	Penambahan Modal Disetor/ *Additional Paid In Capital*	Reklasifikasi Ke Modal Disetor Penuh/ *Reclassification to Share Capital*	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pemerintah Kota Denpasar / *Denpasar City Government*	-	85.524.000.000	(85.524.000.000)	-
Pemerintah Kabupaten/ *Regencies Government*				
- Badung	-	200.000.000.000	(200.000.000.000)	-
- Buleleng	312.707	-	-	312.707
- Jembrana	642.847	-	-	642.847
- Karangasem	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-
- Klungkung	200.202	-	-	200.202
- Gianyar	458.456	70.395.541.544	(70.396.000.000)	-
- Bangli	726.126	-	-	726.126
	2.340.338	**356.919.541.544**	**(356.920.000.000)**	**1.881.882**

Seluruh jumlah setoran di atas sementara dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor dan baru akan dipindahkan sebagai Modal Saham setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta di catat di Otoritas Jasa Keuangan.

The entire amount of the contribution above is temporarily recorded as Additional Paid-in Capital and the shares will be transferred as capital share after obtaining approval from the Minister of Law and Human Rights and recorded at the Financial Services Authority.

25. PENGGUNAAN SALDO LABA

Penggunaan laba bersih tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 01 tanggal 04 Februari 2025, Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn.

Penggunaan laba bersih tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 41 tanggal 23 Februari 2024, Notaris I Made Widiada, S.H.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, penggunaan laba tahun 2024 dan 2023 ditetapkan sebagai berikut:

25. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Distribution of net income on 2024 determined based on Deed of Shareholders Annual General Minutes of Meeting No. 01 dated February 04, 2025, Notary I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn.

Distribution of net income on 2023 determined based on Deed of Shareholders Annual General Minutes of Meeting No. 41 dated February 23, 2024, Notary I Made Widiada, S.H.

Based on the above Shareholder Annual General Minutes of Meeting, the distribution of income in 2024 and 2023, are as follows:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Dividen	658.849.305.920	553.671.231.988	*Dividends*
Cadangan Umum	219.616.435.307	184.557.077.329	*General reserve*
Jumlah	**878.465.741.227**	**738.228.309.317**	***Total***

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

The amount of dividends declared for each period are as follows:

Periode	Jumlah / *Total*	Per Saham / *Per Share*	*Period*
Distribusi pada tahun 2025 untuk laba tahun 2024	658.849.305.920	228.753	*Distribution in 2025 for 2024 profit*
Distribusi pada tahun 2024 untuk laba tahun 2023	553.671.231.988	230.009	*Distribution in 2024 for 2023 profit*

Jasa produksi dan beban C*orporate Social Responsibility* dibukukan sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Employee bonus and Corporate Social Responsibility expenses are recorded as expense in the current year statement of profit and loss and other comprehensive income.

26. PENDAPATAN BUNGA / *26. INTEREST INCOME*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pinjaman yang diberikan	2.605.454.573.732	2.487.122.926.271	*Loans*
Efek - efek	790.324.812.030	680.646.557.515	*Marketable Securities*
Penempatan pada Bank Lain	94.081.580.572	164.315.110.379	*Placements with Other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia	15.073.971.185	15.770.845.656	*Placements with Bank Indonesia*
Jumlah	**3.504.934.937.519**	**3.347.855.439.821**	***Total***

27. BEBAN BUNGA / *27. INTEREST EXPENSE*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Simpanan dari Nasabah			*Deposits from Customers*
Deposito Berjangka	457.921.062.106	380.619.852.053	*Time Deposits*
Tabungan	328.527.023.369	316.146.838.574	*Savings Account*
Giro	83.961.345.764	88.668.684.765	*Current Accounts*
Penjaminan	91.961.160.139	82.863.726.126	*Guarantee*
Premi Asuransi Untuk Program Penjaminan Dana Nasabah	73.416.188.326	67.269.494.280	*Insurance Premium for Premium on Deposit Insurance The Customer*
Simpanan dari Bank Lain	20.422.773.258	17.286.668.096	*Deposits from Another Bank*
Call Money dan Repo	3.252.012.425	8.856.564.263	*Call Money and Repo*
Beban Bunga SGU	1.962.317.804	1.948.858.914	*Interest Expense SGU*
Pinjaman yang Diterima	1.366.248.645	3.403.699.034	*Borrowings*
Pinjaman yang diberikan	1.116.453.591	1.775.460.347	*Loans*
Subsidi Kredit	693.100.800	1.280.160.000	*Subsidized Credit*
Jumlah	**1.064.599.686.227**	**970.120.006.452**	***Total***

28. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *28. OTHER OPERATING INCOME*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pendapatan Operasional			*Operating Income*
Administrasi	85.781.459.912	74.812.490.187	*Administration*
Penerimaan Kembali Kredit Hapus Buku	67.970.331.150	82.060.634.698	*Recovery of Account Written-off*
Fee	45.289.833.988	38.882.314.900	*Fees*
Denda Kredit	11.410.893.448	11.862.632.872	*Loan Penalties*
Tabungan Pasif dan Tutup	6.059.816.339	1.160.092.618	*Savings Passive and Closed*
Tata Usaha Kredit	5.333.779.860	5.970.151.840	*Loan Administration*
Valuta Asing	1.009.555.754	1.049.398.683	*Foreign Exchange Gain*
Safe Deposit Box	88.314.223	88.120.000	*Safe Deposit Box*
Sub - Jumlah	222.943.984.674	215.885.835.798	*Sub - Total*
Provisi dan Komisi			*Provision and Commission*
Jasa Bank	12.086.235.268	9.767.737.892	*Bank Services*
Sub - Jumlah	12.086.235.268	9.767.737.892	*Sub - Total*
Lain-lain	56.473.176.790	1.085.572.298	*Others*
Jumlah	**291.503.396.732**	**226.739.145.988**	***Total***

29. PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *29. RECOVERY (PROVISION) FOR IMPAIRMENT LOSSES*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pinjaman yang Diberikan	117.899.889.023	(139.150.563.768)	*Loans*
Tagihan lainnya	(2.523.574.279)	(10.094.297.118)	*Other Bills*
Giro pada Bank Lain	(1.505.770)	(12.789.130)	*Current Accounts with Other Banks*
Penempatan pada Bank-bank Lain	906.995.029	284.184.479	*Placements with Other Banks*
Efek-efek	(17.000.000)	28.500.000	*Securities*
Jumlah	**116.264.804.003**	**(148.944.965.537)**	***Total***

30. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN / *30. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Tunjangan dan Insentif	272.942.087.847	302.649.446.855	*Benefits and Incentives*
Gaji, Upah dan Honorarium	251.374.679.915	244.931.232.370	*Salaries, Wages and Honorarium*
Jasa Produksi dan Tantiem	235.164.078.692	187.552.435.752	*Production Services and Tantiem*
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 20)	78.092.444.731	43.148.062.936	*Post-Employment Benefits (Note 20)*
Makan dan Lembur	33.518.902.358	32.195.136.464	*Meal and Overtime*
Pendidikan dan Latihan	20.934.317.323	21.869.430.485	*Education and Training*
Representasi dan Penghargaan	13.151.895.801	22.388.750.692	*Representation and Service Awards*
Lain-lain	3.808.010.560	2.636.263.447	*Others*
Jumlah	**908.986.417.227**	**857.370.759.001**	***Total***

Jumlah gaji kotor, tunjangan dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Pejabat Eksekutif masing-masing adalah sebesar Rp106.630.004.195 dan Rp113.650.175.097 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2025 and 2024, the amount of gross salaries, benefits and bonuses of the Board of Commissioners, Directors, Committee and Executive Officers, amounted to Rp106,630,004,195 and Rp113,650,175,097 a respectively, with details as follows:

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

	Jumlah Anggota/ *Total Members*	Gaji/ *Salary*	Tunjangan/ *Benefit*	Bonus dan Penghargaan/ *Bonusses and Service Guarantee*	Jumlah/ *Total*
Direksi/ *Directors*	5	7.000.000.000	18.353.773.022	29.478.204.397	54.831.977.419
Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*	5	2.066.400.000	4.613.369.560	7.976.173.772	14.655.943.332
Pejabat Eksekutif / *Executive Officers*	28	2.533.266.000	16.763.738.559	16.652.057.356	35.949.061.915
Komite Audit/ *Audit Committe*	1	180.000.000	16.673.843	201.000.000	397.673.843
Komite Pemantau Risiko/ *Risk Monitoring Committee*	1	180.000.000	16.673.843	201.000.000	397.673.843
Komitee Remunerasi dan Nominasi/ *Remuneration and Nomination Committee*	1	180.000.000	16.673.843	201.000.000	397.673.843
Jumlah	**41**	**12.139.666.000**	**39.780.902.670**	**54.709.435.525**	**106.630.004.195**

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

	Jumlah Anggota/ *Total Members*	Gaji/ *Salary*	Tunjangan/ *Benefit*	Bonus dan Penghargaan/ *Bonusses and Service Guarantee*	Jumlah/ *Total*
Direksi/ *Directors*	5	5.982.000.000	22.344.170.622	37.856.355.031	66.182.525.653
Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*	5	3.229.200.000	5.429.176.200	8.198.017.697	16.856.393.897
Pejabat Eksekutif / *Executive Officers*	28	2.343.390.000	14.898.874.132	12.050.928.401	29.293.192.533
Komite Audit/ *Audit Committe*	2	360.000.000	41.731.507	257.300.000	659.031.507
Komite Pemantau Risiko/ *Risk Monitoring Committee*	1	180.000.000	23.066.759	184.800.000	387.866.759
Komitee Remunerasi dan Nominasi/ *Remuneration and Nomination Committee*	1	180.000.000	18.664.748	72.500.000	271.164.748
Jumlah	**42**	**12.274.590.000**	**42.755.683.968**	**58.619.901.129**	**113.650.175.097**

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Outsourcing	64.152.772.895	61.277.633.936	*Outsourcing*
Otomasi	80.089.982.639	60.657.001.114	*Automation*
Tamu, *Souvenir*, Sumbangan	49.858.570.033	40.533.434.629	*Guest, Souvenirs, Donation*
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 10)	30.509.395.742	29.099.874.001	*Depreciation of Fixed Assets (Note 10)*
Biaya CSR	20.649.135.532	15.227.359.885	*CSR Expenses*
Amortisasi Aset Hak Guna (Catatan 12)	20.181.242.419	17.339.107.163	*Amortization of Right-of-Use Assets (Note 12)*
Biaya Iuran OJK	19.041.592.909	16.407.334.023	*OJK Contribution Expenses*
Rumah Tangga Kantor dan Lainnya	18.076.070.655	18.010.303.727	*Office Expenses and Others*
Pemeliharaan dan Perbaikan	17.649.064.539	18.283.045.302	*Maintenance and Repairs*
Iklan dan Promosi	14.054.093.938	14.408.543.686	*Advertising and Promotion*
Listrik, Air dan Telepon	11.310.102.811	11.677.731.559	*Electrical, Water and Telephone*
Perjalanan Dinas	10.034.867.899	10.276.536.420	*Travel Expenses*
Ongkos Bank	8.940.702.794	12.450.190.055	*Bank Charges*
Jasa Profesional	8.135.514.444	6.391.030.731	*Profesional Fee*
Sewa	7.255.164.307	8.968.681.600	*Rent Expenses*
Premi Asuransi	7.201.068.550	6.700.036.803	*Insurance Premium*
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 11)	4.735.714.853	4.738.667.375	*Amortization of Intangible Assets (Note 11)*
Rapat	3.950.152.047	4.269.528.291	*Meeting*
Keamanan	1.872.472.000	1.802.928.200	*Security*
Pajak	612.402.494	634.612.906	*Taxes*
Denda dan Sanksi	1.200.000	359.469.657	*Penalty*
Lain-lain	30.871.251.535	13.245.449.937	*Others*
Jumlah	**429.182.535.035**	**372.758.501.000**	***Total***

Lain-lain terdiri dari biaya pengalihan asuransi , biaya lelang, biaya komisi laku pandai serta biaya majalah , surat kabar dan bacaan.

Others consist of insurance transfer fees, auction fees, smart sale commission fees and magazine, newspaper and reading costs.

32. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL / *32. NON - OPERATING INCOME (EXPENSES)*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pendapatan Non - Operasional			***Non Operating Income***
Selisih Kurs	1.816.378.095	1.544.065.747	*Foreign Exchange Difference*
Laba Penjualan Inventaris Kantor (Catatan 10)	161.047.409	-	*Gain from Sale of Office Equipment (Note 10)*
Sewa	184.845.000	182.138.134	*Rent*
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai uang muka pajak	-	48.424.954.723	*Recovery from impairment Impairment loss of tax advance*
Lain-lain	33.515.601.204	5.040.301.635	*Others*
Sub - Jumlah	**35.677.871.708**	**55.191.460.239**	*Sub - Total*
Beban Non - Operasional			***Non - operating expense***
Pemantapan Pelaksanaan Ibadah	(4.800.176.532)	(3.813.609.889)	*Strengthening Implementation of Worship*
Beban Pajak	(36.541.920.240)	(30.512.362.123)	*Tax Expense*
Duka	(500.701.350)	(563.016.196)	*Grief*
Kerugian Penghapusan Inventaris Kantor (Catatan 10)	-	(386.736.454)	*Loss from Disposal of Office Equipment (Note 10)*
Lain-lain	(4.148.521.109)	(5.805.394.876)	*Others*
Sub - Jumlah	(45.991.319.231)	(41.081.119.538)	*Sub - Total*
Jumlah	**(10.313.447.523)**	**14.110.340.701**	***Total***

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Komitmen			***Commitment Liabiities***
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	376.041.963.117	386.981.506.950	*Unused Credit Facilities to Debtors*
Jumlah Liabilitas Komitmen - Bersih	**376.041.963.117**	**386.981.506.950**	***Total Commitments Liability - Net***
Kontinjensi			***Contingencies***
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	62.339.448.894	80.268.037.878	*Interest Income in Settlement*
Sub - Jumlah	**62.339.448.894**	**80.268.037.878**	***Sub - Total***
Liabilitas Kontinjensi Bank Garansi yang Diterbitkan	(281.009.716.125)	(104.919.480.197)	*Contingent Liabilities Bank Guarantee Issued*
Sub - Jumlah	**(281.009.716.125)**	**(104.919.480.197)**	***Sub - Total***
Jumlah Liabilitas Kontinjensi - Bersih	**(218.670.267.231)**	**(24.651.442.318)**	***Total Contigent Liability - Net***

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *34. RELATED PARTY TRANSACTIONS*

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak - pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat telah disepakati bersama.

In the normal course of business, Bank enter into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat dari Hubungan / *Nature of Relationship*	Sifat dari Transaksi / *Nature of Transactions*
Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se Wilayah Bali / *Provincial, City, and Regency Governments of Bali Region*	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan / *Deposits*
Manajemen Kunci / *Key Management*	Komisaris, Direktur dan Pejabat Eksekutif / *Commissioners, Directors and Executive Officers*	Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan / *Loans and Deposits*
Perusahaan yang Dimiliki oleh Pemegang Saham / *Ownership of Shareholders*	Pengendalian Bersama oleh Pemegang Saham / *Joint Control by the Shareholders*	Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan / *Loans and Deposits*

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties. The transactions in the balance consist of:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Pinjaman yang diberikan			***Loans***
Keluarga Direksi dan Karyawan Kunci	27.355.693.858	26.419.046.747	*Family Directors and Key Employees*
Komisaris	875.120.395	3.214.217.807	*Commissioner*
Lainnya	-	2.588.719.600	*Other*
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	28.230.814.253	32.221.984.154	*Total Loans*
Persentase terhadap Jumlah Aset	0,07%	0,08%	*Percentage to Total Asset*
Simpanan dari Nasabah			***Deposits from Customers***
Giro	1.754.244.794.994	540.226.399.665	*Current accounts*
Tabungan	29.351.347.741	25.296.065.082	*Savings*
Deposito	23.614.138.775	25.126.901.368	*time deposits*
Jumlah Simpanan dari Nasabah	1.807.210.281.510	590.649.366.115	*Total Deposits from Customers*
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	5,04%	1,76%	*Percentage to Total Liabilities*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci			***Compensation of Key Management Personel***
Bonus dan Penghargaan	54.709.435.525	58.619.901.129	*Bonuses and Service Gratuity*
Tunjangan	39.780.902.670	42.755.683.968	*Benefits*
Gaji	12.139.666.000	12.274.590.000	*Salaries*
Jumlah Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci	106.630.004.195	113.650.175.097	*Total Compensation of Key Management Personel*
Persentase Terhadap Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci	0,12%	0,13%	*Percentage of Compensation of Key Management Personnel*

Tidak terdapat kerugian penurunan nilai atas saldo transaksi selama tahun berjalan dengan personil manajemen kunci, dan tidak ada penyisihan khusus yang dibuat untuk kerugian penurunan nilai atas transaksi dengan personil manajemen kunci dan kerabat dekat mereka pada akhir tahun.

There were no impairment losses on the transaction balance during the year with key management personel, and no special allowance for impairment losses on transactions with key management personnel and their close relatives at the end of the year.

35. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING / *35. MONETARY ASSET AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024 / *December 31, 2024*		
	Valuta Asing / *Foreign Exchange*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Valuta Asing / *Foreign Exchange*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Aset Moneter					***Monetary Assets***
Kas					*Cash*
Kas Harian Teller	22.753	379.406.275	21.891	352.335.645	*Teller daily cash*
Giro pada Bank Indonesia	51.500	858.762.500	51.500	828.892.500	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	1.934.818	32.263.085.815	1.899.150	30.566.821.020	*Current Accounts with Other Bank*
Liabilitas Moneter					***Monetary Liabilities***
Giro	4.642	77.408.018	4.761	76.629.583	*Current Account*
Tabungan	38.848	647.793.902	82.535	1.328.396.640	*Savings*
Simpanan Berjangka	178.113	2.970.034.275	151.800	2.443.221.000	*Term Deposits*
Rupa-rupa Liabilitas	8.177	136.349.641	8.029	129.223.053	*Other Liabilities*
Rekening Perantara Valuta	1.777.453	29.639.036.779	1.723.613	27.741.543.509	*Currency intermediary Account*

36. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES

Tabel di bawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The table below sets out the carrying values and fair values of financial assets and liabilities in statements of financial position as December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*		**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Value***	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Biaya perolehan diamortisasi					***Measured at amortised cost***
Kas	868.945.822.140	868.945.822.140	580.735.597.835	580.735.597.835	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.624.589.812.614	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	2.694.875.382.728	*Current Account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain bersih	50.601.645.357	50.601.645.357	45.087.137.075	45.087.137.075	*Current Account with Other Bank Net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Bersih	2.041.513.233.445	2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	3.143.158.664.835	*Placement with Bank Indonesia and Other Bank net*
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	23.845.077.361.413	23.845.077.361.413	21.525.087.396.052	21.525.087.396.052	*Loans - Net*
Aset Lain-lain	242.442.682.116	242.442.682.116	194.272.937.814	194.272.937.814	*Other Assets*
Efek-efek	11.273.301.815.282	11.273.301.815.282	9.760.077.271.692	9.760.077.271.692	*Securities*
Jumlah Aset Keuangan	**40.946.472.372.367**	**40.946.472.372.367**	**37.943.294.388.031**	**37.943.294.388.031**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas Segera	82.350.275.735	82.350.275.735	74.679.631.081	74.679.631.081	*Liabilities Due Immediately*
Simpanan dari Nasabah	33.853.210.992.138	33.853.210.992.138	32.167.791.208.809	32.167.791.208.809	*Deposit from Customers*
Simpanan dari Bank Lain	1.075.658.295.068	1.075.658.295.068	661.691.987.042	661.691.987.042	*Deposit from Other Bank*
Pinjaman yang Diterima	23.991.677.262	23.991.677.262	24.433.647.846	24.433.647.846	*Borrowings*
Beban yang Masih Harus Dibayar	24.454.215.202	24.454.215.202	22.595.470.132	22.595.470.132	*Accrued Expense*
Liabilitas Sewa	17.404.471.686	17.404.471.686	15.056.560.942	15.056.560.942	*Lease Liabilities*
Liabilitas lain-lain	417.705.426.456	417.705.426.456	351.353.237.757	351.353.237.757	*Other Liabilities*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**35.494.775.353.547**	**35.494.775.353.547**	**33.317.601.743.609**	**33.317.601.743.609**	***Total Financial Liabilities***

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

The fair value of financial assets and financial liabilities is measured on the following basis:

Aset Keuangan

Financial Assets

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan aset lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair value of short-term financial assets (generally less than one year), such as current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and other assets are carried at carrying amount due to their approximate fair value.

Nilai wajar atas efek-efek ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The fair value of securities is determined by reference to the latest market quotes published as of December 31, 2025 and 2024.

Estimasi nilai wajar pinjaman yang diberikan (umumnya kredit dengan bunga mengambang) merupakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Pinjaman yang diberikan disajikan bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The estimated fair value of loans (generally floating rate loans) represents the present value of estimated future expected future cash flows discounted at market rates. Loans are presented net of allowance for impairment losses.

36. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (LANJUTAN)

Liabilitas Keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut harus segera dibayar pada saat ditagih.

Pengukuran nilai wajar yang diakui pada laporan posisi keuangan:

- Tingkat pertama pengukuran nilai wajar berasal dari kuotasi harga (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik.
- Tingkat kedua pengukuran nilai wajar berasal dari masukan lain selain dari kuotasi harga pasar yang sudah termasuk dalam tingkat pertama yang dapat diamati untuk aset maupun liabiltas, baik secara langsung (contohnya harga) atau tidak langsung (contohnya yang berasal dari harga).
- Tingkat ketiga pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang meliputi input untuk aset atau liabilitas jika tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati (masukan yang tidak dapat diamati).

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES (CONTINUED)

Financial Liabilities

The fair value of short-term financial liabilities (generally less than one year) such as deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities are at carrying amount due to their approximate fair value.

The estimated fair value of unsecured deposits amounts to the amount owed when the debts are due immediately to be paid at the time of collection.

Fair value measurement recognized in the statement of financial position:

- *The first level of measurement of fair value derives from price quotes (not adjusted) in the active market for identical assets and liabilities.*
- *The second level of fair value measurement comes from other inputs other than quoted market prices that are included in the first observable level for assets or liabilities, either directly (e.g. price) or indirectly (e.g., price-derived).*
- *The third level of fair value measurement derived from valuation techniques that includes inputs for assets or liabilities if not based on observable market data (inputs that can not be observed).*

37. INFORMASI SEGMEN

37. SEGMENT INFORMATION

Bank melaporkan segmen wilayah geografis sebagai informasi segmen utama.

The Bank reported geographical segment as its primary segment information.

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*
Dalam Jutaan Rupiah/ *In Million Rupiah*

	Bali/ *Bali*	**Mataram/ *Mataram***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan Bunga	3.426.625	78.310	3.504.935	*Interest Income*
Beban Bunga	(1.020.737)	(43.863)	(1.064.600)	*Interest Expenses*
Pendapatan Bunga - Bersih	2.405.888	34.447	2.440.335	*Interest Income - Net*
Pendapatan Operasional Lainnya	287.464	4.039	291.503	*Other Operating Income*
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(892.924)	(16.062)	(908.986)	*Salaries and Employee Benefits*
Umum dan Administrasi	(425.343)	(3.840)	(429.183)	*General and Administrative*
Beban Modifikasi	(38.986)	(932)	(39.918)	*Modification Expense*
Pembentukan Cadangan Kerugian				*Allowance for Impairment*
Penurunan Nilai	127.042	(10.683)	116.359	*Losses*
Laba Operasional	1.463.141	6.969	1.470.110	*Operating Income*
Laba Bersih	1.094.575	6.896	1.101.471	*Net Profit*
Jumlah Aset	40.708.860	672.129	41.380.989	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	35.653.633	207.513	35.861.146	*Total Liabilities*

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*
Dalam Jutaan Rupiah/ *In Million Rupiah*

	Bali/ *Bali*	**Mataram/ *Mataram***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan Bunga	3.260.460	87.395	3.347.855	*Interest Income*
Beban Bunga	(919.030)	(51.090)	(970.120)	*Interest Expenses*
Pendapatan Bunga - Bersih	2.341.430	36.305	2.377.735	*Interest Income - Net*
Pendapatan Operasional Lainnya	222.357	4.382	226.739	*Other Operating Income*
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(842.551)	(14.820)	(857.371)	*Salaries and Employee Benefits*
Umum dan Administrasi	(368.454)	(4.305)	(372.759)	*General and Administrative*
Beban Modifikasi	(44.021)	(520)	(44.541)	*Modification Expense*
Pembentukan Cadangan Kerugian				*Allowance for Impairment*
Penurunan Nilai	(146.242)	327	(145.915)	*Losses*
Laba Operasional	1.162.519	21.369	1.183.888	*Operating Income*
Laba Bersih	857.198	21.267	878.465	*Net Profit*
Jumlah Aset	37.561.666	751.016	38.312.682	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	33.449.364	203.121	33.652.485	*Total Liabilities*

38. RISIKO KREDIT

Dalam mengelola risiko kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kerangka kerja yang lengkap, yang memuat panduan-panduan mengenai proses perencanaan dan implementasi serta melakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terus dilakukan sejalan dengan pedoman Bank Indonesia, fokus penyempurnaan adalah melakukan pemisahan proses keputusan kredit per masing-masing segmen debitur. Hal ini didukung pula oleh kajian berkala dari panduan-panduan tersebut, guna mencapai perbaikan yang berkesinambungan. Beberapa faktor kunci dalam kerangka kerja manajemen risiko kredit adalah:

- Penentuan cakupan dan parameter-parameter yang digunakan dalam menyusun profil risiko kredit;
- Perencanaan dan penetapan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk menjaga risiko kredit sesuai dengan *Risk Appetite* Bank, antara lain pemberian wewenang kepada pejabat kredit, dan
- Membangun sistem *database* yang kuat.

Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

Sistem dan prosedur kredit Bank telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten. Untuk kredit produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Risk Rating* untuk menganalisis risiko bisnis dan finansial dari debitur secara objektif dan memberikan *rating* kepada nasabahnya. Selain itu, Bank juga menggunakan *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* untuk mengkuantifikasi risiko kredit dan menentukan harga yang sesuai berdasarkan risiko kredit.

Untuk kredit konsumtif dan produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Scoring* untuk menganalisis dan menghitung risiko dari pemberian kredit kepada konsumer.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip *Four Eyes* (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap Kantor Cabang dengan penggunaan *Credit Scoring* dan *Credit Reviewer*.

Risiko kredit, yaitu:

a. Bidang perkreditan, meliputi *Non Performing Loan* (NPL), kecukupan agunan dan pertumbuhan pinjaman yang diberikan.
b. Bidang *treasury* dan investasi, meliputi *Non Performing Portfolio treasury* dan investasi, konsentrasi portofolio *treasury* dan investasi serta kecukupan pembentukan cadangan.

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL) dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

38. CREDIT RISK

To manage credit risk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali has had a complete framework, which includes guidelines on planning and implementation process and continously improve the Standard Operating Procedures (SOP) to be in line with the guidelines of Bank Indonesia, improvement focus is to conduct the separation process of decision loan for each segment. And Bank periodically review the guidelines, in order to achieve continuous improvement. Some of the key factors in credit risk management framework are:

- *Determination of the scope and parameters used in preparing the credit risk profile;*
- *The planning and setting of the policies required to safeguard credit risk in accordance with Risk Appetite Bank, among others, authorization to credit officials, and*
- *Establish strong database system.*

In accordance with the loan characterstics, the Bank's loan are classified into productive loans and consumer loans. In order to manage the risk, the Bank measure credit risk arising from the existing portfolios quantitatively and qualitatively to ensure that the potential losses from default loans are minimized, both for individual borrowers and the overall portfolio.

The Bank's credit system and procedures have been formalized to ensure consistent implementation and policy in credit approval. For productive loans, the Bank uses the Internal Credit Risk Rating model to analyze the business and financial risk of debtors objectively and to give ratings to debtors. In addition, the Bank also use Credit Risk Capital Allocation and Pricing in quantifying credit risk and determining the appropriate pricing.

For both consumer and productive loans, the Bank use the Internal Credit Scoring model to analyze and calculate the credit risk for consumer.

To implement a healthy credit granting process, the Bank apply the Four Eyes Principle (credit decision-making by two person or more) at each branch office by using Credit Scoring and Credit Reviewer.

Credit risk are:

a. *Lending, including Non-Performing Loans (NPL), collateral adequacy and credit growth.*
b. *Treasury and investment, including Non-Performing Portfolio of treasury and investment, treasury and investment portfolio concentration and the adequacy of reserves.*

The following are the Non-Performing Loans (NPL) ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank as of December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Ratio NPL - Bruto	0,80%	0,92%	*NPL Ratio - Gross*
Ratio NPL - Bersih	0,01%	0,02%	*NPL Ratio - Net*
Ratio Kualitas Aset Produktif	0,78%	0,58%	*Asset Quality Earning Ratio*

Rasio kualitas aset produktif merupakan rasio aset yang diklasifikasikan sebagai *non performing* dibandingkan dengan jumlah aset produktif.

Earnings asset quality ratio is the ratio of assets classified as earning assets which classified - non-performing to total earning assets.

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

38. CREDIT RISK (CONTINUED)

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dikaji secara periodik.

The Bank credit risk management system has been standardized in the Bank's Guidelines (BPP) and Standard Operating Procedures (SOP) and reviewed periodically.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya.

(i) The maximum credit risk exposure without calculating the collateral and other credit.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, credit risk exposure to assets in the statement of financial position, are as follows:

Keterangan	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	Description
	Eksposur maksimum / Maximum exposure		
Kas	868.945.822.140	580.735.597.835	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.624.589.812.614	2.694.875.382.728	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain bersih	50.601.645.357	45.087.137.075	Current Account with Other Bank Net
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Bersih	2.041.513.233.445	3.143.158.664.835	Placement with Bank Indonesia and Other Bank net
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	23.845.077.361.413	21.525.087.396.052	Loans - Net
Aset Lain-lain	242.442.682.116	194.272.937.814	Other Assets
Efek-efek	11.273.301.815.282	9.760.077.271.692	Securities
Jumlah	**40.946.472.372.367**	**37.943.294.388.031**	***Total***

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, credit risk exposure on the administrative accounts is as follows:

Keterangan	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	Description
	Eksposur maksimum / Maximum exposure		
Garansi yang Diterbitkan	281.009.716.125	104.919.480.197	Guarantee Issued
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	(376.041.963.117)	(386.981.506.950)	Credit Facilities to Debtors that Have not Been Used
Jumlah - Bersih	**(95.032.246.992)**	**(282.062.026.753)**	***Total - Net***

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a second way out.The types of collateral are as follows:

a. *Physical Collateral,* berupa tanah dan bangunan.
b. *Financial Collateral,* berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
c. Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

a. *Physical Collateral, such as land and buildings.*
b. *Financial Collateral, such as third party funds (savings, current accounts and time deposits), securities, etc.*
c. *Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.*

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

Untuk segmen kredit komersial, sesuai dengan ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral, financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan *(coverage ratio)*.

For the commercial loans segment, according to the loan policy, it has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particulary for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be use in determining the coverage ratio.

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out)* dapat dipastikan.

In addition to the collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (first way out) can be ascertained.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirements, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

Saat ini Bank sedang mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut *internal rating* dan *internal scoring* yang ada agar sejalan dengan *Advanced Internal Rating Based Approach* (A-IRB *Approach*), yaitu dengan mengembangkan *Basel II Risk Paramater Model Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure At Default* (EAD) untuk segmen *Wholesale*, *Retail* dan *Consumer*. Hal ini juga dalam rangka mempersiapkan komponen-komponen model untuk perhitungan *Expected Credit Loss* yang dibutuhkan untuk penerapan perhitungan CKPN berdasarkan IFRS 9 (PSAK 109).

The Bank is currently developing and further complementing internal rating and internal scoring to align with the Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB Approach), namely by developing the Basel II Risk Parameters Probability of Default (PD) Model, Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) Exposure for Wholesale, Retail and Consumer segments. This is also in order to prepare the components of the model for the calculation of Expected Credit Loss needed for the application of CKPN calculations based on IFRS 9 (SFAS 109).

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit oleh rekanan

Sektor Industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

38. CREDIT RISK (CONTINUED)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure by counter parties

Industry Sector

The following table describes the detail of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculating the collateral or other credit support), which are categorized by industry sector.

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*					
	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / *Government (Including Bank Indonesia)*	**Perorangan / *Individual***	**Lembaga Keuangan Bukan Bank / *Non-Bank Financial Institutions***	**Bank / *Bank***	**Perusahaan Lainnya / *Other companies***	**Jumlah / *Total***
Giro pada Bank Indonesia/ *Current Account with Bank Indonesia*	2.624.589.812.614	--	--	--	--	2.624.589.812.614
Giro pada Bank Lain/ *Current Accounts with Other Banks*	--	--	--	50.635.186.507	--	50.635.186.507
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Placement with Bank Indonesia and Other Bank*	--	--	--	2.042.384.931.672	--	2.042.384.931.672
Efek-efek/*Marketable Securities*	11.015.318.815.282	--	--	258.000.000.000	--	11.273.318.815.282
Pinjaman yang Diberikan/ *Loans*	--	22.275.162.212.777	2.396.673.998.444	291.805.126.269	37.264.512.492	25.000.905.849.982
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	--	(677.990.733.604)	(473.798.281.052)	(4.564.035.073)	(397.678.217)	(1.156.750.727.946)
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**13.639.908.627.896**	**21.597.171.479.173**	**1.922.875.717.392**	**2.638.261.209.375**	**36.866.834.275**	**39.835.083.868.111**

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*					
	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / *Government (Including Bank Indonesia)*	**Perorangan / *Individual***	**Lembaga Keuangan Bukan Bank / *Non-Bank Financial Institutions***	**Bank / *Bank***	**Perusahaan Lainnya / *Other companies***	**Jumlah / *Total***
Giro pada Bank Indonesia/ *Current Account with Bank Indonesia*	2.694.875.382.728	--	--	--	--	2.694.875.382.728
Giro pada Bank Lain/ *Current Account with Other Bank*	--	--	--	45.119.172.455	--	45.119.172.455
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Placement with Bank Indonesia and Other Bank*	599.912.525.513	--	--	2.545.024.832.578	--	3.144.937.358.091
Efek-efek/*Marketable Securities*	9.394.077.271.692	--	--	366.000.000.000	--	9.760.077.271.692
Pinjaman yang diberikan/ *Loans*	--	20.897.886.901.390	41.536.081.374	7.806.085.208	1.882.940.345.472	22.830.169.413.444
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	--	(812.624.274.589)	(5.523.983.068)	(1.821.216.655)	(486.923.271.716)	(1.306.892.746.028)
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**12.688.865.179.933**	**20.085.262.626.801**	**36.012.098.306**	**2.962.128.873.586**	**1.396.017.073.756**	**37.168.285.852.382**

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN) ***38. CREDIT RISK (CONTINUED)***

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*					
	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / *Government (Include Bank Indonesia)*	**Perorangan / *Individual***	**Lembaga Keuangan Bukan Bank / *Non-Bank Finacial Institutions***	**Bank / *Bank***	**Perusahaan Lainnya / *Other companies***	**Jumlah / *Total***
Garansi yang Diterbitkan/ *Guarantee Issued*	-	-	-	-	281.009.716.125	281.009.716.125
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan/ *Credit Facilities to Borrowers which Have not Used*	21.079.400.000	99.726.847.942	238.255.360.182	1.648.806.943	15.331.548.050	376.041.963.117
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**21.079.400.000**	**99.726.847.942**	**238.255.360.182**	**1.648.806.943**	**296.341.264.175**	**657.051.679.242**

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*					
	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / *Government (Include Bank Indonesia)*	**Perorangan / *Individual***	**Lembaga Keuangan Bukan Bank / *Non-Bank Finacial Institutions***	**Bank / *Bank***	**Perusahaan Lainnya / *Other companies***	**Jumlah / *Total***
Garansi yang Diterbitkan/ *Guarantee Issued*	-	-	-	-	104.919.480.197	104.919.480.197
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang belum Digunakan/ *Credit Facilities to Borrowers which Have not Used*	-	76.266.729.556	731.319.688	1.157.420.000	308.826.037.706	386.981.506.950
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**-**	**76.266.729.556**	**731.319.688**	**1.157.420.000**	**413.745.517.903**	**491.900.987.147**

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

The above table shows the maximum exposure to credit risk for the Bank As of December 31, 2025 and 2024 without calculating the collateral or other credit support. For the statement of financial position of assets, the exposure is determined based on net carrying amount as disclosed in the financial statements.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pinjaman yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "*early warning system*" dan pemantauan yang disiplin.

Management believes on the Bank's ability to control and maintain the its credit risk exposure arising from loans based on the following:

- *The Bank has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each granting of credit should always refer to such policy.*
- *The Bank has an "early warning system" and disciplined monitoring.*

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN) / ***38. CREDIT RISK (CONTINUED)***

(iv) Pinjaman yang diberikan / *(iv) Loans*

Ikhtisar pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut: / *Summary of loans are as follows:*

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami Penurunan Nilai/ *Impaired***	**Jumlah/ *Total***	
Rumah Tangga	10.022.633.485.992	113.418.201.419	10.136.051.687.411	*Household*
Perdagangan Besar dan Eceran	6.253.522.194.738	151.966.577.372	6.405.488.772.110	*Wholesale and Retail Trade*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.790.390.444.649	27.550.093.428	1.817.940.538.077	*Agriculture, forestry and Fishery*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.287.382.394.015	34.771.974.758	2.322.154.368.773	*Accommodation and culinary supplying*
Konstruksi	765.361.444.342	107.004.622.038	872.366.066.380	*Construction Leasing*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	339.466.871.587	6.110.488.049	345.577.359.636	*and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	553.115.528.764	2.636.242.292	555.751.771.056	*Human Health Activities And Social activity*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.014.155.788	32.352.287	15.046.508.075	*Arts, Entertainment and Recreation*
Industri Pengolahan	533.798.078.933	8.631.549.197	542.429.628.130	*Processing Industry*
Real Estate	15.917.669.230	-	15.917.669.230	*Real Estate*
Informasi dan Komunikasi	12.810.772.377	200.672.742	13.011.445.119	*Information and Communication*
Pengangkutan dan Pergudangan	145.760.636.802	1.700.906.120	147.461.542.922	*Transportation and Warehousing*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	705.533.735.620	1.064.530.609	706.598.266.229	*Financial and Insurance Activities*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	96.794.859.152	98.500.000	96.893.359.152	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Pendidikan	82.702.223.964	441.859.640	83.144.083.604	*Education*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	8.253.932.451	23.287.222	8.277.219.673	*Household Activities as Employer, Activities That Produce Goods And Services By Households Used To Fulfill Own Needs*
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	100.812.061.856	1.034.025.051	101.846.086.907	*Professional, Scientific And Technical Activities*
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	401.057.227	-	401.057.227	*Not Other Business Fields*
Aktivitas Jasa Lainnya	801.116.571.247	13.431.849.024	814.548.420.271	*Other Service Activities*
Jumlah	24.530.788.118.734	470.117.731.248	25.000.905.849.982	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(761.260.660.618)	(394.567.827.951)	(1.155.828.488.569)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**23.769.527.458.116**	**75.549.903.297**	**23.845.077.361.413**	***Total - Net***

38. RISIKO KREDIT (LANJUTAN) / ***38. CREDIT RISK (CONTINUED)***

(iv) Pinjaman yang diberikan (Lanjutan) / *(iv) Loans (Continued)*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami Penurunan Nilai/ *Impaired***	**Jumlah/**	***Total***
Rumah Tangga	9.797.623.881.458	73.923.468.412	9.871.547.349.870	*Household*
Perdagangan Besar dan Eceran	5.873.478.193.965	174.801.952.656	6.048.280.146.621	*Wholesale and Retail Trade*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.689.795.040.102	27.145.823.863	1.716.940.863.965	*Agriculture, forestry and Fishery*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.842.963.215.716	23.224.204.725	1.866.187.420.441	*Accommodation and culinary supplying*
Konstruksi	665.719.705.509	99.944.737.806	765.664.443.315	*Construction Leasing*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	291.299.104.878	2.842.332.714	294.141.437.592	*and Leasing Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support*
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	546.652.545.383	3.693.784.664	550.346.330.047	*Human Health Activities And Social activity*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.540.940.934	191.557.052	15.732.497.986	*Arts, Entertainment and Recreation*
Industri Pengolahan	492.263.094.522	10.393.288.957	502.656.383.479	*Processing Industry*
Real Estate	14.999.773.035	-	14.999.773.035	*Real Estate*
Informasi dan Komunikasi	12.766.609.653	390.082.990	13.156.692.643	*Information and Communication*
Pengangkutan dan Pergudangan	143.131.170.505	473.867.378	143.605.037.883	*Transportation and Warehousing*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	52.174.461.991	3.204.298.644	55.378.760.635	*Financial and Insurance Activities*
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	8.035.714.286	-	8.035.714.286	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	109.122.571.358	98.500.000	109.221.071.358	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities*
Pendidikan	67.617.717.247	-	67.617.717.247	*Education*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	9.213.487.508	850.993	9.214.338.501	*Household Activities as Employer, Activities That Produce Goods And Services By Households Used To Fulfill Own Needs*
Pertambangan dan Penggalian	-	76.889.421	76.889.421	*Mining and Excavation*
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	83.542.049.759	1.600.687.916	85.142.737.675	*Professional, Scientific And Technical Activities*
Aktivitas Jasa Lainnya	679.318.135.466	12.905.671.978	692.223.807.444	*Other Service Activities*
Jumlah	22.395.257.413.275	434.912.000.169	22.830.169.413.444	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(940.706.643.862)	(364.375.373.530)	(1.305.082.017.392)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**21.454.550.769.413**	**70.536.626.639**	**21.525.087.396.052**	***Total - Net***

39. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas terutama terjadi karena potensi ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas, serta terjadinya konsentrasi dana.

Risiko likuiditas mencakup:

a. Bidang perkreditan meliputi kemampuan likuiditas, tenor atau jangka waktu kredit.
b. Bidang *treasury* dan investasi meliputi *net cash outflow*.
c. Bidang pendanaan meliputi konsentrasi jangka waktu sumber dana, konsentrasi sumber dana dan ketergantungan pada dana antar bank.

Risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecil risiko likuiditas ditentukan antara lain:

a. Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas;
d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Kebijakan likuiditas Bank ditunjukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit, teroptimalisasi melalui pengelolaan *treasury*.

Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen-instrumen yang berjangka pendek dan aman. Umumnya, kondisi likuiditas Bank terjaga baik dimana penarikan dana nasabah dapat terpenuhi sekaligus kelebihan dana teroptimalkan dengan imbal hasil yang optimal.

Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang *idle* dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

39. *LIQUIDITY RISK*

Liquidity risk mainly occurs because of the potential maturity mismatch between assets and liabilities, and the concentration of funds.

Liquidity risk consist of:

a. Lending includes the ability of liquidity, tenure or loan period.
b. Treasury and investment consist of net cash outflow.
c. Funding covers a period of funding concentration sources, the concentration of financial resources and dependence on interbank funds.

The risk of loss resulting from the gap between short-term funding and long-term assets. The size of the liquidity risk is determined, i.e:

a. Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, include observe the fund rate volatility;
b. The precision in managing the fund structure, including the adequacy of funding;
c. The availability of asset that is ready to be converted into cash;
d. Ability to create access to the interbank market or other funding sources, including the lender of last resort facilities.

If the gap is large enough it will reduce the Bank's ability to meet its liabilities at maturity. Therefore, liquidity management is needed to anticipate liquidity risk, which is a part of the management liability.

The Bank's policy is aimed to ensure that fund requirements can be fulfilled, either to pay time deposits at maturity or to fulfill an unused loan facility.

Managing the excess of liquidity fund, which are not absorbed by loans, disbursement will be optimized through managing treasury.

Most of the excess of liquidity will be placed in short-term and secured instruments. In general, the Bank's liquidity condition is well maintained where the customers withdrawal can be fulfilled while the excess fund can be optimized with optimum return.

Sources of funds and time deposits maturing managed to avoid any idle funds and determine the amount of liquid assets and appropriate instrument to ensure the level of liquidity in continuously controlled.

The table below presents information on the mapping of financial assets and liabilities in a certain time scale (maturity buckets) based on the remaining term until maturity (remaining maturity) on December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*					
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset Keuangan/ *Financial Assets*						
Kas / *Cash*	868.945.822.140	868.945.822.140	--	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia/ *Current Account with Bank Indonesia*	2.624.589.812.614	2.624.589.812.614	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain/ *Current Accounts with Other Banks*	50.635.186.507	50.635.186.507	--	--	--	--
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Placement with Bank Indonesia and Other Bank*	2.042.384.931.672	1.850.024.737.924	--	192.360.193.748	--	--
Efek-efek/*Marketable Securities*	11.273.318.815.282	480.336.781.603	3.737.296.064.230	3.915.947.265.145	3.139.738.704.304	--
Pinjaman yang Diberikan/ *Loans*	25.000.905.849.982	130.634.078.248	1.181.826.512.795	667.654.420.271	23.020.790.838.668	--
Aset lain-lain/ *Other Asset*	277.012.295.332	--	--	--	--	277.012.295.332
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**42.137.792.713.529**	**6.005.166.419.036**	**4.919.122.577.025**	**4.775.961.879.164**	**26.160.529.542.972**	**277.012.295.332**

39. RISIKO LIKUIDITAS (LANJUTAN)

39. LIQUIDITY RISK (CONTINUED)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

The table below presents information on the mapping of financial assets and liabilities in a certain time scale (maturity buckets) based on the remaining term until maturity (remaining maturity) on December 31, 2025 and 2024: (continued)

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilities*						
Liablitas Segera/ *Liabilities due Immediately*	82.350.275.735	--	--	--	--	82.350.275.735
Simpanan dari Nasabah/ *Deposits from Customers*	33.853.210.992.138	23.418.118.856.290	6.907.896.886.177	3.457.907.413.572	69.287.836.099	--
Simpanan dari Bank Lain/ *Deposits from Other Bank*	1.075.658.295.068	828.291.332.758	224.266.962.310	23.100.000.000	--	--
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	23.991.677.262	626.683.151	--	--	23.364.994.111	--
Beban yang Masih Harus Dibayar / *Accrued Expense*	24.454.215.202	--	--	--	--	24.454.215.202
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	17.404.471.686	--	641.110.853	--	16.763.360.833	--
Liabilitas Lain-lain/ *Others Liabilities*	417.705.426.456	--	--	--	--	417.705.426.456
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**35.494.775.353.547**	**24.247.036.872.198**	**7.132.804.959.340**	**3.481.007.413.572**	**109.416.191.043**	**524.509.917.393**

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset Keuangan/ *Financial Assets*						
Kas / *Cash*	580.735.597.835	580.735.597.835	--	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia/ *Current Account with Bank Indonesia*	2.694.875.382.728	2.694.875.382.728	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain/ *Current Accounts with Other Banks*	45.087.137.075	45.087.137.075	--	--	--	--
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Placement with Bank Indonesia and Other Bank*	3.143.158.664.835	3.143.158.664.835	--	--	--	--
Efek-efek/*Marketable Securities*	9.760.077.271.692	432.986.196.836	3.533.886.735.189	3.398.237.897.390	2.394.966.442.277	--
Pinjaman yang Diberikan/ *Loans*	21.525.087.396.052	287.366.608.882	511.492.916.542	454.666.868.215	20.271.561.002.413	--
Aset lain-lain/ *Other Asset*	229.637.221.111	--	--	--	--	229.637.221.110
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**37.978.658.671.328**	**7.184.209.588.191**	**4.045.379.651.731**	**3.852.904.765.605**	**22.666.527.444.690**	**229.637.221.110**
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilities*						
Liablitas Segera/ *Liabilities due Immediately*	74.679.631.081	--	--	--	--	74.679.631.081
Simpanan dari Nasabah/ *Deposits from Customers*	32.167.791.208.809	24.853.653.118.669	2.711.305.439.899	1.682.636.750.831	2.920.195.899.410	--
Simpanan dari Bank Lain/ *Deposits from Other Bank*	661.691.987.042	491.930.024.732	156.661.962.310	--	13.100.000.000	--
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	24.433.647.846	626.683.151	--	--	23.806.964.695	--
Beban yang Masih Harus Dibayar / *Accrued Expense*	22.595.470.132	--	--	--	--	22.595.470.132
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	15.056.560.942	--	468.094.236	1.787.490.368	12.800.976.338	--
Liabilitas Lain-lain/ *Others Liabilities*	351.353.237.757	--	--	--	--	351.353.237.756
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**33.317.601.743.609**	**25.346.209.826.552**	**2.868.435.496.445**	**1.684.424.241.199**	**2.969.903.840.443**	**448.628.338.969**

40. RISIKO PASAR

Dalam rangka pengelolaan secara hati-hati atas layanan dan produk finansial yang semakin beragam sehingga profil risiko juga semakin tinggi Bank terus mengembangkan dan menyempurnakan infrastruktur sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan perubahan kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko pasar yang jelas, pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen yang handal serta meningkatkan fungsi kontrol dan pemantauan.

Risiko pasar mencakup:

a. Eksposur kredit, *treasury* maupun investasi terhadap volatilitas suku bunga.
b. Volatilitas nilai tukar *treasury* dan investasi.
c. Posisi Devisa Neto (PDN).

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

40. MARKET RISK

In order to manage financial services and products which are increasingly diverse, its became the higher risk profile of the Bank continues to develop and improve infrastructure in accordance with a predetermined framework. These activities include preparation and changes in policies and procedures, establishing limit of market risk, human resource development and information management systems that are reliable and to improve control and monitoring functions.

Market risk consist of:

a. Credit exposure, treasury and investment to interest rate volatility.
b. Exchange rate volatility on treasury and investment.
c. Net Open Position (NOP).

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember 2025 / December 31, 2025		31 Desember 2024 / December 31, 2024		
	Rupiah/ *Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange*	Rupiah/ *Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange*	
Aset					***Assets***
Giro pada Bank Lain	0,00% - 1,25%	0,00%	0,00% - 1,25%	0,00%	*Current Account with Other Bank*
Penempatan pada Bank					*Placements with Bank*
Indonesia dan Bank Lain :					*Indonesia and*
Pada Bank Lain					*Other Banks*
Deposit Facilities	0,00%	0,00%	5,25%	0,00%	*Deposit Facilities*
Interbank Call Money	4,25% - 4,82%	0,00%	6,38% - 6,53%	0,00%	*Interbank Call Money*
Deposito Berjangka	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*Time Deposits*
Tabungan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*Savings*
Efek - efek					*Marketable Securities*
SUN Seri FR 0042	10,25%	0,00%	10,25%	0,00%	*SUN Seri FR 0042*
SUN Seri FR 0045	9,75%	0,00%	9,75%	0,00%	*SUN Seri FR 0045*
SUN Seri FR 0081	6,50%	0,00%	6,50%	0,00%	*SUN Seri FR 0081*
SUN Seri VR 0033	-	0,00%	6,04%	0,00%	*SUN Seri VR 0033*
SUN Seri FR 0084	7,25%	0,00%	7,25%	0,00%	*SUN Seri FR 0084*
SUN Seri FR 0086	5,50%	0,00%	5,50%	0,00%	*SUN Seri FR 0086*
SUN Seri FR 0087	6,50%	0,00%			
SUN Seri FR 0090	5,13%	0,00%	5,125%	0,00%	*SUN Seri FR 0090*
SUN Seri FR 0095	6,38%	0,00%	6,375%	0,00%	*SUN Seri FR 0095*
SUN Seri FR 0101	6,88%	0,00%	6,875%	0,00%	*SUN Seri FR 0101*
SUN Seri FR 0103	6,75%	0,00%			*SUN Seri FR 0103*
SUN Seri FR 0104	6,50%	0,00%	6,50%	0,00%	*SUN Seri FR 0104*
SUN Seri FR 0108	6,50%	0,00%			*SUN Seri FR 0108*
SUN Seri FR 0109	5,88%	0,00%			*SUN Seri FR 0109*
PT BPD Jawa Timur Tbk	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	*PT BPD Jawa Timur Tbk*
PT Bank BTPN Tbk	7,00%	0,00%	7,00%	0,00%	*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	0,00%	0,00%	6,25%	0,00%	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri, Tbk	5.80% - 6.65%	0,00%	5,80% - 7,75%	0,00%	*PT Bank Mandiri, Tbk*
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	0,00%	0,00%	5,50%	0,00%	*PT Bank Tabungan Negara, Tbk*
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	0,00%	0,00%	6,35%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia, Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	0,00%	0,00%	6,35%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk*
PT Bank Mantap	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	*PT Bank Mantap*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia					*Securities Rupiah Bank Indonesia*
SRBI	4,62% - 7,25%	0,00%	6,81% - 7,53%	0,00%	*(SRBI)*
Efek-efek yang Dibeli dengan					*Marketable Securities Purchased*
Janji Dijual Kembali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*Under Resale Agreement*
Pinjaman yang diberikan	2,00% - 15,00%	0,00%	2,00% - 16,00%	0,00%	*Loans*
Liabilitas					***Liability***
Simpanan dari Nasabah					*Deposits from Customers*
Giro	0% - 1,90%	0% - 0,15%	0% - 1,90%	0% - 0.15%	*Current Account*
Tabungan	0% - 3,50%	0% - 0,20%	0% - 3.45%	0% - 0.20%	*Savings*
Deposito Berjangka	2,90% - 3,50%	0,20%	2,90% - 4,00%	0.20%	*Time Deposit*
Simpanan dari Bank Lain:					*Deposits from Other Bank*
Giro	0% - 1,90%	0,00%	0% - 1,90%	0,00%	*Current Account*
Tabungan	0% - 3,45%	0,00%	0% - 3,45%	0,00%	*Savings*
Deposito Berjangka	2,90% - 4,00%	0,00%	2,90% - 4,00%	0,00%	*Time Deposit*
Interbank Call Money	4,30% - 4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	*Interbank Call Money*
Pinjaman yang Diterima	0,50% - 6,75%	0,00%	0,50% - 6,75%	0,00%	*Borrowings*

Risiko nilai tukar timbul sebagai akibat adanya Posisi Devisa Neto (PDN) pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif baik pada sisi aset maupun liabilitas yang berasal dari transaksi produk-produk individual dan perusahaan dan dari perdagangan mata uang asing di pasar uang antar bank.

Exchange rate risk arising as a result of the Net Open Position (NOP) on the statement of financial position and administrative account on either the assets or liabilities resulting from transactions between individual and companies products and from money market foreign currency trading among the banks.

40. RISIKO PASAR (LANJUTAN)

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, Bank diwajibkan memelihara PDN setinggi-tingginya 20% atas modal *tier* I dan *tier* II. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

Berikut adalah PDN Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 per mata uang (dalam ekuivalen rupiah) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia:

40. MARKET RISK (CONTINUED)

In accordance to Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated July 15, 2004 as last amended by Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010, the Bank is required to maintain NOP maximum of 20% on capital tier I and tier II. NOP as a whole is a number that is the sum of the absolute value of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency plus the net difference between bills and liabilities which are either commitments or contingencies in the administrative account for each foreign currency.

On December 31, 2025 and 2024 the Bank's NOP (the rupiah equivalent) in accordance with Bank Indonesia Regulation:

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*			
	Asset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liability***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Mata Uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				*Currencies Aggregate (Statement of Financial Position and Off Balance Sheet)*
Dolar Amerika Serikat	33.471	3.697	29.774	*United States Dollar*
Jumlah Modal			5.560.358	*Total Capital*
Posisi Devisa Neto (PDN)			0,54%	*Net Open Position (NOP)*

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*			
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liability***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Mata Uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				*Currencies Aggregate (Statement of Financial Position and Off Balance Sheet)*
Dolar Amerika Serikat	31.719	3.849	27.870	*United States Dollar*
Jumlah Modal			4.541.874	*Total Capital*
Posisi Devisa Neto (PDN)			0,61%	*Net Open Position (NOP)*

Sehubungan dengan aktivitas Bank sebagai PPE-EBUS, Bank terekspos pada risiko fluktuasi harga obligasi dan suku bunga. Bank memitigasi risiko ini dengan menetapkan batasan (*limit*) transaksi harian, *limit stop-loss*, serta melakukan valuation harian atas portofolio *trading* (kepentingan sendiri). Untuk transaksi nasabah, risiko pasar ditanggung oleh nasabah, namun Bank memitigasi risiko penyelesaian (*settlement risk*) dan risiko operasional.

Due to the Bank's activities as a PPE-EBUS, the Bank is exposed to the risk of bond price fluctuations and interest rates. The Bank mitigates this risk by setting daily transaction limits, stop-loss limits, and conducting daily valuations of its trading portfolio (for its own benefit). For customer transactions, market risk is borne by the customer, but the Bank mitigates settlement and operational risks.

41. RISIKO OPERASIONAL

Bank menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan di bidang manajemen risiko operasional selama tahun 2025. Keberhasilan manajemen risiko ini merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas operasional guna mendorong pertumbuhan bisnis.

Manajemen risiko operasional mencakup bidang yang luas, yakni meliputi proses rekonsiliasi, proses pencegahan dan penanganan kejahatan Bank, penanganan keluhan nasabah, perencanaan kesinambungan bisnis, pengembangan pengetahuan karyawan dalam bidang risiko operasional serta proses evaluasi bagi produk, jenis transaksi, pengembangan produk, pola transaksi maupun sistem teknologi.

Risiko operasional mencakup:
- Sistem administrasi kredit, *treasury* maupun investasi,
- Kesalahan akuntansi,
- Kecurangan,
- *Force majeur,*
- Hubungan dengan debitur,
- Kegagalan sistem.

41. OPERATIONAL RISK

The Bank consider with operational risk management during 2025. The success of this risk management is a very important role in supporting efforts to improve the quantity and quality of operations to encourage business growth.

Operational risk management covering the reconciliation process, the Bank prevention process and handling the crime, handling customer complaints, business continuity planning, developing employee knowledge in operational risk and evaluation process for the product, transaction type, product development, the transactions pattern or technology systems.

Operational risk consist of:
- *Loan administrative, treasury and investment administration system*
- *Accounting Error,*
- *Fraud,*
- *Force majeur,*
- *Relationship with debtor,*
- *System failure.*

42. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Bank BPD Bali mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan dan proses dari tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

42. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Bank BPD Bali's manages its capital structure and makes adjustments to it in the light of changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. No changes were made in the objectives, policies and processes from the previous period.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has complied with all capital requirements.

42. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (LANJUTAN)

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum *(Capital Adequacy Ratio (CAR))* adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko *(Risk - Weighted Assets (RWA))*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 dan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak 1 Juli 2020, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

42. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CONTINUED)

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Financial Services Authority Regulation, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 and OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of July 1, 2020, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.

The capital adequacy ratio as of December 31, 2025 and 2024 are as follows (in million of rupiah):

	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Aset Tertimbang Menurut Risiko			***Risk Weight Asset***
Risiko Kredit	17.739.958	15.945.083	*Credit Risk*
Risiko Pasar	39.474	36.951	*Market Risk*
Risiko Operasional	1.375.093	1.238.086	*Operational Risk*
Modal			***Capital***
Modal Inti	5.389.740	4.526.744	*Core Capital*
Modal Pelengkap	222.412	199.618	*Supplementary Capital*
Jumlah Modal	5.612.152	4.726.362	*Total Capital*

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	**31 Desember 2024 / *December 31, 2024***	
Dengan memperhitungkan risiko kredit tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar dan risiko operasional	31,64%	29,64%	*Calculating the credit risk but without market risk and operational risk*
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar tetapi tanpa memperhitungkan risiko operasional	31,57%	29,57%	*Calculating the credit risk and and market risk but without operational risk*
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar	29,36%	27,51%	*Calculating the credit risk and operational risk but without market risk*
Dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	29,30%	27,45%	*Calculating the credit risk, market risk, and operational risk*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan			*The minimum capital requirement ratio required by Financial Service Authority*
Pilar 1	8,00%	8,00%	*Tier 1*
Pilar 2	9,25%	9,21%	*Tier 2*

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 3,5% dan 4,25% Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perpu No. 3/2008 menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

43. GOVERNMENT GUARANTEE FOR PAYMENT LIABILITY OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, which was effective on September 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation No. 3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008.

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, the amount of such guarantee being subject to change if the situation complies with certain valid criteria.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008 dated October 13, 2008 concerning the Amount of Deposits Guaranteed by the Deposit Guarantee Institution, then on December 31, 2025 and 2024, total deposits guaranteed by LPS are deposits of up to Rp2,000,000,000 for each customer per bank. Customer deposits are guaranteed only if the interest rates are equal to or below 3.5% and 4.25% As of December 31, 2025 and 2024.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia stipulated Perpu No. 3/2008 to become a law.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank is a member of government guarantee programs.

44. LABA PER SAHAM / 44. EARNINGS PER SHARE

Laba tahun berjalan per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares of outstanding common stock during the related year.

	31 Desember 2025 / December 31, 2025	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Laba untuk perhitungan laba per saham	1.101.471.094.577	878.465.741.226	*Income for computation of earnings per share*
Rata-rata tertimbang total saham	2.721.427	2.135.735	*Weighted average number of shares*
Laba per saham (dalam rupiah penuh)	404.740	411.318	*Earnings per share*

45. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS / 45. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	1 Januari 2025 / January 1, 2025	Arus Kas / Cash Flow	Lain-lain / Others	31 Desember 2025 / December 31, 2025	
Pinjaman yang diterima	24.433.647.846	(441.970.584)	-	23.991.677.262	*Borrowings*
Liabilitas sewa	15.056.560.942	(21.311.933.334)	23.659.844.078	17.404.471.686	*Lease liabilities*
Jumlah	39.490.208.788	(21.753.903.918)	23.659.844.078	41.396.148.948	*Total*

	1 Januari 2024 / January 1, 2024	Arus Kas / Cash Flow	Lain-lain / Others	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Pinjaman yang diterima	66.730.442.083	(42.296.794.237)	-	24.433.647.846	*Borrowings*
Liabilitas sewa	13.576.233.846	(9.624.383.458)	11.104.710.554	15.056.560.942	*Lease liabilities*
Jumlah	80.306.675.929	(51.921.177.695)	11.104.710.554	39.490.208.788	*Total*

46. REKLASIFIKASI / 46. RECLASSIFICATION

Laporan keuangan 2024 telah direklasifikasi agar konsisten dengan penyajian laporan keuangan 2025. Rincian akun-akun yang direklasifikasi:

The 2024 financial statements have been reclassified to be consistent with the presentation of the 2025 financial statements. Details of the reclassified accounts:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024		
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassfication
Arus kas dari aktivitas operasi / *Cash flows from operating activities*			
Pembayaran Beban Umum dan administrasi / *Payments of General and Administrative Expense*	(335.377.771.154)	13.796.918.693	(321.580.852.461)
Arus kas dari aktivitas investasi / *Cash flows from investing activities*		-	-
Pembayaran Aset Hak Guna *Payment of Right-of-Use Assets*	(5.814.479.499)	(4.172.535.235)	(9.987.014.734)
Arus kas dari aktivitas pendanaan / *Cash flows from financing activities*		-	-
Pembayaran Liabiltas Sewa *Payments of Lease Liabilities*	-	(9.624.383.458)	(9.624.383.458)

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN / 47. SIGNIFICANT CONTRACTS

Bank memiliki perikatan-perikatan yang signifikan dan penting pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Bank has significant engagements As of December 31, 2025 and 2024 as follows:

a. Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Tunas Jaya Sanur terkait dengan Jasa Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat dengan perjanjian No. 1216/SPK/DIR/UMA/2025 (PPP) - 156/SPK/BPD-TJS/IX/2025 (Penyedia) tanggal 12 September 2025.

a. *The Bank signed a cooperation agreement with PT Tunas Jaya Sanur regarding Construction Services for the Construction of the Head Office Building with agreement No. 1216/SPK/DIR/UMA/2025 (PPP) - 156/SPK/BPD-TJS/IX/2025 (Provider) dated September 12, 2025.*

b. Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Ciriajasa Cipta Mandiri Gedung Narada Karya, KSO terkait dengan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi untuk pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Pusat dengan perjanjian No. 1622/SPK/DIR/UMA/2024 (PPP) - 005/PRJ/CCMG-NK/BPDB/12/2024 (Penyedia) tanggal 31 Desember 2024.

b. *The Bank signed a Cooperation Agreement with PT Ciriajasa Cipta Mandiri Gedung Narada Karya, KSO related to Construction Management Consultant Services for the construction work of the Head Office Building with agreement No. 1622/SPK/DIR/UMA/2024 (PPP) - 005/PRJ/CCMG-NK/BPDB/12/2024 (Provider) dated December 31, 2024.*

c. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Dalung terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0093/SPK/DJA/2025 - 22/LPD.DL/I/2025.

c. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Dalung Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0093/SPK/DJA/2025 - 22/LPD.DL/I/2025.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gulingan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0095/SPK/DJA/2025 - 139/LPD.DA.GL/I/2025.

e. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kapal terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0094/SPK/DJA/2025 - 02/LPD/D.A.K/I/2025.

f. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kerobokan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0090/SPK/DJA/2025 - 08/SK/LPD-DAK/I/2025.

g. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kwanji terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0084/SPK/DJA/2025 - 043/LPF.KW/I/2025.

h. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Mengwi terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0096/SPK/DJA/2025 - 11/Um/LPD.1.02/2025.

i. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padang Luwih terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0086/SPK/DJA/2025 - K.098/LPD.PL.1/2025.

j. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padonan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0092/SPK/DJA/2025 - 12/LPD-PDN/1/2025.

k. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Penarungan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0087/SPK/DJA/2025 - 25/LPD-DAP/I/2025.

l. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sempidi terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0098/SPK/DJA/2025 - 086/UM.LPD.SPD/I/2025.

m. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Lambing Mekar Bhuana terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0097/SPK/DJA/2025 - 020/LPD/I/2025.

n. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Seseh terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0088/SPK/DJA/2025 - 21/LPDDASSH/I/2025.

o. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sibang Kaja terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0085/SPK/DJA/2025 - 09/LPD-SBK/I/2025.

p. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tandeg terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0091/SPK/DJA/2025 - 005/LPD-TDG/I/2025.

q. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tegal terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0083/SPK/DJA/2025 - 001/PKS/LPD-T/I/2025.

r. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tuka terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0089/SPK/DJA/2025 - 006/LPD/DA.TK/I/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

d. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Gulingan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0095/SPK/DJA/2025 - 139/LPD.DA.GL/I/2025.*

e. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kapal Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0094/SPK/DJA/2025 - 02/LPD/D.A.K/I/2025.*

f. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kerobokan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0090/SPK/DJA/2025 - 08/SK/LPD-DAK/I/2025.*

g. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kwanji Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0084/SPK/DJA/2025 - 043/LPF.KW/I/2025.*

h. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Mengwi Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0096/SPK/DJA/2025 - 11/Um/LPD.1.02/2025.*

i. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Padang Luwih Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0086/SPK/DJA/2025 - K.098/LPD.PL.1/2025.*

j. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Padonan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0092/SPK/DJA/2025 - 12/LPD-PDN/1/2025.*

k. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Penarungan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0087/SPK/DJA/2025 - 25/LPD-DAP/I/2025.*

l. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Sempidi Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0098/SPK/DJA/2025 - 086/UM.LPD.SPD/I/2025.*

m. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Lambing Mekar Bhuana Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0097/SPK/DJA/2025 - 020/LPD/I/2025.*

n. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Seseh Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0088/SPK/DJA/2025 - 21/LPDDASSH/I/2025.*

o. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Sibang Kaja Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0085/SPK/DJA/2025 - 09/LPD-SBK/I/2025.*

p. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Tandeg Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0091/SPK/DJA/2025 - 005/LPD-TDG/I/2025.*

q. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Tegal Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0083/SPK/DJA/2025 - 001/PKS/LPD-T/I/2025.*

r. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Tuka Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0089/SPK/DJA/2025 - 006/LPD/DA.TK/I/2025.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

s. Pada tanggal 14 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana terkait dengan Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Serta Integrasi Sistem Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan perjanjian No. 009/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/03/PKS/PEM/2025.

t. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Denpasar terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0137/SPK/DJA/2025 - 005/LPD/DADps/I/2025.

u. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Peguyangan terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0142/SPK/DJA/2025 - 018/LPD-P/I/2025.

v. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kepaon terkait dengan penyediaan *Layanan Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0140/SPK/DJA/2025 - 03/LPDK/I/2025.

w. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Pakraman Ubung terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0138/SPK/DJA/2025 - 16/DP.4/LPD.U/I.2025.

x. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sidakarya terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0139/SPK/DJA/2025 - 03/LPD/DAS/I/2025.

y. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pohgading terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0141/SPK/DJA/2025 - 08/LPD-PG/I/2025.

z. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bale Agung terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0154/SPK/DJA/2025 - 358/LPD - DABAK/I/2025.

aa. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bedha terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0151/SPK/DJA/2025 - 006/LPD.DAB/I/2025.

ab. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Beraban terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0149/SPK/DJA/2025 - 004/LPD/I/2025.

ac. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Cepik terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0156/SPK/DJA/2025 - 05/I/LPD-C/2025.

ad. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gunung Kangin terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0155/SPK/DJA/2025 - 063/LPD.DA.GK/01/2025.

ae. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kaba Kaba terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0150/SPK/DJA/2025 - 0018/LPD/KB/I/2025.

af. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Perean terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0153/SPK/DJA/2025 - 18/LPD-DAP/1/2025.

ag. Pada tanggal 16 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tunjuk terkait dengan penyediaan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan perjanjian No. 0152/SPK/DJA/2025 - 08/LPD/T/I/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

s. *On January 14, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Jembrana Regency Government Regarding the the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems with agreement No. 009/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/03/PKS/PEM/2025.*

t. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Denpasar Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0137/SPK/DJA/2025 - 005/LPD/DADps/I/2025.*

u. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Peguyangan Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0142/SPK/DJA/2025 - 018/LPD-P/I/2025.*

v. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kepaon Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0140/SPK/DJA/2025 - 03/LPDK/I/2025.*

w. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Ubung Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0138/SPK/DJA/2025 - 16/DP.4/LPD.U/I.2025.*

x. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Sidakarya Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0139/SPK/DJA/2025 - 03/LPD/DAS/I/2025.*

y. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Pohgading Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0141/SPK/DJA/2025 - 08/LPD-PG/I/2025.*

z. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Bale Agung Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0154/SPK/DJA/2025 - 358/LPD - DABAK/I/2025.*

aa. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Bedha Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0151/SPK/DJA/2025 - 006/LPD.DAB/I/2025.*

ab. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Beraban Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0149/SPK/DJA/2025 - 004/LPD/I/2025.*

ac. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Cepik Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0156/SPK/DJA/2025 - 05/I/LPD-C/2025.*

ad. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Gunung Kangin Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0155/SPK/DJA/2025 - 063/LPD.DA.GK/01/2025.*

ae. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Kaba Kaba Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0150/SPK/DJA/2025 - 0018/LPD/KB/I/2025.*

af. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Perean Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0153/SPK/DJA/2025 - 18/LPD-DAP/1/2025.*

ag. *On January 16, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with The LPD of Tunjuk Traditional Village Regarding the Technical Assistance of Bank BPD Bali through Open API Service Integration with agreement No. 0152/SPK/DJA/2025 - 08/LPD/T/I/2025.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

ah. Pada tanggal 30 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terkait dengan penyediaan Integrasi Sistem Aplikasi Pembayaran (*Payment System*) dengan perjanjian No. 100,3,7/0221/RSUD/I/2025 - 0217/SPK/DIR/DJA/2025.

ai. Pada tanggal 22 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangli terkait dengan penyediaan Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Serta Integrasi Sistem Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan perjanjian No. 100.3.7.1/04/PKS/PEM/2025 - 0076/SPK/DIR/DJA/2025.

aj. Pada tanggal 23 Januari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dengan perjanjian No. PRJ-18/PB/2025 - 0089/SPK/DIR/DJA/2025.

ak. Pada tanggal 3 Februari 2025 Bank menandatangani Addendum dengan Institut Seni Indonesia Denpasar terkait dengan penyediaan Layanan Penerimaan dan Pengelolaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Pembayaran Lainnya dengan perjanjian No. 1259/IT5/LP.00.01/2025 - 0253/SPK/DIR/DJA/2025.

al. Pada tanggal 5 Februari 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana terkait dengan Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No. 19/Perumda/PKS/II/2024 - 0147/SPK/DIR/DJA/2024.

am Pada tanggal 17 Februari 2025 Bank menandatangani Addendum dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia terkait dengan Integrasi Sistem Aplikasi Pembayaran (*Payment System*) dengan perjanjian No. 100.3.7.1/138.1/II/2025 - 0309/SPK/DIR/DJA/2025.

an. Pada tanggal 20 Maret 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan penyediaan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Menjelang Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung dengan perjanjian No. 000.4.7.2/304/DINSOS - 0465 /SPK/DIR/DJA/2025.

ao. Pada tanggal 21 Maret 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Bali terkait dengan penyediaan Invenstasi Jangka Pendek (Deposito) Politeknik Negeri Bali Tahun 2025 dengan perjanjian No. 04198/PL8/KS/2025 - 0466/SPK/DIR/DJA/2025.

ap. Pada tanggal 01 April 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Finnet Indonesia terkait dengan Distribusi Dan Penjualan Produk Telkomsel dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor Amd.593/LG.05/SL-00/IV/2025 - 023U/ADD-PKS-002/FINNET-01/VI/2025 0500/SPK/DIR/DJA/2025.

aq. Pada tanggal 17 April 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan penyediaan Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Secara *Online* Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan perjanjian No. 900.1.13.2/1528/Keuda - 0538/SPK/DIR/DJA/2025.

ar. Pada tanggal 22 Mei 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terkait dengan Integrasi Sistem Aplikasi Pembayaran (*Payment System*) dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 2826/UN48/KU/2025 - 0667/SPK/DIR/DJA/2025.

as. Pada tanggal 3 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Daerah Mangusada terkait dengan penyediaan Layanan Transaksi Perbankan Penerimaan Tagihan Pasien Rumah Sakit Daerah Mangusada Dengan Sistem Terintegrasi (*Online System*) dengan perjanjian No. 0309/SPK/DIR/DJA/2025 - 000,4,7,2/5591/RSDM/2025.

at. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sempidi terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 086/UM.LPD.SPD/I/2025/PIHAK KEDUA -0098/SPK/DJA/2025/PIHAK PERTAMA.

au. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Seseh terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 21/LPDDASSH/I/2025/Pihak Kedua) - 0088/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

ah. *On January 30, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Buleleng Regency General Hospital Regarding the Integration of Payment Application System with agreement No. 100,3,7/0221/RSUD/I/2025 - 0217/SPK/DIR/DJA/2025.*

ai. *On January 22, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Government of Bangli Regency regarding the provision of Banking Service Systems, the Development and Enhancement of Information Systems, as well as the Integration of Regional Revenue Management Systems, under agreement No. 100.3.7.1/04/PKS/PEM/2025 - 0076/SPK/DIR/DJA/2025.*

aj. *On January 23, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Regional Financial Development of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia regarding State Cash Management with agreement No. PRJ-18/PB/2025 - 0089/SPK/DIR/DJA/2025.*

ak. *On February 3, 2025, the Bank signed addendum with Indonesian Institute of the Arts Denpasar Regarding the Services for Receiving and Managing Single Tuition Fee Payments and Other Payments with agreement No. 1259/IT5/LP.00.01/2025 - 0253/SPK/DIR/DJA/2025.*

al. *On February 5, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Regional Public Drinking Water Company Tirta Amertha Jati, Jembrana Regency regarding the Electronic Drinking Water Bill Payment Receipt Service and Other Bills with agreement No. 19/Perumda/PKS/II/2024 - 0147/SPK/DIR/DJA/2024.*

a On February 17, 2025, the Bank signed an Addendum with Tangguwisia Regional General Hospital regarding the Integration of Payment Application System (Payment System) with agreement No. 100.3.7.1/138.1/II/2025 -0309/SPK/DIR/DJA/2025.

an. *On March 20, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Badung Regency Government regarding the Distribution of Social Assistance in the Form of Money Ahead of Religious Holidays in Badung Regency with Cooperation Agreement Number 000.4.7.2/304/DINSOS-0465/SPK/DIR/DJA/2025.*

ao. *On March 21, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Politeknik Negeri Bali Regarding the Short-Term Investment (Deposit) of Politeknik Negeri Bali in 2025 with agreement No. 04198/PL8/KS/2025 - 0466/SPK/DIR/DJA/2025.*

ap. *On April 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Finnet Indonesia regarding the Distribution and Sales of Telkomsel Products with Cooperation Agreement Number Amd.593/LG.05/SL-00/IV/2025 - 023U/ADD-PKS-002/FINNET-01/VI/2025 0500/SPK/DIR/DJA/2025.*

aq. *On April 17, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Directorate General of Regional Financial Development, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia Regarding the Implementation of Online Fund Disbursement Order (SP2D) through the Regional Government Information System (SIPD) Application with agreement No. 900.1.13.2/1528/Keuda - 0538/SPK/DIR/DJA/2025.*

ar. *On May 22, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with Ganesha University of Education (Undiksha) regarding the Integration of Payment Application Systems (Payment System) with Cooperation Agreement Number 2826/UN48/KU/2025 - 0667/SPK/DIR/DJA/2025.*

as. *On June 3, 2025, the Bank signed a cooperation agreement with Mangusada Regional Hospital Regarding the Banking Transaction Services for Patient Billing Collection at Mangusada Regional Hospital through an Integrated Online System with agreement No. 0309/SPK/DIR/DJA/2025 - 000,4,7,2/5591/RSDM/2025.*

at. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sempidi Traditional Village regarding Bank BPD Bali's Technical Assistance Services through Open API Service Integration, with Cooperation Agreement Number 086/UM.LPD.SPD/I/2025/SECOND PARTY - 0098/SPK/DJA/2025/FIRST PARTY.*

au. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Seseh Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 21/LPDDASSH/I/2025/Second Party) - 0088/SPK/DJA/2025/First Party.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

av. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tuka terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 006/LPD/DA.TK/I/2025/Pihak Kedua - (0089/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).

aw Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padang Luwih terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor K.098/LPD.PL.1/2025/Pihak Kedua - (0086/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).

ax. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Penarungan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 25/LPD-DAP/1/2025/Pihak Kedua - 0087/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).

ay. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Mengwi terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 11/Um/LPD.1.02./2025 - 0096/SPK/DJA/2025.

az. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sibang Kaja terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 09/LPD-SBK/I/2025/Pihak Kedua - 0085/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.

ba. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kwanji terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (043/LPF.KW/I/2025/Pihak Kedua - 0084/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).

bb. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gulingan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 139/LPD.DA.GL/I/2025/Pihak Kedua - 0095/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.

bc. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kapal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/LPD/D.A.K/1/2025/Pihak Kedua - 0094/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.

bd. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Dalung terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (22/LPD.DL/1/2025/Pihak Kedua) - 0093/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama.

be. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padonan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 12/LPD-PDN/1/2025/Pihak Kedua - 0092/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).

bf. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tegal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (001/PKS/LPD-T/I/2025/) - (0083/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).

bg. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kerobokan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (08/SK/LPD-DAK/1/2025/Pihak Kedua) - (0090/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).

bh. Pada tanggal 06 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tandeg terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (005/LPD-TDG/1/2025/Pihak Kedua)-(0091/SPK/DJA/2025/Pihak Pertama).

bi. Pada tanggal 16 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Udayana terkait dengan Pemanfatan Fasilitas Perbankan Dalam Mendukung Penguatan Kelembagaan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 0812 /SPK/DIR/DJA/2025 - B/76/UN14/HK.07.00/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

av. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tuka Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 006/LPD/DA.TK/I/2025/Second Party - (0089/SPK/DJA/2025/First Party).*

aw *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padang Luwih Traditional Village regarding Technical Assistance Services for Bank BPD Bali through Open API Service Integration, with Cooperation Agreement Number K.098/LPD.PL.1/2025/Second Party - (0086/SPK/DJA/2025/First Party).*

ax. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Penarungan Traditional Village LPD regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 25/LPD-DAP/1/2025/Second Party - 0087/SPK/DJA/2025/First Party).*

ay. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Mengwi Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 11/Um/LPD.1.02./2025 - 0096/SPK/DJA/2025.*

az. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sibang Kaja Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 09/LPD-SBK/I/2025/Second Party - 0085/SPK/DJA/2025/First Party.*

ba. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kwanji Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (043/LPF.KW/I/2025/Second Party - 0084/SPK/DJA/2025/First Party).*

bb. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gulingan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 139/LPD.DA.GL/I/2025/Second Party - 0095/SPK/DJA/2025/First Party.*

bc. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kapal Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 02/LPD/D.A.K/1/2025/Second Party - 0094/SPK/DJA/2025/First Party.*

bd. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Dalung Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (22/LPD.DL/1/2025/Second Party) - 0093/SPK/DJA/2025/First Party.*

be. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padonan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 12/LPD-PDN/1/2025/Second Party - 0092/SPK/DJA/2025/First Party).*

bf. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tegal Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (001/PKS/LPD-T/I/2025/) - (0083/SPK/DJA/2025/First Party).*

bg. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kerobokan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (08/SK/LPD-DAK/1/2025/Second Party) - (0090/SPK/DJA/2025/First Party).*

bh. *On June 6, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tandeg Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (005/LPD-TDG/1/2025/Second Party)-(0091/SPK/DJA/2025/First Party).*

bi. *On June 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with Udayana University regarding the Utilization of Banking Facilities in Supporting Institutional Strengthening with Cooperation Agreement Number 0812 /SPK/DIR/DJA/2025 - B/76/UN14/HK.07.00/2025.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

bj. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bondalem terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/LPD/DAB/05/2025 - 0693/SPK/DJA/2025.

bk. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bangkah terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 35/LPD/DS Adat/BNK/V/2025 - 0695/SPK/DJA/2025.

bl. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Ekasari terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 28/LPD.E/VI/2025 - 0689/SPK/DJA/BDE./2025.

bm Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Dauhwaru terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 43/LPD.DW/VI/2025 - 0684 SPK/DJA/BDF./2025.

bn. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Nusasari terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 15/LPD/NS/VI/2025 - 0688/SPK/DJA/BDE/2025.

bo. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pohsanten terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 33/LPD-Pst/V/2025 - 0683/SPK/DJA/BDE/2025.

bp. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Banyubiru terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 253/LPD.DA BBR/VI/2025 - 0687 SPK/DJA/BDF/2025.

bq. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Yehembang Kangin terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 14/II.A/LPDYK/V/2025 - 0690 SPK/DJA/BDF./2025.

br. Pada tanggal 24 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Asah Duren terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 14/SPK/BPD -LPD/VI/2025 - 0685 SPK/DJA/BDE/2025.

bs. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sumberkima terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 306/LPD/SBK/2025 - 0697/SPK/DJA/2025.

bt. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pejarakan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 66/LPD.PJR/VI/2025 - 0696/SPK/DJA/2025.

bu. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Terbuka terkait dengan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi Dan Layanan Perbankan dengan Nota Kesepahaman Nomor 664/UN31/HK.08.00/2025 - 0882/SPK/DIR/DJA/2025.

bv. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Jero Kuta terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 042/LPD/ PASKB/V/2025 - 0617/SPK/DJA/2025.

bw Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Ketewel terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 181/LPDDAK/V/2025 - 0 613/SPWDJA/2025.

bx. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sukawati terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 029/40/DASN/2025 - 0 616/SPWDJA/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

bj. *On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Bondalem Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 02/LPD/DAB/05/2025 - 0693/SPK/DJA/2025.*

bk. *On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Bangkah Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 35/LPD/DS Adat/BNK/V/2025 - 0695/SPK/DJA/2025.*

bl. *On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Ekasari Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 28/LPD.E/VI/2025 - 0689/SPK/DJA/BDE./2025.*

bm *On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Dauhwaru Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 43/LPD.DW/VI/2025 - 0684 SPK/DJA/BDF./2025.*

bn. *On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Nusasari Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 15/LPD/NS/VI/2025 - 0688/SPK/DJA/BDE/2025.*

bo. *On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pohsanten Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 33/LPD-Pst/V/2025 - 0683/SPK/DJA/BDE/2025.*

bp. *On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Banyubiru Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 253/LPD.DA BBR/VI/2025 - 0687 SPK/DJA/BDF/2025.*

bq. *On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Yehembang Kangin Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 14/II.A/LPDYK/V/2025 - 0690 SPK/DJA/BDF./2025.*

br. *On June 24, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Asah Duren Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 14/SPK/BPD - LPD/VI/2025 - 0685 SPK/DJA/BDE/2025.*

bs. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sumberkima Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 306/LPD/SBK/2025 - 0697/SPK/DJA/2025.*

bt. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pejarakan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 66/LPD.PJR/VI/2025 - 0696/SPK/DJA/2025.*

bu. *On June 30, 2025, the Bank signed a Memorandum of Understanding with the Universitas Terbuka regarding the Cooperation of the Tridharma of Higher Education and Banking Services with Memorandum of Understanding Number 664/UN31/HK.08.00/2025 - 0882/SPK/DIR/DJA/2025.*

bv. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Jero Kuta Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 042/LPD/PASKB/V/2025 - 0617/SPK/DJA/2025.*

bw *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Ketewel Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 181/LPDDAK/V/2025 - 0 613/SPWDJA/2025.*

bx. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sukawati Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 029/40/DASN/2025 - 0 616/SPWDJA/2025.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

by. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Teruna terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/UPO.DAT/ ADD. BPD/V/2025 - 0614/SPK/DJA/2025.

bz. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Cemenggaon terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 06/LPD.e/V/2025 - 0 619 /SPWDJA/2025.

ca. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Celuk terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 124/UM.8/LPD.ELKV/2025 - 0618/SPK/DJA/2025.

cb. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Batur terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/LPD.DAB/VI/2025 - 0653/SPK/DJA/2025.

cc. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pulesari terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 20/LPD.PLS/VI/2025 - 0652/SPK/DJA/2025.

cd. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Metra terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 46/LPD/M/VI/2025 - 0651/SPK/DJA/2025.

ce. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kebon terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 47/LPD/K/VI/2025 - 0631/SPK/DJA/2025.

cf. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Serai Kembangmerta terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 010/LPD.SK/VI/2025 - 0654/SPK/DJA/2025.

cg. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pengotan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 036/SPKS/LPDP/VI/2025 - 0629/SPK/DJA/2025.

ch. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Palaktiying terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 44/LPD/PLT/VI/2025 - 0630/SPK/DJA/2025.

ci. Pada tanggal 30 Juni 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Terbuka terkait dengan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi Dan Layanan Perbankan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 664/UN31/HK.08.00/2025 - 0882/SPK/DIR/DJA/2025.

cj. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kepaon terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 13/LPDK//VI/2025 - 0640/SPK/DJA/2025.

ck. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Ubung terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 94/DP.4/LPD.U/VI.2025 - 0638/SPK/DJA/2025.

cl. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Pohgading terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 38/LPD-PG/V/2025 - 0641/SPK/DJA/2025.

cm Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Peguyangan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 089/LPD-P/VI/2025 - 0642/SPK/DJA/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

by. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Adat Teruna regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 01/UPO.DAT/ADD. BPD/V/2025 - 0614/SPK/DJA/2025.*

bz. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Cemenggaon Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 06/LPD.e/V/2025 - 0 619/SPWDJA/2025.*

ca. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Celuk Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 124/UM.8/LPD.ELKV/2025 - 0618/SPK/DJA/2025.*

cb. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Batur Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 001/LPD.DAB/VI/2025 - 0653/SPK/DJA/2025.*

cc. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pulesari Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 20/LPD.PLS/VI/2025 - 0652/SPK/DJA/2025.*

cd. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Metra Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 46/LPD/M/VI/2025 - 0651/SPK/DJA/2025.*

ce. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kebon Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 47/LPD/K/VI/2025 - 0631/SPK/DJA/2025.*

cf. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Serai Kembangmerta Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 010/LPD.SK/VI/2025 - 0654/SPK/DJA/2025.*

cg. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pengotan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 036/SPKS/LPDP/VI/2025 - 0629/SPK/DJA/2025.*

ch. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Palaktiying Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 44/LPD/PLT/VI/2025 - 0630/SPK/DJA/2025.*

ci. *On June 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Universitas Terbuka regarding the Cooperation of the Tridharma of Higher Education and Banking Services with Cooperation Agreement Number 664/UN31/HK.08.00/2025 - 0882/SPK/DIR/DJA/2025.*

cj. *On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kepaon Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 13/LPDK//VI/2025 - 0640/SPK/DJA/2025.*

ck. *On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Ubung Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 94/DP.4/LPD.U/VI.2025 - 0638/SPK/DJA/2025.*

cl. *On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Pohgading Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 38/LPD-PG/V/2025 - 0641/SPK/DJA/2025.*

cm *On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Peguyangan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 089/LPD-P/VI/2025 - 0642/SPK/DJA/2025.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

cn. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Denpasar terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 069/LPD/DADps/VI/2025 - 0656/SPK/DJA/2025.

co. Pada tanggal 02 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sidakarya terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 19/LPD/DAS/VI/2025 - (0639/SPK/DJA/2025.

cp. Pada tanggal 03 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Telekomunikasi Selular Dan PT Finnet Indonesia terkait dengan Distribusi Dan Penjualan Produk Telkomsel dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 0887/SPK/DIR/DJA/2025 - 002Y/PKS-002/FINNET-000/VIII/2025 - PKS.807/LG.05/SL-OO/V/2025.

cq. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Pekraman Kesiman terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 107a/LPD-Ksm./XI/2024 - 1391/SPK/DJA/BDE/2024.

cr. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Sanur terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor III / LPD / I / DAS / 2025 - 0146/SPK/DJA/BDE/2025.

cs. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Pakraman Renon terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor (008/LPD-RN/1/2025 - 0144/SPK/DJA/BDE/2025.

ct. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Pakraman Panjer terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/LPD-PJ/1/2025 - 0145/SPK/DJA/BDE/2025.

cu. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Penyaringan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 005/LPD-DPP/V/2025 - 655/SPK/DJA/BDE/2025.

cv. Pada tanggal 16 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tanjung Bungkak terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 004/LPD-TB/V/2025 - 656/SPK/DJA/BDE/2025.

cw. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padangtegal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 048/LPD-PT/V/2025 - 0623/SPWDJA/2025 - 0624/SPWDJA/2025.

cx. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sebatu terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 19/LPD/V/LPDS/2025 - 0624/SPWDJA/2025.

cy. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Talepud terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 09/LPD/DAT/V/2025 - 0621/SPWDJA/2025.

cz. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Ubud terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 08/LPDU/V/2025 - 0625/SPWDJA/2025.

da. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Mas terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 25/LPD/DAM/V/2025 - 0626/SPWDJA/2025.

db. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Peliatan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 70A/LPD.PLT/UM/V/2025 - 0628/SPWDJA/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

cn. *On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Denpasar Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 069/LPD/DADps/VI/2025 - 0656/SPK/DJA/2025.*

co. *On July 2, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sidakarya Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 19/LPD/DAS/VI/2025 - (0639/SPK/DJA/2025.*

cp. *On July 3, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Telekomunikasi Selular and PT Finnet Indonesia regarding the Distribution and Sales of Telkomsel Products with Cooperation Agreement Number 0887/SPK/DIR/DJA/2025 - 002Y/PKS-002/FINNET-000/VIII/2025 - PKS.807/LG.05/SL-OO/V/2025.*

cq. *On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kesiman Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 107a/LPD-Ksm./XI/2024 - 1391/SPK/DJA/BDE/2024.*

cr. *On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Sanur regarding Bank BPD Bali's Technical Assistance Services Through Open API Service Integration with Cooperation Agreement Number III / LPD / I / DAS / 2025 - 0146 / SPK / DJA / BDE / 2025.*

cs. *On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Pakraman Renon regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number (008/LPD-RN/1/2025 - 0144/SPK/DJA/BDE/2025.*

ct. *On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Pakraman Panjer regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 03/LPD-PJ/1/2025 - 0145/SPK/DJA/BDE/2025.*

cu. *On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Penyaringan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 005/LPD-DPP/V/2025 - 655/SPK/DJA/BDE/2025.*

cv. *On July 16, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tanjung Bungkak Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 004/LPD-TB/V/2025 - 656/SPK/DJA/BDE/2025.*

cw. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padangtegal Traditional Village regarding Bank BPD Bali's Technical Assistance Services through Open API Service Integration with Cooperation Agreement Number 048/LPD-PT/V/2025 - 0623/SPWDJA/2025 - 0624/SPWDJA/2025.*

cx. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sebatu Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 19/LPD/V/LPDS/2025 - 0624/SPWDJA/2025.*

cy. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Talepud Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 09/LPD/DAT/V/2025 - 0621/SPWDJA/2025.*

cz. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Ubud Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 08/LPDU/V/2025 - 0625/SPWDJA/2025.*

da. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Mas Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 25/LPD/DAM/V/2025 - 0626/SPWDJA/2025.*

db. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Peliatan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 70A/LPD.PLT/UM/V/2025 - 0628/SPWDJA/2025.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

dc. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bale Agung terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 393/LPD-DABAK/VI/25 - 0664/SPK/DJA/2025.

dd. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bedha terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 018/LPD.DAB/V/2025 - 0659/SPK/DJA/2025.

de. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Beraban terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 021/LPD/V/2025 - 0657/SPK/DJA/2025.

df. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Cepik terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/VI/LPD-C/2025 - 0666/SPK/DJA/2025.

dg. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gunung Kangin terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 011/LPD - Gk/V/2025) - 0665/SPK/DJA/2025).

dh. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tunjuk terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 11/lpd/T/V/2025 - 0662/SPK/DJA/2025.

di. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Perean terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 023/LPD-DAP/V/2025 - 0663/SPK/DJA/2025.

dj. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kwanji terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 212/LPD/KW/V/2025 - 0593/SPK/DJA/2025.

dk. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Seseh terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/LPDDASSH/V/2025 - 0597/SPK/DJA/2025.

dl. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kerobokan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 30/LPD-SBK/V/2025 - 0594/SPK/DJA/2025.

dm Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kerobokan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 35/SK/LPD-DAK/V/2025 - 0599/SPK/DJA/2025.

dn. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tuka terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 018/LPD/DA.TK/V/2025 - 0598/SPK/DJA/2025.

do. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padonan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 74/LPD-PDN/V/2025 - 0602/SPK/DJA/2025.

dp. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Dalung terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 65/digt/LPD.DL/V/2025 - 0605/SPK/DJA/2025.

dq. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tandeg terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 027/LPD-TDG/V/2025 - 0600/SPK/DJA/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

dc. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Bale Agung Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 393/LPD-DABAK/VI/25 - 0664/SPK/DJA/2025.*

dd. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Bedha Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 018/LPD.DAB/V/2025 - 0659/SPK/DJA/2025.*

de. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD of Beraban Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 021/LPD/V/2025 - 0657/SPK/DJA/2025.*

df. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Adam Cepik regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 02/VI/LPD-C/2025 - 0666/SPK/DJA/2025.*

dg. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gunung Kangin Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 011/LPD - Gk/V/2025) - 0665/SPK/DJA/2025).*

dh. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tunjuk Traditional VIllage regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 11/lpd/T/V/2025 - 0662/SPK/DJA/2025.*

di. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Perean Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 023/LPD-DAP/V/2025 - 0663/SPK/DJA/2025.*

dj. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kwanji Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 212/LPD/KW/V/2025 - 0593/SPK/DJA/2025.*

dk. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Seseh Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 02/LPDDASSH/V/2025 - 0597/SPK/DJA/2025.*

dl. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kerobokan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 30/LPD-SBK/V/2025 - 0594/SPK/DJA/2025.*

dm *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kerobokan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 35/SK/LPD-DAK/V/2025 - 0599/SPK/DJA/2025.*

dn. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tuka Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 018/LPD/DA.TK/V/2025 - 0598/SPK/DJA/2025.*

do. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padonan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 74/LPD-PDN/V/2025 - 0602/SPK/DJA/2025.*

dp. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Dalung Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 65/digt/LPD.DL/V/2025 - 0605/SPK/DJA/2025.*

dq. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Tandeg Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 027/LPD-TDG/V/2025 - 0600/SPK/DJA/2025.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

dr. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tegal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 032/LPD-T/V/2025 - 0592/SPK/DJA/2025.

ds. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Padang Luwih terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 149/LPDPL/V/2025 - 0595/SPK/DJA/2025.

dt. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Mengwi terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 48/Um/LPD.1.02./2025 - 0610/SPK/DJA/2025.

du. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gulingan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 172/LPD.DA.GL/1/2025 - 0609/SPK/DJA/2025.

dv. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Sempidi terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 089/UM.LPD.SPD/I/2025 - 0612/SPK/DJA/2025.

dw Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Kapal terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 07/LPD.DAK/V/2025 - 0606/SPK/DJA/2025.

dx. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Penarungan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 07/PKS/LPD-DAP/II/2025 - 0596/SPK/DJA/2025.

dy. Pada tanggal 18 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Lambing Mekar Bhuana terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 020/LPD/V/2025 - 0611/SPK/DJA/2025.

dz. Pada tanggal 21 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan CV Binatu Modern terkait dengan Penyediaan Layanan Perbankan Dan Fasilitas *Discount* Untuk Transaksi *Online* Serta *Branding* Produk Bank BPD Bali dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 002/MB-XIX/VII/2025 -0953/SPK/DIR/DJA/2025.

ea. Pada tanggal 21 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait dengan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga Di Kabupaten Klungkung Berbasis *E-Ticketing* Dan *E-Payment System* dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor GZDJ25060066N - 0952/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/53/PKS/B.Pem.Kes/2025.

eb. Pada tanggal 25 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Nyanglan terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 071/51/LPD.Nyl/2025 - 0627/SPK/DIR/DJA/2025.

ec. Pada tanggal 28 Juli 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali terkait dengan Pelayanan Transaksi Perbankan Penerimaan Tagihan Pasien Rumah Sakit Mata Bali Mandara Dengan Sistem Integrasi (*Online system*) dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor B.43.000.4.7.2/21/ADUM/RSM.Bm - 0988/SPK/DIR/DJA/2025.

ed. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Nyuh Kukuh terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 69/LPD NK/V/2025 - 0782/SPK/DJA/BDE/2025.

ee. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Tangkas terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 24/LPD-DAT/05/2025 - 0669/SPK/DJA/2025.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

dr. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tegal Traditional Village LPD regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 032/LPD-T/V/2025 - 0592/SPK/DJA/2025.*

ds. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Padang Luwih Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 149/LPDPL/V/2025 - 0595/SPK/DJA/2025.*

dt. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Mengwi Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 48/Um/LPD.1.02./2025 - 0610/SPK/DJA/2025.*

du. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gulingan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 172/LPD.DA.GL/1/2025 - 0609/SPK/DJA/2025.*

dv. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Sempidi Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 089/UM.LPD.SPD/I/2025 - 0612/SPK/DJA/2025.*

dw *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Kapal Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 07/LPD.DAK/V/2025 - 0606/SPK/DJA/2025.*

dx. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Penarungan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 07/PKS/LPD-DAP/II/2025 - 0596/SPK/DJA/2025.*

dy. *On July 18, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Lambing Mekar Bhuana Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 020/LPD/V/2025 - 0611/SPK/DJA/2025.*

dz. *On July 21, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with CV Binatu Modern regarding the Provision of Banking Services and Discount Facilities for Online Transactions as well as Branding of Bank BPD Bali Products with Cooperation Agreement Number 002/MB-XIX/VII/2025-0953/SPK/DIR/DJA/2025.*

ea. *On July 21, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Collection of Recreation, Tourism and Sports Service Fees in Klungkung Regency Based on E-Ticketing and E-Payment System with Cooperation Agreement Number GZDJ25060066N - 0952/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/53/PKS/B.Pem.Kes/2025.*

eb. *On July 25, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Nyanglan Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 071/51/LPD.Nyl/2025 - 0627/SPK/DIR/DJA/2025.*

ec. *On July 28, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Mata Bali Mandara Hospital, Bali Province, regarding Banking Transaction Services for Receiving Patient Bills at Mata Bali Mandara Hospital with an Integration System (Online System) with Cooperation Agreement Number B.43.000.4.7.2/21/ADUM/RSM.Bm - 0988/SPK/DIR/DJA/2025.*

ed. *On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Nyuh Kukuh Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 69/LPD NK/V/2025 - 0782/SPK/DJA/BDE/2025.*

ee. *On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with LPD Desa Adat Tangkas regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 24/LPD-DAT/05/2025 - 0669/SPK/DJA/2025.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

ef. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gunaksa terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 022/LPD-DAG/V/2025 - 0670/SPK/DJA/2025.

eg. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Bias terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/LPD/DAB/V/2025 - 0668/SPK/DJA/2025.

eh. Pada tanggal 01 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPD Desa Adat Gelgel terkait dengan Layanan *Technical Assistance* Bank BPD Bali Melalui Integrasi Layanan Open API dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 001.05/LPD/GTK/V/2025 - 0674/SPK/DJA/2025.

ei. Pada tanggal 04 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait dengan Penyimpanan Dan Pengelolaan Kas Umum Daerah dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7.1/58/KB/B.Pem.Kes/2025 - 1020/SPK/DIR/DJA/2025.

ej. Pada tanggal 04 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait dengan Penyimpanan Dan Pengelolaan Kas Umum Daerah dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7.1/59/PKS/B.Pem.Kes/2025 - 1021/SPK/DIR/DJA/2025.

ek. Pada tanggal 11 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Puri Raharja terkait dengan Pelayanan Transaksi Perbankan Penerimaan Tagihan Pasien Rumah Sakit Umum Puri Raharja Dengan Sistem Integrasi (*Online System*) dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 1073/SPK/DIR/DJA/2025 - 1227/TU/RSPR/IX/2025.

el. Pada tanggal 29 Agustus 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Angkal Bali Perkasa, CV Garuda Bali Sejahtera, CV Gangga Express terkait dengan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Secara Elektronik Untuk Pengelolaan *E-Ticketing* Transportasi Angkutan Laut Dalam Implementasi Layanan Transportasi dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 017/ABP/SK/VIII/2025 - 006/SKY/VIII/2025 - 007/GE/VIII/2025 - 1155/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/68/PKS/B.Pem.Kes/2025

em Pada tanggal 29 Agustus 2025 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Angkal Bali Perkasa, CV Garuda Bali Sejahtera, CV Gangga Express terkait dengan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Secara Elektronik Untuk Pengelolaan *E-Ticketing* Transportasi Angkutan Laut Dalam Implementasi Layanan Transportasi dengan Kesepakatan Bersama Nomor 016/ABP/SK/VIII/2025 - 005/SKY/VIII/2025 - 006/GE/VIII/2025 - 1154/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/67/KB/B.Pem.Kes/2025.

en. Pada tanggal 10 Oktober 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Pariwisata Bali terkait dengan Pemanfaatan Fasilitas Perbankan Dalam Mendukung Penguatan Kelembagaan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor KB/22/PS.02.01/PTP.2/2025 - 1428/SPK/DIR/DJA/2025.

eo. Pada tanggal 13 Oktober 2025 Bank menandatangani Addendum dengan Universitas Pendidikan Ganesha terkait dengan Investasi Jangka Pendek (Deposito) Universitas Pendidikan Ganesha dengan Addendum Nomor 7786/UN48/PL/2025 - 1419/SPK/DIR/DJA/2025.

ep. Pada tanggal 07 November 2025 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Equity Life Indonesia terkait dengan Pemasaran Produk Pitra Yadnya Dengan Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 120/ELI/LGL/XI/25 - 1618SPK/DIR/DJA/2025.

eq. Pada tanggal 1 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan LPD Desa Adat Beng terkait Sinergitas Sistem Pembayaran Menggunakan Layanan *E-Link* dan Akuisisi *Merchant* dengan perjanjian Nomor : 0015/SPK/DIR/DJA/2024 - 39/LPD/B/I/2024.

er. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali & PT Bank Central Asia Tbk terkait Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 075/29/PKS/B.PEM.KESRA/X/2022 dan 015/PKS-BPG-ECM/DST/2022 tentang Pemberian Fasilitas BCA *E-Commerce Payment Gateway* untuk Mendukung Pelaksanaan Penerimaan Kontribusi Wisatawan dengan perjanjian No : B-00.415.4/4778/Setda - 0103/SPK/DIR/DJA/2024 - 010/PKS-ECM/DST/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

ef. *On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gunaksa Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 022/LPD-DAG/V/2025 - 0670/SPK/DJA/2025.*

eg. *On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bias Traditional Village LPD regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 03/LPD/DAB/V/2025 - 0668/SPK/DJA/2025.*

eh. *On August 1, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Gelgel Traditional Village regarding the Technical Assistance Services of Bank BPD Bali Through the Integration of Open API Services with Cooperation Agreement Number 001.05/LPD/GTK/V/2025 - 0674/SPK/DJA/2025.*

ei. *On August 4, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Storage and Management of Regional General Cash with Cooperation Agreement Number 100.3.7.1/58/KB/B.Pem.Kes/2025 - 1020/SPK/DIR/DJA/2025.*

ej. *On August 4, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Storage and Management of Regional General Cash with Cooperation Agreement Number 100.3.7.1/59/PKS/B.Pem.Kes/2025 - 1021/SPK/DIR/DJA/2025.*

ek. *On August 11, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with Puri Raharja General Hospital regarding Banking Transaction Services for Receiving Patient Bills at Puri Raharja General Hospital with an Integrated System (Online System) with Cooperation Agreement Number 1073/SPK/DIR/DJA/2025 - 1227/TU/RSPR/IX/2025.*

el. *On August 29, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Angkal Bali Perkasa, CV Garuda Bali Sejahtera, and CV Gangga Express regarding the Utilization of Electronic Banking Services for the Management of E-Ticketing for Sea Transportation in the Implementation of Transportation Services with Cooperation Agreement Numbers 017/ABP/SK/VIII/2025 - 006/SKY/VIII/2025 - 007/GE/VIII/2025 - 1155/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/68/PKS/B.Pem.Kes/2025*

em *On August 29, 2025, the Bank signed a Joint Agreement with PT Angkal Bali Perkasa, CV Garuda Bali Sejahtera, CV Gangga Express regarding the Utilization of Electronic Banking Services for the Management of E-Ticketing for Sea Transportation in the Implementation of Transportation Services with Joint Agreement Number 016/ABP/SK/VIII/2025 - 005/SKY/VIII/2025 - 006/GE/VIII/2025 - 1154/SPK/DIR/DJA/2025 - 100.3.7.1/67/KB/B.Pem.Kes/2025.*

en. *On October 10, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Tourism Polytechnic regarding the Utilization of Banking Facilities in Supporting Institutional Strengthening with Cooperation Agreement Number KB/22/PS.02.01/PTP.2/2025 - 1428/SPK/DIR/DJA/2025.*

eo. *On October 13, 2025, the Bank signed an Addendum with Ganesha University of Education regarding Short-Term Investments (Deposits) of Ganesha University of Education with Addendum Number 7786/UN48/PL/2025 - 1419/SPK/DIR/DJA/2025.*

ep. *On November 7, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Equity Life Indonesia regarding the Marketing of Pitra Yadnya Products with a Reference Business Model Not Within the Framework of Bank Products with Cooperation Agreement Number 120/ELI/LGL/XI/25 - 1618SPK/DIR/DJA/2025.*

eq. *On January 1, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD of Beng Traditional Village regarding the Synergy of Payment Systems Using E-Link Services and Merchant Acquisition with agreement Number: 0015/SPK/DIR/DJA/2024 - 39/LPD/B/I/2024.*

er. *On January 26, 2024 the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Provincial Government & PT Bank Central Asia Tbk regarding the Transfer of Rights and Obligations in Cooperation Agreement Number: 075/29/PKS/B.PEM.KESRA/X/2022 and 015/PKS - BPG-ECM/DST/2022 concerning Providing BCA E-Commerce Payment Gateway Facilities to Support the Implementation of Accepting Tourist Contributions with agreement No: B-00.415.4/4778/Setda - 0103/SPK/DIR/DJA/2024 - 010/PKS -ECM/DST/2024.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

es. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait Penyedia dan Pendistribusian Kartu Cobranding BPD Bali-Flazz dengan perjanjian No : 0104/SPK/DIR/DJA/2024 - 0232/PKS/CKT/2024.

et. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait Penyedia Pemrosesan Transaksi dan Kanal Pembayaran Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan perjanjian No : 0102/SPK/DIR/DJA/2024 - 009/PKS-ECM/DST/2024.

eu. Pada tanggal 2 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma terkait Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Dengan Sistem Komputer Secara *Online* dengan perjanjian No : Perumda.10/PRJ/II/2024 - 0136/SPK/DIR/DJA/2024.

ev. Pada tanggal 5 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya dengan perjanjian No: 19/Perumda/PKS/II/2024 - 0147/SPK/DIR/DJA/2024.

ew Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No: B.00.415.4/7057/Setda - 0158/SPK/DIR/DJA/2024.

ex. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No: B.00.415.4/7058/Setda - 0159/SPK/DIR/DJA/2024.

ey. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No: 14/PUDAM.TS/SPJ/II/2024 - 0154/SPK/DIR/DJA/2024.

ez. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Bali terkait Investasi Jangka Pendek (Deposito) Politeknik Negeri Bali dengan perjanjian No: 00987/PL8/KU/2024 - 0157/SPK/DIR/DJA/2024.

fa. Pada tanggal 22 April 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini , Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi terkait Pemanfaatan Data dan Informasi pada aplikasi BOS SALUR dengan perjanjian No: 6990/C/PR.04.01/2024 - 0462/spk/dir/dja/2024

fb. Pada tanggal 13 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perbankan lingkup PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan perjanjian No: 100.4.7.1/5583/DUKCAPIL - 0558/SPK/DIR/DJA/2024.

fc. Pada tanggal 21 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung dengan perjanjian No : 134.4/11017/PKS/TKKSD-Bdg/2024 - 0596/SPK/DIR/DJA/2024.

fd. Pada tanggal 22 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taspen (Persero) terkait Pembayaran Tabungan Hari Tua , Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank dengan perjanjian No : Jan-01/C.4.5/052024 - 0601/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

es. *On January 26, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bank Central Asia Tbk regarding the Provision and Distribution of BPD Bali-Flazz Cobranding Cards with agreement No: 0104/SPK/DIR/DJA/2024 - 0232/PKS/CKT/2024.*

et. *On January 26, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bank Central Asia Tbk regarding Providers of Transaction Processing and Non-Cash Payment Channels in the Context of Local Government Transaction Electronification (ETPD) with agreement No: 0102/SPK/DIR/DJA/2024 - 009/ PKS-ECM/DST/2024.*

eu. *On February 2, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tirta Sewakadarma Regional Public Water Company regarding the Utilization of Banking Services for Accepting Payments for Drinking Water Bills and Other Bills Using an Online Computer System with agreement No: Perumda.10/PRJ/II/ 2024 - 0136/SPK/DIR/DJA/2024.*

ev. *On February 5, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Regional Public Drinking Water Company Tirta Amertha Jati, Jembrana Regency regarding the Service for Receiving Payments for Drinking Water Bills and Other Bills with agreement No: 19/Perumda/PKS/II/2024-0147/SPK/DIR/DJA/2024.*

ew *On February 7, 2024, the Bank signed a Joint Agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Information System for Management of Regional Original Income in the Province of Bali and Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data Electronically in the Province of Bali with agreement No: B .00.415.4/7057/Setda - 0158/SPK/DIR/DJA/2024.*

ex. *On February 7, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data in the Province of Bali with agreement No: B.00.415.4/7058/Setda - 0159/SPK/DIR/DJA/2024.*

ey. *On February 7, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tirta Sanjiwani Regional Public Company for Drinking Water, Gianyar Regency regarding Services for Accepting Payments for Drinking Water Bills and Other Bills Electronically with agreement No: 14/PUDAM.TS/SPJ/II/2024 - 0154 /SPK/DIR/DJA/2024.*

ez. *On February 7, 2024, the Bank signed an Addendum to the Cooperation Agreement with the Politeknik Negeri Bali regarding Short Term Investments (Deposits) of the Politeknik Negeri Bali with agreement No: 00987/PL8/KU/2024 - 0157/SPK/DIR/DJA/2024.*

fa. *On April 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Early Childhood Education, Elementary Education and Secondary Education of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology regarding the Utilization of Data and Information on the BOS SALUR application with agreement No: 6990/C/PR.04.01/2024 - 0462/spk/dir/dja/2024.*

fb. *On May 13, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Population and Civil Registration, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia regarding the granting of access rights and utilization of population data in banking services within the scope of PT Bank Pembangunan Daerah Bali with agreement No: 100.4.7.1/5583/DUKCAPIL - 0558/SPK/DIR/DJA/2024.*

fc. *On May 21, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Badung Regency Government regarding the Implementation of the Badung Regency Public Service Mall with agreement No: 134.4/11017/PKS/TKKSD-Bdg/2024 - 0596/SPK/DIR/DJA/2024.*

fd. *On May 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Taspen (Persero) regarding Payment of Old Age Savings, Pension, Work Accident Insurance and Death Insurance Through Bank Accounts with agreement No: Jan-01/C.4.5/052024 - 0601/SPK/DIR/DJA/2024.*

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

fe. Pada tanggal 31 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No : 690/127/KEU,PERUMDA/V/2024 - 0623/SPK/DIR/DJA/2024.

ff. Pada tanggal 27 Juni 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyediaan, Penggunaan Produk dan Jasa Serta Pengembangan Sistem Informasi Layanan Perbankan yang Terintegrasi dengan perjanjian No : 075/02/KB/PEM/2024 - 0720/SPK/DIR/DJA/2024.

fg. Pada tanggal 11 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Serta Integrasi Sistem Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan perjanjian No : 100.3.7.1/23/PKS/PEM/2024 - 0780/SPK/DIR/DJA/2024.

fh. Pada tanggal 12 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Payangan terkait Pengelolaan, Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan dengan perjanjian No : 445/9098/VII/1.01/RSP/2024 - 0801/SPK/DIR/DJA/2024.

fi. Pada tanggal 22 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat dengan perjanjian No : 0368.AMD/HKM.02.01/F01070300/2024 - 0837/SPK/DIR/DJA/2024.

fj. Pada tanggal 19 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait Penggunaan Produk dan Jasa Perbankan dengan perjanjian No : 100.3.7.1/23/PKS/B.Pem.Kes/2024 - 0833/SPK/DIR/DJA/2024.

fk. Pada tanggal 9 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Jasa Raharja terkait Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank dengan perjanjian No : P/31.2/SP/2024 - 0977/SPK/DIR/DJA/2024.

fl. Pada tanggal 14 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Angkasa Pura terkait Sewa Ruang dan Pembagian Pendapatan (*Revenue Sharring*) Kepada AP1 Untuk Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali dengan perjanjian No : 0003020007968/HK.06,02/2023/GM,DPS - 01352/SPK/DIR/DJA/2024.

fm. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Equity Life Indonesia terkait Pemasaran Produk Asuransi Bali Dwipa Multi Protection dengan Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank dengan perjanjian No : 082/ELI/LGL/VIII/24 - 1003/SPK/DIR/DJA/2024.

fn. Pada tanggal 30 September 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Pengelolaan Dana Atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non Tagihan Listrik Secara Terpusat dengan perjanjian No : 1570.Pj/HKM.02.01/F01070300/2024 dan 1129/SPK/DIR/DJA/2024.

fo. Pada tanggal 30 September 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Indonesia Comnets Plus terkait Pelindungan, Pemrosesan dan Penyediaan Akses Data Atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non-Tagihan Listrik Secara Terpusat dengan perjanjian No : 1856.Pj/HKM.02.01/IC010205/2024 - 1143/SPK/DIR/DJA/2024.

fp. Pada tanggal 2 Oktober 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) terkait Kerjasama Optimalisasi Penerimaan Daerah Provinsi Bali Melalui Kerja Sama Perluasan Perluasan Kanal Bayar Retribusi Pariwisata Bali dengan kesepakatan bersama No : 1153/SPK/DIR/DJA/2024 - 074/MOU DOKU/IX/2024

fq. Pada tanggal 11 Oktober 2024 Bank menadatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bima Sakti Alterra terkait Penyediaan *Smart Integrated Billing System* Tagihan Pelanggan dengan perjanjian No : 1208/SPK/DIR/DJA/2024 - 145/ADD-BSA/PPOB&SIBS/X/2024.

fr. Pada tanggal 22 Oktober 2024 Bank menandatangani perjanjian Kerja Sama dengan Primakara University terkait Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan perjanjian No : 006/KB/ RKTR/VIII/2024 - 1248/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

fe. *On May 31, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Perumda Tirta Tohlangkir, Karangasem Regency regarding Services for Accepting Payments for Drinking Water Account Bills and Other Bills Electronically with agreement No: 690/127/KEU, PERUMDA/V/2024 - 0623/SPK/DIR /DJA/2024.*

ff. *On June 27, 2024 the Bank signed a Joint Agreement with the Karangasem Regency Government regarding Regional Financial Management, Provision, Use of Products and Services and Development of an Integrated Banking Service Information System with agreement No: 075/02/KB/PEM/2024 - 0720/SPK/ DIR/DJA/2024.*

fg. *On July 11, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Buleleng Regency Government regarding the Provision of Banking Service Systems, Construction and Development of Information Systems and Integration of Regional Revenue Management Systems with agreement No: 100.3.7.1/23/PKS/PEM/2024 - 0780/SPK/DIR/DJA/2024.*

fh. *On July 12, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Payangan General Hospital regarding the Management, Provision and Use of Banking Services with agreement No: 445/9098/VII/1.01/RSP/2024 - 0801/SPK/DIR/DJA/2024.*

fi. *On July 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) regarding the Centralized Acceptance of Electricity Bill Payments and Other Bills with agreement No: 0368.AMD/HKM.02.01/F01070300/2024 - 0837/SPK/DIR/DJA/2024.*

fj. *On July 19, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Use of Banking Products and Services with agreement No: 100.3.7.1/23/PKS/B.Pem.Kes/2024 - 0833/SPK/DIR/DJA/2024.*

fk. *On August 9, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Jasa Raharja regarding Services and Utilization of Bank Services with agreement No: P/31.2/SP/2024 - 0977/SPK/DIR/DJA/2024.*

fl. *On August 14, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Angkasa Pura regarding Space Rental and Revenue Sharing to AP1 for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Activities at I Gusti Ngurah Rai International Airport - Bali with agreement No: 0003020007968/HK.06,02/2023/GM,DPS - 01352/SPK/DIR/DJA/2024.*

fm. *On August 20, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Equity Life Indonesia regarding the Marketing of Bali Dwipa Multi Protection Insurance Products with a Reference Business Model Not Within the Context of Bank Products with agreement No: 082/ELI/LGL/VIII/24 - 1003/SPK/ DIR/DJA/2024.*

fn. *On September 30, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) regarding the Management of Funds for the Centralized Electricity Bill and Non-Electricity Bill Payment System with agreement No: 1570.Pj/HKM.02.01/F01070300/2024 and 1129/SPK/DIR/DJA/2024.*

fo. On September 30, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Indonesia Comnets Plus regarding the Protection, Processing and Provision of Data Access to the Centralized Electricity Bill and Non-Electricity Bill Payment System with agreement No : 1856.Pj/HKM.02.01/IC010205/2024 - 1143/SPK/DIR/DJA/2024.

fp. *On October 2, 2024, the Bank signed a Joint Agreement with PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) regarding the Cooperation in Optimizing Regional Revenue of Bali Province Through Cooperation in Expanding the Bali Tourism Retribution Payment Channel with a joint agreement No : 1153/SPK/DIR/DJA/2024 - 074/MOU DOKU/IX/2024.*

fq. *On October 11, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bima Sakti Alterra regarding the Provision of Smart Integrated Billing System for Customer Bills with agreement No : 1208/SPK/DIR/DJA/2024 - 145/ADD-BSA/PPOB&SIBS/X/2024.*

fr. *On October 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Primakara University regarding the Implementation of the Tri Dharma of Higher Education with Agreement No : 006/KB/RKTR/VIII/2024 - 1248/SPK/DIR/DJA/2024.*

48. KONTINJENSI

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

Perkara perdata Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., terhadap Bank BPD Bali tidak ada tuntutan pada gugatan, hanya sebagai pihak Turut Tergugat yang saat itu menempatkan dana sebesar Rp195.000.000.000 dalam bentuk *Deposit on Call*. Dalam artian permasalahan terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat. Telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2685 K/PDT/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan putusan MENOLAK permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat (*Inkcraht*).Peninjauan Kembali (PK) telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 September 2025 dengan Putusan TOLAK. (***INKRACHT***).

Perkara perdata Nomor No. 264/Pdt.G/2023/PN.Amp tentang Gugatan I Nengah Gitar, selaku Penggugat kepada Kantor Cabang Karangasem, bahwa Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan/klausula pada Pasal 18 Perjanjian Kredit. Sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2025 tanggal 20 Februari 2025 dinyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi I Nengah Gitar. (***INKRACHT***).

Perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.Amp tentang gugatan I Gede Rai R, selaku Penggugat kepada Kantor Cabang Karangasem bahwa Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melelang semua jaminan Tergugat I/Debitur termasuk jaminan milik penggugat, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar (Banding) tanggal 12 November 2024 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya." (***INKRACHT***).

Perkara perdata Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr. tentang gugatan Wajan Budiarsa, selaku penggugat kepada Kantor Cabang Singaraja terkait Bank dinyatakan tidak beritikad baik karena menetapkan harga lelang tidak sesuai pasar dan memohon pembatalan harga lelang. Penggugat menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar (Banding) tanggal 8 Januari 2025 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan "Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)".Sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor : 4394 K/PDT/2025 tanggal 18 November 2025 menyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi Wajan Budiarsa. (***INKRACHT***)

Perkara perdata Nomor No. 885/Pdt.G/2024/PN.Dps tentang gugatan Ahmad Ase kepada Capem Gatsu Barat terkait Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang jaminan milik Penggugat. Sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 3020 K/PDT/2025 tanggal 14 Juli 2025 menyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi Ahmad Ase. (***INKRACHT***)

Perkara perdata Nomor No. 209/Pdt.G/2024/PN.Nga tentang gugatan H.Saleh, dkk kepada Kantor Cabang Pembantu Pekutatan Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tanpa pemberitahuan kepada Debitur; Penggugat menyatakan Kasasi pada tanggal 9 April 2025 atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Maret 2025 yang menyatakan Menolak Banding Penggugat. Putusan Kasasi Nomor 5298 K/PDT/2025 tanggal 20 November 2025 menyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi H. Saleh. (***INKRACHT***)

Perkara perdata Nomor No. 4/Pdt.Eks/2024/PN Nga tentang Permohonan Eksekusi Fiat Pengadilan Negeri Negara atas jaminan atas nama Yardita, dalam perkara ini Bank BPD Bali mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan atas Jaminan milik Debitur, karena sebelumnya terdapat perkara gugatan dari Pihak Ketiga yang mana putusan Pengadilan Negeri Negara menyatakan Objek Perkara (telah menjadi jaminan di Bank BPD Bali) dilakukan Sita Persamaan. Saat ini masih proses lelang.

Perkara perdata Nomor 320/Pdt.G/2025/PN Sgr tentang gugatan Wayan Kantra kepada Kantor Cabang Singaraja dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan Salinan APHT. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri tanggal 20 Oktober 2025 menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. (***INKRACHT***).

Perkara perdata Nomor 318/Pdt.G/2025/PN Sgr tentang gugatan Sumiani kepada Kantor Capem Tamblang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan Salinan APHT. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri tanggal 4 Desember 2025 menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. (***INKRACHT***).

48. CONTINGENCIES

The Bank currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

*Civil case Number 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., against Bank BPD Bali there is no claim in the lawsuit, only as a Co-Defendant who at that time placed funds amounting to Rp195,000,000,000 in the form of Deposit on Call. In the sense that the problem occurred between the Plaintiff and the Defendants. It has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2685 K/PDT/2024 dated July 25, 2024 with the decision REJECTING the Cassation request from the Cassation Applicant/Plaintiff (Inkcraht). The Judicial Review (PK) has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia on September 18, 2025 with the Decision REJECT. (**INKRACHT**).*

*Civil case No. 264/Pdt.G/2023/PN.Amp regarding the Lawsuit of I Nengah Gitar, as the Plaintiff against the Karangasem Branch Office, that the Bank was declared to have committed an unlawful act because it did not fulfill the provisions/clauses in Article 18 of the Credit Agreement. In accordance with the Cassation Decision Number 444 K/Pdt/2025 dated February 20, 2025, it was stated that "The Supreme Court of the Republic of Indonesia Rejects the Cassation Application of I Nengah Gitar. (**INKRACHT**).*

*Civil case Number 41/Pdt.G/2023/PN.Amp regarding the lawsuit of I Gede Rai R, as the Plaintiff against the Karangasem Branch Office that the Bank was declared to have committed an unlawful act because it auctioned all the collateral of Defendant I/Debtor including the collateral belonging to the plaintiff, the Denpasar High Court Decision (Appeal) dated November 12, 2024 stated that it confirmed the Denpasar District Court Decision which stated "Rejecting the Plaintiff's Lawsuit in its entirety." (**INKRACHT**).*

*Civil case Number 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr. regarding Wajan Budiarsa's lawsuit, as the plaintiff against the Singaraja Branch Office regarding the Bank being declared not acting in good faith because it set an auction price that was not in accordance with the market and requested the cancellation of the auction price. The plaintiff stated that the Cassation against the Denpasar High Court Decision (Appeal) dated January 8, 2025 stated that it upheld the Denpasar District Court Decision which stated that "The Objector's Claim cannot be accepted (niet ontvankelijke verklaard)". In accordance with the Cassation Decision Number: 4394 K/PDT/2025 dated November 18, 2025 stated that "The Supreme Court of the Republic of Indonesia Rejects Wajan Budiarsa's Cassation Application. (**INKRACHT**)*

*Civil case No. 885/Pdt.G/2024/PN.Dps concerning Ahmad Ase's lawsuit against the West Gatsu Sub Branch Office regarding the Bank being declared to have committed an unlawful act by auctioning off the Plaintiff's collateral. In accordance with the Cassation Decision Number 3020 K/PDT/2025 dated July 14, 2025, it stated "The Supreme Court of the Republic of Indonesia Rejects Ahmad Ase's Cassation Application. (**INKRACHT**)*

*Civil case No. 209/Pdt.G/2024/PN.Nga regarding the lawsuit of H. Saleh, et al. against the Pekutatan Sub Branch Office was declared to have committed an unlawful act because they conducted an auction without notification to the Debtor; The Plaintiff filed a cassation on April 9, 2025 against the Denpasar High Court's Appeal Decision dated March 20, 2025 which stated that the Plaintiff's Appeal was rejected. Cassation Decision Number 5298 K/PDT/2025 dated November 20, 2025 stated "The Supreme Court of the Republic of Indonesia Rejects H. Saleh's Cassation Application. (**INKRACHT**)*

Civil case No. 4/Pdt.Eks/2024/PN Nga regarding the Application for Fiat Execution of the Negara District Court for collateral in the name of Yardita, in this case Bank BPD Bali submitted an application for the execution of the Mortgage Right on the Debtor's Collateral, because previously there was a lawsuit case from a Third Party in which the decision of the Negara District Court stated that the Object of the Case (which had become collateral at Bank BPD Bali) was subject to Equality Confiscation. Currently still in the auction process.

*Civil case No. 320/Pdt.G/2025/PN Sgr regarding Wayan Kantra's lawsuit against the Singaraja Branch Office was declared to have committed an unlawful act for not providing a copy of the APHT. In accordance with the District Court's decision dated October 20, 2025, it rejected the plaintiff's lawsuit in its entirety. (**INKRACHT**).*

*Civil case No. 318/Pdt.G/2025/PN Sgr regarding Sumiani's lawsuit against the Tamblang Sub Branch Office was declared to have committed an unlawful act for not providing a copy of the APHT. In accordance with the District Court's decision dated December 4, 2025, it rejected the plaintiff's lawsuit in its entirety. (**INKRACHT**).*

48. KONTINJENSI (LANJUTAN)

Perkara perdata Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Amp tentang gugatan I Gede Pasek Wayan Sugiadnyana kepada Kantor Capem Amlapura yang dinyatakan Dasar pelelangan yang dilakukan mengesampingkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan dan penjelasannya serta Penjelasan Umum angka 9 yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang objek Hak Tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan sebagai pelaksanaannya. Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tanggal 30 September 2025. (***INKRACHT***).

Perkara perdata Nomor 1113/Pdt.Bth/2025/PN Dps tentang gugatan Nurhayati kepada Kantor Capem Gatsu Barat yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena karena Keberatan atas Pelelangan Jaminan atas nama Suami, saat ini perkara masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 226/Pdt.Bth/2025/PN Mtr. tentang gugatan I Gd Karya kepada Kantor Cabang Mataram yang menyatakan keberatan atas Pelelangan Jaminan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 1254/Pdt.G/2025/PN.Dps., tentang gugatan I Gede Komang Malando kepada Kantor Cabang Badung yang menyatakan keberatan atas Pelelangan Jaminan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 285/Pdt.G/2024/PN.Nga., tentang gugatan Ir. I Putu Lantik Wijaya, M.T kepada Kantor Cabang Negara yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini masih dalam proses mediasi.

Perkara perdata Nomor 821/Pdt.G/2025/PN Sgr., tentang gugatan Wayan Kantra kepada Kantor Cabang Singaraja yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No.3201/K/Pdt/1984 mengenai eksekusi Hak Tanggungan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 305/Pdt.G/2025/PN Nga., tentang gugatan H.Saleh kepada Kantor Capem Perkutatan yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tanpa pemberitahuan kepada Debitur. Saat ini masih dalam proses mediasi.

Perkara perdata Nomor 289/Pdt.G/2025/PN Amp., tentang gugatan I Wayan Sudiana kepada Kantor Capem Amlapura yang menyatakan bahwa dasar pelelangan yang dilakukan Penggugat mengesampingkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan dan penjelasannya serta Penjelasan Umum angka 9 yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang objek Hak Tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan sebagai pelaksanaannya. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 1526/Pdt.G/2025/PN.Dps, tentang gugatan Ahmad Ase kepada Kantor Capem Gatsu Barat yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang jaminan milik Penggugat dan menyatakan lelang yang telah dilaksanakan dibatalkan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 1656/Pdt.G/2025/PN Dps., tentang gugatan CV. Duta Mas kepada Kantor Cabang Badung yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang jaminan milik Penggugat. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara perdata Nomor 323/Pdt.G/2025/PN.Amp., tentang gugatan Nengah Gitar kepada Kantor Cabang Karangasem yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pelelangan tanpa melalui pengadilan. Saat ini masih dalam proses persidangan.

Perkara Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/ PN.Niaga.Sby tertanggal 19 Nopember 2015 yang berlokasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan kuasa hukum Pohan & Partners Law Office dengan nilai Kredit Investasi Wholesale Rp135.000.000.000,- (Pokok) dan Kredit Modal Kerja Wholesale Rp15.000.000.000,- (Pokok). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Termohon PT. Karya Cipta Putera Pratama berkedudukan di Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Saat ini Kurator yang baru sedang melakukan pemberesan boedel pailit.

48. CONTINGENCIES (CONTINUED)

*Civil case No. 177/Pdt.G/2025/PN Amp regarding the lawsuit of I Gede Pasek Wayan Sugiadnyana against the Amlapura Sub Branch Officewhich was stated that the basis for the auction carried out overrides the provisions of Article 26 of the Mortgage Law and its explanation as well as General Explanation number 9 which expressly states that the provisions of the Mortgage Law regarding Mortgage Rights objects have not yet come into effect because there are no regulations as its implementation. Withdrawal of the Lawsuit by the Plaintiff dated September 30, 2025. (**INKRACHT**).*

Civil case No. 1113/Pdt.Bth/2025/PN Dps regarding Nurhayati's lawsuit against the West Gatsu Sub Branch Office which was declared to have committed an unlawful act due to an objection to the auction of collateral in the name of her husband, currently the case is still in the trial process.

Civil case No. 226/Pdt.Bth/2025/PN Mtr. concerning I Gd Karya's lawsuit against the Mataram Branch Office, which stated its objection to the Auction of Guarantees. Currently still in the trial process.

Civil case No. 1254/Pdt.G/2025/PN.Dps., concerning I Gede Komang Malando's lawsuit against the Badung Branch Office, which stated its objection to the Auction of Guarantees. Currently still in the trial process.

Civil case No. 285/Pdt.G/2024/PN.Nga., concerning the lawsuit of Ir. I Putu Lantik Wijaya, M.T. against the Negara Branch Office, which was declared to have committed an unlawful act by conducting an auction that did not comply with applicable regulations. Currently still in the mediation process.

Civil case No. 821/Pdt.G/2025/PN Sgr., concerning Wayan Kantra's lawsuit against the Singaraja Branch Office, which alleges that he committed an unlawful act by not implementing Supreme Court Decision No. 3201/K/Pdt/1984 regarding the execution of Mortgage Rights. Currently still in the trial process.

Civil case No. 305/Pdt.G/2025/PN Nga., concerning H. Saleh's lawsuit against the Perkutatan Sub Branch Office, alleging an unlawful act by conducting an auction without notification to the Debtor. Currently in the mediation process.

Civil case Number 289/Pdt.G/2025/PN Amp., regarding the lawsuit of I Wayan Sudiana to the Amlapura Sub Branch Office which stated that the basis of the auction conducted by the Plaintiff disregarded the provisions of Article 26 of the Mortgage Law and its explanation as well as General Explanation number 9 which expressly stated that the provisions of the Mortgage Law regarding Mortgage Rights objects have not yet come into effect because there are no regulations as its implementation. Currently still in the trial process.

Civil case No. 1526/Pdt.G/2025/PN.Dps, concerning Ahmad Ase's lawsuit against the West Gatsu Sub Branch Office, alleging an unlawful act by auctioning off the Plaintiff's collateral and declaring the auction to be cancelled. It is currently still in the trial process.

Civil case No. 1656/Pdt.G/2025/PN Dps., concerning CV. Duta Mas' lawsuit against the Badung Branch Office, alleging that it committed an unlawful act by auctioning off the Plaintiff's collateral. Currently still in the trial process.

Civil case No. 323/Pdt.G/2025/PN.Amp., concerning Nengah Gitar's lawsuit against the Karangasem Branch Office, alleging unlawful conduct by conducting an auction without going through the courts. Currently still in the trial process.

Bankruptcy Case Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Sby dated November 19, 2015 located in the Commercial Court at the Surabaya District Court with legal counsel Pohan & Partners Law Office with a Wholesale Investment Credit value of Rp135,000,000,000,- (Principal) and Wholesale Working Capital Credit of Rp15,000,000,000,- (Principal). The Commercial Court Decision at the Surabaya District Court No.10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY dated August 15, 2016 stated that the Respondent PT. Karya Cipta Putera Pratama domiciled at Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya is in a state of bankruptcy with all its legal consequences. Currently the new Curator is conducting the settlement of the bankruptcy estate.

48. KONTINJENSI (LANJUTAN)

Perkara Kepailitan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tertanggal 5 Mei 2023 yang berlokasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan kuasa hukum BAS Law Firm dengan nilai kredit sebesar Rp33.622.820.229,39. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tertanggal 5 Mei 2023 yang menyatakan termohon PT. Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Saat ini Kurator sedang melakukan pencatatan daftar piutang para Debitor.

48. CONTINGENCIES (CONTINUED)

Bankruptcy Case Number 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby dated May 5, 2023 located in the Commercial Court at the Surabaya District Court with legal counsel BAS Law Firm with a credit value of Rp33,622,820,229.39. The Commercial Court Decision at the Surabaya District Court 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., dated May 5, 2023 which stated that the respondent PT. Hakadikon Beton Pratama and Herman Sudarta are in a state of bankruptcy with all its legal consequences. Currently the Curator is recording the list of Debtors' receivables.

49. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan Bank yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026:

- PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- PSAK 413: Penurunan Nilai;
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta; dan
- PSAK 118 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan ini, manajemen Bank masih mengevaluasi dampak potensial dari perubahan standar akuntansi tersebut terhadap laporan keuangannya.

49. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) has issued new or amendment to the following Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS") and Its Interpretation to Financial Accounting Standards ("IFAS"). The accounting standards will be effective or applicable on the Bank's financial statements for the period beginning on or after January 1, 2026:

- *SFAS 109: Financial Instrument and SFAS 107 Financial Instrument: Disclosure related to Classification and Measurement of Financial Instruments;*
- *SFAS 413: Impairment;*
- *SFAS 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Applying Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities; and*
- *SFAS 118 Presentation and Disclosure in Financial Statements.*

As of authorization date of these financial statements, the Bank's management is still evaluating the potential impact on these amended accounting standards on its financial statements.

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah periode pelaporan keuangan posisi 31 Desember 2025 yang mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

50. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

There are no significant events that occurred after the date of reporting period of financial statements as of December 31, 2025 which affects the decision of the users of the financial statements PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

51. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagaimana diuraikan di muka yang telah diselesaikan pada tanggal 9 Januari 2026.

51. THE COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali is responsible for the presentation and completion of the financial statements as of December 31, 2025 and the year then ended which was completed on January 9, 2026.

BANK BPD BALI

KANTOR PUSAT
Jl. Raya Puputan, Niti Mandala
Denpasar 80235 Bali
Telp. (0361) 223301-5

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN KEUANGAN

(PT. JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK)

PER 31 DESEMBER 2025

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DRAFT PERSETUJUAN FINAL

Tanggal	: 24 Februari 2026
Nama	: Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, S.T
Jabatan	: Direktur Utama
TTD & Cap	:

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK

DAFTAR ISI

KETERANGAN		HALAMAN
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		i-ii
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024		1 - 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024		3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024		4
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024		5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN		6 - 61
LAMPIRAN I	INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN	
LAMPIRAN II	DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN	
LAMPIRAN III	DAFTAR DEPOSITO	

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian **PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak ("Perusahaan dan Entitas Anak")**, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian **PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Entitas Anak** tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan dan Entitas Anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai, kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan dan Entitas Anak atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan dan Entitas Anak.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan dan Entitas Anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
NIU-KAP: KEP-1011/KM.1/2010

DRAFT PERSETUJUAN FINAL

Tanggal : 24 Februari 2026

Nama : Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, S.T

Jabatan : Direktur Utama

TTD & Cap :

I Wayan Wirawan, S.E., M.M., CPA
NRAP AP. 1756

Denpasar, 24 Februari 2026

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2025	2024
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2d,4	291.515.072.313	184.754.877.134
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(193.497.284)	(189.894.700)
Deposito Berjangka	5	26.990.000.000	28.040.000.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(5.840.758.693)	(3.965.210.866)
Efek - Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	2g,12	8.500.000.000	-
Investasi Lancar Lainnya	6	100.000.000	-
Piutang Co-Guarantee	2e,7	89.865.565.247	75.249.928.367
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(70.423.092.017)	(40.982.717.008)
Piutang Usaha	2e,8	2.801.912.527	1.574.496.149
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(635.948.507)	(635.948.507)
Piutang Lain-Lain	9	469.700.862	156.940.278
Uang Muka	10	520.794.272	293.969.390
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Lancar	2f,11	22.659.359.474	3.751.136.811
Jumlah Aset Lancar		**366.329.108.192**	**248.047.577.049**
ASET TIDAK LANCAR			
Efek	2g,12	117.402.195.272	105.160.733.907
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(3.031.786.472)	(3.144.223.833)
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar	2f,11	51.378.776.022	94.805.700.412
Aset Lain-Lain	13	31.405.982.096	23.879.682.439
Aset Tetap dan Inventaris	2h,14	28.706.930.398	28.271.127.201
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(4.433.521.148)	(4.039.316.058)
Aset Tidak Berwujud	2i,15	1.180.725.022	950.438.672
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(599.877.197)	(476.785.957)
Aset Pajak Tangguhan	2s,16	121.628.102	78.351.250
Jumlah Aset Tidak Lancar		**222.131.052.096**	**245.485.708.034**
JUMLAH ASET		**588.460.160.288**	**493.533.285.084**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2025	2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Klaim	2m,17	1.008.142.072	1.182.047.821
Utang Pajak	2r,18	13.650.310	22.143.869
Utang Co-Guarantee	19	-	1.654.397.677
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2n,20	5.021.780.730	4.647.759.985
Utang Lancar Lainnya	21	3.251.150.661	2.807.605.351
Penampungan Sementara Jasa Jaminan	2o,22	2.891.767.759	1.468.061.900
Dana Cadangan Klaim	2m,23	41.416.990.694	36.803.517.524
Corporate Social Resposibility (CSR)	24	643.882.569	716.630.424
Utang Setoran Modal Pemegang Saham	25	1.000.000.000	8.500.000.000
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Pendek	2p,26	75.475.941.065	12.814.452.866
Liabilitas Lain-Lain - Bagian Jangka Pendek	28	2.166.666.640	3.441.582.666
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**132.889.972.499**	**74.058.200.083**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Panjang	2p.26	185.869.550.501	200.037.271.311
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2r,27	528.645.298	331.654.416
Liabilitas Lain-Lain - Bagian Jangka Panjang	28	1.597.222.237	4.588.860.897
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**187.995.418.035**	**204.957.786.624**
JUMLAH LIABILITAS		**320.885.390.534**	**279.015.986.707**
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebanyak 232.121 dan 184.621 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham	29	232.121.200.000	184.621.200.000
Cadangan Umum	29	11.113.690.358	9.341.512.966
Cadangan Tujuan	29	4.677.694.478	3.614.388.043
Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengenda	29	1.145.537.839	-
Saldo Laba	29	15.734.293.206	12.899.314.327
Jumlah		**264.792.415.881**	**210.476.415.336**
Kepentingan Non-Pengendali	29	2.782.353.873	4.040.883.041
JUMLAH EKUITAS		**267.574.769.754**	**214.517.298.377**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**588.460.160.288**	**493.533.285.084**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN USAHA	2k,30	**133.309.879.184**	**117.012.433.887**
BEBAN USAHA	2k,31	**(126.195.029.703)**	**(111.132.929.307)**
LABA BRUTO		**7.114.849.481**	**5.879.504.580**
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK			
Pendapatan di Luar Usaha Pokok	32	1.952.491.707	1.572.154.528
Beban di Luar Usaha Pokok	33	(152.017.900)	(337.762.872)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK		**1.800.473.807**	**1.234.391.656**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**8.915.323.289**	**7.113.896.237**
BEBAN PAJAK			
Kini	18	-	(32.149.370)
Tangguhan	16	(138.085.305)	7.503.891
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**8.777.237.983**	**7.089.250.758**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja	27	(824.373.440)	(53.015.445)
Pajak Penghasilan Terkait	16	181.362.157	11.663.398
TOTAL LABA BERSIH KOMPREHENSIF		**8.134.226.701**	**7.047.898.712**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		8.794.522.338	7.088.709.569
Kepentingan Non-Pengendali		(17.284.355)	541.190
JUMLAH		**8.777.237.983**	**7.089.250.758**
LABA BERSIH KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		8.151.511.055	7.047.357.522
Kepentingan Non-Pengendali		(17.284.355)	541.190
JUMLAH		**8.134.226.700**	**7.047.898.712**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk								
		Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya							
	Modal Disetor	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Lainnya	Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**165.775.000.000**	**8.036.333.787**	**2.570.244.700**	**-**	**-**	**10.028.530.177**	**186.410.108.663**	**9.819.442.584**	**196.229.551.247**
Penambahan Modal Disetor	18.846.200.000	-	-	-	-	-	18.846.200.000	-	**18.846.200.000**
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.305.179.179	-	-	-	(1.305.179.179)	-	-	**-**
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	1.044.143.343	-	-	(1.044.143.343)	-	-	**-**
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-	(1.566.215.014)	(1.566.215.014)	-	**(1.566.215.014)**
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	-	(261.035.836)	(261.035.836)	-	**(261.035.836)**
Dampak Pengambilalihan Kepemilikan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(5.779.100.733)	**(5.779.100.733)**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	7.047.357.522	7.047.357.522	541.190	**7.047.898.711**
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**184.621.200.000**	**9.341.512.966**	**3.614.388.043**	**-**	**-**	**12.899.314.327**	**210.476.415.336**	**4.040.883.041**	**214.517.298.377**
Penambahan Modal Disetor	47.500.000.000	-	-	-	-	-	47.500.000.000	-	**47.500.000.000**
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.772.177.392	-	-	-	(1.772.177.392)	-	-	**-**
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	1.063.306.435	-	-	(1.063.306.435)	-	-	**-**
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-	(2.126.612.871)	(2.126.612.871)	-	**(2.126.612.871)**
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	-	(354.435.478)	(354.435.478)	-	**(354.435.478)**
Dampak Pengambilalihan Kepemilikan Non-Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(78.226.380)	**(78.226.380)**
Penyesuaian Kepentingan Non-Pengendali atas Transaksi Ekuitas Entitas Anak	-	-	-	-	1.145.537.839	-	1.145.537.839	(1.145.537.839)	**-**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	8.151.511.055	8.151.511.055	(17.284.355)	**8.134.226.700**
Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali									
Dividen dari Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	-	(17.480.594)	**(17.480.594)**
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**232.121.200.000**	**11.113.690.358**	**4.677.694.478**	**-**	**1.145.537.839**	**15.734.293.207**	**264.792.415.881**	**2.782.353.873**	**267.574.769.754**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan	158.286.084.560	110.387.628.533
Penerimaan Piutang Subrogasi	2.475.258.499	4.377.939.242
Penerimaan R/I Com atas Reasuransi Penjaminan	216.799.292	8.218.282.264
Penerimaan Bunga dan Adminsitrasi Provisi	4.193.774.550	3.396.211.263
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	2.556.783.047	2.759.342.411
Pembayaran IJP Co-guarantee/IJP/Premi Reasuransi	(17.734.005.985)	(41.506.817.145)
Pembayaran Klaim pada Terjamin	(35.026.156.571)	(23.645.520.999)
Pembayaran Biaya-biaya	(28.054.014.186)	(21.518.425.763)
Pembayaran untuk Aktivitas Lainnya	(144.962.300)	(248.448.318)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**86.769.560.907**	**42.220.191.488**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari Investasi	14.673.598.531	54.701.934.870
Pembayaran Investasi Lainnya	(6.134.669.849)	(41.132.515.650)
Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(20.791.461.365)	(29.070.000.000)
Akuisisi Entitas Anak	(78.226.380)	(5.780.290.482)
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	(938.177.258)	(1.268.210.480)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(13.268.936.321)**	**(22.549.081.742)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Setoran Modal	40.000.000.000	8.500.000.000
Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan Lainnya	2.835.483.827	2.349.322.522
Penerimaan Pinjaman	-	6.500.000.000
Pembayaran Pinjaman	(4.259.381.059)	(6.284.090.884)
Pembayaran Deviden dan Pembagian Laba	(5.316.532.176)	(4.176.573.372)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**33.259.570.592**	**6.888.658.266**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**106.760.195.179**	**26.559.768.012**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**184.754.877.134**	**158.195.109.122**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**291.515.072.313**	**184.754.877.134**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

1. UMUM

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Anak Agung Ayu Granati Andayani, S.H., atas kekuatan penetapan Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Badung, tertanggal 20 Oktober 2010 Nomor W16-38-MPDN KAB.BADUNG.07.03 Tahun 2010 sebagai pengganti dari I Made Pria Dharsana, S.H., Notaris di Kabupaten Badung dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-59685.AH.01.01, tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 01 tanggal 05 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Pria Dharsana, S.H., Notaris di Kabupaten Badung terdapat perubahan nama Perusahaan dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Akta tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024109.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 22 April 2021.

Perubahan terakhir melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroran Terbatas PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 7 tanggal 17 November 2025, yang dibuat dihadapan Notaris I Made Pria Dharsana, S.H., Notaris di Kabupaten Badung mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Akta tersebut telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 17 tertanggal 23 Desember 2025, dibuat dihadapan I Made Pria Dharsana, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung. Perubahan tersebut telah dilaporkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan telah diterima Menteri Hukum Republik Indonesia, melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No No. AHU-AH.01.09-0015828 tanggal 26 Januari 2026.

Dalam melaksanakan kegiatannya PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) bekerja berdasarkan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP), dan asas-asas penjaminan untuk bersikap hati-hati. Sebagai lembaga yang turut menunjang program pemerintah dibidang pengembangan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan melakukan kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan atau bukan perbankan, dan badan usaha lain, disamping memberikan bantuan konsultasi manajemen dan melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, dan Anggaran Dasar PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Akta Notaris Nomor: 9 tanggal 20 Februari 2017, maksud dan tujuan perseroan adalah sebagai berikut:

1) Berusaha dalam bidang penjaminan kredit,
2) Memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi,
3) Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Paraf:……

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan perubahan terakhir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor: 9 tanggal 20 Februari 2017, maksud dan tujuan Perseroan ini adalah sebagai berikut:

1) Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Jasa Penjaminan Kredit, memberikan jasa penjaminan kredit, memberikan jasa penjaminan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha melalui pemberian jasa penjaminan kredit yaitu dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

3) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar ini, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yaitu :
   a. Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya
   b. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
   c. Penjaminan pembelian barang secara angsuran.
   d. Penjaminan atas surat utang.
   e. Penjaminan transaksi dagang.
   f. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *(surety bond).*
   g. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi).
   h. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
   i. Penjaminan *letter of credit* (L/C).
   j. Penjaminan kepabeanan *(custom bond).*
   k. Penjaminan cukai.
   l. Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan.
   m. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ijin-ijin yang dimiliki Perusahaan yaitu sebagai berikut:

1) Akta Pendirian PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor: 27 tanggal 21 November 2010.
2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59685.AH.01.01, tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) tanggal 30 Desember 2010.
4) Nomor Induk Berusaha (NIB) 1242000510379, yang diterbitkan tanggal 7 Mei 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia.
5) Surat Keterangan Ijin Lokasi Nomor: 2235.10.10.2010.2, tanggal 2 Desember 2010.
6) Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 31.250.559.7-901.000 tertanggal 23 November 2010.

Perusahaan berdomisili di Jl. Surapati No.8 Denpasar.

Paraf:……

1. UMUM (Lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 17 November 2025 dan Akta Nomor 17 tertanggal 23 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Drs. Dewa Made Indra, M.Si.
Komisaris Independen	: Ir. I Nengah Usdek Maharipa, M.M.
Komisaris	: I Kadek Budi Prasetya, S.H., M.H.

Direksi

Direktur Utama	: Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana., S. T.
Direktur Operasional	: I Made Gde Budi Dwipayana, S.E., Ak.
Direktur Keuangan	: Agus Adi Sana Putra, S.E., M.M.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 19 November 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Drs. Dewa Made Indra, M.Si.
Komisaris Independen	: Ir. I Nengah Usdek Maharipa, M.M.

Direksi

Direktur Utama	: I Ketut Widiana Karya, S.E., MBA.
Direktur	: I Ketut Indra Satya Dharma Putra, S.E., M.M.

Jumlah sumber daya manusia per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing 53 dan 47 orang dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Dewan Komisaris	3 (tiga) orang	2 (dua) orang
Direksi	3 (tiga) orang	2 (dua) orang
Karyawan Tetap	41 (empat puluh satu) orang	42 (empat puluh dua) orang
Calon Pegawai	6 (enam) orang	1 (satu) orang

Jumlah karyawan entitas anak, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 27 orang yang terdiri dari 17 orang pegawai tetap dan 10 orang pegawai kontrak, serta 22 orang yang terdiri 17 orang pegawai tetap dan 5 orang pegawai kontrak.

Entitas Anak

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung pada entitas anak berikut:

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan		Jumlah Aset	
		2025	2024	2025	2024
PT Bali Kerthi Development Fund Ventura	Modal Ventura	94,97%	80,98%	59.362.502.702	29.517.111.455

Paraf:……

1. UMUM (Lanjutan)

Entitas Anak (Lanjutan)

PT Bali Kerthi Development Fund Ventura sebelumnya bernama PT Sarana Bali Ventura didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 79 tertanggal 10 Desember 1994 dihadapan Notaris I Made Puryatma, S.H., Notaris di Denpasar. Akta tersebut mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 27 Desember 2023, dibuat dihadapan I Wayan Selamet, S.H., Notaris di Kota Denpasar terkait dengan perubahan susunan pemegang saham dimana PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) menjadi pemegang saham pengendali, serta terdapat perubahan Nama Perseroan yang semula PT Sarana Bali Ventura menjadi PT Bali Kerthi Development Fund Ventura serta Penetapan Logo Perseroan terbaru.

Perubahan mengenai Peningkatan Modal Setor Perseroan dan Pengesahan Penjualan Saham Simpanan yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 35 tanggal 28 Agustus 2025 oleh Notaris I Wayan Selamet, S.H di Denpasar dan sudah mendapat pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0060288.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 8 September 2025.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Bali Kerthi Development Fund Ventura ruang lingkup kegiatan adalah sebagai perusahaan modal ventura yang meliputi penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal *(start-up)* dan/atau pembiayaan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian di susun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian disusun berdasarkan konsep kesinambungan usaha dan harga perolehan, serta menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan Keuangan Entitas Anak disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan, menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar baru, amandemen, dan interprestasi yang telah diterbitkan dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi.
- Amandemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran.

Standar baru, amandemen, dan interprestasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109 “Instrumen keuangan” dan PSAK 107 “Instrumen keuangan: pengungkapan” tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan.
- Penyesuaian tahunan 2024 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- PSAK 118: “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan” yang akan menggantikan PSAK 201: “Penyajian Laporan Keuangan”.

Pada tanggal pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar, amandemen dan penyesuaian baru tersebut terhadap Laporan Keuangan Perseroan.

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki pengendalian. Pengendalian didapat ketika Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan tidak lagi mengkonsolidasikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perusahaan memperoleh kendali sampai tanggal Perusahaan tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

c. Prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang diserahkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi. Kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai wajar jumlah kepentingan non-pengendali atas jumlah aset teridentifikasi bersih yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada entitas anak tersebut.

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antara Perusahaan dan entitas anak yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perusahaan dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari saldo Kas dan Bank dan semua investasi yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dan bukan sebagai jaminan dan penggunaannya tidak dibatasi.

e. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan piutang kepada pihak ketiga atau mitra *re/co-guarantee*, pengakuan piutang dilakukan setiap terjadinya pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra dicatat sebagai piutang *co-guarantee*.

f. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk biaya dibayar dimuka *fee* agen yang diamortisir secara sistematik sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan.

g. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan; dan
- Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(a) Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual.
2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan métode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

(b) Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi tersebut dipenuhi:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.
2) Persyaratan kontraktual aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada tanggal 31 Desember 2025 Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

(c) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif. Akan tetapi perusahaan dapat menetapkan pilihan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajar disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Pada saat pengakuan awal perusahaan dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeleminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

Pada tanggal 31 Desember 2025 Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya. Kategori ini meliputi utang penjaminan ulang, utang penjaminan bersama, beban akrual, cadangan klaim, liabilitas lain-lain dalam penyelesaian yang dimiliki oleh Perusahaan.

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pangakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
c) Kontrak jaminan keuangan setelah pengakuan awal, penerbitan kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
   Jumlah penyisihan kerugian yang telah ditentukan dengan jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan (PSAK 115).
d) Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Penerbitan komitmen selanjutnya mengukur komitmen tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan bagian penurunan nilai dengan jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan (PSAK 115).
e) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika kombinasi bisnis diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

Opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yaitu, saat pengakuan awal perusahaan dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi jika sesuai dengan ketentuan, atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan karena:

a) Mengeleminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang dapat timbul dari liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.
b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Awal
Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam hal ini aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada niliai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan
Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, biaya perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klasifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan dengan andal. Pengukuran awal *(initial measurement)* dan pengukuran berikutnya *(subsequent measurement)* atas instrumen keuangan dan perlakuan akuntansi atas perubahan nilai wajar.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan
Perusahaan mengklasifikasi seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penilaian Model Bisnis
Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Perusahaan menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih granular (misalnya subportofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

a) Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
b) Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
c) Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan)

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perseroan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penilaian Model Bisnis (Lanjutan)
Pemilihan model operasi dalam PSAK 109 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Perusahaan dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (ECL) 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (ECL *lifetime*). Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sedangkan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Perusahaan mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur kecuali untuk instrumen berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

a) Instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
b) Instrumen keuangan yang risiko kreditnya tidak mengalami peningkatan signifikan sejak pengakuan awal

Perusahaan menentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan berdasarkan peringkat risiko kredit internal dan penilaian eksternal berupa *investment grade*.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit Signifikan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan:

a) Bagian dari hubungan lindung nilai.
b) Investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain.
c) Liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain.
d) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

c) Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluwarsa.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

h. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan sedangkan penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Penyusutan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Nilai penyusutan tahunan aset tetap adalah sebagai berikut:

Kelompok	Prosentase Penyusutan	Umur Ekonomis
Bangunan		
Permanen	5,00%	20 Tahun
Bukan Permanen	10,00%	10 Tahun
Bukan Bangunan		
Kelompok 1	25,00%	4 Tahun
Kelompok 2	12,50%	8 Tahun
Kelompok 3	6,25%	16 Tahun
Kelompok 4	5,00%	20 Tahun

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi periode terjadinya, sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (Kapitalisasi). Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

Untuk perolehan aset tetap baru kapitalisasinya ditentukan berdasarkan daftar aset yang dapat dikapitalisasi yang ditetapkan dengan SK Direksi tersendiri. Biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat transaksi pembelian aset tetap dapat dikapitalisasi dan menambah harga perolehan aset sepanjang biaya tersebut relevan dan terkait langsung dengan aset tetap yang bersangkutan.

i. Aset Tak Berwujud

Menurut PSAK 238 yang dimaksud aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Diakuinya sebuah aset tidak berwujud apabila:

a) Perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut.
b) Biaya biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal.

Aset tidak berwujud perusahaan terdiri dari perangkat lunak. Perangkat lunak diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya. Dalam menentukan besaran harga perolehan tergantung oleh bagaimana cara perolehan aset tidak berwujud. Apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aset tidak berwujud sebesar uang yang dikeluarkan atau akan dibayarkan. Dan apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan pertukaran dengan aset yang lain, maka harga perolehan aset tidak berwujudnya sebesar harga terkini dari aset yang ditukar.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan, temasuk pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), pendapatan investasi atas penempatan dana dengan pola konvensional dan pendapatan sewa dan servis gedung dicatat dan diakui atas dasar akrual *(accrual basis)*.

a. Pendapatan Bunga Investasi atas Penempatan Dana dengan Pola Konvensional
Pendapatan bunga dengan pola konvensional dicatat dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan perhitungan pendapatan bunga/investasi harian pada bulan berjalan. Dasar perhitungan hari untuk pisah batas atas *accrual* bunga deposito dan obligasi menggunakan pendekatan 1 (satu) tahun 365 hari untuk deposito dan 360 hari untuk obligasi.

Hasil investasi dari deposito berjangka, obligasi dan reksadana diakui atas dasar proporsi waktu sesuai dengan jumlah pokok dan suku bunga yang berlaku.

b. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan dan Pengembalian Imbal Jasa Penjaminan
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan diakui sebagai pendapatan apabila telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) serta diterima uangnya, kecuali untuk IJP yang dananya diperoleh dari subsidi atau hibah dari Pemerintah, meskipun dananya belum cair dapat diakui sebagai pendapatan IJP apabila surat jaminan dari pemerintah yang berkaitan dengan pembayaran IJP sudah keluar dan telah diterbitkan SP-nya. IJP yang telah diterima namun belum terbit SP dikredit ke akun penampungan sementara jasa jaminan.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengembalian IJP yang berada dalam tahun fiskal yang sama dengan saat penerimaannya didebit ke akun pendapatan IJP diterima dimuka. Pengembalian IJP yang berada dalam tahun fiskal yang berbeda dengan saat penerimaannya didebit ke akun beban pengembalian jasa penjaminan.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

a) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;

b) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

c) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

d) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;

e) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Bergantung pada skema penjaminan, pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus atau berdasarkan risiko yang telah direalisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan diterima dimuka.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Seluruh beban diakui sebagai beban ketika terjadinya kewajiban *(accrual basis)*.

Perhitungan akrual pendapatan Imbalan Jasa Penjaminan (IJP), beban Re Asuransi, dan beban *Fee Agent* untuk tahun 2025 berdasarkan perhitungan manual, sehubungan dengan program yang digunakan masih dalam tahap pengembangan.

l. Aset Lain-Lain

Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aset tetap, dan juga tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi/penyertaan, seperti: aset tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan dan aset lancar lainnya disajikan dalam kelompok aset lain-lain.

m. Utang Klaim

Utang klaim adalah utang yang timbul sehubung dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh rekanan yang belum dibayar oleh perusahaan. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar.

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Pengukuran cadangan klaim mengacu pada konsep perhitungan penurunan nilai dalam PSAK 109 instrumen keuangan yang dihitung dengan melakukan estimasi variabel makro yang terkorelasi dengan probabilitas klaim dan didasari total saldo penjaminan bruto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi

n. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain atau jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pihak lain demi kepentingan perusahaan. Biaya tersebut sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya, namun belum dibayarkan oleh perusahaan, sehingga masih merupakan utang atau kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk melunasinya.

o. Penampungan Sementara Jasa Penjaminan

Penampungan sementara merupakan akun yang dibentuk sebagai akun pembantu untuk transaksi yang terjadi atas nilai IJP, namun belum diketahui kejelasan transaksi tersebut. Sehingga pencatatan sementara dimasukan ke dalam akun penampungan sementara. Dan ketika transaksi tersebut telah diketahui kejelasannya maka nilai pada akun penampungan akan dijurnal balik pada periode tersebut.

p. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas tetapi belum menjadi hak karena masih terdapat kewajiban.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

q. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak bagian dari joint venture.

Perusahaan dan entitas anak mencatat investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas *(equity method)*. Dalam metode ekuitas Perusahaan mengakui bagian laba atau rugi pada entitas anak sesuai dengan porsi kepemilikan dalam laporan laba rugi.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan pinjaman yang diberikan / suatu kegiatan pembiayaan berupa penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha dan pembiayaan usaha produktif, dimana entitas anak menyediakan sejumlah dana yang akan dipergunakan bagi keperluan usaha Pasangan Usaha (PU).

Pola pembiayaan ini menentukan suatu persentase tertentu yang akan diberikan oleh PU kepada entitas anak.

r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Karyawan Jangka Pendek

Manfaat jangka pendek karyawan diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode Akrual. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Jangka Panjang dan Imbalan Pascakerja

Manfaat jangka panjang dan pascakerja, seperti pensiun, uang pesangon, uang jasa dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan "Peraturan Perusahaan" yang sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

Kewajiban untuk imbalan pascakerja yang diakui dalam Laporan Posisi Keuangan dihitung dengan nilai sekarang dari estimasi manfaat bahwa karyawan telah mendapatkan imbalan untuk jasa mereka dalam tahun berjalan dan sebelumnya, dikurangi dengan aset program. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Proyeksi Kredit Unit.

Ketika manfaat dari rencana berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan dibebankan atau dikreditkan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain pada metode Garis Lurus selama periode rata-rata atas layanan yang tersisa sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan tersebut. Untuk segera memperpanjang hak atas manfaat yang diterima tersebut, pengakuan atas beban harus segera dibuat di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

r. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Perusahaan menyediakan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti sebagai penghargaan yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Perkiraan biaya imbalan ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimal sekali setahun oleh aktuaris independen. Imbalan kerja jangka panjang lainnya yang jatuh tempo segera diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

s. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 212, “Pajak Penghasilan”. PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari “Beban Pajak Kini” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari “Beban Pajak Kini”.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku dan secara substansial berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain di tahun berjalan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut Laporan Keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan waktu kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan waktu yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

t. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 224 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (sebagai entitas pelapor), yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Paraf:……

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

t. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan)

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
   (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 35.

u. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs rupiah yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Aset dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dalam nilai rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal perolehan / kejadiannya.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi periode berjalan.

Tidak terdapat transaksi dalam mata uang asing untuk periode 31 Desember 2025.

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Paraf:……

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi 24 kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan.

Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Kas dan Setara Kas		
Kas	24.694.150	42.490.600
Bank	68.350.378.163	66.424.386.534
Deposito Berjangka	223.140.000.000	118.288.000.000
Sub jumlah	**291.515.072.313**	**184.754.877.134**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(193.497.284)	(189.894.700)
Jumlah	**291.321.575.029**	**184.564.982.435**

Paraf:……

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Rincian bank berdasarkan pihak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Bank :		
Pihak Berelasi		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Catatan 35)	25.099.579.712	31.060.618.583
Pihak Ketiga		
Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	10.196.136.532	9.704.569.475
Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	11.033.600.411	9.886.160.484
PT Bank Permata, Tbk	10.078.856.031	7.065.628.883
Koperasi	1.059.969.726	5.475.648.567
PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk	6.797.055.644	1.585.741.719
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	793.035.798	491.699.659
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	2.217.071.164	401.242.419
Badan Usaha Milik Desa	900.137.270	535.512.532
PT Bank Bukopin, Tbk	145.115.217	134.117.338
PT Bank MNC Internasional, Tbk	29.820.657	83.446.875
Jumlah	**68.350.378.163**	**66.424.386.534**

Dari nilai kas dan setara kas tersebut, terdapat penempatan pada lembaga keuangan yang bermasalah dan bersifat tidak likuid. Manajemen telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas sebesar nilai penempatan pada lembaga keuangan bermasalah tersebut dan hingga akhir periode pelaporan manajemen telah melakukan upaya penagihan secara intensif. Pada tahun 2025 Mutasi cadangan penurunan nilai kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	189.894.700	189.894.700
Penambahan (Catatan 31)	16.035.800	-
Pemulihan Tahun Berjalan	(12.433.214)	-
Jumlah	**193.497.284**	**189.894.700**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas kas dan setara kas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai kas dan setara kas.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat kas dan bank yang dibatasi penggunaannya.

5. DEPOSITO

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Deposito		
Deposito Berjangka	26.990.000.000	28.040.000.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Deposito	(5.840.758.693)	(3.965.210.866)
Jumlah	**21.149.241.307**	**24.074.789.134**

Paraf:……

5. **DEPOSITO (Lanjutan)**

Mutasi penyisihan penurunan nilai deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	3.965.210.866	3.846.900.000
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 31)	1.875.547.827	118.310.866
Jumlah	**5.840.758.693**	**3.965.210.866**

Manajemen berpendapat jumlah cadangan kerugian penurunan nilai deposito berjangka cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito berjangka.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas penempatan deposito periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berkisar antara 2,90% - 6,75% dan antara 3,00% - 6,75%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat deposito yang dibatasi penggunannya.

6. **INVESTASI LANCAR LAINNYA**

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Investasi Lancar Lainnya		
Tabungan Arisanku Pancakanti	100.000.000	-
Jumlah	**100.000.000**	**-**

Tabungan Arisanku Pancakanti pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp100.000.000 merupakan investasi pada tabungan berjangka BPR Sukawati Pancakanti dengan jangka waktu 12 bulan dan tingkat suku bunga sebesar 0,25%.

7. PIUTANG CO-GUARANTEE

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Piutang Co-Guarantee		
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	76.025.381.039	63.520.813.225
PT Pertalife Insurance	9.486.837.883	9.373.123.078
PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia	3.257.692.177	1.230.033.497
Sub Jumlah	**88.769.911.099**	**74.123.969.800**
Piutang Refund		
PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia	1.095.654.148	532.309.136
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	-	591.762.580
PT Pertalife Insurance	-	1.886.852
Sub Jumlah	**1.095.654.148**	**1.125.958.568**
Jumlah Piutang Co-Guarantee	**89.865.565.247**	**75.249.928.367**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Co-Guarantee	(70.423.092.017)	(40.982.717.008)
Jumlah	**19.442.473.229**	**34.267.211.359**

7. PIUTANG CO-GUARANTEE (Lanjutan)

Paraf:……

Penjelasan mengenai piutang *co-guarantee* adalah sebagai berikut:

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi
Pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat peningkatan pada piutang *co-guarantee* pada PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi karena peningkatan jumlah klaim yang terjadi pada tahun 2025 namun klaim tersebut belum dibayarkan kepada Perusahaan.

Dalam rangka memitigasi risiko, sejak bulan Juni tahun 2022, Perusahaan telah memberhentikan pengajuan penjaminan ulang kepada PT Jakarta Pialang Reasuransi. Pembayaran piutang *co-guarantee* dilakukan melalui pemotongan langsung pembayaran IJP penjaminan ulang, sehingga dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2025 tidak terdapat IJP penjaminan ulang yang dipotong langsung untuk pembayaran klaim dari rekanan.

Perusahaan telah melakukan upaya penagihan dan komunikasi secara intensif dengan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi dalam rangka penyelesaian piutang. Berdasarkan Surat No. 372/JAKRE/DIR/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi telah menyampaikan komitmen pembayaran uang muka klaim sebesar Rp18.521.469.474,-. dan *timeline* penyelesaian pembayaran piutang tahap pertama sebesar Rp13.000.000.000,- pada bulan Maret 2026, pembayaran tahap kedua sebesar Rp5.521.469.474,-. Berkaitan dengan komitmen tersebut, Perusahaan telah menerima komitmen pembayaran klaim pada bulan Desember 2025 sebesar Rp500.000.000,-.

Mutasi pembayaran dan pengajuan klaim kepada PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	63.520.813.225	47.776.204.688
Pengajuan Klaim	14.703.936.465	20.536.152.434
Offset Klaim	(1.263.439.035)	-
Pembayaran Klaim	(935.929.616)	(4.791.543.897)
Saldo Akhir	**76.025.381.039**	**63.520.813.225**

PT Pertalife Insurance
Perusahaan telah melayangkan somasi kepada PT Pertalife Insurance (sebelumnya PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri) terkait dengan penagihan piutang *co-guarantee* kepada PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri melalui Advokat dan Konsultan Hukum I Made Suwena, S.H. berdasarkan surat kuasa yang diterbitkan Perusahaan Nomor: 027/JBM/SK/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 dengan surat somasi dari advokat Nomor: 011/III/MS-Somasi/2022 tanggal 01 Maret 2022.

Pada tahun 2025, Perusahaan telah mengajukan permohonan arbitrase melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) berdasarkan surat No. 31/Wa/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 atas klaim asuransi yang belum dibayar sebesar Rp9.486.837.981,-. Pada tanggal 5 Januari 2026, Perusahaan melayangkan somasi ke-III kepada PT Pertalife Insurance berdasarkan surat somasi dari kuasa hukum Perusahaan No. 02/WA/I/2026 terkait pemenuhan kewajiban pembayaran klaim tersebut.

Paraf:……

7. PIUTANG CO-GUARANTEE (Lanjutan)

PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia

Pada tahun 2025, terdapat peningkatan pada piutang *co-guarantee* kepada PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia disebabkan adanya perubahan dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia yang masih dalam tahap negosiasi. Sebagai upaya dalam penyelesaian piutang tersebut, Perusahaan dan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia telah bersepakat untuk melakukan pencairan atas rekening bersama a.n Jamkrida Bali Reliance KSO berdasarkan Surat Persetujuan Penggunaan Rekening Bersama No. 1121/AJRI-DIR/XI/2025 tanggal 13 November 2025 sebesar Rp1.032.417.675,- yang masih dalam tahap proses pencairan.

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang *co-guarantee* adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	40.982.717.008	19.313.757.770
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 31)	29.440.375.009	21.668.959.238
Saldo Akhir	**70.423.092.017**	**40.982.717.008**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang *co-gurantee* cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai piutang *co-guarantee*.

8. PIUTANG USAHA

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Usaha :		
Piutang Pendapatan Surety Bond	1.421.393.466	473.196.967
Piutang Pendapatan Kupon Obligasi	1.083.121.844	873.400.677
Piutang Pendapatan Bunga Deposito	294.742.217	217.856.929
Piutang Bunga - Entitas Anak	2.655.000	7.576.000
Piutang Pendapatan Lainnya	-	2.465.576
Jumlah Piutang Usaha	**2.801.912.527**	**1.574.496.149**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	(635.948.507)	(635.948.507)
Jumlah	**2.165.964.020**	**938.547.643**

Piutang pendapatan *surety bond* pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.421.393.466,- dan Rp473.196.967,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Pendapatan Surety Bond (Jaminan Pelaksanaan)	585.960.772	65.439.414
Piutang Pendapatan Surety Bond (Jaminan Pemeliharaan)	552.997.504	103.116.252
Piutang Pendapatan Surety Bond (Jaminan Uang Muka)	261.648.722	303.976.969
Piutang Pendapatan Surety Bond (Jaminan Penawaran)	20.786.468	664.332
Jumlah	**1.421.393.466**	**473.196.967**

Piutang pendapatan *surety bond* pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.421.393.466,- merupakan piutang atas penjaminan *surety bond* kepada PT Prima Amertha Mulia, dan telah diterima pelunasannya pada bulan Januari 2026.

Paraf:……

8. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	635.948.507	185.948.507
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 31)	-	450.000.000
Saldo Akhir	**635.948.507**	**635.948.507**

Manajemen berpendapat jumlah cadangan kerugian nilai piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai piutang usaha.

9. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Piutang Lain-lain :		
Piutang Lainnya	308.321.101	1.515.418
Piutang Karyawan	161.379.761	155.424.859
Jumlah	**469.700.862**	**156.940.278**

,

10. UANG MUKA

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Uang Muka :		
Uang Muka - Entitas Anak	384.359.390	134.477.181
Uang Muka Pajak PPh Pasal 21	56.554.350	4.048.209
Uang Muka PPh Pasal 25 - Entitas Anak	27.133.332	-
Uang Muka Penyempurnaan dan Pengadaan Sistem Informasi	-	105.000.000
Uang Muka Lainnya	52.747.200	50.444.000
Jumlah	**520.794.272**	**293.969.390**

Uang Muka Pajak PPh Pasal 21 pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp56.554.350,- merupakan kelebihan pembayaran pajak masa Desember 2024 sebesar Rp26.621.376,- yang akan diajukan untuk pengembalian melalui skema restitusi serta kelebihan pembayaran pajak masa Desember 2025 sebesar Rp29.932.974,- yang akan dikompensasikan dengan pembayaran pajak masa berikutnya.

Pada tahun 2025, Uang Muka Lainnya sebesar Rp52.747.200,- merupakan uang muka atas Pekerjaan Pengembangan Sistem E-Office PT Jamkrida Bali Mandara berdasarkan PKS Nomor 043a/Jamkrida Bali - PKS/X/2025 - A2/54/TRFID/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, dengan total nilai kontrak sebesar Rp158.400.000,- belum termasuk PPN.

Paraf:……

10. UANG MUKA (Lanjutan)

Pada tahun 2025, Perusahaan telah menerima serah terima penyelesaian atas uang muka kontrak paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengupahan Berbasis Kinerja PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: 051a/Jamkrida Bali-PKS/VI/2023 / 14.10/SBM/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 dengan nilai kontrak atas pekerjaan proyek yang disepakati adalah Rp150.000.000,- sudah termasuk PPN berdasarkan sehingga dilakukan reklasifikasi menjadi aset tidak berwujud (Catatan 15).

Uang muka entitas anak terdiri dari uang muka penagihan dan uang muka lainnya. Uang muka penagihan pada entitas anak merupakan talangan biaya dalam proses penyelesaian pembiayaan usaha produktif untuk debitur yang bermasalah.

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Biaya Dibayar di Muka :		
Biaya Re-Asuransi Dibayar di Muka	49.470.766.474	77.418.942.376
Biaya Fee Agent Dibayar di Muka	23.801.119.343	20.869.542.418
Biaya Co-Guarantee Dibayar Dimuka	538.915.681	8.126.608
Biaya Dibayar Dimuka - Entitas Anak	213.847.122	246.309.050
Biaya Asuransi Kendaraan Kantor Dibayar Dimuka	5.301.072	5.529.363
Biaya Asuransi Gedung Kantor Dibayar Dimuka	5.060.807	5.060.808
Biaya Sewa Gedung Dibayar di Muka (Catatan 34)	3.124.998	3.125.000
Biaya Premi Jamsostek Dibayar Dimuka	-	201.600
Sub Jumlah	**74.038.135.497**	**98.556.837.222**
Dikurangi: Bagian Lancar	(22.659.359.474)	(3.751.136.811)
Jumlah	**51.378.776.022**	**94.805.700.412**

Biaya Reasuransi Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan pembayaran imbalan jasa dilakukan oleh perusahaan kepada Perusahaan reasuransi atas penjaminan ulang yang dilakukan perusahaan dan akan dibebankan berdasarkan jangka waktu penjaminan.

Biaya *Fee Agent* Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan pembayaran *fee* atas pemasaran yang dilakukan oleh agen Perusahaan dan akan dibebankan berdasarkan jangka waktu penjaminan.

Paraf:……

12. EFEK

Rincian efek yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun		
Obligasi Korporasi		
Obligasi PT Danareksa (Persero)	500.000.000	-
Jumlah Obligasi	**500.000.000**	**-**
Reksadana		
Reksadana Pendapatan Tetap PNM Venture Capital	8.000.000.000	-
Jumlah	**8.000.000.000**	**-**
Jangka Panjang		
Obligasi Pemerintah		
Obligasi FR83	25.807.627.807	12.163.660.243
Obligasi FR75	12.157.692.374	10.375.247.161
Obligasi FR98	20.799.816.605	20.718.647.200
Obligasi FR65	10.358.350.009	9.874.263.104
Obligasi FR59	9.925.543.325	9.883.854.378
Obligasi FR76	9.885.076.285	5.112.477.572
Obligasi FR92	9.251.367.569	10.271.606.558
Obligasi FR89	5.110.510.967	5.002.415.188
Obligasi FR97	5.103.826.526	9.258.562.503
Obligasi FR106	5.002.383.805	-
Nilai Tercatat		
Setelah diskonto/premi yang belum diamortisasi sebesar Rp7.402.192.272 per 31 Desember 2025 dan Rp1.660.733.907 per 31 Desember 2024	**113.402.195.272**	**92.660.733.907**
Obligasi Korporasi		
Obligasi PT Danareksa (Persero)	1.000.000.000	1.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000
Nilai Tercatat	**2.000.000.000**	**2.500.000.000**
Jumlah Obligasi	**115.402.195.272**	**95.160.733.907**
Reksadana		
Reksadana Penyertaan Terbatas PNM Venture Capital II	2.000.000.000	10.000.000.000
Nilai Tercatat	**2.000.000.000**	**10.000.000.000**
Jumlah Efek	**117.402.195.272**	**105.160.733.907**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.031.786.472)	(3.144.223.833)
Jumlah	**114.370.408.800**	**102.016.510.074**

	Rate	Harga NAB	Nominal	Jatuh Tempo
Reksadana				
Reksadana PNM Venture Capital	8,850%	Rp1.000	Rp1.000.000.000	25 Januari 2026
Reksadana PNM Venture Capital	8,850%	Rp1.000	Rp7.000.000.000	25 Januari 2026
Reksadana PNM Venture Capital	8,500%	Rp1.000	Rp2.000.000.000	18 Desember 2027

Paraf:……

12. EFEK (Lanjutan)

	Kupon	Pemeringkat	Peringkat	Jatuh Tempo
Obligasi Pemerintah *)				
Obligasi FR59	7,000%	-	-	15 Mei 2027
Obligasi FR65	6,625%	-	-	15 Mei 2033
Obligasi FR75	7,500%	-	-	15 Mei 2038
Obligasi FR89	6,875%	-	-	15 Agustus 2051
Obligasi FR92	7,125%	-	-	15 Juni 2042
Obligasi FR83	7,500%	-	-	15 April 2040
Obligasi FR76	7,375%	-	-	15 Mei 2048
Obligasi FR97	7,125%	-	-	15 Juni 2043
Obligasi FR98	7,125%	-	-	15 Juni 2038
Obligasi FR106	7,125%	-	-	15 Agustus 2040
Obligasi Korporasi				
Obligasi PT Danareksa (Persero)	8,000%	Pefindo	idAA	08 Februari 2028
Obligasi PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk	7,000%	Pefindo	IdAA	10 Desember 2027

*) Obligasi pemerintah tidak dirating oleh lembaga pemeringkat efek

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat obligasi atau reksadana yang dijadikan agunan.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang efek adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	3.144.223.833	3.144.223.833
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 31)	(112.437.361)	-
Saldo Akhir	**3.031.786.472**	**3.144.223.833**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas penurunan nilai efek.

13. ASET LAIN-LAIN

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Aset Lain-Lain		
Investasi Pembiayaan Usaha Produktif - Entitas Anak	27.888.975.988	19.859.307.183
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(312.403.817)	(269.270.449)
	27.576.572.171	**19.590.036.734**
Obligasi Konversi - Entitas Anak	1.650.000.000	2.290.000.000
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.000.000)	(9.900.000)
	1.643.000.000	**2.280.100.000**
Investasi Saham - Entitas Anak	1.448.493.259	1.271.629.039
Agunan Yang Diambil Alih - Entitas Anak	737.916.666	737.916.666
Jumlah	**31.405.982.096**	**23.879.682.439**

Paraf:……

13. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)

Investasi Pembiayaan Usaha Produktif
Investasi Pembiayaan Usaha Produktif merupakan pinjaman yang diberikan entitas anak pada Pasangan Usaha (PU) dalam rangka pengembangan usaha dan pembiayaan usaha produktif.

Penjabaran dan kualitas pembiayaan investasi pembiayaan usaha produktif per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

	Jumlah Pasangan Usaha	Investasi Outstanding
Dana Sendiri Perusahaan	112	27.883.578.988
Dana Komersial/Pihak Ketiga	2	5.397.000
	114	**27.888.975.988**

	Kualitas Pembiayaan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Dana Sendiri Perusahaan	26.398.460.988	912.792.000	-	-	572.326.000	27.883.578.988
Dana Komersial/Pihak Ketiga	5.397.000		-	-	-	5.397.000
	26.403.857.988	**912.792.000**	**-**	**-**	**572.326.000**	**27.888.975.988**

Rincian cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

	Seharusnya Dibentuk	Telah Dibentuk	Persentase Dibentuk
Lancar	178.146.663	178.146.663	100%
Dalam Perhatian Khusus	41.386.196	41.386.196	100%
Non Perform	92.870.958	92.870.958	100%
Jumlah	**312.403.817**	**312.403.817**	**100%**

Obligasi Konversi
Obligasi Konversi merupakan pinjaman yang diberikan entitas anak kepada Pasangan Usaha tahap rintisan awal (*start-up*) dalam bentuk penyertaan melalui obligasi konversi.

Rincian obligasi konversi entitas anak per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
PT Sarana Bali Dwipa Jaya/PT Mitra Bali Property	700.000.000	990.000.000
PT Lima Bakti Bersaudara	600.000.000	900.000.000
PT Wahana Fajar Utama	350.000.000	400.000.000
Sub - jumlah	**1.650.000.000**	**2.290.000.000**
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.000.000)	(9.900.000)
Jumlah	**1.643.000.000**	**2.280.100.000**

Paraf:……

13. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)

	No. Seri	Rate	Nominal	Jatuh Tempo
Obligasi Koversi				
PT Sarana Bali Dwipa Jaya	00005-11-25-SBDJ	12%	Rp700.000.000	31 Desember 2026
PT Lima Bakti Bersaudara	00010-10-22-PTLBB	14%	Rp100.000.000	10 Oktober 2026
	00011-10-22-PTLBB	14%	Rp100.000.000	10 Oktober 2026
	00012-10-22-PTLBB	14%	Rp100.000.000	10 Oktober 2027
	00013-10-22-PTLBB	14%	Rp100.000.000	10 Oktober 2027
	00014-10-22-PTLBB	14%	Rp100.000.000	10 Oktober 2027
	00015-10-22-PTLBB	14%	Rp100.000.000	10 Oktober 2027
PT Wahana Fajar Utama	00004-07-23-PTWFU	14%	Rp50.000.000	31 Juli 2026
	00005-07-23-PTWFU	14%	Rp50.000.000	31 Juli 2027
	00006-07-23-PTWFU	14%	Rp50.000.000	31 Juli 2027
	00007-07-23-PTWFU	14%	Rp50.000.000	31 Juli 2027
	00008-07-23-PTWFU	14%	Rp50.000.000	31 Juli 2027
	00009-07-23-PTWFU	14%	Rp50.000.000	31 Juli 2027
	00010-07-23-PTWFU	14%	Rp50.000.000	31 Juli 2027

Investasi Saham

Investasi Saham merupakan pinjaman yang diberikan entitas anak kepada Pasangan Usaha tahap rintisan awal (*start-up*) dalam bentuk penyertaan saham. Rincian investasi saham entitas anak per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

	Persentase Kepemilikan	Kegiatan Usaha	2025
PT Komodo Escape Prawara	24,98%	Jasa Pariwisata	1.036.856.634
PT Kaya Anugerah Bali	27,27%	Perdagangan	251.244.528
PT Sarana Bali Dwipa Jaya	49,00%	Property	65.392.097
PT Baswara Trans Selaras	19,00%	Pengembangan Ekosistem Mobil Listrik	95.000.000
Jumlah			**1.448.493.259**

Rekonsiliasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba (rugi) dan jumlah tercatat dari penyertaan saham pada Pasangan Usaha adalah sebagai berikut:

	Nilai Tercatat Awal Tahun	Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2025	Nilai Tercatat 2025
PT Komodo Escape Prawara	948.754.277	88.102.357	1.036.856.634
PT Kaya Anugerah Bali	262.073.169	(10.828.641)	251.244.528
PT Sarana Bali Dwipa Jaya	60.801.593	4.590.504	65.392.097
PT Baswara Trans Selaras	95.000.000	-	95.000.000
Jumlah	**1.366.629.039**	**81.864.220**	**1.448.493.259**

Pada tahun 2025, entitas anak melakukan penyertaan modal pada PT Baswara Trans Selaras sesuai Proposal Penyertaan Saham Nomor 001/PPS/BDF/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025. Berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Investasi bahwa perusahaan entitas anak melakukan penyertaan saham sebanyak 190 lembar saham dengan nilai nominal Rp95.000.000,- yang mewakili 19% kepemilikan saham dari total saham yang ditempatkan dan disetor. Perusahaan menggunakan Metode Biaya atau Nilai Wajar dimana perusahaan mencatat investasi sesuai Harga Perolehan awal dan hanya mengakui dividen sebagai pendapatan.

Paraf:……

13. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)

Akta Pendirian PT Baswara Trans Selaras Nomor 4 Tanggal 7 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris I Wayan Selamet, S.H. Perusahaan berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 150, Komplek IDT/Genteng Biru Blok B 23-24 dan bergerak di bidang Pengembangan Ekosistem Mobil Listrik *(Electric Vehicle* atau EV).

14. ASET TETAP DAN INVENTARIS

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
Tanah	19.306.130.000	73.434.000	-	19.379.564.000
Bangunan	4.678.378.064	8.111.667	-	4.686.489.731
Kendaraaan	1.907.843.500	283.600.000	239.250.000	1.952.193.500
Inventaris Kantor	2.378.775.637	387.654.536	77.747.006	2.688.683.167
Jumlah Biaya Perolehan	**28.271.127.201**	**752.800.203**	**316.997.006**	**28.706.930.398**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	895.686.718	250.042.468	-	1.145.729.195
Kendaraan	1.235.791.470	195.894.491	236.757.813	1.194.928.122
Inventaris Kantor	1.907.837.869	261.211.370	76.185.397	2.092.863.809
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**4.039.316.057**	**707.148.329**	**312.943.210**	**4.433.521.148**
Nilai Tercatat	**24.231.811.143**			**24.273.409.272**

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
Tanah	1.011.820.000	18.294.310.000	-	19.306.130.000
Bangunan	1.149.518.596	3.528.859.468	-	4.678.378.064
Kendaraaan	1.907.843.500	-	-	1.907.843.500
Inventaris Kantor	2.248.792.157	159.778.480	29.795.000	2.378.775.637
Jumlah Biaya Perolehan	**6.317.974.253**	**21.982.947.948**	**29.795.000**	**28.271.127.201**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	708.150.846	187.535.872	-	895.686.718
Kendaraan	1.027.754.758	208.036.712	-	1.235.791.470
Inventaris Kantor	1.718.039.403	216.093.459	26.294.993	1.907.837.869
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**3.453.945.007**	**611.666.049**	**26.294.993**	**4.039.316.058**
Nilai Tercatat	**2.864.029.245**			**24.231.811.143**

Beban penyusutan aset tetap inventaris untuk 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp707.148.329,- dan Rp611.666.049,- (Catatan 31).

Pada tahun buku per 31 Desember 2025 dan 2024 terdapar Aset Tanah pada Entitas Anak yang dijadikan sebagai agunan atas pinjaman Bank BPD Bali (Catatan 28).

Paraf:……

14. ASET TETAP DAN INVENTARIS (Lanjutan)

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan untuk aset kendaraan sebesar Rp900.500.000,-, *property all risk* (inventaris dan bangunan) dan *earthquake insurance* sebesar Rp4.500.000.000,- per 31 Desember 2025 dan 2024, yang menurut manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang mungkin dialami. Entitas anak juga telah mengasuransikan beberapa Aset Bangunan *Property All Risk* dan Gempa Bumi pada PT Asuransi Ramayana dengan nilai pertanggungan Rp6.000.000.000,-.

Aset Tanah Perusahaan berlokasi Jalan Surapati Nomor 8 Denpasar dan dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 22.09.000026386.0 dengan luas 976m^2 dengan jangka waktu berakhirnya hak tanggal 24 Juli 2055. Hingga akhir periode pelaporan, tidak ada rencana perubahan tata ruang dari pemerintah yang berdampak pada aset tanah Perusahaan sehingga manajemen berpendapat bahwa masa manfaat ekonomis atas tanah adalah tidak terbatas.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atas nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tahun 2025 dan 2024 terdapat penjualan aset tetap kendaraan dan inventaris kantor secara lelang. Rincian penjualan aset tetap yaitu sebagai berikut:

	2025	2024
Hasil Penjualan Aset Tetap	13.963.395	4.639.000
Nilai Tercatat	-	-
Laba Penjualan Aset Tetap	**13.963.395**	**4.639.000**

15. ASET TIDAK BERWUJUD

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Aset Tidak Berwujud		
Sistem Informasi Jamkrida	1.142.324.247	912.037.897
Software dan Lisensi - Entitas Anak	38.400.775	38.400.775
Akumulasi Amortisasi	(599.877.197)	(476.785.957)
Nilai Tercatat	**580.847.826**	**473.652.716**

Paraf:……

15. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

Sistem Informasi Jamkrida

Keterangan	Biaya Perolehan	Akumulasi Amortisasi 31-Des-24	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 31-Des-25	Nilai Tercatat
Sistem Informasi Jamkrida (CV Rumah Media)	154.545.455	154.545.455	-	154.545.455	-
Sistem & Penambahan Fitur (CV Rumah Media)	10.909.091	10.909.091	-	10.909.091	-
Sistem & Penambahan Fitur (CV Ganesha Global)	72.000.000	72.000.000	-	72.000.000	-
Server Sistem Informasi Manajemen Jamkrida	110.040.052	84.364.040	22.008.010	106.372.050	3.668.002
Sistem E-Office Jamkrida	85.560.300	58.466.205	17.112.060	75.578.265	9.982.035
Website Company Profile	23.310.000	6.070.313	2.913.750	8.984.063	14.325.938
Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi	160.890.200	35.194.731	20.111.275	55.306.006	105.584.195
Pengembangan SIMT	67.132.800	8.391.600	8.391.600	16.783.200	50.349.600
Sistem Jamkrida Digital Information (JDI) dan Suretyship Online	127.650.000	5.318.750	15.956.250	21.275.000	106.375.000
Biaya Perencanaan dan Pengawasan Sistem JDI & SO	100.000.000	3.125.000	12.500.000	15.625.000	84.375.000
Pengembangan SIMT	30.286.350	-	3.785.794	3.785.794	26.500.556
Sistem Pengupahan Berbasis Kinerja	150.000.000	-	18.750.000	18.750.000	131.250.000
Sistem Host To Host (H2H)	50.000.000	-	1.562.500	1.562.500	48.437.500
Software dan Lisensi - Entitas Anak	38.400.775	38.400.775	-	38.400.775	-
Jumlah	**1.180.725.022**	**476.785.957**	**123.091.237**	**599.877.197**	**580.847.826**

Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp123.091.237,- dan Rp78.980.444,- (Catatan 31).

Rincian penjelasan atas Sistem Informasi Jamkrida adalah sebagai berikut:

1) Sistem Informasi Jamkrida

Pengadaan Sistem Informasi Jamkrida berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 039/Jamkrida Bali-PKS/XI/2013, antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan CV Rumah Media di Denpasar. Harga kontrak yang disepakati adalah Rp170.000.000, sudah termasuk pajak. Tata cara pembayaran sebagai berikut:

a) Termin I / *Down Payment (DP)* sebesar 40% dari harga kontrak (Rp170.000.000), dibayar 2 (dua) minggu pada bulan I setelah jadwal pengerjaan.
b) Termin II sebesar 55% pada saat pekerjaan telah mencapai 100% atau pada bulan II serah terima akhir.
c) Sisa pembayaran Termin III yaitu sebesar 5% setelah masa pemeliharaan berakhir atau hingga *software* aplikasi dapat diterapkan dengan baik di perusahaan.

Paraf:……

15. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

Rincian penjelasan atas Sistem Informasi Jamkrida adalah sebagai berikut (Lanjutan):

1) Sistem Informasi Jamkrida (Lanjutan)

Berikut rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk pengadaan Sistem Informasi Jamkrida.

Tanggal	Keterangan		Jumlah
17/12/2013	Termin 1 (40%)	Rp	61.818.182
11/04/2014	Termin 2 (55%)	Rp	85.000.000
13/11/2014	Termin 3 (5%)	Rp	7.727.273
	Harga Perolehan	**Rp**	**154.545.455**

2) Penambahan Fitur Sistem Informasi Jamkrida

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 092/Jamkrida Bali-PKS/XI/2014/ 105/RM/XI/2014 tanggal 28 November 2014 antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan CV Rumah Media di Denpasar, harga yang disepakati sebesar Rp10.000.000,- sudah termasuk PPN. Masa pengerjaan 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 1 Desember 2014, masa uji coba paling lambat 1 (bulan) setelah jangka waktu pengerjaan selesai, dan kemudian masa pemeliharaan 2 (dua) bulan setelah masa serah terima perbaikan akhir. Cara pembayaran ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:

a) Termin I / *Down Payment (DP)* sebesar 50% dari harga kontrak (Rp10.000.000), dibayar pada awal jadwal pengerjaan atau setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
b) Termin II sebesar 50% pada saat pekerjaan telah mencapai 100% atau pada akhir bulan II (masa uji coba).
c) Perusahaan telah membayar termin I dan II dengan total sebesar Rp10.000.000 (sudah termasuk PPN) dan biaya tambahan lainnya sebesar Rp2.000.000.

3) Penambahan Fitur Sistem Informasi Jamkrida *Surenty Bonds* dan KBG

Perusahaan telah melakukan penambahan sistem *sofware surenty bonds* dengan vendor Ganesha Global dan pembayaran termin IV tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp72.000.000.

4) Server Sistem Informasi Manajemen Jamkrida

Perusahaan melakukan pengadaan server pada CV Seulawah Information Technology yang sesuai dengan kebutuhan sistem di PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), berdasarkan keputusan Internal Memo No.074/IM/JBM/II/2021 tanggal 3 Februari 2021. Spesifikasi produk server yang dibeli yaitu Server SYS – 1029P- WTR dengan total nilai pengadaan yaitu Rp110.040.052.

5) Sistem E-Office Jamkrida

Pekerjaan pengembangan Sistem E-Office PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 028/Jamkrida Bali-PKS/III/2021/01.015.16/SAS-PKS/III/2022 tanggal 02 Maret 2021 antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan PT Solusi Anak Sakti, nilai kontrak pengerjaan yang disepakati sebesar Rp85.050.000,- sudah termasuk pajak. Masa pengerjaan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 dengan penyerahan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan selesai yaitu pada tanggal 2 Juni 2022.

Paraf:……

15. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

6) Website Company Profile

Perusahaan melakukan kerja sama pengembangan *Website Company Profile* PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan CV Tridatu Solution berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 103/Jamkrida Bali-PKS/IX/2022 /01.TDS-PKS/X/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Pekerjaan Pengembangan *Website Company Profile* PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan nilai kontrak sebesar Rp12.210.000,-. Terdapat Addendum I Perjanjian Kerjasama berdasarkan perjanjian Nomor: 066/Jamkrida Bali-ADD/X/2022 /01.19/TDS-PKS/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, mengubah ketentuan ayat (1) pasal 4 tentang nilai kontrak dalam Perjanjian Induk, dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp23.310.000,-.

7) Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi

Perusahaan melakukan proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PT Jamkrida Bali Mandara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 50.a/Jamkrida Bali-PKS/VII/2019/ 0093.2/PKS/PT.GIN/VII/2019 antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan PT Global Intermedia Nusantara. Nilai kontrak atas pekerjaan proyek yang disepakati adalah Rp149.000.000,- belum termasuk pajak.

8) Sistem Jamkrida Digital Information (JDI) dan Suretyship Online

Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Jamkrida Digital (JDI) dan Suretyship Online PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) yang bekerjasama dengan CV Tridatu Solusindo berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: 029/Jamkrida Bali-PKS/III/2023 / 01.03/TDS-PKS/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan nilai kontrak atas pekerjaan proyek yang disepakati adalah Rp127.650.000,- sudah termasuk PPN. Terkait dengan Biaya Perencanaan dan Pengawasan Sistem JDI & SO dilakukan oleh CV Sari Bakti Meening dengan nilai kontrak Rp100.000.000.

9) Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi Manajemen

Perusahaan melakukan proyek Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi Manajemen PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 043/Jamkrida Bali-PKS/V/2023 / 0092.1/PKS/PT.GIN/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan PT Global Intermedia Nusantara dengan nilai total pekerjaan proyek sebesar Rp103.680.000 tidak termasuk pajak.

10) Sistem Pengupahan Berbasis Kinerja

Perusahaan melakukan proyek Sistem Pengupahan Berbasis Kinerja PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 051a/Jamkrida Bali-PKS/VI/2023 / 14.19/SBM/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan PT Global Intermedia Nusantara dengan nilai total pekerjaan proyek sebesar Rp150.000.000 termasuk pajak.

11) Sistem Host to Host (H2)

Perusahaan melakukan proyek Sistem Host to Host (H2H) Penjaminan Kredit Multiguna berdasarkan Perjanjian kerjasama No. 021/Jamkrida Bali-PKS/II/2-23 / 14.022/SBM/II/2023 tanggal 20 Februari yang telah diaddendum beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum II No. 037/Jamkrida Bali-ADD/IX/2023 / 14.011/SBM/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000 sudah termasuk pajak.

Paraf:……

16. ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan. Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan waktu temporer pengakuan aset dan liabilitas antara akuntansi dengan fiskal berjumlah sebagai berikut:

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Pendapatan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset Pajak Tangguhan:				
Liabilitas Imbalan Pascakerja	392.988.515	54.562.430	181.362.157	628.913.102
Realisasi Pembayaran Manfaat	(320.024.542)	(192.586.593)	-	(512.611.135)
Aset Pajak Tangguhan Perusahaan	**72.963.973**	**(138.024.164)**	**181.362.157**	**116.301.967**
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak	**5.387.277**	**(61.142)**	**-**	**5.326.135**
Jumlah	**78.351.250**	**(138.085.306)**	**181.362.157**	**121.628.102**

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Pendapatan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset Pajak Tangguhan:				
Liabilitas Imbalan Pascakerja	319.710.305	61.614.812	11.663.398	392.988.515
Realisasi Pembayaran Manfaat	(266.215.346)	(53.809.195)	-	(320.024.542)
Aset Pajak Tangguhan Perusahaan	**53.494.959**	**7.805.616**	**11.663.398**	**72.963.973**
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak	**5.689.002**	**(301.725)**	**-**	**5.387.277**
Jumlah	**59.183.961**	**7.503.891**	**11.663.398**	**78.351.250**

17. UTANG KLAIM

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Utang Klaim :		
Utang Klaim Sektor Non Produktif	790.566.263	190.020.748
Utang Klaim Sektor Jasa dan Dagang KU	217.575.809	992.027.073
Jumlah	**1.008.142.072**	**1.182.047.821**

Utang klaim pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.008.142.072,- merupakan klaim yang telah disetujui untuk dibayar, namun belum dilakukan pendebetan oleh rekanan, yang terdiri dari 16 terjamin.

Paraf:……

18. UTANG PAJAK

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Utang Pajak :		
Perusahaan		
PPh Pasal 23	12.589.578	7.351.656
Entitas Anak		
PPh Pasal 21	975.146	7.461.760
PPh Pasal 23	85.586	562.520
PPh Pasal 25	-	1.900.140
PPh Pasal 29	-	4.867.794
Jumlah	**13.650.310**	**22.143.869**

Utang pajak penghasilan 23 sebesar Rp12.589.578,- serta Utang Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 entitas anak masing-masing sebesar Rp975.146,- dan Rp85.586,- merupakan utang pajak masa Desember 2025 yang mana telah dilunasi oleh Perusahaan pada bulan Januari 2026.

Rekonsiliasi antara laba komersil sebelum taksiran pajak penghasilan dengan taksiran pajak penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025	2024
LABA KONSOLIDASIAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**8.915.323.288**	**7.113.896.237**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN ENTITAS ANAK	**(119.195.905)**	**(147.359.157)**
LABA PERUSAHAAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**8.796.127.383**	**6.966.537.080**
KOREKSI POSITIF		
BEDA TETAP		
- Beban Pajak	122.851.001	63.432.880
- Beban Persembahyangan Kantor	76.209.600	1.919.138.775
- Pajak Jasa Giro/Tabungan	63.622.088	
- Lain-Lain	36.816.646	193.339.451
- Beban Suka Duka	25.912.236	187.343.858
- Beban PPh Pasal 21	-	1.971.666.768
- Beban untuk Memperoleh Penghasilan Bersifat Final	2.557.120.666	27.731.937
JUMLAH BEDA TETAP	**2.882.532.237**	**4.362.653.669**
BEDA TEMPORER		
- Beban Cadangan Pasca Kerja	248.011.045	280.067.325
JUMLAH BEDA TEMPORER	**248.011.045**	**280.067.325**
JUMLAH KOREKSI POSITIF	**3.130.543.282**	**4.642.720.994**
KOREKSI NEGATIF		
BEDA TETAP		
- Pendapatan Bunga	14.850.424.531	11.622.532.462
- Pendapatan Jasa Giro Tabungan	933.770.060	762.797.870
JUMLAH BEDA TETAP	**15.784.194.591**	**12.385.330.332**

Paraf:……

18. UTANG PAJAK (Lanjutan)

	2025	2024
JUMLAH BEDA TETAP (Lanjutan)	**15.784.194.591**	**12.385.330.332**
BEDA TEMPORER		
- Realisasi Pembayaran Manfaat	618.033.516	-
JUMLAH BEDA TEMPORER	**618.033.516**	**-**
JUMLAH KOREKSI NEGATIF	**16.402.228.107**	**12.385.330.332**
LABA (RUGI) FISKAL	**(4.475.557.441)**	**(5.418.793.253)**
ENTITAS ANAK:		
Beban Pajak Kini - Entitas Anak	**-**	**32.149.370**

Pada tahun 2025 Perusahaan menerapkan skema *gross up* pajak karyawan, sehingga Beban PPh Pasal 21 tidak dikoreksi fiskal pada tahun 2025 (Catatan 31).

19. UTANG CO - GUARANTEE

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Utang Re-Asuransi :		
PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia	-	1.654.397.677
Jumlah	**-**	**1.654.397.677**

Pada tahun 2025 Perusahaan masih dalam tahap negosiasi perjanjian kerja sama penjaminan utang dengan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia sehingga pada tahun 2025 tidak terdapat utang kepada PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia atas premi penjaminan ulang.

20. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Biaya Yang Masih Harus Dibayar :		
Biaya Jasa Produksi Yang Masih Harus Dibayar	1.319.178.351	1.063.306.436
Biaya Lainnya Yang Masih Harus Dibayar	1.306.495.768	699.091.364
Biaya Tantiem Yang Masih Harus Dibayar	879.452.234	708.870.957
Biaya Fee Agent Yang Masih Harus Dibayar	610.317.553	1.597.098.193
Biaya Fee Based Kredit yg Masih Harus Dibayar	511.251.173	301.022.167
Biaya Insentif Yang Masih Harus Dibayar	395.085.652	278.370.868
Jumlah	**5.021.780.730**	**4.647.759.985**

Biaya *Fee Agent* yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan biaya *fee agent* perusahaan atas komisi agen penjaminan yang belum dibayarkan dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Paraf:……

21. UTANG LANCAR LAINNYA

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Utang Lancar Lainnya :		
Titipan Jaminan Non Kredit	1.498.852.692	1.326.146.459
Cadangan Purna Jabatan	1.364.260.190	1.176.671.383
Utang Lainnya - Entitas Anak	293.962.941	221.795.208
Utang Lancar Lainnya	94.074.838	82.992.302
Jumlah	**3.251.150.661**	**2.807.605.351**

Titipan Jaminan Non-Kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan dana titipan dari para terjamin sebagai *cash collateral* penjaminan *surety bond*.

Pada tahun 2025 terdapat realisasi pembayaran atas cadangan purna jabatan Komisaris Utama sebesar Rp229.064.305,-.

22. PENAMPUNGAN SEMENTARA JASA JAMINAN

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Penampungan Sementara Jasmin :		
Penampungan Sementara Jasmin Kredit Umum	2.859.304.672	1.435.598.812
Penampungan Sementara KBG	25.390.220	25.390.220
Penampungan Sementara Restruktur	7.072.868	7.072.868
Jumlah	**2.891.767.759**	**1.468.061.900**

Penampungan Sementara Jasa Jaminan merupakan transferan uang masuk pada Perusahaan atas jasa penjaminan yang belum dapat teridentifikasi keterjadian transaksi sehingga dilakukan pencatatan ke akun tersebut. Peningkatan Penampungan Sementara Jasa Jaminan pada tanggal 31 Desember 2025 disebabkan adanya pembayaran IJP terlebih dahulu oleh rekanan namun sertifikat penjaminan belum diterbitkan sehingga pembayaran tersebut diakui terlebih dahulu sebagai Penampungan Sementara Jasa Jaminan hingga sertifikat penjaminan.

Perusahaan telah melakukan upaya mempercepat penyelesaian dana penampungan yaitu dengan: 1) Melakukan rekonsiliasi dengan Penerima Jaminan; 2) Mengefektifkan CGO unuk melakukan rekonsiliasi setiap bulan dengan Penerima Jaminan; 3) Melakukan pengembalian kelebihan setoran IJP, kesalahan setoran IJP dan IJP pembatalan penjaminan secara rutin setiap bulan.

23. DANA CADANGAN KLAIM

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Dana Cadangan Klaim		
Dana Cadangan Klaim	41.416.990.694	36.803.517.524
Jumlah	**41.416.990.694**	**36.803.517.524**

Paraf:……

23. DANA CADANGAN KLAIM (Lanjutan)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa Lembaga Penjamin wajib membentuk Cadangan Klaim dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pasal 30 ayat 2 menjelaskan bahwa Lembaga Penjamin juga memperhitungkan cadangan klaim dengan membandingkan antara (a) 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri; atau (b) penjumlahan dari 100% nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan dan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan yang dihitung berdasarkan rata-rata klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 (tiga) bulan terakhir. Pasal 30 ayat 4 menjelaskan dalam hal hasil perhitungan ayat 1 lebih kecil dari hasil perhitungan ayat 2, Lembaga Penjamin menggunakan perhitungan cadangan klaim pada ayat 2.

Berikut perhitungan dana cadangan klaim yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tahun 2025

Berdasarkan informasi keuangan per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

a) Perhitungan 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri

Nilai Penjaminan yg ditanggung sendiri	Cadangan Klaim Yang Sudah Dibentuk	%	Cadangan Klaim Minimal Yang Dibentuk (0,01% Dari Nilai Penjaminan
9.303.264.596.561	41.416.990.694	0,45%	930.326.460

b) Perhitungan penjumlah rata-rata klaim 3 (tiga) periode sebelumnya dengan klaim diproses

Periode	Nilai Klaim	Rata-Rata Klaim 3 periode terakhir	Jumlah Cadangan Minimal yang dibentuk	Cadangan Klaim yg Sudah Dibentuk
Sep-25	4.292.164.712			
Okt-25	4.745.356.708			
Nov-25	2.546.300.739	3.861.274.053		
Des-25	-		**3.861.274.053**	**41.416.990.694**

Berdasarkan informasi tersebut di atas perusahaan sudah memenuhi kewajiban pembentukan cadangan klaim minimal.

Tahun 2024

Berdasarkan informasi keuangan per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a) Perhitungan 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri

Nilai Penjaminan yg ditanggung sendiri	Cadangan Klaim Yang Sudah Dibentuk	%	Cadangan Klaim Minimal Yang Dibentuk (0,01% Dari Nilai Penjaminan
6.728.044.474.698	36.803.517.524	0,55%	672.804.447

Paraf:……

23. DANA CADANGAN KLAIM (Lanjutan)

b) Perhitungan penjumlah rata-rata klaim 3 (tiga) periode sebelumnya dengan klaim diproses

Periode	Nilai Klaim	Rata-Rata Klaim 3 periode terakhir	Jumlah Cadangan Minimal yang dibentuk	Cadangan Klaim yg Sudah Dibentuk
Sep-24	3.346.323.913			
Okt-24	3.312.800.990			
Nov-24	5.312.898.987	3.990.674.630		
Des-24	-		**3.990.674.630**	**36.803.517.524**

Berdasarkan informasi tersebut di atas perusahaan sudah memenuhi kewajiban pembentukan cadangan klaim minimal.

24. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Corporate Social Responsibility		
Corporate Social Responsibility	643.882.569	716.630.424
Jumlah	**643.882.569**	**716.630.424**

25. UTANG SETORAN MODAL PEMEGANG SAHAM

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Utang Setoran Modal Pemegang Saham		
Utang Setoran Modal Pemegang Saham	1.000.000.000	8.500.000.000
Jumlah	**1.000.000.000**	**8.500.000.000**

Rincian utang setoran modal pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Penyertaan Modal 2025	Nominal Per Lembar Saham	Lembar Saham	Jumlah
Pemerintah Kabupaten Karangasem	1.000.000	1.000	1.000.000.000
Jumlah			**1.000.000.000**

Penyertaan Modal 2024	Nominal Per Lembar Saham	Lembar Saham	Jumlah
Pemerintah Kota Denpasar	1.000.000	1.000	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem	1.000.000	500	500.000.000
Pemerintah Provinsi Bali	1.000.000	7.000	7.000.000.000
Jumlah			**8.500.000.000**

Paraf:……

25. UTANG SETORAN MODAL PEMEGANG SAHAM (Lanjutan)

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Denpasar melakukan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000 berdasarkan Peraturan Wali Kota Denpasar No. 58 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, dimana sesuai dengan pasal 2 diputuskan bahwa dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp1.000.000.000,-. Setoran Modal tersebut dilakukan pada tanggal 17 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2025 setoran modal tersebut belum dilakukan pengesahan melalui RUPS

Setoran Modal dari pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar No 43 tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pencairan Dana Dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,- telah dilakukan pengesahan melalui Akta Notaris Nomor 7 tanggal 10 Maret 2025, oleh Notaris I Made Pria Dharsana, S.H. (Catatan 29).

Setoran Modal dari Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 5 tahun 2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, sebesar Rp500.000.000,- telah dilakukan pengesahan melalui Akta Notaris Nomor 1 tanggal 19 November 2024, oleh Notaris Ida Ayu Nyoman Puspadewi, S.H., M.Kn. (Catatan 29).

Setoran Modal dari Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 9 tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp7.000.000.000,- telah dilakukan pengesahan melalui Akta Notaris Nomor 7 tanggal 10 Maret 2025, oleh Notaris I Made Pria Dharsana, S.H. (Catatan 29).

26. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Pendapatan Diterima di Muka		
Pendapatan Diterima di Muka	261.345.491.566	212.851.724.178
Dikurangi: Bagian Jangka Pendek	(75.475.941.065)	(12.814.452.866)
Jumlah	**185.869.550.501**	**200.037.271.311**

Paraf:……

26. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA (Lanjutan)

Pendapatan Diterima di Muka pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp261.345.491.566,- dan Rp212.851.724.178,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Konsumtif/Multiguna KU	208.726.433.333	166.411.806.257
Jasa & Dagang KU	35.921.246.446	31.661.083.935
KUR	10.472.787.620	11.705.781.270
Surety Bond	4.617.386.231	1.067.630.384
Extramortalita	919.106.736	1.061.312.962
Lingkage	306.817.804	566.518.441
Jasa & Dagang KP	196.971.458	196.971.458
Jasa & Dagang Non Bank	147.038.826	147.038.826
Kontra Bank Garansi	11.401.743	33.580.645
Pendapatan Diterima Dimuka - Entitas Anak	26.301.369	-
Jumlah	**261.345.491.566**	**212.851.724.178**

27. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Liabilitas Imbalan Pascakerja		
Liabilitas Imbalan Pascakerja	528.645.298	331.654.416
Jumlah	**528.645.298**	**331.654.416**

Pada tahun 2025 dan 2024, Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam Program BNI Simponi yang merupakan Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perikatan dalam program tersebut dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 68/Jamkrida Bali-PKS/IX/2019 dan 052/DLK/PKS/2019 tanggal 13 September 2019. Seluruh kewajiban iuran pada program pensiun tersebut ditanggung/dibayar sepenuhnya oleh Perusahaan.

Pada tahun 2025 dan 2024, Perusahaan membentuk liabilitas imbalan pasca kerja sesuai Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) No. 11 tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan sesuai dengan PSAK 219 dengan mempertimbangkan amandemen tahun 2015, perubahan minor tahun 2016, amandemen tahun 2018 dan pengatribusian imbalan kerja periode berjalan berdasarkan IFRIC *(International Financial Reporting Interpretations Committee)*.

Penyisihan imbalan pascakerja ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Perhitungan aktuaria per 31 Juli 2025 dan 31 Desember 2024 ditentukan berdasarkan Laporan Kantor Konsultan Aktuaria Herman Budi Purwanto, FSAI dengan Nomor Register PAI 201010190, Register Aktuaris Publik Act-1.18.00128 dengan Laporan Perhitungan Aktuaria Program Imbalan Pascakerja Karyawan Berdasarkan PSAK 219 tanggal 31 Juli 2025 sesuai Laporan Nomor: No. 500/LAP/KKA-HBP/X/25 tanggal 16 Oktober 2025 dan 31 Desember 2024 sesuai Laporan Nomor: 212/LAP/KKA-HBP/XII/24 tanggal 24 Desember 2024.

Paraf:……

27. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

a. Pengakuan Liabilitas/(Aset) dalam Laporan Posisi Keuangan

	2025	2024
Nilai Kini Liabilitas	2.241.106.691	1.967.918.955
Nilai Wajar Aset Program	(1.712.461.394)	(1.636.264.539)
Posisi Pendanaan	**528.645.298**	**331.654.416**
Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui - Non Vested	-	-
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial yang Belum Diakui	-	-
Liabilitas (Aset) yang diakui dalam Laporan Posisi Keuangan	**528.645.298**	**331.654.416**

b. Pengakuan Beban/(Penghasilan)

	2025	2024
Biaya Jasa Kini	290.061.590	263.143.465
Biaya Bunga	74.287.864	108.101.588
Harapan dari Hasil Investasi	(116.338.409)	(91.177.729)
Pengakuan Segera dari Biaya Jasa Lalu yang Vasted	-	-
Dampak Kurtailmen/Penyelesaian	-	-
Beban/Penghasilan yang diakui dalam Laporan Laba/Rugi	**248.011.045**	**280.067.325**

c. Rekonsiliasi Liabilitas/(Aset) yang di catat dalam Laporan Posisi Keuangan

	2025	2024
Liabilitas/(Aset) pada Awal Periode	**331.654.416**	**243.158.899**
Beban/(Penghasilan)	248.011.045	280.067.325
Realisasi Pembayaran Manfaat	(618.033.516)	-
Iuran Pensiunan	(257.360.088)	(244.587.253)
Pendapatan Komprehensif Lainnya	828.373.440	53.015.445
Liabilitas/(Aset) pada Akhir Periode	**532.645.297**	**331.654.416**

d. Penghasilan Komprehensif Lain

	2025	2024
Penghasilan Komprehensif Lainnya Awal	**530.402.492**	**477.387.047**
(Keuntungan)/kerugian aktuaria - liabilitas	831.920.897	43.490.162
(Keuntungan)/kerugian aktuaria - aset program	(7.547.457)	9.525.283
Total (Keuntungan)/kerugian aktuaria	824.373.440	53.015.445
Penghasilan Komprehensif Lainnya Akhir Periode	**1.354.775.932**	**530.402.492**

Paraf:……

27. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Tingkat Bunga Aktuaria	6,66%	7,11%
Tingkat Kenaikan Gaji	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tabel Mortalita	TMI IV	TMI IV
Tingkat Cacat	10% dari TMI IV	10% dari TMI IV
Tingkat Pengunduran Diri		
Umur ≤ 29	10,00%	10,00%
Umur 17 - 29	10,00%	10,00%
Umur 30 - 39	5,00%	5,00%
Umur 40 - 44	3,00%	3,00%
Umur 45 - 49	2,00%	2,00%
Umur 50 - 56	1,00%	1,00%
Umur ≥ 57	0,00%	0,00%
Usia Pensiun Normal	58	58

Analisa sensitivitas saldo liabilitas imbalan pasca kerja terhadap kenaikan dan penurunan asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja berikut pada tanggal 31 Juli 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Tingkat Diskonto		
Kenaikan 1%	1.866.195.417	1.647.057.253
Penurunan 1%	2.706.910.739	2.364.496.247
Tingkat Kenaikan Gaji		
Kenaikan 1%	2.689.912.294	2.351.776.651
Penurunan 1%	1.871.404.468	1.650.381.297

Analisa sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

Manajemen telah menelaah asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan pasca kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan pasca kerja.

28. LIABILITAS LAIN-LAIN

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Liabilitas Lain-Lain		
Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun - Entitas Anak	2.166.666.640	3.441.582.666
Utang Jangka Panjang - Entitas Anak	1.597.222.237	4.588.860.897
Jumlah	**3.763.888.877**	**8.030.443.563**

Paraf:……

28. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)

Liabilitas lain-lain terdiri dari utang jangka panjang dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun entitas anak yang berasal dari pinjaman dari pihak ketiga sehubungan dengan penyaluran dana kepada UMKM.

Rincian utang jangka panjang entitas anak yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	2.166.666.640	2.166.666.660
LPDB - KUMKM	-	791.636.000
PT Bahana Artha Ventura	-	483.280.006
Jumlah	**2.166.666.640**	**3.441.582.666**

Utang jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun entitas anak kepada PT Bahana Artha Ventura bersumber dari PKBL BUMN. Rincian utang kepada PT Bahana Artha Ventura adalah sebagai berikut:

	2025	2024
PKBL PPA	-	242.017.441
PKBL Jasa Marga	-	180.721.401
PKBL Peruri	-	60.541.164
Jumlah	**-**	**483.280.006**

Pada tahun 2025, entitas anak telah melunasi seluruh kewajiban pinjaman kepada LPDB-KUMKM yang sebelumnya digunakan untuk modal kerja pembiayaan kepada UMKM. Pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya pada bulan Juni 2025 sesuai dengan Surat Keterangan Pelunasan Pinjaman Nomor T-PP.00/129/Dir.3/VI/2025, tanggal 12 Juni 2025.

Rincian utang jangka panjang entitas anak per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	1.597.222.237	3.763.888.897
PT Bahana Artha Ventura	-	824.972.000
Jumlah	**1.597.222.237**	**4.588.860.897**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

a) Fasilitas Kredit Pertama
Entitas anak melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 Tanggal 9 Juli 2024, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Jumlah Fasilitas Kredit	:	Bank memberikan kredit kepada Entitas Anak sebesar Rp3.500.000.000 yang dapat ditarik oleh perusahaan apabila telah memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.

Paraf:……

28. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Lanjutan)

a) Fasilitas Kredit Pertama (Lanjutan)

Tujuan Penggunaan	:	Tujuan Kredit ini adalah Modal Kerja Jasa Pembiayaan (Modal Ventura)
Bentuk Kredit	:	*Aplofend* /Angsuran
Jangka Waktu Kredit	:	Jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 9 Juli 2027
Agunan	:	Agunan yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali kredit debitur yaitu sebagai berikut: a) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 234/Desa Dauh Puri Klod, atas sebidang tanah seluas 103 m2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.09.01.04.00774, atas nama PT Sarana Bali Ventura. b) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 235/Desa Dauh Puri Klod, atas sebidang tanah seluas 103 m2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.09.01.04.00773, atas nama PT Sarana Bali Ventura. Agunan tersebut diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Baru sebesar Rp4.375.000.000 c) Piutang Usaha / Pembiayaan yang diberikan diikat Fidusia Notaris sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)

b) Fasilitas Kredit Kedua

Entitas anak kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 26 November 2024, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Kredit	:	Bank memberikan kredit kepada entitas anak sebesar Rp3.000.000.000 yang dapat ditarik oleh perusahaan apabila telah memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.
Tujuan Penggunaan	:	Tujuan Kredit ini adalah Modal Kerja Jasa Pembiayaan (Modal Ventura)
Bentuk Kredit	:	*Aplofend* /Angsuran
Jangka Waktu Kredit	:	Jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 26 November 2027
Agunan	:	Agunan yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali kredit debitur yaitu sebagai berikut: a) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22.09.000008482.0/Desa Dauh Puri Klod, seluas 103 m2, terdaftar atas nama PT Bali Kerthi Development Fund Ventura. b) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.09.000008483.0/Desa Dauh Puri Klod, seluas 103 m2, terdaftar atas nama PT Bali Kerthi Development Fund Ventura. Agunan tersebut diikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Baru sebesar Rp697.000.000 c) Piutang Usaha / Pembiayaan yang diberikan diikat Fidusia Notaris sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). d) Plafon Kredit sebesar 75% dari plafond kredit atau sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Paraf:……

29. EKUITAS

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Ekuitas :		
Modal Disetor	232.121.200.000	184.621.200.000
Cadangan Umum	11.113.690.358	9.341.512.966
Cadangan Tujuan	4.677.694.478	3.614.388.043
Selisih Transaksi Dengan Kepentingan Non-Pengendali	1.145.537.839	-
Laba Ditahan	7.582.782.151	5.851.956.805
Laba Tahun Berjalan	8.151.511.056	7.047.357.522
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**264.792.415.881**	**210.476.415.336**
Kepentingan Non-Pengendali	2.782.353.873	4.040.883.041
Jumlah	**267.574.769.754**	**214.517.298.377**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor: 6 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Pria Dharsana, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp7.047.357.522,- sebagai berikut:

1) Cadangan Umum sebesar 25% atau sebesar Rp1.772.177.392,-
2) Cadangan Tujuan sebesar 15% atau sebesar Rp1.063.306.435,-
3) Deviden sebesar 30% atau sebesar Rp2.126.612.871,-
4) Laba ditahan sebesar 20% atau sebesar Rp1.044.143.343,- dan
5) *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 5% atau Rp354.435.487,-.

Pada tahun 2025, terdapat peningkatan modal disetorkan Perusahaan yang telah disahkan sebagai berikut. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 September 2025 oleh Notaris I Made Pria Dharsana S.H., atas peningkatan modal disetor dari Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp1.000.000.000,-. Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 September 2025 oleh Notaris I Made Pria Dharsana S.H., telah telah dilaporkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No AHU-AH.01.03-0237799 tanggal 23 September 2025.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 10 Maret 2025, oleh Notaris I Made Pria Dharsana, S.H., atas peningkatan modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebesar Rp45.000.000.000,-, dan Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp1.000.000.000,-, Akta Notaris No. 7 tanggal 10 Maret 2025, oleh Notaris I Made Pria Dharsana, S.H., telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan No. AHU-0021422.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 25 Maret 2025.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 Tanggal 19 November 2024, oleh Notaris Ida Ayu Nyoman Puspadewi, S.H., M.Kn, atas peningkatan modal disetor Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp500.000.000,-. Akta Notaris No.1 Tanggal 19 November 2024, oleh Notaris Ida Ayu Nyoman Puspadewi, S.H., M.Kn telah dilaporkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0220007 tanggal 11 Desember 2024.

Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali berasal sebesar Rp1.145.537.839,- berasal dari pembelian saham dalam simpanan PT Bali Kerthi Development Fund Ventura sebesar Rp34.000.000.000,- yang tidak diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham pihak ketiga PT Bali Kerthi Development Fund Ventura. Sehingga total kepemilikan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 13,61% menjadi 94,97%.

Paraf:……

29. EKUITAS (Lanjutan)

Modal saham (modal yang telah disetor) tersebut terinci sebagai berikut:

31 Desember 2025			
Pemegang Saham	**Nominal Per Lembar Saham**	**Lembar Saham**	**Jumlah Modal Disetor**
Pemerintah Daerah Provinsi Bali	1.000.000	212.846	212.846.200.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem	1.000.000	4.075	4.075.000.000
Pemerintah Kabupaten Bangli	1.000.000	600	600.000.000
Pemerintah Kabupaten Gianyar	1.000.000	2.000	2.000.000.000
Pemerintah Kota Denpasar	1.000.000	3.500	3.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Badung	1.000.000	5.000	5.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Tabanan	1.000.000	1.300	1.300.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana	1.000.000	1.000	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Klungkung	1.000.000	1.000	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Buleleng	1.000.000	800	800.000.000
Total		**232.121**	**232.121.200.000**

31 Desember 2024			
Pemegang Saham	**Nominal Per Lembar Saham**	**Lembar Saham**	**Jumlah Modal Disetor**
Pemerintah Daerah Provinsi Bali	1.000.000	167.846,20	167.846.200.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem	1.000.000	2.575,00	2.575.000.000
Pemerintah Kabupaten Bangli	1.000.000	600,00	600.000.000
Pemerintah Kabupaten Gianyar	1.000.000	2.000,00	2.000.000.000
Pemerintah Kota Denpasar	1.000.000	2.500,00	2.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Badung	1.000.000	5.000,00	5.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Tabanan	1.000.000	1.300,00	1.300.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana	1.000.000	1.000,00	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Klungkung	1.000.000	1.000,00	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Buleleng	1.000.000	800,00	800.000.000
Total		**184.621**	**184.621.200.000**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan Pasal 7 mengatur tentang permodalan sebagai berikut:

1) Ayat (1) menyatakan Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah Penjamin ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau Provinsi.

2) Ayat (2) menyatakan jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin ditetapkan paling sedikit:
   a. Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional;
   b. Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup wilayah provinsi; atau
   c. Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk lingkup wilayah kabupaten atau kota.

3) Ayat (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia

Paraf:……

30. PENDAPATAN USAHA

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Pendapatan Usaha :		
Pendapatan Jasa Penjaminan		
Pendapatan Jasa Penjaminan Kredit Umum	74.471.943.189	59.983.082.165
Pendapatan Jasa Penjaminan Kredit KUR	23.269.407.742	20.752.468.957
Pendapatan Subrogasi	2.516.096.071	4.464.374.287
Pendapatan Jasa Penjaminan Kredit Program	436.165.665	425.533.429
Pendapatan Jasa Penjaminan Kredit Non Bank	-	270.856
Jumlah Pendapatan Usaha	**100.693.612.667**	**85.625.729.695**
Pendapatan Lainnya		
Pendapatan Surety Bond	12.478.229.153	5.834.350.587
Pendapatan R/I Com	216.799.292	8.218.282.264
Pendapatan Kontra Bank Quarantee	111.069.290	463.460.682
Jumlah Pendapatan Lainnya	**12.806.097.736**	**14.516.093.533**
Pendapatan Administrasi		
Pendapatan Administrasi Surety Bond	163.250.000	111.575.000
Pendapatan Administrasi Kontra Bank Garansi	3.770.000	12.610.000
Jumlah Pendapatan Administrasi	**167.020.000**	**124.185.000**
Pendapatan Penjaminan Lainnya		
Pendapatan Refund dari Reasuransi	732.702.415	815.839.519
Pendapatan Fee Co-Guarantee	74.130.716	10.456.620
Kelebihan Pembayaran Refund dari Reasuransi	16.223	7.254.459
Jumlah Pendapatan Penjaminan Lainnya	**806.849.354**	**833.550.598**
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga Deposito	7.060.588.853	5.410.379.024
Pendapatan Obligasi	6.911.835.678	5.504.153.438
Pendapatan Reksadana	878.000.000	708.000.000
Jumlah Pendapatan Bunga	**14.850.424.530**	**11.622.532.462**
Pendapatan Operasional - Entitas Anak		
Pendapatan Investasi	3.305.641.677	3.261.866.933
Pendapatan Administrasi & Provisi	385.985.000	218.073.500
Pendapatan Obligasi Konversi	207.084.000	256.085.000
Laba (Rugi) Penyertaan Modal	81.864.220	147.374.420
Pendapatan Operasional Lainnya	5.300.000	406.942.745
Jumlah Pendapatan Operasional - Entitas Anak	**3.985.874.897**	**4.290.342.598**
Pendapatan atas Penjualan Investasi		
Laba atas Penjualan Obligasi	-	-
Jumlah Pendapatan atas Penjualan Investasi	**-**	**-**
Keuntungan Pembelian Diskon atas Akuisisi		
Keuntungan Pembelian Diskon Akuisisi Entitas Anak	-	-
Jumlah Keuntungan Pembelian Diskon	**-**	**-**
Jumlah Pendapatan Usaha	**133.309.879.184**	**117.012.433.887**

Paraf:……

30. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

Pendapatan jasa penjaminan kredit umum pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp74.471.943.189,- dan Rp59.983.082.165,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Jasmin Konsumtif/Multiguna KU	52.559.531.093	41.600.370.044
Pendapatan Jasmin Jasa & Dagang KU	21.680.899.477	17.848.529.919
Pendapatan Jasmin Extra Mortalita	231.512.619	327.715.201
Pendapatan Jasmin Portofolio Credit Risk Guarantee	-	206.467.000
Jumlah	**74.471.943.189**	**59.983.082.165**

Pendapatan jasa penjaminan kredit program untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp436.165.665 dan Rp425.533.429,- merupakan pendapatan jasa penjaminan produk *linkage*.

	2025	2024
Pendapatan Jasmin Produk Linkage	436.165.665	425.533.429
Jumlah	**436.165.665**	**425.533.429**

31. BEBAN USAHA

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Beban Usaha :		
Beban Re Asuransi	28.670.840.209	33.987.456.972
Beban Penyisihan Kerugian	31.262.654.642	22.240.027.238
Beban Klaim Tanggung Sendiri	25.759.507.661	18.616.897.616
Beban Sumber Daya Manusia	21.420.220.066	18.488.838.445
Beban Penjaminan	13.706.216.306	11.882.286.642
Beban Umum Lainnya	1.018.086.491	1.162.743.763
Beban Penyusutan Aset Tetap	707.148.329	611.666.049
Beban Perjalanan Dinas	695.949.713	969.366.398
Beban Administrasi Kantor	586.111.785	663.833.356
Beban Sewa	552.044.019	1.045.895.249
Beban Komunikasi dan Energi Kantor	351.122.877	361.321.452
Beban Co-Guarantee	210.518.049	125.945.463
Beban Promosi	168.130.869	82.824.734
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	167.944.739	160.148.790
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	123.091.240	78.980.444
Beban Pemasaran	96.405.000	63.997.750
Beban Representatif	80.937.851	81.192.841
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Bangunan	61.738.746	12.368.176
Beban Penagihan Subrogasi	40.837.572	86.435.046
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	29.485.608	89.633.134
Beban Bunga - Entitas Anak	486.037.907	321.069.750
Jumlah Beban Usaha	**126.195.029.703**	**111.132.929.307**

Paraf:……

31. BEBAN USAHA (Lanjutan)

Beban Klaim Tanggung Sendiri pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp25.759.507.661,- dan Rp18.616.897.616,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Klaim Tanggung Sendiri Kredit Multiguna KU	12.475.185.357	8.097.812.177
Penurunan/Kenaikan Cadangan Klaim	5.513.463.158	5.752.154.995
Beban Klaim Tanggung Sendiri KUR	4.591.216.620	1.675.726.517
Beban Klaim Tanggung Sendiri Kredit Jasa & Dagang KU	3.179.642.526	3.091.203.927
Jumlah	**25.759.507.661**	**18.616.897.616**

Beban Penjaminan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.706.216.306,- dan Rp11.882.286.642.- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Fee Agent Penjaminan Kredit	7.879.438.037	6.408.792.887
Beban Fee Agent Surety Bonds	2.239.090.377	1.142.402.418
Beban Fee Based Income	1.728.306.807	1.700.498.410
Beban Refund	908.818.344	803.458.414
Beban Akuisisi	629.260.750	593.689.150
Beban Penjaminan Lainnya	265.116.600	33.324.254
Beban Restitusi Penjaminan	40.207.332	1.070.639.422
Beban Fee Agent KBG	15.978.060	84.249.811
Beban Fee Co-Guarantee	-	45.231.876
Jumlah	**13.706.216.306**	**11.882.286.642**

Agen Perusahaan terdiri dari agen penjaminan kredit dan non kredit. Agen penjaminan kredit yaitu *Credit Guarantee Officer* (CGO) terdiri dari 27 orang yang tersebar di masing-masing wilayah kerja dengan rata-rata pencapaian target untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar 142,58%.

Beban Sumber Daya Manusia par 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp21.420.220.066,- dan Rp18.488.838.445,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Gaji Karyawan	1.927.796.847	1.654.382.729
Gaji Direksi	1.859.620.253	1.626.276.515
Beban Jasa Produksi	1.319.178.350	1.063.306.436
Tunjangan Hari Raya	1.293.221.791	1.142.903.840
Beban Insentif	1.011.147.447	989.263.209
Gaji Dewan Komisaris	928.154.525	813.138.253
Beban Tantiem	879.452.234	708.870.957
Tunjangan Konsumsi	738.918.768	643.208.724
Beban PPh Pasal 21	-	1.971.666.768
Jumlah	**9.957.490.215**	**10.613.017.431**

Paraf:……

31. BEBAN USAHA (Lanjutan)

	2025	2024
Jumlah (Lanjutan)	**9.957.490.215**	**10.613.017.431**
Tunjangan Pajak	2.356.979.870	-
Tunjangan Transportasi	705.537.289	614.139.479
Tunjangan Cuti	665.135.111	568.160.824
Gaji Kepala Bagian	534.122.738	493.565.819
Dana Purna Bhakti	416.653.112	357.596.029
Beban SDM Lainnya	388.247.473	246.909.927
Beban Premi Jamsostek Karyawan	364.091.040	323.236.905
Gaji Kepala Divisi	319.280.979	305.671.571
Tunjangan Jabatan	306.906.911	166.807.512
Gaji Pelaksana	301.771.150	284.035.749
Beban Pendidikan dan Pelatihan	288.468.015	183.864.418
Beban Pesangon Karyawan	248.011.045	280.067.325
Beban Seragam Karyawan	275.123.422	248.470.884
Tunjangan Perumahan	184.953.295	162.627.659
Tunjangan Kesejahteraan	168.220.081	142.368.336
Beban Reimbursment Pengobatan	158.064.422	139.010.858
Tunjangan Kesehatan (Asuransi Kesehatan)	139.746.631	124.808.469
Tunjangan Komunikasi	127.932.513	113.648.616
Beban Lembur	86.994.470	74.156.912
Beban Seragam Direksi	51.023.488	42.017.584
Beban Seragam Dewan Komisaris	19.677.657	12.861.214
Tunjangan Persalinan	10.500.000	26.792.500
Tunjangan Pernikahan	2.500.000	7.500.000
Tunjangan Kacamata	2.235.000	16.835.000
Beban Premi Jamsostek Lainnya	117.600	100.800
Beban Gaji Lainnya - Entitas Anak	3.015.980.483	2.940.566.624
Biaya Imbalan Pasca Kerja - Entitas Anak	279.422.556	-
Biaya Pembinaan Korps - Entitas Anak	45.033.500	-
Jumlah	**21.420.220.066**	**18.488.838.445**

Pada Tahun 2025 perusahaan menerapkan skema *gross up* pajak karyawan, sehingga tunjangan pajak karyawan menjadi komponen penghasilan karyawan dan tidak dikoreksi fiskal pada tahun 2025.

Beban Penagihan Subrogasi pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp40.837.572,- dan Rp86.435.046,- merupakan beban penagihan subrogasi untuk kredit umum.

Beban Pemasaran pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp96.405.000,- dan Rp63.997.750,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Marketing & Promosi	65.245.000	41.637.750
Sponsorship & Sumbangan	31.160.000	22.360.000
Beban Pemasaran Lainnya	-	-
Jumlah	**96.405.000**	**63.997.750**

Paraf:……

31. BEBAN USAHA (Lanjutan)

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp695.949.713,- dan Rp969.366.398,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Direksi	246.006.240	416.240.343
Beban Perjalanan Dinas Karyawan	160.782.916	170.968.537
Beban Perjalanan Dinas Lainnya	127.427.425	141.635.317
Beban Perjalanan Dinas Kepala Bagian	91.755.530	147.174.082
Beban Perjalanan Dinas Kepala Divisi	56.594.922	90.348.119
Beban Perjalanan Dinas Komisaris	11.882.680	-
Beban Perjalanan Dinas Pelaksana	1.500.000	3.000.000
Jumlah	**695.949.713**	**969.366.398**

Beban Administrasi Kantor pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp586.111.785,- dan Rp663.833.356,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Administrasi Lain-Lain - Entitas Anak	392.007.490	409.467.757
Beban Pajak	122.851.001	187.343.858
Beban Pencetakan Peralatan Kantor	41.321.100	39.227.001
Beban ATK	29.442.194	27.794.740
Beban Konsultasi	490.000	-
Jumlah	**586.111.785**	**663.833.356**

Beban Sewa pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp552.044.019,- dan Rp1.045.895.249,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Sewa Kendaraan Kantor	421.560.000	421.880.000
Beban Sewa Gedung	109.832.101	569.376.728
Beban Sewa Peralatan Kantor	12.731.918	15.560.110
Beban Sewa Lain-Lain	7.920.000	11.552.510
Beban Sewa Sistem Kantor	-	27.525.901
Jumlah	**552.044.019**	**1.045.895.249**

Beban Komunikasi dan Energi Kantor pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp351.122.877,- dan Rp361.321.452,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Internet Kantor	202.325.098	198.816.770
Beban Listrik Kantor	95.413.721	114.688.377
Beban Komunergi Lain-Lain Kantor	38.909.300	31.281.710
Beban Telepon & Faximile Kantor	9.533.158	11.580.845
Beban PDAM Kantor	4.941.600	4.953.750
Jumlah	**351.122.877**	**361.321.452**

Paraf:……

31. BEBAN USAHA (Lanjutan)

Beban Pemeliharaan Aset Tetap pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.485.608,- dan Rp89.633.134,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Perbaikan & Pemeliharaan Aset Tetap	14.828.808	33.587.807
Beban Perbaikan & Pemeliharaan Inventaris Kantor	10.086.800	22.964.000
Beban Perbaikan & Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4.570.000	-
Beban Renovasi Gedung Kantor	-	33.081.327
Jumlah	**29.485.608**	**89.633.134**

Beban Umum Lainnya pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.018.086.491,- dan Rp1.162.743.763,- terinci sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Konsultan dan Tenaga Ahli	442.647.830	610.653.080
Beban Rapat Kerja	186.782.780	165.308.155
Beban Umum Lain-lain Kantor	151.113.401	160.295.715
Beban Rumah Tangga Kantor	80.000.827	61.877.123
Beban Persembahyangan Kantor	76.209.600	63.432.880
Beban Pemeriksaan	56.245.430	49.223.280
Beban Asosiasi	24.186.623	38.493.530
Beban Edukasi & Sosialisasi kepada Masyarakat Umum	900.000	5.460.000
Beban Penyertaan Langsung	-	8.000.000
Jumlah	**1.018.086.491**	**1.162.743.763**

32. PENDAPATAN DI LUAR USAHA POKOK

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Pendapatan di Luar Usaha Pokok		
Pendapatan Jasa Giro/Tabungan	933.770.060	762.797.870
Pendapatan Lainnya	105.445.383	649.800.747
Keuntungan Transaksi Akuisisi	27.782.380	80.123.904
Pendapatan Dari Penjualan Aset Tetap	13.963.395	4.639.000
Pendapatan Lain Pemulihan Penyisihan Kerugian Ban	12.228.397	-
Pendapatan Atas Lebih Setor IJP	98.309	143.216
Pendapatan Selisih Klaim	1.511	855.464
Pendapatan Non-Operasional - Entitas Anak	859.202.272	73.794.327
Jumlah	**1.952.491.707**	**1.572.154.528**

Pendapatan jasa giro/tabungan diakui secara bruto dan pajak final terkait disajikan sebagai bagian dari beban di luar usaha pokok.

Paraf:……

33. BEBAN DI LUAR USAHA POKOK

Rincian per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Beban di Luar Usaha Pokok		
Pajak Jasa Giro/Tabungan	63.622.088	-
Lain-Lain	36.816.646	193.339.451
Beban Suka Duka	25.912.236	27.731.937
Beban Administrasi Bank	20.818.311	35.277.283
Buuku Cheque	2.475.000	-
Materai	1.437.700	-
Kliring/Transfer	792.700	-
Beban Atas Kurang Setor IJP	143.219	100.547
Beban Transaksi Akuisisi	-	81.313.654
Jumlah	**152.017.900**	**337.762.872**

Beban Lain-lain pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp36.816.646,- dan Rp193.339.451,- merupakan pengeluaran-pengeluaran perusahaan, seperti parkir, *snack* kunjungan tamu, iuran sampah, dan banten upacara.

34. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan penambahan kepemilikan pada PT Bali Kerthi Development Fund Ventura sebesar 0,37%, dengan nilai kas yang dibayar sebesar Rp50.444.000,-, yang terdiri dari nilai aset neto yang diperoleh sebesar Rp78.226.380,- dan keuntungan atas pembelian diskon sebesar Rp27.782.380,-. Sehingga total kepemilikan Perusahaan pada PT Bali Kerthi Development Fund Ventura pada tanggal 31 Juli 2025 adalah sebesar 81,3%. Penambahan kepemilikan tersebut telah disahkan berdasarkan Akta Notaris No. 32 tanggal 28 Februari 2025 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Selamet, S.H.

Perusahaan juga melakukan penambahan penyertaan saham melalui pembelian saham dalam simpanan PT Bali Kerthi Development Fund Ventura sebesar Rp34.000.000.000,- Sehingga total kepemilikan Perusahaan pada PT Bali Kerthi Development Fund Ventura pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar 94.97%. Penambahan kepemilikan tersebut telah disahkan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 28 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Selamet, S.H., Notaris di Kota Denpasar.

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengendalian bersama dengan pemerintah Provinsi Bali	Giro, Deposito, Penjaminan
Pemerintah Provinsi Bali	Pemegang Saham Pengendali	Sewa

Paraf:……

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Rincian saldo dengan pihak berelasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas pada pihak berelasi

	2025	2024
Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	25.099.579.712	31.060.618.583
Deposito Berjangka		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	107.330.000.000	66.930.000.000
Jumlah	**132.429.579.712**	**97.990.618.583**

b. Deposito pada pihak berelasi

	2025	2024
Deposito >3 Bulan		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	5.000.000.000	5.400.000.000
Jumlah	**5.000.000.000**	**5.400.000.000**

36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan pengungkapan dan/atau penyesuaian pada Laporan Keuangan.

37. REKLASIFIKASI AKUN

Tidak terdapat reklasifikasi akun Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

38. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi Interim Perusahaan yang diselesaikan pada tanggal 24 Februari 2026

Paraf:……

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	Catatan	2025	2024
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2d,4	265.922.549.673	181.984.347.781
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(193.497.284)	(189.894.700)
Deposito Berjangka	5	26.990.000.000	27.040.000.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(5.840.758.693)	(3.965.210.866)
Efek - Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	2g,12	8.500.000.000	-
Investasi Lancar Lainnya	6	100.000.000	-
Piutang Co-Guarantee	2e,7	89.865.565.247	75.249.928.367
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(70.423.092.017)	(40.982.717.008)
Piutang Usaha	2e,8	2.762.915.150	1.565.912.371
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(635.948.507)	(635.948.507)
Piutang Lain-Lain	9	317.232.344	20.296.122
Uang Muka	10	109.301.550	159.492.209
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Lancar	2f,11	22.659.359.474	3.751.136.811
Jumlah Aset Lancar		**340.133.626.938**	**243.997.342.580**
ASET TIDAK LANCAR			
Efek	2g,12	117.402.195.272	105.160.733.907
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(3.031.786.472)	(3.144.223.833)
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar	2f,11	51.164.928.900	94.559.391.362
Aset Tetap dan Inventaris	2h,13	25.296.904.247	24.958.430.350
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(2.565.361.089)	(2.062.117.425)
Aset Tidak Berwujud	2i,14	1.142.324.247	912.037.897
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(561.476.424)	(438.385.184)
Aset Pajak Tangguhan	2r,15	116.301.967	72.963.973
Penyertaan Saham	16	51.349.397.071	17.209.197.429
Jumlah Aset Tidak Lancar		**240.313.427.719**	**237.228.028.478**
JUMLAH ASET		**580.447.054.657**	**481.225.371.058**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Interim yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2025	2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Klaim	2m,17	1.008.142.072	1.182.047.821
Utang Pajak	2r,18	12.589.578	7.351.655
Utang Co-Guarantee	19	-	1.654.397.677
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2n,20	5.021.780.730	4.647.759.985
Utang Lancar Lainnya	21	2.957.187.721	2.585.810.144
Penampungan Sementara Jasa Jaminan	2o,22	2.891.767.759	1.468.061.900
Dana Cadangan Klaim	2m,23	41.416.990.694	36.803.517.524
Corporate Social Responsibility (CSR)	24	643.882.569	716.630.424
Utang Setoran Modal Pemegang Saham	25	1.000.000.000	8.500.000.000
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Pendek	2p,26	75.449.639.696	12.814.452.867
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**130.401.980.818**	**70.380.029.996**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima di Muka - Bagian Jangka Panjang	2p.26	185.869.550.501	200.037.271.311
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2q,27	528.645.298	331.654.416
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**186.398.195.798**	**200.368.925.727**
JUMLAH LIABILITAS		**316.800.176.617**	**270.748.955.723**
EKUITAS			
Modal Saham			
'Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 232.121 lembar saham (31 Desember 2024 sebanyak 184.621 lembar saham)	28	232.121.200.000	184.621.200.000
Cadangan Umum	28	11.113.690.358	9.341.512.966
Cadangan Tujuan	28	4.677.694.478	3.614.388.043
Saldo Laba	28	15.734.293.206	12.899.314.327
JUMLAH EKUITAS		**263.646.878.041**	**210.476.415.335**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**580.447.054.657**	**481.225.371.058**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Interim yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN USAHA	2k		
PENDAPATAN USAHA	2k,29	**129.324.004.287**	**112.722.091.289**
BEBAN USAHA	2k,30	**(121.476.204.040)**	**(106.924.152.438)**
LABA BRUTO		**7.847.800.248**	**5.797.938.851**
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK			
Pendapatan di Luar Usaha Pokok	31	1.386.457.492	1.791.350.548
Beban di Luar Usaha Pokok	32	(301.711.239)	(508.385.446)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA POKOK		**1.084.746.253**	**1.282.965.102**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**8.932.546.501**	**7.080.903.953**
BEBAN PAJAK			
Kini		-	-
Tangguhan		(138.024.163)	7.805.616
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**8.794.522.338**	**7.088.709.569**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja		(824.373.440)	(53.015.445)
Pajak Penghasilan Terkait		181.362.157	11.663.398
LABA BERSIH KOMPREHENSIF		**8.151.511.054**	**7.047.357.522**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Interim yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Disetor	Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya			Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Lainnya		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**165.775.000.000**	**8.036.333.787**	**2.570.244.700**	**-**	**10.028.530.177**	**186.410.108.664**
Penambahan Modal Disetor	18.846.200.000	-	-	-	-	**18.846.200.000**
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.305.179.179	-	-	(1.305.179.179)	**-**
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	1.044.143.343	-	(1.044.143.343)	**-**
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(1.566.215.014)	**(1.566.215.014)**
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	(261.035.836)	**(261.035.836)**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	7.047.357.522	**7.047.357.522**
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**184.621.200.000**	**9.341.512.966**	**3.614.388.043**	**-**	**12.899.314.327**	**210.476.415.335**
Penambahan Modal Disetor	47.500.000.000	-	-	-	-	**47.500.000.000**
Pembentukan Cadangan Umum	-	1.772.177.392	-	-	(1.772.177.392)	**-**
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-	1.063.306.435	-	(1.063.306.435)	**-**
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(2.126.612.871)	**(2.126.612.871)**
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	-	(354.435.478)	**(354.435.478)**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	-	-	8.151.511.054	**8.151.511.054**
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**232.121.200.000**	**11.113.690.358**	**4.677.694.478**	**-**	**15.734.293.206**	**263.646.878.041**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Interim yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan	158.286.084.560	110.387.628.533
Penerimaan Piutang Subrogasi	2.475.258.499	4.377.939.242
Penerimaan R/I Com atas Reasuransi Penjaminan	216.799.292	8.218.282.264
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	2.359.792.165	2.593.433.012
Pembayaran IJP Co-guarantee/IJP/Premi Reasuransi	(17.734.005.985)	(41.506.817.145)
Pembayaran Klaim pada Terjamin	(35.026.156.571)	(23.645.520.999)
Pembayaran Biaya-biaya	(23.170.962.949)	(16.988.304.386)
Pembayaran untuk Aktivitas Lainnya	(144.962.300)	(248.448.318)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**87.261.846.714**	**43.188.192.202**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari Investasi	14.673.598.531	11.445.443.433
Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(20.791.461.365)	(29.070.000.000)
Investasi pada Entitas Anak	(34.078.226.380)	(5.780.290.482)
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	(646.507.258)	(1.246.877.180)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(40.842.596.472)**	**(24.651.724.229)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Setoran Modal	40.000.000.000	8.500.000.000
Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan Lainnya	2.835.483.827	2.349.322.522
Pembayaran Deviden dan Pembagian Laba	(5.316.532.176)	(4.176.573.372)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**37.518.951.651**	**6.672.749.150**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**83.938.201.892**	**25.209.217.123**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**181.984.347.781**	**156.775.130.658**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**265.922.549.673**	**181.984.347.781**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
BPD Bali Kanca			
1	BPD Bali A/C 011.02.02.30822-7 Kantor Cabang Denpasar	51.042.328	
2	BPD Bali A/C 013.0111.000.812 Kantor Cabang Badung	14.951.526.046	
3	BPD Bali A/C 016.02.02.22296-0 Kantor Cabang Negara	691.722.076	
4	BPD Bali A/C 022.02.02.05705-7 Kantor Cabang Karangasem	1.884.528	
5	BPD Bali A/C 012.02.02.26126-4 Kantor Cabang Tabanan	86.206.761	
6	BPD Bali A/C 020.02.02.57727-0 Kantor Cabang Bangli	2.008.339	
7	BPD Bali A/C 018.02.05.01321-4 Kantor Cabang Gianyar	2.734.620	
8	BPD Bali A/C 021.02.02.15318-3 Kantor Cabang Klungkung	144.535.091	
9	BPD Bali A/C 014.02.02.39843-9 Kantor Cabang Singaraja	595.637.215	
10	BPD Bali A/C 019.02.02.09810-0 Kantor Cabang Ubud	19.036.128	
11	BPD Bali A/C 015.02.02.04668-7 Kantor Cab Seririt	5.450.971	
12	BPD Bali A/C 010.02.02.28678-7 Kantor Cabang Renon	2.304.907	
13	BPD Bali Kantor Cabang Mangupura	5.965.878	
14	BPD Bali Kantor Cabang Amlapura	4.301.375	
15	BPD Bali Kantor Cabang Negara (KSP PRIMKOPPOL)	72.924.892	
16	BPD Bali Kantor Cabang Bangli (Bumdes Bersama Santhi Sedana)	5.673.517	
17	BPD Bali Kantor Cabang Bangli (Bumdes Panca Sedana Sari)	3.362.392	
18	BPD Bali Kantor Cabang Bangli (Bumdes Jehem Dhana Adhyata)	2.853.644	
19	BPD Bali Kantor Cabang Negara (Koperasi Artha Sanggaraha)	13.265.183	
20	BPD Bali Kantor Cabang Badung	219.072.587	
21	BPD Bali Kantor Cabang Renon (Koperasi Amertha Sedana Yoga)	553.963	
22	BPD Bali Kantor Cabang Klungkung (KPN Sehat Klungkung)	444.096	
23	BPD Bali Kantor Cabang Negara (KPN Setya Graha)	10.630.815	
24	Giro Bank BPD Bali - Entitas Anak	30.861.326	
25	Giro Bank BPD Bali-Kuta - Entitas Anak	28.576.229	
	Jumlah		**16.952.574.908**
Bank Perekonomian Rakyat			
1	BPR Surya Jaya Ubud A/C 001.202.00.00.333	84.526.664	
2	BPR Suar Artha Dharma	60.417.509	
3	BPR Legian	-	
4	BPR Surya Jaya Kubutambahan	171.592.561	
5	BPR Dewangga	27.537.936	
6	BPR Pusaka	17.632.079	
7	BPR Anthenk / BPR Shri Gangga Bali	52.819.498	
8	BPR Sri Partha	33.811.773	
9	BPR Tish	-	
10	BPR Ashi	66.880.167	
11	BPR Werdhi Sedana Kab. Gianyar	482.288.493	
12	BPR Gisawa	115.409.264	
13	BPR Gisawa Negara	27.404.218	
14	BPR Balaguna Prasta	87.861.574	
15	BPR Tohpati / BPR Parta Kencana Tohpati	3.724.502	
16	BPR Wahyu Nirmala	38.409.925	
17	BPR Bank Pasar Bangli	524.884.295	
18	BPR Bayudhana	114.759.942	
19	BPR Sinar Kuta Mulia	135.722.642	
20	BPR Sewu Bali	-	
21	BPR Tohpati / BPR Parta Kencana Tohpati (Cabang Gianyar)	15.370.330	
22	BPR Sinar Kuta	191.625.519	
23	BPR Pasar Raya Kuta	5.736.491	
24	BPR Kertiawan	50.000	
25	BPR Aruna Nirmaladuta	-	
26	BPR Wahyu Nirmala Cab. Singaraja	123.234.469	
27	BPR Kanaya Singaraja	13.274.833	
28	BPR Maha Bhoga Marga	73.686.910	
29	BPR Maha Bhoga Marga Cabang Tabanan	54.191.560	
30	BPR Cahaya Bina Putra	13.696.713	
31	BPR Bali Dewata	70.134.440	
32	BPR Sukawati Pancakanti	55.192.564	
33	BPR Naga	19.479.204	
34	BPR Luhur Damai	94.914.242	
35	BPR Artha Budaya	157.154.567	
36	BPR Bumi Prima Dana	148.629.709	
37	BPR LESTARI	691.956	
38	BPR Gianyar Partasedana	53.022.704	
39	BPR Penebel	23.568.036	
40	BPR Varis Mandiri	41.535.776	
41	BPR Kertiawan Cabang Tabanan	-	
42	BPR Surya Jaya Kubutambahan, Cabang Gianyar	140.493	
43	BPR Prisma Bali	1.251.957	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
44	BPR Nur Abadi	12.684.966	
45	BPR Kertiawan Cabang Gianyar	32.429.579	
46	BPR Sinar Puteramas	231.351.413	
47	BPR Cahaya Bina Putra Buleleng	44.544.180	
48	BPR Udary / BPR Ulatidana Rahayu	71.869.759	
49	BPR Eka Ayu Artha Bhuwana	60.053.109	
50	BPR Bank Surya Jaya Ubud Cabang Negara	47.671.532	
51	BPR Bank Buleleng 45	18.116.821	
52	BPR Krisna Yuna Dana	64.693.102	
53	BPR Sukawati Pancakanti Cabang Denpasar	117.367.880	
54	BPR Sukawati Pancakanti Cabang Mengwi	97.158.278	
55	BPR Varis Mandiri Cabang Denpasar	-	
56	BPR Kertiawan Cabang Kuta	15.901.445	
57	BPR Calliste Bestari	-	
58	BPR Jero Anom	82.976.647	
59	BPR Sari Dananiaga	81.543.216	
60	BPR Ayunulus	-	
61	BPR Amerta Sari Kerambitan	152.013.418	
62	BPR Prisma Bali Mangupura	5.962.746	
63	BPR Penebel Cabang Denpasar	4.745.890	
64	BPR Luhur Damai Cabang Denpasar	140.739.695	
65	BPR Artha Adyamurti	34.035.384	
66	BPR Tulus Dadi	75.762.877	
67	BPR Sari Wira Tama	5.773.241	
68	BPR Sutra / BPR Bunga Sutra Mas	51.044.622	
69	BPR Restu Dewata	52.524.160	
70	BPR Santi Pala	55.437.445	
71	BPR Picu Manunggal	-	
72	BPR Sadhu Arta	134.032.189	
73	BPR Bali Dananiaga Pusat DPS	31.822	
74	BPR Sedana Murni	65.966.994	
75	BPR Karunia Dewata	56.902.784	
76	BPR Bali Dananiaga Cab. Kuta	5.433	
77	BPR Bali Dananiaga Cab. Gianyar	-	
78	BPR Sandi Raya Utama	405.779	
79	BPR Kintamani Perdana	1.320.627	
80	BPR Permata Sedana	112.100.899	
81	BPR Saraswati Ekabumi	34.045.055	
82	BPR Suadana	-	
83	BPR Tridarma Putri	118.759.094	
84	BPR Kertha Warga	101.238.552	
85	BPR Kusuma Mandala	-	
86	BPR Luhur Pucak Sari	10.000	
87	BPR Mitra Bali Mandiri	92.926.763	
88	BPR Khrisna Darma Adipala	32.149.042	
89	BPR Mitra Balijaya Mandiri	132.879.916	
90	BPR Luhur Pucaksari Cab. Tabanan	-	
91	BPR Sari Jaya Sedana	49.297.437	
92	BPR Kusemas Dana Mandiri	40.901.567	
93	BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri	15.405.505	
94	BPR Mitra Bali Artha Mandiri	62.578.009	
95	BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri	71.431.630	
96	BPR Baskara Dewata	45.151.340	
97	BPR Dharmawarga Utama Kerambitan	6.497.247	
98	BPR Dewata Indobank	-	
99	BPR Pertiwi	49.761.623	
100	BPR Dewata Indobank Cab. Kuta	-	
101	BPR Legian Cabang Tabanan	-	
102	BPR Sedana Yasa	67.192.562	
103	BPR Siwi Sedana	124.983.377	
104	BPR Hoki, Denpasar	172.774.158	
105	BPR Danamaster Dewata	292.513	
106	BPR Hoki Cabang Gianyar	155.945.420	
107	BPR Hoki Cabang Tabanan	168.803.918	
108	BPR Hoki Cabang Badung	-	
109	BPR Cahaya Binawerdi	13.488.893	
110	BPR Cahaya Binawerdi Cabang Tabanan	5.153.777	
111	BPR Saptacristy Utama	118.708.884	
112	BPR Tapa	-	
113	BPR KAS Indonesia	11.769.230	
114	BPR Siagadana Kuta	38.877.622	
115	BPR Dewata Indobank Cab. Denpasar	-	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
116	BPR Parasari Sibang	57.921.821	
117	BPR Sari Sedana, Denpasar	90.743.020	
118	BPR Dalung, Badung	74.139.795	
119	BPR Nusamba Kubutambahan, Buleleng	63.448.343	
120	BPR Nusamba Kubutambahan, Negara	204.209.140	
121	BPR Nusamba Kubutambahan, Seririt	168.174.781	
122	BPR PANDE ARTHA DEWATA	7.536.507	
123	BPR HARDYS MITRA INDONESIA	68.336.358	
124	BPR ANGSA SEDANA YOGA, Gianyar	22.160.029	
125	BPR PRIMA DEWATA, Badung	68.227.662	
126	BPR Nusamba Kubutambahan Buleleng	8.475.886	
127	BPR Padma Denpasar	75.560.463	
128	BPR Bank Padma Tabanan	59.297.207	
129	BPR SANUR	917.759	
130	BPR HARI DEPAN	21.856.408	
131	BPR Duta Bali Denpasar	5.133.550	
132	BPR KITA Badung	-	
133	BPR DANA KARYA NUSA	59.452.243	
134	BANK BPR ADI SEDANA AYU (saudaraku)	70.908.378	
135	BPR Artha Bali Jaya Gianyar	30.151.277	
136	BPR HARI DEPAN CABANG GIANYAR	36.022.264	
137	BPR JAYA KERTI	3.735.923	
138	BPR Bali Sinar Menara	100.049.746	
139	BPR Dewata Candradana Klungkung	45.347.149	
140	BPR Dewata Candradana Denpasar	95.252.628	
141	BPR Kita Centradana Denpasar	511.455.453	
142	BPR Artha Bali Jaya Denpasar	72.448.998	
143	BPR Surya Natapala	-	
144	BPR Adi Jaya Mulia	99.123.693	
145	BPR Nusamba Manggis Karangasem	103.279.789	
146	BPR Sentral Ekonomi Nusantara	-	
147	BPR Dewata Candradana Gianyar	35.637.400	
148	BPR Nusamba Manggis Cabang Klungkung	248.917.606	
149	BPR Nusamba Tegallalang Gianyar	46.715.019	
150	BPR Sadana Utama Bali Badung	72.158.298	
151	BPR Sadana Utama Bali Cabang	24.558.367	
152	BPR Nusa Panida	4.824.327	
153	BPR Mulia Wacana Gianyar	114.500	
154	BPR NUSAMBA TEGALALANG CAB. BANGLI	83.703.814	
155	BPR PARASARI (Lukluk)	49.267.924	
156	BPR Nusamba Mengwi	161.343.710	
157	BPR Karya Sari Sedana	98.269.464	
158	BPR Nusamba Manggis cabang Kuta	11.615.585	
159	BPR Kintamani Perdana Cabang Kuta	59.492.834	
160	BPR Tata Anjung Sari	70.913.118	
161	BPR Mertha Sedana	37.393.953	
162	BPR Indra Candra	841.066.264	
163	BPR Tish Gianyar	16.476.321	
164	BPR Tata Anjung Sari Cabang Klungkung	14.590.350	
165	BPR Nusamba Mengwi Cabang Tabanan	19.542.664	
166	BPR Padma Gianyar	34.426.687	
167	BPR Bukit Tanjung	18.749.355	
	Jumlah		**11.033.600.411**
Bank Bukopin			
1	Bukopin A/C 14.01.200.228 Cabang Denpasar	120.675.738	
2	Rekening Giro Bukopin A/C 1950101071	9.462.555	
3	Giro Bank Bukopin - Entitas Anak	14.976.924	
	Jumlah		**145.115.217**
BPD Bali Kancapem			
1	BPD Bali A/C 030.02.02.03367-0 Capem Sukawati	1.018.096	
2	BPD Bali A/C 031.02.02.01821-1 Capem Payangan	71.689.993	
3	BPD Bali A/C 048.02.02.00462-8 Capem Kintamani	506.920	
4	BPD Bali A/C 032.02.02.03089-5 Capem Nusa Dua	143.054.542	
5	BPD Bali A/C 051.02.02.00488-9 Capem Menanga	79.732.619	
6	BPD Bali A/C 025.02.05.00255-7 Capem Selat	54.049.604	
7	BPD Bali A/C 038.02.02.03916-2 Capem Candidasa	39.293.747	
8	BPD Bali A/C 034.02.02.13233-8 Capem FE Unud	2.198.914	
9	BPD Bali A/C 026.02.02.02733-9 Cabang Mengwi	8.760.859	
10	BPD Bali A/C 040.02.02.03692-6 Capem Abiansemal	94.304.651	
11	BPD Bali A/C 036.02.02.004489-8 Capem Gatsu Barat	3.743.869	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
12	BPD Bali A/C 046.02.02.00565-2 Capem Tamblang	213.403.690	
13	BPD Bali A/C 043.02.02.21709-8 Capem Baturiti	4.293.422	
14	BPD Bali A/C 029.02.02.06114-1 Capem Teuku Umar	743.890	
15	BPD Bali A/C 037.02.02.04747-7 Capem Kamboja	888.972	
16	BPD Bali A/C 041.02.02.06189-5 Capem Bajra	4.979.915	
17	BPD Bali A/C 024.02.02.08036-0 Capem Kediri	251.970.483	
18	BPD Bali A/C 044.02.02.38372-3 Capem Penebel	117.137.386	
19	BPD Bali Capem Gatsu Timur	191.836.448	
20	BPD Bali Capem Sanur	80.736.773	
21	BPD Bali Capem Monang-Maning	138.674.578	
22	BPD Bali Capem Tohpati	94.138.094	
23	BPD Bali Capem Ubung	781.166	
24	BPD Bali Capem Sesetan	48.664.567	
25	BPD Bali Capem Ngurah Rai	91.106.349	
26	BPD Bali Capem Legian	52.800.475	
27	BPD Bali Capem Nusa Penida	55.417.095	
28	BPD Bali Capem Pupuan	8.919.976	
29	BPD Bali Capem Gilimanuk	2.888.456	
30	BPD Bali Capem Pekutatan	66.797.709	
31	BPD Bali Capem Warmadewa	37.755.736	
32	BPD Bali Capem Lovina	835.356	
33	BPD Bali Capem Tegal Buah	28.473.914	
34	BPD Bali Capem Ir. Soekarno	3.708.465	
35	BPD Bali Capem Marga	639.433	
36	BPD Bali Capem Tampaksiring	1.000.949	
37	BPD Bali Capem Legian (Rekening Giro No. 033.01.11.00015-6)	223.454.724	
38	BPD Bali Capem Kamboja (Koperasi KPN Pradnya Kerthi Kopertis)	36.488.247	
39	BPD Bali Capem Kamboja (Koperasi RRI)	18.262.273	
40	BPD Capem Kamboja (KPN Dinas Kesehatan Prov bali)	40.870.833	
41	BPD Capem Kamboja (PRIMKOP Kartika Hesti Dharma Sejahtera)	7.803.450	
42	BPD Capem Tanjung	696.042	
44	BPD Capem Warmadewa (Koperasi Amogasidhi dan Koperasi Unud)	18.727.104	
45	BPD Capem Warmadewa (Koperasi Dana Werdhi Denpasar)	822.671	
46	BPD Capem Sesetan (KPN Bahari)	25.670.768	
47	BPD Capem Unud (Koperasi Bina Usaha PD PASAR/Perusda)	26.397.079	
48	BPD Capem Unud (AJRI)	1.988.546	
49	BPD Capem Unud (Jaminan PNK)	4.090.015.644	
50	BPD Capem Kediri (Dana Sponsorship)	9.052.776	
51	BPD Bali Capem Teuku Umar - Rayon 1	157.770.385	
52	BPD Bali Capem Teuku Umar - Rayon 2	36.649.721	
53	BPD Bali Capem Teuku Umar - Rayon 3	113.774.031	
54	BPD Bali Capem Teuku Umar - Rayon 4	76.797.813	
55	BPD Bali Capem Teuku Umar - Rayon 5	74.034.617	
56	BPD Bali Capem Teuku Umar - Bangli	46.866.938	
57	BPD Bali Capem Teuku Umar - Klungkung	117.519.472	
58	BPD Bali Capem Teuku Umar - Nusa Penida	1.119.052	
59	BPD Bali Capem Teuku Umar - Jembrana	170.546.084	
60	BPD Bali Capem Teuku Umar - Gianyar	231.428.591	
61	BPD Bali Capem Teuku Umar - Karangasem	69.930.177	
62	BPD Bali Capem Teuku Umar - Tabanan	324.268.622	
63	BPD Bali Capem Teuku Umar - Penampungan Subrogasi	228.080.231	
	Jumlah		**8.147.004.805**
Bank Rakyat Indonesia (BRI)			
1	BRI Kantor Cabang Gajah Mada	-	
2	Giro Bank BRI	42.528.085	
3	BRI Kantor Cabang Renon	2.174.543.079	
	Jumlah		**2.217.071.164**
OK Bank Indonesia			
1	Bank Ok Indonesia Cabang Denpasar		
	Jumlah		**-**
Bank BNI'46			
1	BNI Gajah Mada	176.933.414	
2	Giro Bank Bank BNI 46 Cabang Renon	1.402.488.109	
3	Giro Bank BNI 46 (Dana PKBL)	-	
4	Giro Bank BNI - Singaraja	166.726.321	
5	Giro Bank BNI - Jembrana	9.973.476	
6	Giro Tabungan Berjangka BNI II-Bali	5.000.098.500	
7	Giro BNI Taplus Bisnis Bali	40.835.824	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
	Jumlah	-	**6.797.055.644**
		-	
Bank Mandiri			
1	Bank Mandiri Cabang Udayana	748.503.596	
2	Giro Bank Mandiri	44.532.202	
	Jumlah		**793.035.798**
Bank Permata			
1	Bank Permata	10.078.856.031	
	Jumlah		**10.078.856.031**
Bank MNC Internasional			
1	Bank MNC Internasional	29.820.657	
	Jumlah		**29.820.657**
Lembaga Perkreditan Desa (LPD)			
1	LPD Talepud	110.392	
2	LPD Desa Pekraman Gumbrih Kec. Pekutatan	-	
3	LPD Desa Pekraman Pekutatan	273.334.515	
4	LPD Desa Pekraman Berangbang	57.261.343	
5	LPD Pengeragoan Dauh Tukad	57.011.183	
6	LPD Desa Pekraman Poh Santen	-	
7	LPD Desa Adat Jegu	-	
8	LPD Desa Pekraman Buruan	69.749.656	
9	LPD Desa Pekraman Yehembang	37.103.517	
10	LPD Desa Pekraman Mendoyo Dangin Tukad	-	
11	LPD Desa Pekraman Banyubiru	131.061	
12	LPD Desa Pekraman Candikusuma	69.808.950	
13	LPD Pergung	-	
14	LPD Baler Bale Agung	50.514.750	
15	LPD Baluk	29.329.576	
16	LPD Melaya	101.490.600	
17	LPD Medewi	38.698.003	
18	LPD Akah	-	
19	LPD Budaga	20.634.435	
20	LPD Desa Pekraman Tangkas	78.112.950	
21	LPD Kesiman	572.646.886	
22	LPD Bugbug	-	
23	LPD KEKERAN TABANAN	41.577.050	
24	LPD Tunjuk	17.785.209	
25	LPD Bongan Puseh	71.509.733	
26	LPD Subamia	49.248.758	
27	LPD Ambengan	16.065	
28	LPD Desa Pekraman Gitgit	92.304	
29	LPD Desa Pekraman Lumbanan	156.268.892	
30	LPD Desa Pekraman Padangbulia	79.955	
31	LPD Desa Pekraman Naga Sepaha	22.938.569	
32	LPD Desa Pekraman Ekasari	557.794	
33	LPD DESA PAKRAMAN SANGSIT DAUH YEH	23.789.125	
34	LPD Pejarakan	-	
35	LPD Sumberkima	26.550	
36	LPD Banyuning	58.195	
37	LPD Sumbersari	25.951.767	
38	LPD PENGERAGOAN DANGIN TUKAD	128.432.025	
39	LPD SANGGALANGIT	17.041	
40	LPD PEMUTERAN	8.962.100	
41	LPD PERANCAK	-	
42	LPD Lepang	-	
43	LPD Dawan	2.381.300	
44	LPD DESA PAKRAMAN TAMAN SARI	49.537.633	
45	LPD Anturan	32.909.037	
46	LPD Senapahan	45.313.076	
47	LPD Meliling	16.222.003	
48	LPD Tista	-	
49	LPD Timpag	-	
50	LPD Tamblang	-	
51	LPD DESA ADAT SAMSAMAN	-	
52	LPD DESA ADAT SAMSAM	3.912.073	
53	LPD DESA ADAT BATUAJI KAWAN	64.099.454	
54	LPD AAN	62.797.913	
55	LPD Besang Kangin	14.812.900	
56	LPD Dauhwaru Kec. Jembrana	40.326.274	
57	LPD Pecatu	242.982.894	
58	LPD KEBONTINGGUH	29.324.249	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
59	LPD Desa Adat Semaon	45.647.500	
60	LPD Kalibukbuk	-	
61	LPD Unggahan	613.853	
62	LPD Desa Adat Saren	5.096.000	
63	LPD Desa Adat Tegal	-	
64	LPD Desa Adat Lambing	82.933.479	
65	LPD Desa Adat Sibanggede	611.160	
66	LPD Desa Adat Gerih	49.840.025	
67	LPD Desa Adat Sibang Kaja	58.952.078	
68	LPD Desa Adat Tuka	99.241.158	
69	LPD PADANG LUWIH DALUNG	1.313.550	
70	LPD Desa Adat Penebel	15.653.081	
71	LPD Desa Adat Beraban	80.455.640	
72	LPD Yeh Buah	18.780.450	
73	LPD Wanasari	54.194.257	
74	LPD DESA PAKRAMAN POHGADING	60.682.220	
75	LPD Canggu	7.480.610	
76	LPD Desa Adat Tulangnyuh	3.640.357	
77	LPD Desa Adat Tegak	37.697.650	
78	LPD Desa Adat Bias Kec. Dawan	27.520.115	
79	LPD Desa Adat Kota Tabanan	409.600	
80	LPD Desa Adat Dalung	82.457.616	
81	LPD Desa Adat Tegal Badeng Kauh	19.941.472	
82	LPD Desa Adat Lelateng	20.517.252	
83	LPD Desa Adat Jewuk Manis	5.237.865	
84	LPD Desa Pakraman Tegal Badeng Kangin	11.281.904	
85	LPD Desa Pakraman Tegal Tugu	48.788.752	
86	LPD Desa Pakraman Temesi	-	
87	LPD Desa Pakraman Angantelu	34.778.414	
88	LPD Desa Adat Gegelang	132.474.450	
89	LPD Desa Adat Kerobokan	86.639.904	
90	LPD Desa Adat Kemoning	55.040.627	
91	LPD Desa Adat Karang Suung Kaja	7.740.550	
92	LPD Desa Pekraman Bangkah	53.365	
93	LPD Desa Pekraman Sawan	930.067	
94	LPD Desa Pekraman Selat	28.520.719	
95	LPD Desa Pekraman Telaga	3.650	
96	LPD Desa Adat Mambal	-	
97	LPD Sibetan	108.058.550	
98	LPD Mengwi	18.824.825	
99	LPD Desa Adat Manggis	11.400	
100	LPD TRI BHUANA	31.730.900	
101	LPD DESA ADAT NANGKA	54.716.860	
102	LPD Desa Adat Ulakan	63.678.277	
103	LPD DESA PEKRAMAN YEH KUNING	67.786.900	
104	LPD DESA PAKRAMAN GIRI AMERTHA	9.125.600	
105	LPD DESA PAKRAMAN PENYARINGAN	47.367.157	
106	LPD DESA PAKRAMAN SUKASADA	59.875	
107	LPD DESA PAKRAMAN SUSUT	-	
108	LPD DESA PAKRAMAN BEBANDEM	10.311.781	
109	LPD DESA PAKRAMAN MACANG	23.877.200	
110	LPD DESA PAKRAMAN SUKAHET	-	
111	LPD DESA PAKRAMAN TANGGAHAN PEKEN	100.000	
112	LPD DESA PAKRAMAN SERAI KEMBANGMERTA	-	
113	LPD DESA ADAT BERAWA	-	
114	LPD DESA ADAT TANDEG	3.146.867	
115	LPD Desa Pekraman Jungut	78.485.360	
116	LPD Desa Pekraman Penasan	53.045.362	
117	LPD Penarukan	985.283	
118	LPD Desa Adat Liligundi	104.558.900	
119	LPD Desa Pakraman Kebon	101.498.184	
120	LPD Desa Adat Darmasaba	71.078.460	
121	LPD Desa Pakraman Putung	805.500	
122	LPD Desa Pakraman Budakeling	91.643.700	
123	LPD Desa Pakraman Manuk	1.825.550	
124	LPD Desa Pakraman Susut Kaja	71.361.798	
125	LPD Desa Pakraman Kepaon	239.150.989	
126	LPD Desa Adat Sala	28.598.263	
127	LPD Desa Adat Kelan	148.498.883	
128	LPD Desa Adat Apit Yeh	5.116.567	
129	LPD Desa Pakraman Pagan	3.764.900	
130	LPD Desa Adat Menanga	305.325.450	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
131	LPD Desa Pakraman Lebu	-	
132	LPD Desa Pakraman Tinga-Tinga	-	
133	LPD DESA ADAT BATUSESA	18.030.850	
134	LPD DESA ADAT WARINGIN	-	
135	LPD DESA PAKRAMAN PEGADUNGAN	18.376	
136	LPD DESA PAKRAMAN PEMARON	-	
137	LPD DESA PAKRAMAN KEKERAN BULELENG	8.345	
138	LPD Desa Adat Sebudi	-	
139	LPD Desa Pakraman Guwang	-	
140	LPD Desa Adat Metra	115.154.258	
141	LPD TELUN WAYAH	94.453.729	
142	LPD Desa Pakraman Klungah	44.150.109	
143	LPD Desa Adat Tingkadbatu	16.223.600	
144	LPD Desa Adat Padangsambian	-	
145	LPD DESA ADAT SARI MEKAR	83.906.317	
146	LPD Desa Adat Batuan	29.175.237	
147	LPD Desa Adat Tohjiwa	3.441.700	
148	LPD DESA ADAT SELAT PANDAN BANTEN	266.221.550	
149	LPD Desa Pakraman Serampingan Megati	-	
150	LPD Desa Pakraman Lembeng	34.580.832	
151	LPD Desa Pakraman Penatahan	26.718.554	
152	LPD Desa Pekraman Ubung	22.205.425	
153	LPD DESA PAKRAMAN SUSUT KELOD	-	
154	LPD DESA ADAT TAMBAHAN	24.106.037	
155	LPD Megati	-	
156	LPD Desa Pekraman Bedulu	16.035.800	
157	LPD Desa Pakraman Abiantuwung	68.978.673	
158	LPD Bale Agung Tabanan	68.690.413	
159	LPD Desa Pekraman Giri Utama	27.168.768	
160	LPD Desa Adat Sumerta	23.650.842	
161	LPD Besan	61.301	
162	LPD Palaktiying	37.099.046	
163	LPP Penatih	-	
164	LPD Tembawu	50.300	
165	LPD Desa Pakraman Pemogan	-	
166	LPD Desa Adat Mambang Gede	12.383	
167	LPD Desa Adat Rianggede	50.055.681	
168	LPD Pangkung Paruk	63.131.900	
169	LPD Gablogan	40.301.539	
170	LPD Mayong	107.730	
171	LPD Desa Adat Tajen	473.077	
172	LPD Desa Pakraman Sembung Gede	69.172.660	
173	LPD Desa Pakraman Datah	56.930.479	
174	LPD Busung Biu	-	
175	LPD Kerobokan Kantor Cabang	85.739.464	
176	LPD Desa Pakraman Pandak Gede	-	
177	LPD Desa Adat Bantas	36.820.500	
178	LPD Sayan	25.095.815	
179	LPD Gerokgak	606.170	
180	LPD Desa Pakraman Tedung	-	
181	LPD Musi	34.500	
182	LPD Peliatan	173.957.728	
183	LPD Peraupan	-	
184	LPD Desa Pakraman Kediri	45.746.101	
185	LPD Bayad Payangan	-	
186	LPD DESA PAKRAMAN BASANGAMBU	-	
187	LPD PATAS	123.450	
188	LPD Desa Adat Sugra	-	
189	LPD Desa Adat Lebah Buana	2.644.693	
190	LPD Desa Pakraman Presana	3.956.100	
191	LPD Mas	255.800	
192	LPD Tibekauh	136.000	
193	LPD Desa Adat Tunon	-	
194	LPD Padang Tegal	59.481.111	
195	LPD Desa Adat Kukuh	458.882	
196	LPD Desa Adat Gempinis	139.448	
197	LPD Desa Pekraman Lumbuan	-	
198	LPD Belatungan	105.727.800	
199	LPD KABA-KABA Tabanan	207.299.634	
200	LPD Sekaan	-	
201	LPD Desa Pakraman Sesadan, Tabanan	13.427.583	
202	LPD Desa Pakraman Kedua, Denpasar	1.272.132	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
203	LPD Desa Adat Komala, Karangasem	43.085.636	
204	LPD Desa Pakraman Lumajang, Tabanan	-	
205	LPD Desa Pakraman Selabih, Tabanan	2.057.575	
206	LPD Desa Pekraman Renon, Denpasar	-	
207	LPD DESA PAKRAMAN KALISADA, Buleleng	169.995.013	
208	LPD DESA ADAT UNGASAN, Badung	12.550.655	
209	LPD DESA ADAT SAMBANGAN, Buleleng	106.950	
210	LPD Desa Adat Br. Anyar, Tabanan	16.193.300	
211	LPD Desa Pakraman Penginyahan, Gianyar	141.241.449	
212	LPD Desa Pakraman Tibubiu, Tabanan	-	
213	LPD Desa Adat Pengembungan, Tabanan	11.233.760	
214	LPD Sebunibus, Nusa Penida	48.958.137	
215	LPD Nyuh Kukuh, Nusa Penida	4.747.063	
216	LPD Panca Mandala Gita, Nusa Penida	26.378.460	
217	LPD Ped, Nusa Penida	-	
218	LPD Bangklet, Bangli	27.385.090	
219	LPD Tukad Besi, Karangasem	105.358.340	
220	LPD Desa Pakraman Batulumbang, Tabanan	108.406.961	
221	LPD Desa Pakraman Serongga Tabanan	-	
222	LPD Kutapang Nusa Penida	2.092.810	
223	LPD DESA PAKRAMAN PEGUYANGAN	5.790.588	
224	LPD Desa Adat Kerobokan Cabang Kebo Iwa	60.882.512	
225	LPD Desa Adat Sukaluwih	41.706.853	
226	LPD Desa Adat Senganan Kanginan	95.671.806	
227	LPD Desa Pakraman Kelaci Kelod	-	
228	LPD Desa Adat Umanyar	51.970.297	
229	LPD Bona Gianyar	33.540.512	
230	LPD DESA PEKARAMAN KESIMPAR KARANGASEM	66.968.400	
231	LPD DESA PEKARAMAN DENPASAR	68.567.244	
232	LPD PANCINGAN KLUNGKUNG	11.320.400	
233	LPD Adat Kuwum Tabanan	-	
234	LPD Adat Luwus Tabanan	80.827.380	
235	LPD Desa Adat Marga Tabanan	32.734.639	
236	LPD Desa Pakraman Babahan Tabanan	-	
237	LPD Desa Adat Ubung Tabanan	-	
238	LPD Sumampan	28.309.883	
239	LPD Jaang	11.526.370	
240	LPD Desa Adat Cau Belayu Tabanan	69.225.271	
241	LPD Desa Pakraman Wongaya Gede Tabanan	28.263.350	
242	LPD Desa Pakraman Puluk-Puluk Tabanan	109.207	
243	LPD Batukandik Badung	26.032.500	
244	LPD Delodyeh Karangasem	15.449.550	
245	LPD Petandakan Buleleng	-	
246	LPD DA KAMPIAL	-	
247	LPD DESA PAKRAMAN PESABAN	-	
248	LPD DESA PAKRAMAN DUKUH PULU KAJA	-	
249	LPD DESA PAKRAMAN KUTUH KAJA	-	
250	LPD Yehanakan Buleleng	16.887	
251	LPD Gelogor klungkung	28.327.562	
252	LPD Panjer	47.072.155	
253	LPD Desa Pakraman Tua Marga Tabanan	44.757.500	
254	LPD Desa Adat Sanggulan Tabanan	-	
255	LPD Desa Adat Tua Tabanan	-	
256	LPD Desa Adat Buleleng	3.179.013	
257	LPD Yang Batu Denpasar	34.417.700	
258	LPD Sanur	70.106.557	
259	LPD Desa Adat Angantiga	28.300	
260	LPD Desa Adat Penarukan Buleleng	13.886.850	
261	LPD Desa Pekraman Belimbing Tabanan	47.224.971	
262	LPD Delod Berawah Negara	-	
263	LPD Kusamba	13.988.100	
264	LPD Tuwed Negara	30.354.205	
265	LPD Petang Badung	-	
266	LPD Desa Adat Penganggahan Tabanan	47.899.350	
267	LPD Tangeb Badung	1.171.600	
268	LPD Karangsari Nusa Penida Klungkung	-	
269	LPD Gunaksa Klungkung	24.701.250	
270	LPD Desa Pakraman Dukuh Buahan Tabanan	32.962.669	
271	LPD Desa Adat Buahan Tabanan	788.972	
272	LPD Panca Mekar Sari Klungkung	-	
273	LPD Padangbai	52.763.453	
274	LPD Kertha Buana Nusa Penida	16.917.433	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
275	LPD Kedonganan Badung	161.248.456	
276	LPD Tengkudak Tabanan	49.671.030	
277	LPD Batununggul Nusa Penida Klungkung	17.228.200	
278	LPD Sumberklampok Buleleng	10.000	
279	LPD Tegal Cangkring	15.628.263	
280	LPD Punduk Dawan	38.933.500	
281	LPD Mastulan	24.638.000	
282	LPD Basang Alas	10.844.061	
283	LPD Bebayu	65.544.129	
284	LPD Bangal	-	
285	LPD Sangging	73.562.383	
286	LPD Ababi	31.676.375	
287	LPD Desa Adat Sesandan	49.847.859	
288	LPD Gadungan	14.630.668	
289	LPD Desa Adat Soka	-	
290	LPD Desa Adat Cepik	23.475.802	
291	LPD Jungut Batu	8.568.625	
292	LPD Desa Adat Punggul	-	
293	LPD Desa Adat Bondalem	-	
294	LPD Desa Adat Kwanji	45.997.885	
295	LPD Tri Wanara Giri Mandala	4.563.900	
	Jumlah		**10.196.136.532**
Koperasi			
1	Koperasi Sila Mukti	20.000	
2	Koperasi Permata Utama	-	
3	Koperasi Amrta Semaya	-	
4	Koperasi Sari Agung Ananta Sedana	-	
5	Koperasi Bina Sejahtera	-	
6	KOPERASI BALI NASIONAL AKUNTAN	-	
7	Koperasi Dana Mukti	-	
8	Koperasi Adintara Kerti	9.693.449	
9	Bumdes Rendang	-	
10	Koperasi Sila Mukti Cabang Gianyar	20.000	
11	KOPERASI BANJAR PENGOSEKAN KAJA	85.161.319	
12	KOPERASI DHARMA LAKSMI	4.161.655	
13	KOPERASI RESTU KENCANA	38.565.101	
14	KOPERASI PARAMA DANA	-	
15	KSP Ema Duta Mandiri	-	
16	KSP Banjar Buruan	-	
17	Koperasi Mitra Usaha Beji Bungaya	65.911.947	
18	Kopkar Sari Nusa	-	
19	KSP Bebandem Mandiri	(6)	
20	Koperasi Nawa Cita	-	
21	KSP Kuta Mimba	-	
22	Koperasi Koppas Srinadi	10	
23	KSP Gapoktan Budiluhur	10.695	
24	Koperasi Sari Harta Utama	-	
25	Koperasi Mandiri	-	
26	KSP Nusa Abadi	37.206.780	
27	KSP Ema Duta Mandiri Gianyar	-	
28	KSP Bali Dwipa Kubutambahan	57.575.123	
29	KSP MAS (MANDALA AMERTA SEDANA)	-	
30	BUMDES DWI AMERTHA SARI	-	
31	Kopkar Sari Ayana	78.246.965	
32	KSP Silamukti Cabang Batubulan	-	
33	Kopkar LPD Catur Purusa Artha	-	
34	Koperasi Kertha Dana	-	
35	KSU Werdhi Sedana	-	
36	KOPERASI TANI ARSA WINANGUN	3.504.895	
37	KSU Darma Sentana	27.068.186	
38	Koperasi Sri Kresna Dana	-	
39	KSP Jaya Pangus	-	
40	KSU SRI YOGA SEDANA	-	
41	KSU Sunari Jaya	-	
42	Koperasi Sari Dana Mertha	-	
43	Kospin Mustika	-	
44	KSP Wahyu Sejahtera	10.183.647	
45	Koperasi Silih Asih	15.320.275	
46	KSP Batu Agung	2.371.530	
47	Koperasi Ruket Badan RSU Tabanan	-	
48	KPN REJEKI	-	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
49	KSP Jaya Laksmi	-	
50	KSU Mekar Sari Batur	-	
51	Koperasi Nirmala	-	
52	Koperasi Semeton Bali	-	
53	KSP Artha Guna	-	
54	BUMDes Widya Sejahtera Tista	-	
55	KPN Pemkab Gianyar	-	
56	BUMDES TELAGA	-	
57	BUMDES KEKERAN	-	
58	BUMDES KALIANGET	-	
59	BUMDES SANGGALANGIT	-	
60	Puskop Jagadhita Kab. Badung	228.079	
61	KSU Duta Tama Sejahtera Mambal	-	
62	KSU Kertha Wiguna	-	
63	KSP Damai Sejahtera	1.291.843	
64	BUMDes Wana Asri / KSP Rahayu	-	
65	KSU Usaha Mandiri	-	
66	KSP Elang Sedana Amertha	-	
67	Koperasi Dubali 1	-	
68	BUMDes Pemuteran	-	
69	BUMDes Temukus	-	
70	BUMDes Sepang (BUMDes Karsa Sejahtera)	-	
71	BUMDes Pejarakan	-	
72	Koperasi Penatih	-	
73	KSP Mitra Yadnya	10.000	
74	BUMDes Musi	-	
75	BUMDes Pangkungparuk (BUMDes Artha Nadi)	-	
76	Koperasi Sedana Luwih	20.000	
77	KSU Krama Dangka	-	
78	KSP Jaya Manunggal	-	
79	KSP Catur Mega Sedana	-	
80	KSP Catur Mega Sedana, Cabang Nusa Dua	-	
81	BUMDes Guna Artha	-	
82	KSP Kuta Mimba, Cabang Kuta	-	
83	KSP Agung Artha Kusuma	-	
84	BUMDes Artha Werdhi Sarana Pangastulan	-	
85	Koperasi Danu Jaya	-	
86	BUMDes Sad Mandala	-	
87	BUMDes Suka Pura	-	
88	KSU Dana Rahayu	10.000	
89	Koperasi Dharma Siaga	75.819.624	
90	Koperasi Sayan Sejahtera	58.527.920	
91	Koperasi Sari Permata Niaga	-	
92	KSU Werdhi Sedana Yoga	1.076.812	
93	KSU Sedana Graha	-	
94	KSU Mitra Karya	21.388	
95	KSP ARTHA GUNA BHAKTI SINGARAJA	75.490.168	
96	Koperasi Lumbung Merta Sari	-	
97	KSU Artha Sejahtera	-	
98	KOSPIN PERMATA SIAGA	20.000	
99	KOPERASI DARMA SESANA	-	
100	KSU KUTA MIMBA Cabang Tabanan	-	
101	BUMDES ARTHA GUNA Karangasem	-	
102	KOPERASI LOKA AMERTHA UTAMA	15.141.220	
103	KSP Arsa Winala Sedana Denpasar	-	
104	KSU Kuta Mimba Cabang Gianyar	-	
105	KSU Kuta Mimba Cabang Denpasar	-	
106	KSP Jujur Utama Mandiri	-	
107	BUMDes Kartika Lestari	-	
108	Koperasi Swadana Arta, Tabanan	10.000	
109	Koperasi Dana Baskara, Tabanan	-	
110	Koperasi Sari Sedana Bakti, Badung	10.039	
111	KSP USAHA RAKYAT BERDIKARI, Klungkung	-	
112	Koperasi Candra Sedana, Badung Utara	-	
113	KSP Satria Gana, Negara	-	
114	KOPERASI BALI SEGARA, Badung	-	
115	KSU MULTI ARTHA GUNA, Gianyar	-	
116	KSP Cendana Makmur Raya (CEMARA), Bangli	45.244.003	
117	Koperasi Dana Mesari Bangli	-	
118	KSU Swadharmita, Denpasar	-	
119	Koperasi Sri Satyam Sedana	-	
120	KSP Kerti Sedana Sejahtera	-	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
121	KOPERASI GUNA PRIMA DANA, Badung	-	
122	KOPDIT KUBU BINGIN, Gianyar	-	
123	KOPERASI ANUGRAH ARTA JAYA	-	
124	KOPERASI SARI SEDANA, Karangasem	-	
125	KOPERASI GIRI SEDANA, Badung	-	
126	KSU Santha Yana Pasek, Denpasar	-	
127	KSU Teja Amerta, Denpasar	65.590.868	
128	Koperasi Jasa Loka Amertha Utama Cabang Singaraja	-	
129	Koperasi Guna Artha Mesari, Badung Selatan	-	
130	Koperasi Sri Sedana Yoga, Karangasem	14.834	
131	KSP Satya Bhakti, Badung Utara	31.670	
132	KSU Kharisma Madani Pusat, Denpasar	-	
133	KSU Kharisma Madani Cab Pakarisan, Denpasar	-	
134	KSU Kharisma Madani Cab Peteran, Denpasar	-	
135	KOPERASI KARYAWAN PD PASAR KOTA DPS	-	
136	KOPERASI GUNA ARTHA MESARI CABANG KUTA	-	
137	Koperasi Mitra Kusuma, Karangasem	-	
138	KOPERASI BUANA SARI	-	
139	KOPERASI CENTRAL HUTAMA MANDIRI	-	
140	KPN DHARMA WIGUNA	-	
141	KSP DALEM BLAMBANGAN	-	
142	KOPKAR RSUD SANJIWANI GIANYAR	1	
143	Koperasi Guna Artha Mesari Cabang Jimbaran	-	
144	Koperas Giri Mitra	60.000	
145	Kopkar Nasuki	-	
146	Koperasi Bunga Bali	-	
147	KSP Darma Sedana	-	
148	KSU Agung Mandiri	-	
149	PRIMER KOPERASI DITLANTAS POLDA BALI	-	
150	Koptri Mitra karya Badung	25.767	
151	KSP Astiti Dana Lestari Badung	1.089.750	
152	Koperasi Tangkas Sari Sedana Badung	1.445.459	
153	Koperasi Ema Duta Mandiri Denpasar	-	
154	Koperasi Widhi Dana Tabanan	-	
155	Bumdes Panca Sari Sedana Bangli	-	
156	Bumdes Tiying lali Karangasem	-	
157	Bumdes Dana Mertha (Tangkup) Karangasem	-	
158	KSP KARYA UTAMA DEWATA PAYANGAN	57.217.653	
159	KSP SEDANA ASRI KARYA	-	
160	KSP ANANDA KRISNHA	995.009	
161	KSP CREA BALI	-	
162	KOPERASI DARMA SUCI	-	
163	KPN CIPTA KARYA	1.394.500	
164	KOPERASI PARTHA MANUNGGAL TABANAN	-	
165	Kopdit Tritunggal Tuka Badung	-	
166	Koperasi Bayu Sudana Tabanan	25.000	
167	KSP PERTIWI	-	
168	KSP WIKAN	-	
169	KOPERASI TRI TUNGGAL TUKA CAB KEROBOKAN	-	
170	KSU SARI ARTHA BUANA	-	
171	Kopdit Tri Tunggal Tuka Tabanan	-	
172	Koperasi Ema Duta Mandiri Tabanan	-	
173	Kopdit Tri Tunggal Tuka Cabang Negara	-	
174	Kopdit Tri Tunggal Tuka KCP Negara	-	
175	Koperasi Kamijaya Sejahtera Denpasar	-	
176	Koperasi Tat Twam Asi Denpasar	-	
177	Koperasi Jati Wirasa Badung	-	
178	KSP Wreda Sri Sejahtera	-	
179	KSP Duta Karya Sedana	-	
180	KSP Giri Sari Yadnya	-	
181	Koperasi Tri Tunggal Tuka	-	
182	Koperasi Mitra Abadi	-	
183	KP Wisnu Nadi Sejahtera	-	
184	KSU DHARMA LAKSANA BADUNG	-	
185	KSP YUDISTIRA	-	
186	KOPERASI MEREGAN	9.999	
187	KPN SETIA KENCANA	-	
188	KPN MERTA USADHA	-	
189	KOPERASI SURYA DEWATA AGUNG	-	
190	KOPERASI BALI DWIPA SEJAHTERA	-	
191	KOPERASI DANA ASRI MANDIRI	10.043	
192	KOPERASI TRI TUNGGAL TUKA KCP PEJARAKAN	-	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
193	KOPERASI MENIK ARTA SEDANA	-	
194	Koperasi SATYA DHARMA SEDANA	-	
195	Koperasi KRAMA BALI	-	
196	KSP PURNAMA SEDANA ARTHA	-	
197	KSP SURYA MANDIRI	-	
198	KOPERASI TRI TUNGGAL TUKA MENGWI	-	
199	KOPTAN KEMBANG SEDANA	-	
200	KSU NUMTUM SARI	-	
201	KSP DANA SARI REJEKI RAHAYU	15.000	
202	KSP PRASIDHA JAYA ARTHA	-	
203	KOPERASI WERDHI DANA RAHAYU	-	
204	KOPKAR KERTHA USADA BULELENG	-	
205	KSP DANA SARI REJEKI RAHAYU CABANG RENDANG	-	
206	KOPERASI TIARA MANDIRI	-	
207	KOPERASI CEMPAKA MEKAR	-	
208	KJ YOGA ARTHA MULIA SEJAHTERA	-	
209	KOPERASI ARTHA NADI	49.398.601	
210	KOPERASI Duta Sejahtera Denpasar	-	
211	KSU PANCA SEDANA ARTHA	-	
212	Koperasi Rukun Kesehatan Tabanan	-	
213	Koperasi Ganesha Mertha Utama	5.733.442	
214	Koperasi Ari Canti Gianyar	-	
215	Koperasi Eka Citta	-	
216	Koperasi Mandara Sedana Kuta	(0)	
217	KPN Setya Graha	-	
218	KSU Mitra Sejahtera	48.714.928	
219	KSP Bhakti Karya Artha	4.624.000	
220	Koperasi Mina Segara	-	
221	KSP Coblong Pamor Denpasar	-	
222	KSP Kredit Swastiastu	-	
223	KJ Lumbung Wibuh Artha	-	
224	KSU Sari Kembang	-	
225	Koperasi Ayu Sedana Tabanan	-	
226	KSU Swadharma	-	
227	KSU Sinar Sari Mandiri Tabanan	-	
228	Koperasi Giri Mitra Cabang Nusa Dua	25.000	
229	Koperasi Pinang Sari	-	
230	KPN Partha Cudana	20.031.645	
231	Koperasi Ajeg Bali Tabanan	-	
232	Koperasi Pinang Sari Cabang Sempidi	1.608.676	
233	Koperasi Yuda Yukti Utama	-	
234	Koperasi Luhur Kedaton Bali	-	
235	Koperasi Swarta Dharma	-	
236	Koperasi Paron Sari	-	
237	KSP Manandana	-	
238	Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti	-	
239	Koperasi Prima Duta Utama	14.936	
240	KSP Mahadana Sari Artha	-	
241	KOPERASI TANI USAHA MANDIRI	2.142.392	
242	KOPERASI TANI USAHA MANDIRI CABANG SESETAN	-	
243	KSP BINA SEJAHTERA KLUNGKUNG	-	
244	KOPERASI TANI USAHA MANDIRI CABANG ABIAN LESTARI MESARI	-	
245	KOPERASI TANI USAHA MANDIRI TP.PBMM MADU SEDANA	-	
246	KOPERASI TANI USAHA MANDIRI CABANG PELAUT	-	
247	KOPDIT SUMBER KASIH TANGEB	-	
248	KOPERASI PANDAWA	45.800	
249	KTUM CABANG SINGARAJA TP WIDYA MERTA SARI SINGARAJA	-	
250	KTUM CABANG SERIRIT TP WIDYA MANDIRI SINGARAJA	3.759.999	
251	KOP Taman Sari Sedana	-	
252	Koperasi Sedana Putra	-	
253	KSP Mahadhana	-	
254	Koperasi Asta Sedana Badung	-	
255	Koperasi Mulia Sejahtera Pusat	-	
256	KSP Mulia Sejahtera KC Bajera	-	
257	KSP Mulia Sejahtera KC Penebel	-	
258	KSP Mulia Sejahtera KC Kerambitan	-	
259	KSP Mulia Sejahtera KC Nyambu	-	
260	Koperasi Usaha Kawan	10.573	
261	Koperasi Pegawai Negeri Sada	-	
262	KSP Sadguna	-	
263	Koperasi Lumbung Artha Mandiri	-	
264	Koperasi Serba Usaha Yoga Sadhana Prasada	-	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR GIRO DAN TABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2026

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
265	Koperasi Guna Prima Dana (KUR)	16.539.800	
266	Koperasi Sari Sedana Artha KOPPSA	-	
267	KSP Graha Mandiri Sejahtera	-	
268	Koperasi CU Pelita	7.000	
269	Koperasi Satya Kencana Dewi	71.394.614	
270	Koperasi Khrisna Dana Mulya	50.100	
271	Koperasi Tri Tunggal Tuka Cabang Jimbaran	-	
272	KOPERASI KUBU GUNUNG TEGAL JAYA	-	
273	Koperasi Serba Usaha Asri	-	
274	KSU Graha Pasek Dana Sejahtera	-	
275	KSP Surya Artha Sedana	-	
276	KSP Citra Telekomunikasi Mandiri	-	
277	Koperasi Sedana Bakti Yoga	-	
278	KSP Lumbung Harta Notarius	-	
	Jumlah		**1.059.969.726**
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)			
1	Bumdes Rendang (Bumdes Artha Darma Duta)	31.119.875	
2	BUMDES Dwi Amertha Sari	35.707.105	
3	BUMDes Widya Sejahtera Tista	31.758.429	
4	BUMDES Telaga (Wana Asri)	11.507.762	
5	BUMDES Kekeran Jaya	2.385.641	
6	BUMDES Kalianget / Mandiri Kalianget	380.000	
7	BUMDES Sanggalangit	-	
8	BUMDes Pemuteran (Sari Nadi Pemuteran)	69.485.650	
9	BUMDes Temukus	-	
10	BUMDes Sepang (BUMDes Karsa Sejahtera)	-	
11	BUMDes Pejarakan (BUMDes Nugraha Tata Semaya)	5.981.000	
12	BUMDes Musi	-	
13	BUMDes Pangkungparuk (BUMDes Artha Nadi)	14.757.500	
14	BUMDes Guna Artha	200.187	
15	BUMDes Artha Werdhi Sarana Pangastulan	4.314.900	
16	BUMDes Sad Mandala	26.115.390	
17	BUMDes Suka Pura	894.000	
18	BUMDES Artha Guna Karangasem	12.878.145	
19	BUMDes Kartika Lestari	17.986.050	
20	Bumdes Panca Sari Sedana Bangli	33.090.135	
21	Bumdes Tiying lali Karangasem	-	
22	Bumdes Dana Mertha (Tangkup) Karangasem	-	
23	BUMDES Guna Bhiksama	-	
24	BUMDES Anugrah Amertha Bumi (Mengening)	63.666.750	
25	BUMDES Desa Nusasari Jembrana	117.655.672	
26	BUMDES Cipta Mahadana Desa Pekutatan	59.668.073	
27	BUMDES Wija Sari Tabanan	83.548.304	
28	BUMDES Sejahtera Mandiri Desa Selat	2.867.100	
29	BUMDES Sari Arta Karangasem	19.308.405	
30	BUMDES Mandala Giri Amertha Buleleng	-	
31	BUMDES Bhuana Utama Desa Panji	41.809.405	
32	BUMDES Partha jaya	50.519.409	
33	BUMDES Valli Karya Lestari Desa Bengkala	10.501.950	
34	BUMDES Amertha Yoni Bangli	2.586.755	
35	BUMDES Kusuma Giri Amertha (Tamblang)	64.367.502	
36	BUMDES Panca Danarta Mandiri	4.667.992	
37	BUMDES MARGA KERTA BAKTI	3.612.414	
38	Bumdes Jineng Mas	6.254.357	
39	Bumdes Bebandem Jagadhita	70.541.413	
	Jumlah		**900.137.270**
	JUMLAH KESELURUHAN		**68.350.378.163**

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR DEPOSITO
PER 31 DESEMBER 2025

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
BPD Bali Kanca			
1	Deposito BPD Bali Cabang Denpasar	2.300.000.000	
2	Deposito BPD Bali Cabang Badung	38.300.000.000	
3	Deposito BPD Bali Cabang Negara	2.650.000.000	
4	Deposito BPD Bali Cabang Karangasem	1.350.000.000	
5	Deposito BPD Bali Cabang Tabanan	4.000.000.000	
6	Deposito BPD Bali Cabang Bangli	4.500.000.000	
7	Deposito BPD Bali Cabang Gianyar	100.000.000	
8	Deposito BPD Bali Cabang Klungkung	3.700.000.000	
9	Deposito BPD Bali Cabang Singaraja	4.700.000.000	
10	Deposito BPD Bali Cabang Ubud	2.500.000.000	
11	Deposito BPD Bali Cabang Seririt	1.330.000.000	
12	Deposito BPD Bali Cabang Renon	6.000.000.000	
13	Deposito BPD Bali Cabang Mangupura	2.000.000.000	
14	Deposito BPD Bali Cabang Amlapura	1.000.000.000	
15	Deposito Bank BPD Bali	-	
16	Deposito Bank BPD Bali - Kuta	5.000.000.000	
	Jumlah		**79.430.000.000**
Bank Rakyat Indonesia (BRI)			
1	Deposito BRI	32.400.000.000	
	Jumlah		**32.400.000.000**
MNC Bank			
1	Deposito MNC Bank	2.000.000.000	
	Jumlah		**2.000.000.000**
Bank Sampoerna			
1	Deposito Bank Sampoerna	1.250.000.000	
	Jumlah		**1.250.000.000**
BPD Bali Kancapem			
1	Deposito BPD Bali Capem Sukawati	100.000.000	
2	Deposito BPD Bali Capem Payangan	2.100.000.000	
3	Deposito BPD Bali Capem Kintamani	500.000.000	
4	Deposito BPD Bali Capem Nusa Dua	300.000.000	
5	Deposito BPD Bali Capem Menanga	900.000.000	
6	Deposito BPD Bali Capem Selat	300.000.000	
7	Deposito BPD Bali Capem Candi Dasa	100.000.000	
8	Deposito BPD Bali Capem FE Unud	11.400.000.000	
9	Deposito BPD Bali Capem Mengwi	400.000.000	
10	Deposito BPD Bali Capem Abiansemal	300.000.000	
11	Deposito BPD Bali Capem Gatsu Barat	300.000.000	
12	Deposito BPD Bali Capem Tamblang	300.000.000	
13	Deposito BPD Bali Capem Baturiti	1.300.000.000	
14	Deposito BPD Bali Capem Teuku Umar	8.400.000.000	
15	Deposito BPD Bali Capem Kamboja	200.000.000	
16	Deposito BPD Bali Capem Bajra	600.000.000	
17	Deposito BPD Bali Capem Kediri	300.000.000	
18	Deposito BPD Bali Capem Penebel	600.000.000	
19	Deposito BPD Bali Capem Gatsu Timur	-	
20	Deposito BPD Bali Capem Sanur	600.000.000	
21	Deposito BPD Bali Capem Monang-Maning	-	
22	Deposito BPD Bali Capem Tohpati	200.000.000	
23	Deposito BPD Bali Capem Ubung	100.000.000	
24	Deposito BPD Bali Capem Sesetan	800.000.000	
25	Deposito BPD Bali Capem Ngurah Rai	200.000.000	
26	Deposito BPD Bali Capem Legian	-	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR DEPOSITO
PER 31 DESEMBER 2025

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
27	Deposito BPD Bali Capem Nusa Penida	500.000.000	
28	Deposito BPD Bali Capem Pupuan	800.000.000	
29	Deposito BPD Bali Capem Gilimanuk	1.600.000.000	
30	Deposito BPD Bali Capem Pekutatan	1.100.000.000	
31	Deposito BPD Bali Capem Warmadewa	1.000.000.000	
32	Deposito BPD Bali Capem Tegal Buah	400.000.000	
33	Deposito BPD Bali Capem Ir. Soekarno	800.000.000	
34	Deposito BPD Bali Capem Tampaksiring	200.000.000	
35	Deposito BPD Bali Capem Lovina	300.000.000	
36	Deposito BPD Bali Capem Tanjung	500.000.000	
37	Deposito BPD Bali Capem Mataram	400.000.000	
	Jumlah		**37.900.000.000**
Bank Perekonomian Rakyat			
1	Deposito BPR Dewangga	200.000.000	
2	Deposito BPR Ashi	650.000.000	
3	Deposito BPR Bala Guna Prastha	1.770.000.000	
4	Deposito BPR Gisawa Kerobokan	1.300.000.000	
5	Deposito BPR Wahyu Nirmala	650.000.000	
6	Deposito BPR Suryajaya Kubutambahan	1.200.000.000	
7	Deposito BPR Parta Kencana Tohpati	300.000.000	
8	Deposito BPR Surya Jaya Ubud	700.000.000	
9	Deposito BPR Pasar Raya Kuta	200.000.000	
10	Deposito BPR Sinar Kuta Mulya	-	
11	Deposito BPR Tish	200.000.000	
12	Deposito BPR Aruna Nirmaladuta	-	
13	Deposito BPR Khrisna Darma Adipala	620.000.000	
14	Deposito BPR Kertiawan	100.000.000	
15	Deposito BPR Tohpati Cabang Gianyar	100.000.000	
16	Deposito BPR Gisawa Negara	-	
17	Deposito BPR Naga	450.000.000	
18	Deposito BPR Sukawati Pancakanti	1.100.000.000	
19	Deposito BPR LUHUR DAMAI	650.000.000	
20	Deposito BPR Bali Dewata	200.000.000	
21	Deposito BPR PADMA	200.000.000	
22	Deposito BPR KANAYA	100.000.000	
23	Deposito BPR LESTARI	-	
24	Deposito BPR ARTHA BUDAYA	1.250.000.000	
25	Deposito BPR Bumi Prima Dana	1.250.000.000	
26	Deposito BPR Sewu	-	
27	Deposito BPR Legian	-	
28	Deposito BPR Duta	100.000.000	
29	Deposito BPR Werdhi Sedana	3.020.000.000	
30	Deposito BPR Pasar Bangli	1.230.000.000	
31	Deposito BPR Gianyar Partha Sedana	100.000.000	
32	Deposito BPR Suar Artha Dharma	350.000.000	
33	Deposito BPR Jero Anom	450.000.000	
34	Deposito BPR Udary	200.000.000	
35	Deposito BPR Sari Dananiaga	918.000.000	
36	Deposito BPR Prisma	100.000.000	
37	Deposito BPR Calliste	-	
38	Deposito BPR Krisna Yuna Dana	100.000.000	
39	Deposito BPR Maha Bhoga Marga	200.000.000	
40	Deposito BPR Kertiawan Cabang Gianyar	100.000.000	
41	Deposito BPR Bali Dana Niaga	100.000.000	
42	Deposito BPR Varis Mandiri	100.000.000	
43	Deposito BPR Suryajaya Kubutambahan Cabang Gianyar	650.000.000	
44	Deposito BPR Artha Bhuwana	300.000.000	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR DEPOSITO
PER 31 DESEMBER 2025

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
45	Deposito BPR Amertasari	400.000.000	
46	Deposito BPR Sinar Kuta	200.000.000	
47	Deposito BPR Cahaya Bina Putra	-	
48	Deposito BPR Surya Cabang Negara	450.000.000	
49	Deposito BPR Maha Bhoga Marga Cabang Tabanan	200.000.000	
50	Deposito BPR Kertiawan Cabang Tabanan	-	
51	Deposito BPR Ayunulus	-	
52	Deposito BPR Artha Adyamurti	200.000.000	
53	Deposito BPR Buleleng 45	600.000.000	
54	Deposito BPR Tulus	500.000.000	
55	Deposito BPR Sadhu Arta	850.000.000	
56	Deposito BPR Cahaya Bina Putra Cabang Buleleng	100.000.000	
57	Deposito BPR Wahyu Nirmala Cabang Buleleng	200.000.000	
58	Deposito BPR Sari Sedana	200.000.000	
59	Deposito BPR Tri Darma Putri	500.000.000	
60	Deposito BPR Santi Pala	200.000.000	
61	Deposito BPR Baskara Dewata	300.000.000	
62	Deposito BPR Restu Dewata	200.000.000	
63	Deposito BPR Nurabadi	100.000.000	
64	Deposito BPR Saraswati Eka Bumi	1.900.000.000	
65	Deposito BPR Suadana	100.000.000	
66	Deposito BPR Mitra Bali Mandiri	200.000.000	
67	Deposito BPR Kusemas	1.800.000.000	
68	Deposito BPR Mitra Bali Artha Mandiri	400.000.000	
69	Deposito BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri	700.000.000	
70	Deposito BPR Pusaka	100.000.000	
71	Deposito BPR Permata Sedana	200.000.000	
72	Deposito BPR Karunia Dewata	100.000.000	
73	Deposito BPR Sari Jaya Sedana	200.000.000	
74	Deposito BPR Kertha Warga	100.000.000	
75	Deposito BPR Sedana Murni	100.000.000	
76	Deposito BPR Sukawati Pancakanti Cabang Mengwi	200.000.000	
77	Deposito BPR Dewata Indobank	-	
78	Deposito BPR Nusamba Kubutambahan	100.000.000	
79	Deposito BPR Sutra / Bunga Sutra Mas	500.000.000	
80	Deposito BPR Bayudhana	200.000.000	
81	Deposito BPR Nusamba Kubutambahan Negara	100.000.000	
82	Deposito BPR Dewata Indobank Cabang Denpasar	-	
83	Deposito BPR Sari Wira Tama	100.000.000	
84	Deposito BPR Kintamani Perdana	100.000.000	
85	Deposito BPR Suryanatapala Klungkung	100.000.000	
86	Deposito BPR Penebel	-	
87	Deposito BPR Siagadana Kuta	100.000.000	
88	Deposito BPR Parasari Sibang	100.000.000	
89	Deposito BPR Prima Dewata Badung	300.000.000	
90	Deposito BPR Hari Depan	100.000.000	
91	Deposito BPR Dewata Candradana Klungkung	100.000.000	
92	Deposito BPR Bali Sinar Menara (Bank Urban)	850.000.000	
93	Deposito BPR Nusamba Manggis Klungkung	100.000.000	
94	Deposito BPR Kita Centradana Denpasar	1.150.000.000	
95	Deposito BPR Mitra Balijaya Mandiri	300.000.000	
96	Deposito BPR Dewata Candradana Denpasar	500.000.000	
97	Deposito BPR Sinar Putera Mas	100.000.000	
98	Deposito BPR Sadana Utama Bali Badung	200.000.000	
99	Deposito BPR Karuna Ramanda Sejahtera	1.800.000.000	
100	Deposito BPR Hoki	1.400.000.000	
101	Deposito BPR Kusemas Dana Mandiri	-	
102	Deposito BPR Saptacristy Utama	260.000.000	
103	Deposito BPR Nusamba Tegallalang Gianyar	120.000.000	
104	Deposito BPR Karya Sari Sedana	210.000.000	

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK
DAFTAR DEPOSITO
PER 31 DESEMBER 2025

No	Keterangan	Jumlah	Saldo
105	Deposito BPR Indra Candra	2.002.000.000	
106	Deposito BPR Siwi Sedana	200.000.000	
	Jumlah		**43.600.000.000**
Bank Mayapada			
1	Deposito Bank Mayapada	4.500.000.000	
	Jumlah		**4.500.000.000**
Bank OK Indonesia			
1	Deposito Bank OK Indonesia Cab. Denpasar - Entitas Anak	3.600.000.000	
	Jumlah		**3.600.000.000**
Bank BTPN Syariah			
1	Deposito BTPN Syariah - Entitas Anak	3.950.000.000	
	Jumlah		**3.950.000.000**
Bank Banten			
	Deposito BJB	4.000.000.000	
	Deposito Bank Banten - Entitas Anak	3.000.000.000	
	Jumlah		**7.000.000.000**
Bank BNI			
1	Deposito Bank BNI - Entitas Anak	-	
	Jumlah		**-**
Bank BTN			
1	Deposito Bank BTN	34.500.000.000	
	Jumlah		**34.500.000.000**
Bank Woori Saudara			
1	Deposito Bank Woori Saudara - Entitas Anak	-	
	Jumlah		**-**
	JUMLAH KESELURUHAN		**250.130.000.000**

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN KEUANGAN BUMD

(PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR)

PER 31 DESEMBER 2025

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUMDA Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem
Jalan Gatot Subroto No 7, Amlapura Kab.Karangasem, Bali 80811
Telp. (0363) 21363

Opini Auditor No : 00072/2.0925/AU.8/04/1881-2/1/IV/2026
Tanggal : 27 April 2026

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Surat Pernyataan Direksi	1
Laporan Auditor Independen	2
Laporan Keuangan	
1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	5
2. Laporan Perubahan Ekuitas	7
3. Laporan Arus Kas	8
4. Laporan Posisi Keuangan	10
Catatan Atas Laporan Keuangan	11
Lampiran	
1. Laporan Auditor Independen Atas Sistem Pengendalian Intern	33
2. Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan	37

Surat Pernyataan Direksi

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM
PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR
Jln. Gatot Subroto No. 7, Amlapura Telp. (0363) 21363 (80811)
E-mail : pdam_karangasem@yahoo.co.id - Website : http://tirtatohlangkir.karangasemkab.go.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	I Komang Haryadi Parwatha, S.H.
Nomor Telepon	:	(0363) 21363
Alamat kantor	:	Jln. Gatot Subroto No.7 Amlapura, Karangasem
Jabatan	:	Direktur

Untuk dan atas nama Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Laporan Keuangan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang relevan bagi Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 27 April 2026

METERAI TEMPEL 9D86AANX389430696

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM

I Komang Haryadi Parwatha, S.H.
Direktur

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00072/2.0925/AU.8/04/1881-2/1/IV/2026

Kepada Yth,
Direktur dan Badan Pengawas
Perumda Tirta Tohlangkir

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda Tirta Tohlangkir ("Entitas"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Dasar Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam bagian Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan dalam laporan kami.

Kami independen terhadap Entitas sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dalam pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kami meyakini bahwa bukti audit yang kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal (*Emphasis of Matter*)

Kami menarik perhatian pada Catatan 3 atas dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, yang menjelaskan bahwa Entitas menerapkan SAK EP untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan pertama kali tersebut, Entitas telah melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas angka-angka komparatif/periode sebelumnya agar sesuai dengan penerapan SAK EP, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, serta atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan dasar akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan - *Lanjutan*

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan tingkat keyakinan yang tinggi, namun bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi salah saji material ketika hal itu ada. Salah saji dapat timbul dari kecurangan atau kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, secara wajar diharapkan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut

Sebagai bagian dari audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit. Kami juga:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini kami;
2. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat dalam kondisi tersebut, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Entitas;
3. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi serta pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
4. Menyimpulkan ketepatan penggunaan dasar akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material terkait peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya;
5. Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, antara lain, ruang lingkup dan waktu audit yang direncanakan, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi selama audit kami.

Tangerang, 27 April 2026

Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2025	2024 (Restated)
Pendapatan Usaha	*3.2.1*		
Pendapatan Penjualan Air		47.957.260.800	48.233.267.350
Pendapatan Non Air		5.622.339.000	5.615.033.000
Jumlah Pendapatan Usaha		**53.579.599.800**	**53.848.300.350**
		-	
Beban Usaha	*3.2.2*		
Biaya Pegawai		12.250.974.303	11.325.564.498
Biaya Pemakaian Bahan Bakar		22.364.600	7.513.950
Biaya listrik		11.172.668.274	11.172.888.068
Beban Bahan Pembantu		450.000	0
Biaya Operasional lainnya		1.124.210.300	1.025.159.000
Biaya Pemeliharaan		3.625.203.596	4.083.718.636
Biaya Air Baku dan Air Curah		5.109.075.992	3.833.278.241
Biaya Pemakaian Bahan Kimia		61.936.557	59.558.604
Biaya ATK & Barang Cetakan		0	0
Biaya Kantor		497.167.736	409.309.356
Biaya Langganan		26.187.800	30.454.900
Biaya Penyisihan Piutang		433.683.809	387.808.881
Biaya Sewa		0	0
Biaya Pajak/Retribusi		0	0
Rupa-rupa Beban Umum		1.700.648.386	1.221.520.123
Biaya Penyusutan & Amortisasi		6.700.634.995	6.238.687.929
Jumlah Beban Usaha		**42.725.206.348**	**39.795.462.187**
Laba (Rugi) Usaha		**10.854.393.452**	**14.052.838.163**
Pendapatan/Beban Lain-Lain			
Pendapatan Lain-lain	*3.2.3*	986.762.796	1.082.674.109
Beban Lain-lain	*3.2.4*	461.382.261	189.142.197
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain		**525.380.535**	**893.531.912**
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak		11.379.773.987	14.946.370.075
Beban Pajak Penghasilan Kini		0	0
Pajak Terhutang	*3.2.5*	**2.742.186.603**	**3.227.212.917**
Pendapatan(Beban) Pajak Tangguhan		0	0
Laba Rugi Bersih (E-F)		**8.637.587.384**	**11.719.157.158**
Laba(Rugi) Penghasilan Komprehensif lainnya			
Surplus Revaluasi Tanah/ Aset Tidak Lancar		0	0
Defisit Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		(8.046.468)	(3.950.997)
Jumlah Laba (Kerugian) Penghasilan Komprehensif Lain		**(8.046.468)**	**(3.950.997)**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		**8.629.540.916**	**11.715.206.161**
Laba Bersih		**8.629.540.916**	**11.715.206.161**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 27 April 2026

I Komang Haryadi Parwatha,S.H
Direktur

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR
KABUPATEN KARANGASEM

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

No.	Uraian	Modal Pemerintah Daerah (Rp)	Modal Hibah (Rp)	Cadangan Umum (Rp)	Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan (Rp)	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (Rp)	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi (Rp)	Akumulasi Laba/ (Rugi) (Rp)	Laba Tahun Berjalan (Rp)	Total Ekuitas (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2023	**70.600.547.649**	**1.245.250.466**	**3.986.708.245**	**1.561.492.095**	**5.680.195.396**		**(6.727.987.333)**	**12.647.659.985**	**88.993.866.502**
1	Penambahan Modal Tahun 2024	0	0	0	0	0		0		0
2	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0	(4.738.913)	0		(4.738.913)
3	Pembagian Laba Tahun Buku 2023	0	0	1.991.293.010	0	0			(12.647.659.985)	(10.656.366.975)
4	Koreksi Laba/(Rugi) Tahun Lalu	0	0	0	0	0		2.691.194.933		2.691.194.933
5	Laba (Rugi) tahun 2024	0	0	0	0	0			11.719.157.158	11.719.157.158
	Saldo per 31 Desember 2024	**70.600.547.649**	**1.245.250.466**	**5.978.001.255**	**1.561.492.095**	**5.680.195.396**	**(4.738.913)**	**(4.036.792.400)**	**11.719.157.158**	**92.743.112.705**
6	Penambahan Modal Tahun 2025	0	0	0	0	0		0		0
7	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0	(8.046.468)	0		(8.046.468)
8	Pembagian Laba Tahun Buku 2024	0	0	1.536.472.952	0	0		0	(11.719.157.158)	(10.182.684.206)
9	Koreksi Laba/(Rugi) Tahun Lalu	0	0	0	0	0		4.030.457.554		4.030.457.554
10	Laba (Rugi) tahun 2025	0	0	0	0	0			8.637.587.384	8.637.587.384
	Saldo per 31 Desember 2025	**70.600.547.649**	**1.245.250.466**	**7.514.474.207**	**1.561.492.095**	**5.680.195.396**	**(12.785.381)**	**(6.334.846)**	**8.637.587.384**	**95.220.426.969**

Karangasem, 27 April 2026

Komang Hary Wadi Pariwatha,S.H
Direktur

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR
KABUPATEN KARANGASEM

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2025	2024
A Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
1 Penerimaan		
Pendapatan Penjualan Air	47.434.998.725	47.435.403.775
Pendapatan Non Air	5.629.141.000	5.615.033.000
Pendapatan Lain-lain	986.762.796	1.082.674.109
Jumlah Pendapatan	**54.050.902.521**	**54.133.110.884**
2 Beban Usaha		
Biaya Pegawai	12.250.974.303	11.325.564.498
Biaya Pemakaian Bahan Bakar	22.364.600	7.513.950
Biaya listrik	11.172.668.274	11.172.888.068
Beban Bahan Pembantu	450.000	
Biaya Operasional lainnya	969.982.707	943.056.565
Biaya Pemeliharaan	3.625.203.596	4.083.718.636
Biaya Air Baku dan Air Curah	5.997.181.313	4.930.522.036
Biaya Pemakaian Bahan Kimia	61.936.557	59.558.604
Biaya Kantor	497.167.736	409.309.356
Biaya Langganan	26.187.800	30.454.900
Rupa-rupa Beban Umum	1.700.648.386	1.221.520.123
Beban Lain-lain	461.382.261	189.142.192
Beban Pajak Penghasilan	2.750.683.751	3.227.212.917
Jumlah Beban	**39.536.831.284**	**37.600.461.850**
Jumlah Netto	**14.514.071.238**	**16.532.649.034**
(Kenaikan) / Penurunan Uang Muka Pembelian	(1.566.670)	(77.950.385)
(Kenaikan)/Peurunan Uang Muka Kerja	(10.765.400)	0
(Kenaikan)/Penurunan Uang Muka Pajak	(643.112.433)	0
Kenaikan / (Penurunan) Hutang Lainnya	854.134.501	(284.317.022)
Kenaikan / (Penurunan) Hutang Pajak	536.761.057	(2.250.925.411)
Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	455.966.754	320.113.135
Total Penyesuaian	**1.191.417.809**	**(2.293.079.682)**
Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	**15.705.489.046**	**14.239.569.352**
B Arus Kas dari Kegiatan Investasi		
(Kenaikan) / Penurunan Pelepasan (Perolehan Aset tetap)	(8.064.762.639)	(9.360.284.304)
(Kenaikan) / Penurunan Aktiva Tak Berwujud	0	8.824.663
(Kenaikan) / Penurunan Sewa Jk Panjang	19.511.333	0
Jumlah Arus Kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas investasi	**(8.045.251.306)**	**(9.351.459.641)**
C Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan		
Kenaikan / (Penurunan) Coorporate Social Responsibility (CSR)	109.118.238	497.823.253
Kenaikan / (Penurunan) Penggunaan Lainnya	384.118.238	497.823.253
Kenaikan / (Penurunan) Cadangan Umum	1.536.472.952	0
Kenaikan / (Penurunan) Akumulasi Kerugian	0	2.691.194.933
Kenaikan / (Penurunan) Akumulasi Laba/Rugi S/d Tahun Lalu	(7.688.699.604)	(12.647.659.985)
Arus Kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas Pendanaan	**(5.658.990.176)**	**(6.969.525.536)**
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas	**2.001.247.564**	**(2.081.415.825)**
Kas dan Setara Kas Kas Awal Tahun	**26.704.879.565**	**28.786.295.390**
Kas dan Setara Kas Kas Akhir Tahun	**28.706.127.129**	**26.704.879.565**

Karangasem, 27 April 2026

I Komang Haryada Parwatha,S.H
Direktur

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR
KABUPATEN KARANGASEM

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
Per 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
Aset	***3.1.1***		
Aset Lancar	***3.1.1.1***		
Kas dan setara Kas		28.706.127.129	26.704.879.565
Deposito		11.000.000.000	11.000.000.000
Piutang Usaha		8.763.322.575	8.241.060.500
Penurunan Piutang Usaha		(2.941.911.200)	(2.508.227.391)
Piutang Rekening Non Air		110.387.025	117.189.025
Piutang Lain-Lain		0	0
Persediaan		4.247.943.707	3.359.838.386
Uang Muka Pembelian		2.575.840	1.009.170
Uang Muka Kerja		107.627.488	96.862.088
Uang Muka Pajak		643.112.433	
Jumlah aset lancar		**50.639.184.997**	**47.012.611.344**
Aset Tetap	***3.1.1.2***		
Aset Tetap Produktif		135.047.922.032	126.983.159.393
Akumulasi Penyusutan		(82.671.656.708)	(75.971.021.713)
Nilai Buku Aset Tetap		**52.376.265.324**	**51.012.137.680**
Aset Tidak Berwujud	***3.1.1.3***		
Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian		0	0
Sewa Jangka Panjang		356.784.221	376.295.555
Beban Ditangguhkan		192.000.000	192.000.000
Akumulasi Amortisasi Beban Ditangguhkan		(192.000.000)	(192.000.000)
Jumlah Aset Tetap		**52.733.049.545**	**51.388.433.235**
Jumlah Aset		**103.372.234.542**	**98.401.044.578**
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban	***3.1.2***		
Utang Lancar	***3.1.2.1***		
Utang Usaha		568.835.665	414.608.072
Utang lainnya		1.001.090.105	146.955.604
Utang Pajak		1.232.678.218	704.414.309
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya		1.243.639.874	787.673.120
Jumlah Utang Lancar		**4.046.243.862**	**2.053.651.105**
Utang Tidak Lancar	***3.1.2.2***		
- Cadangan Pensiun & Sokongan		8.668.699	8.668.699
- Kewajiban Jasa Produksi		1.971.108.628	1.971.108.628
- Coorporate Social Responsibility (CSR)		745.871.197	636.752.959
- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja		12.785.381	4.738.913
- Penggunaan Lainnya		1.367.129.807	983.011.570
Jumlah Utang Tidak Lancar		**4.105.563.712**	**3.604.280.768**
Jumlah Kewajiban		**8.151.807.573**	**5.657.931.873**
Ekuitas	***3.1.3***		
Modal Pemeritah Daerah		70.600.547.649	70.600.547.649
Modal Hibah		1.245.250.466	1.245.250.466
Penyertaan Pemerintah yang belum Belum ditetapkan Statusnya		5.680.195.396	5.680.195.396
Cadangan Umum		7.514.474.207	5.978.001.255
Cadangan Sosial dan Pendidikan		1.561.492.095	1.561.492.095
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi		(12.785.381)	(4.738.913)
Akumulasi Laba/ (Rugi) s/d Tahun Lalu		(6.334.846)	(4.036.792.400)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		8.637.587.384	11.719.157.158
Jumlah Ekuitas		**95.220.426.969**	**92.743.112.705**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**103.372.234.542**	**98.401.044.578**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 27 April 2026

I Kdman Harvadi Parwatha,S.H
Direktur

PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR
KABUPATEN KARANGASEM

Catatan Atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Umum

a. Dasar Pendirian Perusahaan

PERUMDA Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem adalah Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang didirikan pada Tahun 1976 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1976 dan berdasarkan Perda Perubahan Nomor 2 Tahun 2018 Tanggal 26 Maret 2018 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

PERUMDA Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem merupakan BUMD yang memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat khususnya penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem.

PERUMDA Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 7 Amlapura, Karangasem, Bali.

b. Susunan Organisasi Perusahaan

1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi PERUMDA Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 443 Tanggal 2 Oktober 1991 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, dengan susunan sebagai berikut:

a) Bagian Administrasi Keuangan, terdiri dari :
   - Seksi Akuntansi
   - Seksi Keuangan
   - Seksi Administrasi Umum & Personalia
   - Seksi Hubungan Langganan

b) Bagian Teknik, terdiri dari :
   - Seksi Produksi
   - Seksi Distribusi & Penyambungan
   - Seksi Perencana Teknik
   - Seksi Pemeliharaan & Perawatan

c) Unit Pendukung Pelayanan Kecamatan, terdiridari :

- Unit Pelayanan Kecamatan Karangasem
- Unit Pelayanan Kecamatan Selat
- Unit Pelayanan Kecamatan Abang
- Unit Pelayanan Kecamatan Kubu
- Unit Pelayanan Kecamatan Rendang
- Unit Pelayanan Kecamatan Manggis
- Unit Pelayanan Kecamatan Bebandem
- Unit Pelayanan Kecamatan Sidemen

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor 440 /HK /2021 tanggal 1 Desember 2021 ditetapkan sebagai Direktur adalah I Komang Haryadi Parwatha, SH untuk periode Tahun 2021-2026, dan untuk Dewan Pengawas I Nyoman Sutirtayasa, ST., MT ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 193/Hk/2021 periode 2021-2025 Tanggal 2 Juni 2021.

2) Personalia

Jumlah pegawai PERUMDA Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 sebanyak 149 orang dengan rincian berikut:

No	Direksi/Bagian	Berdasarkan Status			Berdasarkan Fungsi/Peran		
		Pegawai Tetap	Honorer	Jumlah	Pegawai Teknis	Pegawai Non Teknis	Jumlah
1	Direktur	1		1		1	1
2	Bagian Keuangan	18	15	33	-	33	33
3	Bagian Teknik	19	6	25	21	4	25
4	Unit Pelayanan Kec. Karangasem	13	5	18	3	15	18
5	Unit Pelayanan Kec. Selat	6	3	9	4	5	9
6	Unit Pelayanan Kec. Abang	11	5	16	8	8	16
7	Unit Pelayanan Kec. Kubu	10	4	14	8	6	14
8	Unit Pelayanan Kec. Rendang	6	2	8	3	5	8
9	Unit Pelayanan Kec. Manggis	8	3	11	5	5	112
10	Unit Pelayanan Kec.	5	2	7	2	5	7

No	Direksi/Bagian	Berdasarkan Status			Berdasarkan Fungsi/Peran		
		Pegawai Tetap	Honorer	Jumlah	Pegawai Teknis	Pegawai Non Teknis	Jumlah
	Bebandem						
11	Unit Pelayanan Kec. Sidemen	5	2	7	1	6	7
Total		**102**	**47**	**149**	**56**	**93**	**149**

c. Gambaran Kegiatan Usaha

Gambaran kegiatan usaha PERUMDA Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem dan jumlah pelanggan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Visi Perusahaan:

"Terwujudnya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Bebas Korupsi Serta Pelayanan Publik Yang Prima"

Misi Perusahaan :

1) Memberikan Pelayanan Prima Kepada Pelanggan Dengan Cepat, Tanggap Dan Bertanggungjawab.
2) Pengelolaan Dan Pengembangan Perusahaan Dengan Prinsip Transparansi, Akuntabel, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Dan Digitalisasi.
3) Menjaga Kualitas, Kuantitas Dan Kontinuitas Pelayanan Dalam Usaha Pemenuhan Hak Rakyat Atas Air.
4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional Sebagai Aset Perusahaan Menuju Perusahaan Yang Pradnyan, Kertha, Shanti Lan Nadi.

Simbol budaya perusahaan, adalah kebersamaan dalam membangun pola pikir, agar makna "MOTTO PERUMDA Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem **''Santhi" (Senyum, Antusias, Niat, Tekad, Harmonis, Inovasi)"** menjadi nilai-nilai primer yang tersusun dari ungkapan KATA, bermakna menjadi PEDOMAN yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jangkauan pelayanan meliputi:

- Kecamatan Karangasem

- Kecamatan Selat
- Kecamatan Abang
- Kecamatan Kubu
- Kecamatan Rendang
- Kecamatan Manggis
- Kecamatan Bebandem
- Kecamatan Sidemen

d. Data Pelanggan

Perkembangan penambah jumlah konsumen dalam 5 tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2025	44.738	pelanggan
Tahun 2024	43.531	pelanggan
Tahun 2023	42.619	pelanggan
Tahun 2022	41.724	pelanggan
Tahun 2021	40.638	pelanggan

2. Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Pembukuan

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan akrual.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung.

b. Piutang dan Penyisihan Kerugian

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman dan data historis selama tiga tahun terakhir.

c. Persediaan

1) Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).
2) Persediaan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu :
   a) Persediaan bahan instalasi, terdiri atas persediaan barang/bahan yang dibeli untuk investasi dan pemeliharaan instalasi.
   b) Persediaan bahan operasi, terdiri atas persediaan bahan kimia dan bahan operasi lainnya.
3) Metode pencatatan persediaan bahan operasi menggunakan metode "*Physical Inventory Method*", sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menggunakan metode "*Perpetual Method*".

d. Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan/harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Aktiva Tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan Aktiva Tetap tersebut.

Aktiva tetap disusutkan dengan metode yang dianut di dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Penggolongan dan besarnya tarif penyusutan sebagai berikut :

1) Kelompok I disusutkan 25 % dari nilai perolehan
2) Kelompok II disusutkan 12,5 % dari nilai perolehan
3) Kelompok III disusutkan 6,25% dari nilai perolehan
4) Bangunan permanen disusutkan sebesar 5 % dari nilai perolehan
5) Bangunan tidak permanen disusutkan sebesar 10 % dari nilai perolehan

e. Aktiva Tetap dalam Penyelesaian

Aset-aset perusahaan yang dibangun sendiri yang sedang dalam masa konstruksi dibukukan dalam perkiraan ini. Pada saat pekerjaan selesai dan telah digunakan untuk operasional perusahaan dipindahbukukan pada aktiva tetap masing masing.

f. Kewajiban

Kewajiban dinyatakan dengan lengkap agar tergambar seluruh kewajiban perusahaan yang terutang pada akhir tahun.

Untuk kewajiban yang telah terjadi namun jumlahnya belum dapat ditentukan secara pasti dapat dilakukan dengan taksiran yang wajar.

g. Bagian Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo

Bagian hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun mendatang setelah tanggal neraca disajikan sebagai kewajiban lancar.

h. Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Pos ini menampung pembiayaan proyek eks BPAM dan proyek PDAM yang berasal dari Pemerintah yang diserahkan oleh proyek kepada PDAM, namun belum ditentukan statusnya sebagai penyertaan.

i. Modal Pemda

Pos ini menampung penyertaan Modal Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari penyetoran Pemda pengalihan ex proyek APBD, pengalihan ex proyek Pemerintah Pusat, maupun setoran bagian laba pemda sebesar 55% yang diserahkan kembali ke PDAM sebagai penyertaan modal pemda.

j. Pendapatan

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima.

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun non usaha diakui pada saat terjadinya transaksi dan/atau pada masa prestasi dinikmati yaitu :

1) Pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk penjualan tunai.

2) Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan. Pendapatan ini diakui pada saat pembayaran jika calon pelanggan membayar kewajibannya secara tunai, atau pada saat ditandatanganinya kontrak sambungan baru bagi pelanggan yang memenuhi kewajibannya dengan cara mengangsur.

k. Beban

Pada dasarnya beban diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi. Pembebanan biaya-biaya yang bersifat periodik seperti gaji, listrik, sewa, asuransi dan sebagainya harus dikaitkan dengan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar dimuka. Untuk biaya listrik dan pajak air bawah tanah diakui berdasarkan bulan rekening/tagihan.

3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

3.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca

3.1.1 Aset

3.1.1.1 Aset Lancar

3.1.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo tersebut merupakan saldo kas dan bank yang dimiliki oleh Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

	2025	2024
Giro BPD	16.793.800.084	17.058.708.485
Kas in Transit di Bank BPD Bali	26.014.875	30.143.750
Giro BRI	6.881.312.170	4.615.027.330
Deposito BPD	5.000.000.000	5.000.000.000
Kas Kecil	5.000.000	1.000.000
Jumlah	**28.706.127.129**	**26.704.879.565**

Kas BPD sebesar Rp26.014.875 adalah jumlah pembayaran secara online rekening air oleh pelanggan pada tanggal 31 Desember 2025 yang belum masuk dalam rekening giro milik Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem di Bank BPD Bali.

Deposito yang tergolong kas dan setara kas dengan rincian sebagai berikut :

No	Penempatan pada Bank	No. Bilyet	Jangka Waktu	Nominal
1.	Bank Pembangunan Daerah Bali	03.01.01676-7	1 Bulan	3.000.000.000
2.	Bank Pembangunan Daerah Bali	03.02.00684-8	3 Bulan	2.000.000.000
Jumlah				**5.000.000.000**

3.1.1.1.2 Deposito

Saldo deposito merupakan saldo deposito yang dimiliki Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

	2025	2024
Deposito pada Bank BPD Bali no 03.03.00192-4 jk. waktu 6 bulan	5.000.000.000	5.000.000.000
Deposito pada Bank BPD Bali no 03.09.00263-3 jk.waktu 6 bulan	6.000.000.000	6.000.000.000
Jumlah	**11.000.000.000**	**11.000.000.000**

3.1.1.1.3 Piutang Usaha

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Usaha yang dimiliki Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

	2025	2024
Piutang Langganan Air	8.763.322.575	8.241.060.500
Piutang Langanan Non Air	110.387.025	117.189.025
Sub. Jumlah	8.873.709.600	8.358.249.525
Penyisihan Piutang Usaha	-2.941.911.200	-2.508.227.391
Jumlah Piutang Bersih	**5.931.798.400**	**5.850.022.134**

Dengan perhitungan penyisihan piutang usaha tahun 2025 sebagai berikut:

Golongan pelanggan		Saldo piutang	Tarif Penyisihan	Akumulasi penyisihan
Sosial Umum	(A1)	32.363.375	56,78%	18.375.924
Tempat Ibadah	(A2)	171.553.250	28,11%	48.223.619
Sosial Khusus	(A3)	4.973.025	40,29%	2.003.632
Rumah Tangga	(B1)	6.195.483.125	32,44%	2.009.814.726
Rumah Tangga	(B2)	1.400.540.050	39,28%	550.132.132
Instansi Pemerintah	(B3)	298.342.275	18,38%	54.835.310
Niaga Kecil	(C1)	428.008.450	51,17%	219.011.924
Niaga Besar	(C2)	162.075.200	24,38%	39.513.934
Industri Kecil	(D1)	5.459.825	0,00%	-
Niaga Lain-lain	(D2)	1.820.000	0,00%	-
Khusus	(E)	62.704.000	0,00%	-
Lainnya		-	0,00%	-
Sub. Jumlah				**2.941.911.200**

3.1.1.1.4 Persediaan

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan operasional yang dimiliki Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

	2025	2024
Persediaan Operasi Kimia	66.318.141,00	55.545.258
Persediaan Suku Cadang Pompa	518.828.520,00	445.880.270
Persediaan Bahan Instalasi	3.662.797.046,15	2.858.412.858
Jumlah	**4.247.943.707,15**	**3.359.838.386**

3.1.1.1.5 Biaya Dibayar Dimuka

Jumlah tersebut merupakan saldo biaya dibayar dimuka Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2025	2024
Rupa-rupa Biaya Dibayar Dimuka	107.627.488,00	96.862.088,00
Uang Muka Pembelian Premium/Solar	2.575.840,00	1.009.170,00
Pembayaran Dimuka Pajak	643.112.433,00	0,00
Jumlah	**753.315.761,00**	**97.871.258,00**

3.1.1.2 Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap milik Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri dari:

	2025	2024
Tanah dan Hak atas Tanah	237.704.075	237.704.075
Instalasi Sumber	3.085.920.701	3.085.920.701
Instalasi Perpompaan	25.039.627.481	23.555.611.146
Instalasi Pengolahan Air	2.630.197.348	2.544.571.948
Instalasi Trans. & Distribusi	99.398.233.750	93.083.926.272
Bangunan Gedung	633.710.500	633.710.500
Peralatan Kantor	104.249.700	104.249.700
Kendaraan	973.805.355	973.805.355
Inventaris Kantor	2.944.473.122	2.763.659.695,00
	135.047.922.032	**126.983.159.392**
Akumulasi Penyusutan	- 82.671.656.708	- 75.971.021.713
Nilai Buku	**52.376.265.324**	**51.012.137.679**

Penambahan aktiva tetap periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Tanah	-	-
Instalasi Sumber Air	-	-
Instalasi Perpompaan	1.462.609.985	2.005.479.180
Instalasi Pengolahan Air	85.625.400	-
Instalasi Transmisi & Distribusi	6.335.713.828	3.579.630.730
Bangunan dan Gedung	-	201.111.000
Peralatan Kantor	-	-
Kendaraan/ Alat Angkutan	-	-
Inventaris Kantor	180.813.427	270.155.800
Jumlah :	**8.064.762.640**	**6.056.376.710**

3.1.1.3 Aset Tidak Berwujud

Jumlah tersebut merupakan saldo Sewa Jangka Panjang Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem berupa sewa tanah dan bangunan dan pengadaan program komputer per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian:

		2025	2024
Sewa jangka panjang		356.784.221	376.295.555
Beban Ditangguhkan		192.000.000	192.000.000
Akumulasi Amortisasi Beban Ditangguhkan	-	192.000.000	(192.000.000)
Jumlah		**356.784.221**	**376.295.555**

3.1.2 Kewajiban

3.1.2.1 Utang Lancar

3.1.2.1.1 Utang Usaha

Jumlah tersebut merupakan saldo utang usaha Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem kepada suplier per 31 Desember 2025 dan 2024

	2025	2024
Utang kepada Supplier	568.835.665	414.608.072
Jumlah	**568.835.665**	**414.608.072**

3.1.2.1.2 Utang Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo utang lainnya Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024

	2025	2024
Utang Lainnya	1.001.090.105	147.220.139
Jumlah	**1.001.090.105**	**147.220.139**

3.1.2.1.3 Utang Pajak

Jumlah tersebut merupakan saldo pajak Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem yang terhutang per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari:

	2025	2024
PPH Badan Pasal 29	1.226.772.318	469.401.381
PPh pasal 25	-	229.817.628
PPN keluaran	5.905.900	5.195.300
Jumlah	**1.232.680.243**	**704.414.309**

3.1.2.1.4 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban jangka pendek Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024

	2025	2024
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	1.243.639.874	787.408.585
Jumlah	**1.243.639.874**	**787.408.585**

3.1.2.2 Utang Tidak Lancar

3.1.2.2.1 Cadangan Pensiun & Sokongan

Jumlah tersebut merupakan saldo cadangan pensiun dan sokongan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dibentuk sebesar 10% dari laba bersih dan dibayarkan untuk untuk pembayaran Kewajiban Dapenma Pamsi.

	2025	2024
Cadangan Pensiun dan Sokongan	8.668.699	8.668.699
Jumlah	**8.668.699**	**8.668.699**

3.1.2.2.2 Kewajiban Jasa Produksi

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban jasa produksi Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dibentuk sebesar 5% dari laba bersih, penambahan di tahun 2024 sesuai persetujuan Bupati Karangasem dengan surat persetujuan nomor 900/2295/Ekbang/Setda tanggal 17 September 2024

	2025	2024
Kewajiban Jasa Produksi	1.971.108.628	1.971.108.628
Jumlah	**1.971.108.628**	**1.971.108.628**

3.1.2.2.3 Coorporate Social Responsibility (CSR)

Jumlah tersebut merupakan saldo *Coorporate Social Responsibility* (CSR) Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dibentuk sebesar 5% dari laba bersih, penambahan di tahun 2024 sesuai persetujuan Bupati Karangasem dengan surat persetujuan nomor 900/2295/Ekbang/Setda tanggal 17 September 2024

	2025	2024
Coorporate Social Responsibility (CSR)	745.871.197	636.752.959
Jumlah	**745.871.197**	**636.752.959**

3.1.2.2.4 Penggunaan Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo penggunaan lainnya Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 yang dibentuk sebesar 15% dari laba bersih, penambahan di tahun 2024 sesuai persetujuan Bupati Karangasem dengan surat persetujuan nomor 900/2295/Ekbang/Setda tanggal 17 September 2024

	2025	2024
Penggunaan Lainnya	1.367.129.807	983.011.570
Jumlah	**1.367.129.807**	**983.011.570**

3.1.2.2.5 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Jumlah tersebut adalah jumlah kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2025 dan 2024

	2025	2024
Kewajiban imbalan pasca kerja	12.780.381	4.738.913

3.1.3 Ekuitas

3.1.3.1 Modal Pemerintah Daerah

Jumlah tersebut merupakan saldo penyertaan pemerintah daerah pada Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian berikut:

	2025	2024
Modal Pemda	3.210.026.336	3.210.026.336
Hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan Aset Eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaaan Air Bersih (P2AB) yang ditetapkan sebagai Modal Pemda berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1897/A/52/0597 tanggal 5 Mei 1997.	6.291.233.421	6.291.233.421
Bagian Laba Pemda Tahun 2006 yang ditetapkan sebagai Modal Penyertaan sesuai SK. Bupati Karangasem No. 900/3613/Ek tanggal 27 Desember 2007	260.948.941	260.948.941
Bagian Laba Pemda Tahun 2007 dan 2008 yang ditetapkan sebagai Modal Penyertaan sesuai SK. Bupati Karangasem No.900/1283/Ek tanggal 1 Juni 2010.	617.578.085	617.578.085
Bagian Laba Pemda Tahun 2009 yang ditetapkan sebagai Modal Penyertaan sesuai SK.Bupati Karangasem No. 900/1511/Ek tanggal 7 Juli 2010	1.973.610.302	1.973.610.302
Pengadaan dan Pemasangan Pompa Sumbersible beserta Pelengkapannya 2 Unit di Mata Air Tirta dan Desa Tumbu Keputusan Bupati tanggal 31 Maret 2011 No. 171/HK/2011.	839.391.000	839.391.000
Bagian Laba Pemda Tahun 2010 yang ditetapkan sebagai modal penyertaan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah No. 931/01-90/LS/KEU/2012 tgl. 19 April 2012	1.847.107.888	1.847.107.888
Batuan Pipa dari Kementrian Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali. Nota Kesepahaman (MOU) No.AM.04.03/1053.3/PDAM/2012.	191.202.660	191.202.660
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tgl. 15 Agustus 2014	6.000.000.000	6.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tgl. No. 3 Tahun 2015	2.478.010.016	2.478.010.016
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tgl. Nomor 9 Tahun 2015	4.500.000.000	4.500.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tgl. 15 Agustus 2014	27.691.439.000	27.691.439.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah Perda.Tahun 2017 Perda. Nomor 13 Tahun 2016	2.100.000.000	2.100.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Tahun 2018 Perda. Nomor 14 Tahun 2017	2.100.000.000	2.100.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah Tahun 2019 Perda. Nomor 10 Tahun 2018	4.500.000.000	4.500.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah tahun 2021 Perda. Nomor 14 Tahun 2020	3.000.000.000	3.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah Tahun 2022 Perda. Nomor 8 Tahun 2021	1.500.000.000	1.500.000.000

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Perda. Nomor 11 Tahun 2022	1.500.000.000	1.500.000.000
Jumlah	**70.600.547.649**	**70.600.547.649**

3.1.3.2 Modal Hibah

Jumlah tersebut merupakan saldo Modal Hibah Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024

	2025	2024
Modal Hibah	1.245.250.466	1.245.250.466
Jumlah	**1.245.250.466**	**1.245.250.466**

3.1.3.3 Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan dari Dinas PU yang diterima oleh Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian:

	2025	2024
Pekerjaan Umum TK. I Bali Proyek Penyediaan dari Pengelolaan Air Bersih.	4.685.441.750	4.685.441.750
Kementrian PU. Direktorat Jendral Cipta Karya Satker Pngembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.	476.447.000	476.447.000
Kementrian PU. Direktorat Jendral Cipta Karya Satker Pngembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Bali	518.306.646	518.306.646
Jumlah	**5.680.195.396**	**5.680.195.396**

3.1.3.4 Cadangan Umum

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban jasa produksi Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2024 dan 2023 yang dibentuk sebesar 20 % dari laba bersih, penambahan di tahun 2024 sesuai persetujuan Bupati Karangasem dengan surat persetujuan nomor 900/2295/Ekbang/Setda tanggal 17 September 2024

	2025	2024
Cadangan Umum	7.514.474.207	3.986.708.245
Jumlah	**7.514.474.207**	**3.986.708.245**

3.1.3.5 Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan

Jumlah tersebut merupakan saldo pembentukan Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem sesuai Perda Nomor 02 Tahun 1976 dan Perda Nomor 2 Tahun 2018 sebesar 10 % dari laba bersih.

	2025	2024
Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan	1.561.492.095	1.561.492.095
Jumlah	**1.561.492.095**	**1.561.492.095**

3.1.3.6 Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasikan

Jumlah tersebut adalah jumlah defisit imbalan pasca kerja tahun 2025

	2025	2024
Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasikan	-12.785.381	-4.738.913
Jumlah	**-12.785.381**	**-4.738.913**

3.1.3.7 Akumulasi Laba (Rugi) s/d Tahun Lalu

Jumlah tersebut merupakan akumulasi kerugian Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem setelah pengurangan sebesar 40% dari laba bersih tahun 2023 sesuai persetujuan Bupati Karangasem dengan surat persetujuan nomor 900/2295/Ekbang/Setda tanggal 17 September 2024

	2025	2024
Akumulasi Laba (Rugi) s/d Tahun Lalu	-6.334.846	-4.036.792.400
Jumlah	**-6.334.846**	**-4.036.792.400**

3.1.3.8 Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Jumlah tersebut merupakan Laba Bersih Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024

	2025	2024
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	8.637.587.384	11.719.157.158
Jumlah	**8.637.587.384**	**11.719.157.158**

3.2 Penjelasan Pos-Pos Laba Rugi

3.2.1 Pendapatan Usaha

Merupakan Pendapatan Usaha Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dan 2024.

3.2.1.1 Pendapatan Air

Jumlah tersebut merupakan pendapatan usaha Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem yang berasal dari hasil penjualan air selama tahun 2025 dan 2024, yang terdiri dari :

	2025	2024
Penjualan Air	47.957.260.800	48.228.165.850
Penjualan Air Tanpa Meter	6.721.500	5.101.500
Jumlah	**47.963.982.300**	**48.233.267.350**

3.2.1.2 Pendapatan Non Air

Jumlah tersebut merupakan pendapatan usaha Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem yang berasal dari hasil pendapatan non air selama tahun 2025 dan 2024, yang terdiri dari :

	2025	2024
Pendapatan Sambungan Baru	3.175.488.000	2.838.463.500
Pendapatan Pendaftaran	26.000.000	25.260.000
Pendapatan Penyambungan Kembali	451.020.000	332.500.000
Pendapatn Denda	1.769.610.000	1.966.530.000
Pendapatan Balik Nama	2.640.000	2.100.000
Uang Jaminan Langganan (UJL)	181.050.000	160.200.000
Pendapatan Non Air Lainnya	16.531.000	289.979.500
Jumlah	**5.622.339.000**	**5.615.033.000**

3.2.2 Beban Usaha

Merupakan Beban Usaha Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dan 2024

3.2.2.1 Beban Pegawai

Merupakan jumlah beban pegawai di Departemen Sumber selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Pegawai Sumber	1.107.145.232	1.069.980.812
Beban Pegawai Transmisi / Distribusi	1.787.545.695	1.787.416.115
Biaya Pegawai Adm. Umum	8.192.317.096	7.314.316.841
Biaya Pembaca Meter	97.550.400	103.043.000
Biaya Direksi dan Dewan Pengawas	907.991.400	975.309.727
Biaya Perjalanan Dinas	158.424.480	75.498.003
Jumlah	**12.250.974.303**	**11.325.564.498**

3.2.2.2 Beban Pemakaian Bahan Bakar

Merupakan jumlah beban pemakaian bahan bakar di Departemen Sumber selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Pemakaian Bahan Bakar	22.364.600	7.513.950,00
Jumlah	**22.364.600**	**7.513.950**

3.2.2.3 Beban Listrik

Merupakan jumlah beban listrik di Departemen Sumber selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban listrik	11.172.668.274	11.172.888.068
Jumlah	**11.172.668.274**	**11.172.888.068**

3.2.2.4 Beban Bahan Pembantu

Merupakan jumlah beban bahan pembantu di Departemen Sumber selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Bahan Pembantu	450.000	-
Jumlah	**450.000**	**-**

3.2.2.5 Beban Operasional Lainnya

Merupakan jumlah beban bahan pembantu selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Rupa - rupa Beban Operasi di Departemen Sumber	745.468.800	646.417.000
Rupa-rupa Beban Pengolahan di Departemen Pengolahan	378.741.500	378.742.000
	1.124.210.300	**1.025.159.000**

3.2.2.6 Beban Pemeliharaan

Merupakan jumlah beban pemeliharaan selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Sumber	71.695.510,00	210.260.880
Beban Pemeliharaan Pengolahan	-	59.453.000
Beban Pemeliharaan Transmisi / Distribusi	3.268.190.696	2.564.231.903
Beban Pemeliharaan Adm. Umum	285.317.390	1.249.772.853
	3.625.203.596	**4.083.718.636**

3.2.2.7 Beban Air Baku dan Air Curah

Merupakan jumlah beban pembelian air baku dan air curah selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Air Baku dan Air Curah	5.109.075.992	3.833.278.241
Jumlah	**5.109.075.992**	**3.833.278.241**

3.2.2.8 Beban Pemakaian Bahan Kimia

Merupakan jumlah beban pemakaian bahan kimia untuk pengolahan air selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Pemakaian Bahan Kimia	61.936.557	59.558.604
Jumlah	**61.936.557**	**59.558.604**

3.2.2.9 Beban Kantor

Merupakan jumlah beban kantor selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Kantor	497.167.736	409.309.356
Jumlah	**497.167.736**	**409.309.356**

3.2.2.10 Beban Langganan

Merupakan jumlah beban hubungan langganan selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Langganan	26.187.800	30.454.900
Jumlah	**26.187.800**	**30.454.900**

3.2.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Merupakan jumlah beban penyisihan piutang selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	433.683.809	387.808.881
Jumlah	**433.683.809**	**387.808.881**

3.2.2.12 Rupa-Rupa Beban Umum

Merupakan jumlah rupa-rupa beban umum selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Rupa-rupa Beban Umum	1.700.648.386	1.221.520.123
Jumlah	**1.700.648.386**	**1.221.520.123**

3.2.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Merupakan jumlah rupa-rupa beban umum selama tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Penyusutan Sumber	1.384.851.446	1.326.374.253
Beban Penyusutan Pengolahan	78.074.851	77.718.078
Beban Penyusutan Transmisi / Distribusi	5.003.451.668	4.622.205.079
Beban Penyusutan Adminstrasi Umum	234.257.030	212.390.520
Jumlah	**6.700.634.995**	**6.238.687.929**

3.2.3 Pendapatan Lain-Lain

Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan non usaha Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem selama Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan lain-lain Unit Sidemen	-	270
Pendapatan Jasa Giro	488.483.273	496.944.839
Pendapatan Bunga Diposito	494.800.000	495.200.000
Rupa - Rupa Pendapatan lainnya	3.479.523	90.529.000
Jumlah	**986.762.796**	**1.082.674.109**

3.2.4 Beban Lain-Lain

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban non usaha Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem selama Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Sumbangan	363.339.806	89.368.530
Beban Administrasi Bank	345.800	384.700
Beban Pajak Bank	97.696.655	99.388.967
Beban Lainnya	-	-
Jumlah	**461.382.261**	**189.142.197**

3.2.5 Beban Pajak Penghasilan

Jumlah tersebut merupakan taksiran pajak badan perusahaan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dan 2024

	2025	2024
Beban Pajak Penghasilan	2.742.186.603	3.227.212.917
Jumlah	**2.742.186.603**	**3.227.212.917**

4. Penerapan Pertama Kali SAK EP

4.1 Latar Belakang

Entitas menerapkan SAK EP untuk pertama kalinya pada laporan keuangan tahun berjalan. Sebelumnya, laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP. Laporan keuangan tahun sebelumnya yang disajikan sebagai angka pembanding telah disajikan kembali agar sesuai dengan SAK EP.

4.2 Dampak Terhadap Laporan Keuangan

Penerapan pertama kali SAK EP tidak menimbulkan dampak material terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas Perusahaan. Penyesuaian yang dilakukan terkait penyelarasan kebijakan akuntansi dan/atau penyajian agar sesuai dengan perbandingan dan tidak mengakibatkan perubahan material atas jumlah yang sebelumnya dilaporkan.

1) Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain SAK ETAP ke SAK EP

URAIAN	2024	Penyajian Kembali	2024 (Restated)
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Penjualan Air	48.233.267.350		48.233.267.350
Pendapatan Non Air	5.615.033.000		5.615.033.000
Jumlah Pendapatan Usaha	**53.848.300.350**		**53.848.300.350**
Beban Usaha			
Biaya Pegawai	11.325.564.498		11.325.564.498
Biaya Pemakaian Bahan Bakar	7.513.950		7.513.950
Biaya listrik	11.172.888.068		11.172.888.068
Beban Bahan Pembantu	0		0
Biaya Operasional lainnya	1.025.159.000		1.025.159.000
Biaya Pemeliharaan	4.083.718.636		4.083.718.636
Biaya Air Baku dan Air Curah	3.833.278.241		3.833.278.241
Biaya Pemakaian Bahan Kimia	59.558.604		59.558.604
Biaya ATK & Barang Cetakan	0		0
Biaya Kantor	409.309.356		409.309.356
Biaya Langganan	30.454.900		30.454.900
Biaya Penyisihan Piutang	387.808.881		387.808.881
Biaya Sewa	0		0
Biaya Pajak/Retribusi	0		0
Rupa-rupa Beban Umum	1.221.520.123		1.221.520.123
Biaya Penyusutan & Amortisasi	6.238.687.929		6.238.687.929
Jumlah Beban Usaha	**39.795.462.187**		**39.795.462.187**
Laba (Rugi) Usaha	**14.052.838.163**		**14.052.838.163**
Pendapatan/Beban Lain-Lain			
Pendapatan Lain-lain	1.082.674.109		1.082.674.109
Beban Lain-lain	189.142.197		189.142.197
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	**893.531.912**		**893.531.912**
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	14.946.370.075		14.946.370.075
Beban Pajak Penghasilan Kini	0		0
Pajak Terhutang	**3.227.212.917**		**3.227.212.917**
Pendapatan(Beban) Pajak Tangguhan	0		0
Laba Rugi Bersih (E-F)	**11.719.157.158**		**11.719.157.158**
Laba(Rugi) Penghasilan Komprehensif lainnya			
Defisit Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	0	-3.950.997	-3.950.997
Jumlah Laba (Kerugian) Penghasilan Komprehensif Lain	**0**		**-3.950.997**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**11.719.157.158**		**11.715.206.161**

2) Rekonsiliasi Laporan Posisi Keuangan SAK ETAP ke SAK EP

Keterangan	2024	Penyajian Kembali	2024 (Disajikan Kembali)
Aset			
Aset Lancar	**47.012.611.344**		**47.012.611.344**
Aset Tetap			
Aset Tetap Produktif	126.983.159.393		126.983.159.393
Akumulasi Penyusutan	-75.971.021.713		-75.971.021.713
Nilai Buku Aset Tetap	**51.012.137.680**		**51.012.137.680**
Aset Tidak Berwujud	**376.295.555**		**376.295.555**
Jumlah Aset Tetap	**51.388.433.235**		**51.388.433.235**
Jumlah Aset	**98.401.044.578**		**98.401.044.578**
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Utang Lancar			
Jumlah Utang Lancar	**2.053.651.105**		**2.053.651.105**
Utang Tidak Lancar			
- Cadangan Pensiun & Sokongan	8.668.699		8.668.699
- Kewajiban Jasa Produksi	1.971.108.628		1.971.108.628
- Coorporate Social Responsibility (CSR)	636.752.959		636.752.959
- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	0	4.738.913	4.738.913
- Penggunaan Lainnya	983.011.570		983.011.570
Jumlah Utang Tidak Lancar	**3.599.541.855**		**3.604.280.768**
Jumlah Kewajiban	**5.653.192.960**		**5.657.931.873**
Ekuitas			
Modal Pemeritah Daerah	70.600.547.649		70.600.547.649
Modal Hibah	1.245.250.466		1.245.250.466
Penyertaan Pemerintah yang belum Belum ditetapkan	5.680.195.396		5.680.195.396
Cadangan Umum	5.978.001.255		5.978.001.255
Cadangan Sosial dan Pendidikan	1.561.492.095		1.561.492.095
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	0	-4.738.913	-4.738.913
Akumulasi Laba/ (Rugi) s/d Tahun Lalu	-4.036.792.400		-4.036.792.400
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	11.719.157.158		11.719.157.158
Jumlah Ekuitas	**92.747.851.618**		**92.743.112.705**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**98.401.044.578**		**98.401.044.578**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan. Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan dan/atau penyesuaian terhadap laporan keuangan.

6. Going Concern

Tidak terdapat masalah yang mengganggu keberlangsungan hidup (*going concern*) Perusahaan.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan No:0072/IV/ML/DPS.1/2026

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direksi
Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem
Jalan Gatot Subroto no.7, Amlapura, Kab. Karangasem

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Kami telah mengaudit Neraca Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal tersebut dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 27 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah material.

Dalam perencanaa dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem secara berjenjang bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut,diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolute, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicata semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung resiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian keamanan, pengendalian

atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dan penilaian resiko pengendalian. Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah – masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah – masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi resiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah – masalah lain tentang pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada ***Lampiran B.***

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUKARDI HASAN & REKAN
NIU-KAP : KEP-1407/KM.1/2012

Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1881

Tangerang, 27 April 2026

Lampiran B

CATATAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan desain dan implementasi Sistem Pengendaliam Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Atas Piutanng Air Yang Telah Berumur Lama

   Terdapat kelemahan atas pengendalian intern pada tahun 2024 yang belum ada langkah tindak lanjutnya, yaitu piutang usaha dan data laporan efisiensi penagihan (LEP) bulan Desember 2024 yang dijumpai hal sebagai berikut:

   1) Piutang air dari pelanggan yang dibangun dengan dana MBR pada unit:

1	Karangasem	Rp	4.006.275
2	Selat	Rp	64.968.750
3	Abang	Rp	5.951.750
4	Rendang	Rp	13.353.750
5	Manggis	Rp	850.250
6	Sidemen	Rp	28.058.250
	Jumlah	**Rp**	**117.189.025**

   2) Piutang air pelanggan di Dusun Pejeng Kecamatan Selat pemakaian air tahun 2020 s/d 2024 sebanyak 50 pelanggan dengan total tagihan sebesar Rp158.822.600. Wilayah tersebut tidak mendapat aliran air.
   3) Pelanggan di wilayah tersebut tidak mendapat pelayanan air dan tetap diterbitkan rekening air setiap bulan.

   Seharusnya piutang tersebut telah dapat diusulkan penghapusan sesuai dengan Permenkeu No. 31/PMK.07/2005 tentang Tata cara Pengajuan Usul, Penelitian, Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Daerah.`

   Hal tersebut disebabkan antara lain:

   1) Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem belum dapat menyediakan air secara lancar di wilayah tersebut.
   2) Belum ada kebijakan dari Direktur secara tertulis mengenai pelanggan yang tidak dapat dilayani karena keterbatasan ketersediaan air.

   Akibatnya pendapatan air dicatat terlalu besar dan piutang air yang tidak dapat ditagih.

Kepada Direktur Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem agar segera :

1) Menerbitkan kebijakan atas pelanggan yang belum mendapat pelayanan air.

2) Mengusulkan penghapusan atas piutang air yang telah berumur lama.

2. Terdapat aset tetap dengan kondisi rusak , masih tercatat sebagai aset tetap

   Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem memiliki sejumlah aset tetap dengan kondisi rusak berat dan tidak berfungsi namun masih tercatat sebagai aset tetap tahun 2025.

   Kondisi tersebut disebabkan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem tidak melakukan inventarisasi secara menyeluruh aset tetapnya

   Kepada Direktur Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem agar segera membentuk tim inventarisasi yang selanjutnya hasil inventarisasi terhadap barang dengan kondisi rusak berat tersebut diusulkan kepada Kuasa Pemilik Modal untuk dihapuskan.

3. Aplikasi Bima Sakti belum mengakomodir kepentingan Satuan Pengawas Intern (SPI)

   Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem dalam tahun 2025 telah menggunakan aplikasi Bima Sakti untuk akuntansi perusahaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja(SPK), modul SPI memang tidak termasuk di dalam kesepakatan tersebut.

   Untuk meningkatkan kinerja SPI, kami sarankan agar pihak Perumda Tirta Tohlangkir mendekati pihak penyedia jasa untuk membantu membuatkan modul SPI di aplikasi Bima Sakti.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Laporan No:0072/IV/KEPATUHAN/DPS.1/2026

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direksi
Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem
Jalan Gatot Subroto no.7, Amlapura, Kab. Karangasem

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kami telah mengaudit neraca Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal tersebut dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 27 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

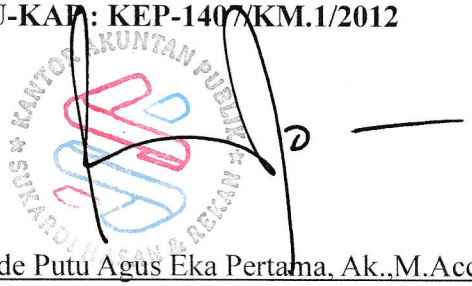
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem terhadap pasal – pasal tertentu hokum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah untuk tidak menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal –pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur yang kami uji, Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem belum sepenuhnya mematuhi, dalam semua hal material, pasal – pasal yang kami sebut dalam paragraph di atas. Sedangkan berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal – pasal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, berkaitan dengan audit kami, terdapat beberapa hal yang kami ketahui Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem tidak sepenuhnya mematuhi, dalam semua hal yang material, hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada ***Lampiran A***.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Bupati, Direksi dan Badan Pengawas. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik, distribusinya tidak dibatasi.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUKARDI HASAN & REKAN
NIU-KAP : KEP-1407/KM.1/2012



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CA., CPA.

Tangerang, 27 April 2026

Lampiran A

CATATAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tidak terdapat hal-hal yang signifikan terkait kepatuhan terhadap Perundang-Undangan yang perlu dilaporkan.

Pemerintah Kabupaten Karangasem

LAPORAN KEUANGAN BUMD

(PT. KARANGASEM SEJAHTERA (PERSERODA))

PER 31 DESEMBER 2025

PT KARANGASEM SEJAHTERA

LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENT

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024 /
For The Year Ended On December 31, 2025
With Comparative Balance For The Year 2024

Dan / And

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

DAFTAR ISI/
TABLE OF CONTENTS

PT KARANGASEM SEJAHTERA
DAFTAR ISI

PT KARANGASEM SEJAHTERA
TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ *Pages*	
Surat Pernyataan Direksi		*Director's Statament Letter*
Laporan Keuangan		*Financial Statements*
- Laporan Posisi Keuangan	1	*Statement of Financial Position* -
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	*Statament of Profit or Loss and Other Comprehensive Income* -
- Laporan Perubahan Ekuitas	3	*Statament of Changes in Equity* -
- Laporan Arus Kas	4	*Statament of Cash Flows* -
- Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 20	*Notes to Financial Statements* -
Lampiran		*Appendix*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI/
DIRECTOR'S STATEMENT LETTER

PT. KARANGASEM SEJAHTERA (PERSERODA)

Jalan Ngurah Rai No. 31 Telp (0363) 21002-21003, Fax 21954

AMLAPURA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA PER 31 DESEMBER 2025 PT KARANGASEM SEJAHTERA

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED AS AT DECEMBER 31 2025 PT KARANGASEM SEJAHTERA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:/ *We, the undersigned:*

1 Nama/ *Name* : Yudha Prahasta Lagosa, SE

Alamat Kantor/ *Office Address* : Jalan Ngurah Rai No. 31 Amlapura, Karangasem, Bali.

Jabatan/ *Title* : Direktur/ *Director*

Menyatakan bahwa:

1 Kami bertanggung-jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Karangasem Sejahtera.

2 Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia (SAK EP).

3 a Semua informasi dalam laporan keuangan PT Karangasem Sejahtera telah dimuat secara lengkap dan benar.

b Laporan keuangan PT Karangasem Sejahtera tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

c Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT Karangasem Sejahtera sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4 Kami bertanggung-jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Karangasem Sejahtera.

Demikian pernyataan ini diibuat dengan sebenarnya.

State that:

1 We are responsible for preparation and presentation of the financial statement of PT Karangasem Sejahtera.

2 The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standard's for Private Entities in Indonesia.

3 a All information in the financial statements of PT Karangasem Sejahtera have been fully disclosed in a complete and truthful manner.

b The financial statements of PT Karangasem Sejahtera do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.

c All documents of transactions, financial notes and bookkeeping and supporting documents have been completely prepared and stored by PT Karangasem Sejahtera in accordance with applicable laws and regulations.

4 We are responsible for the internal control system of PT Karangasem Sejahtera.

This statement was made with truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/ *For and on behalf of the board of Directors*

Karangasem, 27 April 2026/ *April 27, 2026*



Yudha Prahasta Lagosa, SE

Direktur/ *Director*

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

PT KARANGASEM SEJAHTERA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KARANGASEM SEJAHTERA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31/12/2025	31/12/2024	
ASET				*ASSETS*
- **Aset Lancar**				***Current Assets*** -
- Kas dan Setara Kas	*2b, 3*	9.909.250.068	9.871.359.132	*Cash and Cash Equivalents* -
- Piutang Usaha	*2c, 4*	-	2.472.000	*Accounts Receivable* -
- Persediaan	*2d, 5*	4.296.484	38.429.786	*Inventory* -
- Uang Muka	*6*	-	50.000.000	*Prepaid* -
- Aset Lancar Lainnya	*7*	1.091.000	1.091.000	*Other Current Assets* -
- Pajak Dibayar Dimuka	*13a*	4.388.680	-	*Prepaid Tax* -
Jumlah Aset Lancar		**9.919.026.232**	**9.963.351.918**	***Total Current Assets***
- **Aset Tidak Lancar**				***Non Current Assets*** -
- Aset Tetap	*2e, 8*	36.979.000	14.000.000	*Fixed Assets* -
Akumulasi Penyusutan	*2e, 8*	(10.601.021)	(1.647.917)	*Accumulated Depreciation*
- Aset Tidak Lancar Lainnya	*2f, 9*	67.757.010	80.724.300	*Other Non Current Assets* -
Jumlah Aset Tidak Lancar		**94.134.989**	**93.076.383**	***Total Non Current Assets***
JUMLAH ASET		**10.013.161.220**	**10.056.428.302**	***ASSETS TOTAL***
KEWAJIBAN & EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
- **Kewajiban Jangka Pendek**				***Short Term Liabilities*** -
- Utang Usaha	*2g, 10*	-	13.000.000	*Account Payable* -
- Utang Biaya	*2h, 11*	2.964.423	1.506.776	*Accrued Expense* -
- Utang Pajak	*2i, 2l, 13b*	2.273.065	934.874	*Tax Payable* -
- Utang Lain-Lain	*12*	-	3.784.878	*Other Liabilities* -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**5.237.488**	**19.226.528**	***Total Short Term Liabilities***
- **Ekuitas**	*2j, 14*			***Equity*** -
- Modal Saham		10.010.000.000	10.010.000.000	*Share Capital* -
- Laba Tahun-Tahun Sebelumnya		27.201.774	16.315.940	*Other Equity Component* -
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(29.278.042)	10.885.834	*Retained Earnings* -
Jumlah Ekuitas		**10.007.923.732**	**10.037.201.774**	***Total Equity***
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		**10.013.161.220**	**10.056.428.302**	***LIABILITIES & EQUITY TOTAL***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements as a whole

Direksi/ *Director*

Yudha Prahasta Lagosa, SE
Direktur / *Director*

PT KARANGASEM SEJAHTERA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KARANGASEM SEJAHTERA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENDAPATAN	*2k, 15*	865.691.539	316.749.500	*INCOME*
HARGA POKOK USAHA	*16*	(825.482.780)	(296.792.214)	*COST OF INCOME*
Laba (Rugi) Kotor		40.208.758	19.957.286	*Gross Profit (Loss)*
BEBAN OPERASIONAL				*OTHER OPERATING EXPENSES*
- Beban Pemasaran	*2k, 17*	835.000	-	*Marketing Expenses* -
- Beban Administrasi Umum	*2k, 18*	420.540.104	207.945.924	*Generan Administration Expenses* -
Jumlah		421.375.104	207.945.924	*Total*
Laba (Rugi) Operasional		(381.166.346)	(187.988.638)	*Profit (Loss) from Operations*
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				*OTHER REVENUE (EXPENSES)*
- Pendapatan Non Operasional	*19*	344.385.249	216.500.980	*Non Operational Revenue* -
- Beban Non Operasional	*20*	7.503.055	(17.626.509)	*Non Operational Expense* -
Jumlah		351.888.304	198.874.471	*Total*
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak		(29.278.042)	10.885.834	*Profit (Loss) Before Tax Expense*
Manfaat Pajak Penghasilan (Beban)	*2l, 13*			*Income Tax (Expense) Benefit*
- Kini		-	-	*Current Tax* -
- Tangguhan		-	-	*Deferred Tax* -
Jumlah		-	-	*Total*
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(29.278.042)	10.885.834	*Profit (Loss) for The Year*
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				*OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laporan Laba Rugi				*Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss*
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		-	-	*Remeasurement of Post Employment Benefit Obligation* -
- Pajak Penghasilan Terkait		-	-	*Related Incomes Tax* -
Jumlah		-	-	*Total*
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		(29.278.042)	10.885.834	*Total Comprehensive Income For The year*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements as a whole

Direksi/ *Director*

Yudha Prahasta Lagosa, SE
Direktur / Director

PT KARANGASEM SEJAHTERA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KARANGASEM SEJAHTERA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan disetor / *Issued and Paid Capital*	Belum ditentukan Penggunaanya/ *Unappropriated*	Pendapatan Komprehensif Lain/ *Other Comprehensive Income*	Jumlah Ekuitas / *Equity Total*
Saldo 1 Januari 2024/ ***Balance as of January 1, 2024***	**40.000.000.000**	**16.307.940**	**-**	**40.016.307.940**
Setoran Modal/ *Issuance of share capital*	(29.990.000.000)	-	-	**(29.990.000.000)**
Koreksi/ *Correction*	-	8.000	-	**8.000**
Jumlah laba tahun berjalan/ *Current year profit amount*	-	10.885.834	-	**10.885.834**
Saldo 31 Desember 2024/ ***Balance as of December 31, 2024***	**10.010.000.000**	**27.201.774**	**-**	**10.037.201.774**
Koreksi/ *Correction*	-	0,4	-	**0,4**
Jumlah laba tahun berjalan/ *Current year profit amount*	-	(29.278.042)	-	**(29.278.042)**
Saldo 31 Desember 2025/ ***Balance as of December 31, 2025***	**10.010.000.000**	**(2.076.268)**	**-**	**10.007.923.732**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements as a whole

PT KARANGASEM SEJAHTERA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KARANGASEM SEJAHTERA
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
- Penerimaan dari Pendapatan Usaha	865.691.539	316.749.500	*Receipts from Operating Revenue* -
- Pengeluaran untuk Beban Pokok Penjualan	(825.482.780)	(296.792.214)	*Payments for Cost of Goods Sold* -
- Pembayaran Beban Pemasaran	(835.000)	-	*Payments for Marketing Expenses* -
- Pembayaran Beban Administrasi & Umum	(387.119.709)	(200.653.147)	*Payments for G&A Expenses* -
- Penerimaan Pendapatan Non Operasional	344.385.249	216.500.980	*Receipts from Non-Operating Income* -
- Pembayaran Beban Non Operasional	7.503.055	(17.626.509)	*Payments for Non-Operating Expenses* -
Arus Kas Sebelum Perubahan Pada Aset dan Liabilitas Operasi	**4.142.353**	**18.178.610**	***Cash Flows Before Changes to Operating Assets and Liabilities*** -
(Kenaikan)/ Penurunan dalam Aset Operasi			*(Increase)/ Decrease in Operating Assets*
- Piutang Usaha	2.472.000	29.987.528.000	*Account Receivables* -
- Persediaan	34.133.302	(38.429.786)	*Inventory* -
- Uang Muka	50.000.000	(50.000.000)	*Prepaid* -
- Aset Lancar Lainnya	-	(1.091.000)	*Other Current Assets* -
- Pajak Dibayar Dimuka	(4.388.680)	-	*Prepaid Tax* -
Kenaikan/ (Penurunan) dalam Liabilitas Operasi			*Increase/ (Decrease) Operating Liabilities*
- Utang Usaha	(13.000.000)	13.000.000	*Service and Goods Payables* -
- Utang Biaya	1.457.647	1.506.776	*Accrued Expenses* -
- Utang Pajak	1.338.191	934.874	*Taxes Payable* -
- Utang Lain-Lain	(3.784.878)	3.784.878	*Other's Payable* -
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**72.369.936**	**29.935.412.352**	***Net Cash from Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
- Pembelian Aset Tetap	(22.979.000)	(14.000.000)	*Acquisitions of Fixed Assets* -
- Pembelian Aset Tetap Lainnya	(11.500.000)	(86.369.160)	*Acquisitions of Other Fixed Assets* -
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(34.479.000)**	**(100.369.160)**	***Net Cash from Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASh FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
- Penambahan modal saham	-	(29.990.000.000)	*Additional Paid-Up Capital* -
- Penyesuaian/Koreksi	-	8.000	*Correction* -
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**-**	**(29.989.992.000)**	***Net Cash from Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH	**37.890.936**	**(154.948.808)**	***NET INCREASE (DECREASE)***
KAS DAN SETARA KAS DI:			***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT:***
AWAL TAHUN	**9.871.359.132**	**10.026.307.940**	***BEGINNING OF YEAR***
AKHIR TAHUN	**9.909.250.068**	**9.871.359.132**	***END OF YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:			***Cash and cash equivalents consist of :***
- Kas	1.000.000	12.327.300	*Cash* -
- Penempatan Pada Bank			*Placements with Banks* -
- Giro Pada Bank	408.250.068	359.031.832	*Demand Deposits with Banks* -
Setara Kas	9.500.000.000	9.500.000.000	*Cash Equivalent* -
Jumlah	**9.909.250.068**	**9.871.359.132**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements as a whole

1 UMUM

a Pendirian dan informasi umum

PT Karangasem Sejahtera ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 09 Juni 2011, yang dibuat dihadapan I Nengah Swandi, SH.MKn, Notaris di Karangasem. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-50162.AH.01.01. Tahun 2011. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir, Akta No. 86 tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan I Nengah Swandi, SH.MKn, Notaris di Karangasem. Akta ini telah diterima dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0276041.

Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 31 Oktober 2024, Pasal 3, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang Jasa, Industri, dan Perdagangan.

Ijin-ijin yang dimiliki oleh PT Karangasem Sejahtera adalah sebagai berikut:

1) Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 1306240026258 tanggal 13 Juni 2024 dari Pemerintah Republik Indonesia.
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No 31.355.123.6-907.000 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.

2) Perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 25 Maret 2025 berdasarkan Surat Pengukuhan Nomor S-00157/SPPKP-CT/KPP.1707/2025 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

b Susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 539/HK/2025 telah ditetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, dan susunan tersebut juga ditegaskan kembali melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 005/K/PT KS/XII/2025 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2025, dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

1 GENERAL

a The establisment of the Bank and general information

PT Karangasem Sejahtera ("the Company") was established based on Deed No. 05 dated June 9, 2011, drawn up before I Nengah Swandi, S.H., M.Kn., Notary in Karangasem. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No.AHU-50162.AH.01.01. Year 2011. The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment, Deed No. 86 dated October 31, 2024, was drawn up before I Nengah Swandi, S.H., M.Kn., Notary in Karangasem. This deed has been received and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Letter No. AHU-AH.01.09-0276041.

Based on Deed No. 86 dated October 31, 2024, Article 3, the Company's purpose and objectives are to engage in services, manufacturing, and trading activities.

The legals had been owned by PT Karangasem Sejahtera are as follows:

1) Business Identification Number (NIB) Number: 1306240026258 dated June 13, 2024, issued by the Government of the Republic of Indonesia.
2) Taxpayer Identification Number (NPWP) No. 31.355.123.6-907.000 from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxes.

2) The Company was registered as a Taxable Entrepreneur (PKP) on March 25, 2025, based on the Certificate of Registration Number S-00157/SPPKP-CT/KPP.1707/2025 issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxes.

b Composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company

Based on the Decree of the Regent of Karangasem No. 539/HK/2025, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners has been determined, and this composition was further confirmed through the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 005/K/PT KS/XII/2025 held on December 29, 2025, with the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

1 UMUM (LANJUTAN) / ***1 GENERAL (CONTINUED)***

Dewan Komisaris	Drs. I Wayan Ardika, M.Si	***Board of Commissioners***
- Komisaris		*Commissioner* -
Direksi		***Directors***
- Direktur	Yudha Prahasta Lagosa, SE	*Director* -

c Tempat kedudukan Perusahaan / ***c The location of Company***

- Kantor Pusat	Jalan Ngurah Rai No. 31 Amlapura, Karangasem, Bali.	*Head Office* -
- Perusahaan tidak memiliki kantor cabang.		*The company does not have any branch offices.* -

d Jumlah Karyawan Perusahaan / ***d Number of Company's Employees***

Jumlah karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The number of Company's employees are as follows (unaudited):

	Tetap/ *Permanent*	Tidak Tetap/ *Non-Permanent*	*Jumlah/ Total*	
- 2024	3	0	3	*2024* -
- 2025	3	0	3	*2025* -

e Modal Saham / ***f Share Capital***

Berdasarkan Akta Notaris No. 86 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan I Nengah Swandi, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar saham. Sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan, modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 1.001.000 (satu juta seribu) lembar saham atau sebesar Rp10.010.000.000,- (sepuluh miliar sepuluh juta rupiah).

Based on Notarial Deed No. 86 dated October 31, 2024, executed before I Nengah Swandi, S.H., M.Kn., the shareholders approved the amendment of the Company's authorized capital to Rp40.000.000.000,- (forty billion Rupiah), consisting of 4.000.000 (four million) shares with a par value of Rp10.000,- (ten thousand Rupiah) per share. As of the date of the statement of financial position, the issued and fully paid capital consisted of 1.001.000 (one million one thousand) shares, amounting to Rp10.010.000.000,- (ten billion ten million Rupiah).

Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:
1 lembar saham = 10.000

The composition of share ownership as follows:
1 shares = 10.000

No	Nama Pemegang Saham/ Shareholders's name	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah nilai nominal/ *Total amount of shares*
1	Koperasi Konsumen Werdhi Guna Praja	1.000	0,1%	10.000.000
2	Pemerintah	1.000.000	100%	10.000.000.000
	Jumlah/ *Total*	**1.001.000**	**100%**	**10.010.000.000**

2 INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sehubungan dengan penerapan standar tersebut, penyajian kembali (*restatement*) telah dilakukan atas angka komparatif tahun sebelumnya agar selaras dengan ketentuan SAK, sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan secara wajar.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dalam laporan keuangan ini merupakan penerapan pertama kali oleh Yayasan. Sebelum penerapan SAK EP, Yayasan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dan berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b Kas dan Bank

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik Rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain dan fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

c Piutang Usaha

Piutang disajikan sebesar nilai realisasi bersih (*net realizable value*). Perusahaan tidak mencadangkan piutang ragu-ragu. Apabila terdapat piutang yang tidak dapat ditagih akan dihapusbukukan dan dibebankan sebagai beban lain-lain pada laba rugi tahun berjalan.

2 INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies that are consistently applied in the preparation of the financial statements are as follows:

a Basis preparation of financial statements

These financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). In connection with the adoption of this standard, the comparative figures for the previous year have been restated to conform with SAK requirements, so that the financial statements are presented on a comparable basis.

The adoption of the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) in these financial statements represents the foundation's first-time adoption. Prior to the adoption of SAK EP, the foundation prepared its financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability (SAK ETAP).

The reporting curency used in the preparation of the financial statements in Indonesian Rupiah (IDR).

The financial statements were prepared under the accrual basis of accounting and based on historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other basis as described in the related accounting policies.

The statement of cash flow are prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

b Cash and Bank

Cash is the currency of paper and metal, both Rupiah and foreign currency, which is still valid as a valid payment instrument.

Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia Deposits Facility maturiting within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

c Accounts Receivable

Accounts receivable are presented at net realizable value. The Company does not make provisions for doubtful accounts. Uncollectible accounts receivable are written off and charged to other expenses in the current income statement.

2 INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d Persediaan

Persediaan yang ada di perusahaan dicatat sebesar harga perolehan. Persediaan akhir dinilai dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted average cost method*). Persediaan dicatat menggunakan perpectual inventory.

e Aset Tetap dan Penyusutan

Aset Tetap dicatat sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan memakai metode garis lurus sebagai berikut:

	Metode/ *Method*	Masa Manfaat Tahun/ *The Estimated Useful Life Year*	% per tahun/ *% per year*	
Mesin dan Peralatan	Garis Lurus/ *Straight Line*	4	25%	*Mecine and Equipment*

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan nilai aset dalam jumlah siginifikan dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba rugi diperoleh dilaporkan dalam laporan aktivitas periode yang bersangkutan.

f Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya terdiri dari biaya pengurusan legalitas yang dikapitalisasi serta beban ditangguhkan.

g Utang Usaha

Hutang barang dan jasa merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh Perusahaan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/ realisasi atas hak/ perjanjian/ komitmen tersebut.

2 INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d Inventory

Inventories are stated at cost. The cost of ending inventories is determined using the weighted average cost method. Inventories are recorded using the perpetual inventory system.

e Fixed Assets and Depreciation

Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation. Depreciation of fixed assets is carried out using the straight line method as follows:

Repair and maintenance costs are charged to the statement of activities as incurred. Significant renovations and additions to the value of assets are capitalized.

When assets are retired or sold, the cost and any accumulated depreciation are removed from the asset group and any gain or loss is reflected in the statement of activities for the period.

f Other Non-Current Assets

Other non-current assets consist of capitalized legal documentation and licensing costs as well as deferred expenses.

g Account Payable

Accounts payable for goods and services are liabilities arising from rights to goods/services that have been received and enjoyed and/or commitments that have been made by Company, but for which no payment/ settlement/ realization of such rights/ agreements/ commitments has been made by the end of the reporting period.

2 INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

h Utang Biaya

Utang Biaya diakui sebagai kewajiban PT Karangasem Sejahtera yang timbul dari pengakuan beban berdasarkan prinsip akrual, yaitu pada periode ketika entitas telah menerima manfaat, barang, atau jasa, namun hingga tanggal laporan posisi keuangan belum dilakukan pembayaran kas atau pelunasan atas transaksi tersebut. Kewajiban ini diukur sebesar nilai yang harus dibayarkan atau estimasi terbaik atas jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini tersebut.

i Utang Pajak

Utang pajak adalah kewajiban terutang kepada negara atas sejumlah kewajiban pajak yang dibebankan kepada perusahaan, seperti: Utang PPh Pasal 21, 22, 23, 25, dan 29.

j Ekuitas

Hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

k Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai prinsip akuntansi akrual, penerimaan dan pengeluaran kas serta semua hak dan kewajiban diakui pada saat terjadinya.

l Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui liabilitas atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terhutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya.

Pajak Kini

Pajak yang dikenakan terhadap laba yang diperoleh perusahaan dalam 1 tahun, yang besarnya adalah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Besarnya laba kena pajak ditentukan dari hasil perhitungan laba sesuai versi pajak (laba fiskal), yaitu besarnya laba menurut versi perusahaan (laba komersial) setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal.

2 INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

h Accrued Expenses

Accrued expenses are recognized as a liability of PT Karangasem Sejahtera arising from the recognition of an expenses based on the accrual basis, specifically in the period when the entity has received the benefit, goods, or services,but as of the date of the financial position report, no cash payment or settlement has been made for the transaction. This liability is measured at the value payable or the best estimate of the amount required to settle the present obligation.

i Taxes payable

Tax debt is an obligation owed to the state for a number of tax obligations imposed on companies, such as: Income Tax Article 21, 22, 23, 25, and 29.

j Equity

Residual rights to company assets after deducting all liabilities.

k Recognition of Revenue and Expenses

Under accrual accounting principles, cash receipts and disbursements and all rights and obligations are recognised as they occur.

l Income Tax

The company recognized its obligation on all income taxes in the current period and previous period not paid yet. If such amount paid for the current period and previous period exceed the outstanding amount for said period. The company shall have to recognize said excessive as asset. The company does not recognize deferred tax.

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current tax

Tax imposed on profits earned by a company in one year, the amount of which is in accordance with applicable tax regulations. The amount of taxable profit is determined from the calculation of profit according to the tax version (fiscal profit), which is the amount of profit according to the company's version (commercial profit) after fiscal reconciliation.

2 INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

I Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dimaksud dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1) Perusahaan yang melalui satu atau perantara, mengendalikan, mengendalikan bersama, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, dan anak perusahaan sekelompok);
2) Perusahaan asosiasi;
3) Perseorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dari perorangan tersebut (anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi orang tersebut atau dipengaruhi tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);

2 INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

I Income Tax (Continued)

Deferred tax

Deferref tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting dates between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting dates.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent tha it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at each reporting date and adjusted based on availability of future taxable income.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are axpected to apply to the year when the asset is reliazed or the liability is settled, based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged to the current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

In accordance with the Financial Accounting Standards (SAK), related parties are defined as follows:

1) Companies that, through one or more intermediaries, control, jointly control, are controlled by, or are under common control with the reporting company (including holding companies, subsidiaries, and fellow subsidiaries);
2) Associated Companies;
3) Individuals who have, either directly or indirectly, a significant voting interest in the reporting company, and family members of such individuals (close family members are those who can be expected to influence or be influenced by such individuals in their transactions with the reporting company);

2 INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

m Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai

4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan direksi, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

5) Perusahaan yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak-pihak yang disebut dalam angka 1) sampai dengan 4) di atas, atau di mana orang-orang tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan tersebut.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

n Program imbalan kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. SAK menjelaskan imbalan kerja terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:

1) imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangin) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasa terkait;
2) imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangon) yang terutang setelah penyelesaian kontrak kerja;
3) imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah periode pekerja memberikan jasa terkait; dan
4) pesangon adalah imbalan kerja yang terutang sebagai akibat dari salah satu berikut:
   (i) keputusan entitas untuk melakukan terminasi kontrak kerja pekerja sebelum tanggal purnakarya normal; atau
   (ii) keputusan pekerja untuk menerima pengurangan kontrak kerja secara sukarela untuk dipertukarkan dengan imbalan pesangon tersebut.

2 INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

m Transactions with Related Parties

4) Key employees, namely persons who have the authority and responsibility to plan, lead, and control the activities of the reporting company, including members of the board of directors, directors and managers of the company, as well as close family members of such persons; and

5) Companies that are controlled, jointly controlled, or whose voting rights are owned either directly or indirectly by the parties mentioned in points 1) to 4) above, or where such persons have significant influence over the company.

All transactions with related parties, whether conducted under normal conditions and terms as with third parties or not, are disclosed in the notes to the financial statements.

n Employee benefits plan

Employee benefits are all forms of consideration given by an entity in exchange for services rendered by employees, including directors and management. Financial accounting standards classify employee benefits into four (4) categories, namely:

1) short-term employee benefits are employee benefits (other than pensions) that fall due in full within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service;
2) post-employment benefits are employment benefits (other than severance pay) payable after the termination of the employment contract;
3) other long-term employee benefits are employee benefits (other than post-employment benefits and severance pay) that do not fall due entirely within twelve months after the period in which the employee renders the related service; and
4) Severance pay is compensation owed as a result of one of the following:
   (i) the entity's decision to terminate an employee's employment contract before the normal retirement date; or
   (ii) the workers' decision to voluntarily accept a reduction in their employment contracts in exchange for severance pay.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

n Program imbalan kerja (Lanjutan)

Program imbalan pascakerja diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, bergantung pada syarat dan kondisi utamanya:

1) Program iuran pasti adalah program imbalan pascakerja dimana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah (dana) dan tidak memiliki kewajiban legal atau kontruktif untuk membayar iuran lebih lanjut atau melakukan pembayaran imbalan secara langsung kepada pekerja jika dana tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruhnya imbalan kerja terkait dengan jasa pekerja pada periode kini dan periode sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah imbalan pascakerja yang diterima oleh pekerja ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayar oleh entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) pada program imbalan pascakerja atau perusahaan aseuransi, ditambah dengan imbal hasil investasi yang timbul dari iuran tersebut.

2) Program imbalan pasti adalah program imbalan pascakerja selain iuran pasti. Dalam program imbalan pasti, kewajiban entitas adalah memberikan imbalan yang disepakati kepada pekerja kini dan mantan pekerja, dan risiko aktuarial (bahwa imbalan tersebut akan lebih besar atau lebih kecil dari yang diperkirakan) serta risiko investasi (bahwa imbal hasil atas aset yang disisihkan untuk mendanai imbalan akan berbeda dari yang dipekrirakan) ditanggung, secara substansi, oleh entitas. Jika pengalaman aktuarial atau investasi lebih buruk dari yang diperkirakan, maka kewajiban entitas akan meningkat dan sebaliknya jika pengalaman aktuarial lebih baik dari yang diperkirakan.

Imbalan pasti dihitung menggunakan metode projected unit credit (PUC). Jika imbalan pasti didasarkan pada tingkat gaji di masa depan, maka metode PUC mensyaratkan enetitas untuk membuat berbagai asumsi aktuarial dalam mengukur kewajiban imbalan pasti termasuk tingkat diskonto, tingkat imbalan hasil ekspektasian atas aset program, tingkat ekspektasian dari kenaikan gaji, perputaran pekerja, mortalitas, dan tingkat tren kesehatan (untuk program kesehatan imbalan pasti).

2 INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n Employee benefits plan (Continued)

Post-employment benefit plans are classified as defined contribution plans or defined benefit plans, depending on their main terms and conditions:

1) A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which an entity pays fixed contributions to a separate entity (fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions or make direct benefit payments to employees if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits relating to employee service in the current and prior periods. Therefore, the amount of post-employment benefits received by employees is determined by the amount of contributions paid by the entity (and possibly also by the employees) into the post-employment benefit plan or insurance company, plus the investment returns generated from those contributions.

2) A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan. In a defined benefit plan, the entity's obligation is to provide agreed benefits to current and former employees, and the actuarial risk (that the benefits will be greater or less than expected) and investment risk (that the return on assets set aside to fund the benefits will differ from what was expected) are borne, in substance, by the entity. If actuarial or investment experience is worse than expected, the entity's obligation will increase, and conversely, if actuarial experience is better than expected, the entity's obligation will decrease.

Deferred compensation is calculated using the projected unit credit (PUC) method. If defined benefits are based on future salary levels, the PUC method requires entities to make various actuarial assumptions in measuring defined benefit obligations, including discount rates, expected rates of return on plan assets, expected rates of salary increases, employee turnover, mortality, and health trend rates (for defined benefit health plans).

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

n Program imbalan kerja (Lanjutan)

Standar ini tidak mensyaratkan entitas untuk menggunakan aktuaris independen untuk melaksanakan penilaian aktuarial komprehensif yang diperlukan untuk menghitung kewajiban imbalan pasti. Tidak ada persyaratan bahwa penilaian aktuarial komprehensif harus dilaksanakan secara tahunan. Dalam periode diantara penilaian aktuarial komprehensif (jika asumsi aktuarial utama tidak berubah secara signifikan) kewajiban imbalan pasti dapat diukur dengan menyesuaikan pengukuran periode sebelumnya untuk perubahan demografi pekerja seperti jumlah pekerja dan tingkat gaji.

Entitas disyaratkan untuk mengakui seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial pada periode terjadinya. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif.

Namun demikian, pada tahun 2025 PT Karangasem Sejahtera belum menghitung kewajiban imbalan pascakerja sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2023, PP35/2021, PP36/2021, dan PP37/2021, dan SAK EP Babm28 tentang Imbalan Kerja. Estimasi dampak dari belum dihitungnya kewajiban tersebut terhadap laporan keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dapat ditentukan.

o Peristiwa setelah tanggal neraca

Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal neraca (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Kejadian-kejadian setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

p Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan kekuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan kewajiban.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan kewajiban atas tahun keuangan satu tahun ke depan.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

2 INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n Employee benefits plan (Continued)

This standard does not require entities to use independent actuaries to perform the comprehensive actuarial valuations necessary to calculate defined benefit obligations. There is no requirement that comprehensive actuarial valuations be performed annually. In the period between comprehensive actuarial valuations (if the main actuarial assumptions have not changed significantly), defined benefit obligations can be measured by adjusting the previous period's measurement for changes in employee demographics such as the number of employees and salary levels.

Entities are required to recognize all actuarial gains and losses in the period in which they occur. Actuarial gains and losses recognized in other comprehensive income are presented in the statement of comprehensive income.

However, in 2025, PT Karangasem Sejahtera has not yet calculated its post-employment benefit obligations in accordance with Law No. 6 of 2023, PP 35/2021, PP 36/2021, and PP 37/2021, and SAK EP Chapter 28 concerning Employee Benefits. The estimated impact of this uncalculated obligation on the financial statements up to December 31, 2025, cannot yet be determined.

o Subsequent event

Post year-subsequents event that provide additional information about the Company's financial position at the date of the balance sheet (adjusting event), if any, are reflected in the financial statements. Post year-subsequent event that do not need adjustment are disclosed in the notes to financial statements when material.

p Use of critical accounting estimates and judgments

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining in the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year.

Althoough these estimates and assumtions are by management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

3 KAS DAN SETARA KAS / *3 CASH AND CASH EQUIVALENTS*

Kas Dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Cash And Cash Equivalents as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

		31/12/2025	31/12/2024	
- Kas				***Cash -***
- Kas Kecil		-	4.500	*Petty Cash -*
- Kas		1.000.000	12.322.800	*Cash -*
Sub Jumlah	a	**1.000.000**	**12.327.300**	***Total***
- Bank				***Bank -***
- PT Bank Pembangunan Daerah Bali - 0220202564713		112.363.136	299.077.032	*PT Bank Pembangunan Daerah Bali - 0220202564713 -*
- PT Bank Pembangunan Daerah Bali - 0220202555023		295.886.932	59.954.801	*PT Bank Pembangunan Daerah Bali - 0220202555023 -*
Sub Jumlah	b	**408.250.068**	**359.031.832**	***Total***
- Deposit				***Time Deposite -***
- PT Bank Pembangunan Daerah Bali - 0304005990		7.000.000.000	7.000.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Bali - 0304005990 -*
- PT Bank Pembangunan Daerah Bali - 0304006001		2.500.000.000	2.500.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Bali - 0304006001 -*
Sub Jumlah	c	**9.500.000.000**	**9.500.000.000**	***Total***
Jumlah	d = a + b + c	**9.909.250.068**	**9.871.359.132**	***Total***

4 PIUTANG USAHA / *4 ACCOUNT RECEIVABLE*

Piutang Usaha per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Account Receivable as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31/12/2025	31/12/2024	
- Piutang Usaha	-	2.472.000	*Account Receivable -*
Jumlah	**-**	**2.472.000**	***Total***

5 PERSEDIAAN / *5 INVENTORY*

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Inventory as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31/12/2025	31/12/2024	
- Persediaan Produk	4.296.484	38.429.786	*Product Inventory -*
Jumlah	**4.296.484**	**38.429.786**	***Total***

6 UANG MUKA / *6 ADVANCES*

Uang Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Advances as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31/12/2025	31/12/2024	
- Uang Muka Umum	-	50.000.000	*General Advances -*
Jumlah	**-**	**50.000.000**	***Total***

7 ASET LANCAR LAINNYA / *OTHER CURRENT ASSETS*

Aset Lancar Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Other Current Assets as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31/12/2025	31/12/2024	
- Capex Unit Usaha Kapas	1.091.000	1.091.000	*Capex – Cotton Business Unit* -
Jumlah	**1.091.000**	**1.091.000**	***Total***

8 ASET TETAP / *FIXED ASSETS*

Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Fixed Assets as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31/12/2024	Mutasi/ *Movements* Penambahan/ *Additions*	Koreksi/ *Correction*	31/12/2025	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
- Mesin & Peralatan	14.000.000	22.979.000	-	36.979.000	*Machinery and Equipment* -
Jumlah	**14.000.000**	**22.979.000**	**-**	**36.979.000**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
- Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan	1.647.917	8.953.105	-	10.601.021	*Acc. Depre. of Machinery and Equipment* -
Jumlah	**1.647.917**	**8.953.105**	**-**	**10.601.021**	***Total***
Nilai Buku	**12.352.083**			**26.377.979**	***Book Value***

	31/12/2023	Mutasi/ *Movements* Penambahan/ *Additions*	Koreksi/ *Correction*	31/12/2024	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
- Mesin & Peralatan	-	14.000.000	-	14.000.000	*Machinery and Equipment* -
Jumlah	**-**	**14.000.000**	**-**	**14.000.000**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
- Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan	-	1.647.917	-	1.647.917	*Acc. Depre. of Machinery and Equipment* -
Jumlah	**-**	**1.647.917**	**-**	**1.647.917**	***Total***
Nilai Buku	**-**			**12.352.083**	***Book Value***

Rincian aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 1.

Details of fixed assets can be seen in Appendix 1.

9 ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *OTHER FIXED ASSETS*

Aset Tidak Lancar Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Other Fixed Assets as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

		31/12/2025	31/12/2024	
- Lainnya				*Others* -
- Harta Lainnya		97.869.160	86.369.160	*Other Assets* -
- Akumulasi Amortisasi Harta Lainnya		(30.112.150)	(5.644.860)	*Accu. Amortization of Other Assets* -
Sub Jumlah	b	**67.757.010**	**80.724.300**	***Sub Total***
Jumlah	c = a + b	**67.757.010**	**80.724.300**	***Total***

10 UTANG USAHA / *10 ACCOUNT PAYABLE*

Utang Usaha per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: / *Account Payable as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:*

	31/12/2025	31/12/2024	
- Beneng Sari	-	13.000.000	*Beneng Sari* -
Jumlah	**-**	**13.000.000**	***Total***

11 UTANG BIAYA / *11 ACCRUED EXPENSE*

Utang Biaya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: / *Accrued Expense as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:*

	31/12/2025	31/12/2024	
- Utang BPJS Ketenagakerjaan	807.583	807.576	*BPJS Employment Payable* -
- Utang BPJS Kesehatan	-	-	*BPJS Health Payable* -
- Utang Karywan	2.156.840	699.200	*Employee Payables* -
Jumlah	**2.964.423**	**1.506.776**	***Total***

12 UTANG LAIN-LAIN / *12 OTHER PAYABLE*

Utang Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: / *Other Payable as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:*

	31/12/2025	31/12/2024	
- Utang Konsinyasi	-	225.000	*Consignment Payable* -
- Utang Direksi	-	3.559.878	*Director Payables* -
Jumlah	**-**	**3.784.878**	***Total***

13 PERPAJAKAN / *13 TAX PAYABLE*

a Pajak dibayar Dimuka / *a Prepaid Tax*

Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: / *Prepaid Tax as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:*

	31/12/2025	31/12/2024	
- Uang Muka PPh Pasal 21	4.388.680	-	*Prepaid Tax - WHT 21* -
Jumlah	**4.388.680**	**-**	***Total***

b Utang Pajak / *b Tax Payable*

Utang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: / *Tax Payable as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:*

	31/12/2025	31/12/2024	
- Pajak Penghasilan Pasal 21	2.231.840	934.874	*Income Tax Article 21* -
- Pajak Pertambahan Nilai	41.225	-	*Value Added Tax (VAT)* -
Jumlah	**2.273.065**	**934.874**	***Total***

c Rekonsiliasi Pajak / *c Tax Reconciliation*

		2025	2024	
- Laba Sebelum Beban Pajak	a	(29.278.042)	10.885.834	*Income Before Tax Expense* -
Beda Tetap				***Permanent Difference***
- **Koreksi Positif**				***Positive Corrective*** -
- Biaya Lain-lain		650.000	685.500	*Other Expenses* -
- Beban Piodalan dan Upacara Agama		639.000	759.000	*Religious Ceremony Expenses* -
- Biaya Hari Besar dan Even Daerah		172.000	1.092.000	*Holidays & Regional Event Expenses* -
- Beban Rapat dan Konsumsi		1.417.300	1.536.000	*Meeting and Entertainment Expenses* -
- Beban Administrasi Bank		147.500	110.600	*Bank Administration Expenses* -
- Biaya Qris		-	2.887	*QRIS Fees* -
- Beban Administrasi Bank dan Bunga		944.044	16.520.022	*nk Administration and Interest Expenses* -
- Beban koreksi pajak		534.674		*Tax Adjustment Expenses* -
Sub Jumlah	b	**4.504.518**	**20.706.009**	***Sub Total***

13 PERPAJAKAN (LANJUTAN) / ***13 TAX PAYABLE (CONTINUED)***

c Rekonsiliasi Pajak (Lanjutan) / ***c Tax Reconciliation (Continued)***

- **Koreksi Negatif**				***Negative Corrective*** -
- Pendapatan Bunga		3.265.257	81.608.647	*Interest Income* -
- Pendapatan Bunga/Deposito 066012		246.399.996	12.600.000	*Deposit Interest Income 066012* -
- Pendapatan Bunga/Deposito 033886		87.999.996	116.199.999	*Deposit Interest Income 033886* -
- Pendapatan Bunga/Deposito 149375		-	5.800.000	*Deposit Interest Income 149375* -
Sub Jumlah	c	**337.665.249**	**216.208.646**	***Sub Total***
Jumlah Beda Tetap	d =b - c	**(333.160.731)**	**(195.502.637)**	***Permanent Difference Total***
Jumlah Koreksi Fiskal	f = d + e	**(333.160.731)**	**(195.502.637)**	***Fiscal Correction Total***
- **Laba Kena Pajak**	e = a + d	(362.438.773)	(184.616.803)	***Estimated of Income Tax*** -
- **Pembulatan**	g	(362.438.000)	(184.616.000)	***Rounded*** -
- **Penghasilan kena pajak**				***Taxable income*** -
Pasal 31E		4.800.000.000	4.800.000.000	*Article 31E*
Peredaran bruto:		2.347.700.908	533.250.480	*Gross income:*
- Laba dengan fasilitas	h	-	-	*Profit with facility* -
- Laba tanpa fasilitas	i	-	-	*Profit with non-facility* -
- **Taksiran pajak penghasilan**				***Estimated of income tax*** -
- Dengan fasilitas 22% x 50% x h	=	-	-	*With facility* -
- Tanpa fasilitas 22% x i	=	-	-	*With non-facility* -
Jumlah pajak penghasilan badan terutang		**-**	**-**	***Corporate taxes payable total***

14 EKUITAS / ***14 EQUITY***

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: / *Equity as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:*

	31/12/2025	31/12/2024	
- Modal Saham	10.010.000.000	10.010.000.000	*Share Capital* -
- Laba Tahun-Tahun Sebelumnya	27.201.774	16.315.940	*Retained Earnings (Prior Years)* -
- Laba Tahun Berjalan	(29.278.042)	10.885.834	*Current Year Profit* -
Jumlah	**10.007.923.732**	**10.037.201.774**	***Total***

15 PENDAPATAN / ***15 INCOME***

Pendapatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: / *Income from January 1 to December 31, 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:*

	2025	2024	
- Penjualan Produk	865.764.139	316.749.500	*Product Sales* -
- Diskon Penjualan	(72.600)	-	*Sales Discounts* -
Jumlah	**865.691.539**	**316.749.500**	***Total***

16 HARGA POKOK PENJUALAN / ***16 COST OF SALES***

Harga Pokok Penjualan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: / *Cost Of Sales from January 1 to December 31, 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:*

	2025	2024	
- Harga Pokok Penjualan Produk	816.411.978	296.792.214	*Cost of Goods Sold – Products* -
- Biaya Kemasan Beras	9.276.783	-	*Packaging Cost – Rice* -
- Diskon Pembelian	(205.981)	-	*Purchase Discount* -
Jumlah	**825.482.780**	**296.792.214**	***Total***

17 BEBAN PEMASARAN / *17 MARKETING EXPENSES*

Beban Pemasaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Marketing Expenses from January 1 to December 31, 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
- Beban Promosi dan Iklan	835.000	-	*Promotion and Advertising Expenses* -
Jumlah	**835.000**	**-**	***Total***

18 BEBAN ADMINISTRASI UMUM / *18 GENERAN ADMINISTRATION EXPENSES*

Beban Administrasi Umum dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Generan Administration Expenses from January 1 to December 31, 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

		2025	2024	
- Beban Tenaga Kerja		-		*Employee Benefits Expense* -
- Beban Gaji dan Tunjangan Direksi		101.000.000	80.800.000	*Directors' Salary & \Allowances Expenses* -
- Beban Tunjangan Transport Direksi		50.000.000	40.000.000	*Directors' Transport Allowance Expenses* -
- Honor Dewan Komisaris		28.280.000	32.320.000	*Board of Commissioners Honorarium* -
- Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai		102.482.388	26.130.000	*Employee Salaries & Benefits Expenses* -
- Upah Buruh Harian Lepas		4.815.000	-	*Daily Worker Wages* -
- Honor Staff Khusus		50.000.000	-	*Special Staff Honorarium* -
- Beban BPJS Kesehatan		4.368.978	-	*BPJS Health Expense* -
- Beban BPJS Ketenagakerjaan		11.590.770	4.363.008	*BPJS Employment Expense* -
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		-	5.272.500	*Training and Education Expenses* -
- Imbalan Pasca Kerja		-	-	*Post-Employment Benefits*
Sub Jumlah	a	**352.537.136**	**188.885.508**	***Sub Total***
- Beban Jasa Profesional				*Profesional Fee* -
- Biaya Audit Kantor Akuntan Publik		17.500.000	-	*Audit Fee – Public Accounting Firm* -
Sub Jumlah	b	**17.500.000**	**-**	***Sub Total***
- Beban Pajak dan Retribusi				*Tax dan Retribution Expense* -
- Beban koreksi pajak		534.674	-	*Tax Adjustment Expense* -
Sub Jumlah	c	**534.674**	**-**	***Sub Total***
- Beban Penyusutan dan Amortisasi				*Depreciation and Amortization Expense* -
- Penyusutan Mesin & Peralatan		8.953.104	1.647.917	*Depreciation Machinery and Equipment* -
- Amortisasi Harta Lainnya		24.467.290	5.644.860	*Amortization Other Assets* -
Sub Jumlah	d	**33.420.394**	**7.292.777**	***Sub Total***
- Beban Barang dan Jasa				*Goods and Services Expense* -
- Beban Pengiriman		54.000	414.000	*Delivery Expenses* -
- Biaya Konsinyasi		-	225.000	*Consignment Expenses* -
- Beban Rapat dan Konsumsi		1.417.300	1.536.000	*Meeting and Entertainment Expenses* -
- Beban Perjalanan Dinas		-	3.587.939	*Business Travel Expenses* -
- Beban ATK		3.321.700	3.553.700	*Office Supplies Expense* -
- Beban Bahan Bakar dan Transport		1.530.000	600.000	*Fuel and Transportation Expenses* -
- Biaya Hari Besar & Even Daerah		639.000	1.092.000	*Event & Holiday Expenses* -
- Beban Upacara Keagamaan		172.000	759.000	*Religious Ceremony Expenses* -
- Beban Pakaian Dinas dan Traning		1.049.000	-	*Uniform and Training Expenses* -
- Beban Perjalanan Dinas		6.720.000	-	*Business Travel Expenses* -
- Biaya Rumah Tangga		1.644.900	-	*Household Expenses* -
Sub Jumlah	e	**16.547.900**	**11.767.639**	***Sub Total***
Jumlah	f =∑(a:e)	**420.540.104**	**207.945.924**	***Total***

19 PENDAPATAN NON OPERASIONAL / *NON OPERATIONAL REVENUE*

Pendapatan Non Operasional dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Non Operational Revenue from January 1 to December 31, 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
- Pendapatan Bunga / Bagi Hasil	3.265.257	81.608.647	*Interest / Profit Sharing Income* -
- Pendapatan Bunga/Deposito 066012	246.399.996	12.600.000	*Deposit Interest Income 066012* -
- Pendapatan Bunga/Deposito 033886	87.999.996	116.199.999	*Deposit Interest Income 033886* -
- Pendapatan Event Daerah	6.720.000	292.333	*Regional Event Income* -
- Pendapatan Bunga/Deposito 149375	-	5.800.000	*Deposit Interest Income 149375* -
- Pendapatan Lain-lain	-	1	*Other Income* -
Jumlah	**344.385.249**	**216.500.980**	***Total***

20 BEBAN NON OPERASIONAL / *NON OPERATIONAL EXPENSE*

Beban Non Operasional dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Non Operational Expense from January 1 to December 31, 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
- Beban Lain-lain	650.000	914.000	*Other Expenses* -
- Beban Operasional Lain	-	79.000	*Other Operating Expenses* -
- Penyesuaian Persediaan	(9.244.599)	-	*Inventory Adjustment* -
- Beban Administrasi Bank	147.500	110.600	*Bank Administration Expenses* -
- Biaya Qris	-	2.887	*QRIS Fees* -
- Beban Administrasi Bank dan Bunga	944.044	16.520.022	*Bank Administration and Interest Expenses* -
Jumlah	**(7.503.055)**	**17.626.509**	***Total***

21 PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN / *EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD*

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan dan atau penyesuaian terhadap laporan keuangan.

Management is resposible for the preparation of the financial statements. There were no significant subsequent event after the statement of financial position date that require or adjustment to the financial statements.

22 PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN / *RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS*

Penerapan pertama kali Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) tidak menimbulkan dampak material terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, maupun arus kas Perusahaan. Penyesuaian yang dilakukan terutama berkaitan dengan penyelarasan kebijakan akuntansi dan/atau penyajian agar sesuai dengan ketentuan SAK EP.

The first-time adoption of the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) did not result in any material impact on the Company's financial position, financial performance, or cash flows. The adjustments made primarily relate to the alignment of accounting policies and/or presentation to comply with the requirements of SAK EP.

Laporan keuangan tahun 2024 yang disajikan sebagai angka komparatif telah disajikan kembali untuk tujuan perbandingan dan tidak mengakibatkan perubahan material atas jumlah yang sebelumnya dilaporkan.

The financial statements for the year 2024, which are presented as comparative figures, have been restated for comparability purposes and did not result in any material changes to the amounts previously reported.

23 REKLASIFIKASI AKUN / *RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*

Beberapa akun dalam laporan keuangan telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan hasil audit tahun 2025.

Certain accounts in the financial statements has been reclassified to conform with the presentation of the audited financial statements in 2025.

24 RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

24 FINANCIAL RATIO

Financial ratio in 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024
a. Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio		
1) Rasio Lancar / Current Ratio	*189385,17%*	*51820,86%*
2) Rasio Kas / Cash Ratio	*189198,51%*	*51342,39%*
3) Rasio Cepat / Quick Ratio	*189303,14%*	*23345,97%*
4) Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset / Working Capital To Total Asset Ratio	*99,01%*	*98,88%*
b. Rasio Leverage / Leverage Ratio		
1) Rasio Utang terhadap Modal / Total Debt To Equity Ratio	*0,05%*	*0,19%*
2) Rasio Utang terhadap Aset / Total Debt To Total Aset	*0,05%*	*0,19%*
c. Ratio Aktivitas		
1) Perputaran Total Aset / Total Asset Turnover	*0,09 Kali*	*0,03 Kali*
2) Rasio Total Utang terhadap Total Aset / Total Debt to Total Assets	*700,40 Kali*	*0,02 Kali*
3) Periode Rata-rata Penagihan / Average Collection Period	*0,52 Hari*	*17280,61 Hari*
4) Perputaran Persediaan / Inventory Turnover	*38,64 Kali*	*15,45 Kali*
5) Rata-rata Hari Persediaan / Average Days Inventory	*9,45 Hari*	*23,63 Hari*
6) Perputaran Modal Kerja / Working Capital Turnover	*0,09 Hari*	*0,01 Hari*
d. Rasio Rentabilitas / Rentability Ratio		
1) Margin Laba Kotor / Gross Profit Margin	*4,64%*	*6,30%*
2) Margin Laba Operasi / Operating Profit Margin	*-3,38%*	*-59,35%*
3) Rasio Operasi / Operating Ratio	*144,03%*	*159,35%*
4) Tingkat Pengembalian atas Total Aset (ROA) / Rate of Return on Total Aset (ROA)	*-0,29%*	*0,04%*
5) Tingkat Pengembalian atas Investasi (ROI) / Rate of Return on Investment (ROI)	*-0,29%*	*0,11%*
6) Tingkat Pengembalian Bagi Pemilik/Pengembalian Ekuitas (ROE) / Rate Of Return For The Owner/Return On Equity (ROE)	*-0,29%*	*0,11%*

25 PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 27 April 2026.

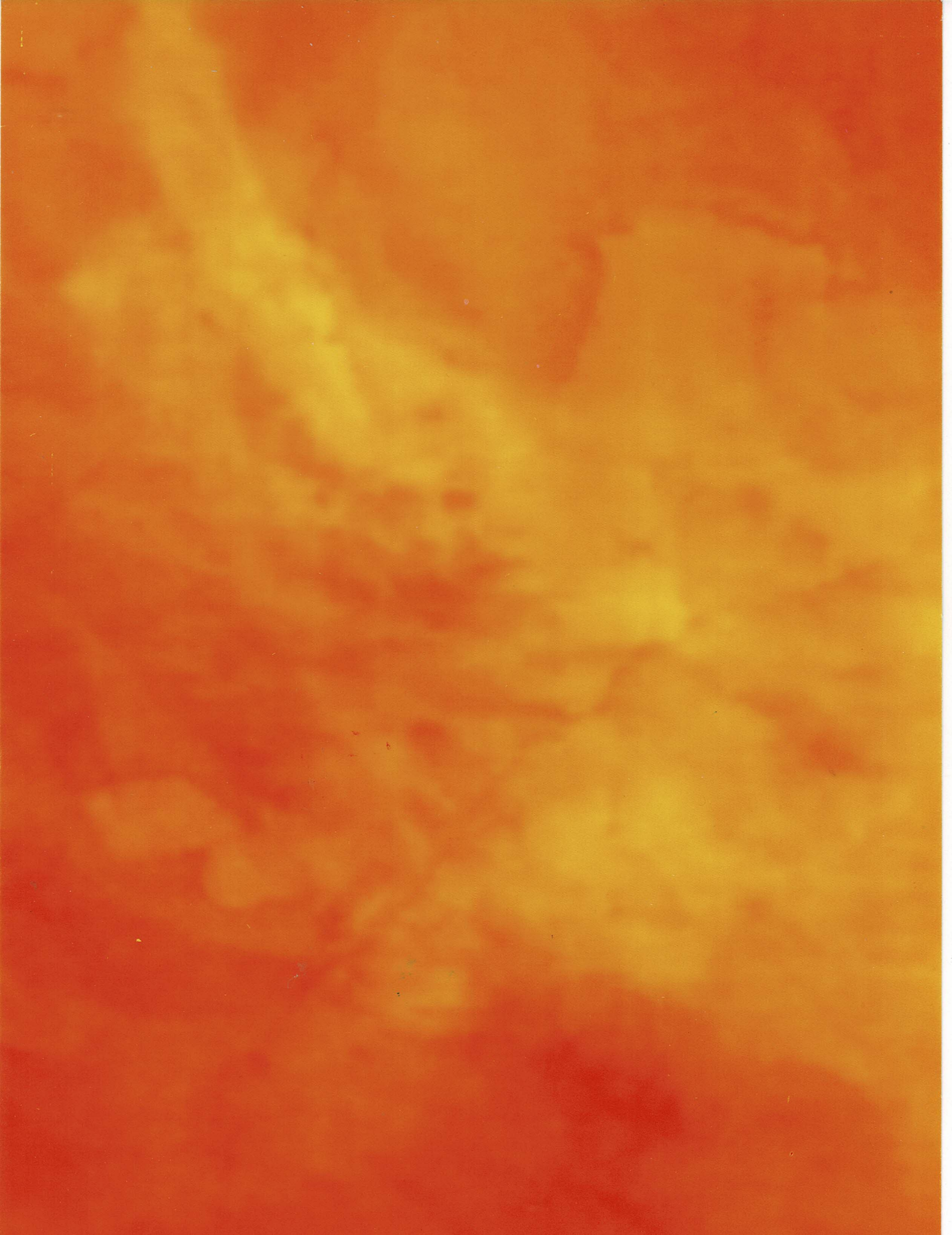
25 COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were completed and authorized for issued by the Bank's Directors on April 27, 2026

LAMPIRAN/
APPENDIX

PT KARANGASEM SEJAHTERA
DAFTAR ASET TETAP/ LIST OF FIXED ASSETS
PER 31 DESEMBER 2025/ AS AT DECEMBER 31, 2025

No/ Num	Kode/ *Code*	Item Aset Tetap/ Fixed Assets Item	Tahun Perolehan/ Year Acquisition	Tarif/ *Rate*	Harga Perolehan/ Cost 31-12-2024 (IDR)	Umur/ Age	Nilai Buku/ Book Value 31-12-2024 (IDR)	Mutasi/ Movements		Harga Perolehan/ Cost 31-12-2025 (IDR)	Ak. Penyusutan/ Acc. Depreciation 12-12-2024 (IDR)	Beban Penyusutan/ Depreciation Expenses		Ak. Penyusutan/ Acc. Depreciation 31-12-2025 (IDR)	Nilai Buku/ Book Value 31-12-2025 (IDR)
								Penambahan/ Additions (IDR)	Koreksi/ Correction (IDR)			Depreciation Expense (IDR)	Koreksi/ Correction (IDR)		
I	**Mesin dan Peralatan / *Mechine and Equipment***														
1	E002	Laptop Asus X441M PROCESSOR INTEL CELERON ram 4GB SSD 128GB Hardisk 500 GB	17/06/2024	25%	2.100.000	4	1.793.750	-	-	2.100.000	306.250	525.000	-	831.250	1.268.750
2	E003	Laptop HP-14bs processor intel celeron RAM 4GB SSD 240 GB	17/06/2024	25%	2.100.000	4	1.793.750	-	-	2.100.000	306.250	525.000	-	831.250	1.268.750
3	E004	Printer Epson L3210	28/06/2024	25%	2.400.000	4	2.050.000	-	-	2.400.000	350.000	600.000	-	950.000	1.450.000
4	E005	Laptop Asus E202 Celeron 11,6 RAM 2GB SSD 240GB	28/06/2024	25%	1.600.000	4	1.366.667	-	-	1.600.000	233.333	400.000	-	633.333	966.667
5	E006	NB Hp 14.DQ3109T4 Celeron-N4500 ram 8GB SSD 256 GB Windows pro 10	18/09/2024	25%	5.050.000	4	4.629.167	-	-	5.050.000	420.833	1.262.500	-	1.683.333	3.366.667
6	E007	Laptop Asus X441M processor intel Celeron RAM 4GB SSD 128GB Hardisk 500GB	08/11/2024	25%	750.000	4	718.750	-	-	750.000	31.250	187.500	-	218.750	531.250
7	E008	TCL Televisi LED TV 55G60	07/01/2025	25%	-	4	-	5.200.000	-	5.200.000	-	1.300.000	-	1.300.000	3.900.000
8	E009	Aqua Water Dispanser AWD-1180BC	07/01/2025	25%	-	4	-	1.950.000	-	1.950.000	-	487.500	-	487.500	1.462.500
9	E010	Vivo Y19S R4/128 GB Black include kartu By-u 7GB	16/01/2025	25%	-	4	-	1.830.000	-	1.830.000	-	457.500	-	457.500	1.372.500
10	E011	Acer Swift Edge SFA 16-41-R1QC/ FLAX WHITE RYZEN-	10/02/2025	25%	-	4	-	13.999.000	-	13.999.000	-	3.208.104	-	3.208.104	10.790.896
	Subtotal				**-**		**12.352.083**	**22.979.000**		**36.979.000**	**1.647.917**	**8.953.104**	-	**10.601.021**	**26.377.979**
II	**Harta Lainnya/ *Other Assets***														
1	S001	Program Zahir	15/05/2024	25%	26.369.160	4	21.974.300	-	-	26.369.160	4.394.860	6.592.290	-	10.987.150	15.382.010
2	S002	Konsultan Renbis, RKAP dan PP Periode 2024-2028 (5th)	30/05/2024	25%	60.000.000	4	58.750.000	-	-	60.000.000	1.250.000	15.000.000	-	16.250.000	43.750.000
3	S003	Akta PT Karangasem Sejahtera No. 86/2024	30/01/2025	25%	-	4	-	11.500.000	-	11.500.000	-	2.875.000	-	2.875.000	8.625.000
	Subtotal				**86.369.160**		**80.724.300**	**11.500.000**	-	**97.869.160**	**5.644.860**	**24.467.290**	-	**30.112.150**	**67.757.010**
	GRAND TOTAL				**86.369.160**		**93.076.383**	**34.479.000**	-	**134.848.160**	**7.292.777**	**33.420.394**	-	**40.713.171**	**94.134.989**



Pemerintah Kabupaten Karangasem

BLUD RSUD KARANGASEM

PER 31 DESEMBER 2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

RSUD KABUPATEN KARANGASEM

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

RSUD KABUPATEN KARANGASEM

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

A. SURAT PERNYATAAN DIREKSI

- Surat Pernyataan Direksi

B. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- Laporan Auditor Independen

C. LAPORAN KEUANGAN

- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU RSUD 2
- Laporan Posisi Keuangan 3
- Laporan Operasional 4
- Laporan Perubahan Ekuitas 5
- Laporan Arus Kas 6
- Catatan atas Laporan Keuangan ..... 7 - 19

=== ooOoo ===

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan : Ngurah Rai No.58 – Amlapura (80811) ☎ (0363) 21470, 21011
Fax. (0363) 23592, Email : rsud_karangasem@yahoo.co.id
website : rsud.karangasemkab.go.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. I Putu Angga Wirayogi
Alamat Kantor : Jl. Ngurah Rai No.58, Kabupaten Karangasem
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Amlapura, 25 Maret 2026

METERAI TEMPEL 10000 04DA5ANX337721813

dr. I Putu Angga Wirayogi
Direktur

Kantor Akuntan Publik
Bustaman, Ezeddin & Putranto
Akuntan Publik Terdaftar dan Konsultan Manajemen
Izin Usaha No. : 1029/KM.1/2017

Kantor Pusat :
Gedung Sentra Kramat Blok B No.18, Jl. Kramat Raya No.7-9
Telp. 021-3156131 • Fax. 021-3148966, Jakarta Pusat 10450
www.kapbep.com • E-mail : infokap@kapbep.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. : 00021/2.1151/AU.5/11/0332-1/1/III/2026

Dewan Pengawas, Direksi dan Manajemen
RSUD KABUPATEN KARANGASEM

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan RSUD Kabupaten Karangasem terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan RSUD Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Desember 2025 serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor untuk Audit atas Laporan Keuangan dalam laporan kami. Kami independen terhadap RSUD Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan RSUD Kabupaten Karangasem dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi melikuidasi RSUD Kabupaten Karangasem atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan RSUD Kabupaten Karangasem.

Tanggung jawab auditor atas Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap

Kantor Cabang :
Jl. Bhakti No. 61, Asrama Haji Tabing, Telp. 0751-7055101 • Fax. 0751-7059924
Padang 25171. E-mail : herryputranto@kapbep.com • herryakuntan@yahoo.co.id

material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.
Sebagai bagian dari audit sesuai dengan Standar Audit, kami menerapkan penilaian profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tanggap terhadap risiko tersebut dan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan dasar bagi pendapat kami. Risiko tidak terdeteksinya salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang diakibatkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan yang disengaja, penyajian yang keliru, atau pengesampingan pengendalian internal.
- Memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan pendapat atas keefektifan pengendalian internal RSUD Kabupaten Karangasem.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi serta pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan RSUD Kabupaten Karangasem untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika kami menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian material, kami diharuskan untuk memperhatikan dalam laporan auditor kami tentang pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh sampai dengan tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi di masa depan dapat menyebabkan RSUD Kabupaten Karangasem berhenti melanjutkan usahanya.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan menggambarkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto





Elviana Ezeddin, CA, CPA
AP.0332

25 Maret 2026

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA				
Lain-lain PAD yang sah -LRA	87.300.000.000	92.477.534.012	105,93%	87.244.225.030
JUMLAH PENDAPATAN LRA	**87.300.000.000**	**92.477.534.012**	**105,93%**	**87.244.225.030**
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	**85.664.968.440**	**89.170.354.024**		**88.756.665.536**
Belanja Pegawai	20.761.660.219	20.920.029.942	100,76%	25.354.818.855
Belanja Barang dan Jasa	64.903.308.221	68.250.324.082	105,16%	63.401.846.681
BELANJA MODAL	**7.784.967.742**	**6.868.669.089**		**14.372.336.432**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.490.656.500	2.742.062.943	78,55%	13.435.267.084
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.394.311.242	1.276.126.146	91,52%	937.069.348
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.900.000.000	2.850.480.000	0,00%	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%	-
JUMLAH BELANJA DAERAH	**93.449.936.182**	**96.039.023.112**	**102,77%**	**103.129.001.968**
SURPLUS/DEFISIT	**(6.149.936.182)**	**(3.561.489.100)**	**57,91%**	**(15.884.776.938)**
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
PEMBIAYAAN BERSIH	-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(6.149.936.182)**	**(3.561.489.100)**	**57,91%**	**(15.884.776.938)**

Amlapura, 25 Maret 2026
Atas nama dan mewakili manajemen,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
RSU KARANGASEM
DINAS KESEHATAN

dr. I Putu Angga Wirayogi
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH BLU RSUD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	2.425.624.940	8.794.277.833
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Total	**2.425.624.940**	**8.794.277.833**
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(3.561.489.100)	(15.884.776.938)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		
RK PPKD	3.567.174.939	9.516.124.045
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	**2.431.310.779**	**2.425.624.940**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-
Lain-Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**2.431.310.779**	**2.425.624.940**

Amlapura, 25 Maret 2026
Atas nama dan mewakili manajemen,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KARANGASEM
RSUD KARANGASEM
DINAS KESEHATAN

dr. I Putu Angga Wirayogi
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 3 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar	*5.1*		
Kas dan Setara Kas	*5.1.1*	2.431.310.779	2.425.624.940
Piutang	*5.1.2*	12.199.787.170	11.125.981.852
Penyisihan Piutang	*5.1.2*	(612.152.950)	(601.246.483)
Persediaan	*5.1.3*	9.155.311.134	12.914.707.403
Jumlah Aset Lancar		**23.174.256.133**	**25.865.067.712**
Aset Tetap			
Harga Perolehan	*5.2*	279.862.498.479	274.118.715.502
Akumulasi Penyusutan	*5.2*	(187.578.336.326)	(174.726.794.829)
Jumlah Aset Tetap		**92.284.162.152**	**99.391.920.673**
Aset Lain-Lain	*5.3*	**269.068.345**	**318.886.877**
TOTAL ASET		**115.727.486.630**	**125.575.875.262**
KEWAJIAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Pendapatan Diterima Dimuka	*5.4*	12.060.000	24.120.000
Utang Belanja	*5.4*	36.126.511.206	27.654.697.900
JUMLAH KEWAJIBAN		**36.138.571.206**	**27.678.817.900**
EKUITAS			
Ekuitas Dana	*5.5*	79.588.915.424	97.897.057.362
JUMLAH EKUITAS		**79.588.915.424**	**97.897.057.362**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**115.727.486.630**	**125.575.875.262**

Amlapura, 25 Maret 2026
Atas nama dan mewakili manajemen,

dr. I Putu Angga Wirayogi
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024	Kenaikan Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
Pendapatan Asli Daerah yang Sah	*6.1*	93.847.703.295	89.790.956.920	4.056.746.375	5%
Jumlah Pendapatan Operasional		**93.847.703.295**	**89.790.956.920**	**4.056.746.375**	**5%**
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	*6.2*	22.018.761.753	27.264.163.228	(5.245.401.475)	-19%
Beban Barang dan Jasa	*6.2*	79.623.151.205	68.122.988.731	11.500.162.475	17%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	*6.2*	14.422.104.394	13.304.628.286	1.117.476.108	8%
Beban Penyisihan Piutang	*6.2*	13.451.641	25.226.119	(11.774.478)	-47%
Jumlah Beban Operasional		**116.077.468.993**	**108.717.006.364**	**7.360.462.630**	**7%**
Kegiatan Non Operasional					
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	6.3	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL	*6.3*	**(22.229.765.699)**	**(18.926.049.444)**	**(3.303.716.254)**	**17%**

Amlapura, 25 Maret 2026
Atas nama dan mewakili manajemen,

dr. I Putu Angga Wirayogi
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	**97.897.057.362**	**107.305.060.735**
Surplus/(Defisit) Lo	**(22.229.765.699)**	**(18.926.049.444)**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan:		
Koreksi peralatan dan mesin extracomptable	-	-
Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap		
Koreksi ekuitas lainnya		
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Piutang Lainnya	(29.786.560)	
Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya		
Koreksi Peralatan dan Mesin		
Koreksi Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin		
Transfer Masuk Aset Tetap dari Entitas Lain	736.612.293	
Koreksi Aset Tetap	(354.127.374)	
Koreksi Utang	13.345.652	9.001
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang		-
Koreksi Ekuitas lainnya	(11.595.190)	-
Koreksi Lainnya		1.913.025
RK PPKD	3.567.174.939	9.516.124.045
EKUITAS AKHIR	**79.588.915.424**	**97.897.057.362**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	92.477.534.012	87.244.225.030
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	(20.920.029.942)	(25.354.818.855)
Belanja Barang dan Jasa	(68.250.324.082)	(63.401.846.681)
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	**3.307.179.988**	**(1.512.440.506)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Arus Kas Keluar		
Belanja Peralatan dan Mesin	(2.742.062.943)	(13.435.267.084)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(1.276.126.146)	(937.069.348)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.850.480.000)	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	**(6.868.669.089)**	**(14.372.336.432)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Subsidi APBD	3.567.174.939	9.516.124.045
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	**3.567.174.939**	**9.516.124.045**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS TRANSITORS	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**5.685.839**	**(6.368.652.893)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**2.425.624.940**	**8.794.277.833**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**2.431.310.779**	**2.425.624.940**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

RSUD KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*)

1. UMUM

1.1 Riwayat Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem yang dulunya lebih dikenal dengan nama RSU Amlapura didirikan pada tanggal 20 Juli 1966. Mulai tanggal 14 April 2010, RSUD Kab. Karangasem melaksanakan PPK BLUD berdasarkan Perbup. Karangasem No 11 tahun 2010. Sesuai dengan SK. Menkes RI Nomor 486 / Menkes / SK/V / 1997, tanggal 20 Mei 1997, RSUD Kabupaten Dati II Karangasem ditingkatkan kelasnya dari kelas D menjadi kelas C. Menindaklanjuti SK. Menkes RI tersebut, Pemda Karangasem telah mengesahkan Perda Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kab. Dati II Karangasem. Kemudian pada tahun 2008 dengan terbitnya PP No. 41 Tahun 2007, maka struktur RSUD Karangasem dirubah berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2019, struktur organisasi RSUD Kabupaten Karangasem kembali dirubah dan dikukuhkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. Pengukuhan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Karangasem nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Tugas

Visi RSUD Karangasem yaitu "Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Paripurna Menuju Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana". Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi untuk mewujudkannya, diantaranya :

1. Membentuk SDM RSUD Karangasem yang cerdas dan profesional
2. Menyediakan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat
3. Menjamin Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Terstandarisasi.

Melihat Visi dan Misi tersebut, maka ditetapkanlah Tujuan RSUD Kabupaten Karangasem, diantaranya :

1. Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat
2. Tersedianya penunjang pelayanan yang berkualitas
3. Tersedianya tenaga kesehatan berkualitas sesuai dengan standard ketenagaan rumah sakit.
4. Terwujudnya kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit
5. Meningkatnya keefisiensi dan efektifitas keuangan RSUD.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas melaksanakan Urusan Wajib Bidang Kesehatan di Kabupaten Karangasem, yang meliputi program sebagai berikut :

1. Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
6. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
7. Pelayanan Kesehatan Rujukan

1.3 Jenis Pelayanan

Cakupan jenis pelayanan yang mampu diberikan oleh RSUD Kabupaten Karangasem mencakup pelayanan medik dan penunjang medik diantaranya:

1. Pelayanan Medik
   a. Perawatan Rawat Jalan mencakup Pelayanan Kesehatan Anak, Kebidanan dan Kandungan, Pelayanan Penyakit Dalam dan Umum, Pelayanan Bedah Umum dan Orthopedi, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelayanan THT, Pelayanan Penyakit Saraf,Pelayanan pemeriksaan Kulit dan Kelamin, Pelayanan pemeriksaanJiwa/Psikiatri dan Narkoba, Pelayanan Fisiotheraphy, Pelayanan Pemeriksaan Mata, Pelayanan TB DOTs, Pelayanan VCT, dan Pelayanan Konsultasi Gizi.
   b. Pelayanan Rawat Inap meliputi Pelayanan Kebidanan dan Kandungan (Bangsal Kamboja), Pelayanan Kesehatan Anak (Bangsal Melati), Pelayanan Penyakit Dalam (Bangsal Mawar), Pelayanan Penyakit Bedah (Bangsal Sekar Tunjung A dan B), Pelayanan Kelas I dan II (Bangsal Wijaya Kusuma 3, Bangsal Kenanga), Intermediate (Bangsal Puri Gangga) serta VIP (Wijaya Kusuma 2) untuk semua jenis spesialisasi.
   c. Pelayanan Gawat Darurat. Dilakukan dalam 24 jam sehari di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
   d. Pelayanan Operasi Pembedahan, yang telah dilengkapi dengan kamar operasi (OK), dengan 2 kamar operasi cito di IGD dan 4 kamar operasi elektif di IBS.
   e. Pelayanan Intensive dengan fasilitas ICU dan NICU.
   f. Pelayanan Hemodialisa atau cuci darah yang sampai saat ini mengoperasikan 1 Amlapura, 15 Maret 2024
   g. Pelayanan Rujukan yang terdiri dari menerima rujukan/merujuk dari/ke fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan oleh Unit
   h. Pelayanan Keluarga Berencana, baik perawatan maupun bagi perserta KB baru.
2. Pelayanan Penunjang Medik
   a. Pelayanan Farmasi. Pelayanan ini dilakukan melalui unit farmasi, diantaranya Apotik Poliklinik dan Apotik Rawat Inap.
   b. Pelayanan Laboratorium, mencakup Patologi Klinik dan Patologi Anatomi.
   c. Pelayanan Radiologi berupa Roentgen dan CT scan, serta USG 3 dimensi dan 4 dimensi.
   d. Pelayanan Gizi, mencakup pelayanan gizi di ruang rawat inap dan penyuluhan/konsultasi gizi baik bagi penderita rawat inap maupun penderita rawat jalan.
   e. Pelayanan Medico Legal merupakan pelayanan surat-surat keterangan terkait dengan masalah hukum.
   f. Pelayanan Transfusi dan Bank Darah. Pelayanannya meliputi penyediaan darah dan komponen darah bagi pasien yang dirawat di RSUD Karangasem.

1. UMUM - lanjutan

1.4 Struktur Organisasi

Terdapat Keputusan Bupati Karangasem Nomor. 347/HK/2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang di tetapkan tanggal 28 Agustus 2025. Sesuai keputusan tersebut terdapat perubahan susunan struktur organisasi RSUD Kabupaten Karangasem di Tahun 2025 sebagai berikut:

- **Direktur**	dr. I Putu Angga Wirayogi
- **Kepala Bagian Tata Usaha**	Ni Made Astini Handayani, SKM., M,Kes.
-Sub Bag. Umum & Kepegewaian	I Gede Muriana,.S.Kep.,Ners.,MM
-Sub Bag. Keuangan & Akuntansi	Ni Ketut Seri, SE.,MM
-Sub Bag. Sunprog & Evapor	Ida Bagus Made Redita, SKM.
- **Bidang Pelayanan**	dr. I Gusti Lanang Udiyana, S.Ked,MM
-Seksi Pelayanan Medis	dr. I Wayan Yogi Rangga Permana.
-Seksi Keperawatan	Ni Luh Suciati, S.Kep.,Ners.,M.Kes
- **Bidang Penunjang**	I Putu Suparditha, ST
-Seksi Penunjang Medis	Komang Agus Sariasa, SST.
-Seksi Penunjang Non Medis	Ni Putu Artini, SKM.
- **Bidang Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu**	I Nyoman Ada, S.Kes,H.MM
-Seksi Pengembangan SDM & Diklat	Ni Gst Ayu Putu Eka Librayanti, S.Keb
-Seksi Penjamin Mutu & Akreditasi	Ni Gusti Ayu Ketut Rusmawati, S.Si.Apt.

1.5 Sumber Daya Manusia

Pegawai RSUD Karangasem per 31 Desember Tahun 2025 seluruhnya berjumlah 888 orang terdiri dari 301 orang PNS, 424 orang PPPK, 96 orang tenaga kontrak dan 67 orang pegawai paruh waktu. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lain dan manajemen.

1.6 Lokasi Rumah Sakit

RSUD Karangasem berlokasi di di pusat kota Amlapura yaitu di Jalan Ngurah Rai No. 58 Amlapura

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

2.1 Dasar Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan tahun buku 2025 dan 2024 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu RSUD Kabupaten Karangasem juga menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

RSUD Kabupaten Karangasem menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas menggunakan basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Kebijakan akuntansi RSUD Kabupaten Karangasem ditetapkan menggunakan Peraturan Bupati Karangasem Nomor. 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tertanggal 8 Desember 2022.

2.2 Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

2.3 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai rupiahnya. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - lanjutan

2.4 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan/ akibat lainnya yang sah.
Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang dihitung sesuai dengan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. Kualitas piutang lancar, 1%
b. Kualitas piutang kurang lancar, 10%
c. Kualitas piutang diragukan, 50%
d. Kualitas piutang macet, 100%

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misal akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

2.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No 108 tahun 2016 adalah:

Objek	Rincian Objek
Barang pakai habis	Bahan Suku Cadang Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Obat-Obatan Persediaan untuk dijual/diserahkan Persediaan untuk tujuan strategis Natura dan pakan Persediaan Penelitian Persediaan dalam proses
Barang Tak Pakai Habis	Komponen
Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Persediaan diakui pada saat:
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikecualikan untuk persediaan obat-obatan.
Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:
a. Metode perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatkan *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
b. Metode periodic, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor. Maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*) dengan menggunakan metode FIFO atau Masuk Pertama Keluar Pertama yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - lanjutan

2.6 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

Batasan jumlah biaya kapitalisasi

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp500.000,00
b. Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan dipeliharan oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00. Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Tarif penyusutan aset tetap yaitu:

Golongan Aktiva	Masa Manfaat/ Tahun
Peralatan dan Mesin	
Alat Besar	10
Alat Angkutan	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5-10
Alat Pertanian	5
Alat Kantor dan Rumah tangga	5
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5
Peralatan dan Mesin	
Alat Kedokteran dan Kesehatan	5
Alat Laboratorium	5-10
Alat Persenjataan	5-10
Komputer	5
Alat Eksplorasi	5
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	5
Alat Bantu Eksplorasi	5
Alat Keselamatan Kerja	5
Alat Peraga	5
Peralatan Proses/Produksi	5
Rambu-Rambu	5
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung	25
Monumen	25
Menara	25
Tugu Titik Kontorl/Pasti	25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Jalan dan Jembatan	12
Instalasi	12
Jaringan	12

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - lanjutan

2.6 Aset Tetap - lanjutan

Aset tetap dapat direklasifikasi ke aset lainnya karena kondisi rusak berat dan/usang setelah mengajukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya dan;
b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Termasuk di dalam aset lainnya adalah:
   Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
   Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   Kemitraan dengan Pihak Ketiga
   Aset Tidak Berwujud;
   Aset Lain-Lain

2.8 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang beban diakui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai tanggal pelaporan belum dibayar.
b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

2.9 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.

2.10 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.

2.11 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima RKUD
b. Kas atas pendapatan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - lanjutan

2.12 Beban

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;
b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2.13 Belanja

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2BP.

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU terdiri dari Penjelasan Pos Pos sebagai berikut:

3.1 PENDAPATAN-LRA

Realisasi Penerimaan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2025 sebesar Rp92.477.534.011,92 dengan besaran presentase adalah 105,93% dari pendapatan yang dianggarkan yaitu Rp87.300.000. Dengan rincian dan perbandingan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebagai berikut :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Pendapatan Jasa Layanan		
1) Pendapatan Umum		
Tindakan/Operasi	127.072.875	134.254.250
Rawat Jalan	1.518.055.542	810.561.399
Rawat Inap	401.638.140	482.806.528
Rontgen	235.037.250	206.160.000
Administrasi	2.700.000	3.481.145
IRD	106.244.243	124.819.375
Jasa Konsultan Medik	8.972.500	10.868.500
Jasa Konsultasi Gizi	616.250	2.300.500
Laboratorium	1.350.311.270	715.922.100
Pelayanan Medik Legal	25.891.500	19.997.000
ICU	-	1.509.000
Pemulasaran Jenasah	434.710.000	396.840.000
Jumlah Saldo Pendapatan Umum	**4.211.249.570**	**2.909.519.797**
2) Pendapatan Penyedia Darah		
Layanan Penyedia Darah Umum	4.410.000	7.080.000
Layanan Penyedia Darah JKN	2.090.761.300	2.105.871.500
Jumlah Saldo Pendapatan Penyedia Darah	**2.095.171.300**	**2.112.951.500**
3) Pendapatan Ambulan		
Ambulan Umum	48.732.800	71.236.500
Ambulan JKN	170.867.500	167.024.600
Jumlah Saldo Pendapatan Ambulan	**219.600.300**	**238.261.100**
4) Pendapatan Farmasi		
Farmasi Umum	201.369.680	222.353.704
Farmasi JKN	24.644.475.005	23.789.662.827
Farmasi Jasa Raharja	159.610.864	172.934.485
Jumlah Saldo Pendapatan Farmasi	**25.005.455.549**	**24.184.951.016**
5) Pendapatan Dengan Kerjasama		
JKN	59.665.747.963	56.689.443.934
Askes Inhealth	-	98.010
Jasa Raharja	677.288.750	377.229.550
BPJS Tenaga Kerja	29.820.365	59.237.450
Jumlah Saldo Pendapatan Dengan Kerjasama	**60.372.857.078**	**57.126.008.944**

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - lanjutan

3.1 PENDAPATAN-LRA - lanjutan

b. Pendapatan Hasil Kerjasama		
Sewa Kantin	-	-
Sewa Ruang Belajar/Diklat	-	-
Pengguna Sarana & Prasarana RS oleh Pihak Lain	201.549.000	149.118.000
Penggunaan Jasa Lab oleh Pihak Lain	34.790.000	22.505.000
Jumlah Saldo Pendapatan Hasil Kerjasama	**236.339.000**	**171.623.000**
c. Pendapatan Lain-Lain		
Pendapatan Lain-Lain	65.450.098	156.993.639
Jasa Giro	119.606.118	206.241.034
Pendapatan Parkir	151.805.000	137.675.000
Jumlah Saldo Pendapatan Lain-Lain	**336.861.216**	**500.909.673**
Jumlah Saldo Pendapatan-LRA	**92.477.534.012**	**87.244.225.030**

Pendapatan tersebut sudah termasuk Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2025 dan 2024, pada Kas Bendahara dengan rincian sebagai berikut :

Total Pendapatan yang disetor per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	92.473.392.112	87.243.293.095
Kas di Bendahara Penerimaan pertanggal 31 Desember 2025 dan 2024	4.141.900	931.935
Total Penerimaan secara akrual Tahun 2025 dan 2024	**92.477.534.012**	**87.244.225.030**

3.2 BELANJA-LRA

Realisasi Belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2025 sebesar Rp96.039.023.112 dengan besaran presentase 102,7% dari belanja yang dianggarkan sebesar Rp93.449.936.183. Dengan rincian dan perbandingan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebagai berikut :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Belanja Pegawai		
Belanja Gaji dan Tunjangan (APBD)	-	4.626.545
Jasa Pelayanan (BLUD)	20.920.029.942	25.326.392.310
Honorarium Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	-	23.800.000
Jumlah Saldo Belanja Pegawai	**20.920.029.942**	**25.354.818.855**
b. Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Alat Tulis Kantor	486.209.057	639.340.500
Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor kertas dan Cover	120.196.350	92.115.000
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	28.408.695	31.512.280
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu fijar Bateray Kering	40.781.400	117.958.000
Belanja Perangko,Materai Benda Pos lainnya	7.500.000	6.300.000
Belanja Perabot Kantor	600.222.072	797.462.422
Belanja Kegiatan Kantor Lainnya	21.802.172.101	20.497.931.945
Belanja Pengisian Tab pemadam Kebakaran	-	19.275.000
Belanja Pengisian Tabung Gas	1.925.971.426	2.155.453.667
Belanja Bahan Perlengkapan Dinas	210.999.460	450.482.500
Belanja Pakaian Olahraga	6.200.460	110.625.000
Belanja Pakaian Dinas Harian	7.972.020	-
Belanja Bahan Komputer	44.121.474	105.147.500
Belanja Bahan Baku Bangunan	-	141.169.607
Belanja Obat-Obatan Pasien	16.150.768.458	15.135.530.058
Belanja Bahan Obat-Obatan Lainnya	73.903.800	106.897.995
Belanja Bahan Kimia/Laboratorium	2.797.469.646	3.883.853.159
Belanja Bahan Makanan/Natura Pasien dan Pegawai	2.295.543.695	2.039.982.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.116.415	146.810.000
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.345.000	-
Belanja Makanan dan Minuman Lapangan	68.204.995	21.503.000
Belanja Telpon	4.710.203	7.553.779
Belanja Listrik	1.310.797.890	1.239.623.328
Belanja Air	771.757.600	623.369.500
Belanja Kawat /Faximile/Internet	1.037.601.600	502.263.450
Belanja paket pengiriman	457.000	414.380
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	272.196.003	111.921.534
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	130.500	107.300

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - lanjutan

3.2 BELANJA-LRA - lanjutan

Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.800.000	4.800.000
Belanja Jasa Kalibrasi	175.165.770	122.600.000
Belanja Honorarium Narasumber/Moderator, Pembawa Acara	19.000.000	11.000.000
Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	81.498.432	103.685.058
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karangasem	24.480.000	-
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN RSUD Karangasem	6.201.524.167	-
Belanja honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan	-	3.600.000
Belanja Jasa Pengolahan Sampah Non Medis	1.562.038.757	1.723.031.748
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.373.839.539	6.192.492.132
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama	69.914.646	63.811.800
Belanja Jasa Iklan/Reklame	27.195.000	-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - Ongkos Tukang	71.040.000	94.920.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	608.467.950	592.860.250
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	28.050.000	18.900.000
Belanja Pemeliharaan Alat Besar	-	9.360.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	55.900.000	25.890.000
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Meubelair	15.500.000	19.900.000
Belanja Pemeliharaan Alat Bersih	48.463.710	24.100.000
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	60.158.250	81.387.000
Belanja Pemeliharaan Alat Dapur	3.378.800	9.207.500
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya	265.507.738	762.558.400
Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Telp	19.758.000	98.859.375
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Lainnya	392.340.970	298.335.726
Belanja Pemeliharaan Persone Komputer	112.371.438	71.150.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan	253.080.000	244.624.000
BelanJa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kesehatan	28.915.331	587.827.242
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	49.625.991
Belanja Pemeliharaan Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	-	105.729.199
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor	55.280.670	99.101.335
Belanja Pemeliharaan PLTD	32.020.000	19.991.100
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Lainnya	39.987.920	24.641.847
Belanja Jasa Berorientasi Bidang kesehatan	44.400.000	45.400.000
Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-Jasa konsultansi manajemen	97.586.605	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.650.090	6.408.320
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	8.210.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-
Belanja Jasa Diberikan Kepada Pihak Ketiga	645.011.107	142.733.380
Belanja Pakaian Teknis	-	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	23.226.900	239.649.600
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	510.077.204	752.240.048
Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi	50.909.255	-
Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya	1.654.179.062	1.442.650.000
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	26.710.000
Belanja suku cadang alat angkutan	78.490.000	45.798.000
Belanja suku cadang alat kedokteran	179.444.451	215.854.726
Belanja Suku Cadang Lainnya	84.915.000	27.600.000
Jumlah Saldo Belanja Barang dan Jasa	**68.250.324.082**	**63.401.846.681**

c. Belanja Modal

1) Belanja Peralatan dan Mesin

Pengadaan Alat Kantor Lainnya	-	11.500.000
Pengadaan Meubilair	-	46.080.000
Pengadaan Alat pembersih	-	7.800.000
Pengadaan Alat Pendingin	159.667.000	407.300.000
Pengadaan Alat Dapur	-	39.675.000
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	565.786.435
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	11.655.000
Pengadaan Alat Komunikasi Telp	-	18.986.550
Pengadaan Personal Komputer	346.023.750	332.100.000
Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	28.971.000	17.000.000
Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.804.000	37.500.000

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - lanjutan

3.2 BELANJA-LRA - lanjutan

Pengadaan Alat Kedokteran Umum	56.258.500	1.861.364.499
Pengadaan Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	2.436.640.000
Pengadaan Alat kedokteran mata	-	120.334.500
Pengadaan alat alat kedokteran Bedah	325.338.693	1.491.000.000
Pengadaan alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	1.720.000.000
Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Elektronika lainnya - Pembelian Alat TLD	-	212.430.000
Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi	-	356.885.100
Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	-	39.630.000
Belanja Modal Electric Generating Set (Genzet)	1.798.000.000	-
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	-	3.701.600.000
Jumlah Saldo Belanja Peralatan dan Mesin	**2.742.062.943**	**13.435.267.084**
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	938.163.212	937.069.348
Belanja Modal Pengadaan Tempat Ibadah	-	-
Belanja Modal Bangunan Instalasi	337.962.934	-
Jumlah Saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**1.276.126.146**	**937.069.348**
3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Modal, Jalan irigasi dan Jaringan Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa	-	-
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	2.850.480.000	-
Jumlah Saldo Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	**2.850.480.000**	**-**
4) Belanja Aset Lainnya		
Belanja Aset Lainnya	-	-
Jumlah Saldo Belanja Aset Lainnya	**-**	**-**
Jumlah Saldo Belanja-LRA	**96.039.023.112**	**103.129.001.968**

4. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yaitu Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos - pos berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**2.425.624.940**	**8.794.277.833**
Penggunaan SAL Pembiayaan	-	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(3.561.489.100)	(15.884.776.938)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		
RK PPKD	3.567.174.939	9.516.124.045
Koreksi Lain-Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun	**2.431.310.779**	**2.425.624.940**

5. POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun 2025 dan 2024.

5.1 ASET LANCAR

5.1.1 KAS SETARA KAS

Merupakan saldo Kas dan Setara Kas RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	4.141.900	931.935
Kas di BLUD	-	-
BPD Cabang Karangasem 0220100004731	1.809.791.682	2.390.694.558
Bank Mandiri KCP Amplapura 145-00-7555777-3	617.377.197	33.998.447
Jumlah Saldo Kas Setara Kas	**2.431.310.779**	**2.425.624.940**

5. POS-POS NERACA - lanjutan

5.1.2 PIUTANG

Merupakan saldo Piutang RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	12.199.787.170	11.125.981.852
Penyisihan Piutang Lainnya	(612.152.950)	(601.246.483)
Jumlah Saldo Piutang	**11.587.634.220**	**10.524.735.369**

Daftar piutang dari kegiatan operasional BLUD, sebagai berikut:

Keterangan	2025	2024
Rujukan JKN & Jamkesmas	7.130.000	7.130.000
Obat dan Alkes	-	292.119.462
Pasien Umum	487.806.025	487.806.025
Jasa Raharja	126.851.600	105.386.220
Ambulance	-	10.520.000
Dinkes Provinsi	-	945.000
RS Balimed Karangasem	705.000	15.331.000
Hasna Medika	3.898.000	19.259.600
BPJS Tenaga Kerja	1.871.260	19.939.840
BPJS Kesehatan	11.237.860.760	10.165.294.705
Dinkes Kab Karangasem	-	2.250.000
Obat Fee For Service	321.684.925	-
RS Kasna Medika	8.512.300	-
Klinik Pratama Nawadara	107.300	-
Viral Load (Lab)	720.000	-
TCM	2.640.000	-
Jumlah	**12.199.787.170**	**11.125.981.852**

Mutasi Penyisihan Piutang Lainnya

	2025	2024
Saldo Awal	601.246.483	575.984.595
Koreksi BPK	(2.545.174)	
Penambahan	13.451.641	25.261.888
Jumlah	**612.152.950**	**601.246.483**

5.1.3 PERSEDIAAN

Merupakan saldo Persediaan RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Persediaan Barang	9.155.311.134	12.914.707.403
Jumlah Saldo Persediaan	**9.155.311.134**	**12.914.707.403**

Rincian persediaan sebagai berikut:

Keterangan	2025	2024
ATK	78.453.118	36.645.750
ATK berbasis IT (bahan komputer)	15.475.494	58.692.600
Kertas & Cover	19.873.440	276.000
Obat	4.919.164.130	5.905.975.422
Bahan Habis Pakai	3.920.822.065	6.534.096.206
Bahan Makanan Pokok	113.838.713	206.589.425
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	83.809.014	121.840.000
Alat Listrik	3.875.160	50.592.000
Jumlah	**9.155.311.134**	**12.914.707.403**

5. POS-POS NERACA - lanjutan

5.2 ASET TETAP

Merupakan saldo Aset Tetap RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Harga Perolehan		
Tanah	7.324.203.420	7.292.093.400
Peralatan dan Mesin	152.735.322.747	151.150.255.936
Gedung dan Bangunan	115.124.244.365	113.848.118.219
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.460.297.262	1.609.817.262
Aset Tetap lainnya	2.547.500	2.547.500
Konstruksi dalam pengerjaan	215.883.184	215.883.184
Jumlah Saldo Harga Perolehan	**279.862.498.479**	**274.118.715.502**
Akumulasi Penyusutan		
Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(130.993.493.796)	(123.002.307.752)
Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(55.581.483.153)	(50.858.169.163)
Akm. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.003.359.377)	(866.317.914)
Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Saldo Akumulasi Penyusutan	**(187.578.336.326)**	**(174.726.794.829)**
Nilai Buku Aset Tetap	**92.284.162.152**	**99.391.920.673**

Mutasi atas aset tetap RSUD Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

Aset Tetap	Saldo Awal	Debet	Kredit	Saldo Akhir
Tanah	7.292.093.400	32.110.020	-	7.324.203.420
Peralatan dan Mesin	151.150.255.936	1.749.679.643	164.612.832	152.735.322.747
Gedung dan Bangunan	113.848.118.219	1.276.126.146	-	115.124.244.365
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.609.817.262	2.850.480.000	-	4.460.297.262
Aset Tetap lainnya	2.547.500	-	-	2.547.500
Konstruksi dalam pengerjaan	215.883.184	-	-	215.883.184
Jumlah	**274.118.715.502**	**5.908.395.809**	**164.612.832**	**279.862.498.479**

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal	Debet	Kredit	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	(123.002.307.752)	155.601.364	8.146.787.408	(130.993.493.796)
Gedung dan Bangunan	(50.858.169.163)	-	4.723.313.990	(55.581.483.153)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(866.317.914)	-	137.041.463	(1.003.359.377)
Jumlah	**(174.726.794.829)**	**155.601.364**	**13.007.142.861**	**(187.578.336.326)**

5.3 ASET LAINNYA

Merupakan saldo Aset Lainnya RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024 :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lain-Lain	97.480.845	88.469.377
Aset Tidak Berwujud	171.587.500	230.417.500
Jumlah Saldo Aset Lainnya	**269.068.345**	**318.886.877**

Aset lain-lain merupakan aset yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta yang dimanfaatkan Pihak lain.

5.4 KEWAJIBAN

Merupakan saldo Kewajiban RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek		
Pendapatan Diterima Dimuka	12.060.000	24.120.000
Utang Belanja	36.126.511.206	27.654.697.900
Jumlah Saldo Kewajiban Jangka Pendek	**36.138.571.206**	**27.678.817.900**

5. POS-POS NERACA - lanjutan

5.4 KEWAJIBAN - lanjutan

Pendapatan diterima dimuka merupakan pembayaran sewa ATM dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total Sewa (Rp)	Pendapatan Tahun 2025 (Rp)	Akumulasi Amortisasi Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2025 (Rp)
PT.Bank BPD Bali (11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2027)	60.300.000	12.060.000	48.240.000	12.060.000
Total	**60.300.000**	**12.060.000**	**48.240.000**	**12.060.000**

Rincian Utang Belanja

Keterangan	2025	2024
Jasa pelayanan	7.693.914.947	6.723.061.619
PMI	577.456.000	210.394.000
Ambulance	3.845.600	4.790.000
Sampah medis	125.831.487	120.451.484
Bahan habis pakai	17.700.619.099	10.875.507.932
Obat lainnya	7.183.414.066	7.974.485.807
Bahan kimia/lab	2.338.282.317	1.395.249.557
Gas medis	-	117.678.226
Air	64.247.600	46.603.400
Sewa alat kedokteran	264.350.000	64.200.000
RS Kasih Ibu	24.415.000	4.395.000
PT. Prodia	26.931.000	5.410.000
Iuran BPJS 4%	-	112.470.875
RS Balimed Karangasem	114.804.090	-
Pembacaan TLD	8.400.000	-
Jumlah	**36.126.511.206**	**27.654.697.900**

5.5 EKUITAS

Merupakan saldo ekuitas RSUD Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2025 dan 2024

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ekuitas Dana		
Total Aset	115.727.486.630	125.575.875.262
Total Kewajiban	(36.138.571.206)	(27.678.817.900)
Jumlah Saldo Ekuitas Dana	**79.588.915.424**	**97.897.057.362**
Kewajiban dan Ekuitas Dana		
Total Kewajiban Ekuitas Dana	36.138.571.206	27.678.817.900
Total Ekuitas Dana	79.588.915.424	97.897.057.362
Jumlah Saldo Kewajiban dan Ekuitas Dana	**115.727.486.630**	**125.575.875.262**

6. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Kabupaten Karangasem dalam Tahun 2025.

6.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Merupakan saldo realisasi dari pendapatan operasional yang diperoleh RSUD Kabupaten Karangasem selama tahun 2025 dan 2024 :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.847.703.295	89.790.956.920
Jumlah Pendapatan Operasional	**93.847.703.295**	**89.790.956.920**
Rekonsialiasi Pendapatan:		
Pendapatan LRA	92.477.534.012	87.244.225.030
Pelunasan piutang tahun sebelumnya	(10.345.248.937)	(8.114.495.037)
Penambahan piutang BLUD	11.703.358.220	10.637.106.927
Pengakuan pendapatan diterima dimuka	12.060.000	24.120.000
Total	**93.847.703.295**	**89.790.956.920**

6. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL - lanjutan

6.2 BEBAN OPERASIONAL

Merupakan saldo realisasi dari beban operasional yang diperoleh RSUD Kabupaten Karangasem selama tahun 2025 dan 2024 :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Beban Pegawai	22.018.761.753	27.264.163.228
Beban Barang dan Jasa	79.623.151.205	68.122.988.731
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14.422.104.394	13.304.628.286
Beban Penyisihan Piutang	13.451.641	25.226.119
Jumlah Saldo Beban Operasional	**116.077.468.993**	**108.717.006.364**
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.857.046.315	8.780.849.881
Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.369.186.616	4.347.701.942
Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	137.041.463	117.246.463
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	58.830.000	58.830.000
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**14.422.104.394**	**13.304.628.286**

6.3 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Merupakan pengakuan nilai Surplus/Defisit atas kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Kabupaten Karangasem selama tahun 2025 dan 2024, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kegiatan Operasional		
Pendapatan LO	93.847.703.295	89.790.956.920
Beban LO	(116.077.468.993)	(108.717.006.364)
Kegiatan Non Operasional		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Surplus/Defisit LO	**(22.229.765.699)**	**(18.926.049.444)**

7. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 25 Maret 2026. Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan dan penyesuaian terhadap laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Karangasem

BLUD PUSKESMAS Se-KABUPATEN KARANGASEM

PER 31 DESEMBER 2025

`

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor: 00047/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	5
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	70
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN	75

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
Jln. Raya Perasi, Desa Pertima, Karangasem
Telp. (0363) 2787684
Website : https://dinkes.karangasemkab.go.id/
Email : puskesmaskarangasem1@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	dr. Gede Andre Darmawan
Nomor Telepon	:	(0363) 2787684
Alamat kantor	:	Jalan Raya Perasi, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem I Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem I Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem I Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No 13
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskeamas Karangasem I Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem I Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem I Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem I

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I



dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 19840910 201408 1 001

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00047/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Karangasem I

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Karangasem I ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00057/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 06 April 2026

Pande Putu Agus Eka Pertama, AK., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN DAERAH	*4.1.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		0,00	3.101.137.200,00	0,00	3.019.840.283,00
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	22.086.327,73	0,00	20.873.908,04
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**3.123.223.527,73**	**0,00**	**3.040.714.191,04**
BELANJA	*4.1.2*				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		1.966.463.418,00	1.831.310.840,00	93,13	1.660.626.455,00
Belanja Barang dan Jasa		2.439.241.813,00	1.623.665.314,00	66,56	1.803.131.261,00
Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		**4.405.705.231,00**	**3.454.976.154,00**	**78,42**	**3.463.757.716,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		477.800.000,00	335.392.350,00	70,20	394.503.900,00
Belanja Gedung dan Bangunan		107.000.000,00	106.223.780,00	99,27	1.015.656.295,00
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**584.800.000,00**	**441.616.130,00**	**75,52**	**1.410.160.195,00**
JUMLAH BELANJA		**4.990.505.231,00**	**3.896.592.284,00**	**78,08**	**4.873.917.911,00**
SURPLUS/DEFISIT		**(4.990.505.231,00)**	**(773.368.756,27)**	**15,50**	**(1.833.203.719,96)**
JUMLAH SILPA		**(4.990.505.231,00)**	**(773.368.756,27)**	**15,50**	**(1.833.203.719,96)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I

dr. Gede Andre Darmawan
NIP.198409102014081001

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**823.638.874,62**	**917.828.432,58**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**823.638.874,62**	**917.828.432,58**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(773.368.756,27)	(1.833.203.719,96)
Sub Total (3+4)	**50.270.118,35**	**(915.375.287,38)**
Pendapatan APBN/APBD	294.738.123,00	1.739.014.162,00
Pendapatan BOK	271.104.873,00	0,00
Setoran ke kas Daerah	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**616.113.114,35**	**823.638.874,62**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I

dr. Gede Andre Darmawan
NIP.198409102014081001

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET	*4.2.1*		
ASET LANCAR	*4.2.1.1*		
Kas di Bendahara Pengeluaran		40.952.426,00	113.340.127,00
Kas pada BLUD		575.160.688,35	710.298.747,62
Piutang Operasional BLUD		3.558.400,00	5.249.700,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(35.584,00)	(52.497,00)
Persediaan BLUD		565.719.546,47	513.935.516,07
JUMLAH ASET LANCAR		**1.185.355.476,82**	**1.342.771.593,69**
ASET TETAP	*4.2.1.2*		
Tanah		132.840.000,00	132.840.000,00
Peralatan dan Mesin		4.686.396.490,82	4.283.860.440,82
Gedung dan Bangunan		6.083.224.054,86	5.977.000.274,86
Jalan, Irigasi dan Jaringan		76.864.790,00	76.864.790,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
JUMLAH NILAI BUKU ASET TETAP		**10.979.325.335,68**	**10.470.565.505,68**
Akumulasi Penyusutan		(5.826.868.856,82)	(5.247.035.634,12)
JUMLAH ASET TETAP		**5.152.456.478,86**	**5.223.529.871,56**
ASET LAINNYA	*4.2.1.3*		
Aset Tetap Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		614.263.688,23	614.263.688,23
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		(600.407.142,23)	(600.407.142,23)
JUMLAH ASET LAINNYA		**13.856.546,00**	**13.856.546,00**
JUMLAH ASET		**6.351.668.501,68**	**6.580.158.011,25**
KEWAJIBAN	*4.2.2*		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	*4.2.2.1*		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		154.030.379,00	153.072.394,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**154.030.379,00**	**153.072.394,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**154.030.379,00**	**153.072.394,00**
EKUITAS	*4.2.3*		
Ekuitas		6.197.638.122,68	6.427.085.617,25
JUMLAH EKUITAS		**6.197.638.122,68**	**6.427.085.617,25**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**6.351.668.501,68**	**6.580.158.011,25**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I

dr. Gede Andre Darmawan
NIP.198409102014081001

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan
PENDAPATAN	*4.3.1*			
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		3.100.045.900,00	3.022.510.783,00	77.535.117,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)		271.104.873,00	0,00	271.104.873,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		1.685.395.892,89	0,00	1.685.395.892,89
Pendapatan Usaha Lainnya		22.044.719,73	20.873.908,04	1.170.811,69
Pendapatan APBN/APBD		294.738.123,00	1.739.014.162,00	(1.444.276.039,00)
JUMLAH PENDAPATAN		**5.373.329.508,62**	**4.782.398.853,04**	**590.930.655,58**
BEBAN	*4.3.2*			
Beban Pegawai		1.852.112.964,00	1.650.389.886,00	201.723.078,00
Beban Barang dan Jasa		3.237.916.962,49	3.238.528.680,15	(611.717,66)
Beban Penyisihan Piutang		35.584,00	46.497,00	(10.913,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		579.833.222,70	554.996.411,00	24.836.811,70
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**5.669.898.733,19**	**5.443.961.474,15**	**225.937.259,04**
SURPLUS(DEFISIT) OPERASIONAL		**(296.569.224,57)**	**(661.562.621,11)**	**364.993.396,54**
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	19.792,00	(19.792,00)
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) NON OPERASIONAL		**0,00**	**19.792,00**	**(19.792,00)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**(296.569.224,57)**	**(661.542.829,11)**	**364.973.604,54**
POS LUAR BIASA		0,00	0,00	
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(296.569.224,57)**	**(661.542.829,11)**	**364.973.604,54**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem

dr. Gede Andre Darmawan
NIP. 198409102014081001

BLUD PUSKESMAS KARANGASEM I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	**6.427.085.617,25**	**5.385.342.212,94**
SURPLUS/DEFISIT-LO	(296.569.224,57)	(661.542.829,11)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	67.121.730,00	1.703.286.233,42
EKUITAS AKHIR	**6.197.638.122,68**	**6.427.085.617,25**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I

dr. Gede Andre Darmawan
NIP.198409102014081001

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3.101.137.200,00	3.019.840.283,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	271.104.873,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	22.086.327,73	20.873.908,04
Pendapatan APBN/APBD	294.738.123,00	1.739.014.162,00
Jumlah arus Kas Masuk	**3.689.066.523,73**	**4.779.728.353,04**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.831.310.840,00	1.660.626.455,00
Belanja Barang dan Jasa	1.623.665.314,00	1.803.131.261,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.454.976.154,00**	**3.463.757.716,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**234.090.369,73**	**1.315.970.637,04**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	335.392.350,00	394.503.900,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	106.223.780,00	1.015.656.295,00
Perolehan jalan,irigasi dan jaringan	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**441.616.130,00**	**1.410.160.195,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(441.616.130,00)**	**(1.410.160.195,00)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Setoran Kas ke Kas Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Penyetoran Modal	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	276.929.859,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**276.929.859,00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	276.929.859,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**276.929.859,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**(207.525.760,27)**	**(94.189.557,96)**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**823.638.874,62**	**917.828.432,58**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**616.113.114,35**	**823.638.874,62**
menurut neraca		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I

dr. Gede Andre Darmawan
NIP.198409102014081001

Catatan Atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Karangasem I

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Karangasem I

UPTD Puskesmas Karangasem I adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Karangasem I merupakan sebuah Puskesmas Rawat Jalan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761 / HK / 2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, UPTD Puskesmas Karangasem I ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

b. Tempat Kedudukan

UPTD Puskesmas Karangasem I beralamat di Jalan Raya Perasi, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Telp 0363 2787684, Email: puskesmaskarangasem1@gmail.com.

Luas wilayah kerja Puskesmas Karangasem I adalah 47,36 km_2 dengan batas wilayah sebagai berikut:

1) Utara : Wilayah kerja Puskesmas Abang I dan Puskesmas Bebandem
2) Timur : Wilayah kerja Puskesmas Karangasem II
3) Selatan : Selat Lombok
4) Barat : Wilayah kerja Puskesmas Manggis II

UPTD Puskesmas Karangasem I memiliki tiga puskesmas pembantu (pustu) diantaranya yaitu:

1) Pustu Asak;
2) Pustu Subagan; dan
3) Pustu Padang Kerta.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Karangasem I adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);

17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem; dan
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

d. Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai UPTD Puskesmas Karangasem I

1) Visi UPTD Puskesmas Karangasem I

Menjadi Puskesmas dengan Pelayanan Prima dalam Mewujudkan Karangasem Sehat.

2) Misi UPTD Puskesmas Karangasem I

Misi UPTD Puskesmas Karangasem I diantaranya, yaitu:

a) Meningkatkan derajat kesehatan, melalui pemberdayaan masyarakat;
b) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan;
c) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
d) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungannya;

e) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan yang bermutu.

3) Motto UPTD Puskesmas Karangasem I

Motto UPTD Puskesmas Karangasem I adalah CTM (Cepat Tepat Memuaskan)

e. Program Pelayanan UPTD Pusksmas Karangasem I

Program Pelayanan UPTD Puskesmas Karangasem I terdiri dari:

1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas

   Pada UPTD Puskesmas Karangasem I ada 5 kegiatan esensial dan 1 kegiatan perkesmas. Lima Kegiatan Esensial tersebut meliputi:

   a) Pelayanan Kesehatan Keluarga (Ibu, Anak dan Keluarga Berencana)
   b) Pelayanan Gizi Masyarakat
   c) Pelayanan Promosi Kesehatan
   d) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
   e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

   Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/ praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

3) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

   a) Upaya Pelayanan UKGS/UKGM

      UKGS/UKGM adalah suatu komponen dari UKS dan merupakan tehnis pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak sekolah dan di posyandu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak serta bumil.

   b) Upaya Pelayanan Lansia

      Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

   c) Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
   d) Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
   e) Upaya Kesehatan Yankestradkom.
   f) Upaya Kesehatan Kerja.
   g) Upaya Kesehatan Indera.

4) Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi dan Laboratorium
   a) Upaya Kesehatan Perorangan
      Upaya kesehatan perorangan di UPTD Puskesmas Karangasem I meliputi: poli umum, poli gigi dan mulut, ruang KIA KB dan imunisasi, ruang konsultasi gizi, laboratorium, Farmasi, kasir, loket pendaftaran dan konseling.
   b) Farmasi
      Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
   c) Laboratorium
      Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

f. Jenis-jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Karangasem I

Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Karangasem I berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Karangasem I Nomor: 02 Tahun 2023 tentang Jenis Layanan UPTD Puskesmas Karangasem I Tahun 2023, sebagai berikut:

1) Jenis Pelayanan Administrasi, meliputi:
   a) Surat Keterangan Sehat
   b) Surat Keterangan Istirahat
   c) Rekomendasi Praktek
2) Jenis Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu sebagai berikut:
   a) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial meliputi:
      (1) Pelayanan Promosi Kesehatan;
      (2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
      (3) Pelayanan Kesehatan Keluarga;
      (4) Pelayanan Gizi;
      (5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
      (6) Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
   b) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan meliputi:
      (1) Pelayanan Kesehatan Sekolah;
      (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupresur;
      (3) Pelayanan Kesehatan Lansia;
      (4) Pelayanan Kesehatan Jiwa;
      (5) Pelayanan Kesehatan Indera;
      (6) Pelayanan Kesehatan Olah Raga (Kesorga);
      (7) Pelayanan Kesehatan Haji;
3) Jenis Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Rawat Jalan meliputi:
   a) Pelayanan Loket dan Rekam Medis;

b) Pelayanan Pemeriksaan Umum;
c) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
d) Pelayanan Tindakan / Gawat Darurat (UGD);
e) Pelayanan MTBS;
f) Pelayanan Lansia;
g) Pelayanan Kesehatan Gigi;
h) Pelayanan Laboratorium;
i) Pelayanan Farmasi;
j) Pelayanan Imunisasi;
k) Pelayanan Gizi bersifat UKP; dan
l) Pelayanan Kesehatan Keselamatan Kerja

g. Sasaran, Indikator, Tenaga Kerja

Berikut disajikan Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

NO	UPAYA KESEHAT	KEGIATAN		INDIKATOR	JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMA
1	2	3	3		4	5	6	7	8	9	
UKM ESENSIAL											
1	Pelayanan Kesehatan Keluarga	Kesehatan Ibu	1	mendapat pelayanan antenatal	bumil	%	100	847	808	95	**86,7**
			2	mendapat pelayanan antenatal	bumil	%	100	847	754	89	
			3	mendapatkan pelayanan	bumil	%	100	847	765	90	
			4	Cakupan Ibu hamil komplikasi	bumil	%	90	169	122	72	
			5	kesehatan sesuai standar (Pn)	bulin	%	100	798	683	86	
			6	tenaga kesehatan sesuai standar	bulin	%	100	798	700	88	
			7	pertama yang mendapat	bayi	%	100	798	692	87	
		Kesehatan Bayi	1	yang mendapat pelayanan sesuai	bayi	%	100	798	695	87	**71,4**
			2	neonatus	bayi	%	80	130	34	26	
			3	bayi 29 hari - 12 bln (Kunjungan	bayi	%	100	870	879	101	
		Upaya Kesehatan Balita dan	1	12 - 59 bulan)sesuai standar	Balita	%	100	3138	3140	100	**100,0**
			2	anak balita sakit yang dilayani	Balita	%	100	1103	1103	100	
			3	Intervinsi Dini Tumbuh Kembang	APRAS	%	100	1402	1402	100	
		Upaya Kesehatan Sekolah	1	dasar yang mendapatkan	siswa	%	100	10663	10122	95	**94,5**
			2	peserta didik SD/MI	siswa	%	100	6265	6119	98	
			3	peserta didik siswa SMP/MTs	siswa	%	100	4398	4003	91	
		Pelayanan Keluarga	1	Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	akseptor	%	70	10875	8154	75	**78,1**
			2	persalinan	akseptor	%	100	798	648	81	
		Pelayanan Calon Pengantin	1	Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Skrining Kesehatan	Catin	%	100	886	57	6,43	**6,43**
		Pelayanan Kesehatan Usila	1	Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	orang	%	100	7821	8898	114	**100,0**

	Pelayanan Promosi Kesehatan	PHBS 5 tatanan	1	Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	%	90	1050	1050	100	**100,0**
			2	Tatanan institusi Pendidikan /sekolah	Sekolah	%	50	42	42	100	
			3	Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	%	80	3	3	100	
			4	Tatanan TTU	TTU	%	40	5	5	100	
			5	Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	%	45	5	5	100	
		Pemberdayaan Masyarakat	1	Pemberdayaan melalui Penyuluhan	Kader UKBM	%	100	5	5	100	**100,0**
		Pembinaan UKBM	1	Pembinaan Posyandu	Posyandu	%	80	79	79	100	**100,0**
			2	Persentase Posyandu Aktif	Posyandu	%	100	79	79	100	
		Penyuluhan NARKOBA	1	Penyuluhan Narkoba Minimal 5 kali dalam Setahun	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	5	5	3	60	**60,0**
		Promosi Kesehatan	1	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan Jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	Masyarakat	kali	12	12	12	100	**108,3**
			2	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar gedung Puskesmas) minimal 12 kali setahun	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	12	12	14	117	
		Program Pengembangan	1	Pembinaan UKBM Lain	kelompok peduli kesehatan	kali	3	5	5	100	**100,0**
			2	Pergerakan Germas 5 indikator	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	3	5	5	100	
			3	Sosialisasi/pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	kali	1	1	1	100	
2	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Pengawasan Kualitas Air	a	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/layak	penduduk	%	95	67693	67693	100	**100,0**
			b	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/IKL	Sarana	%	100	453	453	100	

			c	Persentase Pengambilan sampel air	Sampel Air	%	100	84	84	100	
			d	Persentase kualitas air minum di penyelenggara yang memenuhi syarat	Sarana	%	85	13	13	100	
		2. STBM	a	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	%	100	19443	19443	100	**100,0**
			b	Jumlah Desa ODF	Desa	Desa	55	5	5	100	
			c	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	%	100	5	5	100	
		3. Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang			Sarana	%	90	54	54	100	**100,0**
		4. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)			Sarana	%	25	344	344	100	**100,0**
		5. Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola			Fasyankes	%	100	5	5	100	**100,0**
3		6. Persentase Rumah Sehat			Rumah	%	25	19443	18523	95	**95,3**
	Pelayanan Gizi		1	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	bumil	%	80	22	20	91	**67,6**
			2	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	bumil	%	84	808	752	93	
			3	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	bayi	%	60	349	246	70	
			4	Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	bayi	%	70	255	246	96	
			5	Persentase Cakupan Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	balita	%	85	28	28	100	
			6	Persentase Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	rematri	%	58	4636	4636	100	
			7	Persentase Cakupan vitamin A pada Balita	balita	%	90	1761	1713	97	
			8	Persentase Anemia pada ibu hamil	ibu hamil	%	33	808	22	3	
			9	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	bayi	%	2,5	692	26	4	
			10	Persentase Balita Kurus (Wasting)	balita	%	7,0	2001	28	1	
			11	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	balita	%	5,02	2001	51	3	
		Upaya	12	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	balita	%	85	2177	2001	92	

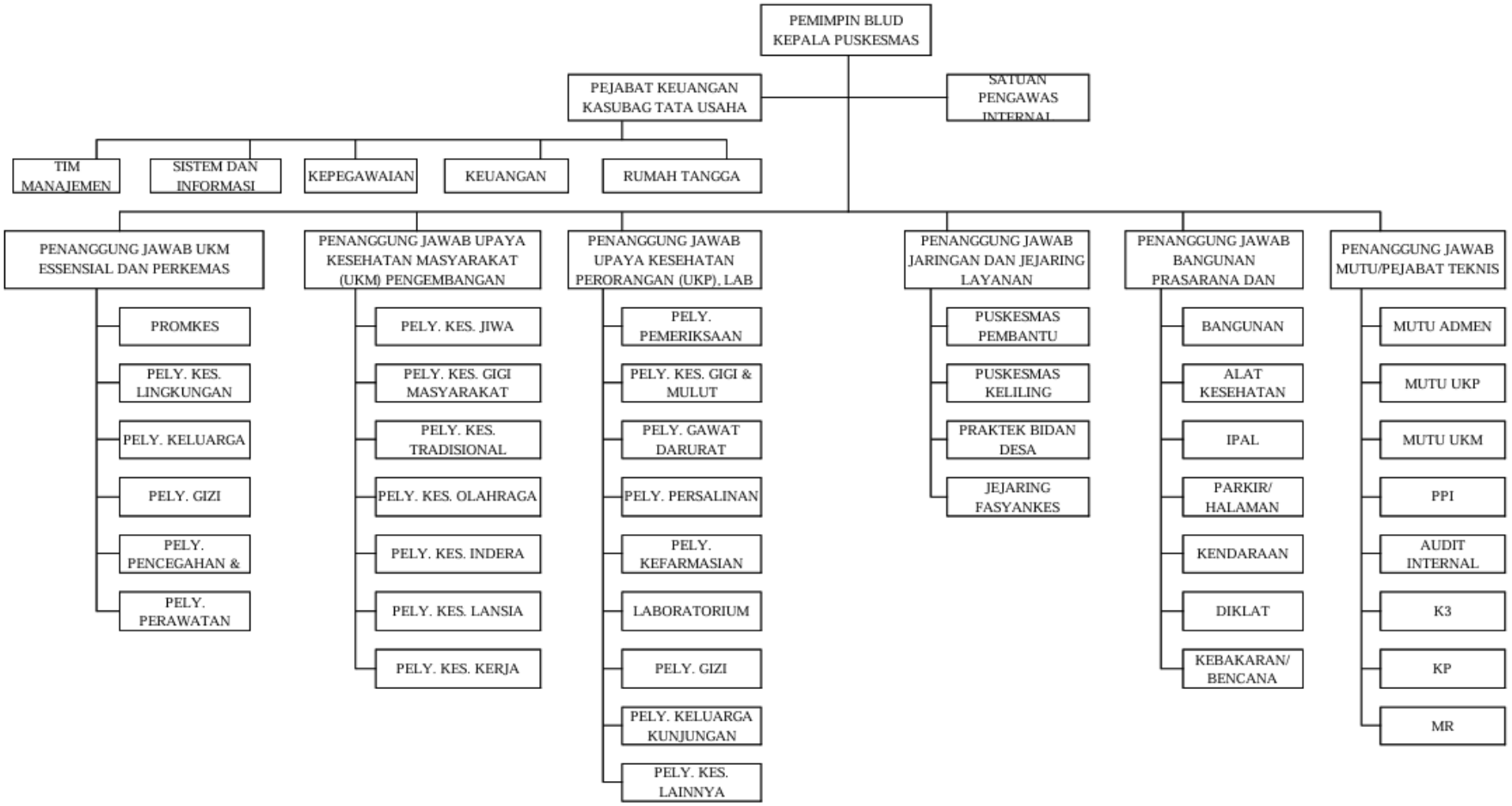
		Perbaikan Gizi	13	Persentase Cakupan Skrining anemia remaja putri	rematri	%	90	1601	1541	96	
4		Masyarakat	14	Persentase Cakupan Ibu Nifas Mendapat kapsul Vitamin A	Ibu Nifas	%	82	692	692	100	
5	Upaya Pengendalian Penyakit	P2M	1	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)	orang	%	90	70	33	47	**47,1**
		PTM	2	Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	bayi-usia sekolah	%	100	814	871	107	**107,0**
			3	Cakupan Wanita Usia Subur (WUS) yang mendapatkan skrening IVA	keluarga	%	70	10006	53	1	**0,5**
			1	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Orang	%	>90	70	33	47	**80,3**
			2	Succsess Rate (Angka Keberhasilan Pengobatan)	orang	%	>90	58	54	93	
		TB Paru	3	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	orang	%	100	340	342	101	
			1	Prosentase Penderita Positif Malaria Yang Diobati sesuai Standar	orang	%	100	1	1	0	**0,8**
		Malaria	2	Angka Kesakitan Malaria /Annual Parasite Incident (API)	orang	per 1.000 pddk	<1	64	1	2	
			1	Angka Prevalensi Kusta	orang	per 10.000 pddk	<1	6	3	5000	**2550,0**
		Kusta	2	Angka Kesembuhan / RFT Rate	orang	%	100	2	2	100	
		Diare	1	Pelayanan penderita diare sesuai standar	orang	%	100	427	427	100	**100,0**
		Hepatitis	1	Pelayanan deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	orang	%	100	847	491	57,97	**57,97**
			1	Prosentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	orang	%	100	46	46	100	**78,3**
		ISPA	2	Cakupan penemuan pneumonia balita	orang	%	100	46	26	57	
		Demam Berdarah	1	Angka Kesakitan DBD/Insiden Rate (IR) DBD	orang	100.000 pc	50	32	364	1138	**616,8**
		Dengue	2	Angka Bebas Jentik (ABJ)	rumah	%	>95	2000	1920	96	

Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV / AIDS	1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	orang	%	100	1171	850	73	**72,6**
Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	1	Pelayanan kasus GHPR ditatalaksana standar	orang	%	100	700	906	129	**129,4**
Kecacingan	1	Pelayanan POPM kecacingan	orang	%	100	9828	9830	100	**100,0**
Surveilance Penyakit	1	Kelengkapan Laporan	puskesmas	%	90	53	53	100	**100,0**
	2	Ketepatan laporan	puskesmas	%	100	53	53	100	
	3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal/alert Penyakit Potensial KLB	%	100	133	133	100	
Imunisasi	2	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan antigen baru	orang	%	100	870	871	100	
	3	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	orang	%	100	792	792	100	**99,8**
	4	Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	orang	%	80	1033	1033	100	
	5	Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	orang	%	80	895	890	99	
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	Presentase meningkatnya desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	desa	%	70	5	5	100	**99,8**
	2	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	735	735	100	

			3	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	410	410	100	
			4	Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining penyakit tidak menular sesuai standar di posbindu	orang	%	100	16641	16484	99	
			5	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	140	140	100	
UKM PENGEMBANGAN											
1	Pelayanan Kesehatan Tradisional		1	Persentase Pembinaan tanaman obat keluarga pada keluarga	Keluarga	%	3	622	629	101	**67,0**
			2	Persentase Pembinaan pada kelompok Asuhan mandiri	Kelompok Asman	%	60	0	0	0	
			3	Persentase Pembinaan penyehat tradisional	Orang	%	70	12	12	100	
	Pelayanan Kesehatan Olah Raga		1	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah raga diwilayah kerjanya	puskesmas	puskesmas	12	1	1	100	**100,0**
			2	Persentase calon jamaah haji yang melakukan tes kebugaran	Jamaah haji	%	100	27	27	100	
2	Kesehatan Gigi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	1	Persentase Desa yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	desa	%	60	5	5	100	**100,0**
4	Upaya Kesehatan Gigi Sekolah	Pelayanan Kesehatan Gigi Sekolah	1	Persentase Pembinaaan Kesehatan Gigi di TK	TK	%	80	20	20	100	
5			2	Persentase Pembinaan dan Bimbingan Sikat Gigi Massal pada SD/MI	SD/MI	%	100	42	42	100	
6	Upaya Kesehatan Kerja	Pelayanan Kesehatan Kerja	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	puskesmas	puskesmas	12	1	1	100	**100,0**
			2	Persentase Pos UKK yang dibina	Pos UKK	%	100	1	1	100	
UKP											
1	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	1	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat sesuai standar	FKTP	%	70	1	1	100	**100,0**
PELAYANAN PERKESMAS											

1		Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	1	Persentase keluarga rawan yang dibina	keluarga	%	80	189	189	100	**100,0**
PELAYANAN KEFARMASIAN											
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		1	Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	puskesmas	%	100	1	1	100	**100,0**
			2	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Obat	%	96	96	96	100	
PELAYANAN											
1	Pemeriksaan Laboratorium		1	Kemampuan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis di wilayah kerja puskesemas	Jenis Pemeriksaan Spesimen	%	20	38339	5185	14	**56,8**
			2	Kemampuan pengujian terhadap sampel lingkungan di wilayah kerja puskesmas	Jenis Pengujian Sampel	%	50	84	84	100	
											156,4

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Karangasem I



Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Karangasem I terdiri dari:

1) Kepala Puskesmas;
2) Tata Usaha; dan
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
8) Penanggung Jawab Mutu

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Puskesmas
   Wewenang:
   a) Memeriksa dan menganalisa laporan-laporan kegiatan stafnya dan sekaligus mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.
   b) Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang di bawahnya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

   Tanggung Jawab:
   a) Pelaksanaan tugas sehari-hari
   b) Melakukan pengawasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
   c) Mengadakan koordinasi dengan kepala kecamatan dan lintas sektor dalam upaya pembangunan Kesehatan di wilayah kerja;
   d) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka miningkatkan derajat Kesehatan;
   e) Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan dibantu oleh staf puskesmas;
   f) Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan;
   g) Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Induk, Pustu, Pusling dan lain-lain.
2) Tata Usaha
   Wewenang:
   a) Menilai kelengkapan administrasi rumah tangga;
   b) Menilai kelengkapan administrasi kepegawaian; dan
   c) Menilai Kelengkapan administrasi keuangan.

   Tanggung Jawab:
   a) Memonitoring data kepegawaian (kinerja);
   b) Memonitoring kinerja rumah tangga; dan
   c) Memonitoring kinerja keuangan.
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
   Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Tanggung Jawab:
a) Promosi Kesehatan
b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
c) Pelayanan Kesehatan Keluarga
d) Pelayanan Gizi
e) Pelayanan P2P
f) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Pengembangan;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Pengembangan

Tanggung Jawab:
a) Pelayanan Kesehatan Jiwa
b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional
d) Pelayanan Kesehatan Olahraga
e) Pelayanan Kesehatan Indera
f) Pelayanan Kesehatan Lansia
g) Pelayanan Kesehatan Kerja

5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab membina jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;

b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengidentifikasi dan Menganalisa Data Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja jejaring pelayanan Puskesmas

7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas Tanggung Jawab:
Bertanggung Jawab memelihara sarana dan prasarana dan peralatan puskesmas
a) Bangunan
b) Alat Kesehatan
c) IPAL
d) Parkir/Halaman
e) Kendaraan
f) Diklat
g) Kebakaran/Kecelakaan

8) Penanggung Jawab Mutu
Wewenang:
a) Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua penanggung jawab mutu;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Memelihara Dokumen/Rekaman;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses pelayanan
Tanggung Jawab:
a) Menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem mutu manajemen
b) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjamin muta dalam proses diklat berdasarkan standar mutu

i. Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Pusksmas Karangasem I

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Karangasem I Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. Gede Andre Darmawan NIP. 19840910 201408 1 001	Pemimpin BLUD
2.	I Made Meiyasa, S.Kep., Ners NIP. 19740502 199703 1 006	Pejabat Keuangan
3.	I Gusti Putu Aryawangsa, S.Tr.Gz NIP. 19750305 2009021 1 002	Pejabat Teknis Bidang UKM Essensial
4.	Gede Eka Sutrisno, A.Md.Kes NIP. 19780428 200501 1 006	Pejabat Teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas

No	Nama	Jabatan
5.	dr. Ni Luh Ratnadi NIP. 19860801 201412 2 003	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	Ni Made Sri Arie Kosasih, S.Kep., Ns NIP. 19841114 200604 2 001	Pejabat Teknis Bidang Mutu
7.	Ni Made Setiawati, A.Md.Keb NIP. 19780505 200312 2 013	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
8.	Ni Gusti Made Arini, A.Md.Keb NIP. 19680906 198902 2 010	Pejabat Teknis Bidang Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

j. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Karangasem I per 31 Desember 2025 sebanyak 79 dan 31 Desember 2024 sebanyak 78 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 47 Orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 30 Orang
- Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil : 2 Orang

Jumlah : 79 Orang

Jumlah pegawai berdasarkan pegawai berdasarkan profesi yaitu:

No	Jabatan	2025			
		PNS	Non PNS	PPPK	Jumlah
a.	**Tenaga Medis**				
	Struktural Medis				
1	Dokter Spesialis	0	0	0	0
2	Dokter Umum	3	0	0	3
3	Dokter Gigi	1	0	0	1
4	Perawat	12	0	9	21
5	Bidan	14	0	7	21
6	Kesehatan Masyarakat	1	0	0	1
7	Sanitarian	1	0	1	2
8	Pranata Laboratorium	2	0	0	2
9	Nutrisionis	2	0	0	2
10	Perawat Gigi	4	0	0	4
11	Apoteker	1	0	0	1
12	Ass. Apoteker	2	0	0	2
13	Penyuluh Kes. Masyarakat Muda	0	0	0	0
14	Tenaga Administrasi Kesehatan	0	0	1	1
15	Tenaga Penunjang Kesehatan	0	2	0	2
	Jumlah Tenaga Medis	**43**	**2**	**18**	**63**
b.	**Tenaga Non Medis**				
	Struktural Non Medis				
1	Pengadministrasi Perkatoran	1	0	11	12
2	Pengadministrasi Umum	1	0	0	1

No	Jabatan	2025			
		ASN	Non ASN	PPPK	Jumlah
3	Bendahara	1	0	0	1
4	Cleaning Service	0	0	0	0
5	Sopir	0	0	0	0
6	Petugas Keamanan	0	0	0	0
7	JMD	0	0	0	0
8	Jumantik	0	0	0	0
9	Operator Layanan Operasional	1	0	0	1
10	Pengelola Umum Operasional	0	0	1	1
	Jumlah Tenaga Non Medis	**4**	**0**	**12**	**16**
	Total Pegawai	**47**	**2**	**30**	**79**

k. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Karangasem I melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokan sebagai berikut:

a) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan
b) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

l. Pembiayaan UPTD Puskesmas

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikthisar Kebijakan Akuntasi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Karangasem I mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Karangasem I.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi Puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD

Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan setara kas;
   b) Investasi jangka pendek;
   c) Piutang dari kegiatan blud;
   d) Persediaan;
   e) Investasi jangka panjang;
   f) Aset tetap;
   g) Aset lainnya;
   h) Kewajiban jangka pendek;
   i) Kewajiban jangka panjang; dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.
3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a) Pembayaran Pegawai;
   b) Pembayaran Barang;
   c) Pembayaran Bunga; dan
   d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
   a) Ekuitas awal;
   b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
   c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
      (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
      (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
      (3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
   d) Ekuitas akhir.

h. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh blud.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Serara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Piutang

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam janga waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal penagihan pertama, kedua, dan ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c) Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Pembentukan Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa maníaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
b. Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakompabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat LaboratoriumLingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produkai Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	Overhaul	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan / Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
InstalasiPengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);
b) Aset Sewaan;
c) Aset yang tidak digunakan:
d) Beban yang ditangguhkan;
e) Lainnya

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai “Aset Kerjasama Operasi”.

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiaban.
Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.
Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Puskesmas kepada pihak lain. Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi Puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (*cut off*). Beban yang masih

harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.
d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas; dan
b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal.
c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.
d) Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
e) Pada akhir periode pelaporan, nilai ekuitas yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah selisih dari aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

   Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

   (1) Pendapatan usaha rawat jalan;
   (2) Pendapatan usaha rawat darurat;
   (3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Hibah
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

c) Pendapatan APBD
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

d) Pendapatan Usaha Lainnya
Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
   (1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
   (2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
   (3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
   (4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;

b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.

d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.

f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.

g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
   (1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.

(2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.
(3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.
(4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.
c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.
e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai
   Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai neger sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Puskesmas yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
b) Beban Barang
   Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
c) Beban Jasa
   Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
d) Beban Pemeliharaan
   Beban Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja pemeliharaan. Beban pemeliharaan terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.

e) Beban Langganan Daya/Jasa
Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.

f) Beban Perjalanan Dinas
Beban Perialanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas adalah biaya yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain
Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang teriadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutanberlalunya waktu.

i) Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

j) Beban Operasional Lainnya
Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar
Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset
Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya
Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

(1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban

pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.

(2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Karangasem I yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. UPTD Puskesmas Karangasem I terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 20.146.378.3-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Karangasem I Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan-LRA

Jumlah realiasasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.123.223.527,73 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.040.714.191,04 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	3.101.137.200,00	0,00	3.019.840.283,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	22.086.327,73	0,00	20.873.908,04
	Jumlah	**0,00**	**3.123.223.527,73**	**0,00**	**3.040.714.191,04**

4.1.2 Belanja-LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksanya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.896.592.284,00 atau 78,08% dari anggaran sebesar Rp 4.990.505.321,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 4.873.917.911,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	4.405.705.231,00	3.454.976.154,00	78,42	3.463.757.716,00
b.	Belanja Modal	584.800.000,00	441.616.130,00	75,52	1.410.160.195,00
	Jumlah	**4.990.505.231,00**	**3.896.592.284,00**	**78,08**	**4.873.917.911,00**

a. Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.454.976.154,00 atau 78,42% dari anggaran sebesar Rp 4.405.705.231,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 3.463.757.716,00. Rincian atas jumlah Belanja Operasional sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Pegawai	1.966.463.418,00	1.831.310.840,00	93,13	1.660.626.455,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	2.439.241.813,00	1.623.665.314,00	66,56	1.803.131.261,00
c.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.405.705.231,00**	**3.454.976.154,00**	**78,42**	**3.463.757.716,00**

Rincian dari Belanja Operasional adalah sebagai berikut

1) Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.831.310.840,00 atau 93,13% dari anggaran sebesar Rp 1.966.463.418,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.660.626.455,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	32.217.000,00	30.424.682,00	94,44	0,00
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	33.417.000,00
3	Belanja Pegawai BLUD	1.934.246.418,00	1.800.886.158,00	93,11	1.627.209.455,00
	Jumlah	**1.966.463.418,00**	**1.831.310.840,00**	**93,13**	**1.660.626.455,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.623.665.314,00 atau 66,56% dari anggaran sebesar Rp 2.439.241.813,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.803.131.261,00. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	12.760.000,00	0,00	0,00	58.209.298,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	52.004.800,00	12.091.800,00	23,25	2.721.200,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.394.600,00	2.115.883,00	0,00	0,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.691.200,00	2.434.500,00	65,95	0,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.860.000,00	5.338.600,00	38,52	0,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	620.000,00	599.400,00	96,68	0,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	22.788.600,00
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.432.600,00	40.183.600,00	72,49	0,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	52.118.400,00	26.956.600,00	51,72	10.720.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	108.100.000,00	86.550.000,00	80,06	168.000.000,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.440.000,00	10.787.580,00	80,26	0,00
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	805.504,00	647.280,00	80,36	1.054.876,00
13	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.006.880,00	809.100,00	80,36	1.318.724,00
14	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	352.228.000,00	313.109.500,00	88,89	373.215.873,00
15	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.770.779.829,00	1.122.041.471,00	63,36	1.165.102.690,00
	Jumlah	**2.439.241.813,00**	**1.623.665.314,00**	**66,56**	**1.803.131.261,00**

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 441.616.130,00 atau 75,52% dari anggaran sebesar Rp 584.800.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.410.160.195,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	477.800.000,00	335.392.350,00	70,20	394.503.900,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.000.000,00	106.223.780,00	99,27	1.015.656.295,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**584.800.000,00**	**441.616.130,00**	**75,52**	**1.410.160.195,00**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 477.800.000,00 atau 70,20% dari anggaran sebesar Rp 335.392.250,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.015.656.295,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	477.800.000,00	335.392.350,00	70,20	232.275.300,00
	Jumlah	**477.800.000,00**	**335.392.350,00**	**70,20**	**232.275.300,00**

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 106.223.780,00 atau 99,27% dari anggaran sebesar Rp 107.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.015.656.295,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	107.000.000,00	106.223.780,00	99,27	1.015.656.295,00
	Jumlah	**107.000.000,00**	**106.223.780,00**	**99,27**	**1.015.656.295,00**

4.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran menunjukkan jumlah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari pedapatan BLUD. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp40.952.426,00 dan Rp113.340.127,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran APBD	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
BOK - PT Bank Negara Indonesia - (No. Rek 1590087876) a.n 1050083 BOKPKMKARANGASEMI	40.952.426,00	113.340.127,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**40.952.426,00**	**113.340.127,00**

b. Kas di BLUD

Kas pada BLUD menunjukkan jumlah kas yang berada di rekening BLUD yang digunakan untuk aktivitas operasioanal. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas masing-masing sebesar Rp575.160.688,35 dan Rp710.298.747,62, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	285.000,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	27,00
3) Kas di Bank		
BLUD PT Bank Pembangunan Daerah Bali - (No. Rek 0220105002249) a.n BLUD UPTD Puskesmas Karangasem I	574.875.688,35	710.298.720,62
Jumlah Kas pada BLUD	**575.160.688,35**	**710.298.747,62**

c. Piutang Layanan

Piutang Operasional BLUD pada UPTD Puskesmas Karangasem I per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.558.400,00 dan Rp5.249.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Layanan	3.558.400,00	5.249.700,00
Jumlah Piutang	**3.558.400,00**	**5.249.700,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada UPTD Puskesmas Karangasem I per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp35.584,00 dan Rp52.497,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Penyisihan Piutang	(35.584,00)	(52.497,00)
Jumlah Penyisihan Piutang	**(35.584,00)**	**(52.497,00)**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang per 31 Desember 2025:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan
Piutang	3.558.400,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**3.558.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**35.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang per 31 Desember 2024:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan
Piutang JKN	5.249.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Bruto	**5.249.700,00**	0,00	0,00	0,00
& Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**52.497,00**	0,00	0,00	0,00
Piutang Netto	**5.197.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. Persediaan

Persediaan BLUD merupakan barang habis pakai yang digunakan dalam operasional UPTD Puskesmas Karangasem I. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp565.719.546,47 dan Rp513.935.516,07 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Alat Tulis Kantor	773.850,00	2.537.100,00
Bahan Komputer	15.684.300,00	5.456.700,00
Kertas dan Cover	9.136.500,00	7.641.000,00
Barang Cetakan	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00
Benda Pos	0,00	500.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	486.016.906,47	482.376.616,07
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	6.785.400,00	2.768.000,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00
Alat Listrik	8.192.500,00	3.522.400,00
Perabotan Kantor	25.510.020,00	9.133.700,00
Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	13.620.070,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	**565.719.546,47**	**513.935.516,07**

Berikut disajikan saldo mutasi Persediaan BLUD per 31 Desember 2025:

URAIAN	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Tulis Kantor	2.537.100,00	6.276.978,00	8.040.228,00	773.850,00
Bahan Komputer	5.456.700,00	15.684.300,00	5.456.700,00	15.684.300,00
Kertas dan Cover	7.641.000,00	14.650.500,00	13.155.000,00	9.136.500,00
Barang Cetakan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	482.376.616,07	1.856.598.047,89	1.852.957.757,49	486.016.906,47
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	2.768.000,00	16.136.520,00	12.119.120,00	6.785.400,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	3.522.400,00	10.217.900,00	5.547.800,00	8.192.500,00
Perabotan Kantor	9.133.700,00	37.440.300,00	21.063.980,00	25.510.020,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	88.921.113,00	75.301.043,00	13.620.070,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**513.935.516,07**	**2.046.925.658,89**	**1.995.141.628,49**	**565.719.546,47**

Berikut disajikan saldo mutasi Persediaan BLUD per 31 Desember 2024:

URAIAN	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Tulis Kantor	21.657.250,00	16.565.200,00	35.685.350,00	2.537.100,00
Bahan Komputer	7.075.200,00	9.800.000,00	11.418.500,00	5.456.700,00
Kertas dan Cover	0,00	28.371.600,00	20.730.600,00	7.641.000,00
Barang Cetakan	0,00	58.410.000,00	58.410.000,00	0,00
Barang Kuasi	159.250,00	0,00	159.250,00	0,00
Benda Pos	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	199.967.000,80	1.734.875.044,43	1.452.465.429,16	482.376.616,07
Bahan Bakar Minyak/ Gas		0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan		0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	4.330.900,00	9.616.000,00	11.178.900,00	2.768.000,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura		0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	7.883.000,00	5.297.500,00	9.658.100,00	3.522.400,00
Perabotan Kantor	0,00	22.666.500,00	13.532.800,00	9.133.700,00
Bibit Ikan		0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi		0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	85.241.418,00	85.241.418,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya		0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**241.072.600,80**	**1.972.843.262,43**	**1.699.980.347,16**	**513.935.516,07**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.152.456.478,86 dan Rp5.223.529.817,56 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Tanah	132.840.000,00	132.840.000,00
2) Peralatan dan Mesin	4.686.396.490,82	4.283.860.440,82
3) Gedung dan Bangunan	6.083.224.054,86	5.977.000.274,86
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.864.790,00	76.864.790,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**10.979.325.335,68**	**10.470.565.505,68**
Akumulasi Penyusutan	(5.826.868.856,82)	(5.247.035.634,12)
Nilai Buku	**5.152.456.478,86**	**5.223.529.871,56**

Rincin mutasi Aset Tetap tahun 2025, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	132.840.000,00	0,00	0,00	132.840.000,00
2) Peralatan dan Mesin	4.283.860.440,82	402.536.050,00	0,00	4.686.396.490,82
3) Gedung dan Bangunan	5.977.000.274,86	106.223.780,00	0,00	6.083.224.054,86
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.864.790,00	0,00	0,00	76.864.790,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**10.470.565.505,68**	**508.759.830,00**	**0,00**	**10.979.325.335,68**
Akumulasi Penyusutan	**5.247.035.634,12**	**0,00**	**0,00**	**5.826.868.856,82**
Nilai Buku	**5.223.529.871,56**			**5.152.456.478,86**

Rincin mutasi Aset Tetap tahun 2024, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	132.840.000,00	0,00	0,00	132.840.000,00
2) Peralatan dan Mesin	3.905.156.540,82	394.503.900,00	15.800.000,00	4.283.860.440,82
3) Gedung dan Bangunan	4.961.343.979,86	1.015.656.295,00	0,00	5.977.000.274,86
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.864.790,00	0,00	0,00	76.864.790,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**9.076.205.310,68**	**1.410.160.195,00**	**15.800.000,00**	**10.470.565.505,68**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	3.152.744.161,12	347.031.490,00	0,00	3.499.775.651,12
3) Gedung dan Bangunan	1.487.787.804,00	201.559.521,00	0,00	1.689.347.325,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.507.258,00	6.405.400,00	0,00	57.912.658,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi	**4.692.039.223,12**	**554.996.411,00**	**0,00**	**5.247.035.634,12**
Nilai Buku				
1) Tanah	132.840.000,00			132.840.000,00
2) Peralatan dan Mesin	752.412.379,70			784.084.789,70
3) Gedung dan Bangunan	3.473.556.175,86			4.287.652.949,86
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.357.532,00			18.952.132,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00			0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00			0,00
Jumlah Nilai Buku	**4.384.166.087,56**			**5.223.529.871,56**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.856.546,00 dan Rp13.856.546,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Aset Lainnya	13.856.546,00	13.856.546,00
Jumlah	**13.856.546,00**	**13.856.546,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2025, sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	614.263.688,23	614.263.688,23
Jumlah Harga Perolehan	**614.263.688,23**	**614.263.688,23**
Akumulasi Penyusutan	(600.407.142,23)	(600.407.142,23)
Nilai Buku	**13.856.546,00**	**13.856.546,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2024, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	616.763.688,23	0,00	2.500.000,00	614.263.688,23
Jumlah Harga Perolehan	**616.763.688,23**	**0,00**	**2.500.000,00**	**614.263.688,23**
Akumulasi Penyusutan				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	602.907.142,23	0,00	2.500.000,00	600.407.142,23
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**602.907.142,23**	**0,00**	**2.500.000,00**	**600.407.142,23**
Nilai Buku				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00			0,00
2) Aset Lain-lain	13.856.546,00			13.856.546,00
Jumlah Niali Buku	**13.856.546,00**			**13.856.546,00**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) UPTD Puskesmas Karangasem I per 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00

b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp154.030.379,00 dan Rp153.072.394,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	148.928.211,00	128.532.418,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	5.102.168,00	24.539.976,00
Jumlah Belanja Yang Masih Harus Dibayar	**154.030.379,00**	**153.072.394,00**

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

4.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang UPTD Puskesmas Karangasem I per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.197.638.122,68 dan Rp6.427.085.617,25 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Ekuitas Awal	6.427.085.617,25	5.385.342.212,94
2) Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(296.569.224,57)	(661.542.829,11)
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	67.121.730,00	1.703.286.233,42
Ekuitas Akhir	**6.197.638.122,68**	**6.427.085.617,25**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Lapoaran Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Karangasem I per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.373.329.508,62 dan Rp4.782.398.853,04, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3.100.045.900,00	3.022.510.783,00
b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	271.104.873,00	0,00
c) Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
d) Pendapatan Hibah	1.685.395.892,89	0,00
e) Pendapatan Usaha Lainnya	22.044.719,73	20.873.908,04
f) Pendapatan APBN/APBD	294.738.123,00	1.739.014.162,00
Jumlah	**5.373.329.508,62**	**4.782.398.853,04**

4.3.2 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.669.898.733,19 dan Rp5.443.961.474,15 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Pegawai	1.852.112.964,00	1.650.389.886,00
b. Beban Barang dan Jasa	3.237.916.962,49	3.238.528.680,15
c. Beban Penyisihan Piutang	35.584,00	46.497,00
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	579.833.222,70	554.996.411,00
e. Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasional	**5.669.898.733,19**	**5.443.961.474,15**

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1.852.112.964,00	1.643.589.886,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	6.800.000,00
	1.852.112.964,00	**1.650.389.886,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:
Beban Barang:

	2025	2024
Beban Baarang Habis Pakai		
Beban Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	54.029.600,00	33.670.350,00
Beban Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran		1.000.000,00
Beban Bahan - Bahan Lainnya	12.119.120,00	11.178.900,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkut	6.572.750,00	14.844.976,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	102.269.587,00	66.728.188,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8.040.228,00	35.685.350,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	13.155.000,00	9.443.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	51.271.600,00	58.410.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	5.456.700,00	11.418.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Prabot Kantor	21.063.980,00	13.532.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	5.547.800,00	25.458.100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.193.000,00	83.922.700,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	0,00	22.788.600,00
Beban Obat - Obatan - Obat	1.750.688.170,49	1.472.880.175,15
Beban Makanan dan Minuman Rapat	96.458.300,00	93.487.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	23.651.200,00	24.564.500,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.773.200,00	57.337.800,00
Beban Bahan - Bahan Kimia	75.301.043,00	85.241.418,00
Beban Bahan dan Penyiapan PMT	0,00	52.722.800,00
Beban Bahan Kuasai	0,00	159.250,00
Beban Natura dan Pakan Natura	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	313.109.500,00	0,00
Jumlah Beban Barang	**2.619.200.778,49**	**2.175.974.407,15**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	86.550.000,00	168.000.000,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	26.963.010,00	23.969.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah Medis	29.079.570,00	22.590.720,00
Beban Tagihan Telepon	16.985.916,00	10.380.573,00
Beban Tagihan Air	8.346.800,00	4.268.800,00
Beban Tagihan Listrik	75.973.875,00	91.501.712,00
Beban Kawat/Faksimili/TV Berlangganan	12.664.000,00	6.660.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.330.000,00	1.641.500,00
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Keuangan	19.980.000,00	19.758.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	183.819.673,00	350.699.918,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2.439.500,00	4.995.000,00
Beban Transport	0,00	226.800.000,00
Beban Administrasi PMT	0,00	1.900.800,00
Beban Jasa Pengelolaan PMT	0,00	7.907.100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.787.580,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	647.280,00	1.054.876,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	809.100,00	1.318.724,00
Beban Kursus, Sosialisasi/Bimbingan, Teknis Workshop/Seminar	0,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	0,00
Jumlah Beban Jasa	**484.176.304,00**	**943.446.723,00**

Beban Pemeliharaan:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Tanah - Lapangan - Tanah Untuk Taman	17.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	8.635.800,00	5.239.200,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Alat Pengolahan Air Kotor	21.645.000,00	13.320.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	7.986.000,00	11.616.100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	8.750.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah - Alat Pendingin	9.498.750,00	8.326.600,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum	9.077.580,00	3.722.940,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	20.290.000,00	36.750.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	8.500.000,00	6.000.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman	0,00	19.228.500,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Listrik Lainnya	0,00	2.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	23.156.750,00	0,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	**134.539.880,00**	**106.703.340,00**

Beban Perjalanan Dinas:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	12.404.210,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**0,00**	**12.404.210,00**

c. Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang

Jumlah Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi:

	2025	2024
Beban Penyusutan	579.833.222,70	554.996.411,00
Jumlah	**579.833.222,70**	**554.996.411,00**

Beban Penyisihan Piutang:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	35.584,00	46.497,00
Jumlah	**35.584,00**	**46.497,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

		2025	2024
a	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
b	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00
c	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	19.792,00
	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0,00**	**19.792,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka - angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup UPTD Puskesmas Karangasem I dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Karangasem I bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Karangasem I bersamaan dengan penerbitan laporan auditor independen tanggal 06 April 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00047/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Karangasem I
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Karangasem I untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Karangasem I tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Karangasem I bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

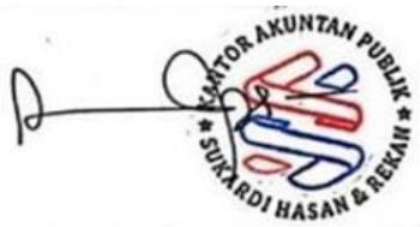
Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan design dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Terdapat jasa giro yang belum diakui sebagai pendapatan di LRA Puskesmas Tahun 2025.

   Atas permasalahn tersebut kami sarankan agar pendapatan jasa giro diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun di Laporan Operasional.

2. Tata Kelola Aktiva Tetap dan Persediaan Perlu ditingkatkan

   Dari hasil audit yang kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:

   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Karangasem I ke Pemda Karangasem.

      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:

   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.

3. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Operasional

   Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Karangasem I dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Karangasem I.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Auntansi yang terantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

Atas masalah tersebut, kami saranankan agar Puskesmas Karangasem I meningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Karangasem I dibidang standar akuntansi pemerintahan no 13.

4. Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Karangasem I pada SIPD belum tepat waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Karangasem I pada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka -angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Karangasem I dan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00047/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Karangasem I
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Karangasem I untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

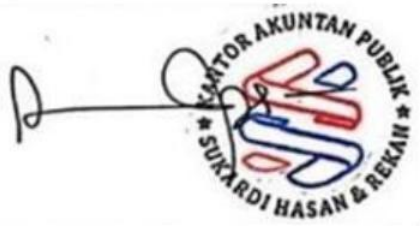
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Karangasem Imerupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Bebandem... terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Karangasem I sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Karangasem Iberbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Karangasem I belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Karangasem Imelalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Karangasem Iberbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

dan perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor : 00048/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	5
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
RESUME PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	73
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	78

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya, Karangasem - Kode Pos 80811
Telp. 0363 (4301005), email : puskesmaskarangasem02@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II KABUPATEN KARANGASEM YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, M.M
Nomor Telepon	:	(0363) 4301005
Alamat Kantor	:	Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya, Karangasem
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Karangasem II

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem II Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem II Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem II Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem II Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem II Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem II Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Karangasem II Kabupaten Karangasem.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Karangasem II



(dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, M.M)

NIP. 19870903 201503 1 001

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00048/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Karangasem II

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00050/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/IV/2025 tanggal 15 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 06 April 2026

Pande Putu Agus Eka Pertama, AK., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

UPTD PUSKESMAS KARAGASEM II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan	*4.1.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		0,00	2.782.093.557,00	0,00	2.504.683.239,00
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		0,00	10.099.127,63	0,00	17.804.190,45
Jumlah Pendapatan		**0,00**	**2.792.192.684,63**	**0,00**	**2.522.487.429,45**
Belanja Daerah	*4.1.2*				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai		1.745.449.607,00	1.568.561.625,00	89,87	1.254.060.386,00
Belanja Barang dan Jasa		1.881.553.680,00	1.464.819.626,00	77,85	2.027.030.981,19
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		**3.627.003.287,00**	**3.033.381.251,00**	**83,63**	**3.281.091.367,19**
Belanja Modal					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		245.000.000,00	157.713.531,00	64,37	285.600.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	52.106.567,90
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		**245.000.000,00**	**157.713.531,00**	**64,37**	**337.706.567,90**
Jumlah Belanja		**3.872.003.287,00**	**3.191.094.782,00**	**82,41**	**3.618.797.935,09**
Surplus (Defisit)		**(3.872.003.287,00)**	**(398.902.097,37)**	**10,30**	**(1.096.310.505,64)**
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran		**(3.872.003.287,00)**	**(398.902.097,37)**	**10,30**	**(1.096.310.505,64)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem II

dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, M.M
NIP. 19870903 201503 1 001

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**370.611.879,84**	**498.426.684,39**
Penggunaan SAL	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**370.611.879,84**	**498.426.684,39**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(398.902.097,37)	(1.096.310.505,64)
Sub Total (3+4)	**(28.290.217,53)**	**(597.883.821,25)**
Pendapatan APBN/APBD	176.037.828,00	968.495.701,09
Pendapatan BOK	267.205.761,00	0,00
Setoran Ke Kas Daerah	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**414.953.371,47**	**370.611.879,84**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala Puskesmas Karangasem II

dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, M.M
NIP. 19870903 201503 1 001

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
Aset	*4.2.1*		
Aset Lancar	*4.2.1.1*		
Kas di Bendahara Pengeluaran		29.901.140,00	90.805.238,00
Kas pada BLUD		385.052.231,47	279.806.641,84
Piutang Operasional BLUD		12.586.300,00	45.180.200,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(125.863,00)	(451.802,00)
Persediaan BLUD		286.520.463,68	284.432.863,89
Jumlah Aset Lancar		**713.934.272,15**	**699.773.141,73**
Aset Tetap	*4.2.1.2*		
Tanah		432.000.000,00	432.000.000,00
Peralatan dan Mesin		4.805.158.011,73	4.573.919.314,73
Gedung dan Bangunan		4.743.540.060,90	4.743.540.060,90
Jalan, Irigasi dan Jaringan		25.792.500,00	25.792.500,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		**10.006.490.572,63**	**9.775.251.875,63**
Akumulasi Penyusutan		(7.022.623.370,73)	(6.576.135.611,73)
Nilai Buku Aset Tetap		**2.983.867.201,90**	**3.199.116.263,90**
Aset Lainnya	*4.2.1.3*		
Aset Tetap Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-Lain		581.152.432,54	581.152.432,54
Penyusutan Aset Lain-Lain		(580.369.153,54)	(580.369.153,54)
Jumlah Aset Lainnya		**783.279,00**	**783.279,00**
Jumlah Aset		**3.698.584.753,05**	**3.899.672.684,63**
Kewajiban	*4.2.2*		
Kewajiban Jangka Pendek	*4.2.2.1*		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		159.966.981,00	155.982.932,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**159.966.981,00**	**155.982.932,00**
Jumlah Kewajiban		**159.966.981,00**	**155.982.932,00**
Ekuitas	*4.2.3*		
Ekuitas		3.538.617.772,05	3.743.689.752,63
Jumlah Ekuitas		**3.538.617.772,05**	**3.743.689.752,63**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**3.698.584.753,05**	**3.899.672.684,63**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem II

dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, M.M
NIP. 19870903 201503 1 001

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan	%
Pendapatan	*4.3.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		2.736.913.357,00	2.515.933.739,00	220.979.618,00	8,78
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		267.205.761,00	0,00	267.205.761,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		10.099.127,63	17.804.190,45	(7.705.062,82)	(43,28)
Pendapatan APBN/APBD		176.037.828,00	968.495.701,09	(792.457.873,09)	(81,82)
Jumlah Pendapatan		**3.190.256.073,63**	**3.502.233.630,54**	**(311.977.556,91)**	(8,91)
Beban	*4.3.2*				
Beban Pegawai		1.572.545.674,00	1.287.595.646,00	284.950.028,00	22,13
Beban Barang dan Jasa		1.462.732.026,21	2.866.187.990,77	(1.403.455.964,56)	(48,97)
Beban Penyisihan Piutang		125.863,00	451.802,00	(325.939,00)	(72,14)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		446.487.759,00	493.055.117,00	(46.567.358,00)	(9,44)
Beban Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban		**3.481.891.322,21**	**4.647.290.555,77**	**(1.165.399.233,56)**	**(25,08)**
Surplus (Defisit) Operasional		**(291.635.248,58)**	**(1.145.056.925,23)**	**853.421.676,65**	**(74,53)**
Kegiatan Non Operasional	*4.3.3*				
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Keg. Non.Lainnya		0,00	339.297,00	(339.297,00)	(100,00)
Jumlah Surplus(defisit) Non Operasional		**0,00**	**339.297,00**	**(339.297,00)**	**(100,00)**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(291.635.248,58)**	**(1.144.717.628,23)**	**853.082.379,65**	**(74,52)**
Pos Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pos Luar Biasa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Surplus (Defisit) LO		**(291.635.248,58)**	**(1.144.717.628,23)**	**853.082.379,65**	**(74,52)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem II

dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, M.M
NIP. 19870903 201503 1 001

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	**3.743.689.752,63**	**3.930.530.696,86**
Surplus (Defisit) LO	(291.635.248,58)	(1.144.717.628,23)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	86.563.268,00	957.876.684,00
Penyetoran ke Kas Daerah	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	**3.538.617.772,05**	**3.743.689.752,63**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Karangasem II

dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, M.M
NIP. 19870903 201503 1 001

UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.782.093.557,00	2.504.683.239,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	267.205.761,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	10.099.127,63	17.804.190,45
Pendapatan APBN/APBD	176.037.828,00	968.495.701,09
Jumlah arus Kas Masuk	**3.235.436.273,63**	**3.490.983.130,54**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.568.561.625,00	1.254.060.386,00
Belanja Barang dan Jasa	1.464.819.626,00	2.027.030.981,19
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.033.381.251,00**	**3.281.091.367,19**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**202.055.022,63**	**209.891.763,35**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	157.713.531,00	285.600.000,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	52.106.567,90
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**157.713.531,00**	**337.706.567,90**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(157.713.531,00)**	**(337.706.567,90)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Setoran ke Kas Daerah (BOK)	0,00	0,00
Setoran ke Kas Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	156.659.088,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**156.659.088,00**

Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	156.659.088,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**156.659.088,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**44.341.491,63**	**(127.814.804,55)**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**370.611.879,84**	**498.426.684,39**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**414.953.371,47**	**370.611.879,84**
menurut neraca		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Karangasem, 06 April 2026
Kepala Puskesmas Karangasem II

dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, M.M
NIP. 19870903 201503 1 001

Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Karangasem II

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Karangasem II

UPTD Puskesmas Karangasem II adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem. yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Karangasem II merupakan sebuah Puskesmas Rawat Inap.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, UPTD Puskesmas Karangasem II ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

UPTD Puskesmas Karangasem II memiliki lima Puskesmas Pembantu (Pustu), yakni:

1) Pustu Seraya Barat di Br. Bungkulan;
2) Pustu Bukit di Desa Bukit;
3) Pustu Tumbu di Desa Tumbu;
4) Pustu Seraya Timur 1 di Br. Tukad Buah; dan
5) Pustu Seraya Timur 2 di Br. Tanah Barak.

b. Tempat dan Kedudukan

UPTD Puskesmas Karangasem II beralamat di Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Telp (0363) 4301005.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Karangasem II adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);
17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);

19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. Visi, Misi, Motto, Tata Nilai, Tujuan, Slogan, dan Kebijakan Mutu UPTD Puskesmas Karangasem II

1) Visi UPTD Puskesmas Karangasem II adalah "Terwujudnya masyarakat yang bersih dan sehat berlandaskan Tri Hita Karana".
   Visi tersebut memiliki makna sebagai berikut:
   a) Bersih : Terwujudnya lingkungan dan tata kelola pelayanan kesehatan yang bersih serta bebas dari KKN
   b) Sehat : Terwujudnya masyarakat yang sehat fisik, mental, sosial dan spiritual
   c) Tri Hita Karana : Terwujudnya keseimbangan antar pemberi pelayanan dengan masyarakat lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa (TYME)
2) Misi
   Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas akan ditempuh 3 (tiga) misi yakni sebagai berikut:
   a) Meningkatkan Upaya Kesehatan Lingkungan dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) secara mandiri.
   b) Mengoptimalkan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu.

c) Membina hubungan baik antara pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa.

3) Motto

Motto UPTD Puskesmas Karangasem II adalah "Bersih dan Sehat Tanggung Jawab Bersama".

4) Tata Nilai

Tata Nilai UPTD Puskesmas Karangasem II adalah "BIJAKSANA"

B : berani dan bertanggung jawab
I : inovatif dan inisiatif
J : jujur ramah dan santun
A : anti KKN
K : komitmen bersama
S : semangat dalam bertugas
A : aktif dan berpikir kritis
N : niat yang tulus dan ikhlas
A : amankan diri dan pasien.

5) Tujuan

Tujuan UPTD Puskesmas Karangasem II adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

6) Slogan

Slogan UPTD Puskesmas Karangasem II adalah "Melayani Dengan Senyuman dan Sepenuh Hati".

7) Kebijakan Mutu Puskesmas

Kebijakan mutu yang ditetapkan oleh UPTD Puskesmas Karangasem II adalah sebagai berikut:

a) Menjamin Mutu sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan dan orang lain (pasien, pengunjung, pendamping pasien, maupun masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan).
b) Memenuhi semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Mutu, Keselamatan Pasien serta Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
c) Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap manajemen dan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan guna meningkatkan budaya Mutu, keselamatan Pasien serta Keselamatan dan kesehatan kerja yang baik di tempat kerja.

e. Program Pelayanan UPTD Puskesmas Karangasem II

Program Pelayanan yang tersedia di UPTD Puskesmas Karangasem II terdiri dari:

1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas

UPTD Puskesmas Karangasem II memiliki 5 kegiatan esensial dan 1 kegiatan perkesmas. Lima Kegiatan Esensial tersebut meliputi:

a) Pelayanan Kesehatan Keluarga (Ibu, Anak dan Keluarga Berencana)
b) Pelayanan Gizi Masyarakat

c) Pelayanan Promosi Kesehatan
d) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

3) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

a) Upaya Pelayanan UKGS/UKGM

UKGS/UKGM adalah suatu komponen dari UKS dan merupakan teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak sekolah dan di posyandu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak serta bumil.

b) Upaya Pelayanan Lansia

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

c) Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

d) Upaya Kesehatan Yankestradkom.
e) Upaya Kesehatan Kerja.
f) Upaya Kesehatan Indera.

4) Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi dan Laboratorium

a) Upaya Kesehatan Perorangan

Upaya kesehatan perorangan di UPTD Puskesmas Karangasem II meliputi: poli umum, poli gigi dan mulut, ruang KIA KB dan imunisasi, ruang konsultasi gizi, laboratorium, Farmasi, kasir, loket pendaftaran dan konseling.

b) Farmasi

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.

c) Laboratorium

Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit,

kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

f. Jenis-Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Karangasem II

Jenis-jenis pelayanan Kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Karangasem II berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Karangasem II Nomor: 05/KR.II/ /2023 Tentang Jenis-jenis Pelayanan pada UPTD Puskesmas Karangasem II, sebagai berikut:

1) UKM Esensial dan Puskesmas antara lain:
   a) Promosi Kesehatan
   b) Kesehatan Lingkungan
   c) Pelayanan Kesehatan Keluarga, meliputi:
      (1) Upaya kesehatan Ibu
      (2) Upaya kesehatan Anak
      (3) Upaya kesehatan KB
   d) Pelayanan Gizi
   e) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
      (1) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular meliputi: Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit Jantung, Penyakit Paru, Ca Payudara, Ca Servik, penyakit indra (mata dan telinga), Upaya Berhenti Merokok, Upaya Kesehatan Jiwa (KESWA)
      (2) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular meliputi: TB, ISPA, Diare, Malaria, DBD, Hepatitis, Frambusia, Kusta, HIV-AIDS, Kecacingan, GHPR, Surveilans, Imunisasi.
   f) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)
   g) Pelayanan dan keperawatan kesehatan masyarakat.
2) UKM Pengembangan antara lain:
   a) Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)
   b) Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer;
   c) Upaya Kesehatan Olahraga (KESORGA);
   d) Upaya Kesehatan Kerja (UKK).
   e) Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
   f) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
   g) Upaya Kesehatan Lansia
   h) Upaya Kesehatan Remaja
3) UKP
   a) Dalam Gedung antara lain:
      (1) Pelayanan Loket;
      (2) Pelayanan Pemeriksaan Umum;
      (3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
      (4) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
      (5) Pelayanan Tumbuh kembang;
      (6) Pelayanan Imunisasi;

(7) Pelayanan KB;
(8) Pelayanan Konseling;
(9) Pemeriksaan Laboratorium;
(10) Pelayanan Obat;
(11) Pelayanan Rawat Inap;
(12) Pelayanan Gawat Darurat;
(13) Pelayanan Persalinan
(14) Pelayanan Pasca Melahirkan;
(15) Pelayanan Bayi baru lahir;
(16) Pelayanan KB Pasca Plasenta;
(17) Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
(18) Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer

b) Di luar Gedung antara lain:
(1) Pelayanan Puskesmas Pembantu;
(2) Pelayanan Puskesmas Keliling;
(3) Pos Binaan Terpadu (POSBINDU);
(4) Posyandu Balita;
(5) Posyandu Remaja;
(6) Posyandu Lansia

g. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Berikut disajikan Sasaran, Target Kinerja, dan Capaian Kinerja berdasarkan kegiatan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN		INDIKATOR	JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3		3	4		5	7	8	9
CAPAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2025										**92,42%**
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										**93,92%**
UKM ESENSIAL										**91,11%**
	Pelayanan Kesehatan Keluarga									**94,75%**
1.	Pelayanan Kesehatan Keluarga	Kesehatan Ibu	1	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	bumil	%	100	383	94,57%	99,96%
			2	Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai Standar (K4)	bumil	%	100	392	96,79%	
			3	Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K6)	bumil	%	100	388	98,48%	
			4	Cakupan Ibu Hamil Komplikasi (preeklamsia, obesitas,anemia,KEK,perdarahan,jantung,Infeksi)	bumil	%	90	102	125,93%	
			5	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar	bulin	%	100	401	101,78%	
			6	Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF4)	bulin	%	100	383	97,21%	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	7	8	9
			7	Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN 1)	bayi	%	100	368	84,99%	
		Kesehatan Bayi	1	Cakupan pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN3)	bayi	%	100	361	83,37%	84,45%
			2	Cakupan penanganan komplikasi Neonatus	bayi	%	80	26	100,00%	
			3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi 29 hari-12 bulan (kunjungan bayi)	bayi	%	100	303	69,98%	
		Upaya Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah	1	Cakupan Pelayanan Anak Balita (12 - 59 bulan)sesuai standar	Balita	%	100	1755	76,17%	64,35%
			2	Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS	Balita	%	100	389	16,88%	
			3	Cakupan Stimulasi Deteksi Intervinsi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	APRAS	%	100	921	100,00%	
		Upaya Kesehatan Sekolah	1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	siswa	%	100	4398	95,84%	95,61%
			2	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SD/MI	siswa	%	100	3195	95,37%	
		Pelayanan Keluarga Berencana	1	Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	akseptor	%	70	5315	75,89%	85,56%
			2	Cakupan Peserta KB Pasca persalinan	akseptor	%	100	379	95,23%	
		Pelayanan Calon Pengantin	1	Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Skrining Kesehatan	Catin	%	100	12	133%	133,33%

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	**7**	8	9
		Pelayanan Kesehatan Usila	1	Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	orang	%	100	5035	100%	100,00%
2	**Pelayanan Promosi Kesehatan**									**100,00 %**
	Pelayanan Promosi Kesehatan	PHBS 5 tatanan	1	Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	%	84	1260	100%	100,00%
			2	Tatanan institusi Pendidikan /sekolah	Sekolah	%	50	36	100%	
			3	Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	%	80	18	100%	
			4	Tatanan TTU	TTU	%	40	1	100%	
			5	Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	%	45	6	100%	
		Pemberdayaan Masyarakat	1	Pemberdayaan Melalui Penyuluhan	Kader UKBM	%	100	315	100%	100,00%
		Pembinaan UKBM	1	Pembinaan Posyandu	Posyandu	%	80	63	100%	100,00%
			2	Persentase Posyandu Aktif	Posyandu	%	100	63	100%	
		Penyuluhan NARKOBA	1	Penyuluhan Narkoba Minimal 5 kali dalam Setahun	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	5	5	100%	100,00%

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	7	8	9
		Promosi Kesehatan	1.	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan Jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	masyarakat	kali	12	12	100%	100,00%
			2.	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar gedung Puskesmas) minimal 12 kali setahun	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	12	12	100%	
		Promosi Kesehatan	1.	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan Jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	Masyarakat	kali	12	12	100%	100,00%
			2.	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar gedung Puskesmas) minimal 12 kali setahun	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	12	12	100%	
		Program Pengembangan	1.	Pembinaan UKBM Lain	kelompok peduli kesehatan	kali	3	3	100%	100,00%
			2.	Pergerakan Germas 5 Indikator	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	3	100	100%	
			3	Sosialisasi/Pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	kali	1	100	100%	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN		INDIKATOR	JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3		3	4		5	**7**	8	9
3	**Pelayanan Kesehatan Lingkungan**									**85,00%**
	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Pengawasan Kualitas Air	a	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/layak	penduduk	%	95	39322	100%	100,00%
			b	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/IKL	Sarana	%	100	3	100%	
			c	Persentase Pengambilan sampel air	Sampel Air	%	100	101	100%	
			d	Persentase kualitas air minum di penyelenggara yang memenuhi syarat	Sarana	%	100	13	100%	
		2. STBM	a	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	%	100	12030	100%	85,00%
			b	Persentase Desa ODF	Desa	%	55	6	55%	
			c	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	%	100	6	100%	
		3. Pengawasan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan			Sarana	%	90	36	100%	100,00%
		4. Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan			Sarana	%	25	270	100%	100,00%
		5. Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis			Fasyankes	%	100	10	100%	100,00%
		6. Persentase Rumah Sehat			Rumah	%	25	11942	25%	25,00%
4	**Pelayanan Gizi**									**91,54%**
	Pelayanan Gizi	Upaya Perbaikan	1	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	bumil	%	80	34	100%	91,54%

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	**7**	8	9
		Gizi Masyarakat	2	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	bumil	%	84	199	91,30%	
			3	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	bayi	%	60	107	78,70%	
			4	Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	bayi	%	70	199	46,00%	
			5	Persentase Balita kurus mendapat makanan tambahan	balita	%	85	21	85,00%	
			6	Persentase Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	rematri	%	58	1076	100%	
			7	Persentase Cakupan vitamin A pada Balita	balita	%	90	1604	100%	
			8	Persentase Anemia pada ibu hamil	ibu hamil	%	33	33	100%	
			9	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	bayi	%	3	3	100%	
			10	Persentase Balita Kurus (wasting)	balita	%	7	7	100%	
			11	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (stunting)	balita	%	14	5	100%	
			12	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	balita	%	85	1514	80,60%	
			13	Persentase Cakupan Skrining Anemia Remaja Putri	Rematri	%	90	369	100%	
			14	Persentase Cakupan Skrining Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A	Ibu Nifas	%	82	554	100%	
5	**Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**									**84,28%**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	7	8	9
	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	P2M	1	Cakupan penemuan Tuberkulosis (treament coverage)	orang	%	90	12	27,27%	27,27%
		PTM	2	Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	bayi usia sekolah	%	100	350	80,83%	80,83%
		SURVAILANS	3	Cakupan wanita usia subur (WUS) yang mendapatlan skrening IVA	orang	%	70	377	93,09%	93,09%
		TB Paru	1	Cakupan penemuan Tuberkulosis (treament coverage)	orang	%	>90	12	27,27%	66,08%
			2	Succsess Rate (Angka Keberhasilan Pengobatan)	orang	%	>90	29	96,67%	
			3	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	orang	%	100	159	74,30%	
		Malaria	1	Prosentase Penderita Positif Malaria Yang Diobati sesuai Standar	orang	%	100	100	100%	100,00%
			2	Angka Kesakitan Malaria / Annual Parasite Incident (API)	orang	per 1.000 pddk	<1	100	100%	100,00%
		Kusta	1	Angka Prevalensi Kusta	orang	per 1.000 pddk	<1	100	100%	100,00%
			2	Angka Kesembuhan / RFT Rate	orang	%	100	100	100%	100,00%
		Diare	1	Pelayanan penderita diare sesuai standar	orang	%	100	396	100%	100,00%
		Hepatitis	1	Pelayanan deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	orang	%	100	343	85%	85%

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	**7**	8	9
		ISPA	1	Prosentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	orang	%	100	772	100,00%	50,27%
			2	Cakupan penemuan pneumonia balita	orang	%	100	19	0,54%	
		Demam Berdarah Dengue	1	Angka Kesakitan DBD/insiden Rate (R) DBD	orang	per 1.000 pddk	50	188	50%	50,00%
			2	Angka Bebas Jentik (ABJ)	rumah	%	>95	181	95%	95,00%
		Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV / AIDS	1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	penduduk beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TBC, IMS, WPS, Waria/ trans gender, WBP)	%	100	340	76,75%	76,75%
		Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	1	Pelayanan kasus GHPR yang ditatalaksana standar	orang	%	100	537	100%	100,00%

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	7	8	9
		Kecacingan	1	Pelayanan POPM Kecacingan	orang	%	100	5346	100%	100%
		Surveilance Penyakit	1	Kelengkapan Laporan	Puskesmas	%	90	52	100%	100,00%
			2	Ketepatan Laporan	Puskesmas	%	100	52	100%	
			3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal Penyakit Potensial KLB	%	100	-	-	
			4	Survailance AFP	Anak usia <15 Tahun	Per 100 ribu	≥ 2 per 100 ribu anak usia < 15 tahun	-	-	
			5	Survailance Campak Rubella	orang	Per 100 ribu	≥ 2 per 100 ribu penduduk	-	-	
			6	Survailance TN	Bayi <28 hari	Per 100 ribu	<1 per 1000 kelahiran hidup	-	-	
		Imunisasi	1	Presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	otrang	%	100	350	80,83%	78,07%
			2	Presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	orang	%	100	436	50,35%	
			3	Presentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	orang	%	100	412	80,78%	

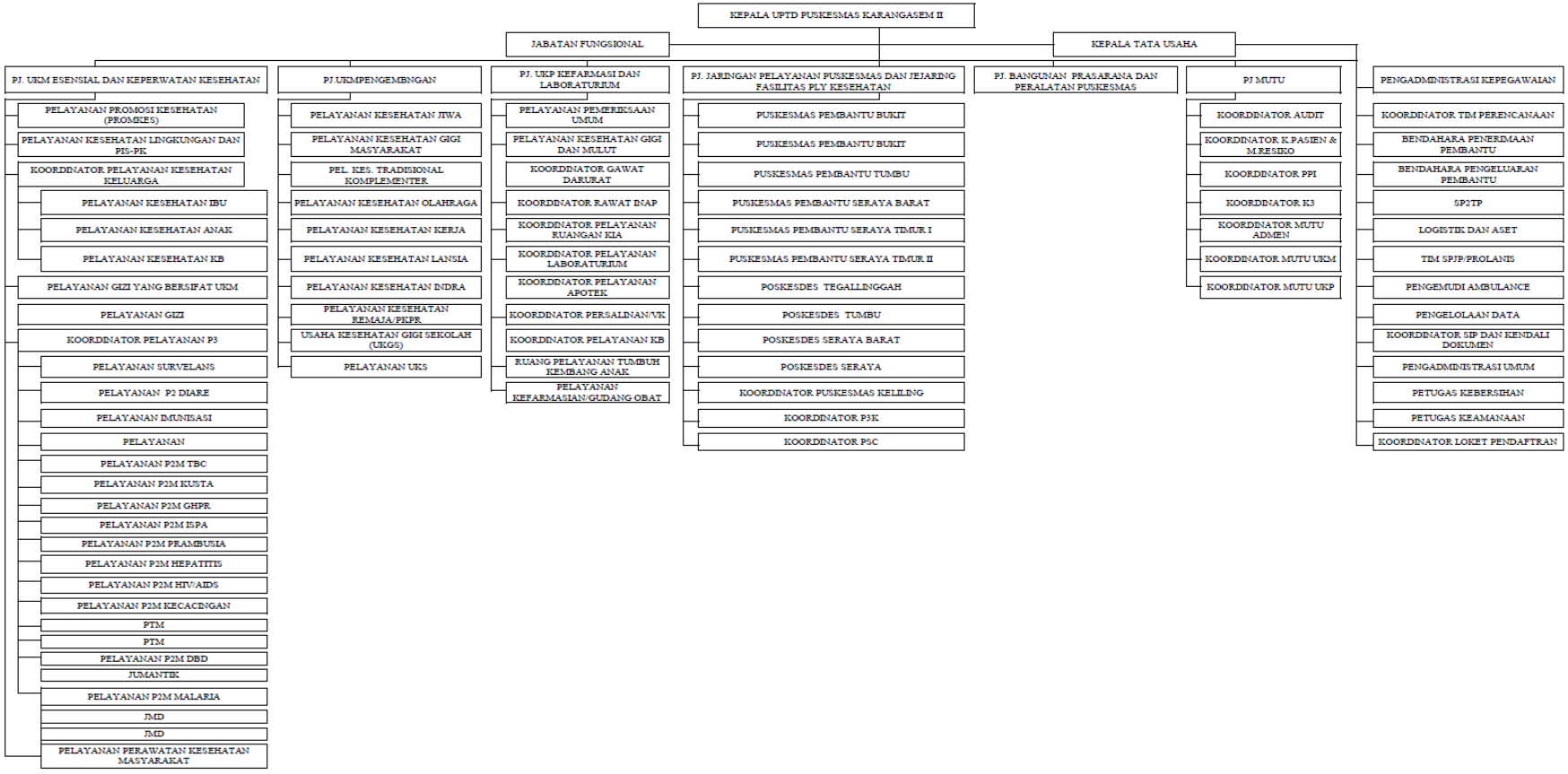
NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	**7**	8	9
			4	Presentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	orang	%	80	533	85,28%	
			5	Presentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	orang	%	80	377	93,09%	
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1.	Presentase meningkatnya desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	desa	%	70	6	100%	99,25%
			2.	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	387	100,00%	
			3.	Persentase pelayanan sesuai standar bagi penderita diabetes melitus	orang	%	100	164	100,00%	
			4.	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	%	100	10717	100,00%	
			5.	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	%	100	77	96,25%	
UKM PENGEMBANGAN										**96,73%**
1	Pelayanan Kesehatan Tradisional		1.	Presentase Pembinaan Toga pada keluarga	keluarga	%	3	77	100,00%	100,00%
			2.	Persentase Pembinaan pada kelompok Asuhan mandiri	Kelompok Asman	%	60	2	100%	

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	**7**	8	9
			3	Persentase Pembinaan Pengobatan Tradisional Hatra	orang	%	70	29	100%	
2	Pelayanan Kesehatan Olah Raga		1	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah raga diwilayah kerjanya	Puskesmas	%	12	100	100%	100,00%
			2	Persentase calon jamaah haji yang melakukan tes kebugaran	Jamaah haji	%	100	-	-	
3	Kesehatan Gigi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	1	Persentase Desa yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	desa	%	60	59	93,65%	93,65%
4	Upaya Kesehatan Gigi Sekolah		1	Persentase Pembinaan Kesehatan Gigi di TK	TK	%	80	32	100,00%	90,00%
5			2	Persentase Pembinaan dan Bimbingan Sikat Gigi Massal pada SD/MI	SD/MI	%	80	64	80,00%	
6	Upaya Kesehatan Kerja	Pelayanan Kesehatan Kerja	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	Puskesmas	%	12	100	100%	100,00%
			2	Persentase Pos UUK yang dibina	Pos UKK	%	100	100	100%	
UKP (UPAYA KESEHATAN PERORANGAN)										**100,00 %**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN	
									SUB VARIABEL	VARIABEL
1	2	3	3		4		5	7	8	9
1	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	1	Presentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat sesuai standar	FKTP	%	70	95	100%	100,00%
PELAYANAN PERKESMAS										**69,42%**
1	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)		1	Persentase keluarga rawan yang dibina	keluarga	%	80	143	69,42%	69,42%
PELAYANAN KEFARMASIAN										**98,75%**
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		1	Persentase yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	puskesmas	%	100	100	100%	98,75%
			2	Persentase Obat dan Vaksin di Puskesmas	Obat	%	96	98	97,50%	
PELAYANAN LABORATORIUM										**100,00 %**
1	Pemeriksaan Laboratorium		1	Kemampuan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis di wilayah kerja puskesmas	Jenis Pemeriksaan Spesimen	%	20	80	100%	100,00%
			2	Kemampuan pengujian terhadap sampel lingkungan di wilayah kerja puskesmas	Jenis Pengujian Sampel	%	50	100	100%	

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Karangasem II



Susunan Organisasi UPTD Karangasem II terdiri dari:

1) Kepala Puskesmas;
2) Tata Usaha;
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
8) Penanggung Jawab Mutu.

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Puskesmas

   Wewenang:

   a) Memeriksa dan menganalisa laporan-laporan kegiatan stafnya dan sekaligus mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan
   b) Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang di bawahnya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

   Tanggung Jawab:

   a) Pelaksanaan tugas sehari-hari
   b) Melakukan pengawasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan
   c) Mengadakan koordinasi dengan kepala kecamatan dan lintas sektor dalam upaya pembangunan Kesehatan di wilayah kerja
   d) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan
   e) Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan dibantu oleh staf puskesmas;
   f) Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan
   g) Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Induk, Pustu, Pusling dan lain-lain.

2) Tata Usaha

   Wewenang:

   a) Menilai kelengkapan administrasi rumah tangga
   b) Menilai kelengkapan administrasi kepegawaian
   c) Menilai kelengkapan administrasi keuangan

   Tanggung Jawab:

   a) Memonitoring data kepegawaian (kinerja)
   b) Memonitoring kinerja rumah tangga
   c) Memonitoring kinerja keuangan

3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

   Wewenang:

   a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Tanggung Jawab:
a) Promosi Kesehatan
c) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
d) Pelayanan Kesehatan Keluarga
e) Pelayanan Gizi
f) Pelayanan P2P
g) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Pengembangan;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Pengembangan

Tanggung Jawab:
a) Pelayanan Kesehatan Jiwa
b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional
d) Pelayanan Kesehatan Olahraga
e) Pelayanan Kesehatan Indera
f) Pelayanan Kesehatan Lansia
h) Pelayanan Kesehatan Kerja

5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKP,
a) Kefarmasian, dan Laboratorium
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Tanggung Jawab:
a) Pelayanan Kesehatan Jiwa
b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional
d) Pelayanan Kesehatan Olahraga
e) Pelayanan Kesehatan Indera
f) Pelayanan Kesehatan Lansia

g) Pelayanan Kesehatan Kerja

6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
   Wewenang:
   a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab membina jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas
   b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen
   c) Mengidentifikasi dan Menganalisa Data Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesma
   d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja jejaring pelayanan Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
   Tanggung Jawab:
   Bertanggung jawab memelihara sarana dan prasarana dan peralatan puskesmas, seperti:
   a) Bangunan
   b) Alat Kesehatan
   c) IPAL
   d) Parkir/Halaman
   e) Kendaraan
   f) Diklat
   g) Kebakaran/Kecelakaan
8) Penanggung Jawab Mutu.
   Wewenang:
   a) Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua penanggung jawab mutu
   b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen
   c) Mengolah dan Memelihara Dokumen/Rekaman
   d) Membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses pelayanan
   Tanggung Jawab:
   a) Menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem mutu manajemen
   b) Merumuskan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penjamin mutu dalam proses diklat berdasarkan standar mutu

i. Pejabat pada UPTD Puskesmas Karangasem II

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Karangasem II Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, M.M NIP. 198709032015031001	Pemimpin BLUD

No	Nama	Jabatan
2.	I Ketut Wirna, A.Md.Kep.,SH NIP. 196809021990021001	Pejabat Keuangan
3.	Ni Made Dwi Artini, S.ST NIP. 19711030 199203 2 010	Pejabat Teknis Bidang UKM Essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4.	Ni Wayan Sukarmayani, A.Md.Keb. NIP. 19781112 200604 2 022	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
5.	dr. I Gede Satria Anom Udayana, S.Ked. NIP. 199404182022031002	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	Ni Komang Ida Mahendri, A.Md.Keb NIP. 19860730 201705 2 001	Pejabat Teknis Bidang Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	I Made Ludarsa Widarma NIP. 19820606 200901 1 006	Pejabat Teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
8.	dr. Ida Bagus Wayan Kardika NIP. 198810092019031001	Pejabat Teknis Bidang Bidang Mutu

j. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Karangasem II per 31 Desember 2025 sebanyak 77 orang terdiri dari:

- Aparatur Sipil Negara (PNS) : 41 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 32 orang
- Pegawai Non Aparatur Sipil Negara : 4 orang

Jumlah **: 77 orang**

Jumlah pegawai berdasarkan profesi yaitu:

No	Jabatan	PNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
a.	**Tenaga Medis**				
	Struktural Medis				
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-
2	Dokter Umum	4	-		**4**
3	Dokter Gigi	1	-	-	**1**
4	Perawat	4	4	-	**8**
5	Perawat (Non Ners)	5	6	-	**11**
6	Struktural Perawat	-	-	-	-
7	Bidan	12	10	-	**22**
8	Kesehatan Masyarakat	-	1	-	**1**
9	Sanitarian	1	-	-	**1**
10	Petugas Lab. TB	2	1	-	**3**

No	Jabatan	PNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
11	Nutrisionis	1	1	-	**2**
12	Terapis Gigi dan Mulut	-	3	-	**3**
13	Apoteker	2	-	-	**2**
14	Ass. Apoteker	1	-	-	**1**
15	Analis Kesehatan	-	-	-	**-**
	Jumlah	**33**	**26**	**-**	**59**
b.	**Tenaga Non Medis**				
	Struktural Non Medis				
1	Pengadministrasi Umum	6	6	-	12
2	Bendahara	-	-	-	-
3	LKB	-	-	-	-
4	Sopir	-	-	-	-
5	Tenaga Penunjang Kesehatan	-	-	4	**4**
6	Cleaning Service	-	-	-	**-**
7	JMD	-	-	-	**-**
8	Jumantik	-	-	-	**-**
10	Pengembangan Pegawai	-	-	-	**-**
11	Pengelola Data	-	-	-	**-**
12	Pelaporan	-	-	-	**-**
13	Tenaga Umum Lainnya	2	-	-	**-**
	Jumlah	**8**	**6**	**4**	**27**
	Total Pegawai	**41**	**32**	**4**	**77**

k. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Karangasem II melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokkan sebagai berikut:

Kerjasama Pelayanan Kesehatan:

2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
4) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Karangasen

l. Pembiayaan UPTD Puskesmas

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Karangasem II mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan

Layanan Umum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (historical cost) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Karangasem II.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA;
b) Belanja;
c) Surplus/defisit-LRA;
d) Penerimaan pembiayaan;
e) Pengeluaran pembiayaan;
f) Pembiayaan neto; dan
g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
4) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan Setara Kas;
   b) Investasi Jangka Pendek;
   c) Piutang dari Kegiatan Blud;
   d) Persediaan;
   e) Investasi Jangka Panjang;
   f) Aset Tetap;
   g) Aset Lainnya;
   h) Kewajiban Jangka Pendek;
   i) Kewajiban Jangka Panjang; Dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.
3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

   Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   f) Pendapatan BLUD lainnya.

   Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a) Pembayaran Pegawai;
   b) Pembayaran Barang;
   c) Pembayaran Bunga; dan

d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris
   a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
   b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan pajak.
   c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
   d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
   a) Ekuitas awal;
   b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
   c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
      1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
      2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
      3) Koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
   d) Ekuitas akhir.

h. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum,

yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau

e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-Pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

   Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

   Pengukuran

   a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
   b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
   c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

   Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

   a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;
   c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
   d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

   Pembentukan Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan/atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

   Penghapusan Piutang

   Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

   Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (First In First Out). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a) Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
b) Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan/ Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
InstalasiPengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi/ Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);
b) Aset Sewaan;
c) Aset yang tidak digunakan;
d) Beban yang ditangguhkan; dan
e) Lainnya.

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau

tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka

Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (cut off). Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.
d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas;
b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal; dan
c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(1) Pendapatan usaha rawat jalan;
(2) Pendapatan usaha rawat darurat; dan
(3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

c) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

d) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
   (1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
   (2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
   (3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
   (4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.
d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.

f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.
g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
   (1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.
   (2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.
   (3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.
   (4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.
c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.
e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai
   Merupakan beban yang terkait kompensasi kepada pegawai, baik kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun yang berstatus Non-ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis Entitas.
b) Beban Barang
   Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
c) Beban Jasa
   Merupakan beban yang terkait dengan pemanfaatan jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
d) Beban Pemeliharaan
   Merupakan beban yang terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.
e) Beban Langganan Daya/Jasa
   Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.
f) Beban Perjalanan Dinas
   Merupakan beban yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain
Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi
Merupakan beban yang timbul akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

i) Beban Penyisihan Piutang
Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait potensi ketertagihannya.

j) Beban Operasional Lainnya
Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar
Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset
Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya
Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

a) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.
b) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Karangasem II yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong

terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. UPTD Puskesmas Karangasem II terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 08.067.350.2-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Karangasem II Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan LRA

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.792.175.869,63 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.522.487.429,45 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	2.782.093.557,00	0,00	2.504.683.239,00
b.	Pendapatan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	10.099.127,63	0,00	17.804.190,45
	Jumlah	**0,00**	**2.792.192.684,63**	**0,00**	**2.522.487.429,45**

4.1.2 Belanja LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah diterapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.191.094.782,00 atau 82,41% dari anggaran sebesar Rp3.872.003.287,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.618.797.935,09, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	3.627.003.287,00	3.033.381.251,00	83,63	3.281.091.367,19
b.	Belanja Modal	245.000.000,00	157.713.531,00	64,37	337.706.567,90
	Jumlah	**3.872.003.287,00**	**3.191.094.782,00**	**82,41**	**3.618.797.935,09**

a. Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.033.381.251,00 atau sebesar 83,63% dari anggaran sebesar Rp3.627.003.287,00,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.281.091.367,19. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Pegawai	1.745.449.607,00	1.568.561.625,00	89,87	1.254.060.386,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	1.881.553.680,00	1.464.819.626,00	77,85	2.027.030.981,19
3)	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**3.627.003.287,00**	**3.033.381.251,00**	**83,63**	**3.281.091.367,19**

Rincian dari Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.568.561.625,00 atau sebesar 89,87% dari anggaran sebesar Rp1.745.449.607,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.254.060.386,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	30.002.000,00	28.110.015,00	93,69	0,00
b)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	20.466.247,00
c)	Belanja Pegawai BLUD	1.715.447.607,00	1.540.451.610,00	89,80	1.233.594.139,00
	Jumlah	**1.745.449.607,00**	**1.568.561.625,00**	**89,87**	**1.254.060.386,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Barang dan Jasa Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.464.819.626,00 atau sebesar 77,85% dari anggaran sebesar Rp1.881.553.680,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.209.030.981,19,00. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.408.000,00	17.848.400,00	32,21	5.211.550,00
b)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	24.887.550,00
c)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.944.800,00	27.297.280,00	82,86	0,00
d)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	138.500.000,00	114.975.000,00	83,01	246.300.000,00
e)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.800.000,00	14.023.854,00	83,48	0,00
f)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.006.880,00	841.464,00	83,57	1.484.186,00
g)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.258.600,00	1.051.830,00	83,57	1.855.414,00
h)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	212.795.563,19
i)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	328.009.000,00	300.016.659,00	0,00	324.642.515,00
j)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.307.626.400,00	988.765.139,00	75,62	1.209.854.203,00
	Jumlah	**1.881.553.680,00**	**1.464.819.626,00**	**77,85**	**2.027.030.981,19**

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157.713.531,00,00 atau sebesar 64,37% dari anggaran sebesar Rp245.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp337.706.567,90. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.000.000,00	157.713.531,00	64,37	285.600.000,00
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**245.000.000,00**	**157.713.531,00**	**64,37**	**285.600.000,00**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157.713.531,00 atau sebesar 64,37% dari anggaran sebesar Rp245.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp285.600.000,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	245.000.000,00	157.713.531,00	64,37	231.600.000,00
b)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
	Jumlah	**245.000.000,00**	**157.713.531,00**	**64,37**	**285.600.000,00**

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. Kas di BOK

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp29.901.140,00 dan Rp90.805.238,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran APBD	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
PT Bank Negara Indonesia Kanor Cabang Singaraja Nomor Rekening 1590087785 a.n. 1050082BOKPKMKARANGASEMII	29.901.140,00	90.805.238,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**29.901.140,00**	**90.805.238,00**

b. Kas di BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD. Jumlah Kas pada BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp385.052.231,47 dan Rp279.806.641,84 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. Rek 0220105002287 a.n. BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II	385.052.231,47	279.806.641,84
Jumlah Kas pada BLUD	**385.052.231,47**	**279.806.641,84**

c. Piutang Layanan

Piutang Layanan merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Karangasem II. Jumlah Piutang Layanan netto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.460.437,00 dan Rp44.728.398,00. dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Pendapatan Pelayanan:		
1) Piutang JKN	12.586.300,00	45.180.200,00
Jumlah Piutang Pelayanan (Bruto)	12.586.300,00	45.180.200,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(125.863,00)	(451.802,00)
Jumlah Piutang Pelayanan (Netto)	**12.460.437,00**	**44.728.398,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang JKN	12.586.300,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Bruto	12.586.300,00	0,00	0,00	0,00
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**125.863,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**12.460.437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang JKN	45.180.200,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Bruto	45.180.200,00	0,00	0,00	0,00
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**451.802,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**44.728.398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang/bahan pakai habis UPTD Puskesmas Karangasem II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp286.520.463,68 dan Rp284.432.863,86 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Persediaan Barang Habis Pakai		
Alat Tulis Kantor	2.369.200,00	5.851.500,00
Bahan Komputer	0,00	4.788.000,00
Kertas dan Cover	0,00	2.310.000,00
Barang Cetakan	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00
Benda Pos	750.000,00	600.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	190.849.484,39	146.507.830,42
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	6.477.600,00	9.755.500,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00
Alat Listrik	0,00	4.327.000,00
Perabotan Kantor	0,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya (BMHP)	86.074.179,28	110.293.033,47
Jumlah Persediaan	**286.520.463,67**	**284.432.863,89**

Rincian mutasi Persediaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Persediaan Habis Pakai				
Alat Tulis Kantor	5.851.500,00	4.464.000,00	7.946.300,00	2.369.200,00
Bahan Komputer	4.788.000,00	3.565.875,00	8.353.875,00	0,00
Kertas dan Cover	2.310.000,00	6.500.000,00	8.810.000,00	0,00
Barang Cetakan	0,00	7.265.000,00	7.265.000,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	600.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	750.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	146.507.830,42	991.510.082,98	947.168.429,01	190.849.484,39
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	9.755.500,00	14.340.000,00	17.617.900,00	6.477.600,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	4.327.000,00	6.620.000,00	10.947.000,00	0,00
Perabotan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya (BMHP)	110.293.033,47	226.876.025,00	251.094.879,19	86.074.179,28
Jumlah	**284.432.863,89**	**1.263.140.982,98**	**1.261.053.383,20**	**286.520.463,67**

Rincian mutasi Persediaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Persediaan Habis Pakai				
Alat Tulis Kantor	949.400,00	7.461.000,00	2.558.900,00	5.851.500,00
Bahan Komputer	1.731.600,00	6.200.000,00	3.143.600,00	4.788.000,00
Kertas dan Cover	1.369.000,00	9.900.000,00	8.959.000,00	2.310.000,00
Barang Cetakan	0,00	38.288.550,00	38.288.550,00	0,00
Barang Kuasi	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00
Benda Pos	740.000,00	2.000.000,00	2.140.000,00	600.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	212.677.097,47	2.312.744.282,70	2.268.620.516,28	256.800.863,89
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	1.687.100,00	11.266.500,00	3.198.100,00	9.755.500,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	2.479.000,00	4.995.000,00	3.147.000,00	4.327.000,00
Perabotan Kantor				
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bangunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**222.085.197,47**	**2.392.855.332,70**	**2.330.507.666,28**	**284.432.863,89**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.983.867.201,90 dan Rp3.199.116.263,90 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Tanah	432.000.000,00	432.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.805.158.011,73	4.573.919.314,73
Gedung dan Bangunan	4.743.540.060,90	4.743.540.060,90
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.792.500,00	25.792.500,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**10.006.490.572,63**	**9.775.251.875,63**
Akumulasi Penyusutan	(7.022.623.370,73)	(6.576.135.611,73)
Nilai Buku	**2.983.867.201,90**	**3.199.116.263,90**

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	432.000.000,00	0,00	0,00	432.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.573.919.314,73	232.594.697,00	1.356.000,00	4.805.158.011,73
Gedung dan Bangunan	4.743.540.060,90	0,00	0,00	4.743.540.060,90
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.792.500,00	0,00	0,00	25.792.500,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**9.775.251.875,63**	**232.594.697,00**	**1.356.000,00**	**10.006.490.572,63**
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.868.433.363,73	263.906.712,00	0,00	4.132.340.075,73
Gedung dan Bangunan	2.684.434.398,00	181.739.497,00	0,00	2.866.173.895,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.267.850,00	841.550,00	0,00	24.109.400,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**6.576.135.611,73**	**446.487.759,00**	**0,00**	**7.022.623.370,73**
Nilai Buku				
Tanah	432.000.000,00	0,00	0,00	432.000.000,00
Peralatan dan Mesin	705.485.951,00	0,00	0,00	672.817.936,00
Gedung dan Bangunan	2.059.105.662,90	0,00	0,00	1.877.366.165,90
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.524.650,00	0,00	0,00	1.683.100,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**3.199.116.263,90**	**0,00**	**0,00**	**2.983.867.201,90**

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	432.000.000,00	0,00	0,00	432.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.275.519.314,73	298.400.000,00	0,00	4.573.919.314,73
Gedung dan Bangunan	4.691.433.493,00	52.106.567,90	0,00	4.743.540.060,90
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.792.500,00	0,00	0,00	25.792.500,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**9.424.745.307,73**	**350.506.567,90**	**0,00**	**9.775.251.875,63**
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.556.627.545,73	311.805.818,00	0,00	3.868.433.363,73
Gedung dan Bangunan	2.504.605.475,00	179.828.923,00	0,00	2.684.434.398,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.847.474,00	1.420.376,00	0,00	23.267.850,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**6.083.080.494,73**	**493.055.117,00**	**0,00**	**6.576.135.611,73**
Nilai Buku				
Tanah	432.000.000,00	0,00	0,00	432.000.000,00
Peralatan dan Mesin	718.891.769,00	0,00	0,00	705.485.951,00
Gedung dan Bangunan	2.186.828.018,00	0,00	0,00	2.059.105.662,90
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.945.026,00	0,00	0,00	2.524.650,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**3.341.664.813,00**	**0,00**	**0,00**	**3.199.116.263,90**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya UPTD Puskesmas Karangasem II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp783.279,00 dan Rp783.279,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	581.152.432,54	581.152.432,54
Jumlah Harga Perolehan	**581.152.432,54**	**581.152.432,54**
Akumulasi Penyusutan	(580.369.153,54)	(580.369.153,54)
Nilai Buku	**783.279,00**	**783.279,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	581.152.432,54	0,00	0,00	581.152.432,54
Jumlah	**581.152.432,54**	**0,00**	**0,00**	**581.152.432,54**
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	580.369.153,54		0,00	580.369.153,54
Jumlah	**580.369.153,54**	**0,00**	**0,00**	**580.369.153,54**
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	783.279,00	0,00	0,00	783.279,00
Jumlah	**783.279,00**	**0,00**	**0,00**	**783.279,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	581.152.432,54	0,00	0,00	581.152.432,54
Jumlah	**581.152.432,54**	**0,00**	**0,00**	**581.152.432,54**
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	580.369.153,54		0,00	580.369.153,54
Jumlah	**580.369.153,54**	**0,00**	**0,00**	**580.369.153,54**
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	783.279,00	0,00	0,00	783.279,00
Jumlah	**783.279,00**	**0,00**	**0,00**	**783.279,00**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Belanja UPTD Puskesmas Karangasem II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp159.966.981,00 dan Rp155.982.932,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	159.966.981,00	126.773.407,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	0,00	29.209.525,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	**159.966.981,00**	**155.982.932,00**

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.2.3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.538.617.772,05 dan Rp3.743.689.752,63 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Ekuitas Awal	3.743.689.752,63	3.930.530.696,86
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(291.635.248,59)	(1.144.717.628,23)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	86.563.268,01	957.876.684,00
Ekuitas Akhir	**3.538.617.772,05**	**3.743.689.752,63**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Karangasem II pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.190.256.073,63 dan Rp3.502.233.630,54 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.736.913.357,00	2.515.933.739,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	267.205.761,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	10.099.127,63	17.804.190,45
Pendapatan APBN/APBD	176.037.828,00	968.495.701,09
Jumlah	**3.190.256.073,63**	**3.502.233.630,54**

4.3.2 Beban

Beban UPTD Puskesmas Karangasem II pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp3.481.891.322,21 dan Rp4.647.290.555,77 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Pegawai	1.572.545.674,00	1.287.595.646,00
Beban Barang dan Jasa	1.462.732.026,21	2.866.187.990,77
Beban Penyisihan Piutang	125.863,00	451.802,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	446.487.759,00	493.055.117,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	**3.481.891.322,21**	**4.647.290.555,77**

1. Beban Pegawai

   Beban Pegawai UPTD Puskesmas Karangasem II pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1.572.545.674,00	1.279.435.646,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	0,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00
Jumlah	**1.572.545.674,00**	**1.287.595.646,00**

2. Beban Barang dan Jasa

   Beban Barang dan Jasa UPTD Puskesmas Karangasem II pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

   Beban Barang:

	2025	2024
Beban Barang Habis Pakai		
Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	49.995.000,00	29.912.150,00
Beban Bahan Kimia	84.446.458,00	0,00
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	78.194.400,00	84.654.250,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	17.617.900,00	11.266.500,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.385.000,00	10.150.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	69.084.029,00	169.203.257,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.946.300,00	2.558.900,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.810.000,00	8.959.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.265.000,00	22.086.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.850.000,00	2.140.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.353.875,00	3.143.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.947.000,00	3.147.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	0,00	24.887.550,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.218.854,19	6.926.600,00
Beban Obat-Obatan-Obat	78.233.549,03	954.808.614,58
Beban Makanan dan Minuman Rapat	27.297.280,00	7.560.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	53.671.872,00	182.143.475,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00
Beban Natura dan Pakan- Natura	0,00	0,00
Beban Barang Kuasi	0,00	452.000,00
Beban Barang dan Jasa BOK	300.016.659,00	0,00
Jumlah	**829.333.176,22**	**1.523.998.896,58**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	114.975.000,00	247.128.000,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	14.084.701,00	9.711.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	22.623.249,00	21.972.568,00
Beban Tagihan Telepon	11.703.000,00	11.715.265,00
Beban Tagihan Air	18.798.100,00	33.201.300,00
Beban Tagihan Listrik	39.935.099,00	45.670.295,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.664.000,00	6.660.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.396.200,00	309.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	241.491.943,00	400.414.728,00
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Keuangan	19.980.000,00	19.758.000,00
Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	0,00
Beban Jasa Transport	0,00	179.150.000,00
Beban Jasa Pengolahan PMT	0,00	6.334.875,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.023.854,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	841.464,00	1.116.206,00
Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1.051.830,00	1.395.394,00
Jumlah	**511.728.440,00**	**984.536.631,00**

Beban Pemeliharaan:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	29.970.000,00	74.925.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	14.695.000,00	5.825.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	8.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	0,00	4.610.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	20.450.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	8.869.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	6.605.000,00	8.800.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Komputer - Peralatan Jaringan	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	212.795.563,19
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	9.996.660,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Air Minum Lainnya	4.993.750,00	4.824.500,00
Jumlah	**96.710.410,00**	**338.649.063,19**

Beban Perjalanan Dinas:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	9.103.400,00
Jumlah	**0,00**	**9.103.400,00**

Beban Uang dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:

	2025	2024
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	24.960.000,00	9.900.000,00
Jumlah	**24.960.000,00**	**9.900.000,00**

3. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang UPTD Puskesmas Karangasem II pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	125.863,00	451.802,00
Jumlah	**125.863,00**	**451.802,00**

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi UPTD Puskesmas Karangasem II pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyusutan		
Peralatan dan Mesin	263.906.712,00	311.805.818,00
Gedung dan Bangunan	181.739.497,00	179.828.923,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	841.550,00	1.420.376,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan	**446.487.759,00**	**493.055.117,00**
Beban Amortisasi		
Aset Tetap Berwujud	0,00	
Jumlah Beban Amortisasi	**0,00**	**0,00**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**446.487.759,00**	**493.055.117,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
(Kerugiab) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	0,00	339.297,00
Jumlah	**0,00**	**339.297,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca tanggal 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka-angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Karangasem II berlangsung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Karangasem II bersamaan dengan penerbitan Laporan Auditor Independen pada tanggal 06 April 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00048/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Karangasem IItanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Karangasem IIbertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan design dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Jasa Giro yang Belum Diakui Sebagai Pendapatan Di LRA Puskesmas Tahun 2025.
   Atas permasalahn tersebut kami sarankan agar pendapatan jasa giro diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun di Laporan Operasional.

2. Tata Kelola Aktiva Tetap dan Persediaan Perlu Ditingkatkan
   Dari hasil audit yang kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:,
   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Karangasem IIke Pemda Karangasem.
      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:
   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.

3. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Operasional
   Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Karangasem IIdari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Bebandem.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Akuntansi yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

Atas masalah tersebut, kami saranankan agar Puskesmas Karangasem IImeningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Karangasem II dibidang Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

4. Pencatatan Transaksi Keuangan Puskesmas Karangasem II pada SIPD Belum Tepat Waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Karangasem IIpada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka - angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Karangasem IIdan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00048/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 06 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Karangasem II berbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Karangasem II belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Karangasem II melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Karangasem II berbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

`

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS ABANG I
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor: 00045/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS ABANG I

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	5
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	73
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN	78

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS ABANG I
Jln. Ida Ketut Djelantik, Desa Tista
Kec. Abang, Kode Pos. 80852 Telp. (0363) 4301725
Email : puskesmasabang1@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSKESMAS ABANG I YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	dr. I Komang Suwirta, S.Ked
Nomor Telepon	:	(0363) 4301725
Alamat kantor	:	Jalan Ida Ketut Djelantik, Desa Tista, Kec. Abang, Karangasem
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Abang I

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang I Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang I Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang I Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No 13
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskeamas Abang I Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang I Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang I Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang I

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang I



dr. I Komang Suwirta, S.Ked.
NIP. 197806102006041009

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00045/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Abang I

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Abang I ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00054/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 06 April 2026

00045

Pande Putu Agus Eka Pertama AK., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

UPTD PUSKESMAS ABANG I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN DAERAH	*4.1.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		0,00	2.946.521.329,00	0,00	2.772.573.019,00
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerjasama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	21.464.600,72	0,00	17.745.190,27
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**2.967.985.929,72**	**0,00**	**2.790.318.209,27**
BELANJA	*4.1.2*				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		1.953.124.250,00	1.777.457.436,00	91,01	1.524.970.679,00
Belanja Barang dan Jasa		2.182.456.614,00	1.570.649.363,00	71,97	1.677.533.792,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERSI		**4.135.580.864,00**	**3.348.106.799,00**	**80,96**	**3.202.504.471,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		138.980.100,00	58.806.159,00	42,31	1.358.551.632,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		70.000.000,00	69.185.200,00	98,84	417.446.778,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**208.980.100,00**	**127.991.359,00**	**61,25**	**1.775.998.410,00**
JUMLAH BELANJA		**4.344.560.964,00**	**3.476.098.158,00**	**80,01**	**4.978.502.881,00**
SURPLUS/DEFISIT		**(4.344.560.964,00)**	**(508.112.228,28)**	**11,70**	**(2.188.184.671,73)**
JUMLAH SILPA		**(4.344.560.964,00)**	**(508.112.228,28)**	**11,70**	**(2.188.184.671,73)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Abang, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang I

dr. I Komang Suwirta, S. Ked
NIP.197806102006041009

UPTD PUSKESMAS ABANG I

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**771.683.287,66**	**664.121.231,39**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**771.683.287,66**	**664.121.231,39**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(508.112.228,28)	(2.188.184.671,73)
Sub Total (3+4)	**263.571.059,38**	**(1.524.063.440,34)**
Pendapatan APBN/APBD	196.277.500,00	2.295.746.728,00
Pendapatan BOK	318.718.601,00	0,00
Setoran ke kas Daerah	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**778.567.160,38**	**771.683.287,66**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Abang, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang I

dr. I Komang Suwirta, S. Ked
NIP.197806102006041009

UPTD PUSKESMAS ABANG I
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET	*4.2.1*		
ASET LANCAR	*4.2.1.1*		
Kas di Bendahara Pengeluaran		20.913.807,00	75.132.396,00
Kas pada BLUD		757.862.725,38	697.674.573,66
Piutang		28.398.900,00	26.882.300,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(283.989,00)	(268.823,00)
Persediaan		579.757.107,01	430.581.792,43
JUMLAH ASET LANCAR		**1.386.648.550,39**	**1.230.002.239,09**
ASET TETAP	*4.2.1.2*		
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		5.760.831.401,65	5.627.951.618,65
Gedung dan Bangunan		8.354.526.164,02	8.285.340.964,02
Jalan, Irigasi dan Jaringan		27.512.888,00	27.512.888,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
JUMLAH NILAI BUKU ASET TETAP		**14.142.870.453,67**	**13.940.805.470,67**
Akumulasi Penyusutan		(6.788.752.294,65)	(6.032.673.112,65)
JUMLAH ASET TETAP		**7.354.118.159,02**	**7.908.132.358,02**
ASET LAINNYA	*4.2.1.3*		
Aset Tetap Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		54.498.240,00	54.498.240,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		(54.498.240,00)	(54.498.240,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**8.740.766.709,41**	**9.138.134.597,11**
KEWAJIBAN	*4.2.2*		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	*4.2.2.1*		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		209.372,00	1.123.682,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		159.577.701,00	150.688.239,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**159.787.073,00**	**151.811.921,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**159.787.073,00**	**151.811.921,00**
EKUITAS	*4.2.3*		
Ekuitas		8.580.979.636,41	8.986.322.676,11
JUMLAH EKUITAS		**8.580.979.636,41**	**8.986.322.676,11**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**8.740.766.709,41**	**9.138.134.597,11**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Abang, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang I

dr. I Komang Suwirta, S. Ked
NIP.197806102006041009

UPTD PUSKESMAS ABANG I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan	%
PENDAPATAN	*4.3.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		2.950.164.029,00	2.787.421.419,00	162.742.610,00	5,84
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)		318.718.601,00	0,00	318.718.601,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		1.165.384.307,99	0,00	1.165.384.307,99	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		21.464.600,72	17.745.190,27	3.719.410,45	20,96
Pendapatan APBN/APBD		196.277.500,00	2.295.746.728,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		**4.652.009.038,71**	**5.100.913.337,27**	**(448.904.298,56)**	**(8,80)**
BEBAN	*4.3.2*				
Beban Pegawai		1.801.307.311,00	1.554.689.012,00	246.618.299,00	15,86
Beban Barang dan Jasa		2.570.317.219,41	2.698.682.861,70	(128.365.642,29)	(4,76)
Beban Penyisihan Piutang		283.989,00	268.823,00	15.166,00	5,64
Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi		756.079.182,00	725.136.550,00	30.942.632,00	4,27
Beban Lain-lain		0,00	5.759.500,00	(5.759.500,00)	(100,00)
JUMLAH BEBAN		**5.127.987.701,41**	**4.984.536.746,70**	**143.450.954,71**	**2,88**
SURPLUS(DEFISIT) OPERASIONAL		**(475.978.662,70)**	**116.376.590,57**	**(592.355.253,27)**	**(509,00)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) NON OPERASIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**(475.978.662,70)**	**116.376.590,57**	**(592.355.253,27)**	**(509,00)**
POS LUAR BIASA		0,00	0,00		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(475.978.662,70)**	**116.376.590,57**	**(592.355.253,27)**	**(509,00)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Abang, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang I

dr. I Komang Suwirta, S. Ked
NIP.197806102006041009

BLUD PUSKESMAS ABANG I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	**8.986.322.676,11**	**7.805.250.839,81**
SURPLUS/DEFISIT-LO	(475.978.662,70)	116.376.590,57
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	70.635.623,00	1.064.695.245,73
Setoran ke Kas Daerah	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	**8.580.979.636,41**	**8.986.322.676,11**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Abang, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang I

dr. I Komang Suwirta, S. Ked
NIP.197806102006041009

UPTD PUSKESMAS ABANG I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.946.521.329,00	2.772.573.019,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	318.718.601,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usahan Lainnya	21.464.600,72	17.745.190,27
Pendapatan APBD/APBN	196.277.500,00	2.295.746.728,00
Jumlah arus Kas Masuk	**3.482.982.030,72**	**5.086.064.937,27**
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	1.777.457.436,00	1.524.970.679,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.570.649.363,00	1.677.533.792,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.348.106.799,00**	**3.202.504.471,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**134.875.231,72**	**1.883.560.466,27**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	58.806.159,00	1.358.551.632,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	69.185.200,00	417.446.778,00
Perolehan jalan,irigasi dan jaringan	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**127.991.359,00**	**1.775.998.410,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(127.991.359,00)**	**(1.775.998.410,00)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman		0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Setoran Kas ke Kas Daerah		0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	209.372,00	213.444.591,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**209.372,00**	**213.444.591,00**

Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.123.682,00	212.320.909,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**1.123.682,00**	**212.320.909,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**(914.310,00)**	**1.123.682,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**5.969.562,72**	**108.685.738,27**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**772.806.969,66**	**664.121.231,39**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**778.776.532,38**	**772.806.969,66**

menurut neraca

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Abang, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang I

dr. I Komang Suwirta, S. Ked
NIP.197806102006041009

Catatan Atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABANG I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Abang I

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Abang I

UPTD Puskesmas Abang I adalah salah satu dari 12 puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. UPTD Puskesmas Abang I merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Karangasem yang terletak di Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung Agung
2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kertamandala (wilayah kerja Pusk. Abang II)
3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kel. Padangkerta dan Kel. Karangasem
4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Budakeling (Bebandem)

Sarana kesehatan yang berada di UPTD Puskesmas Abang I terdiri dari 1 puskesmas induk, 6 puskesmas pembantu (pustu), dan 1 puskesmas keliling (pusling), serta sarana kesehatan bersumber daya masyarakat yaitu 58 Posyandu dan 14 Posbindu PTM.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK /2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 28 Desember 2022, UPTD Puskesmas Abang I ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

b. Tempat Kedudukan

UPTD Puskesmas Abang I beralamat di Jalan Ida Ketut Djelantik, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, Telp. (0363) 4301725, Email: puskesmasabang1@gmail.com.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Abang I adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43);
17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);

18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28).
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 79/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
26) Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
27) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
28) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai UPTD Puskesmas Abang I

1) Visi UPTD Puskesmas Abang I

Visi UPTD Puskesmas Abang I adalah **"Menjadi Puskesmas dengan Pelayanan Prima Demi Mewujudkan Kecamatan Abang Sehat Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi".**

2) Misi UPTD Puskesmas Abang I

Misi adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Adapun Misi UPTD Puskesmas Abang I adalah:

a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Pra Sarana Pelayanan.
b) Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Terjangkau dan Merata.
c) Meningkatkan Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor.
d) Melaksanakan Manajemen Puskesmas yang Baik dan Berkesinambungan.

3) Motto UPTD Puskesmas Abang I

Visi dan Misi yang telah ditetapkan diharapkan mampu untuk memenuhi tujuan dari pelayanan yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Abang I, seperti motto yang ditetapkan sebagai berikut:

‘’TISTA’’
T = TERAMPIL
I = INOVATIF
S = SOPAN
T = TANGGUNG JAWAB
A = AMAN

4) Strategi UPTD Puskesmas Abang I

Untuk dapat mencapai visi misi tersebut, UPTD Puskesmas Abang I memiliki startegi sebagai berikut:

a) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
b) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
c) Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.
d) Meningkatkan pembiayaan kesehatan.

5) Tata Nilai UPTD Pusksmas Abang I

Tata nilai yang ditanamkan dalam penyelenggaraan pelayanan puskesmas adalah: “Berorientasi kepada kepuasan pelanggan” yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Berpihak pada masyarakat: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
b) Bertindak cepat dan tepat: dengan pertimbangan yang cermat sehingga intervensi yang tepat dapat mengenai sasaran.
c) Kerjasama tim: dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme.
d) Integritas yang tinggi: memiliki ketulusan hati, kejujuran, berkepribadian yang teguh dan bermoral tinggi.
e) Transparan dan akuntabel: agar bias dipertanggung gugatkan kepada publik.
f) Malu, memiliki budaya malu bila tidak melaksanakan sesuai tugas dengan sebaik- baiknya.
g) Efektifitas dan efisiensi: menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin.
h) Partisipasi, dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses

pembangunan kesehatan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

e. Program Pelayanan UPTD Pusksmas Abang I

Program Pelayanan UPTD Puskesmas Abang I terdiri dari:

1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas
   Di UPTD Puskesmas Abang I ada 5 kegiatan esensial dan 1 kegiatan perkesmas. Lima Kegiatan Esensial tersebut melputi:
   a) Pelayanan Kesehatan Keluarga (Ibu, Anak dan Keluarga Berencana)
   b) Pelayanan Gizi Masyarakat
   c) Pelayanan Promosi Kesehatan
   d) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
   e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat
   Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/ praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.
3) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
   a) Upaya Pelayanan UKGS/UKGM
      UKGS/UKGM adalah suatu komponen dari UKS dan merupakan tehnis pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak sekolah dan di posyandu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak serta bumil.
   b) Upaya Pelayanan Lansia
      Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
   c) Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
   d) Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
   e) Upaya Kesehatan Yankestradkom.
   f) Upaya Kesehatan Kerja.
   g) Upaya Kesehatan Indera.

4) Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi dan Laboratorium
   a) Upaya Kesehatan Perorangan
      Upaya kesehatan perorangan di UPTD Puskesmas Abang I meliputi: poli umum, poli gigi dan mulut, ruang KIA KB dan imunisasi, ruang konsultasi gizi, laboratorium, Farmasi, kasir, loket pendaftaran dan konseling.
   b) Farmasi
      Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
   c) Laboratorium
      Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

f. Jenis-jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Abang I

Jenis-jenis pelayanan Kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Abang I adalah:

1) Poliklinik
   Poliklinik rawat jalan terdiri dari Poli umum, Poli gigi, KIA/KB, imunisasi, ruang konsultasi termasuk loket pendaftaran prosedur rawat jalan pada poliklinik menguraikan langkah-langkah pemberian pelayanan kepada pasien rawat jalan mulai dari pemilahan kelompok pasien, pendaftaran dan pembayaran jasa layanan, dan pemberian layanan kesehatan pada masing-masing poli, serta tindakan lanjutan yang diperlukan oleh pasien.
2) Rawat Inap
   UPTD Puskesmas Abang I memiliki ruangan khusus rawat inap 3 bangsal dengan kapasitas 10 bed.
3) Unit Gawat Darurat
   UPTD Puskesmas Abang I memiliki ruang khusus unit gawat darurat, tetapi memiliki ruang tindakan medik untuk mengatasi tindakan kegawat daruratan pelayanan primer. Prosedur pada penanganan kasus Gawat Darurat menguraikan langkah-langkah mengutamakan penanganan pasien yang sifatnya gawat dan darurat sejak pasien datang hingga tindakan lanjutan yang diperlukan pasien seperti dirujuk ke rumah sakit.
4) Laboratorium
   Prosedur penunjang medis menguraikan pemberian layanan berupa layanan laboratorium kepada pasien sesuai surat pengantar dari poli umum, poli KIA-KB, ruang konsultasi, ruang UGD.

5) Apotek
   Prosedur layanan obat menguraikan pemberian pelayanan penyediaan obat-obatan kepada pasien sesuai resep dari poli-poli rawat jalan, ruang UGD dan pelayanan di luar gedung seperti kegiatan posyandu (balita dan lansia).
6) Pelayanan Gizi
   Prosedur pelayanan gizi menguraikan pemberian layanan gizi berupa penyuluhan PUGS, konseling atau klinik gizi untuk terapi diet untuk pasien poliklinik, dan dalam bentuk perencanaan serta pengolahan makanan biasa/khusus.
7) Pelayanan Ambulance
   Prosedur pelayanan ambulance menguraikan pemberian layanan ambulance bagi pasien yang memerlukannya dalam rangka rujukan ke rumah sakit.
8) Rekam Medik
   Prosedur rekam medik menguraikan proses penanganan data pasien mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen/data pasien, pengkodean, pengindeksan, dan pengarsipan.
9) Kesehatan Lingkungan
   Prosedur kesehatan lingkungan menguraikan langkah-langkah pemeriksaan air limbah, limbah padat berbahaya, serta air bersih secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

g. Sasaran, Indikator, Tenaga Kerja

No	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN	SASARAN	CAPAIAN	CAPAIAN	
								VARIABEL	SUB VARIABEL
1	2	3		4	5	6	7	8	9
UKM ESENSIAL									
1	Pelayanan Kesehatan Keluarga							**98.99%**	
		Kesehatan Ibu						*100.36%*	
		1	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	Bumil	100%	375	380		101.33%
		2	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Bumil	100%	342	342		100.00%
		3	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai Standar (K6)	Bumil	100%	363	363		100.00%
		4	Cakupan Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung, infeksi)	Bumil	90%	44	44		100.00%
		5	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (Pn)	Bulin	100%	363	363		100.00%
		6	Cakupan pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF 4)	Bulin	100%	375	378		100.80%
		Kesehatan Bayi						*101.96%*	
		1.	Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN 1)	bayi	100%	366	366		100%
		2.	Cakupan Pelayanan Neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN3)	bayi	100%	363	363		100%
		3.	Cakupan Penanganan komplikasi neonataus	bayi	80%	26	26		100%
		4.	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 12 bln (Kunjungan Bayi)	bayi	100%	409	441		108%
		Upaya Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah						*102.26%*	
		1	Cakupan Pelayanan Anak Balita (12-59 bulan) sesuai standar	Balita	100%	1918	2048		106.78%

		2	Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS	Balita	100%	764	764		100.00%
		3	Cakupan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	APRAS	100%	541	541		100.00%
		Upaya Kesehatan Sekolah						*100.00%*	
		1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	siswa	100%	3,028	3,028		100.00%
		2	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SD/ MI	siswa	100%	3,028	3028		100.00%
		3	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SMP/ MTs	siswa	100%	1,561	1561		100.00%
		Pelayanan Keluarga Berencana						*89.39%*	
		1.	Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	akseptor	70%	6,080	4,790		78.78%
		2.	Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan	akseptor	100%	363	363		100.00%
		Pelayanan Calon Pengantin						*100.00%*	
			Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Skrining Kesehatan	Catin	100%	36	36		100.00%
		Pelayanan Kesehatan Usila						*95.43%*	
			Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Orang	100%	4,374	4,174		95.43%
2	**Pelayanan Promosi Kesehatan**							**100.00%**	
		PHBS 5 Tatanan						*100.00%*	
		1	Tatanan Rumah Tangga Sehat	rumah	90%	1680	1680		100.00%
		2	Tatanan Institusi Pendidikan / sekolah	Sekolah	50%	29	29		100.00%
		3	Tatanan Institusi Kesehatan	sarkes	80%	9	9		100.00%
		4	Tatanan TTU	TTU	40%	2	2		100.00%
		5	Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	45%	8	8		100.00%
		Pemberdayaan Masyarakat						*100%*	
		1	Pemberdayaan melalui penyuluhan	Kader UKBM	100%	3	3		100.00%
		Pembinaan UKBM						*100%*	
		1	Pembinaan Posyandu	posyandu	80%	58	58		100.00%
		2	Persentase Posyandu Aktif	posyandu	100%	58	58		100.00%
		Penyuluhan Narkoba						*100%*	

		1	Penyuluhan Narkoba Minimal 5 kali dalam setahun	Masyarakat, sekolah, kelompok	5 kali	5	5		100.00%
		Promosi kesehatan						*100%*	
		1	Promosi Kesehatan untuk program prioritas di dalam Gedung Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	Masyarakat	12 kali	12	12		100.00%
		2	Promosi kesehatan untuk program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar gedung puskesmas) minimal 12 kali setahun	Masyarakat, sekolah, kelompok	12 kali	12	12		100.00%
		Program Pengembangan						100.00%	
		1	Pembinaan UKBM Lain	kelompok peduli kesehatan	3 Kali	3	3		100%
		2	Pergerakan Germas 5 indikator	Masyarakat, sekolah, kelompok	3 Kali	3	3		100%
		3	Sosialisasi/ pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	1 Kali	1	1		100%
3	**Pelayanan Kesehatan Lingkungan**							86.08%	
		Pengawasan Kualitas Air						95.13%	
		1	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/ layak	Penduduk	95%	30,972	29,615		95.62%
		2	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/ IKL	Sarana	100%	417	354		84.89%
		3	Persentase Pengambilan sampel air	Sampel air	100%	61	61		100.00%
		4	Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Sarana	85%	6	6		100.00%
		STBM						90.73%	
		1	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi dasar	KK	100%	12,477	12,125		97.18%
		2	Jumlah Desa ODF	Desa	50%	8	6		75.00%
		3	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	100%	8	8		100.00%
		Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan		Sarana	90%	35	35		100.00%
		Persentase Tempat Pengeloaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan		Sarana	25%	37	34		91.89%
		Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis		Fasyankes	100%	12	12		100.00%
		Persentase Rumah Sehat		Rumah	25%	12,477	4,833		38.74%

4	Pelayanan Gizi	*Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat*						94.49%	
		1	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	Bumil	80%	14	14		100%
		2	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet darah (TTD)	Bumil	84%	336	336		100%
		3	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan mendapat Asi Eksklusif	Bayi	60%	259	241		93%
		4	Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	Bayi	70%	282	201		71.28%
		5	Persentase Cakupan Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	Balita	85%	61	61		100%
		6	Persentase Remaja Putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	rematri	58%	1383	1383		100%
		7	Persentase cakupan vitamin A pada balita	balita	90%	1610	1,528		95%
		8	Persentase Anemia pada ibu hamil	Ibu Hamil	33%	363	13		3.6%
		10	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Bayi	2,5%	282	10		3.5%
		11	Persentase Balita Kurus (Wasting)	balita	7%	1613	35		2.2%
		12	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	balita	5,02%	1613	106		6.6%
		13	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	balita	85%	1769	1613		91%
		14	Persentase Cakupan Ibu Nifas Mendapat kapsul vitamin A	Ibu Nifas	82%	363	363		100%
5	Upaya Pengendalian Penyakit							94%	
		TB Paru						***90%***	
		1	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Orang	>90%	34	28		82%
		2	Success Rate (Angka Keberhasilan Pengobatan)	Orang	>90%	31	30		97%
		3	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	100%	165	122		74%
		Malaria						*#DIV/0!*	
		1	Persentase Penderita Positif Malaria yang diobati sesuai standar	Orang	100%	0	0		#DIV/0!
		2	Angka Kesakitan Malaria/ Anual Parasite Incident (API)	Orang	< 1	0	0		#DIV/0!
		Kusta							
		1	Angka Prevalensi kusta	Orang	< 1	0	0		#DIV/0!
		2	Angka Kesembuhan / RFT Rate	Orang	100%	0	0		
		Diare						***100.00%***	
		1	Presentase penderita diare yang mendapat pelayanan standar	Orang	100%	518	518		100%
		Hepatitis						***89%***	
		1	Presentase Deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	Orang	100%	375	335		89%
		ISPA						*60.48%*	
		1	Presentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	Orang	100%	615	615		100%
		2	Cakupan penemuan pneumonia balita	Orang	100%	62	13		21%

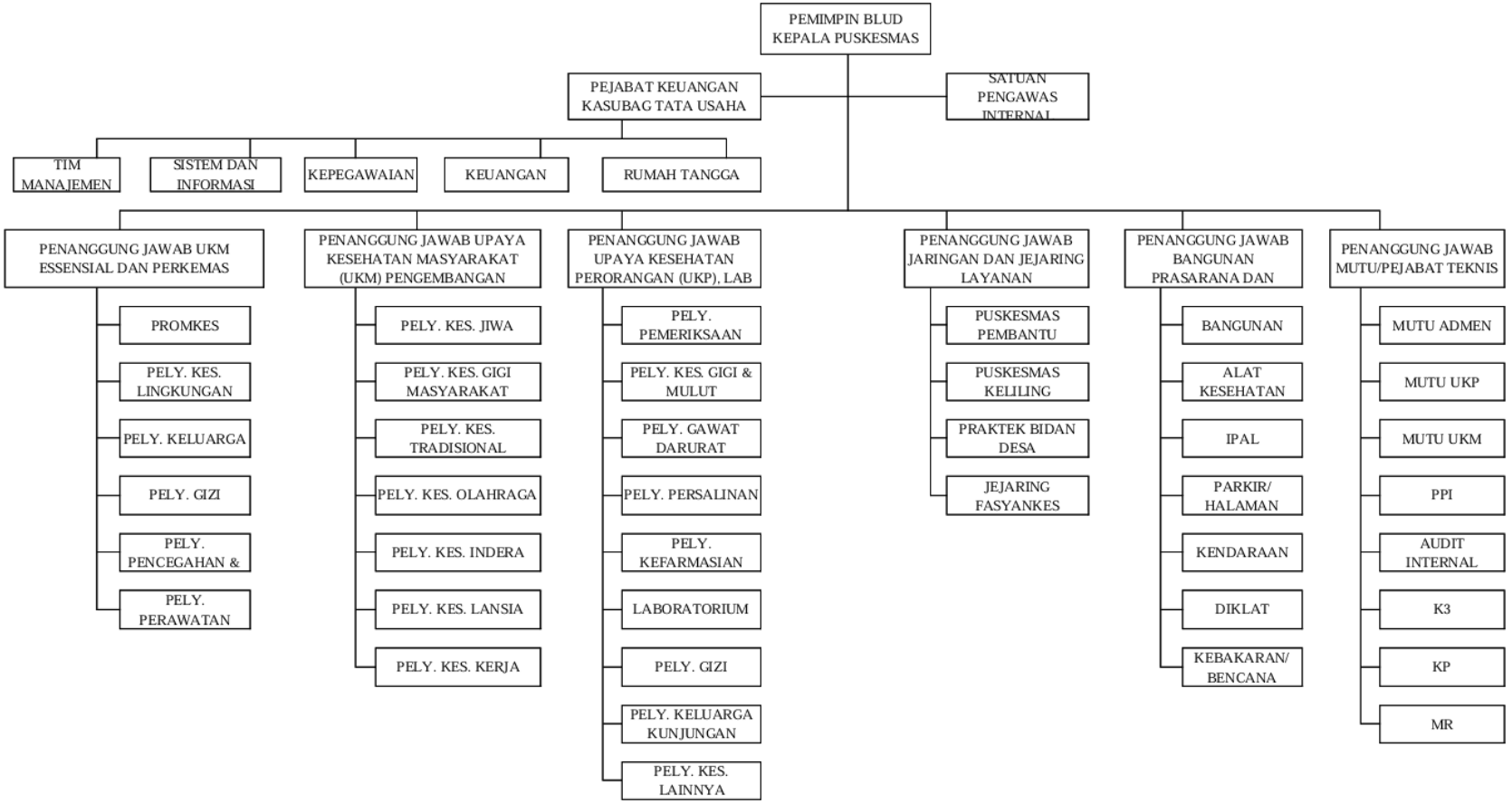
		Demam Berdarah Dengue (DBD)						***96.00%***	
		1	Angka kesakitan DBD/ Insiden rate (IR) DBD	orang	50 ribu per 100.000 penduduk	50	113		3.6 per 1000 penduduk
		2	Angka bebas jentik (ABJ)	rumah	> 95 %	7,848	7,561		96%
		Pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS						***95%***	
		1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	penduduk beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, IMS, WPS, Waria/ transgender, WBP)	100%	375	355		95%
		Pencegahan dan Penanggulangan Rabies						*100%*	
		1	Presentase kasus GHPR ditatalaksana standar	Orang	100%	443	443		100%
		Kecacingan						100%	
		1	Presentase cakupan POPM kecacingan	Orang	100%	5624	5624		100%
		Surveilance Penyakit						100%	
		1	Kelengkapan Laporan	puskesmas	90%	53	53		100%
		2	Ketepatan Laporan	puskesmas	100%	53	53		100%
		3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal/ alert Penyakit potensial KLB	100%	66	66		100%
		Imunisasi						108%	
		1	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Bayi	100%	378	398		105%
		2	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	Bayi	100%	303	379		125%
		3	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	Anak	100%	372	414		111%
		4	Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lengkap di usia sekolah dasar	Anak	80%	600	596		99%
		5	Persentase Wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	WUS	80%	375	373		99%
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular					98%	
		1	Persentase meningkatnya desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpandu (posbindu)	desa	70%	8	7		88%
		2	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	100%	1545	1,545		100%
		3	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	100%	428	428		100%

		4	Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining penyakit tidak menular sesuai standar di Posbindu	orang	100%	9296	9,296		100%
		5	Persentase ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	100%	51	53		104%
UKM PENGEMBANGAN									
1	Kesehatan Tradisional							100%	
		1	Persentase Pembinaan tanaman obat keluarga pada keluarga	keluarga	3%	3	3		100%
		2	Persentase Pembinaan pada kelompok Asuhan Mandiri	kelompok asman	60%	3	3		100%
		3	Persentase Pembinaan Penyehat Tradisional	orang	70%	54	54		100%
2	Upaya Kesehatan Olahraga							100%	
		1	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah raga diwilayah kerjanya	Puskesmas	100%	1	1		100%
		2	Persentase jamaah haji yang melakukan tes kebugaran	Jamaah haji	100%				#DIV/0!
4	Kesehatan Gigi Masyarakat	1	Persentase Desa yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	desa	60%	8	8		100%
5	Upaya kesehatan Gigi Sekolah							100%	
		1	Persentase Pembinaan kesehatan gigi di TK	TK	80%	10	10		100%
		2	Persentase Pembinaan dan bimbingan sikat gigi masal pada SD/ MI	SD/ MI	80%	29	29		100%
6	Upaya Kesehatan Kerja							100%	
		1	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Puskesmas	50%	1	1		100%
		2	Persentase Pos UKK yang dibina	Pos UKK	100%	1	1		100%
UKP									
1	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan							
		1	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat sesuai standar	FKTP	70%	70%	42.35%		42.35%
	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkemas)							98%	
		1	Persentase keluarga rawan yang dibina	Keluarga	80%	50	49		98%
	Pelayanan Kefarmasian							*100.00%*	
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Puskesmas	100%	1	1		100%
		2	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Obat	96%	40	40		100%
	Pemeriksaan Laboratorium							*100.00%*	

		1	Kemampuan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis di wilayah kerja puskesmas	Specimen	20%	2515	2515		100%
		1	Kemampuan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen sampel lingkungan di wilayah kerja puskesmas	Specimen	50%	19	19		100%

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Abang I

Struktur dan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Abang I ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah serta mengacu juga pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Puskesmas. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Abang I yang berlaku Tahun 2023 adalah sebagai berikut:


PEMIMPIN BLUD
KEPALA PUSKESMAS
PEJABAT KEUANGAN
KASUBAG TATA USAHA
SATUAN
PENGAWAS
INTERNAL
TIM
MANAJEMEN
SISTEM DAN
INFORMASI
KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
RUMAH TANGGA
PENANGGUNG JAWAB UKM
ESSENSIAL DAN PERKEMAS
PENANGGUNG JAWAB UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
(UKM) PENGEMBANGAN
PENANGGUNG JAWAB
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN (UKP), LAB
PENANGGUNG JAWAB
JARINGAN DAN JEJARING
LAYANAN
PENANGGUNG JAWAB
BANGUNAN
PRASARANA DAN
PENANGGUNG JAWAB
MUTU/PEJABAT TEKNIS
PROMKES
PELY. KES.
LINGKUNGAN
PELY. KELUARGA
PELY. GIZI
PELY.
PENCEGAHAN &
PELY.
PERAWATAN
PELY. KES. JIWA
PELY. KES. GIGI
MASYARAKAT
PELY. KES.
TRADISIONAL
PELY. KES. OLAHRAGA
PELY. KES. INDERA
PELY. KES. LANSIA
PELY. KES. KERJA
PELY.
PEMERIKSAAN
PELY. KES. GIGI &
MULUT
PELY. GAWAT
DARURAT
PELY. PERSALINAN
PELY.
KEFARMASIAN
LABORATORIUM
PELY. GIZI
PELY. KELUARGA
KUNJUNGAN
PELY. KES.
LAINNYA
PUSKESMAS
PEMBANTU
PUSKESMAS
KELILING
PRAKTEK BIDAN
DESA
JEJARING
FASYANKES
BANGUNAN
ALAT
KESEHATAN
IPAL
PARKIR/
HALAMAN
KENDARAAN
DIKLAT
KEBAKARAN/
BENCANA
MUTU ADMEN
MUTU UKP
MUTU UKM
PPI
AUDIT
INTERNAL
K3
KP
MR

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Abang I terdiri dari:

1) Kepala Puskesmas;
2) Tata Usaha; dan
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
8) Penanggung Jawab Mutu

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Puskesmas
   Wewenang:
   a) Memeriksa dan menganalisa laporan-laporan kegiatan stafnya dan sekaligus mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.
   b) Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang di bawahnya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

   Tanggung Jawab:
   a) Pelaksanaan tugas sehari-hari
   b) Melakukan pengawasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
   c) Mengadakan koordinasi dengan kepala kecamatan dan lintas sektor dalam upaya pembangunan Kesehatan di wilayah kerja;
   d) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka miningkatkan derajat Kesehatan;
   e) Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan dibantu oleh staf puskesmas;
   f) Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan;
   g) Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Induk, Pustu, Pusling dan lain-lain.
2) Tata Usaha
   Wewenang:
   a) Menilai kelengkapan administrasi rumah tangga;
   b) Menilai kelengkapan administrasi kepegawaian;
   c) Menilai Kelengkapan administrasi keuangan.

   Tanggung Jawab:
   a) Memonitoring data kepegawaian (kinerja)
   b) Memonitoring kinerja rumah tangga
   c) Memonitoring kinerja keuangan
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
   Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Tanggung Jawab:
a) Promosi Kesehatan
b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
c) Pelayanan Kesehatan Keluarga
d) Pelayanan Gizi
e) Pelayanan P2P
f) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Pengembangan;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Pengembangan

Tanggung Jawab:
a) Pelayanan Kesehatan Jiwa
b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional
d) Pelayanan Kesehatan Olahraga
e) Pelayanan Kesehatan Indera
f) Pelayanan Kesehatan Lansia
g) Pelayanan Kesehatan Kerja

5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab membina jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;

b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengidentifikasi dan Menganalisa Data Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja jejaring pelayanan Puskesmas

7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
Tanggung Jawab:
Bertanggung Jawab memelihara sarana dan prasarana dan peralatan puskesmas
a) Bangunan
b) Alat Kesehatan
c) IPAL
d) Parkir/Halaman
e) Kendaraan
f) Diklat
g) Kebakaran/Kecelakaan

8) Penanggung Jawab Mutu
Wewenang:
a) Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua penanggung jawab mutu;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Memelihara Dokumen/Rekaman;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses pelayanan
Tanggung Jawab:
a) Menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem mutu manajemen
b) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjamin muta dalam proses diklat berdasarkan standar mutu

i. Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Pusksmas Abang I

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Abang I Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, diketahui susunan pejabat pengelola BLUD sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr.I Komang Suwirta, S.Ked. NIP.197806102006041009	Pemimpin BLUD
2.	I Made Selamet, SST NIP.198403252006041005	Pejabat Keuangan
3.	Ni Wayan Henihayati, S.Tr.Kes. NIP.197312151995032001	Pejabat Teknis Bidang UKM Eseensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat

No	Nama	Jabatan
4.	drg. Ni Wayan Naskaryani NIP.196509062002122001	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
5.	dr. Ni Kadek Ratnasari Agustini NIP.198508292014122002	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	I Wayan Sudarianta, A.Md. Kep. NIP.197512191994021002	Pejabat Teknis Bidang jaringan PelayananPuskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	I Ketut Sumeadnyana. NIP.196612311987031102	Pejabat teknis Bidang bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas
8.	Ni Putu Wahyu Ekawati, S.Kep.Ns. NIP.197209061995032005	Pejabat Teknis Bidang Mutu

j. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Abang I per 31 Desember 2025 sebanyak 88 dan 31 Desember 2024 sebanyak 78 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS : 41 Orang
- Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil : 13 Orang
- PPPK : 33 Orang
- Pegawai Kontrak : 1 Orang

Jumlah : 88 Orang

Jumlah pegawai berdasarkan pegawai berdasarkan profesi yaitu:

No	Jabatan	2025	2024
a.	**Tenaga Medis**		
	Struktural Medis		
1	Dokter Spesialis		
2	Dokter Umum	5	4
3	Dokter Gigi		1
4	Paramedis Non Perawat	3	16
5	Perawat	17	20
6	Bidan	29	23
	Jumlah		64

No	Jabatan	2025	2024
7	Apoteker	1	
8	Asisten Apoteker	2	
8	Struktural Non Medis	31	14
	Total Pegawai	**88**	**78**

k. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2021 UPTD Puskesmas Abang I melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokan sebagai berikut:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Karangasem.

l. Pembiayaan UPTD Puskesmas

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikthisar Kebijakan Akuntasi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Abang I ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (historical cost) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Abang I.

3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi Puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan setara kas;
   b) Investasi jangka pendek;
   c) Piutang dari kegiatan blud;
   d) Persediaan;
   e) Investasi jangka panjang;
   f) Aset tetap;
   g) Aset lainnya;
   h) Kewajiban jangka pendek;
   i) Kewajiban jangka panjang; dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;

e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
f) Pos Luar Biasa; dan
g) Surplus/Defisit-LO.

3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a) Pembayaran Pegawai;
   b) Pembayaran Barang;
   c) Pembayaran Bunga; dan
   d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
   a) Ekuitas awal;
   b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
   c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
      (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
      (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
      (3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
   d) Ekuitas akhir.

h. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum,

yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;

c) Pendapatan bunga;
d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh blud.

18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Serara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Piutang

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam janga waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal penagihan pertama, kedua, dan ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c) Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Dalam hal penagihan pertama, kedua, dan ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan

b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c) Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Pembentukan Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa maníaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan

tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
b. Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakompabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat LaboratoriumLingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produkai Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan / Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
InstalasiPengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);

b) Aset Sewaan;

c) Aset yang tidak digunakan:

d) Beban yang ditangguhkan;
e) Lainnya

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiaban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Puskesmas kepada pihak lain. Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai

pembayaran jasa tertentu tetapi Puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (*cut off*). Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.
d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas; dan
b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal.
c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.
d) Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
e) Pada akhir periode pelaporan, nilai ekuitas yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah selisih dari aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(1) Pendapatan usaha rawat jalan;
(2) Pendapatan usaha rawat darurat;
(3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Hibah
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

c) Pendapatan APBD
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

d) Pendapatan Usaha Lainnya
Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
(1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
(2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
(3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
(4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;

b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.

d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.

f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.

g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
   (1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.
   (2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.
   (3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.
   (4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.
c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.
e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai
   Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai neger sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Puskesmas yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
b) Beban Barang
   Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
c) Beban Jasa
   Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
d) Beban Pemeliharaan
   Beban Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja pemeliharaan. Beban pemeliharaan terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.

e) Beban Langganan Daya/Jasa
Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.

f) Beban Perjalanan Dinas
Beban Perialanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas adalah biaya yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain
Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang teriadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutanberlalunya waktu.

i) Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

j) Beban Operasional Lainnya
Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar
Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset
Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya
Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

(1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban

pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.

(2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Abang I yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, UPTD Puskesmas Abang I menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak: 12.621.470.9-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Abang I Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan-LRA

Jumlah realiasasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.967.985.929,72 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.790.318.209,27 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	2.946.521.329,00	0,00	2.772.573.019,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	21.464.600,72	0,00	17.745.190,27
	Jumlah	**0,00**	**2.967.985.929,72**	**0,00**	**2.790.318.209,27**

4.1.2 Belanja-LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksanya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.476.098.158,00 atau 80,01% dari anggaran sebesar Rp 4.344.560.964,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 4.978.502.881,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	4.135.580.864,00	3.348.106.799,00	80,96	3.202.504.471,00
b.	Belanja Modal	208.980.100,00	127.991.359,00	61,25	1.775.998.410,00
	Jumlah	**4.344.560.964,00**	**3.476.098.158,00**	**80,01**	**4.978.502.881,00**

a. Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.348.106.799,00 atau 80,96% dari anggaran sebesar Rp 4.135.580.864,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 3.202.504.471,00. Rincian atas jumlah Belanja Operasional sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Pegawai	1.953.124.250,00	1.777.457.436,00	91,01	1.524.970.679,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	2.182.456.614,00	1.570.649.363,00	71,97	1.677.533.792,00
c.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.135.580.864,00**	**3.348.106.799,00**	**80,96**	**3.202.504.471,00**

Rician dari Belanja Opersional:

1) Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.777.457.436,00 atau 91,01% dari anggaran sebesar Rp 1.953.124.250,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.524.970.677,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	33.006.000,00	33.006.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	25.340.141,00
3	Belanja Pegawai BLUD	1.920.118.250,00	1.744.451.436,00	0,00	1.499.630.536,00
	Jumlah	**1.953.124.250,00**	**1.777.457.436,00**	**91,01**	**1.524.970.677,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.570.649.363,00 atau 71,97% dari anggaran sebesar Rp 2.182.456.614,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp1.677.533.792,00. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.329.600,00	21.358.000,00	39,31	13.332.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	25.757.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.456.000,00	23.456.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	92.400.000,00	72.075.000,00	78,00	157.300.000,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.520.000,00	8.989.650,00	78,04	0,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	690.432,00	539.400,00	78,13	981.280,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	863.040,00	674.250,00	78,13	1.226.720,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	360.845.000,00	339.966.486,00	94,21	444.980.461,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.638.352.542,00	1.103.590.577,00	67,36	1.033.956.331,00
	Jumlah	**2.182.456.614,00**	**1.570.649.363,00**	**71,97**	**1.677.533.792,00**

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 127.991.359,00 atau 61,25% dari anggaran sebesar Rp 208.980.100,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.775.998.410,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.980.100,00	58.806.159,00	42,31	1.358.551.632,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	69.185.200,00	98,84	417.446.778,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**208.980.100,00**	**127.991.359,00**	**61,25**	**1.775.998.410,00**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 58.806.159,00 atau 42,31% dari anggaran sebesar Rp 138.980.100,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.358.551.632,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	138.980.100,00	58.806.159,00	42,31	1.358.551.632,00
	Jumlah	**138.980.100,00**	**58.806.159,00**	**42,31**	**1.358.551.632,00**

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 69.185.200,00 atau 98,84% dari anggaran sebesar Rp 70.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 417.446.778,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Pagar	70.000.000,00	69.185.200,00	98,84	417.446.778,00
	Jumlah	**70.000.000,00**	**69.185.200,00**	**98,84**	**417.446.778,00**

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran menunjukkan jumlah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari pendapatan BLUD. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.913.807,00 dan Rp75.132.396,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2) Kas di Bank		
PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Amlapura Nomor Rekening: 1590087809 a.n 1050084BOKPKMABANGI	20.913.807,00	75.132.396,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**20.913.807,00**	**75.132.396,00**

b. Kas di BLUD

Kas pada BLUD menunjukkan jumlah kas yang berada di rekening BLUD yang digunakan untuk aktivitas operasional. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas masing-masing sebesar Rp757.862.725,38 dan Rp697.674.573,66 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.097.250,00
3) Kas di Bank		
BLUD - Bank BPD Bali (No. Rek 0220105002275) a.n BLUD UPTD Puskesmas Abang I	757.862.725,38	694.577.323,66
Jumlah Kas pada BLUD	**757.862.725,38**	**697.674.573,66**

c. Piutang Layanan

Piutang Layanan pada UPTD Puskesmas Abang I per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp28.398.900,00 dan Rp26.882.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Pelayanan RJTP	28.398.900,00	26.882.300,00
Jumlah Piutang	**28.398.900,00**	**26.882.300,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada UPTD Puskesmas Abang I per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp283.989,00 dan Rp268.823,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Penyisihan Piutang	(283.989,00)	(268.823,00)
Jumlah Penyisihan Piutang	**(283.989,00)**	**(268.823,00)**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang per 31 Desember 2025:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan
Piutang Pelayanan	28.398.900,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Bruto	**28.398.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
& Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**283.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang per 31 Desember 2024:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan
Piutang Pelayanan	26.882.300,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Bruto	**26.882.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
& Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**268.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. **Persediaan BLUD**

Persediaan BLUD merupakan barang habis pakai yang digunakan dalam operasional UPTD Puskesmas Abang I. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp579.757.107,01 dan Rp430.581.792,43 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Alat Tulis Kantor	0,00	221.500,00
Bahan Komputer	2.571.225,00	1.440.000,00
Kertas dan Cover	783.660,00	880.000,00
Barang Cetakan	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00
Benda Pos	1.000.000,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	572.799.062,01	427.211.292,43
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	952.935,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00
Alat Listrik	1.650.225,00	0,00
Perabotan Kantor	0,00	829.000,00
Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	**579.757.107,01**	**430.581.792,43**

Berikut disajikan saldo mutasi Persediaan BLUD per 31 Desember 2025:

URAIAN	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Tulis Kantor	221.500,00	0,00	221.500,00	0,00
Bahan Komputer	1.440.000,00	9.770.885,00	8.639.660,00	2.571.225,00
Kertas dan Cover	880.000,00	5.205.900,00	5.302.240,00	783.660,00
Barang Cetakan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	427.211.292,43	1.625.246.456,99	1.479.658.687,41	572.799.062,01
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	4.230.210,00	3.277.275,00	952.935,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	0,00	8.599.725,00	6.949.500,00	1.650.225,00
Perabotan Kantor	829.000,00	0,00	829.000,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	45.160.980,00	45.160.980,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**430.581.792,43**	**1.701.214.156,99**	**1.552.038.842,41**	**579.757.107,01**

Berikut disajikan saldo mutasi Persediaan BLUD per 31 Desember 2024:

URAIAN	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Tulis Kantor	0,00	4.505.000,00	4.283.500,00	221.500,00
Bahan Komputer	0,00	10.022.000,00	8.582.000,00	1.440.000,00
Kertas dan Cover	0,00	16.000.000,00	15.120.000,00	880.000,00
Barang Cetakan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Kuasi	1.050.499,50	0,00	1.050.499,50	0,00
Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	406.857.045,90	1.388.742.032,73	1.368.387.786,20	427.211.292,43
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	0,00	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00
Perabotan Kantor	0,00	4.286.500,00	3.457.500,00	829.000,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**407.907.545,40**	**1.431.973.532,73**	**1.409.299.285,70**	**430.581.792,43**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.354.118.159,02 dan Rp7.908.132.358,02 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Tanah	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	5.760.831.401,65	5.627.951.618,65
3) Gedung dan Bangunan	8.354.526.164,02	8.285.340.964,02
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.512.888,00	27.512.888,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**14.142.870.453,67**	**13.940.805.470,67**
Akumulasi Penyusutan	(6.788.752.294,65)	(6.032.673.112,65)
Nilai Buku	**7.354.118.159,02**	**7.908.132.358,02**

Rincian mutasi Aset Tetap tahun 2025, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	5.627.951.618,65	132.879.783,00	0,00	5.760.831.401,65
3) Gedung dan Bangunan	8.285.340.964,02	69.185.200,00	0,00	8.354.526.164,02
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.512.888,00	0,00	0,00	27.512.888,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**13.940.805.470,67**	**202.064.983,00**	**0,00**	**14.142.870.453,67**
Akumulasi Penyusutan	**6.032.673.112,65**	**0,00**	**0,00**	**6.788.752.294,65**
Nilai Buku	**7.908.132.358,02**			**7.354.118.159,02**

Rincian mutasi Aset Tetap tahun 2024, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	4.275.159.486,65	1.358.551.632,00	5.759.500,00	5.627.951.618,65
3) Gedung dan Bangunan	7.867.894.186,02	417.446.778,00	0,00	8.285.340.964,02
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.512.888,00	0,00	0,00	27.512.888,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**12.170.566.560,67**	**1.775.998.410,00**	**5.759.500,00**	**13.940.805.470,67**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	3.388.335.926,65	414.153.056,00	0,00	3.802.488.982,65
3) Gedung dan Bangunan	1.900.625.605,00	308.690.754,00	0,00	2.209.316.359,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.575.031,00	2.292.740,00	0,00	20.867.771,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi	**5.307.536.562,65**	**725.136.550,00**	**0,00**	**6.032.673.112,65**
Nilai Buku				
1) Tanah	0,00			0,00
2) Peralatan dan Mesin	886.823.560,00			1.825.462.636,00
3) Gedung dan Bangunan	5.967.268.581,02			6.076.024.605,02
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.937.857,00			6.645.117,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00			0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00			0,00
Jumlah Nilai Buku	**6.863.029.998,02**			**7.908.132.358,02**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	54.498.240,00	54.498.240,00
Jumlah Harga Perolehan	**54.498.240,00**	**54.498.240,00**
Akumulasi Penyusutan	(54.498.240,00)	(54.498.240,00)
Nilai Buku	**0,00**	**0,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2025, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	54.498.240,00	0,00	0,00	54.498.240,00
Jumlah Harga Perolehan	**54.498.240,00**	**0,00**	**0,00**	**54.498.240,00**
Akumulasi Penyusutan	**54.498.240,00**	**0,00**	**0,00**	**54.498.240,00**
Nilai Buku	**0,00**			**0,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2024, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain				
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	68.498.240,00	0,00	14.000.000,00	54.498.240,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**68.498.240,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**54.498.240,00**
Akumulasi Penyusutan				
1) Peralatan dan Mesin	68.498.240,00	0,00	14.000.000,00	54.498.240,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**68.498.240,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**54.498.240,00**
Nilai Buku	**0,00**			**0,00**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) UPTD Puskesmas Abang I per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp209.372,00 dan Rp1.123.682,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	209.372,00	1.123.682,00
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga	**209.372,00**	**1.123.682,00**

b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 159.577.701,00 dan Rp 150.688.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Utang Jasa Pelayanan ASN	155.079.726,00	131.229.851,00
Utang Jasa Pelayanan Non ASN	4.497.975,00	19.458.388,00
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Pertiga	**159.577.701,00**	**150.688.239,00**

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.580.979.636,41 dan Rp8.986.322.676,11 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Ekuitas Awal	8.986.322.676,11	7.805.250.839,81
2) Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(475.978.662,70)	116.376.590,57
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	70.635.623,00	1.064.695.245,73
Ekuitas Akhir	**8.580.979.636,41**	**8.986.322.676,11**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Lapoaran Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Abang I per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.652.009.038,71 dan Rp5.100.913.337,27 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.950.164.029,00	2.787.421.419,00
b) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	318.718.601,00	0,00
c) Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
d) Pendapatan Hibah	1.165.384.307,99	0,00
e) Pendapatan Usaha Lainnya	21.464.600,72	17.745.190,27
f) Pendapatan APBN/APBD	196.277.500,00	2.295.746.728,00
Jumlah Pendapatan	**4.652.009.038,71**	**5.100.913.337,27**

4.3.2 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.127.987.70,41 dan Rp4.984.746,70 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Pegawai	1.801.307.311,00	1.554.689.012,00
b. Beban Barang dan Jasa	2.570.317.219,41	2.698.682.861,70
c. Beban Penyisihan Piutang	283.989,00	268.823,00
d. Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi	756.079.182,00	725.136.550,00
e. Beban Lain-lain	0,00	5.759.500,00
Jumlah Beban Operasional	**5.127.987.701,41**	**4.984.536.746,70**

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Pegawai		
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	1.801.307.311,00	1.546.529.012,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00
Jumlah Beban Pegawai	**1.801.307.311,00**	**1.554.689.012,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Barang Barang/Persediaan	2.127.830.062,41	1.796.354.470,70
Beban Jasa	362.117.467,00	835.243.691,00
Beban Pemeliharaan	51.849.690,00	43.326.700,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	28.520.000,00	23.758.000,00
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**2.570.317.219,41**	**2.698.682.861,70**

Beban Barang:

	2025	2024
Beban Alat Tulis Kantor	3.231.254,00	4.283.500,00
Beban Kertas dan Cover	5.302.240,00	15.120.000,00
Beban Bahan Cetak	4.182.000,00	74.762.300,00
Beban Bahan Bakar Pelumas	60.079.300,00	50.770.700,00
Beban Alat Listrik dan Elektronik	6.949.500,00	8.418.000,00
Beban Benda Pos	2.000.000,00	0,00
Beban Bahan Komputer	8.639.660,00	8.582.000,00
Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.749.000,00	25.940.000,00
Beban Obat-Obatan	1.239.243.299,41	1.269.178.757,31
Beban Kuasai	0,00	1.050.499,50
Beban Bahan - Bahan Lainnya	3.277.275,00	3.457.500,00
Beban Bahan Kimia	45.160.980,00	27.950.040,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	23.924.080,00	9.967.520,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	240.415.388,00	99.209.028,89
Beban Makanan dan Minuman Rapat	23.456.000,00	16.682.800,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	32.604.600,00	155.224.825,00
Beban Natura dan Pakan - Natura	0,00	0,00
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	0,00	25.757.000,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	62.649.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	339.966.486,00	0,00
Jumlah Beban Barang	**2.127.830.062,41**	**1.796.354.470,70**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Kawat/Faksimili/TV Berlangganan	543.900,00	6.116.100,00
Beban Tagihan Telepon	18.363.826,00	17.950.599,00
Beban Tagihan Air	9.990.100,00	11.212.600,00
Baban Tagih Listrik	37.426.508,00	40.109.247,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	72.075.000,00	157.300.000,00
Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	2.664.000,00	2.222.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN	159.968.136,00	275.587.506,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	539.400,00	981.280,00
Beban Iura Jaminan Kematian bagi Non ASN	674.250,00	1.226.720,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	10.578.300,00	7.414.800,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	2.660.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	32.103.532,00	29.036.103,00
Beban Transport	0,00	272.113.414,00
Beban Insentif Non ASN	0,00	11.313.322,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.030.515,00	0,00
Jumlah Beban Jasa	**362.117.467,00**	**835.243.691,00**

Beban Pemeliharaan:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	12.384.400,00	8.365.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah - Alat Pendingin	2.984.790,00	4.961.700,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	12.000.000,00	20.000.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	19.480.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	**51.849.690,00**	**43.326.700,00**

Beban Perjalanan Dinas:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**0,00**	**0,00**

Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain:

	2025	2024
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	28.520.000,00	23.758.000,00
Jumlah	**28.520.000,00**	**23.758.000,00**

Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD):

	2025	2024
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00
Jumlah Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	**0,00**	**0,00**

c. Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi:

	2025	2024
Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi	756.079.182,00	725.136.550,00
Jumlah	**756.079.182,00**	**725.136.550,00**

Beban Penyisihan Piutang:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	283.989,00	268.823,00
Jumlah	**283.989,00**	**268.823,00**

d. Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Lain-lain		5.759.500,00
Jumlah Beban Lain-lain	**0,00**	**5.759.500,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

		2025	2024
a	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
b	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00
c	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
d	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0,00**	**0,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka - angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup UPTD Puskesmas Abang I dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Abang I bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Abang I bersamaan dengan penerbitan laporan auditor independen tanggal 06 April 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00045/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Abang I
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Abang I untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Abang I tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Abang I bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

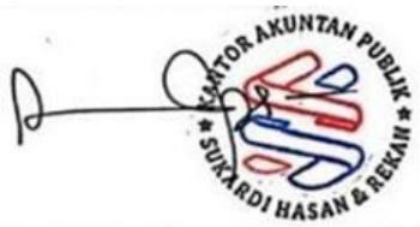
Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan design dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Terdapat selisih saldo kas per 31 Desember 2025 antara saldo menurut rekening korang dengan saldo menurut LPSAL(Laporan Perusabahan Sisa Anggaran Lebih).
   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar pihak puskesmas menelusuri perbedaan angka tersebut.

2. Terdapat jasa giro yang belum diakui sebagai pendapatan di LRA Puskesmas Tahun 2025.
   Atas permasalahn tersebut kami sarankan agar pendapatan jasa giro diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun di Laporan Operasional.

3. Tata Kelola Aktiva Tetap dan Persediaan Perlu ditingkatkan
   Dari hasil audit yg kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:
   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Abang I ke Pemda Karangasem.
      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:
   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.

4. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Operasional

Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Abang I dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Abang I.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Auntansi yang terantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

Atas masalah tersebut, kami saranankan agar Puskesmas Abang I meningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Abang I dibidang standar akuntansi pemerintahan no 13.

5. Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Abang I pada SIPD belum tepat waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Abang I pada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka -angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Abang I dan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00045/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Abang I
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Abang I untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

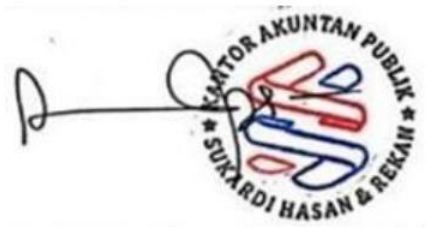
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Abang I merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Abang I... terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 , Email info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Abang I sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 6 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 , Email info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Abang I berbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Abang I belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Abang I melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Abang I berbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 , Email info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 , Email info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

`

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS ABANG II
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor: 00046/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS ABANG II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	5
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	70
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN	75

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS ABANG II
Jln. Raya Ida Ketut Jelantik No.24 Ds.Culik
Kec. Abang, Kode Pos. 80852 Telp. (0363) 21880
Email : puskesmas2abang@gmail.com
Yahoo : pusk_abang2@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSKESMAS ABANG II YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	dr. I Ketut Agus Muliadi Arthawan, M.M
Nomor Telepon	:	(0363) 21880
Alamat kantor	:	Jln. Ida Ketut Jelantik No.24 Culik, Abang, Karangasem, Bali
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Abang II

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang II Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang II Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang II Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No 13
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskeamas Abang II Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang II Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang II Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Abang II

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Abang II

METERAI TEMPEL 10000 7547AANX106547537

dr. I Ketut Agus Muliadi Arthawan, M.M
NIP. 19840216 201408 1 001

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00046/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Abang II

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Abang II ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00048/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/IV/2025 tanggal 14 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 06 April 2026

Pande Putu Agus Eka Pertama, AK., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

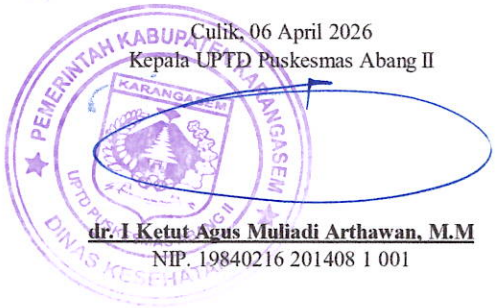
Laporan Keuangan

UPTD PUSKESMAS ABANG II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN DAERAH	*4.1.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		0,00	2.831.745.266,00	0,00	2.777.878.887,00
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerjasama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	11.793.082,71	0,00	11.182.970,83
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**2.843.538.348,71**	**0,00**	**2.789.061.857,83**
BELANJA	*4.1.2*				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		1.959.129.459,00	1.698.395.239,00	86,69	1.581.318.406,00
Belanja Barang dan Jasa		1.831.842.138,00	1.411.918.369,00	77,08	1.558.479.267,42
Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		**3.790.971.597,00**	**3.110.313.608,00**	**82,05**	**3.139.797.673,42**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		148.914.415,00	116.283.989,00	78,09	607.666.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	406.580.427,88
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**148.914.415,00**	**116.283.989,00**	**0,00**	**1.014.247.327,88**
JUMLAH BELANJA		**3.939.886.012,00**	**3.226.597.597,00**	**81,90**	**4.154.045.001,30**
SURPLUS/DEFISIT		**(3.939.886.012,00)**	**(383.059.248,29)**	**9,72**	**(1.364.983.143,47)**
JUMLAH SILPA		**(3.939.886.012,00)**	**(383.059.248,29)**	**9,72**	**(1.364.983.143,47)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Culik, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang II



dr. I Ketut Agus Muliadi Arthawan, M.M
NIP. 19840216 201408 1 001

UPTD PUSKESMAS ABANG II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**440.057.578,65**	**524.199.841,24**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**440.057.578,65**	**524.199.841,24**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(383.059.248,29)	(1.364.983.143,47)
Sub Total (3+4)	**56.998.330,36**	**(840.783.302,23)**
Pendapatan APBN/APBD	110.754.508,00	1.280.840.880,88
Pendapatan BOK	243.421.497,00	0,00
Setoran ke Kas Daerah	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**411.174.335,36**	**440.057.578,65**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Culik, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Abang II

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS ABANG II
DINAS KESEHATAN

dr. I Ketut Agus Muliadi Arthawan, M.M

NIP. 19840216 201408 1 001

UPTD PUSKESMAS ABANG II
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET	*4.2.1*		
ASET LANCAR	*4.2.1.1*		
Kas di Bendahara Pengeluaran		32.192.878,00	149.231.502,00
Kas pada BLUD		378.981.457,36	290.826.076,65
Piutang Operasional BLUD		7.808.400,00	14.047.600,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(78.084,00)	(140.476,00)
Persediaan BLUD		346.902.678,01	389.274.544,40
JUMLAH ASET LANCAR		**765.807.329,37**	**843.239.247,05**
ASET TETAP	*4.2.1.2*		
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		6.034.621.863,30	5.843.456.708,30
Gedung dan Bangunan		8.306.089.567,64	8.306.089.567,64
Jalan, Irigasi dan Jaringan		65.387.395,00	65.387.395,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
JUMLAH NILAI BUKU ASET TETAP		**14.406.098.825,94**	**14.214.933.670,94**
Akumulasi Penyusutan		(8.262.448.476,30)	(7.516.966.144,60)
JUMLAH ASET TETAP		**6.143.650.349,64**	**6.697.967.526,34**
ASET LAINNYA	*4.2.1.3*		
Aset Tetap Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		168.944.957,00	168.944.957,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		(168.778.291,00)	(168.778.291,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		**166.666,00**	**166.666,00**
JUMLAH ASET		**6.909.624.345,01**	**7.541.373.439,39**
KEWAJIBAN	*4.2.2*		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	*4.2.2.1*		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		142.368.360,00	143.514.222,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**142.368.360,00**	**143.514.222,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**142.368.360,00**	**143.514.222,00**
EKUITAS	*4.2.3*		
Ekuitas		6.767.255.985,01	7.397.859.217,39
JUMLAH EKUITAS		**6.767.255.985,01**	**7.397.859.217,39**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**6.909.624.345,01**	**7.541.373.439,39**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Culik, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang II

dr. I Ketut Agus Muliadi Arthawan, M.M
NIP. 19840216 201408 1 001

UPTD PUSKESMAS ABANG II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan	%
PENDAPATAN	*4.3.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		2.782.093.557,00	2.785.819.387,00	(3.725.830,00)	(0,13)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)		243.421.497,00	0,00	243.421.497,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		1.178.953.439,53	0,00	1.178.953.439,53	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		11.793.082,71	11.182.970,83	610.111,88	5,46
Pendapatan APBN/APBD		110.754.508,00	1.280.840.880,88	(1.170.086.372,88)	(91,35)
JUMLAH PENDAPATAN		**4.327.016.084,24**	**4.077.843.238,71**	**249.172.845,53**	**6,11**
BEBAN	*4.3.2*				
Beban Pegawai		1.708.486.287,00	1.583.279.172,00	125.207.115,00	7,91
Beban Barang dan Jasa		2.518.774.940,08	2.529.066.111,03	(10.291.170,95)	(0,41)
Beban Penyisihan Piutang		78.084,00	140.476,00	(62.392,00)	(44,41)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		745.482.331,70	836.053.150,70	(90.570.819,00)	(10,83)
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**4.972.821.642,78**	**4.948.538.909,73**	**24.282.733,05**	**0,49**
SURPLUS(DEFISIT) OPERASIONAL		**(645.805.558,54)**	**(870.695.671,02)**	**224.890.112,48**	**(25,83)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	61.071,00	(61.071,00)	(100,00)
JUMLAH SUPLUS (DEFISIT) NON OPERASIONAL		**0,00**	**61.071,00**	**(61.071,00)**	**(100,00)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**(645.805.558,54)**	**(870.634.600,02)**	**224.829.041,48**	**(25,82)**
POS LUAR BIASA		0,00	0,00		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(645.805.558,54)**	**(870.634.600,02)**	**224.829.041,48**	**(25,82)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Culik, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang II

dr. I Ketut Agus Muliadi Arthawan, M.M
NIP. 19840216 201408 1 001

UPTD PUSKESMAS ABANG II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	**7.397.859.217,39**	**7.247.470.936,60**
SURPLUS/DEFISIT-LO	(645.805.558,54)	(870.634.600,02)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	15.202.326,16	1.021.022.880,81
Penyetoran ke Kas Daerah	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	**6.767.255.985,01**	**7.397.859.217,39**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Culik, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Abang II

dr. I Ketut Agus Muliadi Arthawan, M.M
NIP. 19840216 201408 1 001

UPTD PUSKESMAS ABANG II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.831.745.266,00	2.777.878.887,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	243.421.497,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	11.793.082,71	11.182.970,83
Pendapatan APBN/APBD	110.754.508,00	1.280.840.880,88
Jumlah arus Kas Masuk	**3.197.714.353,71**	**4.069.902.738,71**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.698.395.239,00	1.581.318.406,00
Belanja Barang dan Jasa	1.411.918.369,00	1.558.479.267,42
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.110.313.608,00**	**3.139.797.673,42**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**87.400.745,71**	**930.105.065,29**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	116.283.989,00	607.666.900,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	406.580.427,88
Perolehan jalan,irigasi dan jaringan	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**116.283.989,00**	**1.014.247.327,88**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(116.283.989,00)**	**(1.014.247.327,88)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Setoran Kas ke Kas Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Penyetoran Modal	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	441.331.183,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**441.331.183,00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	441.331.183,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**441.331.183,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**(28.883.243,29)**	**(84.142.262,59)**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**440.057.578,65**	**524.199.841,24**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**411.174.335,36**	**440.057.578,65**
menurut neraca		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Culik, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Abang II

dr. I Ketut Agus Muliadi Arthawan, M.M

NIP. 19840216 201408 1 001

Catatan Atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Abang II

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Abang II

UPTD Puskesmas Abang II adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Abang II merupakan sebuah Puskesmas Non Rawat Inap.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, UPTD Puskesmas Abang II ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

b. Tempat Kedudukan

UPTD Puskesmas Abang II beralamat di Jalan Ida Ketut Jelantik No. 24, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Telp 0363-21880, Email: puskesmas2abang@gmail.com.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Abang II adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);
17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);

20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.;

d. Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai UPTD Puskesmas Abang II

1) Visi UPTD Puskesmas Abang II

Dengan "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" Pelayanan PRIMA di UPTD Puskesmas Abang II Menuju Karangasem Sehat, Kertha, Shanti dan Nadi.

2) Misi UPTD Puskesmas Abang II

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 5 (lima) misi, sebagai berikut:

a) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
b) Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional.
c) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
d) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat.
e) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan Kesehatan.

3) Motto UPTD Puskesmas Abang II: Kesehatan Anda Prioritas Kami

4) Strategi UPTD Puskesmas Abang II

Untuk dapat mencapai visi misi tersebut Puskesmas Abang II memiliki strategi sebagai berikut:

a) Menyusun PTP tahunan secara rutin
b) Menggalang kerjasama antara unit lewat lokakarya mini bulanan baik kerja sama lintas program maupun lintas sektoral

c) Melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam POA sesuai dengan jadwal dan melaporkan hasilnya secara tepat waktu dan benar
d) Melayani konsumen sesuai dengan standar pelayanan prima
e) Menghargai rekan sekerja dan konsumen seperti menghargai diri sendiri dan melayani rekan kerja dan konsumen sebagaimana kami ingin dilayani
f) Mengikuti pelatihan seminar/symposium guna peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme tenaga medis dan paramedis
g) Menambah jenis pelayanan sesuai tuntutan Masyarakat
h) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penerapan kemajuan ilmu dan teknologi serta melalui penerapan nilai nilai moral dan etika
i) Mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam pembiayaan kesehatan melalui JPKM.

5) Tata Nilai UPTD Pusksmas Abang II

a) **P** = Profesional: Memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik.
b) **R** = Ramah: Memiliki sikap yang sopan dan santun kepada seluruh masyarakat dan rekan sekerja
c) **I** = Inisiatif/Inovatif: Memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri dengan ide-ide kreatif serta memberi terobosan bagi peningkatan pelayanan kesehatan.
d) **M** = Malu: Memiliki budaya malu bila tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
e) **A** = Akuntabel: Mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai pedoman dan standar pelayanan operasional.

e. Program Pelayanan UPTD Pusksmas Abang II

Program Pelayanan UPTD Puskesmas Abang II terdiri dari:

1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas

Di UPTD Puskesmas Abang II ada 5 kegiatan esensial dan 1 kegiatan perkesmas. Lima Kegiatan Esensial tersebut meliputi:

a) Pelayanan Kesehatan Keluarga (Ibu, Anak dan Keluarga Berencana)
b) Pelayanan Gizi Masyarakat
c) Pelayanan Promosi Kesehatan
d) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

3) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
   a) Upaya Pelayanan UKGS/UKGM
      UKGS/UKGM adalah suatu komponen dari UKS dan merupakan teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak sekolah dan di posyandu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak serta bumil.
   b) Upaya Pelayanan Lansia
      Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
   c) Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
   d) Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
   e) Upaya Kesehatan Yankestradkom.
   f) Upaya Kesehatan Kerja.
   g) Upaya Kesehatan Indera.
4) Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi dan Laboratorium
   a) Upaya Kesehatan Perorangan
      Upaya kesehatan perorangan di UPTD Puskesmas Abang II meliputi: poli umum, poli gigi dan mulut, ruang KIA KB dan imunisasi, ruang konsultasi gizi, laboratorium, farmasi, kasir, loket pendaftaran dan konseling.
   b) Farmasi
      Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
   c) Laboratorium
      Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

f. Jenis-jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Abang II

Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Abang II berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Abang II Nomor: 05/PKM/AB.II/2023 tentang Jenis-Jenis Pelayanan pada UPTD Puskesmas Abang II, sebagai berikut:

1) Jenis Pelayanan Dalam Gedung

No.	Fasilitas Pelayanan	Jenis Pelayanan
1	Poli Umum	- Pemeriksaan Pasien - Penetapan Diagnosa - Koordinasi Lintas Program (Lab, Gigi, Laktasi, Lansia, Sanitasi, VCT, Tradkom) - Rujukan
2	Poli KIA & KB	- Pemeriksaan Ibu hamil - Konsultasi & Pelayanan KB - Koordinasi Lintas Program (Lab, Poli Umum, Poli Gigi) - Rujukan
3	Poli Gigi	- Pemeriksaan Pasien - Penetapan Diagnosa - Koordinasi Lintas Program - Rujukan
4	Ruang Imunisasi	- Pelayanan Imunisasi - Konsultasi
5	Laboratorium	- Pemeriksaan Spesimen Darah Urine, Sputum dan Faeces - Koordinasi Lintas Program - Rujukan
6	Ruang Obat	- Melayani obat bagi pasien Rawat jalan dan UGD.
7	UGD	- Melakukan pelayanan Kegawatdaruratan - Memberikan Pelayanan Tindakan - Rujukan
8	Ruang Konseling	- Pelayanan Gizi - Pelayanan PKPR (Program Kesehatan Peduli Remaja) - Konseling VCT (HIV/AIDS) - Konseling Jiwa - Konseling IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan)
9	MFK	- Keamanan Gedung/Bangunan Puskesmas - Pengamanan Peralatan dan Prasarana Puskesmas - Pengamanan halaman dan lahan parkir - Pengamanan bahan berbahaya dan beracun - Manajemen Emergency - Pengamanan Kebakaran - Pengadaan peralatan medis - Pengamanan sistem utilitas

2) Jenis Pelayanan Luar Gedung
   a) Puskesmas Keliling (PUSLING)
   b) Posyandu
   c) Posyandu Lansia
   d) Posbindu
   e) Kelas Ibu Balita
   f) Kelas Ibu Hamil
   g) Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Bias)

h) Undangan Anak Sekolah
i) Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (Sdidtk)
j) UKGS
k) Promosi Kesehatan
l) Pembinaan Uks
m) P3K
n) UKK
o) *Sweeping*
p) Kesehatan Lingkungan

g. Sasaran, Indikator, Tenaga Kerja

Berikut disajikan Sasaran, Target, dan Capaian Kinerja berdasarkan Kegiatan Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

NO	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN	PENCAPAIAN	CAKUPAN	
							SUB. VARIABEL	VARIABEL
1	2	3		4	5	6	7	
UKM ESENSIAL								
1	**KESGA**							**90,6**
		Kesehatan Ibu					**83,1**	
		1	Cakupan bumil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai	bumil	100	108,6		
		2	Cakupan bumil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai Standar	bumil	100	99,5		
		3	Cakupan deteksi faktor resiko / komplikasi yang ditemukan oleh masyarakat	bumil	60	17,6		
		4	Cakupan penanganan komplikasi obstetri (PK)	bumil	80	61,1		
		5	Cakupan persalinan oleh nakes sesuai standar (Pn)	bulin	100	108,6		
		6	Cakupan pelayanan nifas oleh nakes sesuai standar (KF III)	bulin	100	102,7		
		Kesehatan Bayi					**91,8**	
		1	Cakupan pelayanan neonatus yg mendapat pelayanan sesuai standar (KN I)	bayi	100	100,2		
		2	Cakupan penanganan Kesehatan neonatus 0-29 hari (KN lengkap)	bayi	100	96,91		
		3	Cakupan penanganan komplikasi neonatus	bayi	80	50		
		4	Cakupan pelayanan Kesehatan bayi 29 hari – 12 bln (Kunjungan Bayi)	bayi	100	120,15		

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Lanjutan*)

NO	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN	PENCAPAIAN	CAKUPAN	
							SUB. VARIABEL	VARIABEL
1	2	3		4	5	6	7	
		1	Cakupan Pelayanan Anak Balita (12-59 bulan) sesuai standar	balita	100	104,46		
		2	Cakupan Pelayanan Kesehatan anak balita sakit yg dilayani dgn MTBS	balita	100	100		
		3	Cakupan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	apras	100	100		
		Pelayanan Keluarga Berencana					**89,2**	
		1	Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	akseptor	80	78		
		2	Cakupan peserta KB pasca persalinan	akseptor	100	100,46		
2	**Promkes**							**99,3**
		Tatanan Sehat					**100**	
		1	Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	90	88,3		
		2	Tatanan Institusi Pendidikan / sekolah	Sekolah	50	100		
		3	Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	80	100		
		4	Tatanan TTU	TTU	40	100		
		5	Tatanan Tempat Kerja	T.Kerja	45	100		
		Pemberdayaan Masyarakat					**100**	
		1	Pemberdayaan melalui penyuluhan	Kader UKBM	100	100		
		Pembinaan UKBM					**100**	
		1	Pembinaan Posyandu	Posyandu	80	100		
		Penyuluhan NARKOBA					**100**	
		1	Penyuluhan Narkoba minimal 5 kali dalam setahun	Masyarakat , Sekolah, Kelompok	5	5(100)		
		Promosi Kesehatan					**100**	
		1	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat minimal 12 kali setahun)	Masyarakat	12	20(166,6)		
		2	Promosi Kesehatan untuk program prioritas di dalam Gedung puskesmas dan Jaringan (Sasaran Masyarakat)	Masyarakat , Sekolah Kelompok	12	18(150)		
		1	Pembinaan UKBM lain	Masyarakat , Sekolah, Kelompok	3	3(100)		

NO	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN	PENCAPAIAN	CAKUPAN	
							SUB. VARIABEL	VARIABEL
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	
		3	Sosialisasi/Pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	1	100		
3	**Kesehatan Lingkungan**							**94,6**
		Pengawasan Kwalitas Air					**93,9**	
		1	Presentase penduduk terakses air minum berkwalitas / layak	Penduduk	100	98,2		
		2	Presentase Sarana air minum	Sarana	100	89,8		
		3	Presentase Sarana air minum yang dikaporitisasi	Sarana	50	90,58		
		4	Presentase pengambilan sampel air	Sampel air	100	100		
		5	Presentase kwalitas air minum di penyelenggara yang memenuhi syarat	Sarana	100	90,9		
		STBM					**85,3**	
		1	Presentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	100	95,8		
		2	Presentase desa ODF	Desa	100	60		
		3	Presentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	100	100		
		Pengawasan TFU yg memenuhi syarat Kesehatan		Sarana	100	80,4	**100**	
		Presentase tempat pengolahan makanan yg memenuhi syarat Kesehatan		Sarana	100	82.5	**90,5**	
		Presentase Fasyankes yg mengelola limbah medis		Fasyankes	100	100	**100**	
		Presentase Rumah Sehat		Rumah	90	98,2	**98,2**	
4	**Gizi**							
		Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat						**89,9**
		1	Presentase Ibu Hamil KEK yg mendapat makanan tambahan	Bumil	80	75,35		
		2	Presentase Ibu Hamil yg mendapat tablet tambah darah (TTD)	Bumil	84	98,4		
		3	Presentase Bayi kurang dari 6 bln yg mendapat ASI Eksklusif	Bayi	60	68		
		4	Presentase Bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Bayi	70	89,6		
		5	Presentase Balita kurus mendapat makanan tambahan	Balita	85	52		

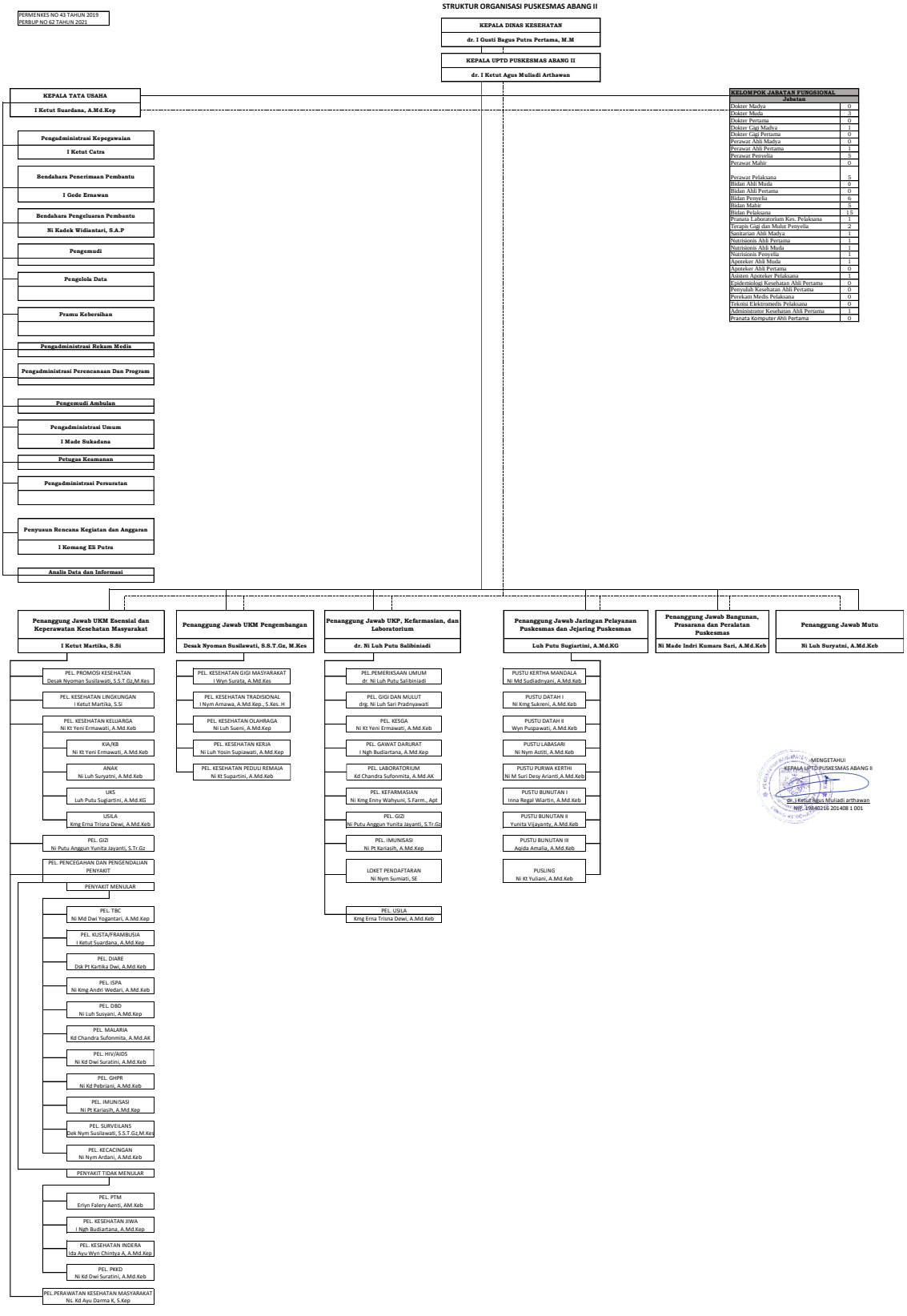
NO	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN	PENCAPAIAN	CAKUPAN	
							SUB. VARIABEL	VARIABEL
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	
		7	Presentase Cakupan Vit A pada Balita	Balita	90	94,5		
		8	Presentase Rumah Tangga	Rumah	82	93,2		
		9	Presentase yg. tdk. Anemia pd bumil	Bumil	33	94,3		
		10	Presentase Bayi Berat Lahir yg.tdk ,Rendah (BBLR)	Bayi	2,5	94,3		
		11	Presentase Balita yg. tdk. Kurang Gizi (Gizi buruk dan Kurang Gizi)	Balita	90	95		
		12	Presentase Balita yg. tdk. kurus (Wasting)	Balita	7	98		
		13	Presentase Balita pendek (Stunting)	Balita	5,02	110		
		14	Presentase Balita yg ditimbang (D/S)	Balita	85	92		
5	**Pencegahan dan pengendalian penyakit**							**98,2**
		TB Paru					**100**	
		1	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	100	100		
		2	Succsess Rate (Angka Keberhasilan Pengobatan)	Orang	>90	100		
		Malaria					**100**	
		1	Presentase penderita positif malaria yg diobati sesuai standar	Orang	100	100		
		2	Angka kesakitan malaria / Annual Parasite Incident (API)	Orang	<1	100		
		Kusta					**100**	
		1	Angka Prevalensi Kusta	Orang	<1	100		
		Diare					**100**	
		1	Presentase Penderita Diare yg mendapat pelayanan standar	Orang	100	100		
		2	Presentase Deteksi Dini Hepatitis pd Bumil	Orang	100	100		
		ISPA					**100**	
		1	Presentase penderita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	Orang	100	100		
		2	Cakupan penemuan pneumonia balita	Orang	100	100		
		Demam Berdarah Dengue (DBD)					**93,3**	
		1	Angka kesakitan / Insiden Rate (IR) DBD	Orang	50	100		
		2	Angka Bebas Jentik (AJB)	Rumah	>95	95		
		3	Angka Penyelidikan Epidemiologi	Kasus	100	100		

NO	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN	PENCAPAIAN	CAKUPAN	
							SUB. VARIABEL	VARIABEL
1	2	3		4	5	6	7	
		1	Pelayanan Kesehatan orang dgn risiko terinfeksi virus yg melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pduk berisiko terinfeksi HIV (bumil,pasien TBC,IMS, WPS,Waria/ trans	100	84,87		
		Pencegahan dan Penanggulangan Rabies					**100**	
		1	Presentase kasus GHPR ditatalaksana standar	orang	100	100		
		Kecacingan					**100**	
		1	Presentase cakupan POPM Kecacingan	orang	100	100		
		Surveilance					**100**	
		1	Kelengkapan Laporan Survailance	Puskesmas	80	100		
		2	Ketepatan Laporan Survailance	Puskesmas	80	100		
		3	Respon Alert	Penyakit potensi KLB	80	100		
		4	Survailance/Pengendalian Vektor	Puskesmas	25	100		
		Pelayanan Imunisasi					**73,8**	
		1	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	bayi	100	99,1		
		2	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	bayi	100	0		
		3	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	baduta	100	100		
		4	Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	anak sekolah	95	97,2		
		5	Persentase Wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	wanita usia subur	95	72,9		
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular						**97**
		1	Presentase meningkatkan desa / kelurahan yg melaksanakan kegiatan Posbindu	Desa	70	100		
		2	Presentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Orang	100	100		

NO	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN	PENCAPAIAN	CAKUPAN	
							SUB. VARIABEL	VARIABEL
1	2	3		4	5	6	7	
		4	Presentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	Orang	100	100		
		5	Presentase ODGJ yg mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	Orang	100	85		
6	**PELAYANAN PERKESMAS**							**100**
		Perawatan Kesehatan Masyarakat						
		1	Presentase keluarga rawan yang dibina	Keluarga	100	100		
UKM Pengembangan								**95,7**
1	**Pelayanan Kesehatan Tradisional**						**100**	
		1	Presentase pembinaan toga pada keluarga	Keluarga	3	90		
		2	Presentase pembinaan pada kelompok Asman	Kelompok Asman	100	100		
		3	Presentase Pembinaan Pengobatan Tradisional	Orang	70	100		
2	**Pelayanan Kesehatan Olahraga**						**100**	
		1	Presentase puskesmas yg menyelenggarakan Kesehatan olahraga di wilayah kerjanya	Puskesmas	100	100		
		2	Presentase anak SD yg melakukan tes kebugaran	Anak SD	100	80		
		3	Presentase Jemaah haji yg melakukan tes kebugaran	Jemaah haji	100	100		
3	**Pelayanan Kesehatan Usila**						**110**	
		1	Presentase usia lanjut berusia 60 keatas yg mendapat skrining Kesehatan sesuai standar	Orang	100	120		
4	**Upaya Kesehatan Sekolah / Pel. UKS**						**100**	
		1	Presentase anak usia Pendidikan dasar yg mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Siswa	100	100		
		2	Cakupan pemeriksaan Kesehatan peserta didik SD	Siswa	100	100		
		3	Cakupan pemeriksaan Kesehatan peserta didik siswa SMP/MTs	Siswa	100	100		
5	**Kesehatan Gigi Masyarakat**						**80**	
		1	Presentase Desa mendapatkan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Desa	80			

NO	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN	PENCAPAIAN	CAKUPAN	
							SUB. VARIABEL	VARIABEL
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	
		1	Presentase Pembinaaan Kesehatan Gigi di TK	TK	80	80		
		2	Presentase Pembinaan dan Bimbingan Sikat Gigi Massal pada SD/MI	SD/MI	100	100		
7	**Upaya Kesehatan kerja**						**100**	
		1	Presentase puskesmas yg melaksanakan Kesehatan kerja dasar	Puskesmas	50	100		
		2	Presentase Pos UKK yg dibentuk dan dibina	Pos UKK	100	100		
UKP								
1	**Pelayanan Puskesmas / Pelayanan**							**100**
		Kesehatan Perorangan						
		1	Presentase Kunjungan ke Pelayanan Kesehatan	Pddk	15	100		
		2	Presentase Rujukan ke FKTL	Pasien	<15	100		
PELAYANAN KEFARMASIAN								
1	**Pengadaan Obat dan Perbekalan**							**100**
		1	Presentase puskesmas yg melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Puskesmas	100	100		
		2	Presentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Obat	90	100		
PELAYANAN LABORATORIUM								**100**
1	**Pemeriksaan Laboratorium**							
		1	Presentase jenis pemeriksaan yg	Spesimen	80	100		

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Abang II



Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Abang II terdiri dari:

1) Kepala Puskesmas;
2) Tata Usaha; dan
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
8) Penanggung Jawab Mutu

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Puskesmas

   Wewenang:

   a) Memeriksa dan menganalisa laporan-laporan kegiatan stafnya dan sekaligus mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.
   b) Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang di bawahnya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

   Tanggung Jawab:

   a) Pelaksanaan tugas sehari-hari
   b) Melakukan pengawasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
   c) Mengadakan koordinasi dengan kepala kecamatan dan lintas sektor dalam upaya pembangunan Kesehatan di wilayah kerja;
   d) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka miningkatkan derajat Kesehatan;
   e) Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan dibantu oleh staf puskesmas;
   f) Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan;
   g) Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Induk, Pustu, Pusling dan lain-lain.

2) Tata Usaha

   Wewenang:

   a) Menilai kelengkapan administrasi rumah tangga
   b) Menilai kelengkapan administrasi kepegawaian
   c) Menilai kelengkapan administrasi keuangan

   Tanggung Jawab:

   a) Memonitoring data kepegawaian (kinerja)
   b) Memonitoring kinerja rumah tangga
   c) Memonitoring kinerja keuangan

3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
   Wewenang:
   a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
   b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
   c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
   d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

   Tanggung Jawab:
   a) Promosi Kesehatan
   b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
   c) Pelayanan Kesehatan Keluarga
   d) Pelayanan Gizi
   e) Pelayanan P2P
   f) Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
   Wewenang:
   a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Pengembangan;
   b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
   c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
   d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Pengembangan

   Tanggung Jawab:
   a) Pelayanan Kesehatan Jiwa
   b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
   c) Pelayanan Kesehatan Tradisional
   d) Pelayanan Kesehatan Olahraga
   e) Pelayanan Kesehatan Indera
   f) Pelayanan Kesehatan Lansia
   g) Pelayanan Kesehatan Kerja
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
   Wewenang:
   a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
   b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
   c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
   d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
   Wewenang:
   a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab membina jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
   b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
   c) Mengidentifikasi dan Menganalisa Data Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
   d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja jejaring pelayanan Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
   Tanggung Jawab:
   Bertanggung Jawab memelihara sarana dan prasarana dan peralatan puskesmas
   a) Bangunan
   b) Alat Kesehatan
   c) IPAL
   d) Parkir/Halaman
   e) Kendaraan
   f) Diklat
   g) Kebakaran/Kecelakaan
8) Penanggung Jawab Mutu
   Wewenang:
   a) Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua penanggung jawab mutu;
   b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
   c) Mengolah dan Memelihara Dokumen/Rekaman;
   d) Membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses pelayanan
   Tanggung Jawab:
   a) Menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem mutu manajemen
   b) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjamin muta dalam proses diklat berdasarkan standar mutu

i. Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Pusksmas Abang II

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Abang II Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. I Ketut Agus Muliadi Arthawan NIP. 19840216 201408 1 001	Pemimpin BLUD

No	Nama	Jabatan
2.	I Ketut Suardana, A.Md.Kep NIP. 19750507 199402 1 002	Pejabat Keuangan
3.	I Ketut Martika, S.Si NIP. 19661204 199003 1 009	Pejabat Teknis Bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4.	Desak Nyoman Susilawati, S.S.T.Gz NIP. 19790914 200701 2 015	Pejabat Teknis Bisang UKM Pengembangan
5.	dr. Ni Luh Putu Salibiniadi NIP. 19860629 201412 2 001	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	Luh Putu Sugiartini, A.Md.KG NIP. 19871005 200902 2 006	Pejabat Teknis Bidang Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	Ni Made Indri Kumara Sari, A.Md.Keb NIP. 19981207 202203 2 008	Pejabat Teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
8.	Ni Luh Suryatni, A.Md.Keb NIP. 19820425 200501 2 015	Pejabat Teknis Bidang Mutu

j. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Abang II per 31 Desember 2025 sebanyak 66 orang terdiri dar:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 40 Orang
- Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil : 26 Orang

Jumlah : 66 Orang

Berikut Daftar Pegawai UPTS Puskesmas Abang II:

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH				KETERANGAN
		PNS	KONTRAK	PPPK	JUMLAH	
1	2	3	4	5		6
1	Dokter Umum	3	0	0	3	Ahli Muda 2, Ahli Pertama 1
2	Dokter Gigi	1	0	0	1	Ahli Madya 1
3	Perawat	7	0	4	11	Penyelia 5, Terampil 5, Ahli Pertama 1
4	Perawat Gigi	2	0	0	2	Penyelia 2
5	Bidan	16	0	10	26	Penyelia 11, Mahir 3, Terampil 12
6	TPG (GIZI)/ Nutrisionis	2	0	1	3	Ahli Muda 1, Penyelia 1, Ahli Pertama 1
7	Sanitarian	1	0	0	1	Ahli Madya 1
8	Analis Kesehatan	1	0	0	1	Terampil 1
9	Apoteker	1	0	0	1	Ahli Muda 1
10	Ass Apoteker	1	0	0	1	Terampil 1
11	Adminkes	0	0	1	1	Ahli Pertama
12	Umum	5	0	10	15	Sarjana 2, SMA 12, SMP 1, SD 1
	Total	**40**	**0**	**26**	**66**	**66**

k. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Abang II melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokkan sebagai berikut:

Kerjasama Pelayanan Kesehatan:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Karangasem.

l. Pembiayaan UPTD Puskesmas

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikthisar Kebijakan Akuntasi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Abang II mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Abang II.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
    a) Laporan Realisasi Anggaran;
    b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
    c) Neraca;
    d) Laporan Operasional;
    e) Laporan Arus Kas;
    f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi Puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
e) Lain-lain; dan
f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan setara kas;
   b) Investasi jangka pendek;
   c) Piutang dari kegiatan blud;
   d) Persediaan;
   e) Investasi jangka panjang;
   f) Aset tetap;
   g) Aset lainnya;
   h) Kewajiban jangka pendek;
   i) Kewajiban jangka panjang; dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.
3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan

f) Pendapatan BLU lainnya.

4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

a) Pendapatan dari alokasi APBD;
b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

a) Pembayaran Pegawai;
b) Pembayaran Barang;
c) Pembayaran Bunga; dan
d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;

b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
   a) Ekuitas awal;
   b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
   c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
      (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
      (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
      (3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
   d) Ekuitas akhir.

h. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh blud.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Serara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Piutang

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam janga waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal penagihan pertama, kedua, dan ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c) Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Dalam hal piutang sampai dengan tanggal pelaporan telah diterima, maka kolektibilitas piutang menjadi Lancar.

Pembentukan Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa maníaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
b. Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakompabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat LaboratoriumLingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan *overhaul* disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produkai Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan / Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);
b) Aset Sewaan;
c) Aset yang tidak digunakan:
d) Beban yang ditangguhkan;
e) Lainnya

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiaban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Puskesmas kepada pihak lain. Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi Puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (*cut off*). Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.
d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas; dan
b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal.
c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.
d) Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
e) Pada akhir periode pelaporan, nilai ekuitas yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah selisih dari aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
   Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:
   (1) Pendapatan usaha rawat jalan;
   (2) Pendapatan usaha rawat darurat;
   (3) Pendapatan usaha rawat inap.
b) Hibah
   Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.
c) Pendapatan APBD
   Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.
d) Pendapatan Usaha Lainnya
   Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.
e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
   Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan

dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

(1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
(2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
(3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
(4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;

b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.
d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.
g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
   (1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.
   (2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.
   (3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.
   (4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.
c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.
e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai
   Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai neger sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Puskesmas yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
b) Beban Barang
   Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
c) Beban Jasa
   Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
d) Beban Pemeliharaan
   Beban Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja pemeliharaan. Beban pemeliharaan terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.
e) Beban Langganan Daya/Jasa
   Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.
f) Beban Perjalanan Dinas
   Beban Perialanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas adalah biaya yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.
g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain
   Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.
h) Beban Penyusutan dan Amortisasi
   Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang teriadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutanberlalunya waktu.
i) Beban Penyisihan Piutang
   Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

j) Beban Operasional Lainnya
Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar
Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset
Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya
Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

(1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.

(2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Abang II yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh, untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, UPTD Puskesmas Abang II menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak: 12.811.783.5-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Abang II Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan-LRA

Jumlah realiasasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.843.538.348,71 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.789.061.857,83 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	2.831.745.266,00	0,00	2.777.878.887,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	11.793.082,71	0,00	11.182.970,83
	Jumlah	**0,00**	**2.843.538.348,71**	**0,00**	**2.789.061.857,83**

4.1.2 Belanja-LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksanya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.226.597.597,00 atau 81,90% dari anggaran sebesar Rp 3.939.886.012,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 4.154.045.001,30 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	3.790.971.597,00	3.110.313.608,00	82,05	3.139.797.673,42
b.	Belanja Modal	148.914.415,00	116.283.989,00	78,09	1.014.247.327,88
	Jumlah	**3.939.886.012,00**	**3.226.597.597,00**	**81,90**	**4.154.045.001,30**

a. Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.110.313.608,00 atau 82,05% dari anggaran sebesar Rp 3.790.971.597,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 3,139.797.673,42. Rincian atas jumlah Belanja Operasional sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Pegawai	1.959.129.459,00	1.698.395.239,00	86,69	1.581.318.406,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.831.842.138,00	1.411.918.369,00	77,08	1.558.479.267,42
c.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**3.790.971.597,00**	**3.110.313.608,00**	**82,05**	**3.139.797.673,42**

Rincian dari Belanja Operasinal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.698.395.239,00 atau 86,69% dari anggaran sebesar Rp 1.959.129.459,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.581.318.406,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	32.905.000,00	32.905.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	34.276.593,00
3	Belanja Pegawai BLUD	1.926.224.459,00	1.665.490.239,00	86,46	1.547.041.813,00
	Jumlah	**1.959.129.459,00**	**1.698.395.239,00**	**86,69**	**1.581.318.406,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.411.918.363,00 atau 77,08% dari anggaran sebesar Rp 1.831.842.138,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.558.479.267,42. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.639.400,00	17.747.300,00	64,21	5.790.400,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.689.400,00	6.289.360,00	94,02	0,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	18.837.000,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.168.800,00	22.070.000,00	91,32	0,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.931.200,00	19.484.000,00	97,76	13.008.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	45.400.000,00	39.450.000,00	86,89	69.900.000,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.760.000,00	5.034.204,00	87,40	0,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	345.216,00	302.064,00	87,50	441.576,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	431.520,00	377.580,00	87,50	552.024,00
10	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	359.748.000,00	327.582.799,00	0,00	335.179.905,00
11	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.341.728.602,00	973.581.062,00	72,56	1.114.770.362,42
	Jumlah	**1.831.842.138,00**	**1.411.918.369,00**	**77,08**	**1.558.479.267,42**

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 116.283.989,00 atau 78,09% dari anggaran sebesar Rp 148.914.415,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.014.247.327,88. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.914.415,00	116.283.989,00	78,09	607.666.900,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	406.580.427,88
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**148.914.415,00**	**116.283.989,00**	**78,09**	**1.014.247.327,88**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 148.914.415,00 atau 78,09% dari anggaran sebesar Rp 116.283.989,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 607.666.900,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	469.125.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	148.914.415,00	116.283.989,00	0,00	138.541.900,00
	Jumlah	**148.914.415,00**	**116.283.989,00**	**78,09**	**607.666.900,00**

4.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran menunjukkan jumlah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari pendapatan BLUD. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.192.878,00 dan Rp149.231.502,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Singaraja Nomor Rekening: 1590087821 a.n 1050085BOKPKMABANGII	32.192.878,00	149.231.502,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**32.192.878,00**	**149.231.502,00**

b. Kas di BLUD

Kas pada BLUD menunjukkan jumlah kas yang berada di rekening BLUD yang digunakan untuk aktivitas operasional. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas masing-masing sebesar Rp378.981.457,36 dan Rp290.826.076,65 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem Nomor Rekening: 0220105002299 a.n BLUD UPTD Puskesmas Abang II	378.981.457,36	290.826.076,65
Jumlah Kas pada BLUD	**378.981.457,36**	**290.826.076,65**

c. Piutang Layanan

Piutang Layanan pada UPTD Puskesmas Abang II per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.808.400,00 dan Rp14.047.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Pelayanan	7.808.400,00	14.047.600,00
Jumlah Piutang	**7.808.400,00**	**14.047.600,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada UPTD Puskesmas Abang II per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp78.048,00 dan Rp140.476,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Penyisihan Piutang	(78.084,00)	(140.476,00)
Jumlah Penyisihan Piutang	**(78.084,00)**	**(140.476,00)**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang per 31 Desember 2025:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan
Piutang Pelayanan	7.808.400,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**7.808.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% Penyisihan	1,0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**78.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang per 31 Desember 2024:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan
Piutang Pelayanan	14.047.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Bruto	**14.047.600,00**	0,00	0,00	0,00
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**140.476,00**	0,00	0,00	0,00
Piutang Netto	**13.907.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. **Persediaan BLUD**

Persediaan BLUD merupakan barang habis pakai yang digunakan dalam operasional UPTD Puskesmas Abang II. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp346.902.678,01 dan Rp389.274.544,40 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Alat Tulis Kantor	731.700,00	838.550,00
Bahan Komputer	2.637.474,00	465.000,00
Kertas dan Cover	3.356.314,00	6.423.750,00
Bahan Cetak	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00
Benda Pos	50.000,00	40.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	338.781.640,01	381.102.244,40
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00
Alat Listrik	547.750,00	405.000,00
Perabot Kantor	797.800,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	**346.902.678,01**	**389.274.544,40**

Berikut disajikan saldo mutasi Persediaan BLUD per 31 Desember 2025:

URAIAN	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Tulis Kantor	838.550,00	9.250.000,00	9.356.850,00	731.700,00
Bahan Komputer	465.000,00	9.728.040,00	7.555.566,00	2.637.474,00
Kertas dan Cover	6.423.750,00	9.377.001,00	12.444.437,00	3.356.314,00
Barang Cetakan	0,00	13.781.520,00	13.781.520,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	40.000,00	2.000.000,00	1.990.000,00	50.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	381.102.244,40	1.321.538.803,69	1.363.859.408,08	338.781.640,01
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	405.000,00	10.304.000,00	10.161.250,00	547.750,00
Perabotan Kantor	0,00	13.328.950,00	12.531.150,00	797.800,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**389.274.544,40**	**1.389.308.314,69**	**1.431.680.181,08**	**346.902.678,01**

Berikut disajikan saldo mutasi Persediaan BLUD per 31 Desember 2024:

URAIAN	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Tulis Kantor	381.000,00	9.388.100,00	8.930.550,00	838.550,00
Bahan Komputer	0,00	15.150.000,00	14.685.000,00	465.000,00
Kertas dan Cover	0,00	21.640.500,00	15.216.750,00	6.423.750,00
Barang Cetakan	0,00	33.888.375,00	33.888.375,00	0,00
Barang Kuasi	1.803.750,00	0,00	1.803.750,00	0,00
Benda Pos	500.000,00	2.000.000,00	2.460.000,00	40.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	353.828.030,20	1.277.608.040,78	1.250.333.826,58	381.102.244,40
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	12.401.000,00	12.401.000,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	0,00	6.970.000,00	6.565.000,00	405.000,00
Perabotan Kantor	0,00	1.215.500,00	1.215.500,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**356.512.780,20**	**1.380.261.515,78**	**1.347.499.751,58**	**389.274.544,40**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.143.650.349,64 dan Rp6.697.967.526,34 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Tanah	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	6.034.621.863,30	5.843.456.708,30
3) Gedung dan Bangunan	8.306.089.567,64	8.306.089.567,64
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.387.395,00	65.387.395,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**14.406.098.825,94**	**14.214.933.670,94**
Akumulasi Penyusutan	(8.262.448.476,30)	(7.516.966.144,60)
Nilai Buku	**6.143.650.349,64**	**6.697.967.526,34**

Rincian mutasi Aset Tetap tahun 2025, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	5.843.456.708,30	191.165.155,00	0,00	6.034.621.863,30
3) Gedung dan Bangunan	8.306.089.567,64	0,00	0,00	8.306.089.567,64
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.387.395,00	0,00	0,00	65.387.395,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**14.214.933.670,94**	**191.165.155,00**	**0,00**	**14.406.098.825,94**
Akumulasi Penyusutan	**7.516.966.144,60**			**8.262.448.476,30**
Nilai Buku	**6.697.967.526,34**			**6.143.650.349,64**

Rincian mutasi Aset Tetap tahun 2024, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	5.237.005.308,30	607.666.900,00	1.215.500,00	5.843.456.708,30
3) Gedung dan Bangunan	7.899.509.139,76	406.580.427,88	0,00	8.306.089.567,64
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.387.395,00	0,00	0,00	65.387.395,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**13.201.901.843,06**	**1.014.247.327,88**	**1.215.500,00**	**14.214.933.670,94**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	3.861.000.348,90	544.908.570,70	0,00	4.405.908.919,60
3) Gedung dan Bangunan	2.780.065.593,00	285.695.630,00	0,00	3.065.761.223,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.847.052,00	5.448.950,00	0,00	45.296.002,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi	**6.680.912.993,90**	**836.053.150,70**	**0,00**	**7.516.966.144,60**
Nilai Buku				
1) Tanah	0,00			0,00
2) Peralatan dan Mesin	1.376.004.959,40			1.437.547.788,70
3) Gedung dan Bangunan	5.119.443.546,76			5.240.328.344,64
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.540.343,00			20.091.393,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00			0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00			0,00
Jumlah Nilai Buku	**6.520.988.849,16**			**6.697.967.526,34**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp166.666,00 dan Rp166.666,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Aset Lainnya	166.666,00	166.666,00
Jumlah	**166.666,00**	**166.666,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2025, sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	168.944.957,00	168.944.957,00
Jumlah Harga Perolehan	**168.944.957,00**	**168.944.957,00**
Akumulasi Penyusutan	(168.778.291,00)	(168.778.291,00)
Nilai Buku	**166.666,00**	**166.666,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2024, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	179.944.957,00	0,00	11.000.000,00	168.944.957,00
Jumlah Harga Perolehan	**179.944.957,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**168.944.957,00**
Akumulasi Penyusutan				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	179.778.291,00	0,00	11.000.000,00	168.778.291,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**179.778.291,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**168.778.291,00**
Nilai Buku				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00			0,00
2) Aset Lain-lain	166.666,00			166.666,00
Jumlah Niali Buku	**166.666,00**			**166.666,00**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) UPTD Puskesmas Abang II per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp142.368.360,00 dan Rp143.514.222,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Utang Belanja Jasa Pelayanan bagi ASN	135.914.793,00	125.823.745,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan bagi Non ASN	6.453.567,00	17.690.477,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	**142.368.360,00**	**143.514.222,00**

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.767.255.985,01 dan Rp7.397.859.217,39 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Ekuitas Awal	7.397.859.217,39	7.247.470.936,60
2) Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(645.805.558,54)	(870.634.600,02)
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	15.202.326,16	1.021.022.880,81
Ekuitas Akhir	**6.767.255.985,01**	**7.397.859.217,39**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Lapoaran Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Abang II per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.327.016.084,24 dan Rp4.077.843.238,71 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.782.093.557,00	2.785.819.387,00
b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	243.421.497,00	0,00
c) Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
d) Pendapatan Hibah	1.178.953.439,53	0,00
e) Pendapatan Usaha Lainnya	11.793.082,71	11.182.970,83
f) Pendapatan APBN/APBD	110.754.508,00	1.280.840.880,88
Jumlah	**4.327.016.084,24**	**4.077.843.238,71**

4.3.2 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.927.821.642,78 dan Rp4.948.538.909,73 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Pegawai	1.708.486.287,00	1.583.279.172,00
b. Beban Barang dan Jasa	2.518.774.940,08	2.529.066.111,03
c. Beban Penyisihan Piutang	78.084,00	140.476,00
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	745.482.331,70	836.053.150,70
e. Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasional	**4.972.821.642,78**	**4.948.538.909,73**

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1.707.126.287,00	1.576.479.172,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	6.800.000,00
Jumlah	**1.708.486.287,00**	**1.583.279.172,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang:

	2025	2024
Beban Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	113.995.560,00	104.281.150,00
Beban Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.631.700,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkut	16.987.440,00	15.628.000,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	145.871.540,00	151.833.575,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	9.356.850,00	8.930.550,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	12.444.437,00	15.216.750,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	18.615.880,00	21.574.375,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Kuasai	0,00	1.803.750,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1.990.000,00	2.460.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	7.555.566,00	10.785.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Prabot Kantor	12.936.200,00	12.401.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	10.161.250,00	6.565.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	18.845.025,00	18.837.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.988.062,00	40.894.000,00
Beban Obat - Obatan - Obat	1.217.987.868,08	1.140.916.257,61
Beban Natura dan Pakan Natura		0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	56.570.000,00	75.640.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	25.044.800,00	22.258.200,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.484.000,00	89.724.375,00
Beban Persediaan Dibawah Nilai Kapitasi		0,00
Beban Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	49.995.750,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	327.582.799,00	0,00
Jumlah Beban Barang	**2.110.413.027,08**	**1.741.380.682,61**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	39.450.000,00	71.013.530,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	1.805.000,00
Beban Jasa Kalibrasi	6.797.640,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah Medis	23.663.487,00	7.465.000,00
Beban Tagihan Telepon	12.109.780,00	20.506.341,00
Beban Tagihan Air	4.858.600,00	8.286.565,00
Beban Tagihan Listrik	41.861.070,00	4.673.200,00
Beban Kawat/Faksimili/TV Berlangganan	0,00	36.867.930,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.866.600,00	6.660.000,00
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Keuangan		1.193.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	153.672.158,00	262.961.637,00
Beban Sewa Alat Ukur Lainnya/Biaya Sewa Pemantau Suhu Internet of Things	2.220.000,00	2.664.000,00
Beban Transport Lokal	0,00	209.400.000,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	302.064,00	441.576,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	377.580,00	552.024,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	15.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.950.000,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.034.204,00	0,00
Jumlah Beban Jasa	**314.163.183,00**	**634.489.803,00**

Beban Pemeliharaan:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	15.575.000,00	14.430.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Alat Pengolahan Air Kotor	16.372.500,00	13.075.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	1.376.400,00	4.674.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah - Alat Pendingin	6.959.000,00	9.805.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.993.550,00	12.780.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum	6.824.280,00	7.741.140,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	14.319.000,00	20.875.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Jaringan	999.000,00	2.750.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	0,00	30.239.125,42
Jumlah Beban Pemeliharaan	**74.418.730,00**	**116.369.265,42**

Beban Perjalanan Dinas:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	9.068.360,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**0,00**	**9.068.360,00**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:

	2025	2024
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00
Beban Jasa untuk Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Beban Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	19.780.000,00	27.758.000,00
Jumlah Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	**19.780.000,00**	**27.760.024,00**

c. Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi:

	2025	2024
Beban Penyusutan dan Amortisasi	745.482.331,70	836.053.150,70
Jumlah	**745.482.331,70**	**836.053.150,70**

Beban Penyisihan Piutang:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	78.084,00	140.476,00
Jumlah	**78.084,00**	**140.476,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

		2025	2024
a	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
b	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00
c	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	61.071,00
	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0,00**	**61.071,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka - angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup UPTD Puskesmas Abang II dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Abang II bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Abang II bersamaan dengan penerbitan laporan auditor independen tanggal 06 April 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00046/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Abang II
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Abang II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Abang II tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Abang II bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah-masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

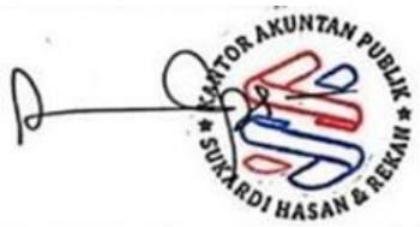
Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan design dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Terdapat jasa giro yang belum diakui sebagai pendapatan di LRA Puskesmas Tahun 2025.

   Atas permasalahn tersebut kami sarankan agar pendapatan jasa giro diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun di Laporan Operasional.

2. Tata Kelola Aktiva Tetap dan Persediaan Perlu ditingkatkan

   Dari hasil audit yang kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:

   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Abang II ke Pemda Karangasem.

      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:

   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.

3. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Operasional

   Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Abang II dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Abang II.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Auntansi yang terantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

Atas masalah tersebut, kami saranankan agar Puskesmas Abang II meningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Abang II dibidang standar akuntansi pemerintahan no 13.

4. Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Abang II pada SIPD belum tepat waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Abang II pada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka -angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Abang II dan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00046/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan

BLUD UPTD Puskesmas Abang II

Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Abang II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Abang II merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Abang II... terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188, Email: info@kapsukardihasan.com Website: https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Abang II sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188, Email: info@kapsukardihasan.com Website: https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Abang II berbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Abang II belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Abang II melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Abang II berbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188, Email: info@kapsukardihasan.com Website: https://www.kapsukardihasan.com

dan perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188, Email: info@kapsukardihasan.com Website: https://www.kapsukardihasan.com

`

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS KUBU I
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor : 00043/2.0925/AU.5/11/1881-2/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS KUBU I

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	5
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
RESUME PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	77
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	82

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS KUBU I
Jalan Amlapura - Singaraja, Kec.Kubu, Karangasem, Kode Pos 80853
Telepon (0363) 23610, Email Puskesmas_kubu@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS KUBU I
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	dr. Ida Made Ananta Warma Dewa
Nomor Telepon	:	08179755694
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Amlapura–Singaraja, Kec.Kubu, Karangasem
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Kubu I

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu I Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu I Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu I Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu I Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu I Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu I Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu I Kabupaten Karangasem.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Kubu I

METERAI TEMPEL 10000 DAMX205432916

dr. Ida Made Ananta Warma Dewa

NIP. 19760512 200501 1 010

Dipindai dengan CamScanner

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00043/2.0925/AU.5/11/1881-2/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Kubu I

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Kubu I ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 06 April 2026

00043

Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

UPTD PUSKESMAS KUBU I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan	***4.1.1***				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		0,00	2.848.946.720,00	0,00	2.876.990.748,32
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		0,00	21.893.379,57	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		**0,00**	**2.870.840.099,57**	**0,00**	**2.876.990.748,32**
Belanja Daerah	***4.1.2***				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai		2.088.907.042,00	1.847.676.002,00	88,45	1.111.397.338,00
Belanja Barang dan Jasa		1.981.819.998,00	1.433.601.093,00	72,34	1.845.264.187,98
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		**4.070.727.040,00**	**3.281.277.095,00**	**80,61**	**2.956.661.525,98**
Belanja Modal					
Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		382.181.000,00	301.111.213,00	78,79	588.315.700,00
Belanja Gedung dan Bnagunan		0,00	0,00	0,00	311.218.802,11
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		**382.181.000,00**	**301.111.213,00**	**78,79**	**899.534.502,11**
Jumlah Belanja		**4.452.908.040,00**	**3.582.388.308,00**	**80,45**	**3.856.196.028,09**
Surplus (Defisit)		**(4.452.908.040,00)**	**(711.548.208,43)**	**15,98**	**(979.205.279,77)**
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran		**(4.452.908.040,00)**	**(711.548.208,43)**	**15,98**	**(979.205.279,77)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu I



dr. Ida Made Ananta Warma Dewa
NIP. 197605122005011010

UPTD PUSKESMAS KUBU I

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**1.012.084.637,80**	**624.783.643,48**
Penggunaan SAL	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**1.012.084.637,80**	**624.783.643,48**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(711.548.208,43)	(979.205.278,77)
Sub Total (3+4)	**300.536.429,37**	**(354.421.635,29)**
Lain-Lain Pendapatan APBD	154.770.224,00	1.079.863.891,09
Pendapatan BOK	319.407.905,00	286.642.382,00
Setoran ke Kas Daerah	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**774.714.558,37**	**1.012.084.637,80**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Kubu I



dr. Ida Made Ananta Warma Dewa

NIP. 197605122005011010

UPTD PUSKESMAS KUBU I
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
Aset	***4.2.1***		
Aset Lancar	***4.2.1.1***		
Kas di Bendahara Pengeluaran		80.320.220,00	116.173.094,00
Kas di BLUD		694.394.338,37	895.911.543,80
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		16.080.200,00	22.851.500,00
Penyisihan Piutang		(160.802,00)	(228.515,00)
Persediaan		337.948.028,98	301.991.297,12
Jumlah Aset Lancar		**1.128.581.985,35**	**1.336.698.919,92**
Aset Tetap	***4.2.1.2***		
Tanah		10.455.000,00	10.000.000,00
Peralatan dan Mesin		4.645.510.013,62	4.208.040.531,62
Gedung dan Bangunan		6.781.802.117,79	6.781.802.117,79
Jalan, Irigasi dan Jaringan		280.220.510,00	280.220.510,00
Jumlah Aset Tetap		**11.717.987.641,41**	**11.280.063.159,41**
Akumulasi Penyusutan		(7.377.111.654,62)	(6.891.239.425,62)
Nilai Buku Aset Tetap		**4.340.875.986,79**	**4.388.823.733,79**
Aset Lainnya	***4.2.1.3***		
Aset Lain-Lain		388.637.605,00	388.637.605,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(388.278.299,00)	(388.278.299,00)
Jumlah Aset Lainnya		**359.306,00**	**359.306,00**
Jumlah Aset		**5.469.817.278,14**	**5.725.881.959,71**
Kewajiban	***4.2.2***		
Kewajiban Jangka Pendek	***4.2.2.1***		
Utang Belanja		153.741.398,00	447.045.295,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**153.741.398,00**	**447.045.295,00**
Jumlah Kewajiban		**153.741.398,00**	**447.045.295,00**
Ekuitas	***4.2.3***		
Ekuitas		5.316.075.880,14	5.278.836.664,71
Jumlah Ekuitas		**5.316.075.880,14**	**5.278.836.664,71**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**5.469.817.278,14**	**5.725.881.959,71**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu I

dr. Ida Made Ananta Warma Dewa
NIP. 197605122005011010

UPTD PUSKESMAS KUBU I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan	%
Pendapatan	***4.3.1***				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		2.842.181.220,00	2.845.696.090,00	(3.514.870,00)	(0,12)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		319.407.905,00	286.642.382,00	32.765.523,00	11,43
Pendapatan Hibah		1.388.358.089,23	0,00	1.388.358.089,23	0,00
Pendapatan APBD		154.770.224,00	1.079.863.891,00	(925.093.667,00)	(85,67)
Pendapatan Lain-Lain		21.893.379,57	16.155.855,00	5.737.524,57	35,51
Jumlah Pendapatan		**4.726.610.817,80**	**4.228.358.218,00**	**498.252.599,80**	**11,78**
Beban	***4.3.2***				
Beban Pegawai		1.634.053.431,00	1.399.991.280,00	234.062.151,00	16,72
Beban Barang dan Jasa		2.274.968.244,37	1.362.727.596,00	912.240.648,37	66,94
Beban Penyisihan Piutang		160.802,00	325.243,00	(164.441,00)	(50,56)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		485.872.229,00	485.379.018,00	493.211,00	0,10
Jumlah Beban		**4.395.054.706,37**	**3.248.423.137,00**	**1.146.631.569,37**	**35,30**
Surplus (Defisit) Operasional		**331.556.111,43**	**979.935.081,00**	**(648.378.969,57)**	**(66,17)**
Kegiatan Non Operasional	***4.3.3***				
Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus (Defisit) Non Operasional		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**331.556.111,43**	**979.935.081,00**	**(648.378.969,57)**	**(66,17)**
Pos Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pos Luar Biasa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Surplus (Defisit) LO		**331.556.111,43**	**979.935.081,00**	**(648.378.969,57)**	**(66,17)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu I

dr. Ida Made Ananta Warma Dewa
NIP. 197605122005011010

UPTD PUSKESMAS KUBU I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	**5.278.836.664,71**	**4.781.833.600,00**
Surplus (Defisit) LO	331.556.111,43	964.429.712,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	(294.316.896,00)	(467.426.647,29)
Koreksi Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Belanja YMH	0,00	0,00
Penyetoran ke Kas Daerah	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	**5.316.075.880,14**	**5.278.836.664,71**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu I

dr. Ida Made Ananta Warma Dewa
NIP. 197605122005011010

UPTD PUSKESMAS KUBU I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.848.946.720,00	2.860.834.893,00
Pendapatan APBN/APBD	154.770.224,00	1.079.863.891,09
Dana Perimbangan (BOK)	319.407.905,00	286.642.382,00
Pendapatan Lain-Lain	21.893.379,57	16.155.855,32
Jumlah arus Kas Masuk	**3.345.018.228,57**	**4.243.497.021,41**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.847.676.002,00	1.111.397.338,00
Belanja Barang dan Jasa	1.433.601.093,00	1.845.264.186,98
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.281.277.095,00**	**2.956.661.524,98**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**63.741.133,57**	**1.286.835.496,43**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	301.111.213,00	588.315.700,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	311.218.802,11
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**301.111.213,00**	**899.534.502,11**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(301.111.213,00)**	**(899.534.502,11)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Penyetoran ke Kas Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	197.984.947,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**197.984.947,00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	197.984.947,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**197.984.947,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**(237.370.079,43)**	**387.300.994,32**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**1.012.084.637,80**	**624.783.643,48**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**774.714.558,37**	**1.012.084.637,80**
menurut neraca		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu I

dr. Ida Made Ananta Warma Dewa
NIP. 197605122005011010

Catatan Atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUBU I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Kubu I

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Kubu I

UPTD Puskesmas Kubu I adalah puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Kubu I merupakan sebuah puskesmas rawat inap.

UPTD Puskesmas Kubu I memiliki enam puskesmas pembantu (Pustu) yang tersebar ke dalam empat desa, yaitu:

1) Desa Tulamben : Pustu Batudawa, Pustu Muntig, Pustu Tulamben
2) Desa Dukuh : Pustu Dukuh
3) Desa Baturinggit : Pustu Baturinggit
4) Desa Sukadana : Pustu Sukadana

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023. UPTD Puskesmas Kubu I ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

b. Tempat dan Kedudukan

UPTD Puskesmas Kubu I beralamat di Jl. Raya Amlapura Singaraja, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Telp 0363-23610, Email : puskesmas_kubui@yahoo.co.id

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Kubu I adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);

17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 620/HK/2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. Visi dan Misi UPTD Puskesmas Kubu I

1) Visi

Visi dari UPTD Puskesmas Kubu I adalah " Mewujudkan Kecamatan Kubu Sehat Melalui Pelayanan Primer Puskesmas yang AGUNG (Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, Gemah Ripah Loh Jinawi) ”

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 5 (Lima) misi, sebagai berikut.

a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai dengan standar kesehatan
b) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
d) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan
e) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya

3) Strategi

Untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut, UPTD Puskesmas Kubu I memiliki strategi sebagai berikut:

a) Menyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) sebagai pedoman kegiatan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien
b) Melayani kliien/masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Prima
c) Menggalang kerjasama antar unit lewat lokakarya mini lintas program maupun lintas sektoral secara rutin
d) Meningkatkan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di jaringan puskesmas
e) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan melalui penerapat kemajuan ilmu dan teknologi serta melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika
f) Mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
g) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyampaian informasi kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya secara langsung maupun tidak langsung.

4) Tata Nilai

a) C : Cekatan = Melayani dengan cepat dan tepat
b) A : Amanah = Melayani sesuai standar pelayanan
c) N : Nyaman = Menciptakan lingkungan kerja aman dan kondusif
d) T : Terbuka = Menerima saran dan kritik membangun
e) I : Ikhlas = Melayani sepenuh hati dan bertanggungjawab
f) K : Kerjasama = Kerja bersama demi mencapai tujuan yang sama

5) Moto : "Kepuasan Pelanggan Dengan Memberikan Pelayanan Yang Cantik (Cekatan, Amanah, Nyaman, Terbuka, Ikhlas, dan Kerjasama).

e. Program Pelayanan UPTD Puskesmas Kubu I

Program Pelayanan UPTD Puskesmas Kubu I terdiri dari:

1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas

Di UPTD Puskesmas Kubu I ada 5 kegiatan esensial dan I kegiatan perkesmas. Lima Kegiatan Esensial tersebut meliputi:

a) Pelayanan Kesehatan Keluarga (Ibu, Anak dan Keluarga Berencana)

b) Pelayanan Gizi Masyarakat

c) Pelayanan Promosi Kesehatan

d) Pelayanan Kesehatan Lingkungan

e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

f) Upaya Pelayanan UKGS/UKGM

UKGS/UKGM adalah suatu komponen dari UKS dan merupakan tehnis pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak sekolah dan di posyandu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak serta bumil.

g) Upaya Pelayanan Lansia

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

h) Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

i) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/ praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

2) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

a) Upaya Kesehatan Yankestradkom

b) Upaya Kesehatan Kerja

c) Upaya Kesehatan Olah Raga

d) Upaya Kesehatan Indera

3) Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi dan Laboratorium

a) Upaya Kesehatan Perorangan

Upaya kesehatan perorangan di UPTD Puskesmas Kubu I meliputi: poli umum, poli gigi dan mulut, ruang KIA KB dan imunisasi, ruang konsultasi gizi, laboratorium, Farmasi, kasir, loket pendaftaran dan konseling.

b) Farmasi

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.

c) Laboratorium

Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

f. Jenis-Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Kubu I

Tata kelola Pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster

Pelayanan UPTD Puskesmas Kubu I terdiri dari:

1) Klaster 1 Manajemen
   a) Manajemen Inti
   b) Manajemen Arsip
   c) Manajemen Sumber Daya Manusia
   d) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan
   e) Manajemen Mutu Pelayanan
   f) Manajemen Keuangan dan Aset atau Barang Milik Daerah
   g) Manajemen Sistem Informasi Digital
   h) Manajemen Jejaring
   i) Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
2) KLASTER 2 IBU DAN ANAK
   a) Ibu hamil, bersalin, dan nifas
   b) Balita dan anak pra sekolah

c) Anak usia sekolah dan remaja
d) Gizi

3) Klaster 3 Usia Dewasa Dan Lansia
   a) Usia dewasa 18 – ≤ 59 tahun
   b) Usia lansia ≥ 60 tahun
4) Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular
   a) Kesehatan lingkungan
   b) Surveilans
   c) TB/HIV
5) Klaster 5 Lintas Klaster
   a) UGD 24 jam
   b) Rawat inap
   c) Laboratorium
   d) Kefarmasian
   e) Kesehatan gigi dan mulut
   f) Penanggulangan krisis kesehatan
   g) CKG (Cek Kesehatan Gratis)

g. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	**UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESSENSIAL**							**89,06**
I.	**KESEHATAN KELUARGA**							***86,00***
1	**Kesehatan Ibu**							**114,89**
	1	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	Bumil	100%	329	365	110,94	
	2	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Bumil	100%	329	333	101,22	
	3	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai Standar (K6)	Bumil	100%	329	322	97,87	
	4	Cakupan Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung, infeksi)	Bumil	90%	66	104	157,58	
	5	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (Pn)	Bulin	100%	306	349	114,05	
	6	Cakupan pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF 4)	Bulin	100%	306	326	106,54	

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	7	Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN1)	Bayi	100%	306	355	116,01	
2	**Kesehatan Bayi**							**91,73**
	1	Cakupan Pelayanan Neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN3)	Bayi	100%	306	349	114,05	
	2	Cakupan Penaganan komplikasi neonatus	Bayi	80%	50	15	30,00	
	3	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 12 bln (Kunjungan Bayi)	Bayi	100%	334	438	131,14	
3	**Upaya Kesehatan Balita dan Anak pra Sekolah**							**100,40**
	1	Cakupan Pelayanan Anak Balita (12 - 59 bulan) sesuai standar	Balita	100%	832	842	101,20	
	2	Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS	Balita	100%	619	619	100,00	
	3	Cakupan Stimulasi Deteksi Intervinsi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	Apras	100%	365	365	100,00	
4	**Upaya Kesehatan Sekolah**							**107,50**

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Siswa	100%	4.209	5.156	122,50	
	2	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SD/MI	Siswa	100%	2.779	2.779	100,00	
	3	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik siswa SMP/MTs	Siswa	100%	1.342	1.342	100,00	
5	**Pelayanan Keluarga Berencana (KB)**							**86,94**
	1	Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	Akseptor	70%	4.759	3.571	75,04	
	2	Cakupan Peserta KB Pasca persalinan	Akseptor	100%	86	85	98,84	
6	**Pelayanan Calon Pengantin**							**0,52**
	1	Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Skrining Kesehatan	Catin	100%	388	2	0,52	
7	**Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**							**100,00**
	1	Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Orang	100%	3.430	3.430	100,00	
II.	**PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN**							***92,82***
1	**PHBS 5 Tatanan**							**90,23**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUBU I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	1	Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	90%	1050	957	91,14	
	2	Tatanan Institusi Pendidikan/ Sekolah	Sekolah	50%	27	27	100,00	
	3	Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	80%	7	7	100,00	
	4	Tatanan TTU	TTU	40%	2	2	100,00	
	5	Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	45%	10	6	60,00	
2	**Pemberdayaan Masyarakat**							**100,00**
	1	Pemberdayaan melalui penyuluhan	Kader UKBM	100%	40	40	100,00	
3	**Pembinaan UKBM**							**100,00**
	1	Pembinaan Posyandu	Posyandu	80%	40	40	100,00	
	2	Persentase Posyandu Aktif	Posyandu	100%	40	40	100,00	
4	**Penyuluhan Narkoba**							**100,00**
	1	Penyuluhan Narkoba Minimal 5 kali dalam Setahun	Masyarakat, Sekolah, Kelompok	5 Kali	5	5	100,00	
5	**Promosi Kesehatan**							**100,00**

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	1	Promosi Kesehatan untuk program prioritas di dalam Gedung Puskesmas dan Jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	Masyarakat	12 Kali	12	12	100,00	
	2	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar gedung Puskesmas) minimal 12 kali setahun	Masyarakat, Sekolah, Kelompok	12 Kali	12	12	100,00	
6	**Program Pengembangan**							**66,67**
	1	Pembinaan UKBM Lain	Kelompok Peduli Kesehatan	3 Kali	3	3	100,00	
	2	Pergerakan Germas 5 Indikator	Masyarakat, Sekolah, Kelompok	3 Kali	3	3	100,00	
	3	Sosialisasi/ Pembinaan SBH minimal 1 Kali setahun	SLTA/ Sederajat	1 Kali	1	0	-	
III.	**PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN**							***82,69***
1	**Pengawasan Kualitas Air**							**78,86**
	1	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/layak	Penduduk	95%	24.062	22.694	94,31	

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	2	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/IKL	Sarana	100%	180	180	100,00	
	3	Persentase Pengambilan sampel air	Sampel Air	100%	165	165	100,00	
	4	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standart	Sarana	85%	30	30	100,00	
2	**STBM**							**91,80**
	1	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	100%	6.904	6.586	95,39	
	2	Jumlah Desa ODF	Desa	50%	5	4	80,00	
	3	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	100%	5	5	100,00	
3	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan		Sarana	90%	26	26	100,00	**100,00**
4	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan		Sarana	25%	41	15	36,59	**36,59**

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5	Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis		RS dan Fasyankes	100%	1	1	100,00	**100,00**
6	Persentase Rumah Sehat		Rumah	25%	9.845	8.751	88,89	**88,89**
IV.	**UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**							***93,28***
	1	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	Ibu hamil	80%	25	25	100,00	
	2	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	Ibu hamil	84%	329	333	101,22	
	3	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Bayi	60%	259	146	56,37	
	4	Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	Bayi	70%	247	189	76,52	
	5	Persentase Cakupan Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	Balita	85%	13	13	100,00	
	6	Persentase Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	Remaja Putri	58%	1.671	1.671	100,00	
	7	Persentase Cakupan vitamin A pada Balita	Balita	90%	1.213	1.133	93,40	

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	8	Persentase Anemia pada ibu hamil	Ibu hamil	33%	26	6	23,08	
	9	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Bayi	2,5%	306	13	4,25	
	10	Persentase Balita Kurus (Wasting)	Balita	7,0%	1.089	13	1,19	
	11	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	Balita	5,02%	1.089	40	3,67	
	12	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	Balita	85%	1.194	1.089	91,21	
	13	Persentase Cakupan Skrining anemia remaja putri	rematri	90%	1.671	1.671	100,00	
	14	Persentase Cakupan Ibu Nifas Mendapat kapsul Vitamin A	Ibu Nifas	82%	306	349	114,05	
V.	**UPAYA PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT**							***90,52***
1	**TB Paru**							**55,18**
	1	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Orang	>90%	31	6	19,35	
	2	Succsess Rate (Angka Keberhasilan Pengobatan)	Orang	>90%	22	20	90,91	

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	3	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Orang	100%	152	84	55,26	
2	**Malaria**							**0,00**
	1	Prosentase Penderita Positif Malaria Yang Diobati sesuai Standar	Orang	100%	0	0	0,00	
	2	Angka Kesakitan Malaria /Annual Parasite Incident (API)	Orang	0,98 per 1.000 pddk (<1)	0	0	0,00	
3	**Kusta**							**0,00**
	1	Angka Prevalensi Kusta	Orang	0,97 per 1.000 pddk (<1)	0	0	0,00	
	2	Angka Kesembuhan / RFT Rate	Orang	100%	0	0	0,00	
4	**Diare**							**79,57**
	1	Pelayanan penderita diare sesuai standar	Orang	100%	235	187	79,57	
5	**Hepatitis**							**90,58**
	1	Pelayanan deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	Orang	100%	329	298	90,58	

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
6	**ISPA**							**52,78**
	1	Prosentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	Orang	100%	256	256	100,00	
	2	Cakupan penemuan pneumonia balita	Orang	100%	36	2	5,56	
7	**Demam Berdarah Dengue**							**118,00**
	1	Angka Kesakitan DBD/Insiden Rate (IR) DBD	Orang	50 ribu Per 100.000 Penduduk (50)	50	68	136,00	
	2	Angka Bebas Jentik (ABJ)	Rumah	>95%	2.000	2.000	100,00	
8	**Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS**							**100,00**
	1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	penduduk beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TBC, IMS, WPS, Waria/ trans gender, WBP)	100%	362	362	100,00	
9	**Pencegahan dan Penanggulangan Rabies**							**100,00**
	1	Pelayanan kasus GHPR ditatalaksana standar	Orang	100%	276	276	100,00	
10	**Kecacingan**							**100,00**
	1	Pelayanan POPM kecacingan	Orang	100%	8.432	8.432	100,00	

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11	**Surveilance Penyakit**							**100,00**
	1	Kelengkapan Laporan Survailance	Puskesmas	90%	52	52	100,00	
	2	Ketepatan Laporan Survailance	Puskesmas	100%	52	52	100,00	
	3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal/alert Penyakit Potensial KLB	100%	80	80	100,00	
12	**Imunisasi**							**99,63**
	1	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Orang	100%	334	337	100,90	
	2	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan antigen baru	Orang	100%	334	302	90,42	
	3	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	Orang	100%	347	358	103,17	
	4	Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	Orang	80%	481	481	100,00	
	5	Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	Orang	80%	329	341	103,65	
13	**Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular**							**100,00**

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	1	Presentase meningkatnya desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa	70%	5	5	100,00	
	2	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	100%	273	273	100,00	
	3	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	100%	97	97	100,00	
	4	Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining penyakit tidak menular sesuai standar di posbindu	Orang	100%	7.247	7.247	100,00	
	5	Persentase ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang	100%	68	68	100,00	
UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN								**100,00**
1	**Pelayanan Kesehatan Tradisional**							**100,00**
	1	Persentase Pembinaan tanaman obat keluarga pada keluarga	Keluarga	3%	5	5	100,00	
	2	Persentase Pembinaan pada kelompok Asuhan mandiri	Kelompok Asmas	60%	0	0	-	
	3	Persentase Pembinaan penyehat tradisional	Orang	70%	44	44	100,00	

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2	**Pelayanan Kesehatan Olah Raga**							**100,00**
	1	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah raga diwilayah kerjanya	Puskesmas	12	1	1	100,00	
	2	Persentase calon jamaah haji yang melakukan tes kebugaran	Jemaah Haji	100%	0	0		
3	**Kesehatan Gigi Masyarakat (Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut)**							**100,00**
	1	Persentase Desa yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Desa	60%	5	5	100,00	
4	**Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) (Pelayanan Kesehatan Gigi Sekolah)**							**100,00**
	1	Persentase Pembinaaan Kesehatan Gigi di TK	TK	80%	12	12	100,00	
	2	Persentase Pembinaan dan Bimbingan Sikat Gigi Massal pada SD/MI	SD/MI	80%	21	21	100,00	
5	**Upaya Kesehatan Kerja (Pelayanan Kesehatan Kerja)**							**100,00**
	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	Puskesmas	12	1	1	100,00	
	2	Persentase Pos UKK yang dibina	Pos UKK	100%	2	2	100,00	
UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP)								**100,00**

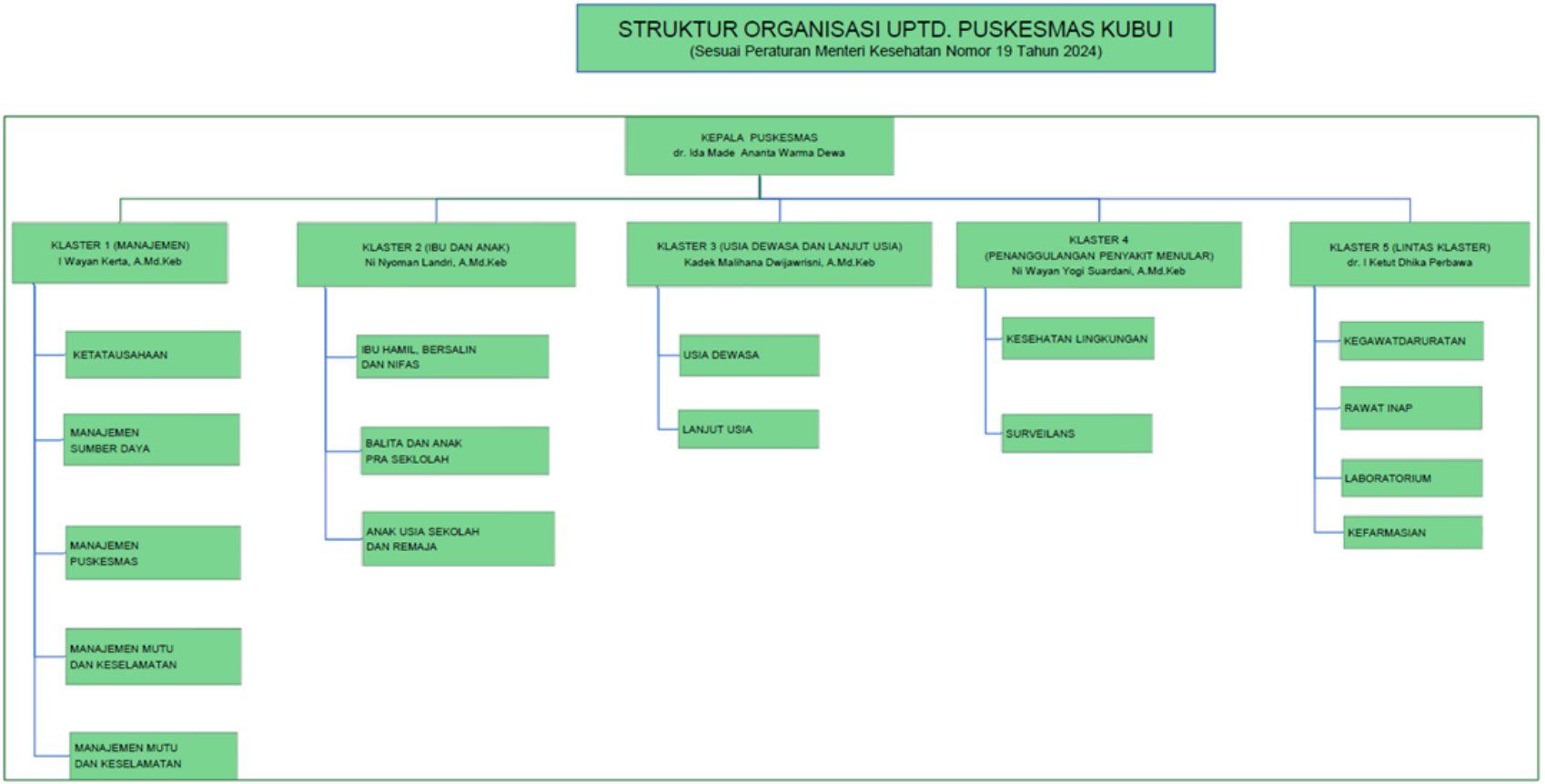
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUBU I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
							SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan**							**100,00**
	1	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat sesuai standar	FKTP	70%	1	1	100,00	
PELAYANAN PERKESMAS								**100,00**
	1	Persentase keluarga rawan yang dibina	Keluarga	80%	240	240	100,00	
PELAYANAN KEFARMASIAN								**100,00**
	1	Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Puskesmas	100%	1	1	100,00	
	2	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Obat	96%	53	53	100,00	
PELAYANAN LABORATORIUM								**100,00**
	1	Kemampuan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis di wilayah kerja puskesemas	Jenis Pemeriksaan Spesimen	20%	17	17	100,00	
	2	Kemampuan pengujian terhadap sampel lingkungan di wilayah kerja puskesmas	Jenis Pengujian Sampel	50%	34	34	100,00	
HASIL RATA-RATA CAKUPAN MANAJEMEN PUSKESMAS								**96,35**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUBU I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)	
						SUB VARIABEL	VARIABEL
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
KRITERIA KINERJA							BAIK

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kubu I



Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kubu I terdiri dari:

1) Kepala Puskesmas;
2) Tata Usaha; dan
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
8) Penanggung Jawab Mutu

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Puskesmas

   Wewenang:

   a) Memeriksa dan menganalisa laporan-laporan kegiatan stafnya dan sekaligus mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.
   b) Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang di bawahnya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

   Tanggung Jawab:

   a) Pelaksanaan tugas sehari-hari
   b) Melakukan pengawasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
   c) Mengadakan koordinasi dengan kepala kecamatan dan lintas sektor dalam upaya pembangunan Kesehatan di wilayah kerja;
   d) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka miningkatkan derajat Kesehatan;
   e) Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan dibantu oleh staf puskesmas;
   f) Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan;
   g) Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Induk, Pustu, Pusling dan Iain-Iain.

2) Tata Usaha

   Wewenang:

   a) Menilai kelengkapan administrasi rumah tangga;
   b) Menilai kelengkapan administrasi kepegawaian;
   c) Menilai Kelengkapan administrasi keuangan.

Tanggung Jawab:

a) Memonitoring data kepegawaian (kinerja)
b) Memonitoring kinerja rumah tangga
c) Memonitoring kinerja keuangan

3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dałam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Tanggung Jawab:

a) Promosi Kesehatan
b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
c) Pelayanan Kesehatan Keluarga
d) Pelayanan Gizi
e) Pelayanan P2P
f) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

4) Penanggung Jawab I-JKM Pengembangan

Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Pengembangan;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dałam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Pengembangan

Tanggung Jawab:

a) Pelayanan Kesehatan Jiwa
b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional
d) Pelayanan Kesehatan Olahraga
e) Pelayanan Kesehatan Indera
f) Pelayanan Kesehatan Lansia

g) Pelayanan Kesehatan Kerja

5) Penanggung Jawab UKP, Kefannasian, dan Laboratorium

Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKP, Kefannasian, dan Laboratorium;

b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;

c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;

d) Membantu Kepala Puskesmas dałam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab membina jaringan pelayanan Puskesmas danjejaring Puskesmas;

b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;

c) Mengidentifikasi dan Menganalisa Data Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;

d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja jejaring pelayanan Puskesmas

7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

Tanggung Jawab:

Bertanggung Jawab memelihara sarana dan prasarana dan peralatan puskesmas

a) Bangunan

b) Alat Kesehatan

c) IPAL

d) Parkir/Halaman

e) Kendaraan

f) Diklat

g) Kebakaran/Kecelakaan

8) Penanggung Jawab Mutu

Wewenang:

a) Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua penanggung jawab mutu;

b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;

c) Mengolah dan Memelihara Dokumen/Rekaman;

d) Membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses pelayanan

Tanggung Jawab:

a) Menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem mutu manajemen

b) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjamin muta dalam proses diklat berdasarkan standar mutu

i. Pejabat pada UPTD Puskesmas Kubu I

Susunan Pejabat Pengelola BLUD sempat mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, yaitu adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	dr. Ida Made Ananta Warma Dewa NIP. 19760512 200501 1 010	Pemimpinan BLUD
2	Ni Wayan Kerta, A.Md.Keb NIP. 19760304 200501 1 007	Pejabat Keuangan
3	Ni Nyoman Landri, A.Md.Keb NIP. 19750808 200604 2 025	Pejabat Teknis Bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4	Kadek Malihara Dwijawrisni, A.Md.Keb NIP. 19950223 201903 2 019	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
5	dr. I Ketut Dhika Perbawa, S.Ked NIP. 19940611 20223 1 005	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6	Ni Wayan Yogi Suardani, A.Md.Keb NIP. 19880527 201503 2 006	Pejabat Teknis Bidang Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7	I Made Dirga Rudytawan, A.Md.Kep NIP. 19931205 201903 1 002	Pejabat Teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
8	dr. Putu Ayu Ananda Puspasari Kartika Putri NIP. 19820425 200604 2 031	Pejabat Teknis Bidang Mutu

j. Jumlah Pegawai

No	Pendidikan	Jenis Tenaga	Jenis Kepegawaian			Jumlah
			ASN	PTT	Kontrak	
1	S1 Kedokteran	Dokter Umum	4			4
3	S1 Keperawatan	Perawat	6			6

No	Pendidikan	Jenis Tenaga	Jenis Kepegawaian			Jumlah
4	S1 Analis	Analis	1			1
5	S1 Kes. Mas.	Adminkes	1			1
6	S1 Kefarmasian	Apoteker	2			2
7	S1 Ekonomi	Oprasional	1			1
8	D3 Kebidanan	Bidan	23			23
9	D3 Keperawatan	Perawat	15			15
10	D3 Teknisi Gigi	Perawat Gigi	1			1
11	D3 Kesling	Kesling	1			1
12	D3 Gizi	Gizi	1			1
13	D3 Farmasi	Asis. Apotek	1			1
14	SMA/ SMP	Penunjang	7			7
JUMLAH			**65**			**65**

k. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Kubu I melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokkan sebagai berikut:

Kerjasama Pelayanan Kesehatan:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Karangasem

l. Pembiayaan UPTD Puskesmas Kubu I

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Kubu I mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan

Layanan Umum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (historical cost) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Kubu I.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan Setara Kas;
   b) Investasi Jangka Pendek;
   c) Piutang dari Kegiatan Blud;
   d) Persediaan;
   e) Investasi Jangka Panjang;
   f) Aset Tetap;
   g) Aset Lainnya;
   h) Kewajiban Jangka Pendek;
   i) Kewajiban Jangka Panjang; Dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.
3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

a) Pendapatan dari alokasi APBD;
b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

a) Pembayaran Pegawai;
b) Pembayaran Barang;
c) Pembayaran Bunga; dan
d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;

b) Perolehan Aset Lainnya;

c) Penyertaan Modal;

d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan

e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan

b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan

b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan pajak.

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.

2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3) Koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.

d) Ekuitas akhir.

h. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b) Jasa giro;

c) Pendapatan bunga;

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau

e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-Pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.

c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;

c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

Pembentukan Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan/atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a) Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
b) Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
6	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan

tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan/ Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
InstalasiPengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi/ Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);

b) Aset Sewaan;

c) Aset yang tidak digunakan;

d) Beban yang ditangguhkan; dan

e) Lainnya.

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka

Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (cut off). Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;

b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan

c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.

d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas;

b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal; dan

c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(1) Pendapatan usaha rawat jalan;

(2) Pendapatan usaha rawat darurat; dan

(3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

c) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

d) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
   (1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
   (2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
   (3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
   (4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.
d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.
g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
   (1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.
   (2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.
   (3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.

(4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.

c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.

e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai

Merupakan beban yang terkait kompensasi kepada pegawai, baik kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun yang berstatus Non-ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis Entitas.

b) Beban Barang

Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

c) Beban Jasa

Merupakan beban yang terkait dengan pemanfaatan jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

d) Beban Pemeliharaan

Merupakan beban yang terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.

e) Beban Langganan Daya/Jasa

Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.

f) Beban Perjalanan Dinas

Merupakan beban yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain

Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Merupakan beban yang timbul akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

i) Beban Penyisihan Piutang

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait potensi ketertagihannya.

j) Beban Operasional Lainnya

Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar

Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset

Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya

Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

a) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.
b) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Kubu I yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. UPTD Puskesmas Kubu I terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 13.905.771.5-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Kubu I Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan LRA

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.870.840.099,57 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.876.990.748,32 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	2.848.946.720,00	0,00	2.860.834.893,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	21.893.379,57	0,00	16.155.855,32
	Jumlah	**0,00**	**2.870.840.099,57**	**0,00**	**2.876.990.748,32**

4.1.2 Belanja LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah diterapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.582.388.308,00 atau 80,45% dari anggaran sebesar Rp4.452.908.040,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.856.196.027,09, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	4.070.727.040,00	3.281.277.095,00	80,61	2.956.661.524,98
b.	Belanja Modal	382.181.000,00	301.111.213,00	78,79	899.534.502,11
	Jumlah	**4.452.908.040,00**	**3.582.388.308,00**	**80,45**	**3.856.196.027,09**

a. Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.281.277.095,00 atau sebesar 80,61% dari anggaran sebesar Rp4.070.727.040,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.956.661.524,98. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Pegawai	2.088.907.042,00	1.847.676.002,00	88,45	1.111.397.338,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	1.981.819.998,00	1.433.601.093,00	72,34	1.845.264.186,98
3)	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.070.727.040,00**	**3.281.277.095,00**	**80,61**	**2.956.661.524,98**

Rincian dari Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.847.676.002,00 atau sebesar 88,45% dari anggaran sebesar Rp2.088.907.042,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.111.397.338,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	36.503.000,00	32.371.608,00	88,68	0,00
b)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	23.182.892,00
c)	Belanja Pegawai BLUD	2.052.404.042,00	1.815.304.394,00	88,45	1.088.214.446,00
	Jumlah	**2.088.907.042,00**	**1.847.676.002,00**	**88,45**	**1.111.397.338,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.433.601.093,00 atau sebesar 72,34% dari anggaran sebesar Rp1981.819.998,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah

sebesar Rp1.845.264.186,98. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.397.200,00	0,00	0,00	4.380.200,00
b)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	19.767.000,00
c)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.968.500,00	36.968.500,00	100,00	0,00
d)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.311.500,00	9.311.500,00	100,00	
e)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	127.340.000,00	95.430.000,00	74,94	227.360.000,00
f)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.360.000,00	11.506.752,00	74,91	0,00
g)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	920.576,00	690.432,00	75,00	1.373.792,00
h)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.150.720,00	863.040,00	75,00	1.717.408,00
i)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	227.126.688,98
j)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	399.078.000,00	322.941.300,00	80,92	303.027.014,00
k)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.364.293.502,00	955.889.569,00	70,06	1.060.512.084,00
	Jumlah	**1.981.819.998,00**	**1.433.601.093,00**	**72,34**	**1.845.264.186,98**

3) Belanja Lainnya

Realisasi Belanja Lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp301.111.213,00 atau sebesar 78,79% dari anggaran sebesar Rp328.181.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp588.315.700,00. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.181.000,00	301.111.213,00	78,79	588.315.700,00
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**382.181.000,00**	**301.111.213,00**	**78,79**	**588.315.700,00**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp301.111.213,00 atau sebesar 78,79% dari anggaran sebesar Rp382.181.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp588.315.700,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	382.181.000,00	301.111.213,00	78,79	301.395.700,00
b)	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	233.370.000,00
c)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	53.550.000,00
	Jumlah	**382.181.000,00**	**301.111.213,00**	**78,79**	**588.315.700,00**

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

4.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. Kas di BOK

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp80.320.220,00 dan Rp116.173.094,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran APBD	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Amlapura		
No. Rek 1590087843 a.n 1050088BOKPKMKUBUII	80.320.220,00	116.173.094,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**80.320.220,00**	**116.173.094,00**

b. Kas di BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD. Jumlah Kas pada BLUD UPTD Puskesmas Karangasem II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp694.394.338,37 dan Rp895.911.554,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	180.000,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Karangasem		
No. Rek 0220105005925 a.n BLUD UPTD Puskesmas Kubu II	694.214.338,37	895.911.544,80
Jumlah Kas pada BLUD	**694.394.338,37**	**895.911.544,80**

c. Piutang Layanan

Piutang Layanan merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Kubu I. Jumlah Piutang Layanan netto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.919.398,00 dan Rp22.622.985,00. dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Pendapatan Pelayanan:		
1) Piutang Pelayanan RJPT	15.723.100,00	22.541.500,00
2) Piutang Pelayanan Promotif	357.100,00	310.000,00
3) Piutang BPJS Kesehatan	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pelayanan (Bruto)	16.080.200,00	22.851.500,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(160.802,00)	(228.515,00)
Jumlah Piutang Pelayanan (Netto)	**15.919.398,00**	**22.622.985,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang Pelayanan RJPT	22.541.500,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pelayanan Promotif	310.000,00			
Piutang BPJS Kesehatan	0,00			
Jumlah Piutang Bruto	**22.851.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**228.515,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**22.312.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang Pelayanan RJPT	15.723.100,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pelayanan Promotif	357.100,00			
Piutang BPJS Kesehatan	0,00			
Jumlah Piutang Bruto	**16.080.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**160.802,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**15.562.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang/bahan pakai habis UPTD Puskesmas Kubu I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp337.948.028,98 dan Rp301.991.297,12 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Persediaan		
Alat Tulis Kantor	240.806,00	1.391.200,00
Bahan Komputer	1.106.475,00	2.984.000,00
Kertas dan Cover	2.703.960,00	2.520.000,00
Barang Cetakan	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00
Benda Pos	200.000,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	311.674.623,98	272.435.893,12
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00
Alat Listrik	0,00	0,00
Perabotan Kantor	1.019.100,00	3.387.000,00
Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	21.003.064,00	19.273.204,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan Barang Habis Pakai	**337.948.028,98**	**301.991.297,12**

Rincian mutasi persediaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Persediaan Habis Pakai				
Alat Tulis Kantor	1.391.200,00	3.919.056,00	5.069.450,00	240.806,00
Bahan Komputer	2.984.000,00	2.212.950,00	4.090.475,00	1.106.475,00
Kertas dan Cover	2.520.000,00	12.540.780,00	12.356.820,00	2.703.960,00
Barang Cetakan	0,00	21.432.300,00	21.432.300,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	200.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	272.435.893,12	1.044.847.034,24	1.005.608.303,38	311.674.623,98
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	0,00	4.369.800,00	4.369.800,00	0,00
Perabotan Kantor	3.387.000,00	8.769.300,00	11.137.200,00	1.019.100,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	19.273.204,00	55.422.831,00	53.692.971,00	21.003.064,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**301.991.297,12**	**1.156.514.051,24**	**1.120.557.319,38**	**337.948.028,98**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.340.875.986,79 dan Rp4.338.823.733,79 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Tanah	10.455.000,00	10.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.645.510.013,62	4.208.040.531,62
Gedung dan Bangunan	6.781.802.117,79	6.781.802.117,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.220.510,00	280.220.510,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**11.717.987.641,41**	**11.280.063.159,41**
Akumulasi Penyusutan	(7.377.111.654,62)	(6.891.239.425,62)
Nilai Buku	**4.340.875.986,79**	**4.388.823.733,79**

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.853.612.832,00	354.427.699,62	0,00	4.208.040.531,62
Gedung dan Bangunan	6.470.583.316,00	311.218.801,79	0,00	6.781.802.117,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.850.510,00	233.370.000,00	0,00	280.220.510,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**10.381.046.658,00**	**899.016.501,41**	**0,00**	**11.280.063.159,41**
Akumulasi Penyusutan	**6.405.860.408,00**			**6.891.239.425,62**
Nilai Buku	**3.975.186.250,00**			**4.388.823.733,79**

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	10.000.000,00	455.000,00	0,00	10.455.000,00
Peralatan dan Mesin	4.208.040.531,62	437.469.482,00	0,00	4.645.510.013,62
Gedung dan Bangunan	6.781.802.117,79	0,00	0,00	6.781.802.117,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.220.510,00	0,00	0,00	280.220.510,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**11.280.063.159,41**	**437.924.482,00**	**0,00**	**11.717.987.641,41**
Akumulasi Penyusutan	**6.891.239.425,62**			**7.377.111.654,62**
Nilai Buku	**4.388.823.733,79**			**4.340.875.986,79**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya UPTD Puskesmas Kubu I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp359.306,00 dan Rp359.306,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	388.637.605,00	388.637.605,00
Jumlah Harga Perolehan	**388.637.605,00**	**388.637.605,00**
Akumulasi Penyusutan	(388.278.299,00)	(388.278.299,00)
Nilai Buku	**359.306,00**	**359.306,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	388.637.605,00	0,00	0,00	388.637.605,00
Jumlah	**388.637.605,00**	**0,00**	**0,00**	**388.637.605,00**
Akumulasi Penyusutan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	388.278.299,00		0,00	388.278.299,00
Jumlah	**388.278.299,00**	**0,00**	**0,00**	**388.278.299,00**
Nilai Buku				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	391.467.889,00	0,00	0,00	359.306,00
Jumlah	**391.467.889,00**	**0,00**	**0,00**	**359.306,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	388.637.605,00	0,00	0,00	388.637.605,00
Jumlah	**388.637.605,00**	**0,00**	**0,00**	**388.637.605,00**
Akumulasi Penyusutan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	388.278.299,00		0,00	388.278.299,00
Jumlah	**388.278.299,00**	**0,00**	**0,00**	**388.278.299,00**
Nilai Buku				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	391.467.889,00	0,00	0,00	359.306,00
Jumlah	**391.467.889,00**	**0,00**	**0,00**	**359.306,00**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Belanja UPTD Puskesmas Kubu I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp153.741.398,00 dan Rp447.045.295,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	153.741.398,00	447.045.295,00
Jumlah Belanja Yang Masih Harus Dibayar	**153.741.398,00**	**447.045.295,00**

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.2.3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.316.075.880,14 dan Rp5.278.859.632,71 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Ekuitas Awal	5.278.836.664,71	4.781.833.600,00
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	331.556.111,43	964.429.712,00
Dampak Kumulatif Perubahan	(294.316.896,00)	(467.426.647,29)
Ekuitas Akhir	**5.316.075.880,14**	**5.278.836.664,71**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Kubu I pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.726.610.817,80 dan Rp4.228.358.218,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.842.181.220,00	2.845.696.090,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	319.407.905,00	286.642.382,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	1.388.358.089,23	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	21.893.379,57	16.155.855,00
Pendapatan APBN/APBD	154.770.224,00	1.079.863.891,00
Jumlah	**4.726.610.817,80**	**4.228.358.218,00**

4.3.2 Beban

Beban UPTD Puskesmas Kubu I pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp4.395.054.706,37 dan Rp3.249.423.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Pegawai	1.634.053.431,00	1.399.991.280,00
Beban Barang dan Jasa	2.274.968.244,37	1.362.727.596,00
Beban Penyisihan Piutang	160.802,00	325.243,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	485.872.229,00	485.379.018,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	**4.395.054.706,37**	**3.248.423.137,00**

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai UPTD Puskesmas Kubu I pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1.634.053.431,00	1.353.680.069,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	9.795.000,00
-sda- Dana BOK/APBN	0,00	36.516.211,00
Jumlah	**1.634.053.431,00**	**1.399.991.280,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa UPTD Puskesmas Kubu I pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang:

	2025	2024
Beban Barang		
Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	46.404.216,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	4.369.800,00	1.948.700,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	5.069.450,00	4.954.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.000.000,00	20.000.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	4.090.475,00	4.600.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	2.800.000,00	2.543.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	12.356.820,00	11.730.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	11.137.200,00	5.570.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	0,00	19.767.000,00
Beban Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	52.824.600,00	85.607.350,00
Beban Bahan Cetak	8.120.800,00	0,00
Bebn Bahan - Bahan Kimia	53.692.970,00	21.074.131,00
Beban Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.090.000,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	322.941.300,00	303.027.014,00
Beban Bahan Lainnya	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Natura	173.827.500,00	96.910.000,00
Beban Obat- Obat-Obatan	971.977.188,37	116.278.919,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	9.787.000,00	2.295.000,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	33.631.115,00	8.007.141,00
Beban Barang Kuasi	0,00	0,00
Jumlah	**1.731.030.434,37**	**705.403.055,00**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Jasa		
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	690.432,00	1.373.792,00
Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	863.040,00	1.717.408,00
Beban Iurang Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	11.506.752,00	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	14.758.560,00	14.718.600,00
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Bidang Keuangan	0,00	27.758.000,00
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Bidang Kesehatan	12.500.000,00	27.758.001,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	14.862.270,00	16.727.181,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	95.430.000,00	227.360.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.471.071,00	16.901.895,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.282.800,00	3.963.000,00
Beban Tagihan Air	3.968.700,00	7.394.100,00
Beban Tagihan Listrik	64.504.850,00	57.210.966,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN	235.474.935,00	0,00
Jumlah	**482.473.410,00**	**402.882.943,00**

Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain:

	2025	2024
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	10.591.000,00	0,00
Jumlah	**10.591.000,00**	**0,00**

c. Beban Pemeliharaan:

Beban Pemeliharaan UPTD Puskesmas Kubu I pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Darat Bermotor Khusus	9.850.000,00	4.235.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	10.376.500,00	6.511.000,00
Beban Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	5.394.400,00	9.964.000,00
Beban Pemeliharaan Bagunan Gedung	0,00	227.126.689,00
Beban Pemeliharaan Jaringan Listrik	5.972.500,00	5.972.910,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer	4.950.000,00	3.950.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Personal Komputer	12.075.000,00	16.730.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer Lainnya	2.255.000,00	6.750.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Elektronik	0,00	
Jumlah	**50.873.400,00**	**281.239.599,00**

d. Beban Perjalanan Dinas:

Beban Perjalanan Dinas UPTD Puskesmas Kubu I pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	960.000,00
Jumlah	**0,00**	**960.000,00**

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang UPTD Puskesmas Kubu I pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	160.802,00	325.243,00
Jumlah	**160.802,00**	**325.243,00**

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi UPTD Puskesmas Kubu I pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Amortisasi	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap	485.872.229,00	485.376.018,00
Jumlah	**485.872.229,00**	**485.376.018,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca tanggal 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka-angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup BLUD UPTD Puskesmas Kubu I dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kubu I berlangsung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Kubu I bersamaan dengan penerbitan Laporan Auditor Independen pada tanggal 06 April 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00043/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Kubu I
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Kubu I untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 06 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Kubu I tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Kubu I bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah-masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

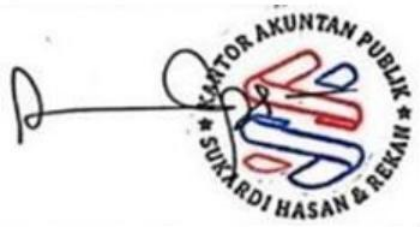
Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan *design* dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Jasa Giro yang Belum Diakui Sebagai Pendapatan di LRA Puskesmas Tahun 2025.
   Atas permasalahn tersebut kami sarankan agar pendapatan jasa giro diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun di Laporan Operasional.

2. Tata Kelola Aktiva Tetap dan Persediaan Perlu Ditingkatkan
   Dari hasil audit yg kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:,
   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Kubu I ke Pemda Karangasem.
      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:
   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.

3. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Operasional
   Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Kubu I dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Kubu I.
   Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Auntansi yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

Atas masalah tersebut, kami saranankan agar Puskesmas Kubu I meningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Kubu I dibidang Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

4. Pencatatan Transaksi Keuangan Puskesmas Kubu I Pada SIPD Belum Tepat Waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Kubu I pada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka -angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Kubu I dan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00043/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Kubu I
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Kubu I untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

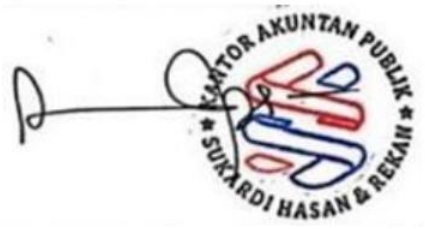
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Kubu I merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Kubu I... terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp: (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Kubu I sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp: (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Kubu I berbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Kubu I belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Kubu I melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Kubu I berbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum Disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp: (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp: (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS KUBU II
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor : 00044/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS KUBU II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	5
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
RESUME PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	75
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	80

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS KUBU II
Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kode Pos. 80853
Telepon: (0363) 4301682, Pos-el: puskesmaskubudua@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS KUBU II
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	dr. I Kadek Juniadi Dwipayana
Nomor Telepon	:	(0363) 4301682
Alamat Kantor	:	Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kec. Kubu, Karangasem
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Kubu II

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu II Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu II Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu II Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu II Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu II Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu II Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kubu II Kabupaten Karangasem.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu II



dr. I Kadek Juniadi Dwipayana
NIP. 198806132014121001

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00044/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Kubu II

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Kubu II ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00053/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 06 April 2026

00044

Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak., M.Ac., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

UPTD PUSKESMAS KUBU II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan	*4.1.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		0,00	2.867.119.929,00	0,00	2.668.018.093,00
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		0,00	19.375.001,88	0,00	21.591.138,41
Jumlah Pendapatan		**0,00**	**2.886.494.930,88**	**0,00**	**2.689.609.231,41**
Belanja Daerah	*4.1.2*				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai		1.905.842.320,00	1.718.925.916,00	90,19	1.495.886.785,00
Belanja Barang dan Jasa		1.709.510.557,00	1.309.702.018,00	76,61	1.387.728.998,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		**3.615.352.877,00**	**3.028.627.934,00**	**83,77**	**2.883.615.783,00**
Belanja Modal					
Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		383.802.400,00	253.309.433,00	66,00	330.310.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan		107.000.000,00	106.361.700,00	99,40	361.465.050,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		**490.802.400,00**	**359.671.133,00**	**73,28**	**691.775.050,00**
Jumlah Belanja		**4.106.155.277,00**	**3.388.299.067,00**	**82,52**	**3.575.390.833,00**
Surplus (Defisit)		**(4.106.155.277,00)**	**(501.804.136,12)**	**12,22**	**(885.781.601,59)**
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran		**(4.106.155.277,00)**	**(501.804.136,12)**	**12,22**	**(885.781.601,59)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu II

dr. I Kadek Juniadi Dwipayana
NIP. 19880613 201412 1 001

UPTD PUSKESMAS KUBU II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**627.296.225,67**	**933.999.756,26**
Penggunaan SAL	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**627.296.225,67**	**933.999.756,26**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(501.804.136,12)	(885.781.601,59)
Sub Total (3+4)	**125.492.089,55**	**48.218.154,67**
Pendapatan APBN/APBD	192.296.521,00	579.078.071,00
Pendapatan BOK	247.515.314,00	0,00
Setoran Ke Kas Daerah	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**565.303.924,55**	**627.296.225,67**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Kubu II



dr. I Kadek Juniadi Dwipayana

NIP. 19880613 201412 1 001

UPTD PUSKESMAS KUBU II
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
Aset	*4.2.1*		
Aset Lancar	*4.2.1.1*		
Kas di Bendahara Pengeluaran		37.012.441,00	198.847.685,00
Kas pada BLUD		528.291.483,55	428.448.540,67
Piutang Operasional BLUD		11.833.400,00	13.155.500,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(118.334,00)	(131.555,00)
Persediaan BLUD		271.082.965,41	423.190.839,65
Jumlah Aset Lancar		**848.101.955,96**	**1.063.511.010,32**
Aset Tetap	*4.2.1.2*		
Tanah		85.514.000,00	85.514.000,00
Peralatan dan Mesin		5.894.130.458,88	5.564.878.047,88
Gedung dan Bangunan		6.432.472.750,00	6.326.111.050,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		34.337.500,00	34.337.500,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		**12.446.454.708,88**	**12.010.840.597,88**
Akumulasi Penyusutan		(7.268.586.004,88)	(6.666.512.360,01)
Nilai Buku Aset Tetap		**5.177.868.704,00**	**5.344.328.237,87**
Aset Lainnya	*4.2.1.3*		
Aset Lain-Lain		1.177.556.927,27	1.177.556.927,27
Penyusutan Aset Lain-Lain		(737.122.171,04)	(737.122.171,04)
Jumlah Aset Lainnya		**440.434.756,23**	**440.434.756,23**
Jumlah Aset		**6.466.405.416,19**	**6.848.274.004,42**
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	*4.2.2.1*		
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		166.563.413,00	123.902.498,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**166.563.413,00**	**123.902.498,00**
Jumlah Kewajiaban		**166.563.413,00**	**123.902.498,00**
Ekuitas	*4.2.3*		
Ekuitas		6.299.842.003,19	6.724.371.506,42
Jumlah Ekuitas		**6.299.842.003,19**	**6.724.371.506,42**
Jumlah Ekuitas dan Kewajiban		**6.466.405.416,19**	**6.848.274.004,42**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu II

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KARANGASEM
DINAS KESEHATAN

dr. I Kadek Juniadi Dwipayana
NIP. 19880613 201412 1 001

UPTD PUSKESMAS KUBU II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan	%
Pendapatan	*4.3.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		2.865.798.329,00	2.667.181.293,00	198.617.036,00	7,45
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		247.515.314,00	0,00	247.515.314,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		1.248.152.986,17	0,00	1.248.152.986,17	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		19.375.001,88	21.591.138,41	(2.216.136,53)	(10,26)
Pendapatan APBN/APBD		192.296.521,00	579.078.071,00	(386.781.550,00)	(66,79)
Jumlah Pendapatan		**4.573.138.152,05**	**3.267.850.502,41**	**1.305.287.649,64**	39,94
Beban	*4.3.2*				
Beban Pegawai		1.766.116.445,00	1.499.987.132,00	266.129.313,00	17,74
Beban Barang dan Jasa		2.627.366.662,41	2.235.487.145,37	391.879.517,04	17,53
Beban Penyisihan Piutang		118.334,00	122.787,00	(4.453,00)	(3,63)
Beban Penyusutan		602.073.644,87	735.424.486,00	(133.350.841,13)	(18,13)
Beban Amortisasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban		**4.995.675.086,28**	**4.471.021.550,37**	**524.653.535,91**	**11,73**
Surplus (Defisit) Operasional		**(422.536.934,23)**	**(1.203.171.047,96)**	**780.634.113,73**	**(64,88)**
Kegiatan Non Operasional	*4.3.3*				
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Keg. Non.Lainnya		0,00	131.155,00	(131.155,00)	(100,00)
Jumlah Surplus (Defisit) Non Operasional		**0,00**	**131.155,00**	**(131.155,00)**	**(100,00)**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(422.536.934,23)**	**(1.203.039.892,96)**	**780.502.958,73**	**(64,88)**
Pos Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pos Luar Biasa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran		**(422.536.934,23)**	**(1.203.039.892,96)**	**780.502.958,73**	**(64,88)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu II

dr. I Kadek Jundadi Dwipayana
NIP. 19880613 201412 1 001

UPTD PUSKESMAS KUBU II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	6.724.371.506,42	6.917.691.080,60
Surplus (Defisit) LO	(422.536.934,23)	(1.203.039.892,96)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	(1.992.569,00)	1.009.720.318,78
Setoran ke Kas Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Setoran ke Kas Daerah (BOK)	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	**6.299.842.003,19**	**6.724.371.506,42**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu II

dr. I Kadek Juniadi Dwipayana
NIP. 19880613 201412 1 001

UPTD PUSKESMAS KUBU II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.867.119.929,00	2.668.018.093,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	247.515.314,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	19.375.001,88	21.591.138,41
Pendapatan APBN/APBD	192.296.521,00	579.078.071,00
Jumlah arus Kas Masuk	**3.326.306.765,88**	**3.268.687.302,41**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.718.925.916,00	1.495.886.785,00
Belanja Barang dan Jasa	1.309.702.018,00	1.387.728.998,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.028.627.934,00**	**2.883.615.783,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**297.678.831,88**	**385.071.519,41**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	253.309.433,00	330.310.000,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	106.361.700,00	361.465.050,00
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**359.671.133,00**	**691.775.050,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(359.671.133,00)**	**(691.775.050,00)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Setoran ke Kas Daerah (BOK)	0,00	0,00
Setoran ke Kas Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	181.086.517,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**181.086.517,00**

Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	181.086.517,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**181.086.517,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**(61.992.301,12)**	**(306.703.530,59)**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**627.296.225,67**	**933.999.756,26**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**565.303.924,55**	**627.296.225,67**
menurut neraca		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kubu, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Kubu II

dr. I Kadek Juniadi Dwipayana
NIP. 19880613 201412 1 001

Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Kubu II

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Kubu II

UPTD Puskesmas Kubu II didirikan pada tahun 1975, merupakan salah satu dari 12 Puskesmas yang ada di Kabupaten Karangasem dan terletak di paling utara Kabupaten. Batas- batas wilayah kerja Puskesmas Kubu II yaitu:

1) Sebelah Utara : Laut Bali
2) Sebelah Timur : Desa Sukadana
3) Sebelah Selatan : Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli
4) Sebelah Barat : Kecamatan Tejakula, Kab. Buleleng

Sarana kesehatan yang ada di Puskesmas Kubu II terdiri dari 1 buah Puskesmas Induk, 3 buah Puskesmas Pembantu (Pustu), 1 buah Puskesmas Keliling (Pusling), sarana kesehatan bersumber daya masyarakat yaitu 4 buah Poskesdes dan 81 Posyandu.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK /2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 28 Desember 2022, UPTD Puskesmas Kubu II ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

b. Tempat dan Kedudukan

UPTD Puskesmas Kubu II beralamat di Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Telp. (0363) 4301682, Email: puskesmaskubudua@yahoo.com.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Kubu II adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);

17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. Visi, Misi, Strategi, Fungsi, Motto, dan Janji Pelayanan UPTD Puskesmas Kubu II

1) Visi : “Terwujudnya Warga Dan Lingkungan Kubu Yang Sehat.”
2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat mewujudkan visi Puskesmas tersebut maka ditetapkan 4 misi pembangunan kesehatan sebagai berikut:

a) Melaksanakan tata kelola puskesmas yang efektif, efisien dan berkualitas

b) Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dengan mendorong kemandirian individu, keluarga, kelompok dan masyarakat melalu kerja sama lintas sektor

c) Menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan yang bermutu dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan

d) Membangun kemitraan yang baik dengan jejaring fasilitas kesehatan

3) Strategi UPTD Puskesmas Kubu II

Untuk dapat mencapai visi misi tersebut, Puskesmas Kubu II memiliki strategi sebagai berikut:

a) Menyusun PTP tahunan dan bulanan secara rutin

b) Menggalang kerjasama antar unit lewat lokakarya mini bulanan dan tahunan baik kerjasama lintas program maupun lintas sektoral

c) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PTP dan melaporakan hasilnya secara tepat waktu dan benar

d) Melayani konsumen sesuai dengan Standar Pelayanan Prima

e) Menghargai rekan sekerja dan konsumen seperti menghargai diri sendiri dan melayani rekan kerja dan konsumen sebagaimana kami ingin dilayani

f) Mengikuti pelatihan dan atau seminar guna meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme tenaga medis dan paramedik

g) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penerapan kemajuan ilmu dan teknologi serta melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika.

4) Fungsi Puskesmas

Adapun fungsi Puskesmas dalam mewujudkan visi misi adalah

a) Pusat pembangunan kesehatan masyarakat

b) Pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan

c) Pusat Pelayanan Kesehatan tingkat pertama

5) Motto UPTD Puskesmas Kubu II

Adapun motto Puskesmas Kubu II adalah “SAHABAT MASYARAKAT MENUJU SEHAT.”

6) Janji Pelayanan UPTD Puskesmas Kubu II

“SENYUM” (Senyum, Nyaman, Santun dan Melayani)

e. Program Pelayanan UPTD Puskesmas Kubu II

Program Pelayanan yang tersedia di UPTD Puskesmas Kubu II terdiri dari:

1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas

UPTD Puskesmas Kubu II terdapat 5 kegiatan esensial dan 1 kegiatan perkesmas. Lima Kegiatan Esensial tersebut melputi:

a) Pelayanan Kesehatan Keluarga (Ibu, Anak dan Keluarga Berencana)

b) Pelayanan Gizi Masyarakat

c) Pelayanan Promosi Kesehatan

d) Pelayanan Kesehatan Lingkungan

e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/ praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

3) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

a) Upaya Pelayanan UKGS/UKGM

UKGS/UKGM adalah suatu komponen dari UKS dan merupakan tehnis pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak sekolah dan di posyandu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak serta bumil.

b) Upaya Pelayanan Lansia

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

c) Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

d) Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

e) Upaya Kesehatan Yankestradkom.

f) Upaya Kesehatan Kerja.

g) Upaya Kesehatan Indera

4) Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi, dan Laboratorium

a) Upaya Kesehatan Perorangan

Upaya kesehatan perorangan di UPTD Puskesmas Kubu II meliputi: poli umum, poli gigi dan mulut, ruang KIA KB dan imunisasi, ruang konsultasi gizi, laboratorium, Farmasi, kasir, loket pendaftaran dan konseling.

b) Farmasi

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.

c) Laboratorium

Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

f. Jenis-Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Kubu II

Jenis-jenis pelayanan Kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Kubu II adalah:

1) Poliklinik

Poliklinik rawat jalan terdiri dari Poli umum, Poli gigi, KIA/KB, imunisasi, ruang konsultasi termasuk loket pendaftaran prosedur rawat jalan pada poliklinik menguraikan langkah-langkah pemberian pelayanan kepada pasien rawat jalan mulai dari pemilahan kelompok pasien, pendaftaran dan pembayaran jasa layanan, dan pemberian layanan kesehatan pada masing-masing poli, serta tindakan lanjutan yang diperlukan oleh pasien.

2) Unit Gawat Darurat

UPTD Puskesmas Kubu II memiliki ruang khusus unit gawat darurat, tetapi memiliki ruang tindakan medik untuk mengatasi tindakan kegawat daruratan pelayanan primer. Prosedur pada penanganan kasus Gawat Darurat menguraikan langkah-langkah mengutamakan penanganan pasien yang sifatnya gawat dan darurat sejak pasien datang hingga tindakan lanjutan yang diperlukan pasien seperti dirujuk ke rumah sakit.

3) Laboratorium

Prosedur penunjang medis menguraikan pemberian layanan berupa layanan laboratorium kepada pasien sesuai surat pengantar dari poli umum, poli KIA-KB, ruang konsultasi, ruang UGD.

4) Apotek

Prosedur layanan obat menguraikan pemberian pelayanan penyediaan obat-obatan kepada pasien sesuai resep dari poli-poli rawat jalan, ruang UGD dan pelayanan di luar gedung seperti kegiatan posyandu (balita dan lansia).

5) Pelayanan Gizi

Prosedur pelayanan gizi menguraikan pemberian layanan gizi berupa penyuluhan PUGS, konseling atau klinik gizi untuk terapi diet untuk pasien poliklinik, dan dalam bentuk perencanaan serta pengolahan makanan biasa/khusus.

6) Pelayanan Ambulance

Prosedur pelayanan ambulance menguraikan pemberian layanan ambulance bagi pasien yang memerlukannya dalam rangka rujukan ke rumah sakit.

7) Rekam Medik

Prosedur rekam medik menguraikan proses penanganan data pasien mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen/data pasien, pengkodean, pengindeksan, dan pengarsipan.

8) Kesehatan Lingkungan

Prosedur kesehatan lingkungan menguraikan langkah-langkah pemeriksaan air limbah, limbah padat berbahaya, serta air bersih secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

g. Capaian Standar Pelayanan Kesehatan Minimal (SPM)

Berikut disajikan Capaian Standar Pelayanan Kesehatan Minimal (SPM) sebagai berikut:

No	Indikator	Sasaran	Capaian	%
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	551	333	60,4%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	551	585	106,2%
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	539	547	101,5%
4	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	2075	2104	101,4%
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	3442	3442	100%
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	11.513	11.513	100%
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan krining kesehatan sesuai standar	6108	6093	99,8%
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2187	2156	98,6%
9	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	597	570	95,5%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	62	66	106,5%
11	Persentase Orang dengan terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	239	49	20,5%
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	607	646	106,4%

h. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Berikut ini Target Pencapaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan jenis kegiatan per 31 Desember 2025 sebegai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
							SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*		*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
I UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESSENSIAL									**96.89**
I.	**KESEHATAN KELUARGA**								***85,02***
1	**Kesehatan Ibu**								**121,06**
	1	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	Bumil	100%	504	629	124,80	**124,80**	
	2	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Bumil	100%	504	511	101,39	**101,39**	
	3	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai Standar (K6)	Bumil	100%	504	486	96,43	**96,43**	
	4	Cakupan Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung, infeksi)	Bumil	90%	100	204	204,00	**226,67**	
	5	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (Pn)	Bulin	100%	504	557	110,52	**110,52**	
	6	Cakupan pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF 4)	Bulin	100%	504	500	99,21	**99,21**	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUBU II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
						SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*	*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
	7 Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN1)	Bayi	100%	504	560	111,11	**111,11**	
2	**Kesehatan Bayi**							**101,19**
	1 Cakupan Pelayanan Neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN3)	Bayi	100%	504	532	105,56	**105,56**	
	2 Cakupan Penaganan komplikasi neonatus	Bayi	80%	90	66	73,33	**91,67**	
	3 Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 12 bln (Kunjungan Bayi)	Bayi	100%	600	638	106,33	**106,33**	
3	**Upaya Kesehatan Balita dan Anak pra Sekolah**							**116,97**
	1 Cakupan Pelayanan Anak Balita (12 - 59 bulan) sesuai standar	Balita	100%	2.078	2317	111,50		
	2 Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS	Balita	100%	769	1072	139,40		
	3 Cakupan Stimulasi Deteksi Intervinsi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	Apras	100%	352	352	100,00		
4	**Upaya Kesehatan Sekolah**							**100,00**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUBU II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
						SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*	*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
	1 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Siswa	100%	6.241	6.241	100,00		
	2 Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SD/MI	Siswa	100%	4.476	4.476	100,00		
	3 Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik siswa SMP/MTs	Siswa	100%	1.765	1.765	100,00		
5	**Pelayanan Keluarga Berencana (KB)**							**55,40**
	1 Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	Akseptor	70%	7.498	3518	46,92		
	2 Cakupan Peserta KB Pasca persalinan	Akseptor	100%	36	23	63,89		
6	**Pelayanan Calon Pengantin**							**0,51**
	1 Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Skrining Kesehatan	Catin	100%	586	3	0,51		
7	**Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**							**100,00**
	1 Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Orang	100%	5.181	5.181	100,00		
II.	**PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN**							***178,39***
1	**PHBS 5 Tatanan**							**358,02**
	1 Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	90%	92	180	195,65		
	2 Tatanan Institusi	Sekolah	50%	50	200	400,00		

NO	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
						SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*	*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
	Pendidikan/ Sekolah							
	3 Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	80%	80	200	250,00		
	4 Tatanan TTU	TTU	40%	40	200	500,00		
	5 Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	45%	45	200	444,44		
2	**Pemberdayaan Masyarakat**							**111,63**
	1 Pemberdayaan melalui penyuluhan	Kader UKBM	100%	86	96	111,63		
3	**Pembinaan UKBM**							**98,00**
	1 Pembinaan Posyandu	Posyandu	80%	100	96	96,00		
	2 Persentase Posyandu Aktif	Posyandu	100%	100	100,00	100,00		
4	**Penyuluhan Narkoba**							**100,00**
	1 Penyuluhan Narkoba Minimal 5 kali dalam Setahun	Masyarakat, Sekolah, Kelompok	5 Kali	5	5	100,00		
5	**Promosi Kesehatan**							**183,33**
	1 Promosi Kesehatan untuk program prioritas di dalam Gedung Puskesmas dan Jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	Masyarakat	12 Kali	12	12	100,00		
	2 Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar gedung Puskesmas) minimal 12 kali	Masyarakat, Sekolah, Kelompok	12 Kali	12	32	266,67		

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
							SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*		*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
		setahun							
6	**Program Pengembangan**								**219,33**
	1	Pembinaan UKBM Lain	Kelompok Peduli Kesehatan	3 Kali	3	3	100,00		
	2	Pergerakan Germas 5 Indikator	Masyarakat, Sekolah, Kelompok	3 Kali	3	15	500,00		
	3	Sosialisasi/ Pembinaan SBH minimal 1 Kali setahun	SLTA/ Sederajat	1 Kali	1	1	100,00		
III.	**PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN**								***62,24***
1	**Pengawasan Kualitas Air**								**79,78**
	1	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/layak	Penduduk	95%	53.638	44.095	82,21		
	2	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/IKL	Sarana	100%	6	6	100,00		
	3	Persentase Pengambilan sampel air	Sampel Air	100%	6	7	116,67		
	4	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standart	Sarana	85%	6	6	100,00		
2	**STBM**								**78,64**
	1	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	100%	15.322	13.164	85,92		
	2	Jumlah Desa ODF	Desa	50%	4	2	50,00		

NO	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
						SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*	*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
	3 Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	100%	4	4	100,00		
3	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	Sarana	90%	40	36	90,00		**90,00**
4	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan	Sarana	25%	60	15	25,00		**25,00**
5	Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis	RS dan Fasyankes	100%	3	3	100,00		**100,00**
IV.	**UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**							***74,46***
	1 Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	Ibu hamil	80%	43	21	48,84		
	2 Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	Ibu hamil	84%	629	545	86,65		
	3 Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Bayi	60%	408	379	92,89		
	4 Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	Bayi	70%	560	488	87,14		
	5 Persentase Cakupan Balita Gizi Kurang mendapat makanan	Balita	85%	71	47	66,20		

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
							SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*		*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
		tambahan							
	6	Persentase Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	Remaja Putri	58%	1.130	1.130	100,00		
	7	Persentase Cakupan vitamin A pada Balita	Balita	90%	2.359	2.280	96,65		
	8	Persentase Anemia pada ibu hamil	Ibu hamil	33%	629	30	4,77		
	9	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Bayi	2,5%	560	42	7,50		
	10	Persentase Balita Kurus (Wasting)	Balita	7,0%	166	49	29,67		
	11	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	Balita	5,00 %	118	151	127,61		
	12	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	Balita	85%	2.367	2.236	94,48		
	13	Persentase Cakupan Skrining anemia remaja putri	rematri	90%	442	442	100,00		
	14	Persentase Cakupan Ibu Nifas Mendapat kapsul Vitamin A	Ibu Nifas	82%	556	556	100,00		
V.	**UPAYA PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT**								***84,35***
1	**TB Paru**								**63,38**
	1	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Orang	>90%	**43**	13	30,23		

NO	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
						SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*	*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
	2 Succsess Rate (Angka Keberhasilan Pengobatan)	Orang	>90%	**90%**	92,30%	102,56		
	3 Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Orang	100%	**211**	121	57,35		
2	**Malaria**							**0,00**
	1 Prosentase Penderita Positif Malaria Yang Diobati sesuai Standar	Orang	100%	100	0	0,00		
	2 Angka Kesakitan Malaria /Annual Parasite Incident (API)	Orang	0,98 per 1.000 pddk (<1)	53	0	0,00		
3	**Kusta**							**1,06**
	1 Angka Prevalensi Kusta	Orang	0,97 per 10.000 pddk (<1)	5	6	1,12		
	2 Angka Kesembuhan / RFT Rate	Orang	100%	100	6	1,00		
4	**Diare**							**20,56**
	1 Pelayanan penderita diare sesuai standar	Orang	100%	1.498	308	20,56		
5	**Hepatitis**							**100,99**
	1 Pelayanan deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	Orang	100%	504	509	100,99		
6	**ISPA**							**147,23**
	1 Prosentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	Orang	100%	334	654	195,81		

NO	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
						SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*	*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
	2 Cakupan penemuan pneumonia balita	Orang	100%	74	73	98,65		
7	**Demam Berdarah Dengue**							**115,57**
	1 Angka Kesakitan DBD/Insiden Rate (IR) DBD	Orang	50 ribu Per 100.000 Penduduk (50)	27	73	132,92		
	2 Angka Bebas Jentik (ABJ)	Rumah	>95%	381	374,25	98,23		
8	**Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS**							**107,47**
	1 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	penduduk beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TBC, IMS, WPS, Waria/ trans gender, WBP)	100%	549	590	107,47		
9	**Pencegahan dan Penanggulangan Rabies**							**100,00**
	1 Pelayanan kasus GHPR ditatalaksana standar	Orang	100%	100%	452	100		
10	**Kecacingan**							**198,20**
	1 Pelayanan POPM kecacingan	Orang	100%	6890	13.656	198,20		
11	**Surveilance Penyakit**							**66,81**
	1 Kelengkapan Laporan Survailance	Puskesmas	90%	53	53	100,00		
	2 Ketepatan Laporan	Puskesmas	100%	53	53	100,00		

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
							SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*		*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
		Survailance							
	3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal/alert Penyakit Potensial KLB	100%	12	5	0,42		
12	**Imunisasi**								**92,48**
	1	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Orang	100%	600	532	88,67		
	2	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan antigen baru	Orang	100%	1.200	0	-		
	3	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	Orang	100%	523	472	90,25		
	4	Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	Orang	80%	%	706	-		
	5	Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	Orang	80%	410	405	98,78		
	6		Jumlah bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) terinput di Aplikasi ASIK	bayi	abs	600	530	88,33	
	7		Jumlah Baduta 12-24 bulan yang mendapat	baduta	abs	523	504	96,37	

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
							SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*		*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
			imunisasi lanjutan lengkap terinput di Aplikasi ASIK						
13	**Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular**								**82,84**
	1	Presentase meningkatnya desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa	70%	4	1	12,50		
	2	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	100%	337	337	100,00		
	3	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	100%	197	197	100,00		
	4	Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining penyakit tidak menular sesuai standar di posbindu	Orang	100%	10.950	10.959	100,08		
	5	Persentase ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang	100%	62	63	101,61		

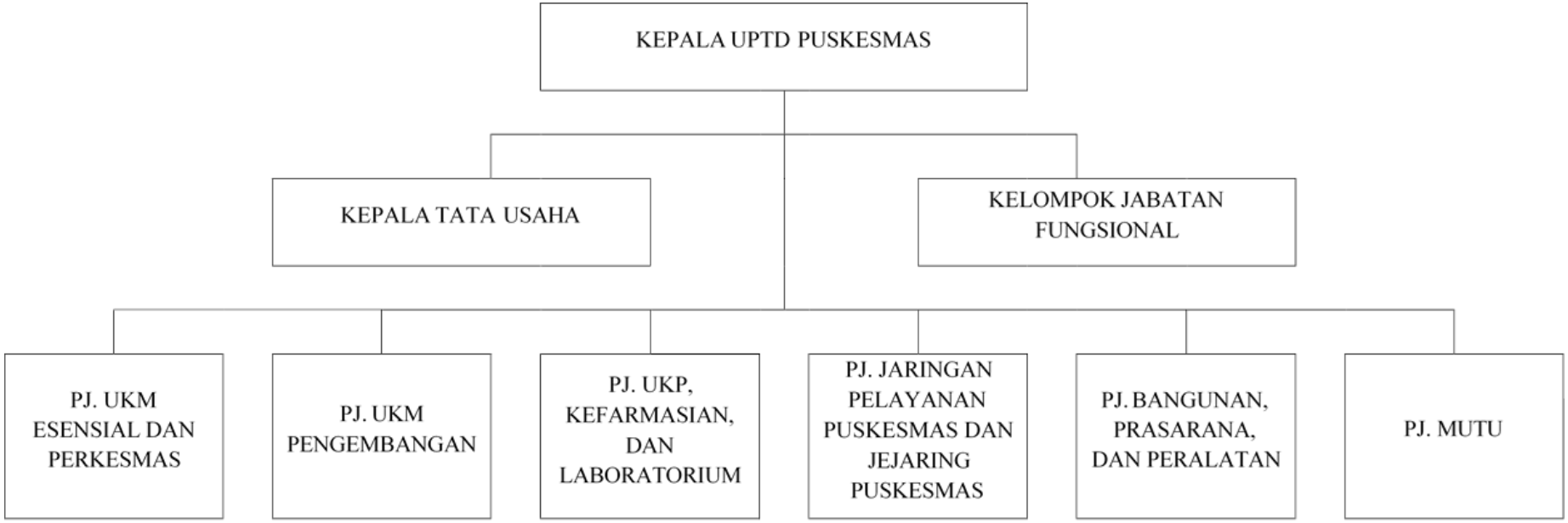
NO	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
						SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*	*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
II UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN								**83,82**
1	**Pelayanan Kesehatan Tradisional**							**19,10**
	1 Persentase Pembinaan tanaman obat keluarga pada keluarga	Keluarga	3%	14603	190	1,30		
	2 Persentase Pembinaan pada kelompok Asuhan mandiri	Kelompok Asmas	60%	4	0	-		
	3 Persentase Pembinaan penyehat tradisional	Orang	70%	50	28	56,00		
2	**Pelayanan Kesehatan Olah Raga**							**100,00**
	1 Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah raga diwilayah kerjanya	Puskesmas	12	12	12	100,00		
	2 Persentase calon jamaah haji yang melakukan tes kebugaran	Jemaah Haji	100%	0	0	100,00		
3	**Kesehatan Gigi Masyarakat (Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut)**							**100,00**
	1 Persentase Desa yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Desa	60%	4	4	100,00		
4	**Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) (Pelayanan Kesehatan Gigi Sekolah)**							**100,00**
	1 Persentase Pembinaaan Kesehatan Gigi di TK	TK	80%	10	10	100,00		
	2 Persentase Pembinaan dan Bimbingan Sikat Gigi Massal pada SD/MI	SD/MI	80%	30	30	100,00		
5	**Upaya Kesehatan Kerja (Pelayanan Kesehatan Kerja)**							**100,00**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUBU II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	JENIS KEGIATAN		SASARAN	TARGET	TARGET SASARAN (T)	CAPAIAN (H)	CAKUPAN (%)		
							SUB VARIABEL		VARIABEL
1	*2*		*4*		*5*	*6*	*7*		*8*
	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	Puskesmas	12	12	12	100,00		
	2	Persentase Pos UKK yang dibina	Pos UKK	100%	1	1	100,00		

i. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Kubu II

Struktur dan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kubu II ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah serta mengacu juga pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Puskesmas. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Kubu II yang berlaku Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

1) Kepala Puskesmas;
2) Tata Usaha; dan
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
8) Penanggung Jawab Mutu

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Puskesmas

   Wewenang:

   a) Memeriksa dan menganalisa laporan-laporan kegiatan stafnya dan sekaligus mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.
   b) Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang di bawahnya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

   Tanggung Jawab:

   a) Pelaksanaan tugas sehari-hari
   b) Melakukan pengawasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
   c) Mengadakan koordinasi dengan kepala kecamatan dan lintas sektor dalam upaya pembangunan Kesehatan di wilayah kerja;
   d) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka miningkatkan derajat Kesehatan;
   e) Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan dibantu oleh staf puskesmas;
   f) Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan;
   g) Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Induk, Pustu, Pusling dan lain-lain.

2) Tata Usaha

   Wewenang:

   a) Menilai kelengkapan administrasi rumah tangga;
   b) Menilai kelengkapan administrasi kepegawaian;
   c) Menilai Kelengkapan administrasi keuangan.

Tanggung Jawab:

a) Memonitoring data kepegawaian (kinerja)
b) Memonitoring kinerja rumah tangga
c) Memonitoring kinerja keuangan

3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Tanggung Jawab:

a) Promosi Kesehatan
b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
d) Pelayanan Kesehatan Keluarga
e) Pelayanan Gizi
f) Pelayanan P2P
g) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Pengembangan;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Pengembangan

Tanggung Jawab:

a) Pelayanan Kesehatan Jiwa
b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional
d) Pelayanan Kesehatan Olahraga
e) Pelayanan Kesehatan Indera
f) Pelayanan Kesehatan Lansia

h) Pelayanan Kesehatan Kerja

5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab membina jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengidentifikasi dan Menganalisa Data Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja jejaring pelayanan Puskesmas

7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

Tanggung Jawab:

Bertanggung Jawab memelihara sarana dan prasarana dan peralatan puskesmas

a) Bangunan
b) Alat Kesehatan
c) IPAL
d) Parkir/Halaman
e) Kendaraan
f) Diklat
g) Kebakaran/Kecelakaan

8) Penanggung Jawab Mutu

Wewenang:

a) Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua penanggung jawab mutu;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Memelihara Dokumen/Rekaman;

d) Membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses pelayanan

Tanggung Jawab:

a) Menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem mutu manajemen
b) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjamin muta dalam proses diklat berdasarkan standar mutu

j. Pejabat pada UPTD Puskesmas Kubu II

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Kubu II Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, diketahui susunan pejabat pengelola BLUD sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. I Kadek Juniadi Dwipayana NIP. 198806132014121001	Pemimpin BLUD
2.	drg. Ida Bagus Giri Husada NIP. 198302282014081002	Pejabat Keuangan
3.	dr. I Nyoman Agus Setiawan NIP. 199003102019031004	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
4.	dr. Ayu Made Yusida Herdyana NIP. 198001242009022002	Pejabat Teknis Mutu
5.	I Made Putra Yasa, S.Kep., Ns NIP. 197403071996031005	Pejabat Teknis Bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
6.	Made Wiliani, A.Md.Keb. NIP. 197207281992032004	Pejabat Teknis Bidang jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	I Gede Widana, SE NIP. 197612312007011108	Pejabat teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
8.	Ni Kadek Suarmini, A.Md. Kes Gigi NIP. 198811032022031001	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan

k. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Kubu II per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebanyak 57 orang dan 57 orang terdiri dari:

No.	Keterangan	2025	2024
1.	Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	57 orang	50 orang
2.	Pegawai Non ASN	0 orang	7 orang

Jumlah	**57 orang**	**57 orang**

Jumlah pegawai berdasarkan profesi yaitu:

No	Jabatan	2025	2024
a.	**Tenaga Medis**		
	Struktural Medis		
1	Dokter Spesialis	-	-
2	Dokter Umum	4	4
3	Dokter Gigi	1	1
4	Paramedis Non Perawat	6	6
5	Perawat	18	18
6	Bidan	21	21
7	Bidan Desa	-	-
	Jumlah	**50**	**50**
b.	**Tenaga Non Medis**		
	Struktural Non Medis	7	7
	Total Pegawai	**57**	**57**

Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan tingkat pendidikan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 yaitu:

2025								
No	**Pendidikan**	**Status**						**Jumlah**
		PNS	**CPNS**	**PPPK**	**Harlep APBD**	**Harlep BLUD**	**Dokter BLUD**	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	1	-	-	-	-	-	1
3	SMA	4	-	-	-	-	-	4
4	D1	-	-	-	-	-	-	-
5	D3	37	-	-	-	-	-	37
6	S1	15	-	-	-	-	-	15
7	S2	-	-	-	-	-	-	-
8	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57**

2024								
No	**Pendidikan**	**Status**						**Jumlah**
		PNS	**CPNS**	**PPPK**	**Harlep APBD**	**Harlep BLUD**	**Dokter BLUD**	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	1	-	-	1
3	SMA	1	-	-	3	-	-	4
4	D1	-	-	-	-	-	-	-
5	D3	16	-	18	3	-	-	37
6	S1	12	-	3	-	-	-	15
7	S2	-	-	-	-	-	-	-
8	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**29**	**-**	**21**	**7**	**-**	**-**	**57**

l. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Kubu II melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokan sebagai berikut:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Karangasem.

m. Pembiayaan UPTD Puskesmas Kubu II

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Kubu II mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (historical cost) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Kubu II.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   d) Laporan Realisasi Anggaran;
   e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   f) Neraca;
   g) Laporan Operasional;
   h) Laporan Arus Kas;
   i) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   j) Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

c. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;

c) Surplus/defisit-LRA;
d) Penerimaan pembiayaan;
e) Pengeluaran pembiayaan;
f) Pembiayaan neto; dan
g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan Setara Kas;
   b) Investasi Jangka Pendek;
   c) Piutang dari Kegiatan BLUD;
   d) Persediaan;
   e) Investasi Jangka Panjang;
   f) Aset Tetap;

g) Aset Lainnya;

h) Kewajiban Jangka Pendek;

i) Kewajiban Jangka Panjang; Dan

j) Ekuitas.

f. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO;

b) Beban;

c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;

d) Kegiatan non operasional;

e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;

f) Pos Luar Biasa; dan

g) Surplus/Defisit-LO.

3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

a) Pendapatan dari alokasi APBD;

b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

d) Pendapatan hasil kerja sama;

e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan

f) Pendapatan BLU lainnya.

4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

a) Pendapatan dari alokasi APBD;
b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

a) Pembayaran Pegawai;
b) Pembayaran Barang;
c) Pembayaran Bunga; dan
d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang

jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan

b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan

b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan pajak.

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

h. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.

2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3) Koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.

d) Ekuitas akhir.

i. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.

5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari

Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

j. Pos-Pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.

c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;

c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

Pembentukan Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan/atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (First In First Out). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a) Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
b) Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan/ Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
InstalasiPengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi/ Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);

b) Aset Sewaan;

c) Aset yang tidak digunakan;

d) Beban yang ditangguhkan; dan

e) Lainnya.

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka

Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (*cut of*f). Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.
d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas;

b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal; dan

c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

h) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(1) Pendapatan usaha rawat jalan;

(2) Pendapatan usaha rawat darurat; dan

(3) Pendapatan usaha rawat inap.

i) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

j) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

k) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

l) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

(1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

(2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;

(3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan

(4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.

d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.

f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.

g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:

(1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.

(2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.

(3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.

(4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.

c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.

e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai

Merupakan beban yang terkait kompensasi kepada pegawai, baik kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun yang berstatus Non-ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis Entitas.

b) Beban Barang

Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

c) Beban Jasa

Merupakan beban yang terkait dengan pemanfaatan jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

d) Beban Pemeliharaan

Merupakan beban yang terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.

e) Beban Langganan Daya/Jasa

Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.

f) Beban Perjalanan Dinas

Merupakan beban yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain

Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Merupakan beban yang timbul akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

i) Beban Penyisihan Piutang

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait potensi ketertagihannya.

j) Beban Operasional Lainnya

Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar

Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset

Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya

Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

a) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.

b) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;

b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;

c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;

d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Kubu II yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. UPTD Puskesmas Kubu II terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 12.794.796.8-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Kubu II Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan LRA

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.886.494.930,88 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.689.609.231,41 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	2.867.119.929,00	0,00	2.668.018.093,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	19.375.001,88	0,00	21.591.138,41
	Jumlah	**0,00**	**2.886.494.930,88**	**0,00**	**2.689.609.231,41**

4.1.2 Belanja LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah diterapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.388.299.067,00 atau 82,52% dari anggaran sebesar Rp4.106.155.277,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.575.390.833,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	3.615.352.877,00	3.028.627.934,00	83,77	2.883.615.783,00
b.	Belanja Modal	490.802.400,00	359.671.133,00	73,28	691.775.050,00
	Jumlah	**4.106.155.277,00**	**3.388.299.067,00**	**82,52**	**3.575.390.833,00**

a. Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.028.627.934,00 atau sebesar 83,77% dari anggaran sebesar Rp3.615.352.877,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.883.615.783,00. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Pegawai	1.905.842.320,00	1.718.925.916,00	90,19	1.495.886.785,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	1.709.510.557,00	1.309.702.018,00	76,61	1.387.728.998,00
3)	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**3.615.352.877,00**	**3.028.627.934,00**	**83,77**	**2.883.615.783,00**

Rincian dari Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.718.925.916,00 atau sebesar 90,19% dari anggaran sebesar Rp1.905.842.320,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.495.886.785,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	37.406.000,00	37.406.000,00	100,00	0,00
b)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	32.823.822,00
c)	Belanja Pegawai BLUD	1.868.436.320,00	1.681.519.916,00	90,00	1.463.062.963,00
	Jumlah	**1.905.842.320,00**	**1.718.925.916,00**	**90,19**	**1.495.886.785,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.309.702.018,00 atau sebesar 76,61% dari anggaran sebesar Rp1.709.510.557,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.387.728.998,00. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.903.100,00	3.329.573,00	7,42	3.295.400,00
b)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	17.991.000,00
c)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.256.000,00	13.226.400,00	92,78	0,00
d)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.002.900,00	22.865.000,00	65,32	18.060.800,00
e)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	47.100.000,00	40.800.000,00	86,62	89.300.000,00
f)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.760.000,00	5.034.204,00	87,40	0,00
g)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	345.216,00	302.064,00	87,50	539.704,00
h)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	431.520,00	377.580,00	87,50	674.696,00
i)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	408.957.000,00	371.988.600,00	0,00	291.567.493,00
j)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.152.754.821,00	851.778.597,00	73,89	966.299.905,00
	Jumlah	**1.709.510.557,00**	**1.309.702.018,00**	**76,61**	**1.387.728.998,00**

3) Belanja Lainnya

Realisasi Belanja Lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp359.671.133,00 atau sebesar 73,28% dari anggaran sebesar Rp490.802.400,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp691.775.050,00. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	383.802.400,00	253.309.433,00	66,00	330.310.000,00
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.000.000,00	106.361.700,00	99,40	361.465.050,00
4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**490.802.400,00**	**359.671.133,00**	**73,28**	**691.775.050,00**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp253.309.433,00 atau sebesar 66,00% dari anggaran sebesar Rp383.802.400,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp330.310.000,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	383.802.400,00	253.309.433,00	66,00	330.310.000,00
	Jumlah	**383.802.400,00**	**253.309.433,00**	**66,00**	**330.310.000,00**

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp106.361.700,00 atau sebesar 99,40% dari anggaran sebesar Rp107.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp360.465.050,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	107.000.000,00	106.361.700,00	99,40	316.328.875,00
b)	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	45.136.175,00
	Jumlah	**107.000.000,00**	**106.361.700,00**	**99,40**	**361.465.050,00**

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. Kas di BOK

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp37.012.441,00 dan Rp198.847.685,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran APBD	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Amlapura		
No. Rek 1590087843 a.n 1050088BOKPKMKUBUII	37.012.441,00	198.847.685,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**37.012.441,00**	**198.847.685,00**

b. Kas di BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD. Jumlah Kas pada BLUD UPTD Puskesmas Kubu II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp528.291.483,55 dan Rp428.448.54.,67 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	400.000,00	655.000,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Karangasem		
No. Rek 0220105005925 a.n BLUD UPTD Puskesmas Kubu II	527.891.483,55	427.793.540,67
Jumlah Kas pada BLUD	**528.291.483,55**	**428.448.540,67**

c. Piutang Layanan

Piutang Layanan merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Kubu II. Jumlah Piutang Layanan netto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.715.066,00 dan Rp13.023.945,00. dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Pendapatan Pelayanan:		
1) Piutang JKN	11.833.400,00	13.155.500,00
Jumlah Piutang Pelayanan (Bruto)	**11.833.400,00**	**13.155.500,00**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(118.334,00)	(131.555,00)
Jumlah Piutang Pelayanan (Netto)	**11.715.066,00**	**13.023.945,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang JKN	11.833.400,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Bruto	**11.833.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**118.334,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**11.715.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang JKN	13.155.500,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Bruto	**13.155.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**131.555,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**13.023.945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang/bahan pakai habis UPTD Puskesmas Kubu II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp271.082.965,41 dan Rp423.190.839.65 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Persediaan		
Alat Tulis Kantor	4.606.814,00	1.695.220,00
Persediaan Bahan Komputer	1.934.000,00	769.680,00
Persediaan Benda Kuasi	0,00	0,00
Persediaan Benda Pos	0,00	0,00
Persediaan Benda Material/Obat/Alkon	256.505.576,41	418.748.196,65
Persediaan Alat Listrik	1.168.450,00	767.530,00
Persediaan Perabot Kantor	0,00	1.210.213,00
Bahan Kimia	6.868.125,00	0,00
Jumlah Persediaan Barang Habis Pakai	**271.082.965,41**	**423.190.839,65**

Rincian mutasi Persediaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Persediaan Habis Pakai				
Alat Tulis Kantor	1.695.220,00	14.559.468,00	11.647.874,00	4.606.814,00
Persediaan Bahan Komputer	769.680,00	7.070.500,00	5.906.180,00	1.934.000,00
Persediaan Bahan Cetak	0,00	13.862.000,00	13.862.000,00	0,00
Persediaan Benda Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Benda Pos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Persediaan Benda Material/Obat/Alkon	418.748.196,65	1.264.232.684,18	1.426.475.304,42	256.505.576,41
Persediaan Alat Listrik	767.530,00	5.492.850,00	5.091.930,00	1.168.450,00
Persediaan Perabot Kantor	1.210.213,00	0,00	1.210.213,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	69.006.900,00	62.138.775,00	6.868.125,00
Jumlah	**423.190.839,65**	**1.375.224.402,18**	**1.527.332.276,42**	**271.082.965,41**

Rincian mutasi Persediaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Persediaan Habis Pakai				
Alat Tulis Kantor	2.995.200,00	14.065.000,00	15.364.980,00	1.695.220,00
Persediaan Bahan Komputer	3.604.200,00	22.467.500,00	25.302.020,00	769.680,00
Persediaan Bahan Cetak	0,00	16.069.000,00	16.069.000,00	
Persediaan Benda Kuasi	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
Persediaan Benda Pos	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Persediaan Benda Material/Obat/Alkon	367.867.621,24	1.018.338.183,78	967.457.608,37	418.748.196,65
Persediaan Alat Listrik	0,00	6.137.400,00	5.369.870,00	767.530,00
Persediaan Perabot Kantor	0,00	3.286.700,00	2.076.487,00	1.210.213,00
Jumlah	**375.168.021,24**	**1.081.363.783,78**	**1.033.340.965,37**	**423.190.839,65**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.177.868.704,00 dan Rp5.344.328.237,87 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Tanah	85.514.000,00	85.514.000,00
Peralatan dan Mesin	5.894.130.458,88	5.564.878.047,88
Gedung dan Bangunan	6.432.472.750,00	6.326.111.050,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.337.500,00	34.337.500,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**12.446.454.708,88**	**12.010.840.597,88**
Akumulasi Penyusutan	(7.268.586.004,88)	(6.666.512.360,01)
Nilai Buku	**5.177.868.704,00**	**5.344.328.237,87**

Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	85.514.000,00	0,00	0,00	85.514.000,00
Peralatan dan Mesin	5.564.878.047,88	329.252.411,00	0,00	5.894.130.458,88
Gedung dan Bangunan	6.326.111.050,00	106.361.700,00	0,00	6.432.472.750,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.337.500,00	0,00	0,00	34.337.500,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**12.010.840.597,88**	**435.614.111,00**	**0,00**	**12.446.454.708,88**
Akumulasi Penyusutan	**6.666.512.360,01**			**7.268.586.004,88**
Nilai Buku	**5.344.328.237,87**			**5.177.868.704,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	85.514.000,00	0,00	0,00	85.514.000,00
Peralatan dan Mesin	5.241.580.547,88	323.297.500,00	0,00	5.564.878.047,88
Gedung dan Bangunan	6.062.646.810,23	263.464.239,77	0,00	6.326.111.050,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.337.500,00	0,00	0,00	34.337.500,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**11.424.078.858,11**	**586.761.739,77**	**0,00**	**12.010.840.597,88**
Akumulasi Penyusutan	**5.987.460.986,01**			**6.666.512.360,01**
Nilai Buku	**5.436.617.872,10**			**5.344.328.237,87**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya UPTD Puskesmas Kubu II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp440.434.756,23 dan Rp440.434.756,23 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	1.177.556.927,27	1.177.556.927,27
Jumlah Harga Perolehan	**1.177.556.927,27**	**1.177.556.927,27**
Akumulasi Penyusutan	(737.122.171,04)	(737.122.171,04)
Nilai Buku	**440.434.756,23**	**440.434.756,23**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	1.177.556.927,27	0,00	0,00	1.177.556.927,27
Jumlah	**1.177.556.927,27**	**0,00**	**0,00**	**1.177.556.927,27**
Akumulasi Penyusutan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	737.122.171,04	0,00	0,00	737.122.171,04
Jumlah	**737.122.171,04**	**0,00**	**0,00**	**737.122.171,04**
Nilai Buku				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	440.434.756,23	0,00	0,00	440.434.756,23
Jumlah	**440.434.756,23**	**0,00**	**0,00**	**440.434.756,23**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	1.147.032.617,04	30.524.310,23	0,00	1.177.556.927,27
Jumlah	**1.147.032.617,04**	**30.524.310,23**	**0,00**	**1.177.556.927,27**
Akumulasi Penyusutan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	755.564.728,04	0,00	18.442.557,00	737.122.171,04
Jumlah	**755.564.728,04**	**0,00**	**18.442.557,00**	**737.122.171,04**
Nilai Buku				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	391.467.889,00	0,00	0,00	440.434.756,23
Jumlah	**391.467.889,00**	**0,00**	**0,00**	**440.434.756,23**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Belanja UPTD Puskesmas Kubu II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp166.563.413,00 dan Rp123.902.498,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	160.426.849,00	113.236.320,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	6.136.564,00	10.666.178,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	**166.563.413,00**	**123.902.498,00**

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.2.3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.299.842.003.19 dan Rp6.724.371.506,42 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Ekuitas Awal	6.724.371.506,42	6.917.691.080,60
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(422.536.934,23)	(1.203.039.892,96)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	(1.992.569,00)	1.009.720.318,78
Ekuitas Akhir	**6.299.842.003,19**	**6.724.371.506,42**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Kubu II pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.573.138.152,05 dan Rp3.267.850.502,41 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.865.798.329,00	2.667.181.293,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	247.515.314,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	1.248.152.986,17	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	19.375.001,88	21.591.138,41
Pendapatan APBN/APBD	192.296.521,00	579.078.071,00
Jumlah	**4.573.138.152,05**	**3.267.850.502,41**

4.3.2 Beban

Beban UPTD Puskesmas Kubu II pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp4.995.675.086,28 dan Rp4.471.021.550,37 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Pegawai	1.766.116.445,00	1.499.987.132,00
Beban Barang dan Jasa	2.627.366.662,41	2.235.487.145,37
Beban Penyisihan Piutang	118.334,00	122.787,00
Beban Penyusutan	602.073.644,87	735.424.486,00
Beban Amortisasi	0,00	0,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	**4.995.675.086,28**	**4.471.021.550,37**

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai UPTD Puskesmas Kubu II pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1.766.116.445,00	1.491.827.132,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00
Jumlah	**1.766.116.445,00**	**1.499.987.132,00**

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa UPTD Puskesmas Kubu II pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang:

	2025	2024
Beban Barang		
Beban Alat Tulis Kantor	11.647.874,00	15.364.980,00
Beban Kertas dan Cover	0,00	18.750.000,00
Beban Bahan Cetak	5.375.000,00	16.069.000,00
Beban Bahan Kuasi	0,00	201.000,00
Beban Bahan Bakar Pelumas	30.658.196,00	38.594.497,00
Beban Alat Listrik dan Elektronik	5.091.930,00	5.369.870,00
Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	90.612.200,00	14.995.800,00
Beban Benda Pos	1.000.000,00	1.500.000,00
Beban Bahan Komputer	5.906.180,00	25.302.020,00
Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.999.940,00	8.695.000,00
Bbeban Obat-Obatan	1.375.520.859,41	885.054.818,37
Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.501.350,00	29.180.500,00
Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.942.500,00	0,00
Beban Bahan Kimia	62.138.775,00	28.984.700,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	1.940.000,00	9.953.500,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	50.954.450,00	82.402.790,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	6.171.600,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.862.100,00	16.290.800,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	19.238.600,00	100.852.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.040.500,00	24.038.000,00
Beban Natura dan Pakan- Natura	0,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	0,00	17.991.000,00
Beban Bahan Perabot Kantor	1.210.213,00	2.076.487,00
Beban Barang dan Jasa BOK	371.988.600,00	0,00
Jumlah	**2.132.800.867,41**	**1.341.666.762,37**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.364.000,00	12.960.000,00
Beban Tagihan Telepon	14.948.464,00	11.239.447,00
Beban Tagihan Air	3.274.500,00	3.064.900,00
Beban Tagihan Listrik	62.429.030,00	54.347.732,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	40.800.000,00	89.300.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	0,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN	126.159.060,00	279.908.254,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.034.204,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	302.064,00	539.704,00
Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	377.580,00	674.696,00
Beban Jasa Kalibrasi	10.539.450,00	17.674.000,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	190000	190.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	28.410.703,00	13.348.529,00
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Survei	9.000.000,00	8.000.000,00
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Bidang Keuangan	19.980.000,00	19.758.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.145.400,00	615.000,00
Beban Jasa Transportasi	0,00	182.578.400,00
Jumlah	**342.114.455,00**	**694.198.662,00**

Beban Pemeliharaan:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.826.590,00	45.297.610,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.424.750,00	133.629.500,00
Jumlah	**142.251.340,00**	**178.927.110,00**

Beban Perjalanan Dinas:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	16.494.611,00
Jumlah	**0,00**	**16.494.611,00**

Beban Uang dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:

	2025	2024
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.200.000,00	4.200.000,00
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00
Jumlah	**10.200.000,00**	**4.200.000,00**

3. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang UPTD Puskesmas Kubu II pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	118.334,00	122.787,00
Jumlah	**118.334,00**	**122.787,00**

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi UPTD Puskesmas Kubu II pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyusutan	602.073.644,87	735.424.486,00
Beban Amortisasi	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**602.073.644,87**	**735.424.486,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	0,00	131.155,00
Jumlah	**0,00**	**131.155,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca tanggal 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka-angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup BLUD UPTD Puskesmas Kubu II dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kubu II berlangsung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Kubu II bersamaan dengan penerbitan Laporan Auditor Independen pada tanggal 06 April 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00044/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Kubu II
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Kubu II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 06 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Kubu II tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Kubu II bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah-masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan *design* dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Jasa Giro yang Belum Diakui Sebagai Pendapatan Di LRA Puskesmas Tahun 2025.
   Atas permasalahn tersebut kami sarankan agar pendapatan jasa giro diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun di Laporan Operasional.

2. Tata Kelola Aktiva Tetap dan Persediaan Perlu ditingkatkan
   Dari hasil audit yg kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:,
   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Kubu II ke Pemda Karangasem.
      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:
   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.

3. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Operasional
   Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Kubu II dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Kubu II.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Akuntansi yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

Atas masalah tersebut, kami saranankan agar Puskesmas Kubu II meningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Kubu II dibidang Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

4. Pencatatan Transaksi Keuangan Puskesmas Kubu II Pada SIPD Belum Tepat Waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Kubu II pada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka -angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Kubu II dan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00044/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Kubu II
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Kubu II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 06 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

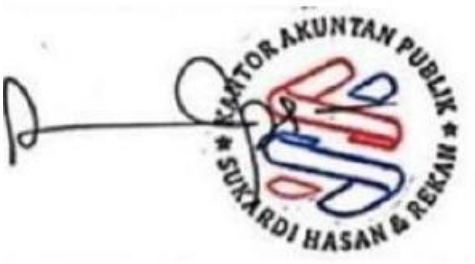
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Kubu II merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Kubu II... terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp: (021) 55787188 ; Email : info@kapsukardihasan.com ; Website : https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Kubu II sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp: (021) 55787188 ; Email : info@kapsukardihasan.com ; Website : https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Kubu II Berbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Kubu II belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Kubu II melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Kubu II berbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum Disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp: (021) 55787188 ; Email : info@kapsukardihasan.com ; Website : https://www.kapsukardihasan.com

perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp: (021) 55787188 ; Email : info@kapsukardihasan.com ; Website : https://www.kapsukardihasan.com

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2024

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Jl. Raya Ulakan-Karangasem, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis,
Kabupaten Karangasem, Bali 80871
Telp : 0363-41625
Email: puskesmasmanggis1@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD 1

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 2

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Laporan Realisasi Anggaran 5
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 6
3. Laporan Neraca 7
4. Laporan Operasional 8
5. Laporan Arus Kas 9
6. Laporan Perubahan Ekuitas 11

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Umum 12
2. Pernyataan Kepatuhan terhadap PSAP BLU 38
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 38
4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 63
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 68
6. Penjelasan Pos-Pos Neraca 69
7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 74
8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 77
9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 78
10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan 79

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 80

Lampiran Catatan atas Hasil Pemeriksaan 83

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
Jln. Raya Ulakan, Kec. Manggis
Kode Pos. 80871, Telp. (0363) 41625 Email: puskesmasmanggis1@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas Manggis I, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	dr. Ni Wayan Putu Suati
Alamat Kantor	:	Jln. Raya Ulakan, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Bali
Alamat Rumah	:	Br. Dinas Subagan, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem
Jabatan	:	Pemimpin BLUD/Kepala UPTD Puskesmas Manggis I
NIP	:	19720418 200604 2 017

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Manggis I.

Ulakan, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Manggis I
Selaku Pemimpin BLUD,



dr. Ni Wayan Putu Suati
NIP. 19720418 200604 2 017

Laporan No: 00042/2.1516/AU.5/11/0463-3/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Manggis I
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Laporan Audit Atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Manggis I, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00042/ML/KAP.IGOR/III/2026 tanggal 25 Maret 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan,

KANTOR AKUNTAN PUBLIK • I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 25 Maret 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.a*	2.294.798.000,00	2.402.446.617,00	104,69%	2.444.369.669,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	*4.1.b*			-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	*4.1.c*	-		-	-
5	Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-		-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	*4.1.e*	11.171.594,00	13.300.379,31	-	11.735.415,81
7	**Jumlah Pendapatan BLUD**		**2.305.969.594,00**	**2.415.746.996,31**	**104,76%**	**2.456.105.084,81**
8	**Belanja**					
9	**Belanja Operasi**					
10	Belanja Pegawai	*4.2.a*	1.302.429.000,00	1.394.272.876,00	107,05%	1.297.986.137,00
11	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	1.430.608.042,00	1.273.987.819,00	89,05%	1.683.323.842,00
12	Bunga		-		-	-
13	Belanja Lain-lain		-		-	-
14	**Jumlah Belanja Operasi**		**2.733.037.042,00**	**2.668.260.695,00**	**97,63%**	**2.981.309.979,00**
15	**Belanja Modal**					
16	Belanja Modal Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	62.500.000,00	60.693.821,00	97,11%	183.298.200,00
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	1.081.000.000,00	1.049.499.500,00	97,09%	79.756.000,00
19	Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	*4.3.d*	-		-	-
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	-		-	-
21	**Jumlah Belanja Modal**		**1.143.500.000,00**	**1.110.193.321,00**	**97,09%**	**263.054.200,00**
22	**Jumlah Belanja**		**3.876.537.042,00**	**3.778.454.016,00**	**97,47%**	**3.244.364.179,00**
23	**Surplus (Defisit)**		**(1.570.567.448,00)**	**(1.362.707.019,69)**	**86,77%**	**(788.259.094,19)**
24	**Pembiayaan**					
25	**Penerimaan Pembiayaan**					
26	Penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-	-
29	**Pengeluaran Pembiayaan**					
30	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
31	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
32	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-	-
33	**Pembiayaan Neto**		-	-	-	-
34	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**(1.570.567.448,00)**	**(1.362.707.019,69)**	**86,77%**	**(788.259.094,19)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ulakan, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Manggis I,

dr. Ni Wayan Putu Suati
NIP. 19720418 200604 2 017

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**358.442.472,19**	**551.904.652,38**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**358.442.472,19**	**551.904.652,38**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	(1.362.707.019,69)	(788.259.094,19)
5	**Sub Total**		**(1.004.264.547,50)**	**(236.354.441,81)**
6	Pendapatan APBD/APBN	*5.4*	1.494.480.664,00	594.796.914,00
7	Setoran ke Kas Daerah			
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.5*	**490.216.116,50**	**358.442.472,19**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ulakan, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Manggis I,

dr. Ni Wayan Putu Suati
NIP. 19720418 200604 2 017

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	*6.1*	23.678.824,00	73.705.947,00
4	Kas pada BLUD	*6.2*	466.566.950,50	284.736.525,19
5	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	10.662.300,00	7.828.100,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(106.623,00)	(78.281,00)
7	Persediaan BLUD	*6.4*	440.027.762,43	423.164.216,80
8	**Jumlah Aset Lancar**		**940.829.213,93**	**789.356.507,99**
9	**Aset Tetap**	*6.5*		
10	Tanah		227.140.000,00	227.140.000,00
11	Peralatan dan Mesin		4.452.848.590,92	4.182.916.112,92
12	Gedung dan Bangunan		8.788.405.312,41	7.738.905.812,41
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		73.913.035,00	73.913.035,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	**Biaya Perolehan Aset Tetap**		**13.542.306.938,33**	**12.222.874.960,33**
17	Akumulasi Penyusutan		*(7.891.994.281,92)*	*(7.427.624.495,92)*
18	**Nilai Buku Aset Tetap**		**5.650.312.656,41**	**4.795.250.464,41**
19	**Aset Lainnya**	*6.6*		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		339.205.182,08	339.205.182,08
22	**Jumlah Aset Lainnya**		**339.205.182,08**	**339.205.182,08**
23	Akumulasi/Amortisasi Aset Lainnya		*(330.950.114,08)*	*(330.950.114,08)*
24	**Nilai Buku Aset Lainnya**		**8.255.068,00**	**8.255.068,00**
25	**JUMLAH ASET**		**6.599.396.938,34**	**5.592.862.040,40**
26	**KEWAJIBAN**			
27	**Kewajiban Jangka Pendek**			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	*6.7*	29.658,00	-
29	Belanja yang Masih Harus Dibayar	*6.8*	135.067.646,00	134.769.257,00
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	*6.9*	-	-
31	**Jumlah Kewajiban Jk Pendek**		**135.097.304,00**	**134.769.257,00**
32	**Kewajiban Jangka Panjang**			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	**Jumlah Kewajiban Jk Panjang**		-	-
35	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**135.097.304,00**	**134.769.257,00**
36	**EKUITAS**	*6.10*		
37	Ekuitas		6.464.299.634,34	5.458.092.783,40
38	**JUMLAH EKUITAS**		**6.464.299.634,34**	**5.458.092.783,40**
39	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**		**6.599.396.938,34**	**5.592.862.040,40**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ulakan, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Manggis I,

dr. Ni Wayan Putu Suati
NIP. 19720418 200604 2 017

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*7.1.a.*	2.405.280.817,00	2.449.354.369,00	(44.073.552,00)	-1,80%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*7.1.b.*	-	-		
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	*7.1.c.*	-	-		
6	Pendapatan Hibah	*7.1.d.*	-	-	-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya	*7.1.e.*	13.300.379,31	11.735.415,81	1.564.963,50	13,34%
8	Pendapatan APBD/APBN	*7.1.f.*	1.494.480.664,00	594.796.914,00	899.683.750,00	151,26%
9	**Jumlah Pendapatan**		**3.913.061.860,31**	**3.055.886.698,81**	**857.175.161,50**	**28,05%**
10	**Beban**					
11	Beban Pegawai	*7.2.a.*	1.411.664.105,00	1.300.644.835,00	111.019.270,00	8,54%
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.b.*	2.197.297.428,93	2.408.896.536,47	(211.599.107,54)	-8,78%
13	Beban Penyisihan Piutang	*7.2.c.*	106.623,00	78.281,00	28.342,00	36,21%
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	*7.2.d.*	464.369.786,00	479.671.070,20	(15.301.284,20)	-3,19%
15	Beban Lain-Lain	*7.2.e.*	1.214.000,00	-	1.214.000,00	-
16	**Jumlah Beban**		**4.074.651.942,93**	**4.189.290.722,67**	**(114.638.779,74)**	**-2,74%**
17	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**(161.590.082,62)**	**(1.133.404.023,86)**	**971.813.941,24**	**-85,74%**
18	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		78.281,00	28.550,00	-	-
22	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional**		**78.281,00**	**28.550,00**	-	-
23	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**(161.511.801,63)**	**(1.133.375.473,86)**	**971.813.941,24**	**-85,75%**
24	**Pos Luar Biasa**					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	**Jumlah Pos Luar Biasa**		-	-	-	-
28	**Surplus (Defisit)-LO**		**(161.511.801,63)**	**(1.133.375.473,86)**	**971.813.941,24**	**-85,75%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ulakan, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Manggis I,

dr. Ni Wayan Putu Suati
NIP. 19720418 200604 2 017

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**			
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1.a)*		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		2.402.446.617,00	2.444.369.669
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
6	Pendapatan Hibah		-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya		13.300.379,31	11.735.415,81
8	Pendapatan APBD/APBN		1.494.480.664,00	594.796.914,00
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**3.910.227.660,31**	**3.050.901.998,81**
10	**Arus Kas Keluar**	*8.1.b)*		
11	Belanja Pegawai		1.394.272.876,00	1.297.986.137,00
12	Belanja Barang dan Jasa		1.273.987.819,00	1.683.323.842,00
13	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**2.668.260.695,00**	**2.981.309.979,00**
14	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**1.241.966.965,31**	**69.592.019,81**
15	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**			
16	**Arus Masuk Kas**	*8.2.a)*		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
24	**Arus Keluar Kas**	*8.2.b)*		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		60.693.821,00	183.298.200,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		1.049.499.500,00	79.756.000,00
28	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**1.110.193.321,00**	**263.054.200,00**
32	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(1.110.193.321,00)**	**(263.054.200,00)**
33	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	*8.3.a)*		
34	**Arus Masuk Kas**			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
37	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
38	**Arus Keluar Kas**	***8.3.b)***		
39	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
40	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-
41	Pemberian Pinjaman		-	-
42	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-	-
43	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		-	-
44	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**			
45	**Arus Kas Masuk**	***8.4.a)***		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		144.999.713,24	144.447.204,00
47	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**144.999.713,24**	**144.447.204,00**
48	**Arus Kas Keluar**	***8.4.b)***		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		144.970.055,24	144.447.204,00
50	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**144.970.055,24**	**144.447.204,00**
51	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**29.658,00**	-
52	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**		**131.803.302,31**	**(193.462.180,19)**
53	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**358.442.472,19**	**551.904.652,38**
54	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**490.245.774,50**	**358.442.472,19**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ulakan, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Manggis I,

dr. Ni Wayan Putu Suati
NIP. 19720418 200604 2 017

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.1*	**5.458.092.783,40**	**5.729.978.252,66**
2	**Surplus (Defisit) LO**	*9.2*	**(161.511.801,63)**	**(1.133.375.473,86)**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.3*	**1.167.718.652,57**	**861.490.004,60**
	Koreksi saldo awal persediaan		-	84.323.860,85
	Koreksi Mutasi Persediaan Antar Perangkat Daerah		957.265.995,57	764.377.743,75
	Koreksi Mutasi Aset Tetap antar Perangkat Daerah		210.452.657,00	12.800.000,00
	Setoran ke Kas Daerah		-	-
	Koreksi saldo awal piutang		-	(11.600,00)
4	**Ekuitas Akhir**	*9.4*	**6.464.299.634,34**	**5.458.092.783,40**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ulakan, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Manggis I,

dr. Ni Wayan Putu Suati
NIP. 19720418 200604 2 017

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Manggis I

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Manggis I

UPTD Puskesmas Manggis I adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Manggis I merupakan sebuah Puskesmas Rawat Inap.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, UPTD Puskesmas Manggis I ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

b. Tempat dan Kedudukan

UPTD Puskesmas Manggis I beralamat di Jl. Raya Ulakan – Karangasem, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Telp 0363-41625, Email: puskesmasmanggis1@gmail.com.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Manggis I adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);
17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

24) Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
27) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
28) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
29) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 625/HK2023 Tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
30) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 226/HK/2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor 623/HK/2023 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
31) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 325/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Dan Rekening Bank Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

d. Visi dan Misi UPTD Puskesmas Manggis I

1) Visi : "Terwujudnya Masyarakat Sehat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Manggis I berdasarkan Tri Hita Karana Menuju Karangasem Era Baru".
2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 5 (Lima) misi, sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang lebih bermutu, profesional, merata, dan terjangkau.
b) Memelihara kesehatan perorangan keluarga dan masyarakat.
c) Meningkatkan kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat.
d) Mendorong keterpaduan dan kesinambungan kerja lintas program dan lintas sektor.
e) Menggunakan sistem informasi dan teknologi tepat guna dalam penyelenggaraan management UPTD Puskesmas Manggis I.

3) Strategi

Untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut, UPTD Puskesmas Manggis I memiliki strategi sebagai berikut:

a) Menyusun PTP tahunan dan perencanaan bulanan secara rutin.

b) Menggalang kerjasama antar unit lewat lokakarya mini bulanan baik kerjasama lintas program maupun sektoral.
c) Melaksanakan apa yang telah dilaksanakan dalam POA sesuai jadwal dan melaporkan hasilnya secara rutin, tepat waktu dan benar.
d) Melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan prima.
e) Menghargai sesama rekan kerja dan masyarakat.
f) Mengikuti pelatihan seminar/symposium guna peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme tenaga medis dan paramedis.
g) Menambah jenis pelayanan sesuai tuntutan masyarakat.
h) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penerapan kemajuan ilmu dan teknologi serta melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika.
i) Mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam pembiayaan kesehatan melalui JKN.

4) Tata Nilai
a) Keikhlasan
Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dengan sepenuh hati tanpa pamrih.
b) Keterbukaan
Puskesmas dikelola secara transparan dapat dipertanggungjawabkan, menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.
c) Keprofesionalan
Memberikan pelayanan yang efektif efisien dan akuntabel berdasarkan standar profesi.

5) Motto : **SELARAS**
a) **S**alam senyum sapa sopan santun
b) **E**mpati (melayani dengan penuh hati)
c) **L**engkap (memberikan pelayanan yang komperhensif dan profesional)
d) **A**dil (pelayanan yang merata tanpa membeda-bedakan)
e) **R**amah dalam sikap dan perilaku
f) **A**kurat dalam memberikan pengobatan
g) **S**emangat untuk memberikan pelayanan terbaik

e. Program Pelayanan UPTD Puskesmas Manggis I

Program Pelayanan UPTD Puskesmas Manggis I terdiri dari:

1) Upaya Kesehatan Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat:
a) Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS;
b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
c) Pelayanan KIA dan KB;
d) Pelayanan Gizi;
e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
f) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

2) Upaya Kesehatan Pengembangan:
a) Pelayanan Kesehatan Jiwa;
b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masayarakat;
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
d) Pelayanan Kesehatan Olah Raga;

e) Pelayanan Kesehatan Indera;
f) Pelayanan Kesehatan Lansia;
g) Pelayanan Kesehatan Kerja.

3) Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium:
a) Pelayanan Pemeriksaan Umum;
b) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
c) Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
d) Pelayanan Gawat Darurat;
e) Pelayanan Persalinan;
f) Pelayanan Rawat Inap;
g) Pelayanan Kefarmasian;
h) Pelayanan Laboratorium.

4) Upaya Kesehatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasyankes:
a) Puskesmas Pembantu;
b) Puskesmas Keliling;
c) Bidan Desa;
d) Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

f. Jenis-Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Manggis I

Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Manggis I terdiri dari:

1) Poliklinik
Poliklinik rawat jalan terdiri dari Poli umum, Poli gigi, KIA/KB, imunisasi, ruang konsultasi termasuk loket pendaftaran prosedur rawat jalan pada poliklinik menguraikan langkah-langkah pemberian pelayanan kepada pasien rawat jalan mulai dari pemilahan kelompok pasien, pendaftaran dan pembayaran jasa layanan, dan pemberian layanan kesehatan pada masing-masing poli, serta tindakan lanjutan yang diperlukan oleh pasien.

2) Rawat Inap
UPTD Puskesmas Manggis I memiliki ruangan khusus rawat inap dengan kapasitas TT Rawat Inap 14 buah.

3) Unit Gawat Darurat
UPTD Puskesmas Manggis I memiliki ruang khusus unit gawat darurat, tetapi memiliki ruang tindakan medik untuk mengatasi tindakan kegawat daruratan pelayanan primer. Prosedur pada penanganan kasus Gawat Darurat menguraikan langkah-langkah mengutamakan penanganan pasien yang sifatnya gawat dan darurat sejak pasien datang hingga tindakan lanjutan yang diperlukan pasien seperti dirujuk ke rumah sakit.

4) Laboratorium
Prosedur penunjang medis menguraikan pemberian layanan berupa layanan laboratorium kepada pasien sesuai surat pengantar dari poli umum, poli KIA-KB, ruang konsultasi, ruang UGD.

5) Apotek
Prosedur layanan obat menguraikan pemberian pelayanan penyediaan obat-obatan kepada pasien sesuai resep dari poli-poli rawat jalan, ruang UGD dan pelayanan di luar gedung seperti kegiatan posyandu (balita dan lansia).

6) Pelayanan Gizi
Prosedur pelayanan gizi menguraikan pemberian layanan gizi berupa penyuluhan

PUGS, konseling atau klinik gizi untuk terapi diet untuk pasien poliklinik, dan dalam bentuk perencanaan serta pengolahan makanan biasa/khusus.

7) Pelayanan *Ambulance*
Prosedur pelayanan *ambulance* menguraikan pemberian layanan ambulance bagi pasien yang memerlukannya dalam rangka rujukan ke rumah sakit.
8) Rekam Medik
Prosedur rekam medik menguraikan proses penanganan data pasien mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen/data pasien, pengkodean, pengindeksan, dan pengarsipan.
9) Kesehatan Lingkungan
Prosedur kesehatan lingkungan menguraikan langkah-langkah pemeriksaan air limbah, limbah padat berbahaya, serta air bersih secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

g. Sasaran, Indikator, Target Kinerja

Berikut disajikan Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
I	**Pelayanan Kesehatan Keluarga**							**94,94**
	A	**Kesehatan Ibu**						**107,15**
	1	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	bumil	%	100	385	424	110,10
UKM ESENSIAL								**90,18**
	2	Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai Standar (K4)	bumil	%	100	385	354	91,90
	3	Cakupan Deteksi faktor resiko /komplikasi yang ditemukan oleh Masyarakat	bumil	%	40	77	81	105,2
	4	Cakupan penaganan Komplikasi Obstetri (PK)	bumil	%	80	77	82	106,5

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
	5	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (Pn)	bulin	%	100	332	364	109,60
	6	Cakupan pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF 3)	bulin	%	80	332	397	119,60
	B	**Kesehatan Bayi**						**78,17**
	1	Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN 1)	bayi	%	100	357	365	102,24
	2	Cakupan Pelayanan kesehtan Neonatal 0 - 28 hari (KN Lengkap)	bayi	%	100	357	329	92,16
	3	Cakupan Penaganan komplikasi neonatus	bayi	%	80	54	7	12,96
	4	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 12 bln (Kunjungan Bayi)	bayi	%	100	-	376	105,32
	C	**Upaya Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah**						**101,46**
	1	Cakupan Pelayanan Anak Balita (12 - 59 bulan)sesuai standar	Balita	%	100	1444	1415	97,99
	2	Cakupan Pelayanan kesehatan anak	Balita	%	100	-	1400	100

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
		balita sakit yang dilayani dengan MTBS						
	3	Cakupan Stimulasi Deteksi Intervinsi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	APRAS	%	100	454	483	106,39
	D	**Pelayanan Keluarga Berencana**						**92,99**
	1	Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	akseptor	%	70	6106	4670	76,38
	2	Cakupan Peserta KB Pasca persalinan	akseptor	%	100	332	364	109,6
	3	Cakupan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA dan kanker payudara dengan pemeriksaan klinis (SADANIS)	PUS	%				
II	**Pelayanan Promosi Kesehatan**							**103,30**
	A	**Tatanan Sehat**						**100**
	1	Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	%	84	1050	1050	100
	2	Tatanan institusi Pendidikan /sekolah	Sekolah	%	100	58	58	100
	3	Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	%	80	5	5	100
	4	Tatanan TTU	TTU	%	40	21	21	100
	5	Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	%	45	5	5	100
	B	**Penyuluhan Kesehatan**						**100**
	1	Kegiatan penyuluhan pada	Posyandu	kali	12	12	12	100

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
		Kelompok Rumah Tangga minimal 12 kali dalam setahun						
	2	Kegiatan penyuluhan Pada Institusi Pendidikan minimal 2 kali dalam setahun	Sekolah	kali	2	2	2	100
	3	Kegiatan penyuluhan pada Institusi Kesehatan minimal 2 kali dalam setahun	Institusi Kesehatan	kali	10	10	10	100
	4	Kegiatan penyuluhan pada TTU minimal 2 kali dalam setahun	TTU	kali	2	2	2	100
	5	Kegiatan penyuluhan pada Tempat Kerja minimal 2 kali dalam setahun	Tempat Kerja	kali	2	2	2	100
	C	**Pengembangan UKBM**						**83,12**
	1	Posyandu PURI (Purnama & Mandiri)	Posyandu	%	40	79	39	49
	2	Poskesdes beroperasi dengan strata Pratama,Madya, Purnama dan Mandiri	Poskesdes	%	50	1	1	100
	3	pembinaan tingkat pengembangan Posbindu PTM Minimal 6 kali setahun	Posbindu	6 kali	6	6	6	100

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
	D	**Penyuluhan NARKOBA**						**100**
	1	Penyuluhan Narkoba Minimal 5 kali dalam Setahun	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	5	5	5	100
	E	**Pengembangan Desa Siaga Aktif**						**100**
	1	Desa Siaga Aktif	Desa	%	100	5	5	100
	2	Pembinaan Desa Siaga Aktif 12 Kali dalam setahun	Poskesdes	kali	12	12	12	100
	F	**Promosi Kesehatan**						**100**
	1	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan Jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	Masyarakat	kali	12	12	12	100
	2	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar Gedung	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	12	12	12	100
	G	**Program Pengembangan**						**140**
	1	Pembinaan Kelompok Masyarakat/Kelompok peduli Kesehatan minimal 1 kali	kelompok peduli kesehatan	kali	1	1	2	200

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
		setahun						
	2	Pembinaan Germas Hidup Sehat ke masyarakat, kelompok, sekolah dll' minimal 5 kali setahun	Masyarakat, Sekolah Kelomp-ok	kali	5	5	6	120
	3	Sosialisasi/pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	kali	1	1	1	100
II	**Pelayanan Gizi**							**97,69**
	A	**Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat**						**97,69**
	1	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	bumil	%	95	38	38	100
	2	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	bumil	%	98	385	357	92,7
	3	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	bayi	%	50	236	211	89,41
	4	Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	bayi	%	60	310	283	91,29
	5	Persentase Balita kurus mendapat makanan tambahan	balita	%	90	20	20	100
	6	Persentase Remaja putri yang mendapat Tablet	rematri	%	60	1579	1579	100

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
		Tambah Darah (TTD)						
	7	Persentase Cakupan vitamin A pada Balita	balita	%	90	1330	1281	96,32
	8	Persentase Anemia pada ibu hamil	ibu hamil	%	14	424	16	4,72
	9	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	bayi	%	7,4	364	15	4,12
	10	Persentase Balita Kurus (Wasting)	balita	%	7	1642	11	1,16
	11	Persentase Balita Pendek (Stunting)	balita	%	19	405	223	55,06
	12	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	balita	%	85	1986	1917	71,30
	13	Persentase Cakupan Skrining anemia remaja putri	rematri	%	90	1579	1579	100
IV	**Pelayanan Kesehatan Lingkungan**							**77,15**
	1	Pengawasan Kualitas Air						99,6
	a	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/layak	penduduk	%	100	100	100	100
	b	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/IKL	Sarana	%	100	100	100	100
	c	Persentase sarana air minum yang dikaporitisasi	Sarana	%	100	100	100	100
	d	Persentase Pengambilan sampel air	Sampel Air	%	100	100	7 sampel	100
	e	Persentase kualitas air minum di penyelenggara yang memenuhi	Sarana	%	100	100	98	98

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
		syarat						
	2	STBM						54,7
	a	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	%	100	100	99,1	99,1
	b	Persentase Desa ODF	Desa	%	100	100	40	40
	c	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	%	100	100	25	25
V	**Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P)**							**77,83**
	A	**Pencegahan dan Penanggulangan Rabies**						**100**
	1	Presentase kasus GHPR ditatalaksana standar	orang	%	100	459		100
	B	**HIV AIDS**						**83,5**
	1	Persentase penduduk berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,pasien TBC,IMS,WPS, Waria/Transgende r,WBP)	Pelayanan kesehatan orang	%	100	414	346	83,5
	C	**TBC**						**107**
	1	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang	%	100	146	187	128
	2	Succsess Rate {Angka Keberhasilan Pengobatan}	orang	%	90	23	20	86
	D	**DIARE**						**63,65**
	1	Prosentase penderita diare	orang	%	100	830	227	27,3

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
		yang mendapat pelayanan standar						
	2	Prosentase deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	orang	%	100	503	503	100
	E	**IMUNISASI**						**95,91**
	1	Imunisasi HB 0 (<7 hari)	bayi	%	95	332	346	101,2
	2	Imunisasi BCG + Polio 1	bayi	%	95	332	297	89,46
	3	Imunisasi DPT-HB1 + Polio 2	bayi	%	95	357	278	77,87
	4	Imunisasi DPT-HB2 + Polio 3	bayi	%	95	357	262	73,39
	5	Imunisasi DPT-HB3 + Polio 4	bayi	%	95	357	264	73,59
	6	Imunisasi Campak pada bayi	bayi	%	95	357	347	98,82
	7	Imunisasi Lengkap	bayi	%	95	357	346	96,92
	8	Imunisasi Boster DPT-HB Hib	bayi	%	88	444	429	96,62
	9	Imunisasi Boster Campak	bayi	%	88	444	431	97,07
	10	Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD	anak	%	95	500	471	94,44
	11	Imunisasi TD pada anak kelas 2 dan 5	anak	%	95	1078	1022	95,29
	12	Bias Campak kelas 1 SD	anak	%	95	500	445	89
	13	Imunisasi HPV Untuk Anak Perempuan Kelas 5	anak	%	100	285	275	97,2
	13	TT Bumil	bumil	%	95	617	407	65,96
	F	**DBD**						**102**
	1	Angka Kesakitan DBD/Insiden Rate	Orang	per 100.000	50			116,6
	2	Cakupan Penyelidikan	kasus	%	100	49	49	100

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN *(Lanjutan)*

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
		Epidemiologi (PE)						
	3	Angka Bebas Jentik (ABJ)	rumah	%	>95			89,25
	G	**KUSTA**						**0,9**
	1	Angka Prevalensi Kusta	Orang	per 10.000 pddk	<1	3	3	0,90
	H	**MALARIA**						**100**
	1	Penderita positif Malaria yang di obati sesuai standar	Orang	%	100	64	1	100
	2	Angka Kesakitan Malaria/Annual Parasit Incident (API)	Orang	per 1000 pddk	<1	64	1	100
	I	**P2 ISPA/Pnemonia balita**						**100**
	1	Prosentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	orang	%	100%	100%	100	100
	J	**Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular**						**81**
	1	Presentase meningkatnya desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	desa	%	70	6 desa	6 desa	70 %
	2	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	622	622	100 %

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
	3	Persentase pelayanan sesuai standar bagi penderita diabetes melitus	orang	%	100	344	344	100 %
	4	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	%	100	9360	9360	100 %
	5	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pasien ODGJ	Orang	100%	106	106	100%
	K	**SURVAILANS**						100
	1	Kelengkapan Laporan	dokumen	%	90%	1	1	100&
	2	Ketepatan laporan	dokumen	%	100%	1	1	100%
	3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal/alert Penyakit Potensial KLB	%	100%	1	1	100%
	4	Survailance Campak Rubella	orang	%	100%			0
	L	**Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)**						**0**
	1	Kunjungan rumah keluarga risti	kk	%	80%			
UKM PENGEMBANGAN								**99,62**
	A	**LANSIA**						**96,99**
	1	Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	LANSIA	%	100	4386	4254	96,99

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
	B	**Upaya Kesehatan Gigi Sekolah**						**100**
	1	Persentase Pembinaaan Kesehatan Gigi di TK	TK	%	80	18	18	100
	2	Persentase Pembinaan dan Bimbingan Sikat Gigi Massal pada SD/MI	SD/MI	%	100	40	40	100
	C	**UKS**						**100**
	1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Semua siswa SD kls 1 s/d	Siswa	100%	3186	3186	100%
	2	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SMP/MTsN	Semua siswa SMP kls VII	Siswa	100%	1586	1586	100%
	3	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik siswa SMA/MA	Semua siswa SMA kls X	Siswa	100%	1750	1750	100%
	D	**Upaya Kesehatan olahraga**						**100**
	1	Persentase puskesmas yang menyelenggaraka-n kesehatan olah raga diwilayah kerjanya	Kelompo k olah raga wilayah	Kelom pok olah raga	100%	100	100	100
	2	Persentase anak SD yang melakukan tes kebugaran	Anak SD	Siswa	100%	100	100	100

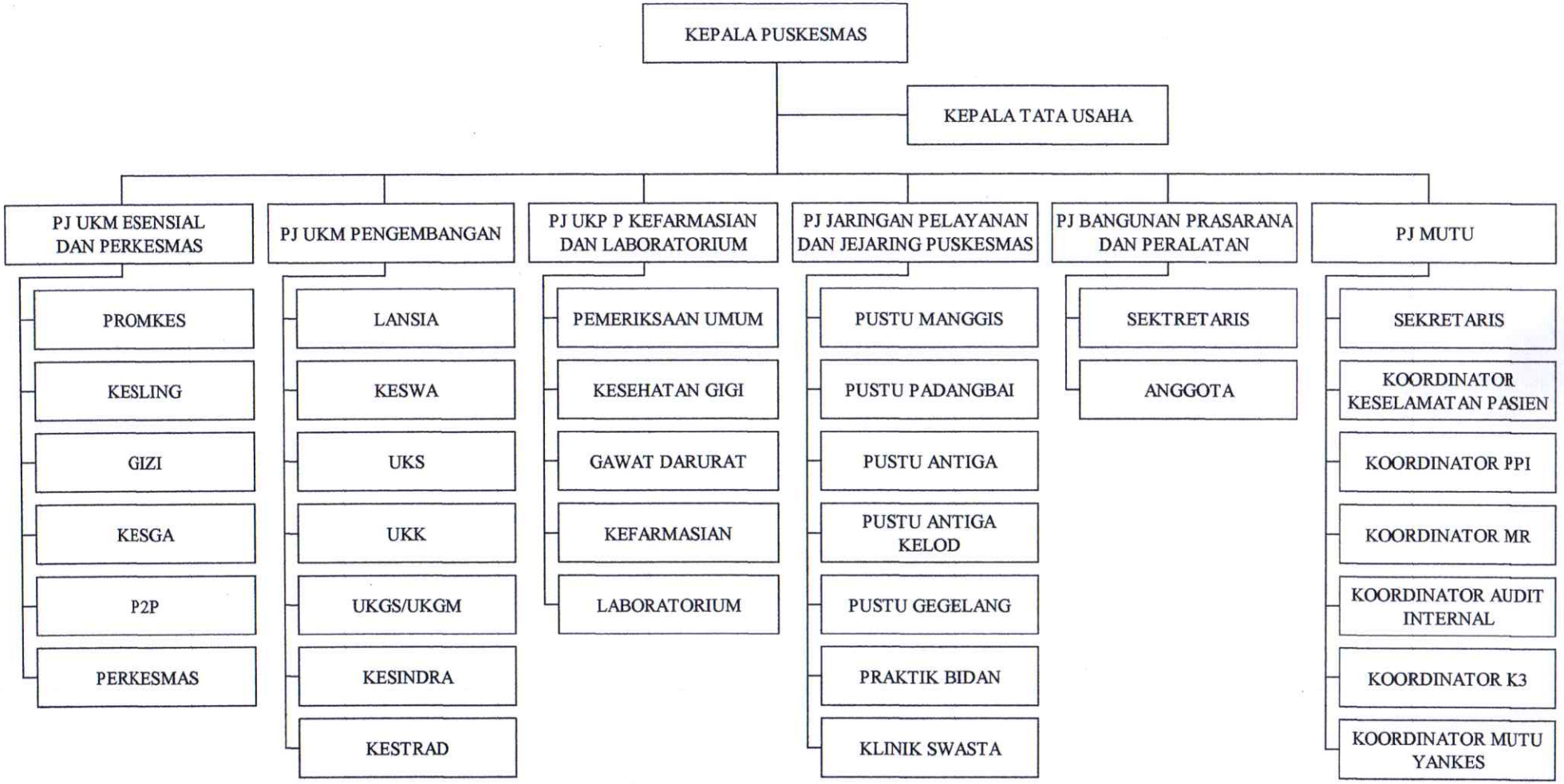
Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
	3	Persentase jamaah haji yang melakukan tes kebugaran	Jamaah haji	Orang	100%	0	0	0
	E	**Pelayanan Kesehatan Kerja (UKK)**						**100**
	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	Pekerja	%	5000%	50	50	100
	2	Persentase Pos UKK yang dibentuk dan dibina	Pekerja	%	10000%	1	1	100
	F	**Pelayanan PKPR**						**100**
	1	Pembinaan konselor sebaya minimal 5 sekolah	Sekolah	%	100	5	5	100
	2	Pembinaan PKHS pada remaja (Pembinaan penerapan protokol kesehatan)	Sekolah	%	100	5	5	100
	3	Penyuluhan kesehatan reproduksi	Sekolah	%	100	5	5	100
	4	Posyandu remaja inimal 1	Desa	%	100	3	3	100
	G	**JIWA**						**100**
	1	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pasien ODGJ	Orang	100%	106	106	100
	H	**YANKESTRAD KOM**						**100**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN *(Lanjutan)*

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
	1	Sosialisasi asuhan mandiri dalam rangka pembentukan kelompok pemanfaaatan TOGA	Kelompo k Asman	%	100	6	6	100
	2	Pembinaan Kelompok TOGA dalam rangka pengobatan tradisional	Kelompo k TOGA	satuan		6	6	100
	3	Pembinaan TOGA Pada Keluarga	Keluarga	satuan		2	2	100
	4	Pembinaan Penyehatan Tradisional (Hatra)	Hattra	%	100	2	2	100
UKP (UPAYA KESEHATAN PERORANGAN)								**80,71**
	A	**Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan**						**65,55**
	1	Persentase Kunjungan ke Pelayanan Kesehatan	pddk	%	>15	15	10,6	71,1
	2	Persentase Rujukan ke FKTL	pasien	%	<2	2,0	1,2	60,0
	B	**PELAYANAN KEFARMASI-AN**						**98**
	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	puskesma s	%	100	100	100	100
	2	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Obat	%	90	96	97	96

Kegiatan			Sasaran	Jenis Satu-an	Target	Jumlah Sasaran	Penca -paian (ABS)	Cakupan
1	2		3	4	5	6	7	9
	C	**PELAYANAN LABORATORIUM**						**87**
	1	Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium yang dilaksanakan	spesimen	%	80			87
	D	**PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT**						**72,3**
	1	Persentase keluarga rawan yang dibina	Keluarga	%	80	113	102	72,3
KINERJA PUSKESMAS								**90,17**

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Manggis I



Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Manggis I terdiri dari:

1) Kepala Puskesmas;
2) Tata Usaha; dan
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas;
8) Penanggung Jawab Mutu.

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Puskesmas

   Wewenang:

   a) Memeriksa dan menganalisa laporan-laporan kegiatan stafnya dan sekaligus mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.
   b) Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang di bawahnya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

   Tanggung Jawab:

   a) Pelaksanaan tugas sehari-hari;
   b) Melakukan pengawasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
   c) Mengadakan koordinasi dengan kepala kecamatan dan lintas sektor dalam upaya pembangunan Kesehatan di wilayah kerja;
   d) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka miningkatkan derajat Kesehatan;
   e) Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan dibantu oleh staf puskesmas;
   f) Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan;
   g) Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Induk, Pustu, Pusling dan lain-lain.

2) Tata Usaha

   Wewenang:

   a) Menilai kelengkapan administrasi rumah tangga;
   b) Menilai kelengkapan administrasi kepegawaian;
   c) Menilai Kelengkapan administrasi keuangan.

   Tanggung Jawab:

   a) Memonitoring data kepegawaian (kinerja);
   b) Memonitoring kinerja rumah tangga;
   c) Memonitoring kinerja keuangan.

3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

Tanggung Jawab:

a) Promosi Kesehatan;
b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
c) Pelayanan Kesehatan Keluarga;
d) Pelayanan Gizi;
e) Pelayanan P2P;
f) Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Pengembangan;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Pengembangan.

Tanggung Jawab:

a) Pelayanan Kesehatan Jiwa;
b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional;
d) Pelayanan Kesehatan Olahraga;
e) Pelayanan Kesehatan Indera;
f) Pelayanan Kesehatan Lansia;
g) Pelayanan Kesehatan Kerja.

5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
Wewenang:
   a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab membina jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
   b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
   c) Mengidentifikasi dan Menganalisa Data Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
   d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja jejaring pelayanan Puskesmas.

7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
Tanggung Jawab:
Bertanggung Jawab memelihara sarana dan prasarana dan peralatan puskesmas
   a) Bangunan;
   b) Alat Kesehatan;
   c) IPAL;
   d) Parkir/Halaman;
   e) Kendaraan;
   f) Diklat;
   g) Kebakaran/Kecelakaan.

8) Penanggung Jawab Mutu
Wewenang:
   a) Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua penanggung jawab mutu;
   b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
   c) Mengolah dan Memelihara Dokumen/Rekaman;
   d) Membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses pelayanan.

Tanggung Jawab:
   a) Menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem mutu manajemen;
   b) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjamin mutu dalam proses diklat berdasarkan standar mutu.

i. Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Manggis I

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Manggis I Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ditetapkan tanggal 29 Desember 2023, diketahui susunan pejabat pengelola BLUD sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. Ni Wayan Putu Suati NIP. 19720418 200604 2 017	Pemimpin BLUD
2.	I Dewa Putu Sariarsa, S.Kep., Ns NIP. 19700310 199102 1 003	Pejabat Keuangan

No	Nama	Jabatan
3.	Ni Nyoman Suriani, SKM NIP. 19790105 200801 2 025	Pejabat Teknis Bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4.	Ns. I Nyoman Ones, S.Kep. NIP. 19711221 199203 1 005	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
5.	dr. Ni Made Ari Rujati NIP. 19870809 201903 2 001	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	drg. I Made Mertha Windhu NIP. 19720326 200501 1 006	Pejabat Teknis Bidang Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	I Made Wartama, SM NIP. 19831117 200901 1 007	Pejabat Teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
8.	dr. I Made Putera Aditya NIP. 19930719 202203 1 003	Pejabat Teknis Bidang Mutu

j. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Manggis I per 31 Desember 2025 sebanyak 71 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 71 orang
- Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil : 03 orang

Jumlah : 74 orang

Jumlah pegawai berdasarkan pegawai berdasarkan profesi yaitu:

No	Jabatan	2025		
		ASN	Non ASN	Jumlah
a.	**Tenaga Medis**			
	Struktural Medis			
1	Dokter Spesialis	0	-	0
2	Dokter Umum	4	-	4
3	Dokter Gigi	1	-	1
4	Perawat	17	-	17
5	Struktural Perawat	-	-	-
6	Bidan	15	-	15
7	Kesehatan Masyarakat	-	-	-
8	Sanitarian	2	-	2
9	Petugas Lab. TB	-	-	-
10	Nutrisionis	1	-	1
11	Perawat Gigi	3	-	3
12	Apoteker	-	-	-
13	Ass. Apoteker	2	-	2
14	Laboratorium Kesehatan	2	-	2
	Jumlah Tenaga Medis	**47**	**-**	**47**
b.	**Tenaga Non Medis**	**-**	**-**	**-**
	Struktural Non Medis	-	-	-

No	Jabatan	2025		
		ASN	Non ASN	Jumlah
1	Pengadministrasi Umum	14		14
2	Bendahara	2	-	2
3	LKB	-	-	-
4	Sopir	1	-	1
5	Petugas Keamanan	-	-	-
6	Cleaning Service	-	-	-
7	Tenaga Penunjang	7	3	10
	Jumlah Tenaga Non Medis	**24**	**3**	**24**
	Total Pegawai	**71**	**3**	**74**

Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan tingkat pendidikan yaitu:

No	Pendidikan	Status				Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	Kontrak Pemda	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	7	-	11	3	21
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	23	-	7	-	30
6	D4	2	-	-	-	2
7	S1	13	-	8	-	21
8	S2	-	-	-	-	-
9	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		**45**	**-**	**26**	**3**	**74**

k. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Manggis I melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokkan sebagai berikut:

Kerjasama Pelayanan Kesehatan:
1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Karangasem.

l. Pembiayaan UPTD Puskesmas

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

m. Indikator Pelayanan Kesehatan

Berikut disajikan Indikator Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Manggis I Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Indikator Pelayanan Kesehatan	Tahun		Satuan
	2025	2024	
BOR	0,6	1	%
LOS	1	1,2	hari
TOI	256	117,6	hari
BTO	2	3,1	%/tahun
NDR	-	-	%
GDR	-	-	%
Jml Kunj Rawat Jalan	27.556	23.453	Orang
Jml Kunj Rawat Inap	45	18	Orang
Jml Kunj IGD	6355	5.303	Orang

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi Puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dengan realisasi periode sebelumnya.
2) Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas pada halaman pertama, dan dapat diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
   a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
   b) cakupan entitas pelaporan;
   c) periode yang dicakup;
   d) mata uang pelaporan; dan
   e) satuan angka yang digunakan.
3) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
4) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
5) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh UPTD/SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.
6) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Transfer;
   d) Surplus/defisit-LRA;
   e) Penerimaan pembiayaan;
   f) Pengeluaran pembiayaan;
   g) Pembiayaan netto; dan
   h) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
7) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut

angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Penjelasan lebih rinci dapat pula disajikan dalam bentuk lampiran.

8) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

9) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

   a) Saldo Anggaran Lebih awal;

   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;

   e) Lain-lain; dan

   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

3) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

4) Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

5) Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
6) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) kas dan setara kas;
   b) piutang dari kegiatan operasional
   c) persediaan;
   d) aset tetap;
   e) kewajiban jangka pendek;
   f) kewajiban jangka panjang; dan
   g) ekuitas.

a. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2) Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
3) Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
   a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
   b) cakupan entitas pelaporan;
   c) periode yang dicakup;
   d) mata uang pelaporan; dan
   e) satuan angka yang digunakan.
4) Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari Operasi;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.

5) Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6) Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu 19 dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

7) Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

8) Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

9) Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

10) Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan Peraturan Perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

11) Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

12) Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:

    a) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

    b) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

    c) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

b. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan *metode langsung*, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) **Aktivitas Operasi**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
a) Pendapatan dari alokasi APBD;
b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
a) Pembayaran Pegawai;
b) Pembayaran Barang;
c) Pembayaran Bunga; dan
d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) **Aktivitas Investasi**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) **Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) **Aktivitas Transitoris**

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

1) Ekuitas awal
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
   - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4) Ekuitas akhir.

d. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2) Pendapatan-LRA juga didefinisikan sebagai penerimaan Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3) Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
   a) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b) Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan;
   c) Pendapatan hasil Kerjasama;
   d) Pendapatan hibah;
   e) Pendapatan lain-lain.
4) Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:
   a) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
   b) Diterima oleh SKPD; atau
   c) Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD.
5) Pendapatan yang tidak melalui rekening kas umum daerah seperti:

   Pendapatan Dana Kapitasi JKN diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan notifikasi penyaluran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan yang disalurkan langsung kepada rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN di FKTP dan laporan penyaluran Dana Kapitasi JKN yang diterima dari BPJS Kesehatan melalui kepala SKPD Dinas Kesehatan.
6) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
7) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan

Belanja

1) Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh Pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2) Belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
4) Klasifikasi ekonomi belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

5) Belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah seperti:

Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PA/KPA Dinas Kesehatan/FKTP.

6) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

e. Pos-pos Neraca

1) **Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) **Piutang**

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.

c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan/atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) **Persediaan**

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi

penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

4) **Aset Tetap dan Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)* dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat LaboratoriumLingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVII I	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan *overhaul* disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Hidrodinamica			
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produkai Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan / Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
InstalasiPengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) **Aset Tidak Berwujud**

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset

tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Tak Berwujud;

b) Aset Lain-lain;

c) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud;

d) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya;

Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan berdasarkan karakteristik dan harapan entitas untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut. Masa manfaat aset tak berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut:

Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
Royalti	5 Tahun
Software	
a. Pengembangan Sendiri	5 Tahun
b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	5 Tahun
Lisensi	5 Tahun atau masa secara hukum (mana yang lebih pendek/*which ever is shorter*)
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 Tahun
Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

7) **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Belanja

Digunakan untuk mencatat utang belanja Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

b) Utang Jk. Pendek Lainnya.

Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan Pemerintah Daerah.

8) **Ekuitas**

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset pemerintah dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai piutang, koreksi nilai persediaan, koreksi nilai aset tetap, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

a) Ekuitas bertambah pada saat adanya:
   1) surplus-LO pada periode pelaporan;
   2) koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
   3) koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
   4) adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

b) Ekuitas berkurang pada saat adanya:
   1) defisit-LO pada periode pelaporan;
   2) koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
   3) koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
   4) adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

9) **Pendapatan**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b) Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan;
c) Pendapatan hasil Kerjasama;
d) Pendapatan hibah;
e) Pendapatan lain-lain,

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned;
b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

d) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

e) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

10) **Beban**

Beban disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi Berbasis Akrual *(full accrual accounting cycle)*. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui PA/KPA.

b) Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar nilai tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban Pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

d) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

e) Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan/atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi.

Pengukuran

Beban diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi.

11) **Perpajakan**

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Manggis I yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, UPTD Puskesmas Manggis I menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak: 13.905.197.3-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Manggis I Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.415.746.996,31 atau 104,76% dari anggaran sebesar Rp2.305.969.594,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.456.105.084,81. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.294.798.000,00	2.402.446.617,00	104,69%	2.444.369.669,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas	-	-	-	-
c.	Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-	-	-
d.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	11.171.594,00	13.300.379,31	119,06%	11.735.415,81
	Jumlah	**2.305.969.594,00**	**2.415.746.996,31**	**104,76%**	**2.456.105.084,81**

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.402.446.617,00 atau 104,69% dari anggaran sebesar Rp2.294.798.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.444.369.669,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.294.798.000,00		-	
2)	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum		156.552.500,00	-	172.586.000,00
3)	Pendapatan Jasa Layanan Pasien JKN				
	- Pendapatan Kapitasi		2.114.443.717,00	-	2.149.504.469,00
	- Pendapatan Non Kapitasi				
	- RITL		67.350.400,00	-	50.559.200,00
	- RJTL		64.100.000,00	-	71.720.000,00
	Jumlah	**2.294.798.000,00**	**2.402.446.617,00**	**104,69%**	**2.444.369.669,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Pendapatan Hibah

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Jumlah realisasi Pendapatan Usaha Lainnya berupa Pendapatan Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.300.379,31 atau 119,06% dari anggaran sebesar Rp11.171.594,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.735.415,81 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Jasa Giro	8.671.594,00	11.800.379,31	136,08%	10.235.415,81
2)	Sewa Rumah Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00
3)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.000.000,00	-		
	Jumlah	**11.171.594,00**	**13.300.379,31**	**119,06%**	**11.735.415,81**

4.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.394.272.876,00 atau 107,05% dari anggaran sebesar Rp1.302.429.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.297.986.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A.	**Sumber Dana APBD**	-	-	-	-
1)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN			-	-
B.	**Sumber Dana BLUD**	**1.277.429.000,00**	**1.370.657.122,00**	**107,30%**	**1.269.220.090,00**
1)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.269.269.000,00	1.362.497.122,00	107,35%	1.261.060.090,00
2)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00%	8.160.000,00
C.	**Sumber Dana BOK**	**25.000.000,00**	**23.615.754,00**	**94,46%**	**28.766.047,00**
1)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	25.000.000,00	23.615.754,00	94,46%	28.766.047,00
Jumlah		**1.302.429.000,00**	**1.394.272.876,00**	**107,05%**	**1.297.986.137,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.273.987.819,00 atau 89,05% dari anggaran Rp1.430.608.042,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.683.323.842,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Barang	828.832.400,00	734.969.869,00	88,68%	576.935.579,00
b.	Belanja Jasa	474.505.742,00	430.885.360,00	90,81%	843.906.654,00
c.	Belanja Pemeliharaan	112.269.900,00	108.132.590,00	96,31%	262.481.609,00
d.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	-	-	-
e.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-
f.	Sisa BOK Puskesmas 2023	-	-	-	-
Jumlah		**1.430.608.042,00**	**1.273.987.819,00**	**89,05%**	**1.683.323.842,00**

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan sumber dananya dapat dilihat pada rincian berikut.

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Sumber Dana BOK/APBN	320.474.500,00	298.209.580,00	93,05%	337.590.006,00
b.	Sumber Dana APBD	254.264.542,00	173.212.611,00	68,12%	300.374.245,00
c.	Sumber Dana BLUD	855.869.000,00	802.565.628,00	93,77%	1.045.359.591,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**1.430.608.042,00**	**1.273.987.819,00**	**89,05%**	**1.683.323.842,00**

Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	**Sumber Dana BOK/APBN**	**320.474.500,00**	**298.209.580,00**	**93,05%**	**337.590.006,00**
A	**Belanja Barang**	**320.474.500,00**	**298.209.580,00**	**93,05%**	**121.475.280,00**
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				106.502.780,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				14.972.500,00
	- Belanja barang dan jasa BOK	320.474.500,00	298.209.580,00	93,05%	
B	**Belanja Jasa**	-	-	-	**216.114.726,00**
	- Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transport				203.216.105,00
	- Belanja Jasa Pelayanan Non ASN				6.793.621,00
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				6.105.000,00
	- Sisa BOK Puskesmas 2023		-	-	-

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
2	**Sumber Dana APBD**	**254.264.542,00**	**173.212.611,00**	**68,12%**	**300.374.245,00**
A	**Belanja Barang**	**135.158.800,00**	**80.151.783,00**	**59,30%**	**48.802.200,00**
	- Belanja Bahan Cetak	795.000,00	536.026,00	67,42%	1.175.200,00
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	69.768.400,00	26.470.000,00	37,94%	24.865.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	-	22.762.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.017.000,00	952.497,00	93,66%	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.498.500,00	99,90%	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.418.800,00	32.748.510,00	79,07%	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.659.600,00	17.946.250,00	86,87%	-
B	**Belanja Jasa**	**119.105.742,00**	**93.060.828,00**	**78,13%**	**145.197.600,00**
	- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	75.675.000,00	81.225.000,00	107,33%	143.100.000,00
	- Belanja Tenaga Kebersihan	32.400.000,00	-	-	-
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	9.720.000,00	10.427.994,00	107,28%	-
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	582.552,00	625.704,00	107,41%	932.216
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	728.190,00	782.130,00	107,41%	1.165.384
C	**Belanja Pemeliharaan**	**-**	**-**	**0,00%**	**106.374.445**
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan			-	106.374.445
3	**Sumber Dana BLUD**	**855.869.000,00**	**802.565.628,00**	**93,77%**	**1.045.359.591,00**
A	**Belanja Barang**	**373.199.100,00**	**356.608.506,00**	**95,55%**	**406.658.099,00**
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	20.000.000,00	43.904.940,00	219,52%	50.997.429,00
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.224.500,00	41.500.022,00	100,67%	36.476.890,00
	- Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.329.600,00	976.800,00	41,93%	1.980.000,00
	- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.605.200,00	-	-	-
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.948.500,00	10.951.042,00	100,02%	7.679.000,00
	- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.000.000,00	11.998.500,00	99,99%	5.703.000,00
	- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	40.000.000,00	38.488.202,00	96,22%	47.961.848,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.732.400,00	9.000.921,00	83,87%	7.857.100,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.530.000,00	10.856.966,00	94,16%	16.480.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.400.000,00	5.295.810,00	71,57%	4.200.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.368.200,00	5.883.000,00	62,80%	8.281.800,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.018.200,00	7.218.564,00	65,51%	13.665.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
	- Belanja Obat-Obatan	110.000.000,00	109.937.089,00	99,94%	129.327.032,00
	- Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	63.049.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	48.330.000,00	47.250.400,00	97,77%	-
	- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.712.500,00	11.346.250,00	49,96%	-

B	**Belanja Jasa**	**355.400.000,00**	**337.824.532,00**	**95,05%**	**482.594.328,00**
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.500.000,00		0,00%	1.425.000,00
	- Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			-	-
	- Belanja Jasa Kalibrasi	20.000.000,00	19.724.700,00	98,62%	9.714.054,00
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	15.000.000,00	14.942.820,00	99,62%	16.031.175,00
	- Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	8.882.078,00	74,02%	8.887.238,00
	- Belanja Tagihan Air	8.000.000,00	4.230.000,00	52,88%	5.944.900,00
	- Belanja Tagihan Listrik	74.400.000,00	65.514.535,00	88,06%	65.221.548,00
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	8.500.000,00	70,83%	-
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.500.000,00	549.200,00	36,61%	-
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	158.000.000,00	189.169.199,00	119,73%	350.612.413,00
	- Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	3.000.000,00	1.332.000,00	44,40%	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	25.000.000,00	19.980.000,00	79,92%	19.758.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	15.000.000,00	-	-	-
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa. Acara, dan Panitia	5.000.000,00	-	-	-
C	**Belanja Pemeliharaan**	**112.269.900,00**	**108.132.590,00**	**96,31%**	**156.107.164,00**
1)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90%	4.995.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	12.000.000,00	9.455.000,00	78,79%	-
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%	26.850.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%	14.980.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	12.000.000,00	11.758.230,00	97,99%	14.721.264,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	5.000.000,00	4.989.450,00	99,79%	4.428.900,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	28.000.000,00	17.956.757,00	64,13%	39.732.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	8.500.000,00	8.453.153,00	99,45%	14.950.000,00
2)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	18.269.900,00	27.025.000,00	147,92%	25.450.000,00
3)	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	- Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	10.000.000,00
D	**Belanja Perjalanan Dinas**	**15.000.000,00**	-	-	-
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000,00		-	-
E	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	-	-	-	-
	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			-	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**1.430.608.042,00**	**1.273.987.819,00**	**89,05%**	**1.683.323.842,00**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Belanja Modal

Total realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.110.193.321,00 atau 97.09% dari anggaran sebesar Rp1.143.500.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp263.054.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.500.000,00	60.693.821,00	97,11%	183.298.200,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.081.000.000,00	1.049.499.500,00	97,09%	79.756.000,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
e.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		**1.143.500.000,00**	**1.110.193.321,00**	**97,09%**	**263.054.200,00**

Rincian Belanja Modal berdasarkan sumber dananya dapat dilihat pada rincian berikut.

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Sumber Dana BOK/APBN	-	-	-	
b.	Sumber Dana APBD	1.081.000.000,00	1.049.499.500,00	97,09%	79.756.000,00
c.	Sumber Dana BLUD	62.500.000,00	60.693.821,00	97,11%	183.298.200,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**1.143.500.000,00**	**1.110.193.321,00**	**97,09%**	**263.054.200,00**

Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.693.821,00 atau 97,11% dari anggaran sebesar Rp62.500.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp183.298.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	**Sumber Dana APBD**	-	-	-	-
1)	Belanja Modal Pengadaan Unit Komputer Lainnya	-	-	-	-
2)	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal	-	-	-	-
B	**Sumber Dana BLUD**	**62.500.000,00**	**60.693.821,00**	**97,11%**	**183.298.200,00**
1)	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	104.940.000,00
2)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	15.970.000,00
3)	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	27.490.000,00
4)	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	16.450.000,00
5)	Belanja Modal Alat Kesehatan umum	-	-	-	18.448.200,00
6)	Belanja Modal Mebel	21.840.000,00	7.798.860,00	35,71%	-
7)	Belanja Modal Alat Pendingin	-	14.030.400,00	-	-
8)	Belanja Modal Modal Alat Komunikasi Satelit	10.000.000,00	9.998.880,00	99,99%	-
9)	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	18.551.200,00	6.767.801,00	36,48%	-
10)	Belanja Modal Personal Computer	12.108.800,00	12.107.880,00	99,99%	-
11)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		9.990.000,00	-	-
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**62.500.000,00**	**60.693.821,00**	**97,11%**	**183.298.200,00**

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.049.454.500,00 atau 97,08% dari anggaran sebesar Rp1.081.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp79.756.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	**Sumber Dana APBD**	**1.081.000.000,00**	**1.049.499.500,00**	**97,09%**	**79.756.000,00**
1)	Belanja Modal Pagar	100.000.000,00	98.851.703,00	98,85%	79.756.000,00
2)	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	981.000.000,00	950.647.797,00	96,91%	-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan 0,00.

5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp358.442.472,19 dan Rp551.904.652,38.

5.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan

Jumlah Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp1.362.662.019,69) dan (Rp788.259.094,19) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025	2024
1)	Realisasi Pendapatan LRA	2.415.746.996,31	2.456.105.084,81
2)	Realisasi Belanja	(3.778.454.016,00)	(3.244.364.179,00)
	Jumlah	**(1.362.707.019,69)**	**(788.259.094,19)**

5.4 Pendapatan APBD/APBN

Jumlah Pendapatan APBD/APBN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.494.435.664,00 dan Rp594.796.914,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025	2024
A.	**Pendapatan APBD**	**1.222.712.111,00**	**380.130.245,00**
1)	Pendapatan Operasional		
	- Belanja Pegawai	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	173.212.611,00	300.374.245,00
2)	Pendapatan Investasi		
	- Belanja Modal	1.049.499.500,00	79.756.000,00
B.	**Pendapatan BOK/APBN**	**271.768.553,00**	**214.666.669,00**
1)	Pendapatan Operasional		
	- Tahap I	29.936.403,00	-
	- Tahap II	138.189.800,00	82.648.069,00
	- Tahap III	103.642.350,00	132.018.600,00
	Jumlah	**1.494.480.664,00**	**594.796.914,00**

5.5 Setoran ke Kas Daerah

Jumlah Setoran ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp490.216.116,50 dan Rp358.442.472,19.

6. Penjelasan Pos-Pos Neraca

6.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan APBD dan APBN/BOK. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp23.678824,00 dan Rp73.705.947,00.

	2025	2024
Kas di Bendahara Pengeluaran		
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan APBD	-	-
2) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan APBN/BOK	-	-
3) Kas di Bank	-	-
Bank BNI (No.Rek. 1590087810) a.n. 1050080BOKPKMMANGGISI	23.678.824,00	73.705.947,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	**23.678.824,00**	**73.705.947,00**

6.2 Kas pada BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD. Jumlah Kas pada BLUD UPTD Puskesmas Manggis I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp466.566.950,00 dan Rp284.736.525,19 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Kas pada BLUD		
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	-	-
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	-	-
3) Kas di Bank		
Bank BPD (No.Rek 0380105000060)		
a.n BLUD UPTD PUSKESMAS MANGGIS I	466.566.950,50	284.736.525,19
Jumlah Kas pada BLUD	**466.566.950,50**	**284.736.525,19**

6.3 Piutang Operasional BLUD

Piutang Operasional BLUD merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Manggis I. Jumlah Piutang Operasional BLUD bruto per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp10.662.300,00 dan Rp7.828.100,00

.

	2025	2024
Piutang Operasional BLUD		
1) Piutang KB (RJTP)	-	347.100,00
2) Piutang Persalinan (RITP)	-	3.194.200,00
3) Piutang Ambulance (RJTP)	-	2.681.300,00
4) Piutang KIA (RJTP)	-	277.100,00
5) Piutang Rawat Inap	-	994.200,00
6) Gula darah (RJTP)	-	334.200,00
7) Pelayanan RJTP	6.376.800,00	-
8) Pelayanan RITP	3.594.200,00	-
9) Pelayanan Promotif	691.300,00	-
Jumlah Piutang Operasional BLUD (Bruto)	**10.662.300,00**	**7.828.100,00**
Dikurangi: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(106.623,00)	(78.281,00)
Jumlah Piutang Operasional BLUD (Netto)	**10.555.677,00**	**7.749.819,00**

Berikut disajikan saldo piutang dan mutasi piutang tahun 2025:

Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2024	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Piutang JKN	7.828.100,00	10.662.300,00	7.828.100,00	10.662.300,00
Jumlah Bruto	**7.828.100,00**	**10.662.300,00**	**7.828.100,00**	**10.662.300,00**

Berikut disajikan saldo piutang dan mutasi piutang tahun 2024:

Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2023	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Piutang JKN	-	35.560.000,00	27.731.900,00	7.828.100,00
Jumlah Bruto	**-**	**35.560.000,00**	**27.731.900,00**	**7.828.100,00**

Penyisihan kerugian piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Kualitas Piutang			
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan
1 Piutang JKN	10.662.300,00	-	-	-
Jumlah Bruto	10.662.300,00	-	-	-
% Penyisihan	1,0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	106.623,00	-	-	-

Penyisihan kerugian piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Kualitas Piutang			
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan
1 Piutang JKN	7.828.100,00	-	-	-
Jumlah Bruto	7.828.100,00	-	-	-
% Penyisihan	1,0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	78.281,00	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp106.623,00 dan Rp78.281,00 *(lihat catatan no. 7.2e)*

Perubahan Penyisihan Kerugian Piutang sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	78.281,00	28.550,00
Pembalikan Penyisihan Piutang	(78.281,00)	(28.550,00)
Penyisihan Tahun Berjalan	106.623,00	78.281,00
Saldo Akhir Tahun	**106.623,00**	**78.281,00**

6.4 Persediaan BLUD

Persediaan BLUD merupakan persediaan barang/bahan pakai habis UPTD Puskesmas Manggis I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp440.027.762,43 dan Rp423.164.216,80 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
Barang Pakai Habis		
- Alat Tulis Kantor	181.100,00	1.811.600,00
- Kertas dan Cover	2.174.200,00	11.209.500,00
- Barang Kuasi	-	-
- Benda Pos	-	260.000,00
- Bahan Komputer	1.202.800,00	1.808.800,00
- Perabot Kantor	328.900,00	4.773.900,00
- Alat Listrik	647.000,00	7.721.000,00
- Obat-Obatan	435.493.762,43	395.579.416,80
Jumlah Persediaan	**440.027.762,43**	**423.164.216,80**

Berikut disajikan saldo dan mutasi persediaan tahun 2025.

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
- Alat Tulis Kantor	1.811.600,00	9.000.921,00	10.631.421,00	181.100,00
- Kertas dan Cover	11.209.500,00	11.809.463,00	20.844.763,00	2.174.200,00
- Bahan Cetak	-	7.330.336,00	7.330.336,00	-
- Barang Kuasi	-	-	-	-
- Benda Pos	260.000,00	2.000.000,00	2.260.000,00	-
- Bahan Komputer	1.808.800,00	5.883.000,00	6.489.000,00	1.202.800,00
- Perabot Kantor	4.773.900,00	10.951.042,00	15.396.042,00	328.900,00
- Alat Listrik	7.721.000,00	7.218.564,00	14.292.564,00	647.000,00
- Bahan Bakar dan Pelumas	-	67.970.022,00	67.970.022,00	-
- Obat-Obatan	395.579.416,80	109.937.089,00	70.022.743,37	435.493.762,43
Jumlah Bruto	**423.164.216,80**	**232.100.437,00**	**215.236.891,37**	**440.027.762,43**

Berikut disajikan saldo dan mutasi persediaan tahun 2024.

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
- Alat Tulis Kantor	3.793.050,00	7.857.100,00	9.838.550,00	1.811.600,00
- Kertas dan Cover	1.133.600,00	16.480.000,00	6.404.100,00	11.209.500,00
- Bahan Cetak	-	5.375.200,00	5.375.200,00	-
- Barang Kuasi	892.000,00		892.000,00	-
- Benda Pos	630.000,00	2.000.000,00	2.370.000,00	260.000,00
- Bahan Komputer	2.611.800,00	8.281.800,00	9.084.800,00	1.808.800,00
- Perabot Kantor	8.367.700,00	7.679.000,00	11.272.800,00	4.773.900,00
- Alat Listrik	2.567.000,00	13.665.000,00	8.511.000,00	7.721.000,00
- Bahan Bakar dan Pelumas	-	61.341.890,00	61.341.890,00	-
- Obat-Obatan	399.066.078,52	893.704.775,75	897.191.437,47	395.579.416,80
Jumlah Bruto	**419.061.228,52**	**1.016.384.765,75**	**1.012.281.777,47**	**423.164.216,80**

6.5 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.650.321.656,41 dan Rp4.795.250.464,41 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Tanah	227.140.000,00	227.140.000,00
2) Peralatan dan Mesin	4.452.848.590,92	4.182.916.112,92
3) Gedung dan Bangunan	8.788.405.312,41	7.738.905.812,41
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.913.035,00	73.913.035,00
5) Aset Tetap Lainya	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah Harga Perolehan	**13.542.306.938,33**	**12.222.874.960,33**
Akumulasi Penyusutan	(7.891.994.281,92)	(7.427.624.495,92)
Nilai Buku	**5.650.312.656,41**	**4.795.250.464,41**

Rincian mutasi Aset Tetap tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025			
	Saldo Awal 1 Jan 2025	Mutasi		Saldo 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
1) Tanah	227.140.000,00	-	-	227.140.000,00
2) Peralatan dan Mesin	4.182.916.112,92	271.146.478,00	1.214.000,00	4.452.848.590,92
3) Gedung & Bangunan	7.738.905.812,41	1.049.499.500,00	-	8.788.405.312,41
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.913.035,00	-	-	73.913.035,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**12.222.874.960,33**	**1.320.645.978,00**	**1.214.000,00**	**13.542.306.938,33**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	3.859.980.541,92	150.066.197,00	-	4.010.046.738,92
3) Gedung dan Bangunan	3.513.909.578,00	309.283.001,00	-	3.823.192.579,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.734.376,00	5.020.588,00	-	58.754.964,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**7.427.624.495,92**	**464.369.786,00**	**-**	**7.891.994.281,92**
Nilai Buku				
1) Tanah	227.140.000,00			227.140.000,00
2) Peralatan dan Mesin	322.935.571,00			442.801.852,00
3) Gedung dan Bangunan	4.224.996.234,41			4.965.212.733,41
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.178.659,00			15.158.071,00
5) Aset Tetap Lainnya	-			-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	**4.795.250.464,41**			**5.650.312.656,41**

Rincian mutasi Aset Tetap tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024			
	Saldo Awal 1 Jan 2024	Mutasi		Saldo 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
1) Tanah	227.140.000,00	-	-	227.140.000,00
2) Peralatan dan Mesin	4.002.735.912,92	196.098.200,00	15.918.000,00	4.182.916.112,92
3) Gedung & Bangunan	7.659.149.812,41	79.756.000,00	-	7.738.905.812,41
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.913.035,00	-	-	73.913.035,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**11.962.938.760,33**	**275.854.200,00**	**15.918.000,00**	**12.222.874.960,33**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	3.704.969.554,72	170.928.987,20	15.918.000,00	3.859.980.541,92
3) Gedung dan Bangunan	3.210.188.083,00	303.721.495,00	-	3.513.909.578,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	48.713.788,00	5.020.588,00	-	53.734.376,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**6.963.871.425,72**	**479.671.070,20**	**15.918.000,00**	**7.427.624.495,92**

Nilai Buku			
1)	Tanah	227.140.000,00	227.140.000,00
2)	Peralatan dan Mesin	297.766.358,20	322.935.571,00
3)	Gedung dan Bangunan	4.448.961.729,41	4.224.996.234,41
4)	Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.199.247,00	20.178.659,00
5)	Aset Tetap Lainnya	-	-
6)	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah		**4.999.067.334,61**	**4.795.250.464,41**

Rincian Tanah lokasi UPTD Puskesmas Manggis I yakni sebagai berikut.

No	Uraian	Luas (M2)	Lokasi	Bukti Penguasaan/ Hak Pakai	Nilai
1)	UPTD Puskesmas Manggis I Induk	2.770	Jl. Raya Ulakan	Hak Pakai SK. 2619/1991 tanggal 31 Januari 1991	227.140.000,00

Selama periode berjalan tahun 2024 terdapat penambahan dan pengurangan aset tetap dengan uraian sebagai berikut.

	2025	2024
1) Peralatan dan Mesin		
Saldo Awal	**4.182.916.112,92**	**4.002.735.912,92**
Penambahan:		
- Belanja Modal	60.693.821,00	183.298.200,00
- Mutasi Antar Perangkat Daerah		12.800.000,00
- Mutasi Antar Perangkat Daerah (B.Midical Sistem TCW 3000 AC Vaccine Refrigator and Accessories	130.241.667,00	-
- Mutasi Antar Perangkat Daerah (FORTACEDX K100 Infinitysemi Automatic Chemistry Analyzer (Alpha)	71.950.000,00	-
- Mutasi Antar Perangkat Daerah (Tensimeter dan Stetoscope)	8.260.990,00	-
Jumlah Penambahan Harga Perolehan Peralatan dan Mesin	**271.146.478,00**	**196.098.200,00**
Pengurangan:		
- Reklas ke Aset Ekstrakomptabel atas dibawah nilai kapitalisasi	1.214.000,00	-
- Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Bermotor	-	2.600.000,00
- Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Bermotor	-	13.318.000,00
Jumlah Pengurangan Harga Perolehan Peralatan dan Mesin	**1.214.000,00**	**15.918.000,00**
Saldo Akhir Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin	**4.452.848.590,92**	**4.182.916.112,92**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	**3.859.980.541,92**	**3.704.969.554,72**
Penambahan Akumulasi Penyusutan		
- Beban Penyusutan	150.066.197,00	170.928.987,20
Jumlah Penambahan	**150.066.197,00**	**170.928.987,20**
Pengurangan		
- Penghapusan Aset Tetap	-	15.918.000,00
Jumlah Pengurangan	-	15.918.000,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**4.010.046.738,92**	**3.859.980.541,92**

2) Gedung dan Bangunan	2025	2024
Saldo Awal	**7.738.905.812,41**	**7.659.149.812,41**
Penambahan:		
- Belanja Modal	1.049.499.500,00	79.756.000,00
Jumlah Penambahan Harga Perolehan Peralatan dan Mesin	**1.049.499.500,00**	**79.756.000,00**
Pengurangan:		
- Reklas ke Aset Ekstrakomptabel atas Aset Mutasi Antar Perangkat Daerah	-	-
Jumlah Pengurangan Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin	-	-
Saldo Akhir Biaya Perolehan Gedung dan Bangunan	**8.788.405.312,41**	**7.738.905.812,41**
	2025	**2024**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	**3.513.909.578,00**	**3.210.188.083,00**
Penambahan Akumulasi Penyusutan		
- Beban Penyusutan	309.283.001,00	303.721.495,00
Jumlah Penambahan	**309.283.001,00**	**303.721.495,00**
Pengurangan		
- Reklas ke Aset Lainnya		
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**3.823.192.579,00**	**3.513.909.578,00**

	2025	2024
3) Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Saldo Awal	**73.913.035,00**	**73.913.035,00**
Penambahan:		
- Belanja Modal	-	-
Jumlah Penambahan Harga Perolehan Peralatan dan Mesin	-	-
Pengurangan:		
- Reklas ke Aset Ekstrakomptabel atas Aset Mutasi Antar Perangkat Daerah	-	-
Jumlah Pengurangan Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin	-	-
Saldo Akhir Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin	**73.913.035,00**	**73.913.035,00**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	**53.734.376,00**	**48.713.788,00**
Penambahan Akumulasi Penyusutan		
- Beban Penyusutan	5.020.588,00	5.020.588,00
Jumlah Penambahan	**5.020.588,00**	**5.020.588,00**
Pengurangan		
- Penghapusan Aset Tetap	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**58.754.964,00**	**53.734.376,00**

Selama periode berjalan tahun 2025 Perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut.

	2025	2024
1) Saldo Awal Tahun	7.427.624.496,12	6.963.871.425,92
2) Koreksi Saldo Awal	-	-
3) Penyusutan Tahun Berjalan	464.369.786,00	479.671.070,20
4) Koreksi Penyusutan Aset Tetap	-	-
5) Penghapusan Aset Tetap	-	(15.918.000,00)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**7.891.994.282,12**	**7.427.624.496,12**

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp464.369.786,00 dan Rp479.671.070,00 *(lihat catatan no.7. 2c)*.

6.6 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya UPTD Puskesmas Manggis I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp8.255.068,00 dan Rp8.255.068,00 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Aset Tidak Berwujud	-	-
2) Aset Lainnya (Rusak Berat)	339.205.182,08	339.205.182,08
Jumlah Harga Perolehan	**339.205.182,08**	**339.205.182,08**
Akumulasi Penyusutan	(330.950.114,08)	(330.950.114,08)
Nilai Buku	**8.255.068,00**	**8.255.068,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025			
	Saldo Awal 01 Jan 2025	Mutasi		Saldo 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	-			-
2) Aset Lainnya (Rusak Berat)	339.205.182,08			339.205.182,08
Jumlah	**339.205.182,08**	-	-	**339.205.182,08**
Akumulasi Penyusutan				
1) Aset Tidak Berwujud	-			-
2) Aset Lainnya (Rusak Berat)	330.950.114,08			330.950.114,08
Jumlah	**330.950.114,08**	-	-	**330.950.114,08**
Nilai Buku				
1) Aset Tidak Berwujud	-			-
2) Aset Lainnya (Rusak Berat)	8.255.068,00			8.255.068,00
Jumlah	**8.255.068,00**			**8.255.068,00**

6.7 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga UPTD Puskesmas Manggis I per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp29.658,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Perhitungan Pihak Ketiga		
- Jasa Giro Rek BOK Bulan Desember	29.658,00	-
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga	**29.658,00**	-

6.8 Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar UPTD Puskesmas Manggis I per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp135.067.646,00 dan Rp134.769.257,00 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
- Makmin Petugas Jaga	-	-
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	127.347.038,00	109.955.809,00
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN	7.720.608,00	24.813.448,00
Jumlah Utang Belanja	**135.067.646,00**	**134.769.257,00**

6.9 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya UPTD Puskesmas Manggis I per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.10 Ekuitas

Jumlah Ekuitas UPTD Puskesmas Manggis I per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.464.299.634,34 dan Rp5.458.092.783,40 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
1) Ekuitas Awal	5.458.092.783,40	5.729.978.252,66
2) Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(161.511.801,63)	(1.133.375.473,86)
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.167.718.652,57	861.490.004,60
4) Ekuitas Akhir	**6.464.299.634,34**	**5.458.092.783,40**

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari Mutasi Persediaan antar Perangkat Daerah, mutasi Aset Tetap antar Perangkat Daerah, dan Setoran ke Kas Daerah (*lihat catatan no. 9.3*).

7. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

7.1 Pendapatan

Pendapatan UPTD Puskesmas Manggis I pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.913.016.860,31 dan Rp3.055.886.698,81 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.405.280.817,00	2.449.354.369,00
b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
c. Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-
d. Pendapatan Hibah	-	-
e. Pendapatan Lainnya	13.300.379,31	11.735.415,81
f. Pendapatan APBD/APBN	1.494.480.664,00	594.796.914,00
Jumlah Pendapatan	**3.913.061.860,31**	**3.055.886.698,81**

Rincian Pendapatan Operasional adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat UPTD Puskesmas Manggis I pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.405.280.817,00 dan Rp2.449.354.369,00 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Umum	171.882.500,00	172.586.000,00
Pendapatan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		-
- Kapitasi	2.114.443.717,00	2.149.504.469,00
- Non Kapitasi		
- RITL	70.184.600,00	55.543.900,00
- RJTL	48.770.000,00	71.720.000,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	**2.405.280.817,00**	**2.449.354.369,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan UPTD Puskesmas Manggis I pada Tahun 2025 dan 2024 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Pendapatan Hasil Kerjasama UPTD Puskesmas Manggis I pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah UPTD Puskesmas Manggis I pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya UPTD Puskesmas Manggis I pada Tahun 2025 dan 2024 masing -masing sebesar Rp13.300.379,31 dan Rp11.735.415,81 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
- Pendapatan Jasa Giro	11.800.379,31	10.235.415,81
- Sewa Rumah Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00
Jumlah Pendapatan Lainnya	**13.300.379,31**	**11.735.415,81**

f. Pendapatan APBD/APBN

Pendapatan APBD/APBN UPTD Puskesmas Manggis I pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.494.480.644,00 dan Rp594.796.914,00 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
Pendapatan Belanja Operasi		
- Pendapatan Belanja Pegawai	-	-
- Pendapatan Belanja Barang dan Jasa	173.212.611,00	300.374.245,00
Pendapatan Belanja Modal		
- Pedapatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-
- Pendapatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.049.499.500,00	79.756.000,00
Pendapatan BOK/APBN		
- Tahap I	29.936.403,00	-
- Tahap II	138.189.800,00	82.648.069,00
- Tahap III	103.642.350,00	132.018.600,00
Jumlah Pendapatan APBD/APBN	**1.494.480.664,00**	**594.796.914,00**

7.2 Beban

Beban UPTD Puskesmas Manggis I pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.651.802.161,36 dan Rp4.189.290.722,67 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Pegawai	1.411.664.105,00	1.300.644.835,00
b. Beban Barang dan Jasa	2.197.297.428,93	2.408.896.536,47
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	464.369.786,00	479.671.070,20
d. Beban Penyisihan Piutang	106.623,00	78.281,00
e. Beban Lain-lain	1.214.000,00	-
Jumlah Beban Operasional	**4.074.651.942,93**	**4.189.290.722,67**

Rincian Beban adalah sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai UPTD Puskesmas Manggis I pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.411.664.105,00 dan Rp1.300.644.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya		
1) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - APBD	-	-
2) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - BLUD	1.379.888.351,00	1.263.718.788,00
3) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - BOK	23.615.754,00	28.766.047,00
4) Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00
Jumlah Beban Pegawai	**1.411.664.105,00**	**1.300.644.835,00**

b. Beban Barang & Jasa

Beban Barang dan Jasa UPTD Puskesmas Manggis I Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.197.297.428,93 dan Rp2.408.896.536,47,00 terdiri dari:

	2025	2024
Beban Barang		
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.631.421,00	9.838.550,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.844.763,00	6.404.100,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.330.336,00	5.375.200,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.260.000,00	2.370.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.489.000,00	9.084.800,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Barang Kuasi	-	892.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.292.564,00	8.511.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lain	-	11.000.000,00
- Beban Bahan-Bahan Kimia	43.904.940,00	50.997.429,00
- Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	67.970.022,00	61.341.890,00
- Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	976.800,00	1.980.000,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	15.396.042,00	11.272.800,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.998.500,00	5.703.000,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	38.488.202,00	47.961.848,00
- Beban Obat-Obatan-Obat	70.022.743,36	897.191.437,47
- Beban Makanan dan Minuman APBN/BOK	17.946.250,00	121.475.280,00
- Beban Makanan dan Minuman BLUD	79.998.910,00	60.259.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	22.762.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.346.250,00	-
- Belanja Obat-Obatan-Obat APBD	957.265.995,57	
- Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	298.209.580,00	-
Jumlah Beban Barang	**1.675.372.318,93**	**1.334.420.334,47**

	2025	2024
Beban Jasa Kantor		
- Beban Jasa Tenaga Kesehatan	81.225.000,00	143.100.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	625.704,00	932.216,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	782.130,00	1.165.384,00
- Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	1.332.000,00	-
- Beban Jasa Tenaga Laboratorium	-	1.425.000,00
- Beban Jasa Kalibrasi	19.724.700,00	9.714.054,00
- Beban Jasa Pengolahan Sampah	14.942.820,00	16.031.175,00
- Beban Tagihan Telepon	8.882.078,00	8.887.238,00
- Beban Tagihan Air	4.230.000,00	5.944.900,00
- Beban Tagihan Listrik	65.514.535,00	65.221.548,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.500.000,00	6.105.000,00
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	549.200,00	-
- Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	182.504.353,00	325.493.973,00
- Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	5.000.000,00	5.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	19.980.000,00	19.758.000,00
- Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-	-
- Beban Jasa Transport	-	203.216.105,00
Jumlah Beban Jasa Kantor	**413.792.520,00**	**811.994.593,00**

	2025	2024
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
- Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	4.995.000,00	4.995.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	9.455.000,00	-
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.000.000,00	26.850.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	14.980.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	11.758.230,00	14.721.264,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	4.989.450,00	4.428.900,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.956.757,00	39.732.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.453.153,00	14.950.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	27.025.000,00	131.824.445,00
- Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
- Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	**108.132.590,00**	**262.481.609,00**

Beban Perjalanan Dinas		
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	-	-
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
- Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**2.197.297.428,93**	**2.408.896.536,47**

c. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp106.623,00 dan Rp78.281,00.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi UPTD Puskesmas Manggis I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp464.369.786,00 dan Rp479.671.070,20 terdiri dari:

	2025	2024
Beban Penyusutan		
- Peralatan dan Mesin	150.066.197,00	170.928.987,20
- Gedung dan Bangunan	309.283.001,00	303.721.495,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.020.588,00	5.020.588,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**464.369.786,00**	**479.671.070,20**

e. Beban Lain-lain

Beban Lain lain UPTD Puskesmas Manggis I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.214.000,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

	2025	2024
Beban Lain-lain		
- Beban Lain - lain Pengadaan di Bawah Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	1.214.000,00	-
Jumlah Beban Lain - lain	**1.214.000,00**	-

7.3 Kegiatan Non Operasional

Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu masing-masing sebesar Rp78.281,00 dan Rp28.550,00.

	2025	2024
a. Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-
b. (Kerugian) Penurunan Nilai Aset	-	-
c. Surplus/Defisit dari Keg. Non Op. Lainnya	78.281,00	28.550,00
d. Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	**78.281,00**	**28.550,00**

8. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

8.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	2025	2024
a. Arus Masuk Kas		
Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar terdiri dari:		
1) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.402.446.617,00	2.444.369.669,00
2) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
3) Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-
4) Pendapatan Hibah	-	-
5) Pendapatan Usaha Lainnya	13.300.379,31	11.735.415,81
6) Pendapatan APBD/APBN	1.494.480.664,00	594.796.914,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**3.910.227.660,31**	**3.050.901.998,81**

	2025	2024
b. Arus Keluar Kas		
Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:		
1) Belanja Pegawai	1.394.272.876,00	1.297.986.137,00
2) Belanja Barang dan Jasa		
- Belanja Barang	734.969.869,00	576.935.579,00
- Belanja Jasa	430.885.360,00	843.906.654,00
- Belanja Pemeliharaan	108.132.590,00	262.481.609,00
- Belanja Perjalanan Dinas	-	-
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**2.668.260.695,00**	**2.981.309.979,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**1.241.966.965,31**	**69.592.019,81**

8.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2025	2024
a. Arus Masuk Kas		
Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:		
1) Penerimaan Penjualan atas Tanah	-	-
2) Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
3) Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
4) Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
b. Arus Keluar Kas		
Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:		
1) Perolehan Tanah	-	-
2) Perolehan Peralatan dan Mesin	60.693.821,00	183.298.200,00
3) Perolehan Gedung dan Bangunan	1.049.499.500,00	79.756.000,00
4) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5) Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**1.110.193.321,00**	**263.054.200,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(1.110.193.321,00)**	**(263.054.200,00)**

8.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2025	2024
a. Arus Masuk Kas		
Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:		
1) Penerimaan Pinjaman	-	-
2) Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
b. Arus Keluar Kas		
Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:		
1) Setoran Ke Kas Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-

8.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2025	2024
a. Arus Masuk Kas		
Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:		
1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	144.999.713,24	144.447.204,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**144.999.713,24**	**144.447.204,00**

	2025	2024
b. Arus Keluar Kas		
Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:		
1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	144.970.055,24	144.447.204,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**144.970.055,24**	**144.447.204,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**29.658,00**	-

8.5 Saldo Kas	2025	2024
1) Saldo Awal Kas	358.442.472,19	551.904.652,38
2) Kenaikan/Penurunan kas Per 31 Desember	131.803.302,31	(193.462.180,19)
3) Saldo Akhir Kas	**490.245.774,50**	**358.442.472,19**

9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

9.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 masing-masing sebesar Rp5.458.092.783,40 dan Rp5.729.978.252,66.

9.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp796.923.193,94 dan (Rp1.133.375.473,86) terdiri dari:

	2025	2024
1) Pendapatan-LO	3.913.140.141,31	3.055.915.248,81
2) Beban - LO	(4.074.651.942,93)	(4.189.290.722,67)
Jumlah Surplus (Defisit)	**(161.511.801,63)**	**(1.133.375.473,86)**

9.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp861.490.004,60 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Koreksi Saldo Awal Persediaan Obat-Obatan	-	84.323.860,85
2) Koreksi Mutasi Persediaan Antar Perangkat Daerah		
- Belanja Obat-Obatan-Obat	957.265.995,57	764.377.743,75
Jumlah Koreksi Mutasi Persediaan Antar Perangkat Daerah	**957.265.995,57**	**848.701.604,60**
3) Koreksi Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah - Peralatan dan Mesin		
- Fortacedx K100 Infinitysemi Automatic Chemistry Analyzer (Alpha)	71.950.000,00	
- B. Midical Sistem TCW 3000 AC Vaccine Refrigator and Accessories	130.241.667,00	
- Tensimeter	4.800.520,00	
- Stetoscope	3.460.470,00	
- Pulse Oxymeter UGD		12.800.000,00
Jumlah Koreksi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah - Peralatan dan Mesin	**210.452.657,00**	**12.800.000,00**
4) Koreksi Saldo Awal Piutang JKN	-	(11.600,00)
5) Setoran ke Kas Daerah		
- Setoran ke Kas Daerah	-	
Jumlah Koreksi Setoran ke Kas Daerah	-	**(11.600,00)**
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	**1.167.718.652,57**	**861.490.004,60**

9.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.464.299.634,34 dan Rp5.458.092.783,40.

Kantor Akuntan Publik
I GEDE OKA & REKAN
Registered Public Accountants
Izin Usaha KAP: KMK No. 131/MK/SK/2025

Laporan No.: 00042/ML/KAP.IGOR/III/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Manggis I
Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Manggis I untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini Wajar yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00042/2.1274/AU.5/11/0463-3/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen UPTD Puskesmas Manggis I bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otori sasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang. Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi UPTD Puskesmas Manggis I merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan UPTD Puskesmas Manggis I terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami tidak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Manggis I untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Namun demikian, kami menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Manggis I untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok temuan:

1. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. UPTD Puskesmas Manggis I belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pencatatan/penatausahaan dan pengendalian persediaan belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib
4. Terdapat persediaan Obat dan BMHP kedaluwarsa sebanyak 290 jenis senilai Rp96.915.895 belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan dari laporan keuangan.
5. Pencatatan/Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib.
6. Terdapat Bangunan UPTD Puskesmas Manggis I yang dibangun diatas Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah.
7. Terdapat aset lainnya senilai Rp339.205.182,08 yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan.
8. Dokumen RBA dan DPA UPTD Puskesmas Manggis I tahun anggaran 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.

NRAP: AP. 0463

Badung, 25 Maret 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Manggis I Tahun 2025 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022, UPTD Puskesmas Manggis I ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

Sebagai BLUD UPTD Puskesmas Manggis I diberikan fleksibilitas untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya guna membiayai kegiatan operasionalnya. Pemeriksaan terhadap dokumen Puskesmas, diketahui bahwa UPTD Puskesmas Manggis I belum sepenuhnya memiliki ketentuan yang diwajibkan sebagai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Ket
1	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 4	Tidak Ada	
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 22	Tidak Ada	
3	Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin	Pasal 24 ayat (1)	Ada	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023
4	Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 38	Ada	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022
5	Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 41	Ada	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022
6	Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 43	Ada	Peraturan Bupati Karangasem

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Ket
				Nomor 49 Tahun 2022
7	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 64 ayat (3)	Tidak Ada	
8	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 73	Tidak Ada	
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 77 ayat (1)	Tidak Ada	
10	Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 83 ayat (6)	Ada	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11	Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 85 ayat (2)	Tidak Ada	
12	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 87 ayat (5)	Tidak Ada	
13	Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah	Pasal 91 ayat (6)	Tidak Ada	
14	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 94	Tidak Ada	
15	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 96	Tidak Ada	
16	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 99 ayat (5)	Tidak Ada	

Permasalahan tersebut belum sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa:

a) Pasal 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b) Pasal 22, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Pembina dan Pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c) Pasal 24 ayat (1), Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
d) Pasal 38, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
e) Pasal 41, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
f) Pasal 43, Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
g) Pasal 64 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
h) Pasal 73, Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
i) Pasal 77 ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
j) Pasal 83 ayat (6), Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k) Pasal 85 ayat (2), Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
l) Pasal 87 ayat (5), Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
m)Pasal 91 ayat (6), Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
n) Pasal 94, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
o) Pasal 96, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
p) Pasal 99 ayat (5), BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Kepala UPTD Puskesmas Manggis I melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk melengkapi produk hukum dalam rangka pelaksanaan BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

2. UPTD Puskesmas Manggis I belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu bentuk fleksibilitas yang dimiliki Badan Layanan Umum Daerah adalah pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan layanan. Hasil pemeriksaan pada Puskesmas diketahui belum memiliki Peraturan Pemimpin BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan:

a. Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

b. Lampiran I angka 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD dilaksanakan berdasarkan peraturan pimpinan BLU/BLUD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan UPTD Puskesmas Manggis I sebagai BLUD belum sepenuhnya dapat menerapkan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan UPTD Puskesmas Manggis I menyusun Peraturan Pemimpin BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum UPTD Puskesmas Manggis I.

3. Pencatatan/penatausahaan dan pengendalian persediaan belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan persediaan di lingkungan UPTD Puskesmas Manggis I ditemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan logistik, yaitu pengurus barang tidak mencatat mutasi masuk dan keluar barang persediaan logistik. Pencatatan yang dilakukan hanya berupa saldo akhir persediaan berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2025, tanpa didukung oleh catatan rinci terkait transaksi mutasi selama periode berjalan. Pencatatan persediaan logistik juga tidak menggunakan sistem persediaan maupun kartu stok sehingga menyulitkan bagian persediaan dalam melakukan mutasi dan stock opname persediaan.

Hal tersebut menyebabkan bagian persediaan tidak bisa membuat laporan persediaan terkait pemasukan, penggunaan persediaan, dan saldo akhir persediaan secara *real time.*

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Manggis I sebagai berikut meningkatkan atau melakukan pengadaan sistem informasi yang dimiliki puskesmas, membuat kartu stok dan mutase secara real time, serta melakukan *stock opname* secara berkala yang dilengkapi dengan Berita Acara.

4. Terdapat persediaan Obat dan BMHP kedaluwarsa sebanyak 290 jenis senilai Rp96.915.895 belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan dari laporan keuangan

Berdasarkan pemeriksaan fisik persediaan persediaan tertanggal 07 Maret 2025 diketahui terdapat persediaan yang kedaluwarsa. Persediaan kedaluwarsa tersebut terdiri dari persediaan obat-obatan dan bahan material habis pakai (BMHP). Rincian persediaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Nama Persediaan	Jumlah	Satuan	ED	Total Harga (Rp)
1.	Norelut	60	Tablet	Jan-20	105.600
2.	Stelazin 5 mg	2400	Tablet	Feb-20	645.600
3.	Vit K tablet	100	Tablet	Jan-20	68.600
4.	Metoclopramide 10 mg	200	Tablet	Nov-19	19.000
5.	Asam pipemidat	100	Tablet	Jan-20	140.000
6.	Obat malaria (DHP Frimal)	36	Tablet	Nov-19	77.760
7.	INH 100 mg	100	Tablet	Feb-20	28.200
8.	Vit K Injeksi 2 mg/ml	1255	Ampul	Feb-20	4.620.910
9.	Salbutamol nebulezer	60	Ampul	Feb-20	273.000
10.	Diazepam inj 5 ml	60	Ampul	Mar-20	104.100
11.	Carbamazepin	600	Tablet	Mar-20	138.000
12.	Klozapin 25 mg	1850	Tablet	Mar-20	2.073.850

No	Nama Persediaan	Jumlah	Satuan	ED	Total Harga (Rp)
13.	Cotrimoxazole 480 mg	2300	Tablet	Mar-20	287.500
14.	FDC Anak	2	Paket	Mar-20	465.036
15.	Diazepam inj 5 ml	15	Ampul	Apr-20	26.025
16.	FDC Kat I	1	Paket	Apr-20	389.344
17.	MgSO4 40 %	137	Botol	Nov-20	520.052
18.	Iodium (betagin kumur)	9	Botol	Jun-19	116.055
19.	Paracetamol infus	2	Botol	May-20	23.220
20.	Albendazol sirup	179	Botol	Oct-20	716.000
21.	PP Test	60	Pcs	May-20	118.090
22.	Metronidazole 250 mg	100	Tablet	May-20	9.400
23.	Epineprin inj	45	Ampul	Sep-20	63.360
24.	Tetracyclin 500 mg	100	Kapsul	May-20	31.000
25.	Thiamfenicol 500 mg	100	Tablet	May-20	122.000
26.	HCT	300	Tablet	Agt-2020	46.500
27.	Dulcolax	180	Tablet	Agt-2020	57.420
28.	Ketorolac inj	40	Ampul	Nov-20	41.800
29.	Carbamazepin	100	Tablet	Apr-20	24.500
30.	Chlorpromazine 100 mg	300	Tablet	Jul-20	44.100
31.	Chlorpromazine 100 mg	700	Tablet	Agt 2020	102.900
32.	Amoxicillin 250 mg	8000	Tablet	Apr-20	1.472.000
33.	Gentamisin inj	118	Vial	Oct-20	414.062
34.	Paracetamol drops	7	Botol	Dec-20	46.543
35.	Metronidazol infus	8	Botol	Jul-20	64.880
36.	Artesunat inj	6	Ampul	Jun-20	202.752
37.	Iodine test	8	Pcs	Apr-20	-
38.	Jelly USG	1	Botol	Dec-20	13.584
39.	Methylergometrin inj	702	Ampul	Nov-20	2.177.604
40.	Primaquin	70	Tablet	May-20	15.680
41.	Retinol 200.000 IU	300	Tablet	Apr-20	155.100
42.	Tabung vacutainer merah	200	Pcs	Oct-20	276.800
43.	Wing nedle	10	Pcs	Jan-20	14.560
44.	Fenobarbital inj	5	Ampul	May-20	9.285
45.	Digoxin 0.25 mg	300	Tablet	Nov-20	31.200
46.	Doxicillin 100 mg	100	Tablet	May-20	26.400
47.	Dimenhidrinat 50 mg	100	Tablet	Apr-20	9.900
48.	INH 300 mg	100	Tablet	Agt 2020	28.200
49.	Tabung vacutainer ungu	300	Pcs		507.300
50.	PTU 100 mg	100	Tablet		43.400
51.	Oksitoksin inj	436	Ampul	May-20	519.276
52.	Occo	3	Botol	Apr-20	435.600
53.	Acyclovir 200 mg	1000	tablet	Jan-21	236.000
54.	Aqua PI	15	Fls	Feb-21	42.900
55.	Besi II Sulfat tablet	33300	tablet	Feb-21	11.788.200
56.	Infuset anak	50	pcs		179.375
57.	Jelly USG	1	botol	Feb-21	13.584
58.	FDC Anak	1	paket	Mar-21	232.518
59.	Fenol gliserol	24	botol	Mar-21	62.160

BUSA

No	Nama Persediaan	Jumlah	Satuan	ED	Total Harga (Rp)
60.	Fit K Tablet	100	tablet	Mar-21	71.000
61.	Glukosa infus 10% 500 ml	15	botol		112.500
62.	KY Jelly	5	botol	Mar-21	152.745
63.	Paracetamol suppo	24	suppo	Apr-21	377.150
64.	Stick AU Benececk	125	kotak	Jul-21	765.250
65.	Domperidon tablet	300	tablet	Apr-21	27.300
66.	Sefadroksil 250 mg	2000	tablet	Apr-21	1.380.000
67.	Salep 2-4	10	pot	May-21	26.210
68.	Besi II Sulfat tablet	17200	tablet	Jul-21	6.020.000
69.	Metronidazole 250 mg	100	tablet	May-21	-
70.	Salbutamol nebulizer	128	Fls	Jul-21	582.400
71.	Sefadroksil sirup	130	botol	Jul-21	510.380
72.	Eugenol	1	botol	May-21	18.824
73.	Ibuprofen syrup	55	botol	May-21	149.655
74.	Reagen ZN	1	botol	Jun-21	257.000
75.	SD Bioline HIV	50	kotak	May-21	598.750
76.	Sianocobalamin inj	91	ampul	Jul-21	100.464
77.	Ranitidine inj	100	ampul	Jul-21	115.500
78.	Abbocath " 22 "	300	pcs	Jun-21	1.168.500
79.	Mineral mix	24	sachet	Jul-21	70.080
80.	Fit K Tablet	300	tablet	Jul-21	213.000
81.	Vit A 200.000 IU merah	500	tablet	May-21	276.000
82.	Neo diaform	50	tablet	Sep-21	6.800
83.	Flufenazin inj	10	ampul	Sep-21	598.000
84.	Atropin inj	20	ampul	Sep-21	32.780
85.	Mgso4 20%	10	botol	Agt 2021	33.280
86.	Oxytetracylin salep mata	1039	tube	Oct-21	2.597.500
87.	Diazepam inj	120	ampul	Oct-21	208.200
88.	Albendazole tablet 400 mg	200	tablet	Sep-21	80.600
89.	Sianocobalamin inj	88	ampul	Oct-21	97.152
90.	Lidocain comp inj	60	ampul	Oct-21	116.220
91.	Ondansentron inj	30	ampul	Nov-21	32.100
92.	Zink tablet	700	tablet	Dec-21	366.800
93.	Fenobarbital tablet	110	Tablet	Dec-21	204.270
94.	Tetracyclin	300	caps	Jan-22	93.000
95.	GARAM ORALIT	65	sachet	Jan-22	17.810
96.	POLYCARBOKSILAT SEMEN	1	botol	Jan-22	825.000
97.	CALS GLUCONAS	68	Fls	Jan-22	716.108
98.	DIFENHIDRAMIN	16	ampul	Jan-22	17.520
99.	BETAHISTIN	1100	tablet	Jan-22	121.000
100.	ERYTHROMYCIN 500 MG	100	tablet	Jan-22	75.000
101.	ETSA ASAM	1	botol	Jan-22	225.500
102.	FUROSEMIDE	400	tablet	Feb-22	32.800
103.	GRISEOFULVIN 125 MG	710	tablet	Feb 20-22	149.100
104.	ETYLCHLORIDA	4	botol	Feb-22	836.000

No	Nama Persediaan	Jumlah	Satuan	ED	Total Harga (Rp)
105.	REAGEN DREW	1	PAKE T	Jan-22	8.800.000
106.	SALBUTAMOL NEBULIZER	19	VIAL	Feb-22	86.450
107.	FENITOIN	314	caps	Feb-22	189.970
108.	ANTI HEMOROID	100	tablet	Mar-22	190.800
109.	HALLOPERIDOL 5 MG	600	tablet	Mar-22	33.600
110.	PREDNISON	800	tablet	Mar-22	58.400
111.	RIVANOL	10	botol	Mar-22	34.000
112.	GLUCOSA 5% 500 ML	30	botol	Apr-22	207.000
113.	DEXAMETHASON INJ	26	ampul	Apr-22	24.024
114.	DIFENHIDRAMIN	34	ampul	Apr-22	37.230
115.	PIRIDOXIN	1090	tablet	Apr-22	142.790
116.	COMPOSIT A2	1	botol	Apr-22	511.500
117.	COMPOSIT A3	1	botol	Apr-22	511.500
118.	FDC KAT 1	2	PAKE T	Jun-22	833.392
119.	IV 18	50	PCS	Mar-22	197.600
120.	BETAHISTIN	700	tablet	Jun-22	61.600
121.	COTRIMOXAZOL 480 MG	700	tablet	Jun-22	88.200
122.	AMOXICILLIN DS 250 MG	40	botol	Mei-22	145.120
123.	REAGEN ZN	1	PAKE T	Apr-22	228.000
124.	KHLORAMPHENICOL TT	4	botol	Mei-22	40.568
125.	ISDN	155	tablet	Mei-22	13.795
126.	ISONIAZID	100	tablet	Jun-22	28.200
127.	GARAM ORALIT	55	sachet	Agt-22	15.400
128.	HALLOPERIDOL 5 MG	1900	tablet	Agt-22	153.900
129.	OKSITETRACYCLIN SM	15	TUBE	Mei-22	52.500
130.	ZINC SIRUP	4	botol	Agt-22	12.684
131.	GARAM ORALIT	26	sachet	AGT 2022	7.280
132.	HCT	1420	tablet	Sep-22	220.100
133.	ACYCLOVIR 400 MG	300	tablet	Sep-22	121.200
134.	ALBENDAZOLE	100	tablet	Sep-22	38.000
135.	SERUM ABU	1	botol	Sep-22	517.132
136.	AMPICILLIN INJ	206	VIAL	Nov-22	1.696.822
137.	ANTI HEMOROID	60	SUPP	Nov-22	195.000
138.	MGSO4 40%	8	Fls	Des-22	30.368
139.	CLOZAPIN 25 MG	380	tablet	Des-22	182.020
140.	Diazepam rectal	5	supp	Jan-23	67.730
141.	Eugenol	1	botol		20.150
142.	Klozapin 25 mg	50	tablet	Jan-23	23.650
143.	Kotrimoxazol syr	50	botol	Dec-22	109.500
144.	MGSO4 20 %	6	Fls	Jan-23	21.480
145.	Glukosa 40 % steril	10	Fls	Jan-23	70.000
146.	Abbocath " 24 "	39	biji	Jan-23	151.905
147.	Acyclovir 400 mg	200	tablet	Feb-23	80.400

No	Nama Persediaan	Jumlah	Satuan	ED	Total Harga (Rp)
148.	Doxicillin tabl	100	tablet	Feb-23	27.500
149.	Epinepin ing	100	ampul	Feb-23	151.500
150.	Abbocath " 24 "	50	biji	Jan-23	194.750
151.	Methylergometrin inj	26	ampul	Feb-23	26.832
152.	Perhidrol	5	btl	Feb-23	18.480
153.	Reagen ZN	1	kotak	Feb-23	176.760
154.	Glukosa infus 5 % 500 ml	10	Fls	Feb-23	66.270
155.	Diazepam inj	20	ampul	Mar-23	30.900
156.	Jelly USG	7	btl	Mar-23	122.500
157.	Captopril 25 mg	1100	tablet	Apr-23	82.500
158.	Dimenhidrinat	100	tablet	Apr-23	11.200
159.	MgSO4 40 %	12	Fls	Apr-23	49.080
160.	Ondansentron inj	25	ampul	Apr-23	21.825
161.	Spironolactone 100 mg	200	tablet	Apr-23	106.000
162.	Abbocath " 18 "	15	biji	May-23	59.850
163.	Allopurinol 100 mg	1900	tablet	Jun-23	165.300
164.	Ranitidine tablet	160	tablet	Jun-23	13.600
165.	Ibupofen 400 mg	2600	tablet	Jun-23	520.000
166.	Phitomenadion inj 10 mg	15	ampul	Jun-23	51.750
167.	Mineral mix	24	sachet	Agt 2022	-
168.	Acyclovir 200 mg	300	tablet	Jul-23	201.600
169.	Amoxicillin DS 125 mg	204	botol	Jul-23	413.100
170.	Atropin inj	6	ampul	Jul-23	10.308
171.	Eugenol	1	botol	Jun-23	20.150
172.	Salbutamol 4 mg	1270	tablet	Jul-23	82.550
173.	Asam folat	57	tablet	Jul-23	3.192
174.	Sefadroksil DS	2	botol	Jul-23	16.650
175.	Allopurinol 100 mg	480	tablet	agt 2023	41.760
176.	Asam folat	1000	tablet	Sep-23	56.000
177.	Phitomenadion tablet	100	tablet	Sep-23	74.800
178.	Ranitidine tabl	1700	tablet	Sep-23	144.500
179.	Glucosa 10% 500 ml	2	botol	agt 2023	15.000
180.	Zink tablet	700	tablet	Oct-23	151.200
181.	Salbutamol 2 mg	300	tablet	Sep-23	25.800
182.	Allopurinol 100 mg	300	tablet	Oct-23	26.100
183.	MgSO4 40 %	2	botol	Oct-23	8.180
184.	Epinepin ing	50	ampul	Nov-23	75.750
185.	CPZ 100 mg	1200	tablet	Nov-23	602.400
186.	Stelazine 5 mg	400	tablet	Nov-23	114.800
187.	Methylergometrin inj	22	ampul	Nov-23	22.704
188.	MGSO4 20 %	14	botol	Nov-23	50.120
189.	Epinepin ing	12	ampul	Nov-23	18.180
190.	Resperidon	100	tablet	Nov-23	12.300
191.	Phytomenadion tablet	90	tablet	Nov-23	67.320
192.	Aqua PI	2	botol	Dec-23	5.300
193.	Ultrasonic gel 5 lt	5	Galon		1.349.999.95
194.	Haloperidol 2mg Tablet	90	Tablet	Jan-24	7.290.00

No	Nama Persediaan	Jumlah	Satuan	ED	Total Harga (Rp)
195.	Aqua PI	8	Flash	Jan-23	21.200.00
196.	Dulcolax Supp Anak	6	Suppos itoria	Jan-23	30.348.00
197.	Haloperidol 2mg Tablet	200	Tablet	Jan-24	16.200.00
198.	Lidocain Comp Inj	30	Ampul	Jan-23	24.090.00
199.	MgSO4 40%	6	Flash	Jan-23	33.960.00
200.	Risperidon	500	Tablet	Jan-23	61.500.00
201.	Albendazole 100 mg	100	Tablet	Jan-24	45.700.00
202.	Ketokonazole	500	Tablet	Jan-24	200.000.00
203.	Metilergometrin	146	Tablet	Jan-24	31.244.00
204.	Ketorolac Inj	5	Ampul	Jan-24	8.000.00
205.	Metilergometrin	200	Tablet	Jan-24	42.800.00
206.	Oksitetra SK	54	Tube	Jan-24	128.898.00
207.	Sikzonoate Inj	5	Ampul	Jan-24	321.900.00
208.	Diazepam Inj	3	Ampul	Jan-24	4.635.00
209.	Furosemid	90	Tablet	Jan-24	23.940.00
210.	Sikzonoate Inj	3	Ampul	Jan-24	193.140.00
211.	Dextrose 40% Inj	5	Flash	Jan-24	0.00
212.	Clobazam 10 mg	600	Tablet	Jan-24	230.400.00
213.	Diazepam Inj	28	Ampul	Jan-24	43.260.00
214.	Kalsium Laktat	1800	Tablet	Jan-24	1.548.000.00
215.	Allopurinol 100 mg	600	Tablet	Jan-24	52.200.00
216.	Clobazam 10 mg	168	Tablet	Jan-24	64.512.00
217.	Furosemid	100	Tablet	Jan-24	26.600.00
218.	Calcium Gluconate Inj	2	Ampul	Jan-24	21.500.00
219.	Erytromycin Syr	45	Botol	Jan-24	290.790.00
220.	Cyanocobalamin Inj	46	Ampul	Jan-24	10.396.00
221.	Wing Needle 27G	3	Pcs	Jan-24	4.326.00
222.	Ondencetron 4mg Inj	10	Ampul	Jan-24	14.850.00
223.	Betadine Kumur	5	Botol	Jan-24	198.000.00
224.	Carbamazepin	61	Tablet	Jan-24	11.529.00
225.	Trihexiphinidil (TXP)	800	Tablet	Jan-24	50.400.00
226.	Carbamazepin	2000	Tablet	Jan-24	378.000.00
227.	Hidrokortison 2.5% Krim	24	Tube	Jan-24	55.800.00
228.	Neo Kaolana Sirup	15	Botol	Jan-24	263.070.00
229.	Sulfadiazin Silver	6	Tube	Jan-24	111.342.00
230.	Hyoscine Butylbromide	100	Tablet	Jan-24	69.500.00
231.	Acyclovir krim	35	Tube	Jan-24	163.170.00
232.	MgSO4 40%	12	Flash	Jan-24	67.932.00
233.	MgSO4 20%	11	Flash	Jan-24	54.670.00
234.	Acyclovir krim	88	Tube	Jan-24	410.256.00
235.	Ani Hemoroid Supp	10	Suppos itoria	Jan-24	32.500.00
236.	Ketokonazole 200 mg	1256	Tablet	Jan-24	502.400.00
237.	Simvastatin 10 mg	1400	Tablet	Jan-24	203.000.00
238.	Erytromycin Tab	100	Tablet	Jan-24	77.500.00
239.	Asam Askorbat 50 mg Tab	3150	Tablet	Jan-24	211.050.00

No	Nama Persediaan	Jumlah	Satuan	ED	Total Harga (Rp)
240.	Diazepam Inj	37	Ampul	Jan-24	57.165.00
241.	Atropin Inj	16	Ampul	Jan-24	27.488.00
242.	Metilergometrin Inj	31	Ampul	Jan-24	63.550.00
243.	Kotrimoksazol sirup	18	Botol	Jan-24	39.420.00
244.	Allopurinol 100 mg	1800	Tablet	Jan-25	306.000
245.	Flufenazine Decanoate (Sikzonoate Inj)	30	Ampul	Jan-25	2.417.580
246.	Ketorolac Inj	33	Ampul	Jan-25	52.800
247.	Omeprazole 20 mg Kaps	200	Kapsul	Jan-25	46.400
248.	Metformin 500 mg Tab	5000	Tablet	Jan-25	950.000
249.	Dextrose 5% 500 ml Infus	18	Flash	Jan-25	108.486
250.	Rifampicin 75mg/ Isoniazid 50mg	168	Tablet	Jan-25	172.368
251.	Betahistin 6 mg Tab	1400	Tablet	Feb-25	266.000
252.	Acyclovir 400 mg Tab	1000	Tablet	Feb-25	650.000
253.	Allopurinol 100 mg	1100	Tablet	Dec-24	187.000
254.	I.V abbocath 26G	100	Pcs	Jan-25	430.500
255.	Dexamethasone Inj	13	Ampul	Mar-25	12.987
256.	Fitomenadion 10 mg/ml Inj	22	Ampul	Mar-25	126.984
257.	Fitomenadion 2 mg/ml Inj	12	Ampul	Mar-25	33.300
258.	Fenitoin 100 mg	507	Kapsul	Apr-25	90.753
259.	Allopurinol 100 mg	1900	Tablet	Apr-25	323.000
260.	Nystatin Tab Vaginal 100,000 IU	20	Tablet	May-25	11.000
261.	Fenitoin 100 mg	1000	Kapsul	May-25	820.000
262.	Simvastatin 10 mg	300	Tablet	Jun-25	33.000
263.	Kotrimoxazole 480 mg	1639	Tablet	Jun-25	483.505
264.	Dextrose 10% Infus 500 ml	2	Flash	Jun-25	14.400
265.	Magnesium Sulfat 20% 25 ml	5	Flash	Jun-25	24.865
266.	I.V abbocath 26G	76	Pcs	Jul-25	327.180
267.	Erythromycin 500 mg	1119	Tablet	Jul-25	867.225
268.	Hidroklortiazid 25 mg	370	Tablet	Jul-25	29.970
269.	Plain Catgut 2/0	48	Pcs	Jun-25	252.000
270.	Griseofulvin 125 mg	580	Tablet	Jul-25	169.940
271.	Metronidazole 500 mg	522	Tablet	Jul-25	110.142
272.	Risperidone 2 mg	482	Tablet	Jul-25	59.286
273.	Spuit 10 cc	100	Pcs	May-25	91.725
274.	Infus Glukosa 40%	6	Flash	Jul-25	66.600
275.	Ephineprine Inj	16	Ampul	Aug-25	166.400
276.	Sikzonoate Inj	15	Ampul	Aug-25	930.000
277.	Phenobarbital 30 mg	5400	Tablet	Sep-25	982.800
278.	Methylergometrin Inj	10	Ampul	Sep-25	20.500
279.	Ethylchloride	25	Botol	Sep-25	4.688.600
280.	Calcium Gluconas Inj	2	Ampul	Sep-25	21.500
281.	I.V Abbocath 18 G	80	Pcs	Sep-25	319.200
282.	Oksitosin Inj	14	Ampul	Oct-25	43.848
283.	Amitriptylin 25 mg	120	Tablet	Oct-25	20.760

No	Nama Persediaan	Jumlah	Satuan	ED	Total Harga (Rp)
284.	Dexamethason Inj	13	Ampul	Oct-25	23.088
285.	HIV 1/2 Antibody D3TEKSI	25	Pcs	Oct-25	186.350
286.	Virocheck HIV 1/2	25	Pcs	Oct-25	164.100
287.	Natrium Diclofenac 50 mg	1000	Tablet	Dec-25	187.000
288.	Dihydroartemycin Piperaquin (DHP)	9	Tablet	Dec-25	25.659
289.	Glukosa Larutan Infus 10% 500 ml	4	Flash	Dec-25	30.000
290.	I.V Catheter 24G	68	Pcs	Dec-25	271.320
	Jumlah				**96.915.895**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 421 dan Pasal 432 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengolahan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:

1) Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan apabila tidak digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
2) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah, putusan pengadilan yang telah berketentuan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan, atau sebab lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Manggis I memerintahkan petugas terkait untuk melakukan pemusnahan terhadap persediaan kedaluwarsa kemudian berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut maka akan dilakukan penghapusan persediaan yang telah kedaluwarsa dari Laporan Keuangan.

5. Pencatatan/Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib

Berdasarkan pemeriksaan fisik atas aset tetap di lingkungan UPTD Puskesmas Manggis I ditemukan ada beberapa kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tidak terdapat Kartu Inventaris Ruangan yang terpasang

Berdasarkan pemeriksaan fisik aktiva tetap UPTD Puskesmas Manggis I tanggal 18 Februari 2026 diketahui bahwa Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sudah terpasang pada ruangan-ruangan tempat aset tetap berada, namun belum diperbaharui.

b. Tidak semua aset tetap terdapat nomor registrasi

Berdasarkan hasil pemerikasaan fisik aset tetap UPTD Puskesmas Manggis I tanggal 18 Februari 2025 diketahui bahwa tidak semua aset tetap terdapat penomoran registrasi yang tertempel atas aset – aset/inventaris.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Manggis I menugaskan Pengurus Barang untuk memperbaiki penatausahaan aset tetap.

6. Terdapat Bangunan UPTD Puskesmas Manggis I yang dibangun diatas Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat bangunan UPTD Puskesmas Manggis I yang berdiri diatas Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Luas (M^2)	Nilai Perolehan (Rp)	Tanggal, Perolehan	Dibangun diatas Tanah Milik
Gedung Pustu Padangbai	60	116.783.110	31/01/1991	Tanah Milik Desa Adat Padangbai
Gedung Pustu Gegelang	60	234.040.000	31/01/1991	Tanah Milik Pribadi an. I Wayan Kari
Pembangunan Pustu Manggis	82	664.388.000	27/12/2017	Tanah Milik Desa Adat Manggis
Pemb. Poskesdes Desa Gegelang	60	163.500.000	31/01/2008	Tanah Milik Desa Adat Gegelang
Belanja modal pagar Pustu Gegelang	60	69.321.000	27/12/2017	Tanah Milik Pribadi an. I Wayan Kari
Belanja modal pagar Pustu Manggis	23	78.535.000	27/12/2017	Tanah Milik Desa Adat Manggis
Jumlah		**1.326.567.110**		

Pada keterangan bukti kepemilikan/penguasaan tanah lokasi Puskesmas Pembantu diketahui bahwa terdapat kekurangan administrasi pada bukti Surat Pernyataan pada Puskesmas Pembantu Padangbai, Gegelang, Manggis, dan Poskesdes Desa Gegelang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Manggis I agar memperbaharui surat pernyataan pemberian hak pakai dari Desa lokasi Puskemas Pembantu kepada UPTD Puskesmas Manggis I.

7. Terdapat aset lainnya senilai Rp339.205.182,08 yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Manggis I per 31 Desember 2025 diketahui terdapat aset lainnya yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Tahun	Harga Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Recorder Display Lainnya (Dst)	2016	3.000.000,00	2.350.000,00	650.000,00
2	Nebulizer	2005	6.960.650,00	6.960.650,00	-
3	Tensimeter	2014	1.155.000,00	1.155.000,00	-
4	Tensimeter	2014	1.155.000,00	1.155.000,00	-
5	Tensimeter	2014	1.155.000,00	1.155.000,00	-
6	Tensimeter	2014	1.155.000,00	1.155.000,00	-
7	Tensimeter	2014	1.155.000,00	1.155.000,00	-
8	Tensimeter	2014	1.155.000,00	1.155.000,00	-
9	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2013	660.000,00	660.000,00	-
10	Diagnostik Set	2005	2.944.100,00	2.944.100,00	-
11	Alat Kedokteran umum lainnya	1998	5.000.000,00	5.000.000,00	-

fwA

No	Nama Barang	Tahun	Harga Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
12	Alat Kedokteran umum lainnya	1995	500.000,00	500.000,00	-
13	Alat Kedokteran umum lainnya	1995	500.000,00	500.000,00	-
14	Alat Kedokteran umum lainnya	1995	500.000,00	500.000,00	-
15	Alat Kedokteran umum lainnya	1995	500.000,00	500.000,00	-
16	Alat Kedokteran umum lainnya	1995	500.000,00	500.000,00	-
17	Alat Kedokteran umum lainnya	1995	500.000,00	500.000,00	-
18	Alat Kedokteran umum lainnya	1995	500.000,00	500.000,00	-
19	Alat Kedokteran umum lainnya	2005	5.389.000,00	5.389.000,00	-
20	Alat Kedokteran umum lainnya	2005	2.210.400,00	2.210.400,00	-
21	Peralatan studio audio lainnya (dst)	1998	1.000.000,00	1.000.000,00	-
22	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2016	1.180.000,00	924.333,00	255.667,00
23	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2006	113.846.700,00	113.846.700,00	-
24	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2006	2.911.370,00	2.911.370,00	-
25	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2006	23.531.200,00	23.531.200,00	-
26	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2007	1.490.000,00	1.490.000,00	-
27	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2007	7.250.000,00	7.250.000,00	-
28	A.C. Window	2016	7.530.000,00	5.898.500,00	1.631.500,00
29	Meubeleur lainnya	2007	945.000,00	945.000,00	-
30	Meubeleur lainnya	2007	945.000,00	945.000,00	-
31	Meubeleur lainnya	2007	945.000,00	945.000,00	-
32	Alat Kantor Lainnya	2006	3.135.550,00	3.135.550,00	-
33	Alat Kantor Lainnya	2007	3.500.000,00	3.500.000,00	-
34	Alat Kantor Lainnya	2009	5.950.000,00	5.950.000,00	-
35	Alat Kantor Lainnya	2004	8.230.000,00	8.230.000,00	-
36	White Board	2007	1.440.000,00	1.440.000,00	-
37	Mesin Absen (Time Recorder)	2014	7.375.500,00	5.777.475,00	1.598.025,00
38	Mesin Absen (Time Recorder)	2016	5.500.000,00	4.308.333,00	1.191.667,00
39	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	2014	2.420.000,00	2.420.000,00	-
40	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (Dst)	1992	25.640.000,00	25.640.000,00	-
41	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	1.905.700,00	1.111.658,00	794.042,00
42	Note Book	2007	14.120.012,08	14.120.012,08	-
43	Personal Komputer lainnya	2005	6.799.500,00	6.799.500,00	-
44	P.C Unit	2009	7.074.100,00	7.074.100,00	-
45	P.C Unit	2009	7.074.100,00	7.074.100,00	-
46	P.C Unit	2009	7.074.100,00	7.074.100,00	-
47	P.C Unit	2009	7.074.100,00	7.074.100,00	-
48	P.C Unit	2009	7.074.100,00	7.074.100,00	-
49	P.C Unit	2014	9.800.000,00	9.800.000,00	-
50	P.C Unit	2016	9.850.000,00	7.715.833,00	2.134.167,00
	Jumlah		**339.205.182,08**	**339.205.182,08**	**8.255.068,00**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

1) Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa:
   a. Pasal 421 huruf a pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
   b. Pasal 422:
      (1) Ayat (1) pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
      (2) Ayat (3) pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
   c. Pasal 423 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pasal 424 ayat (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
   e. Pasal 432:
      (1) ayat (1) barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: pemusnahan.
      (2) ayat (3) huruf d penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
2) PSAP 07 Paragraf 77 menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
3) PSAP 07 Paragraf 78 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Paragraf 31 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan Kepala UPTD Puskesmas Manggis I membuat Surat Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah dan meminta pengelola barang untuk segera menindaklanjuti dengan membuat usulan Surat Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah agar segera diterbitkan keputusan penghapusan.

8. Dokumen RBA dan DPA UPTD Puskesmas Manggis I Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Dokumen Anggaran UPTD Puskesmas Manggis I Tahun 2025 diketahui bahwa RBA (Rencana Bisnis Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) hanya memuat hal-hal berikut:

a. RBA (Rencana Bisnis Anggaran)
   RBA UPTD Puskesmas Manggis I hanya memuat rincian belanja berdasarkan sub kegiatan.

b. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
DPA hanya memuat anggaran pendapatan Lain-Lain PAD yang sah – Pendapatan BLUD. DPA UPTD Puskesmas belum memuat anggaran pendapatan secara rinci untuk untuk seluruh sumber-sumber pendapatan, yaitu pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. Pasal 59 Ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Bab V tentang Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa:
   1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   3) Perkiraan harga;
   4) Besaran persentase ambang batas; dan
   5) Perkiraan maju atau *forward estimate.*
b. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
   1) Pasal 9
      (1) RBA meliputi:
         a. rencana bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan;
         b. ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
         c. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
         d. perkiraan harga;
         e. besaran Persentase Ambang Batas; dan
         f. perkiraan maju atau *forward estimate.*
      (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
      (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.
   2) Pasal 10
      (1) Rencana Bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat antara lain kondisi kerja, asumsi makro dan mikro serta target kinerja.
      (2) Ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
      (3) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
      (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
      (5) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(6) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

3) Pasal 19
   (1) DPA paling sedikit mencakup:
      a. pendapatan dan Belanja;
      b. proyeksi arus kas; dan
      c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
   (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
   (3) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

4) Pasal 20
   (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
   (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan/jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan dokumen anggaran UPTD Puskesmas Manggis I belum sepenuhnya dapat diandalkan sebagai acuan pelaksanaan dan penilaian kinerja BLUD.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan Kepala UPTD Puskesmas Manggis I untuk menyusun dokumen anggaran sesuai Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

`

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS MANGGIS II
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor: 00042/2.0925/AU.5/11/1881-2/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS MANGGIS II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	5
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	68
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN	73

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS MANGGIS II
Jalan I Gusti Ngurah Tenganan - Pesedahan, Kode Pos : 80871
Telepon (0363) 41898, email : puskesmasmanggis2@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS MANGGIS II
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	dr. I Ketut Sadiarta
Nomor Telepon	:	(0363) 41898
Alamat kantor	:	Jl. I Gusti Ngurah Tenganan, Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem - Bali
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Manggis II

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Manggis II Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Manggis II Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Manggis II Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No 13
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskeamas Manggis II Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Manggis II Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Manggis II Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Manggis II

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Manggis II

METERAI TEMPEL 888BDANX257103644

dr. I Ketut Sadiarta
NIP. 19730223200501 1007

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00042/2.0925/AU.5/11/1881-2/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Manggis II

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Manggis II ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 28 April 2026

00042

Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - UPTD PUSKESMAS MANGGIS II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN DAERAH	*4.1.1*				
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat		0,00	973.703.541,00	0,00	989.234.065,84
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	147.520.233,00
Pendapatan APBD		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	3.327.626,84	0,00	4.553.786,00
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**977.031.167,84**	**0,00**	**1.141.308.084,84**
BELANJA	*4.1.2*				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		716.020.278,00	606.445.598,00	84,70	585.965.849,00
Belanja Barang dan Jasa		797.787.743,00	659.057.555,00	82,61	755.307.875,00
JUMLAH BELANJA OPERASIONAL		**1.513.808.021,00**	**1.265.503.153,00**	**83,60**	**1.341.273.724,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Peralatan dan Mesin		627.754.100,00	559.039.500,00	89,05	379.925.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan		687.000.000,00	578.287.100,00	84,18	105.980.570,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**1.314.754.100,00**	**1.137.326.600,00**	**86,50**	**485.905.570,00**
JUMLAH BELANJA		**2.828.562.121,00**	**2.402.829.753,00**	**84,95**	**1.827.179.294,00**
SURPLUS/DEFISIT		**(2.828.562.121,00)**	**(1.425.798.585,16)**	**50,41**	**(685.871.209,16)**
JUMLAH SILPA		**(2.828.562.121,00)**	**(1.425.798.585,16)**	**50,41**	**(685.871.209,16)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Manggis, 06 April 2026
Kepala Puskesmas Manggis II

dr. I Ketut Sadiarta
NIP.197302232005011007

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - UPTD PUSKESMAS MANGGIS II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	219.148.102,78	388.783.195,18
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**219.148.102,78**	**388.783.195,18**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(1.425.798.585,16)	(685.871.209,40)
Sub Total (3+4)	**(1.206.650.482,38)**	**(297.088.014,22)**
Pendapatan APBN/APBD	1.112.030.611,00	520.066.317,00
Pendapatan BOK	234.061.937,00	0,00
Setoran Ke Kas Daerah	0,00	(3.830.200,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**139.442.065,62**	**219.148.102,78**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Manggis, 06 April 2026
Kepala Puskesmas Manggis II

dr. I Ketut Sadiarta
NIP.197302232005011007

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - UPTD PUSKESMAS MANGGIS II

NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET	*4.2.1*		
ASET LANCAR	*4.2.1.1*		
Kas di Badan Layanan Umum Daerah		115.355.885,62	133.589.541,78
Kas di Bendaharan Pengeluaran (BOK)		24.086.180,00	85.558.562,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		694.200,00	2.418.400,00
Penyisihan Piutang		(6.942,00)	(24.184,00)
Persediaan		130.887.032,23	125.395.834,00
JUMLAH ASET LANCAR		**271.016.355,85**	**346.938.153,78**
ASET TETAP	*4.2.1.2*		
Tanah		110.700.000,00	110.700.000,00
Peralatan dan Mesin		4.125.309.073,31	3.487.746.677,31
Gedung dan Bangunan		4.683.806.613,50	4.105.519.514,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		3.793.000,00	3.793.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
JUMLAH NILAI BUKU ASET TETAP		**8.923.608.686,81**	**7.707.759.191,31**
Akumulasi Penyusutan		(4.773.516.772,31)	(4.232.976.715,51)
JUMLAH ASET TETAP		**4.150.091.914,50**	**3.474.782.475,80**
ASET LAINNYA	*4.2.1.3*		
Aset Tetap Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		734.759.136,00	734.759.136,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		(719.882.367,00)	(719.882.367,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		**14.876.769,00**	**14.876.769,00**
JUMLAH ASET		**4.435.985.039,35**	**3.836.597.398,58**
KEWAJIBAN	*4.2.2*		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	*4.2.2.1*		
Utang Belanja		51.455.501,00	52.202.218,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**51.455.501,00**	**52.202.218,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**51.455.501,00**	**52.202.218,00**
EKUITAS	*4.2.3*		
Ekuitas		4.384.529.538,35	3.784.395.180,58
JUMLAH EKUITAS		**4.384.529.538,35**	**3.784.395.180,58**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**4.435.985.039,35**	**3.836.597.398,58**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Manggis, 06 April 2026
Kepala Puskesmas Manggis II

dr. I Ketut Sadiarta
NIP 197302232005011007

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - UPTD PUSKESMAS MANGGIS II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan	%
PENDAPATAN	*4.3.1*				
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat		971.967.741,00	994.668.985,00	(22.701.244,00)	(2,28)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)		234.061.937,00	147.520.233,00	86.541.704,00	58,66
Pendapatan Hibah		557.300.962,26	0,00	557.300.962,26	0,00
Pendapatan APBD		1.112.030.611,00	520.066.317,00	591.964.294,00	113,82
Pendapatan Usaha Lainnya		3.327.626,84	4.553.786,00	(1.226.159,16)	(26,93)
JUMLAH PENDAPATAN		**2.878.688.878,10**	**1.666.809.321,00**	**1.211.879.557,10**	**72,71**
BEBAN	*4.3.2*				
Beban Pegawai		608.258.283,00	583.346.281,00	24.912.002,00	4,27
Beban Barang dan Jasa		1.208.307.917,00	718.742.955,00	489.564.962,00	68,11
Beban Penyusutan dan Penyisihan Piutang		540.546.998,80	540.812.025,00	(265.026,20)	(0,05)
JUMLAH BEBAN		**2.357.113.198,80**	**1.842.901.261,00**	**514.211.937,80**	**27,90**
SURPLUS(DEFISIT) OPERASIONAL		**521.575.679,30**	**(176.091.940,00)**	**697.667.619,30**	**(396,20)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Defisit dari Kegiatan Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) NON OPERASIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**521.575.679,30**	**(176.091.940,00)**	**697.667.619,30**	**(396,20)**
POS LUAR BIASA		0,00	0,00		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**521.575.679,30**	**(176.091.940,00)**	**697.667.619,30**	**(396,20)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Manggis, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Manggis II

dr. I Ketut Sadiarta
NIP 197302232005011007

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - BLUD PUSKESMAS MANGGIS II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	**3.784.395.180,58**	**3.864.137.049,00**
SURPLUS/DEFISIT-LO	521.575.679,30	(176.091.940,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	78.558.678,47	96.350.071,58
Setoran ke Kas Daerah	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	**4.384.529.538,35**	**3.784.395.180,58**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Manggis, 06 April 2026
Kepala Puskesmas Manggis II

dr. I Ketut Sadiarta
NIP 197302232005011007

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - UPTD PUSKESMAS MANGGIS II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	973.703.541,00	989.234.066,00
Pendapatan Usaha Lainnya	3.327.626,84	4.553.786,00
Pendapatan APBN/APBD	1.112.030.611,00	520.066.317,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	234.061.937,00	147.520.233,00
Jumlah arus Kas Masuk	**2.323.123.715,84**	**1.661.374.402,00**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	606.445.598,00	585.965.849,00
Belanja Barang dan Jasa	659.057.555,00	759.138.075,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**1.265.503.153,00**	**1.345.103.924,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**1.057.620.562,84**	**316.270.478,00**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Perolehan Peralatan dan Mesin	559.039.500,00	379.925.000,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	578.287.100,00	105.980.570,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**1.137.326.600,00**	**485.905.570,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(1.137.326.600,00)**	**(485.905.570,00)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Penyetoran ke Kas Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	106.091.909,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**106.091.909,00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	106.091.909,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**106.091.909,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**(79.706.037,16)**	**(169.635.092,00)**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**219.148.103,00**	**388.783.195,00**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**139.442.065,84**	**219.148.103,00**
menurut neraca		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Manggis, 06 April 2026
Kepala Puskesmas Manggis II

dr. I Ketut Sadiarta
NIP. 197308232005011007

Catatan Atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGGIS II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Manggis II

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Manggis II

UPTD Puskesmas Manggis II adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Berdiri pada Tahun 1992, UPTD Puskesmas Manggis II melingkupi wilayah kerja di Kecamatan Manggis dengan luas wilayah ± 28,99 km2, mewilayahi 6 desa (Tenganan, Pesedahan, Nyuhtebel, Sengkidu, Selumbung, dan Ngis), 22 dusun, 25 posyandu, 11 TK/PAUD, 16 SD, 2 SMP dan 1 SMA. Batas-batas wilayah kerja yaitu sebelah utara Kecamatan Bebandem, sebelah timur Kecamatan Karangasem, sebelah barat Desa Manggis dan sebelah selatan Samudra Indonesia. Jumlah penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas Manggis II sebanyak 17.634 jiwa denganjumlah KK 4.877.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, UPTD Puskesmas Manggis II ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

UPTD Puskesmas Manggis II memiliki empat Puskesmas Pembantu (Pustu) dan I pondok bersalin desa (polindes), yakni:

1) Pustu Gumung : Desa Tenganan, Br. Dinas Gumung
2) Pustu Selumbung : Desa Selumbung, Br. Dinas Kelodan
3) Pustu Ngis : Desa Ngis, Br. Dinas Karangasem
4) Pustu Sengkidu : Desa Sengkidu, Br. Dinas Karangasem
5) Polides Nyuhtebel : Desa Nyuhtebel, B. Dinas Kr. Anyar

b. Tempat Kedudukan

UPTD Puskesmas Manggis II beralamat di JI. I Gusti Ngurah Tenganan, Desa Pesedahan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem (80871) Telp (0363) 41898, Email: puskesmasmanggis2@gmail.com.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Manggis II adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir.dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 818); 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10) Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11) Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
14) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);

17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28).
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761 /HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 79/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
25) Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem; dan
27) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

d. Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai UPTD Puskesmas Manggis II

1) Visi UPTD Puskesmas Manggis II

"Menjadi Puskesmas yang bermutu, terjangkau, adil dan merata dałam pelayanan dan pembinaan kesehatan menuju masyarakat sehat dan sejahtera".

2) Misi UPTD Puskesmas Manggis II

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 5 (Lima) misi, sebagai berikut:

a) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang berakhlak mulia.

b) Memberi pelayanan dan pembinaan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau melalui pendekatan keluarga.
c) Menyelenggarakan system informasi puskesmas yang bermutu dan berkualitas.
d) Memanfaatkan taologi tepat guna dałam pelayanan dan pembinaan kesehatan.
e) Meningkatkan kerajasama lintas sektoral serta seluruh komponen pendukung dałam pembangunan kesehatan.

3) Motto UPTD Puskesmas Manggis II

"MANTAP" (Melayani Tanpa Perbedaan)

4) Tujuan UPTD Puskesmas Manggis II

"Memberikan pelayanan dan pembinaan kesehatan bermutu, adil dan merata menuju masyarakat sehat dan sejahtera".

5) Tata Nilai UPTD Pusksmas Manggis II

UPTD Puskesmas Manggis II dałam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai Tata Nilai yaitu melayani dengan "PRIMA" dengan makna sebagai berikut:

a) P (Profesional): Melaksanakan tugas dengan baik dałam memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai kompetensi,
b) R (Ramah) Memiliki sifat sopan, santun dan beretika pada masyarakat dan rekan sejawat.
c) I (Inopatif) Bekerja dengan giat serta mampu menciptakan ide baru dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
d) M (Merata) Memberi pelayanan kesehatan secara adil dan merata tanpa perbedaan.
e) A (Aman) Bekerja berhati-hati dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

e. Program Pelayanan UPTD Pusksmas Manggis II

Program Pelayanan UPTD Puskesmas Manggis II terdiri dari:

1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas

Di UPTD Puskesmas Manggis II ada 5 kegiatan esensial dan I kegiatan perkesmas. Lima Kegiatan Esensial tersebut melputi:

a) Pelayanan Kesehatan Keluarga (Ibu, Anak dan Keluarga Berencana)
b) Pelayanan Gizi Masyarakat
c) Pelayanan Promosi Kesehatan
d) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/ praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga,

kelompok dan Masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

3) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
   a) Upaya Pelayanan UKGS/UKGM
      UKGS/UKGM adalah suatu komponen dari UKS dan merupakan tehnis pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak sekolah dan di posyandu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak serta bumil.
   b) Upaya Pelayanan Lansia
      Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
   c) Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
   d) Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
   e) Upaya Kesehatan Yankestradkom.
   f) Upaya Kesehatan Kerja.
   g) Upaya Kesehatan Indera.
4) Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi dan Laboratorium
   a) Upaya Kesehatan Perorangan
      Upaya kesehatan perorangan di UPTD Puskesmas Manggis II meliputi: poli umum, poli gigi dan mulut, ruang KIA KB dan imunisasi, ruang konsultasi gizi, laboratorium, Farmasi, kasir, loket pendaftaran dan konseling.
   b) Farmasi
      Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
   c) Laboratorium
      Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

f. Jenis-jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Manggis II

Jenis-jenis pelayanan Kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Manggis II adalah:

1) Poliklinik
   Poliklinik rawat jalan terdiri dari Poli umum, Poli gigi, KIA/KB, imunisasi, ruang konsultasi termasuk loket pendaftaran prosedur rawat jalan pada poliklinik menguraikan langkah-langkah pemberian pelayanan kepada pasien rawat jalan mulai dari pemilahan kelompok pasien, pendaftaran dan pembayaran jasa layanan, dan

pemberian layanan kesehatan pada masing-masing poli, serta tindakan lanjutan yang diperlukan oleh pasien.

2) Unit Gawat Darurat
   UPTD Puskesmas Manggis II memiliki ruang khusus unit gawat darurat, tetapi memiliki ruang tindakan medik untuk mengatasi tindakan kegawat daruratan pelayanan primer. Prosedur pada penanganan kasus Gawat Darurat menguraikan langkah-langkah mengutamakan penanganan pasien yang sifatnya gawat dan darurat sejak pasien datang hingga tindakan lanjutan yang diperlukan pasien seperti dirujuk ke rumah sakit.
3) Laboratorium
   Prosedur penunjang medis menguraikan pemberian layanan berupa layanan laboratorium kepada pasien sesuai surat pengantar dari poli umum, poli KIA-KB, ruang konsultasi, ruang UGD.
4) Apotek
   Prosedur layanan obat menguraikan pemberian pelayanan penyediaan obat-obatan kepada pasien sesuai resep dari poli-poli rawat jalan, ruang UGD dan pelayanan di luar gedung seperti kegiatan posyandu (balita dan lansia).
5) Pelayanan Gizi
   Prosedur pelayanan gizi menguraikan pemberian layanan gizi berupa penyuluhan PUGS, konseling atau klinik gizi untuk terapi diet untuk pasien poliklinik, dan dalam bentuk perencanaan serta pengolahan makanan biasa/khusus.
6) Pelayanan Ambulance
   Prosedur pelayanan ambulance menguraikan pemberian layanan ambulance bagi pasien yang memerlukannya dalam rangka rujukan ke rumah sakit.
7) Rekam Medik
   Prosedur rekam medik menguraikan proses penanganan data pasien mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen/data pasien, pengkodean, pengindeksan, dan pengarsipan.
8) Kesehatan Lingkungan
   Prosedur kesehatan lingkungan menguraikan langkah-langkah pemeriksaan air limbah, limbah padat berbahaya, serta air bersih secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

g. Sasaran, Indikator, Tenaga Kerja

NO		KEGIATAN/INDIKATOR	JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JUMLAH SASARAN PUSKESMAS	CAPAIAN KOMULATIF	CAKUPAN	PREDIKAT KINERJA
1		2	3	4	5	6	7	8	9
UKM ESENSIAL								79,83	Kurang
I	**Pelayanan Kesehatan Keluarga**							79,50	Kurang
	A	**Kesehatan Ibu**						99,02	Baik
	1	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	bumil	%	100	168	161	95,83	Baik
	2	Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai Standar (K4)	bumil	%	100	147	144	97,96	Baik
	3	Cakupan Ibu Hamil Yang mendapatkan pelayana antenatal sesuai standar (K6)	bumil	%	100	154	154	100	Baik
	4	Cakupan Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung, infeksi)	bumil	%	90	39	39	100	Baik
	5	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (Pn)	bulin	%	100	147	147	100	Baik
	6	Cakupan pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF 4)	bulin	%	100	147	147	100	Baik
	7	Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN1)	bayi	%	100	160	159	99,38	Baik
	B	**Kesehatan Bayi**						90,42	Cukup
	1	Cakupan Pelayanan Neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN3)	bayi	%	100	160	154	96,25	Baik
	2	Cakupan Penaganan komplikasi neonatus	bayi	%	80	24	18	75,00	Kurang
	3	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 12 bln (Kunjungan Bayi)	bayi	%	100	160	160	100,00	Baik
	C	**Upaya Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah**						100,04	Baik
	1	Cakupan Pelayanan Anak Balita (12 - 59 bulan)sesuai standar	Balita	%	100	900	901	100,11	Baik
	2	Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS	Balita	%	100	528	528	100,00	Baik
	3	Cakupan Stimulasi Deteksi Intervinsi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	APRAS	%	100	279	279	100,00	Baik

NO	KEGIATAN/INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JUMLAH SASARAN PUSKESMAS	CAPAIAN KOMULATIF	CAKUPAN	PREDIKAT KINERJA
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	D	**Upaya Kesehatan Sekolah**						100,05	Baik
	1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Siswa	%	100	1280	1280	100,00	Baik
	2	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SD/MI	Siswa	%	100	1280	1282	100,16	Baik
	3	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik siswa SMP/MTs	Siswa	%	100	860	860	100,00	Baik
	E	**Pelayanan Keluarga Berencana**						66,98	Kurang
	1	Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	akseptor	%	70	3139	1983	63,17	Kurang
	2	Cakupan Peserta KB Pasca persalinan	akseptor	%	100	154	109	70,78	Kurang
	F	**Pelayanan Calon Pengantin**						0,00	Kurang
	1	Persentase Calon pengantin mendapatkan skreening kesehatan	Catin	%	100	256	0	0,00	Kurang
	G	**Pelayanan Kesehatan Usila**						100,00	Baik
	1	Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Orang	%	100	2253	2253	100,00	Baik
II	**Pelayanan Promosi Kesehatan**							94,33	Baik
	A	**PHBS 5 Tatanan**						99,29	Baik
	1	Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	%	84	840	810	96,43	Baik
	2	Tatanan institusi Pendidikan /sekolah	Sekolah	%	50	29	29	100,00	Baik
	3	Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	%	80	6	6	100,00	Baik
	4	Tatanan TTU	TTU	%	40	4	4	100,00	Baik
	5	Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	%	45	4	4	100,00	Baik
	B	**Pemberdayaan Masyarakat**						100,00	Baik
	1.	Pemberdayaan melalui Penyuluhan	Kader UKBM	%	100	50	50	100,00	Baik
	C	**Pembinaan UKBM**						100,00	Baik
	1	Pembinaan Posyandu	Posyandu	%	80	25	25	100,00	Baik
	2	Presentasi posyandu aktif	Posyandu	%	100	25	25	100,00	Baik
	D	**Penyuluhan Narkoba**						100,00	Baik

NO	KEGIATAN/INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JUMLAH SASARAN PUSKESMAS	CAPAIAN KOMULATIF	CAKUPAN	PREDIKAT KINERJA
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	1	Penyuluhan Narkoba minimal 5 kali dalam setahun	Masy, Sekolah, Kelompok peduli kesehatan	kali	5	5	5	100,00	Baik
	E	**Promosi Kesehatan**						100,00	Baik
	1	Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan Jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12kali setahun	Masyarakat	kali	12	12	12	100,00	Baik
	2	Promosi kesehatan untuk program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (kegiatan diluar gedung puskesmas) minimal 12 kali setahun	Masy, Sekolah, Kelompok	kali	12	12	12	100,00	Baik
	F	**Program Pengembangan**						66,67	Kurang
	1.	Pembinaan UKBM lain	kelompok peduli kesehatan	kali	3	3	0	0,00	Kurang
	2.	Pergerakan Germas 5 Indikator	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	3	5	5	100,00	Baik
	3	Sosialisasi/ Pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	kali	1	1	1	100,00	Baik
III	**Pelayanan Kesehatan Lingkungan**							94,25	Baik
	1	Pengawasan Kualitas Air						88,33	Cukup
	a	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/layak	penduduk	%	95	17.905	17905	100,00	Baik
	b	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/IKL	Sarana	%	100	415	415	100,00	Baik
	c	Persentase Pengambilan sampel air	Sampel Air	%	100	15	8	53,33	Kurang
	d	Persentase kualitas air minum di penyelenggara yang	Sarana	%	100	24	24	100,00	Baik

NO	KEGIATAN/INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JUMLAH SASARAN PUSKESMAS	CAPAIAN KOMULATIF	CAKUPAN	PREDIKAT KINERJA
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		memenuhi syarat							
	2	STBM						100,18	Baik
	a	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	%	100	5.468	5530	101,13	Baik
	b	Persentase Desa ODF	Desa	%	100	72	72	100,00	Baik
	c	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	%	100	72	72	100,00	Baik
	3	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	Sarana	%	90	20	20	100,00	Baik
	4	Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan	Sarana	%	25	22	22	100,00	Baik
	5	Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis	Fasyankes	%	100	12	12	100,00	Baik
	6	Persentase Rumah Sehat	Rumah	%	25	5.235	5240	100,10	Baik
IV	**Pelayanan Gizi**							68,59	Kurang
		Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat						68,59	Kurang
	1	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	bumil	%	80	18	16	88,89	Cukup
	2	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	bumil	%	84	193	169	87,56	Cukup
	3	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	bayi	%	60	75	75	100,00	Baik
	4	Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	bayi	%	70	174	90	51,72	Kurang
	5	Persentase Cakupan Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	balita	%	85	10	10	100,00	Baik
	6	Persentase Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	rematri	%	58	5574	5574	100,00	Baik
	7	Persentase Cakupan vitamin A pada Balita	balita	%	90	1330	1330	100,00	Baik
	8	Persentase Anemia pada ibu hamil	ibu hamil	%	33	156	10	6,41	Kurang
	9	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	bayi	%	2,5	72	16	22,22	Kurang
	10	Persentase Balita Kurus (Wasting)	balita	%	7	9156	44	0,48	Kurang
	11	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	balita	%	14	9156	335	3,66	Kurang

NO	KEGIATAN/INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JUMLAH SASARAN PUSKESMAS	CAPAIAN KOMULATIF	CAKUPAN	PREDIKAT KINERJA
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	12	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	balita	%	85	8420	8420	100,00	Baik
	13	Persentase Cakupan Skrining anemia remaja putri	rematri	%	90	161	160	99,38	Baik
	14	Persentase Cakupan Ibu Nifas Mendapat kapsul Vitamin A	Ibu Nifas	%	82	157	157	100,00	Baik
V	**Upaya Pengendalian Penyakit**							62,48	Kurang
	A	**P2M**						30,00	Kurang
	1	Cakupan Penemuan Tuberculosis (Treatment Coverage)	orang	%	90	10	3	30,00	Kurang
	B	**PTM**						100,00	Baik
	1	Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	Bayi-usia sekolah	%	100	430	430	100,00	Baik
	C	**Surveilance**						100,00	Baik
	1	Cakupan Wanita Usia Subur (WUS) yang mendapatkan skreening IVA	Keluarga	%	70	536	536	100,00	Baik
	D	**TB Paru**						69,26	Kurang
	1	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Orang	%	>90	10	3	30,00	Kurang
	2	Succsesrate (Angka keberhasila pengobatan)	Orang	%	>90	9	7	77,78	Kurang
	3	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	Orang	%	100	84	84	100,00	Baik
	E	**Malaria**						0,00	Kurang
	1	Prosentase Penderita Positif Malaria Yang Diobati sesuai Standar	Orang	%	100	100	0	0,00	Kurang
	2	Angka Kesakitan Malaria /Annual Parasite Incident (API)	Orang	per 1.000 pddk	<1	17.905	0	0,00	Kurang
	F	**Kusta**						50,00	Kurang
	1	Angka Prevalensi Kusta	Orang	per 10.000 pddk	<1	15.871	0	0,00	Kurang
	2	Angka Kesembuhan / RFT Rate	orang	%	100	1	1	100,00	Baik
	G	**Diare**						37,76	Kurang
	1	Pelayanan penderita diare sesuai standar	orang	%	100	429	162	37,76	Kurang
	H	**Hepatitis**						35,25	Kurang
	1	Pelayanan deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	Bumil	**%**	100	261	92	35,25	Kurang

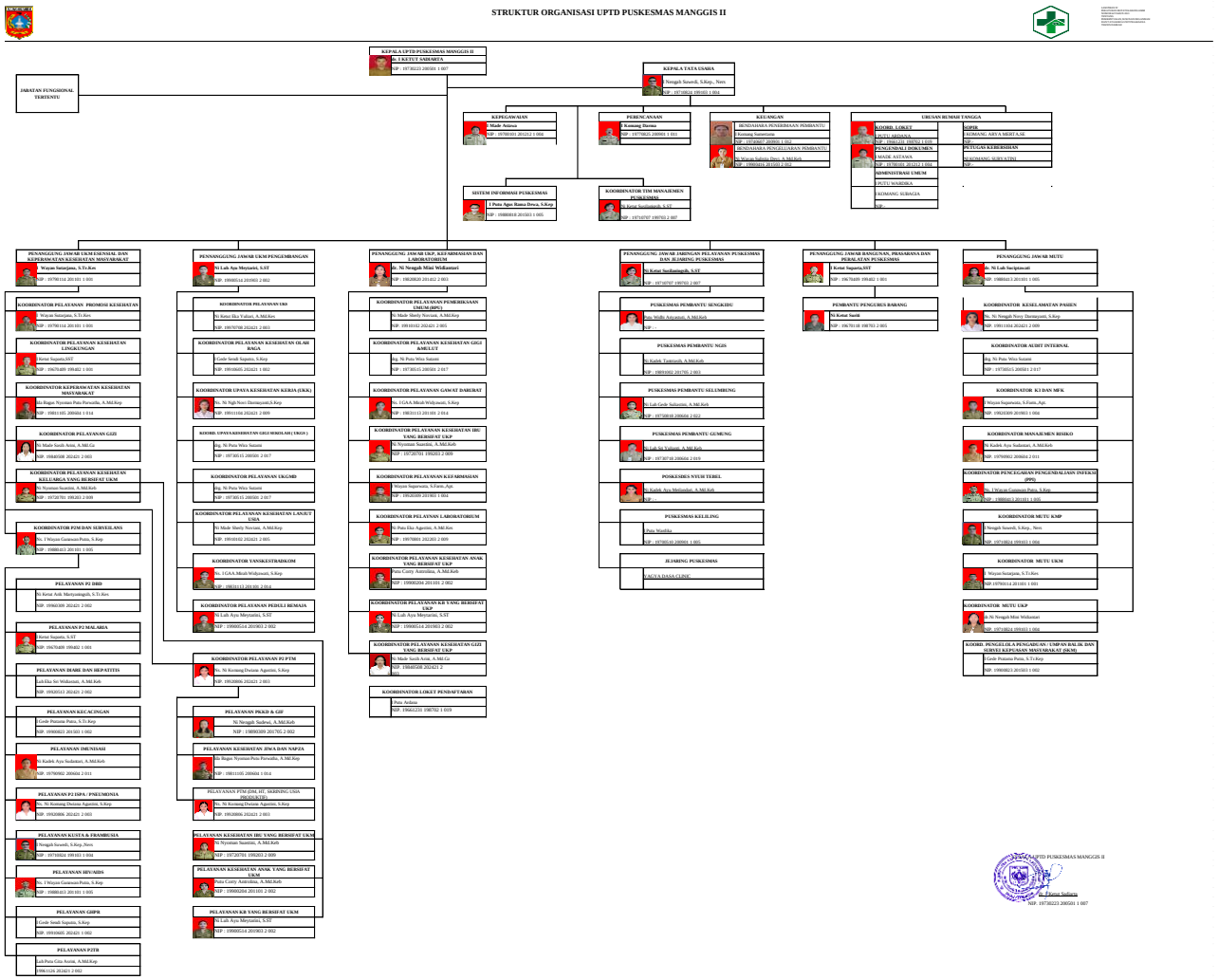
NO	KEGIATAN/INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JUMLAH SASARAN PUSKESMAS	CAPAIAN KOMULATIF	CAKUPAN	PREDIKAT KINERJA
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	I	**ISPA**						7,50	Kurang
	1	Prosentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	Orang	%	100	1.587	238	15,00	Kurang
	2	Cakupan penemuan pneumonia balita	Orang	%	100	33	0	0,00	Kurang
	J	**Demam Berdarah Dengue (DBD)**						55,67	Kurang
	1	Angka Kesakitan DBD/Insiden Rate (IR) DBD	Orang	per 100.000 pddk	50	50	28	28,00	Kurang
	2	Angka Bebas Jentik (ABJ)	Rumah	%	>95	2.400	2000	83,33	Cukup
	K	**Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV / AIDS**						48,89	Kurang
	1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yg melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Vinus)	Penduduk beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, IMS, WPS, Waria/Trans gender,WBP)	%	100	180	88	48,89	Kurang
	L	**Pencegahan dan Penanggulangan Rabies**						98,00	Baik
	1	Pelayanan kasus GHPR ditatalaksana standar	orang	%	100	100	98	98,00	Baik
	M	**Kecacingan**						100,00	Baik
	1	Pelayanan POPM kecacingan	orang	%	100	2164	2164	100,00	Baik
	N	**Surveilance Penyakit**						50,00	Kurang
	1	Kelengkapan Laporan Surveilance	puskesmas	%	90	80	80	100,00	Baik
	2	Ketepatan Laporan Surveilance	puskesmas	%	100	100	100	100,00	Baik
	3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal/alert Penyakit Potensial KLB	%	100	100	100	100,00	Baik
	4	Survailance AFP	Anak usia <15 tahun	Per 100 ribu	≥ 2 per 100 ribu anak usia < 15 tahun	6	0	0,00	Kurang

NO	KEGIATAN/INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JUMLAH SASARAN PUSKESMAS	CAPAIAN KOMULATIF	CAKUPAN	PREDIKAT KINERJA
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	5	Survailance Campak Rubella	Orang	Per 100 ribu	≥ 2 per 100 ribu penduduk	1	0	0,00	Kurang
	6	Survailance TN	Bayi <28 hari	Per 1000	<1 per 1000 kelahiran hidup	1	0	0,00	Kurang
	O	**Imunisasi**						97,34	Baik
	1	Persentase Bayi Usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Bayi	%	100	174	174	100,00	Baik
	2	Persentase Bayi Usia 0-11 bulan yang mendapat Antigen Baru	Bayi	%	100	325	325	100,00	Baik
	3	Persentase Anak Usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Baduta	Anak	%	100	229	197	86,03	Cukup
	4	Persentase Anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia Sekolah Dasar	Anak	%	80	216	216	100,00	Baik
	5	Persentase Wanita usia subur yang memiliki stastus Imunisasi T2 +	WUS	%	80	147	148	100,68	Baik
	P	**Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)**						120,00	Baik
	1.	Presentase meningkatnya desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	desa	%	70	6	12	200,00	Baik
	2.	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	375	375	100,00	Baik
	3.	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	135	135	100,00	Baik
	4.	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining penyakit tidak menular sesuai standar di posbindu	orang	%	100	4829	4829	100,00	Baik
	5.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	72	72	100,00	Baik
UKM PENGEMBANGAN								97,25	Baik
	A	**Pelayanan Kesehatan Tradisional**						86,27	Cukup

NO		KEGIATAN/INDIKATOR	JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JUMLAH SASARAN PUSKESMAS	CAPAIAN KOMULATIF	CAKUPAN	PREDIKAT KINERJA
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	1	Persentase Pembinaan Toga pada keluarga	keluarga	%	3	3	3	100,00	Baik
	2	Persentase Pembinaan pada kelompok Asman	kelompok asman	%	60	2	**2**	**100,00**	**Baik**
	3	Persentase Pembinaan Pengobatan Tradisional Hatra	Orang	%	70	17	10	58,82	Kurang
	B	**Pelayanan Kesehatan Olahraga**						100,00	Baik
	1	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah raga diwilayah kerjanya	puskesmas	puskesmas	12	1	1	100,00	Baik
	2	Persentase calon jamaah haji yang melakukan tes kebugaran	jamaah haji	%	100	0	0	0,00	Kurang
	C	**Kesehatan Gigi Masyarakat**						100,00	Baik
		Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut						100,00	Baik
	1	Persentase Desa yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Desa	%	60	6	6	100,00	Baik
	D	**Upaya Kesehatan Gigi Sekolah**						100,00	Baik
		Pelayanan Kesehatan Gigi Sekolah						100,00	Baik
	1	Persentase Pembinaaan Kesehatan Gigi di TK	TK	%	80	12	12	100,00	Baik
	2	Persentase Pembinaan dan Bimbingan Sikat Gigi Massal pada SD/ MI	SD/MI	%	80	16	16	100,00	Baik
	E	**Upaya Kesehatan Kerja (UKK)**						100,00	Baik
		Pelayanan Kesehatan Kerja						100,00	Baik
	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Kerja Dasar	puskesmas	puskesmas	12	1	**1**	100,00	Baik
	2	Persentase Pos UKK yang dibina	Pos UKK	%	100	1	1	100,00	Baik
UKP (UPAYA KESEHATAN PERORANGAN)								96,14	Baik
	A	**Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan**						82,82	Cukup
		Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan						82,82	Cukup
	1	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat sesuai standar (ASPAK)	FKTP	%	70	1449	1200	82,82	Cukup
	B	**PELAYANAN PERKESMAS**						101,75	Baik
		Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)						101,75	Baik
	1	Persentase keluarga rawan yang dibina	Keluarga	%	80	57	58	101,75	Baik

NO	KEGIATAN/INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JUMLAH SASARAN PUSKESMAS	CAPAIAN KOMULATIF	CAKUPAN	PREDIKAT KINERJA
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	C	**PELAYANAN KEFARMASIAN**						100,00	Baik
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan						100,00	Baik
	1	Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	puskesmas	%	100	12	12	100,00	Baik
	2	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Obat	%	96	480	477	99,38	Baik
	D	**PELAYANAN LABORATORIUM**						100,00	Baik
		Pemeriksaan Laboratorium						100,00	Baik
	1	Kemampuan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis di wilayah kerja puskesemas	Jenis Pemeriksaan Spesimen	%	20	7	7	100,00	Baik
	2	Kemampuan pengujian terhadap sampel lingkungan di wilayah kerja puskesmas	Jenis Pengujian Sampel	%	50	52	0	0,00	Kurang
KINERJA PUSKESMAS								91,08	Baik

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Manggis II



Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Manggis II terdiri dari:

1) Kepala Puskesmas;
2) Tata Usaha; dan
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
8) Penanggung Jawab Mutu

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Puskesmas
   Wewenang:
   a) Memeriksa dan menganalisa laporan-laporan kegiatan stafnya dan sekaligus mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.
   b) Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang di bawahnya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

   Tanggung Jawab:
   a) Pelaksanaan tugas sehari-hari
   b) Melakukan pengawasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
   c) Mengadakan koordinasi dengan kepala kecamatan dan lintas sektor dalam upaya pembangunan Kesehatan di wilayah kerja;
   d) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka miningkatkan derajat Kesehatan;
   e) Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan dibantu oleh staf puskesmas;
   f) Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan;
   g) Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Induk, Pustu, Pusling dan lain-lain.
2) Tata Usaha
   Wewenang:
   a) Menilai kelengkapan administrasi rumah tangga;
   b) Menilai kelengkapan administrasi kepegawaian;
   c) Menilai Kelengkapan administrasi keuangan.

   Tanggung Jawab:
   a) Memonitoring data kepegawaian (kinerja)
   b) Memonitoring kinerja rumah tangga
   c) Memonitoring kinerja keuangan
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
   Wewenang:

a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Tanggung Jawab:
a) Promosi Kesehatan
b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
c) Pelayanan Kesehatan Keluarga
d) Pelayanan Gizi
e) Pelayanan P2P
f) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKM Pengembangan;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKM Pengembangan

Tanggung Jawab:
a) Pelayanan Kesehatan Jiwa
b) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional
d) Pelayanan Kesehatan Olahraga
e) Pelayanan Kesehatan Indera
f) Pelayanan Kesehatan Lansia
g) Pelayanan Kesehatan Kerja

5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab program UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Menganalisa Data Program;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja program/pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium.

6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Wewenang:
a) Memiliki wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab membina jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;

c) Mengidentifikasi dan Menganalisa Data Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja jejaring pelayanan Puskesmas

7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
Tanggung Jawab:
Bertanggung Jawab memelihara sarana dan prasarana dan peralatan puskesmas
a) Bangunan
b) Alat Kesehatan
c) IPAL
d) Parkir/Halaman
e) Kendaraan
f) Diklat
g) Kebakaran/Kecelakaan

8) Penanggung Jawab Mutu
Wewenang:
a) Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua penanggung jawab mutu;
b) Menyusun dan Mengembangkan Dokumen;
c) Mengolah dan Memelihara Dokumen/Rekaman;
d) Membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses pelayanan
Tanggung Jawab:
a) Menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem mutu manajemen
b) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjamin muta dalam proses diklat berdasarkan standar mutu

i. Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Pusksmas Manggis II

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Manggis II Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. I Ketut Sadiarta NIP. 197302232005011007	Pemimpin BLUD
2.	I Nengah Suwedi, S.Kep.,Ners NIP. 197108241991031004	Pejabat Keuangan
3.	I Wayan Sutarjana, S.Tr.Kes NIP. 197901142011011001	Pejabat Teknis Bidang UKM Eseensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat

No	Nama	Jabatan
4.	Ni Luh Ayu Meytarini, S.ST NIP. 199005142019032002	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
5.	dr. Ni Nengah Mini Widiantari NIP. 198208202014122003	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	Ni Ketut Susilaningsih, S.ST NIP. 197107071997032007	Pejabat Teknis Bidang jaringan PelayananPuskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	I Ketut Suparta, S.ST NIP. 196704091994021001	Pejabat teknis Bidang bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas
8.	dr. Ni Luh Suciptawati NIP. 197507132005012016	Pejabat Teknis Bidang Mutu

j. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Manggis II per 31 Desember 2025 sebanyak 48 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS : 29 Orang
- Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil : 19 Orang

Jumlah : 48 Orang

Jumlah pegawai berdasarkan pegawai berdasarkan profesi yaitu:

NO	Jenis Nakes	PNS	PPPK	JML
a	**Tenaga Medis**			
1	Dokter Umum	3	0	3
2	Dokter Gigi	1	1	2
	Jumlah Tenaga Medis	**4**	**1**	**5**
b	**Tenaga Kesehatan**			
1	Perawat	6	7	13
2	Bidan	9	3	12
3	Terapis Gigi dan mulut	0	1	1
4	Sanitarian	2	2	4
5	Nutrisionis	1	1	2
6	Laboratorium Kesehatan	1	0	1
7	Apoteker	1	0	1
8	Ass. Apoteker	1	0	1
9	Administrator Kesehatan	0	1	1
	Jumlah Tenaga Kesehatan	**21**	**15**	**36**
c	**Tenaga Penunjang**			
1	Pengadministrasi Perkantoran	3	1	4
2	Penata Layanan Operasional	1	0	1
3	Operator Layanan Operasional	0	2	2
	Jumlah Tenaga Penunjang	**4**	**3**	**7**
	Total Pegawai	**29**	**19**	**48**

k. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Manggis II melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokkan sebagai berikut:

Kerjasama Pelayanan Kesehatan:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Karangasem.

l. Pembiayaan UPTD Puskesmas

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikthisar Kebijakan Akuntasi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Manggis II ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Manggis II.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
    a) Laporan Realisasi Anggaran;
    b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
    c) Neraca;
    d) Laporan Operasional;
    e) Laporan Arus Kas;
    f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
    g) Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi Puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan setara kas;
   b) Investasi jangka pendek;
   c) Piutang dari kegiatan blud;
   d) Persediaan;
   e) Investasi jangka panjang;
   f) Aset tetap;
   g) Aset lainnya;
   h) Kewajiban jangka pendek;
   i) Kewajiban jangka panjang; dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.
3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.

4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

a) Pendapatan dari alokasi APBD;
b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

a) Pembayaran Pegawai;
b) Pembayaran Barang;
c) Pembayaran Bunga; dan
d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;

d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
   (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
   (3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
d) Ekuitas akhir.

h. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.

9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh blud.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Serara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Piutang

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam janga waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal penagihan pertama, kedua, dan ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c) Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Pembentukan Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	10%
2.	Kurang Lancar	50%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah

tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa maníaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
b. Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakompabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat LaboratoriumLingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produkai Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan / Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat

aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);
b) Aset Sewaan;
c) Aset yang tidak digunakan:
d) Beban yang ditangguhkan;
e) Lainnya

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiaban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

   Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

   Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

   Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka
Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Puskesmas kepada pihak lain. Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi Puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar
Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (cut off). Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.
d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas; dan
b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal.
c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.
d) Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
e) Pada akhir periode pelaporan, nilai ekuitas yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah selisih dari aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(1) Pendapatan usaha rawat jalan;
(2) Pendapatan usaha rawat darurat;
(3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

c) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

d) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

(1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
(2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
(3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
(4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;

b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.

d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.
g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
   (1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.
   (2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.
   (3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.
   (4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.
c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.
e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai

   Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai neger sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Puskesmas yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b) Beban Barang

   Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

c) Beban Jasa

   Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

d) Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja pemeliharaan. Beban pemeliharaan terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.

e) Beban Langganan Daya/Jasa
Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.

f) Beban Perjalanan Dinas
Beban Perialanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas adalah biaya yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain
Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang teriadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutanberlalunya waktu.

i) Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

j) Beban Operasional Lainnya
Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar
Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset
Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya
Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

(1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.

(2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Manggis II yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. UPTD Puskesmas Manggis II belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama UPTD Puskesmas Manggis II. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, UPTD Puskesmas Manggis II menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak: 00.277.095.6-907.000 atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan-LRA

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp977.031.167,84 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.141.308.084,84 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	0,00	973.703.541,00	0,00	989.234.065,84
b.	Pendapatan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	147.520.233,00
c.	Pendapatan APBD	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Lainnya	0,00	3.327.626,84	0,00	4.553.786,00
	Jumlah	**0,00**	**977.031.167,84**	**0,00**	**1.141.308.084,84**

4.1.2 Belanja-LRA

Belanja dilakukan dengan memepertimbangkan prinsip-prisip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.402.829.753,00 atau 84,95% dari anggaran sebesar Rp2.828.562.121,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.827.179.294,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	1.513.808.021,00	1.265.503.153,00	83,60	1.341.273.724,00
b.	Belanja Modal	1.314.754.100,00	1.137.326.600,00	86,50	485.905.570,00
	Jumlah	**2.828.562.121,00**	**2.402.829.753,00**	**84,95**	**1.827.179.294,00**

a. Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.265.503.153,00 atau 83,60% dari anggaran sebesar Rp1.513.808.021,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.341.273.724,00. Rincian atas jumlah Belanja Operasional sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Pegawai	716.020.278,00	606.445.598,00	84,70	585.965.849,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	797.787.743,00	659.057.555,00	82,61	755.307.875,00
c.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.513.808.021,00**	**1.265.503.153,00**	**83,60**	**1.341.273.724,00**

Rincian dari Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

1) Belanaja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp606.445.598,00 atau 84,70% dari anggaran sebesar Rp716.020.378,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp585.965.849,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	26.785.000,00	26.785.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.032.976,00
3	Belanja Pegawai BLUD	689.235.278,00	579.660.598,00	84,10	557.932.873,00
	Jumlah	**716.020.278,00**	**606.445.598,00**	**84,70**	**585.965.849,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp659.057.555,00 atau 82,61% dari anggaran sebesar Rp797.787.743,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp755.307.875,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.603.500,00	17.846.400,00	62,39	13.625.820,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.698.500,00	9.409.359,00	97,02	0,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	15.986.727,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.484.200,00	21.063.900,00	93,68	3.892.800,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.718.600,00	15.734.400,00	94,11	11.692.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	37.900.000,00	31.200.000,00	82,32	67.100.000,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.800.000,00	3.955.446,00	82,41	0,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	287.680,00	237.336,00	82,50	417.044,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	359.600,00	296.670,00	82,50	521.356,00
10	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	292.835.500,00	268.759.290,00	0,00	294.157.462,00
11	Belanja Barang dan Jasa BLUD	384.100.163,00	290.554.754,00	75,65	351.744.866,24
	Jumlah	**797.787.743,00**	**659.057.555,00**	**82,61**	**755.307.875,00**

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaaran 2025 sebesar Rp1.137.326.600,00 atau 86,50% dari anggaran sebesar Rp1.314.754.100,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp485.905.570,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	627.754.100,00	559.039.500,00	89,05	379.925.000,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	687.000.000,00	578.287.100,00	84,18	105.980.570,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.314.754.100,00**	**1.137.326.600,00**	**86,50**	**485.905.570,00**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp559.039.500,00 atau 89,05% dari anggaran sebesar Rp627.754.100,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp379.925.000,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	53.900.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	487.500.000,00	434.000.000,00	89,03	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	140.254.100,00	125.039.500,00	89,15	79.075.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	246.950.000,00
	Jumlah	**627.754.100,00**	**559.039.500,00**	**89,05**	**379.925.000,00**

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp578.287.100,00 atau 84,18% dari anggaran sebesar Rp687.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp105.980.570,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	687.000.000,00	578.287.100,00	84,18	105.980.570,00
	Jumlah	**687.000.000,00**	**578.287.100,00**	**84,18**	**105.980.570,00**

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran menunjukkan jumlah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari pendapatan BLUD. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.086.180,00 dan Rp85.558.562,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran APBD	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	0,00	0,00
2) Kas di Bank		
BOK - PT Bank Negara Indonesia - (No. Rek 51070200004) a.n 1590087763 BOKPKMMANGGISII	24.086.180,00	85.558.562,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**24.086.180,00**	**85.558.562,00**

b. Kas di BLUD

Kas pada BLUD menunjukkan jumlah kas yang berada di rekening BLUD yang digunakan untuk aktivitas operasional. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas masing-masing sebesar Rp115.355.885,62 dan Rp133.589.540,78 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
BLUD PT Bank Pembangunan Daerah Bali - (No. Rek 0380105000073) a.n BLUD UPTD Puskesmas Manggis II	115.355.885,62	133.589.540,78
Jumlah Kas pada BLUD	**115.355.885,62**	**133.589.540,78**

c. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang pada UPTD Puskesmas Manggis II per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp694.200,00 dan Rp2.418.400,00, dengan rincian sebagai berikut

	2025	2024
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	694.200,00	2.418.400,00
Jumlah Piutang	**694.200,00**	**2.418.400,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada UPTD Puskesmas Manggis II per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.942,00 dan Rp24.184,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2025	2024
Penyisihan Piutang	(6.942,00)	(24.184,00)
Jumlah	**(6.942,00)**	**(24.184,00)**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025:

Jenis Piutang	Umur Piutang				Total Piutang per 31 Desember 2025
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan	
JKN Klaim Non Kapitasi Oktober 2025	237.100,00	0,00	0,00	0,00	237.100,00
JKN Klaim Non Kapitasi November	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JKN Klaim Non Kapitasi Desember 2025	457.100,00	0,00	0,00	0,00	457.100,00
JKN Klaim Non Kapitasi Ambulance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Bruto	**694.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.200,00**
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%	
Jumlah Penyisihan	**6.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.942,00**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024:

Jenis Piutang	Umur Piutang				Total Piutang per 31 Desember 2024
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.418.400,00	0,00	0,00	0,00	2.418.400,00
Jumlah Bruto	**2.418.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.418.400,00**
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%	
Jumlah Penyisihan	**24.184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.184,00**

e. Persediaan

Persediaan BLUD merupakan barang habis pakai yang digunakan dalam operasional UPTD Puskesmas Manggis II. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp130.887.032,23 dan Rp125.395.833,97 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Alat Tulis Kantor	1.605.800,00	448.000,00
Bahan Komputer Berbasis IT	4.655.100,00	3.242.000,00
Kertas dan Cover	4.512.000,00	1.770.000,00
Barang Cetakan	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00
Benda Pos	0,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	117.001.432,23	117.632.533,97
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00
Alat Listrik	2.668.700,00	2.303.300,00
Perabotan Kantor	444.000,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	**130.887.032,23**	**125.395.833,97**

Berikut disajikan saldo mutasi Persediaan BLUD per 31 Desember 2025:

URAIAN	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Tulis Kantor	448.000,00	3.398.900,00	2.241.100,00	1.605.800,00
Bahan Komputer	3.242.000,00	3.940.500,00	2.527.400,00	4.655.100,00
Kertas dan Cover	1.770.000,00	8.779.000,00	6.037.000,00	4.512.000,00
Barang Cetakan	0,00	2.641.800,00	2.641.800,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	117.632.533,97	649.188.309,22	649.819.410,96	117.001.432,23
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	1.265.400,00	1.265.400,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	2.303.300,00	6.540.000,00	6.174.600,00	2.668.700,00
Perabotan Kantor	0,00	5.771.000,00	5.327.000,00	444.000,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	19.721.876,00	19.721.876,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
JUMLAH	**125.395.833,97**	**711.746.785,22**	**706.255.586,96**	**130.887.032,23**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.150.091.914,50 dan Rp3.474.782.475,80 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Tanah	110.700.000,00	110.700.000,00
2) Peralatan dan Mesin	4.125.309.073,31	3.487.746.677,31
3) Gedung dan Bangunan	4.683.806.613,50	4.105.519.514,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.793.000,00	3.793.000,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**8.923.608.686,81**	**7.707.759.191,31**
Akumulasi Penyusutan	(4.773.516.772,31)	(4.232.976.715,51)
Nilai Buku	**4.150.091.914,50**	**3.474.782.475,80**

Rincian mutasi Aset Tetap tahun 2025, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	110.700.000,00	0,00	0,00	110.700.000,00
2) Peralatan dan Mesin	3.487.746.677,31	637.562.396,00	0,00	4.125.309.073,31
3) Gedung dan Bangunan	4.105.519.514,00	578.287.099,50	0,00	4.683.806.613,50
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.793.000,00	0,00	0,00	3.793.000,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**7.707.759.191,31**	**1.215.849.495,50**	**0,00**	**8.923.608.686,81**
Akumulasi Penyusutan	**4.232.976.715,51**	**0,00**	**0,00**	**4.773.516.772,31**
Nilai Buku	**3.474.782.475,80**			**4.150.091.914,50**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.876.769,00 dan Rp14.876.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	734.759.136,00	734.759.136,00
Jumlah Harga Perolehan	**734.759.136,00**	**734.759.136,00**
Akumulasi Penyusutan	(719.882.367,00)	(719.882.367,00)
Nilai Buku	**14.876.769,00**	**14.876.769,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2025, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	734.759.136,00	0,00	0,00	734.759.136,00
Jumlah Harga Perolehan	**734.759.136,00**	**0,00**	**0,00**	**734.759.136,00**
Akumulasi Penyusutan	**719.882.367,00**	**0,00**	**0,00**	**719.882.367,00**
Niali Buku	**14.876.769,00**			**14.876.769,00**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp51.455.501,00 dan Rp52.202.218,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Utang Belanja	51.455.501,00	52.202.218,00
Jumlah Utang Belanja	**51.455.501,00**	**52.202.218,00**

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebsar Rp4.384.592.538,35 dan Rp3.784.395.180,58 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Ekuitas Awal	3.784.395.180,58	3.864.137.049,00
2) Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	521.575.679,30	(176.091.940,00)
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	78.558.678,47	96.350.071,58
Ekuitas Akhir	**4.384.529.538,35**	**3.784.395.180,58**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Lapoaran Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Manggis II per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.878.688.878,10 dan Rp1.666.809.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	971.967.741,00	994.668.985,00
b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	234.061.937,00	147.520.233,00
c) Pendapatan Hibah	557.300.962,26	0,00
d) Pendapatan APBD	1.112.030.611,00	520.066.317,00
e) Pendapatan Usaha Lainnya	3.327.626,84	4.553.786,00
Jumlah Pendapatan	**2.878.688.878,10**	**1.666.809.321,00**

4.3.2 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.357.113.198,80 dan Rp1.842.901.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Pegawai	608.258.283,00	583.346.281,00
b. Beban Barang dan Jasa	1.208.307.917,00	718.742.955,00
c. Beban Penyusutan dan Penyisihan Piutang	540.546.998,80	540.812.025,00
Jumlah Beban Operasional	**2.357.113.198,80**	**1.842.901.261,00**

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	8.160.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	604.858.283,00	547.153.305,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	0,00	28.032.976,00
Jumlah Beban Pegawai	**608.258.283,00**	**583.346.281,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Barang	1.042.399.231,00	531.323.344,00
Beban Jasa	125.214.031,00	131.374.734,00
Beban Pemeliharaan	40.694.655,00	54.235.727,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	1.809.150,00
Jumlah	**1.208.307.917,00**	**718.744.979,00**

Beban Barang:

	2025	2024
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	6.174.600,00	3.134.300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.241.100,00	2.939.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Berbasis IT	2.527.400,00	6.575.300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1.500.000,00	2.226.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	6.037.000,00	10.711.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	10.308.459,00	4.833.500,00
Beban Barang Kuasai	0,00	870.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.556.000,00	13.356.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	0,00	15.274.500,00
Beban Bahan - Bahan Kimia	19.721.876,00	11.740.456,00
Beban Fax, Internet/TV Berlangganan		0,00
Beban Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	36.786.050,00	31.992.570,00
Beban Bahan - Bahan Lainnya	5.771.000,00	6.990.500,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	268.759.290,00	294.157.462,00
Beban Makanan dan Minuman dan Natura	0,00	26.425.800,00
Beban Obat-Obatan	589.493.815,00	66.217.212,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	1.655.000,00	0,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkut	15.164.641,00	33.878.944,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.942.200,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	21.063.900,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.265.400,00	0,00
Beban bahan bahan bangunan dan konstruksi	16.431.500,00	0,00
Jumlah Beban Barang	**1.042.399.231,00**	**531.323.344,00**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Jasa Kalibrasi	3.889.501,00	5.028.000,00
Beban Jasa Kesehatan Bagi Non ASN	38.782.848,00	88.158.228,00
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Keuangan	17.000.000,00	19.758.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	9.403.980,00	8.502.406,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.333.400,00	309.000,00
Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	2.666.000,00	2.670.000,00
Beban Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	237.336,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	296.670,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	31.200.000,00	0,00
Beban Tagihan Air	4.293.600,00	6.949.100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00
Beban Transfer Keungan Daerah dan Desa	0,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.955.446,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.900.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.495.250,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000,00	0,00
Jumlah Beban Jasa	**125.214.031,00**	**131.374.734,00**

Beban Pemeliharaan:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	785.000,00	7.929.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Alat Pengolahan Air Kotor	16.889.760,00	19.874.000,00
Rumah - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	6.486.130,00	5.495.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah - Alat Pendingin	4.981.500,00	3.925.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.509.265,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	6.993.000,00	13.337.227,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	1.050.000,00	3.675.000,00
Jumlah	**40.694.655,00**	**54.235.727,00**

Beban Perjalanan Dinas:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.809.150,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**0,00**	**1.809.150,00**

c. Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang

Jumlah Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	6.942,00	24.300,00
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	540.540.056,80	540.787.725,00
Jumlah	**540.546.998,80**	**540.812.025,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka - angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup UPTD Puskesmas Manggis II dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Manggis II bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Manggis II bersamaan dengan penerbitan laporan auditor independen tanggal 06 April 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00042/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Manggis II
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Manggis II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Manggis II tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Manggis II bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

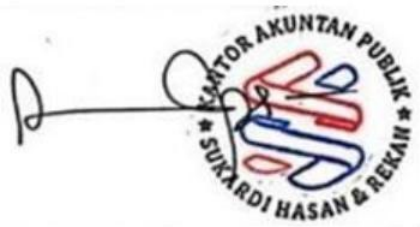
Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan design dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Aktiva Tetap dan Persediaan Perlu ditingkatkan

   Dari hasil audit yg kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:

   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Manggis II ke Pemda Karangasem.

      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:

   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.

2. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Operasional

   Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Manggis II dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Manggis II.

   Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Auntansi yang terantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

   Atas masalah tersebut, kami saranankan agar Puskesmas Manggis II meningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Manggis II dibidang standar akuntansi pemerintahan no 13.

3. Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Manggis II pada SIPD belum tepat waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Manggis II pada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka -angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Manggis II dan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00042/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan

BLUD UPTD Puskesmas Manggis II

Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Manggis II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

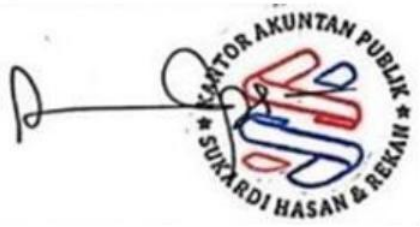
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Manggis II merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Manggis II... terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188, Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Manggis II sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188, Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Manggis II berbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Manggis II belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Manggis II melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Manggis II berbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188, Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188, Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

`

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor : 00050/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS BEBANDEM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	5
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
RESUME PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	74
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	79

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
Jln. Kuncara Giri, Bebandem, Kode Pos. 80861 Telp. (0363) 2787819

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	dr. I Made Sudarba
Nomor Telepon	:	(0363) 2787819
Alamat Kantor	:	Jln. Kuncara Giri, Bebandem
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Bebandem

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Bebandem Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Bebandem Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Bebandem Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Bebandem Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Bebandem Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Bebandem Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Bebandem Kabupaten Karangasem.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Bebandem



dr. I Made Sudarba

NIP.197610202005011011

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00050/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Bebandem

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bebandem ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00051/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 06 April 2026

Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan	*4.1.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		0,00	3.366.986.106,00	0,00	3.138.865.884,00
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		0,00	23.213.736,41	0,00	16.259.137,62
Jumlah Pendapatan		**0,00**	**3.390.199.842,41**	**0,00**	**3.155.125.021,62**
Belanja Daerah	*4.1.2*				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai		2.114.405.032,00	1.997.657.800,00	94,48	1.653.986.217,00
Belanja Barang dan Jasa		1.945.030.014,00	1.405.442.506,00	72,26	1.556.700.361,70
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		**4.059.435.046,00**	**3.403.100.306,00**	83,83	**3.210.686.578,70**
Belanja Modal					
Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		320.000.000,00	274.139.839,00	85,67	727.312.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan		320.000.000,00	317.576.800,00	99,24	2.812.418.361,50
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		**640.000.000,00**	**591.716.639,00**	92,46	**3.539.730.361,50**
Jumlah Belanja		**4.699.435.046,00**	**3.994.816.945,00**	**85,01**	**6.750.416.940,20**
Surplus (Defisit)		**(4.699.435.046,00)**	**(604.617.102,59)**	**12,87**	**(3.595.291.918,58)**
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran		**(4.699.435.046,00)**	**(604.617.102,59)**	**12,87**	**(3.595.291.918,58)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bebandem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Bebandem

dr. I Made Sudarba
NIP. 197610202005011011

UPTD PUSKESMAS BEBANDEM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**962.879.326,70**	**743.704.637,78**
Penggunaan SAL	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**962.879.326,70**	**743.704.637,78**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(604.617.102,59)	(3.595.291.918,58)
Sub Total (3+4)	**358.262.224,11**	**(2.851.587.280,80)**
Pendapatan APBN/APBD	243.113.436,00	3.814.466.607,50
Pendapatan BOK	132.863.879,00	0,00
Setoran Ke Kas Daerah	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**734.239.539,11**	**962.879.326,70**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bebandem, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Bebandem

dr. I Made Sudarba

NIP. 197610202005011011

UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
Aset	*4.2.1*		
Aset Lancar	*4.2.1.1*		
Kas di Bendahara Pengeluaran		64.769.500,00	225.189.621,00
Kas pada BLUD		669.470.039,11	737.689.705,70
Piutang Operasional BLUD		9.893.600,00	16.906.300,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(98.936,00)	(169.063,00)
Persediaan BLUD		225.857.375,55	302.105.443,04
Jumlah Aset Lancar		**969.891.578,66**	**1.281.722.006,74**
Aset Tetap	*4.2.1.2*		
Tanah		749.687.220,00	749.687.220,00
Peralatan dan Mesin		6.089.764.673,70	5.729.990.690,70
Gedung dan Bangunan		9.719.890.072,79	9.610.910.072,79
Jalan, Irigasi dan Jaringan		27.496.300,00	27.496.300,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		**16.586.838.266,49**	**16.118.084.283,49**
Akumulasi Penyusutan		(8.330.814.228,70)	(7.555.913.366,00)
Nilai Buku Aset Tetap		**8.256.024.037,79**	**8.562.170.917,49**
Aset Lainnya	*4.2.1.3*		
Aset Tetap Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-Lain		490.093.084,08	490.093.084,08
Penyusutan Aset Lain-Lain		(488.121.153,08)	(488.121.153,08)
Jumlah Aset Lainnya		**1.971.931,00**	**1.971.931,00**
Jumlah Aset		**9.227.887.547,45**	**9.845.864.855,23**
Kewajiban	*4.2.2*		
Kewajiban Jangka Pendak	*4.2.2.1*		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		172.505.072,00	173.112.616,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**172.505.072,00**	**173.112.616,00**
Jumlah Kewajiban		**172.505.072,00**	**173.112.616,00**
Ekuitas	*4.2.3*		
Ekuitas		9.055.382.475,45	9.672.752.239,23
Jumlah Ekuitas		**9.055.382.475,45**	**9.672.752.239,23**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**9.227.887.547,45**	**9.845.864.855,23**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bebandem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Bebandem

dr. I Made Sudarba
NIP. 197610202005011011

UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan	%
Pendapatan	*4.3.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		3.359.973.406,00	3.152.897.984,00	207.075.422,00	6,57
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		132.863.879,00	0,00	132.863.879,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		1.863.614.826,10	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		23.213.736,41	16.259.137,62	6.954.598,79	42,77
Pendapatan APBN/APBD		243.113.436,00	3.814.466.607,50	(3.814.466.607,50)	(100,00)
Jumlah Pendapatan		**5.622.779.283,51**	**6.983.623.729,12**	**(1.360.844.445,61)**	**(19,49)**
Beban	*4.3.2*				
Beban Pegawai		2.023.259.977,00	1.678.232.523,00	345.027.454,00	20,56
Beban Barang dan Jasa		3.312.335.678,59	3.248.717.394,95	63.618.283,64	1,96
Beban Penyisihan Piutang		98.936,00	169.063,00	(70.127,00)	(41,48)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		774.900.862,70	723.569.645,00	51.331.217,70	7,09
Beban Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban		**6.110.595.454,29**	**5.650.688.625,95**	**459.906.828,34**	**8,14**
Surplus (Defisit) Operasional		**(487.816.170,78)**	**1.332.935.103,17**	**(1.820.751.273,95)**	**(136,60)**
Kegiatan Non Operasional	*4.3.3*				
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Keg. Non.Lainnya		0,00	28.742,00	(28.742,00)	(100,00)
Jumlah Surplus(defisit) Non Operasional		**0,00**	**28.742,00**	**(28.742,00)**	**(100,00)**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(487.816.170,78)**	**1.332.963.845,17**	**(1.820.780.015,95)**	**(136,60)**
Pos Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pos Luar Biasa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Surplus (Defisit) LO		**(487.816.170,78)**	**1.332.963.845,17**	**(1.820.780.015,95)**	**(136,60)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bebandem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Bebandem

dr. I Made Sudarba
NIP. 197610202005011011

UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	**9.672.752.239,23**	**6.715.516.165,62**
Surplus (Defisit) LO	**(487.816.170,78)**	**1.332.963.845,17**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	(129.553.593,00)	1.624.272.228,44
Setoran ke Kas Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Setoran ke Kas Daerah (BOK)	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	**9.055.382.475,45**	**9.672.752.239,23**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bebandem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Bebandem

dr. I Made Sudarba
NIP. 19761020200501 1011

UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3.366.986.106,00	3.138.865.884,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	132.863.879,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	23.213.736,41	16.259.137,62
Pendapatan APBN/APBD	243.113.436,00	3.814.466.607,50
Jumlah arus Kas Masuk	**3.766.177.157,41**	**6.969.591.629,12**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.997.657.800,00	1.653.986.217,00
Belanja Barang dan Jasa	1.398.682.506,00	1.556.700.361,70
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.396.340.306,00**	**3.210.686.578,70**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**369.836.851,41**	**3.758.905.050,42**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	280.899.839,00	727.312.000,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	317.576.800,00	2.812.418.361,50
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**598.476.639,00**	**3.539.730.361,50**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(598.476.639,00)**	**(3.539.730.361,50)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Setoran ke Kas Daerah (BOK)	0,00	0,00
Setoran ke Kas Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	520.807.140,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**520.807.140,00**

Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	520.807.140,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**520.807.140,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**(228.639.787,59)**	**219.174.688,92**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**962.879.326,70**	**743.704.637,78**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**734.239.539,11**	**962.879.326,70**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bebandem, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Bebandem

dr. I Made Sudarba
NIP. 197610202005011011

Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Bebandem

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Bebandem

Puskesmas Bebandem terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Secara geografis wilayah kerja Puskesmas Bebandem merupakan seluruh wilayah Kecamatan Bebandem, dimana wilayahnya membentang di daerah perbukitan di bawah Gunung Agung sampai dengan dekat wilayah kota Kabupaten Karangasem dengan luas wilayah 81,51 km^2.

Batas wilayah kerja Puskesmas Bebandem yaitu:

1) Utara : Gunung Agung dan Kecamatan Abang
2) Bebandeman : Kecamatan Manggis
3) Timur : Kecamatan Karangasem
4) Barat : Kecamatan Bebandem

Secara administratif wilayah kerja Puskesmas Bebandem terdiri dari 8 desa dengan 70 dusun. Wilayah kerja Puskesmas Bebandem terdiri dari 8 Desa yaitu:

1) Desa Bebandem
2) Desa Sibetan
3) Desa Jungutan
4) Desa Macang
5) Desa Buana Giri
6) Desa Budakeling
7) Desa Bungaya Kangin
8) Desa Bungaya

Sarana Kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas Bebandem adalah Puskesmas pembantu 7 buah, poskesdes 5 buah, Puskesmas keliling 1 buah dan 8 bidan desa. Adapun peran serta masyarakat yang dimiliki oleh Puskesmas Bebandem yaitu:

1) Jumlah Posyandu : 72 Posyandu
2) Jumlah Desa Siaga : 8 Desa
3) Jumlah TK : 9 buah
4) Jumlah SD : 41 buah
5) Jumlah SMP : 5 buah
6) Jumlah SMA : 2 buah

UPTD Puskesmas Bebandem adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Bebandem merupakan sebuah Puskesmas Non Rawat Inap.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, UPTD Puskesmas Bebandem ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

b. Tempat dan Kedudukan

UPTD Puskesmas Bebandem beralamat di Jl. Kuncaragiri, Bebandem, Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali 80861, Telp. 0363 2787819, email: puskesmasbebandem@gmail.com.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Bebandem adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);
17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);

20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. Visi, Misi, dan Tujuan UPTD Puskesmas Bebandem

1) Visi : "Terwujudnya Pelayanan Puskesmas yang Berkualitas melalui Pendekatan Keluarga menuju Karangasem Sehat."
2) Misi
   a) Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
   b) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga;
   c) Memberi pelayanan yang bermutu dan meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan sesuai standar;
   d) Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya;
   e) Meningkatkan kualitas SDM kesehatan yang profesional, inovatif, dan berkarakter.
3) Tujuan : "Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya."

e. Program Pelayanan UPTD Puskesmas Bebandem

Program Pelayanan yang tersedia di UPTD Puskesmas Bebandem terdiri dari:

1) Pelayanan Rawat Jalan

   Pelayanan rawat jalan di UPTD Puskesmas Bebandem terdiri dari beberapa pelayanan, yaitu mulai dari pelayanan umum, pelayanan KIA/KB, pelayanan Gigi dan Mulut, pelayanan Laboratorium, pelayanan Farmasi, pelayanan Imunisasi, Konseling (VCT, Kesling, Gizi, PTM dan Jiwa, Remaja, Promkes), pelayanan Akuesure, dan pelayanan Lansia dan Jiwa.

2) Pelayanan Luar Gedung

   Pelayanan luar gedung yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Bebandem terdiri dari upaya Pelayanan Promosi Kesehatan, Upaya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Upaya Pelayanan KIA-KB, Upaya Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Perkesmas, UKS & UKGS, Upaya Pelayanan Kesehatan Lansia, Yankestradkom, UKK, Kesorga, Remaja, Pelayanan Kesehatan Jiwa, Pelayanan Kesehatan Indra, Surveillance, Pelayanan Imunisasi, Puskesmas Keliling, P3K, dan Posyandu.

f. Jenis-Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Bebandem

Jenis-jenis pelayanan Kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Bebandem berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bebandem Nomor: 440/003/BBD/I/SK/2023 Tentang Jenis Dan Jadwal Layanan Di UPTD. Puskesmas Bebandem, sebagai berikut:

1) Jenis Layanan UKP di UPTD Puskesmas Bebandem
   a) Loket Pendaftaran
   b) Layanan Kesehatan
   c) Layanan Kesehatan Jiwa
   d) Layanan Kesehatan Lansia
   e) Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut
   f) Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
   g) Layanan KB dan Pemeriksaan IVA
   h) Layanan TBC
   i) Layanan Imunisasi
   j) Layanan Farmasi
   k) Layanan Laboratorium
   l) Layanan Laboratorium Ibu Hamil
   m) Layanan Konseling Gizi
   n) Layanan Konseling Jiwa
   o) Layanan Konseling VCT (HIV/AIDS)
   p) Layanan Konseling Remaja

q) Layanan Konseling Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
r) Layanan Konseling UBM
s) Layanan Akupresur
t) Layanan Ruang Gawat Darurat (RGD)/Tindakan
u) Layanan Rujukan

2) Jenis Layanan Ukm Esensial di UPTD Puskesmas Bebandem
a) Posyandu Balita:
b) Posyandu Lansia
c) Puskesmas Keliling
d) Imunisasi
e) Kelas Ibu Hamil
f) Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
g) SDIDTK
h) Pembinaan UKS
i) UKGS
j) Kecacingan
k) Gizi Masyarakat
l) Kesehatan Lingkungan
m) Penyakit Tidak Menular
n) Perkesmas

3) Layanan Ukm Pengembangan di UPTD Puskesmas Bebandem
a) Upaya Kesehatan Kerja
b) Upaya Kesehatan Gigi Sekolah
c) Pelayanan Kesehatan Tradisional
d) Pelayanan Kesehatan Olahraga
e) Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat Desa

g. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Berikut ini Target Pencapaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan jenis kegiatan per 31 Desember 2025 sebegai berikut:

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
UKM ESENSIAL											
1	**Pelayanan Kesehatan Keluarga**	Kesehatan Ibu	1	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	bumil	%	100	639	601	94	
			2	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	bumil	%	100	639	599	94	
			3	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai Standar (K6)	bumil	%	100	639	590	92	
			4	Cakupan Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung, infeksi)	bumil	%	90	128	85	66	
			5	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (Pn)	bulin	%	100	578	597	103	
			6	Cakupan pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF 4)	bulin	%	100	578	568	98	
			7	Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN1)	bayi	%	100	578	597	103	
											93,1
		Kesehatan Bayi	1	Cakupan Pelayanan Neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN3)	bayi	%	100	578	608	105	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			2	Cakupan Penaganan komplikasi neonatus	bayi	%	80	94	30	32	
			3	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 12 bln (Kunjungan Bayi)	bayi	%	100	578	583	101	
		Upaya Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah	1	Cakupan Pelayanan Anak Balita (12 - 59 bulan)sesuai standar	Balita	%	100	2893	2754	95	
			2	Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS	Balita	%	100	649	649	100	
			3	Cakupan Stimulasi Deteksi Intervinsi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	APRAS	%	100	1039	1039	100	
		Upaya Kesehatan Sekolah	1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	siswa	%	100	4260	4260	100	
			2	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SD/MI	siswa	%	100	4260	4260	100	
			3	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik siswa SMP/MTs	siswa	%	100	2179	1066	49	
		Pelayanan Keluarga Berencana	1	Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	akseptor	%	70	6603	6573	100	
			2	Cakupan Peserta KB Pasca persalinan	akseptor	%	100	578	199	34	
		Pelayanan Calon Pengantin	1	Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Skrining Kesehatan	Catin	%	100	20	20	100	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan Kesehatan Usila	1	Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	orang	%	100	6700	6700	100	
											85,9
2	**Pelayanan Promosi Kesehatan**	PHBS 5 tatanan	1	Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	%	90	1680	1481	88	
			2	Tatanan institusi Pendidikan /sekolah	Sekolah	%	50	5	5	100	
			3	Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	%	80	12	12	100	
			4	Tatanan TTU	TTU	%	40	2	2	100	
			5	Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	%	45	5	5	100	
		Pemberdayaan Masyarakat	1	Pemberdayaan melalui Penyuluhan	Kader UKBM	%	100	360	360	100	
		Pembinaan UKBM	1	Pembinaan Posyandu	Posyandu	%	80	72	72	100	
			2	Persentase Posyandu Aktif	Posyandu	%	100	72	72	100	
		Penyuluhan NARKOBA	1	Penyuluhan Narkoba Minimal 5 kali dalam Setahun	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	5	5	5	100	
		Promosi Kesehatan	1	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan Jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	Masyarakat	kali	12	12	12	100	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			2	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar gedung Puskesmas) minimal 12 kali setahun	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	12	12	12	100	
		Program Pengembangan	1	Pembinaan UKBM Lain	kelompok peduli kesehatan	kali	3	3	1	33	
			2	Pergerakan Germas 5 indikator	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	3	3	3	100	
			3	Sosialisasi/pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	kali	1	1	1	100	
											94,4
3	**Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	Pengawasan Kualitas Air	a	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/layak	penduduk	%	95	46779	46779	100	
			b	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/IKL	Sarana	%	100	39	39	100	
			c	Persentase Pengambilan sampel air	Sampel Air	%	100	30	30	100	
			d	Persentase kualitas air minum di penyelenggara yang memenuhi syarat	Sarana	%	85	13	13	100	

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		STBM	a	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	%	100	17032	16522	97	
			b	Jumlah Desa ODF	Desa	Desa	55	8	6	75	
			c	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	%	100	8	8	100	
		Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan			Sarana	%	90	51	46	90	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan			Sarana	%	25	25	25	100	
		Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis			Fasyankes	%	100	1	1	100	
											96,2
4	**Pelayanan Gizi**	Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	1	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	bumil	%	80	10	2	20	
			2	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	bumil	%	84	601	590	98	
			3	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	bayi	%	60	103	26	25	
			4	Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	bayi	%	70	300	300	100	
			5	Persentase Cakupan Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	balita	%	85	21	9	43	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			6	Persentase Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	rematri	%	58	1725	1725	100	
			7	Persentase Cakupan vitamin A pada Balita	balita	%	90	2390	2264	95	
			8	Persentase Anemia pada ibu hamil	ibu hamil	%	33	639	12	1	
			9	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	bayi	%	2,5	300	2	1	
			10	Persentase Balita Kurus (Wasting)	balita	%	7,0	2286	21	1	
			11	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	balita	%	5,02	2310	83	4	
			12	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	balita	%	85	2310	2222	96	
			13	Persentase Cakupan Skrining anemia remaja putri	rematri	%	90	1734	830	48	
			14	Persentase Cakupan Ibu Nifas Mendapat kapsul Vitamin A	Ibu Nifas	%	82	578	592	102	
											72,7
5	**Upaya Pengendalian Penyakit**	TB Paru	1	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Orang	%	>90	105	23	22	
			2	Succsess Rate (Angka Keberhasilan Pengobatan)	orang	%	>90	30	30	100	
			3	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	orang	%	100	510	220	43	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Malaria	1	Prosentase Penderita Positif Malaria Yang Diobati sesuai Standar	orang	%	100	0	0	100	
			2	Angka Kesakitan Malaria /Annual Parasite Incident (API)	orang	per 1.000 pddk	<1	0	0	100	
		Kusta	1	Angka Prevalensi Kusta	orang	per 10.000 pddk	<1	1	0,67	67	**100,0**
			2	Angka Kesembuhan / RFT Rate	orang	%	100	1	1	100	
		Diare	1	Pelayanan penderita diare sesuai standar	orang	%	100	646	646	100	
		Hepatitis	1	Pelayanan deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	orang	%	100	639	407	64	
		ISPA	1	Prosentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	orang	%	100	1504	1504	100	
			2	Cakupan penemuan pneumonia balita	orang	%	100	72	87	121	
		Demam Berdarah Dengue	1	Angka Kesakitan DBD/Insiden Rate (IR) DBD	orang	per 100.000 pddk	50	50	172	289	**per 100000 pddk**
			2	Angka Bebas Jentik (ABJ)	rumah	%	>95	100	96	96	
		Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV /	1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	orang	%	100	851	521	61	

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		AIDS		Immunodeficiency Virus)							
		Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	1	Pelayanan kasus GHPR ditatalaksana standar	orang	%	100	947	947	100	
		Kecacingan	1	Pelayanan POPM kecacingan	orang	%	100	7296	7296	100	
		Surveilance Penyakit	1	Kelengkapan Laporan	puskesmas	%	90	12	12	100	
			2	Ketepatan laporan	puskesmas	%	100	12	12	100	
			3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal/alert Penyakit Potensial KLB	%	100	24	24	100	
											88,6
		Imunisasi	1	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	orang	%	100	629	600	95	
			2	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	orang	%	100	679	663	98	
			3	Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	orang	%	80	847	824	97	

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			4	Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	orang	%	80	639	604	95	
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	Presentase meningkatnya desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	desa	%	70	8	8	100	
			2	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	679	678	100	
			3	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	287	287	100	
			4	Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining penyakit tidak menular sesuai standar di posbindu	orang	%	100	14293	14293	100	
			5	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	90	94	104	
											98,8
UKM PENGEMBANGAN											
1	Pelayanan Kesehatan Tradisional		1	Persentase Pembinaan tanaman obat keluarga pada keluarga	Keluarga	%	3	472	237	50	
			2	Persentase Pembinaan penyehat tradisional	Orang	%	70	61	32	52	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
2	Pelayanan Kesehatan Olah Raga		1	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah raga diwilayah kerjanya	puskesmas	puskesmas	12	41	27	66	
3	Upaya Kesehatan Gigi Sekolah	Pelayanan Kesehatan Gigi Sekolah	1	Persentase Pembinaaan Kesehatan Gigi di TK	TK	%	80	17	17	100	
4			2	Persentase Pembinaan dan Bimbingan Sikat Gigi Massal pada SD/MI	SD/MI	%	100	41	41	100	
5	Upaya Kesehatan Kerja	Pelayanan Kesehatan Kerja	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	puskesmas	puskesmas	12	1	1	100	
			2	Persentase Pos UKK yang dibina	Pos UKK	%	100	1	1	100	
											81,2
UKP											
1	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	1	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat sesuai standar	FKTP	%	70	70	69,05	99	
PELAYANAN PERKESMAS											
1	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)		1	Persentase keluarga rawan yang dibina	keluarga	%	80	177	132	75	
PELAYANAN KEFARMASIAN											

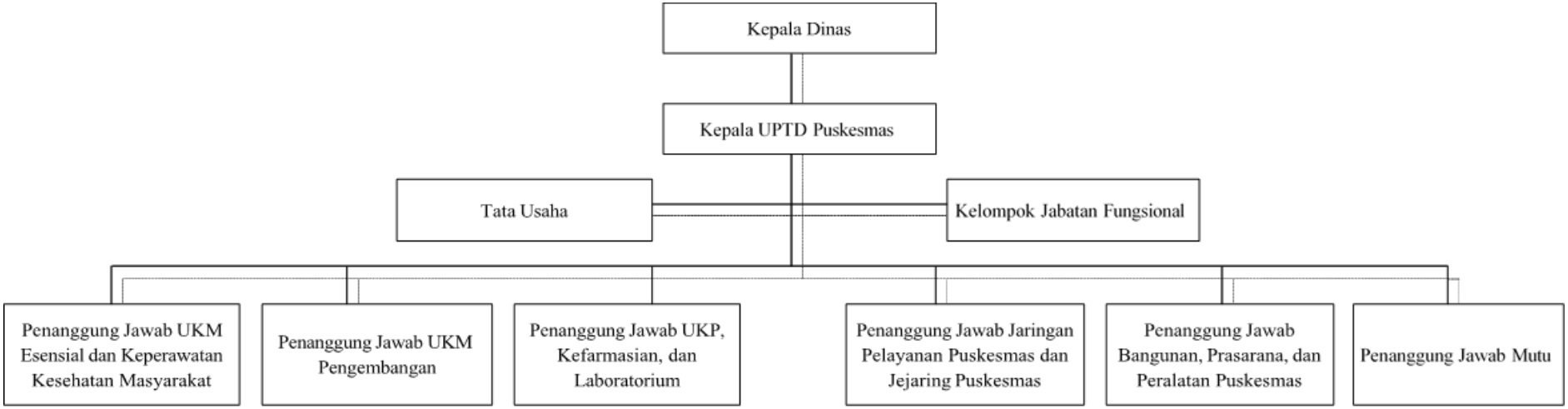
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BEBANDEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	JML SASARAN	CAPAIAN	CAKUPAN	KINERJA PUSKESMAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		1	Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	puskesmas	%	100	100	100	100	
			2	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Obat	%	96	40	40	100	
PELAYANAN LABORATORIUM											
1	Pemeriksaan Laboratorium		1	Kemampuan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis di wilayah kerja puskesemas	Jenis Pemeriksaan Spesimen	%	20	72	64	89	
			2	Kemampuan pengujian terhadap sampel lingkungan di wilayah kerja puskesmas	Jenis Pengujian Sampel	%	50	36	27	75	
TOTAL											**89,5**
											90,1

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Bebandem

Berdasarkan Bupati Karangasem Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah tentang Struktur Organisasi, Persyaratan, Wewenang dan Tanggung Jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Bebandem adalah sebagai berikut:



Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Bebandem terdiri dari:

1) Kepala UPTD;
2) Kepala Tata Usaha;
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
8) Penanggung Jawab Mutu.

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala UPTD

   Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dan melaksanakan fungsi:

   a) Menyusun program kerja UPTD Puskesmas;
   b) Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   c) Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   d) Menyelenggarakan wahana Pendidikan tenaga Kesehatan;
   e) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
   f) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
   g) Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
   h) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
   i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2) Kepala Tata Usaha

   Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas melaksanakan tugas:

   a) Menyusun program kerja tata usaha;
   b) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan dokumentasi dan kearsipan);

c) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara / daerah, keamanan dan ketertiban UPTD;

d) Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;

e) Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;

f) Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;

g) Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;

h) Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;

i) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan;

j) Melaksanakan penatausahaan keuangan;

k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;

l) Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;

m) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

n) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha; dan

o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

a) Dokter

Dokter pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

(1) Menyusun program kerja;

(2) Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat;

(3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

(4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

b) Dokter Gigi

Dokter Gigi pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

(1) Menyusun program kerja;

(2) Memberikan pelayanan Kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan Kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang Kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat;

(3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

(4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis

c) Bidan

Bidan pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

(1) Menyusun program kerja;

(2) Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan;

(3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

(4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

d) Perawat

Perawat pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

(1) Menyusun program kerja;

(2) Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan;

(3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

(4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

e) Jabatan Fungsional Lainnya

4) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang membawahi:

a) Pelayanan promosi kesehatan;

b) Pelayanan kesehatan lingkungan;

c) Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;

d) Pelayanan gizi dan bersifat UKM;

e) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan

f) Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

5) Penanggung Jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
   a) Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
   b) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
   c) Pelayanan kesehatan olahraga;
   d) Pelayanan kesehatan kerja; dan
   e) Pelayanan kesehatan lainnya.
6) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi:
   a) Pelayanan pemeriksaan umum;
   b) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
   c) Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
   d) Pelayanan gawat darurat;
   e) Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
   f) Pelayanan persalinan;
   g) Pelayanan kefarmasian;
   h) Pelayanan laboratorium;
7) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, membawahi:
   a) Puskesmas pembantu;
   b) Puskesmas keliling;
   c) Praktik bidan desa; dan
   d) Jejaring puskesmas.
8) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
9) Penanggung Jawab Mutu.

i. Pejabat pada UPTD Puskesmas Bebandem

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Bebandem Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, diketahui susunan pejabat pengelola BLUD sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. I Made Sudarba NIP.197610202005011011	Pemimpin BLUD

No	Nama	Jabatan
2.	I G Wiswasa Abhijana, SKM NIP.198808162015031002	Pejabat Keuangan
3.	Ni Putu Suastiari, A.Md. Kep NIP.198212012005012009	Pejabat Teknis Bidang UKM Eseensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat
4.	drg. I Ketut Adi Wicaksana Putra NIP.198409012014121001	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
5.	dr. I Gede Listiana, M.M. NIP.198703292014081001	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	dr. Ni Wayan Indah Puspita Ningsih NIP.198610302019032007	Pejabat Teknis Bidang Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	Ni Kadek Sri Damayanti, A.Md., Kep NIP.199807082022032008	Pejabat Teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
8.	Ni Kadek Wiraningsih, A.Md. Kes NIP.199812292022032012	Pejabat Teknis Bidang Mutu

j. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Bebandem per 31 Desember 2025 sebanyak 92 orang terdiri dari:

- Aparatur Sipil Negara (PNS) : 50 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 42 orang

Jumlah : 92 orang

Jumlah pegawai berdasarkan profesi yaitu:

NO	URAIAN	PNS	PPPK	TOTAL
PELAKSANA				
1	Penata Layanan Operasional	1	1	**2**
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	13	**14**
JABATAN FUNGSIONAL				
1	Dokter	5	0	**5**
2	Bidan	19	18	**37**
3	Dokter Gigi	1	0	**1**
4	Perawat	13	8	**21**
5	Pranata Laboratorium	1	1	**2**
6	Apoteker	1	0	**1**
7	Nutrisionis	1	1	**2**
8	Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	0	0	**0**
9	Sanitarian	2	0	**2**

NO	URAIAN	PNS	PPPK	TOTAL
10	Asisten Apoteker	2	0	**2**
11	Terapis Gigi dan Mulut	2	0	**2**
12	Administrator Kesehatan	1	0	**1**
	TOTAL	**50**	**42**	**92**

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Bebandem per 31 Desember 2024 sebanyak 85 orang terdiri dari:

- Aparatur Sipil Negara (PNS) : 47 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 19 orang
- Pegawai Non Aparatur Sipil Negara : 19 orang

Jumlah **: 85 orang**

Jumlah pegawai berdasarkan profesi yaitu:

No	Uraian	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	Dokter	3	1	0	4
2	Dokter Gigi	1	0	0	1
3	Bidan	19	8	7	34
4	Perawat	12	8	0	20
5	Terapis Gigi dan Mulut	2	0	0	2
6	Nutrisionis/ Gizi	1	1	0	2
7	Apoteker	1	0	0	1
8	Asisten Apoteker	2	0	0	2
9	Pranata Laboratorium	1	1	0	2
10	Sanitarian	2	0	0	2
11	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	0	0	1
12	Pranata Layanan Operasional	1	0	1	2
13	Pengadministrasian Perkantoran	1	0	11	12
	Jumlah	**47**	**19**	**19**	**85**

k. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Bebandem melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokkan sebagai berikut:

Kerjasama Pelayanan Kesehatan:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3) Pengelola Sampah Medis.
4) Seluruh Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SLUA.

5) Seluruh Jejaring Pelayanan di Wilayah Kerja Puskesmas.

l. Pembiayaan UPTD Puskesmas Bebandem

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Bebandem mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan

Layanan Umum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (historical cost) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Bebandem.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
    a) Laporan Realisasi Anggaran;
    b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
    c) Neraca;
    d) Laporan Operasional;
    e) Laporan Arus Kas;
    f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
    g) Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;

e) Lain-lain; dan

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) Kas dan Setara Kas;

b) Investasi Jangka Pendek;

c) Piutang dari Kegiatan Blud;

d) Persediaan;

e) Investasi Jangka Panjang;

f) Aset Tetap;

g) Aset Lainnya;

h) Kewajiban Jangka Pendek;

i) Kewajiban Jangka Panjang; Dan

j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO;

b) Beban;

c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;

d) Kegiatan non operasional;

e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;

f) Pos Luar Biasa; dan

g) Surplus/Defisit-LO.

3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

   Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   f) Pendapatan BLUD lainnya.

   Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a) Pembayaran Pegawai;
   b) Pembayaran Barang;
   c) Pembayaran Bunga; dan
   d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

   Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;

b) Penjualan Aset Lainnya;

c) Penerimaan dari Divestasi; dari

d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;

b) Perolehan Aset Lainnya;

c) Penyertaan Modal;

d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan

e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan

b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan

b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan pajak.

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.

2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3) Koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.

d) Ekuitas akhir.

h. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan

terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.

15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-Pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

   Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

   Pengukuran

   a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
   b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
   c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

   Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

   a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;
   c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
   d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

Pembentukan Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan/atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (First In First Out). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a) Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b) Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan/ Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
InstalasiPengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi/ Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);

b) Aset Sewaan;

c) Aset yang tidak digunakan;

d) Beban yang ditangguhkan; dan

e) Lainnya.

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka

Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (cut off). Beban yang masih harus

dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.
d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas;
b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal; dan
c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(1) Pendapatan usaha rawat jalan;
(2) Pendapatan usaha rawat darurat; dan
(3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

c) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

d) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
   (1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
   (2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
   (3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
   (4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.
d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.
g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:

(1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.

(2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.

(3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.

(4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.

c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.

e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai

Merupakan beban yang terkait kompensasi kepada pegawai, baik kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun yang berstatus Non-ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis Entitas.

b) Beban Barang

Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

c) Beban Jasa

Merupakan beban yang terkait dengan pemanfaatan jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

d) Beban Pemeliharaan

Merupakan beban yang terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.

e) Beban Langganan Daya/Jasa

Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.

f) Beban Perjalanan Dinas

Merupakan beban yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain

Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Merupakan beban yang timbul akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

i) Beban Penyisihan Piutang

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait potensi ketertagihannya.

j) Beban Operasional Lainnya

Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar

Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset

Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya

Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

a) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.

b) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;

b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;

c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;

d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Bebandem yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. UPTD Puskesmas Bebandem terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 13.904.974.6-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Bebandem Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan LRA

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.390.199.842,41 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.155.125.021,62 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	3.366.986.106,00	0,00	3.138.865.884,00
b.	Pendapatan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	23.213.736,41	0,00	16.259.137,62
	Jumlah	**0,00**	**3.390.199.842,41**	**0,00**	**3.155.125.021,62**

4.1.2 Belanja LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah diterapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.994.816.945,00 atau 85.01% dari anggaran sebesar Rp4.699.435.046,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.750.416.940,20, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	4.059.435.046,00	3.396.340.306,00	83,67	3.210.686.578,70
b.	Belanja Modal	640.000.000,00	598.476.639,00	93,51	3.539.730.361,50
	Jumlah	**4.699.435.046,00**	**3.994.816.945,00**	**85,01**	**6.750.416.940,20**

a. Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.403.100.306,00 atau sebesar 83,83% dari anggaran sebesar Rp4.059.435.046,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.210.686.578,70. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Pegawai	2.114.405.032,00	1.997.657.800,00	94,48	1.653.986.217,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	1.945.030.014,00	1.405.442.506,00	72,26	1.556.700.361,70
3)	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.059.435.046,00**	**3.403.100.306,00**	**83,83**	**3.210.686.578,70**

Rincian dari Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.997.657.800,00 atau sebesar 94,48% dari anggaran sebesar Rp2.114.405.032,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.653.986.217,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	30.006.000,00	30.006.000,00	100,00	0,00
b)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	14.632.214,00
c)	Belanja Pegawai BLUD	2.084.399.032,00	1.967.651.800,00	94,40	1.639.354.003,00
	Jumlah	**2.114.405.032,00**	**1.997.657.800,00**	**94,48**	**1.653.986.217,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.405.442.506,00 atau sebesar 72,26% dari anggaran sebesar Rp1.945.030.014,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.556.700.361,70. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.797.600,00	7.759.540,00	21,68	3.733.500,00
b)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	1.125.000,00	93,75	800.000,00
c)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00
d)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.080.000,00	13.030.000,00	61,81	0,00
e)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.872.400,00	19.341.200,00	45,11	5.760.000,00
f)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	116.000.000,00	81.450.000,00	70,22	203.300.000,00
g)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.400.000,00	10.068.408,00	69,92	0,00
h)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	863.040,00	604.128,00	70,00	1.275.664,00
i)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.078.800,00	755.160,00	70,00	1.594.736,00
j)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	328.047.500,00	263.278.000,00	80,26	259.025.165,00
k)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.383.690.674,00	1.008.031.070,00	72,85	1.055.111.296,70
	Jumlah	**1.945.030.014,00**	**1.405.442.506,00**	**72,26**	**1.556.700.361,70**

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp591.716.639,00 atau sebesar 92,46% dari anggaran sebesar Rp640.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.539.730.361,50. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.000.000,00	274.139.839,00	85,67	727.312.000,00
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.000.000,00	317.576.800,00	99,24	2.812.418.361,50
4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**640.000.000,00**	**591.716.639,00**	**92,46**	**3.539.730.361,50**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp274.139.839,00 atau sebesar 85,67% dari anggaran sebesar Rp320.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp727.312.000,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	320.000.000,00	274.139.839,00	85,67	199.812.000,00
	Jumlah	**320.000.000,00**	**274.139.839,00**	**85,67**	**199.812.000,00**

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp317.576.800,00 atau sebesar 99,24 % dari anggaran sebesar Rp320.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.812.418.361,50. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.000.000,00	108.980.000,00	99,07	2.812.418.361,50
b)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	210.000.000,00	208.596.800,00	99,33	0,00
	Jumlah	**320.000.000,00**	**317.576.800,00**	**99,24**	**2.812.418.361,50**

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. Kas di BOK

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp64.769.500,00 dan Rp225.189.621,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran APBD	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
BLUD- Bank BNI (No. Rek 1590087854) a.n 1050086 BOKKPKM Bebandem	64.769.500,00	225.189.621,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**64.769.500,00**	**225.189.621,00**

b. Kas di BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD. Jumlah Kas pada BLUD UPTD Puskesmas Bebandem per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp669.470.039,11 dan Rp737.689.705,70 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
BLUD-PT Bank Pembangunan Daerah Bali - (No. Rek 0220105002275) a.n BLUD UPTD Puskesmas Bebandem	669.470.039,11	737.689.705,70
Jumlah Kas pada BLUD	**669.470.039,11**	**737.689.705,70**

c. Piutang Layanan

Piutang Layanan merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Bebandem. Jumlah Piutang Layanan netto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.794.664,00 dan Rp16.737.237,00. dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Pendapatan Pelayanan:		
1) Piutang Pelayanan Promotif	865.500,00	974.200,00
2) Piutang Pelayanan RJTP	9.028.100,00	15.932.100,00
Jumlah Piutang Pelayanan (Bruto)	**9.893.600,00**	**16.906.300,00**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(98.936,00)	(169.063,00)
Jumlah Piutang Pelayanan (Netto)	**9.794.664,00**	**16.737.237,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang Pelayanan Promotif	865.500,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pelayanan RJTP	9.028.100,00			
Jumlah Piutang Bruto	9.893.600,00	0,00	0,00	0,00
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**98.936,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**9.794.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang Pelayanan Promotif	974.200,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pelayanan RJTP	15.932.100,00			
Jumlah Piutang Bruto	16.906.300,00	0,00	0,00	0,00
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**169.063,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**16.737.237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang/bahan pakai habis UPTD Puskesmas Bebandem per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp225.857.375,55 dan Rp302.105.443,04 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Persediaan Barang Habis Pakai		
Alat Tulis Kantor	6.144.067,56	9.005.500,00
Bahan Komputer	8.147.994,73	11.440.000,00
Kertas dan Cover	9.748.769,00	8.124.000,00
Barang Cetakan	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00
Benda Pos	1.000.000,00	920.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	189.095.743,81	254.824.943,04
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	5.335.845,41	6.173.000,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00
Alat Listrik	6.384.955,04	11.618.000,00
Perabotan Kantor	0,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Bangunan dan Kontruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan Barang Habis Pakai	**225.857.375,55**	**302.105.443,04**

Berikut ini merupakan saldo dan mutasi dari persediaan tahun 2025:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Persediaan Habis Pakai				
Alat Tulis Kantor	9.005.500,00	9.313.386,00	12.174.818,44	6.144.067,56
Bahan Komputer	11.440.000,00	12.367.492,00	15.659.497,27	8.147.994,73
Kertas dan Cover	8.124.000,00	22.642.329,00	21.017.560,00	9.748.769,00
Barang Cetakan	0,00	77.996.213,00	77.996.213,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	920.000,00	1.500.000,00	1.420.000,00	1.000.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	254.824.943,04	2.077.608.705,10	2.143.337.904,33	189.095.743,81
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	6.173.000,00	9.945.622,00	10.782.776,59	5.335.845,41
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	11.618.000,00	11.042.930,00	16.275.974,96	6.384.955,04
Perabotan Kantor	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	61.804.020,00	61.804.020,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**302.105.443,04**	**2.290.980.697,10**	**2.367.228.764,59**	**225.857.375,55**

Berikut ini merupakan saldo dan mutasi dari persediaan tahun 2024:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Persediaan Habis Pakai				
Alat Tulis Kantor	12.972.750,00	11.630.000,00	15.597.250,00	9.005.500,00
Kertas dan Cover	12.040.000,00	19.799.000,00	23.715.000,00	8.124.000,00
Benda Pos	500.000,00	2.500.000,00	2.080.000,00	920.000,00
Bahan Komputer	17.232.000,00	11.440.000,00	17.232.000,00	11.440.000,00
Alat Listrik	14.606.500,00	13.890.000,00	16.878.500,00	11.618.000,00
Persediaan Obat-Obatan	322.840.167,85	1.775.608.256,13	1.843.623.480,93	254.824.943,05
Barang Kuasi	667.000,00	0,00	667.000,00	0,00
Bahan Lainnya	7.484.600,00	9.350.000,00	10.661.600,00	6.173.000,00
Jumlah	**388.343.017,85**	**1.844.217.256,13**	**1.930.454.830,93**	**302.105.443,05**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.256.024.037,79 dan Rp8.562.170.917,49 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Tanah	749.687.220,00	749.687.220,00
Peralatan dan Mesin	6.089.764.673,70	5.729.990.690,70
Gedung dan Bangunan	9.719.890.072,79	9.610.910.072,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.496.300,00	27.496.300,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**16.586.838.266,49**	**16.118.084.283,49**
Akumulasi Penyusutan	(8.330.814.228,70)	(7.555.913.366,00)
Nilai Buku	**8.256.024.037,79**	**8.562.170.917,49**

Rincian mutasi Aset Tetap 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	749.687.220,00	0,00	0,00	749.687.220,00
Peralatan dan Mesin	5.009.678.690,70	727.312.000,00	7.000.000,00	5.729.990.690,70
Gedung dan Bangunan	6.798.491.711,29	2.812.418.361,50	0,00	9.610.910.072,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.496.300,00	0,00	0,00	27.496.300,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**12.585.353.921,99**	**3.539.730.361,50**	**7.000.000,00**	**16.118.084.283,49**
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.191.906.040,00	447.852.623,00	7.000.000,00	4.632.758.663,00
Gedung dan Bangunan	2.625.641.392,00	274.185.788,00	0,00	2.899.827.180,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.796.289,00	1.531.234,00	0,00	23.327.523,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**6.839.343.721,00**	**723.569.645,00**	**7.000.000,00**	**7.555.913.366,00**
Nilai Buku				
Tanah	749.687.220,00	0,00	0,00	749.687.220,00
Peralatan dan Mesin	817.772.650,70	0,00	0,00	1.097.232.027,70
Gedung dan Bangunan	4.172.850.319,29	0,00	0,00	6.711.082.892,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.700.011,00	0,00	0,00	4.168.777,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.746.010.200,99**	**0,00**	**0,00**	**8.562.170.917,49**

Rincian mutasi Aset Tetap 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	749.687.220,00	0,00	0,00	749.687.220,00
Peralatan dan Mesin	5.729.990.690,70	359.773.983,00	0,00	6.089.764.673,70
Gedung dan Bangunan	9.610.910.072,79	317.576.800,00	208.596.800,00	9.719.890.072,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.496.300,00	0,00	0,00	27.496.300,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**16.118.084.283,49**	**677.350.783,00**	**208.596.800,00**	**16.586.838.266,49**
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.632.758.663,00	417.747.404,70		5.050.506.067,70
Gedung dan Bangunan	2.899.827.180,00	355.622.224,00	0,00	3.255.449.404,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.327.523,00	1.531.234,00	0,00	24.858.757,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**7.555.913.366,00**	**774.900.862,70**	**0,00**	**8.330.814.228,70**
Nilai Buku				
Tanah	749.687.220,00	0,00	0,00	749.687.220,00
Peralatan dan Mesin	1.097.232.027,70	0,00	0,00	1.039.258.606,00
Gedung dan Bangunan	6.711.082.892,79	0,00	0,00	6.464.440.668,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.168.777,00	0,00	0,00	2.637.543,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**8.562.170.917,49**	**0,00**	**0,00**	**8.256.024.037,79**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya UPTD Puskesmas Bebandem per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.971.931,00 dan Rp1.971.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	490.093.084,08	490.093.084,08
Jumlah Harga Perolehan	**490.093.084,08**	**490.093.084,08**
Akumulasi Penyusutan	(488.121.154,08)	(488.121.153,08)
Nilai Buku	**1.971.930,00**	**1.971.931,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	490.093.084,09	0,00	0,00	490.093.084,09
Jumlah	**490.093.084,09**	**0,00**	**0,00**	**490.093.084,09**
Akumulasi Penyusutan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	488.121.153,08	0,00	0,00	488.121.153,08
Jumlah	**488.121.153,08**	**0,00**	**0,00**	**488.121.153,08**
Nilai Buku				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	1.971.931,00	0,00	0,00	1.971.931,01
Jumlah	**1.971.931,00**	**0,00**	**0,00**	**1.971.931,01**

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	490.093.084,09	0,00	6.100.000,00	483.993.084,09
Jumlah	**490.093.084,09**	**0,00**	**6.100.000,00**	**483.993.084,09**
Akumulasi Penyusutan				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	488.121.153,08	0,00	6.100.000,00	482.021.153,08
Jumlah	**488.121.153,08**	**0,00**	**6.100.000,00**	**482.021.153,08**
Nilai Buku				
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	1.971.931,00	0,00	0,00	1.971.931,01
Jumlah	**1.971.931,00**	**0,00**	**0,00**	**1.971.931,01**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Belanja UPTD Puskesmas Bebandem per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp172.505.072,00 dan Rp173.112.616,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	172.505.072,00	146.902.895,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	0,00	26.209.721,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	**172.505.072,00**	**173.112.616,00**

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.2.3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.055.382.475,45 dan Rp9.672.752.239,23 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Ekuitas Awal	9.672.752.239,23	6.715.516.165,62
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(487.816.170,78)	1.332.963.845,17
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	(129.553.593,00)	1.624.272.228,44
Ekuitas Akhir	**9.055.382.475,45**	**9.672.752.239,23**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Bebandem pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp5.622.779.283,51 dan Rp6.983.623.729,12 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3.359.973.406,00	3.152.897.984,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	132.863.879,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	1.863.614.826,10	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	23.213.736,41	16.259.137,62
Pendapatan APBN/APBD	243.113.436,00	3.814.466.607,50
Jumlah	**5.622.779.283,51**	**6.983.623.729,12**

4.3.2 Beban

Beban UPTD Puskesmas Bebandem pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp6.110.595.454,29 dan Rp5.650.688.625,95 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Pegawai	2.023.259.977,00	1.678.232.523,00
Beban Barang dan Jasa	3.312.335.678,59	3.248.717.394,95
Beban Penyisihan Piutang	98.936,00	169.063,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	774.900.862,70	723.569.645,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	**6.110.595.454,29**	**5.650.688.625,95**

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai UPTD Puskesmas Bebandem pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1.993.253.977,00	1.671.432.523,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	30.006.000,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	6.800.000,00
Jumlah	**2.023.259.977,00**	**1.678.232.523,00**

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa UPTD Puskesmas Bebandem pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang:

	2025	2024
Beban Barang Habis Pakai		
Beban Bahan Kimia	61.807.020,00	59.431.859,00
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	24.020.640,00	233.900.350,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	10.782.776,59	9.350.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.740.000,00	9.990.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	69.805.808,00	83.510.900,00
Beban Bahan Cetak	0,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.174.818,44	15.597.250,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	21.017.560,00	23.715.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	67.680.213,00	800.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.420.000,00	2.080.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.659.497,27	17.232.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.275.974,96	16.878.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	33.097.000,00	22.632.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat	2.073.532.096,33	1.853.881.503,95
Beban Makanan dan Minuman Rapat	15.910.000,00	8.008.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	31296000	55.213.100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.652.700,00	5.760.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	0	26.100.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.378.620,00
Beban Perabot Kantor	18.717.750,00	7.484.600,00
Beban Barang Kuasi	0,00	667.000,00
Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.864.350,00	
Jumlah	**2.548.454.204,59**	**2.453.610.682,95**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	81.450.000,00	203.300.000,00
beban Jasa Tenaga Penganganan Prasarana dan Sarana Umum	31.080.000,00	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	10.241.173,00	14.874.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	45.004.451,00	33.180.120,00
Beban Tagihan Telepon	7.528.640,00	7.396.197,00
Beban Tagihan Air	1.920.000,00	2.011.500,00
Beban Tagihan Listrik	32.000.687,00	29.046.125,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	6.660.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.381.300,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	184.571.077,00	391.452.065,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	16.627.000,00
Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	2.664.000,00	2.666.000,00
Jasa Pengolahan PMT Lokal	0,00	745.875,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	263.278.000,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.068.408,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	604.128,00	1.275.664,00
Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	755.160,00	1.594.736,00
Jumlah	**681.347.024,00**	**710.829.282,00**

Beban Pemeliharaan:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	6.549.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3.163.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	4.939.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	18.315.000,00	7.997.550,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus	7.040.000,00	5.655.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Pendingin	5.770.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.512.150,00	20.316.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	9.517.140,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.969.800,00	7.969.800,00
Beban Pemeliharaab Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.495.500,00	3.774.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	1.794.400,00
Jumlah	**62.754.450,00**	**57.023.890,00**

Beban Perjalanan Dinas:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	7.495.540,00
Jumlah	**0,00**	**7.495.540,00**

Beban Uang dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:

	2025	2024
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	19.780.000,00	19.758.000,00
Jumlah	**19.780.000,00**	**19.758.000,00**

3. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang UPTD Puskesmas Bebandem pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	98.936,00	169.063,00
Jumlah	**98.936,00**	**169.063,00**

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi UPTD Puskesmas Bebandem pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyusutan		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	417.747.404,70	447.852.623,00
Gedung dan Bangunan	355.622.224,00	274.185.788,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.531.234,00	1.531.234,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan	**774.900.862,70**	**723.569.645,00**
Beban Amortisasi		
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Jumlah Beban Lainnya	**0,00**	**0,00**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**774.900.862,70**	**723.569.645,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
(Kerugiab) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	0,00	28.742,00
Jumlah	**0,00**	**28.742,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca tanggal 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka-angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup BLUD UPTD Puskesmas Bebandem dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bebandem berlangsung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Bebandem bersamaan dengan penerbitan Laporan Auditor Independen pada tanggal 06 April 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00050/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Bebandem
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bebandem untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 06 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bebandem tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Bebandem bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan *design* dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Aktiva Tetap Dan Persediaan Perlu Ditingkatkan

   Dari hasil audit yg kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:,

   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Bebandem ke Pemda Karangasem.

      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.
   2) Gudang Persediaan obat dan BHP (Bahan Habis Pakai) belum memadai, karena suhu ruangan tidak diatur dan barang ditaruh tidak tertata dengan baik.
   3) Terdapat bangunan rawat inap yang belum berfungsi yang disebabkan peralatan penunjang belum lengkap.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:

   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.
   2) Menyediakan Gudang obat dan BHP (Bahan Habis Pakai) yang lebih baik agar persediaan obat dan BHP aman dan tidak gampang rusak.
   3) Segera menyediakan peralatan penunjang agar ruangan rawat inap dapat dimanfaakan secara optimal.

2. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan dalam Laporan Operasional

   Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Bebandem dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Bebandem.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Akuntansi yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

Atas masalah tersebut, kami sarankan agar Puskesmas Bebandem meningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Bebandem dibidang Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

3. Pencatatan Transaksi Keuangan Puskesmas Bebandem Pada SIPD Belum Tepat Waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Bebandem pada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka-angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Bebandem dan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00050/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Bebandem
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bebandem untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 06 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

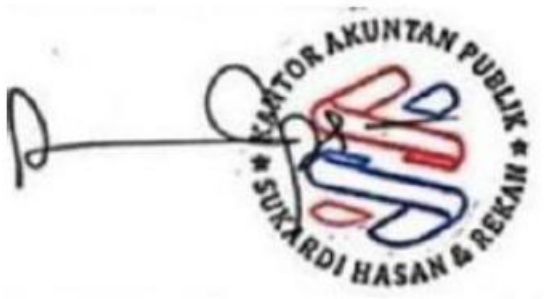
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Bebandem merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Bebandem... terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Bebandem sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Bebandem berbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Bebandem belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Bebandem melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Bebandem berbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email: info@kapsukardihasan.com ; Website: https://www.kapsukardihasan.com

`

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS SELAT
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor: 00049/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS SELAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	10
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	82
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN	87

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS SELAT
Jalan Raya Selat, Kode Pos : 80862
Email : selat.pusk@gmail.com No. Hp : 082341440012
Laman : https://puskesmas-selat.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSKESMAS SELAT YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ns.Ni Nyoman Sri Wedayanti,S.Kep.,M.M
Nomor Telepon	:	082341440012
Alamat kantor	:	Jalan Raya Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali 80862
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Selat

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Selat Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Selat Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Selat Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No 13
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskeamas Selat Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Selat Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Selat Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Selat

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Selat



Ns.Ni Nyoman Sri Wedayanti,S.Kep.,M.M
NIP. 19810829 200501 2 015

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00049/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Selat

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Selat ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00049/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/IV/2025 tanggal 14 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 06 April 2026





Pande Putu Agus Eka Pertama, AK., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

UPTD PUSKESMAS SELAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN DAERAH	*4.1.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		0,00	3.468.380.943,00	0,00	3.187.530.340,00
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		0,00	12.827.927,00	0,00	11.629.281,75
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**3.481.208.870,00**	**0,00**	**3.199.159.621,75**
BELANJA	*4.1.2*				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		1.985.181.119,00	1.970.135.608,00	99,24	1.597.732.706,00
Belanja Barang dan Jasa		2.155.838.810,00	1.908.564.520,00	88,53	2.317.876.717,38
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		**4.141.019.929,00**	**3.878.700.128,00**	**93,67**	**3.915.609.423,38**
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		108.058.200,00	88.215.500,00	81,64	335.945.580,00
Belanja Gedung dan Bangunan		800.000.000,00	790.899.420,35	98,86	1.817.900.004,50
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**908.058.200,00**	**879.114.920,35**	**96,81**	**2.153.845.584,50**
JUMLAH BELANJA		**5.049.078.129,00**	**4.757.815.048,35**	**94,23**	**6.069.455.007,88**
SURPLUS/DEFISIT		**(5.049.078.129,00)**	**(1.276.606.178,35)**	**25,28**	**(2.870.295.386,13)**
JUMLAH SILPA		**(5.049.078.129,00)**	**(1.276.606.178,35)**	**25,28**	**(2.870.295.386,13)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Selat, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Selat

Ns.Ni Nyoman Sri Wedayanti,S.Kep.,M.M
NIP. 19810829 200501 2 015

UPTD PUSKESMAS SELAT

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**368.282.627,20**	**822.371.828,45**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**368.282.627,20**	**822.371.828,45**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(1.276.606.178,35)	(2.870.295.386,13)
Sub Total (3+4)	**(908.323.551,15)**	**(2.047.923.557,68)**
Pendapatan APBN/APBD	1.074.283.004,35	2.416.206.184,88
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	341.899.822,00	0,00
Setoran ke kas Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**507.859.275,20**	**368.282.627,20**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Selat, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Selat

Ns.Ni Nyoman Sri Wedayanti,S.Kep.,M.M

NIP. 19810829 200501 2 015

UPTD PUSKESMAS SELAT

NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET	*4.2.1*		
ASET LANCAR	*4.2.1.1*		
Kas di Bendahara Pengeluaran		15.309.356,00	52.864.178,00
Kas pada BLUD		492.549.919,20	315.418.449,20
Piutang Operasional BLUD		99.632.500,00	19.388.600,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(996.325,00)	(193.886,00)
Persediaan BLUD		469.103.535,34	493.763.095,82
JUMLAH ASET LANCAR		**1.075.598.985,54**	**881.240.437,02**
ASET TETAP	*4.2.1.2*		
Tanah		23.860.500,00	23.860.500,00
Peralatan dan Mesin		4.838.834.259,17	4.677.010.281,17
Gedung dan Bangunan		11.315.827.583,04	10.524.928.162,69
Jalan, Irigasi dan Jaringan		53.284.900,00	50.950.400,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
JUMLAH NILAI BUKU ASET TETAP		**16.231.807.242,21**	**15.276.749.343,86**
Akumulasi Penyusutan		(8.223.608.678,17)	(7.568.174.091,17)
JUMLAH ASET TETAP		**8.008.198.564,04**	**7.708.575.252,69**
ASET LAINNYA	*4.2.1.3*		
Aset Tetap Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		2.257.500.776,10	2.257.500.776,10
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		(2.228.628.144,25)	(2.228.628.144,25)
JUMLAH ASET LAINNYA		**28.872.631,85**	**28.872.631,85**
JUMLAH ASET		**9.112.670.181,43**	**8.618.688.321,56**
KEWAJIBAN	*4.2.2*		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	*4.2.2.1*		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		249.620.520,00	188.643.045,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**0,00**	**188.643.045,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**0,00**	**188.643.045,00**
EKUITAS	*4.2.3*		
Ekuitas		9.112.670.181,43	8.430.045.276,56
JUMLAH EKUITAS		**9.112.670.181,43**	**8.430.045.276,56**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**9.112.670.181,43**	**8.618.688.321,56**
		-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Selat, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Selat

Ns.Ni Nyoman Sri Wedayanti,S.Kep.,M.M
NIP. 19810829 200501 2 015

UPTD PUSKESMAS SELAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan	%
PENDAPATAN	*4.3.1*				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		3.541.883.443,00	3.147.050.340,00	394.833.103,00	12,55
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)		341.899.822,00	0,00	341.899.822,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		1.301.304.068,85	0,00	1.301.304.068,85	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		12.827.927,00	11.629.281,75	1.198.645,25	10,31
Pendapatan APBN/APBD		1.074.283.004,35	2.416.206.184,88	(1.341.923.180,53)	(55,54)
JUMLAH PENDAPATAN		**6.272.198.265,20**	**5.574.885.806,63**	**697.312.458,57**	**12,51**
BEBAN	*4.3.2*				
Beban Pegawai		2.041.967.747,00	1.643.846.479,00	398.121.268,00	24,22
Beban Barang dan Jasa		3.219.321.735,33	2.547.631.959,97	671.689.775,36	26,37
Beban Penyisihan Piutang		996.325,00	261.300,00	735.025,00	281,30
Beban Penyusutan dan Amortisasi		655.434.587,00	733.230.825,00	(77.796.238,00)	(10,61)
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**5.917.720.394,33**	**4.924.970.563,97**	**992.749.830,36**	**20,16**
SURPLUS(DEFISIT) OPERASIONAL		**354.477.870,87**	**649.915.242,66**	**(295.437.371,79)**	**(45,46)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	666.100,00	(666.100,00)	(100,00)
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) NON OPERASIOAL		**0,00**	**666.100,00**	**(666.100,00)**	**(100,00)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**354.477.870,87**	**650.581.342,66**	**(296.103.471,79)**	**(45,51)**
POS LUAR BIASA		0,00	0,00		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**354.477.870,87**	**650.581.342,66**	**(296.103.471,79)**	**(45,51)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Selat, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Selat

Ns.Ni Nyoman Sri Wedayanti,S.Kep.,M.M
NIP. 19810829 200501 2 015

BLUD PUSKESMAS SELAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
EKUITAS AWAL	**8.430.045.276,56**	**7.505.851.232,54**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**354.477.870,87**	**650.581.342,66**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	328.147.034,00	273.612.701,36
EKUITAS AKHIR	**9.112.670.181,43**	**8.430.045.276,56**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Selat, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Selat

Ns.Ni Nyoman Sri Wedayanti,S.Kep.,M.M
NIP. 19810829 200501 2 015

UPTD PUSKESMAS SELAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3.468.380.943,00	3.187.530.340,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	341.899.822,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	12.827.927,00	11.629.281,75
Pendapatan APBN/APBD	1.074.283.004,35	2.416.206.184,88
Jumlah arus Kas Masuk	**4.897.391.696,35**	**5.615.365.806,63**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.970.135.608,00	1.597.732.706,00
Belanja Barang dan Jasa	1.908.564.520,00	2.317.876.717,38
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.878.700.128,00**	**3.915.609.423,38**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**1.018.691.568,35**	**1.699.756.383,25**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	88.215.500,00	335.945.580,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	790.899.420,35	1.817.900.004,50
Perolehan jalan,irigasi dan jaringan	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**879.114.920,35**	**2.153.845.584,50**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(879.114.920,35)**	**(2.153.845.584,50)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Penyetoran Ke Kas Daerah (BOK)	0,00	0,00
Penyetoran Ke Kas Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	404.057.260,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**404.057.260,00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	404.057.260,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**404.057.260,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**139.576.648,00**	**(454.089.201,25)**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**368.282.627,20**	**822.371.828,45**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**507.859.275,20**	**368.282.627,20**
menurut neraca		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Selat, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Selat

Ns.Ni Nyoman Sri Wedayanti,S.Kep.,M.M
NIP. 19810829 200501 2 015

Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Selat

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Selat

UPTD Puskesmas Selat adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Selat merupakan sebuah Puskesmas Rawat Inap.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK /2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 28 Desember 2022, UPTD Puskesmas Selat ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

Batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Utara : Gunung Agung/Kecamatan Kubu
Barat : Kecamatan Rendang
Timur : Kecamatan Bebandem
Selatan : Kecamatan Sidemen

b. Tempat Kedudukan

UPTD Puskesmas Selat beralamat di Jalan Raya Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali 80862, Telp 082 341440012, Email: selat.pusk@gmail.com.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Selat adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);
17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);

19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

d. Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai UPTD Puskesmas Selat

1) Visi UPTD Puskesmas Selat

"Terwujudnya Kecamatan Selat Sehat Melalui Terpenuhi Pelayanan Kesehatan Dasar yang Optimal pada Jenis dan Mutu Pelayanan Tahun 2026"

2) Misi UPTD Puskesmas Selat

a) Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;
b) Meningkatkan Cakupan pelayanan di bidang Kesehatan Ibu dan Anak terutama, ibu hamil, bayi dan balita;
c) Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur;
d) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas;
e) Memberdayakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
f) Membangun Sistem Informasi Puskesmas;
g) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama program dan lintas sektor dalam upaya penyelenggaraan kegiatan.

e. Jenis-jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Selat

Jenis Pelayanan Kesehatan yang tersedia di UPTD Puskesmas Selat terdiri dari:

1) Pelayanan Poliklinik

Pelayanan Poliklinik dimulai dari pelayanan pendaftaran dan Rekam Medis. Pelayanan pendaftaran dilaksanakan di Ruang pendaftaran. Di sana pengunjung atau pasein dilayani dengan e-rekam medis/e-Pusk. Pasien menyerahkan identitas berupa kartu (KTP, Kartu BPJS, KK) kemudian akan diproses melalui e-Pusk sehingga pasien mendapatkan nomor antrian dan data masuk ke tempat pelayanan yang di tuju, seperti pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan KIA/KB, atau pelayanan tindakan. Setelah itu, pasien akan diarahkan untuk menunggu sesuai dengan jenis pelayanan yang akan diterima. Pemanggilan pasien disesuaikan dengan nomor urut pada aplikasi e -Pusk. Terkait pasein yang tidak memiliki jaminan kesehatan, maka didaftarkan sebagai pasien umum dan membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh daerah (Peraturan Daerah). Sedangkan untuk Pasien Gawat Darurat, sudah disediakan loket khusus yaitu loket Gawat Darurat.

2) Unit Gawat Darurat

   Puskesmas Selat memiliki ruang khusus unit gawat darurat dan ruang tindakan medik untuk mengatasi tindakan kegawat darurat pelayanan primer. Penanganan kasus gawat darurat menggunakan triase kegawatan dengan prioritas pasien yang di dahulukan. Puskesmas Selat sudah memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit bagi pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan mengacu pada protap dan standar pelayanan.

3) Pelayanan Persalinan

   UPTD Puskesmas Selat memiliki ruang khusus Persalinan untuk penanganan Persalinan Normal. Puskesmas Selat juga merupakan Puskesmas yang mampu PONED dan SDM- nya sudah mendapatkan pelatihan baik secara daring maupun luring. Selain ruang persalinan Puskesmas Selat juga memiliki ruang pasca persalinan. Pelayanan persalinan yang diberikan mengacu pada protap-protap dan standar pelayanan.

4) Pelayanan Rawat Inap

   UPTD Puskesmas Selat memiliki ruang khusus rawat inap post persalinan/partus sebanyak 3 kamar dengan jumlah 12 bed. Penanganan atau prosedur pada penanganan di ruang rawat inap menguraikan langkah-langkah untuk mengutamakan penanganan ibu post partus sejak pasien datang hingga tindakan lanjutan yang diperlukan pasien, seperti dirujuk ke rumah sakit.

5) Laboratorium

   UPTD Puskesmas Selat melayani laboratorium untuk menunjang pelayanan medis. Laboratorium yang dialayani diantaranya Hematologi berupa pemeriksaan darah lengkap, kimia klinik, pemeriksaan bakteriologi dan parasitologi, pemeriksaan urin katagori sederhana, dan pemeriksaan imunologi. Biaya yang dikenakan juga berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah. Selain itu, Puskesmas Selat juga sudah memilki alat TCM untuk pemeriksaan TBC.

6) Apotek

   Pelayanan obat di apotek dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-Pusk. Pasien yang sudah mendapatkan resep pengobatan pada aplikasi akan segera terkirim ke

apotek sehingga apotek dapat mempersiapkan obat terlebih dahulu guna mengurangi waktu pasien untuk menunggu. Pelayanan obat dilaksanakan sesuai dengan standar atau prosedur pelayanan kefarmasian dan dilayani oleh apoteker sesuai dengan kompetensinya.

7) Pelayanan Gizi
   Pelayanan Gizi dilaksanakan baik dalam Gedung maupun diluar Gedung Puskesmas. Pelayanan gizi yang dilaksanakan di dalam Gedung adalah konseling gizi yang dilaksanakan pada ruangan konseling yang terseida. Sedangkan untuk pelayanan yang dilaksanakan di luar Gedung adalah kegiatan promotive dan preventif seperti upaya penurunan stunting, penanganan bayi BBLR, Anemia pada remaja dan lainnya terkait dengan gizi.
8) Pelayanan Ambulance
   Pelayanan Ambulans stand by 24 jam sehingga pasien yang memerlukan ambulans untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut tetap siaga. Terdapat juga sopir yang bertugas 24 jam secara bergilir serta terdapat tim backup apabila ada yang memerlukan rujukan secara bersamaan.
9) Rekam Medik
   Saat ini, UPTD Puskesmas Selat menggunakan e-rekam medis. Oleh karena itu, rekam medis pasien sudah tercatat pada e-rekam medis. Namun Rekam Medis manual/catatan rekam Medis disimpan dengan baik. Rekam Medis ditempatkan pada ruangan khusus dan tidak semua orang boleh masuk untuk menjaga kerahasiaan dokumen.
10) Kesehatan Lingkungan
    Pelayanan Kesehatan Lingkungan juga dilaksanakan baik di dalam Gedung maupun di luar Gedung. Pelayanan Kesahatan Lingkungan yang dilakukan di dalam Gedung menangani terkait limbah medis, dimana pada UTD Puskesmas Selat juga terdapat IPAL. Dalam pengelolaan sampah medis sudah memiliki rekanan/MoU dalam penanganannya. Selain itu, sampah organik dan Non Organik juga sudah memiliki MoU dalam pengelolaannya. Kegiatan yang dilaksanakan diluar Gedung Puskesmas adalah terkait pemeriksaan sample air, kaporitisasi, dan pemicuan Desa ODF maupun STBM.

f. Sasaran, Indikator, Tenaga Kerja

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	SATUAN	SASARAN	TARGET SASARAN		PENCAPAIAN		CAKUPAN	
					Abs	%	Abs	%	VARIABEL	SUBVARIABEL
1	2	3	4	5	6		7		8	
		A. UKM ESENSIAL								
		PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA (96,44 %)								
		KESEHATAN IBU							**94,49**	Baik
		a. Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	Bumil	534	534	100	496	92,88		92,88
		b. Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Bumil	457	457	100	477	104,38		104,38
		c. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K6)	Bumil	457	457	100	454	99,34		99,34
		d. Cakupan deteksi faktor resiko (preeklamsia,obesitas ,anemia,KEK,perdarahan,jantung, infeksi)	Bumil	107	96,3	90	61	63,34		63,34

		e. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (Pn)	Bulin	457	457	100	465	101,75		101,75
		f. Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF4)	Bulin	457	457	100	446	97,59		97,59
		g. Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN1)	Bulin	457	457	100	467	102,19		102,19
		KESEHATAN BAYI							**77,10**	kurang
		a. Cakupan pelayanan neonatus pertama mendapat pelayanan sesuai standar (KN3)	bayi	457	457	100	467	102,19		102,19
		b. Cakupan penanganan komplikasi neonatus	bayi	74	59	80	17	28,72		28,72
		c. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 29 hari-12 bulan (kunjungan bayi)	bayi	499	499	100	501	100,40		100,40
		UPAYA KESEHATAN BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH							**100,04**	Baik
		a. Cakupan Pelayanan Anak Balita (12-59 bulan) sesuai standar	Balita	2453	2453	100	2456	100,12		100,12
		b. Cakupan pelayanan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS	Balita	1610	1610	100	1610	100		100
		c. Cakupan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak prasekolah	APRAS	670	670	100	670	100		100
		UPAYA KESEHATAN SEKOLAH							**100,0**	Baik
		a. Persentase anak usia Pendidikan	Siswa	5845	5845	100	5845	100		100

		dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
		b. Cakupan Pemeriksaan kesehatan peserta didik SD/MI	Siswa	3697	3697	100	3697	100		100
		c. Cakupan pemeriksaan kesehatan peserta didik siswa SMP/MTs	Siswa	2148	2148	100	2148	100		100
		PELAYANAN KELUARGA BERENCANA							**103,485**	Baik
		a. Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	Akseptor	8189	5732	70	6132	106,97		106,97
		b. Cakupan peserta KB Pasca persalinan	Akseptor	41	41	100	41	100		100
		PELAYANAN CALON PENGANTIN							**100**	Baik
		a. Persentase Calon pengantin mendapat skrining kesehatan	Catin	26	26	100	26	100		100
		PELAYANAN KESEHATAN USILA							**100**	Baik
		a. Persentase usia lanjut berusia 60 tahun ketas yang mendapat skrining sesuai standar	Orang	5760	5760	100	5760	100		100
		PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (**149,36** **%)**								
		PHBS 5 TATANAN							**149,36**	**Baik**
		a. Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	1680	1512	90	1680	109,89		109,89
		b. Tatanan Institusi Pendidikan /sekolah	Sekolah	39	20	50	37	189,74		189,74

		c. Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	12	10	80	12	125		125
		d. Tatanan TTU	TTU	3	2	40	2	100		100
		e. Tatanan Tempat Kerja	Tempat kerja	4	2	45	4	222,2		222,2
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							**103,03**	**Baik**
		Pemberdayaan melalui penyuluhan	Kader UKBM	330	330	100	340	103.03		103,03
		PEMBINAAN UKBM							**175**	**Baik**
		a. Pembinaan Posyandu	Posyandu	66	26	40	66	250		250
		b. Persetase Posyandu aktif	Posyandu	66	66	100	66	100		100
		PENYULUHAN NARKOBA							**100**	**Baik**
		a. Penyuluhan narkoba minimal 5 kali dalam setahun	Masyarakat,sekolah, kelompok	5	5	100	5	100		100
		PROMOSI KESEHATAN DALAM GEDUNG							**100**	Baik
		a. Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali	Masyarakat	12	12	100	12	100		100

		b. Promosi kesehatan untuk program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (kegiatan di luar gedung Puskesmas)minimal 12 kali	Masy,sekolah,kelompok	12	12	100	12	100		100
		PROGRAM PENGEMBANGAN							77,78	cukup
		a. Pembinaan UKBM lain	Kelompok peduli kesehatan	3	3	100	2	66,67		66,67
		b. Pembinaan Germas 5 Indikator	Masy, sekolah,kelompok	3	3	100	5	166,67		166,67
		c. Sosialisasi /Pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	1	1	100	0	0		0
3		PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN **(133,36 %)**								
		1.PENGAWASAN KUALITAS AIR							133,33	Baik
		a. Persentase Penduduk terakses air minum berkualitas /layak	penduduk	47390	45021	95	47390	105,26		100
		b. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan /IKL	Sarana	396	396	100	396	100		166,67
		c. Pengambilan sample air	Sample	8	100	8	8	100		100
		d. Persentase sarana air minum yang	Sample	8	6,8	85	8	117,65		166,67

		diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar								
		2.STBM							**133,39**	**Baik**
		a. Persentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	14248	14248	100	14248	100		100
		b. Persentase Desa ODF	Desa	8	4	50	8	200		200
		c. Persentase Desa yang melaksanakan STBM	Desa	8	8	100	8	100		100
		3.Pengawasan Tempat –Tempat Umum (TFU) yang memenuhi syarat	Sarana	41	63	90	41	65,08	65,08	65,08
		4.Persentase tempat pengolahan makanan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan	Sarana	71	18	25	64	360,56	360,56	360,56
		5.Persentase RS dan fasyankes yang mengelola limbah medis	Fasyankes	10	10	100	10	100	100	100
		6.Persentase Rumah Sehat	Rumah	14130	3533	25	12205	345,51	345,51	345,51
4		PELAYANAN GIZI (**109,23** **%)**								
		UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT							**109,23**	Baik
		a. Persentase Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	Bumil	35	28	80	35	125		125
		b. Persentase Ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	Bumil	534	449	84	477	106,34		106,34

		c. Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif	Bayi	239	143	60	192	133,89		133,89
		d. Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)	Bayi	466	326	70	393	120,48		120,48
		e. Persentase balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	Balita	32	27	85	15	55,15		55,15
		f. Persentase remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	Rematri	1675	972	58	3350	344,83		100
		g. Persentase cakupan Vitamin A pada balita	Balita	2217	1995	90	2128	106,65		106,65
		h. Persentase Anemia pada ibu hamil	Ibu hamil	534	176	33	24	13,62		13,62
		i. Persentase bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Bayi	466	12	2,5	17	145,92		145,92
		j. Persentase Balita Kurus (Wasting)	Balita	2225	156	7	32	20,55		20,55
		k. Persentase Balita Pendek dan sangat pendek (Stunting)	Balita	2225	312	14	41	13,16		13,16
		l. Balita yang ditimbang /D/S	Balita	2372	2016	85	2225	110,36		110,36
		m. Persentase cakupan skrining anemia pada remaja putri	Balita	487	438	90	487	111,11		111,11
		n. Persentase cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A	Bufas	457	375	82	458	122,22		122,22
5		PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT **(131,31 %)**								
		TB PARU							**84,03**	cukup
		a.Cakupan penemuan tuberculosis (treatment coverage)	Orang	32	29	90	11	37,93		37,93
		b. Sucses rate (Angka keberhasilan pengobatan)	Orang	19	17,1	90	18	105,88		105,88

		c.Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis /Treatment coverage	Orang	157	157	100	170	108,28		108,28
		MALARIA							**0,0**	Baik
		a. Persentase Penderita Positif Malaria yang di obati sesuai standar	Orang	0	24	100	0	0,0		0,0
		Angka kesakitan Malaria /API (Annual Parasite Insidence)	Orang	0	1	40	0	0,0		0,0
		KUSTA							**50**	Kurang
		Angka prevalensi Kusta	Orang	0,96per 10.000 pddk	1	0,19 per 10000 pddk	0	0,0		0,0
		Angka kesembuhan kusta /RFT rate	Orang	1	1	100	1	100		100
		DIARE							193,53	**Baik**
		a. Cakupan penderita diare yang mendapat pelayanan sesuai standar	Orang	433	433	100	838	193,53		193,53
		HEPATITIS							**92,69**	**Baik**
		b. Persentase Deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	Orang	534	534	100	495	92,69		9269
		ISPA							**79,55**	kurang

		a. Persentase Balita batuk/ pilek /kesukaran bernafas mendapat pelayanan standar	Orang	3042	3042	100	2951	97		97
		b. Cakupan penemuan pneumonia balita	Orang	62	62	100	39	62,90		62,90
		DBD							**342,63**	Baik
		a. Angka kesakitan DBD/Insiden rate (IR)DBD	Orang 40000000/100000 JP	20	20	100	116	580		366,6
		b. Angka bebas Jentik (ABJ)	Rumah	3200	3040	95	3200	105,26		105,26
		PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN IMS DAN HIV/AIDS							90,66	**Baik**
		a. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Imunodefesiensi Virus*)	Orang	568	568	100	515	90,66		90,66
		PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES							**100**	Baik
		a. Persentase Kasus GHPR ditatalaksana sesuai standar	Orang	666	666	100	666	100		100

		KECACINGAN							**100**	Baik
		Persentase cakupan POPM Kecacingan	Orang	6718	6718	100	6718	100		100
		SURVEILANS PENYAKIT							**70,37**	Kurang
		a. Kelengkapan Laporan Survailance	Pusk	52	47	90	52	111,11		111,11
		b. Ketepatan laporan Survailans	Pusk	52	52	100	52	100		100
		c. Signyal / Alert yang di respon <24 jam	Penyakit potensi KLB	0	0	100	0	0		0
		PELAYANAN IMUNISASI							88,78	cukup
		a. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Bayi	475	475	100	449	94,5		94,5
		b. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	Bayi	799	799	100	855	107,01		107,01
		c. Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan baduta	Anak	526	526	100	528	100.38		100.38
		d. Persentase Anak mendapat imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	Anak	619	495	80	625	126,26		126,26

		e. Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	WUS	534	427	80	496	116,15		116,15
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular							**106,66**	Baik
		a. Persentase meningkatnya desa /kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan terpadu (Posbindu)	Desa	8	6	70	8	133,33		133,33
		b. Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1254	1254	100	1254	100		100
		c. Persentase pelayanan sesuai standar bagi penderita Diabetes Melitus	Orang	320	320	100	320	100		100
		d. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Orang	12304	12304	100	12304	100		100
		e. Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	106	106	100	106	100		100

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	SATUAN	SARAN	TARGET SASARAN		PENCAPAIAN		CAKUPAN	
					Abs	%	Abs	%	VARIABEL	SUB VARIABEL
1	2	3	4	5	6			7	8	
		B. UKM PENGEMBANGAN (134,66 %)								
1		PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL							**177,41**	Baik
		a. Persentase Pembinaan Toga pada Keluarga	Orang	14248	428	3	1411	329,67		329,67
		b. Persentase Pembinaan pada kelompok Asuhan Mandiri	Kelompok	1	1	60	1	100		100
		c. Persentase Pembinaan Pengobatan tradisional	Orang	56	39	70	40	102,56		102,56
2		PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA							**106,25**	Baik
		a. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah raga di Wilayahnya	Puskesmas	1	1	100	1	100		100

		b. Persentase Skrining kebugaran jasmani di sekolah ,tempat kerja dan calon Jemaah haji	sekolah	8	8	100	9	112,5		112,5
3		UPAYA KESEHATAN GIGI MASYARAKAT							**160**	Baik
		a. Pesentase Desa yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Desa	8	5	60	8	160		160
4		UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH							**126,35**	Baik
		a. Persentase Pembinaan Kesehatan Gigi di TK	TK	23	18	80	23	127,7		127,7
		b. Persentase pembinaan dan bimbingan sikat gigi massal pada SD/MI	SD/MI	34	27	80	34	125		125
5		UPAYA KESEHATAN KERJA							**100**	Baik
		a. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	pusk	1	1	100	1	100		100
		b. Persentase Pos UKK yang di bina	Pos ukk	2	2	100	2	100		100

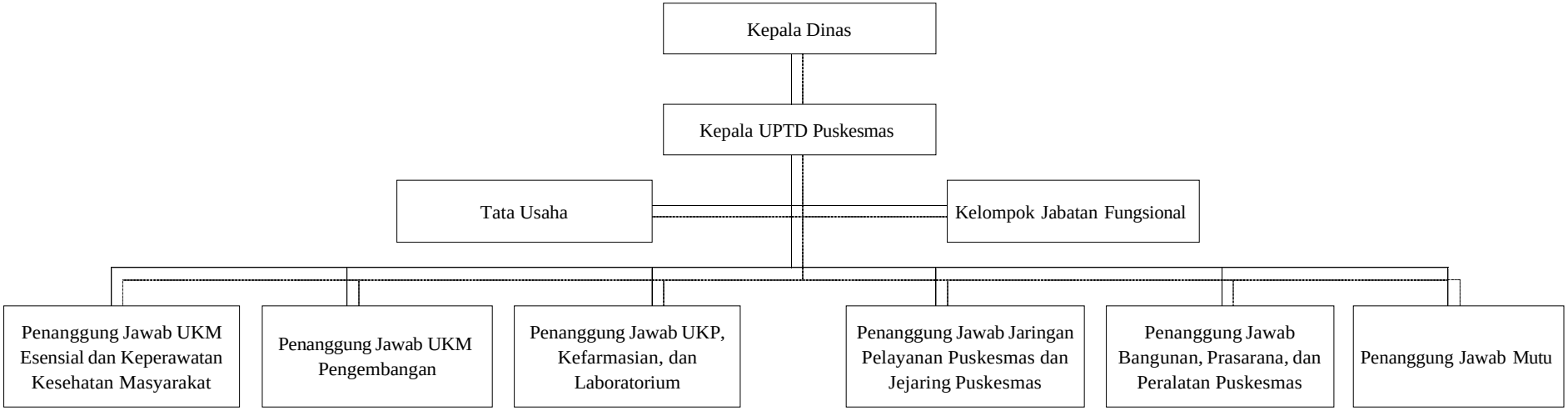
	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	SATUAN	SASARAN	TARGET SASARAN		PENCAPAIAN		CAKUPAN	
					Abs	%	Abs	%	VARIABEL	SUB VARIABEL
		C. PELAYANAN UKP(116,64 %)								
1	PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN							**100**	Baik
		a. Persentase FKTP yang memenuhi sarana dan prasana dan alat sesuai standar	FKTP	1	1	70	1	100		100
									116,56	Baik
2	PELAYANAN PERKESMAS	a. Persentase keluarga rawan yang dibina	Keluarga	196	157	80	183	116,56		116,56
									101,1	Baik
3	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	a. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Puskesmas	1	1	100	1	100		100

		b. Persentase ketersediaan Obat dan vaksin di Puskesmas	Obat	47	45	96	46	102,2		102,2
									132,14	baik
4	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	a. Persentase jenis Pemeriksaan Laboratorium yang dilaksanakan	Spesimen	78	16	20	24	150		150
		b. Kemampuan pengujian terhadap sample lingkungan di wilayah puskesmas	Jenis	41	21	50	59	114,28		114,28

	UPAYA KESEHATA N	**KEGIATAN**	**SATUAN**	**SASARA N**	**TARGET**	**PENCAP AIAN**	**CAKUPAN**	
					%	**%**	**VARIA BEL**	**SUB VARIABEL**
		D, LAPORAN KINERJA MUTU PUSKESMAS					**96,63 %**	**Baik**
1		Kepatuhan kebersihan tangan	orang	Staf puskesmas	≥85%	94,54%		94,54%
2		Kepatuhan Penggunaan APD	orang	Staf puskesmas	≥85%	94,54%		94,54%
3		Kepatuhan identifikasi pasien	orang	Staf puskesmas	100%	100%		100%
4		Kebrhasilan Pengobatan TB SO	orang	Pasien TB	100%	100%		100%
5		Pelayanan ANC sesuai standar	orang	Ibu hamil	100%	100%		100%
6		Kepuasan pasien	orang	pasien	≥76,61 %	90,74		90,74

g. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Selat

BerdasarkanBupati Karangasem Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah tentang Struktur Organisasi, Persyaratan, Wewenang dan Tanggung Jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Selat sebagai berikut:



Keterangan:

: Garis Perintah

: Garis Koordinasi

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

1) Kepala UPTD;
2) Kepala Tata Usaha;
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
8) Penanggung Jawab Mutu

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala UPTD

   Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya, dan melaksanakan fungsi:

   a) Menyusun program kerja UPTD Puskesmas;
   b) Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   c) Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   d) Menyelenggarakan wahana Pendidikan tenaga Kesehatan;
   e) Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik
   f) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
   g) Mengevaluasi, merumuskan dan menyususn laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
   h) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
   i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2) Kepala Tata Usaha

   Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas melaksanakan tugas:

   a) Menyusun program kerja tata usaha;
   b) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan dokumentasi dan kearsipan);
   c) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara / daerah, keamanan dan ketertiban UPTD;
   d) Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
   e) Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
   f) Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   g) Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
   h) Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;

i) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan;
j) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
l) Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
m) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
n) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha; dan
o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik seacra lisan maupun tertulis.

3) Kelompok Jabatan Fungsional
   a) Dokter
      Dokter pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
      (1) Menyusun program kerja;
      (2) Memberikan pelayanan Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat;
      (3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
      (4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
      (5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
   b) Dokter Gigi
      Dokter Gigi pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
      (1) Menyusun program kerja;
      (2) Memberikan pelayanan Kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan Kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang Kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat;
      (3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
      (4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
      (5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis
   c) Bidan
      Bidan pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
      (1) Menyusun program kerja;
      (2) Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan, pengelolaan pelayanan kebidanan;
      (3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
      (4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

d) Perawat

Perawat pada UPTD Puskesmas mempuunyai tugas:

(1) Menyusun program kerja
(2) Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan;
(3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
(4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

e) Jabatan Fungsional Lainnya

4) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang membawahi:
   a) Pelayanan promosi Kesehatan;
   b) Pelayanan Kesehatan lingkungan;
   c) Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
   d) Pelayanan gizi dan bersifat UKM;
   e) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
   f) Pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat.
5) Penanggung Jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
   a) Pelayanan Kesehatan gigi masyarakat;
   b) Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer;
   c) Pelayanan Kesehatan olahraga;
   d) Pelayanan Kesehatan kerja; dan
   e) Pelayanan Kesehatan lainnya.
6) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi:
   a) Pelayanan pemeriksaan umum;
   b) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
   c) Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
   d) Pelayanan gawat darurat;
   e) Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
   f) Pelayanan persalinan;
   g) Pelayanan kefarmasian;
   h) Pelayanan laboratorium;
7) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, membawahi:
   a) Puskesmas pembantu;
   b) Puskesmas keliling;
   c) Praktik bidan desa; dan

d) Jejaring puskesmas.

8) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
9) Penanggung Jawab Mutu.

h. Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Pusksmas Selat

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Selat Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, diketahui susunan pejabat pengelola BLUD sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. I Gusti Lanang Putu Udiyana, S. Ked, M.M NIP. 198412092014121001	Pemimpin BLUD
2.	Ns. Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep, M.M NIP. 198108292005012015	Pejabat Keuangan
3.	drg. Oka Sulistyawati Pradnyani NIP. 19820314201422002	Pejabat Teknis Bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4.	I Gusti Ayu Trisnadewi A, A.Md. Keb NIP. 198903242017052003	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
5.	dr. I Ketut Juli Mahardika, S. Ked NIP. 198707072019031003	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	Ni Luh Ade Widiastuthi, A.Md. Keb NIP. 197702051996032002	Pejabat Teknis Bidang Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	I Gusti Ngurah Diana, A. Md. Kep NIP. 197407201994021004	Pejabat Teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
8.	dr. I Nengah Purna Winata, S. Ked NIP. 19881132022031001	Pejabat Teknis Bidang Mutu

i. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Selat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 80 dan 80 orang terdiri dari:

No.	Status Kepegawaian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	79	37
2	Pegawai PPPK	0	17
3	Tenaga Harian Lepas (RHL)	0	3
4	Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil	0	23
5	Pengabdian	1	0
	Jumlah	**80**	**80**

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Selat berdasarkan profesi pada tahun 2025 yaitu:

NO.	PROFESI	ASN/ PNS	KONTRAK DAERAH	PENGABDIAN	JUMLAH
1	Dokter	4	-	-	4
2	Dokter Gigi	1	-	-	1
3	Perawat	20	-	-	20
4	Perawat Gigi	2	-	-	2
5	Bidan	19	-	-	19
6	Kesehatan Masyarakat	1	-	-	1
7	Kesehatan Lingkungan	1	-	-	1
8	Analis	3	-	-	3
9	Gizi	2	-	-	2
10	Apoteker	1	-	-	1
11	Asisten Apoteker	2	-	-	2
12	Dukungan Manajemen	23	-	1	24
Jumlah		**79**	**-**	**1**	**80**

j. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Selat melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokkan sebagai berikut:

Kerjasama Pelayanan Kesehatan:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
3) Pengelola Sampah Medis;
4) Seluruh Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SLUA;
5) Seluruh Jejaring Pelayanan di Wilayah Kerja Puskesmas.

k. Pembiayaan UPTD Puskesmas

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikthisar Kebijakan Akuntasi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Selat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Selat.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).

7) Periode akuntansi Puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan setara kas;
   b) Investasi jangka pendek;
   c) Piutang dari kegiatan blud;
   d) Persediaan;
   e) Investasi jangka panjang;
   f) Aset tetap;
   g) Aset lainnya;
   h) Kewajiban jangka pendek;
   i) Kewajiban jangka panjang; dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.
3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

a) Pendapatan dari alokasi APBD;
b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

a) Pembayaran Pegawai;
b) Pembayaran Barang;
c) Pembayaran Bunga; dan
d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang

jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
   a) Ekuitas awal;
   b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
   c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

(1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
(2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
(3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.

d) Ekuitas akhir.

h. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh blud.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi

jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Serara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening dibank.

2) Piutang

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam janga waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Pembentukan Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa maníaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakompabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat LaboratoriumLingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produkai Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	Overhaul	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan / Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
InstalasiPengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);
b) Aset Sewaan;
c) Aset yang tidak digunakan:
d) Beban yang ditangguhkan;
e) Lainnya

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiaban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Puskesmas kepada pihak lain. Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi Puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (cut off). Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.
d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas; dan
b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal.
c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.
d) Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
e) Pada akhir periode pelaporan, nilai ekuitas yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah selisih dari aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

   Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

   (1) Pendapatan usaha rawat jalan;
   (2) Pendapatan usaha rawat darurat;
   (3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Hibah

   Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

c) Pendapatan APBD

   Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

d) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
   (1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
   (2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
   (3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
   (4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;
b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.
d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.
g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
   (1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.
   (2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.
   (3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.
   (4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.
c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.
e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai

   Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai neger sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Puskesmas yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b) Beban Barang

   Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

c) Beban Jasa

   Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.

d) Beban Pemeliharaan

   Beban Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja pemeliharaan. Beban pemeliharaan terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.

e) Beban Langganan Daya/Jasa

   Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.

f) Beban Perjalanan Dinas

   Beban Perialanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas adalah biaya yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.

g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain
Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang teriadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutanberlalunya waktu.

i) Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

j) Beban Operasional Lainnya
Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar
Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset
Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya
Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

(1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.

(2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Selat yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. UPTD Puskesmas Selat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 12.820.475.7-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Selat Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan-LRA

Jumlah realiasasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.481.208.870,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.199.159.621,75 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	3.468.380.943,00	0,00	3.187.530.340,00
b.	Pendapatan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	12.827.927,00	0,00	11.629.281,75
	Jumlah	**0,00**	**3.481.208.870,00**	**0,00**	**3.199.159.621,75**

4.1.2 Belanja-LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksanya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.757.815.048,35 atau 94,23% dari anggaran sebesar Rp 5.049.078.129,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 6.069.455.007,88 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	4.141.019.929,00	3.878.700.128,00	93,67	3.915.609.423,38
b.	Belanja Modal	908.058.200,00	879.114.920,35	96,81	2.153.845.584,50
	Jumlah	**5.049.078.129,00**	**4.757.815.048,35**	**94,23**	**6.069.455.007,88**

a. Belanja Operasi

Jumlah realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.878.700.128,00 atau 93,67% dari anggaran sebesar Rp 4.141.019.929,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 3.915.609.423,38. Rincian atas jumlah Belanja Operasional sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Pegawai	1.985.181.119,00	1.970.135.608,00	99,24	1.597.732.706,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	2.155.838.810,00	1.908.564.520,00	88,53	2.317.876.717,38
c.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.141.019.929,00**	**3.878.700.128,00**	**93,67**	**3.915.609.423,38**

Rician dari Belanja Operasi:

1) Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.970.135.608,00 atau 99,24% dari anggaran sebesar Rp 1.985.181.119,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.597.732.706,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	33.082.000,00	31.157.609,00	94,18	0,00
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	31.357.629,00
3	Belanja Pegawai BLUD	1.952.099.119,00	1.938.977.999,00	99,33	1.566.375.077,00
	Jumlah	**1.985.181.119,00**	**1.970.135.608,00**	**99,24**	**1.597.732.706,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.908.564.520,00 atau 88,53% dari anggaran sebesar Rp 2.155.838.810,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 2.317.876.717,38. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.554.000,00	14.526.900,00	44,62	15.791.200,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.388.000,00	10.275.800,00	98,92	2.994.500,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.860.000,00	34.850.600,00	87,43	0,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	7.216.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	221.300.000,00	195.025.000,00	88,13	319.260.000,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.800.000,00	25.290.882,00	87,82	0,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.726.080,00	1.517.512,00	87,92	2.060.688,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.157.600,00	1.896.890,00	87,92	2.576.112,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	84.579.427,38
11	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	361.682.000,00	348.304.600,00	96,30	392.464.193,00
12	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.457.371.130,00	1.276.876.336,00	87,62	1.466.334.597,00
	Jumlah	**2.155.838.810,00**	**1.908.564.520,00**	**88,53**	**2.317.876.717,38**

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 879.114.920,35 atau 96,81% dari anggaran sebesar Rp 908.058.200,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 2.153.845.584,50. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.058.200,00	88.215.500,00	81,64	335.945.580,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	790.899.420,35	98,86	1.817.900.004,50
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**908.058.200,00**	**879.114.920,35**	**96,81**	**2.153.845.584,50**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 88.215.500,00 atau 81,64% dari anggaran sebesar Rp 108.058.200,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 335.945.580,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00
3	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	108.058.200,00	88.215.500,00	81,64	269.045.580,00
	Jumlah	**108.058.200,00**	**88.215.500,00**	**81,64**	**335.945.580,00**

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 790.899.420,35 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp 800.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 1.817.900.004,50. Rincian atas jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	550.000.000,00	543.969.369,50	98,90	1.500.311.475,63
2	Belanja Modal Pagar	250.000.000,00	246.930.050,85	98,77	317.588.528,87
	Jumlah	**800.000.000,00**	**790.899.420,35**	**98,86**	**1.817.900.004,50**

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran menunjukkan jumlah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari pendapatan BLUD. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 15.309.356,00 dan Rp 52.864.17800,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran APBD	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
BOK - Bank BNI Cabang Singaraja (No. Rek 1590087865) a.n 1050087 BOK PKM SELAT	15.309.356,00	52.864.178,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**15.309.356,00**	**52.864.178,00**

b. Kas pada BLUD

Kas pada BLUD menunjukkan jumlah kas yang berada di rekening BLUD yang digunakan untuk aktivitas operasional. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas masing-masing sebesar Rp492.549.919,20 dan Rp315.418.449,20, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
BLUD PT Bank Pembangunan Daerah Bali - (No. Rek 020105002263) a.n BLUD UPTD Puskesmas Selat	492.549.919,20	315.418.449,20
Jumlah Kas pada BLUD	**492.549.919,20**	**315.418.449,20**

c. Piutang Layanan

Piutang Layanan pada UPTD Puskesmas Selat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp99.632.500,00 dan Rp19.388.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Layanan	99.632.500,00	19.388.600,00
Jumlah Piutang	**99.632.500,00**	**19.388.600,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada UPTD Puskesmas Selat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp996.325,00 dan Rp193.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Penyisihan Piutang	(996.325,00)	(193.886,00)
Jumlah Penyisihan Piutang	**(996.325,00)**	**(193.886,00)**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang per 31 Desember 2025:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang	99.632.500,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**99.632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% Penyisihan	1,0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**996.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Berikut Penyisihan Kerugian Piutang per 31 Desember 2024:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Piutang	19.388.600,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Bruto	**19.388.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
& Penyisihan	1,0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**193.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. Persediaan

Persediaan merupakan barang habis pakai yang digunakan dalam operasional UPTD Puskesmas Selat. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp469.103.535,34 dan Rp493.763.095,82 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Alat Tulis Kantor	21.580.000,00	15.715.800,00
Bahan Komputer	9.306.000,00	14.050.000,00
Kertas dan Cover	0,00	11.377.800,00
Barang Cetakan	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00
Benda Pos	500.000,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	428.440.335,34	435.442.695,82
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00
Alat Listrik	9.277.200,00	17.176.800,00
Perabotan Kantor	0,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	**469.103.535,34**	**493.763.095,82**

Berikut disajikan saldo mutasi Persediaan BLUD per 31 Desember 2025:

URAIAN	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Tulis Kantor	15.715.800,00	13.613.500,00	7.749.300,00	21.580.000,00
Bahan Komputer	14.050.000,00	2.877.000,00	7.621.000,00	9.306.000,00
Kertas dan Cover	11.377.800,00	11.824.750,00	23.202.550,00	0,00
Barang Cetakan	0,00	45.969.500,00	45.969.500,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	0,00	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	435.442.695,82	1.526.415.863,85	1.533.418.224,33	428.440.335,34
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	14.977.500,00	14.977.500,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	17.176.800,00	12.956.000,00	20.855.600,00	9.277.200,00
Perabotan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	19.996.500,00	19.996.500,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	71.018.020,00	71.018.020,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**493.763.095,82**	**1.724.648.633,85**	**1.749.308.194,33**	**469.103.535,34**

Berikut disajikan saldo mutasi Persediaan BLUD per 31 Desember 2024:

URAIAN	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Alat Tulis Kantor	13.337.850,00	19.945.250,00	17.567.300,00	15.715.800,00
Bahan Komputer	24.693.000,00	5.616.000,00	16.259.000,00	14.050.000,00
Kertas dan Cover	739.000,00	24.922.800,00	14.284.000,00	11.377.800,00
Barang Cetakan	0,00	64.851.600,00	64.851.600,00	0,00
Barang Kuasi	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00
Benda Pos	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	433.981.017,05	1.285.227.136,83	1.283.765.458,06	435.442.695,82
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	64.686.900,00	64.686.900,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	15.725.000,00	19.938.900,00	18.487.100,00	17.176.800,00
Perabotan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	38.453.100,00	38.453.100,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	11.848.058,00	11.848.058,00	0,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**488.849.867,05**	**1.541.239.744,83**	**1.536.326.516,06**	**493.763.095,82**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.316.307.807,04 dan Rp7.708.575.252,69 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Tanah	23.860.500,00	23.860.500,00
2) Peralatan dan Mesin	4.838.834.259,17	4.677.010.281,17
3) Gedung dan Bangunan	11.315.827.583,04	10.524.928.162,69
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.284.900,00	50.950.400,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**16.231.807.242,21**	**15.276.749.343,86**
Akumulasi Penyusutan	(8.223.608.678,17)	(7.568.174.091,17)
Nilai Buku	**8.008.198.564,04**	**7.708.575.252,69**

Rincian mutasi Aset Tetap tahun 2025, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	23.860.500,00			23.860.500,00
2) Peralatan dan Mesin	4.677.010.281,17	161.823.978,00	0,00	4.838.834.259,17
3) Gedung dan Bangunan	10.524.928.162,69	790.899.420,35	0,00	11.315.827.583,04
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.950.400,00	0,00	0,00	53.284.900,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**15.276.749.343,86**	**952.723.398,35**	**0,00**	**16.231.807.242,21**
Akumulasi Penyusutan	**7.568.174.091,17**	**0,00**	**0,00**	**8.223.608.678,17**
Nilai Buku	**7.708.575.252,69**			**8.008.198.564,04**

Rincian mutasi Aset Tetap tahun 2024, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	23.860.500,00			23.860.500,00
2) Peralatan dan Mesin	4.329.724.701,17	348.745.580,00	1.460.000,00	4.677.010.281,17
3) Gedung dan Bangunan	8.707.028.158,19	1.817.900.004,50	0,00	10.524.928.162,69
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.950.400,00	0,00	0,00	50.950.400,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**13.111.563.759,36**	**2.166.645.584,50**	**1.460.000,00**	**15.276.749.343,86**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Peralatan dan Mesin	3.553.657.824,17	413.475.173,00	0,00	3.967.132.997,17
3) Gedung dan Bangunan	3.244.987.092,00	316.285.262,00	0,00	3.561.272.354,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.298.350,00	3.470.390,00	0,00	39.768.740,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi	**6.834.943.266,17**	**733.230.825,00**	**0,00**	**7.568.174.091,17**
Nilai Buku				
1) Tanah	23.860.500,00			23.860.500,00
2) Peralatan dan Mesin	776.066.877,00			709.877.284,00
3) Gedung dan Bangunan	5.462.041.066,19			6.963.655.808,69
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.652.050,00			11.181.660,00
5) Aset Tetap Lainnya	0,00			0,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00			0,00
Jumlah Nilai Buku	**6.276.620.493,19**			**7.708.575.252,69**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp28.872.631,85 dan Rp28.872.631,85 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Aset Lainnya	28.872.631,85	28.872.631,85
Jumlah	**28.872.631,85**	**28.872.631,85**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2025, sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	2.257.500.776,10	2.257.500.776,10
Jumlah Harga Perolehan	**2.257.500.776,10**	**2.257.500.776,10**
Akumulasi Penyusutan	(2.228.628.144,25)	(2.228.628.144,25)
Nilai Buku	**28.872.631,85**	**28.872.631,85**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2024, sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	2.267.500.776,10	0,00	10.000.000,00	2.257.500.776,10
Jumlah Harga Perolehan	**2.267.500.776,10**	**0,00**	**10.000.000,00**	**2.257.500.776,10**
Akumulasi Penyusutan				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aset Lain-lain	2.238.628.114,25	0,00	10.000.000,00	2.228.628.114,25
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**2.238.628.114,25**	**0,00**	**10.000.000,00**	**2.228.628.114,25**
Nilai Buku				
1) Aset Tidak Berwujud	0,00			0,00
2) Aset Lain-lain	28.872.661,85			28.872.661,85
Jumlah Niali Buku	**28.872.661,85**			**28.872.661,85**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) UPTD Puskesmas Selat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp249.620.520,00 dan Rp192.994.975,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN berupa Remunerasi ASN BLUD Bulan Desember	232.567.006,00	156.366.331,00
2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN berupa Remunerasi Jasa Pelayanan Non ASN BLUD Bulan Desember	17.053.514,00	32.276.714,00
3) Hutang Iuran BPJS 4% atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN berupa Remunerasi ASN BLUD Bulan Desember	0,00	0,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	**249.620.520,00**	**188.643.045,00**

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

4.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang UPTD Puskesmas Selat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.112.670.181,43 dan Rp8.430.045.276,56 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Ekuitas Awal	8.430.045.276,56	7.505.851.232,54
2) Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	354.477.870,87	650.581.342,66
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	328.147.034,00	273.612.701,36
Ekuitas Akhir	**9.112.670.181,43**	**8.430.045.276,56**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Lapoaran Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Selat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.272.198.265,20 dan Rp5.574.885.806,63, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3.541.883.443,00	3.147.050.340,00
b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (BOK)	341.899.822,00	0,00
c) Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
d) Pendapatan Hibah	1.301.304.068,85	0,00
e) Pendapatan Usaha Lainnya	12.827.927,00	11.629.281,75
f) Pendapatan APBN/APBD	1.074.283.004,35	2.416.206.184,88
Jumlah	**6.272.198.265,20**	**5.574.885.806,63**

4.3.2 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.617.605.504,33 dan Rp4.924.970.563,97 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Pegawai	2.041.967.747,00	1.643.846.479,00
b. Beban Barang dan Jasa	3.219.321.735,33	2.547.631.959,97
c. Beban Penyisihan Piutang	996.325,00	261.300,00
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	655.434.587,00	733.230.825,00
e. Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasional	**5.917.720.394,33**	**4.924.970.563,97**

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	2.041.967.747,00	1.635.686.479,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00
Jumlah	**2.041.967.747,00**	**1.643.846.479,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Barang	1.947.520.262,33	506.826.468,59
Beban Jasa	707.959.896,00	1.189.593.024,00
Beban Pemeliharaan	135.480.000,00	208.653.427,38
Beban Perjalanan Dinas	522.000,00	38.274.722,00
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		0,00
Beban Bahan Material	330.314.977,00	413.270.688,00
Beban Makanan dan Minuman	92.024.600,00	187.013.630,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	5.500.000,00	4.000.000,00
Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Beban Lainnya		0,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**3.219.321.735,33**	**2.547.631.959,97**

Beban Barang:

	2025	2024
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	7.749.300,00	17.567.755,90
Beban Bahan Cetak	0,00	49.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	58.185.300,00	47.247.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	23.202.550,00	14.284.000,00
Beban Benda POS	4.500.000,00	5.750.000,00
Beban Obat - Obatan - Obat	1.428.222.412,33	330.208.667,69
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	7.621.000,00	16.259.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	20.855.600,00	18.487.100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.000.000,00	32.000.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	0,00	24.600.000,00
Beban Barang Kuasi	0,00	373.545,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	348.304.600,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor -Perabot kantor	29.879.500,00	0,00
Jumlah Beban Barang	**1.947.520.262,33**	**506.826.468,59**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	195.025.000,00	314.995.562,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	290.206.765,00	480.641.062,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan		2.996.413,00
Beban Iuran BPJS		0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.517.512,00	2.060.688,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.896.890,00	2.576.112,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi		0,00
Beban Jasa Kalibrasi	24.592.050,00	19.750.777,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	38.779.560,00	36.759.926,00
Beban Tagihan Air	2.848.600,00	4.434.300,00
Beban Tagihan Listrik	90.130.137,00	56.475.934,00
Beban Tagihan Telepon	0,00	204.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4.842.500,00	0,00
Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	19.758.000,00
Beban Jasa Administrasi	0,00	1.119.000,00
Beban Jasa Pengolahan Bumil KEK	0,00	5.321.250,00
Beban Transport	0,00	242.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.890.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25.290.882,00	0,00
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Keuangan	19.780.000,00	0,00
Jumlah Beban Jasa	**707.959.896,00**	**1.189.593.024,00**

Beban Material:

	2025	2024
Beban Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	19.996.500,00	38.453.100,00
Beban Bahan - Bahan Kimia	74.105.225,00	11.848.058,00
Beban Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	69.519.400,00	69.160.200,00
Beban Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
Beban Bahan - Bahan Lainnya	14.977.500,00	64.686.900,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	9.535.000,00	19.850.000,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	100.969.872,00	176.126.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.547.480,00	33.146.430,00
Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	2.664.000,00	0,00
Jumlah Beban Material	**330.314.977,00**	**413.270.688,00**

Beban Makanan dan Minuman:

	2025	2024
Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
Beban Natura dan Pakan - Natura	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	57.174.000,00	171.374.430,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	34.850.600,00	8.423.200,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	7.216.000,00
Jumlah Beban Makanan dan Minuman	**92.024.600,00**	**187.013.630,00**

Beban Kursus Singkat/Pelatihan:

	2025	2024
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	5.500.000,00	4.000.000,00
Jumlah Beban Kursus Singkat/Pelatihan	**5.500.000,00**	**4.000.000,00**

c. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Alat Pengolaha Air Kotor	15.540.000,00	18.981.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkut - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	31.000.000,00	55.350.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	9.075.000,00	16.850.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	1.500.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Alat Studio Lainnya	31.950.000,00	10.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum	0,00	1.393.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	19.950.000,00	15.000.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	20.000.000,00	5.000.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	84.579.427,38
Beban Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Air Minum - Jaringan Air Minum Lainnya	1.965.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.500.000,00	0,00
Jumlah Beban Pemeliharaan Jaringan	**135.480.000,00**	**208.653.427,38**

d. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	522.000,00	38.274.722,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**522.000,00**	**38.274.722,00**

e. Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi:

	2025	2024
Beban Penyusutan	655.434.587,00	733.230.825,00
Jumlah	**655.434.587,00**	**733.230.825,00**

Beban Penyisihan Piutang:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	996.325,00	261.300,00
Jumlah	**996.325,00**	**261.300,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

		2025	2024
a	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
b	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00
c	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	666.100,00
d	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0,00**	**666.100,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka - angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup UPTD Puskesmas Selat dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Selat bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Selat bersamaan dengan penerbitan laporan auditor independen tanggal 25 Maret 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00049/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Selat
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Selat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Selat tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Selat bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

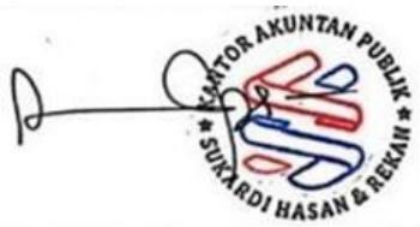
Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan design dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Aktiva Tetap dan Persediaan Perlu ditingkatkan

   Dari hasil audit yang kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:

   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Selat ke Pemda Karangasem.

      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.

   2) Terdapat bantuan peralatan kedokteran Gigi bantuan dana APBN yang belum bisa dimanfaatkan karena masih menunggu teknisi untuk memasang peralatan pada ruangan yg sudah disediakan.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:

   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.
   2) Mengkomunikasikan dengan pihak pemberi bantuan agar segera mengirim teknisi untuk memasang peralatan kedokteran gigi agar bisa segera dimanfaatkan.

2. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Operasional

   Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Selat dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Selat.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Auntansi yang terantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

Atas masalah tersebut, kami saranankan agar Puskesmas Selat meningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Selat dibidang standar akuntansi pemerintahan no 13.

3. Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Selat pada SIPD belum tepat waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Selat pada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka -angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Selat dan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00049/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan

BLUD UPTD Puskesmas Selat

Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Selat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 6 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

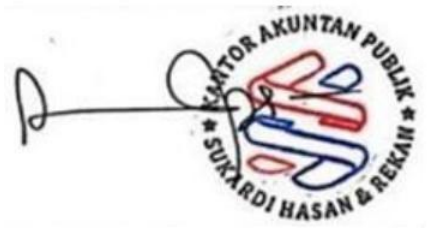
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Selat merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Selat... terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Selat sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Selat berbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Selat belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Selat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Selat berbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Tlp : (021) 55787188 Email: info@kapsukardihasan.com, Website: https://www.kapsukardihasan.com

`

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini Auditor Nomor : 00051/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Tanggal : 06 April 2026

BADAN LAYANAN UMUM UPTD PUSKESMAS SIDEMEN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	4
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	5
NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	6
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	8
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
RESUME PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	61
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	74

Surat Pernyataan Direksi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
Jln. Raya Sidemen, Kode Pos 80864
Telp. (0366) 5551564
Email : sidemenpuskesmas@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSKESMAS SIDEMEN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	dr. I Made Narka
Nomor Telepon	:	(0363) 5551564
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Sidemen, Telaga Tawang, Kec. Sidemen, Karangasem
Jabatan	:	Kepala UPTD Puskesmas Sidemen

Untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem telah disusun dan disajikan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem sesuai ketentutan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangasem, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Sidemen



dr. I Made Narka

NIP. 19690103 200604 1 005

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00051/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2026

Kepada Yth,
Kepala
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
UPTD Puskesmas Sideman

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Sideman ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00055/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas;
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tangerang, 06 April 2026

Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1881

Jl. Palem Raja Raya No. 65 Palem Semi, Karawaci
Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15139
(021) 55787188 info@kapsukardihasan.com https://www.kapsukardihasan.com

Laporan Keuangan

UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaraan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan	***4.1.1***				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		0,00	2.939.929.790,00	0,00	2.427.371.092,00
Pendapatan Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		0,00	10.301.863,24	0,00	8.219.127,95
Jumlah Pendapatan		**0,00**	**2.950.231.653,24**	**0,00**	**2.435.590.219,95**
Belanja Daerah	***4.1.2***				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai		1.913.238.000,00	1.831.007.223,00	95,70	1.191.053.709,00
Belanja Barang dan Jasa		1.636.263.460,00	1.321.700.915,00	80,78	1.545.904.655,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		**3.549.501.460,00**	**3.152.708.138,00**	**88,82**	**2.736.958.364,00**
Belanja Modal					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		97.000.000,00	86.768.021,00	89,45	276.912.080,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.154.000.000,00	1.002.101.847,00	86,84	4.946.212.532,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		**1.251.000.000,00**	**1.088.869.868,00**	**87,04**	**5.223.124.612,00**
Jumlah Belanja		**4.800.501.460,00**	**4.241.578.006,00**	**88,36**	**7.960.082.976,00**
Surplus (Defisit)		**(4.800.501.460,00)**	**(1.291.346.352,76)**	**26,90**	**(5.524.492.756,05)**
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran		**(4.800.501.460,00)**	**(1.291.346.352,76)**	**26,90**	**(5.524.492.756,05)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sidemen, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Sidemen

dr. I Made Narka
NIP. 19690103 200604 1 005

UPTD PUSKESMAS SIDEMEN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	**474.500.708,81**	**545.638.912,86**
Penggunaan SAL	0,00	0,00
Sub Total (1-2)	**474.500.708,81**	**545.638.912,86**
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(1.291.346.352,76)	(5.524.492.756,05)
Sub Total (3+4)	**(816.845.643,95)**	**(4.978.853.843,19)**
Pendapatan APBN/APBD	1.150.558.520,00	5.453.354.552,00
Pendapatan BOK	277.898.968,00	0,00
Setoran Ke Kas Daerah	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**611.611.844,05**	**474.500.708,81**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sidemen, 06 April 2026

Kepala UPTD Puskesmas Sidemen

dr. I Made Narka

NIP. 19690103 200604 1 005

UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
Aset	***4.2.1***		
Aset Lancar	***4.2.1.1***		
Kas di Bendahara Pengeluaran		90.446.807,00	123.975.531,00
Kas pada BLUD		523.342.356,05	350.525.177,81
Piutang Operasional BLUD		12.727.300,00	11.853.400,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(127.273,00)	(118.534,00)
Persediaan BLUD		256.957.685,76	270.237.917,58
Jumlah Aset Lancar		**883.346.875,81**	**756.473.492,39**
Aset Tetap	***4.2.1.2***		
Tanah		3.600.000,00	3.600.000,00
Peralatan dan Mesin		3.839.790.747,93	3.676.017.936,93
Gedung dan Bangunan		10.492.884.834,63	10.074.153.848,63
Jalan, Irigasi dan Jaringan		73.964.050,00	73.964.050,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		14.410.239.632,56	**13.827.735.835,56**
Akumulasi Penyusutan		(6.284.093.365,93)	(6.056.999.746,93)
Nilai Buku Aset Tetap		**8.126.146.266,63**	**7.770.736.088,63**
Aset Lainnya	***4.2.1.3***		
Aset Lain-Lain		905.844.882,00	905.844.882,00
Penyusutan Aset Lain-Lain		(898.228.815,00)	(898.228.815,00)
Jumlah Aset Lainnya		**7.616.067,00**	**7.616.067,00**
Jumlah Aset		**9.017.109.209,44**	**8.534.825.648,02**
Kewajiban	***4.2.2***		
Kewajiban Jangka Pendek	***4.2.2.1***		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.177.319,00	0,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		200.711.170,00	277.185.255,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**202.888.489,00**	**277.185.255,00**
Jumlah Kewajiban		**202.888.489,00**	**277.185.255,00**
Ekuitas	***4.2.3***		
Ekuitas		8.814.220.720,44	8.257.640.393,02
Jumlah Ekuitas		**8.814.220.720,44**	**8.257.640.393,02**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**9.017.109.209,44**	**8.534.825.648,02**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sidemen, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Sidemen

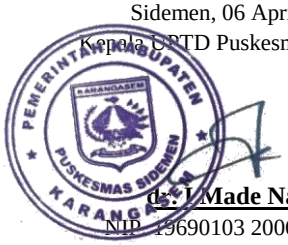
dr. I Wayan Nyoman Narka
NIP. 19690103 200604 1 005

UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan /Penurunan	%
Pendapatan	***4.3.1***				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		2.782.967.457,00	2.397.583.092,00	385.384.365,00	16,07
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		277.898.968,00	0,00	277.898.968,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah		1.289.366.779,35	0,00	1.289.366.779,35	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya		1.150.558.520,00	8.219.127,95	2.082.735,29	25,34
Pendapatan APBN/APBD		10.301.863,24	5.453.354.552,00	57.739.035,59	1,06
Jumlah Pendapatan		**5.511.093.587,59**	**7.859.156.771,95**	**(2.348.063.184,36)**	**(29,88)**
Beban	***4.3.2***				
Beban Pegawai		1.752.485.071,00	1.321.368.538,00	431.116.533,00	32,63
Beban Barang dan Jasa		2.626.395.993,17	2.381.844.547,82	244.551.445,35	10,27
Beban Penyisihan Piutang		127.273,00	118.534,00	8.739,00	7,37
Beban Penyusutan dan Amortisasi		227.093.619,00	514.653.019,00	(287.559.400,00)	(55,87)
Beban Lain-Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban		**4.606.101.956,17**	**4.217.984.638,82**	**388.117.317,35**	**9,20**
Surplus (Defisit) Operasional		**904.991.631,42**	**3.641.172.133,13**	**(2.736.180.501,71)**	**(75,15)**
Kegiatan Non Operasional					
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Keg. Non.Lainnya		0,00	416.414,00	(416.414,00)	(100,00)
Jumlah Surplus (Defisit) Non Operasional		**0,00**	**416.414,00**	**(416.414,00)**	**(100,00)**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**904.991.631,42**	**3.641.588.547,13**	**(2.736.596.915,71)**	**(75,15)**
Pos Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pos Luar Biasa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Surplus (Defisit) LO		**904.991.631,42**	**3.641.588.547,13**	**(2.736.596.915,71)**	**(75,15)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sidemen, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Sidemen



dr. I Made Narka
NIP. 19690103 200604 1 005

UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	**8.257.640.393,02**	**3.753.721.555,77**
Surplus (Defisit) LO	904.991.631,42	3.641.588.547,13
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	(348.411.304,00)	862.330.290,12
Setoran ke Kas Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Setoran ke Kas Daerah (BOK)	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	**8.814.220.720,44**	**8.257.640.393,02**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sidemen, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Sidemen

Ni Made Narka
NIP. 19690103 200604 1 005

UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	2.939.929.790,00	2.427.371.092,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	277.898.968,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	10.301.863,24	8.219.127,95
Pendapatan APBN/APBD	1.150.558.520,00	5.453.354.552,00
Jumlah arus Kas Masuk	**4.378.689.141,24**	**7.888.944.771,95**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1.831.007.223,00	1.191.053.709,00
Belanja Barang dan Jasa	1.321.700.915,00	1.545.904.655,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.152.708.138,00**	**2.736.958.364,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	**1.225.981.003,24**	**5.151.986.407,95**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	86.768.021,00	276.912.080,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.002.101.847,00	4.946.212.532,00
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**1.088.869.868,00**	**5.223.124.612,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Investasi	**(1.088.869.868,00)**	**(5.223.124.612,00)**
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Setoran ke Kas Daerah (BOK)	0,00	0,00
Setoran ke Kas Daerah (BLUD)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dar Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dar Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.177.319,00	570.417.621,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**2.177.319,00**	**570.417.621,00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	570.417.621,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**570.417.621,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	**2.177.319,00**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	**139.288.454,24**	**(71.138.204,05)**
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	**474.500.708,81**	**545.638.912,86**
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	**613.789.163,05**	**474.500.708,81**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sidemen, 06 April 2026
Kepala UPTD Puskesmas Sidemen

dr. I Made Narka
NIP. 19690103 200604 1 005

Catatan Atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Sidemen

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Sidemen

Berdiri pada Tahun 1975, Puskesmas Sidemen berada di bagian selatan kabupaten Karangasem dengan luas wilayah 35,39 km^2 dengan wilayah perbukitan dengan letinggian 300-500 meter di atas permukaan laut yang dibelah oleh aliran Sungai Unda sehingga wilayahnya menjadi 2 bagian yaitu Sidemen barat sungai dan Sidemen timur sungai.

Puskesmas Sidemen mewilayahi 10 Desa dan 54 posyandu dengan jumlah dusun terbanyak adalah desa Sangkan Gunung dengan luas 5,58 km^2 dan desa paling sedikit luasnya adalah desa Wisma Kerta adalah 2,79 km^2. Jumlah penduduk Kecamatan Sidemen adalah 32.980 jiwa. Sumber Pendanaan Puskesmas Sidemen adalah dari APBD, JKN, BOK.

Batas wilayah kerja Puskesmas Sidemen yaitu:

1) Utara : Desa Selat
2) Barat : Kabupaten Bangli
3) Selatan : Kabupaten Klungkung
4) Timur : Kecamatan Manggis

UPTD Puskesmas Sidemen adalah Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan aset yang tidak terpisahkan dari aset daerah. Secara historis, UPTD Puskesmas Sidemen merupakan sebuah Puskesmas Rawat Inap.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, UPTD Puskesmas Sidemen ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

b. Tempat dan Kedudukan

UPTD Puskesmas Sidemen beralamat di Jalan Raya Sidemen, Telaga Tawang, Kode Pos 80864, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Telp 0366-5551564, Email: sidemenpuskesmas@gmail.com.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Sidemen adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);

17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 -2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
20) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);
21) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pelayanan Kesehatan Kepada UPTD Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Karangasem;
22) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem;
23) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 801/HK/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 61/HK/2023 tentang Rekening Bank Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
25) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 184/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 386/HK/2022 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
26) Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. Visi dan Misi UPTD Puskesmas Sidemen

1) Visi : “Mewujudkan masyarakat mandiri dalam hidup sehat menuju Sidemen sehat.”
2) Misi
   a) Menggerakan pembangunan kecamatan yang berwawasan kesehatan
   b) Mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat
   c) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
   d) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat

e. Program Pelayanan UPTD Puskesmas Sidemen

Program Pelayanan yang tersedia di UPTD Puskesmas Sidemen terdiri dari:

1) Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan di UPTD Puskesmas Sidemen terdiri dari beberapa pelayanan yaitu mulai dari Poli Umum, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Poli Lansia, Poli Anak MBTS, Poli Gigi, Laboratorium, Pelayanan Farmasi, dan Pelayanan Konseling.

2) Pelayanan Luar Gedung

Pelayanan luar gedung yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Sidemen terdiri dari upaya pelayanan Promosi Kesehatan, Posyandu, Pustu Sangkan Gunung, Pustu Tangkup, Pustu Loka Sari, Pustu Sinduwati, Pustu Tri Eka Buana, Poskesdes Telaga Tawang, Poskesdes Sidemen, Poskesdes Talibeng, Poskesdes Kerta Buana, Poskesdes Wisma Kerta, dan P2M.

f. Jenis-Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Sidemen

Jenis-jenis pelayanan Kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Sidemen adalah:

1) Poliklinik

Poliklinik rawat jalan terdiri dari Poli umum, Poli gigi, KIA/KB, imunisasi, ruang konsultasi termasuk loket pendaftaran prosedur rawat jalan pada poliklinik menguraikan langkah-langkah pemberian pelayanan kepada pasien rawat jalan mulai dari pemilahan kelompok pasien, pendaftaran dan pembayaran jasa layanan, dan pemberian layanan kesehatan pada masing-masing poli, serta tindakan lanjutan yang diperlukan oleh pasien.

2) Unit Gawat Darurat

UPTD Puskesmas Sidemen memiliki ruang khusus unit gawat darurat, tetapi memiliki ruang tindakan medik untuk mengatasi tindakan kegawat daruratan pelayanan primer. Prosedur pada penanganan kasus Gawat Darurat menguraikan langkah-langkah mengutamakan penanganan pasien yang sifatnya gawat dan darurat sejak pasien datang hingga tindakan lanjutan yang diperlukan pasien seperti dirujuk ke rumah sakit.

3) Laboratorium

Prosedur penunjang medis menguraikan pemberian layanan berupa layanan laboratorium kepada pasien sesuai surat pengantar dari poli umum, poli KIA-KB, ruang konsultasi, ruang UGD.

4) Apotek

Prosedur layanan obat menguraikan pemberian pelayanan penyediaan obat-obatan kepada pasien sesuai resep dari poli-poli rawat jalan, ruang UGD dan pelayanan di luar gedung seperti kegiatan posyandu (balita dan lansia).

5) Pelayanan Gizi

Prosedur pelayanan gizi menguraikan pemberian layanan gizi berupa penyuluhan PUGS, konseling atau klinik gizi untuk terapi diet untuk pasien poliklinik, dan dalam bentuk perencanaan serta pengolahan makanan biasa/khusus.

6) Pelayanan Ambulance

Prosedur pelayanan ambulance menguraikan pemberian layanan ambulance bagi pasien yang memerlukannya dalam rangka rujukan ke rumah sakit.

7) Rekam Medik

Prosedur rekam medik menguraikan proses penanganan data pasien mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen/data pasien, pengkodean, pengindeksan, dan pengarsipan.

8) Kesehatan Lingkungan

Prosedur kesehatan lingkungan menguraikan langkah-langkah pemeriksaan air limbah, limbah padat berbahaya, serta air bersih secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

g. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Berikut disajikan Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan Per 31 Desember 2025.

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
UKM ESENSIAL												
1	Pelayanan Kesehatan Keluarga	Kesehatan Ibu	1	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	bumil	%	100	418	421	100,72	100,72	**100,72%**
			2	Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K6)	bumil	%	100	418	378	90,43	90,43	**108,85%**
			3	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai Standar (K6)	bumil	%	100	418	378	90,43	90,43	
			4	Cakupan Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung, infeksi)	bumil	%	80	84	113	135,17	135,17	
			5	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (Pn)	bulin	%	100	372	426	114,52	114,52	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			6	Cakupan pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF 4)	bulin	%	100	372	423	113,71	113,71	
		Kesehatan Bayi	1	Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN1)	bayi	%	100	409	425	103,91	103,91	**103,91%**
			2	Cakupan Pelayanan Neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN3)	bayi	%	100	409	336	82,15	82,15	**80,91%**
			3	Cakupan Penaganan komplikasi neonatus	bayi	%	80	73	40	54,79	54,79	
			4	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 12 bln (Kunjungan Bayi)	bayi	%	100	409	300	73,35	73,35	
		Upaya Kesehatan Balita dan Anak	1	Cakupan Pelayanan Anak Balita (12 - 59 bulan)sesuai standar	Balita	%	100	1.937	1.404	72,48	72,48	
		Pra Sekolah	2	Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS	Balita	%	100	1.937	1.371	102,70	102,70	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			3	Cakupan Stimulasi Deteksi Intervinsi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	APRAS	%	100	426	426	100	100	
		Upaya Kesehatan Sekolah	1.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	siswa	%	100	4.474	4.474	100	100	**100%**
			2.	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SD/MI	siswa	%	100	2.753	2.753	100	100	
			3.	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik siswa SMP/MTs	siswa	%	100	1.580	1.580	100	100	
		Pelayanan Keluarga Berencana	1	Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	akseptor	%	70	6.712	4.915	73,23	73,23	**73,23%**
			2	Cakupan Peserta KB Pasca persalinan	akseptor	%	100	372	267	71,77	71,77	**71,77%**
		Pelayanan Calon Pengantin	1	Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Skrining Kesehatan	Catin	%	100	547	105	19,2	19,2	**19,2%**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Pelayanan Kesehatan Usila	1.	Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	orang	%	100	4.820	4.820	100	100	**100%**
2	Pelayanan Promosi Kesehatan	PHBS 5 tatanan	1	Tatanan Rumah Tangga Sehat	Rumah	%	91	2.100	1.925	91,7	91,7	**91,7%**
			2	Tatanan institusi Pendidikan /sekolah	Sekolah	%	50	35	35	100	100	**83,92%**
			3	Tatanan Institusi Kesehatan	Sarkes	%	80	10	10	100	100	
			4	Tatanan TTU	TTU	%	40	53	31	58	58	
			5	Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	%	45	11	11	100	100	
		Pemberdayaan Masyarakat	1.	Pemberdayaan melalui Penyuluhan	Kader UKBM	%	100	270	270	100	100	
		Pembinaan UKBM	1	Pembinaan Posyandu	Posyandu	%	40	54	54	100	100	
			2	Persentase Posyandu Aktif	Posyandu	%	100	54	54	100	100	
		Penyuluhan NARKOBA	1.	Penyuluhan Narkoba Minimal 5 kali dalam Setahun	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	5	5	5	100	100	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Promosi Kesehatan	1	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan Jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	Masyarakat	kali	12	12	12	100	100	
			2	Promosi Kesehatan Untuk Program prioritas melalui	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	12	12	12	100	100	
				pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar gedung Puskesmas) minimal 12 kali setahun								
		Program Pengembangan	1	Pembinaan UKBM Lain	kelompok peduli kesehatan	kali	3	3	1	33	33	
			2	Pergerakan Germas 5 indikator	Masyarakat, Sekolah Kelompok	kali	5	5	5	100	100	
			3	Sosialisasi/pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	kali	1	1	0	0	0	
3	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Pengawasan Kualitas Air	a	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/layak	penduduk	%	95	32.980	32.980	100	100	**100%**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			b	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/IKL	Sarana	%	100	101	101	100	100	
			c	Persentase Pengambilan sampel air	Sampel Air	%	100	30	30	100	100	**86,3%**
			d	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standart	Sarana	%	85	7	7	100	100	
		2. STBM	a	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi layak	KK	%	100	10.542	8.839	88	88	
			b	Jumlah Desa ODF	Desa	Desa	100	10	5	50	50	
			c	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	%	100	10	10	100	100	
		3. Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan			Sarana	%	90	37	36	97	97	
		4. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan			Sarana	%	25	321	130	40	40	
		5. Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis			Fasyankes	%	10	10	100	100	100	
		6. Persentase Rumah Sehat			Rumah	%	10.542	10.542	8.839	88	88	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pelayanan Gizi	Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	1	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	bumil	%	80	25	31	100	100	**100%**
			2	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	bumil	%	84	418	421	100,72	100,72	**90,67%**
			3	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	bayi	%	60	98	163	78,05	78,05	
			4	Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	bayi	%	70	58	83	81,08	81,08	
			5	Persentase Cakupan Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	balita	%	85	42	49	100	100	
			6	Persentase Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	rematri	%	58	600	1.034	100	100	
			7	Persentase Cakupan vitamin A pada Balita	balita	%	90	1.461	1.623	100	100	
			8	Persentase Anemia pada ibu hamil	ibu hamil	%	33	408	37	9,01	9,01	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			9	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	bayi	%	2,5	425	20	4,71	4,71	
			10	Persentase Balita Kurus (Wasting)	balita	%	7	121	19	0,98	0,98	
			11	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	balita	%	5,02	87	49	2,53	2,53	
			12	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	balita	%	85	1.465	1.724	100	100	
			13	Persentase Cakupan Skrining anemia remaja putri	rematri	%	90	313	348	100	100	
			14	Persentase Cakupan Ibu Nifas Mendapat kapsul Vitamin A	Ibu Nifas	%	82	349	425	100	100	
5	Upaya Pengendalian Penyakit	TB Paru	1	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Orang	%	>90	39	19	48,71	48,71	**48,71%**
			2	Succsess Rate (Angka Keberhasilan Pengobatan)	orang	%	>90	38	38	100	100	**104%**
			3	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	orang	%	100	189	204	108	108	
		Malaria	1	Prosentase Penderita Positif Malaria Yang Diobati sesuai Standar	orang	%	0,00	0	0	0,00	0,00	**0,00%**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Kusta	1	Angka Prevalensi Kusta	orang	0,97 per 10.000 pddk	<1	3	3	75	75	**75%**
			2	Angka Kesembuhan / RFT Rate	orang	%	100	1	1	100	100	**100%**
		Diare	1	Pelayanan penderita diare sesuai standar	orang	%	100	522	522	100	100	**100%**
		Hepatitis	1	Pelayanan deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	orang	%	100	418	350	83,73	83,73	**83,73%**
		ISPA	1	Prosentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	orang	%	95	1.984	1.022	49	49	**49%**
			2	Cakupan penemuan pneumonia balita	orang	%	75	41	7	12,80	12,80	**12,80%**
		Demam Berdarah Dengue	1	Angka Kesakitan DBD/Insiden Rate (IR) DBD	orang	50 ribu per 100.000 pddk	50	21	120	296	296	**296%**
			2	Angka Bebas Jentik (ABJ)	rumah	%	>95	1.190	1.166	97	97	**97%**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV / AIDS	1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	penduduk beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TBC, IMS, WPS, Waria/ trans gender, WBP)	%	100	459	424	92	92	**92%**
		Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	1	Pelayanan kasus GHPR ditatalaksana standar	orang	%	100	660	660	100	100	**100%**
		Kecacingan	1	Pelayanan POPM kecacingan	orang	%	100	4.649	4.649	100	100	**100%**
		Surveilance Penyakit	1	Kelengkapan Laporan	puskesmas	%	100	53	100	53	100	**100%**
			2	Ketepatan laporan	puskesmas	%	100	53	100	53	100	**100%**
			3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal/alert Penyakit Potensial KLB	%	100	733	100	733	100	**100%**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

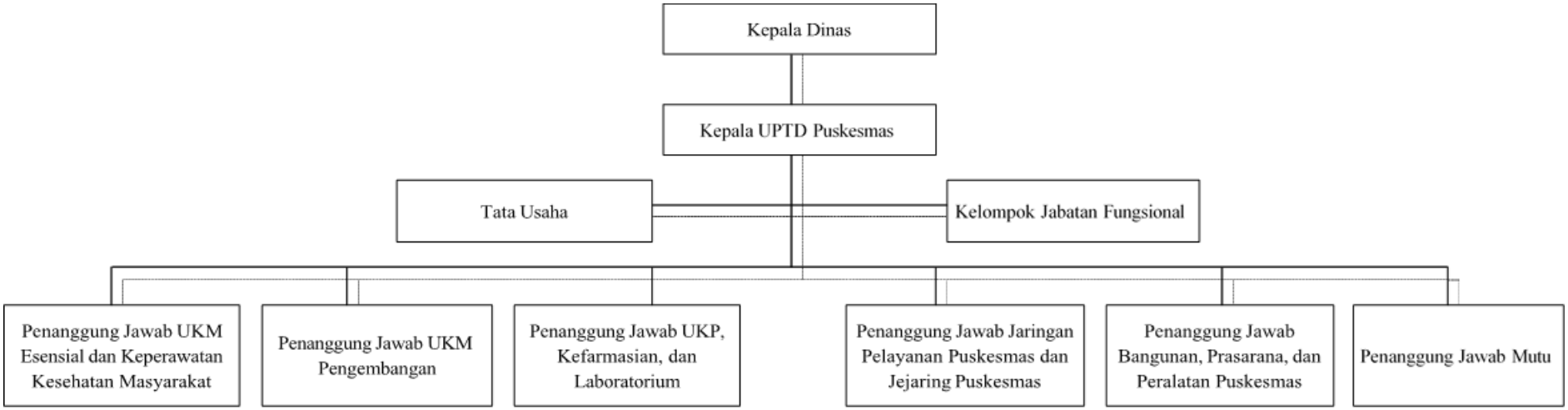
NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Imunisasi	1	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	orang	%	100	408	423	103	103	**103%**
			2	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan antigen baru	orang	%	100	916	820	89	89	**89%**
			3	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	orang	%	100	489	477	97	97	**97%**
			4	Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	orang	%	100	488	488	100	100	**100%**
			5	Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	orang	%	95	418	452	108	108	**108%**
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	Presentase meningkatnya desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	desa	%	80	10	10	100	100	**100%**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

NO	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	INDIKATOR		JENIS SASARAN	JENIS SATUAN	TARGET	ABSOLUT	CAPAIAN		CAKUPAN	
									ANGKA	%	SUB VARIABEL (SV)	VARIABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			2	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	875	875	100	100	**100%**
			3	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	269	269	100	100	
			4	Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining penyakit tidak menular sesuai standar di posbindu	orang	%	100	10.298	10.298	100	100	
			5	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	%	100	94	94	100	100	

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Sidemen

Berdasarkan Bupati Karangasem Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah tentang Struktur Organisasi, Persyaratan, Wewenang dan Tanggung Jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Sidemen sebagai berikut:



Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Sidemen terdiri dari:

1) Kepala UPTD;
2) Kepala Tata Usaha;
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
8) Penanggung Jawab Mutu.

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala UPTD

   Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dan melaksanakan fungsi:

   a) Menyusun program kerja UPTD Puskesmas;
   b) Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   c) Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   d) Menyelenggarakan wahana Pendidikan tenaga Kesehatan;
   e) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
   f) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
   g) Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
   h) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
   i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2) Kepala Tata Usaha

   Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas melaksanakan tugas:

   a) Menyusun program kerja tata usaha;
   b) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan dokumentasi dan kearsipan);
   c) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara / daerah, keamanan dan ketertiban UPTD;
   d) Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
   e) Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
   f) Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   g) Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
   h) Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
   i) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan;

j) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
l) Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
m) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
n) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha; dan
o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

a) Dokter

Dokter pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

(1) Menyusun program kerja;
(2) Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat;
(3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
(4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

b) Dokter Gigi

Dokter Gigi pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

(1) Menyusun program kerja;
(2) Memberikan pelayanan Kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan Kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang Kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat;
(3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
(4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis

c) Bidan

Bidan pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

(1) Menyusun program kerja;
(2) Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan;
(3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
(4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

d) Perawat

Perawat pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

(1) Menyusun program kerja;
(2) Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan;
(3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
(4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
(5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

e) Jabatan Fungsional Lainnya

4) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang membawahi:
   a) Pelayanan promosi kesehatan;
   b) Pelayanan kesehatan lingkungan;
   c) Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
   d) Pelayanan gizi dan bersifat UKM;
   e) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
   f) Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
5) Penanggung Jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
   a) Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
   b) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
   c) Pelayanan kesehatan olahraga;
   d) Pelayanan kesehatan kerja; dan
   e) Pelayanan kesehatan lainnya.
6) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi:
   a) Pelayanan pemeriksaan umum;
   b) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
   c) Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
   d) Pelayanan gawat darurat;
   e) Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
   f) Pelayanan persalinan;
   g) Pelayanan kefarmasian;
   h) Pelayanan laboratorium;
7) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, membawahi:
   a) Puskesmas pembantu;
   b) Puskesmas keliling;
   c) Praktik bidan desa; dan

d) Jejaring puskesmas.

8) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan

9) Penanggung Jawab Mutu.

a. Pejabat pada UPTD Puskesmas Sidemen

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Sidemen Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 262/HK/2025 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2025, diketahui susunan pejabat pengelola BLUD sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. I Made Narka NIP. 19690103 200604 1 005	Pemimpin BLUD
2.	Ni Luh Suhartini, A.Md.Kes NIP. 19730312 199203 2 004	Pejabat Keuangan
3.	I Gusti Ayu Wijantari, S.Kep.,Ns NIP. 19821208 200604 2 016	Pejabat Teknis Bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4.	Drg. I Ketut Nuarja NIP. 19790914 200701 2 015	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
5.	dr. I Gusti Ayu Sutrisna Wathi NIP. 19860704 201903 2 008	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	Ni Ketut Sudiari, A.Md.Keb NIP. 19830222 200604 2 009	Pejabat Teknis Bidang Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	Ida Ayu Mayun Mustika NIP. 19661229 198703 2 005	Pejabat Teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
8.	dr. Nyoman Okadana Arsana NIP. 19791112 200604 1 010	Pejabat Teknis Bidang Mutu

b. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Sidemen per 31 Desember 2025 sebanyak 68 orang terdiri dari:

- Aparatur Sipil Negara (PNS) : 39 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 12 orang
- Pegawai Non Aparatur Sipil Negara : 17 orang

Jumlah **: 68 orang**

Jumlah pegawai berdasarkan profesi yaitu:

No	JENIS TENAGA	PNS	THL	KONTRAK	JUMLAH
1	Dokter	5	-	-	5
2	Dokter Gigi	2	-	-	2
3	Bidan	17	-	1	18

No	JENIS TENAGA	PNS	THL	KONTRAK	JUMLAH
4	Perawat	18	-	-	18
5	Perawat Gigi	3	-	-	3
6	Nutrisionis/ Gizi	1	-	-	1
7	Asisten Apoteker	2	-	-	2
8	Analis Lab	3	-	-	3
9	Sanitarian	1	-	-	1
10	Promkes	1	-	-	1
11	Rekam Medis	-	-	-	-
12	Admin	2	-	6	8
13	Admin Akuntansi	1	-	-	1
14	Sopir	1	-	1	2
15	Satpam	-	-	1	1
16	Petugas Kebersihan	-	-	2	2
17	Pengelola Kbs	-	-	-	-
18	Lkb/ Kpa	-	-	-	-
19	Ppti	-	-	-	-
	JUMLAH	**57**	**-**	**11**	**68**

c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Sidemen melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokkan sebagai berikut:

Kerjasama Pelayanan Kesehatan:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3) Pengelola Sampah Medis.
4) Seluruh Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SLUA.
5) Seluruh Jejaring Pelayanan di Wilayah Kerja Puskesmas.

d. Pembiayaan UPTD Puskesmas Sidemen

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD

Puskesmas Sidemen mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan

Layanan Umum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Sidemen.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;

d) Penerimaan pembiayaan;
e) Pengeluaran pembiayaan;
f) Pembiayaan neto; dan
g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan Setara Kas;
   b) Investasi Jangka Pendek;
   c) Piutang dari Kegiatan Blud;
   d) Persediaan;
   e) Investasi Jangka Panjang;
   f) Aset Tetap;
   g) Aset Lainnya;
   h) Kewajiban Jangka Pendek;
   i) Kewajiban Jangka Panjang; Dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.
3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan metode langsung, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

   Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   f) Pendapatan BLUD lainnya.

   Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a) Pembayaran Pegawai;
   b) Pembayaran Barang;
   c) Pembayaran Bunga; dan

d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris
   a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
   b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan pajak.
   c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
   d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
   a) Ekuitas awal;
   b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
   c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
      1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
      2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
      3) Koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
   d) Ekuitas akhir.

h. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum,

yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk

Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-Pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

Pembentukan Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan/atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dagang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (First In

First Out). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a) Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
b) Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksploraasi**	

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
1	Alat Eksploraasi Topografi	5
2	Alat Eksploraasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Radiational Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan/ Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
InstalasiPengelolahan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi/ Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud
   a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
   b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).
6) Aset Lainnya

   Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);
b) Aset Sewaan;
c) Aset yang tidak digunakan;
d) Beban yang ditangguhkan; dan
e) Lainnya.

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.

Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien

Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran di muka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka

Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (cut off). Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain - lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.
d) Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;

a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas;
b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal; dan
c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(1) Pendapatan usaha rawat jalan;
(2) Pendapatan usaha rawat darurat; dan
(3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

c) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

d) Pendapatan Usaha Lainnya
Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
   (1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
   (2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
   (3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
   (4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.
d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.
g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
   (1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.
   (2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.
   (3) Mudharabah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.

(4) Musyarakah, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (akad). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.
c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.
e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai
   Merupakan beban yang terkait kompensasi kepada pegawai, baik kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun yang berstatus Non-ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis Entitas.
b) Beban Barang
   Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
c) Beban Jasa
   Merupakan beban yang terkait dengan pemanfaatan jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
d) Beban Pemeliharaan
   Merupakan beban yang terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.
e) Beban Langganan Daya/Jasa
   Merupakan beban yang terdiri dari beban penggunaan listrik, air, telepon, internet, serta jasa-jasa yang dimanfaatkan secara teratur dan berulang oleh Entitas.
f) Beban Perjalanan Dinas
   Merupakan beban yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.
g) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain
   Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.
h) Beban Penyusutan dan Amortisasi
   Merupakan beban yang timbul akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
i) Beban Penyisihan Piutang

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait potensi ketertagihannya.

j) Beban Operasional Lainnya
Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

k) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar
Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

l) Kerugian Penurunan Nilai Aset
Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

m) Kerugian Lainnya
Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

a) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.
b) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
d) Jumlah kerugian yang terjadi.

11) Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Sidemen yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. UPTD Puskesmas Sidemen terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 12.624.020.9-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan LRA

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.950.231.853,24 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.435.590.219,95 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	2.939.929.790,00	0,00	2.427.371.092,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	10.301.863,24	0,00	8.219.127,95
	Jumlah	**0,00**	**2.950.231.653,24**	**0,00**	**2.435.590.219,95**

4.1.2 Belanja LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah diterapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.241.578.006,00 atau 88,77% dari anggaran sebesar Rp4.800.501.460,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.960.082.976,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Operasional	3.549.501.460,00	3.152.708.138,00	88,82	2.736.958.364,00
b.	Belanja Modal	1.251.000.000,00	1.088.869.868,00	87,04	5.223.124.612,00
	Jumlah	**4.800.501.460,00**	**4.241.578.006,00**	**88,36**	**7.960.082.976,00**

a. Belanja Operasional

Jumlah realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.152.708.138,00 atau sebesar 88,82% dari anggaran sebesar Rp3.549.501.460,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.736.958.364,00. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Pegawai	1.913.238.000,00	1.831.007.223,00	95,70	1.187.988.709,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	1.636.263.460,00	1.321.700.915,00	80,78	1.548.969.655,00
3)	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**3.549.501.460,00**	**3.152.708.138,00**	**88,82**	**2.736.958.364,00**

Rincian dari Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.831.007.223,00 atau sebesar 95,70% dari anggaran sebesar Rp1.913.238.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.187.988.709,00. Rincian atas jumlah Belanja Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	33.678.000,00	31.718.023,00	94,18	0,00
b)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	12.022.928,00
c)	Belanja Pegawai BLUD	1.879.560.000,00	1.799.289.200,00	95,73	1.175.965.781,00
	Jumlah	**1.913.238.000,00**	**1.831.007.223,00**	**95,70**	**1.187.988.709,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp,00 atau sebesar 95,70% dari anggaran sebesar Rp1.913.238.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.187.988.709,00. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.440.000,00	30.847.065,00	47,87	7.046.796,00
b)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
c)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.456.000,00	20.988.000,00	89,48	0,00
d)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.950.000,00	8.866.000,00	99,06	9.174.000,00
e)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	108.300.000,00	78.450.000,00	72,44	160.300.000,00
f)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.920.000,00	10.068.408,00	72,33	0,00
g)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	834.272,00	604.128,00	72,41	1.030.344,00
h)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.042.840,00	755.160,00	72,41	1.288.056,00
i)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	368.196.500,00	279.764.900,00	0,00	357.016.541,00
j)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.047.123.848,00	891.357.254,00	85,12	992.113.918,00
	Jumlah	**1.636.263.460,00**	**1.321.700.915,00**	**80,78**	**1.548.969.655,00**

b. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.088.869.868,00 atau sebesar 87,04% dari anggaran sebesar Rp1.251.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.223.124.612,00. Rincian atas jumlah Belanja Operasional tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1)	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.000.000,00	86.768.021,00	89,45	276.912.080,00
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.154.000.000,00	1.002.101.847,00	86,84	4.946.212.532,00
4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.251.000.000,00**	**1.088.869.868,00**	**87,04**	**5.223.124.612,00**

Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp86.768.021,00 atau sebesar 89,45% dari anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp276.912.080,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	97.000.000,00	86.768.021,00	89,45	225.412.080,00
b)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00
	Jumlah	**97.000.000,00**	**86.768.021,00**	**89,45**	**276.912.080,00**

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.002.101.847,00 atau sebesar 87,06% dari anggaran sebesar Rp1.154.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.946.212.532,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a)	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.100.000.000,00	950.205.857,00	86,38	4.733.526.977,00
b)	Belanja Modal Pagar	54.000.000,00	51.895.990,00	96,10	212.685.555,00
	Jumlah	**1.154.000.000,00**	**1.002.101.847,00**	**86,84**	**4.946.212.532,00**

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

a. Kas di BOK

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp90.446.807,00 dan Rp123.978.531,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran APBD	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
BLUD- Bank BNI No Rek 1590087832 a.n 1050079 BOK PKM SIDEMEN	90.446.807,00	123.978.531,00
Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran	**90.446.807,00**	**123.978.531,00**

b. Kas di BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD. Jumlah Kas pada BLUD UPTD Puskesmas Sidemen per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp523.342.356,05 dan Rp350.525.177,81 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3) Kas di Bank		
BLUD PT Bank Pembangunan Daerah Bali- No. Rek 0220105002263 a.n BLUD UPTD Puskesmas Sidemen	523.342.356,05	350.525.177,81
Jumlah Kas pada BLUD	**523.342.356,05**	**350.525.177,81**

c. Piutang Layanan

Piutang Layanan merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Sidemen. Jumlah Piutang Layanan netto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.600.027,00 dan Rp11.734.866,00. dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Pendapatan Pelayanan:		
1) Piutang JKN	12.727.300,00	11.853.400,00
Jumlah Piutang Pelayanan (Bruto)	**12.727.300,00**	**11.853.400,00**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(127.273,00)	(118.534,00)
Jumlah Piutang Pelayanan (Netto)	**12.600.027,00**	**11.734.866,00**

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang JKN	12.727.300,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Bruto	12.727.300,00	0,00	0,00	0,00
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**127.273,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**12.600.027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang			
	Lancar <= 1 Bulan	Kurang Lancar	Diragukan 3-12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang JKN	11.853.400,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Bruto	11.853.400,00	0,00	0,00	0,00
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	**118.534,00**	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Netto	**11.734.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang/bahan pakai habis UPTD Puskesmas Sidemen per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp256.957.685,76 dan Rp270.237.917,58 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Alat Tulis Kantor	6.322.693,00	2.739.600,00
Bahan Komputer	15.904.000,00	25.702.000,00
Kertas dan Cover	5.248.235,00	9.000.000,00
Barang Cetakan	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00
Benda Pos	560.000,00	300.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	195.040.528,16	198.823.528,58
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	3.995.000,00	0,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00
Alat Listrik	2.540.200,00	3.322.000,00
Perabotan Kantor	0,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Bangunan dan Kontruksi	0,00	0,00
Bahan Kimia	27.347.029,60	30.350.789,00
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	**256.957.685,76**	**270.237.917,58**

Rincian mutasi Persediaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Persediaan Habis Pakai				
Alat Tulis Kantor	2.739.600,00	7.501.640,00	3.918.547,00	6.322.693,00
Bahan Komputer	25.702.000,00	0,00	9.798.000,00	15.904.000,00
Kertas dan Cover	9.000.000,00	9.477.735,00	13.229.500,00	5.248.235,00
Barang Cetakan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Kuasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	300.000,00	2.000.000,00	1.740.000,00	560.000,00
Barang Yang Akan Diserahkan Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Material/ Obat/ Alkon	198.823.528,58	1.426.228.048,47	1.430.011.048,89	195.040.528,16
Bahan Bakar Minyak/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	15.642.000,00	11.647.000,00	3.995.000,00
Bahan Makanan/ Natura dan Bahan Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Listrik	3.322.000,00	9.060.930,00	9.842.730,00	2.540.200,00
Perabotan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Bagunan dan Kontruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Kimia	30.350.789,00	65.162.353,12	68.166.112,52	27.347.029,60
Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**270.237.917,58**	**1.535.072.706,59**	**1.548.352.938,41**	**256.957.685,76**

Rincian mutasi Persediaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Persediaan Habis Pakai				
Alat Tulis Kantor	202.700,00	5.598.300,00	3.061.400,00	2.739.600,00
Bahan Komputer	104.500,00	31.620.000,00	6.022.500,00	25.702.000,00
Kertas dan Cover	1.330.200,00	20.700.000,00	13.030.200,00	9.000.000,00
Barang Cetakan	1.575.000,00	18.412.900,00	19.987.900,00	0,00
Barang Kuasi	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00
Benda Pos	860.000,00	2.000.000,00	2.560.000,00	300.000,00
Material/Obat/Alkon	182.202.388,28	1.034.733.711,58	1.018.112.571,28	198.823.528,58
Alat Listrik	1.230.000,00	8.509.500,00	6.417.500,00	3.322.000,00
Perabot Kantor	0,00	15.521.400,00	15.521.400,00	0,00
Bahan Kimia	0,00	56.427.199,00	26.076.410,00	30.350.789,00
Jumlah	**188.189.788,28**	**1.193.523.010,58**	**1.111.474.881,28**	**270.237.917,58**

4.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.126.146.266,63 dan Rp7.770.736.088,63 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Tanah	3.600.000,00	3.600.000,00
Peralatan dan Mesin	3.839.790.747,93	3.676.017.936,93
Gedung dan Bangunan	10.492.884.834,63	10.074.153.848,63
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.964.050,00	73.964.050,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	**14.410.239.632,56**	**13.827.735.835,56**
Akumulasi Penyusutan	(6.284.093.365,93)	(6.056.999.746,93)
Nilai Buku	**8.126.146.266,63**	**7.770.736.088,63**

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Peralatan dan Mesin	3.676.017.936,93	163.772.811,00	289.004.600,00	3.839.790.747,93
Gedung dan Bangunan	10.074.153.848,63	418.730.986,00	0,00	10.492.884.834,63
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.964.050,00	0,00	0,00	73.964.050,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**13.827.735.835,56**	**582.503.797,00**	**289.004.600,00**	**14.410.239.632,56**
Akumulasi Penyusutan	**6.056.999.746,93**			**6.284.093.365,93**
Jumlah	**7.770.736.088,63**			**8.126.146.266,63**

Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Peralatan dan Mesin	3.675.310.456,93	289.712.080,00	289.004.600,00	3.676.017.936,93
Gedung dan Bangunan	5.127.941.316,63	4.946.212.532,00	0,00	10.074.153.848,63
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.964.050,00	0,00	0,00	73.964.050,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**8.880.815.823,56**	**5.235.924.612,00**	**289.004.600,00**	**13.827.735.835,56**
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.104.138.755,93	289.270.067,00	276.000.000,00	3.117.408.822,93
Gedung dan Bangunan	2.670.781.218,00	219.943.531,00	0,00	2.890.724.749,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.426.754,00	5.439.421,00	0,00	48.866.175,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.818.346.727,93**	**514.653.019,00**	**276.000.000,00**	**6.056.999.746,93**
Nilai Buku				
Tanah	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Peralatan dan Mesin	571.171.701,00	0,00	0,00	558.609.114,00
Gedung dan Bangunan	2.457.160.098,63	0,00	0,00	7.183.429.099,63
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.537.296,00	0,00	0,00	25.097.875,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**3.062.469.095,63**	**0,00**	**0,00**	**7.770.736.088,63**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya UPTD Puskesmas Sidemen per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.616.067,00 dan Rp7.616.067,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	905.844.882,00	905.844.882,00
Jumlah Harga Perolehan	**905.844.882,00**	**905.844.882,00**
Akumulasi Penyusutan	(898.228.815,00)	(898.228.815,00)
Nilai Buku	**7.616.067,00**	**7.616.067,00**

4.2.2 Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Belanja UPTD Puskesmas Sidemen per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.177.319,00 dan Rp0,00.

	2025	2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.177.319,00	0,00
Jumlah	**2.177.319,00**	**0,00**

b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp200.711.170,00 dan Rp277.185.255,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Desember 2023	165.481.751,00	244.003.903,00
Belanja Obat	35.164.480,00	
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN berupa Remunerasi Jasa Pelayanan Non ASN BLUD Bulan Desember 2023	64.939,00	33.181.352,00
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	**200.711.170,00**	**277.185.255,00**

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.2.3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.814.220.720,44 dan Rp8.257.640.393,02 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Ekuitas Awal	8.257.640.393,02	3.753.721.555,77
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	904.991.631,42	3.641.588.547,13
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(348.411.304,00)	862.330.290,12
Ekuitas Akhir	**8.814.220.720,44**	**8.257.640.393,02**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan UPTD Puskesmas Sidemen pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp5.511.093.587,59 dan Rp7.859.156.771,95 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.782.967.457,00	2.397.583.092,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	277.898.968,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	1.289.366.779,35	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	1.150.558.520,00	8.219.127,95
Pendapatan APBN/APBD	10.301.863,24	5.453.354.552,00
Jumlah	**5.511.093.587,59**	**7.859.156.771,95**

4.3.2 Beban

Beban UPTD Puskesmas Sidemen pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar RpRp4.606.101.956,17 dan Rp4.217.984.638,82 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Pegawai	1.752.485.071,00	1.321.368.538,00
Beban Barang dan Jasa	2.626.395.993,17	2.381.844.547,82
Beban Penyisihan Piutang	127.273,00	118.534,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	227.093.619,00	514.653.019,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	**4.606.101.956,17**	**4.217.984.638,82**

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai UPTD Puskesmas Sidemen pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1.750.445.071,00	1.321.368.538,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	0,00
Jumlah	**1.752.485.071,00**	**1.321.368.538,00**

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa UPTD Puskesmas Sidemen pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang:

	2025	2024
Beban Bahan - Bahan Kimia	71.509.872,40	26.629.988,00
Beban Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	89.131.067,00	52.551.495,00
Beban Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
Beban Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	5.580.000,00
Beban Bahan - Bahan Lainnya	11.647.000,00	15.521.400,00
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	9.997.800,00	4.229.750,00
Beban Barang Pakai Habis Kesehatan (BMHP)	0,00	76.155.427,83
Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	64.181.826,00	3.781.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.918.547,00	3.061.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.229.500,00	18.230.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31.957.265,00	39.002.080,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.740.000,00	2.560.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.281.569,00	6.022.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.842.730,00	6.417.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	21.000.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	67.247.440,00	24.413.000,00
Beban Obat-Obatan - Obat	0,00	951.634.679,99
Beban Natura dan Pakan	1.381.686.069,77	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	34.101.100,00	12.476.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	61.499.800,00	36.302.500,00
Beban Makanan Aktivitas Lapangan	8.866.000,00	9.174.000,00
Beban Barang dan Jasa BOK	279.764.900,00	357.249.541,00
Jumlah	**2.153.602.486,17**	**1.671.992.961,82**

Beban Jasa:

	2025	2024
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000,00	8.160.000,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	2.000.000,00
Beban Jasa Kalibrasi	7.609.050,00	9.235.200,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	48.041.167,00	79.059.901,00
Beban Tagihan Telepon	22.247.859,00	20.644.269,00
Beban Tagihan Air	16.540.500,00	17.071.225,00
Beban Tagihan Listrik	15.135.004,00	40.778.732,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	742.200,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.279.744,00	5.606.748,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	78.450.000,00	149.075.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	0,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN	138.030.052,00	229.128.497,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.068.408,00	
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	604.128,00	1.030.344,00
Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi ASN	0,00	1.288.056,00
Beban Iuran Kematian bagi Non ASN	755.160,00	0,00
Jumlah	**347.943.272,00**	**563.077.972,00**

Beban Pemeliharaan:

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Pompa		14.952.900,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Alat Pengolahan Air Kotor		5.550.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	9.975.000,00	4.105.250,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.984.235,00	4.325.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.397.500,00	2.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	490.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	7.336.000,00	6.310.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pemadam Kebakaran	0,00	10.454.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Alat Studio Lainnya	996.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum	12.570.750,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Lainnya		29.180.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	12.450.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	12.250.000,00	9.150.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Air Minum - jaringan Air Minum Lainnya	10.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Listrik lainnya	9.890.750,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Telepon - Jaringan Telepon Lainnya	10.000.000,00	0,00
Jumlah	**102.850.235,00**	**86.517.150,00**

Beban Perjalanan Dinas:

	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	31.678.464,00
Jumlah	**0,00**	**31.678.464,00**

Beban Uang dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:

	2025	2024
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.000.000,00	28.578.000,00
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00
Jumlah	**22.000.000,00**	**28.578.000,00**

3. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang UPTD Puskesmas Sidemen pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	127.273,00	118.534,00
Jumlah	**127.273,00**	**118.534,00**

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi UPTD Puskesmas Sidemen pada Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyusutan	227.093.619,00	514.653.019,00
Beban Amortisasi	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**227.093.619,00**	**514.653.019,00**

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	0,00	416.414,00
Jumlah	**0,00**	**416.414,00**

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca tanggal 31 Desember 2025 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka-angka laporan keuangan tahun 2025.

6. Going Concern

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup BLUD UPTD Puskesmas Sidemen dimasa yang akan datang diragukan.

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Sidemen berlangsung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Puskesmas (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Sidemen bersamaan dengan penerbitan Laporan Auditor Independen pada tanggal 06 April 2026.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Nomor : 00051/III/ML/ DPS.1/SHR/ 2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Sidemen
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Sidemen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 06 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Sidemen tanggal 31 Desember 2025, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen BLUD UPTD Puskesmas Sidemen bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran

yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini yaitu lingkungan pengendalian, pengendalian pengamanan, pengendalian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian resiko pengendalian.

Kami menemukan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan merupakan masalah masalah yang kami ketahui berkaitan dengan kelemahan signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berdasarkan pertimbangan kami, dapat berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

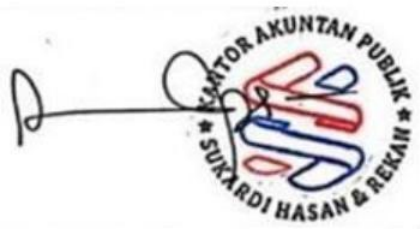
Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang mungkin juga dianggap sebagai kelemahan material sebagaimana didefinisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami laporkan kepada manajemen sebagaimana disajikan dalam laporan Lampiran A.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini dan dimasa yang akan datang kami ucapkan banyak terima kasih.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.
NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Lampiran A

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Catatan atas kelemahan design dan implementasi Sistem Pengendalian Intern yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Selisih Saldo Kas Per 31 Desember 2025 Antara Saldo Menurut Rekening Koran Dengan Saldo Menurut LPSAL (Laporan Perusabahan Sisa Anggaran Lebih). Hal ini disebabkan adanya pencairan dana dua kali atas satu transaksi yang sama dengan pihak ke tiga. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah diakui sebagai piutang pihak ketiga.

   Atas permasalah tersebut kami sarankan agar meningkatkan pengawasan atas tata kelola pengeluaran uang melalui verifikasi dokumen yang lebih ketat.
2. Tata Kelola Aktiva Tetap dan Persediaan Perlu Ditingkatkan

   Dari hasil audit yang kami lakukan terhadap tata kelola aktiva tetap, kami temukan hal-hal sebagi berikut:,

   1) Masih terdapat barang yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda. Hal ini berdampak pada masih tercantumnya aktiva rusak dalam daftar aktiva produktif. Hal ini disebabkan lambatnya proses pengajuan usul hapus barang dari Puskesmas Sidemen ke Pemda Karangasem.

      Masih terdapat barang persediaan habis pakai yang rusak yang tidak segera diajukan penghapusannya ke Pemda.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar:

   1) Segera mengajukan permohoan penghapusan atas aktiva rusak dan pesediaan rusak ke Bagian Aset Pemda Karangasem.

3. Terdapat Penerimaan Hibah Obat-Obatan dan Peralatan yang Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Operasional

   Dari audit yang dilakukan, Kami menemukan adanya hibah obat-obatan dan peralatan yang diterima oleh Puskesmas Sidemen dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan Pemda Karangasem yang belum dilaporkan dalam Laporan Operasional Puskesmas Sidemen.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh pegawai yang melakukan pencatatan terhadap Prinsip-Prinsip Auntansi yang terantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13).

Atas masalah tersebut, kami saranankan agar Puskesmas Sidemen meningkatkan kompetensi pegawai Puskesmas Sidemen dibidang Standar Akuntansi Pemerintahan No 13.

4. Pencatatan Transaksi Keuangan Puskesmas Sidemen Pada SIPD Belum Tepat Waktu

   Pencatatan transaksi keuangan Puskesmas Sidemen pada SIPD belum tepat waktu terutama terkait pencatatan transaksi keuangan yang menyangkut angka -angka neraca dan laporan operasional. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya informasi pada neraca Puskesmas Sidemen dan laporan operasionalnya.

   Atas permasalahan tersebut, kami sarankan agar pencatatan pada SIPD dilakukan tepat waktu berdasarkan bukti transaksi atau berita acara yang dibuat oleh Puskesmas per akhir tahun buku.

Laporan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Nomor : 00051/III/KEPATUHAN/DPS.1/2026

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
BLUD UPTD Puskesmas Sidemen
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Sidemen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 06 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

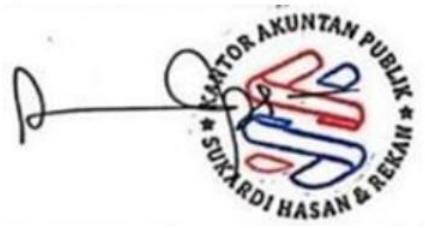
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas Sidemen merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLUD UPTD Puskesmas Sidemen... terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email : info@kapsukardihasan.com ; Website : https://www.kapsukardihasan.com

Hasil pengujian kami menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BLUD UPTD Puskesmas Sidemen sebagaimana disajikan dalam Lampiran B

Kantor Akuntan Publik

Sukardi Hasan & Rekan



Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak.,M.Acc., CPA.

NIAP: AP.1881

Tangerang, 06 April 2026

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email : info@kapsukardihasan.com ; Website : https://www.kapsukardihasan.com

Lampiran B

CATATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang perlu mendapat perhatian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Sidemen berbasis PSAP 13

   Dari hasil audit, kami menemukan bahwa Puskesmas Sidemen belum mempunyai Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis PSAP 13.

   Hal ini belum sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

   Atas permasalahan tersebut kami sarankan agar Puskesmas Sidemen melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengajukan usulan ke Pemda Karangasem untuk segera dibuatkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Sidemen berbasis PSAP 13.

2. Tata Kelola Puskesmas belum disesuaikan dengan Permenkes No 19 Tahun 2024

   Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor: 19 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan berlakunya permenkes ini maka Permnekes No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email : info@kapsukardihasan.com ; Website : https://www.kapsukardihasan.com

perubahannya sepanjang mengatur persyaratan dan perijinan Puskesmas, dinyatakan tidak berlaku.

Atas perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyesuaikan peraturan bupati yang terkait sehubungan dengan adanya Permenkes yang baru tersebut.

Kami sarankan agar secepatnya menyesuikan peraturan bupati yang relevan agar sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024.

Ruko Barcelona No.65 - Jl. Palem Raja Raya, Palem Semi
Karawaci - Panunggangan Barat, Kota Tangerang - Banten, 15132
Telp : (021) 55787188 ; Email : info@kapsukardihasan.com ; Website : https://www.kapsukardihasan.com

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENDANG

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2024

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD PUSKESMAS RENDANG
Jl. Gunung Batur No 5, Menanga, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali 80863
Telp 081338774636, Email: rendangpuskesmas@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN BLUD 1

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 2

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Laporan Realisasi Anggaran 5
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 6
3. Laporan Neraca 7
4. Laporan Operasional 8
5. Laporan Arus Kas 9
6. Laporan Perubahan Ekuitas 11

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Umum 12
2. Pernyataan Kepatuhan terhadap PSAP BLU 31
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 31
4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 57
5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 62
6. Penjelasan Pos-pos Neraca 64
7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 70
8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 74
9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 75
10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan 76

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 77

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS RENDANG
Jln. Gunung Batur No.05, Menanga - Rendang, Kode Pos 80863
Telp. (0363) 5502365
Email : rendangpuskesmas@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
UPTD PUSKESMAS RENDANG

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Rendang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: dr. I Made Sudarma Yasa
Alamat Kantor	: Jln. Gunung Batur No.05, Menanga - Rendang
Alamat Rumah Sesuai KTP	: Br. Dinas Pempatan, Rendang, Karangasem
Jabatan	: Pemimpin BLUD/Kepala UPTD
NIP	: 19790226 200604 1 003

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama BLUD UPTD Puskesmas Rendang

Rendang, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Rendang
Selaku Pemimpin BLUD,



dr. I Made Sudarma Yasa
NIP. 19790226 200604 1 003

Laporan No: 00041/2.1516/AU.5/11/0463-3/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Rendang

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Rendang, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian

material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00041/ML/KAP.IGOR/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan,

00041

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 25 Maret 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**					
2	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	*4.1.a*	3.282.000.000,00	3.387.155.448,00	103,20%	3.147.535.380,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	*4.1.c*	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	*4.1.e*	10.092.536,00	9.076.072,20	89,93%	8.989.351,11
7	**Jumlah Pendapatan**		**3.292.092.536,00**	**3.396.231.520,20**	**103,16%**	**3.156.524.731,11**
8	**Belanja**					
9	**Belanja Operasi**					
10	Belanja Pegawai	*4.2.a*	1.783.858.857,00	1.748.470.248,00	98,02%	1.514.363.852,00
11	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	2.194.748.120,00	1.917.306.814,00	87,36%	2.192.624.015,55
12	Belanja Bunga	*4.2.c*	-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	*4.2.d*	-	-	-	-
14	**Jumlah Belanja Operasi**		**3.978.606.977,00**	**3.665.777.062,00**	**92,14%**	**3.706.987.867,55**
15	**Belanja Modal**					
16	Belanja Tanah	*4.3.a*	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	185.000.000,00	181.646.110,00	98,19%	184.717.610,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	61.000.000,00	60.003.150,00	98,37%	425.430.050,00
19	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	*4.3.d*	-	-	-	-
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	-	-	-	-
21	**Jumlah Belanja Modal**		**246.000.000,00**	**241.649.260,00**	**98,23%**	**610.147.660,00**
22	**Jumlah Belanja**		**4.224.606.977,00**	**3.907.426.322,00**	**92,49%**	**4.317.135.527,55**
23	**Surplus (Defisit)**		**(932.514.441,00)**	**(511.194.801,80)**	**54,82%**	**(1.160.610.796,44)**
24	**Pembiayaan**					
25	**Penerimaan Pembiayaan**					
26	Penerimaan SILPA Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	**Jumlah Penerimaan**		**-**	**-**	**-**	**-**
29	**Pengeluaran Pembiayaan**					
30	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
31	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
32	**Jumlah Pengeluaran**		**-**	**-**	**-**	**-**
33	**Pembiayaan Neto**		**-**	**-**	**-**	**-**
34	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**(932.514.441,00)**	**(511.194.801,80)**	**54,82%**	**(1.160.610.796,44)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Rendang, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Rendang,

dr. I Made Sudarma Yasa
NIP 19790226 200604 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENDANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**319.083.238,16**	**261.005.375,60**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**319.083.238,16**	**261.005.375,60**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	*5.3*	(511.194.801,80)	(1.160.610.796,44)
5	**Sub Total**		**(192.111.563,64)**	**(899.605.420,84)**
6	Pendapatan APBN/APBD	*5.4*	573.602.126,00	1.218.688.659,00
7	Setoran ke Kas Daerah (BLUD)	*5.5*	-	-
8	Setoran ke Kas Daerah (BOK)	*5.6*	-	-
9	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	***5.7***	**381.490.562,36**	**319.083.238,16**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Rendang, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Rendang,

dr. I Made Sudarma Yasa
NIP 19790226 200604 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENDANG
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	*6.1*	3.398.285,00	42.788.381,00
4	Kas pada BLUD	*6.2*	378.100.062,36	276.294.857,16
5	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	33.899.700,00	66.492.300,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*6.3*	(3.389.970,00)	(664.923,00)
7	Persediaan BLUD	*6.4*	487.946.245,65	548.618.837,22
8	**Jumlah Aset Lancar**		**899.954.323,01**	**933.529.452,38**
9	**Aset Tetap**	*6.5*		
10	Tanah		3.600.000,00	3.600.000,00
11	Peralatan dan Mesin		5.727.816.269,62	5.535.785.545,62
12	Gedung dan Bangunan		7.945.538.253,48	7.945.538.253,48
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		38.699.125,00	38.699.125,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	**Biaya Perolehan Aset Tetap**		**13.715.653.648,10**	**13.523.622.924,10**
17	Akumulasi Penyusutan		(9.443.327.236,62)	(8.854.870.382,62)
18	**Nilai Buku Aset Tetap**		**4.272.326.411,48**	**4.668.752.541,48**
19	**Aset Lainnya**	*6.6*		
20	Aset Tidak Berwujud		6.000.000,00	6.000.000,00
21	Aset Lain-lain		845.273.503,00	845.273.503,00
22	**Jumlah Aset Lainnya**		**851.273.503,00**	**851.273.503,00**
23	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		(849.302.303,00)	(848.052.303,00)
24	**Nilai Buku Aset Lainnya**		**1.971.200,00**	**3.221.200,00**
25	**JUMLAH ASET**		**5.174.251.934,49**	**5.605.503.193,86**
26	**KEWAJIBAN**			
27	**Kewajiban Jangka Pendek**			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	*6.7*	7.785,00	-
29	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	*6.8*	565.657.558,00	365.768.595,00
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	*6.9*	-	-
31	**Jumlah Kewajiban Jk Pendek**		**565.665.343,00**	**365.768.595,00**
32	**Kewajiban Jangka Panjang**			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	**Jumlah Kewajiban Jk Panjang**		**-**	**-**
35	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**565.665.343,00**	**365.768.595,00**
36	**EKUITAS**			
37	Ekuitas	*6.10*	4.608.586.591,49	5.239.734.598,86
38	**JUMLAH EKUITAS**		**4.608.586.591,49**	**5.239.734.598,86**
39	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS**		**5.174.251.934,49**	**5.605.503.193,86**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Rendang, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Rendang,

dr. I Made Sudarma Yasa
NIP 19790226 200604 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENDANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**					
3	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	*7.1.a*	3.354.562.848,00	3.194.440.480,00	160.122.368,00	5,01%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*7.1.b*	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	*7.1.c*	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	*7.1.d*	-	-	-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya	*7.1.e*	9.076.072,20	8.989.351,11	86.721,09	0,96%
8	Pendapatan APBN/APBD	*7.1.f*	573.602.126,00	1.218.688.659,00	(645.086.533,00)	-52,93%
9	**Jumlah Pendapatan**		**3.937.241.046,20**	**4.422.118.490,11**	**(484.877.443,91)**	**-10,96%**
10	**Beban**					
11	Beban Pegawai	*7.2.a*	1.934.224.207,00	1.707.956.630,00	226.267.577,00	13,25%
12	Beban Barang dan Jasa	*7.2.b*	3.107.333.430,85	3.060.409.422,19	46.924.008,66	1,53%
16	Beban Penyisihan Piutang	*7.2.c*	3.389.970,00	664.923,00	2.725.047,00	409,83%
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	*7.2.d*	589.706.854,00	720.037.867,30	(130.331.013,30)	-18,10%
15	Beban Lain-Lain	*7.2.e*	-	-	-	-
16	**Jumlah Beban**		**5.634.654.461,85**	**5.489.068.842,49**	**145.585.619,36**	**2,65%**
17	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**(1.697.413.415,65)**	**(1.066.950.352,38)**	**(630.463.063,27)**	**59,09%**
18	**Kegiatan Non Operasional**	*7.3*				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		664.923,00	195.872,00	469.051,00	239,47%
22	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional**		**664.923,00**	**195.872,00**	**469.051,00**	**239,47%**
23	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**(1.696.748.492,65)**	**(1.066.754.480,38)**	**(629.994.012,27)**	**59,06%**
24	**Pos Luar Biasa**					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	**Jumlah Pos Luar Biasa**		**-**	**-**	**-**	**-**
28	**Surplus (Defisit)-LO**		**(1.696.748.492,65)**	**(1.066.754.480,38)**	**(629.994.012,27)**	**59,06%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Rendang, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Rendang,

dr. I Made Sudarma Yasa
NIP 19790226 200604 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENDANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**			
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1.a)*		
3	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan		3.387.155.448,00	3.147.535.380,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama		-	-
6	Pendapatan Hibah		-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya		9.076.072,20	8.989.351,11
8	Pendapatan APBN/APBD		573.602.126,00	1.218.688.659,00
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**3.969.833.646,20**	**4.375.213.390,11**
10	**Arus Kas Keluar**	*8.1.b)*		
11	Belanja Pegawai		1.748.470.248,00	1.514.363.852,00
12	Belanja Barang dan Jasa		1.917.306.814,00	2.192.624.015,55
13	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**3.665.777.062,00**	**3.706.987.867,55**
14	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**304.056.584,20**	**668.225.522,56**
15	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**			
16	**Arus Masuk Kas**	*8.2.a)*		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**
24	**Arus Keluar Kas**	*8.2.b)*		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		181.646.110,00	184.717.610,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		60.003.150,00	425.430.050,00
28	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**241.649.260,00**	**610.147.660,00**
32	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(241.649.260,00)**	**(610.147.660,00)**
33	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	*8.3.a)*		
34	**Arus Masuk Kas**			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**-**
37	**Arus Keluar Kas**	*8.3.b)*		
38	Setoran ke Kas Daerah (BLUD)		-	-
39	Setoran ke Kas Daerah (BOK)		-	-
40	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**-**	**-**
41	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**-**	**-**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENDANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
42	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**			
43	**Arus Kas Masuk**	*8.4.a)*		
44	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		62.356.227,00	216.787.153,00
45	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**62.356.227,00**	**216.787.153,00**
46	**Arus Kas Keluar**	*8.4.b)*		
47	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		62.348.442,00	216.787.153,00
48	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**62.348.442,00**	**216.787.153,00**
49	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**7.785,00**	**-**
50	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**		**62.415.109,20**	**58.077.862,56**
51	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**		**319.083.238,16**	**261.005.375,60**
52	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**381.498.347,36**	**319.083.238,16**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Rendang, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Rendang,

dr. I Made Sudarma Yasa
NIP 19790226 200604 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENDANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.1*	**5.239.734.598,86**	**5.774.791.913,21**
2	**Surplus (Defisit) LO**	*9.2*	**(1.696.748.492,65)**	**(1.066.754.480,38)**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.3*	**1.065.600.485,28**	**531.697.166,03**
	Koreksi Ekuitas Mutasi Antar Perangkat Daerah Aset Tetap		10.384.614,00	12.800.000,00
	Koreksi Ekuitas Mutasi Antar Perangkat Daerah Persediaan		1.098.449.061,28	876.002.592,03
	Koreksi Saldo Awal Piutang		-	200.574,00
	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap		-	(360.056.000,00)
	Koreksi saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-	2.750.000,00
	Koreksi Saldo Awal Hutang		(43.233.190,00)	-
4	**Ekuitas Akhir**	*9.4*	**4.608.586.591,49**	**5.239.734.598,86**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Rendang, 25 Maret 2026
Kepala UPTD Puskesmas Rendang,

dr. I Made Sudarma Yasa
NIP 19790226 200604 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RENDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024

1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Rendang

a. Sejarah Pembentukan UPTD Puskesmas Rendang

Puskesmas Rendang, berdiri tahun 1975 terletak di kecamatan paling barat Kabupaten Karangasem yaitu di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, luas tanah sepuluh are yang mewilayahi enam desa yaitu Desa Pesaban, Desa Nongan, Desa Rendang, Desa Menanga, Desa Besakih dan Desa Pempatan. Puskesmas Rendang pada saat ini melayani rawat jalan dibantu enam Puskesmas Pembantu. Pada tahun 2000 di bantu dengan pelayanan dua pos kesehatan desa. Puskesmas Rendang pada tahun 2008 meningkatkan pelayanan menjadi Puskesmas Rawat Inap dan pelayanan UGD 24 jam.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, UPTD Puskesmas Rendang ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

Kondisi Geografi

1) Batas Wilayah

Kecamatan Rendang adalah salah satu dari 8 (delapan) Kecamatan di Kecamatan Rendang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara	: Kabupaten Bangli
Selatan	: Kabupaten Klungkung
Timur	: Kecamatan Selat
Barat	: Kabupaten Bangli

2) Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Rendang adalah 109,70 Km^2 dengan luas wilayah masing-masing Desa sebagai berikut:

Desa Nongan	: 64,30 Km^2
Desa Menanga	: 15,40 Km^2
Desa Rendang	: 9,64 Km^2
Desa Pempatan	: 53,78 Km^2
Desa Besakih	: 21,23 Km^2
Desa Pesaban	: 3,22 Km^2

Wilayah Kecamatan Rendang merupakan wilayah pegunungan yang beriklim dingin. Sebagian besar lahan merupakan lahan pertanian. Jumlah dusun di wilayah kerja Puskesmas Rendang adalah 62 dusun, yaitu Desa Pesaban sebanyak 4 dusun, Desa Nongan sebanyak 14 dusun, Desa Rendang sebanyak 14 dusun, Desa Menanga sebanyak 8 dusun, Desa Besakih sebanyak 11 dusun dan Desa Pempatan sebanyak 11 dusun. Jarak terjauh wilayah kerja Puskesmas Rendang adalah $\pm$ 5 Km^2 dari Puskesmas Rendang dimana semua wilayah sudah dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dengan waktu tempuh $\pm$25 menit, sedangkan jarak tempuh dari Puskesmas Rendang ke Ibu Kota Kabupaten $\pm$50 Km^2 dengan waktu tempuh $\pm$60 menit.

Kondisi Demografi

1) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Rendang berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2018 berjumlah 41.609 jiwa dimana jumlah penduduk terbanyak ada pada Desa Pempatan yaitu

10.980 jiwa dan penduduk terkecil ada pada Desa Pesaban yaitu 2.643 jiwa. Data menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki 20.976 jiwa, dan perempuan 20.633 jiwa.

2) Kepadatan Penduduk
   Kepadatan penduduk di wilayah kerja Puskesmas Rendang pada tahun 2018 adalah 360 per Km^2. Kepadatan penduduk tertinggi tahun 2018 berada di Desa Nongan (895 jiwa/ Km^2) dan kepadatan penduduk terendah berada di Desa Pempatan (195 jiwa/ Km^2).
3) Jumlah Rumah Tangga (KK)
   Sedangkan jumlah Rumah Tangga (KK) tahun 2018 adalah sebanyak 11.210 KK dengan jumlah KK miskin sebanyak 1.822 KK.
4) Jumlah Sarana Kesehatan
   Di Kecamatan Rendang terdapat 1 (satu) Puskesmas Kecamatan yang terletak di Desa Menanga. Di masing-masing desa terdapat 1 puskesmas Pembantu dan 4 Poskesdes. Di masing-masing dusun terdapat sarana Posyandu yang seluruhnya berjumlah 62 Posyandu untuk seluruh Kecamatan Rendang.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, UPTD Puskesmas Rendang ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

b. Tempat dan Kedudukan

UPTD Puskesmas Rendang beralamat di Jalan Gunung Batur No 5 Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Kode Pos 80863, Telp. 081338774636, email: rendangpuskesmas@gmail.com.

c. Dasar Hukum

Adapun peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD Puskesmas Rendang adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10) Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 54);
14) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 20);
15) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 19);
16) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 49);
17) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 50);
18) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 54);
19) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023 tentang Remunerasi Bagi Pejabat pengelola dan pegawai pada unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 26);

d. Visi dan Misi UPTD Puskesmas Rendang

1) Visi : "Pelayanan Kesehatan Dasar yang memadai menuju Kecamatan Rendang Sehat"
2) Misi
   a) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Kecamatan Rendang
   b) Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat di Kecamatan Rendang
   c) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di Kecamatan Rendang
   d) Meningkatkan Kerjasama Lintas sektoral dalam penyelenggaraan pembangunan berwawasan kesehatan di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
   e) Mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Manajemen Puskesmas

e. Program Pelayanan dan Jenis-Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Rendang

Program Pelayanan dan Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang disediakan di UPTD Puskesmas Rendang berdasarkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Rendang Nomor: 800/003/PKM-RDG/I/2023 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Puskesmas Rendang Nomor: 800/003/PKM-RDG/I/2020 tentang Jenis-Jenis Pelayanan yang disediakan di UPTD Puskesmas Rendang, dengan rincian sebagai berikut:

Program Pelayanan

1) Pelayanan Medis Rawat Jalan
   Pelayanan Medis Rawat Jalan di UPTD Puskesmas Rendang terdiri dari beberapa pelayanan yaitu mulai dari Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum, Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA/KB, Pelayanan Ruang Pemeriksaan Anak, Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut, Pelayanan Imunisasi, Pelayanan Ruang VCT, Ruang Konseling Remaja, dan Pelayanan Ruang ISPA.
2) Pelayanan Penunjang Medis
   Pelayanan Penunjang Medis di UPTD Puskesmas Rendang terdiri dari beberapa pelayanan yaitu mulai dari Pelayanan Unit Pendaftaran dan Kasir, Pelayanan Unit Laboratorium, Pelayanan Unit Apotek (Instalasi Farmasi), Pelayanan Klinik Sanitasi, dan Pelayanan Pojok Gizi / Laktasi.
3) Pelayanan Rawat Inap dan Gawat Darurat
   Pelayanan Rawat Inap dan Gawat Darurat di UPTD Puskesmas Rendang terdiri dari beberapa pelayanan yaitu mulai dari Rawat Inap, Bersalin dan Poned, dan UGD 24 jam.
4) Penyelenggaraan Program Kesehatan
   a) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
      Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial terdiri dari Upaya Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Lingkungan, Upaya Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, PKPR, Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (ISPA, TB, Diare, Hepatitis, HIV, Kusta, Malaria, DBD, GHPR, Imunisasi), Upaya Penyakit Tidak Menular (PTM, PKKD, Jiwa), Surveilans, Upaya Kesehatan Lansia, dan Usaha Kesehatan Sekolah.
   b) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
      Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan terdiri dari Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS), Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM), Usaha Kesehatan

Kerja (UKK), Kesehatan Tradisional dan Komplementer, Kesehatan Olahraga dan Perawatan Kesehatan Masyarakat.

Jenis-Jenis Pelayanan

1) Jenis Pelayanan Dalam Gedung

No	Fasilitas Pelayanan	Jenis Pelayanan	Jadwal Pelayanan
1	Ruang Pemeriksaan Umum	- Pemeriksaan pasien - Penetapan diagnose - Koordinasi Lintas Unit Layanan (Lab, gigi, laktasi, lansia, klinik sanitasi, klinik akupresur) - Rujukan	Setiap Hari Kerja
2	Ruang Pemeriksaan KIA &KB	- Pemeriksaan Ibu hamil - PPIA - Pelayanan KB - Konsultasi KB - Koordinasi lintas unit layanan (Lab,VCT, Poli Gigi) - Rujukan	Setiap Hari Kerja Senin, Rabu, Jumat Setiap Hari Kerja Setiap Hari Kerja Senin, Rabu, Jumat Setiap Hari Kerja
3	Ruang Pemeriksaan Anak	- Pemeriksaan anak - MTBS - MTBM - Koordinasi lintas unit layanan (Lab) - Rujukan	Setiap Hari Kerja
4	Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut	- Pemeriksaan pasien - Penetapan diagnose - Koordinasi Lintas unit layanan - Rujukan	Setiap Hari Kerja
5	Ruang Imunisasi, Laktasi dan Gizi Klinis	- Pelayanan Imunisasi (Imunisasi HB 0, BCG, Polio 1, DPT/Hb/Hib, Polio 2, - DPT/Hb/Hib, Polio 3, DPT/Hb/Hib, Polio 4, IPV, MR, JE, DPT/Hb/Hib Boster, Campak Boster, TT Ibu Hamil) - SDDITK Bayi /BALITA - Konsultasi	Hari Selasa & Kamis Setiap Hari Kerja
6	Ruang Laboratorium	- Pemeriksaan spesimen darah, urine, sputum - Koordinasi Lintas Unit Layanan - Rujukan	Setiap Hari Kerja
7	Ruang Obat	- Melayani obat bagi pasien rawat jalan	Setiap Hari Kerja
8	UGD	- Melakukan pelayanan kegawatdaruratan - Tindakan bedah minor - Melayani Rujukan	24 Jam
9	Ruang Bersalin/ Nifas	- Melayani persalinan - PONED - Rujukan	24 Jam
10	Ruang VCT, Ruang Konseling	- Konseling HIV/AIDS - IMS	Setiap Hari Kerja

No	Fasilitas Pelayanan	Jenis Pelayanan	Jadwal Pelayanan
	Remaja, Ruang Yankestrad terintegrasi	- Pelayanan Konseling Remaja yang Bermasalah - Pelayanan Kesehatan tradisional dan komplementer - Rujukan	
11	Ruang Rawat Inap	- Pelayanan Pasien Rawat Inap - Rujukan	24 am
12	Ruang Sanitasi Klinis	- Konsultasi Penyakit yang - berbasis lingkungan (Diare, DBD, Malaria)	Selasa, Kamis, Sabtu
13	Ruang Tindakan	- Perawatan luka - Tindakan bedah minor - Rujukan	Setiap Hari Kerja
14	POLI ISPA	- *Screening* pasien yang - bergejala ispa dan suspek Covid-19	Setiap Hari Kerja

2) Pelayanan Luar Gedung
   a) Puskesmas Keliling (PUSLING)
   b) Posyandu
   c) Posyandu Lansia
   d) Posbindu
   e) Kelas Ibu Hamil
   f) Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
   g) Penjaringan Anak Sekolah
   h) Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
   i) UKGS
   j) Promosi Kesehatan
   k) Pembinaan UKS
   l) P3K
   m) UKK
   n) *Sweeping*
   o) Kesehatan Lingkungan

f. Jumlah Pelayanan UPTD Puskesmas Rendang Tahun 2025

Jumlah Pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gangguan Jiwa Tahun 2025 pada UPTD Puskesmas Rendang sebanyak 45.856 orang pasien dengan rincian:

No	Bulan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Gangguan Jiwa	Jumlah
1	Januari	3.547	50	20	3.617
2	Februari	3.530	41	20	3.591
3	Maret	3.755	42	20	3.817
4	April	3.158	38	20	3.216
5	Mei	3.468	36	10	3.514
6	Juni	3.859	40	10	3.909
7	Juli	3.400	36	10	3.446

No	Bulan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Gangguan Jiwa	Jumlah
8	Agustus	3.845	33	10	3.888
9	September	4.205	46	3	4.254
10	Oktober	4.520	41	-	4.561
11	November	3.605	34	-	3.639
12	Desember	4.364	40	-	4.404
Jumlah		**45.256**	**477**	**123**	**45.856**

g. Sasaran, Indikator, Target Kinerja

Berikut disajikan Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	Sasaran	TARGET SASARAN	Rendang	Nilai (%)	Nilai Dinas
1	2	3	4	5	6	7	8
UKM ESENSIAL							**93,52**
1	**Pelayanan Kesehatan Keluarga**						**80,34**
		KIA-KB					
		Kesehatan Ibu					82,89
		1 Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K1)	Bumil	100%	90,7	83,1	83,1
		2 Cakupan ibu hamil yang pertama mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Bumil	100%	81,1	81,11	81,11
		3 Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai Standar (K6)	Bumil	100%	99,48	75,55	75,55
		4 Cakupan Ibu hamil komplikasi (preeklampsia, obesitas, anemia, KEK, pendarahan, jantung, infeksi)	Bumil	90%	58,42	58,9	58,9
		5 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (Pn)	Bulin	100%	104,45	104,45	104,45
		6 Cakupan pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF 4)	Bulin	100%	94,24	94,24	94,24
		Kesehatan Bayi					99,00
		1 Cakupan Pelayanan Neonatus pertama yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN 1)	bayi	100%	96,61	104,71	104,71

No	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN	Sasaran	TARGET SASARAN	Rendang	Nilai (%)	Nilai Dinas
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 Cakupan Pelayanan Neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar (KN3)	bayi	100%	99,27	107,33	107,33
		3 Cakupan Penanganan komplikasi neonataus	bayi	80%	58,06	58,06	58,06
		4 Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 12 bln (Kunjungan Bayi)	bayi	100%	125,91	125,91	125,91
		Upaya Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah					107,55
		1 Cakupan Pelayanan Anak Balita (12-59 bulan) sesuai standar	Balita	100%	122,66	122,66	122,66
		2 Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS	Balita	100%	100	100	100
		3 Cakupan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah	APRAS	100%	93,98	100	100
		Upaya Kesehatan Sekolah					100,00
		1 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	siswa	100%	100	100	100
		2 Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SD/ MI	siswa	100%	100	100	100
		3 Cakupan Pemeriksaan Kesehatan peserta didik SMP/ MTs	siswa	100%	100	100	100
		Pelayanan Keluarga Berencana					72,36
		1 Cakupan Peserta KB aktif (CPR)	akseptor	70%	67,7	65,11	65,11
		2 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan	akseptor	100%	75,62	79,6	79,6
		Pelayanan Calon Pengantin					0,60
		Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Skrining Kesehatan	Catin	100%	0.6	0,6	0,6
		Pelayanan Kesehatan Usila					100,00
		Persentase usia lanjut berusia 60 keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Orang	100%	100	100	100
2	**Pelayanan Promosi Kesehatan**						100,00
		PHBS 5 Tatanan					100,00
		1 Tatanan Rumah Tangga Sehat	rumah	90%	100	100	100

No	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN		Sasaran	TARGET SASARAN	Rendang	Nilai (%)	Nilai Dinas
1	2	3		4	5	6	7	8
		2	Tatanan Institusi Pendidikan / sekolah	Sekolah	50%	100	100	100
		3	Tatanan Institusi Kesehatan	sarkes	80%	100	100	100
		4	Tatanan TTU	TTU	40%	100	100	100
		5	Tatanan Tempat Kerja	Tempat Kerja	45%	100	100	100
		Pemberdayaan Masyarakat						100,00
		1	Pemberdayaan melalui penyuluhan	Kader UKBM	100%	100	100	100
		Pembinaan UKBM						100,00
		1	Pembinaan Posyandu	posyandu	80%	100	100	100
		2	Persentase Posyandu Aktif	posyandu	100%	100	100	100
		Penyuluhan Narkoba						100,00
		1	Penyuluhan Narkoba Minimal 5 kali dalam setahun	Masyarakat, sekolah, kelompok	5 kali	100	100	100
		Promosi kesehatan						100,00
		1	Promosi Kesehatan untuk program prioritas di dalam Gedung Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat) minimal 12 kali setahun	Masyarakat	12 kali	100	100	100
		2	Promosi kesehatan untuk program prioritas melalui pemberdayaan masyrakat di bidang kesehatan (kegiatan di luar gedung puskesmas)	Masyarakat, sekolah, kelompok	12 kali	100	100	100
		Program Pengembangan						100,00
		1	Pembinaan UKBM Lain	kelompok peduli kesehatan	3 Kali	100	100	100
		2	Pergerakan Germas 5 indikator	Masyarakat, sekolah, kelompok	3 Kali	100	100	100
		3	Sosialisasi/ pembinaan SBH minimal 1 kali setahun	SLTA sederajat	1 Kali	100	100	100
3	**Kesehatan Lingkungan**							100,00
		Pengawasan Kualitas Air						
		1	Persentase penduduk terakses air minum berkualitas/ layak	Penduduk	95%	99,7	100	100
		2	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan/ IKL	Sarana	100%	100	100	100

No	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN		Sasaran	TARGET SASARAN	Rendang	Nilai (%)	Nilai Dinas
1	2	3		4	5	6	7	8
		3	Pengambilan sampel air	Sampel air	100%	100	100	100
		4	Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Sarana	85%	100	100	100
		STBM						100,00
		1	Persentase KK terakses fasilitas sanitasi dasar	KK	100%	100	100	100
		2	Desa ODF	Desa	50%	100	100	100
		3	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Desa	100%	100	100	100
		Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan		Sarana	90%	97,5	100	100
		Persentase Tempat Pengeloaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan		Sarana	25%	78,9	100	100
		Persentase RS dan Fasyankes yang mengelola limbah medis		Fasyankes	100%	100	100	100
		Persentase Rumah Sehat		Rumah	25%	98,11	100	100
4	**Gizi**	***Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat***						**97,5**
		1	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	Bumil	80%	100	100	100
		2	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet darah (TTD)	Bumil	84%	66.4	66,4	80
		3	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan mendapat Asi Eksklusif	Bayi	60%	100	100	100
		4	Persentase Bayi baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)	Bayi	70%	100	100	100
		5	Persentase Cakupan Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	Balita	85%	100	100	100
		6	Persentase Remaja Putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	rematri	58%	100	100	100
		7	Persentase cakupan vitamin A pada balita	balita	90%	93.72	93,72	100
		8	Persentase Anemia pada ibu hamil	Ibu Hamil	33%	3.55	3,55	100
		9	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Bayi	2,50%	3.26	3,26	85
		10	Persentase Balita Kurus (Wasting)	balita	7%	6.8	6,8	100

No	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN		Sasaran	TARGET SASARAN	Rendang	Nilai (%)	Nilai Dinas
1	2	3		4	5	6	7	8
		11	Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	balita	5,02%	1.77	1,77	100
		12	Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	balita	85%	92,1	92,1	100
		13	Persentase Cakupan Skrining anemia remaja putri	rematri	90%	100	100	100
		14	Persentase CakupanIbu Nifas mendapat Kapsul Vitamin A	Ibu Nifas	82%	100	100	100
5	**Pencegahan dan pengendalian penyakit**							**89,77**
		TB Paru						68,5
		1	Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Orang	100%	41,7	0,38	0,38
		2	Success Rate	Orang	>90%	94,4	94,4	100
		3	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	100%	108,5	105,12	105,12
		Malaria						100,00
		1	Persentase Penderita Positif Malaria yang diobati sesuai standar	Orang	100%	100	-	100
		2	Angka kesakitan malaria (API)	Orang	< 1	<1	-	100
		Kusta						100,00
		1	Angka Prevalensi kusta	Orang	< 1	< 1	0	100
		2	Angka Kesembuhan / RFT Rate	Orang	100%	100	100	100
		Diare						100,00
		1	Presentase penderita diare yang mendapat pelayanan standar	Orang	100%	100	100	100
		Hepatitis						81,91
		1	Presentase Deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	Orang	100%	81,91	81,91	81,91
		ISPA						50,15
		1	Presentase balita dengan batuk/pilek/kesukaran bernafas mendapat tatalaksana standar	Orang	100%	99,28	100	100
		2	Cakupan penemuan pneumonia balita	Orang	100%	100	0,31	0,31
		Demam Berdarah Dengue (DBD)						81,25
		1	Angka kesakitan DBD/ Insiden rate (IR) DBD	orang	50/100.000 pddk	73,88	67,61	73,95
		2	Angka bebas jentik (ABJ)	rumah	> 95 %	96,11	88,55	88,55

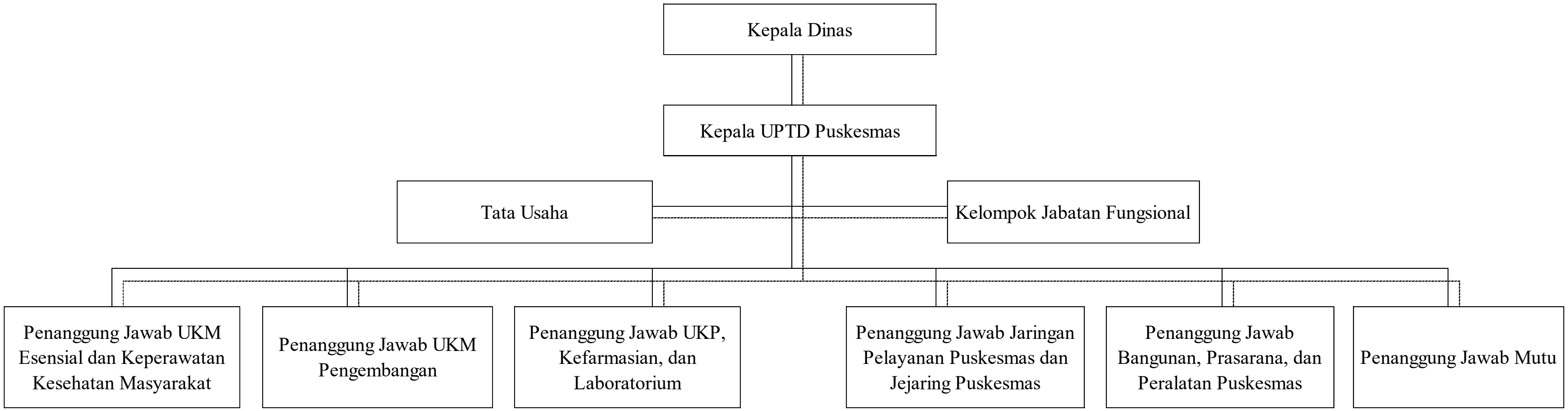
No	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN		Sasaran	TARGET SASARAN	Rendang	Nilai (%)	Nilai Dinas
1	2	3		4	5	6	7	8
		Pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS						
		1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	penduduk beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, IMS, WPS, Waria/ transgender, WBP)	100%	82	81.85	81.85
		Pencegahan dan Penanggulangan Rabies						
		1	Presentase kasus GHPR ditatalaksana standar	Orang	100%	100	100	100
		Kecacingan						
		1	Presentase cakupan POPM kecacingan	Orang	100%	100	100	100
		Surveilance Penyakit						99,37
		1	Kelengkapan Laporan	puskesmas	90%	100	100	100
		2	Ketepatan Laporan	puskesmas	100%	100	98.1	98.1
		3	Sinyal/Alert yang direspon < 24 jam	Sinyal/ alert Penyakit potensial KLB	100%	100	100	100
		Pelayanan Imunisasi						104,06
		1	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Bayi	100%	109,93	109,93	109,93
		2	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	Bayi	100%	100	100	100
		3	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	Anak	100%	95,94	95,94	95,94
		4	Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lengkap di usia sekolah dasar	Anak	98%	98,45	98,45	98,45
		5	Persentase Wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	WUS	80%	116	116	116
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular						100,00
		1	Persentase meningkatnya desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpandu (posbindu)	desa	70%	6	100	100
		2	Persentase penderita hipertensi mendapatkan	orang	100%	100	100	100

No	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN		Sasaran	TARGET SASARAN	Rendang	Nilai (%)	Nilai Dinas
1	2	3		4	5	6	7	8
			pelayanan kesehatan sesuai standar					
		3	Persentase pelayanan sesuai standar bagi penderita diabetes mellitus	orang	100%	100	100	100
		4	Persentase warga negara usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	100%	100	100	100
		5	Persentase ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	100%	101	101	101
UKM PENGEMBANGAN								**89,99**
1	Kesehatan Tradisional							83,33
		1	Persentase Pembinaan tanaman obat keluarga pada keluarga	keluarga	3%	91	91	100
		2	Persentase Pembinaan pada kelompok Asuhan Mandiri	kelompok asman	60%	100	100	100
		3	Persentase Pembinaan Penyehat Tradisional	orang	70%	50	50	50
2	Upaya Kesehatan Olahraga							100,00
		1	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah raga diwilayah kerjanya	Puskesmas	100%	100	100	100
		2	Persentase jamaah haji yang melakukan tes kebugaran	Jamaah haji	100 orang		-	100
4	Kesehatan Gigi Masyarakat	1	Persentase Desa yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	desa	80%	66,66	66,6	66,6
5	Upaya kesehatan Gigi Sekolah							100,00
		1	Persentase Pembinaan kesehatan gigi di TK	TK	80%	100	100	100
		2	Persentase Pembinaan dan bimbingan sikat gigi masal pada SD/ MI	SD/ MI	100%	100	100	100
6	Upaya Kesehatan Kerja	1	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Puskesmas	50%	100	100	100
		2	Persentase Pos UKK yang dibina	Pos UKK	100%	100	100	100
UKP								**81,47**
1	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan							

No	UPAYA KESEHATAN	KEGIATAN		Sasaran	TARGET SASARAN	Rendang	Nilai (%)	Nilai Dinas
1	2	3		4	5	6	7	8
		1	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat sesuai standar	FKTP	70%	99,42	63,46	63,46
2	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkemas)							
		1	Persentase keluarga rawan yang dibina	Keluarga	80%	100	100	100
3	Pelayanan Kefarmasian							100,00
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Puskesmas	100%	100	100	100
		2	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Obat	96%	100	100	100
4								62,41
	Pemeriksaan Laboratorium	1	Kemampuan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis di wilayah kerja puskesmas	Specimen	20%	58,97	58,97	58,97
		2	Kemampuan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen sampel lingkungan di wilayah kerja puskesmas	Specimen	50%	65,85	65,85	65,85

h. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Rendang

Berdasarkan Bupati Karangasem Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah tentang Struktur Organisasi, Persyaratan, Wewenang dan Tanggung Jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah. Adapun bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Rendang sebagai berikut:



Keterangan:

——————————— : Garis Perintah

-------------------------- : Garis Koordinasi

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
1) Kepala UPTD;
2) Kepala Tata Usaha;
3) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
4) Penanggung Jawab UKM Pengembangan
5) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
6) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas
8) Penanggung Jawab Mutu

Rincian Wewenang dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala UPTD
   Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya, dan melaksanakan fungsi:
   a) Menyusun program kerja UPTD Puskesmas;
   b) Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   c) Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
   d) Menyelenggarakan wahana Pendidikan tenaga Kesehatan;
   e) Memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik
   f) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
   g) Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
   h) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
   i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2) Kepala Tata Usaha
   Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas melaksanakan tugas:
   a) Menyusun program kerja tata usaha;
   b) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan dokumentasi dan kearsipan);
   c) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban UPTD;
   d) Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
   e) Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
   f) Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   g) Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
   h) Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
   i) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan;
   j) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
   k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
   l) Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
   m) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
   n) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha; dan
   o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3) Kelompok Jabatan Fungsional
   a) Dokter
      Dokter pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
      (1) Menyusun program kerja;
      (2) Memberikan pelayanan Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang Kesehatan kepada masyarakat;
      (3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
      (4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
      (5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
   b) Dokter Gigi
      Dokter Gigi pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
      (1) Menyusun program kerja;
      (2) Memberikan pelayanan Kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan Kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang Kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat;
      (3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
      (4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
      (5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis
   c) Bidan
      Bidan pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
      (1) Menyusun program kerja;
      (2) Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan, pengelolaan pelayanan kebidanan;
      (3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
      (4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
      (5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
   d) Perawat
      Perawat pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
      (1) Menyusun program kerja
      (2) Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan;
      (3) Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
      (4) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
      (5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
   e) Jabatan Fungsional Lainnya

4) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang membawahi:
   a) Pelayanan promosi Kesehatan;
   b) Pelayanan Kesehatan lingkungan;
   c) Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
   d) Pelayanan gizi dan bersifat UKM;
   e) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
   f) Pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat.

5) Penanggung Jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
   a) Pelayanan Kesehatan gigi masyarakat;
   b) Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer;
   c) Pelayanan Kesehatan olahraga;
   d) Pelayanan Kesehatan kerja; dan
   e) Pelayanan Kesehatan lainnya.

6) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi:
   a) Pelayanan pemeriksaan umum;
   b) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
   c) Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
   d) Pelayanan gawat darurat;
   e) Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
   f) Pelayanan persalinan;
   g) Pelayanan kefarmasian;
   h) Pelayanan laboratorium;

7) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, membawahi:
   a) Puskesmas pembantu;
   b) Puskesmas keliling;
   c) Praktik bidan desa; dan
   d) Jejaring puskesmas.

8) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

9) Penanggung Jawab Mutu.

i. Pejabat pada UPTD Puskesmas Rendang

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas Rendang Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 625/HK/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2023, diketahui susunan pejabat pengelola BLUD sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	dr. I Made Sudarma Yasa NIP. 19790226 200604 1 003	Pemimpin BLUD
2.	I Made Widera, S.Kep.,Ners NIP. 19680405 199003 1 012	Pejabat Keuangan
3.	Bdn. Ni Wayan Ekawati, S.Tr.Keb NIP. 19681111 199103 2 013	Pejabat Teknis Bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

No	Nama	Jabatan
4.	Ni Putu Nusrani, A.Md.Keb NIP. 19760101 200604 2 042	Pejabat Teknis Bidang UKM Pengembangan
5.	dr. I Putu Angga Wirayogi NIP. 19801223 201001 1 012	Pejabat Teknis Bidang UKP Kefarmasian dan Laboratorium
6.	Ni Made Sri Sinaryati, A.Md.Keb NIP. 19740115 200604 2 018	Pejabat Teknis Bidang Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
7.	I Putu Suarta, S.Sos NIP. 19671231 198703 1 059	Pejabat Teknis Bidang Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
8.	Ns. Ni Wayan Seriarcani, S.Kep NIP. 19781225 200604 2 039	Pejabat Teknis Bidang Mutu

j. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai UPTD Puskesmas Rendang per 31 Desember 2025 sebanyak 88 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 48 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 40 orang

Jumlah : 88 orang

Jumlah pegawai berdasarkan profesi yaitu:

No	Jenis Tenaga	PNS	PPPK	Jumlah
1	Dokter	3	-	3
2	Dokter Gigi	1	-	1
3	Bidan	15	13	28
4	Perawat	12	12	24
5	Perawat Gigi	3	-	3
6	Nutrisionis/ Gizi	-	1	1
7	Apoteker	1	-	1
8	Ass. Apoteker	1	-	1
9	Analis Lab	2	-	2
10	Sanitarian	3	1	4
11	AdminKes	1	-	1
12	Rekam Medis/Petugas Loket	1	4	5
13	Administrasi Umum	1	2	3
14	Kord Pembuat SPJ	-	1	1
15	Bendahara	2	-	2
16	Pengurus Barang	1	-	1
17	Sopir Ambulance	1	2	3
18	Petugas Keamanan	-	2	2
19	Petugas Kebersihan	-	2	2
	Jumlah	**48**	**40**	**88**

k. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 UPTD Puskesmas Rendang melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan beberapa pihak yang dikelompokkan sebagai berikut:
Kerjasama Pelayanan Kesehatan:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
3) Pengelola Sampah Medis;
4) Seluruh Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SLUA;
5) Seluruh Jejaring Pelayanan di Wilayah Kerja Puskesmas.

l. Pembiayaan UPTD Puskesmas

Pembiayaan puskesmas bersumber dari pendapatan puskesmas yang digunakan kembali sebagai biaya operasional. Sumber pendapatan puskesmas berasal dari jasa pelayanan pasien Umum, BPJS dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan puskesmas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi UPTD Puskesmas Rendang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah UPTD Puskesmas Rendang.
3) Laporan Keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;

f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g) Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
6) Khusus Laporan Realisasi Anggaran menyajikan nilai anggaran dan realisasi yang ada dalam dokumen anggaran UPTD Puskesmas (RBA dan DPA).
7) Periode akuntansi Puskesmas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Penerimaan pembiayaan;
   e) Pengeluaran pembiayaan;
   f) Pembiayaan neto; dan
   g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD hanya menyajikan pendapatan dan belanja yang disajikan dalam RBA/DPA UPTD Puskesmas. Belanja untuk UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD (Kas Daerah) dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan sehingga atas realisasinya disajikan dalam LRA Dinas Kesehatan dan tidak disajikan lagi dalam LRA UPTD Puskesmas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e) Lain-lain; dan
   f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) kas dan setara kas;
   b) investasi jangka pendek;
   c) piutang dari kegiatan BLUD;
   d) persediaan;
   e) investasi jangka panjang;
   f) aset tetap;
   g) aset lainnya;
   h) kewajiban jangka pendek;
   i) kewajiban jangka panjang; dan
   j) ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO;
   b) Beban;
   c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
   d) Kegiatan non operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan
   g) Surplus/Defisit-LO.
3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.
4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan *metode langsung*, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

a) Pendapatan dari alokasi APBD/APBN;
b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;
e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
f) Pendapatan usaha lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

a) Pembayaran Pegawai;
b) Pembayaran Barang;
c) Pembayaran Bunga; dan
d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Penjualan Aset Tetap;
b) Penjualan Aset Lainnya;
c) Penerimaan dari Divestasi; dari
d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan Aset Tetap;
b) Perolehan Aset Lainnya;
c) Penyertaan Modal;
d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD

untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
   2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
   3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
d) Ekuitas akhir.

h. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan usaha lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan usaha lainnya, antara lain berupa:
    a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) jasa giro;
    c) pendapatan bunga;
    d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan; dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Piutang

Pengukuran

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
b) Nilai Piutang atas Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disajikan berdasarkan nilai yang dibayarkan apabila selama penyusunan Laporan Keuangan telah diketahui nilai pendapatannya. Sedangkan bagi Piutang yang belum dibayarkan diakui sebesar nilai verifikasi apabila telah terdapat Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) atau berdasarkan nilai pengajuan apabila belum terdapat BAHV.
c) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
d) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan Pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal penagihan pertama, kedua, dan ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c) Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Dalam hal piutang sampai dengan tanggal pelaporan telah diterima, maka kolektibilitas piutang menjadi Lancar.

Pembentukan Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai yang diperkirakan tidak dapat ditagih dengan dasar pertimbangan tertentu dan atau berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penghapusan Piutang

Piutang usaha dihapuskan apabila sudah dipastikan tidak bisa tertagih didasarkan atas kebijakan manajemen puskesmas. Piutang yang dihapuskan akan mengurangi penyisihan kerugian piutang dan apabila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi saldo penyisihan kerugian piutang maka akan diperlakukan sebagai beban kerugian piutang dan mengurangi surplus/defisit tahun berjalan.

3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pengukuran persediaan menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Apabila terdapat persediaan yang kedaluwarsa atau rusak, maka jumlah tersebut mengurangi nilai persediaan dan dibebankan pada periode yang bersangkutan.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)* dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
b. Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk pengeluaran - pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Masa manfaat/umur ekonomis untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
	Aset Tetap	
A.	**Peralatan dan Mesin**	
I	**Alat Besar**	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	10
3	Alat-Alat Bantu	10
II	**Alat Angkutan**	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10
5	Alat Angkut Bermotor Udara	10
III	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Alat Bengkel Bermesin dan atau tidak bergerak	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin dan atau bergerak	5
3	Alat Ukur	5
IV	**Alat Pertanian**	
1	Alat Pengolahan	5
V	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
VI	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	5
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
VII	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	Alat Kedokteran	5
2	Alat Kesehatan Umum	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
VIII	**Alat Laboratorium**	
1	Unit Alat Laboratorium	5
2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
6	*Radiation Aplication and Non-Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
IX	**Alat Persenjataan**	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	5
3	Senjata Sinar	5
4	Alat Khusus Kepolisian	5
X	**Komputer**	
1	Komputer Unit	5
2	Peralatan Komputer	5
XI	**Alat Eksplorasi**	
1	Alat Eksplorasi Topografi	5
2	Alat Eksplorasi Geofisika	5
XII	**Alat Pengeboran**	
1	Alat Pengeboran Mesin	5
2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
XIII	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
1	Sumur	5
2	Produksi	5
3	Pengolahan dan Pemurnian	5
XIV	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	Alat Bantu Eksplorasi	5
2	Alat Bantu Produksi	5
XV	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	Alat Deteksi	5
2	Alat Pelindung	5
3	Alat SAR	5
4	Alat Kerja Penerbangan	5
XVI	**Alat Peraga**	
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
XVII	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	Unit Peralatan proses / produksi	5

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
XVIII	**Rambu - rambu**	
1	Rambu - rambu Lalu Lintas Darat	5
2	Rambu - rambu Lalu Lintas Udara	5
3	Rambu - rambu Lalu Lintas Laut	5
XIX	**Peralatan Olah Raga**	
1	Peralatan Olah Raga	5
B	**Gedung dan Bangunan**	
I	**Bangunan Gedung**	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
II	**Monumen**	
1	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	25
III	**Bangunan Menara**	
1	Bangunan Menara Perambuan	25
IV	**Tugu Titik Kontrol / Pasti**	
1	Tugu/Tanda Batas	25
C	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
I	**Jalan dan Jembatan**	
1	Jalan	12
2	Jembatan	12
II	**Bangunan Air**	
1	Bangunan Air Irigasi	12
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	12
4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	12
7	Bangunan Air Kotor	12
III	**Instalasi**	
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	12
2	Instalasi Air Kotor	12
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	12
5	Instalasi Pembangkit Listrik	12
6	Instalasi Gardu Listrik	12
7	Instalasi Pertahanan	12
8	Instalasi Gas	12
9	Instalasi Pengaman	12
10	Instalasi lain	12

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat/ umur ekonomis (Tahun)
IV	**Jaringan**	
1	Jaringan Air Minum	12
2	Jaringan Listrik	12
3	Jaringan Telepon	12
4	Jaringan Gas	12

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan *overhaul* disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Alat Besar Apung	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Bantu	*Overhaul*	30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
		>65% s.d. 100%	6
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	8
		>75% s.d. 100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Ukur	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir tidak bergerak	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Radiational Application & Non-Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Peralatan laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	*Renovasi*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Senjata Sinar	*Overhaul*	30% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Komputer	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Produksi	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	30% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat bantu Produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Pelindung	*Renovasi*	25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat sar	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat kerja penerbang	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	30% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	5
Peralatan Proses Produksi			
Unit Peralatan proses produksi	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu lalu lintas darat	*Overhaul*	30% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	4
Rambu-rambu lalu lintas Udara	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Rambu-rambu lalu lintas Laut	*Overhaul*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	30% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	*Renovasi*	15% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Gedung tempat tinggal	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>75% s.d. 100%	20
Monumen			
Candi/tugu Peringatan / Prasasti	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Bangunna Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	15% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	12
		>65% s.d. 100%	15

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 60%	10
		>45% s.d. 100%	12
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Banguan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulan Benncana Alam	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Pengembangan sumber air dan Tanah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Bersih / Air Baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi gardu Listrik	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi gas	*Renovasi*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Instalasi Pengaman	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
		>65% s.d. 100%	8
Instalasi Lain	*Renovasi*	0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d. 100%	8
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Telepon	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	7
		>65% s.d. 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	8
		>65% s.d. 100%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	*Renovasi*	0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	8
		>45% s.d. 65%	10
		>65% s.d. 100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas:

a) Aset Kerjasama Operasi (KSO);
b) Aset Sewaan;
c) Aset yang tidak digunakan:
d) Beban yang ditangguhkan;
e) Lainnya

Aset Kerjasama Operasi yang diserahkan pemilik aset disajikan sebagai "Aset Kerjasama Operasi".

Aset Sewa, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periode yang konstan atas saldo kewajiban.

Aset yang dihentikan penggunaanya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatat dan tidak disusutkan.
Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.

7) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban puskesmas kepada pihak lain, yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dari aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lainnya di masa datang, selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:

a) Utang Usaha
Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena transaksi pengadaan bahan, barang, aset/investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan operasional puskesmas.

Utang usaha diakui pada saat puskesmas menerima dan mempunyai kuasa penuh terhadap pengelolaan sumber daya (barang dan/atau jasa) dan telah timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi lain sebagai kompensasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Nilai utang usaha dicatat sebesar faktur atau tagihan dari rekanan atas barang/jasa yang telah diserahkan dan diterima/dikuasai oleh puskesmas.

b) Uang muka pasien
Uang muka pasien adalah uang atau yang diterima dari pasien sebagai deposit pembayaran dimuka untuk pembayaran biaya perawatannya.

Uang muka pasien diakui dan dicatat pada saat diterimanya uang dari pasien walaupun puskesmas belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan yang diterima dimuka
Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Puskesmas kepada pihak lain. Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu

tetapi Puskesmas belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Beban yang masih harus dibayar
Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca (*cut off*). Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat puskesmas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain, tetapi puskesmas belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut. Beban yang masih harus dibayar dicatat sebesar nilai tagihan atau taksiran nilai beban yang akan diselesaikan. Beban yang masih harus dibayar meliputi beban jasa dan daya (listrik, air, telepon, dan gas), surat kabar, termasuk bagian beban/bunga yang telah jatuh tempo, dan lain-lain.

8) Ekuitas

Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

a) Ekuitas adalah hak residual atas aset puskesmas setelah dikurangi semua kewajiban;
b) Ekuitas puskesmas tidak terbagi atas saham-saham; dan
c) Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (pemerintah) harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi.

Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional puskesmas.

Ekuitas puskesmas antara lain meliputi, ekuitas awal, surplus & defisit tahun lalu, surplus & defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

a) Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD oleh pejabat yang berwenang;
b) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dalam RBA/DPA puskesmas; dan
c) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset puskesmas sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Bupati, dan menambah nilai ekuitas awal.
d) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional puskesmas.
e) Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
f) Pada akhir periode pelaporan, nilai ekuitas yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah selisih dari aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

9) Pendapatan

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(1) Pendapatan usaha rawat jalan;
(2) Pendapatan usaha rawat darurat;
(3) Pendapatan usaha rawat inap.

b) Hibah
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi UPTD Puskesmas untuk menyerahkan barang/jasa.

c) Pendapatan APBN/APBD
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN/APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA UPTD Puskesmas untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi UPTD Puskesmas.

d) Pendapatan Usaha Lainnya
Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

e) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Pengakuan

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
   (1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
   (2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
   (3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
   (4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;

b) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi.

d) Pendapatan dari APBD/APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.

f) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh UPTD Puskesmas.

g) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
   (1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak UPTD Puskesmas.
   (2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak UPTD Puskesmas. Porsi mitra yang diterima UPTD Puskesmas diakui sebagai kewajiban.

(3) *Mudharabah*, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (*akad*). Hak pemilik dana (investor) diakui sebagai kewajiban.

(4) *Musyarakah*, pendapatan diakui sebesar porsi yang disepakati dalam perjanjian (*akad*). Hak mitra lain diakui sebagai kewajiban.

Pengukuran

a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
b) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.
c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD Puskesmas.
e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

10) Beban

Beban UPTD Puskesmas diklasifikasikan ke dalam:

a) Beban Pegawai
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Puskesmas yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
b) Beban Barang
Merupakan beban yang terkait dengan penggunaan persediaan barang dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
c) Beban Jasa
Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja jasa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Entitas.
d) Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja pemeliharaan. Beban pemeliharaan terkait dengan kegiatan perawatan aset tetap agar dapat berfungsi optimal selama pemakaian.
e) Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi belanja perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas adalah biaya yang ditanggung oleh Entitas dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Entitas.
f) Beban Uang/Jasa Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain
Merupakan beban-beban yang terkait pemanfaatan barang atau jasa milik Pihak Ketiga/Pihak Lain yang turut mendukung kegiatan Entitas.

g) Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan berlalunya waktu.

h) Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

i) Beban Operasional Lainnya
Merupakan beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut di atas. Beban ini meliputi beban bantuan sosial, beban kerugian penghentian aset, beban kerugian persediaan kedaluwarsa, beban reklasifikasi aset ekstrakomptabel, dan penyesuaian lainnya.

j) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar
Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus.

k) Kerugian Penurunan Nilai Aset
Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.

l) Kerugian Lainnya
Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Pengakuan

a) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan UPTD Puskesmas, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing UPTD Puskesmas.
b) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:
a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
b) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
d) Jumlah kerugian yang terjadi.

j. Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi UPTD Puskesmas Rendang yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh, untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, UPTD Puskesmas Rendang terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 20.109.413.3-907.000 atas nama UPTD Puskesmas Rendang Kabupaten Karangasem pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.396.231.520,20 atau 103,16% dari anggaran sebesar Rp3.292.092.536,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.156.524.731,11 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.282.000.000,00	3.387.155.448,00	103,20%	3.147.535.380,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-	-	-
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	-	-	-
d.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	10.092.536,00	9.076.072,20	89,93%	8.989.351,11
	Jumlah	**3.292.092.536,00**	**3.396.231.520,20**	**103,16%**	**3.156.524.731,11**

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Jumlah realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.387.155.448,00 atau 103,20% dari anggaran sebesar Rp3.282.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.147.535.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.282.000.000,00			
1.	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan				
	- Rawat Jalan		46.420.000,00		37.120.000,00
	- Rawat Darurat		54.920.000,00		60.280.000,00
	- Rawat Inap		4.290.000,00		4.875.000,00
	- Tindakan Medik		41.270.000,00		47.185.000,00
	- Persalinan		140.000,00		4.480.000,00
	- Lab Patologi		23.532.500,00		12.191.000,00
	- Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Umum		34.650.000,00		24.975.000,00
	- Pelayanan P3K kecuali yang bersifat Pemerintahan, sosial dan keagamaan		250.000,00		-
	- Ambulance		6.095.000,00		6.612.000,00
	Pendapatan Puskesmas Keliling		80.000,00		360.000,00
	Pendapatan Pelayanan Puskesmas Pembantu		1.240.000,00		1.560.000,00
2.	Pendapatan Jasa Layanan JKN				
	- Pendapatan Kapitasi		2.774.230.648,00		2.706.058.580,00
	- Pendapatan Non Kapitasi		400.037.300,00		241.838.800,00
	Jumlah	**3.282.000.000,00**	**3.387.155.448,00**	**103,20%**	**3.147.535.380,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerja Sama

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Pendapatan Hibah

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Jumlah realisasi Pendapatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.076.072,20 atau 89,93% dari anggaran sebesar Rp10.092.536,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.989.351,11 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Usaha Lainnya				
	- Pendapatan Jasa Giro	9.092.536,00	8.396.072,20	92,34%	8.989.351,11
	- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	1.000.000,00	680.000,00	68,00%	-
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya		**10.092.536,00**	**9.076.072,20**	**89,93%**	**8.989.351,11**

4.2 Penjelasan Pos-pos Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.748.470.248,00 atau 98,02% dari anggaran sebesar Rp1.783.858.857,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.514.363.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	**Sumber Dana APBD**				
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-
2	**Sumber Dana BOK/APBN**				
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	30.214.000,00	30.214.000,00	100,00%	30.120.000,00
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-
3	**Sumber Dana BLUD**				
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.750.244.857,00	1.714.856.248,00	97,98%	1.484.243.852,00
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00%	-
	Jumlah Belanja Pegawai	**1.783.858.857,00**	**1.748.470.248,00**	**98,02%**	**1.514.363.852,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.917.306.814,00 atau 87,36% dari anggaran Rp2.194.748.120,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.192.624.015,55 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Barang	1.134.510.540,00	988.221.624,00	87,11%	1.043.003.842,55
2	Belanja Jasa	920.144.080,00	799.644.990,00	86,90%	1.022.556.332,00
3	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	109.460.200,00	91,22%	80.826.800,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	26.479.041,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90%	19.758.000,00
6	Pembulatan Pagu BOK	93.500,00	-	-	-
	Jumlah	**2.194.748.120,00**	**1.917.306.814,00**	**87,36%**	**2.192.624.015,55**

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dilihat dari sumber dana adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Sumber Dana APBD	243.769.120,00	195.844.357,00	80,34%	308.064.200,00
2	Sumber Dana BOK/APBN	330.329.000,00	326.938.500,00	98,97%	364.529.619,00
3	Sumber Dana BLUD	1.620.650.000,00	1.394.523.957,00	86,05%	1.520.030.196,55
	Jumlah	**2.194.748.120,00**	**1.917.306.814,00**	**87,36%**	**2.192.624.015,55**

Rincian Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	**Belanja Barang**	**1.134.510.540,00**	**988.221.624,00**	**87,11%**	**1.043.003.842,55**
A	**Belanja Barang Pakai Habis**				
	Sumber Dana APBD				
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.960.000,00	12.050.000,00	34,47%	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	-	27.000.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.380.000,00	23.340.000,00	99,83%	20.115.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.640.000,00	8.630.285,00	99,89%	-
	Sumber Dana BOK/APBN				
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.152.000,00	1.152.000,00	100,00%	-
	- Belanja Bahan Makanan	63.030.000,00	63.030.000,00	100,00%	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	22.918.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	36.753.500,00	36.456.500,00	99,19%	130.138.320,00
	Sumber Dana BLUD				
	- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	35.026.000,00	34.996.000,00	99,91%	33.694.230,00
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	93.605.440,00	90.136.640,00	96,29%	82.060.004,00
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	86.078.760,00	82.353.097,00	95,67%	37.607.900,00
	- Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.032.000,00	1.631.700,00	80,30%	1.052.000,00
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.000.000,00	47.683.350,00	99,34%	19.873.000,00
	- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000,00	11.119.710,00	55,60%	13.094.250,00
	- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	140.000.000,00	106.973.812,00	76,41%	170.631.330,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	16.567.100,00	82,84%	19.935.200,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	26.928.000,00	20.047.800,00	74,45%	26.666.400,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	48.000.000,00	45.266.500,00	94,31%	29.646.010,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.624.600,00	11.126.500,00	59,74%	18.492.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.000.000,00	14.403.000,00	72,02%	-
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.000.000,00	24.981.000,00	99,92%	16.957.500,00
	- Belanja Obat-Obatan-Obat	200.000.000,00	154.882.470,00	77,44%	194.982.698,55
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.490.900,00	18.815.000,00	96,53%	4.500.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	160.750.000,00	159.519.820,00	99,23%	167.640.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	659.340,00	659.340,00	100,00%	3.600.000,00
2	**Belanja Jasa**	**920.144.080,00**	**799.644.990,00**	**86,90%**	**1.022.556.332,00**
A	**Belanja Jasa Kantor**				
	Sumber Dana APBD				
	- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	155.000.000,00	133.050.000,00	85,84%	257.375.000,00
	Sumber Dana BOK/APBN				
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000	12.000.000	100,00%	6.660.000,00
	- Belanja Administrasi PMT	-	-	-	2.518.000,00
	- Belanja Pengolahan PMT	-	-	-	7.606.800,00

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	- Belanja Transportasi Lokal	217.300.000	214.300.000	98,62%	189.190.000,00
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-	5.498.499,00
	Sumber Dana BLUD				
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	1.000.000,00
	- Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000,00	4.760.000	100,00%	-
	- Belanja Upah Tukang	-	-	-	17.085.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.945.000,00	20.945.000	100,00%	-
	- Belanja Jasa Kalibrasi	25.000.000,00	24.979.440	99,92%	19.957.800,00
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	40.000.000,00	34.970.642	87,43%	33.741.684,00
	- Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	-	-	602.000,00
	- Belanja Tagihan Air	29.000.000,00	27.050.600	93,28%	26.400.200,00
	- Belanja Tagihan Listrik	40.000.000,00	35.928.646	89,82%	37.812.950,00
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	84.000.000,00	25.229.600	30,04%	10.946.400,00
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000,00	902.600	11,28%	1.202.500,00
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	258.149.960,00	244.090.390	94,55%	401.385.299,00
B	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**				
	Sumber Dana APBD				
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.200.000,00	16.540.956,00	86,15%	-
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.150.720,00	992.496,00	86,25%	1.588.447,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.438.400,00	1.240.620,00	86,25%	1.985.753,00
C	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**				
	Sumber Dana BLUD				
	- Belanja Sewa Alat Ukur	3.000.000,00	2.664.000,00	88,80%	-
3	**Belanja Pemeliharaan**	**120.000.000,00**	**109.460.200,00**	**91,22%**	**80.826.800,00**
A	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**				
	Sumber Dana BLUD				
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	12.000.000,00	10.055.000,00	83,79%	5.096.000,00
	- Belanja Pemeliharaan IPAL	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90%	19.980.800,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000,00	4.590.000,00	91,80%	5.000.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	20.000.000,00	19.902.500,00	99,51%	8.000.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	10.000.000,00	7.048.500,00	70,49%	9.560.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	38.000.000,00	37.240.000,00	98,00%	22.795.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	4.975.000,00
B	**Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**				
	Sumber Dana APBD				
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	-	-	-
C	**Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi**				
	Sumber Dana BLUD				
	- Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00	5.644.200,00	56,44%	5.420.000,00

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
4	**Belanja Perjalanan Dinas**	**-**	**-**	**-**	**26.479.041,00**
	Sumber Dana BLUD				
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	26.479.041,00
5	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**20.000.000,00**	**19.980.000,00**	**99,90%**	**19.758.000,00**
	- Belanja Jasa Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20.000.000,00	19.980.000	99,90%	19.758.000,00
6	**Pembulatan Pagu BOK**	**93.500,00**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**2.194.748.120,00**	**1.917.306.814,00**	**87,36%**	**2.192.624.015,55**

c. Belanja Bunga

Jumlah realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Belanja Lain-lain

Jumlah realisasi Belanja Lain - lain Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.3 Penjelasan Pos-pos Belanja Modal

Total realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp241.649.260,00 atau 98,23% dari anggaran sebesar Rp246.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp610.147.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.000.000,00	181.646.110,00	98,19%	184.717.610,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.000.000,00	60.003.150,00	98,37%	425.430.050,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		**246.000.000,00**	**241.649.260,00**	**98,23%**	**610.147.660,00**

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dilihat dari sumber dana adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Sumber Dana APBD	61.000.000,00	60.003.150,00	98,37%	479.330.050,00
b.	Sumber Dana BLUD	185.000.000,00	181.646.110,00	98,19%	130.817.610,00
Jumlah Belanja Modal		**246.000.000,00**	**241.649.260,00**	**98,23%**	**610.147.660,00**

Rincian belanja modal adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp181.646.110,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp185.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp184.717.610,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	**Sumber Dana APBD**	**-**	**-**	**-**	**53.900.000,00**
1)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda Dua	-	-	-	53.900.000,00
B	**Sumber Dana BLUD**	**185.000.000,00**	**181.646.110,00**	**98,19%**	**130.817.610,00**
1)	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	14.800.000,00
2)	Belanja Modal Kursi Rapat	-	-	-	14.915.000,00
3)	Belanja Modal Mesin Cuci	6.000.000,00	5.883.000,00	98,05%	-
4)	Belanja Modal Alat Kesehatan	54.000.000,00	51.845.560,00	96,01%	-
5)	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	-	-	43.157.610,00
6)	Belanja Modal Personal Komputer	125.000.000,00	123.917.550,00	99,13%	57.945.000,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**185.000.000,00**	**181.646.110,00**	**98,19%**	**184.717.610,00**

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.003.150,00 atau 98,37% dari anggaran sebesar Rp61.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp425.430.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
A	**Sumber Dana APBD**	**61.000.000,00**	**60.003.150,00**	**98,37%**	**425.430.050,00**
1)	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	61.000.000,00	60.003.150,00	98,37%	319.314.450,00
2)	Belanja Modal Pagar	-	-	-	106.115.600,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**61.000.000,00**	**60.003.150,00**	**98,37%**	**425.430.050,00**

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp319.083.238,16 dan Rp261.005.375,60.

5.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan

Jumlah Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp511.194.801,80 dan Rp1.160.610.796,44 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2025	2024
1)	Realisasi Pendapatan LRA	3.396.231.520,20	3.156.524.731,11
2)	Realisasi Belanja	(3.907.426.322,00)	(4.317.135.527,55)
	Jumlah	**(511.194.801,80)**	**(1.160.610.796,44)**

5.4 Pendapatan APBN/APBD

Jumlah Pendapatan APBN/APBD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp573.602.126,00 dan Rp1.218.688.659,00.

No.	Keterangan	2025	2024
1)	**Pendapatan APBN/BOK**		
	Pendapatan Operasional BOK		
	- Tahap I	65.374.519,00	125.087.809,00
	- Tahap II	144.217.200,00	174.975.200,00
	- Tahap III	108.162.900,00	131.231.400,00
No.	**Keterangan**	**2025**	**2024**
2)	**Pendapatan APBD**		
	Pendapatan Operasional		
	- Belanja Pegawai	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	195.844.357,00	308.064.200,00
	- Belanja Bunga	-	-
	Pendapatan Investasi		
	- Belanja Modal	60.003.150,00	479.330.050,00
	Jumlah	**573.602.126,00**	**1.218.688.659,00**

5.5 Setoran ke Kas Daerah (BLUD)

Jumlah Setoran ke Kas Daerah (BLUD) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6 Setoran ke Kas Daerah (BOK)

Jumlah Setoran ke Kas Daerah (BOK) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.7 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp381.490.562,36 dan Rp319.083.238,16.

6. Penjelasan Pos-pos Neraca

6.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.398.285,00 dan Rp42.788.381,00.

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran APBD	-	-
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BOK	-	-
3) Kas di Bank		
BLUD - Bank BNI (No. Rek 1590087796) a.n 1050078 BOK PKM	3.398.285,00	42.788.381,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	**3.398.285,00**	**42.788.381,00**

6.2 Kas pada BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD. Jumlah Kas pada BLUD UPTD Puskesmas Rendang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp378.100.062,36 dan Rp276.294.857,16 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	-	577.000,00
2) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	-	-
3) Kas di Bank		
BLUD PT Bank Pembangunan Daerah Bali - (No. Rek 0510105000044) a.n BLUD UPTD Puskesmas Rendang	378.100.062,36	275.717.857,16
Jumlah Kas pada BLUD	**378.100.062,36**	**276.294.857,16**

6.3 Piutang Operasional BLUD

Piutang Operasional BLUD merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Rendang. Jumlah Piutang Operasional BLUD neto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp30.509.730,00 dan sebesar Rp65.827.377,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang Pendapatan Pelayanan:		
1) Piutang JKN	33.899.700,00	66.492.300,00
Jumlah Piutang Pelayanan (Bruto)	**33.899.700,00**	**66.492.300,00**
Dikurangi: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(3.389.970,00)	(664.923,00)
Jumlah Piutang Pelayanan (Netto)	**30.509.730,00**	**65.827.377,00**

Berikut disajikan saldo piutang dan mutasi piutang tahun 2025:

Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Piutang JKN	66.492.300,00	367.444.700,00	400.037.300,00	33.899.700,00
Jumlah Bruto	**66.492.300,00**	**367.444.700,00**	**400.037.300,00**	**33.899.700,00**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(664.923,00)	(3.389.970,00)	(664.923,00)	(3.389.970,00)
Jumlah Netto	**65.827.377,00**	**364.054.730,00**	**399.372.377,00**	**30.509.730,00**

Berikut disajikan saldo piutang dan mutasi piutang tahun 2024:

Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Piutang JKN	19.587.200,00	288.743.900,00	241.838.800,00	66.492.300,00
Jumlah Bruto	**19.587.200,00**	**288.743.900,00**	**241.838.800,00**	**66.492.300,00**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(195.872,00)	(664.923,00)	(195.872,00)	(664.923,00)
Jumlah Netto	**19.391.328,00**	**288.078.977,00**	**241.642.928,00**	**65.827.377,00**

Penyisihan kerugian piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Kualitas Piutang			
	Lancar <= 1 bulan	Kurang Lancar 1 - 3 bulan	Diragukan 3 - 12 bulan	Macet > 12 bulan
% Penyisihan	1%	10%	50%	100%
Piutang JKN	-	33.899.700,00	-	-
Jumlah Bruto	**-**	**33.899.700,00**	**-**	**-**
Jumlah Penyisihan	-	(3.389.970,00)	-	-
Jumlah Bruto	**-**	**30.509.730,00**	**-**	**-**

Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 adalah sebesar Rp3.389.970,00 *(lihat catatan no. 7.2c)*

Perubahan Penyisihan Kerugian Piutang sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal	664.923,00	664.923,00
Koreksi Saldo Awal	-	2.026,00
Pembalikan Penyisihan Piutang	(664.923,00)	(666.949,00)
Penyisihan Tahun Berjalan	3.389.970,00	664.923,00
Saldo Akhir Tahun	**3.389.970,00**	**664.923,00**

6.4 Persediaan BLUD

Persediaan BLUD merupakan persediaan barang/bahan pakai habis UPTD Puskesmas Rendang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp487.946.245,65 dan Rp548.618.837,22 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Persediaan		
1) Alat Tulis Kantor	8.685.570,00	2.602.530,00
2) Bahan Komputer	8.742.490,00	2.356.890,00
3) Kertas dan Cover	10.128.100,00	1.774.000,00
4) Barang Cetakan	-	6.612.000,00
5) Barang Kuasi	-	-
6) Benda Pos	300.000,00	-
7) Material/Obat/Alkon	390.049.908,65	491.374.473,72
8) Alat Listrik	4.050.000,00	-
9) Bahan Lainnya	12.026.300,00	-
10) Bahan Kimia	53.963.877,00	43.898.943,50
Jumlah Persediaan	**487.946.245,65**	**548.618.837,22**

Berikut disajikan saldo dan mutasi persediaan tahun 2025:

Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
1) Alat Tulis Kantor	2.602.530,00	16.567.100,00	10.484.060,00	8.685.570,00
2) Bahan Komputer	2.356.890,00	11.126.500,00	4.740.900,00	8.742.490,00
3) Kertas dan Cover	1.774.000,00	20.047.800,00	11.693.700,00	10.128.100,00
4) Barang Cetakan	6.612.000,00	45.266.500,00	51.878.500,00	-
5) Barang Kuasi	-	-	-	-
6) Benda Pos	-	2.400.000,00	2.100.000,00	300.000,00
7) Material/Obat/Alkon	491.374.473,72	1.360.305.343,28	1.461.629.908,35	390.049.908,65
8) Alat Listrik	-	14.403.000,00	10.353.000,00	4.050.000,00
9) Bahan Lainnya	-	47.683.350,00	35.657.050,00	12.026.300,00
10) Bahan Kimia	43.898.943,50	90.136.640,00	80.071.706,50	53.963.877,00
Jumlah Bruto	**548.618.837,22**	**1.607.936.233,28**	**1.668.608.824,85**	**487.946.245,65**

Berikut disajikan saldo dan mutasi persediaan tahun 2024:

Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
1) Alat Tulis Kantor	1.876.510,00	20.625.000,00	19.898.980,00	2.602.530,00
2) Bahan Komputer	-	18.820.890,00	16.464.000,00	2.356.890,00
3) Kertas dan Cover	-	17.729.600,00	15.955.600,00	1.774.000,00
4) Barang Cetakan	1.344.750,00	32.850.000,00	27.582.750,00	6.612.000,00
5) Barang Kuasi	-	-	-	-
6) Benda Pos	-	-	-	-
7) Material/Obat/Alkon	524.320.441,83	1.213.002.640,76	1.245.948.608,87	491.374.473,72
8) Alat Listrik	-	-	-	-
9) Bahan Lainnya	534.000,00	9.998.000,00	10.532.000,00	-
10) Bahan Kimia	-	82.060.004,00	38.161.060,50	43.898.943,50
Jumlah Bruto	**528.075.701,83**	**1.395.086.134,76**	**1.325.849.938,87**	**548.618.837,22**

6.5 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.272.326.411,48 dan Rp4.668.752.541,48 dengan rincian sebagai berikut:

Harga Perolehan	**2025**	**2024**
1) Tanah	3.600.000,00	3.600.000,00
2) Peralatan dan Mesin	5.727.816.269,62	5.535.785.545,62
3) Gedung dan Bangunan	7.945.538.253,48	7.945.538.253,48
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.699.125,00	38.699.125,00
5) Aset Tetap Lainya	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah Harga Perolehan	**13.715.653.648,10**	**13.523.622.924,10**
Akumulasi Penyusutan	(9.443.327.236,62)	(8.854.870.382,62)
Nilai Buku	**4.272.326.411,48**	**4.668.752.541,48**

Rincian mutasi Aset Tetap 2025 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	**Mutasi**		**Saldo**
	31 Des 2024	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Des 2025**
Biaya Perolehan				
1) Tanah	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
2) Peralatan dan Mesin	5.535.785.545,62	192.030.724,00	-	5.727.816.269,62
3) Gedung dan Bangunan	7.945.538.253,48	-	-	7.945.538.253,48
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.699.125,00	-	-	38.699.125,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**13.523.622.924,10**	**192.030.724,00**	**-**	**13.715.653.648,10**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	4.881.402.423,62	250.734.553,00	-	5.132.136.976,62
3) Gedung dan Bangunan	3.945.070.279,00	335.221.624,00	-	4.280.291.903,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.397.680,00	2.500.677,00	-	30.898.357,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**8.854.870.382,62**	**588.456.854,00**	**-**	**9.443.327.236,62**
Nilai Buku				
1) Tanah	3.600.000,00			3.600.000,00
2) Peralatan dan Mesin	654.383.122,00			595.679.293,00
3) Gedung dan Bangunan	4.000.467.974,48			3.665.246.350,48
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.301.445,00			7.800.768,00
5) Aset Tetap Lainnya	-			-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	**4.668.752.541,48**			**4.272.326.411,48**

Rincian mutasi Aset Tetap 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	**Mutasi**		**Saldo**
	1 Jan 2024	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Des 2024**
Biaya Perolehan				
1) Tanah	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
2) Peralatan dan Mesin	5.342.975.470,62	197.517.610,00	4.707.535,00	5.535.785.545,62
3) Gedung dan Bangunan	7.520.108.203,48	425.430.050,00	-	7.945.538.253,48
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.699.125,00	-	-	38.699.125,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**12.905.382.799,10**	**622.947.660,00**	**4.707.535,00**	**13.523.622.924,10**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	4.490.710.007,32	390.692.416,30	-	4.881.402.423,62
3) Gedung dan Bangunan	3.619.725.505,00	325.344.774,00	-	3.945.070.279,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.897.003,00	2.500.677,00	-	28.397.680,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**8.136.332.515,32**	**718.537.867,30**	**-**	**8.854.870.382,62**

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo
	1 Jan 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024
Nilai Buku				
1) Tanah	3.600.000,00			3.600.000,00
2) Peralatan dan Mesin	852.265.463,30			654.383.122,00
3) Gedung dan Bangunan	3.900.382.698,48			4.000.467.974,48
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.802.122,00			10.301.445,00
5) Aset Tetap Lainnya	-			-
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	**4.769.050.283,78**			**4.668.752.541,48**

Rincian Tanah lokasi UPTD Puskesmas Rendang, terdiri dari:

No	Uraian	Luas (M2)	Lokasi	Bukti Penguasaan/ Hak Pakai	Nilai
1	Puskesmas Rendang	2.035 m2	Banjar Dinas Menanga Kawan, Desa Menanga, Kec. Rendang	BA Pinjam Pakai Tanah Puskesmas Rendang tanggal 2 Juni 2024	3.600.000,00
2	Pustu Pempatan	87 m2	Banjar Dinas Pemuteran, Desa Pempatan, Kec. Rendang	BA Pinjam Pakai Gedung Poskesdes No.028/23/Diskes/ 2020	-
3	Pustu Besakih	-	-	Status kepemilikan/penguasaan Pustu Besakih masih belum jelas dikarenakan belum ada Berita Acara Serah Terima dari UPTD Puskesmas Rendang ke Dinas Kesehatan Karangasem	-
4	Pustu Batusesa	-	Banjar Dinas Batusea, Desa Menanga, Kec. Rendang	BA Pinjam Pakai Tanah Pustu Batusea tanggal 28 Mei 2015	-
5	Pustu Rendang	400 m2	Banjar Dinas Becingah, Desa Rendang, Kec. Rendang	BA Pinjam Pakai Tanah Pustu Rendang tanggal 25 Mei 2015	-
6	Pustu Nongan	700 m2	Desa Nongan, Kec. Rendang	BA Pinjam Pakai Tanah Pustu Nongan tanggal 25 Mei 2015	-
7	Pustu Pesaban	300 m2	Banjar Dinas Pesaban Kangin, Desa Pesaban, Kec. Rendang	Berita Acara Pinjam Pakai Tanah Pustu Pesaban tanggal 26 Mei 2015	-
	Jumlah				**3.600.000,00**

Selama periode berjalan tahun 2025 terdapat penambahan dan pengurangan Harga Perolehan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan uraian sebagai berikut:

1) Tanah	**2025**
Harga Perolehan	
Saldo Awal	3.600.000,00
Penambahan Harga Perolehan:	
- Mutasi Penambahan	-
Jumlah Penambahan Harga Perolehan Tanah	-
Pengurangan Harga Perolehan:	
- Mutasi Pengurangan	-
Jumlah Pengurangan Biaya Perolehan Tanah	-
Saldo Akhir Harga Perolehan Tanah	**3.600.000,00**

2) **Peralatan dan Mesin**	**2025**
Harga Perolehan	
Saldo Awal	**5.535.785.545,62**
Penambahan Harga Perolehan:	
- Belanja Modal	181.646.110,00
- Mutasi Antar Perangkat Daerah	
- Mutasi Dari Dinas Kesehatan	10.384.614,00
Jumlah Penambahan Harga Perolehan Peralatan dan Mesin	192.030.724,00
Pengurangan Harga Perolehan	
- Ekstrakomptabel	-
Jumlah Pengurangan Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin	-
Saldo Akhir Harga Perolehan Peralatan dan Mesin	**5.727.816.269,62**
Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	**4.881.402.423,62**
Penambahan Akumulasi Penyusutan	
- Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	250.734.553,00
Jumlah Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	**250.734.553,00**
Pengurangan Akumulasi Penyusutan	
- Pengurangan Akumulasi Penyusutan	-
Jumlah Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	**5.132.136.976,62**

3) **Gedung dan Bangunan**	**2025**
Harga Perolehan	
Saldo Awal	**7.945.538.253,48**
Penambahan Harga Perolehan	
- Belanja Modal	-
Jumlah Penambahan Harga Perolehan Gedung dan Bangunan	-
Pengurangan Harga Perolehan	
- Mutasi Pengurangan	-
Jumlah Pengurangan Biaya Perolehan Gedung dan Bangunan	-
Saldo Akhir Biaya Perolehan Gedung dan Bangunan	**7.945.538.253,48**
Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	**3.945.070.279,00**
Penambahan Akumulasi Penyusutan	
- Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	335.221.624,00
Jumlah Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	**335.221.624,00**
Pengurangan Akumulasi Penyusutan	
- Pengurangan Akumulasi Penyusutan	-
Jumlah Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	**4.280.291.903,00**

4) **Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**2025**
Harga Perolehan	
Saldo Awal	**38.699.125,00**
Penambahan Harga Perolehan	
- Mutasi Tambah	-
Jumlah Penambahan Harga Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
Pengurangan Harga Perolehan	
- Mutasi Pengurangan	-
Jumlah Pengurangan Biaya Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
Saldo Akhir Biaya Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**38.699.125,00**

Akumulasi Penyusutan	**2025**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	**28.397.680,00**
Penambahan Akumulasi Penyusutan	
- Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.500.677,00
Jumlah Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**2.500.677,00**
Pengurangan Akumulasi Penyusutan	
- Pengurangan Akumulasi Penyusutan	**-**
Jumlah Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**-**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**30.898.357,00**

Selama periode berjalan tahun 2025 dan 2024 Perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

	2025	**2024**
1) Saldo awal tahun	8.854.870.382,62	8.136.332.515,32
2) Penyusutan tahun berjalan	588.456.854,00	718.537.867,30
3) Penghapusan Aset Tetap	-	-
Saldo akhir tahun	**9.443.327.236,62**	**8.854.870.382,62**

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp588.456.854,00 *(lihat catatan no.7. 2d)* .

6.6 Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya UPTD Puskesmas Rendang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.971.200,00 dan Rp3.221.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	**2024**
Harga Perolehan		
1) Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	6.000.000,00
2) Aset Lain-lain	845.273.503,00	845.273.503,00
Jumlah Harga Perolehan	**851.273.503,00**	**851.273.503,00**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.000.000,00)	(4.750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(843.302.303,00)	(843.302.303,00)
Nilai Buku	**1.971.200,00**	**3.221.200,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

	Saldo Awal	**Mutasi**		**Saldo**
	1 Jan 2025	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Des 2025**
Biaya Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
2) Aset Lain-lain	845.273.503,00	-	-	845.273.503,00
Jumlah	**851.273.503,00**	**-**	**-**	**851.273.503,00**
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi				
1) Aset Tidak Berwujud	4.750.000,00	1.250.000,00	-	6.000.000,00
2) Aset Lain-lain	843.302.303,00	-	-	843.302.303,00
Jumlah	**848.052.303,00**	**1.250.000,00**	**-**	**849.302.303,00**
Nilai Buku				
1) Aset Tidak Berwujud	1.250.000,00			-
2) Aset Lain-lain	1.971.200,00			1.971.200,00
Jumlah	**3.221.200,00**			**1.971.200,00**

Rincian mutasi Aset Lainnya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

	Saldo Awal	**Mutasi**		**Saldo**
	1 Jan 2024	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Des 2024**
Biaya Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
2) Aset Lain-lain	850.273.503,00	-	5.000.000,00	845.273.503,00
Jumlah	**856.273.503,00**	**-**	**5.000.000,00**	**851.273.503,00**
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi				
1) Aset Tidak Berwujud	3.250.000,00	1.500.000,00	-	4.750.000,00
2) Aset Lain-lain	848.302.303,00	-	5.000.000,00	843.302.303,00
Jumlah	**851.552.303,00**	**1.500.000,00**	**5.000.000,00**	**848.052.303,00**
Nilai Buku				
1) Aset Tidak Berwujud	2.750.000,00			1.250.000,00
2) Aset Lain-lain	1.971.200,00			1.971.200,00
Jumlah	**4.721.200,00**			**3.221.200,00**

Mutasi Pengurangan Tahun 2024 merupakan penghapusan aset lain-lain berupa peralatan dan mesin yaitu sepeda motor berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 42/KPTS/HK/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Disebabkan Karena Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang, Puskesmas Manggis I, Puskesmas Manggis II, Puskesmas Rendang, Puskesmas Sidemen, Puskesmas Abang I, Puskesmas Abang II, Puskesmas Kubu I, Puskesmas Kubu II, dan Puskesmas Selat Kabupaten Karangasem, dengan rincian penghapusan pada UPTD Puskesmas Rendang sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Barang	Harga	Risalah Lelang dan BAST
1)	Sepeda Motor	5.000.000,00	Risalah No. 146/14.02/2024-01, tanggal 21 Mei 2024 BAST No. 900.1.4.3/530/Pusk/2024, tanggal 10 Juli 2024
	Jumlah	**5.000.000,00**	

Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (*lihat catatan no.7. 2d*).

6.7 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) UPTD Puskesmas Rendang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.785,00 dan Rp0,00.

6.8 Belanja yang Masih harus Dibayar

Belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp565.657.558,00 dan Rp365.768.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	533.367.882,00	310.838.491,00
2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	32.289.676,00	54.930.104,00
Belanja yang Masih harus Dibayar	**565.657.558,00**	**365.768.595,00**

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala UPTD Puskesmas Rendang tanggal 31 Juli 2025, diketahui bahwa memang benar terdapat koreksi saldo awal nilai hutang sebesar Rp43.233.190,00 yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan pada pengajuan Remunerasi ASN dan Non ASN.

6.9 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.10 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.608.586.591,49 dan Rp5.239.734.598,86 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Ekuitas Awal	5.239.734.598,86	5.774.791.913,21
2) Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(1.696.748.492,65)	(1.066.754.480,38)
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.065.600.485,28	531.697.166,03
4) Ekuitas akhir	**4.608.586.591,49**	**5.239.734.598,86**

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi persediaan dan aset tetap mutasi antar perangkat daerah, serta koreksi saldo awal piutang, aset tetap, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dan koreksi hutang awal *(lihat catatan no. 9.3)*

7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

7.1 Pendapatan

Pendapatan UPTD Puskesmas Rendang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.937.241.046,20 dan Rp4.422.118.490,11 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.354.562.848,00	3.194.440.480,00
b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
c. Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-
d. Pendapatan Hibah	-	-
e. Pendapatan Usaha Lainnya	9.076.072,20	8.989.351,11
f. Pendapatan APBN/APBD	573.602.126,00	1.218.688.659,00
Jumlah	**3.937.241.046,20**	**4.422.118.490,11**

Rincian Pendapatan Operasional adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Rendang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.354.562.848,00 dan Rp3.194.440.480,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan		
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan		
1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan		
- Rawat Jalan	46.420.000,00	37.120.000,00
- Rawat Darurat	54.920.000,00	60.280.000,00
- Rawat Inap	4.290.000,00	4.875.000,00
- Tindakan Medik	41.270.000,00	47.185.000,00
- Persalinan	140.000,00	4.480.000,00
- Lab Patologi	23.532.500,00	12.191.000,00
- Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Umum	34.650.000,00	24.975.000,00
- Pelayanan P3K kecuali yang bersifat Pemerintahan, sosial dan keagama	250.000,00	-
- Ambulance	6.095.000,00	6.612.000,00
Pendapatan Puskesmas Keliling	80.000,00	360.000,00
Pendapatan Pelayanan Puskesmas Pembantu	1.240.000,00	1.560.000,00
2. Pendapatan Jasa Layanan JKN		
- Pendapatan Kapitasi	2.774.230.648,00	2.706.058.580,00
- Pendapatan Non Kapitasi	367.444.700,00	288.743.900,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	**3.354.562.848,00**	**3.194.440.480,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan UPTD Puskesmas Rendang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Pendapatan Hasil Kerjasama UPTD Puskesmas Rendang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah UPTD Puskesmas Rendang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya UPTD Puskesmas Rendang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.076.072,20 dan Rp8.989.351,11 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Pendapatan Jasa Giro	8.396.072,20	8.989.351,11
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	680.000,00	-
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	**9.076.072,20**	**8.989.351,11**

f. Pendapatan APBN/APBD

Pendapatan APBN/APBD UPTD Puskesmas Rendang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp573.602.126,00 dan Rp1.218.688.659,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1. Pendapatan APBN/BOK		
Pendapatan Operasional BOK		
- Tahap I	65.374.519,00	125.087.809,00
- Tahap II	144.217.200,00	174.975.200,00
- Tahap III	108.162.900,00	131.231.400,00
2. Pendapatan APBD		
Pendapatan Operasional		
- Belanja Pegawai	-	-
- Belanja Barang dan Jasa	195.844.357,00	308.064.200,00
- Belanja Bunga	-	-
Pendapatan Investasi		
- Belanja Modal	60.003.150,00	479.330.050,00
Jumlah Pendapatan APBN/APBD	**573.602.126,00**	**1.218.688.659,00**
Jumlah Pendapatan	**3.937.241.046,20**	**4.422.118.490,11**

7.2 Beban

Beban UPTD Puskesmas Rendang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.634.654.461,85 dan Rp5.489.068.842,49 dengan rincian sebagai berikut:

		2025	2024
a.	Beban Pegawai	1.934.224.207,00	1.707.956.630,00
b.	Beban Barang dan Jasa	3.107.333.430,85	3.060.409.422,19
c.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3.389.970,00	664.923,00
d.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	589.706.854,00	720.037.867,30
e.	Beban Lain-lain	-	-
Jumlah Beban Operasional		**5.634.654.461,85**	**5.489.068.842,49**

Rincian Beban adalah sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai UPTD Puskesmas Rendang pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.934.224.207,00 dan Rp1.707.956.630,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.934.224.207,00	1.707.956.630,00
Jumlah Beban Pegawai	**1.934.224.207,00**	**1.707.956.630,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa UPTD Puskesmas Rendang Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.107.333.430,85 dan Rp3.060.409.422,19 terdiri dari:

	2025	2024
1) Beban Barang	2.147.343.276,85	1.903.170.834,19
2) Beban Jasa	770.546.804,00	1.030.174.747,00
3) Beban Pemeliharaan	169.463.350,00	80.826.800,00
4) Beban Perjalanan Dinas	-	26.479.041,00
5) Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	19.980.000,00	19.758.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**3.107.333.430,85**	**3.060.409.422,19**

Beban Barang dan Jasa	2025	2024
1) Beban Barang		
- Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	34.996.000,00	33.694.230
- Beban Bahan-Bahan Kimia	80.071.706,50	38.161.060,50
- Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	94.403.097,00	37.607.900,00
- Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.631.700,00	1.052.000,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	35.657.050,00	20.407.000,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.119.710,00	13.094.250,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	100.798.748,90	175.338.865,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.484.060,00	13.941.930,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.693.700,00	24.892.400,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.030.500,00	29.646.010,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.100.000,00	2.400.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.740.900,00	16.135.110,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.353.000,00	-
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	27.000.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.981.000,00	16.957.500,00
- Beban Obat-Obatan-Obat	1.360.831.159,45	1.103.931.258,69
- Beban Bahan Makanan	63.030.000,00	-
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	42.155.000,00	47.533.000,00
- Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	195.976.320,00	297.778.320,00
- Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.289.625,00	3.600.000,00
Jumlah Beban Barang	**2.147.343.276,85**	**1.903.170.834,19**

	2025	2024
2) Beban Jasa		
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	1.000.000,00
- Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	4.760.000,00	-
- Beban Jasa Tenaga Kesehatan	133.050.000,00	257.375.000,00
- Beban upah tukang	-	17.085.000
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.945.000,00	-
- Beban Jasa Kalibrasi	24.979.440,00	19.957.800,00
- Beban Jasa Pengolahan Sampah	34.970.642,00	33.741.684,00
- Beban Tagihan Telepon	-	602.000,00
- Beban Tagihan Air	27.050.600,00	26.400.200,00
- Beban Tagihan Listrik	35.928.646,00	37.812.950,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	37.229.600,00	17.606.400,00
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	902.600,00	1.202.500,00
- Beban Administrasi PMT	-	2.518.000,00
- Beban Pengolahan PMT	-	7.606.800,00
- Beban Trasportasi Lokal	214.300.000,00	189.190.000,00
- Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	214.992.204,00	414.502.213,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.540.956,00	-
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	992.496,00	1.588.447,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.240.620,00	1.985.753,00
- Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	2.664.000,00	-
Jumlah Beban Jasa	**770.546.804,00**	**1.030.174.747,00**
3) Beban Pemeliharaan		
Beban Peralatan dan Mesin		
- Beban Pemeliharaan IPAL	19.980.000,00	19.980.800
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	10.055.000,00	5.096.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.590.000,00	5.000.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.902.500,00	8.000.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	7.048.500,00	9.560.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	37.240.000,00	22.795.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.000.000,00	4.975.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	60.003.150	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
- Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.644.200,00	5.420.000
Jumlah Beban Pemeliharaan	**169.463.350,00**	**80.826.800,00**
4) Beban Perjalanan Dinas		
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	-	26.479.041,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**-**	**26.479.041,00**
5) Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain		
- Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	19.980.000,00	19.758.000,00
- Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-	-
Jumlah Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	**19.980.000,00**	**19.758.000,00**
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**3.107.333.430,85**	**3.060.409.422,19**

c. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.389.970,00 dan Rp664.923,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Beban Penyisihan Piutang	3.389.970,00	664.923,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**3.389.970,00**	**664.923,00**

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp589.706.854,00 dan Rp720.037.867,30 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Penyusutan		
- Peralatan dan Mesin	250.734.553,00	390.692.416,30
- Gedung dan Bangunan	335.221.624,00	325.344.774,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.500.677,00	2.500.677,00
- Aset Lainnya	-	-
Jumlah Beban Penyusutan	**588.456.854,00**	**718.537.867,30**
Beban Amortisasi		
- Aset Tidak Berwujud	1.250.000,00	1.500.000,00
Jumlah Beban Amortisasi	**1.250.000,00**	**1.500.000,00**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**589.706.854,00**	**720.037.867,30**

e. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.3 Kegiatan Non Operasional

Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp664.923,00 dan Rp195.872,00.

	2025	2024
a. Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-
b. (Kerugian) Penurunan Nilai Aset	-	-
c. Surplus/Defisit dari Keg. Non Op. Lainnya	664.923,00	195.872,00
d. Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	**664.923,00**	**195.872,00**

8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

8.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**2025**	**2024**
a. Arus Masuk Kas		
Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari:		
1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.387.155.448,00	3.147.535.380,00
2) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
3) Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	-
4) Pendapatan Hibah	-	-
5) Pendapatan Usaha Lainnya	9.076.072,20	8.989.351,11
6) Pendapatan APBN/APBD	573.602.126,00	1.218.688.659,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**3.969.833.646,20**	**4.375.213.390,11**
b. Arus Keluar Kas		
Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:		
1) Belanja Pegawai	1.748.470.248,00	1.514.363.852
2) Belanja Barang dan Jasa		
- Belanja Barang	988.221.624,00	1.043.003.842,55
- Belanja Jasa	799.644.990,00	1.022.556.332,00
- Belanja Pemeliharaan	109.460.200,00	80.826.800,00
- Belanja Perjalanan Dinas	-	26.479.041,00
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	19.980.000,00	19.758.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**3.665.777.062,00**	**3.706.987.867,55**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**304.056.584,20**	**668.225.522,56**

8.2	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	**2025**	**2024**
	a. Arus Masuk Kas		
	Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:		
	1) Penerimaan Penjualan atas Tanah	-	-
	2) Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
	3) Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
	4) Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
	5) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	-	-
	6) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	**-**	**-**
	b. Arus Keluar Kas		
	Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:		
	1) Perolehan Tanah	-	-
	2) Perolehan Peralatan dan Mesin	181.646.110,00	184.717.610,00
	3) Perolehan Gedung dan Bangunan	60.003.150,00	425.430.050
	4) Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
	5) Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
	6) Perolehan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	**241.649.260,00**	**610.147.660,00**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(241.649.260,00)**	**(610.147.660,00)**

8.3	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	**2025**	**2024**
	a. Arus Masuk Kas		
	Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:		
	1) Penerimaan Pinjaman	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	**-**	**-**
	b. Arus Keluar Kas		
	Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:		
	1) Setoran ke Kas Daerah (BLUD)	-	-
	2) Setoran ke Kas Daerah (BOK)	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	**-**	**-**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**-**	**-**

8.4	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	**2025**	**2024**
	a. Arus Masuk Kas		
	Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:		
	1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	62.356.227,00	216.787.153,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**62.356.227,00**	**216.787.153,00**
	b. Arus Keluar Kas		
	Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:		
	1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	62.348.442,00	216.787.153,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**62.348.442,00**	**216.787.153,00**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**7.785,00**	**-**

8.5	**Saldo Kas**	**2025**	**2024**
	1) Saldo Awal Kas	319.083.238,16	261.005.375,60
	2) Kenaikan/Penurunan kas	62.415.109,20	58.077.862,56
	3) Saldo Akhir Kas	**381.498.347,36**	**319.083.238,16**

9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

9.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.239.734.598,86 dan Rp5.774.791.913,21.

9.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.696.748.492,65 dan Rp1.066.754.480,38.

9.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp1.065.600.485,28 dan Rp531.697.166,03 dengan rincian sebagai berikut:

		2025	2024
1	Penghapusan BMD	-	-
2	Koreksi Ekuitas Mutasi Antar Perangkat Daerah Aset Tetap	10.384.614,00	12.800.000,00
3	Koreksi Ekuitas Mutasi Antar Perangkat Daerah Persediaan	1.098.449.061,28	876.002.592,03
4	Koreksi Saldo Awal Piutang	-	200.574,00
5	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	-	(360.056.000,00)
6	Koreksi saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	2.750.000,00
7	Koreksi Saldo Awal Hutang	(43.233.190,00)	-
Jumlah		**1.065.600.485,28**	**531.697.166,03**

9.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.608.586.591,49 dan Rp5.239.734.598,86.

10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan keuangan sama dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 25 Maret 2026.

Terdapat pencairan klaim BPJS atas Layanan Tahun 2025 yang diajukan, diverifikasi, dan pembayaran pada Tahun 2026. Adapun rincian klaim yang diverifikasi Tahun 2026 dan menjadi Piutang pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

No	Keterangan	No./Tgl. Pengajuan	Tgl. Verifikasi	Tgl. Pembayaran	Nilai Pembayaran
1	Susulan RJTP November 2025	Prd/11/12.1/2025, tgl. 29 Desember 2025	10 Januari 2026	19 Januari 2026	462.100
2	Susulan RITP November 2025	Prd/11/12.1/2025, tgl. 29 Desember 2025	10 Januari 2026	19 Januari 2026	397.100
3	RJTP Desember 2025	Prd/12/01/2026, tgl. 28 Januari 2026	10 Februari 2026	18 Februari 2026	10.742.100
4	RITP Desember 2025	Prd/12/01/2026, tgl. 28 Januari 2026	10 Februari 2026	18 Februari 2026	15.397.100
5	Promprev Desember 2025	Prd/12/01/2026, tgl. 28 Januari 2026	10 Februari 2026	18 Februari 2026	3.727.100
6	Susulan RJTP Desember 2025	Prd/12/02/2026, tgl. 27 Februari 2026	09 Maret 2026	16 Maret 2026	177.100
7	Susulan RITP Desember 2025	Prd/12/02/2026, tgl. 27 Februari 2026	09 Maret 2026	16 Maret 2026	2.997.100
	Jumlah				**33.899.700**

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Laporan No.: 00041/ML/KAP.IGOR/1/III/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Rendang
Kabupaten Karangasem

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Rendang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini Wajar yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00041/2.1516/AU.5/11/0463-3/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen UPTD Puskesmas Rendang bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi UPTD Puskesmas Rendang merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan UPTD Puskesmas Rendang terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami tidak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Rendang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Namun demikian, kami menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Rendang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok temuan:

1. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. UPTD Puskesmas Rendang belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pencatatan/penatausahaan dan pengendalian persediaan belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib.
4. Tanah lokasi Puskesmas UPTD Puskesmas Rendang tidak didukung dengan bukti penguasaan dan/atau hak pakai yang memadai.
5. Terdapat aset lainnya dengan nilai perolehan Rp845.273.503,00 yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan.
6. Dokumen RBA dan DPA UPTD Puskesmas Rendang Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Terdapat persediaan Obat dan BHP kedaluwarsa sebanyak 12 jenis senilai Rp2.421.040,00 belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan dari laporan keuangan.
8. Sistem Aplikasi E-Pusk belum digunakan secara optimal.
9. Penganggaran Belanja Pemeliharaan berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan anggaran Rp61.000.000,00 dan realisasi Rp60.003.150,00 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak tepat.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan,



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP. 0463

Badung, 25 Maret 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Rendang Tahun 2025 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tanggal 28 Desember 2022, UPTD Puskesmas Rendang ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

Sebagai BLUD UPTD Puskesmas Rendang diberikan fleksibilitas untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya guna membiayai kegiatan operasionalnya. Pemeriksaan terhadap dokumen Puskesmas, diketahui bahwa UPTD Puskesmas Rendang belum sepenuhnya memiliki ketentuan yang diwajibkan sebagai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Ket
1	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 4	Tidak Ada	
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 22	Tidak Ada	
3	Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin	Pasal 24 ayat (1)	Ada	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2023
4	Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 38	Ada	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2022
5	Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 41	Ada	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2022
6	Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 43	Ada	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2022

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Ket
7	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 64 ayat (3)	Tidak Ada	
8	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 73	Tidak Ada	
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 77 ayat (1)	Tidak Ada	
10	Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 83 ayat (6)	Ada	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11	Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 85 ayat (2)	Tidak Ada	
12	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 87 ayat (5)	Tidak Ada	
13	Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah	Pasal 91 ayat (6)	Tidak Ada	
14	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 94	Tidak Ada	
15	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 96	Tidak Ada	
16	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 99 ayat (5)	Tidak Ada	

Permasalahan tersebut belum sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa:

a. Pasal 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. Pasal 22, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Pembina dan Pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pasal 24 ayat (1), Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
d. Pasal 38, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
e. Pasal 41, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
f. Pasal 43, Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
g. Pasal 64 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
h. Pasal 73, Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
i. Pasal 77 ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
j. Pasal 83 ayat (6), Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k. Pasal 85 ayat (2), Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
l. Pasal 87 ayat (5), Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
m. Pasal 91 ayat (6), Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
n. Pasal 94, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
o. Pasal 96, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
p. Pasal 99 ayat (5), BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Kepala UPTD Puskesmas Rendang melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk melengkapi produk hukum dalam rangka pelaksanaan BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

2. UPTD Puskesmas Rendang belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu bentuk fleksibilitas yang dimiliki Badan Layanan Umum adalah pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan layanan. Hasil pemeriksaan pada UPTD Puskesmas Rendang diketahui belum memiliki Peraturan Pemimpin BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan:

a. Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada

Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU/BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU/BLUD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan UPTD Puskesmas Rendang sebagai BLUD belum sepenuhnya dapat menerapkan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan UPTD Puskesmas Rendang menyusun Peraturan Pemimpin BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum UPTD Puskesmas Rendang.

3. Pencatatan/penatausahaan dan pengendalian persediaan belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan persediaan di lingkungan UPTD Puskesmas Rendang ditemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persedian sebagai berikut:

a. Terdapat perbedaan jumlah persediaan menurut catatan dengan hasil stock opname di Gudang Obat dan Gudang Logistik UPTD Puskesmas Rendang

Berdasarkan pemeriksaan persediaan UPTD Puskesmas Rendang pada tanggal 23 Februari 2026 ditemukan terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan menurut catatan dengan hasil stock opname. Selisih tersebut terdiri dari selisih lebih sebanyak 110 dan selisih kurang sebanyak 256. Terhadap selisih tersebut tidak dapat dilakukan koreksi sehubungan keterbatasan data untuk trace back.

No	Nama Persediaan	Lokasi	Catatan	Fisik	Selisih	
					Lebih	Kurang
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7 (4-5)
1	Masker N 95	Gudang Obat	451	480	29	-
2	Buku Kwarto isi 100 lembar	Gudang Logistik	(2)	31	33	-
3	Kertas HVS Sidu 70 gsm A4	Gudang Logistik	(27)	48	75	-
4	Kertas HVS Sidu 70 gsm Folio	Gudang Logistik	39	41	2	-
5	Map Kertas Folio	Gudang Logistik	213	164	-	49
6	Bussines Map	Gudang Logistik	20	16	-	4
7	Spray Ruangan Otomatis	Gudang Logistik	7	4	-	3
8	Plastik Sampah Hitam Besar	Gudang Logistik	200	-	-	200
Jumlah			**901**	**304**	**110**	**256**

Berdasarkan keterangan dari pengurus barang, selisih pada gudang logistik disebabkan oleh kurangnya kontrol dalam pencatatan persediaan, dimana pada saat pengambilan persediaan, tidak dicatat dalam buku amprahan yang dijadikan dasar dalam membuat kartu stock. Hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara saldo pada laporan persediaan dengan kartu stock sehingga mengakibatkan saldo persediaan tidak menunjukkan kondisi yang

sebenarnya. Sedangkan selisih persediaan pada Gudang Obat disebabkan oleh pengurus barang yang tidak mengontrol persediaan tersebut karena merupakan persediaan covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Rendang untuk memerintahkan pengurus barang agar memperbaiki pencatatan persediaan, dan rutin melaksanakan pengecekan pada saat pengambilan persediaan, sehingga laporan persediaan dapat menunjukkan kondisi persediaan yang sebenarnya.

b. UPTD Puskesmas Rendang belum memiliki sistem akuntansi persediaan

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan persediaan di lingkungan UPTD Puskesmas Rendang ditemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan, yaitu tidak adanya sistem akuntansi persediaan dan pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan kartu stok. Pencatatan persediaan tidak menggunakan sistem sehingga menyulitkan bagian persediaan dalam melakukan mutasi dan *stock opname* persediaan.

Hal tersebut menyebabkan bagian persediaan tidak bisa membuat laporan persediaan terkait pemasukan, penggunaan persediaan, dan saldo akhir persediaan secara *real time*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Rendang meningkatkan atau melakukan pengadaan sistem informasi yang dimiliki puskesmas, secara berkala.

4. Tanah lokasi Puskesmas UPTD Puskesmas Rendang tidak didukung dengan bukti penguasaan dan/atau hak pakai yang memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepemilikan tanah lokasi UPTD Puskesmas Rendang diketahui bukti penguasaan dan/atau hak pakai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bukti Kepemilikan/Penguasaan
1	Puskesmas Rendang	Berita Acara Pinjam Pakai Tanah Puskesmas Rendang tanggal 2 Juni 2024
2	Pustu Pempatan	Berita Acara Pinjam Pakai Gedung Poskesdes No.028/23/Diskes/2020
3	Pustu Besakih	Status kepemilikan/penguasaan Pustu Besakih masih belum jelas dikarenakan belum ada Berita Acara Serah Terima dari UPTD Puskesmas Rendang ke Dinas Kesehatan Karangasem
4	Pustu Batusesa	Berita Acara Pinjam Pakai Tanah Pustu Batusesa tanggal 28 Mei 2015
5	Pustu Rendang	Berita Acara Pinjam Pakai Tanah Pustu Rendang tanggal 25 Mei 2015
6	Pustu Nongan	Berita Acara Pinjam Pakai Tanah Pustu Nongan tanggal 25 Mei 2015
7	Pustu Pesaban	Berita Acara Pinjam Pakai Tanah Pustu Pesaban tanggal 26 Mei 2015

Pada keterangan bukti kepemilikan/penguasaan tanah lokasi Puskesmas Pembantu diketahui bahwa terdapat kurangnya pada bukti Berita Acara Penyerahan status kepemilikan pada Puskesmas Pembantu Besakih.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Rendang membuat pernyataan pemberian hak pakai dari Desa lokasi Puskesmas Pembantu kepada UPTD Puskesmas Rendang.

5. Terdapat aset lainnya dengan nilai perolehan Rp845.273.503,00 yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Rendang per 31 Desember 2025 diketahui terdapat aset lainnya yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Bangunan Klinik/Puskesmas	8.000.000,00	8.000.000,00	-
2	Ultrasonic Sceaner	8.956.800,00	8.956.800,00	-
3	Alat Penyaring	957.000,00	957.000,00	-
4	Meja Kerja	1.442.833,00	1.442.833,00	-
5	Meja Kerja	1.269.500,00	1.269.500,00	-
6	Distiling Apparatus	6.799.500,00	6.799.500,00	-
7	Timer (Alat Laboratorium Hematologi)	788.872,00	788.872,00	-
8	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	1.325.000,00	1.325.000,00	-
9	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	1.210.000,00	1.210.000,00	-
10	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	500.000,00	500.000,00	-
11	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	3.360.000,00	3.360.000,00	-
12	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	2.596.800,00	2.596.800,00	-
13	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	948.250,00	948.250,00	-
14	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	5.389.000,00	5.389.000,00	-
15	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	2.445.100,00	2.445.100,00	-
16	alat kesehatan kebidanan dan penyakit	2.295.500,00	2.295.500,00	-
17	kandungan lainnya (dst)	-	-	-
18	alat kesehatan kebidanan dan penyakit	914.000,00	914.000,00	-
19	kandungan lainnya (dst)	-	-	-
20	Emergency Kit	4.890.160,00	4.890.160,00	-
21	Emergency Kit	2.351.910,00	2.351.910,00	-
22	Emergency Kit	1.100.000,00	1.100.000,00	-
23	Emergency Kit	2.796.250,00	2.796.250,00	-
24	Emergency Kit	2.894.350,00	2.894.350,00	-
25	Emergency Kit	1.871.500,00	1.871.500,00	-
26	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Gigi)	877.910,00	877.910,00	-

No	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
27	Tensimeter	2.911.370,00	2.911.370,00	-
28	Tensimeter	2.911.370,00	2.911.370,00	-
29	Tensimeter	921.600,00	921.600,00	-
30	Tensimeter	921.600,00	921.600,00	-
31	Tensimeter	921.600,00	921.600,00	-
32	Tensimeter	921.600,00	921.600,00	-
33	Tensimeter	921.600,00	921.600,00	-
34	Tensimeter	921.600,00	921.600,00	-
35	Tensimeter	2.245.500,00	2.245.500,00	-
36	Diagnostik Set	2.944.100,00	2.944.100,00	-
37	Diagnostik Set	1.470.000,00	1.470.000,00	-
38	Alat Kedokteran umum lainnya	11.729.630,00	11.729.630,00	-
39	Alat Kedokteran umum lainnya	34.514.150,00	34.514.150,00	-
40	Alat Kedokteran umum lainnya	988.175,00	988.175,00	-
41	Alat Kedokteran umum lainnya	3.250.000,00	3.250.000,00	-
42	Alat Kedokteran umum lainnya	369.649.500,00	369.649.500,00	-
43	Alat Kedokteran umum lainnya	244.200.000,00	244.200.000,00	-
44	Telephone (PABX)	4.928.000,00	2.956.800,00	1.971.200,00
45	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	1.490.000,00	1.490.000,00	-
46	Lainnya (Home Use)	-	-	-
47	Televisi	500.000,00	500.000,00	-
48	Televisi	2.360.000,00	2.360.000,00	-
49	Lemari Es	500.000,00	500.000,00	-
50	Lemari Es	3.000.000,00	3.000.000,00	-
51	Mesin Cuci	5.480.000,00	5.480.000,00	-
52	Kursi Kayu	542.500,00	542.500,00	-
53	Kursi Besi/Metal	2.334.860,00	2.334.860,00	-
54	White Board	1.440.000,00	1.440.000,00	-
55	Lemari Kaca	1.357.000,00	1.357.000,00	-
56	Lemari Kaca	3.892.150,00	3.892.150,00	-
57	alat timbangan/biara lainnya (dst)	4.840.200,00	4.840.200,00	-
58	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1.796.500,00	1.796.500,00	-
59	Jarum Kulit Satu Set	948.250,00	948.250,00	-
60	Station Wagon	30.000.000,00	30.000.000,00	-
61	Peralatan Personal Komputer lainnya	2.210.400,00	2.210.400,00	-
62	Note Book	14.120.013,00	14.120.013,00	-
63	PC Unit	7.960.000,00	7.960.000,00	-
64	Portable Generating Set	7.250.000,00	7.250.000,00	-
Jumlah		**845.273.503,00**	**843.302.303,00**	**1.971.200,00**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

1) Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa:
   a. Pasal 421 huruf a pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.

b. Pasal 422:
   (1) Ayat (1) pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
   (2) Ayat (3) pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
c. Pasal 423 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Pasal 424 ayat (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
e. Pasal 432:
   (1) ayat (1) barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: pemusnahan.
   (2) ayat (3) huruf d penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

2) PSAP 07 Paragraf 77 menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
3) PSAP 07 Paragraf 78 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Paragraf 31 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan Kepala UPTD Puskesmas Rendang membuat Surat Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah dan meminta pengelola barang untuk segera menindaklanjuti dengan membuat usulan Surat Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah agar segera diterbitkan keputusan penghapusan.

6. Dokumen RBA dan DPA UPTD Puskesmas Rendang Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Dokumen Anggaran UPTD Puskesmas Rendang Tahun 2025 diketahui bahwa RBA (Rencana Bisnis Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) hanya memuat hal-hal berikut:

a. RBA (Rencana Bisnis Anggaran)
   RBA UPTD Puskesmas Rendang hanya memuat rincian belanja berdasarkan sub kegiatan.
b. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
   DPA hanya memuat anggaran pendapatan Lain-Lain PAD yang sah – Pendapatan BLUD. DPA UPTD Puskesmas belum memuat anggaran pendapatan secara rinci untuk untuk seluruh sumber-sumber pendapatan, yaitu pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. Pasal 59 Ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Bab V tentang Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa:
   1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   3) Perkiraan harga;
   4) Besaran persentase ambang batas; dan
   5) Perkiraan maju atau *forward estimate.*
b. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
   1) Pasal 9
      a) RBA meliputi:
         (1) rencana bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan;
         (2) ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
         (3) rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
         (4) perkiraan harga;
         (5) besaran Persentase Ambang Batas; dan
         (6) perkiraan maju atau *forward estimate*.
      b) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
      c) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.
   2) Pasal 10
      a) Rencana Bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat antara lain kondisi kerja, asumsi makro dan mikro serta target kinerja.
      b) Ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
      c) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
      d) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
      e) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
      f) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
   3) Pasal 19
      a) DPA paling sedikit mencakup:
         (1) pendapatan dan Belanja;
         (2) proyeksi arus kas; dan
         (3) jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

b) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
c) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

4) Pasal 20
a) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
b) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan/jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan dokumen anggaran UPTD Puskesmas Rendang belum sepenuhnya dapat diandalkan sebagai acuan pelaksanaan dan penilaian kinerja BLUD.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan Kepala UPTD Puskesmas Rendang untuk menyusun dokumen anggaran sesuai Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Terdapat persediaan Obat dan BHP kedaluwarsa sebanyak 12 jenis senilai Rp2.421.040,00 belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan dari laporan keuangan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap persediaan, diketahui terdapat persediaan kedaluwarsa berupa persediaan obat dan BHP sebanyak 12 jenis senilai Rp2.421.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Obat	Satuan	Tanggal Expired	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	Allopurinol	Tablet	Januari 2025	300	170	51.000,00
2	Metformin	Tablet	Januari 2025	1000	190	190.000,00
3	Sikzonat Injeksi	Ampul	Januari 2025	5	64.380	321.900,00
4	Fenitoin	Capsul	Maret 2025	1300	179	232.700,00
5	Alprazolam	Tablet	Maret 2025	80	644	51.520,00
6	Cotrimoksazol	Tablet	Mei 2025	420	240	100.800,00
7	Nistatin Supp	Tablet	Mei 2025	20	550	11.000,00
8	Eritromisin Syrup	Botol	Juli 2025	35	20.202	707.070,00
9	Fenobarbital 30 Mg	Tablet	Agustus 2025	1200	291	349.200,00
10	Calcium Glukonat Injeksi	Ampul	September 2025	1	10.750	10.750,00
11	Amitiptilin	Tablet	Oktober 2025	100	495	49.500,00
12	TPT (Tablet TBC)	Tablet	Desember 2025	120	2.880	345.600,00
Total				**4.581,00**		**2.421.040,00**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 421 dan Pasal 432 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:

a. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan, atau sebab lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Rendang melakukan pemusnahan dan penghapusan terhadap persediaan kedaluwarsa untuk kemudian berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut maka akan dilakukan pengusulan penghapusan persediaan yang telah kedaluwarsa dari Laporan Keuangan.

8. Sistem Aplikasi E-Pusk Belum Digunakan Secara Optimal

Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 23 Februari 2026 ditemukan bahwa sistem e-pusk belum digunakan secara optimal. Sistem epusk sudah bisa menerbitkan nota pembayaran sesuai dengan Perda Tarif Retribusi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun dalam pelaksanaannya unit layanan masih menggunakan nota karcis manual sebagai bukti transaksi kepada pasien.

Permasalahan ini disebabkan karena petugas Kasir dan Register Kasir belum melakukan proses verifikasi terhadap transaksi yang masuk, baik dari unit Pustu (Puskesmas Pembantu) maupun pusat (Puskesmas Induk). Hal ini mengakibatkan data pendapatan harian tidak terposting ke dalam database sistem. Selain itu sistem ini belum didukung oleh perangkat keras berupa Printer Kasir (Thermal Printer) di titik layanan, sehingga petugas kesulitan untuk mencetak struk pembayaran langsung dari sistem.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Rendang untuk segera melakukan pengadaan Printer Kasir untuk mendukung operasional loket pembayaran serta Melakukan evaluasi berkala terhadap sinkronisasi data antara kunjungan pasien dengan realisasi pendapatan pada sistem e-Pusk.

9. Penganggaran Belanja Pemeliharaan berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan anggaran Rp61.000.000,00 dan realisasi Rp60.003.150,00 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak tepat

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen anggaran dan laporan realisasi anggaran UPTD Puskesmas Rendang Tahun 2025 diketahui terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dianggarkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025	
		Anggaran	Realisasi
1	Jasa Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Puskesmas	1.830.000,00	1.600.000,00
2	Jasa Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Puskesmas	2.440.000,00	2.403.150,00
3	Pemeliharaan bangunan Puskesmas	56.730.000,00	56.000.000,00
	Jumlah	**61.000.000,00**	**60.003.150,00**

Hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran dan realisasi belanja pada BLUD Puskesmas menunjukkan bahwa terdapat kegiatan yang bersifat pemeliharaan gedung dan bangunan, yaitu tidak menambah masa manfaat maupun kapasitas aset, namun dianggarkan dan direalisasikan pada akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelaahan atas dokumen kontrak, RAB, dan SPJ, pekerjaan tersebut berupa perbaikan ringan/sedang, pengecatan, serta penggantian komponen bangunan yang tidak meningkatkan nilai ekonomis aset secara signifikan. Pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat maupun tidak memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja, sehingga seharusnya diklasifikasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa berupa belanja pemeliharaan.

Terhadap kesalahan penganggaran tersebut, dalam neraca sudah dilakukan koreksi dengan tidak mengakui sebagai tambahan aset tetap.

Permasalahan ini tidak sesuai dengan:

a. PSAP 07 Paragraf 16 menyatakan bahwa Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
   1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
b. PSAP 07 Paragraf 33 menyatakan bahwa Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
c. PSAP 07 Paragraf 33 menyatakan bahwa Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
d. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Bab VIII: Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap menyatakan bahwa Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (*expense / revenue expenditure*).

Pemasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan dalam LRA tidak menggambarkan tambahan nilai aset tetap yang sesungguhnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Puskesmas selaku pimpinan BLUD memerintahkan kepada Pejabat Keuangan agar dimasa mendatang memperhatikan ketentuan penganggaran dalam LRA.